SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang :

a. bahwa perencanaan pembangunan dibutuhkan untuk memastikan pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik guna mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa dalam rangka menjamin pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik perlu adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dalam suatu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan di Daerah, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6867);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1) RKPD tahun 2027 merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2025-2029.
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Januari 2027 sampai dengan Desember 2027.

Pasal 3

RKPD tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam:
a. penyusunan rencana APBD tahun anggaran 2027;
b. penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2027; dan
c. pembahasan KUA dan PPAS tahun anggaran 2027 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

RKPD tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. bab I berisi pendahuluan;
b. bab II berisi gambaran umum kondisi Daerah;
c. bab III berisi kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;

d. bab IV berisi sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
e. bab V berisi rencana kerja dan pendanaan Daerah;
f. bab VI berisi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
g. bab VII berisi penutup.

Pasal 5

Ketentuan mengenai RKPD tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 26 Juni 2026

Plt. BUPATI PEKALONGAN,

TTD

SUKIRMAN

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 26 Juni 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD
M. YULIAN AKBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2026 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

KISTORO, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 19750503 201001 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **vi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang I-1
B. Dasar Hukum I-3
C. Hubungan Antar Dokumen I-8
D. Maksud dan Tujuan I-9
E. Sistematika Dokumen RKPD I-9

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-1
A. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
1. Aspek Geografi dan Demografi II-1
a. Posisi dan Peran Strategis Daerah
1). Luas dan Batas Wilayah Administrasi II-1
2). Letak dan Kondisi Geografis II-2
3). Topografi II-3
4). Geologi II-4
5). Hidrologi II-7
6). Klimatologi II-13
7). Penggunaan lahan II-14
b. Potensi Sumber Daya Alam II-16
1). Rencana Pola Ruang II-17
2). Rencana Struktur Ruang Wilayah II-29
c. Daya Dukung dan **Daya Tampung Lingkungan Hidup** II-39
1). Daya Dukung Lahan Bangunan II-41
2). Daya Dukung Fungsi Lindung II-42
3). Daya Dukung Air II-43
4). Daya Dukung Pangan II-45
5). Daya Tampung Lingkungan Hidup II-49
d. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan II-51
1). Indeks Ketahanan Pangan (IKP) II-51
2). Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan *(Prevalence of Undernourishment)* II-52
3). Konsumsi Listrik Per Kapita II-52
4). Persentase akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan II-53
e. Lingkungan Hidup Berkualitas II-53
1). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) II-53
2). Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman II-54
3). Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah II-55
f. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim II-57
1). Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif II-57
2). Indeks Risiko Bencana (IRB) II-59
3). Indeks Ketahanan Daerah (IKD) II-60
g. Demografi II-61
1). Jumlah Penduduk II-61
2). Kepadatan Penduduk II-62
3). Proyeksi dan Analisis Penduduk 2025-2030 ..... II-63

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-64
a. Aspek Kesejahteraan Ekonomi II-64
1). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) II-64
2). Pertumbuhan Ekonomi II-67
3). Pengeluaran Per kapita disesuaikan II-68
4). Kemiskinan II-70
5). Kemiskinan Ekstrem II-76
6). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) II-77
7). Rasio Gini II-78
8). Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia II-79
9). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) II-80
b. Kesehatan untuk Semua II-83
1). Umur Harapan Hidup (UHH) II-83
2). Indeks Keluarga Sehat II-84
3). Angka Kematian Ibu (AKI) II-85
4). Angka Kematian Bayi (AKB) II-87
5). Kondisi Gizi II-87
6) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita II-88
c. Pendidikan Berkualitas yang Merata II-90
1). Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun II-90
2). Harapan Lama Sekolah II-92
3). Angka Partisipasi Sekolah 5 - 6 tahun II-93
4). Angka Partisipasi Sekolah (APS) II-94
5). Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi II-95
6). Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang) II-96
d. Perlindungan Sosial yang Adaptif II-96
1). Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional II-97
2). Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan II-97
e. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju II-98
1). Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan II-98
2). Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir II-99
f. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif II-99
1). Indeks Pembangunan Gender (IPG) II-99
2). Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) II-102
3). Indeks Ketimpangan Gender (IKG) II-104
4). Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) II-106
3. Aspek Daya Saing Daerah II-107
a. Daya Saing Sumber Daya Manusia II-107
1). Angka Beban Ketergantungan *(Dependency Ratio)* II-107
b. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi II-109
1). Kapabilitas Inovasi II-109
2). PDRB Per Kapita II-110
3). Rasio PDRB Industri Pengolahan II-111
4). Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum II-111
5). Rasio Kewirausahaan Daerah II-112
6). Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB II-112
7). Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja II-113

8) . Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) II-114
c. Penerapan Ekonomi Hijau II-117
d. Transformasi Digital II-118
1). Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet II-118
e. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global II-118
1). Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) II-118
2). Ekspor Barang dan Jasa II-119
f. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi II-119
1). Persentase Desa Mandiri II-119
2). Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak II-121
3). Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota II-122
4). Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota II-123
5). Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota II-124
g. Stabilitas Ekonomi Makro II-125
1). *Return on Asset (ROA)* BUMD II-125
2). Disparitas Harga II-126
3). Tingkat Inflasi II-127
4). Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB II-127
5). Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB II-128
6). Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB II-130
4. Aspek Pelayanan Umum II-132
a. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif II-132
1). Indeks Reformasi Birokrasi II-132
2) Indeks Reformasi Hukum II-132
3). Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) II-133
4). Indeks Pelayanan Publik (IPP) II-134
5). Indeks Integritas Nasional II-135
b. Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah II-135
1). Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar II-135
a). Pendidikan II-135
b). Kesehatan II-139
c). Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-145
d). Perumahan dan Kawasan Permukiman II-150
e). Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat II-152
f). Sosial II-155
2). Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II-157
a). Tenaga Kerja II-157
b). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak II-159
c). Pangan II-160
d). Pertanahan II-162
e). Lingkungan Hidup II-162
f). Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil II-163
g). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa II-164
h). Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana II-166
i). Perhubungan II-167
j). Komunikasi dan Informatika II-168
k). Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah II-168
l). Penanaman Modal II-169
m). Kepemudaan dan Olahraga II-170

n). Statistik II-171
o). Persandian II-173
p). Kebudayaan II-174
q). Perpustakaan II-176
r). Kearsipan II-177
3). Urusan Pilihan II-178
a). Kelautan dan Perikanan II-178
b). Pariwisata II-180
c). Pertanian II-181
d). Perdagangan II-183
e). Perindustrian II-184
f). Transmigrasi II-186
4). Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan II-187
a). Perencanaan II-187
b). Keuangan II-187
c). Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan II-188
d). Penelitian dan Pengembangan II-190
e). Sekretariat Daerah II-191
f). Sekretariat DPRD II-192
5). Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan II-192
a). Inspektorat II-192
6). Urusan Kewilayahan II-194
a). Kecamatan II-194
7). Urusan Pemerintahan Umum II-194
a). Kesatuan Bangsa dan Politik II-194
B. Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2025 ..... II-196
1. Evaluasi Capaian Terhadap Target Indikator Kinerja II-196
2. Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan II-197
3. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) II-199
4. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025 ..... II-201
C. Permasalahan Pembangunan II-297
1. Permasalahan Pembangunan Daerah II-297
2. Isu Strategis Daerah II-306

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
1. Kondisi Perekonomian Global dan Nasional III-1
2. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional Tahun 2027 ..... III-3
3. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 ..... III-3
4. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Pekalongan Tahun 2027 ..... III-5
a. Pertumbuhan Ekonomi III-6
b. PDRB Per kapita III-6
c. Tingkat Inflasi III-7
d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) III-7
e. Tingkat Kemiskinan III-8
f. Rasio Gini III-8
B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-9
1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-10
2. Arah Kebijakan Belanja Daerah III-15
3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-19

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027

A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1
1. Visi IV-1
2. Misi IV-5
B. Prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2027 ..... IV-23
1. Prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 ..... IV-23
2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 ..... IV-24
3. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2027 ..... IV-29
4. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2027 ..... IV-32
5. Keselarasan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah Tahun 2027 ..... IV-33
6. Inovasi Daerah dalam Pencapaian Target dan Sasaran Tahun 2027 ..... IV-42
C. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kewilayahan IV-44
1. Kebijakan Pembangunan Berbasis Wilayah Pengembangan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah IV-44
2. Arah Kebijakan Kewilayahan berdasarkan RTRW Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040 ..... IV-47

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

A. Kerangka Pendanaan Pembangunan Tahun 2027 ..... V-1
B. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2027 ..... V-4

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Pembagian Administrasi di Wilayah Kabupaten Pekalongan	II-1
Tabel 2.2.	Ketinggian Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Pekalongan	II-3
Tabel 2.3.	Sebaran Jenis Tanah Kabupaten Pekalongan	II-6
Tabel 2.4.	Sungai dan Anak Sungai di Kabupaten Pekalongan	II-7
Tabel 2.5.	Daerah Irigasi di Kabupaten Pekalongan	II-10
Tabel 2.6.	Nama Lumbung/ Embung Di Kabupaten Pekalongan	II-10
Tabel 2.7.	Data Kondisi Sumber Mata Air Kabupaten Pekalongan	II-11
Tabel 2.8.	Banyak Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2025	II-14
Tabel 2.9.	Penggunaan Lahan Kabupaten Pekalongan Tahun 2024	II-14
Tabel 2.10.	Klasifikasi Kelas Kemampuan Lahan	II-39
Tabel 2.11.	Kemampuan Lahan Kabupaten Pekalongan	II-40
Tabel 2.12.	Daya Dukung Lahan Bangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2045	II-42
Tabel 2.13.	Daya Dukung Fungsi Lindung Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2045	II-43
Tabel 2.14.	Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kabupaten Pekalongan Tahun 2024	II-44
Tabel 2.15.	Proyeksi Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kabupaten Pekalongan Tahun 2045	II-44
Tabel 2.16.	Daya Dukung Pangan Beras (DDPB) Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2045	II-45
Tabel 2.17.	Persentase Wilayah Terlampaui DDPB Kabupaten Pekalongan	II-47
Tabel 2.18.	Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2024	II-48
Tabel 2.19.	Proyeksi Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2045	II-48
Tabel 2.20.	Indeks Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemanfaatan dan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025	II-51
Tabel 2.21.	Konsumsi Listrik Per kapita Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025.	II-53
Tabel 2.22.	Kondisi Akses dan Pengelolaan Layanan Air Minum Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025	II-53
Tabel 2.23.	Jumlah Timbulan Sampah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 - 2025	II-55
Tabel 2.24.	Persentase Pengelolaan Sampah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 - 2025	II-56
Tabel 2.25.	Sampah Yang Masuk TPA Bojonglarang Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 - 2025	II-56
Tabel 2.26.	Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 - 2025	II-57
Tabel 2.27.	Upaya Pembangunan Rendah Karbon di Kabupaten Pekalongan Tahun 2021	II-58
Tabel 2.28.	Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-60
Tabel 2.29.	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025	II-62
Tabel 2.30.	Kepadatan Penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025	II-62
Tabel 2.31.	Proyeksi Penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2030	II-63

Tabel 2.32. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-65
Tabel 2.33. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 . II-65
Tabel 2.34. Perkembangan Kontribusi Sektor dan PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-66
Tabel 2.35. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 - 2025..... II-67
Tabel 2.36. Kemiskinan Ekstrem Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 - 2025 ..... II-76
Tabel 2.37. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 - 2025..... II-78
Tabel 2.38. Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-80
Tabel 2.39. Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 II-83
Tabel 2.40. Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 ..... II-85
Tabel 2.41. Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025 ..... II-85
Tabel 2.42. Jumlah Kasus Kematian Ibu (AKI) Menurut Wilayah di Kabupaten Pekalongan tahun 2025 ..... II-86
Tabel 2.43. Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025 ..... II-87
Tabel 2.44. Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025..... II-88
Tabel 2.45. Prevalensi Stunting Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025..... II-89
Tabel 2.46. Jumlah PAUD bentuk pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Kabupaten Pekalongan Tahun 2024-2025 ..... II-93
Tabel 2.47. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025.. II-94
Tabel 2.48. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025.. II-95
Tabel 2.49. Indeks Literasi Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025..... II-96
Tabel 2.50. Indeks Numerasi Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025..... II-96
Tabel 2.51. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Pekalongan Tahun 2023-2024 ..... II-97
Tabel 2.52. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-98
Tabel 2.53. Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2024-2025 II-98
Tabel 2.54. Komponen Pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024..... II-102
Tabel 2.55. Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025..... II-105
Tabel 2.56. Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025..... II-105

Tabel 2.57. Perkembangan Indikator Dimensi Pemberdayaan Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 202012025 ..... II-106
Tabel 2.58. Angka Beban Ketergantungan *(Dependency Ratio)* Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-107
Tabel 2.59. Jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2025 ..... II-108
Tabel 2.60. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-113
Tabel 2.61. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Kabupaten Pekalongan Agustus 2023–Agustus 2025 ..... II-113
Tabel 2.62. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-119
Tabel 2.63. Persentase Desa Mandiri Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-120
Tabel 2.64. Jumlah Desa Mandiri Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 ..... II-120
Tabel 2.65. Kondisi Jalan Mantap Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-122
Tabel 2.66. *Return on Asset (ROA)* BUMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-125
Tabel 2.67. Disparitas Harga Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-126
Tabel 2.68. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-128
Tabel 2.69. Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-129
Tabel 2.70. Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-130
Tabel 2.71. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-132
Tabel 2.72. Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-133
Tabel 2.73. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-133
Tabel 2.74. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-134
Tabel 2.75. APK Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025 ..... II-136
Tabel 2.76. APM Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025 ..... II-137
Tabel 2.77. Target dan Capaian Jumlah ATS yang dikembalikan ke Sekolah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-138
Tabel 2.78. Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-139
Tabel 2.79. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-140
Tabel 2.80. *Incidence Rate (IR)* DBD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-142
Tabel 2.81. Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-143
Tabel 2.82. Rasio Dokter per satuan penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-143
Tabel 2.83. Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-144
Tabel 2.84. Rasio Puskesmas, Pustu dan Poliklinik Kesehatan Desa Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-144
Tabel 2.85. Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-145

Tabel 2.86. Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-146
Tabel 2.87. Kondisi Jalan berdasarkan Jenis Permukaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-147
Tabel 2.88. Jenis Jembatan berdasarkan Konstruksinya Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-147
Tabel 2.89. Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-148
Tabel 2.90. Kondisi Drainase Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-148
Tabel 2.91. Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-149
Tabel 2.92. Capaian Kinerja Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-149
Tabel 2.93. Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-150
Tabel 2.94. Rekapitulasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-151
Tabel 2.95. Capaian Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-151
Tabel 2.96. Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-152
Tabel 2.97. Penyelesaian Pelanggaran Perda Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-152
Tabel 2.98. Rasio Jumlah Satpol PP per 10.000 Penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-153
Tabel 2.99. Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-153
Tabel 2.100. Rasio Jumlah Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-154
Tabel 2.101. Jumlah Kejadian Konflik SARA Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-154
Tabel 2.102 Kinerja Sub-Urusan Kebakaran Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-154
Tabel 2.103. Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-155
Tabel 2.104. Perkembangan Pelayanan Urusan Sosial Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-156
Tabel 2.105. Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosial Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-157
Tabel 2.106. Perkembangan Pelayanan Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-158
Tabel 2.107. Perkembangan Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-160
Tabel 2.108. Capaian Pelayanan Urusan Pangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-161
Tabel 2.109. Jumlah Lumbung Pangan di Kabupaten Pekalongan dan Tahun Pendiriannya II-161
Tabel 2.110. Capaian Pelayanan Urusan Pertanahan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-162
Tabel 2.111. Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-163

Tabel 2.112. Perkembangan Pelayanan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-164
Tabel 2.113. Peringkat Indeks Desa Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025..... II-165
Tabel 2.114. Indeks Desa Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-165
Tabel 2.115. Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025..... II-166
Tabel 2.116. Perkembangan Pelayanan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025..... II-167
Tabel 2.117. Perkembangan Pelayanan Perhubungan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025..... II-167
Tabel 2.118. Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-168
Tabel 2.119. Capaian Kinerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-169
Tabel 2.120. Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025..... II-170
Tabel 2.121. Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-171
Tabel 2.122. Predikat Indeks Satu Data Indonesia II-172
Tabel 2.123. Nilai Indeks Domain dan Indeks SDI Kabupaten Pekalongan Tahun 2023-2024..... II-172
Tabel 2.124. Nilai Indeks Aspek Kabupaten Pekalongan Tahun 2023-2024 ..... II-173
Tabel 2.125. Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025..... II-174
Tabel 2.126 Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-175
Tabel 2.127. Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025..... II-176
Tabel 2.128. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang Memiliki Sertifikat Di Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-177
Tabel 2.129. Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025..... II-178
Tabel 2.130. Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-178
Tabel 2.131. Perkembangan Perikanan Budidaya Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025..... II-179
Tabel 2.132. Perkembangan Perikanan Tangkap Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025..... II-180
Tabel 2.133. Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025..... II-181
Tabel 2.134. Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025..... II-182
Tabel 2.135. Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025..... II-183
Tabel 2.136. Indikator Capaian Pelayanan Urusan Perindustrian Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-185
Tabel 2.137. Jumlah Perusahaan/Unit Usaha Menurut Kelompok Industri Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-185
Tabel 2.138. Jumlah Tenaga Kerja Menurut Kelompok Industri Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-186
Tabel 2.139. Indikator Capaian Pelayanan Urusan Transmigrasi Kabupaten

Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-187
Tabel 2.140. Capaian Kinerja Fungsi Keuangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-188
Tabel 2.141. Nominatif Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kab. Pekalongan Berdasarkan Golongan Per 31 Desember 2025 ..... II-188
Tabel 2.142. Nominatif Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pekalongan Berdasarkan Pendidikan per 31 Desember 2025 ..... II-189
Tabel 2.143. Capaian Kinerja Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-190
Tabel 2.144. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-191
Tabel 2.145. Capaian Kinerja Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-191
Tabel 2.146. Capaian Kinerja Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-192
Tabel 2.147. Capaian Kinerja Fungsi Pengawasan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-193
Tabel 2.148. Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah II-196
Tabel 2.149. Skala Nilai Peringkat Kinerja Sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017 ..... II-197
Tabel 2.150. Realisasi Capaian Fisik dan Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 ..... II-198
Tabel 2.151. Kriteria Penilaian/Status Capaian Indikator Kinerja Program per Urusan Tahun 2025 ..... II-199
Tabel 2.152. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 ..... II-200
Tabel 2.153. Evaluasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 ..... II-201
Tabel 2.154. Evaluasi Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 ..... II-225
Tabel 2.155. Evaluasi Program Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 ..... II-236
Tabel 2.156. Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Program Triwulan IV Tahun 2025 ..... II-296
Tabel 2.157. Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2030 ..... II-306
Tabel 2.158. Analisis Isu Strategis Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 ..... II-307
Tabel 3.1. Proyeksi Indikator Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 ..... III-4
Tabel 3.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pekalongan Tahun 2023-2025 dan Proyeksi 2026-2027 ..... III-6
Tabel 3.3. PDRB Per kapita Kabupaten Pekalongan Tahun 2023-2025 dan Proyeksi 2026-2027 ..... III-7
Tabel 3.4. Tingkat Inflasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2023-2025 dan Proyeksi 2026-2027 ..... III-7
Tabel 3.5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan Tahun 2023-2025 dan Proyeksi 2026-2027 ..... III-7
Tabel 3.6. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pekalongan Tahun 2023-2025 dan Proyeksi 2026-2027 ..... III-8
Tabel 3.7. Rasio Gini Kabupaten Pekalongan Tahun 2023-2025 dan Proyeksi 2026-2027 ..... III-8
Tabel 3.8. Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... III-12

Tabel 3.9. Realisasi dan Proyeksi Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024-2028 ..... III-14
Tabel 3.10. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... III-15
Tabel 3.11. Realisasi dan Proyeksi Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024-2028 ..... III-18
Tabel 3.12. Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... III-19
Tabel 3.13. Realisasi dan Proyeksi Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024-2028 ..... III-21
Tabel 3.14. Proyeksi Struktur Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2027 ..... III-22
Tabel 4.1. Sasaran RPJMD Kabupaten Pekalongan 2025-2029 ..... IV-14
Tabel 4.2. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 ..... IV-15
Tabel 4.3. Target Indikator Makro Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2027 sebagai hasil Rokortekrenbang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 ..... IV-34
Tabel 4.4. Dukungan 35 Program Daerah Provinsi Jawa Tengah yang didelegasikan di Kabupaten Pekalongan IV-35
Tabel 4.5. Sasaran Kinerja IPM, Pertumbuhan Ekonomi, TPT, dan Tingkat Kemiskinan WP Petanglong Tahun 2027 ..... IV-47
Tabel 5.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2027 ..... V-1
Tabel 5.2. Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2027 ..... V-3
Tabel 6.1. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2030 ..... VI-2
Tabel 6.2. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2030 ..... VI-4
Tabel 6.3. Indikator Kinerja Dan Pagu Anggaran Program, Kegiatan dan Sub VI-18
Tabel 6.4. Pokok-pokok Pikiran DPRD VI-405

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Rencana Jadwal Penyusunan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2027	I-2
Gambar 1.2.	Alur Proses Penyusunan Substansi Perencanaan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2027	I-3
Gambar 1.3.	Hubungan Antar Dokumen	I-8
Gambar 2.1.	Peta Kabupaten Pekalongan terhadap Provinsi Jawa Tengah	II-1
Gambar 2.2.	Peta Administrasi Kabupaten Pekalongan	II-3
Gambar 2.3.	Peta Topografi Kabupaten Pekalongan	II-4
Gambar 2.4.	Peta Struktur Geologi Kabupaten Pekalongan	II-6
Gambar 2.5.	Peta Jenis Tanah Kabupaten Pekalongan	II-7
Gambar 2.6.	Peta Hidrologi Kabupaten Pekalongan	II-13
Gambar 2.7.	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Pekalongan	II-15
Gambar 2.8.	Arah Pengembangan WP Petanglong	II-17
Gambar 2.9.	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pekalongan	II-18
Gambar 2.10.	Peta Kesesuaian Lahan Kabupaten Pekalongan	II-20
Gambar 2.11.	Peta Rawan Bencana Kabupaten Pekalongan	II-21
Gambar 2.12.	Peta Kawasan Pertanian Kabupaten Pekalongan	II-24
Gambar 2.13.	Peta Wilayah Pertambangan Kabupaten Pekalongan	II-26
Gambar 2.14.	Peta Rencana Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Pekalongan	II-27
Gambar 2.15.	Peta Lokasi Pariwisata Kabupaten Pekalongan	II-28
Gambar 2.16.	Peta Lokasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan Kabupaten Pekalongan	II-29
Gambar 2.17.	Grafik Kemampuan Lahan Kabupaten Pekalongan	II-40
Gambar 2.18.	Grafik Perkembangan Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025	II-49
Gambar 2.19.	Grafik Perkembangan Nilai Indikator Kinerja Utana (IKU) Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025	II-50
Gambar 2.20.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan *(Prevalence of Undernourishment)* Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025	II-52
Gambar 2.21.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025	II-54
Gambar 2.22.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025	II-55
Gambar 2.23.	Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif di Kabupaten Pekalongan Tahun 2025	II-59
Gambar 2.24.	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Pekalongan Tahun 2021 - 2025	II-61
Gambar 2.25.	Piramida Penduduk Kabupaten Pekalongan, 2025 dan 2030	II-64
Gambar 2.26.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025	II-68
Gambar 2.27.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2021-2025	II-68
Gambar 2.28.	Pengeluaran per kapita Disesuaikan Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025	II-69
Gambar 2.29.	Pengeluaran per kapita Disesuaikan Kabupaten Pekalongan Dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar 2021-2025	II-69

Gambar 2.30. Garis Kemiskinan Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025 ..... II-70
Gambar 2.31. Garis Kemiskinan Kabupaten Pekalongan, dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2021-2025 ..... II-71
Gambar 2.32. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025 ..... II-71
Gambar 2.33. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar 2021-2025 ..... II-72
Gambar 2.34. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025..... II-73
Gambar 2.35. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2021-2025 ..... II-73
Gambar 2.36. Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional (Maret 2025) II-74
Gambar 2.37. Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025..... II-74
Gambar 2.38. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pekalongan, dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2021-2025 ..... II-75
Gambar 2.39. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2021-2025 ..... II-75
Gambar 2.40. Peta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 ..... II-77
Gambar 2.41. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan, dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025..... II-77
Gambar 2.42. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2021-2025 . II-78
Gambar 2.43. Rasio Gini Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025 ..... II-79
Gambar 2.44. Sumber Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) II-80
Gambar 2.45. IPM Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia Tahun 2025..... II-81
Gambar 2.46. Rata-rata Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 ..... II-81
Gambar 2.47. IPM Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025 ..... II-82
Gambar 2.48. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2021-2025.. II-82
Gambar 2.49. Umur Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025 ..... II-83
Gambar 2.50. Umur Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2021-2025 ... II-84
Gambar 2.51. Jumlah Kasus Kematian Ibu Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2025 ..... II-85
Gambar 2.52. Jumlah Kasus Kematian Bayi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 ..... II-87
Gambar 2.53. Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2025 ..... II-88
Gambar 2.54. Jumlah Kasus Stunting Balita s.d. 59 Bulan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Bulan Desember 2025 ..... II-89
Gambar 2.55. Prevalensi Stunting Balita s.d 59 Bulan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Bulan Desember 2025 ..... II-89

Gambar 2.56. Prevalensi Stunting Kabupaten Pekalongan 2021-2025 ..... II-90
Gambar 2.57. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025 ..... II-91
Gambar 2.58. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2021-2025..... II-91
Gambar 2.59. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025 ..... II-92
Gambar 2.60. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2021-2025..... II-92
Gambar 2.61. Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD usia 5-6 tahun Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025..... II-94
Gambar 2.62. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025 ..... II-99
Gambar 2.63. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2021-2025 ..... II-100
Gambar 2.64. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut jenis kelamin Kabupaten Pekalongan 2021-2025..... II-100
Gambar 2.65. Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut jenis kelamin Kabupaten Pekalongan 2021-2025..... II-101
Gambar 2.66. Umur Harapan Hidup (UHH) menurut jenis kelamin Kabupaten Pekalongan 2021-2025..... II-101
Gambar 2.67. Pengeluaran Per kapita yang Disesuaikan Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Pekalongan 2021-2025..... II-102
Gambar 2.68. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 ..... II-103
Gambar 2.69. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020-2024 ..... II-103
Gambar 2.70. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025 ..... II-104
Gambar 2.71. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2021-2025 ..... II-107
Gambar 2.72. Dependency Ratio Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025..... II-108
Gambar 2.73. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2022-2025 ..... II-109
Gambar 2.74. PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-110
Gambar 2.75. PDRB Per Kapita Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2025..... II-110
Gambar 2.76. Rasio PDRB Industri Pengolahan ADHB dan ADHK Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025..... II-111
Gambar 2.77. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum ADHB dan ADHK Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025..... II-112
Gambar 2.78. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025..... II-114
Gambar 2.79. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Agustus 2022 – Agustus 2025 (ribu orang) II-115
Gambar 2.80. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin, Agustus 2025 (persen) II-116
Gambar 2.81. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan Agustus 2022 – Agustus 2025 (ribu orang)..... II-116

Gambar 2.82. Banyaknya Infrastruktur Energi Baru Terbarukan Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 ..... II-117
Gambar 2.83. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-118
Gambar 2.84. Nilai Ekspor Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-119
Gambar 2.85. Persentase Desa Mandiri Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-120
Gambar 2.86. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-122
Gambar 2.87. Jaringan Jalan Tol Trans Jawa yang Melewati Wilayah Kabupaten Pekalongan II-123
Gambar 2.88. Exit Tol Bojong Kabupaten Pekalongan Pekalongan II-123
Gambar 2.89. *Return on Asset* (ROA) BUMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-125
Gambar 2.90. Tingkat Inflasi Kabupaten Pekalongan,Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025 ..... II-127
Gambar 2.91. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-128
Gambar 2.92. Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-129
Gambar 2.93. Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-130
Gambar 2.94. Indeks SPBE Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-134
Gambar 2.95. Indeks Integritas Nasional Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-135
Gambar 2.96. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 ..... II-140
Gambar 2.97. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-141
Gambar 2.98. Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Succes Rate/SR) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2025 di Provinsi Jateng II-141
Gambar 2.99. Incidence Rate (IR) DBD Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Th. 2025 ..... II-142
Gambar 2.100. *Case Fatality Rate Demam Berdarah Dengue* (CFR DBD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-142
Gambar 2.101. *Case Fatality Rate Demam Berdarah Dengue* (CFR DBD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 ..... II-143
Gambar 2.102. Persentase Jalan Mantap Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-146
Gambar 2.103. Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... II-147
Gambar 2.104. Kartu Disabilitas II-156
Gambar 2.105. Perkembangan Upah Minimum Kabupaten Pekalongan Tahun 2022-2026 ..... II-159
Gambar 2.106. Klasifikasi Status pada Indeks Desa II-165
Gambar 2.107. Struktur Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan SDI II-172
Gambar 2.108. Hasil Penilaian Evaluasi SDI Kab. Pekalongan Tahun 2024 ..... II-173
Gambar 2.109. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tingkat Kecamatan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 ..... II-193
Gambar 3.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi sejumlah Negara III-2

Gambar 3.2. Proporsi Unsur Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... III-13
Gambar 3.3. Proporsi Unsur Belanja Daerah terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 ..... III-16
Gambar 4.1. Indikator Visi Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029..... IV-5
Gambar 4.2. Keterkaitan Visi dan Pokok Visi, Misi, dan Fokus Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029. IV-12
Gambar 4.3. Logframe Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 - 2029 ..... IV-13
Gambar 4.4. Keterkaitan RPJMN-Tema RKP-Prioritas Pembangunan dalam RKP 2027..... IV-24
Gambar 4.5. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2027..... IV-33
Gambar 4.6. Pemberian Terapi pada Anak dengan Disabilitas di Sekolah Inklusi melalui Mobile therapy..... IV-43
Gambar 4.7. Pemberian Terapi oleh Therapis dari Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP) melalui *Mobile Therapy* IV-44
Gambar 4.8. Pembagian Wilayah Pengembangan Provinsi Jawa Tengah IV-45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah mulai dari rencana pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, rencana pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun dan rencana pembangunan tahunan.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Proses penyusunan RKPD dimulai dari tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan. Rencana program prioritas daerah dalam RKPD disusun menggunakan pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses dan substansi.

Penyusunan RKPD Tahun 2027 dilakukan dengan pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah *(top-down)*, bawah-atas *(bottom-up)*, serta berorientasi tematik, holistik, integratif dan spasial (THIS). Selain itu penyusunan dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, inovatif, kreatif, berorientasi pada hasil *(outcome)* dengan pendekatan *money follows programme* dan *programme follows result*, berbasis risiko *(risk-based planning)*, dan berbasis pada riset *(research-based planning)*, terpadu lintas sektor, serta berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan.

Penyusunan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2027 merupakan bagian dari pelaksanaan **tahun kedua** RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 – 2029. RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2027 disusun juga dengan mempertimbangkan kebijakan yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025–2045, RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045, RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025–2045, RPJMN Tahun 2025 – 2029, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2025-2029. Dengan demikian, RKPD Tahun 2027 masih tetap mendukung pencapaian Asta Cita dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), mempertimbangkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala terpilih serta Program Prioritas Nasional.

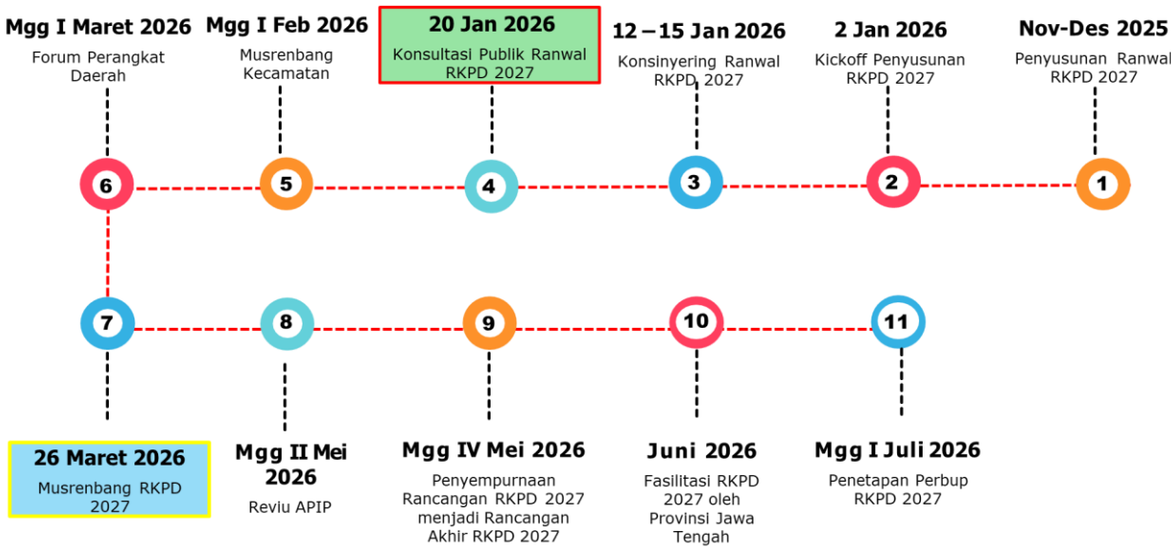
Berpedoman pada kebijakan dalam RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2027 diarahkan dalam rangka **"Penguatan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Optimalisasi Potensi Daerah untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Inklusif"**. Tema ini mencerminkan komitmen

Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk tidak hanya membangun fondasi fisik, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2027 memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2025, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional, amanat pembangunan global/nasional/regional, regulasi yang berlaku, dan dinamika agenda pembangunan nasional lainnya. Selain itu kebijakan pembangunan daerah tahun 2027 juga turut memperhatikan proyeksi target dalam RKPD Tahun 2026. Dalam RKPD Tahun 2027 juga memuat hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026, disamping rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Proses penyusunan dokumen RKPD Tahun 2027 meliputi: 1) Persiapan yaitu penyampaian surat edaran Bupati Pekalongan tentang arah kebijakan pembangunan dan pedoman penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2026 dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2027, dan penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2027; 2) Musrenbang desa/kelurahan, Konsultasi publik sekaligus pembukaan masa musrenbang; 3) Forum perangkat daerah; 4) Musrenbang Kabupaten; 5) Reviu APIP; 6) Fasilitasi RKPD Tahun 2027 oleh Pemerintah Provinsi; 7) Pembahasan rancangan akhir RKPD dengan DPRD dalam bentuk dialog interaktif eksekutif dan legislatif; dan 8) Penetapan RKPD Tahun 2027

Adapun jadwal penyusunan dokumen RKPD Provinsi Kabupaten Pekalongan Tahun 2027 disajikan dalam gambar dibawah ini.



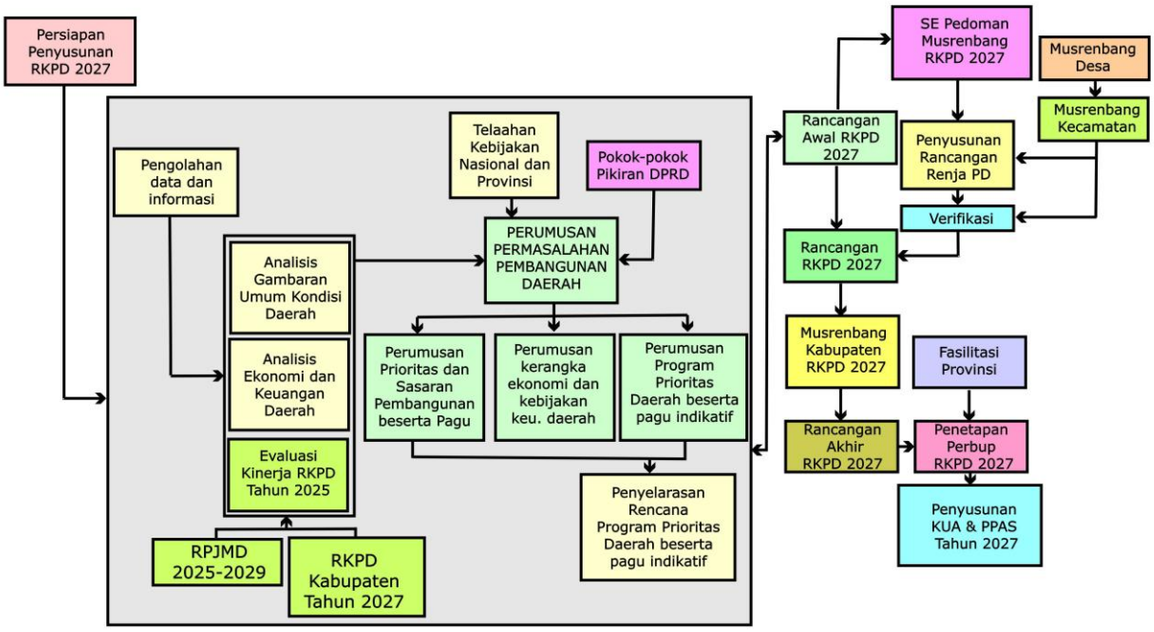
Gambar 1.1. Rencana Jadwal Penyusunan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2027

Dokumen RKPD Tahun 2027 ini mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Secara substansial memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, perkiraan maju, dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam Tahun 2027;
2. Secara normatif menjadi dasar penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2027 yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2027;

3. Secara operasional memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam rencana kerja (Renja) perangkat daerah Tahun 2027; dan
4. Secara faktual menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat

Selengkapnya beberapa alur proses penyusunan substansi RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2027 sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut ini.



Gambar 1.2. Alur Proses Penyusunan Substansi Perencanaan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2027

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Pekalongan tahun 2027 diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

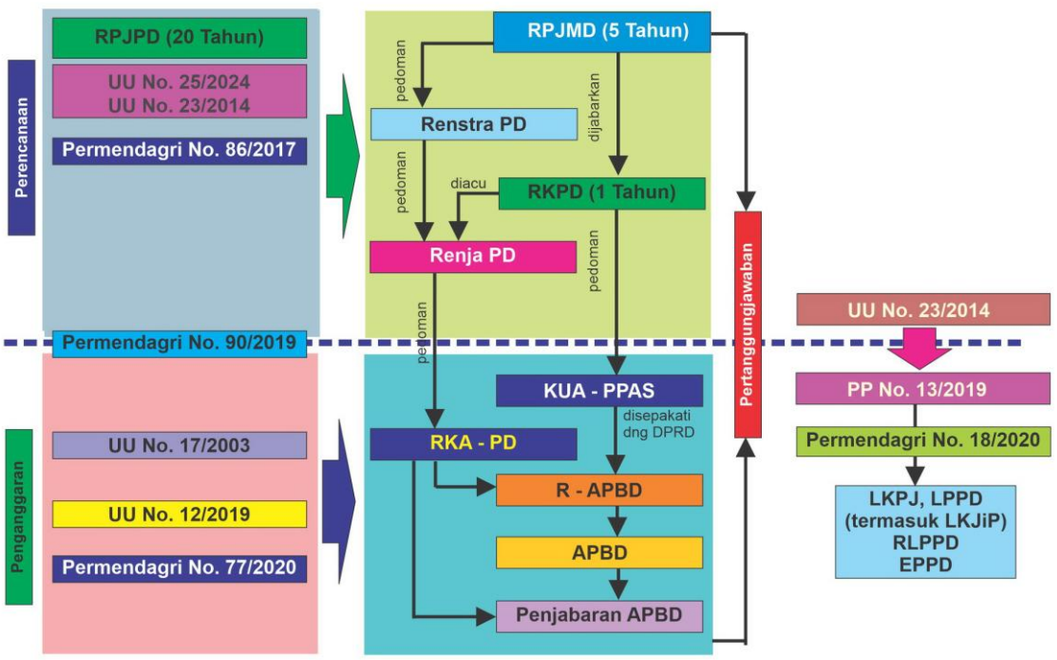
31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
38. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6633);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6634);
41. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
42. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata uang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Norek Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor B-278/2024);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);

46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 8; Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 161)
47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
48. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 93);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 95);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 114);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 17, Norek Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8-208/2024)
52. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 130);
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

58. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
59. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
60. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);

C. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Proses perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban merupakan satu siklus manajemen pembangunan yang berkelanjutan sehingga dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan memiliki fungsi dan peran yang sangat penting. Jika dikaitkan dengan dokumen di atasnya, maka RKPD merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD atau RPD yang disusun berdasarkan pada RPJPD. Dokumen RKPD menjadi acuan penyusunan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) yang juga disusun dengan berpedoman pada rencana strategis perangkat daerah (renstra PD) sebagai dokumen perencanaan strategis perangkat daerah. Dokumen RKPD ini akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUAPPAS pada saat memasuki tahapan penganggaran. Selanjutnya pada saat pertanggungjawaban, maka dokumen RKPD ini akan dipertanggungjawabkan dalam laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah (LKPJ). Sehingga dokumen RKPD ini menjadi satu dokumen tahunan yang memiliki korelasi dengan dokumen penganggaran, dan pertanggungjawaban.



Gambar 1.3. Hubungan Antar Dokumen

Selain itu, penyusunan dokumen RKPD juga tetap memperhatikan keselarasan dengan dokumen-dokumen lainnya baik yang sifatnya nasional, daerah, maupun sektoral. Dokumen tersebut antara lain dokumen tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW), tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/sustainable development goals (SDGs), rancangan road map reformasi birokrasi, strategi penanggulangan kemiskinan, percepatan pencegahan stunting, pangan dan gizi, penurunan emisi gas rumah kaca, dan pengurangan risiko bencana. Keselarasan dengan dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2027.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Penyusunan RKPD Tahun 2027 adalah :

a. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2027;
b. Mewujudkan harmonisasi rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Daerah tahun 2027; dan
c. Memastikan program dan kegiatan yang disusun dalam RKPD telah memuat indikator dan target kinerja *(outcome dan output)*, kelompok sasaran, lokasi dan pagu indikatif serta prakiraan maju dan mendukung prioritas nasional.

2. Tujuan penyusunan RKPD Tahun 2027 adalah untuk :

a. Memberikan arah bagi seluruh *stakeholder* pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2027;
b. Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun 2027;
c. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 bagi Perangkat Daerah;
d. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan dan keterpaduan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
e. Instrumen bagi pemerintahan daerah untuk mengukur target kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah; dan Instrumen bagi Pemerintah Daerah sebagai acuan penyusunan laporan LPPD, LKjIP, dan LKPJ.

E. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2027 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen; maksud dan tujuan; serta sistematika RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi umum daerah; evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun 2025 dan capaian RPJMD sampai dengan tahun 2025; permasalahan pembangunan daerah; dan isu strategis pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat kondisi perekonomian daerah; arah kebijakan ekonomi daerah; serta arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tujuan dan sasaran pembangunan daerah, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2027 berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan RKPD tahun 2025 dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027 dalam RPJMD, program prioritas, telaah pokok pikiran, keselarasan prioritas daerah dengan prioritas provinsi dan nasional, serta inovasi pembangunan daerah.

BAB RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2027.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) yang akan dicapai di tahun 2027.

BAB VII PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2027.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

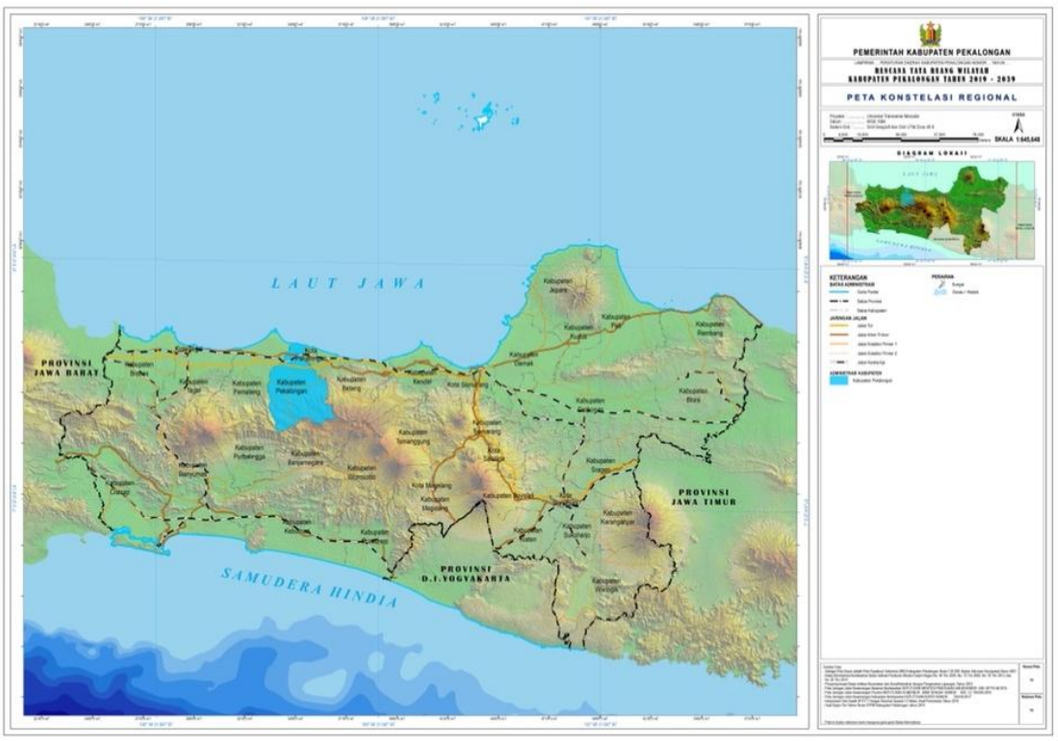
A. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Aspek Geografi dan Demografi

a. Posisi dan Peran Strategis Daerah

1). Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang berada di daerah pantura bagian barat, memanjang ke arah selatan dengan Kota Kajen sebagai ibukota pusat pemerintahan. Posisi Kabupaten Pekalongan di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Gambar 2.1. Peta Kabupaten Pekalongan terhadap Provinsi Jawa Tengah

Luas wilayah Kabupaten Pekalongan seluas **89.291,37** (RTRW Kabupaten Pekalongan 2020-2040). Kabupaten Pekalongan terdiri atas 19 kecamatan dan 285 desa/kelurahan. Dari 285 desa/kelurahan yang ada, terdapat 11 desa yang merupakan desa pesisir dan 274 desa/kelurahan bukan termasuk desa pesisir.

Tabel 2.1.
Pembagian Administrasi di Wilayah Kabupaten Pekalongan

No	Kecamatan	Luas (ha)	Desa	Kelurahan	Dusun	RW	RT
1	Kandangserang	7.630,80	14	-	68	60	153
2	Paninggaran	9.771,26	15	-	65	66	202
3	Lebakbarang	6.311,29	11	-	35	33	85
4	Petungkriyono	8.307,75	9	-	40	40	91
5	Talun	4.977,18	10	-	67	31	144

No	Kecamatan	Luas (ha)	Desa	Kelurahan	Dusun	RW	RT
6	Doro	7.712,46	14	-	48	62	212
7	Karanganyar	5.767,61	15	-	67	75	203
8	Kajen	8.564,94	24	1	96	119	321
9	Kesesi	6.882,48	23	-	65	121	380
10	Sragi	3.413,85	16	1	75	154	402
11	Siwalan	2.794,57	13	-	60	97	272
12	Bojong	4.309,47	22	-	74	92	288
13	Wonopringgo	2.065,68	14	-	43	44	140
14	Kedungwuni	2.306,36	16	3	69	135	409
15	Karangdadap	2.150,93	11	-	56	69	174
16	Buaran	905,83	7	3	26	82	237
17	Tirto	2.038,65	16	-	41	64	251
18	Wiradesa	1.338,92	11	5	30	91	297
19	Wonokerto	2.041,34	11	-	33	66	205
Jumlah		**89.291,37**	**272**	**13**	**1.058**	**1.501**	**1.501**

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2024

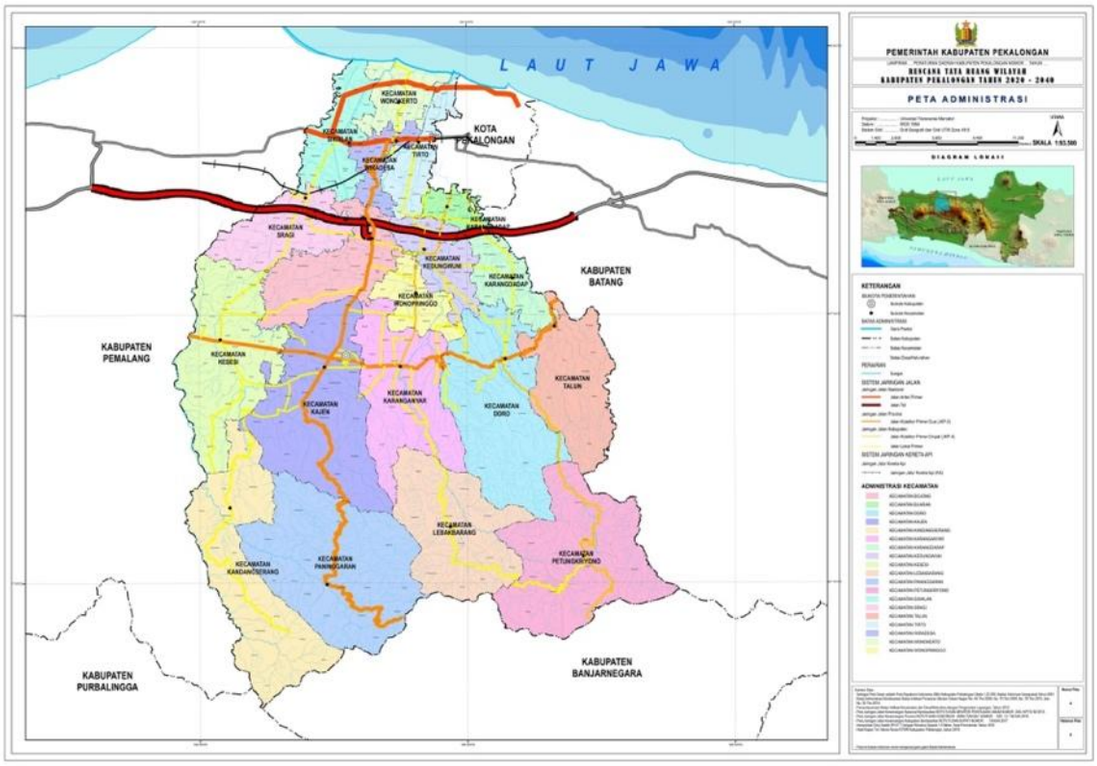
Kabupaten Pekalongan terdiri dari 19 kecamatan, 272 desa, 13 kelurahan, 1.058 dusun, 1.501 RW, dan 4.466 RT. Kecamatan Kajen dan Kecamatan Kesesi dengan jumlah desa terbanyak yaitu masing-masing sebanyak 24 desa dan 23 desa. Untuk kelurahan hanya terdapat di Kecamatan Kajen, Sragi, Kedungwuni, Buaran, dan Wiradesa, dengan jumlah kelurahan terbanyak terdapat di Kecamatan Wiradesa sebanyak 5 kelurahan. Jumlah dusun terbanyak terdapat di Kecamatan Kajen sebanyak 96 dusun. Jumlah RW terbanyak terdapat di Kecamatan Sragi sebanyak 154 RW sedangkan untuk RT dengan jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Kedungwuni sebanyak 409 RT.

2). Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Pekalongan mempunyai bentuk yang memanjang dari utara ke selatan. Di bagian utara termasuk wilayah pantura dan merupakan jalur utama di Pulau Jawa. Secara astronomis letak Kabupaten ini berada di antara 6º - 7º 23’ Lintang Selatan dan antara 109º - 109º 78’ Bujur Timur. Karena sebagian wilayahnya berbatasan langsung dengan Laut Jawa maka dari 285 desa/kelurahan yang ada, terdapat 6 desa pantai. Kabupaten Pekalongan memiliki batas administrasi meliputi :

Sebelah Utara : Laut Jawa dan Kota Pekalongan;
Sebelah Timur : Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan;
Sebelah Selatan : Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga;
Sebelah Barat : Kabupaten Pemalang.

Adapun peta administrasi Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.2. Peta Administrasi Kabupaten Pekalongan

3). Topografi

Wilayah Kabupaten Pekalongan merupakan perpaduan antara dataran rendah di bagian utara dan dataran tinggi di bagian selatan yang termasuk dalam kawasan dataran tinggi Dieng. Kawasan dataran tinggi berada pada 1.294 meter dari permukaan laut. Secara topografis, terdapat 66 desa/kelurahan (23,16%) yang terdapat di dataran tinggi dan sebanyak 208 desa/kelurahan (72,98%) berada di dataran rendah serta 11 desa/kelurahan (3,86%) pada dataran pantai Kelerengan lahan di wilayah Kabupaten Pekalongan cukup bervariasi.

Secara umum rona kelerengan di Pekalongan merupakan pegunungan di bagian selatan yang melandai ke arah utara (pantai). Keragaman kelerengan di Kabupaten Pekalongan Bervariasi mulai dari 0- 2 % yang meliputi bagian utara sampai dengan bagian tengah Kabupaten Pekalongan, 0-15 % bagian tengah Pekalongan (Kecamatan Doro dan Talun), 15-40% yang meliputi bagian selatan Kecamatan Talun, Doro, sebagian Kecamatan Kandangserang dan Paninggaran serta kelerengan lebih dari 40 % yang meliputi sebagian besar Kecamatan Lebakbarang, Petungkriyono, bagian utara dan selatan Kecamatan Paninggaran, bagian barat Kecamatan Kajen dan bagian selatan Kecamatan Kandangserang.

Adapun tabel ketinggian wilayah per kecamatan dari permukaan laut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

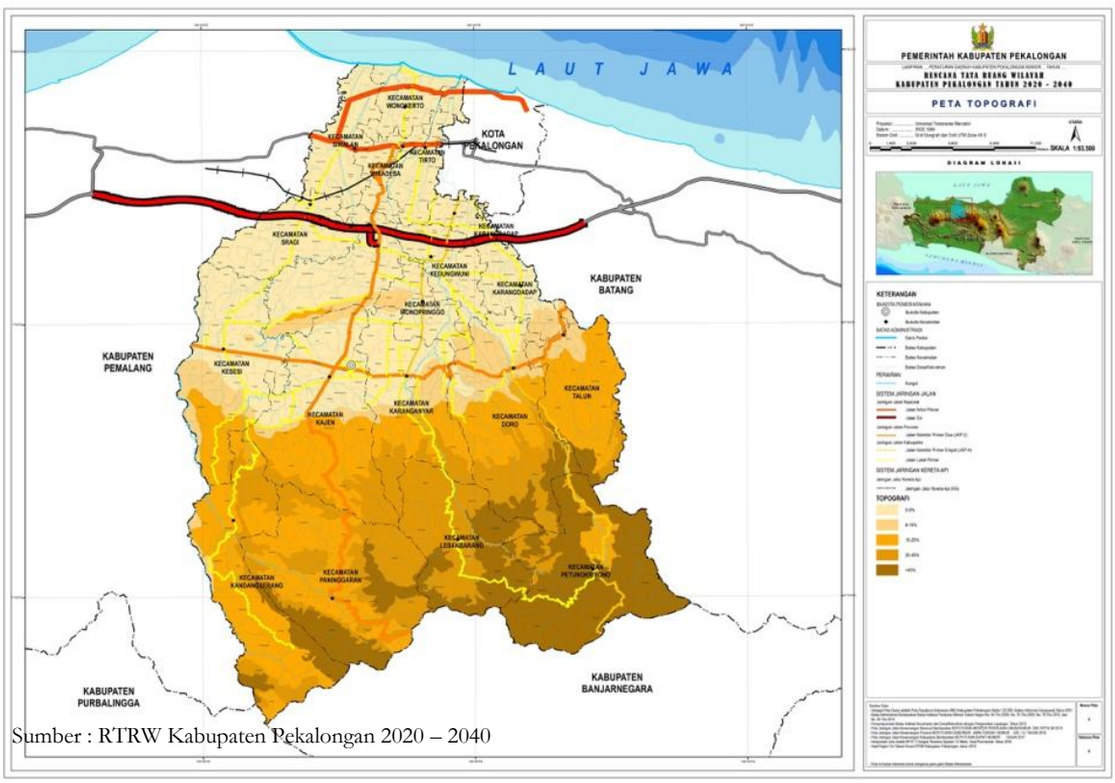
Tabel 2.2.
Ketinggian Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Pekalongan

No.	Kecamatan	Tinggi dari Permukaan Laut (m)	Kecamatan			Desa/ Kelurahan		
			Pantai	Rendah	Tinggi	Pantai	Rendah	Tinggi
1.	Kandangserang	276	-	-	1	-	-	14
2.	Paninggaran	850	-	-	1	-	-	15
3.	Lebakbarang	691	-	-	1	-	-	11
4.	Petungkriyono	1.294	-	-	1	-	-	9
5.	Talun	300	-	-	1	-	6	4
6.	Doro	381	-	-	1	-	8	6

No.	Kecamatan	Tinggi dari Permukaan Laut (m)	Kecamatan			Desa/ Kelurahan		
			Pantai	Rendah	Tinggi	Pantai	Rendah	Tinggi
7.	Karanganyar	70	-	1	-	-	13	2
8.	Kajen	60	-	1	-	-	20	5
9.	Kesesi	40	-	1	-	-	23	-
10.	Sragi	9	-	1	-	3	17	-
11.	Siwalan	9	-	1	-	-	10	-
12.	Bojong	50	-	1	-	-	22	-
13.	Wonopringgo	20	-	1	-	-	14	-
14.	Kedungwuni	11	-	1	-	-	19	-
15.	Karangdadap	11	-	1	-	-	11	-
16.	Buaran	8	-	1	-	-	10	-
17.	Tirto	4	-	1	-	2	14	-
18.	Wiradesa	4	-	1	-	-	16	-
19	Wonokerto	4	-	1	-	6	5	-
	Jumlah	-	-	13	6	11	208	66

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2024

Sedangkan peta topografi Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020 – 2040

Gambar 2.3. Peta Topografi Kabupaten Pekalongan

4). Geologi

Struktur Geologi Kabupaten Pekalongan terdiri dari :

a). Daerah Endapan *Aluvial*

(1). Aluvium, yang terletak pada ketinggian 0 - 25 m dpl. Daerah meliputi Kecamatan Sragi, Wiradesa, Tirto, Buaran, Kedungwuni, Doro, Wonopringgo, Karanganyar, Kajen, Kesesi dan Bojong dengan luas keseluruhan 25.138,9516 Ha atau sebesar 30,23 % dari luas keseluruhan. Kawasan ini cukup sesuai untuk pengembangan kegiatan pertanian namun harus didukung oleh pengairan atau irigasi yang memadai. Untuk mendukung potensi pertanian yang ada di kawasan ini maka kecamatan-kecamatan tersebut menjadi salah satu prioritas utama dalam pengembangan jaringan irigasi di Kabupaten Pekalongan.

(2). Aluvium Facies Gunung Api, terlelak pada ketinggian antara 25 - 500 dpl. Struktur geologi ini meliputi daerah - daerah di Kecamatan Petungkriyono, Talun, Kandangserang, Kajen, Kesesi, Wonopringgo dan Kedungwuni; luas cakupan wilayahnya seluas 12.970,6250 Ha atau sekitar 14,45 % dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan. Daerah ini merupakan lahan dengan kualitas yang baik bagi pengembangan pertanian karena memiliki sifat menyerap dan menampung air. Namun perlu diperhatikan dalam pengembangannya nanti tetap harus memperhatikan kelayakan lahannya.

b). Daerah Hasil Gunung Api Kuarter Tua

Daerah ini terletak pada daerah dengan ketinggian sekitar 500 meter dpl atau lebih. Struktur geologi ini terdapat di Kecamatan Paninggaran, Lebakbarang, Petungkriyono, Talun, Doro, Karanganyar,Kajen, Kesesi, dan Karanganyar; dengan luas cakupan wilayahnya sebesar 17.681,250 Ha atau sekitar 19,70 % dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan. Umumnya bersifat kurang subur, dengan kondisi topografi relatif kasar dimana pelapukan dari daerah ini mudah terbawa oleh hanyutan sungai yang melintasi kawasan tersebut yang berdampak pada penurunan tingkat kesuburan lahan. Karena sifatnya tersebut maka pengembangan di daerah ini diprioritaskan pada pengembangan kegiatan yang mengarah pada perlindungan tanah serta mengurangi dan mencegah kekritisan lahan dengan pengembangan kawasan lindung, hutan produksi terbatas atau hutan rakyat.

c). Daerah *Miosen Facies Sedimen*

Terdapat pada daerah dengan ketinggian lebih dari 500 m atau-pun lebih dari 1000 m dpl. Pada umumnya merupakan daerah dengan potensi kehutanan dengan total luasan mencapai 18.850,000 Ha atau sekitar 20,26 % dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan. Terletak di Kecamatan Kesesi, Paninggaran, Lebakbarang, Petungkriyono, Karanganyar, Kajen dan sebagian kecil Kecamatan Kesesi. Untuk mendukung potensi tersebut maka pengembangan diarahkan pada pengembangan kegiatan perkebunan, hutan tanaman keras, hutan produksi dan hutan rakyat.

d). Daerah geologi lain

(1). Daerah Hasil Gunung Api
Terdapat di Kecamatan Kesesi, Paninggaran dengan luas keseluruhan mencapai 6.555,8333 Ha atau 7,30% dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan.

(2). Daerah Hasil Gunung Api tak teruraikan
Pada umumnya daerah ini berupa batuan breksi, lava, lapili dan tupa. Umumnya batuan tersebut membentuk bukit-bukit tinggi yang tertutup dan berwarna abu-abu tua sampai coklat dan kuning kemerahan. Jenis lahan ini mencakup wilayah-wilayah di kecamatan Kandangserang, Paninggaran, Talun, Doro, Kajen, Kesesi, Wonopringgo dan Kedungwuni.

(3). Daerah Pra Tertier Sedimen
Terdapat di Kecamatan Petungkriyono dengan luasan sekitar 2.020 Ha atau sekitar 2,25 % dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan.

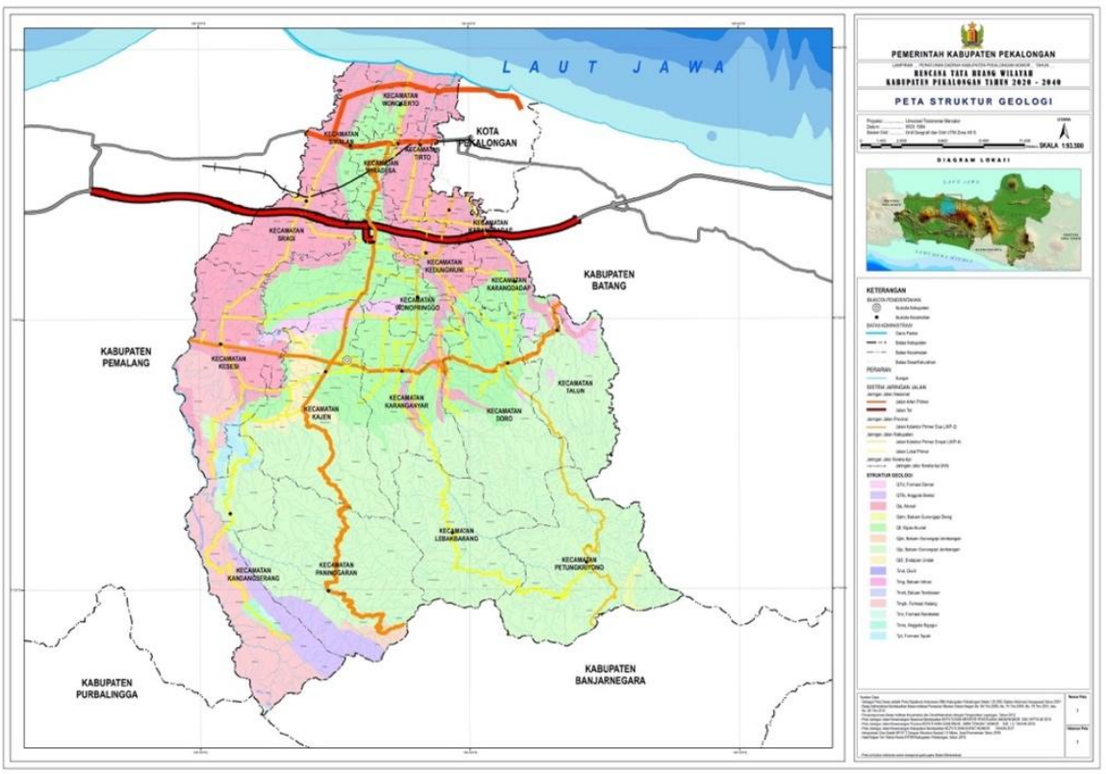
(4). Daerah Pliosen Facies Sedimen
Terdapat di kecamatan kesesi dan Kajen dengan luasan sekitar 572 Ha atau 0,64 % dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan.

(5). Daerah Oligosen
Terdapat di Kecamatan Kandangserang dan Paninggaran dengan luasan sekitar 262,500 Ha atau sekitar 0,29% dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan.

(6). Daerah Granit

Terdapat di Kecamatan Kesesi dengan luasan sekitar 150 ha atau sekitar 0,13 % dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan.

Kondisi geologi lingkungan di Kabupaten Pekalongan secara umum dapat dijelaskan dalam gambar sebagai berikut:



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020 – 2040

Gambar 2.4. Peta Struktur Geologi Kabupaten Pekalongan

Sebaran jenis tanah di Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut :

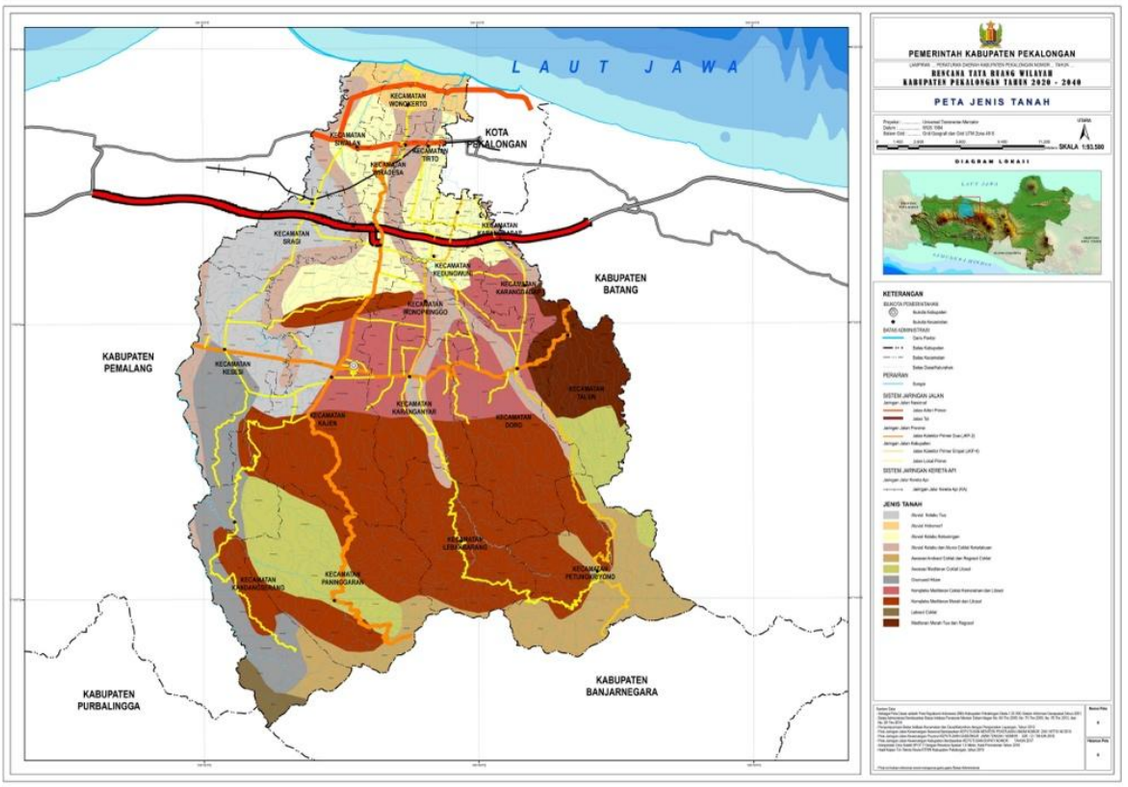
Tabel 2.3.
Sebaran Jenis Tanah Kabupaten Pekalongan

No.	Jenis Tanah	Kecamatan
1	latosol coklat	Kec. Paninggaran, Kandangserang, Doro
2	aluvial kelabu tua	Kec. Sragi dan Kedungwuni
3	kompleks gromosol mediteran	Kec. Kandangserang
4	latosol coklat	Kec. Paninggaran, Doro, Karanganyar, Kajen, Kesesi, Bojong, Wonopringgo, Kedungwuni
5	alluvial kelabu	Kec. Sragi, Kajen, Kesesi, Bojong, Buaran, Tirto, Wiradesa
6	alluvial coklat	Kec. Sragi, Bojong, Wonopringgo, Kedungwuni, Buaran, Tirto
7	alluvial hidromorf	Kec. Sragi, Wiradesa, Tirto
8	kompleks latosol merah kekuning-kuningan dan latosol coklat kemerahan	Kec. Kandangserang, Paninggaran, Lebakbarang, Petungkriyono

No.	Jenis Tanah	Kecamatan
9	andosol coklat	Kec. Kandangserang, Paninggaran, Lebakbarang, Petungkriyono

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2024

Adapun peta jenis tanah dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020 – 2040

Gambar 2.5. Peta Jenis Tanah Kabupaten Pekalongan

5). Hidrologi

a). Air Permukaan

Keadaan hidrologi ditunjukkan oleh keberadaan sungai, mata air,dan waduk yang terdapat di Kabupaten Pekalongan. Kabupaten Pekalongan secara hidrologi terbagi ke dalam 4 Daerah Aliran Sungai, yaitu DAS Kupang, DAS Sekarang, DAS Sragi dan DAS Genteng. Keempat daerah aliran sungai ini merupakan daerah aliran sungai utama yang mencakup beberapa aliran sungai yang ada di Kabupaten Pekalongan yang kesemuanya bermuara di Laut Jawa. Sungai-sungai dan anak sungai yang terdapat di Kabupaten Pekalongan, antara lain dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.4.
Sungai dan Anak Sungai di Kabupaten Pekalongan

No	Nama Sungai/ Anak Sungai	Luas Dta (Km)	Panjang (Km)	Kecamatan yang Dilalui	Keterangan
A	Sungai Sengkarang	189	63.35	Petungkriyono, Lebakbarang, Karanganyar, Wonopringgo, Kedungwuni, Bojong, Wiradesa, Tirto, Wonokerto	
1	Sungai Banteng	4.30	3.30	Petungkriyono	

No	Nama Sungai/ Anak Sungai	Luas Dta (Km)	Panjang (Km)	Kecamatan yang Dilalui	Keterangan
2	Sungai Pakis	6.47	4.50	Petungkriyono	
3	Sungai Totogan	3.00	3.10	Petungkriyono	
4	Sungai Sawangan	5.70	3.50	Petungkriyono	
5	Sungai Kedondong	27.39	5.00	Lebakbarang	
a.	Sungai Kumenyep	14.81	7.5	Petungkriyono Dan Lebakbarang	
b	Sungai Sedo 1	3.55	4.20	Lebakbarang	
6	Sungai Pundutan	1.25	0.05	Lebakbarang	
7	Sungai Wisnu	5.85	8.40	Lebakbarang, Karanganyar	
a	Sungai Mendolo	4.15	3.5	Lebakbarang	
8	Sungai Blimbing	48.43	12.40	Karanganyar, Doro	
a	Sungai Klame	5.80	2.40	Doro	
b	Sungai Sorosido	9.25	11.30	Doro	
c	Sungai Sarak	3.05	4.10	Doro	
d	Sungai Anget	4.35	3.60	Doro	
e	Sungai Sintarol	2.20	3.10	Doro	
f	Sungai Manggis	5.70	3.55	Karanganyar	
9	Sungai Grugak	8.45	8.15	Doro	
10	Sungai Welo	49.52	27.00	Petungkriyono, Doro, Kedungwuni	
11	Sungai Kaliagung	0.00	3.10	Karanganyar, Wonopringgo	
B	Sungai Meduri	14.82	8.00	Tirto	
1	Sungai Ngalian	5.10	5.80	Tirto, Buaran	
2	Sungai Bremi	10.96	9.00	Tirto	
3	Sungai Pucung/ Buntu	3.60	4.20	Tirto	
C	Sungai Mrican	11.20	12.00	Wiradesa, Wonokerto	
D	Sungai Pecakaran	2.50	3.75	Wonokerto	
E	Sungai Pegantungan (Sungai Pekuncen)	3.00	3.98	Wiradesa, Wonokerto	
F	Sungai Kupang	15.76	6.90	Petungkriyono, Talun, Karangdadap, Buaran	
1	Sungai Mangunan	3.90	3.40	Petungkriyono	
2	Sungai Sumilir	10.12	8.70	Talun	
a	Sungai Jolotigo	4.05	3.10	Talun	
3	Sungai Wengker	4.35	5.70	Talun	
4	Sungai Gandu	13.19	9.15	Talun, Karangdadap	
a	Sungai Mijen (A)	2.15	2.85	Talun	
b	Sungai Wanglu	7.15	6.80	Talun	
c	Sungai Winong – Sono	2.75	7.10	Talun	
5	Sungai Kaliwage	3.70	4.20	Doro, Talun, Karangdadap	
a	Sungai Bendo	7.40	6.20	Doro, Talun, Karangdadap	
6	Sungai Tengah	6.15	6.75	Doro, Karangdadap	
a	Sungai Langu	1.10	3.15	Karangdadap	
7	Sungai Worowari	5.70	5.50	Kedungdadap	
a	Sungai Dalem	2.60	3.40	Karangdadap	
8	Sungai Kawung	2.45	3.50	Kedungwuni, Karangdadap, Buaran	
a	Sungai Kemloko	2.45	3.64		
9	Sungai Gawe	-	4.50	Kedungwuni, Buaran	
G	Sungai Paingan-Sragi	241.45	59.09	Paninggaran, Kajen, Kandangserang, Kesesi,	
1	Sungai Joho	1.85	3.00	Paninggaran	
2	Sungai Penembangan	12.42	6.50	Paninggaran	
3	Sungai Kesur	4.05	3.20	Kandangserang	

No	Nama Sungai/ Anak Sungai	Luas Dta (Km)	Panjang (Km)	Kecamatan yang Dilalui	Keterangan
4	Sungai Lambur (Tawing Atas)	8.02	2.11	Kandangserang, Kesesi	
5	Sungai Tawing (Bawah)	8.02	4.00	Kesesi	
6	Sungai Berem	8.84	2.75	Kajen, Kesesi	
a	Sungai Pengging	2.38	3.00	Kajen	
b	Sungai Gowok	2.50	3.00	Kajen	
c	Sungai Karang	7.17	4.80	Kajen	
7	Sungai Luwuk – Kajen – Sokoyoso – Gutomo	29.09	14.21	Karanganyar, Kajen	
a	Sungai Godeg	3.79	3.64	Karanganyar, Kajen	
b	Sungai Nyamok	2.53	3.40	Karanganyar, Kajen	
c	Sungai Wedari	2.30	3.50	Karanganyar,	
d	Sungai Siwedus	5.46	3.10	Kajen	
e	Sungai Kajongan	16.45	11.64	Kajen	
8	Sungai Ponjo – Sapon - Gejlik	4.27	7.38	Kajen	
9	Sungai Gosek	13.27	9.88	Kesesi	
10	Sungai Boro-Sempor	10.50	10.32	Karanganyar, Bojong	
a	Sungai Kemuning	1.64	3.90	Bojong	
b	Sungai Lamaran	2.52	2.90	Bojong	
c	Sungai Bojong – Menjangan-Gendoran	10.96	9.36	Bojong, Karanganyar,	
11	Sungai Winong	19.80	9.80	Kesesi, Sragi	
12	Sungai Tumbal - Silumping	9.89	6.50	Sragi, Siwalan	
13	Sungai Kapidodo / Kangkung	7.15	6.11	Siwalan	
14	Sungai Ampel	6.74	6.50	Siwalan, Wonokerto	
15	Sungai Tratebang	6.30	4.50	Wonokerto	
H	Sungai Genteng – Layangan	127.35	19.25	Paninggaran, Kadangserang, Kesesi	Sungai Layangan Merupakan Sungai Lintas Batas Yang Sebagian Sungainya Berada Di Wilayah Kab. Pekalongan dan Sebagian Lagi di Wilayah Kab, Pemalang
1	Sungai Mindi	4.30	4.20	Paninggaran	
2	Sungai Sodong/Lumeneng	0.90	3.15	Paninggaran	
3	Sungai Tanduran Perwuni	7.50	3.45	Paninggaran	
4	Sungai Jengkol	4.05	4.30	Paninggaran	
5	Sungai Siori – Plumbon	1.00	3.80	Paninggaran	
6	Sungai Asahan	4.70	6.40	Kandangserang	
G	Sungai Keruh	50.56	12.15	Kandangserang	

Sumber DPU TARU Kabupaten Pekalongan Tahun 2024

Sumber air di Kabupaten Pekalongan selain berasal dari sungai juga berasal dari beberapa daerah irigasi serta wadung/ embung/ lumbung air yang ada di Kabupaten Pekalongan. Sumber daya air permukaan tersebut sebagian besar dimanfaatkan untuk pertanian. Dari sumber air tersebut, terbagi dalam 4 daerah irigasi, yaitu:

(1) Daerah Irigasi Rancah;
(2) Daerah Irigasi Longsong;
(3) Daerah Irigasi Watesan; dan
(4) Daerah Irigasi Ontobogo.

Tabel 2.5.
Daerah Irigasi di Kabupaten Pekalongan

No	Nama/Lokasi	Koordinat	Debit Air (l/dt)	Konservasi
1	**D.I Rancah**	07°07'18,9" LS	40	Irigasi dan Keperluan Rumah Tangga
	Desa Kandangserang	109°31'20,3" BT		
	Kec. Kandangserang			
2	**D.I Longsong**	07°07'7,6" LS	60	Irigasi dan Keperluan Rumah Tangga
	Desa Kandangserang	109°31'11,9" BT		
	Kec. Kandangserang			
3	**D.I Watesan**	07°07'3,6" LS	85	Irigasi dan Keperluan Rumah Tangga
	Desa Kandangserang	109°31'3,1" BT		
	Kec. Kandangserang			
4	**D.I Ontobogo**	07°04'26,1" LS	85	Irigasi dan Air Bersih (PAM)
	Desa Kandangserang	109°31'10,3" BT		
	Kec. Kandangserang			

Sumber : DPU TARU Kabupaten Pekalongan Tahun 2023

Sebagai salah satu strategi dalam upaya konservasi sumber daya air yang ditujukan untuk meningkatkan, memulihkan dan mempertahankan daya dukung, daya tampung, dan fungsi daerah aliran sungai untuk menjamin ketersediaan air guna memenuhi kebutuhan yang berkelanjutan dilakukan melalui upaya pemeliharaan berbagai sumber daya air yaitu kawasan danau, waduk, rawa, situ/embung dan mata air sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Dalam upaya peningkatan pemeliharaan sumber air, salah satu strategi dalam pengawetan air yaitu dengan pembangunan waduk atau embung.

Tabel 2.6.
Nama Lumbung/ Embung Di Kabupaten Pekalongan

No.	Nama/Lokasi	Luas Lahan	Pengelola
1	Lumbung Air Kapirutan Desa Kesesi Kec. Kesesi	± 2.00 Ha	BBWS Wilayah Pamali Comal
2	Lumbung air Kulu Desa Kulu Kec. Karanganyar	± 1,20 Ha	BBWS Wilayah Pamali Comal
3	Embung Tracas	± 1.50 Ha	DKPP Kab. Pekalongan

Sumber : DPU TARU Kabupaten Pekalongan Tahun 2024

b). Air Bawah Tanah

Air tanah yang terdapat di Kabupaten Pekalongan meliputi air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal dapat diketahui keberadaannya melalui sumur-sumur penduduk sebagai pengguna utama, sedang air tanah dalam diidentifikasi melalui sumur-sumur artesis yang umumnya dimiliki oleh pengguna sektor industri.
Berdasarkan hasil penelitian dari Direktorat Geologi Bandung, potensi air tanah di Kabupaten Pekalongan adalah sebesar 475.757.000 m3 yang terdiri dari :

a) Potensi air tanah dangkal diperkirakan dengan 57.082 sumur penduduk = 57.082x4.051 m3 = 231.239.182m3.
b) Potensi air tanah dalam = 244.517.818 m3.

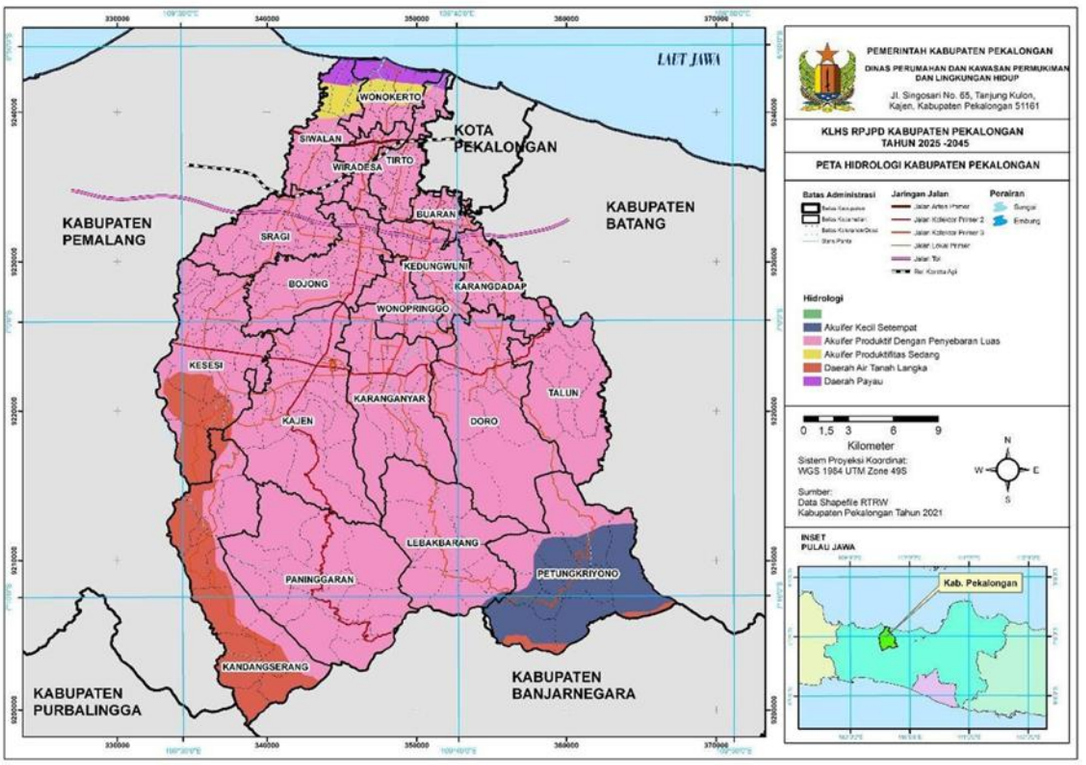
Tabel 2.7.
Data Kondisi Sumber Mata Air Kabupaten Pekalongan

No	Nama	Debit	Mengairi	Lokasi Mata Air	
		(Vol/Waktu)	Lahan (Ha)	Desa	Kecamatan
1	Wedang atas	30.00	11.00	Tajur	Kandangserang
2	Wedang Bawah	22.00	25.00	Tajur	Kandangserang
3	Rancah	40.00	30.00	Kandangserang	Kandangserang
4	Longsong	60.00	80.00	Kandangserang	Kandangserang
5	Watesan	85.00	100.00	Kandangserang	Kandangserang
6	Simende	-	125.00	Kandangserang	Kandangserang
7	Krobokan	-	55.00	Kandangserang	Kandangserang
8	Poh	25.00	33.00	Kandangserang	Kandangserang
9	Sumurup I	80.00	70.00	Kandangserang	Kandangserang
10	Sumurup II	40.00	-	Kandangserang	Kandangserang
11	Bubakan	50.00	-	Kandangserang	Kandangserang
12	Seruni (Winong)	30.50	6.00	Kandangserang	Kandangserang
13	Rancah I	-	110.00	Paninggaran	Paninggaran
14	Rancah II	-	25.00	Kaliombo	Paninggaran
15	Plumbon	-	60.00	Winduaji	Paninggaran
16	Bandingan	-	10.00	Bandingan	Paninggaran
17	Wangan Sabrang	-	98.00	Werdi	Paninggaran
18	Kepoh	-	38.00	Tanggerang	Paninggaran
19	Mejarum	30.00	35.00	Windurojo	Kesesi
20	Gersali	23.00	19.00	Windurojo	Kesesi
21	Sibendo	-	12.00	Gandarum	Kajen
22	Sidudo	-	40.00	Paninggaran	Paninggaran
23	Sinongko	-	52.00	Garungwioro	Kandangserang
24	Gondang	-	20.00	Mendolo	Lebakbarang
25	Suro	-	10.00	Gutomo	Karanganyar
26	Bandot	-	15.00	Yosorejo	Petungkriyono
27	Curug Gempong	-	13.00	Lebakbarang	Lebakbarang
28	Pupu/Pupah	-	110.00	Garungwioro	Kandangserang
29	Sidondang	-	63.00	Timbangsari	Lebakbarang
30	Garung	-	15.00	Garungwioro	Kandangserang
31	Klepu	-	13.00	Garungwioro	Kandangserang
32	Guci	-	25.00	Kutorembet	Lebakbarang
33	Pedawang	33.30	-	Pedawang	Karanganyar
34	Paseh/Beluk/Soga	23.00	-	Gutomo	Karanganyar

No	Nama	Debit	Mengairi	Lokasi Mata Air	
		(Vol/Waktu)	Lahan (Ha)	Desa	Kecamatan
35	Ontobogo	40.00	10.00	Gutomo	Karanganyar
36	Gemistri	-	50.00	Sukoharjo	Kandangserang
37	Rowo Bantar	-	23.00	Tlogohendro	Petungkriyono
38	Gondang/ Glidigan	-	37.00	Tlogohendro	Petungkriyono
39	Tlogohendro	-	17.00	Tlogohendro	Petungkriyono
40	Mangunan	-	23.00	Tlogohendro	Petungkriyono
41	Simego	-	15.00	Simego	Petungkriyono
42	Rogojujo	-	20.00	Kasimpar	Petungkriyono
43	Sidoharjo	-	17.00	Sidoharjo	Doro
44	Pungangan	-	35.00	Pungangan	Doro
45	Rogoselo	-	10.00	Rogoselo	Doro
46	Bliugorejo	-	35.00	Bligorejo	Doro
47	Kutosari	-	15.00	Kutosari	Doro
48	Kalirejo	-	35.00	Kalirejo	Talun
49	Banjarsariu	-	36.00	Banjarsari	Talun
50	Kecapi	-	23.00	Krompeng	Talun
51	talun	-	63.00	Batursari	Talun
52	Picis	-	48.00	Sengare	Talun
53	Sengare	-	92.00	Misoyi	Talun
54	Donowangun	-	90.00	-	Talun
55	Besuki	-	50.00	Paninggaran	Paninggaran
56	Gunung Damar	-	-	Bubak	Kandangserang
57	Banyu Mudal	80.00	440.00	Brengkolang	Kajen
58	Sido Sukmo	60.00	227.00	Dk. Sidosukmo Ds.Gutomo	Karanganyar
59	Sendang	30.00	-	Wangandowo	Bojong
60	Sumur watu	30.00	-	Sumur Jbl Bogo	Bojong
61	Pancuran	50.00	-	Kalipancur	Bojong
62	Santen	20.00	-	Kalipancur	Bojong
63	Grugak	30.00	29.00	Kalipancur	Bojong
	Jumlah Total		**2,758.00 Ha**		

Sumber : DPU TARU Kabupaten Pekalongan Tahun 2023

Selain air permukaan seperti sungai, embung, dan mata air, Kabupaten Pekalongan memiliki cadangan air tanah yang berada di kawasan imbuhan air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) Pekalongan-Pemalang yang terdapat di Kecamatan Petungkriyono, Kandangserang, Talun, Doro, Kajen, Karanganyar dan Kesesi. CAT tersebut termasuk dalam kategori CAT Lintas Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah.



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020 – 2040

Gambar 2.6. Peta Hidrologi Kabupaten Pekalongan

6). Klimatologi

Kabupaten Pekalongan terbagi menjadi 2 (dua) daerah dataran, maka kondisi tersebut mempengaruhi kondisi iklim. Wilayah bagian utara yang didominasi oleh daerah dataran rendah dan berdekatan dengan Laut Jawa, maka kondisi iklim di daerah tersebut cenderung lebih panas. Sedangkan wilayah bagian selatan yang merupakan daerah pegunungan dan dataran tinggi, kondisi iklim di daerah tersebut cenderung lebih sejuk

Iklim Kabupaten Pekalongan termasuk dalam kategori iklim tropis basah. Curah hujan dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Curah hujan di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2025 menunjukkan variasi yang signifikan sepanjang tahun. Curah hujan tertinggi berada pada bulan Januari sebesar 502,60 mm dan Februari sebesar 301,60 mm, yang juga disertai jumlah hari hujan yang tinggi, yakni 20 dan 18 hari. Sedangkan, Juli dan Oktober mengalami curah hujan terendah hanya sebesar 52,70 mm dan 57,70mm.

Secara umum, musim hujan berlangsung pada akhir tahun hingga awal tahun berikutnya (November hingga Januari), ditandai dengan tingginya curah hujan dan berkurangnya penyinaran matahari. Sebaliknya, musim kemarau terjadi pada pertengahan tahun, khususnya Juni hingga Agustus dengan curah hujan sangat rendah dan penyinaran matahari yang lebih tinggi. Adapun hari hujan dan curah hujan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8.
Banyak Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2025

No	Bulan	Curah Hujan	Hari Hujan
1	Januari	502,60	20
2	Februari	301,60	18
3	Maret	203,10	16
4	April	168,40	11
5	Mei	237,90	11
6	Juni	216,00	8
7	Juli	52,70	6
8	Agustus	130,90	9
9	September	145,40	6
10	Oktober	57,70	7
11	November	209,50	17
12	Desember	288,20	19

Sumber : Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 2026

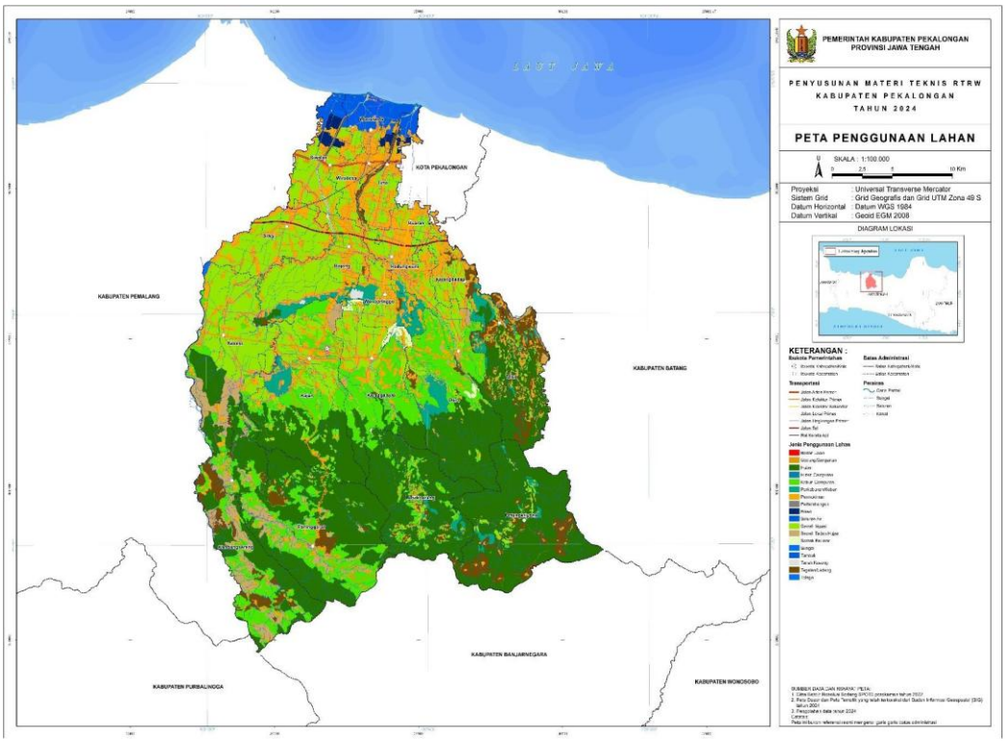
7). Penggunaan lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Pekalongan diklasifikasikan menjadi 15 (delapan belas) klasifikasi, yaitu; badan jalan, gedung/bangunan, hutan, hutan campuran, kebun campuran, perkebunan/kebun, permukiman, pertambangan, rawa, sawah irigasi, sawah tadah hujan, semak belukar, sungai, tambak, tanah kosong, dan tegalan/ladang.

Tabel 2.9.
Penggunaan Lahan Kabupaten Pekalongan Tahun 2024

NO.	PENGGUNAAN LAHAN	LUAS (Ha)	PERSENTASE (%)
	Lahan Tidak Terbangun	**75.167,03**	**84,18**
1.	Sungai	620,43	0,69
2.	Tambak	1.712,51	1,92
3.	Rawa	410,94	0,46
4.	Hutan	28.205,87	31,59
5.	Kebun Campuran	16.902,46	18,93
6.	Perkebunan/Kebun	2.518,12	2,82
7.	Tegalan/Ladang	2.935,60	3,29
8.	Tanah Kosong	95,03	0,11
9.	Sawah Irigasi	20.474,97	22,93
10.	Sawah Tadah Hujan	855,25	0,96
11.	Semak Belukar	425,19	0,48
12.	Pertambangan	10,66	0,01
	Lahan Terbangun	**14.087,33**	**15,80**
13.	Badan Jalan	50,15	0,06
14.	Gedung/Bangunan	244,08	0,27
15.	Permukiman	13.816,50	15,47
	Jumlah (Ha)	**89.291,47**	**100**

Sumber : DPU Taru Kabupaten Pekalongan, 2025



Sumber : DPU Taru Kabupaten Pekalongan; 2025

Gambar 2.7. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Pekalongan

Penggunaan lahan di Kabupaten Pekalongan berdasarkan tabel diatas yang memiliki luas penggunaan paling luas ialah peruntukan pada klasifikasi hutan dengan luas 28.205,87 Ha (31,59%), sawah irigasi dan tadah hujan dengan luas 20.474,97Ha (22,93%), dan permukiman dengan luas 13.816,50 Ha 15,47%). Sedangkan penggunaan lahan yang paling sempit yaitu pada klasifikasi penggunaan lahan pertambangan 10,66 Ha, dan badan jalan dengan luas 50,15 Ha

Secara umum penggunaan lahan di Kabupaten Pekalongan didominasi oleh lahan non terbangun berupa hutan dan sawah seluas 75.167,03 Ha (84,18%). Hutan dan sawah merupakan lahan yang perlu dilindungi untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan untuk menjaga ketahanan pangan sehingga tidak dapat dikembangkan sebagai lahan terbangun. Dengan demikian hanya tersisa lahan seluas 39.121,24 Ha (43,81%) yang dapat dikembangkan.

Namun demikian, pengembangan lahan ini masih perlu mengalokasikan ruang untuk kawasan lindung lainnya di luar kawasan hutan, dan ruang untuk kawasan pertanian lainnya untuk mendukung kebutuhan penyediaan pangan seperti lahan untuk kebun campuran dan perkebunan sehingga lahan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Pekalongan di luar kebun campuran dan perkebunan adalah seluas 19.420,58 Ha (21,74%). Kondisi eksisting lahan terbangun berupa badan jalan, permukiman, gedung/bangunan, dan lahan yang tidak dapat dibangun berupa sungai dan tambak adalah seluas 16.433,67,95 (18,41%). Dengan demikian, lahan yang masih dapat dikembangkan adalah seluas 5.579,27 Ha (6,24%).

Ke depannya, jumlah penduduk dan kegiatan di Kabupaten Pekalongan akan terus berkembang sementara luas lahan tetap. Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya untuk menghemat penggunaan lahan dengan cara pembangunan secara horizontal baik ke atas ataupun ke bawah tanah. Apabila upaya-upaya penghematan lahan tidak dilakukan sedini mungkin, dikhawatirkan, apabila ruang yang masih dapat dikembangkan habis, maka keberadaan ruang lindung berupa hutan dan ruang untuk lahan pertanian dan perikanan terancam mengalami alih fungsi yang akan berdampak negatif terhadap keberlanjutan

lingkungan dan ketahanan pangan kabupaten sehingga secara keseluruhan dapat mengancam keberlanjutan hidup penduduk Kabupaten Pekalongan

b. Potensi Sumber Daya Alam

Wilayah Pengembangan (WP) Petanglong yang meliputi Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan, terdapat beberapa sektor unggulan yang dapat menjadi potensi kewilayahan untuk dapat dioptimalkan dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan wilayah di antaranya perdagangan dan jasa, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, penyediaan akomodasi, pertambangan dan penggalian, informasi dan komunikasi, dan real estate. Kawasan strategis yang berada di WP Petanglong yang dapat dijadikan sebagai daya ungkit pencapaian kinerja pembangunan kewilayahan antara lain kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan Industri Terpadu Batang (KSP), dan kawasan perkotaan Petanglong (KSP).

Keterkaitan Kabupaten Pekalongan dengan kabupaten/kota lain antara lain interaksi yang cukup kuat terutama terjadi dengan Kota Pekalongan yang dihubungkan dengan jalur pantura dan Jalan Kedungwuni-Buaran-Kota Pekalongan. Sedangkan dengan Kabupaten Batang dan Pemalang selain dihubungkan dengan jalur pantura juga dihubungkan dengan jalur tengah Batang-Kajen-Pemalang. Interaksi antara Kabupaten Pekalongan, Pemalang dan Batang akan meningkatkan aktivitas sepanjang jalur tersebut untuk Kabupaten Pekalongan terutama terjadi di Kecamatan Talun, Doro, Karanganyar, Kajen dan Kesesi. Perkembangan jalur ini diharapkan mampu mendukung pemerataan perkembangan di Kabupaten Pekalongan terutama di wilayah tengah dan selatan. Sedangkan untuk Kabupaten Banjarnegara di wilayah selatan, interaksi yang terjadi lebih mengarah pada aktivitas wisata, sebagai bagian dari pengembangan Kawasan Wisata Dieng. Berdasarkan kondisi tersebut Jalur Pekalongan-Banjarnegara dapat dikembangkan sebagai pintu masuk menuju Kawasan Wisata Dieng. Dengan pengembangan ini diharapkan dapat memacu aktivitas wisata di Kabupaten Pekalongan.

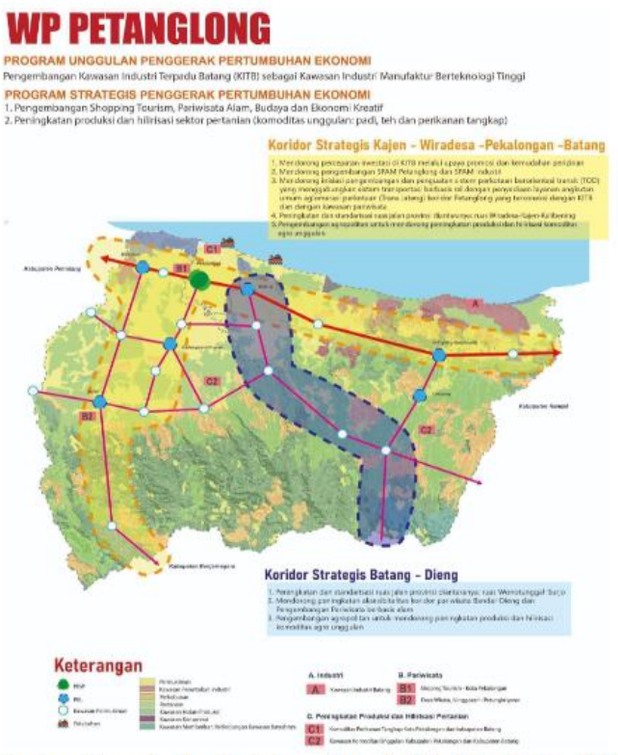
Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, dalam mengimplementasikan episentrum pertumbuhan ekonomi baru di WP Petanglong, berikut adalah indikasi kebutuhan rencana program unggulan dan program strategis selama lima tahun kedepan yang merupakan lintas kewenangan sebagai berikut. :

1) Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) sebagai Kawasan Industri Manufaktur Berteknologi Tinggi;
2) Pengembangan Shopping Tourism, Pariwisata Alam, Budaya dan Ekonomi Kreatif;
    - Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan serta integrasi antarmoda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata
    - Peningkatan daya saing sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dan nusantara
3) Peningkatan Produksi Dan Hilirisasi Sektor Pertanian (komoditas unggulan: padi, teh, kerbau, kambing, itik, ayam buras, dan perikanan tangkap);
    - Peningkatan produksi pertanian (dalam arti luas)
    - Hilirisasi pertanian (dalam arti luas)

Selain indikasi kebutuhan rencana program implementasi episentrum pertumbuhan ekonomi baru dimaksud, terdapat beberapa indikasi rencana program kewilayahan selama lima tahun kedepan yang juga merupakan lintas kewenangan di WP Petanglong, antara lain sebagai berikut

1) **Lingkup Sosial dan Kependudukan** dengan fasilitasi penyediaan rumah layak huni, pengembangan layanan kesehatan, pemberian Makan Bergizi Gratis, Mendorong pemenuhan puskesmas mendorong sekolah inklusif serta mendorong dan memfasilitasi pembentukan rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas.
2) **Lingkup Perekonomian** dengan mendorong kerja sama antardaerah dalam pengembangan ekonomi daerah, Mendorong revitalisasi pasar tradisional serta Pengembangan kawasan pertumbuhan pada simpul-simpul transportasi.
3) **Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan** dengan mendorong keterpaduan pengembangan permukiman perkotaan Kota Pekalongan dan kabupaten di sekitarnya, pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir yang mengalami penurunan tanah dan peningkatan banjir rob, pengamanan pesisir utara Petanglong secara berkelanjutan, sistem pengendali banjir, pengelolaan limbah industri/kerajinan batik, pembangunan waduk sumber air baku SPAM Regional Petanglong, pembangunan TPST Regional Petanglong dan persampahan berbasis masyarakat, pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Rehabilitasi dan konservasi hutan dan lahan untuk pemulihan kapasitas daya dukung DAS khususnya di catchment area, terutama pada DAS Comal, DAS Sragi, DAS Sengkarang dan DAS Kupang, serta transformasi sektor energi melalui pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan, penerapan jaringan cerdas (smart grid), adopsi teknologi penyimpanan energi, pemanfaatan Internet of Things (IoT) untuk pemantauan *real-time*, serta perluasan penggunaan kendaraan listrik guna meningkatkan efisiensi, keterhubungan, dan keberlanjutan pasokan energi.

.

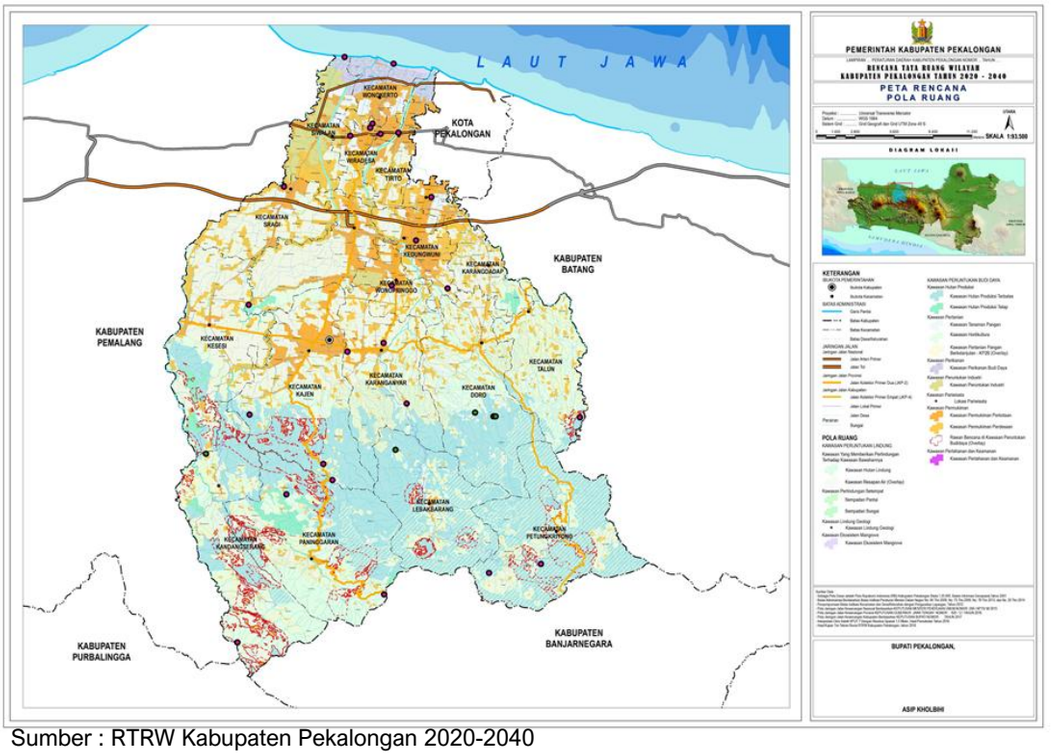


Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah (Hasil Analisis), 2025

Gambar 2.8. Arah Pengembangan WP Petanglong

1). Rencana Pola Ruang

Selanjutnya dapat dijelaskan potensi pengembangan wilayah Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040 mengenai Rencana Pola Ruang sesuai gambar dan penjelasan berikut.



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020-2040

Gambar 2.9. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pekalongan

a). Kawasan Peruntukan Lindung

Kawasan peruntukan lindung meliputi :

(1). Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi:

(a). Kawasan hutan lindung

Kawasan hutan lindung berupa kawasan hutan yang dikelola oleh negara dan berfungsi lindung. Kawasan hutan lindung dengan luas 1.899,96 hektar berada di:

(1). Kecamatan Kandangserang;
(2). Kecamatan Paninggaran; dan
(3). Kecamatan Petungkriyono

(b). Kawasan resapan air

Kawasan resapan air berupa kawasan yang memiliki kelerengan diatas 45% dengan luas kurang lebih 13.923 hektar. Kawasan resapan air berada di:

(1). Kecamatan Doro;
(2). Kecamatan Kajen;
(3). Kecamatan Kandangserang;
(4). Kecamatan Lebakbarang;
(5). Kecamatan Paninggaran;
(6). Kecamatan Petungkriyono; dan
(7). Kecamatan Talun

(2). Kawasan Perlindungan Setempat

(a). Sempadan pantai

Sempadan pantai ditetapkan 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Sempadan pantai dengan luas kurang lebih 70 hektar berada di :

(1). Kecamatan Siwalan;
(2). Kecamatan Tirto;
(3). Kecamatan Wonokerto.

(b). Sempadan sungai

Sempadan sungai dengan luas kurang lebih 1.226 hektar meliputi :

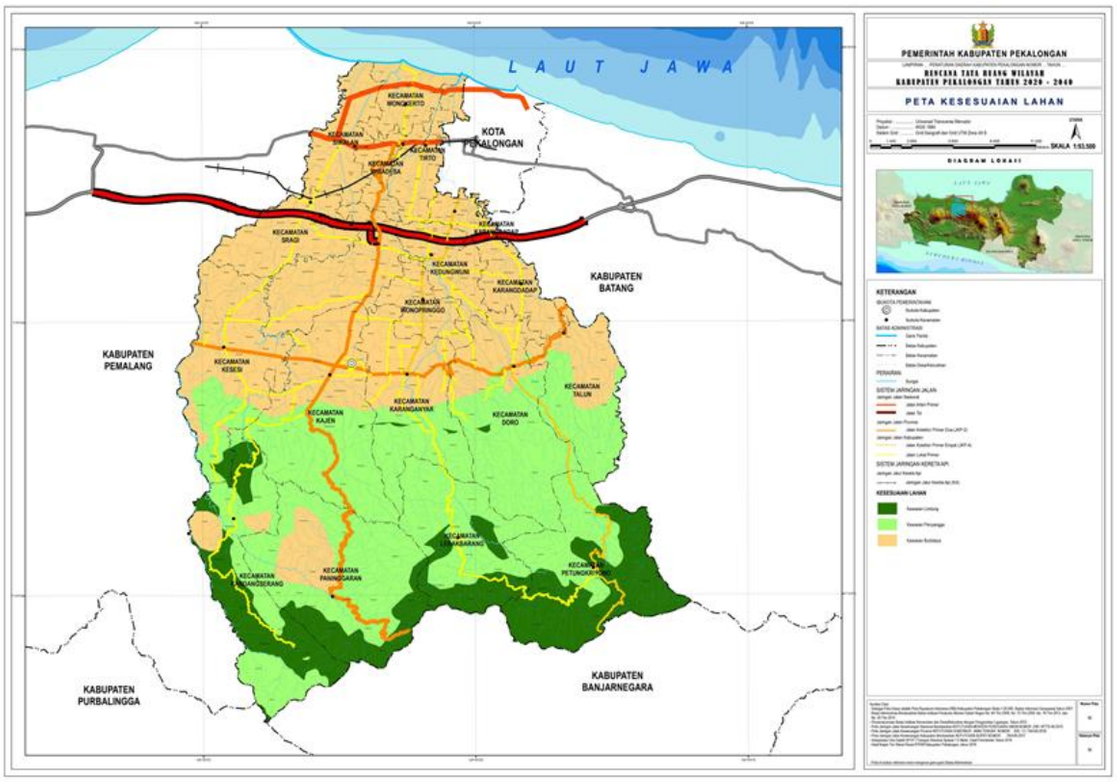
(1). Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
(2). Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
(3). Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
(4). Sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan; dan
(5). Sungai yang terpengaruh pasang air laut

Sempadan sungai meliputi :

(1). Sungai Sragi beserta anak sungainya meliputi :
- Sungai Boro;
- Sungai Camprang/Menjangan;
- Sungai Genteng.
- Sungai Gosek;
- Sungai Gutomo, Sokoyoso, Kajen/Luwuk;
- Sungai Layangan;
- Sungai Paingan;
- Sungai Siwedus;
- Sungai Tengah; dan
- Sungai Winong.

(2). Sungai Sengkarang (Pencongan) beserta anak sungainya meliputi :
- Sungai Blimbing;
- Sungai Dondong;
- Sungai Gubangan;
- Sungai Jangkar;
- Sungai Jurang Garung;
- Sungai Kemuning / Wisnu;
- Sungai Kumenyeb;
- Sungai Meduri;
- Sungai Mendolo;
- Sungai Mrican.
- Sungai Ngalian;
- Sungai Parangan;
- Sungai Pucung;
- Sungai Punduran;
- Sungai Sengkarang Atas Kanan (Sungai Banteng);
- Sungai Sengkarang Atas Kiri (Sungai Pakis);
- Sungai Tanjung;
- Sungai Wadas; dan
- Sungai Welo.

(3). Sungai Kupang (Pekalongan) beserta anak sungainya meliputi :
- Sungai Gawe; dan
- Sungai Sumilir.



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020-2040

Gambar 2.10. Peta Kesesuaian Lahan Kabupaten Pekalongan

(c). Kawasan sekitar danau atau waduk

Kawasan sekitar danau atau waduk meliputi :

(1). Sempadan waduk;

Sempadan waduk ditetapkan dengan kriteria daratan sepanjang tepian waduk dan bendungan yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk paling sedikit 100 meter diukur dari tepi saat pasang tertinggi ke arah darat.

(2). Sempadan embung; dan

(3). Sempadan fasilitas penanggulangan banjir dan rob

Sempadan embung dan fasilitas penanggulangan banjir dan rob sesuai peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan rekomendasi konstruksi.

(3). Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi meliputi kawasan cagar alam geologi yaitu berupa kawasan keunikan proses geologi meliputi Kecamatan Doro, Kecamatan Lebakbarang dan Kecamatan Kandangserang.

(4). Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Pekalongan meliputi:

(a) Kawasan rawan banjir dan genangan, meliputi :

(1). Kecamatan Bojong;
(2). Kecamatan Buaran;
(3). Kecamatan Kajen;
(4). Kecamatan Karanganyar;
(5). Kecamatan Karangdadap;
(6). Kecamatan Kedungwuni;
(7). Kecamatan Kesesi;
(8). Kecamatan Siwalan;
(9). Kecamatan Sragi;

(10). Kecamatan Tirto;
(11). Kecamatan Wiradesa;
(12). Kecamatan Wonokerto; dan
(13). Kecamatan Wonopringgo.

(b) Kawasan rawan tanah longsor; meliputi :

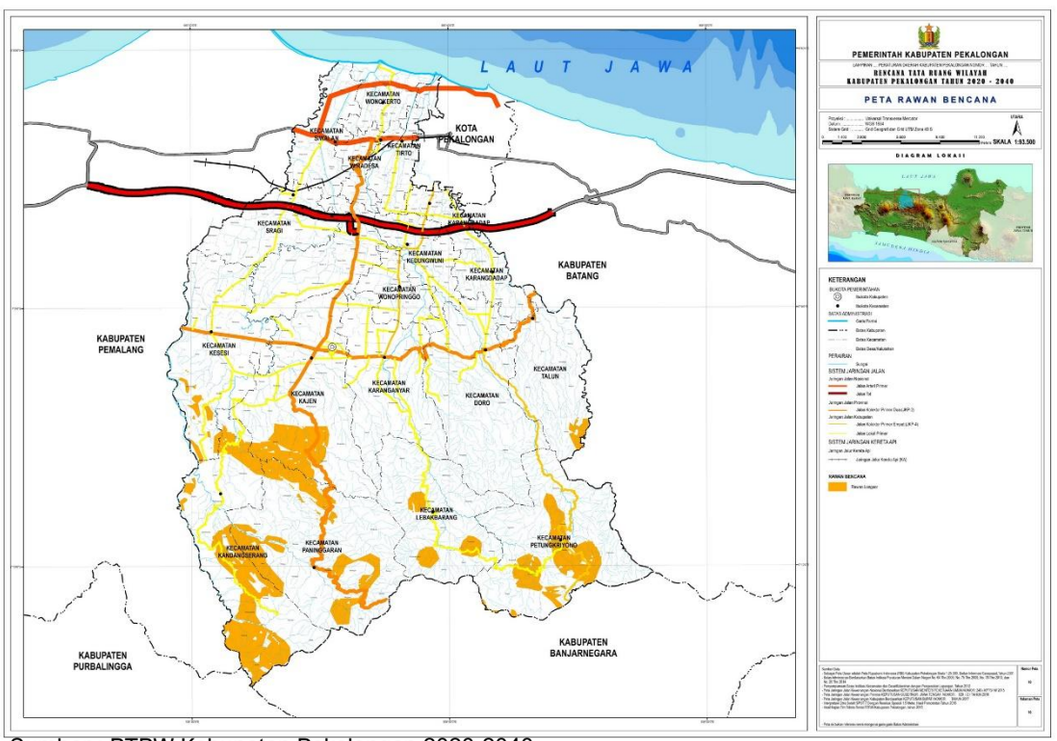
(1). **Rawan longsor perbukitan,** meliputi :
- Kecamatan Doro;
- Kecamatan Kajen;
- Kecamatan Karanganyar;
- Kecamatan Kandangserang;
- Kecamatan Kesesi;
- Kecamatan Lebakbarang;
- Kecamatan Paninggaran;
- Kecamatan Petungkriyono; dan
- Kecamatan Talun.

(2). **Rawan longsor sungai**, meliputi:
- Kecamatan Karanganyar;
- Kecamatan Kedungwuni;
- Kecamatan Kesesi;
- Kecamatan Sragi; dan
- Kecamatan Wonopringgo

(c) Kawasan rawan bencana lainnya

Kawasan rawan bencana lainnya berupa bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun peta rawan bencana Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020-2040

Gambar 2.11. Peta Rawan Bencana Kabupaten Pekalongan

(5). Kawasan Cagar Budaya

Kawasan cagar budaya dapat berupa benda, struktur, bangunan atau kawasan yang akan ditetapkan Bupati.

(6). Kawasan Ekosistem Mangrove

Kawasan ekosistem mangrove dengan luas kurang lebih 66 hektar meliputi:

(a). Kawasan muara sungai (estuari), meliputi :

(1). Kecamatan Siwalan;
(2). Kecamatan Tirto; dan
(3). Kecamatan Wonokerto.

(b). Kawasan pantai berhutan mangrove. meliputi :

(1). Kecamatan Siwalan;
(2). Kecamatan Tirto; dan
(3). Kecamatan Wonokerto

b). Kawasan Peruntukan Budidaya

Kawasan peruntukan budidaya meliputi :

(1). Kawasan hutan produksi

Kawasan hutan produksi dengan luas ± 26.264,72 hektar meliputi:

(a). Kawasan hutan produksi terbatas

Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 25.065,82 hektar meliputi :

(1). Kecamatan Doro;
(2). Kecamatan Kajen;
(3). Kecamatan Kandangserang;
(4). Kecamatan Karanganyar;
(5). Kecamatan Kesesi;
(6). Kecamatan Lebakbarang;
(7). Kecamatan Paninggaran;
(8). Kecamatan Petungkriyono; dan
(9). Kecamatan Talun

(b). Kawasan hutan produksi tetap

Kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 1.198,9 hektar meliputi:

(1). Kecamatan Bojong;
(2). Kecamatan Kandangserang;
(3). Kecamatan Karangdadap;
(4). Kecamatan Kesesi;
(5). Kecamatan Lebakbarang;
(6). Kecamatan Paninggaran; dan
(7). Kecamatan Talun.

(2). Kawasan pertanian, meliputi :

(a). Kawasan tanaman pangan

Kawasan tanaman pangan dengan luas ± 23.404 hektar meliputi :

(1). Kecamatan Bojong;
(2). Kecamatan Buaran;
(3). Kecamatan Doro;
(4). Kecamatan Kajen;
(5). Kecamatan Kandangserang;
(6). Kecamatan Karanganyar;
(7). Kecamatan Karangdadap;
(8). Kecamatan Kedungwuni;
(9). Kecamatan Kesesi;

(10). Kecamatan Lebakbarang;
(11). Kecamatan Paninggaran;
(12). Kecamatan Petungkriyono;
(13). Kecamatan Petungkriyono;
(14). Kecamatan Siwalan;
(15). Kecamatan Sragi;
(16). Kecamatan Talun;
(17). Kecamatan Tirto;
(18). Kecamatan Wiradesa;
(19). Kecamatan Wonokerto; dan
(20). Kecamatan Wonopringgo.

(b). Kawasan hortikultura

Kawasan hortikultura dengan luas kurang lebih 17.249 hektar meliputi :

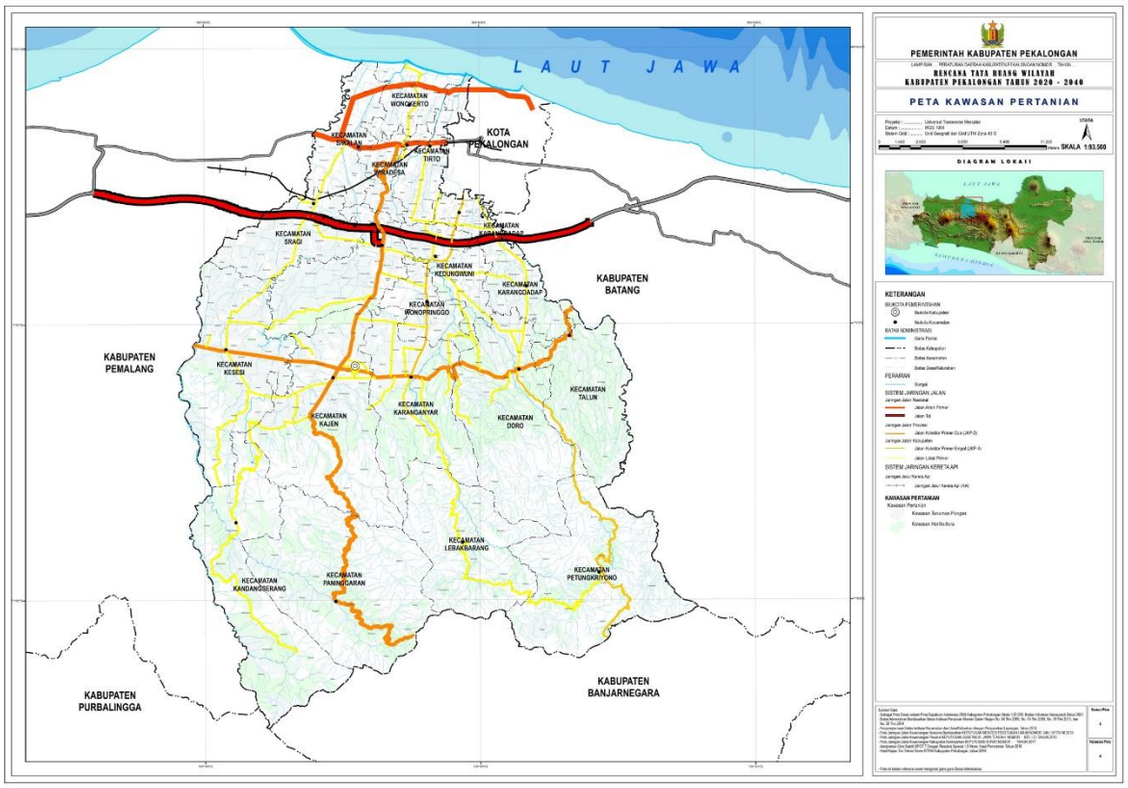
(1). Kecamatan Bojong;
(2). Kecamatan Buaran;
(3). Kecamatan Doro;
(4). Kecamatan Kajen;
(5). Kecamatan Kandangserang;
(6). Kecamatan Karanganyar;
(7). Kecamatan Karangdadap;
(8). Kecamatan Kedungwuni;
(9). Kecamatan Kesesi;
(10). Kecamatan Lebakbarang;
(11). Kecamatan Paninggaran;
(12). Kecamatan Petungkriyono;
(13). Kecamatan Sragi;
(14). Kecamatan Talun;
(15). Kecamatan Tirto;
(16). Kecamatan Wonokerto; dan
(17). Kecamatan Wonopringgo.

(c). Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan ± 22.211 hektar meliputi:

(1). Lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 19.719 hektar; dan
(2). Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 2.492 hektar.

Selengkapnya peta kawasan pertanian Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020-2040

Gambar 2.12. Peta Kawasan Pertanian Kabupaten Pekalongan

(3). Kawasan perikanan

Kawasan perikanan berupa kawasan perikanan budidaya yang meliputi :

(a). Budidaya tambak

Budidaya tambak dengan luas ± 1.120 hektar meliputi:

(1). Kecamatan Siwalan;
(2). Kecamatan Tirto; dan
(3). Kecamatan Wonokerto

(b). Budidaya air tawar

Budidaya air tawar meliputi seluruh wilayah kecamatan.

(c). Fasilitas perikanan tangkap, meliputi :

(1). Pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Perikanan Pantai beserta sarana pelelangan ikan di Kecamatan Wonokerto;
(2). Pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Pendaratan Ikan beserta sarana pelelangan ikan di Kecamatan Wonokerto; dan
(3). Peningkatan sarana dan prasarana pendaratan kapal dan/atau perahu serta sarana dan prasarana TPI berada di Kecamatan Wonokerto.

(d). Pengembangan pengolahan perikanan, meliputi:

(1). Kecamatan Karangdadap;
(2). Kecamatan Kedungwuni;
(3). Kecamatan Siwalan;
(4). Kecamatan Sragi;
(5). Kecamatan Tirto;
(6). Kecamatan Wonokerto; dan
(7). Kecamatan lainnya.

(4). Kawasan pertambangan dan energi

(a). Kawasan pertambangan, meliputi :

(1). Kawasan pertambangan mineral logam

Kawasan pertambangan mineral logam meliputi wilayah usaha pertambangan yang berada di :

- Kecamatan Doro;
- Kecamatan Kandangserang;
- Kecamatan Karanganyar;
- Kecamatan Lebakbarang;
- Kecamatan Paninggaran;
- Kecamatan Petungkriyono;
- Kecamatan Siwalan;
- Kecamatan Talun;
- Kecamatan Tirto; dan
- Kecamatan Wonokerto.

(2). Kawasan pertambangan mineral bukan logam atau batuan

Kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan meliputi wilayah usaha pertambangan yang berada di :

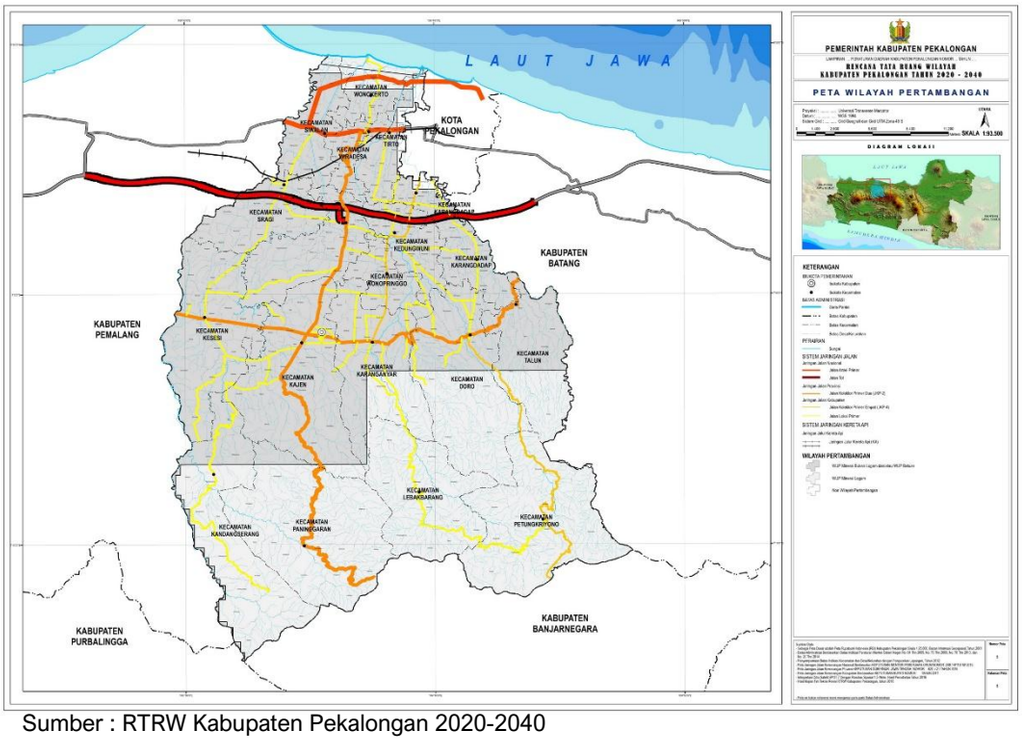
- Kecamatan Bojong;
- Kecamatan Buaran;
- Kecamatan Doro;
- Kecamatan Kajen;
- Kecamatan Kandangserang;
- Kecamatan Karanganyar;
- Kecamatan Karangdadap;
- Kecamatan Kedungwuni;
- Kecamatan Kesesi;
- Kecamatan Paninggaran;
- Kecamatan Siwalan;
- Kecamatan Sragi;
- Kecamatan Talun;
- Kecamatan Tirto;
- Kecamatan Wiradesa;
- Kecamatan Wonokerto; dan
- Kecamatan Wonopringgo.

(b). Kawasan panas bumi

Kawasan panas bumi berupa Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Dataran Tinggi Dieng, yang meliputi :

(a) Kecamatan Lebakbarang; dan
(b) Kecamatan Petungkriyono.

Selengkapnya peta wilayah pertambangan Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020-2040

Gambar 2.13. Peta Wilayah Pertambangan Kabupaten Pekalongan

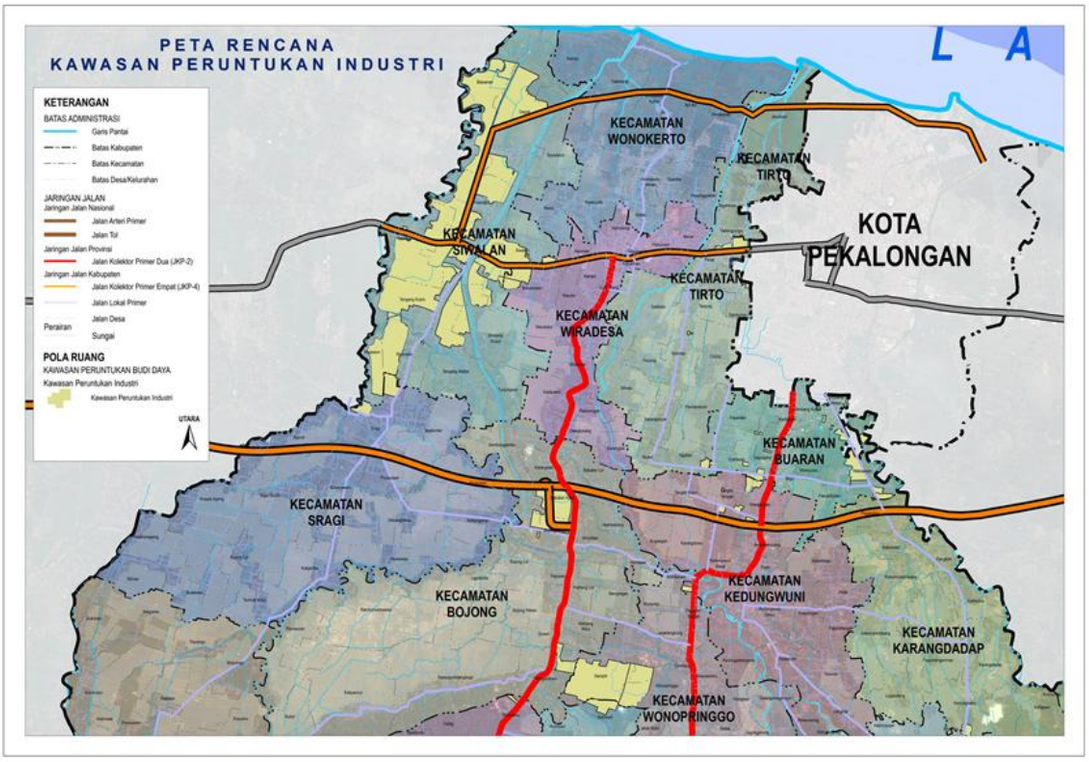
(5). Kawasan peruntukan industri

Rencana kawasan peruntukan industri dengan luas ± 1.533 hektar berada di :

(1) Kecamatan Bojong;
(2) Kecamatan Buaran;
(3) Kecamatan Doro;
(4) Kecamatan Kajen;
(5) Kecamatan Karanganyar;
(6) Kecamatan Karangdadap;
(7) Kecamatan Kedungwuni;
(8) Kecamatan Paninggaran;
(9) Kecamatan Siwalan;
(10) Kecamatan Sragi;
(11) Kecamatan Tirto;
(12) Kecamatan Wiradesa;
(13) Kecamatan Wonokerto; dan
(14) Kecamatan Wonopringgo.

Pengembangan kawasan industri berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri yang akan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Perusahaan industri besar dan perusahaan industri menengah wajib berlokasi di kawasan peruntukan industri. Perusahaan industri kecil dan/atau mikro dapat berlokasi di luar kawasan peruntukan industri atau kawasan industri dengan mempertimbangkan dampak lingkungan. Sentra industri kecil menengah yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan harus berlokasi di kawasan peruntukan industri.

Selengkapnya peta rencana peruntukan industri Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.14. Peta Rencana Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Pekalongan

(6). Kawasan pariwisata, meliputi :

(a). Pariwisata alam, meliputi :

(1). Curug Bidadari Desa Jolotigo Kecamatan Talun;
(2). Curug Cinde Lebakbarang;
(3). Curug Siwatang – Lambanggelun di Kecamatan Paninggaran;
(4). Destinasi wisata Kalipahingan di Kecamatan Paninggaran;
(5). Kabalong (Karanggondang, Limbangan dan Lolong) Karanganyar;
(6). Kandangserang (Watu Ireng, Lambur, Kandangserang, Tajur);
(7). Kawasan wisata Linggoasri;
(8). Kawasan wisata Petungkriyono;
(9). Kebun teh di Desa Kaliboja Kecamatan Paninggaran;
(10). Pantai Depok di Desa Depok Kecamatan Siwalan;
(11). Pantai Kisik di Kecamatan Wonokerto;
(12). Watubahan di Desa Lemah Abang Kecamatan Doro;
(13). Wisata Air Sigesing Desa Watugajah Kecamatan Kesesi;
(14). Wisata air sungai Pencongan; dan
(15). Obyek Wisata Alam lainnya.

(b). Pariwisata budaya

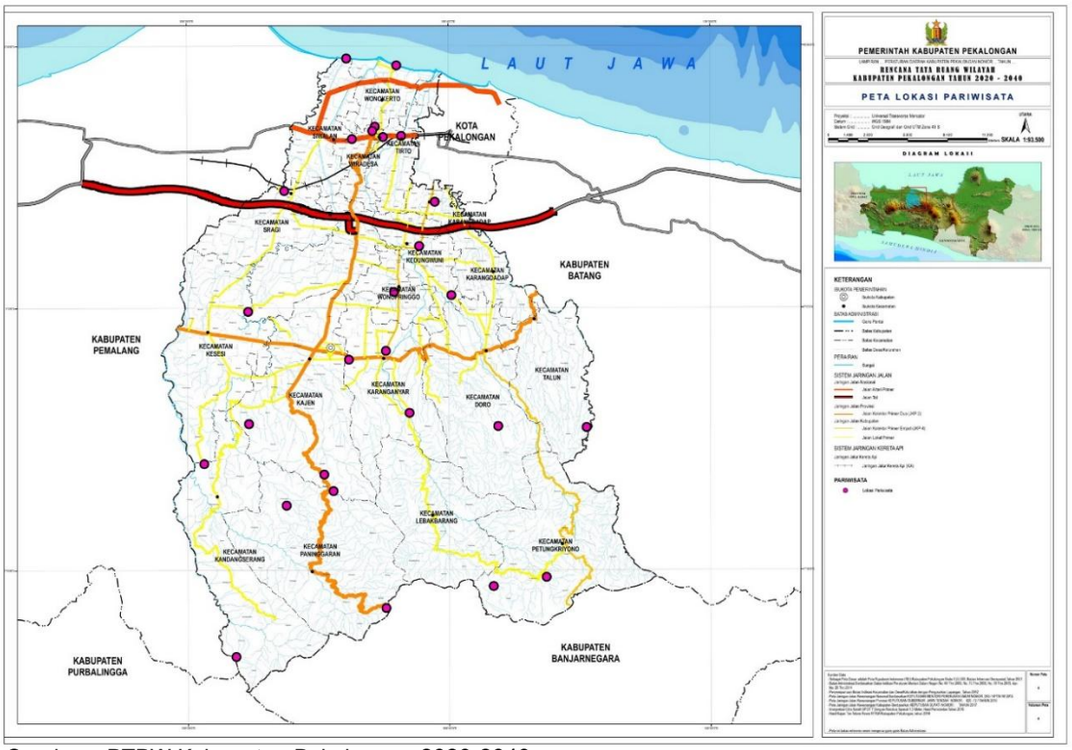
Pariwisata Budaya meliputi wisata kesenian, batik Pekalongan dan budaya lokal Kabupaten Pekalongan yang tersebar di seluruh wilayah daerah.

(c). Pariwisata buatan, meliputi :

(1). International Batik Centre (IBC) di Kecamatan Wiradesa;
(2). Kampung Batik di Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa;
(3). Kolam renang Banyu Biru di Kecamatan Wiradesa;
(4). Kolam renang Kulu Asri di Kecamatan Karanganyar;
(5). Kolam renang Langkap Indah di Kecamatan Kedungwuni;
(6). Kolam renang Prima Graha Wisata di Kecamatan Karanganyar;

(7). Pabrik Gula di Kecamatan Sragi;
(8). Pasar Grosir Pantura di Kecamatan Wiradesa;
(9). Sentra Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) Pakumbulan di Kecamatan Buaran;
(10). Sentra bordir di Kecamatan Kedungwuni;
(11). Sentra Kerajinan tempurung kelapa di Kecamatan Wonopringgo; dan
(12). Wisata buatan lainnya.

Selengkapnya peta lokasi pariwisata Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020-2040

Gambar 2.15. Peta Lokasi Pariwisata Kabupaten Pekalongan

(7). Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman dengan luas ± 15.403 hektar meliputi :

(a). Kawasan permukiman perkotaan

Kawasan permukiman perkotaan dengan luas ± 7.194 hektar meliputi :

(1). Permukiman Perkotaan Kecamatan Bojong;
(2). Permukiman Perkotaan Kecamatan Buaran;
(3). Permukiman Perkotaan Kecamatan Doro;
(4). Permukiman Perkotaan Kecamatan Kajen;
(5). Permukiman Perkotaan Kecamatan Kandangserang;
(6). Permukiman Perkotaan Kecamatan Karanganyar;
(7). Permukiman Perkotaan Kecamatan Karangdadap;
(8). Permukiman Perkotaan Kecamatan Kedungwuni;
(9). Permukiman Perkotaan Kecamatan Kesesi;
(10). Permukiman Perkotaan Kecamatan Lebakbarang;
(11). Permukiman Perkotaan Kecamatan Paninggaran;
(12). Permukiman Perkotaan Kecamatan Petungkriyono;
(13). Permukiman Perkotaan Kecamatan Siwalan;
(14). Permukiman Perkotaan Kecamatan Sragi;
(15). Permukiman Perkotaan Kecamatan Talun;

(16). Permukiman Perkotaan Kecamatan Tirto;
(17). Permukiman Perkotaan Kecamatan Wiradesa;
(18). Permukiman Perkotaan Kecamatan Wonokerto; dan
(19). Permukiman Perkotaan Kecamatan Wonopringgo.

(b). Kawasan permukiman pedesaan

Kawasan permukiman pedesaan dengan luas kurang lebih 8.209 hektar berada di seluruh wilayah daerah di luar kawasan permukiman perkotaan.

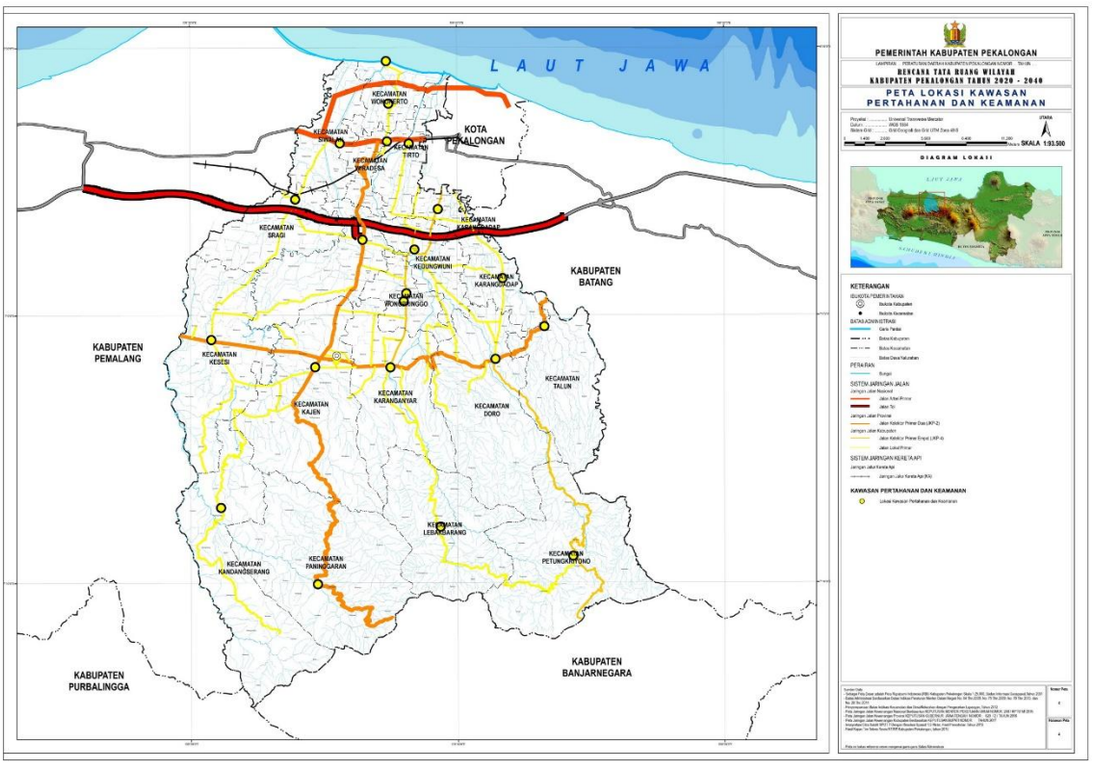
(8). Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan dengan luas ± 15 hektar meliputi :

(1) Kantor militer yang meliputi:
   (a) Kantor Komando Distrik Militer (Kodim) Kabupaten Pekalongan;
   (b) Kantor Komando Rayon Militer (Koramil) di seluruh Kecamatan; dan
   (c) Pos Angkatan Laut di Kecamatan Wonokerto.

(2) Kesatuan militer berupa Batalyon Infanteri 407 Padmakusuma Kompi Senapan C di Kecamatan Wonopringgo.

Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan lebih lanjut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dapat dilihat pada gambar berikut



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020-2040

Gambar 2.16. Peta Lokasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan Kabupaten Pekalongan

2). Rencana Struktur Ruang Wilayah

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Pekalongan, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040, meliputi :

a). Sistem Perkotaan

Sistem perkotaan berupa rencana sistem pusat pelayanan, meliputi :

(1). Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi
   (a). Kawasan Perkotaan Kajen;
   (b). Kawasan Perkotaan Wiradesa; dan

(c). Kawasan Perkotaan Kedungwuni.

(2). Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), meliputi :
(a). Kawasan Perkotaan Kecamatan Doro;
(b). Kawasan Perkotaan Kecamatan Kesesi;
(c). Kawasan Perkotaan Kecamatan Paninggaran;
(d). Kawasan Perkotaan Kecamatan Petungkriyono; dan
(e). Kawasan Perkotaan Kecamatan Sragi

(3). Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), meliputi :
(a). Desa Kandangserang Kecamatan Kandangserang;
(b). Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap;
(c). Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang; dan
(d). Desa Kalirejo Kecamatan Talun.

b). Sistem Jaringan Prasarana

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana meliputi:

(1). Sistem Jaringan Transportasi, meliputi :

(a). Sistem Jaringan Transportasi Darat, meliputi :

(1). Sistem Jaringan Jalan, meliputi :

(a). Jaringan jalan nasional

(1). Jalan arteri primer, meliputi :
(a). Ruas batas Kota Pemalang - batas Kota Pekalongan yang melewati wilayah daerah berada di:
(1). Kecamatan Siwalan;
(2). Kecamatan Wiradesa; dan
(3). Kecamatan Tirto.
(b). Jalan lingkar Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan (PETANGLONG) berada di:
(1). Kecamatan Siwalan;
(2). Kecamatan Wonokerto; dan
(3). Kecamatan Tirto

(2). Jalan tol, meliputi :
(a). ruas jalan tol Pemalang – Batang yang melewati wilayah Daerah berada di:
(1). Kecamatan Sragi;
(2). Kecamatan Bojong;
(3). Kecamatan Kedungwuni;
(4). Kecamatan Buaran; dan
(5). Kecamatan Karangdadap.
(b). Rencana jalan keluar dan masuk ruas jalan tol ruas jalan tol Pemalang – Batang berada di Kecamatan Bojong.

(b). Jaringan jalan provinsi

Jaringan jalan provinsi berupa jalan kolektor primer 2 (JKP 2) meliputi:
(1). Wiradesa - Kalibening/ Bts. Kab. Banjarnegara;
(2). Kesesi/ Batas Kab Pemalang - Kebonagung; dan
(3). Kebonagung – Wonotunggal/ Batas Kab. Batang

(c). Jaringan jalan kabupaten

Jaringan jalan kabupaten berupa jalan lokal primer, jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan yang ditetapkan oleh Bupati.

(d). Jalan desa

Jalan desa berupa rencana peningkatan dan pengembangan prasarana jalan pedesaan di seluruh wilayah kecamatan.

(e). Jalan khusus

Jalan khusus berupa pengembangan jalan dan fasilitasnya dari dan menuju:

(1). kawasan industri;
(2). kawasan pertambangan;
(3). kawasan wisata; dan
(4). kawasan lainnya

(f). Terminal penumpang, meliputi :

(1). Terminal tipe B berada di Kecamatan Kajen;
(2). Terminal tipe C berada di Kecamatan Wiradesa;
(3). Terminal tipe C berada di Kecamatan Kedungwuni;
(4). Terminal tipe C berada di Kecamatan Doro;
(5). Terminal tipe C berada di Kecamatan Kesesi;
(6). Terminal tipe C berada di Kecamatan Sragi;
(7). Terminal tipe C berada di Kecamatan Karanganyar;
(8). Terminal tipe C berada di Kecamatan Lebakbarang;
(9). Terminal tipe C berada di Kecamatan Petungkriyono;
(10). Terminal tipe C berada di Kecamatan Kandangserang; dan
(11). Terminal tipe C berada di Kecamatan Paninggaran.

(g). Terminal barang

Terminal barang berupa pembangunan dan peningkatan prasarana bongkar muat barang berada di :

(1). Kecamatan Siwalan;
(2). Kecamatan Sragi; dan
(3). Kecamatan Wiradesa

(h). Pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum massal

Pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum massal berupa pengembangan angkutan bus perkotaan yang menghubungkan Kajen – Wiradesa – Pekalongan dan Kajen – Kedungwuni – Pekalongan (Kawasan Petanglong).

(2). Sistem jaringan kereta api, meliputi :

(a). jaringan jalur kereta api; meliputi :

(1). Jaringan jalur kereta api umum, meliputi :

(a). Jaringan jalur kereta api antarkota, meliputi :

- jalur kereta api cepat Jakarta – Surabaya;
- jalur Utara menghubungkan Jakarta – Semarang – Surabaya;
- kereta api regional Semarang – Tegal – Brebes; dan
- peningkatan kecepatan kereta api koridor Jakarta – Surabaya.

(b). Jaringan jalur kereta api perkotaan

Jaringan jalur kereta api perkotaan berupa jalur Petanglong yang menghubungkan Pekalongan – Kedungwuni – Kajen dan/atau Pekalongan – Wiradesa– Kajen sesuai hasil studi kelayakan dan peraturan perundang-undangan.

(2). Jaringan jalur kereta api khusus

Jaringan jalur kereta api khusus dari dan menuju :

(a). kawasan industri;
(b). kawasan wisata; dan
(c). kawasan lainnya.

(b). Stasiun kereta api, meliputi :

(1). Stasiun penumpang

Stasiun penumpang berupa Stasiun Sragi di Kecamatan Sragi.

(2). Stasiun barang

Stasiun barang sesuai hasil studi kelayakan dan peraturan perundang-undangan.

(b). Sistem Jaringan Transportasi Laut, meliputi :

(1). Pelabuhan umum

Pelabuhan umum berupa Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kecamatan Wonokerto.

(2). Pelabuhan khusus/ terminal khusus

Pelabuhan khusus/terminal khusus dilaksanakan sesuai hasil studi kelayakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3). Pelabuhan perikanan

Pelabuhan perikanan berada di Kecamatan Wonokerto meliputi :

(a). Pelabuhan Perikanan Jambean; dan

(b). Pelabuhan Perikanan Wonokerto.

(4). Alur pelayaran

Alur pelayaran berupa alur-pelayaran keluar masuk pelabuhan yang berada di Kecamatan Wonokerto.

(c). Sistem Jaringan Transportasi Udara, meliputi :

(1). Rencana pembangunan dan pengembangan landasan helikopter (*helipad*) sesuai kebutuhan di kawasan perkotaan;

(2). Rencana pembangunan dan pengembangan bandar udara sesuai hasil studi kelayakan dan peraturan perundang-undangan; dan

(3). Rencana pengembangan sarana dan prasarana transportasi udara lainnya sesuai perkembangan teknologi berdasarkan hasil studi kelayakan dan peraturan perundang-undangan.

(2). Sistem Jaringan Energi, meliputi :

(a). Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi

Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi berupa rencana sistem jaringan prasarana pipa gas. Rencana sistem jaringan prasarana pipa gas merupakan pengembangan jaringan pipa gas Cirebon – Semarang– Bangkalan oleh Pemerintah yang melalui Kecamatan Siwalan dan/atau Kecamatan Sragi – Kecamatan Wiradesa –Kecamatan Tirto.

(b). Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi :

(1). Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya, meliputi :

(a). Pengembangan energi mikrohidro dan minihidro berada di :

(1). Kecamatan Doro;

(2). Kecamatan Kajen;

(3). Kecamatan Kandangserang;

(4). Kecamatan Karanganyar;

(5). Kecamatan Kesesi;

(6). Kecamatan Lebakbarang;

(7). Kecamatan Paninggaran;

(8). Kecamatan Petungkriyono;

(9). Kecamatan Talun; dan Kecamatan lain yang memenuhi syarat berdasarkan hasil studi kelayakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b). Pengembangan energi surya di seluruh wilayah daerah;
(c). Pengembangan energi angin di seluruh wilayah daerah; dan
(d). Rencana pengembangan energi alternatif dengan pemanfaatan sumber daya terbarukan di seluruh wilayah daerah.

(2). Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, meliputi :

(a) jaringan transmisi tenaga listrik, meliputi :

(1). jaringan SUTET, melalui:

(a). Kecamatan Sragi – Kecamatan Bojong – Kecamatan Kedungwuni – Kecamatan Buaran – Kecamatan Karangdadap; dan
(b). Kecamatan Kesesi – Kecamatan Sragi – Kecamatan Bojong – Kecamatan Wonopringgo – Kecamatan Kedungwuni dan Kecamatan Karangdadap.

(2). Jaringan SUTT melalui Kecamatan Sragi – Kecamatan Siwalan – Kecamatan Wiradesa – Kecamatan Tirto.

(b) Jaringan distribusi tenaga listrik meliputi :

(1) Pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) di seluruh daerah; dan
(2) Pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dan Saluran Kabel Tegangan Rendah (SKTR) di seluruh daerah.

(c) Rencana gardu induk berada di Kecamatan Siwalan dan/atau kecamatan lain sesuai hasil studi kelayakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(d) Rencana pembangunan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) daya cepat/*fast charging* di kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan di seluruh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3). Sistem Jaringan Telekomunikasi, meliputi :

(a). Jaringan tetap, meliputi :

(1). Pengembangan sistem prasarana jaringan kabel telekomunikasi
Pengembangan sistem prasarana jaringan kabel telekomunikasi direncanakan sudah melayani seluruh ibukota Kecamatan.
(2). Pembangunan saluran kabel telekomunikasi.
Pembangunan saluran kabel telekomunikasi direncanakan di seluruh wilayah daerah. Pembangunan kabel telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b). Jaringan bergerak, meliputi :

(1). Jaringan bergerak seluler, meliputi :

(a) pengembangan cakupan dan kualitas layanan dilakukan melalui pengaturan lokasi dan ketentuan teknis layanan jaringan nirkabel; dan
(b) pembangunan menara telekomunikasi (menara BTS) mengarahkan penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2). Jaringan bergerak satelit berupa pengembangan jaringan layanan internet pada fasilitas umum.

(4). Sistem Jaringan Sumber Daya Air, meliputi :

(a). Sumber air

Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya air WS Pemali-Comal. Rencana pengembangan

sistem jaringan sumber daya air disinkronkan dengan pola dan rencana PSDA WS Pemali-Comal. Sumber air meliputi :

(1). Sumber air permukaan, meliputi :

(a). Sungai;

Sungai pada wilayah sungai meliputi :

(1). DAS Comal;
(2). DAS Kupang;
(3). DAS Sengkarang;
(4). DAS Sragi Baru; dan
(5). DAS Sragi Lama

(b). Mata air, berada di

(1). Kecamatan Bojong;
(2). Kecamatan Doro;
(3). Kecamatan Kajen;
(4). Kecamatan Kandangserang;
(5). Kecamatan Karanganyar;
(6). Kecamatan Kesesi;
(7). Kecamatan Lebakbarang;
(8). Kecamatan Paninggaran;
(9). Kecamatan Petungkriyono; dan
(10). Kecamatan Talun

(c). Tampungan air alami, dan

(d). Tampungan air buatan, meliputi :

(1) Tampungan air buatan berupa embung, meliputi :

(a). Embung Bangunadi di Kecamatan Doro;
(b). Embung Benteng-Sungai Silempeng di Kecamatan Siwalan;
(c). Embung Brondong di Kecamatan Kesesi;
(d). Embung Buangan Buntu di Kecamatan Kesesi;
(e). Embung Jogoloyo di Kecamatan Talun;
(f). Embung Kalijoyo di Kecamatan Kajen;
(g). Embung Karangmoncol di Kecamatan Kesesi;
(h). Embung Karangmulyo di Kecamatan Kesesi;
(i). Embung Kulu di Kecamatan Karanganyar;
(j). Embung Limbangan di Kecamatan Karanganyar;
(k). Embung Pamutih di Kecamatan Kajen;
(l). Embung Pododadi di Kecamatan Karanganyar;
(m). Embung Semampir di Kecamatan Kesesi;
(n). Embung Siangkreng di Kecamatan Karanganyar;
(o). Embung Sikedok di Kecamatan Talun;
(p). Embung Sudikampir di Kecamatan Karanganyar;
(q). Embung Sumilir di Kecamatan Talun;
(r). Embung Wangandowo di Kecamatan Bojong; dan
(s). Embung Wisnu di Kecamatan Karanganyar.

(2) Tampungan air buatan berupa waduk berupa rencana pembangunan waduk di :

(1) Kecamatan Kandangserang,
(2) Kecamatan Paninggaran,
(3) Kecamatan Lebakbarang,
(4) Kecamatan Petungkriyono,
(5) Kecamatan Doro,
(6) Kecamatan Talun,

(7) Kecamatan Kajen; dan
(8) Kecamatan Kesesi sesuai hasil studi kelayakan dan peraturan perundang-undangan

(2). Sumber air tanah pada cekungan air tanah (CAT)
Sumber air tanah pada cekungan air tanah (CAT) berupa Cekungan Air Tanah Pekalongan – Pemalang.

(b). Prasarana sumber daya air, meliputi :

(a) Sistem jaringan irigasi, meliputi :

(1) Sistem Jaringan Irigasi Primer, yang meliputi :

(a) Daerah irigasi kewenangan Pemerintah Pusat yang berada di :
(1) Daerah Irigasi Kaliwadas;
(2) Daerah Irigasi Pesantren Kletak;
(3) Daerah Irigasi Kupang Krompeng; dan
(4) Daerah Irigasi Sragi.

(b) Daerah irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi:
(1) Daerah Irigasi Asem Siketek/Kesetu;
(2) Daerah Irigasi Padurekso;
(3) Daerah Irigasi Sudikampir; dan
(4) Daerah Irigasi Tapak Menjangan.

(c) Daerah irigasi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi 339 daerah irigasi.

(2) Sistem Jaringan Irigasi Sekunder dan Tersier berada di seluruh wilayah daerah

(b) sistem jaringan pengendalian banjir, berupa **:** sistem pengendalian daya **rusak** air meliputi :

(1) Pembangunan tanggul dan long storage di Kecamatan Siwalan, Kecamatan Wonokerto, dan Kecamatan Tirto;
(2) Perbaikan teknis prasarana drainase dengan cara normalisasi saluran, rehabilitasi saluran, penambahan saluran baru, dan pembangunan bangunan-bangunan dan bangunan penunjang prasarana drainase;
(3) Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase wilayah kabupaten dan rencana penanganan kawasan rawan banjir;
(4) Pengendalian Banjir Sistem Sungai Kupang Kabupaten Pekalongan;
(5) Pengendalian Banjir Sistem Sungai Sragi Lama dan Sragi Baru Kabupaten Pekalongan;
(6) Pengendalian Banjir Sistem Sungai Sengkarang Kabupaten Pekalongan; dan
(7) Penyempurnaan Sistem Banjir dan Rob Kabupaten Pekalongan.

(c) Jaringan air baku untuk air bersih, meliputi :

(1) Pemanfaatan secara optimal dan proporsional sumber mata air, meliputi:
(a) Kecamatan Bojong;
(b) Kecamatan Doro;
(c) Kecamatan Kajen;
(d) Kecamatan Kandangserang;
(e) Kecamatan Karanganyar;
(f) Kecamatan Kesesi;
(g) Kecamatan Lebakbarang;
(h) Kecamatan Paninggaran;
(i) Kecamatan Petungkriyono; dan
(j) Kecamatan Talun.

(2) Pengendalian penggunaan air tanah dalam meliputi :
(a) Kecamatan Bojong;
(b) Kecamatan Buaran;
(c) Kecamatan Kedungwuni;
(d) Kecamatan Siwalan;
(e) Kecamatan Sragi;
(f) Kecamatan Tirto;
(g) Kecamatan Wiradesa;
(h) Kecamatan Wonokerto; dan
(i) Kecamatan Wonopringgo.

(3) Pengawetan air melalui pengembangan fasilitas resapan air meliputi:
(a) Kecamatan Bojong;
(b) Kecamatan Doro;
(c) Kecamatan Kajen;
(d) Kecamatan Kandangserang;
(e) Kecamatan Karanganyar;
(f) Kecamatan Karangdadap;
(g) Kecamatan Kesesi;
(h) Kecamatan Lebakbarang;
(i) Kecamatan Paninggaran;
(j) Kecamatan Petungkriyono; dan
(k) Kecamatan Talun.

(4) Pemanfaatan air hujan melalui teknologi pemanenan air hujan (*rainharvesting*) di seluruh wilayah Daerah

(d) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna

Jaringan air bersih ke kelompok pengguna meliputi pengembangan jaringan perpipaan dan non perpipaan pada wilayah yang rawan air bersih di seluruh wilayah daerah.

(5). Sistem Jaringan Prasarana Lainnya, meliputi :

(a). Sistem penyediaan air minum, meliputi :

(1). Jaringan perpipaan, meliputi :

(a). pengembangan prasarana jaringan perpipaan air minum, meliputi :
- Penambahan kapasitas dan revitalisasi sambungan rumah (SR) berada di seluruh kecamatan;
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Petanglong; dan
- Penambahan kapasitas dan revitalisasi jaringan di seluruh wilayah.

(b). Peningkatan kualitas air baku menjadi air minum

Peningkatan kualitas air baku menjadi air minum berupa pembangunan fasilitas pengolahnya beserta kelengkapan pendukungnya.

(2). Bukan jaringan perpipaan

Bukan jaringan perpipaan dilakukan pada wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan meliputi :

(a). Penggalian atau pemanfaatan air permukaan;

(b). Pengeboran air tanah secara terkendali dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan; dan

(c). Pengolahan air payau di wilayah sekitar pantai.

(b). Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), meliputi :

(1). Pengembangan dan peningkatan instalasi pengolahan air limbah industri;
Pengembangan dan peningkatan instalasi pengolahan limbah industri berupa pembangunan instalasi pengolahan limbah untuk industri besar, menengah dan kecil.

(2). Pengembangan dan peningkatan instalasi pengolahan limbah domestik terpadu di kawasan perkotaan, meliputi :

- Pengembangan instalasi pengolahan lumpur tinja di wilayah Daerah sesuai hasil studi kelayakan dan peraturan perundang-undangan; dan
- Pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja berbasis masyarakat dan rumah tangga perkotaan

(3). Pengembangan dan peningkatan instalasi pengolahan limbah domestik terpadu di kawasan pedesaan, meliputi :

- Peningkatan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan pemanfaatan hasil pengolahannya bagi sumber energi alternatif dan pupuk organik; dan
- Pengembangan sistem pengolahan limbah rumah tangga pedesaan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna.

(4). Pengelolaan barang bekas, meliputi :

- Pengaturan kegiatan pengumpulan dan pemilahan barang bekas yang berada di kawasan permukiman;
- Pembinaan kepada masyarakat pelaku usaha pengumpulan dan pemilahan barang bekas; dan
- Pengawasan kegiatan pengumpulan dan pemilahan barang bekas**.**

(c). Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) berupa pembangunan TPS limbah B3 di seluruh wilayah sesuai studi kelayakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(d). Sistem jaringan persampahan, meliputi :

(1). Rencana lokasi TPA, meliputi :

(a). Pembangunan dan pengembangan TPA dan/atau TPA Regional berada di :

- Kecamatan Karangdadap; dan/atau
- Lokasi lainnya yang berada di wilayah Daerah yang memenuhi syarat secara teknis maupun non teknis berdasarkan studi kelayakan dan peraturan perundang-undangan;

(b). Pengelolaan sampah di lokasi TPA dan/atau TPA Regional diarahkan menggunakan pendekatan *sanitary landfill*.

(2). Rencana lokasi TPS
Rencana lokasi TPS dan/atau TPST Regional di seluruh wilayah daerah dengan sistem pengelolaan TPS 3R.

(3). Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga; dan
Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga melalui pendekatan *reduce, reuse*, dan *recycle* (3R).

(4). Rencana pengelolaan sampah pedesaan
Rencana pengelolaan sampah pedesaan melalui pengelolaan swadaya masyarakat.

(e). Sistem Jaringan Drainase, meliputi :

(1). Pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan di Daerah khususnya pada kawasan permukiman padat dan kumuh, serta kawasan sekitar pasar tradisional;

(2). Pembangunan dan peningkatan saluran drainase kanan-kiri jalan meliputi:
  (a). ruas jalan arteri;
  (b). ruas jalan kolektor;
  (c). ruas jalan lokal; dan
  (d). ruas jalan lingkungan.
(3). Peningkatan saluran primer, saluran sekunder dan saluran tersier di seluruh Kawasan permukiman perkotaan dan permukiman pedesaan.
(4). Normalisasi saluran sungai sebagai saluran akhir yang meliputi sungai di seluruh wilayah Daerah.
(5). Pembangunan fasilitas resapan dan/atau kolam retensi di kawasan yang sulit dialirkan ke saluran drainase meliputi :
  (a). Kecamatan Buaran;
  (b). Kecamatan Kedungwuni;
  (c). Kecamatan Siwalan;
  (d). Kecamatan Sragi;
  (e). Kecamatan Tirto;
  (f). Kecamatan Wiradesa; dan
  (g). Kecamatan Wonokerto.

(f). Sistem Evakuasi Bencana, meliputi :

(1). Jalur Evakuasi, meliputi :
  (a). Pengembangan jalur evakuasi bencana banjir berupa jalan-jalan desa pada lokasi yang lebih tinggi berada di :
    (1). Kecamatan Bojong;
    (2). Kecamatan Buaran;
    (3). Kecamatan Kajen;
    (4). Kecamatan Karangdadap;
    (5). Kecamatan Kedungwuni;
    (6). Kecamatan Kesesi;
    (7). Kecamatan Siwalan;
    (8). Kecamatan Sragi;
    (9). Kecamatan Tirto;
    (10). Kecamatan Wiradesa; dan
    (11). Kecamatan Wonokerto.
  (b). Pengembangan jalur evakuasi bencana tanah longsor berupa ruas jalan yang ada atau ruas jalan darurat menuju ruang evakuasi berada di :
    (1). Kecamatan Doro;
    (2). Kecamatan Kajen;
    (3). Kecamatan Kandangserang;
    (4). Kecamatan Karanganyar;
    (5). Kecamatan Lebakbarang;
    (6). Kecamatan Paninggaran;
    (7). Kecamatan Petungkriyono; dan
    (8). Kecamatan Talun.
  (c). Pengembangan jalur evakuasi bencana gelombang pasang dan abrasi berupa pengembangan jalan desa yang berada di kawasan yang memiliki pantai berada di:
    (1). Kecamatan Siwalan;
    (2). Kecamatan Tirto; dan
    (3). Kecamatan Wonokerto.

(2). Ruang Evakuasi

Ruang evakuasi berada di seluruh kecamatan yang meliputi :

(a). lapangan;
(b). stadion;
(c). taman publik;
(d). bangunan rumah;
(e). bangunan kantor pemerintah;
(f). bangunan fasilitas sosial;
(g). bangunan fasilitas umum; dan
(h). ruang/bangunan lainnya.

(3). Lahan relokasi, meliputi :

Lahan relokasi dilakukan apabila lokasi bencana tidak dapat lagi dimanfaatkan. Penetapan lahan relokasi dilakukan oleh Bupati dengan pertimbangan meliputi:

(a). Bukan merupakan kawasan lindung;
(b). Bukan bagian dari kawasan yang rawan terhadap bencana; dan
(c). Memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang dipindahkan.

c. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan hidup itu sendiri adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/ atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Dalam proses perhitungan daya tampung dan daya dukung lahan dapat diketahui berdasarkan hasil analisis kemampuan lahan Kabupaten Pekalongan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang.

Kemampuan lahan menggambarkan kemampuan sebuah wilayah untuk dilakukan pembangunan. Kemampuan lahan juga digunakan sebagai dasar arahan pemanfaatan ruang untuk pertanian, ketinggian bangunan, tutupan lahan dan pemanfaatan air baku. Kemampuan lahan semakin tinggi menggambarkan sebuah wilayah mudah dan memiliki keamanan untuk dilakukan pembangunan. Adapun kriteria kemampuan lahan di Kabupaten Pekalongan berdasarkan hasil pembobotan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10.
Klasifikasi Kelas Kemampuan Lahan

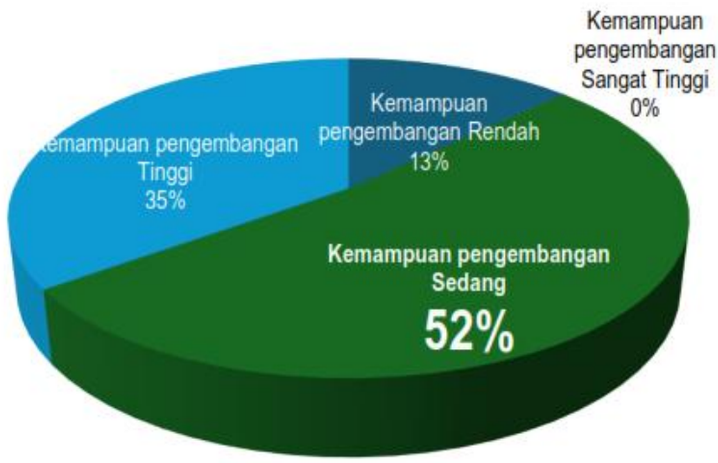
TOTAL NILAI	KELAS KEMAMPUAN LAHAN	KLASIFIKASI PENGEMBANGAN
32-58	Kelas a	Klasifikasi Pengembangan Sangat Rendah
59-83	Kelas b	Klasifikasi Pengembangan Rendah
84-109	Kelas c	Klasifikasi Pengembangan Sedang
110-134	Kelas d	Klasifikasi Pengembangan Agak Tinggi
135-160	Kelas e	Klasifikasi Pengembangan Sangat Tinggi

Sumber: Permen PU Nomor 20/PRT/M/2007

Tabel 2.11.
Kemampuan Lahan Kabupaten Pekalongan

KECAMATAN	LUAS KEMAMPUAN PENGEMBANGAN (Ha)				JUMLAH (Ha)
	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI	
Bojong	0	1.827,48	2.481,98	0	4.309,47
Buaran	0	60,16	845,76	0	905,92
Doro	911,37	5.213,99	1.587,10	0	7.712,46
Kajen	521,63	5.010,25	3.033,06	0	8.564,94
Kandangserang	2.605,66	4.729,77	295,37	0	7.630,80
Karanganyar	182,09	3.297,87	2.287,65	0	5.767,61
Karangdadap	0	304,25	1.844,35	2,32	2.150,93
Kedungwuni	0	301,64	2.004,73	0	2.306,36
Kesesi	110,20	3.460,35	3.311,93	0	6.882,48
Lebakbarang	1.562,42	4.712,22	36,65	0	6.311,29
Paninggaran	2.410,54	7.021,16	339,55	0	9.771,26
Petungkriyono	2.976,39	5.305,66	25,70	0	8.307,75
Siwalan	0	252,43	2.542,14	0	2.794,57
Sragi	0	1.318,24	2.095,61	0	3.413,85
Talun	231,99	2.970,52	1.770,46	4,22	4.977,19
Tirto	0	98,12	1.940,53	0	2.038,65
Wiradesa	0	25,62	1.313,30	0	1.338,92
Wonokerto	0	121,70	1.919,64	0	2.041,34
Wonopringgo	0	549,28	1.516,41	0	2.065,68
Jumlah	**11.512,29**	**46.580,71**	**31.191,93**	**6,54**	**89.291,47**

Sumber: Analisis Penyusun, 2024



Gambar 2.17. Grafik Kemampuan Lahan Kabupaten Pekalongan

Berdasarkan hasil pembobotan kemampuan lahan diatas, kemampuan lahan di Kabupaten Pekalongan didominasi dengan kemampuan lahan pengembangan sedang dan kemampuan pengembangan lahan tinggi dengan luasan masing-masing sebesar 46.580,71 Ha dan 31.191,93 Ha atau sebesar 52% dan 35% dari total luas Kabupaten Pekalongan. Kemampuan pengembangan sedang dapat diartikan bahwa lahan tersebut berpotensi untuk dikembangkan, akan tetapi juga perlu untuk mempertimbangkan syarat-syarat dan batasan tertentu terutama apabila terdapat wilayah yang memiliki nilai kemampuan lahan rendah. Kecamatan yang berpotensi tinggi untuk pengembangan yakni Kecamatan Paninggaran dengan luas 7.021,16 Ha.

1). Daya Dukung Lahan Bangunan

Daya dukung lahan bangunan merupakan konsep penting dalam perencanaan tata ruang, yang menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk mendukung pembangunan bangunan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan atau mengancam keberlanjutan pembangunan. Analisis daya dukung lahan digunakan untuk menilai sejauh mana lahan dapat dimanfaatkan sebagai area bangunan berdasarkan karakteristik fisik, ketersediaan ruang, serta jumlah penduduk yang akan ditampung. Perhitungan Daya Dukung Lahan Bangunan (DDLB) dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) digunakan untuk menilai kemampuan ruang wilayah dalam menampung aktivitas pembangunan bangunan secara berkelanjutan tanpa melampaui ambang batas pemanfaatan lahan yang diperkenankan.

DDLB dihitung dengan membandingkan potensi maksimum lahan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan terbangun dengan luas lahan yang telah dimanfaatkan sebagai lahan terbangun. Berdasarkan Pedoman SK MENLHK 297/2019, perhitungan DDLB menggunakan rumus sebagai berikut:.

$$\textbf{DDLB} = \frac{\alpha \text{ x } Lw}{Ltb}, \text{ di mana } LTb = LB + LTp$$

Keterangan :

Lw : Luas Wilayah (Ha)

A : Koefisien luas lahan terbangun maksimal (70% untuk lahan perkotaan dan 30% untuk RTH, sedangkan untuk pedesaan menggunakan asumsi 50%)

LTb : Luas Lahan Terbangun (Ha)

LB : Luas lahan bangunan (Ha)

LTp : Luas lahan untuk infrastruktur (diasumsikan 20% dari luas bangunan)

Dengan hasil perhitungan DDLB diinterpretasikan sebagai berikut:

DDLB < 1 : Daya Dukung Lahan Terbangun terlampaui atau buruk

DDLB = 1 : Daya Dukung Lahan Terbangun bersyarat atau sedang

DDLB > 1 : Daya Dukung Lahan Terbangun baik

Berdasarkan hasil analisis, Daya Dukung Lahan Bangunan (DDLB) Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 dengan target di Tahun 2045, menyajikan analisis yang lebih komprehensif yang juga memuat variabel penyusunnya yaitu luas wilayah, luas lahan terbangun (LTb), serta status daya dukung pada masing-masing kecamatan. Berdasarkan tabel tersebut, penurunan nilai DDLB dipengaruhi oleh peningkatan luas lahan terbangun yang berdampak pada semakin menurunnya rasio antara kapasitas lahan (yang ditentukan oleh koefisien α dan luas wilayah) terhadap kebutuhan ruang terbangun. Kondisi ini mengindikasikan meningkatnya tekanan pemanfaatan ruang dan potensi keterlampauan daya dukung lahan bangunan, khususnya pada kecamatan dengan laju alih fungsi lahan yang relatif tinggi. Oleh karena itu, upaya pengendalian yang dapat dilakukan meliputi penguatan pengendalian pemanfaatan ruang, pembatasan perluasan lahan terbangun pada wilayah dengan status DDLB bersyarat dan terlampaui, serta perlindungan lahan berfungsi lindung dan pertanian pangan berkelanjutan guna menjaga keseimbangan antara kapasitas lahan dan kebutuhan pembangunan jangka panjang

Tabel 2.12.
Daya Dukung Lahan Bangunan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2045

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (HA)	DDLB 2024			DDLB 2045		
			LTB	DDLB	KET	LTB	DDLB	KET
1	Kecamatan Bojong	4.309,47	1.249,03	2,42	BERSYARAT	1.594,53	1,89	BERSYARAT
2	Kecamatan Buaran	905,83	556,24	1,14	BERSYARAT	655,97	0,97	TERLAMPAUI
3	Kecamatan Doro	7.712,46	699,17	5,52	AMAN	744,60	5,18	AMAN
4	Kecamatan Kajen	8.564,94	1.206,48	4,97	AMAN	1.881,91	3,19	AMAN
5	Kecamatan Kandangserang	7.630,80	389,42	9,80	AMAN	387,84	9,84	AMAN
6	Kecamatan Karanganyar	5.767,61	858,92	3,36	AMAN	1.023,37	2,82	BERSYARAT
7	Kecamatan Karangdadap	2.150,93	783,27	1,37	BERSYARAT	902,78	1,19	BERSYARAT
8	Kecamatan Kedungwuni	2.306,36	1.344,49	1,20	BERSYARAT	1.595,56	1,01	BERSYARAT
9	Kecamatan Kesesi	6.882,48	998,07	3,45	AMAN	1.244,93	2,76	BERSYARAT
10	Kecamatan Lebakbarang	6.311,29	115,10	27,42	AMAN	128,94	24,47	AMAN
11	Kecamatan Paninggaran	9.771,26	375,18	13,02	AMAN	396,00	12,34	AMAN
12	Kecamatan Petungkriyono	8.307,75	108,61	38,25	AMAN	122,84	33,81	AMAN
13	Kecamatan Siwalan	2.794,57	833,04	2,35	BERSYARAT	1.355,57	1,44	BERSYARAT
14	Kecamatan Sragi	3.413,85	1.084,87	1,57	BERSYARAT	1.279,03	1,33	BERSYARAT
15	Kecamatan Talun	4.977,18	452,26	5,50	AMAN	461,22	5,40	AMAN
16	Kecamatan Tirto	2.038,65	990,38	1,44	BERSYARAT	1.170,86	1,22	BERSYARAT
17	Kecamatan Wiradesa	1.338,92	822,16	1,14	BERSYARAT	936,15	1,00	BERSYARAT
18	Kecamatan Wonokerto	2.041,34	524,50	1,95	BERSYARAT	772,27	1,32	BERSYARAT
19	Kecamatan Wonopringgo	2.065,68	719,52	1,44	BERSYARAT	1.126,38	0,92	TERLAMPAUI
Kabupaten Pekalongan		**89.291,37**	**14.110,72**	**3,16**	**AMAN**	**17.780,76**	**2,51**	**BERSYARAT**

Sumber: Analisis Penyusun 2025 (Pedoman SK MENLHK 297/2019)

2). Daya Dukung Fungsi Lindung

Daya dukung fungsi lindung merujuk pada kemampuan suatu kawasan yang memiliki fungsi lindung, seperti hutan lindung, daerah resapan air, atau Kawasan konservasi, dalam menjalankan peran ekologisnya untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia. Secara teknis, nilai DDL diperoleh dari perbandingan antara total luas guna lahan yang telah diberi bobot koefisien lindung (α) terhadap luas wilayah keseluruhan (LW). Setiap jenis guna lahan (Lg_n) dikalikan dengan koefisien lindungnya masing-masing, yang mencerminkan kontribusi relatif guna lahan tersebut dalam mendukung fungsi lindung, seperti perlindungan tanah, air, keanekaragaman hayati, dan pengendalian bencana. Penjumlahan seluruh hasil perkalian tersebut kemudian dibagi dengan luas wilayah untuk menghasilkan nilai indeks DDL yang bersifat proporsional dan terstandar.

$$\mathbf{DDL} = \frac{\Sigma\, \mathbf{Lgl1} * \boldsymbol{\alpha 1} + \mathbf{Lgl2} * \boldsymbol{\alpha 2} + \mathbf{Lgl3} * \boldsymbol{\alpha 3} + \cdots + \mathbf{Lgln} * \boldsymbol{\alpha n}}{\mathbf{LW}},$$

Keterangan:
Lw : Luas Wilayah (Ha)
α : Koefisien lindung untuk guna lahan
Lg_n : Luas guna lahan jenis n (Ha)

Berdasarkan hasil analisis, pada tahun 2024, daya dukung fungsi lindung masih berada pada kategori relative baik, namun dalam proyeksi tahun 2045 terjadi pergeseran ke kategori sedang. Penurunan ini berlangsung hampir merata di seluruh kecamatan, menandakan bahwa tekanan terhadap fungsi lindung tidak hanya bersifat lokal, tetapi telah menjadi fenomena wilayah secara keseluruhan. Meskipun terdapat satu kecamatan yang menunjukkan peningkatan, perubahan tersebut belum cukup signifikan untuk mengimbangi tren penurunan secara agregat. Secara keseluruhan, temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan kebijakan perlindungan dan pengelolaan kawasan lindung agar fungsi ekologis wilayah tetap terjaga dalam jangka Panjang.

Tabel 2.13.
Daya Dukung Fungsi Lindung Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2045

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Ha)	PENGGUNAAN LAHAN 2024			POLA RUANG 2045		
			LGLN	DDL	KET	LGLN	DDL	KET
1	Kecamatan Bojong	4.309,45	1.661,02	0,39	RENDAH	1.621,41	0,38	RENDAH
2	Kecamatan Buaran	907,41	263,09	0,29	RENDAH	238,64	0,26	RENDAH
3	Kecamatan Doro	7.712,46	6.416,21	0,83	SANGAT BAIK	4.031,40	0,52	SEDANG
4	Kecamatan Kajen	8.564,94	5.639,79	0,66	BAIK	4.085,71	0,48	SEDANG
5	Kecamatan Kandangserang	7.630,80	5.487,01	0,72	BAIK	4.326,58	0,57	SEDANG
6	Kecamatan Karanganyar	5.767,61	3.983,59	0,69	BAIK	2.635,78	0,46	SEDANG
7	Kecamatan Karangdadap	2.149,44	821,34	0,38	RENDAH	775,91	0,36	RENDAH
8	Kecamatan Kedungwuni	2.306,72	693,91	0,30	RENDAH	657,28	0,28	RENDAH
9	Kecamatan Kesesi	6.882,48	3.565,69	0,52	SEDANG	3.167,88	0,46	SEDANG
10	Kecamatan Lebakbarang	6.311,29	5.444,62	0,86	SANGAT BAIK	3.915,29	0,62	BAIK
11	Kecamatan Paninggaran	9.771,26	8.642,28	0,88	SANGAT BAIK	6.024,79	0,62	BAIK
12	Kecamatan Petungkriyono	8.307,75	6.816,10	0,82	SANGAT BAIK	5.138,49	0,62	BAIK
13	Kecamatan Siwalan	2.801,68	1.390,69	0,50	SEDANG	1.284,70	0,46	SEDANG
14	Kecamatan Sragi	3.413,87	1.272,64	0,37	RENDAH	1.245,89	0,36	RENDAH
15	Kecamatan Talun	4.977,18	4.082,89	0,82	SANGAT BAIK	2.310,17	0,46	SEDANG
16	Kecamatan Tirto	2.038,68	829,36	0,41	SEDANG	821,07	0,40	SEDANG
17	Kecamatan Wiradesa	1.338,92	377,30	0,28	RENDAH	382,61	0,29	RENDAH
18	Kecamatan Wonokerto	2.034,20	1.432,89	0,70	BAIK	1.229,91	0,60	BAIK
19	Kecamatan Wonopringgo	2.065,33	692,96	0,34	RENDAH	652,15	0,32	RENDAH
Kabupaten Pekalongan		**89.291,46**	**59.513,38**	**0,67**	**BAIK**	**44.545,66**	**0,50**	**SEDANG**

Sumber: Analisis Penyusun 2025 (Pedoman SK MENLHK 297/2019)

3). Daya Dukung Air

Daya dukung air adalah kemampuan sumber daya air di suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan air yang diperlukan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Analisis daya dukung air meliputi penilaian terhadap ketersediaan air, baik dari limpasan air permukaan maupun sumber air lainnya, serta perbandingannya dengan kebutuhan air berdasarkan standar ketentuan.

Berdasarkan hasil analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Air (DDA) Kabupaten Pekalongan Tahun 2024, secara kuantitatif seluruh kecamatan masih berada pada kondisi belum terlampaui, yang ditunjukkan oleh nilai surplus antara ketersediaan air dan total kebutuhan air tahunan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa secara neraca air, sumber daya air yang tersedia masih mampu memenuhi kebutuhan domestik dan penggunaan lahan di masing-masing kecamatan.

Namun demikian, capaian DDA yang belum terlampaui tidak serta-merta mencerminkan kondisi sumber daya air yang aman secara kualitas. Temuan adanya beberapa sungai dalam kondisi tercemar menunjukkan adanya tekanan lingkungan yang bersifat spasial dan sektoral, yang tidak sepenuhnya tertangkap dalam analisis DDA berbasis kuantitas. Sungai Sengkarang yang melintasi Kecamatan Wonopringgo, Sungai Mrican di Kecamatan Wonokerto, Sungai Kupang di Kecamatan Karangdadap, serta Sungai Meduri di Kecamatan Tirto berpotensi menjadi media penyebaran pencemaran air ke wilayah sekitarnya.

Dengan demikian, kecamatan-kecamatan yang dilalui oleh aliran sungai tercemar tersebut berpotensi mengalami penurunan kualitas lingkungan perairan, meskipun secara neraca air masih menunjukkan kondisi surplus. Situasi ini menegaskan bahwa DDA tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya indikator keberlanjutan sumber daya air, karena tidak memperhitungkan degradasi mutu air dan risiko pencemaran lintas wilayah.

Tabel 2.14.
Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kabupaten Pekalongan Tahun 2024

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	KETERSEDIAAN AIR (M3/TAHUN)	KEBUTUHAN AIR RUMAH TANGGA (M3/TAHUN)	KEBUTUHAN AIR PENGGUNAAN LAHAN (M3/TAHUN)	KEBUTUHAN AIR TOTAL (M3/TAHUN)	SURPLUS/DEFISIT (M3/TAHUN)
Bojong	80.282	106.412.154,13	1.417.387,28	43.447,73	9.477.846,84	96.934.307,29
Buaran	48.914	43.479.122,77	966.808,89	6.791,84	5.326.471,32	38.152.651,46
Doro	48.491	169.715.583,12	725.972,20	86.197,77	7.312.756,84	162.402.826,28
Kajen	78.050	176.145.760,71	1.008.872,67	67.467,79	9.507.392,72	166.638.367,99
Kandangserang	37.423	169.625.263,04	386.014,04	67.119,02	4.147.661,93	165.477.601,11
Karanganyar	48.277	94.180.813,03	352.468,01	46.603,01	4.892.725,42	89.288.087,61
Karangdadap	44.645	39.708.932,29	91.189,18	8.060,86	3.835.159,11	35.873.773,18
Kedungwuni	105.462	32.684.416,70	168.407,25	9.299,55	4.291.670,77	28.392.745,93
Kesesi	77.363	108.345.976,09	1.420.776,08	38.690,20	7.151.693,19	101.194.282,90
Lebakbarang	11.602	113.456.474,36	493.897,11	49.173,79	2.318.988,18	111.137.486,18
Paninggaran	44.314	149.265.744,56	281.011,84	59.210,31	3.725.186,50	145.540.558,06
Petungkriyono	13.635	156.570.177,94	1.181.510,17	75.882,93	3.572.831,04	152.997.346,90
Siwalan	44.197	64.625.387,93	711.633,69	15.357,46	6.370.251,45	58.255.136,48
Sragi	69.574	46.069.611,08	1.070.150,76	21.584,17	4.834.792,91	41.234.818,18
Talun	32.542	76.858.538,78	125.876,71	35.861,02	3.837.527,05	73.021.011,73
Tirto	78.291	48.336.627,33	935.767,38	8.541,85	6.018.954,15	42.317.673,19
Wiradesa	64.383	9.507.042,93	1.253,16	618,33	1.512.280,35	7.994.762,58
Wonokerto	48.442	27.047.879,19	492.099,03	4.872,75	1.876.530,55	25.171.348,64
Wonopringgo	50.659	10.354.305,17	5.566,94	2.513,53	941.081,24	9.413.223,92
Kab. Pekalongan	**1.026.546**	**1.642.389.811,14**	**11.836.662,40**	**647.293,90**	**90.951.801,55**	**1.551.438.009,59**

Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Pekalongan, 2024

Namun, pada proyeksi tahun 2045, Daya Dukung dan Daya Tampung Air (DDA) Kabupaten Pekalongan secara kuantitatif diperkirakan masih berada pada kondisi belum terlampaui, seiring dengan besarnya potensi ketersediaan air dibandingkan kebutuhan air total. Namun, peningkatan jumlah penduduk, intensifikasi pemanfaatan ruang, serta perubahan penggunaan lahan berpotensi menaikkan kebutuhan air secara signifikan dan sekaligus menurunkan ketersediaan air efektif, terutama pada periode kering. Kondisi ini menunjukkan bahwa surplus air yang tercatat dalam neraca tahunan semakin bergantung pada keberlanjutan fungsi daerah tangkapan air dan stabilitas hidrologis wilayah.

Tabel 2.15.
Proyeksi Daya Dukung dan Daya Tampung Air
Kabupaten Pekalongan Tahun 2045

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	KETERSEDIAAN AIR (M3/TAHUN)	KEBUTUHAN AIR RUMAH TANGGA (M3/TAHUN)	KEBUTUHAN AIR PENGGUNAAN LAHAN (M3/TAHUN)	KEBUTUHAN AIR TOTAL (M3/TAHUN)	SURPLUS/DEFISIT (M3/TAHUN)
Bojong	134.487	106.412.154,13	11.619.676,80	48.268.182,65	59.887.859,45	46.524.294,68
Buaran	51.347	43.479.122,77	4.436.380,80	5.023.409,66	9.459.790,46	34.019.332,31
Doro	82.551	169.715.583,12	7.132.406,40	46.516.770,50	53.649.176,90	116.066.406,22
Kajen	149.305	176.145.760,71	12.899.952,00	61.566.086,92	74.466.038,92	101.679.721,79
Kandangserang	46.666	169.625.263,04	4.031.942,40	60.717.267,57	64.749.209,97	104.876.053,07
Karanganyar	87.298	94.180.813,03	7.542.547,20	47.436.495,71	54.979.042,91	39.201.770,11
Karangdadap	48.940	39.708.932,29	4.228.416,00	19.736.829,09	23.965.245,09	15.743.687,20
Kedungwuni	113.538	32.684.416,70	9.809.683,20	11.450.779,92	21.260.463,12	11.423.953,58
Kesesi	122.405	108.345.976,09	10.575.792,00	83.645.676,99	94.221.468,99	14.124.507,10
Lebakbarang	14.443	113.456.474,36	1.247.875,20	15.995.958,24	17.243.833,44	96.212.640,92
Paninggaran	75.603	149.265.744,56	6.532.099,20	40.693.062,79	47.225.161,99	102.040.582,57
Petungkriyono	15.152	156.570.177,94	1.309.132,80	32.174.674,24	33.483.807,04	123.086.370,90
Siwalan	46.527	64.625.387,93	4.019.932,80	15.174.097,23	19.194.030,03	45.431.357,91
Sragi	69.332	46.069.611,08	5.990.284,80	42.917.808,51	48.908.093,31	-2.838.482,23
Talun	49.206	76.858.538,78	4.251.398,40	36.914.537,12	41.165.935,52	35.692.603,26
Tirto	87.354	48.336.627,33	7.547.385,60	9.699.550,77	17.246.936,37	31.089.690,96
Wiradesa	65.662	9.507.042,93	5.673.196,80	7.207.078,25	12.880.275,05	-3.373.232,13
Wonokerto	223.965	27.047.879,19	19.350.576,00	5.989.814,81	25.340.390,81	1.707.488,38
Wonopringgo	54.981	10.354.305,17	4.750.358,40	15.708.424,30	20.458.782,70	-10.104.477,54
Kab. Pekalongan	**1.538.762**	**1.642.389.811,14**	**132.949.036,80**	**606.836.505,28**	**739.785.542,08**	**902.604.269,06**

Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Pekalongan, 2024

Di sisi lain, apabila pencemaran sungai yang telah teridentifikasi sejak 2024 tidak ditangani secara sistematis, maka pada 2045 sebagian sumber daya air berisiko mengalami penurunan daya tampung lingkungan secara permanen. Sungai-sungai tercemar yang melintasi beberapa kecamatan berpotensi menjadikan air yang tersedia secara kuantitatif tidak lagi layak

dimanfaatkan, sehingga menciptakan kondisi aman semu dalam interpretasi DDA. Dengan demikian, pada tahun 2045 tantangan utama pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Pekalongan bukan semata risiko defisit kuantitas, melainkan penurunan fungsi ekologis dan kualitas air yang menggerus daya dukung dan daya tampung lingkungan secara nyata. Oleh karena itu, hasil proyeksi DDA 2045 harus diinterpretasikan sebagai peringatan dini: tanpa pengendalian pencemaran, perlindungan DAS, dan penguatan pengelolaan air limbah, surplus air secara numerik tidak akan berbanding lurus dengan ketersediaan air yang aman, layak, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

4). Daya Dukung Pangan

Daya dukung pangan merupakan ukuran kemampuan suatu wilayah dalam menyediakan kebutuhan beras bagi penduduknya secara mandiri tanpa bergantung pada pasokan dari luar daerah. Analisis ini bertujuan untuk menjamin ketahanan pangan suatu wilayah, mengidentifikasi potensi swasembada, serta merumuskan kebijakan pengelolaan lahan pertanian yang berkelanjutan.

Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan Beras (DDPB) Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa pada tahun 2024 hingga proyeksi 2045 sebagian besar kecamatan berada pada kondisi terlampaui. Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas produksi beras lokal belum mampu mencukupi kebutuhan konsumsi penduduknya. Pada tingkat kabupaten, nilai DDPB menurun dari sekitar minus 818 ribu pada tahun 2024 menjadi minus 1,336 juta pada tahun 2045, yang menunjukkan pelebaran defisit daya dukung pangan beras seiring dengan meningkatnya tekanan kebutuhan pangan di masa mendatang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.16.
Daya Dukung Pangan Beras (DDPB)
Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2045

NO	KECAMATAN	TAHUN 2024		TAHUN 2045		STATUS DDPB
		DDPB	KET	DDPB	KET	
1	Bojong	19.493,41	BELUM TERLAMPAUI	16.346,05	BELUM TERLAMPAUI	MENURUN
		-81.763,27	TERLAMPAUI	-101.108,00	TERLAMPAUI	MENURUN
2	Buaran	2.078,48	BELUM TERLAMPAUI	1.507,62	BELUM TERLAMPAUI	MENURUN
		-36.579,76	TERLAMPAUI	-51.558,00	TERLAMPAUI	MENURUN
3	Doro	3.890,16	BELUM TERLAMPAUI	1.502,57	BELUM TERLAMPAUI	MENURUN
		-36.284,77	TERLAMPAUI	-75.417,00	TERLAMPAUI	MENURUN
4	Kajen	12.312,64	BELUM TERLAMPAUI	6.618,02	BELUM TERLAMPAUI	MENURUN
		-84.071,61	TERLAMPAUI	-143.248,00	TERLAMPAUI	MENURUN
5	Kandangserang	5.152,56	BELUM TERLAMPAUI	1.840,63	BELUM TERLAMPAUI	MENURUN
		-34.918,73	TERLAMPAUI	-59.233,00	TERLAMPAUI	MENURUN
6	Karanganyar	7.361,53	BELUM TERLAMPAUI	1.781,42	BELUM TERLAMPAUI	MENURUN
		-54.004,37	TERLAMPAUI	-78.241,00	TERLAMPAUI	MENURUN
7	Karangdadap	5.280,04	BELUM TERLAMPAUI	2.889,70	BELUM TERLAMPAUI	MENURUN
		-61.773,06	TERLAMPAUI	-73.620,00	TERLAMPAUI	MENURUN
8	Kedungwuni	4.042,16	BELUM TERLAMPAUI	2.659,97	BELUM TERLAMPAUI	MENURUN
		-69.201,61	TERLAMPAUI	-85.482,00	TERLAMPAUI	MENURUN
9	Kesesi	32.811,32	BELUM TERLAMPAUI	23.922,02	BELUM TERLAMPAUI	MENURUN
		-81.921,39	TERLAMPAUI	-111.134,00	TERLAMPAUI	MENURUN
10	Lebakbarang	65,14	BELUM TERLAMPAUI	39,47	BELUM TERLAMPAUI	MENURUN
		-21.341,68	TERLAMPAUI	-42.763,00	TERLAMPAUI	MENURUN

NO	KECAMATAN	TAHUN 2024		TAHUN 2045		STATUS DDPB
		DDPB	KET	DDPB	KET	
11	Paninggaran	1.380,42	BELUM TERLAMPAUI	355,27	BELUM TERLAMPAUI	MENURUN
		-26.361,56	TERLAMPAUI	-72.286,00	TERLAMPAUI	MENURUN
12	Petungkriyono	331,94	BELUM TERLAMPAUI	217,11	BELUM TERLAMPAUI	MENURUN
		-28.754,46	TERLAMPAUI	-50.433,00	TERLAMPAUI	MENURUN
13	Siwalan	7.342,42	BELUM TERLAMPAUI	3.774,90	BELUM TERLAMPAUI	MENURUN
		-62.443,78	TERLAMPAUI	-86.373,00	TERLAMPAUI	MENURUN
14	Sragi	17.540,21	BELUM TERLAMPAUI	14.346,84	BELUM TERLAMPAUI	MENURUN
		-69.166,98	TERLAMPAUI	-93.412,00	TERLAMPAUI	MENURUN
15	Talun	759,98	BELUM TERLAMPAUI	138,16	BELUM TERLAMPAUI	MENURUN
		-16.643,54	TERLAMPAUI	-54.298,00	TERLAMPAUI	MENURUN
16	Tirto	3.111,48	BELUM TERLAMPAUI	1.719,68	BELUM TERLAMPAUI	MENURUN
		-56.683,91	TERLAMPAUI	-74.149,00	TERLAMPAUI	MENURUN
17	Wiradesa	3.083,54	BELUM TERLAMPAUI	2.080,01	BELUM TERLAMPAUI	MENURUN
		-41.449,40	TERLAMPAUI	-58.285,00	TERLAMPAUI	MENURUN
18	Wonokerto	1.427,07	BELUM TERLAMPAUI	1.596,67	BELUM TERLAMPAUI	MENINGKAT
		-31.965,46	TERLAMPAUI	-37.863,00	TERLAMPAUI	MENURUN
19	Wonopringgo	3.182,65	BELUM TERLAMPAUI	1.401,36	BELUM TERLAMPAUI	MENURUN
		-53.523,07	TERLAMPAUI	-71.672,00	TERLAMPAUI	MENURUN
Kab. Pekalongan		**-818.205,28**	**TERLAMPAUI**	**-1.335.837,52**	**TERLAMPAUI**	**MENURUN**

Sumber: Laporan D3TLH 2024 & Analisis Penyusun 2025 (Pedoman SK MENLHK 297/2019)

Penurunan nilai PPDB sejalan dengan karakteristik Kabupaten Pekalongan yang mengalami penyusutan luas lahan sawah produktif, terutama di wilayah dataran rendah dan pesisir yang tertekan oleh alih fungsi lahan, banjir, dan rob. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk dan konsentrasi permukiman di kecamatan-kecamatan pusat aktivitas menyebabkan peningkatan kebutuhan konsumsi beras yang tidak diimbangi oleh peningkatan produktivitas pertanian. Penurunan DDPB hingga tahun 2045 mencerminkan bahwa ketahanan pangan Kabupaten Pekalongan semakin bergantung pada pasokan dari luar wilayah, sehingga diperlukan pengendalian konversi lahan sawah, peningkatan produktivitas pertanian, serta perlindungan kawasan pertanian pangan berkelanjutan agar defisit daya dukung pangan tidak semakin melebar di masa mendatang.

Berdasarkan data persentase wilayah terlampaui DDPB Kabupaten Pekalongan, pada tahun 2024 mencapai 84,36% dari total luas wilayah. Kondisi ini menggambarkan ketidakseimbangan antara kapasitas lingkungan dengan intensitas aktivitas pembangunan yang berlangsung secara relatif merata di seluruh wilayah kabupaten. Pada proyeksi tahun 2045, persentase keterlampauan secara agregat sedikit menurun menjadi 83,42%. Hal ini mengindikasikan bahwa arah pengembangan wilayah ke depan berpotensi tetap memberikan tekanan besar terhadap lingkungan, sehingga diperlukan pengendalian pemanfaatan ruang dan strategi pembangunan yang lebih berorientasi pada keberlanjutan agar kapasitas wilayah dapat terjaga dalam jangka Panjang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.17.
Persentase Wilayah Terlampaui DDPB Kabupaten Pekalongan

KECAMATAN	DDPB 2024 (HA)		DDPB 2045 (HA)	
	TERLAMPAUI	%	TERLAMPAUI	%
Kecamatan Bojong	2.414,90	56,04%	2.200,08	51,05%
Kecamatan Buaran	752,39	83,06%	726,97	80,25%
Kecamatan Doro	7.376,41	95,64%	7.187,38	93,19%
Kecamatan Kajen	7.461,54	87,12%	7.775,26	90,78%
Kecamatan Kandangserang	6.613,15	86,66%	6.432,38	84,30%
Kecamatan Karanganyar	5.114,97	88,68%	5.295,41	91,81%
Kecamatan Karangdadap	1.721,00	80,01%	1.786,58	83,06%
Kecamatan Kedungwuni	1.975,36	85,65%	1.807,91	78,39%
Kecamatan Kesesi	3.853,45	55,99%	3.959,27	57,53%
Kecamatan Lebakbarang	6.304,54	99,89%	6.213,81	98,46%
Kecamatan Paninggaran	8.589,65	87,91%	8.525,28	87,25%
Kecamatan Petungkriyono	8.271,75	99,57%	8.191,48	98,60%
Kecamatan Siwalan	1.999,52	71,55%	1.846,35	66,07%
Kecamatan Sragi	1.841,13	53,93%	1.834,18	53,73%
Kecamatan Talun	4.938,79	99,23%	4.843,20	97,31%
Kecamatan Tirto	1.644,26	80,65%	1.563,60	76,70%
Kecamatan Wiradesa	1.091,95	81,55%	1.080,62	80,71%
Kecamatan Wonokerto	1.608,13	78,78%	1.402,88	68,72%
Kecamatan Wonopringgo	1.751,67	84,80%	1.818,20	88,02%
Kabupaten Pekalongan	**75.324,55**	**84,36%**	**74.490,83**	**83,42%**

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2025

Berdasarkan tabel diatas, data persentase wilayah terlampaui DDPB Kabupaten Pekalongan, pada tahun 2024 mencapai 84,36% dari total luas wilayah. Kondisi ini menggambarkan ketidakseimbangan antara kapasitas lingkungan dengan intensitas aktivitas pembangunan yang berlangsung secara relatif merata di seluruh wilayah kabupaten. Pada proyeksi tahun 2045, persentase keterlampauan secara agregat sedikit menurun menjadi 83,42%. Hal ini mengindikasikan bahwa arah pengembangan wilayah ke depan berpotensi tetap memberikan tekanan besar terhadap lingkungan, sehingga diperlukan pengendalian pemanfaatan ruang dan strategi pembangunan yang lebih berorientasi pada keberlanjutan agar kapasitas wilayah dapat terjaga dalam jangka panjang.

Pada tahun 2024, daya dukung pangan Kabupaten Pekalongan secara umum telah berada pada kondisi terlampaui, yang ditunjukkan oleh defisit antara ketersediaan pangan dan kebutuhan penduduk pada skala kabupaten. Pada proyeksi tahun 2045, keterlampauan tersebut akan terus meningkat, seiring bertambahnya jumlah penduduk yang tidak sepenuhnya dapat diimbangi oleh peningkatan ketersediaan pangan. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan pentingnya penguatan strategi ketahanan pangan agar keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan energi di Kabupaten Pekalongan dapat dikelola secara lebih optimal dan berkelanjutan di masa mendatang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18.
Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2024

KECAMATAN	JML PENDUDUK (JIWA)	KETERSEDIAAN PANGAN (KKAL/ TAHUN)	KEBUTUHAN GIZI (KKAL/TAHUN)	AMBANG BATAS ENERGI	SURPLUS/ DEFISIT	KETERANGAN
Kecamatan Bojong	25.219	18.409.625.770,00	32.641.690.208,75	44.712,03	19.493,41	Belum Terlampaui
	81.763	59.687.199.330,00	-	-	-81.763,27	Terlampaui
Kecamatan Buaran	2.481	1.810.988.660,00	3.328.468.990,00	4.559,28	2.078,48	Belum Terlampaui
	36.580	26.703.232.900,00	-	-	-36.579,76	Terlampaui
Kecamatan Doro	4.658	3.400.704.010,00	6.240.879.356,25	8.548,65	3.890,16	Belum Terlampaui
	36.285	26.487.878.420,00	-	-	-36.284,77	Terlampaui
Kecamatan Kajen	14.732	10.754.510.650,00	19.743.872.872,50	27.044,82	12.312,64	Belum Terlampaui
	84.072	61.372.284.900,00	-	-	-84.071,61	Terlampaui
Kecamatan Kandangserang	6.608	4.824.072.080,00	8.585.937.053,75	11.760,87	5.152,56	Belum Terlampaui
	34.919	25.490.665.440,00	-	-	-34.918,73	Terlampaui
Kecamatan Karanganyar	8.803	6.426.341.910,00	11.800.935.510,00	16.164,72	7.361,53	Belum Terlampaui
	54.004	39.423.196.200,00	-	-	-54.004,37	Terlampaui
Kecamatan Karangdadap	6.118	4.466.268.380,00	8.321.172.475,00	11.398,20	5.280,04	Belum Terlampaui
	61.773	45.094.344.730,00	-	-	-61.773,06	Terlampaui
Kecamatan Kedungwuni	4.869	3.554.496.810,00	6.505.643.935,00	8.911,32	4.042,16	Belum Terlampaui
	69.202	50.517.188.390,00	-	-	-69.201,61	Terlampaui
Kecamatan Kesesi	40.811	29.791.862.100,00	53.747.209.486,25	73.622,01	32.811,32	Belum Terlampaui
	81.921	59.802.629.160,00	-	-	-81.921,39	Terlampaui
Kecamatan Lebakbarang	90	65.911.200,00	113.470.533,75	155,43	65,14	Belum Terlampaui
	21.342	15.579.420.430,00	-	-	-21.341,68	Terlampaui
Kecamatan Paninggaran	1.780	1.299.392.220,00	2.307.234.186,25	3.160,41	1.380,42	Belum Terlampaui
	26.362	19.243.933.100,00	-	-	-26.361,56	Terlampaui
Kecamatan Petungkriyono	393	287.184.510,00	529.529.157,50	725,34	331,94	Belum Terlampaui
	28.754	20.990.750.050,00	-	-	-28.754,46	Terlampaui
Kecamatan Siwalan	9.910	7.234.538.840,00	12.595.229.246,25	17.252,73	7.342,42	Belum Terlampaui
	62.444	45.583.970.310,00	-	-	-62.443,78	Terlampaui
Kecamatan Sragi	20.177	14.729.583.620,00	27.535.516.190,00	37.717,68	17.540,21	Belum Terlampaui
	69.167	50.491.905.070,00	-	-	-69.166,98	Terlampaui
Kecamatan Talun	1.053	768.964.000,00	1.323.822.893,75	1.813,35	759,98	Belum Terlampaui
	16.644	12.149.778.550,00	-	-	-16.643,54	Terlampaui
Kecamatan Tirto	3.779	2.758.854.480,00	5.030.526.996,25	6.890,73	3.111,48	Belum Terlampaui
	56.684	41.379.261.170,00	-	-	-56.683,91	Terlampaui
Kecamatan Wiradesa	3.807	2.779.255.570,00	5.030.526.996,25	6.890,73	3.083,54	Belum Terlampaui
	41.449	30.258.072.280,00	-	-	-41.449,40	Terlampaui
Kecamatan Wonokerto	1.578	1.151.876.660,00	2.193.763.652,50	3.004,98	1.427,07	Belum Terlampaui
	31.965	23.334.793.360,00	-	-	-31.965,46	Terlampaui
Kecamatan Wonopringgo	4.278	3.122.935.420,00	5.446.585.620,00	7.460,64	3.182,65	Belum Terlampaui
	53.523	39.071.849.670,00	-	-	-53.523,07	Terlampaui
KAB. PEKALONGAN	**1.109.999**	**810.299.720.350,00**	**213.022.015.360,00**	**291.793,92**	**-818.205,28**	**TERLAMPAUI**

Sumber: Laporan D3TLH 2024 & Analisis Penyusun 2025 (Pedoman SK MENLHK 297/2019)

Tabel 2.19.
Proyeksi Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2045

KECAMATAN	JML PENDUDUK (JIWA)	KETERSEDIAAN PANGAN (KKAL/ TAHUN)	KEBUTUHAN GIZI (KKAL/TAHUN)	AMBANG BATAS ENERGI	SURPLUS/ DEFISIT	KETERANGAN
Kecamatan Bojong	34.926	25.495.980.000,00	37.428.593.495,04	51.272,05	16.346,05	Belum Terlampaui
	101.108	73.808.840.000,00	-	-	-101.108,00	Terlampaui
Kecamatan Buaran	3.024	2.207.520.000,00	3.308.082.758,40	4.531,62	1.507,62	Belum Terlampaui
	51.558	37.637.340.000,00	-	-	-51.558,00	Terlampaui
Kecamatan Doro	3.288	2.400.240.000,00	3.497.116.058,88	4.790,57	1.502,57	Belum Terlampaui
	75.417	55.054.410.000,00	-	-	-75.417,00	Terlampaui
Kecamatan Kajen	12.609	9.204.570.000,00	14.035.722.560,64	19.227,02	6.618,02	Belum Terlampaui
	143.248	104.571.040.000,00	-	-	-143.248,00	Terlampaui
Kecamatan Kandangserang	3.921	2.862.330.000,00	4.205.990.935,68	5.761,63	1.840,63	Belum Terlampaui
	59.233	43.240.090.000,00	-	-	-59.233,00	Terlampaui
Kecamatan Karanganyar	3.786	2.763.780.000,00	4.064.215.960,32	5.567,42	1.781,42	Belum Terlampaui
	78.241	57.115.930.000,00	-	-	-78.241,00	Terlampaui
Kecamatan Karangdadap	5.073	3.703.290.000,00	5.812.773.989,76	7.962,70	2.889,70	Belum Terlampaui
	73.620	53.742.600.000,00	-	-	-73.620,00	Terlampaui
Kecamatan Kedungwuni	5.238	3.823.740.000,00	5.765.515.664,64	7.897,97	2.659,97	Belum Terlampaui
	85.482	62.401.860.000,00	-	-	-85.482,00	Terlampaui
Kecamatan Kesesi	48.066	35.088.180.000,00	52.551.257.533,44	71.988,02	23.922,02	Belum Terlampaui
	111.134	81.127.820.000,00	-	-	-111.134,00	Terlampaui
Kecamatan Lebakbarang	90	65.700.000,00	94.516.650,24	129,47	39,47	Belum Terlampaui
	42.763	31.216.990.000,00	-	-	-42.763,00	Terlampaui
Kecamatan Paninggaran	810	591.300.000,00	850.649.852,16	1.165,27	355,27	Belum Terlampaui
	72.286	52.768.780.000,00	-	-	-72.286,00	Terlampaui
Kecamatan Petungkriyono	495	361.350.000,00	519.841.576,32	712,11	217,11	Belum Terlampaui
	50.433	36.816.090.000,00	-	-	-50.433,00	Terlampaui
Kecamatan Siwalan	8.331	6.081.630.000,00	8.837.306.797,44	12.105,90	3.774,90	Belum Terlampaui
	86.373	63.052.290.000,00	-	-	-86.373,00	Terlampaui
Kecamatan Sragi	26.373	19.252.290.000,00	29.725.486.500,48	40.719,84	14.346,84	Belum Terlampaui
	93.412	68.190.760.000,00	-	-	-93.412,00	Terlampaui
Kecamatan Talun	315	229.950.000,00	330.808.275,84	453,16	138,16	Belum Terlampaui
	54.298	39.637.540.000,00	-	-	-54.298,00	Terlampaui
Kecamatan Tirto	3.783	2.761.590.000,00	4.016.957.635,20	5.502,68	1.719,68	Belum Terlampaui
	74.149	54.128.770.000,00	-	-	-74.149,00	Terlampaui
Kecamatan Wiradesa	4.329	3.160.170.000,00	4.678.574.186,88	6.409,01	2.080,01	Belum Terlampaui
	58.285	42.548.050.000,00	-	-	-58.285,00	Terlampaui
Kecamatan Wonokerto	2.676	1.953.480.000,00	3.119.049.457,92	4.272,67	1.596,67	Belum Terlampaui
	37.863	27.639.990.000,00	-	-	-37.863,00	Terlampaui
Kecamatan Wonopringgo	3.195	2.332.350.000,00	3.355.341.083,52	4.596,36	1.401,36	Belum Terlampaui
	71.672	52.320.560.000,00	-	-	-71.672,00	Terlampaui
KAB. PEKALONGAN	**1.590.903**	**1.161.359.190.000,00**	**186.197.800.972,80**	**255.065,48**	**-1.335.837,52**	**TERLAMPAUI**

Sumber: Laporan D3TLH 2024 & Analisis Penyusun 2025 (Pedoman SK MENLHK 297/2019)

5). Daya Tampung Lingkungan Hidup

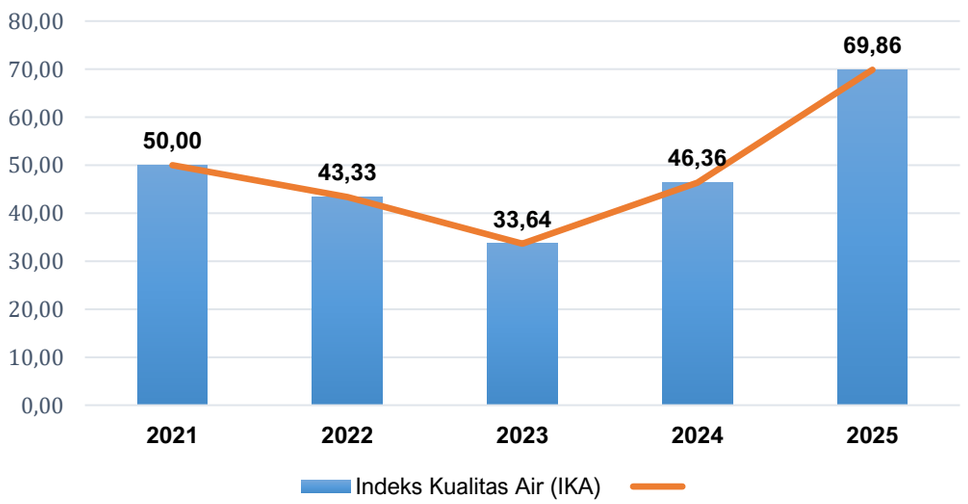
a). Indeks Kualitas Air (IKA)

Kualitas air sungai merupakan salah satu parameter dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kualitas Air dihitung dari hasil konversi Pollution Index (PI). Perhitungan IKA dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Perhitungan ini didasarkan pada nilai hasil sampel terhadap baku mutu tiap parameter

Pemantauan kualitas air sungai dilakukan terhadap beberapa sungai yang potensial tercemar oleh aktivitas sekitarnya. Pada tahun 2024 dilakukan pemantauan terhadap 5 sungai yaitu (1)Sungai Kupang, (2)Sungai Sengkarang, (3)Sungai Sragi, (4)Sungai Silempeng dan (5)Sungai Meduri. Jumlah titik sampel adalah 12 titik meliputi 2 titik di Sungai Kupang, 3 titik di Sungai Sengkarang, 3 titik di Sungai Sragi, 2 titik di Sungai Silempeng dan 2 titik di Sungai Meduri. Pengujian Sungai Kupang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, sedangkan hasil pengujian Sungai Sengkarang, Sungai Sragi, Sungai Silempeng dan Sungai Meduri diperoleh dari swapantau usaha/ kegiatan di wilayah Kabupaten Pekalongan.

Uji kualitas air sungai di Kabupaten tahun 2025 dilakukan di 24 titik sampel lokasi. Rumus perhitungan IKA mulai tahun 2025 menggunakan rumus baru yaitu IKA INA. Rumus baru tersebut menentukan kualitas air (maksimal bobot 100). Fluktuasi nilai IKA INA lebih sensitif dengan adanya suatu program perbaikan kualitas air.

Dengan hasil uji laboratorium tersebut diperoleh hasil bahwa 2 titik sampel dengan status baik dan 12 titik sampel dengan status sedang Perhitungan tersebut menghasilkan Indeks Kualitas Air (IKA INA) = 69,86. Dengan rumus IKA lama = 47,69. Perkembangan Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : DINAS PERKIM DAN LH Kab. Pekalongan, 2026

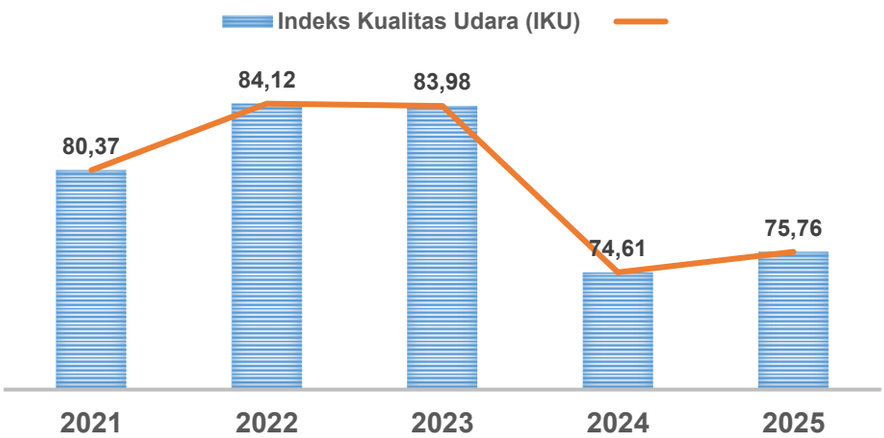
Gambar 2.18. Grafik Perkembangan Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

Mengacu pada Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Pekalongan, kondisi kualitas air pada Kabupaten Pekalongan pada tahun 2021-2025 mengalami kondisi yang fluktuatif. Nilai IKA pada tahun 2021 tercatat sebesar 50,00, kemudian mengalami penurunan menjadi 43,33 pada tahun 2022 dan mencapai angka terendah sebesar 33,64 pada tahun 2023 dan mengalami kenaikan di Tahun 2024 sebesar 46,36 dan Tahun 2025 sebesar 69,86. Penurunan nilai IKA ini dapat dikaitkan dengan tekanan

aktivitas antropogenik, termasuk keberadaan kawasan pertambangan mineral dan batubara yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap penurunan kualitas air melalui peningkatan sedimen, limbah tambang, dan risiko air asam tambang. Meskipun terjadi perbaikan di tahun 2024 dan 2025 , kondisi ini masih menunjukkan bahwa kualitas air berada dalam kategori rentan, sehingga pengelolaan kawasan pertambangan perlu lebih diarahkan pada pengendalian limbah cair, reklamasi lahan pascatambang, serta pemantauan kualitas air secara konsisten.

b). Indeks Kualitas Udara (IKU)

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap parameter NO_2 dan SO2, kemudian dilakukan perhitungan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU). IKU merupakan indikator pengelolaan kualitas udara di suatu wilayah. Hasil IKU Kabupaten Pekalongan tahun 2025 sebesar 75,76 (kategori sedang). Perkembangan IKU Kabupaten Pekalongan cenderung fluktuatif dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.



Sumber : DINAS PERKIM DAN LH Kab. Pekalongan, 2026

Gambar 2.19. Grafik Perkembangan Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 - 2025

Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Pekalongan periode 2021–2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, IKU tercatat sebesar 80,37 kemudian meningkat pada 2022 menjadi 84,12 dan mencapai puncak pada 2023 sebesar 85,10. Namun, pada tahun 2024 dan 2025 terjadi penurunan tajam hingga 74,61 dan 75,76.

Fluktuasi ini dapat dihubungkan dengan potensi aktivitas pertambangan mineral dan batubara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Peningkatan IKU pada 2021–2023 bisa mengindikasikan adanya upaya pengendalian polusi udara yang relatif berhasil, sementara penurunan drastis di tahun 2024 dan 2025 menunjukkan adanya tekanan lingkungan baru yang signifikan. Kegiatan pertambangan berpotensi menjadi salah satu faktor penyumbang melalui emisi debu dari kegiatan eksploitasi, emisi kendaraan angkutan tambang, dan pembakaran bahan bakar fosil pada operasional tambang.

Penurunan kualitas udara ini menegaskan perlunya pengelolaan ketat pada Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program (KRP) Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan, terutama dalam pengendalian emisi partikulat dan gas buang, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta sistem transportasi hasil tambang yang lebih efisien. Dengan demikian, keberadaan kawasan pertambangan tidak semakin memperburuk kualitas udara dan tetap dapat dikendalikan agar selaras dengan baku mutu lingkungan yang berlaku

d. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Kondisi energi, air, dan pangan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dan krusial serta untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dan pembangunan berkelanjutan dapat dijelaskan melalui beberapa indikator antara lain :

1). Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan.

Hasil perhitungan IKP berdasarkan sembilan indikator untuk wilayah kabupaten dan delapan indikator untuk wilayah kota yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan memberikan gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah (kab/kota). Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kabupaten/kota). IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah (kabupaten/kota) dikelompokkan ke dalam enam kelompok, yaitu *Prioritas 1 (Sangat Rentan), Prioritas 2 (Rentan), Prioritas 3 (Agak Rentan), Prioritas 4 (Agak Tahan), Prioritas 5 (Tahan), Prioritas 6 (Sangat Tahan)*. Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Pekalongan tahun 2021-2025 yang bersumber dari Badan Pangan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.20.
Indeks Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemanfaatan dan
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Tahun	Ketersediaan	Keterjangkauan	Pemanfaatan	IKP	Kelompok IKP
1	2021	84,00	80,98	74,59	**79,33**	6
2	2022	83,45	81,23	77,46	**80,39**	6
3	2023	80,25	84,01	81,32	**81,81**	6
4	2024	-	-	-	**80,65**	6
5	2025	61,12	84,47	79,53	**74,99**	5

Sumber : Badan Pangan Nasional, 2025

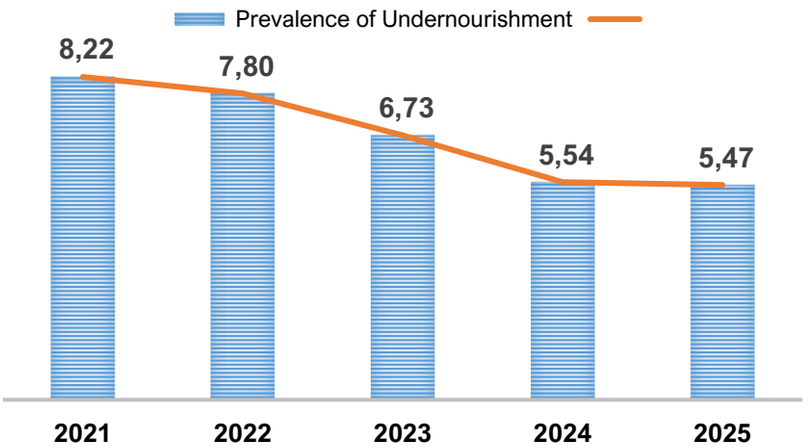
IKP secara Nasional disusun mulai tahun 2025 dan menjadi indikator kinerja di dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 Prioritas Nasional-2 (Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru) yang diampu oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Berdasarkan perhitungan, Skor IKP Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 cenderung mengalami penurunan dari 80,65 di Tahun 2024 menjadi 74,99 di Tahun 2025 dengan kelompok IKP

Tahan dengan rincian untuk aspek ketersediaan pangan memiliki skor sebesar 61,12; aspek keterjangkauan pangan memiliki skor sebesar 84,47 dan aspek pemanfaatan pangan memiliki skor 79,53. Penurunan capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Tahun 2025, yang menegaskan adanya perubahan metodologi perhitungan dari Badan Pangan Nasional melalui penyesuaian indikator penyusun dari 9 indikator menjadi 12 indikator, sehingga angka capaian Tahun 2025 disepakati sebagai basis pengukuran *(baseline)* baru yang tidak dapat diperbandingkan secara langsung dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

2). Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan *(Prevalence of Undernourishment)*

Berdasarkan BPS, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment (PoU)* adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Angka PoU dihasilkan oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS setiap tahun. PoU mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya.

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan *(Prevalence of Undernourishment)* Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 berdasarkan data BPS dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS; 2026

Gambar 2.20. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan *(Prevalence of Undernourishment)* Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

Hasil Susenas 2021-2025 menunjukkan prevalensi ketidakcukupan pangan di Kabupaten Pekalongan memiliki kecenderungan turun dari 8,22 persen pada tahun 2021 menjadi 5,47 persen pada tahun 2025. Artinya hingga tahun 2025, masih terdapat 5,47 persen penduduk yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif.

3). Konsumsi Listrik Per Kapita

Konsumsi listrik per kapita adalah rata-rata jumlah energi listrik yang digunakan oleh setiap orang dalam suatu wilayah atau negara dalam periode waktu tertentu, biasanya satu tahun. Angka ini dihitung dengan membagi total konsumsi listrik dengan jumlah penduduk. Konsumsi Listrik Per Kapita Kabupaten Pekalongan tahun 2025 sebesar **0,57 mwh/jiwa** dengan jumlah konsumsi Listrik sebesar 601.594 Mwh dengan jumlah penduduk sebesar 1.030.342 jiwa Capain ini sam dengan tahun 2024 sebesar **0,57 mwh/jiwa** dengan jumlah konsumsi Listrik sebesar 582.369 Mwh dengan jumlah penduduk sebesar 1.019.006 jiwa.

Tabel 2.21.
Konsumsi Listrik Perkapita
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Konsumsi Listrik per Kapita (Jumlah Konsumsi Listrik/Jumlah Penduduk)	**0,54**	**0,56**	**0,55**	**0,57**	**0,57**
	- Konsumsi Listrik (MWh)	528.986	553.907	549.649	582.369	601.594
	- Jumlah Penduduk (jiwa)	983.356	995.495	1.007.384	1.019.006	1.030.342

Sumber : PLN UP3 Pekalongan; 2026

4). Persentase akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan;
b) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halam rumah (on premises);
c) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan
d) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.

Cakupan akses air minum jaringan perpipaan pada tahun 2024 sebesar 58,00 persen. Dalam rangka pengelolaan air minum yang berkelanjutan maka dilakukan pendampingan terhadap institusi dan kelompok masyarakat pengelola layanan air minum di Kabupaten Pekalongan dengan kondisi pengelolaannya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.22.
Kondisi Akses dan Pengelolaan Layanan Air Minum
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
	Capaian Akses Air Minum					
1	**Aman**	n/a	n/a	n/a	58,00	58,36
2	**Jaringan Perpipaan**	n/a	n/a	n/a	58,00	58,36
	Kondisi SPAM Perkotaan (PDAM) Sumber: Buku BPPW 2024					
1.	Kapasitas Produksi (Lps)	n/a	n/a	n/a	295,00	
2.	*Idle Capacity (Lps)*	n/a	n/a	n/a	61,00	
3.	*Status Full Cost Recovery (FCR)*	n/a	n/a	n/a	FCR	

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2024; dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Tengah DJCK Kementerian PU, 2024

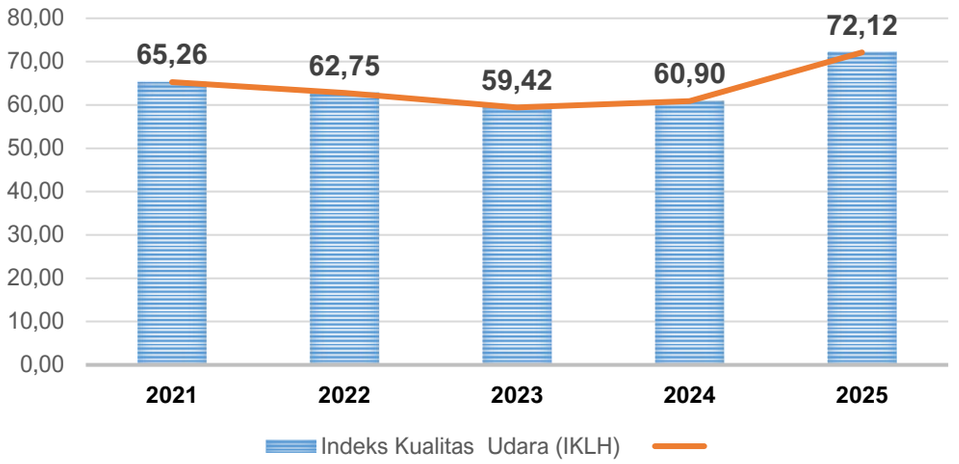
e. Lingkungan Hidup Berkualitas

Menjelaskan kondisi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang dapat dijelaskan dengan indikator sebagai berikut :

1). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pekalongan cenderung fluktuatif, tahun 2021 nilai IKLH sebesar 65,26 dengan perubahan metode perhitungan yang baru, menurun menjadi 62,75 (kategori sedang) pada tahun 2022, turun sebesar 59,42 dan

kemudian naik sebesar 60,90 di Tahun 2024 dan naik Kembali sebesar 72,12 di Tahun 2025. Perkembangan capaian IKLH dari tahun 2021-2025 dapat dilihat pada gambar berikut.



	2021	2022	2023	2024	2025
Komponen Pembentuk ILKH					
• Indeks Kualitas Air (IKA)	50,00	43,33	33,64	46,36	69,86
• Indeks Kualitas Udara (IKU)	80,37	84,12	83,98	74,61	75,76
• Indeks Kualitas Lahan	56,55	56,55	58,28	60,47	69,28

Sumber : DINAS PERKIM DAN LH Kab. Pekalongan, 2026

Gambar 2.21. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

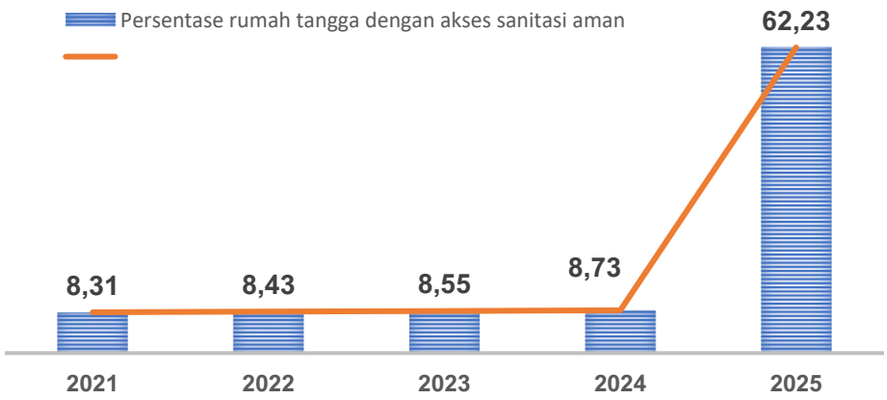
Dari gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa IKLH cenderung menurun di Tahun 2021-2023 disebabkan karena adanya **Penurunan Indeks Tutupan Lahan/Hutan** dimana terdapat perubahan luas wilayah Kabupaten Pekalongan dalam Perda RTRW Nomor 3/2020, yang semula sebesar 836,13 km2 menjadi 893,04 km2, dengan penambahan luas wilayah sebesar 60 km2, sedangkan luas hutan berkurang, sehingga luas wilayah kabupaten (sebagai faktor pembaginya) bertambah mengakibatkan indeks tutupan lahan nilainya turun.

2). Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Kualitas dan kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal. Kelengkapan fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T).

Formulasi Perhitungan : **PSA = ((JRTST+JRTIPLT) : JRTS) x 100%**
PSA : Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman
JRTST : Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T
JRTIPLT : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)
JRTS : Jumlah rumah tangga seluruhnya

Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman Kabupaten Pekalongan tahun 2020-2024 berdasarkan data BPS dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : DPU TARU; 2026

Gambar 2.22. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman dari data DPU TARU Kabupaten Pekalongan memiliki kecenderungan naik dari 8,73 persen pada tahun 2024 menjadi 62,23 persen pada tahun 2025 dengan sebanyak 554.980 unit rumah yang memiliki akses sanitasi aman dari 891.892 jumlah total rumah di Kabupaten Pekalongan.

3). Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari Kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Jumlah timbulan sampah setiap tahun akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan, peningkatan jumlah timbulan sampah dalam 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2021 - 2025, sebesar 15.676,87 ton (10,66%) dengan rata - rata per tahun sebesar 3.919,22 ton (2,66%). Jumlah timbulan sampah tahun 2025 mencapai sebesar 148.774,88 ton. Perkembangan jumlah timbulan sampah di Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 dapat dijelaskan seperti tabel berikut.

Tabel 2.23.
Jumlah Timbulan Sampah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 - 2025

TAHUN	TIMBULAN SAMPAH (TON)
2021	141.447,87
2022	142.569,58
2023	144.022,43
2024	147.079,06
2025	148.774,88

Sumber : DINAS PERKIM DAN LH Kab. Pekalongan; https://sipsn.kemenlh.go.id, 2025

Pengelolaan sampah di Kabupaten Pekalongan dalam kurun waktu 2021-2025 juga belum berjalan dengan optimal, dilihat dari penanganan sampah sekitar 20-25 persen setiap tahun, sehingga rata-rata sampah yang tidak dikelola berkisar 75-80 persen setiap tahunnya. Perkembangan pengelolaan sampah selama tahun 2021-2025 dapat diuraikan seperti tabel berikut.

Tabel 2.24.
Persentase Pengelolaan Sampah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 - 2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Penanganan (%)	40,00	39,79	3,70	3,19	27,79
Pengurangan (%)	1,26	1,32	1,25	1,17	1,23
Sampah tidak dikelola (%)	59,34	58,90	95,04	95,63	70,98

Sumber : DINAS PERKIM DAN LH Kab. Pekalongan; https://sipsn.kemenlh.go.id, 2026

Cakupan layanan persampahan di Kabupaten Pekalongan sudah melayani 16 kecamatan dari 19 kecamatan yang ada. 3 (tiga) kecamatan yang belum terlayani persampahan oleh DinperkimLH Kabupaten Pekalongan adalah Kecamatan Petungkriyono, Lebakbarang dan Kandangserang. Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana pengolahan sampah.

Sarana pengumpulan sampah di Kabupaten Pekalongan berupa Transfer Depo sebanyak 2 unit yaitu di Pekuncen dan Pasar Kedungwuni. Sedangkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berlokasi di Desa Linggoasri Kecamatan Kajen yaitu TPA Bojonglarang dengan luas areal 4,54 Ha dengan kapasitas 150 m3 yang dikelola dengan sistem semi *control landfill.* Kondisi TPA saat ini sudah overload, jumlah sampah yang terangkut ke TPA Bojonglarang mencapai 135 ton/hari pada tahun 2024. Data sampah yang masuk TPA dalam tahun 2021-2025 cenderung fluktuatif, seperti dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.25.
Sampah Yang Masuk TPA Bojonglarang
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 - 2025

TAHUN	SAMPAH YANG MASUK TPA (TON/TH)
2021	50.917,50
2022	51.100,00
2023	47.450,00
2024	49.275,00
2025	52.560,00

Sumber : DINAS PERKIM DAN LH Kab. Pekalongan; https://sipsn.kemenlh.go.id, 2025

Kegiatan pengolahan sampah yang berkembang saat ini di Kabupaten Pekalongan antara lain:

a). Bank Sampah

Kabupaten Pekalongan sejak tahun 2017 memiliki bank sampah induk yaitu Sahabat Bumi, dengan jumlah sampah yang dikelola sebesar 4.943 kg/bulan dan melayani seluruh wilayah di kabupaten pekalongan. Sedangkan bank sampah aktif ada sejumlah 22 unit bank sampah dengan jumlah yang paling banyak ada di kecamatan kajen yaitu sejumlah 7 unit bank sampah.

b). TPST/TPS 3R

TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Sedangkan tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan. Prinsip TPST dan TPS 3R adalah penggunaan ulang dan pendaurulangan sampah untuk diolah menjadi barang yang mempunyai nilai tambah. TPST/TPS 3R yang ada di kabupaten pekalongan sebanyak 25 unit yang tersebar di kecamatan yang aktif sebanyak 15 unit.

c). Rumah Rongsok

Rumah rongsok merupakan pengepul atau penampung sampah yang masih mempunyai nilai jual yang dimiliki oleh individu. Rumah rongsok yang terdata oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan tersebar di 10 wilayah kecamatan sejumlah 13 unit lapak rongsok

Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah menunjukan perkembangan meningkat dari 3,43 persen di tahun 2021 menjadi 29,03 persen di Tahun 2025.

Tabel 2.26.
Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 - 2025

TAHUN	Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
2021	3,43
2022	4,01
2023	3,79
2024	4,37
2025	29,03

Sumber : https://sipsn.kemenlh.go.id, 2025

f. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim atau Ketahanan Iklim merupakan tindakan antisipasi yang terencana ataupun spontan untuk mengurangi nilai potensi kerugian akibat ancaman bahaya, kerentanan, dampak, dan risiko perubahan iklim. Dalam pelaksanaan Pembangunan Berketahanan Iklim di 5 (lima) sektor prioritas dengan pendekatan aksi melalui pendekatan infrastruktur, teknologi, peningkatan kapasitas, maupun tata kelola dan pendanaan dipertimbangkan dengan memperhatikan aspek inklusivitas (kesetaraan gender, penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya), dan memperhatikan kelestarian ekosistem. Fungsi pengaturan iklim secara keruangan berarti menjaga wilayah-wilayah yang memiliki fungsi besar dalam penyimpanan karbon yaitu sistem penggunaan lahan hutan. Terjaganya kelestarian hutan dengan kerapatan tinggi berarti mengurangi GRK dan menjaga kualitas iklim lokal.

1). Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif

Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan kementerian teknis lainnya telah menyusun mekanisme pemantauan kegiatan penanganan perubahan iklim. Dimulai pada tahun 2012, proses yang dilakukan secara kontinyu, transparan dan partisipatif ini melahirkan sebuah

portal Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) yang bernama **Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Rencana Aksi Nasional Rendah Karbon (AKSARA)**. AKSARA diresmikan pada tahun 2019 sebagai portal terintegrasi yang membantu Pemerintah Indonesia dalam memenuhi komitmen penurunan emisi GRK sebesar 29% di tahun 2030.

AKSARA merupakan platform untuk mencatat pelaksanaan rendah karbon (PRK) dan ketahanan iklim (PBI) secara transparan, akurat, komprehensif, konsisten, dan terintegrasi. AKSARA bertujuan untuk: (1) Menyediakan data dan informasi yang akurat, transparan, dan partisipatif tentang aksi LCDI di Indonesia, (2) Menyediakan sistem untuk mengumpulkan dan melaporkan pencapaian aksi LCDI kerja sama pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung pembangunan rendah karbon di Indonesia, (3) Mendukung kredibilitas dan transparansi pelaporan pencapaian penurunan emisi rumah kaca dan pembangunan rendah karbon di Indonesia kepada masyarakat internasional; dan (4) Menyediakan data terkini untuk proses evaluasi dan perencanaan aksi pembangunan rendah karbon yang lebih baik di masa depan.

Setiap kabupaten/kota melakukan pelaporan terkait upaya yang sudah dilakukan dalam rangka penurunan emisi GRK melalui kegiatan pembangunan rendah karbon. Berdasarkan data yang sudah dilaporkan melalui aplikasi AKSARA, Kabupaten Pekalongan baru melakukan pelaporan pada tahun 2021 dari sektor energi dan limbah, sehingga belum dapat diketahui seberapa jauh upaya secara total yang sudah dilakukan dalam rangka mengurangi emisi GRK di Kabupaten Pekalongan. Berikut ini adalah upaya pembangunan rendah karbon yang sudah dilakukan pada tahun 2021 dari sektor energi dan limbah.

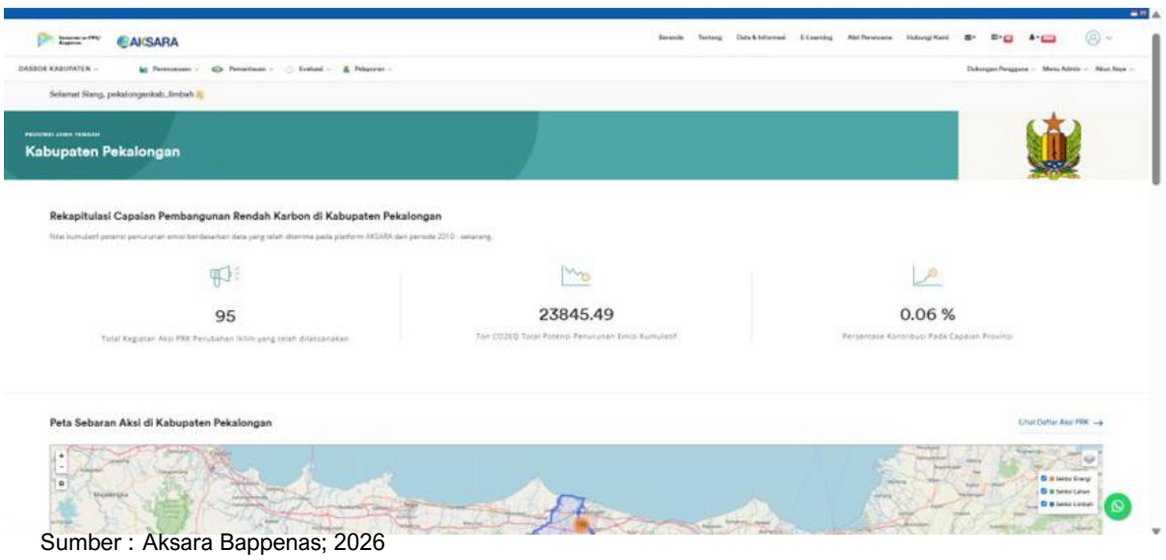
Tabel 2.27.
Upaya Pembangunan Rendah Karbon
di Kabupaten Pekalongan Tahun 2021

SEKTOR MITIGASI	SUB-SEKTOR MITIGASI	KATEGORI	POTENSI PENURUNAN EMISI (TON CO_2)	PELAKSANA KEGIATAN
Energi	Transportasi	Peremajaan Armada Angkutan Umum	12960	Dinas Perhubungan
Pengelolaan Limbah	Persampahan	Pendukung	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Pengelolaan Limbah	Persampahan	Pendukung	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Pengelolaan Limbah	Persampahan	Bank Sampah	4,59	Unit BSU PAKUMBULAN BERSERI
Pengelolaan Limbah	Persampahan	Bank Sampah	3,39	Unit BSU RESIK MULYA
Pengelolaan Limbah	Persampahan	Bank Sampah	4,99	Unit BSU BERKAH MULYA
Pengelolaan Limbah	Persampahan	Bank Sampah	2,40	Unit BSU BLOK E
Pengelolaan Limbah	Persampahan	Bank Sampah	7,99	Unit BSU KREASI SEJAHTERA
Pengelolaan Limbah	Persampahan	Bank Sampah	-	Unit BSU SIDO RESIK
Pengelolaan Limbah	Persampahan	Bank Sampah	-	Unit BSU JALIN SETIA
Pengelolaan Limbah	Persampahan	Bank Sampah	5,99	Unit BSU CAPING GUNUNG

SEKTOR MITIGASI	SUB-SEKTOR MITIGASI	KATEGORI	POTENSI PENURUNAN EMISI (TON CO_2)	PELAKSANA KEGIATAN
Pengelolaan Limbah	Persampahan	Bank Sampah	34,94	Unit BSU GEJLIG APIK

Sumber : AKSARA, PPRK/Bappenas; 2021

Penyelarasan target penurunan emisi GRK Kabupaten Pekalongan tahun 2025 adalah sebesar **854.836,43** ton CO2eq, sedangkan capaian penurunan emisi GRK kumulatif Kabupaten Pekalongan pada aplikasi aksara per 1 Januari 2026 sebesar 23.846,49 ton CO2Eq, sehingga masih terdapat gap sebesar 878.682,92 ton CO2eq atau sekitar 2,79% yang baru terealisasi. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Aksara Bappenas; 2026

Gambar 2.23. Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif di Kabupaten Pekalongan Tahun 2025

Beberapa Upaya pemerintah Kabupaten Pekalongan kontribusi penurunan emisi GRK antara lain :

a) Sektor Lahan & Kehutanan: Restorasi lahan rusak, rehabilitasi hutan, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
b) Ekosistem Karbon Biru: Prioritas rehabilitasi mangrove dan lamun untuk penyerapan karbon maksimal.
c) Sektor Industri & Limbah: Penerapan standar industri hijau (efisiensi energi dan teknologi rendah karbon) serta perbaikan sistem pengelolaan sampah/limbah.
d) Kebijakan Pendukung: Inventarisasi, verifikasi, dan registrasi emisi GRK untuk memantau capaian target.

2). Indeks Risiko Bencana (IRB)

IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

Pembagian kelas risiko berdasarkan angka:
1. IRB < 13 adalah **rendah**
2. IRB 13 - 144 adalah **sedang**
3. IRB > 144 adalah **tinggi**

Berdasarkan Surat BNPB No. B-009/BNPB/PERB/SS.01.01/01/2023 perihal Metode Perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), agar pemerintah daerah melalui BPBD berfokus pada peningkatan kapasitas yang diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang berdasarkan 7 prioritas, yaitu:

a) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;
b) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
c) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;
d) Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
e) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
f) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan
g) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Tabel 2.28.
Indeks Resiko Bencana (IRB)
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1.	**Indeks Resiko Bencana (IRB)**	**160,19**	**168,52**	**149,83**	**131,25**	**102,14**
2.	Kelas Resiko	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi

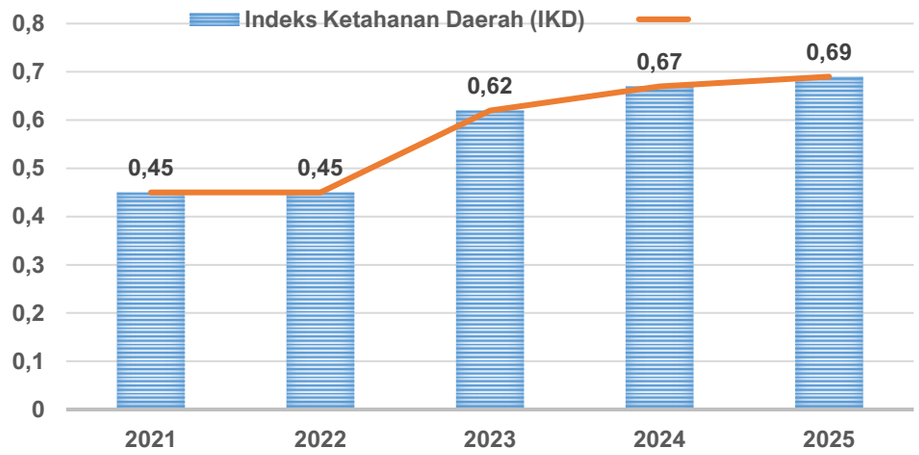
Sumber : InaRisk BNPB, 2025

Kabupaten Pekalongan memiliki indeks risiko tinggi dengan nilai indeks 102,14 di Tahun 2025 dengan ancaman bencana banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan melakukan upaya pengelolaan risiko bencana untuk mengurangi kerugian akibat bencana seminimal mungkin. Upaya pengelolaan risiko bencana ini didasari dengan pemahaman risiko bencana yang ada yang diperoleh melalui suatu kajian risiko bencana. Informasi risiko bencana tersebut kemudian dijadikan salah satu dasar dalam perumusan berbagai upaya penanggulangan bencana.

3). Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan bagian dari perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). IKD dinilai setiap tahun untuk untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan di daerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya. Kewenangan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan terkait dengan kebencanaan dapat dilaksanakan secara lintas sektor, melalui pelaksanaan rencana kerja masing-masing unit OPD dan penganggaran daerah yang disusun berdasarkan koordinasi Bapperida di tataran daerah. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam program kegiatan lintas sektor ini diharapkan dapat berlangsung lebih baik dengan adanya instrumen kebijakan ini.

Penilaian IKD dilaksanakan dengan metode diskusi terfokus *(Focus Group Discussion)* terkait daftar isian (kuesioner) yang isi jawabannya disepakati bersama oleh *multistakeholders* yang disesuaikan dengan jenis dan karakter ancaman bencana di wilayah tersebut. Hasil penilaian IKD kemudian ditindaklanjuti menjadi rekomendasi dan kebijakan strategis untuk meningkatkan ketahanan daerah yang secara langsung berdampak pada penurunan IRBI. Hasil penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Pekalongan Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : BPBD Kab. Pekalongan, 2025

Gambar 2.24. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Pekalongan Tahun 2021 - 2025

IKD didapatkan dari isian kuesioner/daftar pertanyaan dalam 7 parameter Indeks Ketahanan Daerah. Dalam 7 parameter IKD sendiri terdapat 7 Prioritas dan 71 Indikator. Setiap indikator diturunkan menjadi 4 pertanyaan kunci, sehingga total ada 284 pertanyaan kunci. Setiap pertanyaan kunci wajib disertakan bukti verifikasi *(evidence)* seperti salinan peraturan, dokumentasi kegiatan, daftar hadir, dokumen anggaran, dan lain-lain.

Berdasarkan penilaian ketahanan secara keseluruhan ketahanan daerah Kabupaten Pekalongan dalam menghadapi potensi bencana memiliki Indeks Ketahanan Daerah **0,69** di Tahun 2025 dan nilai ini menunjukkan Tingkat Kapasitas Daerah Sedang. Capaian ini adalah suatu keberhasilan bagi Kabupaten Pekalongan dalam rangka progres penurunan IRBI Daerah dan sebab apabila dibandingkan dengan nilai IKD tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan yang signifikan. Artinya telah ada upaya dari multi-stakeholders yang konsen, positif dan masif dalam pengendalian dan pengurangan risiko bencana di daerah.

g. Demografi

1). Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan tahun 2025 sebanyak **1.030.342 jiwa** terdiri dari laki-laki **523.526 jiwa (50,81%)** dan perempuan **506.816 jiwa (49,19%)** dengan laju pertambahan penduduk sebesar **1,15** . Dilihat dari rasio jenis kelamin sebesar **103,30**, jumlah penduduk tahun 2025 lebih banyak laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Selanjutnya jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 seperti dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.29.
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
dan Jenis Kelamin Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total	Laju Pertumbuhan 2021-2025 (%)
1.	Kandangserang	18.814	18.659	37.473	0,86
2.	Paninggaran	23.328	22.356	45.684	1,69
3.	Lebakbarang	5.814	5.843	11.657	0,87
4.	Petungkriyono	6.972	6.757	13.729	0,74
5.	Talun	17.066	16.211	33.277	1,56
6.	Doro	25.232	24.071	49.303	1,66
7.	Karanganyar	25.527	24.489	50.016	2,01
8.	Kajen	41.061	39.858	80.919	1,97
9.	Kesesi	38.881	37.810	76.691	1,26
10.	Sragi	33.661	33.613	67.274	0,46
11.	Siwalan	21.800	21.262	43.062	0,68
12.	Bojong	41.175	39.500	80.675	1,47
13.	Wonopringgo	25.615	25.056	50.671	1,15
14.	Kedungwuni	53.542	51.515	105.057	0,75
15.	Karangdadap	23.385	21.879	45.264	1,78
16.	Buaran	24.777	24.150	48.927	0,71
17.	Tirto	40.418	38.724	79.142	1,08
18.	Wiradesa	32.713	31.995	64.708	0,73
19.	Wonokerto	23.745	23.068	46.813	0,23
JUMLAH 2025		**523.526**	**506.816**	**1.030.342**	
2024		517.684	501.322	1.019.006	1,15
2023		511.671	495.713	1.007.384	1,19
2022		500.355	486.100	986.455	1,23
2021		495.409	481.095	976.504	2,01

Sumber : BPS Kab. Pekalongan Tahun 2026

2). Kepadatan Penduduk

Penyebaran penduduk Kabupaten Pekalongan belum begitu merata. Hal ini terlihat dari angka kepadatan penduduk antar kecamatan yang berbeda cukup signifikan. Angka kepadatan penduduk di dapat dari perbandingan antara jumlah penduduk dibandingkan dengan luas wilayahnya. Pada tahun 2025, kepadatan penduduk Kabupaten Pekalongan mencapai 1.232,26 jiwa/km2. Jika dilihat per kecamatan, ada dua kecamatan dengan tingkat kepadatan yang rendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya (dibawah 200 jiwa/km2), yakni Lebakbarang dan Petungkriyono. Sebaliknya, ada empat kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduknya sudah mencapai diatas 4.000 jiwa/ km2 yaitu Kedungwuni, Buaran, Wiradesa, dan Tirto. Kepadatan penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 secara lengkap dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.30.
Kepadatan Penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas (ha)	Luas (km2)	Kepadatan penduduk/ km2
1.	Kandangserang	37.473	7.630,80	60,55	618,88
2.	Paninggaran	45.684	9.771,26	92,99	491,28
3.	Lebakbarang	11.657	6.311,29	58,20	200,29
4.	Petungkriyono	13.729	8.307,75	73,58	186,59
5.	Talun	33.277	4.977,18	58,57	568,16
6.	Doro	49.303	7.712,46	68,45	720,28
7.	Karanganyar	50.016	5.767,61	63,48	787,90

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas (ha)	Luas (km2)	Kepadatan penduduk/ km2
8.	Kajen	80.919	8.564,94	75,15	1.076,77
9.	Kesesi	76.691	6.882,48	68,52	1.119,25
10.	Sragi	67.274	3.413,85	32,40	2.076,36
11.	Siwalan	43.062	2.794,57	25,91	1.661,98
12.	Bojong	80.675	4.309,47	40,06	2.013,85
13.	Wonopringgo	50.671	2.065,68	18,80	2.695,27
14.	Kedungwuni	105.057	2.306,36	22,94	4.579,64
15.	Karangdadap	45.264	2.150,93	20,99	2.156,46
16.	Buaran	48.927	905,83	9,54	5.128,62
17.	Tirto	79.142	2.038,65	17,39	4.551,01
18.	Wiradesa	64.708	1.338,92	12,71	5.091,11
19.	Wonokerto	46.813	2.041,34	15,91	2.942,36
JUMLAH 2025		**1.030.342**	**89.291,37**	**836,13**	**1.232,26**
2024		1.019.006	89.291,37	836,13	**1.218,72**
2023		1.007.384	89.291,37	836,13	1.204,82
2022		986.455	89.291,37	836,13	1.179,79
2021		976.504	89.291,37	836,13	1.167,89

Sumber : BPS Kab. Pekalongan Tahun 2026

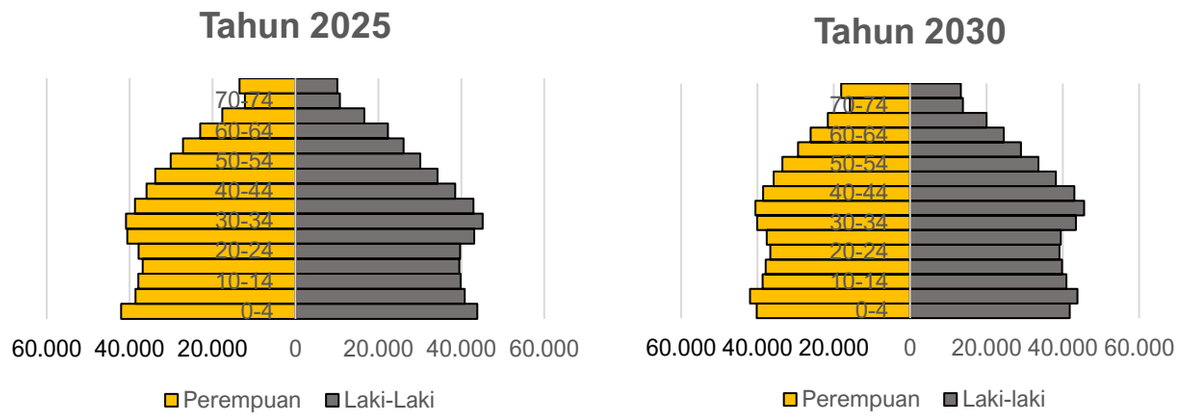
3). Proyeksi dan Analisis Penduduk 2025-2030

Jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan pada Tahun 2020 sebesar 968,82 ribu orang dan meningkat sebesar 1.03 juta orang di Tahun 2025. Jumlah penduduk diproyeksikan mencapai **1,08 juta orang** pada tahun 2030. Perkembangan proyeksi penduduk Kabupaten Pekalongan tahun 2030 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2.31.
Proyeksi Penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2030

No	Uraian	2020	2025	2030
1.	Laki-Laki (000)	492,76	523,53	549,77
2.	Perempuan (000)	478,23	506,82	531,82
3.	**Total (000)**	**970,99**	**1.030,34**	**1.081,59**
4.	Sex Ratio (%)	103,04	103,30	103,38
5.	**Komposisi Umur (%)**			
	0–14	24,06	23,58	22,87
	15–64	69,48	68,57	67,65
	65+	6,46	7,84	9,48
6.	Dependency Ratio (%)	43,92	45,83	47,82
7.	**FERTILITAS**			
	Total Fertility Rate (TFR)	2,25	2,17	2,10
8.	**MORTALITAS**			
	Infant Mortality Rate (IMR)	15,54	12,26	10,25

Sumber : data tahun 2020 berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 dan data tahun 2025-2035 berdasarkan hasil proyeksi penduduk



Sumber : BPS, Bapperida Kabupaten Pekalongan;2026

Gambar 2.25. Piramida Penduduk Kabupaten Pekalongan, 2025 dan 2030

Proyeksi penduduk Kabupaten Pekalongan menunjukkan peningkatan jumlah penduduk umur 60 tahun ke atas (lanjut usia) di Kabupaten Pekalongan dalam periode 2020–2030. Proporsi penduduk umur 60 tahun ke atas pada 2020 sebesar 6,46 persen. Proyeksi proporsi penduduk umur 60 tahun ke atas menjadi 9,48 persen pada tahun 2030. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Pekalongan sudah memasuki fase struktur umur penduduk menua, yang ditandai dengan proporsi penduduk berusia 60 tahun ke atas di Kabupaten Pekalongan yang sudah mendekati 10 persen dari total penduduk.

Selanjutnya dari hasil proyeksi memperlihatkan adanya tren penurunan komposisi pada penduduk umur 0–14 tahun dari 24,06 persen pada tahun 2020 menjadi 22,87 persen pada tahun 2030. Sedangkan komposisi Penduduk umur 15-64 tahun yang merupakan penduduk usia produktif diproyeksikan akan menurun dari 69,48 persen di tahun 2020 akan menurun menjadi 67,65 persen dari jumlah total penduduk di tahun 2030.

Rasio ketergantungan pada tahun 2020 adalah sebesar 43,92. Rasio ketergantungan ini meningkat menjadi 45,83 di tahun 2025. Kemudian, rasio ketergantungan ini terus meningkat sebesar 47,82 pada tahun 2030. Hal tersebut menunjukkan terdapat 48 penduduk usia nonproduktif untuk setiap 100 penduduk usia produktif.

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Kesejahteraan Ekonomi

1). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sementara PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.32.
Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB)
Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Sektor	2021	2022	2023	2024*	2025**
		(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.050.243,50	4.205.638,06	4.553.732,32	4.920.763,40	5.284.106,28
B	Pertambangan & Penggalian	1.021.324,51	1.018.506,90	1.070.449,19	1.145.449,80	1.181.143,69
C	Industri pengolahan	7.439.647,01	7.988.775,85	8.475.219,23	8.989.018,85	9.689.689,78
D	Pengadaan Listrik dan Gas	34.719,65	35.994,83	38.509,74	41.752,02	44.593,29
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur ulang	8.996,35	9.430,59	9.809,56	10.446,62	11.459,82
F	Konstruksi	1.716.109,14	1.906.567,75	2.186.812,60	2.379.636,36	2.549.674,08
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.276.465,86	3.575.981,52	3.877.095,40	4.062.920,35	4.335.911,93
H	Transportasi dan Pergudangan	471.413,03	774.727,93	893.600,19	946.903,31	1.017.099,24
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.283.038,48	1.474.338,51	1.668.740,07	1.902.280,99	2.130.707,62
J	Informasi dan Komunikasi	613.984,04	629.984,98	693.292,24	764.027,98	828.827,29
K	Jasa keuangan dan Asuransi	606.044,51	640.890,15	683.804,40	709.094,20	767.297,87
L	Real Estate	314.175,88	327.427,99	354.913,12	383.653,97	410.817,47
M,N	Jasa Perusahaan	78.984,32	85.034,01	93.571,83	104.219,32	113.131,17
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	699.040,41	729.493,67	779.678,07	878.223,87	926.878,93
P	Jasa Pendidikan	1.545.123,28	1.614.878,26	1.752.136,80	1.975.686,66	2.156.260,75
Q	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	370.017,38	387.013,70	423.246,29	463.947,18	492.458,87
R,S,T,U	Jasa lainnya	500.972,91	557.904,23	611.815,28	674.074,81	744.148,21
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		**24.030.300,26**	**25.962.588,93**	**28.166.426,33**	**30.352.099,69**	**32.684.206,29**

Sumber : BPS Kab. Pekalongan, 2026 *) angka sementara **)Angka sangat sementara

Dari tabel diatas, struktur perekonomian sebagian masyarakat Kabupaten Pekalongan pada tahun 2025 dengan sektor industri pengolahan memiliki peranan paling dominan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pekalongan. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan pada tahun 2025 sebesar 32,68 triliun **lebih tinggi** dari Tahun 2024 sebesar Rp 30,35 triliun dengan sumbangan sektor terbesar dari industri pengolahan sebesar Rp 9,69 triliun (29,65 persen), sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp 5,28 triliun (16,17 persen), sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp 4,34 triliun (13,27 persen) dan sektor konstruksi sebesar Rp 2,55 triliun (7,80 persen).

Nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.33.
Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Harga Konstan (PDRB ADHK)
Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Sektor	2021	2022	2023	2024*	2025**
		(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.475.649,88	2.494.737,03	2.556.850,41	2.597.964,98	2.730.989,36
B	Pertambangan & Penggalian	619.617,49	605.614,13	618.158,18	655.090,28	662.315,22
C	Industri pengolahan	5.134.118,70	5.344.704,61	5.489.185,15	5.667.333,74	6.016.315,70
D	Pengadaan Listrik & Gas	30.882,92	31.844,10	33.510,29	35.900,40	38.288,54
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur ulang	7.951,66	8.143,30	8.357,72	8.503,80	8.925,44
F	Konstruksi	1.151.633,62	1.200.117,40	1.336.398,81	1.447.362,95	1.537.252,14
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.525.055,66	2.671.363,30	2.813.373,72	2.896.145,48	3.020.466,00
H	Transportasi dan Pergudangan	374.165,52	582.663,81	621.814,74	649.399,86	688.646,04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	934.326,56	1.054.817,94	1.180.112,78	1.319.310,29	1.454.474,11
J	Informasi dan Komunikasi	635.003,63	649.862,71	716.743,13	789.389,24	855.590,98
K	Jasa keuangan dan Asuransi	396.304,81	398.465,76	411.861,90	421.525,50	447.304,82
L	Real Estate	255.448,15	262.702,88	281.794,68	303.266,93	321.521,73
M,N	Jasa Perusahaan	52.841,61	55.066,24	58.333,89	63.989,92	68.241,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	482.411,75	492.735,36	517.287,52	573.902,57	594.243,57

No	Sektor	2021	2022	2023	2024*	2025**
		(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)
P	Jasa Pendidikan	894.392,09	931.509,36	992.234,95	1.086.208,50	1.159.430,93
Q	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	262.003,34	270.361,25	288.101,44	310.522,06	323.517,58
R,S,T,U	Jasa lainnya	383.258,27	408.706,62	434.351,45	465.361,41	498.392,74
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		**16.615.065,66**	**17.463.415,80**	**18.358.470,76**	**19.291.177,92**	**20.425.915,91**

Sumber : BPS Kab. Pekalongan, 2026 *) angka sementara **)Angka sangat sementara

Dari tabel diatas, Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan tahun 2025 sebesar Rp 20,43 triliun lebih tinggi dari Tahun 2024 sebesar Rp 19,29 triliun dengan sumbangan sektor terbesar dari sektor industri pengolahan sebesar Rp 6,02 triliun (29,45 persen), kemudian sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp 3,02 triliun (14,79 persen), sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp 2,73 triliun (13,37 persen), dan sektor konstruksi sebesar Rp 1,54 triliun (7,53 persen).

Adapun Perkembangan Kontribusi Sektor dan PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.34.
Perkembangan Kontribusi Sektor dan PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Sektor	2021		2022		2023		2024*		2025**	
		Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	16,85	14,90	16,20	14,29	16,17	13,93	16,21	13,47	16,17	13,37
B	Pertambangan & Penggalian	4,25	3,73	3,92	3,47	3,80	3,37	3,77	3,40	3,61	3,24
C	Industri pengolahan	30,96	30,90	30,77	30,61	30,09	29,90	29,62	29,38	29,65	29,45
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,14	0,19	0,14	0,18	0,14	0,18	0,14	0,19	0,14	0,19
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur ulang	0,04	0,05	0,04	0,05	0,03	0,05	0,03	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi	7,14	6,93	7,34	6,87	7,76	7,28	7,84	7,50	7,80	7,53
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,63	15,20	13,77	15,30	13,76	15,32	13,39	15,01	13,27	14,79
H	Transportasi dan Pergudangan	1,96	2,25	2,98	3,34	3,17	3,39	3,12	3,37	3,11	3,37
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,34	5,62	5,68	6,04	5,92	6,43	6,27	6,84	6,52	7,12
J	Informasi dan Komunikasi	2,56	3,82	2,43	3,72	2,46	3,90	2,52	4,09	2,54	4,19
K	Jasa keuangan dan Asuransi	2,52	2,39	2,47	2,28	2,43	2,24	2,34	2,19	2,35	2,19
L	Real Estate	1,31	1,54	1,26	1,50	1,26	1,53	1,26	1,57	1,26	1,57
M,N	Jasa Perusahaan	0,33	0,32	0,33	0,32	0,33	0,32	0,34	0,33	0,35	0,33
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,91	2,90	2,81	2,82	2,77	2,82	2,89	2,97	2,84	2,91
P	Jasa Pendidikan	6,43	5,38	6,22	5,33	6,22	5,40	6,51	5,63	6,60	5,68
Q	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,54	1,58	1,49	1,55	1,50	1,57	1,53	1,61	1,51	1,58
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,08	2,31	2,15	2,34	2,17	2,37	2,22	2,41	2,28	2,44
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : BPS Kab. Pekalongan, 2026 *) Angka sementara **)Angka sangat sementara

Dari tabel diatas, perkembangan kontribusi sektor PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Hb) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan pada tahun 2025 yang terbesar dihasilkan oleh sektor industri pengolahan sebesar 29,65 persen, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 16,17 persen, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,27 persen dan sektor konstruksi sebesar 7,80 persen.

Sedangkan perkembangan kontribusi sektor PDRB atas Dasar Harga Konstan (Hk) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan pada tahun 2025 yang terbesar dihasilkan oleh sektor industri pengolahan sebesar 29,45 persen, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14,79 persen, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 13,37 persen, dan sektor konstruksi sebesar 7,53 persen.

2). Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pekalongan tahun 2025 tercatat mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 5,88 persen, meningkat dibandingkan capaian tahun 2024 yang tumbuh sebesar 5,08 persen. Selengkapnya pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pekalongan tahun 2021-2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

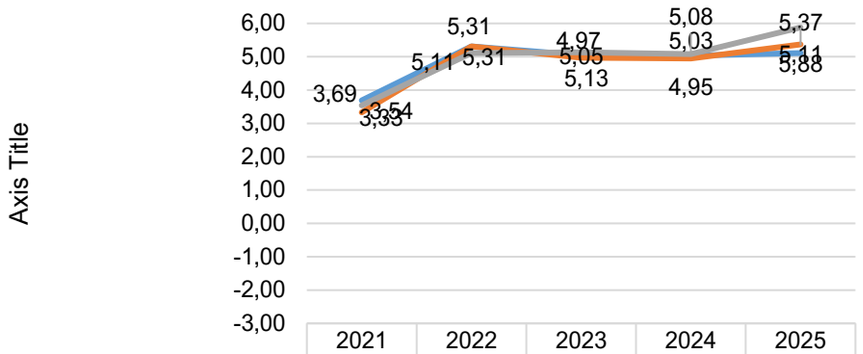
Tabel 2.35.
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 - 2025

No	Sektor	2021	2022	2023	2024*	2025**
A	Pertanian. Kehutanan dan Perikanan	2,48	0,77	2,49	1,61	5,12
B	Pertambangan & Penggalian	2,03	-2,26	2,07	5,97	1,10
C	Industri pengolahan	3,75	4,10	2,70	3,25	6,16
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,74	3,11	5,23	7,13	6,65
E	Pengadaan Air. Pengolahan Sampah. Limbah dan Daur ulang	4,48	2,41	2,63	1,75	4,96
F	Konstruksi	7,35	4,21	11,36	8,30	6,21
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,59	5,79	5,32	2,94	4,29
H	Transportasi dan Pergudangan	2,42	55,72	6,72	4,44	6,04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,05	12,90	11,88	11,80	10,25
J	Informasi dan Komunikasi	4,32	2,34	10,29	10,14	8,39
K	Jasa keuangan dan Asuransi	1,82	0,55	3,36	2,35	6,12
L	Real Estate	1,27	2,84	7,27	7,62	6,02
M.N	Jasa Perusahaan	2,41	4,21	5,93	9,70	6,64
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-2,31	2,14	4,98	10,94	3,54
P	Jasa Pendidikan	1,04	4,15	6,52	9,47	6,74
Q	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,64	3,19	6,56	7,78	4,19
R.S.T.U	Jasa lainnya	1,28	6,64	6,27	7,14	7,10
Pertumbuhan Ekonomi		**3,54**	**5,11**	**5,13**	**5,08**	**5,88**

Sumber : BPS Kab. Pekalongan. 2026

Capaian positif pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan selama 2025 ditopang dengan penguatan kinerja sejumlah komponen pada sektor lapangan usaha. Tercatat, Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan meliputi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,25 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 8,39 persen; Jasa Lainnya sebesar 7,10 persen, Jasa Pendidikan sebesar 6,74 persen dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6,65 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 sebesar 5,88 persen lebih besar dari Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,37 persen dan nasional sebesar 5,02 persen. Selengkapnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2021-2025 dapat dilihat pada gambar berikut.

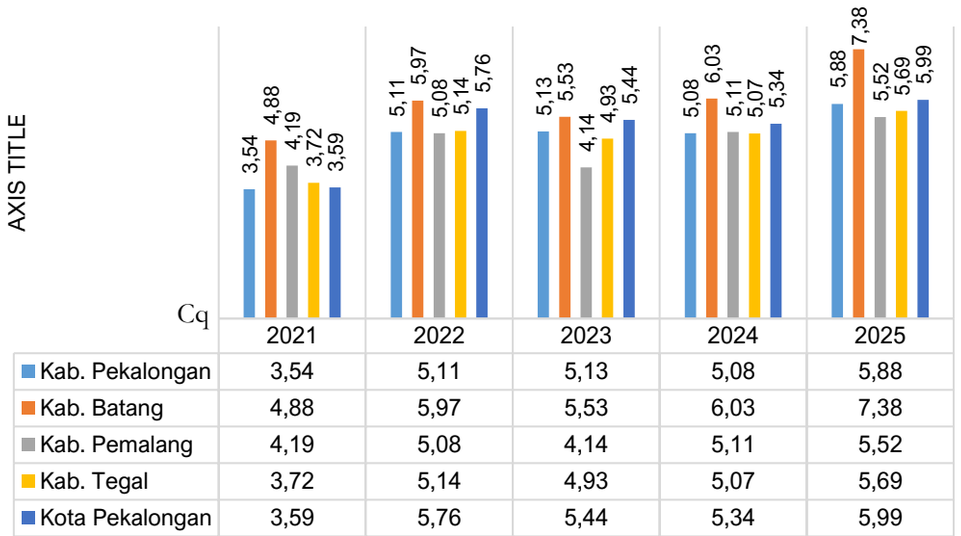


	2021	2022	2023	2024	2025
Nasional	3,69	5,31	5,05	5,03	5,11
Provinsi Jawa Tengah	3,33	5,31	4,97	4,95	5,37
Kab. Pekalongan	3,54	5,11	5,13	5,08	5,88

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Maret 2021-2025

Gambar 2.26. Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

Kemudian capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada gambar berikut.



Cq	2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Pekalongan	3,54	5,11	5,13	5,08	5,88
Kab. Batang	4,88	5,97	5,53	6,03	7,38
Kab. Pemalang	4,19	5,08	4,14	5,11	5,52
Kab. Tegal	3,72	5,14	4,93	5,07	5,69
Kota Pekalongan	3,59	5,76	5,44	5,34	5,99

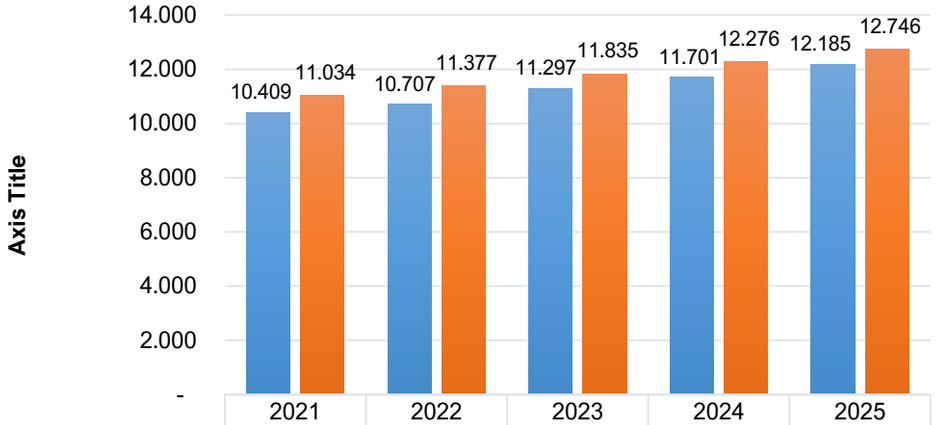
Sumber : BPS Provinsi Jateng, 2026

Gambar 2.27. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2021-2025

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 sebesar 5,88 persen, lebih tinggi dibandingkan 3 (tiga) kabupaten/kota sekitar antara lain, Kabupaten Pemalang (5,52%), Kabupaten Tegal (5,69%) dan Kota Pekalongan (5,99%) dan lebih rendah dibandingkan Kabupaten Batang (7,38%).

3). Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita disesuaikan di Kabupaten Pekalongan naik dari Rp. 11.701.000,00,- di tahun 2024 menjadi Rp.12.185.000,00 di tahun 2025. Capaian pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Pekalongan dari 2021-2025 secara umum di bawah pencapaian Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengeluaran perkapita di Kabupaten Pekalongan semakin meningkat, namun peningkatan daya beli rumah tangga masih di bawah Provinsi Jawa Tengah. Perkembangan pengeluaran perkapita (disesuaikan) Kabupaten Pekalongan tahun 2021-2025 dapat dilihat gambar berikut.

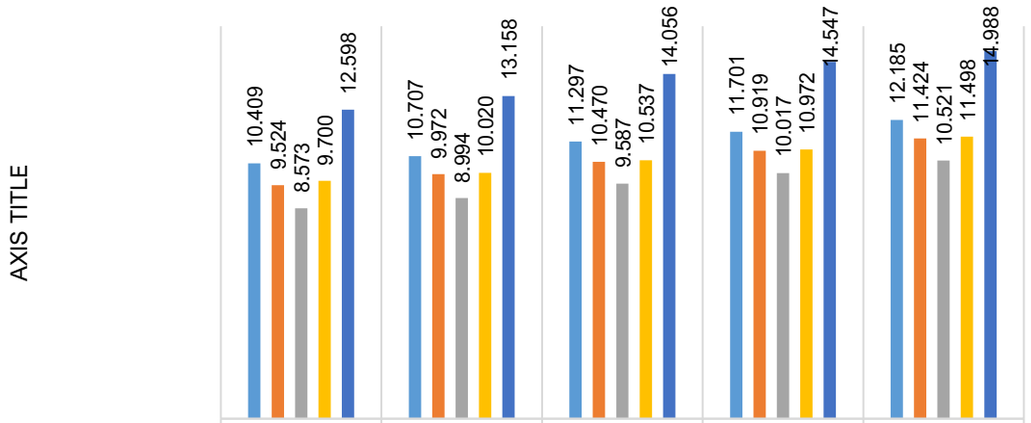


	2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Pekalongan	10.409	10.707	11.297	11.701	12.185
Jawa Tengah	11.034	11.377	11.835	12.276	12.746

Sumber : BPS Provinsi Jateng, 2026

Gambar 2.28. Pengeluaran per kapita Disesuaikan Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025

Pengeluaran perkapita disesuaikan Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada gambar berikut.



	2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Pekalongan	10.409	10.707	11.297	11.701	12.185
Kab. Batang	9.524	9.972	10.470	10.919	11.424
Kab. Pemalang	8.573	8.994	9.587	10.017	10.521
Kab. Tegal	9.700	10.020	10.537	10.972	11.498
Kota Pekalongan	12.598	13.158	14.056	14.547	14.988

Sumber : BPS Provinsi Jateng, 2025

Gambar 2.29. Pengeluaran per kapita Disesuaikan Kabupaten Pekalongan Dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2021- 2025

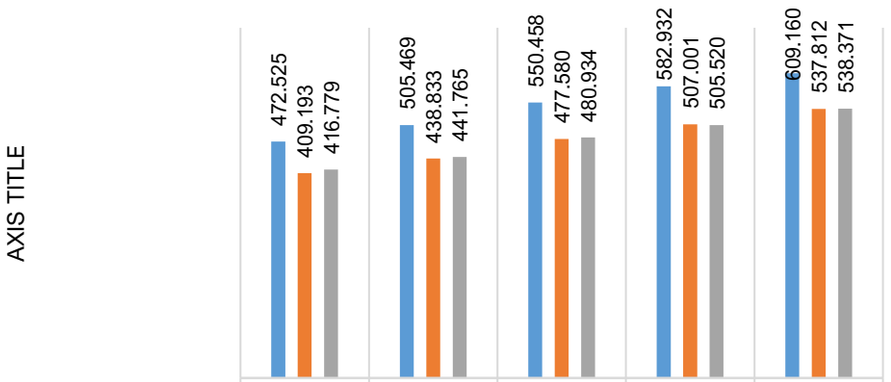
Dari gambar diatas, pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Pekalongan tahun 2025 sebesar Rp. 12.185.000,- lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Batang sebesar Rp. 11.424.000,-, Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 10.521.000,-, Kabupaten Tegal sebesar Rp. 11.498.000,- dan dan lebih rendah dibandingkan Kota Pekalongan sebesar Rp. 14.988.000,-.

4). Kemiskinan

Kemiskinan di suatu wilayah dapat dijelaskan melalui beberapa indikator antara lain garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin serta karakteristik penduduk miskin itu sendiri berdasarkan fasilitas tempat tinggal, tingkat pendidikan, status pekerjaan, status kesehatan dan lainnya.

1) Garis Kemiskinan (GK)

Garis Kemiskinan adalah nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang dipergunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Pekalongan pada Tahun 2024 sebesar Rp. 505.520 per kapita per bulan berada di atas GK Provinsi sebesar Rp. 507.001 per kapita per bulan dan di bawah GK Nasional sebesar Rp. 582.932 per kapita per bulan. Tahun 2025 Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Pekalongan meningkat menjadi Rp. 538.371 per kapita per bulan berada di atas GK Provinsi sebesar Rp. 537.812 per kapita per bulan dan di bawah Nasional sebesar Rp. 609.160 per kapita per bulan. Garis Kemiskinan di Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025 dapat dilihat gambar berikut.



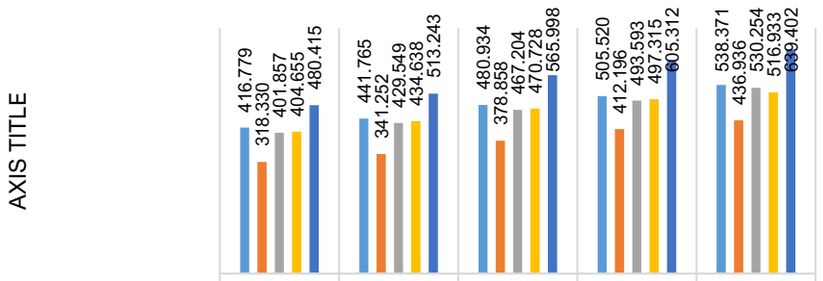
	2021	2022	2023	2024	2025
Nasional	472.525	505.469	550.458	582.932	609.160
Prov. Jawa Tengah	409.193	438.833	477.580	507.001	537.812
Kab. Pekalongan	416.779	441.765	480.934	505.520	538.371

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Maret 2021-2025

Gambar 2.30. Garis Kemiskinan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

Dari gambar diatas, garis kemiskinan di Kabupaten Pekalongan 2021-2025 selalu naik setiap tahun. Hal ini terjadi karena trend akan kebutuhan setiap saat berubah. Tabel di atas juga bisa diartikan bahwa besarnya konsumsi perkapita per bulan penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan pada Tahun 2025 maksimal sebesar Rp. 538.371,- per kapita per bulan.

Garis kemiskinan Kabupaten Pekalongan tahun 2025 sebesar Rp. 538.371,- per kapita per bulan lebih tinggi dibandingkan garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yang sebesar Rp. 537.812 per kapita per bulan. Hal ini dapat diartikan bahwa kemampuan penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan dalam mencukupi kebutuhannya lebih tinggi dibandingkan di Provinsi Jawa Tengah.. Garis kemiskinan Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada gambar berikut.



	2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Pekalongan	416.779	441.765	480.934	505.520	538.371
Kab. Batang	318.330	341.252	378.858	412.196	436.936
Kab. Pemalang	401.857	429.549	467.204	493.593	530.254
Kab. Tegal	404.655	434.638	470.728	497.315	516.933
Kota Pekalongan	480.415	513.243	565.998	605.312	639.402

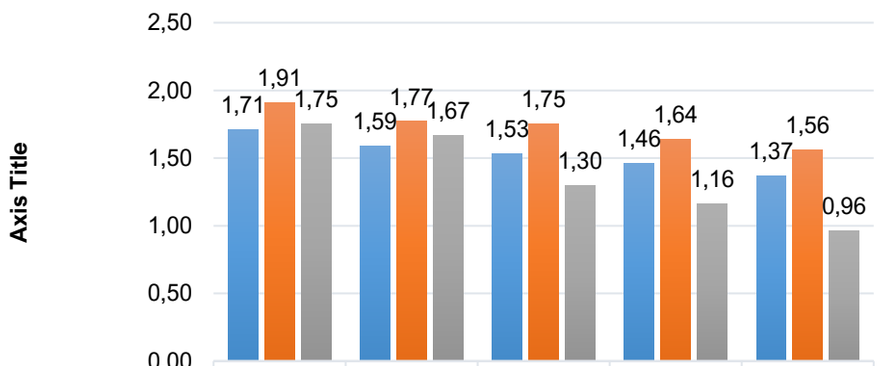
Sumber : BPS Provinsi Jateng, Maret 2024

Gambar 2.31. Garis Kemiskinan Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2021- 2025

Dari gambar di atas, garis Kabupaten Pekalongan tahun 2025 sebesar Rp. 538.371,- lebih tinggi bila dibandingkan dengan Kabupaten Batang, Pemalang dan Tegal dan lebih rendah dari Kota Pekalongan. Dengan kata lain, dapat diketahui apabila penduduk Kabupaten Pekalongan tinggal di 3 (tiga) kabupaten tersebut diatas tidak termasuk kategori warga miskin.

2) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks kedalaman kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. P1Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 adalah 0,96 lebih rendah dibandingkan angka provinsi Jawa Tengah sebesar 1,56 dan Nasional sebesar 1,37. Penurunan P1 di Kabupaten Pekalongan mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin tersebut cenderung makin menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di antara mereka juga semakin melebar. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

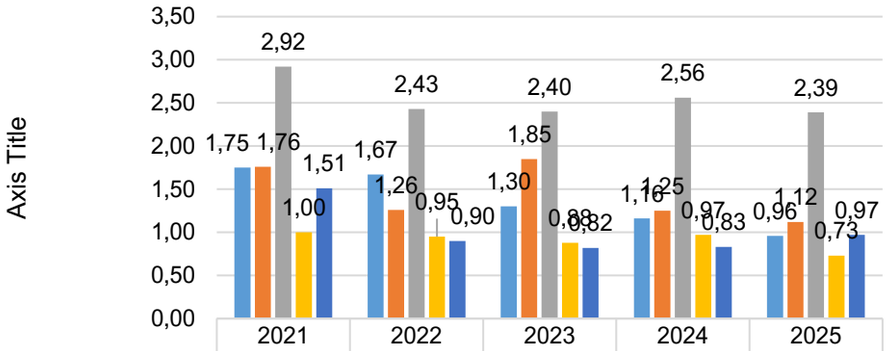


	2021	2022	2023	2024	2025
Nasional	1,71	1,59	1,53	1,46	1,37
Prov. Tengah	1,91	1,77	1,75	1,64	1,56
Kab.Pekalongan	1,75	1,67	1,30	1,16	0,96

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Maret 2021-2025

Gambar 2.32. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

Pada periode Maret 2021 - Maret 2025, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pekalongan mengalami fluktuasi. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) cenderung menurun dari 1,75 persen pada tahun 2021 menjadi 0,96 persen pada tahun 2025 . Rata-rata capaian P1Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 masih di bawah (lebih baik) dari Provinsi Jawa Tengah. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada gambar berikut.



	2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Pekalongan	1,75	1,67	1,30	1,16	0,96
Kab. Batang	1,76	1,26	1,85	1,25	1,12
Kab. Pemalang	2,92	2,43	2,40	2,56	2,39
Kab. Tegal	1,00	0,95	0,88	0,97	0,73
Kota Pekalongan	1,51	0,90	0,82	0,83	0,97

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Maret 2021-2025

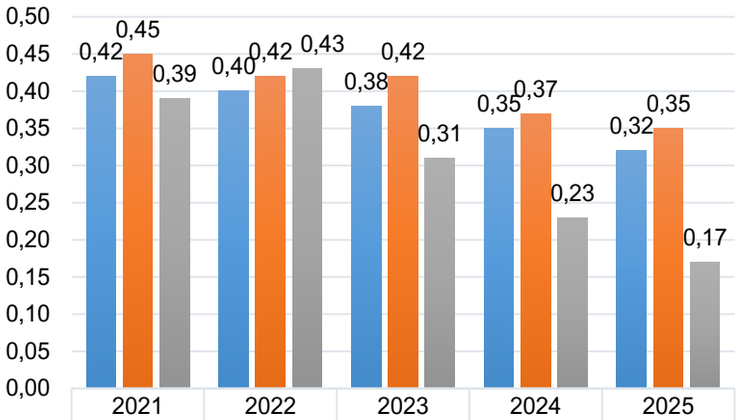
Gambar 2.33. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2021-2025

Dari gambar diatas, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 sebesar 0,96 lebih tinggi dari Kabupaten Tegal sebesar 0,73. Sedangkan capaian P1 Kabupaten Pekalongan lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Batang sebesar 1,12, Kabupaten Pemalang sebesar 2,39 dan Kota Pekalongan sebesar 0,97. P1 Kabupaten Pekalongan lebih rendah atau lebih baik karena masyarakat di bawah garis kemiskinan mengalami peningkatan kesejahteraan dan pendapatan penduduk miskin mengalami peningkatan apabila dibandingkan Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang dan Kota Pekalongan.

3) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan *(Poverty Severity Index-P2)* memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) akan menilai sejauh mana gap atau perbedaan konsumsi antar penduduk miskin. Semakin besar Angka P1 dan P2 maka semakin butuh upaya keras dalam pengentasan kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pekalongan tahun 2025 adalah 0,17 lebih rendah dibandingkan angka Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,35 dan Nasional sebesar 0,32. Selengkapnya dapat dijelaskan pada gambar berikut.

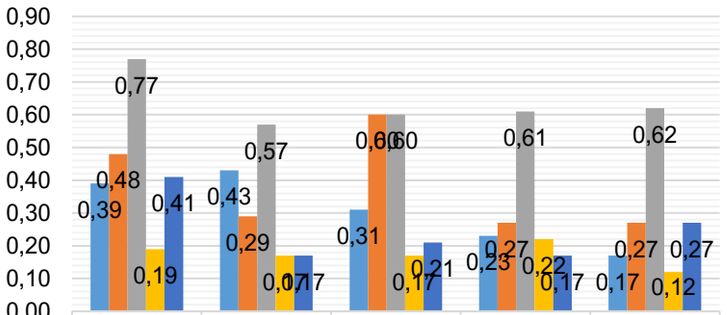


	2021	2022	2023	2024	2025
Nasional	0,42	0,40	0,38	0,35	0,32
Prov. Tengah	0,45	0,42	0,42	0,37	0,35
Kab.Pekalongan	0,39	0,43	0,31	0,23	0,17

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Maret 2021-2025

Gambar 2.34. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

Dari tabel dan gambar diatas, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pekalongan turun dari 0,39 pada tahun 2021 menjadi 0,17 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan rata-rata pengeluaran antar penduduk miskin semakin menurun. Capaian Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2021-2025 Kabupaten Pekalongan secara umum masih di bawah (lebih baik) dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada gambar berikut.



	2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Pekalongan	0,39	0,43	0,31	0,23	0,17
Kab. Batang	0,48	0,29	0,60	0,27	0,27
Kab. Pemalang	0,77	0,57	0,60	0,61	0,62
Kab. Tegal	0,19	0,17	0,17	0,22	0,12
Kota Pekalongan	0,41	0,17	0,21	0,17	0,27

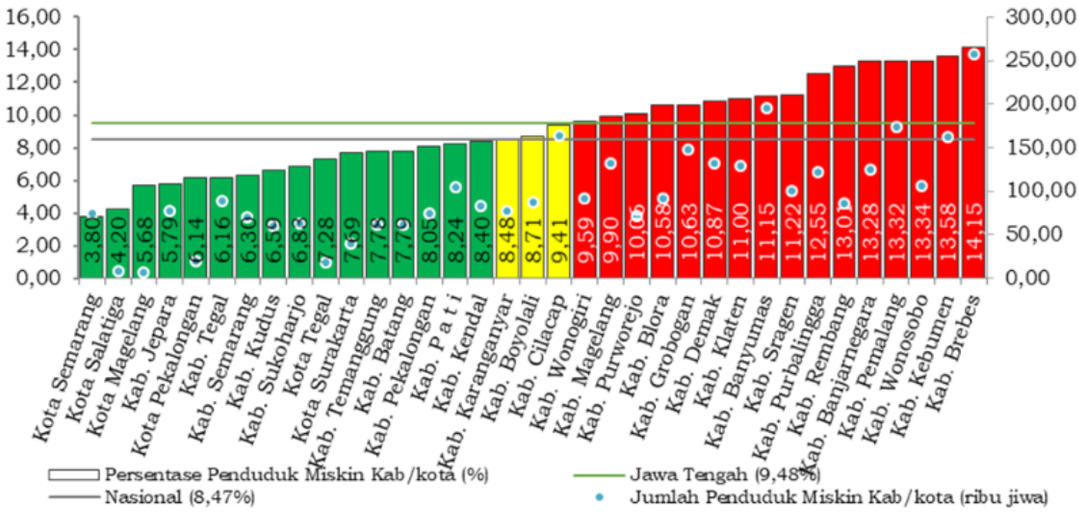
Sumber : BPS Provinsi Jateng, Maret 2021-2025

Gambar 2.35. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2021-2025

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 sebesar 0,17 lebih tinggi dari Kabupaten Tegal sebesar 0,12. Sedangkan capaian P2 Kabupaten Pekalongan lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Batang 0,27, Kabupaten Pemalang sebesar 0,62 dan Kota Pekalongan sebesar 0,27.

4) Tingkat Kemiskinan

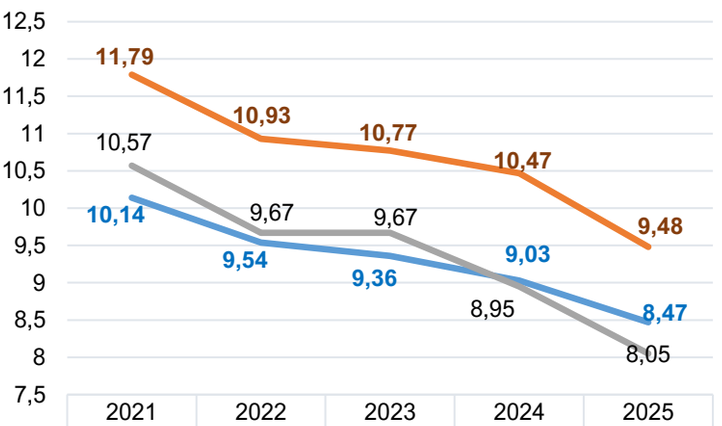
Persebaran penduduk miskin kabupaten/kota di Jawa Tengah terbagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional, kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan di atas nasional, serta kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan nasional sebagaimana gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Jateng, Maret 2026

Gambar 2.36. Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional (Maret 2025)

Kabupaten Pekalongan termasuk Kabupaten yang memiliki persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan nasional. Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2025 tercatat sebesar **8,05 persen** menurun dibandingkan Tahun 2024 sebesar **8,95 persen**. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan nasional (8,47 persen) dan di bawah Provinsi Jawa Tengah (9,48 persen). Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada gambar berikut.

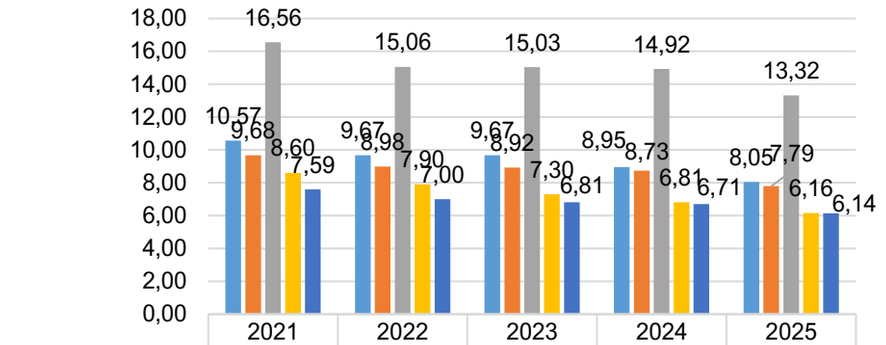


	2021	2022	2023	2024	2025
Nasional	10,14	9,54	9,36	9,03	8,47
Jawa Tengah	11,79	10,93	10,77	10,47	9,48
Kab. Pekalongan	10,57	9,67	9,67	8,95	8,05

Gambar 2.37. Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

Penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Pekalongan menunjukkan adanya perbaikan dalam kondisi sosial ekonomi masyarakat serta efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan yang mencerminkan

kapasitas tata kelola pembangunan daerah yang adaptif dan responsif terhadap tantangan. Selanjutnya Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada gambar berikut.



	2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Pekalongan	10,57	9,67	9,67	8,95	8,05
Kab. Batang	9,68	8,98	8,92	8,73	7,79
Kab. Pemalang	16,56	15,06	15,03	14,92	13,32
Kab. Tegal	8,60	7,90	7,30	6,81	6,16
Kota Pekalongan	7,59	7,00	6,81	6,71	6,14

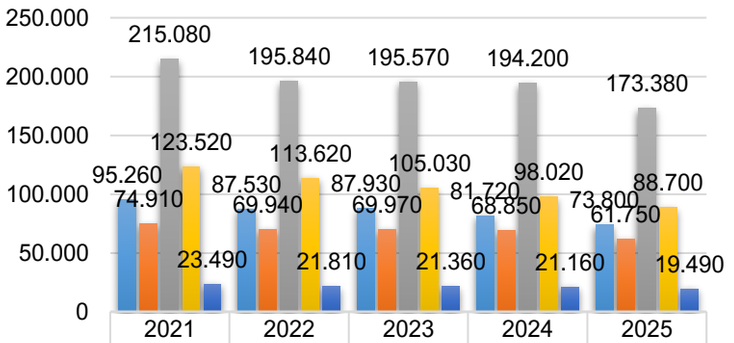
Sumber : BPS Provinsi Jateng, Maret 2020-2024

Gambar 2.38. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pekalongan, dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2021-2025

Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pekalongan tahun 2025 sebesar 8,05 persen lebih rendah dibandingkan Kabupaten Pemalang sebesar 13,32 persen dan lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Batang sebesar 7,79 persen, Kabupaten Tegal sebesar 6,16 persen dan Kota Pekalongan sebesar 6,14 persen.

5) Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Pekalongan tahun 2025 sebesar 73.800 orang lebih rendah dari Kabupaten Pemalang sebesar 173.380 jiwa dan Kabupaten Tegal sebesar 88.700 jiwa dan lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Batang sebesar 61.750 jiwa dan Kota Pekalongan sebesar 19.490 jiwa. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



	2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Pekalongan	95.260	87.530	87.930	81.720	73.800
Kab. Batang	74.910	69.940	69.970	68.850	61.750
Kab. Pemalang	215.080	195.840	195.570	194.200	173.380
Kab. Tegal	123.520	113.620	105.030	98.020	88.700
Kota Pekalongan	23.490	21.810	21.360	21.160	19.490

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Maret 2021-2025

Gambar 2.39. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2021-2025

5). Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketika individu hidup dengan pendapatan di bawah ambang batas minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, tempat tinggal, dan layanan kesehatan. Menurut definisi Bank Dunia, kemiskinan ekstrem terjadi ketika seseorang hidup dengan kurang dari US$2,15 per hari (berdasarkan nilai paritas daya beli tahun 2017).

Mendasarkan **Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem**, penghapusan miskin ekstrem menjadi salah satu indikator Tujuan 1 yaitu: Tanpa Kemiskinan di *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Inpres ini menetapkan mengenai optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Melalui Inpres ini diinstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antarkementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Kemiskinan ekstrem Kabupaten Pekalongan tahun 2024 berada di bawah nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Persentase kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pekalongan juga menurun dibandingkan dengan dari tahun 2023 sebesar 1,19 persen menjadi 0,51 persen di Tahun 2024 atau turun 0,68 persen poin.. Kemiskinan Ekstrem Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.36.
Kemiskinan Ekstrem Nasional,
Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 - 2025

No	Wilayah	Kemiskinan Ekstrem				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Nasional	2,14	2,04	1,12	1,25	0,85
2	Jawa Tengah	2,28	1,97	1,11	0,62	0,30
3	Kab. Pekalongan	2,27	2,07	1,19	0,63	0,30

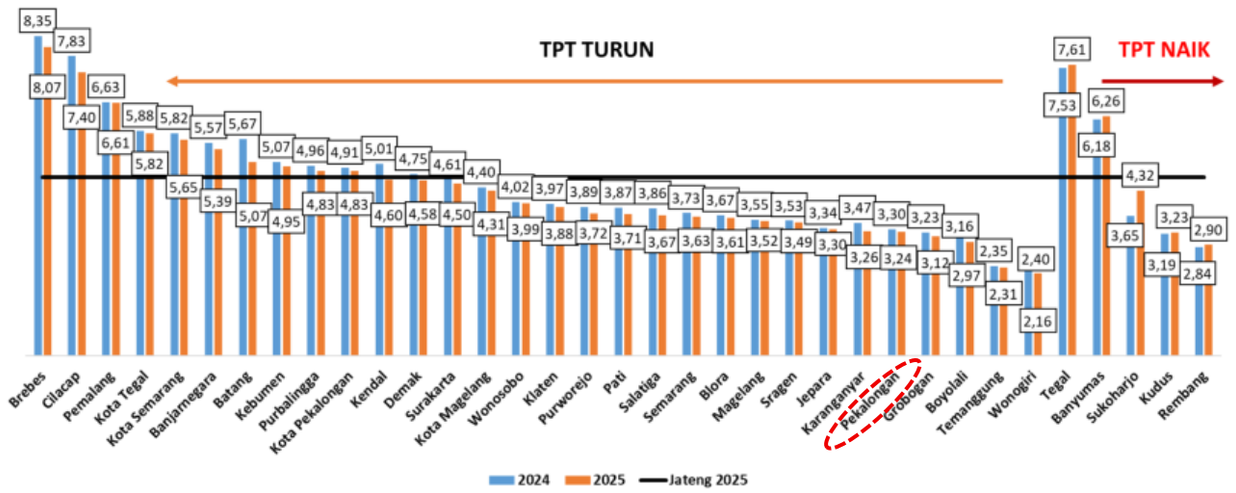
Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2021-2024

Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu fokus di Jawa Tengah dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menetapkan lokasi fokus prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang telah terbit dalam **Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 400.9.14/349** Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Fokus Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Pekalongan Tahun 2025. Lokasi fokus kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pekalongan sejumlah 8 Kecamatan yang tersebar di 10 Desa antara lain :

- Kecamatan Talun : Desa Sengare
- Kecamatan Karanganyar : Desa Kayugeritan
- Kecamatan Wonopringgo : Desa Galangpengampon, Kwagean dan Sastrodrijan
- Kecamatan Kedungwuni : Desa Tangkil Kulon
- Kecamatan Bojong : Desa Sembungjambu
- Kecamatan Sragi : Desa Bulakpelem
- Kecamatan Tirto : Desa Jeruksari
- Kecamatan Siwalan : Desa Tengengwetan

6). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan berdasarkan data Agustus 2025 menunjukkan penurunan 3,24 persen menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2024 sebesar 3,30 persen atau sebesar 0,06 point. Capaian ini **di bawah** capaian provinsi dan nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

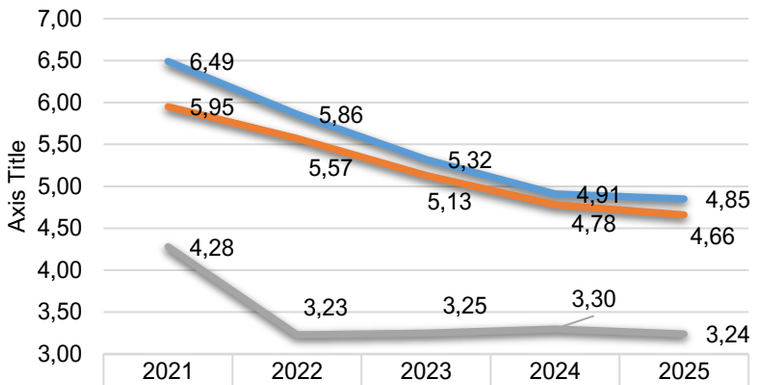


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah; Agustus 2025

Gambar 2.40. Peta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Penurunan TPT Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 sebesar 3,24 persen atau **turun sebesar 0,06 persen** dibandingkan Tahun 2024 sebesar 3,30. Penurunan ini disebabkan oleh masuknya investasi di Kabupaten Pekalongan dan upaya pemerintah daerah untuk menciptakan lapangan kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut. Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025 dapat dilihat dalam gambar berikut.



	2021	2022	2023	2024	2025
Nasional	6,49	5,86	5,32	4,91	4,85
Jawa Tengah	5,95	5,57	5,13	4,78	4,66
Kab. Pekalongan	4,28	3,23	3,25	3,30	3,24

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Agustus; 2021-2025

Gambar 2.41. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

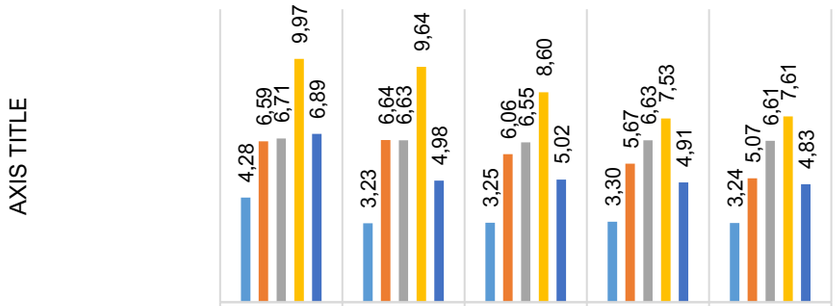
TPT di Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 sebesar 3,24 persen berarti bahwa dari 100 orang Angkatan Kerja, terdapat sekitar 3 sampai dengan 4 orang yang menganggur. Bila dilihat menurut jenis kelamin, TPT laki-laki lebih banyak dari pada TPT perempuan, yaitu TPT laki-laki sebesar 3,31 persen sedangkan TPT perempuan sebesar 3,14 persen. Angka tersebut berarti bahwa dari 100 orang Angkatan Kerja laki-laki terdapat sekitar 3-4 orang yang menganggur, sedangkan dari 100 orang Angkatan Kerja perempuan ada kira kira 3-4 orang yang menganggur. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.37.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No.	Wilayah	2021	2022	2023	2024	2025
1.	**TPT**	**4,28**	**3,23**	**3,25**	**3,30**	**3,24**
2.	TPT Laki-Laki	4,03	3,95	3,55	3,95	3,31
3.	TPT Perempuan	4,63	2,21	2,78	2,49	3,14

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Agustus; 2021-2025

Selanjutnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar tahun 2021-2025 dapat dilihat pada gambar berikut.



	2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Pekalongan	4,28	3,23	3,25	3,30	3,24
Kab. Batang	6,59	6,64	6,06	5,67	5,07
Kab. Pemalang	6,71	6,63	6,55	6,63	6,61
Kab. Tegal	9,97	9,64	8,60	7,53	7,61
Kota Pekalongan	6,89	4,98	5,02	4,91	4,83

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Data Agustus; 2020-2024

Gambar 2.42. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2021-2025

Dari tabel dan gambar diatas, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan pada tahun 2025 sebesar 3,24 persen lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Batang sebesar 5,07 persen, Kabupaten Pemalang sebesar 6,61 persen, Kabupaten Tegal sebesar 7,61 persen dan Kota Pekalongan sebesar 4,83 persen.

7). Rasio Gini

Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Kegunaan Rasio Gini ini untuk melihat ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk di suatu wilayah. Bila Rasio Gini = 0, ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Bila Rasio Gini =

1, ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh salah satu atau satu kelompok saja dan yang lainnya tidak sama sekali. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS Provinsi Jawa Tengah, Rasio Gini Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025.



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas); Maret 2026

Gambar 2.43. Rasio Gini Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025

Rasio Gini Kabupaten Pekalongan pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,334 naik dibandingkan Tahun 2024 sebesar 0,327 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah (0,359).

Rasio Gini Kabupaten Pekalongan rata-rata di bawah provinsi Jawa Tengah. koefisien gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, jika B=0 koefisien gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pemerataan pendapatan di Kabupaten Pekalongan lebih baik dibandingkan dengan rata-rata capaian di Provinsi Jawa Tengah.

8). Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia

Pemerataan pendapatan ini diperhitungkan berdasarkan pendekatan yang dilakukan oleh Bank Dunia, yaitu dengan mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok berdasarkan besarnya pendapatan. 40 persen penduduk berpendapatan rendah; 40 persen penduduk berpendapatan menengah, dan 20 persen berpendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40 persen terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Kategori ketimpangan ditentukan sebagai berikut.

1) jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ***ketimpangan pendapatan tinggi***.
2) jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen dikategorikan ***ketimpangan pendapatan sedang/menengah***.
3) jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ***ketimpangan pendapatan rendah***.

Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 yang dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2.38.
Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

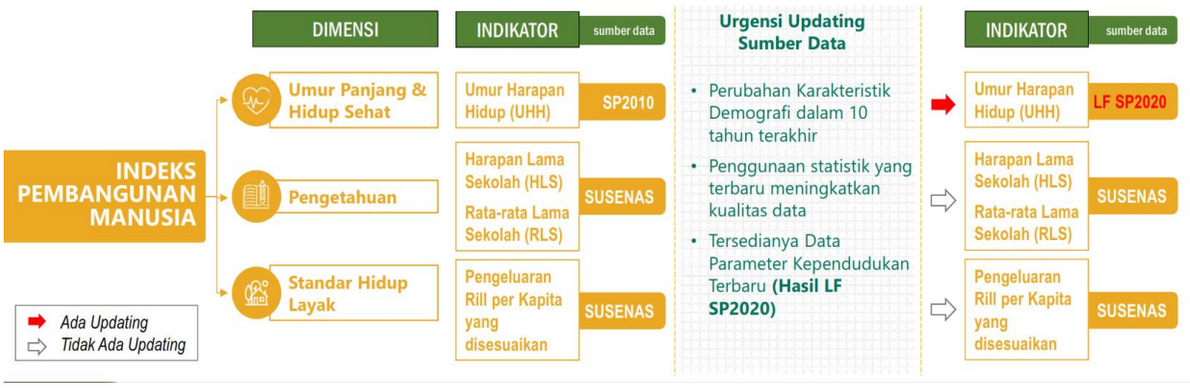
Tahun	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia		
	20% pendapatan tinggi	40% pendapatan menengah	40% pendapatan bawah
2021	39,69	38,98	21,33
2022	40,42	38,54	21,04
2023	41,56	37,73	20,71
2024	41,36	38,22	20,43
2025	42,58	36,43	20,98

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah; 2026; Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan, bahwa 40 persen penduduk berpendapatan rendah di Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 ternyata sudah menerima 20,98 persen dari total pendapatan. Angka ini sedikit lebih tinggi dibanding tahun 2025 yaitu sebesar 20,98 persen. Walaupun terjadi kenaikan, situasinya masih menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Pekalongan menggambarkan ketimpangan rendah atau tingkat pemerataan yang tinggi dan menunjukkan makin merata.

9). Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), direpresentasikan dalam 3 dimensi yang dapat dilihat pada gambar berikut :

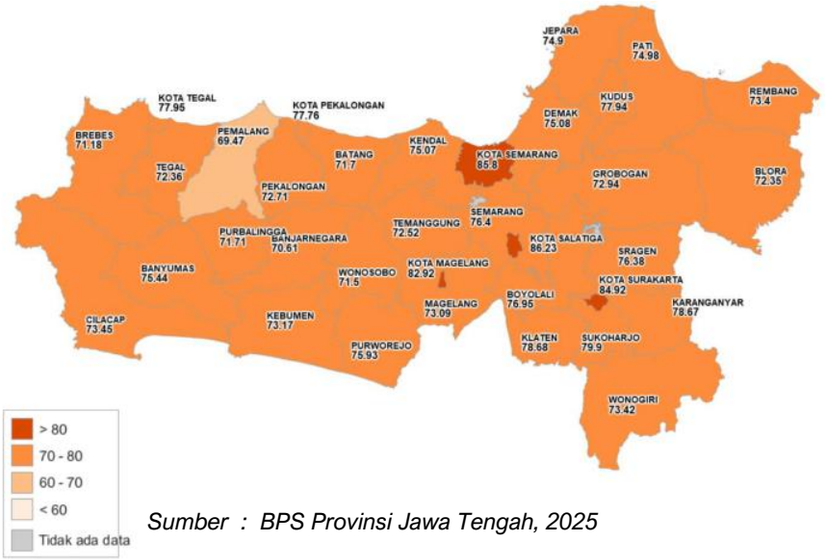


Gambar 2.44. Sumber Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Seiring dengan meningkatnya IPM provinsi, IPM seluruh kabupaten/kota juga mengalami peningkatan. Dari sisi perbandingan antar kabupaten/kota, tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam kategori capaian dan peringkat dibanding tahun lalu. Urutan IPM terendah ditempati oleh Kabupaten Pemalang (69,47), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Salatiga (86,23). Empat kota dengan status capaian pembangunan manusia yang "sangat tinggi" (IPM ≥ 80) yaitu Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Surakarta, dan Kota Magelang.

Jumlah kabupaten/kota dengan status capaian pembangunan manusia yang **"tinggi" (70 ≤ IPM < 80)** pada tahun 2025 bertambah menjadi 30 dari tahun sebelumnya sebanyak 29 Kabupaten/Kota yaitu; Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang,

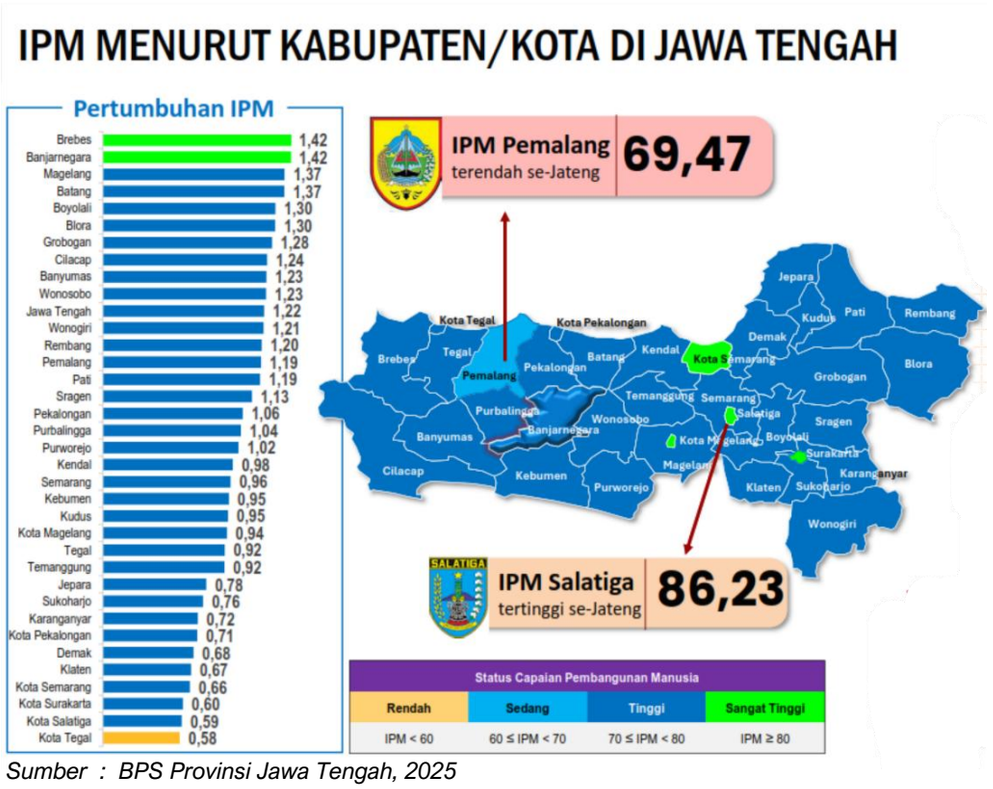
Pekalongan, Tegal, Brebes, Kota Pekalongan dan Kota Tegal. Sedangkan kabupaten dengan status capaian "sedang" (60 ≤ IPM < 70) ada 1, yaitu Pemalang. Sementara itu, wilayah di Jawa Tengah dengan status pembangunan manusia "rendah" (IPM < 60) tidak ada. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.45. IPM Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia Tahun 2025

Pada tahun 2025, pertumbuhan IPM tertinggi dicapai oleh Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banjarnegara dengan angka 1,42%, sedangkan pertumbuhan terendah tercatat di Kota Tegal sebesar 0,58%. Pada tahun 2025, sebanyak 25 kabupaten/kota mengalami nilai pertumbuhan IPM lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan IPM 2020-2024. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

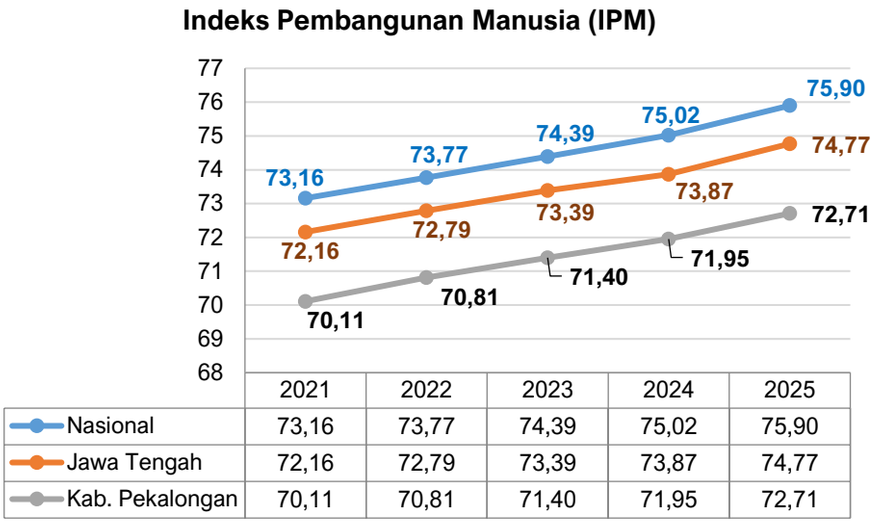


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.46. Rata-rata Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pekalongan pada tahun 2025 mencapai 72,71. Angka tersebut mengalami peningkatan 0,76 poin dibanding tahun 2024 yang sebesar 71,95. Selama kurun waktu 2021-2025, IPM Kabupaten Pekalongan rata-rata meningkat sebesar 0,65 persen. Capaian IPM Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 lebih rendah dibandingkan dengan IPM Jawa Tengah tahun 2025 yang mencapai 74,77; meningkat dibanding tahun sebelumnya, yakni atau tumbuh 1,22 persen atau meningkat sebesar 0,90 poin dibandingkan capaian tahun 2024 yang sebesar 73,87.

Peningkatan IPM tahun 2025 didukung oleh peningkatan semua komponen penyusunnya. Perkembangan IPM Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2021-2025 dapat dilihat pada gambar berikut.

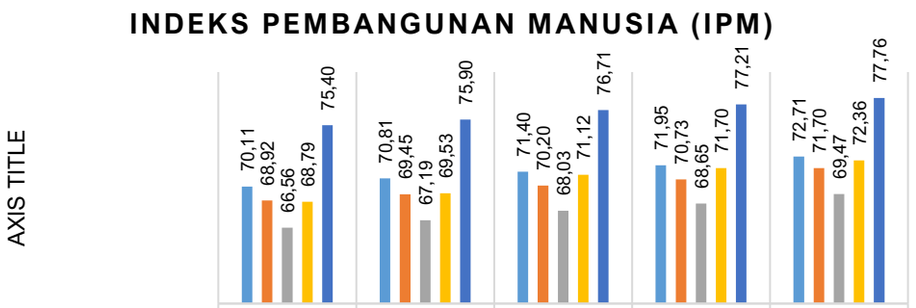


	2021	2022	2023	2024	2025
Nasional	73,16	73,77	74,39	75,02	75,90
Jawa Tengah	72,16	72,79	73,39	73,87	74,77
Kab. Pekalongan	70,11	70,81	71,40	71,95	72,71

Sumber : BPS Provinsi Jateng, 2026

Gambar 2.47. IPM Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

Selanjutnya IPM Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada gambar berikut.



	2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Pekalongan	70,11	70,81	71,40	71,95	72,71
Kab. Batang	68,92	69,45	70,20	70,73	71,70
Kab. Pemalang	66,56	67,19	68,03	68,65	69,47
Kab. Tegal	68,79	69,53	71,12	71,70	72,36
Kota Pekalongan	75,40	75,90	76,71	77,21	77,76

Sumber : BPS Provinsi Jateng, 2026

Gambar 2.48. IPM Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2021-2025

Dari gambar tabel dan gambar diatas, IPM Kabupaten Pekalongan pada 2025 sebesar 72,71 lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Batang sebesar 71,70, Kabupaten Pemalang sebesar 69,47 dan Kabupaten Tegal sebesar 72,36 dan lebih rendah dibandingkan dengan Kota Pekalongan sebesar 77,76. Adapun komponen pembentuk IPM secara lengkap yang meliputi meliputi Umur Harapan Hidup (UHH); pendidikan diukur dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS); serta dimensi pengeluaran diukur dengan pengeluaran per kapita dapat dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.39.
Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

Tahun	Umur Harapan Hidup/UHH (th)	Harapan Lama Sekolah/HLS (th)	Rata-rata Lama Sekolah/RLS (th)	Pengeluaran Perkapita disesuaikan (ribu Rp)	IPM
2021	73,74	12,42	7,17	10.409	70,11
2022	73,81	12,43	7,46	10.707	70,81
2023	73,99	12,44	7,47	11. 297	71,40
2024	74,25	12,46	7,48	11.701	71,95
2025	**74,59**	**12,63**	**7,50**	**12.185**	**72,71**

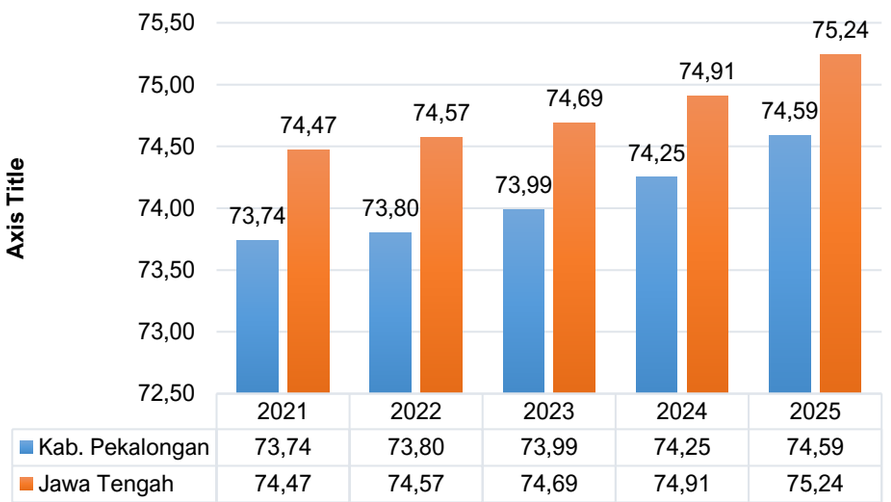
Sumber : BPS Provinsi Jateng, 2026

b. Kesehatan untuk Semua

Kondisi kesehatan mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan diantaranya

1). Umur Harapan Hidup (UHH)

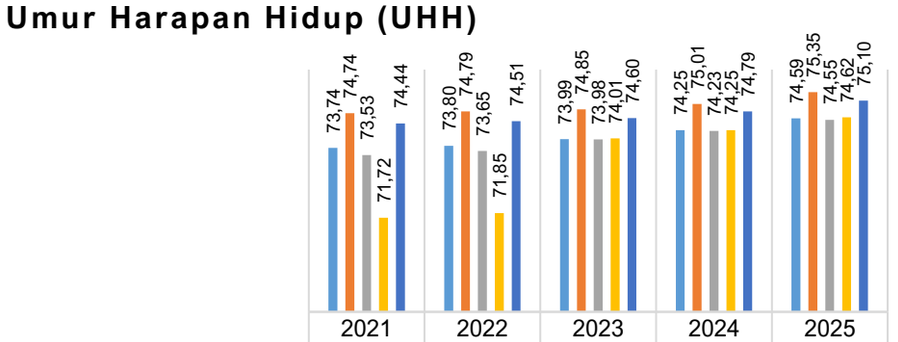
Umur Harapan Hidup (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH juga dapat digunakan untuk menggambarkan derajat kesehatan masyarakat. Kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Pekalongan secara umum semakin membaik berdasarkan rata-rata umur harapan hidup yang semakin panjang. Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Jateng, 2026

Gambar 2.49. Umur Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025

Berdasarkan tabel dan gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Pekalongan mengalami peningkatan dari 74,25 tahun di tahun 2024 menjadi sebesar 74,59 tahun di Tahun 2025. Namun angka tersebut masih di bawah angka Provinsi Jawa Tengah yaitu 75,24 tahun. Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada gambar berikut.



	2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Pekalongan (tahun)	73,74	73,80	73,99	74,25	74,59
Kab. Batang (tahun)	74,74	74,79	74,85	75,01	75,35
Kab. Pemalang (tahun)	73,53	73,65	73,98	74,23	74,55
Kab. Tegal (tahun)	71,72	71,85	74,01	74,25	74,62
Kota Pekalongan (tahun)	74,44	74,51	74,60	74,79	75,10

Sumber : BPS Provinsi Jateng, 2025

Gambar 2.50. Umur Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2021-2025

Dari tabel dan gambar diatas, Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Pekalongan pada 2025 sebesar 74,59 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Pemalang sebesar 74,55 tahun dan lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Batang sebesar 75,35 tahun, Kabupaten Tegal sebesar 74,62 tahun dan Kota Pekalongan sebesar 75,10 tahun.

2). Indeks Keluarga Sehat

KS adalah Indeks Keluarga Sehat yang perhitungannya diambil dari rekapitulasi data dari 12 indikator yang diambil datanya dan hasilnya dibagi menjadi 3, yaitu : 1) Keluarga Sehat, bila IKS > 0,800; 2) Keluarga Pra Sehat, bila IKS = 0,500 0,800; 3) Keluarga Tidak Sehat, bila IKS < 0,500.

Pendataan keluarga dilakukan terhadap seluruh keluarga dalam wilayah kerja Puskesmas dengan menggunakan formulir pengumpulan data untuk Profil kesehatan keluarga (prokesga). Prokesga berisi data di tingkat keluarga dan data dari semua individu anggota keluarga tersebut (sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga). Data yang dicatat minimal data dari 12 indikator tersebut di atas. Sesuai kondisi daerah, Prokesga dapat dikembangkan sehingga mencakup indikator-indikator lain yang dianggap penting di daerah tersebut. Dengan demikian, data yang dicatat bisa relatif lengkap sesuai kebutuhan daerah.
Indikator keluarga Sehat meliputi :

1) Keluarga mengikuti program KB;
2) Persalinan di Fasilitas Kesehatan;
3) Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
4) Bayi mendapat ASI eksklusif;
5) Pertumbuhan Balita dipantau;
6) Penderita TB paru berobat sesuai standar;
7) Penderita hipertensi berobat teratur;

8) Penderita gangguan jiwa tidak ditelantarkan dan diobati;
9) Anggota keluarga tidak ada yang merokok;
10) Keluarga sudah menjadi anggota JKN;
11) Keluarga mempunyai sarana air bersih;
12) Keluarga menggunakan jamban sehat.

Berdasarkan Nilai IKS Tahun 2024, Kabupaten Pekalongan termasuk kabupaten kota tidak sehat dengan IKS sebesar 0,320. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.40.
Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Pekalongan
dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

No.	No Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kabupaten Pekalongan	0,14	0,14	0,15	0,173	0,320
2.	Provinsi Jawa Tengah	0,19	0,198	0,25	0,287	-

Sumber : DINKES Kab. Pekalongan, DINKES Prov. Jawa Tengah, 2024

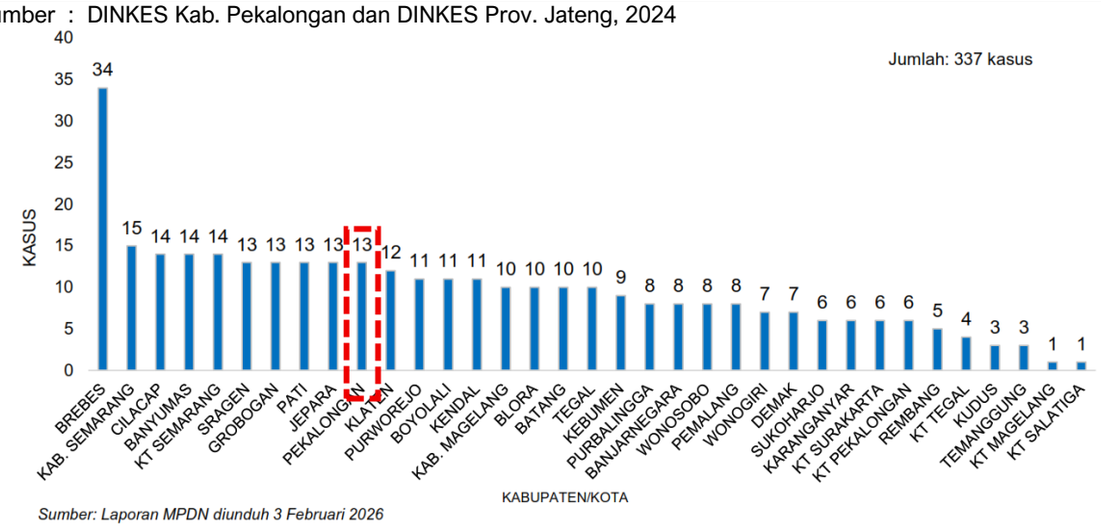
3). Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI masih di kisaran 152,25 per 100.000 Kelahiran Hidup, belum mencapai target yang ditentukan yaitu 183 per 100.000 KH di tahun 2024. Demikian juga bayi dan balita yang masih harus kita selamatkan dari kematian. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.41.
Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Pekalongan
dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025

No.	Wilayah	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kab. Pekalongan	**172,78** (27 kasus)	**143.33** (21 kasus)	**247** (34 kasus)	**152,25** (18 kasus)	**112,33** (13 kasus)
2.	Jawa Tengah	**199** (1.011 kasus)	**84,60** (485 kasus)	**76,15** (438 kasus)	**74,73** (427 kasus)	**74,73** (337 kasus)

Sumber : DINKES Kab. Pekalongan dan DINKES Prov. Jateng, 2024



Sumber: Laporan MPDN diunduh 3 Februari 2026

Sumber : DINKES Kab. Pekalongan dan DINKES Prov. Jateng, 2026

Gambar 2.51. Jumlah Kasus Kematian Ibu Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2025

Dari tabel dan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa, Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Pekalongan mengalami penurunan dari 152,25 per 100.000 kelahiran hidup (18 kasus) pada tahun 2024 menjadi 112,33 per 100.000 kelahiran hidup (13 kasus) pada tahun 2025. Capaian ini termasuk tertinggi **10 (sepuluh) besar** di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Jumlah Kasus Kematian Ibu Menurut Wilayah Puskesmas di Kabupaten Pekalongan tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 2.42.
Jumlah Kasus Kematian Ibu (AKI) Menurut Wilayah Puskesmas di Kabupaten Pekalongan tahun 2025

No	PUSKESMAS	Jumlah Kasus AKI
1	Kandangserang	-
2	Paninggaran	1
3	Lebakbarang	1
4	Petungkriyono	-
5	Talun	-
6	Doro I	-
7	Doro II	1
8	Karanganyar	-
9	Kajen I	1
10	Kajen II	1
11	Kesesi I	-
12	Kesesi II	1
13	Sragi I	1
14	Sragi II	-
15	Siwalan	-
16	Bojong 1	1
17	Bojong II	-
18	Wonopringgo	2
19	Kedungwuni I	-
20	Kedungwuni II	-
21	Karangdadap	-
22	Buaran	1
23	Tirto I	-
24	Tirto II	-
25	Wiradesa	1
26	Wonokerto 1	-
	TOTAL	**13**

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Pekalongan; 2026

Jumlah Kasus Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Pekalongan termasuk daerah yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Penyebab kematian ibu antara lain oleh Preeklampsia Berat (PEB) 8 kasus, perdarahan 5 kasus dan lain-lain 6 kasus. Upaya penurunan AKI di Kabupaten Pekalongan dilaksanakan melalui peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil, adanya Program Puskesmas Mampu Persalinan di setiap Puskesmas dan peran lintas sektoral dan Gerakan Masyarakat Selamatkan Ibu dan Anak (GEMA SETIA) di seluruh kecamatan. Upaya percepatan penurunan AKI dilakukan dengan menjamin setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas seperti pelayanan kesehatan ibu hamil serta pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di setiap puskesmas.

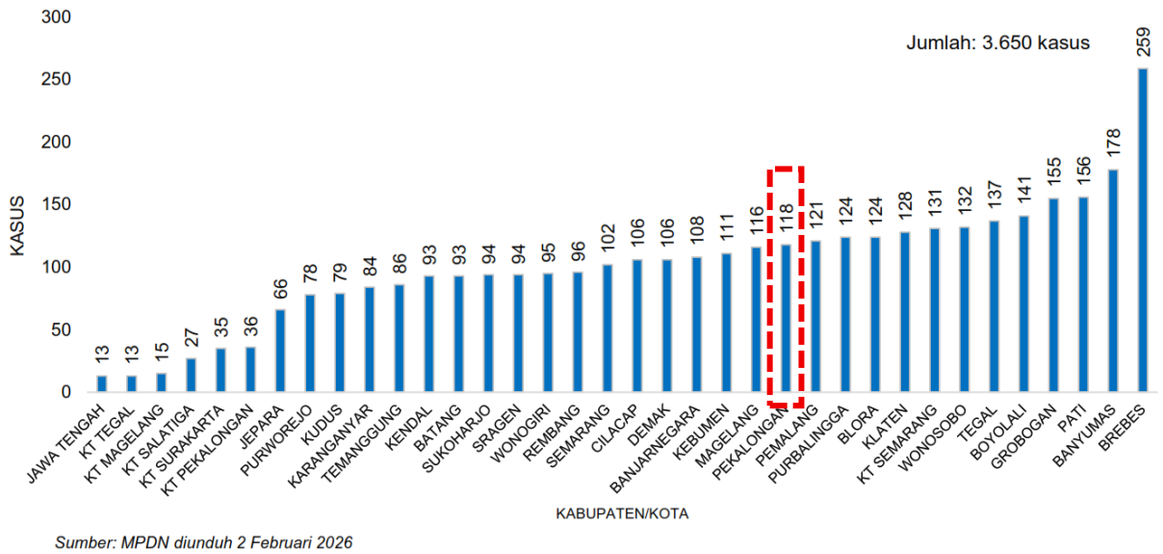
4). Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) juga merupakan indikator makro dalam pembangunan kesehatan. AKB dihitung pada bayi baru lahir sampai umur 12 bulan. AKB Kabupaten Pekalongan dari tahun 2021-2025 fluktuatif tetapi cenderung mengalami kenaikan. AKB Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 sebesar 12,62 (146 kasus) menurun dibandingkan tahun 2024 sebesar 13,36 (158 kasus). Selengkapnya data Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025 sebagai berikut.

Tabel 2.43.
Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025

No.	Wilayah	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kab. Pekalongan	**6,98** (109 kasus)	**7,17** (105 kasus)	**9,38** (129 kasus)	**13,36** (158 kasus)	**12,62** (146 kasus)
2.	Jawa Tengah	**7,87** (3.997 kss)	**7,02** (4.024 kss)	**8,02** (4.612 kss)	**7,57** (4.326 kss)	**7,57** (3.650 kss)

Sumber : DINKES Kab. Pekalongan dan DINKES Prov. Jateng, 2025



Sumber: MPDN diunduh 2 Februari 2026

Sumber : DINKES Kab. Pekalongan dan DINKES Prov. Jateng, 2026

Gambar 2.52. Jumlah Kasus Kematian Bayi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Dari gambar di atas, dapat dijelaskan penyebab utama tingginya kematian bayi di Kabupaten Pekalongan antara lain Asfiksia, Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), dan kelainan congenital. Adapun langkah-langkah yang telah ditempuh untuk mencapai target yaitu dengan cara pembinaan puskesmas mampu bersalin oleh dokter spesialis anak, peningkatan kapasitas petugas dalam pencegahan dan penanganan Berat badan lahir rendah (BBLR), pemeriksaan ibu hamil resti di tiap kecamatan, pendidikan kesehatan reproduksi remaja di sekolah.

5). Kondisi Gizi

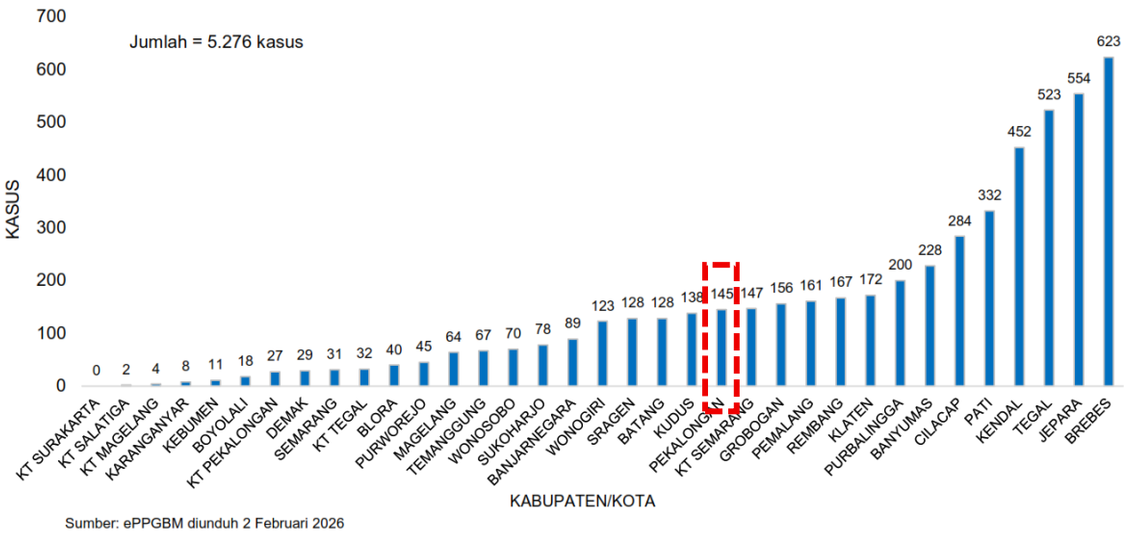
Pendataan gizi buruk di Kabupaten Pekalongan berdasarkan pada 2 (dua) kategori yaitu kategori pertama dengan membandingkan berat badan dengan umur (BB/U) dan kategori kedua adalah membandingkan berat badan dengan tinggi badan (BB/TB). Pemeriksaan pertama dilakukan di Posyandu dengan membandingkan berat badan dengan umur melalui

kegiatan penimbangan, jika ditemukan balita yang berada di bawah garis merah (BGM) atau dua kali tidak naik (2T), maka dilakukan konfirmasi status gizi dengan menggunakan indikator berat badan menurut tinggi badan. Secara rinci Kasus Balita Gizi Buruk Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.44.
Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

No.	Wilayah	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kab. Pekalongan	Kasus	36	36	98	357	145
2.	Jawa Tengah	Kasus	1.868	2.999	2.794	8.639	5.276

Sumber : DINKES Kab. Pekalongan dan DINKES Jateng, 2023



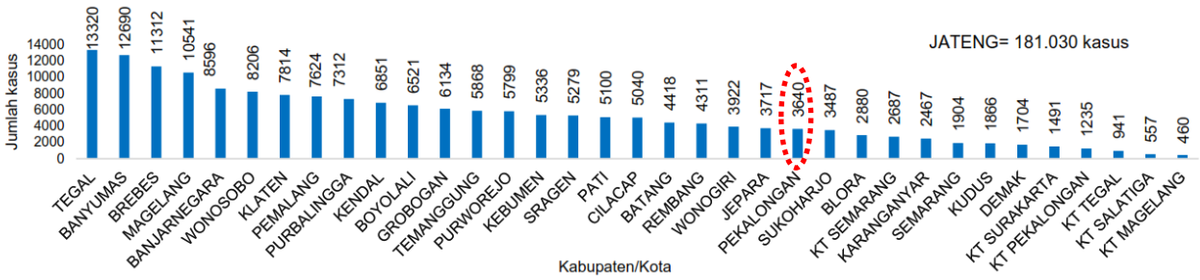
Sumber : DINKES Kab. Pekalongan dan DINKES Jateng, 2026

Gambar 2.53. Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2025

Dari tabel dan gambar di atas, capaian jumlah kasus balita gizi buruk di Kabupaten Pekalongan pada Tahun 2025 sebesar 145 kasus turun dari Tahun 2024 sebesar 357 kasus. Gizi buruk disebabkan oleh kombinasi kekurangan asupan nutrisi (kurang kalori, protein, atau mikronutrien), infeksi berulang (seperti diare dan TBC), serta faktor sosial-ekonomi seperti kemiskinan dan rendahnya pengetahuan gizi. Kondisi ini juga dipicu oleh kurangnya akses ke makanan bergizi, sanitasi buruk, serta kelainan bawaan yang mengganggu penyerapan nutrisi.

6). Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita

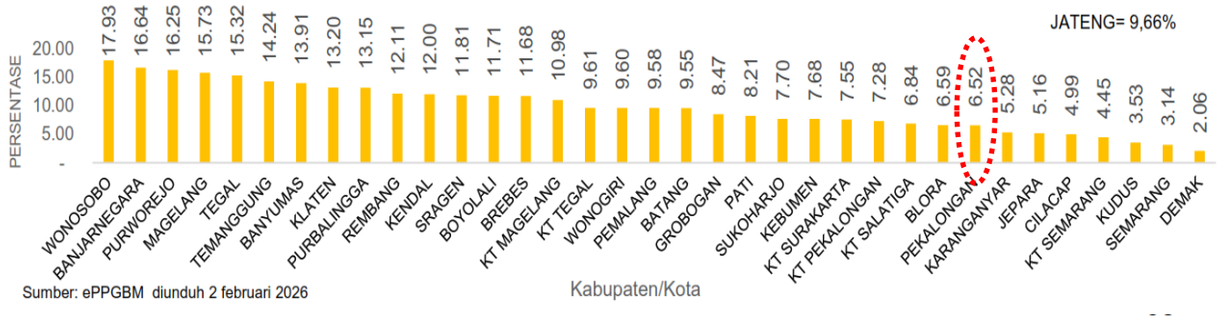
Stunting (kerdil) adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Jumlah Kasus Stunting Balita s.d. 59 Bulan Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 sebesar 3.640 kasus turun dari tahun 2024 sebesar 4.974 kasus. Jumlah Kasus Stunting Balita s.d. 59 Bulan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Bulan Desember 2025 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : DINKES Kab. Pekalongan dan DINKES Jateng, 2026

Gambar 2.54. Jumlah Kasus Stunting Balita s.d. 59 Bulan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Bulan Desember 2025

Perkembangan stunting di Kabupaten Pekalongan mengacu pada Data Dinas Kesehatan dan terus dilaksanakan integrasi dengan data Aplikasi **Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGM)**, prevalensi stunting di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2025 ada pada angka 6,52 persen atau turun 2,73 point dibandingkan Tahun 2024. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: ePPGBM diunduh 2 februari 2026

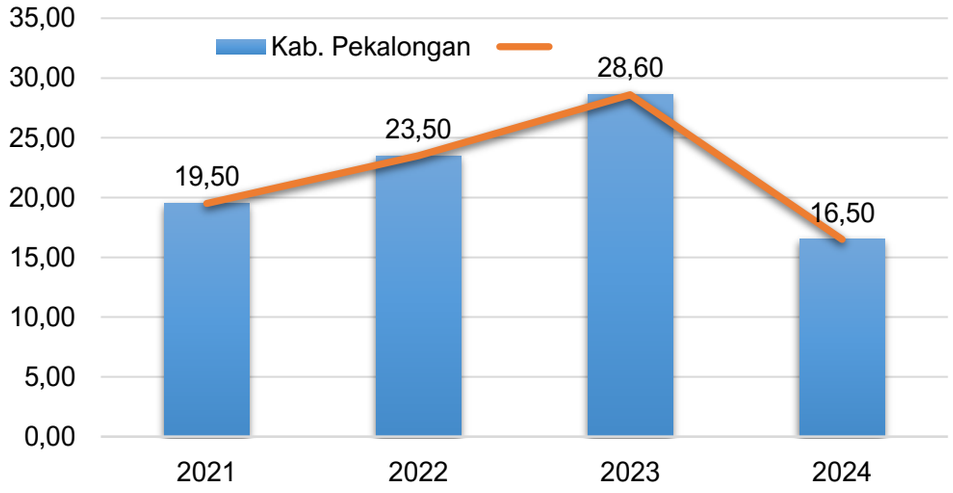
Gambar 2.55. Prevalensi Stunting Balita s.d 59 Bulan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Bulan Desember 2025

Sedangkan Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan bahwa pada tahun 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Pekalongan turun sebanyak 9,10% poin dibanding tahun 2023 atau sebesar 19,50 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.45.
Prevalensi Stunting Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025

No.	Wilayah	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Kab. Pekalongan						
	ePPGM	%	13,56	11,04	11,30	9,25	6,52
	Data SSGI	**%**	**19,50**	**23,50**	**28,60**	**19,50**	**n/a**
2	Jawa Tengah						
	ePPGM	%	12,80	11,90	9,79	10,01	9,66
	Data SSGI	**%**	**20,90**	**20,80**	**20,70**	**17,10**	**n/a**

Sumber : ePPGM dan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2025



Sumber : Survey Status Gizi Indonesia (SSGI); 2024

Gambar 2.56. Prevalensi Stunting Kabupaten Pekalongan 2021-2024

Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah memiliki Kebijakan dalam penurunan kasus stunting yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penurunan Stunting di Kabupaten Pekalongan. Dalam Peraturan Bupati tersebut telah ditetapkan sasaran dan kegiatan intervensi yang perlu dilakukan dalam penurunan kasus stunting serta pelibatan peran serta masyarakat dan pemerintah dalam penurunan kasus stunting.

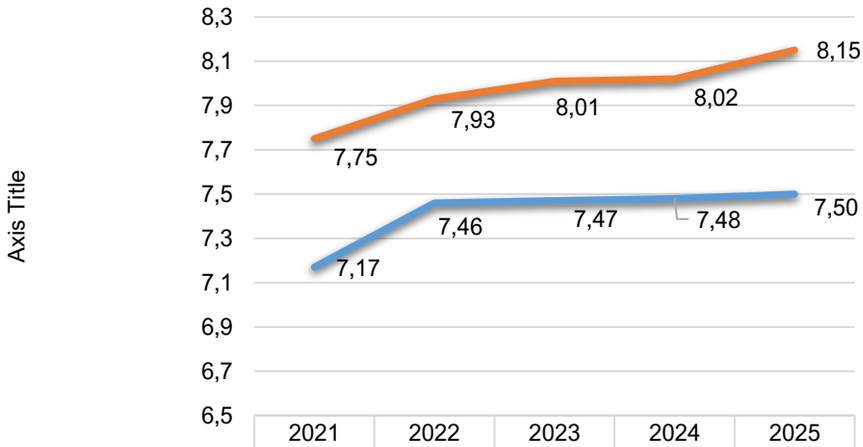
Guna menurunkan angka stunting di Kabupaten Pekalongan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui OPD terkait telah melaksanakan berbagai program penurunan stunting seperti pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada Remaja Putri yang Anemia serta Ibu Hamil selama 90 hari, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal, pemberian susu protein tinggi, pelatihan kelas Ibu Hamil (bumil), sosialisasi isi piringku, Pembentukan dan pemberdayaan Tim Pendamping Keluarga (TPK), Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting baik di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten, Pengelolaan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS), Perbaikan Sanitasi Lingkungan dan lain sebagainya.

c. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Kondisi pendidikan masyarakat berperan cukup penting dalam peningkatan kualitas hidup manusia serta mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1). Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada gambar berikut.

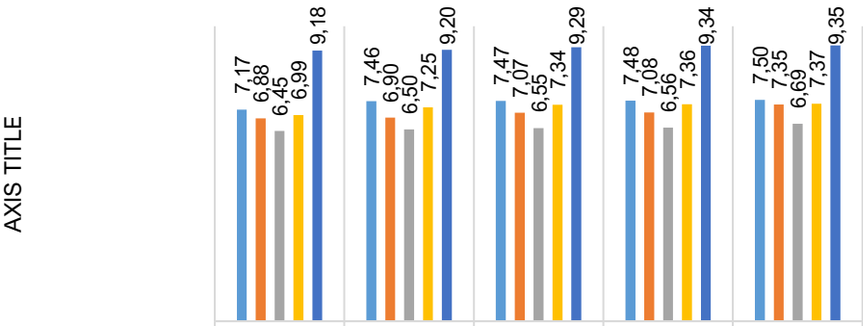


	2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Pekalongan	7,17	7,46	7,47	7,48	7,50
Jawa Tengah	7,75	7,93	8,01	8,02	8,15

Sumber : BPS Provinsi Jateng, 2025

Gambar 2.57. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025

Berdasarkan tabel dan gambar diatas, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Pekalongan meningkat dari 7,48 tahun di Tahun 2024 menjadi 7,50 tahun di Tahun 2025. Namun demikian rata-rata capaian RLS Kabupaten Pekalongan masih lebih rendah dari capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 8,15 tahun. Sedangkan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada gambar berikut.



	2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Pekalongan	7,17	7,46	7,47	7,48	7,50
Kab. Batang	6,88	6,90	7,07	7,08	7,35
Kab. Pemalang	6,45	6,50	6,55	6,56	6,69
Kab. Tegal	6,99	7,25	7,34	7,36	7,37
Kota Pekalongan	9,18	9,20	9,29	9,34	9,35

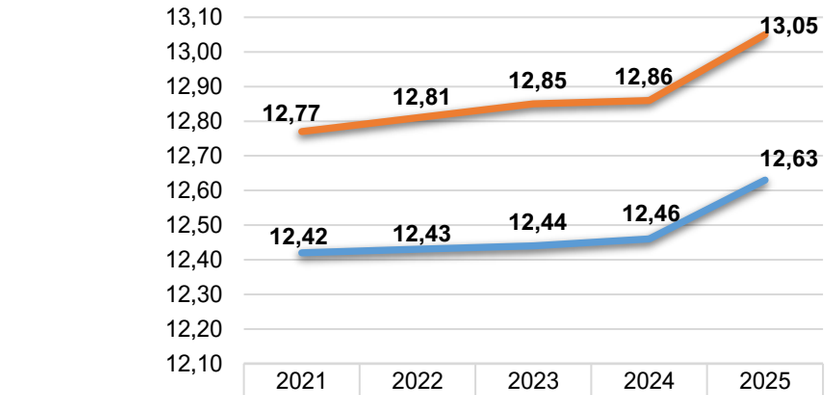
Sumber : BPS Provinsi Jateng, 2025

Gambar 2.58. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2021-2025

Dari gambar diatas, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pekalongan pada 2025 sebesar 7,50 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Batang sebesar 7,35 tahun, Kabupaten Pemalang sebesar 6,69 tahun, dan Kabupaten Tegal sebesar 7,37 tahun dan lebih rendah dengan Kota Pekalongan sebesar 9,35 tahun.

2). Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

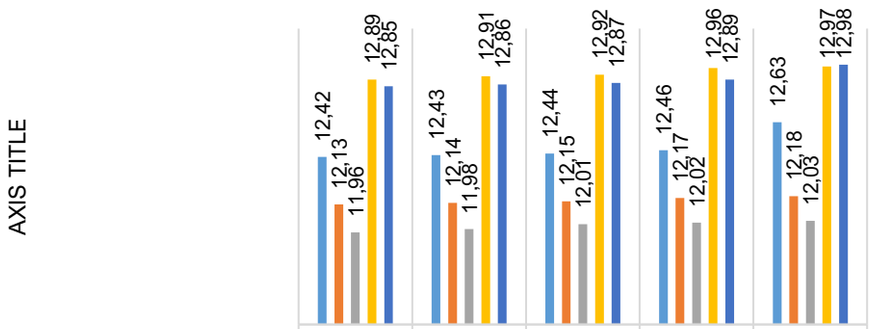


	2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Pekalongan	12,42	12,43	12,44	12,46	12,63
Jawa Tengah	12,77	12,81	12,85	12,86	13,05

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.59. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025

Berdasarkan tabel dan gambar diatas, Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Pekalongan meningkat sebesar 12,43 tahun di Tahun 2022 menjadi 12,44 tahun di Tahun 2023. Namun demikian rata-rata capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pekalongan masih lebih rendah dari capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 12,85 tahun. Sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada gambar berikut.



	2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Pekalongan (tahun)	12,42	12,43	12,44	12,46	12,63
Kab. Batang (tahun)	12,13	12,14	12,15	12,17	12,18
Kab. Pemalang (tahun)	11,96	11,98	12,01	12,02	12,03
Kab. Tegal (tahun)	12,89	12,91	12,92	12,96	12,97
Kota Pekalongan(tahun)	12,85	12,86	12,87	12,89	12,98

Sumber : BPS Provinsi Jateng, 2025

Gambar 2.60. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2021-2025

Dari tabel dan gambar diatas, Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pekalongan pada 2025 sebesar 12,63 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Batang sebesar 12,18 tahun dan Kabupaten Pemalang sebesar 12,03 tahun dan lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Tegal sebesar 12,97 tahun dan Kota Pekalongan sebesar 12,98 tahun.

3). Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan sensorik dan motorik serta penanaman karakter pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Penyediaan pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu poin tujuan dari Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development Goals/SDGs)*. Target Agenda Pendidikan 2030 untuk jenjang PAUD adalah memastikan seluruh anak laki-laki dan perempuan memperoleh akses perkembangan, perawatan dan pendidikan pra-SD (PAUD) yang bermutu untuk menjamin kesiapan memasuki pendidikan dasar.

Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (TK/Taman Kanak-Kanak) Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 sejumlah 357 unit yang dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2.46.
Jumlah PAUD Bentuk Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)
Kabupaten Pekalongan Tahun 2024-2025

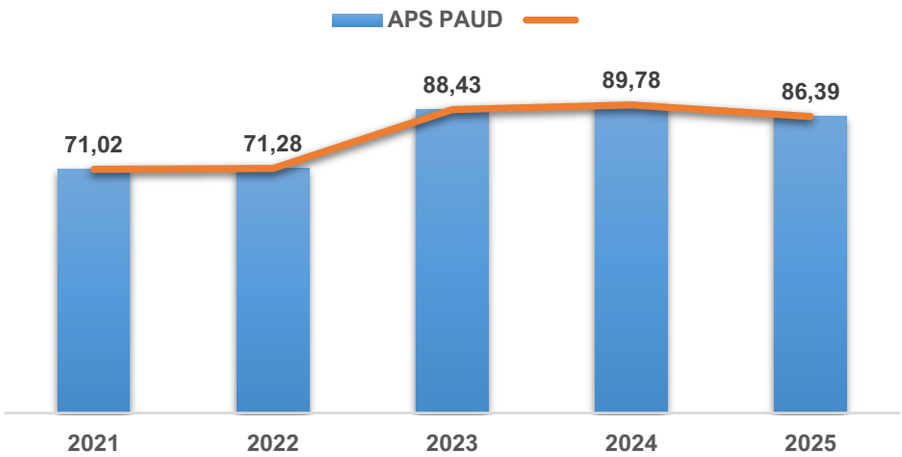
Kecamatan	Jumlah TK		Jumlah Siswa		Guru
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bojong	-	25	-	1.349	103
Buaran	1	17	17	979	58
Doro	1	24	33	1.495	81
Kajen	2	32	239	1.477	132
Kandangserang	-	11	-	599	61
Karanganyar	1	20	66	1.031	73
Karangdadap	-	11	-	516	46
Kedungwuni	1	41	59	2.234	152
Kesesi	1	32	30	1.139	110
Lebakbarang	-	2	-	43	41
Paninggaran	-	7	-	256	71
Petungkriyono	-	3	-	42	47
Siwalan	-	16	-	643	57
Sragi	1	22	52	1.276	85
Talun	-	18	-	653	67
Tirto	-	24	-	1.734	87
Wiradesa	1	20	97	1.143	82
Wonokerto	-	15	-	736	67
Wonopringgo	-	17	-	1.170	76
Jumlah Total 2025	**9**	**357**	**593**	**18.515**	**1.496**
2024	**9**	**345**	**529**	**18.550**	**945**

Sumber : DINDIKBUD Kab. Pekalongan, 2026

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah satuan pendidikan anak usia dini Kabupaten Pekalongan dari 366 lembaga dapat dijelaskan sebagai berikut:
(1) Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri : 9 unit
(2) Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta : 357 Lembaga

Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-Kanak/TK Kabupaten Pekalongan sebanyak 1.496 orang. Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini perlu adanya Pengembangan menyeluruh yang meliputi aspek pengasuhan, kesehatan, pendidikan dan perlindungan. Pengembangan menyeluruh tersebut akan dapat dicapai secara optimal melalui pemberian layanan PAUD yang bermutu dan berkualitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Persentase anak usia 5 - 6 tahun yg sudah tamat atau sedang belajar di PAUD menjadi salah satu indikator SPM yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD adalah persentase anak usia dini (umumnya 0-6 tahun atau 5-6 tahun) yang sedang menempuh pendidikan prasekolah dibandingkan total anak kelompok usia tersebut di suatu wilayah. APS digunakan untuk mengukur akses dan daya serap layanan PAUD, mencakup TK, RA, dan kelompok bermain, baik formal maupun non formal. Adapun perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD usia 5-6 tahun Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 sebagaimana gambar berikut.



Sumber : DINDIKBUD Kab. Pekalongan, 2025

Gambar 2.61. Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD usia 5-6 tahun Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) atau partisipasi PAUD (usia 5-6 tahun) di Kabupaten Pekalongan di Tahun 2021-2025 relatif tinggi sudah mencapai 70-90 persen setiap tahunnya menunjukkan aksesibilitas pendidikan prasekolah yang merata

4). Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Secara rinci APS Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.47.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
APS Kab. Pekalongan						
1	SD/MI (7-12 tahun)	99,96	98,68	99,99	99,54	99,99

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
2	SLTP/MTs (13-15 tahun)	94,83	89,79	92,57	96,30	95,18
3.	SMA/SMK/MA(16-18 tahun)	66,11	66,78	65,62	66,18	75,97
APS Provinsi Jawa Tengah						
1	SD/MI (7-12 tahun)	99,66	99,58	99,57	99,57	99,54
2	SLTP/MTs (13-15 tahun)	96,84	96,77	97,08	97,12	97,05
3.	SMA/SMK/MA(16-18 tahun)	70,79	70,82	70,87	71,60	77,97

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026

Dari tabel diatas, Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI cenderung meningkat. Pada tahun 2025 terdapat 99,99 persen penduduk telah bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI. Kondisi tersebut menunjukan pada tahun 2024 masih ada sekitar kurang dari 1 persen anak berumur 7-12 tahun yang tidak sekolah di SD/MI baik di lingkungan Kabupaten Pekalongan maupun di luar wilayah Kabupaten Pekalongan. Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah APS SD/MI Kabupaten Pekalongan diatas rata-rata. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTP/MTs tahun 2025 sebesar 95,18 persen, di bawah rata-rata APS Provinsi Jawa Tengah. Masih terdapat penduduk 4,82 persen penduduk usia 13-15 tahun yang tidak menempuh pendidikan pada SMP/MTs manapun baik di lingkungan Kabupaten Pekalongan maupun di luar wilayah Kabupaten Pekalongan. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK cenderung mengalami kenaikan dengan capaian dibawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK sebesar 75,97 persen sehingga masih ada 24,03 persen penduduk usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah pada jenjang SMA/SMK/MA baik di lingkungan Kabupaten Pekalongan maupun di luar wilayah Kabupaten Pekalongan.

5). Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan S1, S2 dan S3. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.48.
Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

Tahun	Tidak mempunyai ijazah	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (%)				Total
		SD/MI/ Paket A	SMP/MTS/ Paket B	SMA/SMK/MA/Paket C	Diploma/ Universitas	
2021	18,93	33,38	22,66	19,25	5,78	100,00
2022	16,97	32,18	24,71	19,74	6,39	100,00
2023	16,97	31,60	25,79	19,52	6,12	100,00
2024	15,90	33,70	24,07	19,65	6,68	100,00
2025	15,84	31,52	25,76	21,09	5,79	100,00
Rata-Rata	**16,92**	**32,48**	**24,60**	**19,85**	**6,15**	**100,00**

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025

Dari tabel di atas, persentase penduduk umur 15 Tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Pekalongan sepanjang tahun 2021-2025 rata-rata didominasi lulusan SD/MI sebanyak 32,48 persen, SMP/MTS/Paket B sebesar 24,60 persen, SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 19,85 persen, Tidak mempunyai ijazah sebesar 16,92 persen dan lulusan diploma/universitas sebesar 6,15 persen.

6). Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang)

a) Literasi Membaca SD/Sederajat dan SMP/Sederajat

Merupakan cakupan siswa yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk **literasi.** Dikategorikan **sudah "mencapai kompetensi minimum"** jika **paling sedikit 75% peserta didik** pada satuan pendidikan tersebut memiliki **level hasil belajar minimal "cakap"** sebagaimana tertuang dalam Rapor Pendidikan

Formulasi Perhitungan : Jumlah peserta didik dengan kemampuan literasi sesuai kewenangan kabupaten/kota yang memiliki capaian asesmen nasional mencapai standar kompetensi minimum untuk literasi DIBAGI Jumlah peserta didik yang mengikuti asesmen nasional di kabupaten/kota DIKALI 100%.

Tabel 2.49.
Indeks Literasi Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	SD/MI (7-12 tahun)	N/A	N/A	**68,56**	**79,27**	**79,25**
2	SLTP/MTs (13-15 tahun)	N/A	N/A	**69,76**	**79,75**	**84,76**

Sumber : Dindikbud Kab. Pekalongan; 2026

b) Numerasi SD/Sederajat dan SMP/Sederajat

Merupakan cakupan siswa yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk **literasi.** Dikategorikan **sudah "mencapai kompetensi minimum"** jika **paling sedikit 75% peserta didik** pada satuan pendidikan tersebut memiliki **level hasil belajar minimal "cakap"** sebagaimana tertuang dalam Rapor Pendidikan

Formulasi Perhitungan : Jumlah peserta didik dengan kemampuan numerasi sesuai kewenangan kabupaten/kota yang memiliki capaian asesmen nasional mencapai standar kompetensi minimum untuk **numerasi** DIBAGI Jumlah peserta didik yang mengikuti asesmen nasional di kabupaten/kota DIKALI 100%.

Tabel 2.50.
Indeks Numerasi Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	SD/MI (7-12 tahun)	N/A	N/A	**53,18**	**70,87**	**77,17**
2	SLTP/MTs (13-15 tahun)	N/A	N/A	**48,00**	**73,14**	**80,40**

Sumber : Dindikbud Kab. Pekalongan; 2026

d. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Kondisi perlindungan sosial menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup yang lebih baik.

1). Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Cakupan kesehatan semesta atau *Universal Health Coverage (UHC)* berkaitan dengan sebuah sistem yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses finansial terhadap pelayanan kesehatan tersebut. UHC merupakan cakupan kepesertaan program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk memastikan minimal 98 persen dari total jumlah penduduk telah mendapatkan akses pelayanan kesehatan dengan mendaftarkan dirinya atau didaftarkan menjadi peserta JKN

Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah. Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Tengah, cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2.51.
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Kabupaten Pekalongan Tahun 2023-2025

No	Uraian	2023	2024	2025
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.008.691	1.039.736	1.039.736
2	Jumlah Peserta JKN			
	• Aktif (jiwa)	711.080	732.147	822.187
	• Non Aktif (jiwa)	203.219	288.278	221.639
	% Aktif	**70,50**	**71,75**	**79,08**
5	% Kepesertaan (UHC=98%)	90,64	98,14	100,39
	% Kepesertaan aktif=80%	Belum tercapai	Belum tercapai	Belum tercapai

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Pekalongan; 2026

Dari tabel di atas Rata-rata Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 sebesar 72,19% sedikit lebih besar dari Tahun 2023 sebesar 71,53% yang mencerminkan beberapa hal penting antara lain

1) Akses Pelayanan Kesehatan : cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan;
2) Kesadaran Masyarakat : cakupan yang tinggi mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
2) Komitmen pemerintah daerah: Cakupan yang tinggi mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional;
3) Pencapaian *Universal Health Coverage (UHC)*: cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian *Universal Health Coverage (UHC)*, yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.

2). Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.

Tabel 2.52.
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jaminan Pensiun/Veteran	5,95	3,56	3,26	4,18	4,30
2	Jaminan Hari Tua	4,64	3,98	2,60	3,72	4,70
3	Asuransi Kecelakaan Kerja	5,99	4,05	3,54	5,13	6,10
4	Jaminan/Asuransi Kematian	4,37	3,29	3,04	3,31	4,10
5	Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	2,24	1,10	1,71	1,47	0,90

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2026

Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko- risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak.

e. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Kondisi penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan serta pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter serta memperteguh jati diri bangsa yang dapat dijelaskan melalui indikator sebagai berikut.

1). Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan

Cakupan CB dan WBTB yang mendapatkan intervensi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan/atau pembinaan yang dilestarikan mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dan UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (CB). Indikator ini menggambarkan sejauh mana upaya yang dilakukan untuk melestarikan warisan budaya yang ada di Kabupaten Pekalongan beserta nilai pentingnya; Indikator ini juga merupakan indikator proxy dari pembentuk komponen Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) pada Dimensi Warisan Budaya; dengan nilai maksimal indikator 100%, merupakan indikator “positif” serta dengan jumlah total CB dan WBTB yang harus dilestarikan di Kabupaten Pekalongan sejumlah 161. Capaian persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.53.
Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)
yang dilestarikan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2024-2025

Tahun	Jumlah Objek yang dilestarikan		Total	Persentase Capaian
	CB	WBTB		
2024	1 (Eks Pendopo Nusantara Kabupaten Pekalongan)	2 (Kesenian Tari Sintren dan Apem Kesesi)	3	1,86%
2025	-	3 (Seni Gendukan, Selamatan Giling Tebu PG Sragi dan Tata Rias Pengantin Srimpi Priyayi)	3	3,72%

Sumber : Dindikbud Kabupaten Pekalongan, 2026

2). Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir

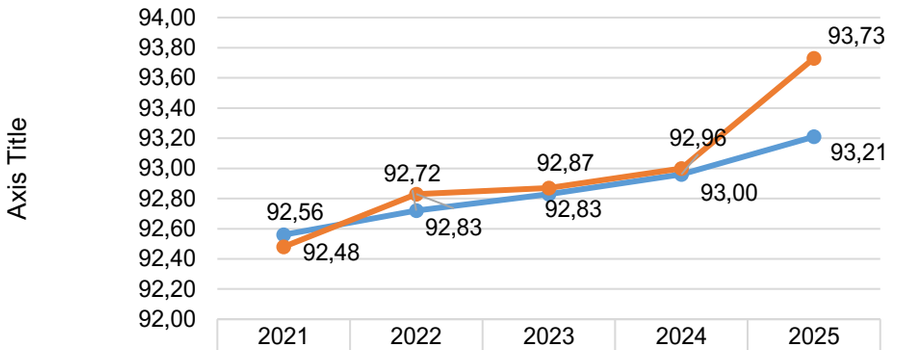
Cakupan kelompok kesenian yang terdaftar dan berperan serta aktif setiap tahunnya dalam kegiatan/acara yang menampilkan pertunjukan atau festival kesenian. Indikator ini menggambarkan sejauh mana para pelaku seni di Kabupaten Pekalongan dapat menjadikan kegiatan seni budaya sebagai salah satu sumber pendapatan/kesejahteraan. Indikator ini merupakan indikator proxy dari pembentuk komponen **Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) pada Dimensi Ekonomi Budaya dan Dimensi Ekspresi Budaya** dengan Nilai maksimal indikator 100%, merupakan indikator "positif". Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir sebesar **0,44 persen** di Tahun 2024.

f. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Merupakan kondisi tentang peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan.

1). Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan suatu indeks yang mengukur pencapaian pembangunan kapabilitas dasar manusia pada bidang kesehatan. pendidikan. dan ekonomi di suatu wilayah dengan mempertimbangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan tercapai apabila angka IPM perempuan dibanding IPM laki-laki berada pada angka 100. Perbandingan IPG Kabupaten Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025 dapat dilihat dalam gambar berikut.

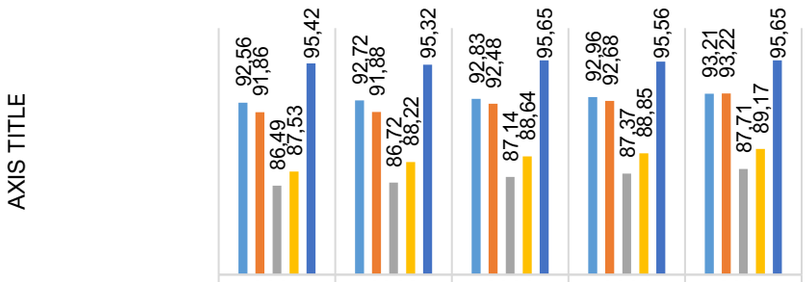


	2021	2022	2023	2024	2025
Pekalongan	92,56	92,72	92,83	92,96	93,21
Jawa Tengah	92,48	92,83	92,87	93,00	93,73

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026

Gambar 2.62. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025

Berdasarkan gambar diatas, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pekalongan tahun 2025 tercatat sebesar 93,21 lebih besar dari Tahun 2024 sebesar 92,96. Angka ini mencerminkan pencapaian pembangunan manusia yang berkeadilan gender berdasarkan hasil Long Form SP2020. Data ini mengindikasikan terus adanya peningkatan kesetaraan gender di berbagai sektor dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.



	2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Pekalongan	92,56	92,72	92,83	92,96	93,21
Kab. Batang	91,86	91,88	92,48	92,68	93,22
Kab. Pemalang	86,49	86,72	87,14	87,37	87,71
Kab. Tegal	87,53	88,22	88,64	88,85	89,17
Kota Pekalongan	95,42	95,32	95,65	95,56	95,65

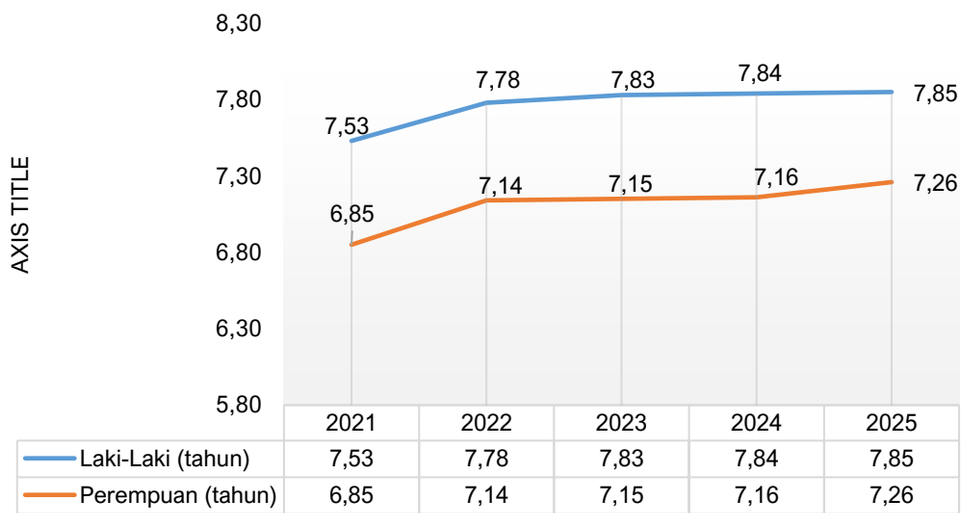
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026

Gambar 2.63. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2021-2025

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pekalongan tahun 2025 sebesar 93,21 lebih baik dari Kabupaten Pemalang sebesar 87,71, Kabupaten Tegal 89,17 dan di bawah Kabupaten Batang sebesar 93,22 dan Kota Pekalongan sebesar 95,65. Nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang semakin besar (mendekati 100) menunjukkan kesetaraan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan semakin baik. Angka 100 adalah titik tertinggi (setara sempurna), sehingga kenaikan nilai IPG menandakan berkurangnya kesenjangan gender dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Adapun faktor-faktor pembentuk IPG di Kabupaten Pekalongan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut jenis kelamin

Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut jenis kelamin, dari tahun 2021-2025 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki selama kurun waktu tahun 2021-2025 lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Pada tahun 2025 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk laki-laki sebesar 7,85 tahun sedangkan perempuan sebesar 7,26 tahun. Tentunya perlu ada peningkatan partisipasi pendidikan penduduk perempuan agar tercipta kesetaraan lama sekolah. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.



	2021	2022	2023	2024	2025
Laki-Laki (tahun)	7,53	7,78	7,83	7,84	7,85
Perempuan (tahun)	6,85	7,14	7,15	7,16	7,26

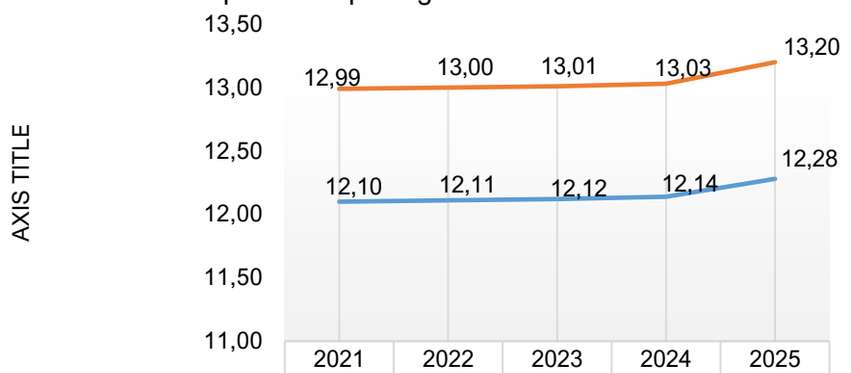
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026

Gambar 2.64. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut jenis kelamin Kabupaten Pekalongan 2021-2025

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan lebih rendah daripada laki-laki dikarenakan antara lain masih melekatnya budaya patriarki (menempatkan kedudukan/hak laki-laki lebih tinggi daripada perempuan) termasuk hak mendapatkan pendidikan formal, serta masih dijumpainya pernikahan usia anak di beberapa daerah yang mengakibatkan putus sekolah pada anak perempuan.

b). Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut jenis kelamin

Kondisi Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut jenis kelamin Kabupaten Pekalongan tahun 2021-2025 untuk penduduk laki-laki lebih rendah dibandingkan penduduk perempuan. Pada tahun 2025 Harapan Lama Sekolah (HLS) perempuan sebesar 13,20 tahun, sedangkan laki-laki sebesar 12,28 tahun. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.



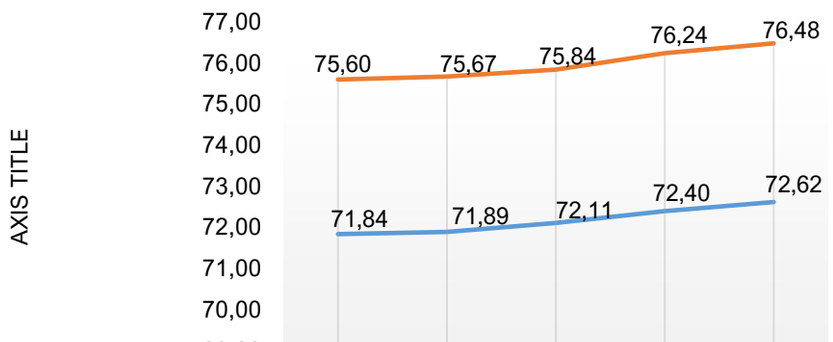
	2021	2022	2023	2024	2025
Laki-Laki (tahun)	12,10	12,11	12,12	12,14	12,28
Perempuan (tahun)	12,99	13,00	13,01	13,03	13,20

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.65. Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut jenis kelamin. Kabupaten Pekalongan 2021-2025

c). Umur Harapan Hidup (UHH) menurut jenis kelamin

Capaian Umur Harapan Hidup (UHH), perempuan dari tahun 2021-2025 selalu lebih tinggi dibandingkan dengan Umur Harapan Hidup (UHH) Laki-laki. Pada Tahun 2024 UHH perempuan sebesar 76,24 tahun naik menjadi 76,48 tahun pada tahun 2025. Sedangkan UHH laki-laki pada tahun 2024 sebesar 72,40 tahun naik menjadi 72,62 tahun pada tahun 2025. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.



	2021	2022	2023	2024	2025
Laki-Laki (tahun)	71,84	71,89	72,11	72,40	72,62
Perempuan (tahun)	75,60	75,67	75,84	76,24	76,48

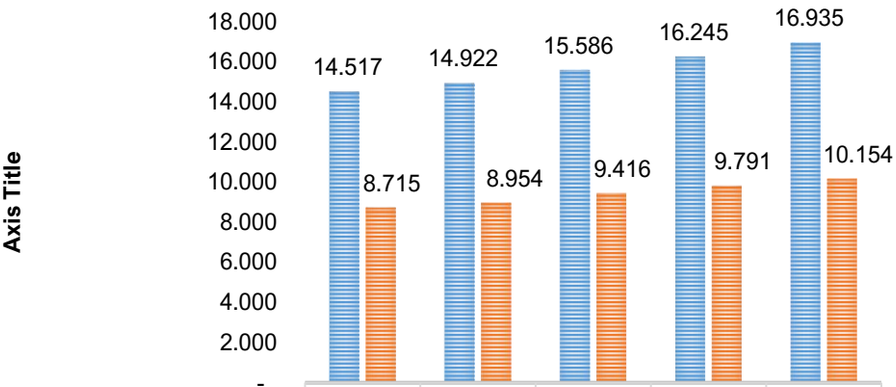
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.66. Umur Harapan Hidup (UHH) menurut jenis kelamin Kabupaten Pekalongan 2021-2025

d). Pengeluaran perkapita yang disesuaikan menurut jenis kelamin

Capaian pengeluaran perkapita yang disesuaikan dari Tahun 2021-2025 untuk penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pengeluaran perkapita penduduk laki-laki meningkat dari sebesar 16.245 ribu rupiah/orang/tahun pada tahun 2024 menjadi 16.935 ribu rupiah/orang/tahun pada tahun 2025. Sementara itu pengeluaran perkapita penduduk perempuan naik dari sebesar 9.791ribu rupiah/orang/tahun pada tahun 2024 menjadi 10.154 ribu rupiah/orang/tahun di tahun 2025.

Ketimpangan pengeluaran perkapita yang disesuaikan antara perempuan dan laki-laki disebabkan oleh kompetensi perempuan yang masih rendah dan akses ekonomi terhadap perempuan masih terbatas, sehingga masih belum bisa bersaing dengan laki-laki. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.



	2021	2022	2023	2024	2025
Laki-Laki (rb Rp/org/th)	14.517	14.922	15.586	16.245	16.935
Perempuan (rb Rp/org/th)	8.715	8.954	9.416	9.791	10.154

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.67. Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Pekalongan 2021-2025

2). Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

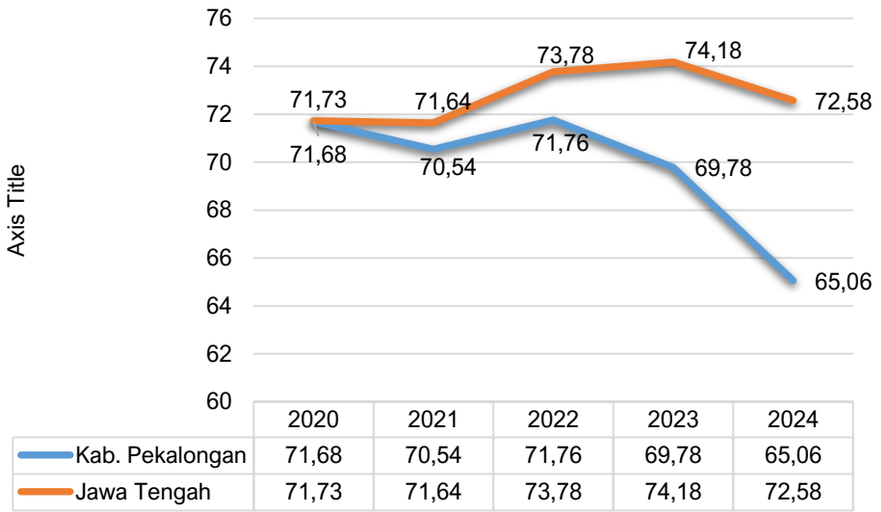
Sebagai upaya peningkatan pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dilakukan melalui pemberdayaan perempuan di bidang politik, ketenagakerjaan dan ekonomi yang ditunjukkan pada capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Komponen pembentuk IDG tahun 2020-2024 di Kabupaten Pekalongan antara lain : **keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja**. Hal ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2.54.
Komponen Pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
1	[IDG] Keterlibatan perempuan di Parlemen	27,91	26,67	26,67	25,00	17,78
2	[IDG] Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	50,65	49,29	48,03	54,99	53,20
3	[IDG] Sumbangan Pendapatan Perempuan	26,29	25,79	25,84	25,82	26,12

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Komponen pembentuk IDG rata-rata turun di tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 sehingga menyebabkan IDG Kabupaten Pekalongan turun dari 69,78 di tahun 2023 menjadi 65,06 di Tahun 2024. Tantangan utama masalah gender di beberapa tahun kedepan adalah masih berkutat pada budaya patriarki yang masih kental, membuat perempuan sulit untuk berpartisipasi secara bebas. Rata-rata capaian IDG Kabupaten Pekalongan masih berada di bawah Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

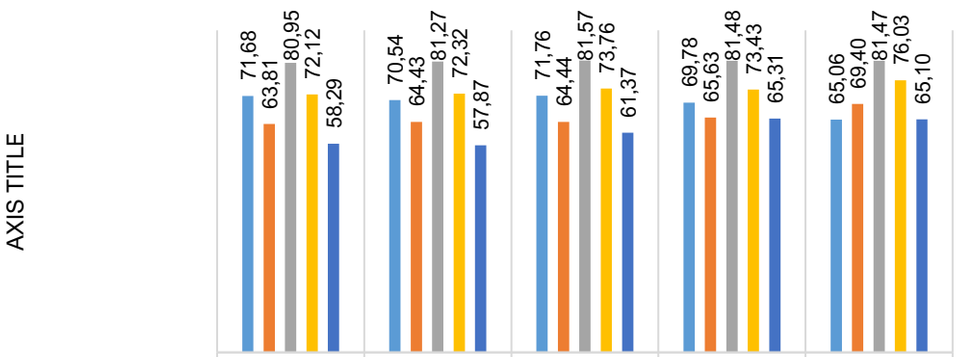


	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Pekalongan	71,68	70,54	71,76	69,78	65,06
Jawa Tengah	71,73	71,64	73,78	74,18	72,58

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.68. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Kabupaten Pekalongan ke depan masih dihadapkan pada tantangan pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Berbagai persoalan yang masih menjadi perhatian ke depan adalah masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS), kurangnya peran serta perempuan khususnya di bidang politik, serta tingginya kesenjangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.



	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Pekalongan	71,68	70,54	71,76	69,78	65,06
Kab. Batang	63,81	64,43	64,44	65,63	69,40
Kab. Pemalang	80,95	81,27	81,57	81,48	81,47
Kab. Tegal	72,12	72,32	73,76	73,43	76,03
Kota Pekalongan	58,29	57,87	61,37	65,31	65,10

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

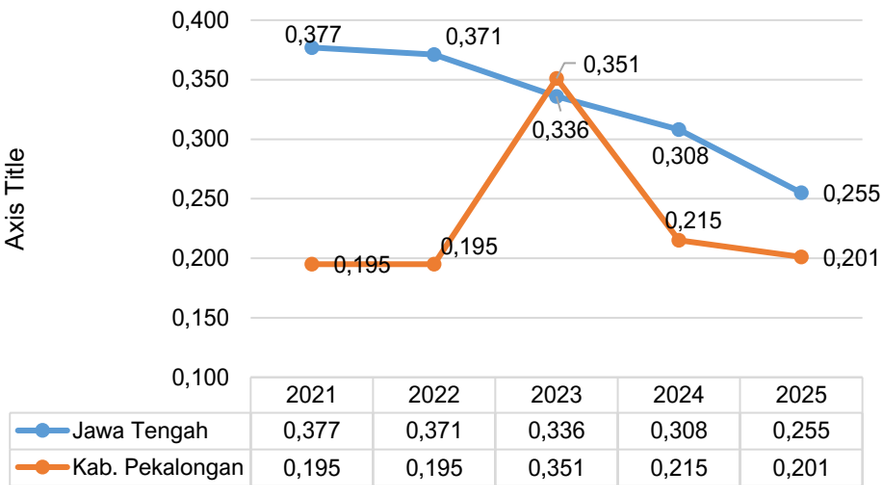
Gambar 2.69. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020-2024

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pekalongan tahun 2024 lebih rendah dari Kabupaten Batang sebesar 69,40, Kabupaten Pemalang sebesar 81,47, Kabupaten Tegal sebesar 76,03 dan dan Kota Pekalongan sebesar 65,10.

3). Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Kesetaraan gender menjadi bagian dari target pembangunan di banyak negara, terutama yang mengalami disparitas pembangunan yang tinggi. Ketimpangan pembangunan menurut gender mengakibatkan pembangunan tidak dapat mencapai potensinya yang optimal. Kondisi yang ideal dalam pembangunan manusia yang diharapkan adalah kelompok penduduk laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama untuk berperan dalam pembangunan, memegang kendali atas sumber daya pembangunan yang ada, serta menerima manfaat dari pembangunan yang setara dan adil.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan kerugian/kegagalan *(loss)* dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja. Pengukuran IKG dilakukan untuk membantu pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dalam mengevaluasi capaian pembangunan menurut gender dan menemukan solusi perbaikannya. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025 dapat dijelaskan dalam gambar berikut.



	2021	2022	2023	2024	2025
Jawa Tengah	0,377	0,371	0,336	0,308	0,255
Kab. Pekalongan	0,195	0,195	0,351	0,215	0,201

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah; 2025

Gambar 2.70. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025

Dari gambar di atas, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Pekalongan tahun 2025 sebesar 0,201, turun 0,014 poin dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 0,215. Ketimpangan gender Kabupaten Pekalongan pada rentang tahun 2021-2025 secara umum menunjukkan tren penurunan, meskipun sempat mengalami peningkatan di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Kabupaten Pekalongan terus mengalami peningkatan.

Penurunan IKG Kabupaten Pekalongan 2025 dipengaruhi oleh perbaikan di semua dimensi, khususnya dimensi kesehatan reproduksi. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.55.
Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025

No.	Wilayah	2021	2022	2023	2024	2025
1.	**Jawa Tengah**					
	MHPK20	0,267	0,264	0,260	0,249	0,226
	MTF	0,042	0,042	0,027	0.018	0,008
2.	**Kab. Pekalongan**					
	MHPK20	0,277	0,286	0,277	0,272	0,259
	MTF	0,004	0,000	0,035	0,000	0,000

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah; 2026

Ket :

- *MHPK20 (Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun);*
- *MTF (Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan)*

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang dalam dua tahun terakhir melahirkan anak lahir hidup tidak di fasilitas kesehatan tetap dari 0,000 pada tahun 2024 dan 2025. Selain itu, proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun juga mengalami penurunan dari 0,272 pada tahun 2024 menjadi 0,259 pada tahun 2025. ya. Perbaikan pada dimensi kesehatan reproduksi menunjukkan bahwa risiko potensial kesehatan reproduksi perempuan di Kabupaten pekalongan telah berhasil diminimalkan.

Selanjutnya dapat dijelaskan perkembangan indikator dimensi pasar tenaga kerja Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025 sebagai berikut:

Tabel 2.56.
Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025

No.	Wilayah	2021	2022	2023	2024	2025
1.	**Jawa Tengah**					
	TPAK Laki-Laki	81,94	83,74	84,52	85,66	85,36
	TPAK Perempuan	57,58	58,31	58,92	61,82	63,37
2.	**Kab. Pekalongan**					
	TPAK Laki-Laki	84,94	83,10	84,29	87,33	86,10
	TPAK Perempuan	58,33	58,01	56,27	65,13	68,20

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026

Pada dimensi pasar tenaga kerja, direpresentasikan dengan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pada 2025, TPAK perempuan meningkat lebih tinggi dibandingkan laki-laki. TPAK perempuan meningkat 3,07 persen poin dari 65,13 persen pada 2024 menjadi 68,20 persen pada 2025. Sementara itu, TPAK laki-laki mencapai 86,10 persen pada 2025 atau menurun sebesar 1,23 persen poin dibandingkan tahun 2024. Penurunan TPAK laki-laki dan peningkatan TPAK perempuan menyebabkan gap laki-laki dan perempuan dalam pasar tenaga kerja semakin menyempit dibandingkan tahun sebelumnya..

Selanjutnya Dimensi pemberdayaan disusun oleh 2 (dua) indikator, yaitu persentase anggota legislatif dan persentase penduduk 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas. Kedua indikator ini dipilah menurut jenis kelamin. Selenhkapnya dapat dilihat pada table berikut

Tabel 2.57.
Perkembangan Indikator Dimensi Pemberdayaan Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025

No.	Wilayah	2021	2022	2023	2024	2025
1.	**Jawa Tengah**					
	Persentase Keterwakilan di Legislatif Menurut Jenis Kelamin					
	▪ Laki-Laki	81,67	80,00	79,83	82,35	79,66
	▪ Perempuan	18,33	20,00	2017	17,65	20,34
	Persentase Penduduk Usia 25 tahun ke atas dengan Pendidikan SMA ke atas Menurut Jenis Kelamin					
	▪ Laki-Laki	32,26	34,14	34,82	35,72	33,21
	▪ Perempuan	26,82	28,79	29,20	29,61	28,74
2.	**Kab. Pekalongan**					
	Persentase Keterwakilan di Legislatif Menurut Jenis Kelamin					
	▪ Laki-Laki	73,33	73,33	75,00	82,22	82,22
	▪ Perempuan	26,67	26,67	25,00	17,78	17,78
	Persentase Penduduk Usia 25 tahun ke atas dengan Pendidikan SMA ke atas Menurut Jenis Kelamin					
	▪ Laki-Laki	25,43	25,51	26,83	27,40	23,87
	▪ Perempuan	21,61	21,94	22,31	22,37	21,94

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026

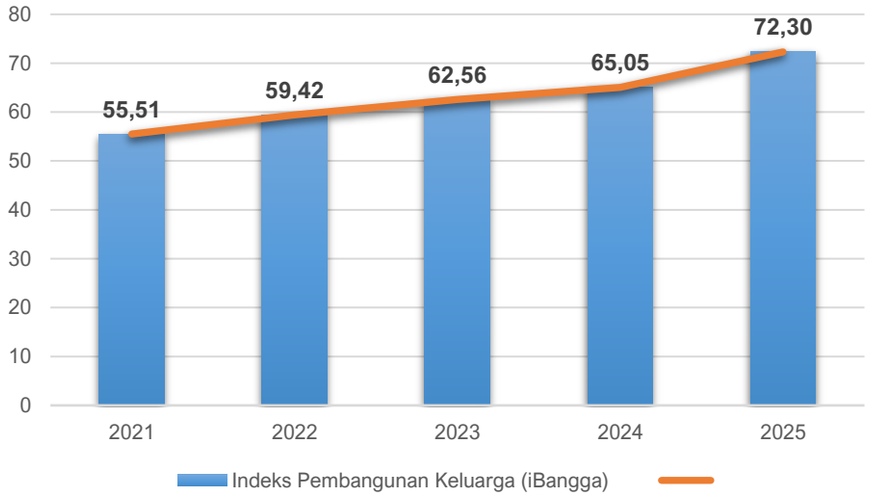
Dari tabel di atas, persentase anggota legislatif perempuan dan laki-laki sama di tahun 2024-2025. Pada tahun 2025, indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas mengalami penurunan baik pada jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Persentase penduduk laki-laki usia 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas sebesar 23,87 persen, sedangkan perempuan sebesar 21,94 persen. Capaian laki-laki dan perempuan dalam akses terhadap pendidikan masing-masing menurun sebesar 2,51 persen poin dan 0,87 persen poin dibandingkan tahun 2024. Sekalipun mengalami penurunan, ketimpangan antara laki-laki dan perempuan semakin sempit dalam capaian pendidikan SMA ke atas.

4). Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)

IBangga berdasarkan data BKKBN merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia.
Penghitungan IBangga menggunakan pendekatan tiga dimensi yang dibentuk dari 17 variabel. Langkah langkah penghitungan IBangga:
1. menghitung nilai agregasi masing masing variabel di level provinsi dan kabupaten/kota;
2. menghitung skor di setiap dimensi;
3. menghitung Ibangga.

Nilai IBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut:
1. IBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40;
2. IBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40–70;
3. IBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) di Kabupaten Pekalongan **pada 2025**, sebesar **72,30 (Tangguh)**. Ini berarti keluarga memiliki ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan yang tangguh. Capaian tersebut menunjukkan adanya komitmen dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan terhadap Program Bangga Kencana dan Upaya Percepatan Penurunan Stunting. Perkembangan iBangga Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN); 2025

Gambar 2.71. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2021-2025

3. Aspek Daya Saing Daerah

a. Daya Saing Sumber Daya Manusia

1). Angka Beban Ketergantungan

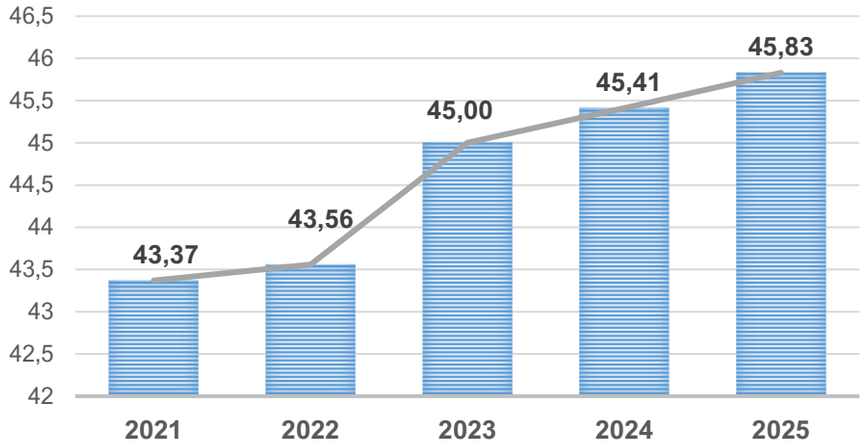
Angka Beban Ketergantungan *(dependency ratio)* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Selama periode 2021-2025 berdasarkan data BPS, angka beban ketergantungan di Kabupaten Pekalongan cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2025 angka beban ketergantungan Kabupaten Pekalongan sebesar 45,83 persen, artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 46 orang penduduk belum produktif atau sudah tidak produktif. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan gambar sebagai berikut.

Tabel 2.58.
Angka Beban Ketergantungan *(Dependency Ratio)*
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Tahun	Usia Bukan Produktif		Usia Produktif	Dependency Ratio (DR) (%)
		0-14 th	>65 th	15-64 th	
1.	2021	233.759	61.656	681.089	**43,37**
2.	2022	233.971	65.362	687.122	**43,56**
3.	2023	162.698	73.035	771.651	**45,00**
4.	2024	241.393	76.828	700.785	**45,41**
5.	2025	243.005	80.809	706.528	**45,83**

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan. 2025



Sumber : BPS Kab. Pekalongan Tahun 2026

Gambar 2.72. *Dependency Ratio* Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

Dari tabel dan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur tahun 2024 menunjukan jumlah kelompok **usia produktif (15-64 tahun**) di Kabupaten Pekalongan sebanyak **706.528 jiwa**, sedangkan kelompok **usia non produktif** sebanyak **323.813 jiwa** yang terdiri dari **0-14 tahun** sebanyak **243.005** jiwa dan **65+ tahun** sebesar **80.808 jiwa**. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.59.
Jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2025

No.	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total	Jumlah Total
1.	0-4	43.837	42.065	85.902	**243.005**
2.	5-9	40.831	38.588	79.419	
3.	10-14	39.803	37.881	77.684	
4.	15-19	39.531	36.854	76.385	**706.528**
5.	20-24	39.722	37.861	77.583	
6.	25-29	43.088	40.585	83.673	
7.	30-34	45.159	40.881	86.040	
8.	35-39	42.921	38.709	81.630	
9.	40-44	38.515	35.922	74.437	
10.	45-49	34.279	33.839	68.118	
11.	50-54	30.086	30.112	60.198	
12.	55-59	26.064	27.129	53.193	
13.	60-64	22.287	22.984	45.271	
14.	65-69	16.572	17.677	34.249	**80.808**
15.	70-74	10.723	12.217	22.940	
16.	70+	10.108	13.512	23.620	
	Jumlah 2024	**523.526**	**506.816**	**1.030.342**	

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2026

Peningkatan proporsi penduduk usia tua dapat dimaknai sebagai hal yang positif karena hal tersebut menunjukkan kualitas kesehatan yang semakin baik sehingga penduduk memiliki usia dan harapan hidup yang lebih panjang. Di sisi lain, hal tersebut menjadi tantangan karena jika penduduk usia tua tersebut semakin banyak maka akan semakin meningkatkan angka beban ketergantungan.

b. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

1). Kapabilitas Inovasi

Indeks Daya Saing Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka konseptual *Global Competitiveness Index (GCI)* yang dikembangkan oleh *World Economic Forum (WEF)*, dengan penyesuaian terhadap konteks pembangunan nasional dan ketersediaan data di tingkat daerah. Kerangka tersebut digunakan sebagai dasar dalam merumuskan pilar dan indikator daya saing yang relevan untuk menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menciptakan lingkungan yang produktif, berkelanjutan, dan inklusif. Seluruh data yang digunakan dalam penyusunan IDSD merupakan data sekunder yang bersumber dari kementerian, lembaga, dan instansi resmi pemerintah.

Komponen IDSD 2023 terdiri dari 4 Komponen yang dibagi menjadi 12 pilar. Masing-masing pilar terbagi atas sejumlah indikator, dengan total indikator sebanyak 63 untuk Provinsi, dan 48 untuk Kabupaten/ Kota. Kapabilitas Inovasi level Kabupaten/Kota antara lain keanekaragaman tenaga kerja, publikasi ilmiah, aplikasi kekayaan intelektual, belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, aplikasi merek dagang. Kapabilitas inovasi menggambarkan kemampuan dalam mengembangkan produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan melalui penerapan proses secara tepat serta cepat dalam menanggapi perubahan teknologi.

Berdasarkan data Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), **Kapabilitas Inovasi** merupakan indikator pembentuk **Pilar 12** dari **Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)**. Bapperida Kabupaten Pekalongan menunjukkan komitmennya dalam memanfaatkan data IDSD sebagai rujukan penting dalam perumusan kebijakan. Adapun skor IDSD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 sebesar **3,69**, naik dari skor tahun 2024 yang lalu,**3,61**. Sedangkan tahun 2025 IDSD Jawa Tengah sebesar 3,43. **Kapabilitas Inovasi (Pilar 12)** naik dari **2,43** di Tahun 2024 menjadi **2,86** di Tahun 2025. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



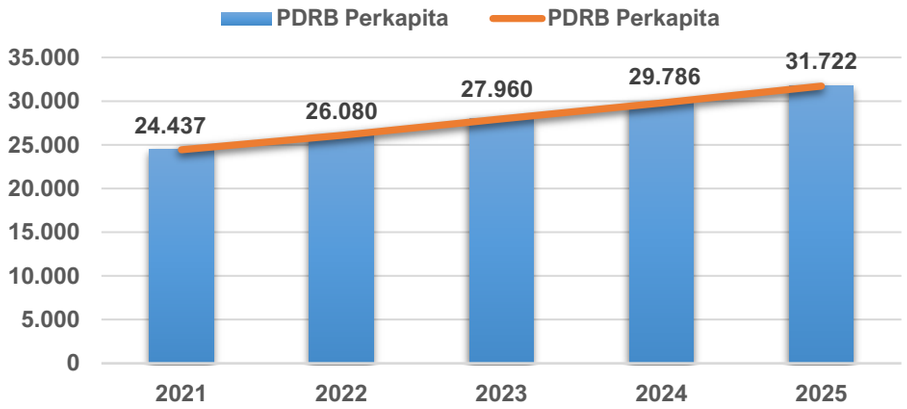
Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), 2025

Gambar 2.73. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2022-2025

2). PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB perkapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi di daerah tersebut. PDRB per kapita dihitung berdasarkan pendapatan regional neto atas dasar biaya faktor dibagi dengan jumlah penduduk regional pertengahan tahun.

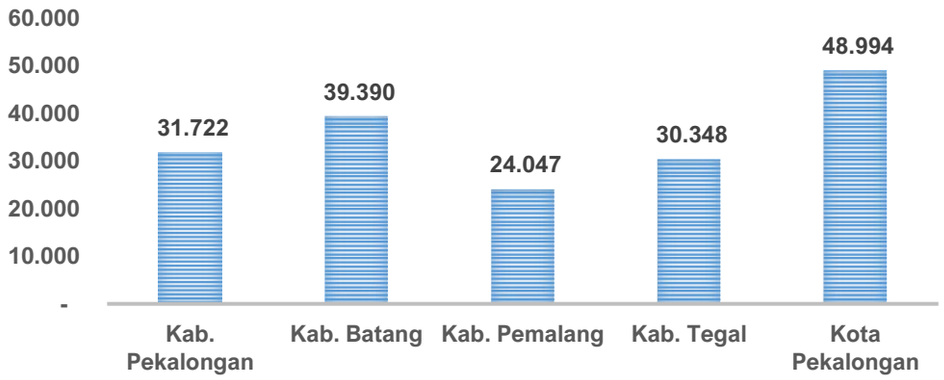
Nilai PDRB per kapita Kabupaten Pekalongan dari tahun 2021-2025 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2025 PDRB per kapita tercatat sebesar 31,72 juta rupiah mengalami kenaikan 6,50 persen atau sebesar dari 29,79 juta rupiah di tahun 2024. Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Jawa Tengah; 2026 *angka sementara; **angka sangat sementara

Gambar 2.74. PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

Sedangkan capaian PDRB Per Kapita Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Jawa Tengah; 2025 *angka sementara *angka sangat sementara

Gambar 2.75. PDRB Per Kapita Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2025

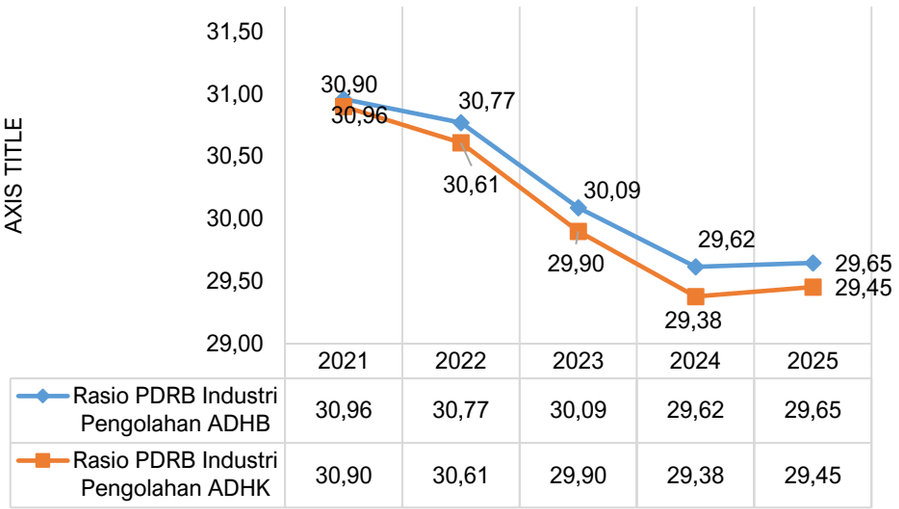
Bila dibandingkan dengan kabupaten sekitar pada tahun 2025, PDRB per kapita Kabupaten Pekalongan mencapai 31,72 juta rupiah lebih baik dari Kabupaten Pemalang sebesar 24,05 juta rupiah dan Kabupaten Tegal sebesar 30,35 juta rupiah, namun lebih rendah dibandingkan Kabupaten Batang sebesar 39,39 juta rupiah dan Kota Pekalongan sebesar 48,99 juta rupiah.

3). Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB Industri Pengolahan adalah kontribusi persentase nilai tambah bruto sektor manufaktur terhadap total PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun. Rasio ini mengukur sejauh mana industri pengolahan (mengubah bahan mentah menjadi produk jadi/setengah jadi) berperan dalam perekonomian regional

Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Pekalongan mempunyai peranan yang sangat penting dalam struktur perekonomian Kabupaten Pekalongan dengan pertumbuhan mencapai 6,16 persen di Tahun 2025 naik dibandingkan tahun 2024 sebesar 3,25 persen. Rasio PDRB Industri Pengolahan ADHB Tahun 2025 sebesar 29,65 mengalami kenaikan dari Tahun 2024 sebesar 29,62 persen. Sedangkan Rasio PDRB Industri Pengolahan ADHK sebesar 29,45 di Tahun 2025 juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 sebesar 29,38.

Selengkapnya Rasio PDRB Industri Pengolahan ADHB dan ADHK Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada gambar berikut.



	2021	2022	2023	2024	2025
Rasio PDRB Industri Pengolahan ADHB	30,96	30,77	30,09	29,62	29,65
Rasio PDRB Industri Pengolahan ADHK	30,90	30,61	29,90	29,38	29,45

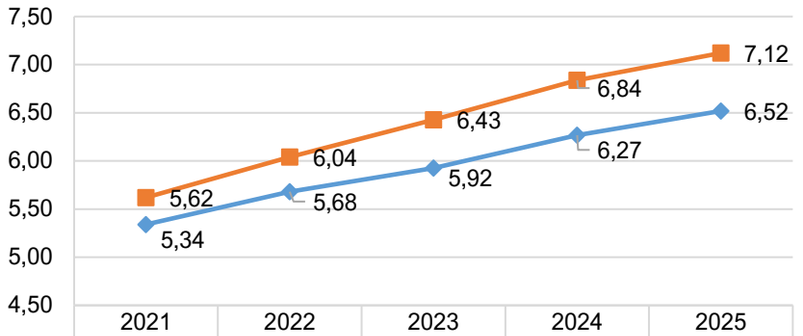
Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan; 2026

Gambar 2.76. Rasio PDRB Industri Pengolahan ADHB dan ADHK Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

4). Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan kontributor penting dalam PDRB, dengan kontribusi yang bervariasi antar wilayah, sering kali didorong oleh pariwisata. Pertumbuhan PDRB sektor ini mencerminkan peningkatan kualitas layanan, investasi, dan konsumsi Masyarakat. Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum di Kabupaten Pekalongan merupakan **sektor tertinggi** penyumbang angka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 sebesar **10,25 persen** sedikit melambat bila dibandingkan tahun 2024 sebesar **11,80** persen.

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum ADHB sebesar 6,52 di Tahun 2024 naik dibandingkan tahun 2024 sebesar 6,27. Sedangkan Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum ADHK sebesar 7,12 di Tahun 2025 naik dibandingkan tahun 2024 sebesar 6,844. Selengkapnya Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum ADHB dan ADHK Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada gambar berikut.



	2021	2022	2023	2024	2025
PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum ADHB	5,34	5,68	5,92	6,27	6,52
PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum ADHK	5,62	6,04	6,43	6,84	7,12

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan; 2025

Gambar 2.77. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum ADHB dan ADHK Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

5). Rasio Kewirausahaan Daerah

Berdasarkan data Sakernas BPS, Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Rasio Kewirausahaan Daerah Kabupaten Pekalongan ditargetnya untuk **Tahun 2025** sebesar **4,66.**

6). Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

Berdasarkan (1)Volume usaha koperasi daerah: Perangkat Daerah yang menangani Urusan Koperasi dan UKM; dan (2) PDRB : PDRB Seri 2010, BPS, Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.

Formulasi Perhitungan : (Volume Usaha Koperasi Daerah/PDRB ADHB)x100%

Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Tahun 2025 sebesar 0,82 lebih kecil dari tahun 2021 sebesar 0,75. Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut. Selengkapnya Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2.60.
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Volume Koperasi	Juta Rp	179.498,00	134.980,07	196.932,90	251.913,48	269.308,26
2	PDRB Menurut harga berlaku	Juta Rp	24.030.302,70	25.998.888,90	28.166.426,33	30.352.099,69	32.684.206,29
3	Persentase Volume Koperasi terhadap PDRB berlaku	Persen	**0,75**	**0,52**	**0,70**	**0,83**	**0,82**

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan; 2026

7). Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja (PUK) merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Penduduk usia kerja pada Agustus 2025 sebanyak 788,99 ribu orang, naik sebanyak 9,69 ribu orang dibandingkan Agustus 2024. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu 609,67 ribu orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 179,32 orang.

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2025 terdiri dari 589,95 ribu orang penduduk bekerja dan 19,72 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2024, jumlah Angkatan kerja meningkat sebanyak 14,43 ribu orang, penduduk bekerja bertambah sebanyak 14,35 ribu orang, sementara jumlah pengangguran bertambah sebanyak 80 orang.

Perbandingan antara jumlah penduduk pengangguran dengan seluruh angkatan kerja atau yang disebut sebagai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama tiga tahun terakhir mengalami fluktuatif cenderung turun. Pada tahun 2023, TPT Kabupaten Pekalongan sebesar 3,25 persen, naik di tahun 2024 menjadi 3,30 persen dan yang terakhir turun menjadi 3,24 persen di tahun 2025. Pada periode yang sama, TPT menurut jenis kelamin juga mengalami fluktuasi. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Kabupaten Pekalongan Agustus 2023-Agustus 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.61.
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Kabupaten Pekalongan
Agustus 2023-Agustus 2025

No	Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2023	Agustus 2024	Agustus 2025	Perubahan Ags 2023–Ags 2025
		ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	**Penduduk Usia Kerja (PUK)**	769,49	779,30	788,99	9,81
2.	**Angkatan Kerja**	542,19	595,24	609,67	53,05
	• Bekerja	524,58	575,60	589,95	51,01
	• Pengangguran	17,61	19,64	19,72	2,04
3.	**Bukan Angkatan Kerja**	227,30	184,07	179,32	-43,24
		persen	persen	persen	Persen poin
4.	**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**	3,25	3,30	3,24	0,05
	• Laki-Laki	3,55	3,95*	3,31	0,40
	• Perempuan	2,78	2,49	3,14	-0,29
		persen	persen	persen	Persen poin

No	Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2023	Agustus 2024	Agustus 2025	Perubahan Ags 2023–Ags 2025
		ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**	70,46	76,38	77,27	5,92
	• Laki-Laki	84,29	87,33	86,10	3,04
	• Perempuan	56,27	65,13	68,20	8,86

Sumber : BPS Kab. Pekalongan, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas); 2023-2025

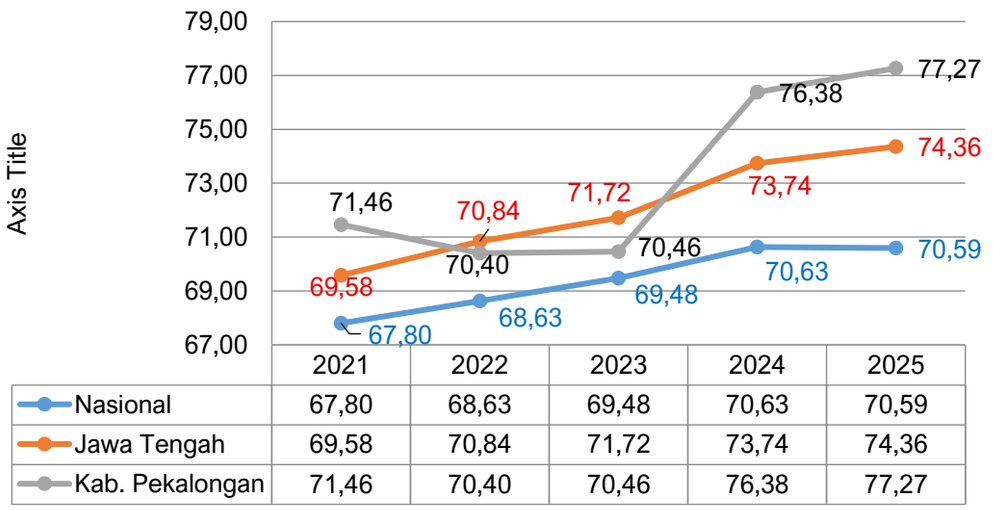
*Catatan: *) Relative Standard Error (RSE) sebesar 25,20%, yang berarti nilai estimasi masih dapat digunakan namun perlu kehati-hatian.*

RSE menunjukkan seberapa besar presisi nilai yang diestimasi dengan nilai yang sebenarnya (populasi)

8). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan sejak Agustus 2021 sampai dengan Agustus 2025. TPAK pada Agustus 2025 sebesar 77,27 persen, naik 0,89 persen poin dibanding Agustus 2024. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Secara absolut, jumlah penduduk bukan angkatan kerja mengalami penurunan sebanyak 43,24 ribu orang.

Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada gambar berikut.



	2021	2022	2023	2024	2025
Nasional	67,80	68,63	69,48	70,63	70,59
Jawa Tengah	69,58	70,84	71,72	73,74	74,36
Kab. Pekalongan	71,46	70,40	70,46	76,38	77,27

Sumber : BPS Kab. Pekalongan, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas); 2020-2024

Gambar 2.78. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pekalongan, dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025

Berdasarkan tabel dan gambar diatas, TPAK Kabupaten Pekalongan pada 2025 sebesar 77,27 persen naik dibandingkan dengan TPAK 2024 sebesar 76,38 persen. Hal ini mengindikasikan Semakin naik TPAK menunjukkan bahwa semakin naik pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

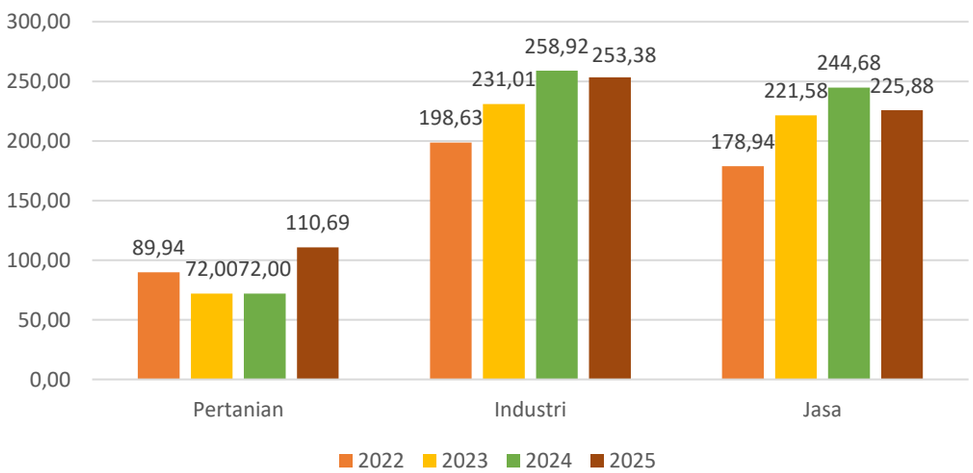
a). Karakteristik Penduduk Bekerja

Karakteristik penduduk bekerja akan disajikan berdasarkan lapangan usaha dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

(1). Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Berdasarkan hasil Sakernas tiga tahun terakhir, industri menjadi lapangan usaha dengan jumlah tenaga kerja terbanyak. Penyerapan tenaga kerja yang besar di sektor industri sejalan dengan kontribusi sektor industri pengolahan yang besar terhadap ekonomi Kabupaten Pekalongan. Sementara itu, lapangan usaha pertanian konsisten menjadi lapangan usaha dengan jumlah penduduk bekerja paling sedikit.

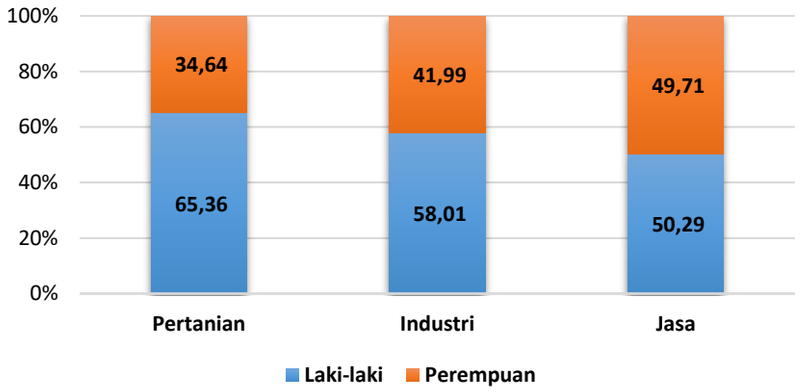
Dilihat dari kurun waktu tiga tahun terakhir, terjadi penurunan jumlah tenaga kerja di lapangan usaha pertanian. Pada tahun 2022, pekerja sektor pertanian tercatat sebesar 89,94 ribu orang. Namun, pada 2023 dan 2023, angkanya cenderung menurun dan kembali naik drastis pada tahun 2025 menjadi 110,69 ribu orang. Sementara itu, lapangan usaha industri dan jasa cenderung mengalami peningkatan, meskipun agak menurun di tahun 2025. Dimana pekerja sektor industri cenderung mengalami peningkatan dari 198,63 ribu orang pada 2022 menjadi 253,38 ribu orang pada 2025. Selanjutnya, sektor jasa juga menunjukkan kecenderungan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sektor jasa , meningkat dari 178,94 ribu orang pada 2022 menjadi 225,88 ribu pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa sektor jasa juga menjadi bagian penting dalam ekonomi Kabupaten Pekalongan dan berkontribusi besar terhadap peluang kerja dan aktivitas ekonomi. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Kab. Pekalongan, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas); 2022-2025

Gambar 2.79. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Agustus 2022 – Agustus 2025 (ribu orang)

Persentase penduduk bekerja menurut lapangan usaha dan jenis kelamin, terlihat bahwa jumlah pekerja laki-laki di sektor pertanian hampir dua kali lipat jumlah pekerja perempuan. Artinya, keterlibatan pekerja perempuan pada sektor pertanian tergolong rendah. Sementara itu, 41,99 persen pekerja sektor industri merupakan pekerja perempuan dan sisanya adalah laki-laki. Pola yang berbeda justru terdapat pada sektor jasa, meski tipis, laki-laki masih mendominasi sebesar 50,29 persen dari total pekerja sektor jasa di Kabupaten Pekalongan. Sektor jasa meliputi lapangan usaha perdagangan, transportasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa informasi dan telekomunikasi, keuangan, kesehatan,pendidikan, administrasi pemerintah, kesenian dan jasa lainnya.



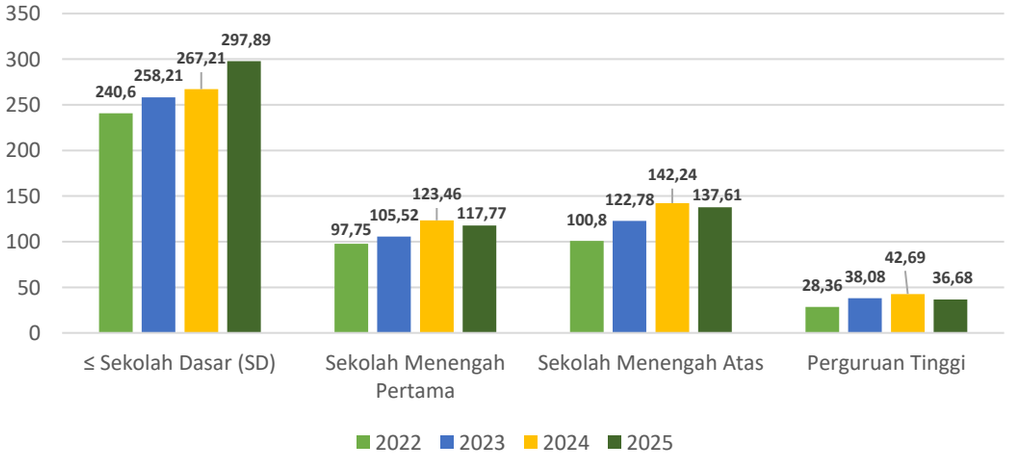
Sumber : BPS Kab. Pekalongan, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas); 2025

Gambar 2.80. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin, Agustus 2025 (persen)

(2). Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pada tahun 2022-2025, penduduk bekerja masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD) dan secara berturut-turut diikuti oleh kategori pekerja lulusan SMP, SMA umum, SMA Kejuruan dan Universitas (Diploma dan Sarjana). Jumlah pekerja dengan pendidikan SD ke bawah menunjukkan peningkatan, berturut-turut dari 240,60 ribu pada 2022 menjadi 258,21 ribu pada 2023, 267,21 ribu pada 2024 dan mencapai 297,89 ribu pada tahun 2025. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja masih berasal dari kelompok pendidikan dasar, yang mencerminkan tantangan dalam upaya peningkatan pendidikan tenaga kerja.

Tidak hanya kategori pendidikan dasar, kecenderungan peningkatan jumlah tenaga kerja tersebar secara merata pada seluruh jenjang pendidikan. Terlihat dari jumlah tenaga kerja dengan Pendidikan SMP yang juga mengalami peningkatan dari 97,75 ribu pada 2022 menjadi 105,52 ribu pada 2023 dan kemudian meningkat lebih lanjut menjadi 123,46 ribu pada 2024, tetapi cenderung turun di tahun 2025 menjadi 117,77 ribu. Jumlah pekerja dari latar belakang SMA Kejuruan meningkat dari 45,88 ribu pada 2022 menjadi 57,40 ribu pada 2023 dan mencapai 65,10 ribu pada 2024 juga cenderung turun pada tahun 2025 menjadi 137,61 ribu. Pekerja dengan latar belakang pendidikan universitas pun cenderung menunjukkan peningkatan, dari 28,36 ribu pada 2022, menjadi 38,08 ribu pada 2023, kemudian mencapai 42,69 ribu pada 2024 dan cenderung turun menjadi 36,68 ribu di tahun 2025.



Sumber : BPS Kab. Pekalongan, Sakernas; 2022-2025

Gambar 2.81. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2022 – Agustus 2025 (ribu orang)

c. Penerapan Ekonomi Hijau

Pembangunan ekonomi hijau di tingkat kabupaten adalah strategi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang menyeimbangkan antara peningkatan kesejahteraan sosial, penciptaan lapangan kerja hijau, dan kelestarian lingkungan atau penurunan emisi karbon. Bagi pemerintah daerah, penyusunan rencana tata ruang dan anggaran yang bersinergi dengan program Pembangunan Rendah Karbon menjadi kunci utama. Ekonomi hijau dapat didukung dengan energi terbarukan melalui berbagai upaya, termasuk pengembangan sumber energi bersih, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan peningkatan efisiensi energi.

Kabupaten Pekalongan menunjukkan komitmen terhadap pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui keberadaan berbagai infrastruktur EBT yang cukup beragam. Infrastruktur yang paling mendominasi adalah PLTS SHS (Solar Home System) sebanyak 408 unit dengan kapasitas 20 kWp, menandakan fokus pada pemenuhan energi listrik rumah tangga di wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik konvensional. Selain itu, terdapat 300 unit PJUTS (Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya) dengan kapasitas 96.000 watt yang mendukung penerangan wilayah publik secara mandiri dan berkelanjutan. Potensi air juga dimanfaatkan melalui PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro) sebanyak 3 unit dengan kapasitas 6.990 kW serta PLTMH (Mikrohidro) sebanyak 25 unit berkapasitas 625 kVA.

Pemanfaatan energi surya juga diterapkan melalui PLTS *Rooftop* sebanyak 4 unit berkapasitas 121 kWp, serta pemanfaatan limbah melalui 4 unit biogas dengan kapasitas 72 m³. Namun demikian, beberapa potensi energi seperti PLTA (skala besar), PLTS *Ground Mounted*, panas bumi, dan PLTSa (berbasis limbah) belum dimanfaatkan, menunjukkan ruang pengembangan yang masih terbuka. Secara keseluruhan, infrastruktur EBT di Kabupaten Pekalongan telah berkembang cukup baik, terutama di sektor energi surya dan hidro skala kecil, namun masih terdapat peluang besar untuk pengembangan lebih lanjut pada sumber energi terbarukan lainnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.





No.	Infrastruktur EBT	Jumlah Unit	Kapasitas	Satuan
1	Biogas	4	72	m³
2	PLTA	-	-	kW
3	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM)	3	6990	kW
4	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	25	625	kVa
5	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) *Solar Home System (SHS)*	408	20	kWp
6	PLTS *Ground Mounted*	-	-	kWp
7	PLTS Rooftop	4	121	kWp
8	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS)	300	96000	watt
9	Panas Bumi	-	-	-
10	Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)	-	-	-

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

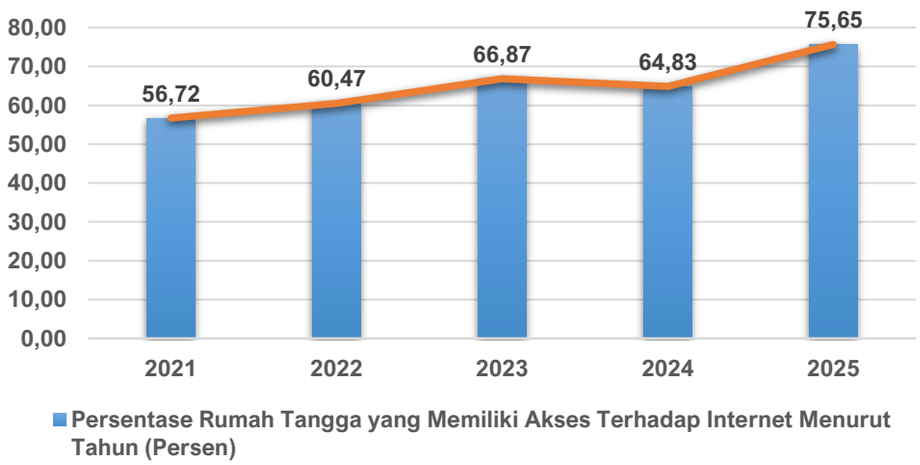
Gambar 2.82. Banyaknya Infrastruktur Energi Baru Terbarukan Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 (PLTM Desa Bantar Kulon, Kec. Lebakbarang)

d. Transformasi Digital

1). Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet

Rumah tangga dengan akses internet merupakan rumah tangga dengan minimal terdapat satu anggota rumah tangga yang mengakses internet, baik melalui jaringan tetap atau seluler. Rumah tangga dengan akses internet berarti bahwa internet tersedia untuk digunakan oleh semua anggota rumah tangga kapan saja.

Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 cenderung mengalami kenaikan dari 56,72% di Tahun 2021 meningkat menjadi 75,65% di Tahun 2025. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Kab. Pekalongan, 2026

Gambar 2.83. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

e. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

1). Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

Berdasarkan BPS, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB.

Total PMTB berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli *(financial leasing)*, serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli *(financial leasing)*. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Tabel 2.62.
Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

Tahun	PMTB		PDRB		Persentase (%)	
	Berlaku	Konstan	Berlaku	Konstan	Berlaku	Konstan
2021	5.612.050,32	3.784.896,00	24.030.300,26	16.615.065,66	**23,35**	**22,78**
2022	6.061.161,91	3.963.763,81	25.962.588,93	17.463.415,80	**23,35**	**22,70**
2023	6.754.431,15	4.321.292,88	28.166.426,33	18.358.470,76	**23,98**	**23,54**
2024	7.760.342,27	4.706.767,10	30.352.099,69	19.291.177,92	**25,57**	**24,40**
2025	8.515.074,12	5.039.794,93	32.684.206,29	20.425.915,91	**26,05**	**24,67**

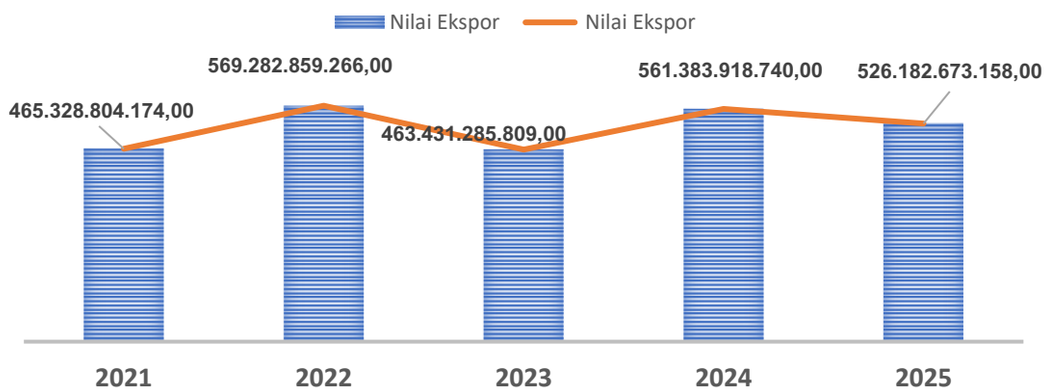
Sumber : BPS Kab. Pekalongan, 2026

Dari tabel di atas Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB ADHB) meningkat dari 23,35% di Tahun 20210 menjadi 26,05% di Tahun 2025. Sedangkan Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB ADHK) juga meningkat dari 22,78% di Tahun 2021 menjadi 24,67% di Tahun 2025. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan investasi dalam bentuk aset tetap, seperti bangunan, mesin, dan peralatan, yang digunakan dalam proses produksi. kenaikan PMTB merupakan indikator positif bagi perekonomian karena mencerminkan adanya peningkatan investasi yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan daya saing.

2). Ekspor Barang dan Jasa

Jumlah nilai Ekspor Kabupaten Pekalongan dari tahun 2021-2025 fluktuatif. Pada tahun 2025 nilai ekspor di Kabupaten Pekalongan mencapai Rp. 537,89 milyar. Tahun 2022 adalah tahun dimana nilai ekspor berada di titik tertinggi selama lima tahun terakhir yaitu sebesar Rp. 569,28 milyar. Rata-rata nilai ekspor Kabupaten Pekalongan selama 2021-2025 per tahunnya adalah Rp. 517,12 milyar.

.



Gambar 2.84. Nilai Ekspor Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

f. Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

1). Persentase Desa Mandiri

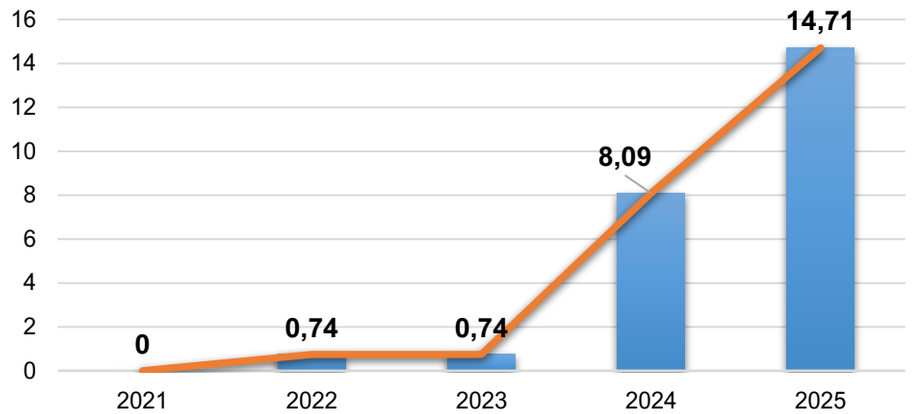
Menurut UU No. 6 Tahun 2014, Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik.

Semakin tingginya jumlah desa mandiri menunjukkan tingkat pembangunan desa yang semakin baik yang didukung dengan komponen pendukung yang termuat dalam 6 (enam) dimensi pengukurannya. Persentase Desa Mandiri Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.63.
Persentase Desa Mandiri Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Kondisi Jalan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Desa Mandiri	**0**	**2**	**2**	**22**	**40**
2.	Jumlah Desa	272	272	272	272	272
	Persentase Desa Mandiri	**0,00**	**0,74**	**0,74**	**8,09**	**14,71**

Sumber Dinas PMD Kab. Pekalongan, 2025



Sumber Dinas PMD Kab. Pekalongan, 2025

Gambar 2.85. Persentase Desa Mandiri Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

Dari tabel dan gambar di atas, jumlah desa mandiri di Kabupaten Pekalongan mengalami kenaikan dari 22 desa di Tahun 2024 menjadi 40 desa di Tahun 2025 dari jumlah total 272 desa. yang meliputi :

Tabel 2.64.
Jumlah Desa Mandiri Kabupaten Pekalongan Tahun 2025

No.	Desa	Kecamatan
1.	KANDANGSERANG	KANDANGSERANG
2.	PANINGGARAN	PANINGGARAN
3.	DOMIYANG	PANINGGARAN
4.	SAWANGAN	DORO
5.	DORO	DORO
6.	KARANGSARI	KARANGANYAR
7.	KULU	KARANGANYAR
8.	SINANGOHPRENDENG	KAJEN
9.	GANDARUM	KAJEN
10.	SABARWANGI	KAJEN
11.	NYAMOK	KAJEN
12.	TANJUNGKULON	KAJEN
13.	TANJUNGSARI	KAJEN

No.	Desa	Kecamatan
14.	GEJLIG	KAJEN
15.	KEBONAGUNG	KAJEN
16.	ROWOLAKU	KAJEN
17.	BUKUR	BOJONG
18.	KALIPANCUR	BOJONG
19.	SUMURJOMBLANGBOGO	BOJONG
20.	LEGOKCLILE	BOJONG
21.	DUWET	BOJONG
22.	WANGANDOWO	BOJONG
23.	KETITANGKIDUL	BOJONG
24.	REJOSARI	BOJONG
25.	BOJONGMINGGIR	BOJONG
26.	WIRODITAN	BOJONG
27.	KARAGSARI	BOJONG
28.	WONOPRINGGO	WONOPRINGGO
29.	GONDANG	WONOPRINGGO
30.	PENGADENTENGAH	WONOPRINGGO
31.	COPRAYAN	BUARAN
32.	WONOYOSO	BUARAN
33.	PAKUMBULAN	BUARAN
34.	SIMBANGWETAN	BUARAN
35.	KERTIJAYAN	BUARAN
36.	WARULOR	WIRADESA
37.	KEMPLONG	WIRADESA
38.	KAUMAN	WIRADESA
39.	BEBEL	WONOKERTO
40.	WONOKERTOKULON	WONOKERTO

Sumber Dinas PMD Kab. Pekalongan, 2026

2). Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi :

(1) Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
(2) Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan.

Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut:

(1) Ketahanan bangunan *(durable housing)* yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat;
(2) Kecukupan luas tempat tinggal *(sufficient living space)* yaitu luas lantai perkapita ≥ 7,2 m2;
(3) Memiliki akses air minum dan sanitasi layak

Formulasi Perhitungan menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak).

PHLTB (proksi)= $\frac{JRTHLTB\ (proksi)}{(JRT\ x\ 100)}$

- PHLTB (proksi): Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan;
- RTHLTB (proksi): jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan;
- JRT: Jumlah rumah tangga



Sumber : BPS Kab. Pekalongan, 2025

Gambar 2.86. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS, persentase rumah tangga dengan akses hunian layak mengalami kenaikan dari **74,85%** di Tahun 2021 menjadi **91,30%** di Tahun 2025. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan.

3). Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota

Berdasarkan status jalan Kabupaten Pekalongan di tahun 2025 mempunyai 9,20 km Jalan Nasional, 85,75 km jalan provinsi dan 697,90 km jalan kabupaten. Menurut kondisi fisiknya, panjang jalan di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2025 yaitu 300,274 km dalam kondisi baik, 251,282 km kondisi sedang atau sebesar 79,03 persen atau naik di bandingkan tahun 2024 sebesar 313,275 km dalam kondisi baik, 233,091 km kondisi sedang atau sebesar 78,29 persen dari jumlah total seluruh panjang jalan sebesar 697.896 km. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.65.
Kondisi Jalan Mantap Kabupaten Pekalongan
Tahun 2021-2025

No	Kondisi Jalan	2021	2022	2023	2024	2025
	Kondisi Jalan					
1.	Baik (km)	414,211	432,632	288,992	313,275	300,274
2.	Sedang (km)	137,054	135,383	232,135	233,091	251,282
3.	Rusak ringan (km)	53,154	53,141	79,455	60,573	50,432
4.	Rusak Berat (km)	93,477	76,74	97,314	90,957	95,908
	Total (km)	**697,896**	**697,896**	**697,896**	**697,896**	**697,896**
	% MANTAP (baik dan sedang)	**78,99**	**81,39**	**74,67**	**78,29**	**79,03**

Sumber : DPU TARU Kab. Pekalongan; 2026

Adanya pelaksanaan program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan di Kabupaten Pekalongan difokuskan untuk mendukung program nasional pembangunan jalan tol trans Jawa. yang menghubungkan dua kota terbesar yaitu Jakarta dan Surabaya. Hal ini didukung pula adanya exit toll di Kecamatan Bojong sehingga mempermudah aksesibilitas menuju ibukota Kabupaten Pekalongan di Kecamatan Kajen maupun wilayah lainnya.



Gambar 2.87. Jaringan Jalan Tol Trans Jawa di Wilayah Kabupaten Pekalongan



Gambar 2.88. Exit Tol Bojong Kabupaten Pekalongan Pekalongan

4). Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota

Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota adalah indikator yang mengukur jumlah ruas jalan kabupaten/kota dengan pemenuhan minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal perlengkapan jalan dibandingkan dengan jumlah total ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota.

Pemenuhan minimal perlengkapan jalan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pemenuhan minimal perlengkapan jalan adalah tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, *guardrill*, penerangan jalan umum (PJU) dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) pada jalan kabupaten/kota minimal sebesar 60% dari total kebutuhan ideal untuk masing-masing perlengkapan jalan dimaksud untuk 1 (satu) ruas jalan. Jenis dan ruang lingkup rambu, marka,

guardrill dan APILL sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Formulasi Perhitungan ;
Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota = (Jumlah ruas jalan kabupaten/kota dengan pemenuhan minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal perlengkapan jalan / Jumlah total ruas jalan kewenangan kabupaten/kota) x 100%. Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 kurang lebih sekitar (20/697,896 km) x 100 % sehingga capaiannya adalah **2,87 %.**

Indikator persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan (fasilitas keselamatan) jalan secara tuntas di 1 ruas jalan untuk setiap jenis perlengkapan jalan yang dimungkinkan berbeda- beda kebutuhannya (jenis dan/atau jumlahnya) pada setiap ruas jalannya. Hal ini berkontribusi untuk meningkatkan tingkat keselamatan pengguna jalan di ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka mengurangi potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menjadi indikator ditingkat provinsi (Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dalam 1 Juta Keberangkatan).

5). Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Pelaksanaan penilaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) untuk daerah irigasi kewenangan kabupaten wajib dilaksanakan setiap tahun, hal ini berdasarkan atas amanat dari Permen PUPR No. 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi. Sedangkan untuk pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) wajib dilaksanakan setidaknya setiap 5 tahun, hal ini berdasarkan atas amanat dari Permen PUPR Nomor: 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi.

ePAKSI (Elektronik Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi) (merupakan instrumen yang diperlukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas PUTR Kabupaten Pekalongan dalam pengelolaan aset irigasi dan inventarisasi kondisi sistem/jaringan irigasi dimana akan menjadi dasar dalam penentuan kegiatan perencanaan kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi permukaan khususnya pada Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten Pekalongan.

Penetapan kriteria penilaian kinerja sistem irigasi digambarkan dalam indeks sebagai berikut :
Nilai indeks antara : 80 – 100 Kinerja Sangat Baik
Nilai indeks antara : 70 – 79 Kinerja Baik
Nilai indeks antara : 55 – 69 Kinerja Kurang dan Perlu Perhatian
Nilai indeks antara : < 54 Kinerja Jelek dan Perlu Perhatian.

Indikator ini mengukur kinerja irigasi guna mendukung ketahanan pangan. Formulasi Perhitungan Mengacu ePAKSI Ditjen SDA Kementerian PUPR, penetapan kriteria penilaian kinerja sistem irigasi maka ditetapkan bobot maksimal penilaian setiap Aspek dan Indikatornya sebagai berikut :
1) Aspek Kondisi Prasarana Fisik (bobot maksimal 45)
2) Aspek Produktivitas Tanam (bobot maksimal 15)
3) Aspek Sarana Penunjang (bobot maksimal 10)
4) Aspek Organisasi Personalia (bobot maksimal 15)
5) Aspek Dokumentasi (bobot maksimal 5)

6) Aspek Kondisi P3A yang mencakup indikator (bobot maksimal 10)

Luas Baku sawah di Kabupaten Pekalongan sebesar 519.266 Ha dengan jumlah daerah irigasi (DI) sebanyak 13.818 buah. Indeks Kinerja Sistem Irigasi daerah irigasi kewenangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 sebesar **48,23%** sedikit menurun dari Tahun 2024 sebesar 49,87% dengan jumlah daerah irigasi kewenangan kabupaten sebesar 339 buah.

g. Stabilitas Ekonomi Makro

1). *Return on Asset (ROA)* BUMD

Berdasarkan data Laporan Keuangan BUMD serta BPS, *Return On Asset (ROA*) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. *Return On Asset (ROA)* dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama.

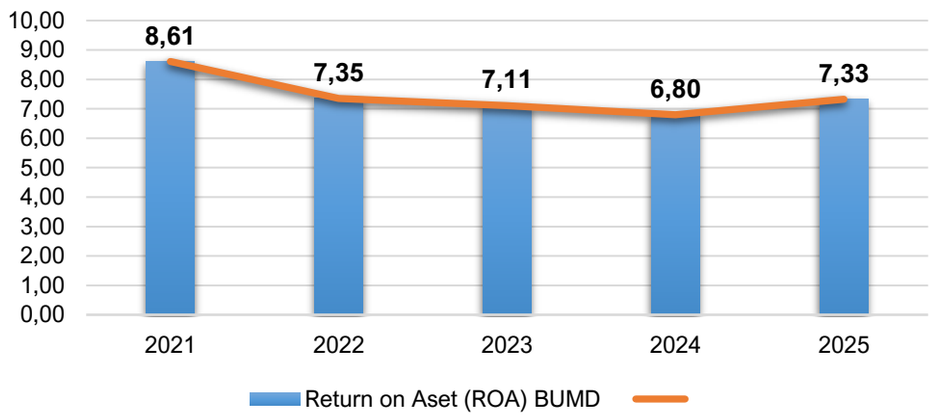
Formulasi Perhitungan : (Agregat laba bersih seluruh BUMD / Agregat aset seluruh BUMD) x 100%

Return on Asset (ROA) BUMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 dihitung berdasarkan 1 (satu) BUMD milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan yaitu PDAM Tirta Kajen.

Tabel 2.66.
***Return on Asset (ROA)* BUMD**
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024* (Rp)	2025** (Rp)
1	Agregat laba bersih BUMD	3.663.462.317	3.835.033.247	4.192.927.388	4.369.413.994	4,369.413,994
2	Aset BUMD	42.549.990.095	52.205.969.740	59.002.602.828	64.236.562.901	64.625.538.404
***Return on Asset (ROA)* BUMD**		**8,61**	**7,35**	**7,11**	**6,80**	**7,33**

Sumber : Bag. Perekonomian Setda Kab. Pekalongan, PDAM Tirta Kajen; 2025 **unaudite*



Sumber : Bag. Perekonomian Setda Kab. Pekalongan, PDAM Tirta Kajen; 2025 **unaudite*

Gambar 2.89. *Return on Asset (ROA)* BUMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

2). Disparitas Harga

Berdasarkan data Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Tahunan di tingkat Kabupaten/Kota Kementerian Perdagangan, melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), Disparitas harga adalah perbedaan harga atas suatu harga komoditas bahan pokok tertentu antardaerah. 13 Komoditas Bapok (Barang Pokok) antara lain beras medium, gula pasir, minyak goreng kemasan sederhana, daging sapi paha belakang, daging ayam ras, telur ayam ras, tepung terigu, kedelai impor, cabe merah keriting, cabe rawit merah, bawang merah, bawang putih impor kating dan ikan kembung.

Disparitas harga Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Tengah tahun 2020-2024 dalam rentang angka ±10 persen dengan demikian semakin kecil nilai disparitas berarti semakin kecil perbedaan harga komoditas di Kabupaten/Kota dengan harga di Provinsi untuk komoditas yang sama. Kecilnya nilai disparitas dapat diartikan adanya perbaikan dan efisiensi sistem distribusi barang antar wilayah dan menurunnya kesenjangan harga suatu komoditas antarwilayah. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.67.
Disparitas Harga
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

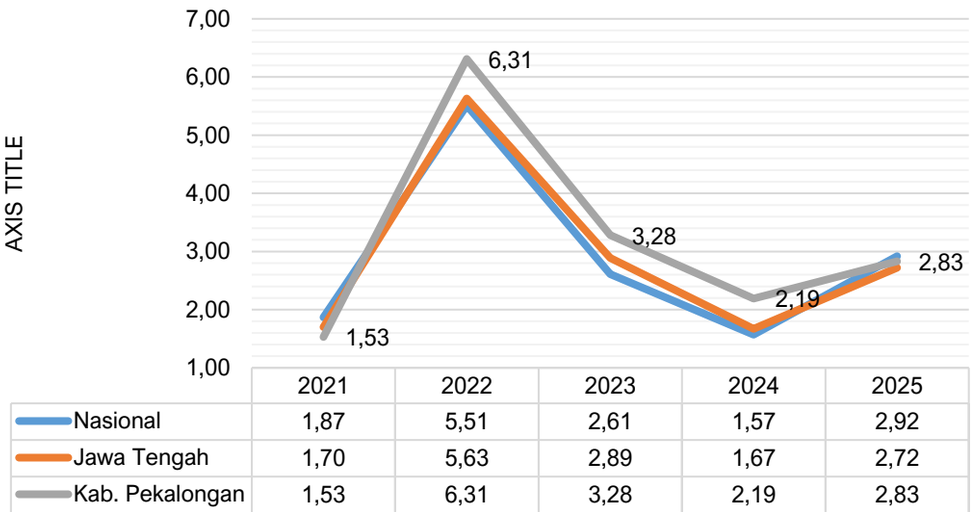
No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	**Harga komoditas di kabupaten**					
	(1). Beras Medium	9.195	9.291	11.304	13.165	13.124
	(2). Gula Pasir	12.244	13.395	14.381	16.844	17.002
	(3). Minyak Goreng Kemasan Sederhana	15.042	15.022	13.618	15.570	20.000
	(4). Daging Sapi Paha Belakang	112.092	125.602	133.248	137.592	135.658
	(5). Daging Ayam Ras	33.585	37.395	38.115	39.418	38.637
	(6). Telur Ayam Ras	22.053	25.725	27.436	27.108	27.589
	(7). Tepung Terigu	9.138	11.227	12.249	12.302	12.053
	(8). Kedelai Impor	10.222	12.364	11.829	10.116	9.506
	(9). Cabe Merah Keriting	30.877	42.494	39.012	40.903	44.949
	(10). Cabe Rawit Merah	48.006	44.384	47.511	41.988	49.422
	(11). Bawang Merah	25.799	32.533	29.902	31.831	39.350
	(12). Bawang Putih Impor Kating	26.342	27.624	33.138	40.125	38.924
	(13). Ikan Kembung	73.998	73.591	52.536	45.981	30.084
2	**Harga komoditas di provinsi**					
	(1). Beras Medium	9.516	9.903	11.744	13.093	13.159
	(2). Gula Pasir	12.384	13.529	14.278	16.949	16.976
	(3). Minyak Goreng Kemasan Sederhana	15.179	15.412	14.149	15.820	20.373
	(4). Daging Sapi Paha Belakang	119.075	128.876	132.963	132.062	130.006
	(5). Daging Ayam Ras	33.227	34.921	35.454	35.833	35.204
	(6). Telur Ayam Ras	22.210	25.749	27.657	27.225	27.561
	(7). Tepung Terigu	8.638	10.579	11.688	11.608	11.600
	(8). Kedelai Impor	10.252	12.684	12.922	12.146	10.662
	(9). Cabe Merah Keriting	30.547	43.378	37.435	37.433	42.650
	(10). Cabe Rawit Merah	48.286	46.054	46.617	40.371	48.462
	(11). Bawang Merah	26.802	34.544	31.411	33.005	40.104
	(12). Bawang Putih Impor Kating	27.205	28.572	33.615	41.047	39.234
	(13). Ikan Kembung	65.751	65.957	64.826	61.623	34.884
Disparitas Harga						
(1). Beras Medium		-3,37	-6,18	-3,75	0,55	-0,27
(2). Gula Pasir		-1,13	-0,99	0,72	-0,62	0,15
(3). Minyak Goreng Kemasan Sederhana		-0,90	-2,53	-3,75	-1,58	-1,83

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
(4).	Daging Sapi Paha Belakang	-5,86	-2,54	0,21	4,19	4,35
(5).	Daging Ayam Ras	1,08	7,08	7,51	10,00	9,75
(6).	Telur Ayam Ras	-0,71	-0,09	-0,80	-0,43	0,10
(7).	Tepung Terigu	5,79	6,13	4,80	5,98	3,91
(8).	Kedelai Impor	-0,29	-2,52	-8,46	-16,71	-10,84
(9).	Cabe Merah Keriting	1,08	-2,04	4,21	9,27	5,39
(10).	Cabe Rawit Merah	-0,58	-3,63	1,92	4,01	1,98
(11).	Bawang Merah	-3,74	-5,82	-4,80	-3,56	-1,88
(12).	Bawang Putih Impor Kating	-3,17	-3,32	-1,42	-2,25	-0,79
(13).	Ikan Kembung	12,54	11,57	-18,96	-25,38	-13,76
Rata-rata		**0,06**	**-0,38**	**-1,74**	**-1,27**	**-0,29**

Sumber : sp2kp.kemendag.go.id, sihati (Sistem Informasi Harga dan Produksi Komoditi); 2026

3). Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi di Kabupaten dalam kurun waktu tahun 2023-2025 relatif terkendali cukup baik di angka rata-rata 3±1 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi di Kabupaten Pekalongan sepanjang 2025 tercatat mencapai **2,83 persen (data inflasi Kota Tegal)** , lebih tinggi dibanding dengan inflasi tahun 2024 yang sebesar 2,19 persen. kenaikan harga pada kelompok perumahan, air, listrik, bahan bakar rumah tangga, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau (terutama komoditas pangan bergejolak). Selain itu, kenaikan harga emas perhiasan akibat faktor geopolitik global dan cuaca ekstrem, memberi andil terbesar terhadap inflasi di 2025. Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada gambar berikut.



	2021	2022	2023	2024	2025
Nasional	1,87	5,51	2,61	1,57	2,92
Jawa Tengah	1,70	5,63	2,89	1,67	2,72
Kab. Pekalongan	1,53	6,31	3,28	2,19	2,83

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026

Gambar 2.90. Tingkat Inflasi Kabupaten Pekalongan,Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

4). Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Berdasarkan BPS, SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah), LRA (Laporan Realisasi Anggaran), Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase

rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah.

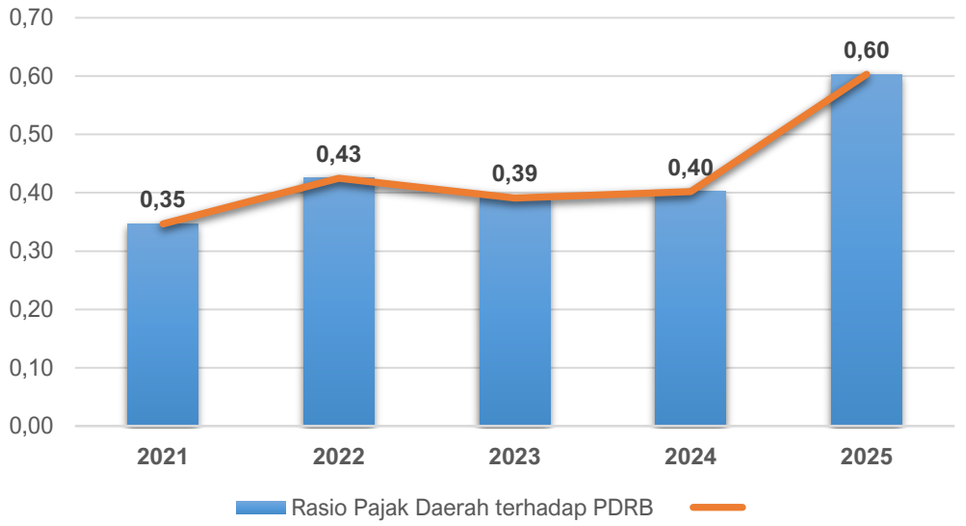
Formulasi Perhitungan : (Penerimaan pajak daerah / PDRB) x 100%

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.68.
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021 (Juta Rp)	2022* (Juta Rp)	2023 (Juta Rp)	2024 (Juta Rp)	2025 (Juta Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pajak Daerah	83.272,78	110.344,25	110.054,65	121.974,84	197.108,54
2	PDRB ADHB	**24.030.300,26**	**25.962.588,93**	**28.166.426,33**	**30.352.099,69**	**32.684.206,29**
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB		**0,35**	**0,43**	**0,39**	**0,40**	**0,60**

Sumber : BPKD; BPS Kab. Pekalongan, 2026



Sumber : BPKD; BPS Kab. Pekalongan, 2026

Gambar 2.91. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) tahun 2025 sebesar 0,60 persen naik dari Tahun 2021 sebesar 0,33 persen. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.

5). Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB

Berdasarkan Total DPK pada bank Milik Kabupaten/Kota: Laporan Keuangan (Audited) Perbankan serta PDRB: BPS, Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota. Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik

Kabupaten/Kota per PDRB (%) adalah persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu daerah terhadap PDRB daerah tersebut pada suatu waktu tertentu.

Formulasi Perhitungan : (Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota dibagi PDRB) x 100% dengan meliputi 3 (tiga) bank yaitu :

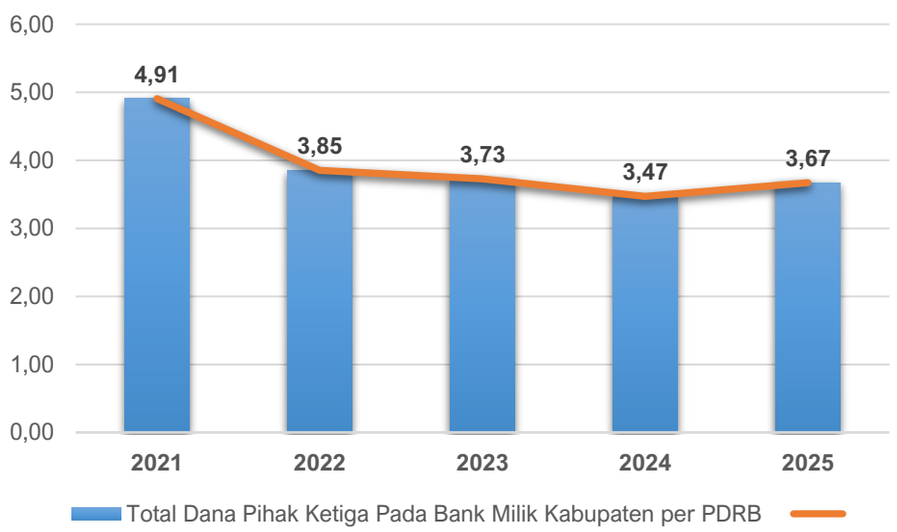
1) PT. Bank Jateng
2) PT. BPR BKK Kab. Pekalongan (Perseroda)
3) PT. BPR BKK Jateng (Perseroda)

Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten Pekalongan per PDRB (%) cenderung mengalami penurunan dari 4,91 persen di Tahun 2021 menjadi 3,67 persen di Tahun 2025. Hal ini menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan pada bank milik kabupaten/kota terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai Total DPK/PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio Total DPK/PDRB (%), menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.69.
Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022*	2023	2024	2025
		(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	
1	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten	1.178.953,38	1.000.502,62	1.050.268,31	1.053.221,34	1.199.929,37
2	PDRB ADHB	**24.030.300,26**	**25.962.588,93**	**28.166.426,33**	**30.352.099,69**	**32.684.206,29**
Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten per PDRB		**4,91**	**3,85**	**3,73**	**3,47**	**3,67**

Sumber : Bag. Perekonomian Setda; BPS Kab. Pekalongan, 2026



Sumber : Bag. Perekonomian Setda; BPS Kab. Pekalongan, 2026

Gambar 2.92. Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

6). Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB

Berdasarkan Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota : Laporan Keuangan (Audited) Perbankan serta PDRB: BPS, Total Kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota;

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.

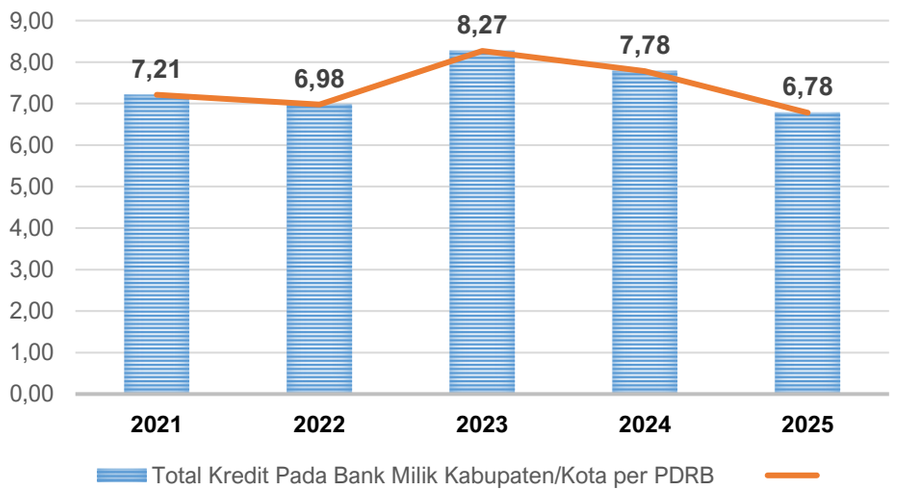
Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu daerah terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) daerah tersebut pada suatu waktu tertentu.

Formulasi Perhitungan : (Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB) x 100%

Tabel 2.70.
Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022*	2023	2024	2025
		(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)
1	Total Kredit Pada Bank Milik Kab./Kota	1.733.274,97	1.811,937,65	1.987.218,33	2.018.900,29	1.910.544,71
2	PDRB ADHB	**24.030.300,26**	**25.962.588,93**	**24.030.300,26**	**25.962.588,93**	**28.166.426,33**
Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB		**7,21**	**6,98**	**8,27**	**7,78**	**6,78**

Sumber : Bag. Perekonomian Setda; BPS Kab. Pekalongan, 2026



Sumber : Bag. Perekonomian Setda; BPS Kab. Pekalongan, 2026

Gambar 2.93. Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten Pekalongan per PDRB (%) cenderung mengalami penurunan dari 7,21 persen di Tahun 2021 menjadi 6,78 persen di Tahun 2025. Hal ini dapat menggambarkan semakin rendahnya tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%) menunjukkan semakin berfungsinya perbankan milik daerah sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian daerah tersebut.

4. Aspek Pelayanan Umum

a. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

1) Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi adalah indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah. Dengan meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi yang ada di daerah, diharapkan perwujudan demokrasi substansial atas asas kesetaraan dan kualitas kebijakan yang dihasilkan akan semakin membaik. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan tahun 2025 adalah 76,98 dengan kategori "BB". Capaian ini sedikit lebih rendah dari tahun 2024 sebesar 77,03 dengan kategori "BB". Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.71.
Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No.	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	64,91	66,56	64,80	77,03	76,98
2.	Kategori Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	BB	BB

Sumber :KemenPAN dan RB; 2026

Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus melaksanakan evaluasi komprehensif dan mengakselerasi implementasi Reformasi Birokrasi Tematik (pengentasan kemiskinan Peningkatan investasi, mendorong hilirisasi, mendukung ketahanan pangan nasional, mendorong peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan, mendorong peningkatan akses, kualitas dan mutu layanan pendidika) guna meningkatkan capaian Indeks Reformasi Birokrasi di tahun-tahun selanjutnya.

2) Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah Instrumen untuk mengukur Reformasi Hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi, dan deregulasi aturan dan penguatan sistem regulasi nasional. Dasar hukum pelaksanaan IRH yaitu :

1) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
4) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.OT.03.01 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;

Sebagai upaya mewujudkan IRH yang semakin baik, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 35 Pemerintah Kabupaten/Kota telah menjadikan IRH sebagai salah satu indikator pencapaian dalam program RPJPD Tahun 2025-2045. Selanjutnya diharapkan keseluruhan penilaian IRH

di Jawa Tengah baik Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat semakin optimal guna mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya di area perundang-undangan.
Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagai berikut:

1) Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%;
2) Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang Peraturan perundang-undangan yang berkualitas, dengan bobot 25%;
3) Kualitas re-regulasi atau de-regulasi Peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu, dengan bobot 35%;
4) Penataan database Peraturan perundang-undangan, dengan bobot 15%.

Berdasarkan Surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : PPH-OT.03.01-396 tanggal 13 Oktober 2025, Pemerintah Kabupaten Pekalongan mendapatkan **nilai IRH Tahun 2025 sebesar 99,76** dengan kategori **AA (ISTIMEWA)** naik dibandingkan Tahun 2024 sebesar 98,42 dengan kategori AA (ISTIMEWA).

Tabel 2.72.
Indeks Reformasi Hukum
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No.	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1.	**Indeks Reformasi Hukum**	N/A	N/A	**56.32**	**98,42**	**99,76**
2.	Kategori	N/A	N/A	C (Cukup)	AA Istimewa	AA Istimewa

Sumber : Kemenkumham RI; 2025

3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.
Adapun Definisi Operasional (Kepmen PANRB No. 739 Th 2023): Instrumen Evaluasi SPBE terdiri dari 4 (empat) Domain:

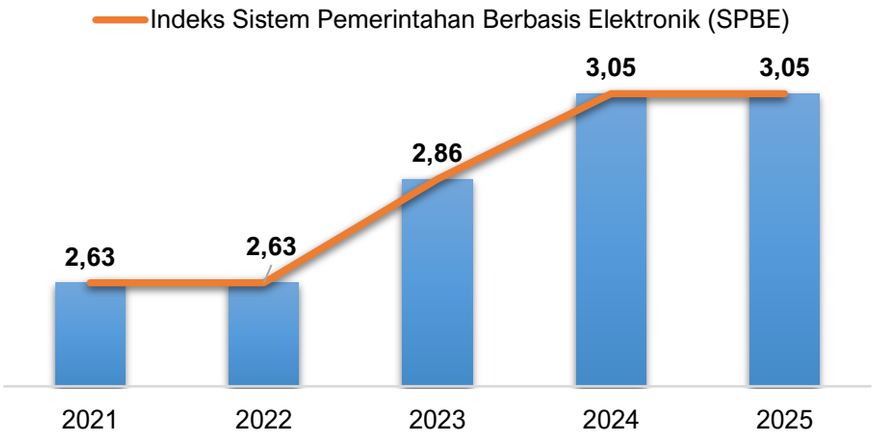
1) Domain Kebijakan Internal.
2) Domain Tata Kelola SPBE.
3) Domain Manajemen SPBE.
4) Domain Layanan SPBE.

Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut**.**

Tabel 2.73.
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Indeks SPBE	**2,63**	**2,63**	**2,86**	**3,05**	**3,05**
2.	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber : KemenPAN dan RB RI; 2025



Sumber : KemenPAN dan RB RI; 2025

Gambar 2.94. Indeks SPBE Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

Indeks SPBE Kabupaten Pekalongan cenderung naik dari 2,63 di Tahun 2021 menjadi 3,05 di Tahun 2025 dengan rata-rata predikat baik. Peran atau komitmen pimpinan dalam pengembangan layanan *e-Government* memang dibutuhkan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan sangat komitmen dalam penggunaan *e-Government*/SPBE sebagai pendukung utama pembangunan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan menggunakan media sosial, audio-visual dan aplikasi untuk menyapa masyarakat, membangun kesamaan persepsi pembangunan dengan perangkat daerah dan mengkomunikasikan pembangunan dengan masyarakat, memahami permasalahan pembangunan langsung dari masyarakat dan sekaligus eksekusinya, serta pemecahan aduan masalah pembangunan.

4) Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Kementerian PANRB secara rutin melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) setiap tahun. Hasil dari PEKPPP ini adalah Indeks Pelayanan Publik (IPP) Instansi Pemerintah, dalam hal ini IPP Pemkab Pekalongan. Unit Lokus Evaluasi (ULE) merupakan Organisasi Pelayanan Publik yang dipilih oleh KemenPANRB untuk menjadi lokus PEKPPP. IPP dari ULE yang dipilih akan mewakili/menjadi IPP Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Tabel 2.74.
Indeks Pelayanan Publik (IPP)
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Indeks Pelayanan Publik Kabupaten	**4,13**	**4,26**	**3,95**	**4,29**	**4,10**
2.	Kategori	**A-** (Sangat Baik)	**A-** (Sangat Baik)	**B** (Baik)	**A-** (Sangat Baik)	**A-** (Sangat Baik)

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan; 2025

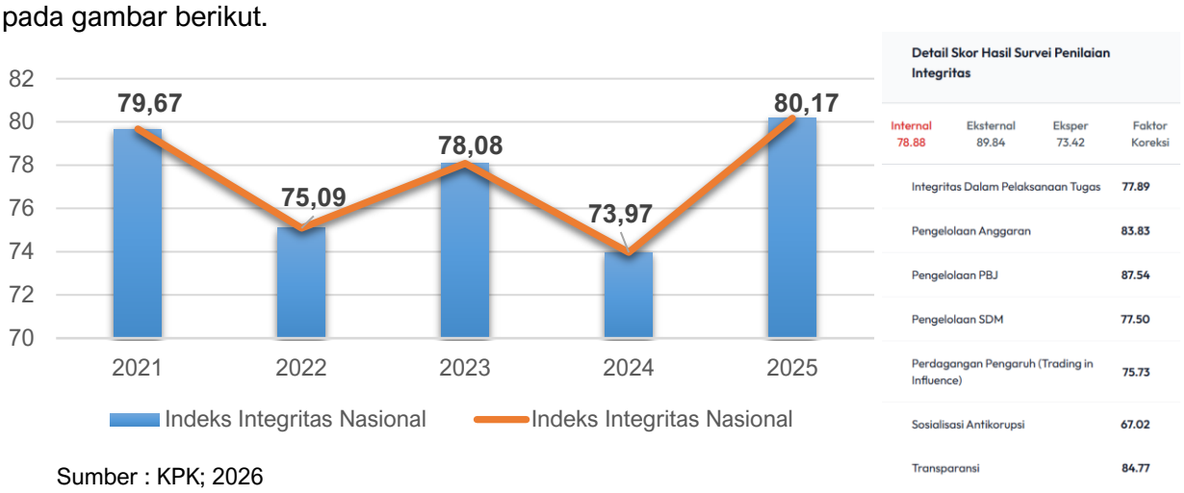
Pada Tahun 2020 **c**apaian awal IPP sebesar **3,95 (Baik)** pada ULE DPMPTSP Naker dan Disdukcapil. Pada tahun 2021–2022**,** IPP meningkat menjadi **4,13** dan **4,26 (Sangat Baik/A-)** seiring dengan perbaikan kualitas layanan di DPMPTSP dan Disdukcapil. Sedangkan di Tahun 2023 IPP turun kembali ke **3,95 (Baik)**. Penurunan ini dipengaruhi oleh variasi kualitas pelayanan di ULE (Kecamatan Wiradesa, RSUD Kajen, dan Dinsos), khususnya terkait keterbatasan sarana prasarana, standar pelayanan yang belum merata, serta kapasitas SDM

yang belum optimal. Untuk tahun 2024 IPP meningkat signifikan menjadi **4,29 (Sangat Baik/A)**, menunjukkan adanya perbaikan layanan di Disdukcapil, Dinsos, dan RSUD Kajen

5) Indeks Integritas Nasional

Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indeks Integritas Nasional merupakan pemetaan risiko korupsi dan capaian upaya pencegahan korupsi yang dilakukan seluruh K/L/PD. Berdasarkan hasil ukuran tersebut menjadi dasar untuk menyusun perbaikan sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi. Semakin tinggi nilai Indeks Integritas Nasional maka capaian upaya pencegahan korupsi semakin baik dan risiko korupsi semakin kecil. Begitu pula sebaliknya.

Capaian Indeks Integritas Nasional Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : KPK; 2026

Gambar 2.95. Indeks Integritas Nasional Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

Hasil SPI dirumuskan dalam bentuk Indeks Integritas Nasional, yang memberikan gambaran umum tingkat integritas di Kabupaten Pekalongan. Indeks Integritas Nasional Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 sebesar 80,17 (sangat terjaga) atau naik 6,2 point dari kondisi waspada dari Tahun 2024. Hasil SPI 2024 diharapkan dapat bermanfaat tidak hanya bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam memitigasi risiko korupsi, tetapi juga untuk memulai dan mendorong partisipasi publik secara langsung dalam pencegahan korupsi.

b. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

1). Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

a). Pendidikan

Dalam upaya mewujudkan keberhasilan Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun dan pemenuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM), perlu peningkatan pemerataan akses dan mutu, relevansi serta partisipasi pendidikan di Kabupaten Pekalongan yang dapat digambarkan sebagai berikut :

(1). Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK mengindikasikan partisipasi sekolah penduduk sesuai jenjang pendidikannya. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang

bersekolah pada suatu jenjang Pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya pendaftaran Murid usia dini, pendaftaran Murid yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas.

APK Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.75.
APK Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025

No.	Tahun	SD/MI (%)		SMP/MTS (%)		SMA/SMK/MA (%)	
		Kab.	Prov.	Kab.	Prov.	Kab.	Prov
1.	2021	103,89	106,40	99,93	94,00	62,30	86,65
2.	2022	107,31	106,19	99,72	94,05	62,30	86,83
3.	2023	104,49	105,01	98,83	92,80	68,94	87,84
4.	2024	106,16	103,86	92,35	90,89	78,65	88,54
5.	2025	103,66	103,65	83,89	91,73	101,50	91,11

Sumber : BPS Susenas, DINDIKBUD Kab. Pekalongan, 2025

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa akses pemerataan layanan pendidikan yang direpresentasikan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI dan SMP/MTS lebih baik dibandingkan Jawa Tengah. Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2025 pada jenjang pendidikan SD lebih dari 100 persen, yaitu 103,66 persen, hal ini menggambarkan bahwa secara keseluruhan, semua penduduk yang berusia 7-12 tahun sudah bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI. Nilai APK pada jenjang pendidikan SMP Tahun 2024 sebesar 83,89 persen, hal ini menggambarkan secara keseluruhan penduduk yang berusia 13-15 tahun masih belum semuanya bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTS.

Persoalan kesenjangan dan distribusi pemerataan akses layanan pendidikan telah diupayakan untuk diatasi oleh pemerintah, salah satunya melalui zonasi pendidikan. Zonasi dipandang strategis untuk mempercepat pemerataan di sektor pendidikan, tidak hanya secara distribusi akses namun juga kualitas layanan pendidikan.

(2). Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut. APM berfungsi untuk menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan usianya, atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Tahun 2019-2023, Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Pekalongan untuk semua jenjang pendidikan cenderung meningkat. Secara Rinci Angka Partisipasi Murni (APM) pada semua jenjang pendidikan Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.76.
APM Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025

No.	Tahun	SD/MI (%)		SMP/MTS (%)		SMA/SMK/MA (%)	
		Kab	Prov	Kab	Prov	Kab	Prov
1.	2021	93,07	98,22	81,48	80,89	46,14	60,46
2.	2022	96,19	98,39	78,93	81,02	55,22	61,17
3.	2023	97,73	98,46	78,22	81,56	53,41	61,46
4.	2024	98,14	98,39	77,96	81,03	56,14	62,56
5.	2025	97,64	97,21	77,39	80,29	74,42	67,81

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Susenas, DINDIKBUD Kab. Pekalongan, 2026

Dari tabel diatas, Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Pekalongan untuk jenjang SD/MI Tahun 2025 sebesar 97,64 persen turun dibandingkan tahun 2024 sebesar 98,14 persen. Untuk jenjang APM SMP/MTs Tahun 2025 sebesar 77,39 persen menurun dibandingkan tahun 2024 sebesar 77,96 persen. Untuk jenjang SMA/SMK/MA Tahun 2025 sebesar 74,42 persen naik dibandingkan tahun 2024 sebesar 56,14 persen. Apabila dikaitkan dengan target SDGs dalam bidang pendidikan bahwa seluruh penduduk usia sekolah harus bersekolah (100 persen) maka masih perlu upaya keras untuk mengembalikan penduduk usia sekolah ke bangku sekolah.

(3). Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS)

Verifikasi dan validasi (verval) data dari berbagai sumber data, antara lain Basis Data Terpadu (BDT); Data Pokok Pendidikan (Dapodik), *Education Management Information System (EMIS)* dan Kegiatan Pendidikan Untuk Semua (PUS) yang telah terintegrasi, mengungkap jumlah anak tidak sekolah (ATS) cukup tinggi di Kabupaten Pekalongan yaitu **4.346 orang** pada **tahun 2019**. Hasil pengolahan dan integrasi dari berbagai sumber data tersebut digunakan sebagai basis data awal dalam peluncuran **Gerakan KUDU Sekolah** pada tanggal 2 Mei tahun 2019. Dari hasil survei ditemukan beberapa penyebab ATS, diantaranya adalah kemiskinan atau kemampuan ekonomi keluarga yang rendah, pernikahan dini, kondisi anak yang berkebutuhan khusus, serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan.

Gerakan KUDU Sekolah yang merupakan komitmen pemerintah dalam memperluas keterjangkauan pelayanan dasar, salah satunya akses terhadap Pendidikan. Gerakan KUDU Sekolah adalah bentuk upaya Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam mengembalian Anak Tidak Sekolah kembali ke Satuan pendidikan yang melibatkan sinergi dari berbagai elemen masyarakat dan stakeholder terkait. Adapun caranya dengan menggunakan pendekatan kolaborasi pentahelix (Pemerintah Kabupaten, pemerintah desa, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan masyarakat peduli) guna mengupayakan pengembalian anak usia sekolah yang tidak bersekolah serta Dewasa Tidak Sekolah (DTS) sekaligus memastikan anak yang sudah kembali bersekolah untuk menyelesaikan pendidikannya sampai tuntas wajib belajar 12 tahun melalui jalur pendidikan formal dan non-formal.

Tujuan dari Gerakan KUDU SEKOLAH antara lain :
(a) Meningkatkan akses layanan pendidikan dasar dan menengah berkualitas;
(b) Menurunkan jumlah ATS di Kabupaten Pekalongan;
(c) Mendampingi anak yang sudah kembali bersekolah agar menyelesaikan sesuai jenjang Pendidikan sampai tuntas wajib belajar 12 tahun; dan

(d) Menurunkan angka kemiskinan melalui sektor pendidikan.

Sasaran dari Gerakan KUDU SEKOLAH antara lain :

(a) Anak Putus Sekolah (termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)/Anak Penyandang Disabilitas (APD) usia 7-18 Tahun) yang sudah bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu, yaitu SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA terapi *drop out* (berhenti/putus sekolah);

(b) Anak tidak melanjutkan sekolah (termasuk ABK)/APD usia 7-18 Tahun) yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu, yaitu SD/MI, SMP/MTs tetapi tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi;

(c) Anak yang belum sekolah atau tidak pernah sekolah (termasuk ABK)/APD usia 7-18 Tahun) pada jenjang tertentu, yaitu SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan pelaksanaan Gerakan KUDU Sekolah di Kabupaten Pekalongan mengalami penyesuaian dalam penggunaan basis data sasaran Anak Tidak Sekolah (ATS), dimana pada tahap awal pendataan masih memanfaatkan berbagai sumber data yang dihimpun di tingkat desa, namun selanjutnya dilakukan perubahan dengan menggunakan basis data yang bersumber dari PUSDATIN Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang juga hal tersebut sesuai dengan arahan Tim Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PP ATS) Provinsi Jawa Tengah.

Penyesuaian ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi, keseragaman, dan validitas data sasaran sehingga intervensi program Gerakan KUDU Sekolah dapat lebih terukur, khususnya di tingkat pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Penyesuaian tersebut sekaligus merupakan tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Pekalongan terhadap kebijakan penanganan Anak Tidak Sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah, sehingga program dapat lebih tepat sasaran, selaras dengan kebijakan provinsi dan nasional, serta memudahkan sinkronisasi data, pemantauan penanganan, dan pelaporan capaian program. Target dan Capaian Gerakan Kudu Sekolah di Kabupaten Pekalongan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.77.
Target dan Capaian Jumlah ATS yang dikembalikan ke Sekolah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah ATS	4.463	4.850	4.065	4.307	15.159 *(cut off data per 8 September 2025)*
2.	Target penanganan ATS	1.025	2.252	600	650	850
3.	Capaian Pengembalian ATS	604	674	318	650	850

Sumber : Dindikbud Kab. Pekalongan, 2025

Data tersebut diperoleh melalui hasil verifikasi dan validasi secara intensif berdasarkan hasil pelaksanaan Rekonfirmasi pada rangkaian Gerakan KUDU Sekolah di Kabupaten Pekalongan. Kegiatan rekonfirmasi tersebut dilaksanakan melalui pendampingan oleh Tim KUDU Sekolah Kecamatan dalam hal ini koordinator kecamatan, didampingi Penilik Pendidikan dan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan serta Koordinator/operator ATS di tingkat desa yang terjun langsung secara door to door bertemu dengan Anak Tidak Sekolah dan orangtua yang bersangkutan untuk dibujuk agar kembali ke sekolah yakni baik satuan pendidikan formal maupun non formal.

Adapun pada tahun 2024, target yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan selaku leading sector dalam penanganan ATS sebanyak 650 ATS. Jumlah tersebut merupakan target maksimal penerima bantuan stimulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Pekalongan yang kemudian dituangkan dalam DPA Dinas Pendidikan dan Kabupaten Pekalongan tahun 2024.

(4). Capaian indikator kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan

Untuk capaian indikator kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 rata-rata belum mencapai 100%. Persentase anak usia 5 - 6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di PAUD mencapai 90,00 persen pada tahun 2025, persentase anak usia 7 - 12 tahun yg sudah tamat atau sedang belajar di SD/MI juga mencapai 99,99 persen di tahun 2025, persentase anak usia 13 - 15 tahun yg sudah tamat atau sedang belajar di SMP/MTs tahun mencapai 93,00 persen di tahun 2025 dan persentase anak usia 7 - 18 tahun yg sudah taat atau sedang belajar di Pendidikan Kesetaraan mencapai 20,35 persen di Tahun 2025. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.78.
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Indikator Pelayanan Dasar	Target	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase anak usia 5 - 6 tahun yg sudah tamat atau sedang belajar di PAUD	100,00	81,50	87,01	88,43	89,78	90,00
2.	Persentase anak usia 7 - 12 tahun yg sudah tamat atau sedang belajar di SD/MI	100,00	93,10	99,96	98,68	99,99	99,99
3.	Persentase anak usia 13 - 15 tahun yg sudah tamat atau sedang belajar di SMP/MTs tahun	100,00	81,50	75,33	79,86	79,25	93,00
4.	Persentase anak usia 7 - 18 tahun yg sudah taat atau sedang belajar di Pendidikan Kesetaraan	100,00	5,40	7,97	10,27	20,35	20,35

Sumber : isian data DINDIKBUD Kabupaten Pekalongan, 2026

b). Kesehatan

Kesehatan merupakan sebuah investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatnya kesadaran masyarakat, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dapat terwujud. Capaian indikator urusan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan tergambarkan pada tabel berikut :

(1). Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis *(treatment coverage)*

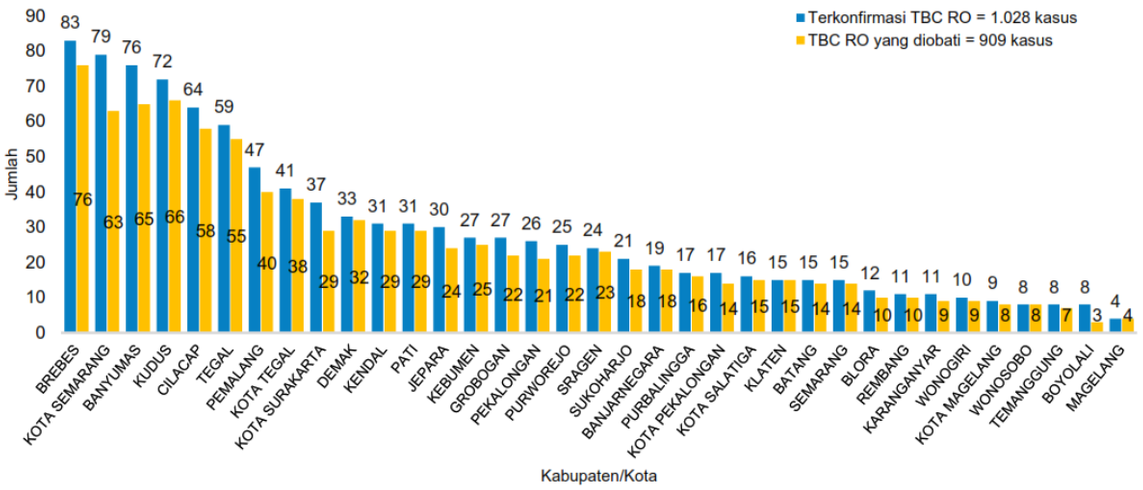
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis *(treatment coverage)* adalah persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu.

Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting:

(a). Penemuan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis;

(b). Pengobatan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis.

Formulasi perhitungan cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu. Jumlah penemuan dan pengobatan kasus TBC RO Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 terkonfirmasi sebesar 26 dan pengobatan sebesar 21 kasus, Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : DINKES Kab. Pekalongan dan DINKES Jateng, 2025

Gambar 2.96. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis Kabupaten Pekalongan Tahun 2025

Selanjutnya cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.79.
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

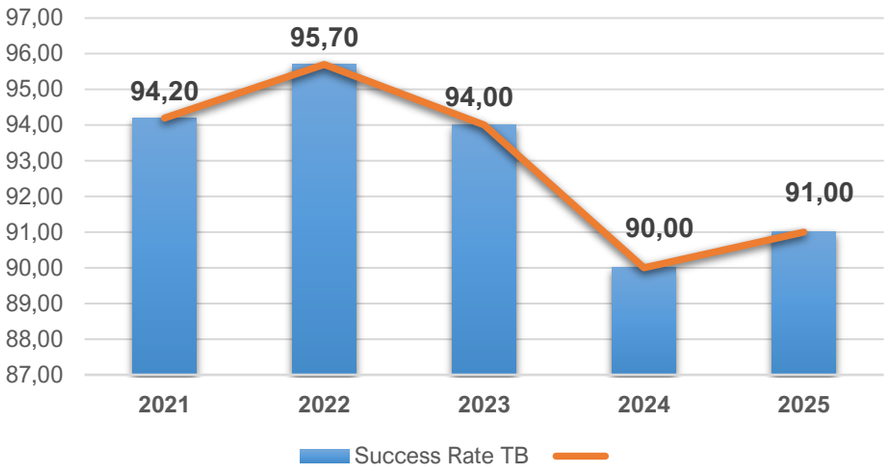
No.	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Konfirmasi TBC RO	Kasus	13	33	36	41	26
2.	Pengobatan TBC RO	Kasus	10	24	30	35	21

Sumber : Dinkes Kab. Pekalongan; 2025

(2). Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis *(treatment success rate)*

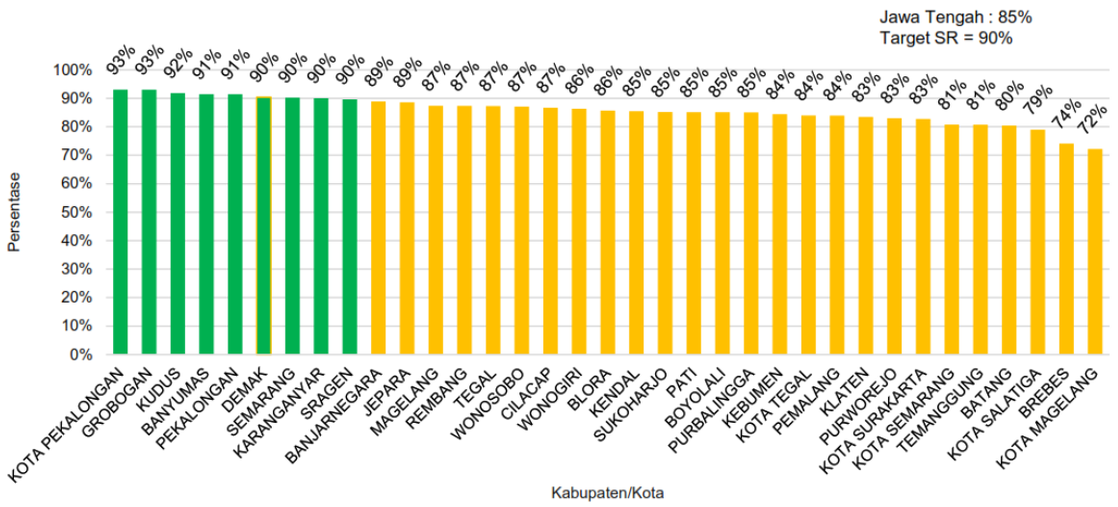
Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis *(treatment success rate)* adalah persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap. Indikator merupakan indikator penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah.

Angka keberhasilan pengobatan (*Success Rate/SR*) TB Kabupaten Pekalongan di Tahun 2024 sebesar 90,00 persen turun dari 94,00 persen di Tahun 2023. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : DINKES Kab. Pekalongan dan DINKES Jateng, 2026

Gambar 2.97. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025



Sumber : DINKES Kab. Pekalongan dan DINKES Jateng, 2026

Gambar 2.98. Angka Keberhasilan Pengobatan TB *(Success Rate/SR)* Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2025 di Provinsi Jateng

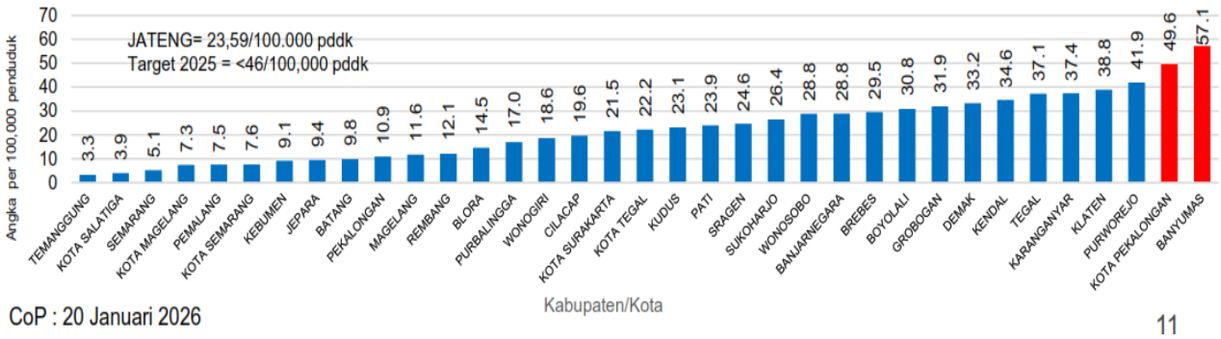
(3). *Incidence Rate Demam Berdarah Dengue* (IR DBD)

Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue per 100,000 penduduk. Angka Kesakitan/Incidence Rate (IR) penyakit DBD di Kabupaten Pekalongan selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami fluktuasi yang perlu diwaspadai agar tidak terjadi kejadian luar biasa. Pada tahun 2020, Angka kesakitan penyakit DBD sebesar 26,00 per 10.000 penduduk, kemudian mengalami penurunan sebesar 18,02 di Tahun 2021 dan naik tajam sebesar 67,21 per 10.000 penduduk di Tahun 2022 dan kemudian mengalami penurunan di Tahun 2023 sebesar 40,10 per 10.000 penduduk kemudian mengalami kenaikan sebesar 57,40 per 10.000 penduduk. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.80. .
***Incidence Rate (IR)* DBD**
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No.	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	IR DBD	Kasus	18,02	67,21	40,10	57,40	10,90

Sumber : Dinkes Kab. Pekalongan; 2025

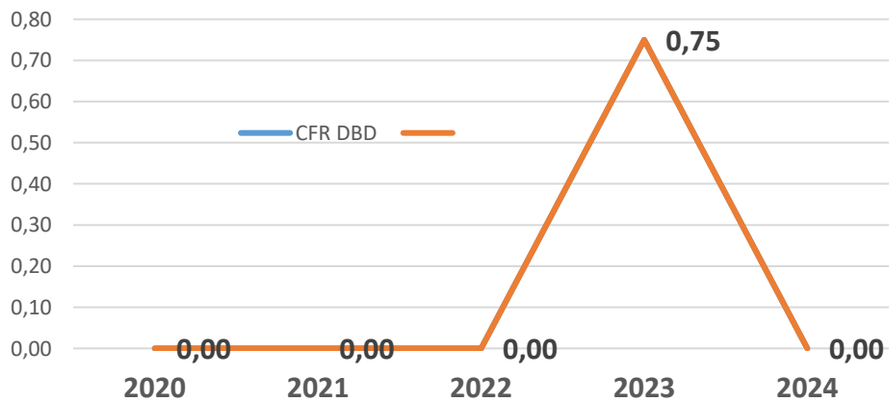


Sumber : DINKES Kab. Pekalongan dan DINKES Jateng, 2026

Gambar 2.99. *Incidence Rate (IR)* DBD Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

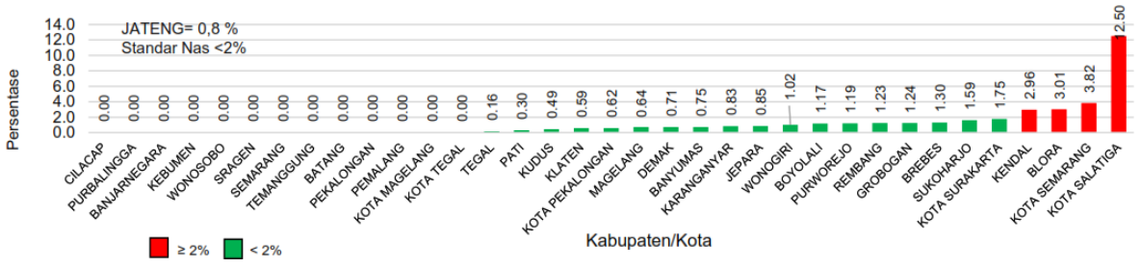
(4). *Case Fatality Rate Demam Berdarah Dengue* (CFR DBD)

Formulasi perhitungan merupakan jumlah kasus demam berdarah dengue meninggal dibagi jumlah seluruh kasus DBD x 100%. Sedangkan Angka Kematian/*Case Fatality Rate (CFR)* akibat penyakit DBD masih terjadi, selama 5 tahun terakhir (2020-2024) dengan tidak ada kasus (0,00%) kecuali di Tahun 2023 terjadi peningkatan kasus sebesar 0,75 persen seiring meningkatkan Angka Kesakitan DBD. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : DINKES Kab. Pekalongan, DINKES Provinsi Jawa Tengah, 2026

Gambar 2.100. *Case Fatality Rate Demam Berdarah Dengue* (CFR DBD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025



Gambar 2.101. *Case* Fatality Rate Demam Berdarah Dengue (CFR DBD) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

(5). Rasio Tenaga Medis dan Dokter

Berdasarkan data yang ada rasio tenaga medis sampai dengan tahun 2025 mencapai 2,27 per 1.000 penduduk. Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk di Kabupaten Pekalongan berdasarkan data dimana untuk tahun 2025 terdapat 1 tenaga medis di setiap 441 jiwa penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Pekalongan masih kekurangan tenaga kesehatan. Selengkapnya dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.81.
Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Tenaga Medis (orang)	1.896	1.030	1.410	2.350	2.809
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	976.504	986.455	1.007.384	1.019.006	1.030.342
	Rasio	**1,94**	**1,04**	**1,40**	**2,31**	**2,27**
	Rasio 1 tenaga medis/1.000 pddk	**515**	**958**	**714**	**434**	**441**

Sumber : DINKES Kab. Pekalongan, 2025

Jumlah dokter di Kabupaten Pekalongan di tahun 2025 sebesar 314 orang. Rasio dokter sebesar 0,305 per 1000 penduduk atau 1 dokter melayani 3.281 penduduk. Kondisi tersebut belum memenuhi kebutuhan yang ideal. Selengkapnya dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.82.
Rasio Dokter per satuan penduduk
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Dokter (orang)	125	115	102	134	314
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	976.504	986.455	1.007.384	1.019.006	1.030.342
	Rasio	**0,128**	**0,116**	**0,101**	**0,132**	**0,305**
	Rasio 1 dokter/1.000 pddk	**7.812**	**8.578**	**9.876**	**7.605**	**3.281**

Sumber : DINKES Kab. Pekalongan, 2026

(6). Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Pelayanaan kesehatan dilakukan oleh Rumah sakit sebagai sarana rujukan dan FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) yaitu Puskesmas dan jaringannya, poliklinik. Kabupaten Pekalongan memiliki 5 Rumah Sakit yaitu 3 RSUD dan 2 RS Swasta. RSUD telah mencapai akreditasi dengan 16 pelayanan. Rata-rata perhitungan rasio RS dengan jumlah penduduk baru mencapai 0,005 karena 1 Rumah Sakit melani kurang lebih 206.068 jiwa penduduk. Kondisi tersebut masih belum dapat memenuhi kebutuhan. Selengkapnya dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.83.
Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah RSUD (unit)	2	3	3	3	3
2.	Jumlah RS Swasta (unit)	1	1	2	2	2
	Total RS	3	4	5	5	5
3.	Jumlah Penduduk (jiwa)	976.504	986.455	1.007.384	1.019.006	1.030.342
	Rasio	**0,003**	**0,004**	**0,005**	**0,005**	**0,005**
	Rasio 1 RS/1.000 pddk	**325.501**	**246.614**	**201.477**	**203.801**	**206.068**

Sumber : DINKES Kab. Pekalongan, 2026

(7). Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Poliklinik Kesehatan Desa

Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik Kesehatan Desa di Kabupaten Pekalongan tahun 2021-2025 cenderung tetap. rasio Puskesmas, Pustu dan Poliklinik Kesehatan Desa per 1.000 penduduk pada tahun 2024 adalah 0,23 artinya satu puskesmas melayani 39.629 jiwa. Rasio ini masih dibawah standar Kementerian Kesehatan RI yaitu 1 Puskesmas melayani 30.000 penduduk. Namun demikian dengan adanya puskesmas pembantu dan poliklinik kesehatan desa dapat membantu melayani kesehatan masyarakat. Dari 27 Puskesmas di Kabupaten Pekalongan, terdapat 26 Puskesmas terakreditasi. Selengkapnya dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.84.
Rasio Puskesmas, Pustu dan Poliklinik Kesehatan Desa
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Puskesmas Induk (unit)	27	27	27	27	26
2.	Jumlah Puskesmas Pembantu (unit)	49	49	49	49	49
3.	Jumlah Poliklinik Kesehatan Desa	159	159	159	159	159
4.	Jumlah Penduduk (jiwa)	976.504	986.455	1.007.384	1.019.006	1.030.342
5.	**Rasio 1 Puskesmas, Pustu dan Poliklinik Kesehatan Desa /1.000 pddk**	**0,24**	**0,24**	**0,23**	**0,23**	**0,23**
	Rasio 1 puskesmas/1.000 pddk	**36.167**	**36.535**	**37.311**	**37.741**	**39.629**

Sumber : DINKES Kab. Pekalongan, 2026

(8). Capaian indikator kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Sementara itu untuk capaian indikator kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan di Kabupaten Pekalongan rata-rata telah menunjukkan capaian sebesar 100 persen. Perkembangan SPM selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.85.
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Indikator Pelayanan Dasar	Target	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100	89,28	87,85	100	96,97
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	100	89,29	89,95	100	93,27
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100	94,91	95,33	100	97,02
4	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100	80,30	89,52	100	100	95,83
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	99,28	100	100	100
6	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	74,00	84,79	82,69	82,06	91,84
7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	100	73,80	96,60	86,24	96,31	99,07
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100	60,30	86,22	85,61	93,72	90,64
9	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	100	88,90	88,82	92,27	96,52	100
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC yang sesuai	100	88,10	96,53	81,48	85,58	100
12	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	100	100	100	100	100

Sumber : isian data DINKES Kabupaten Pekalongan, 2025

c). Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 11 sub urusan yaitu 1) sumber daya air (SDA); 2) air minum; 3) persampahan; 4) air limbah; 5) drainase; 6) permukiman; 7) bangunan gedung; 8) penataan bangunan dan lingkungannya; 9) jalan; 10) jasa konstruksi; dan 11) Penataan Ruang. Selanjutnya capaian kinerja pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dijelaskan sebagai berikut.

(1). Kondisi Jalan dan Jembatan

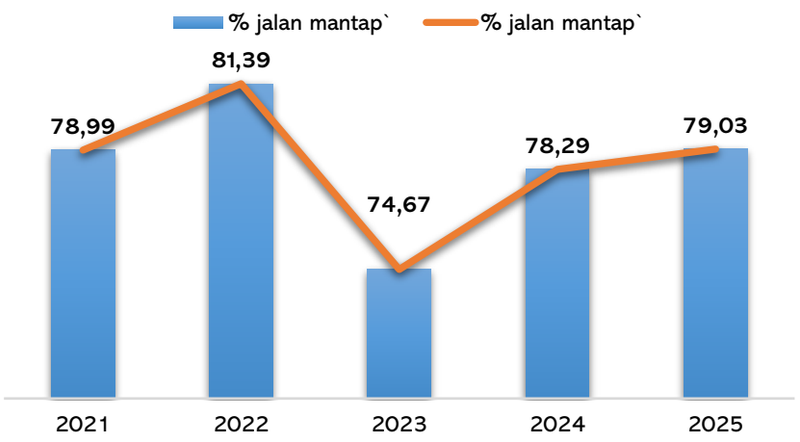
Berdasarkan kondisi fisiknya, panjang jalan di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2025 yaitu 300,274 km dalam kondisi baik, 251,282 km kondisi sedang atau sebesar 79,03 persen atau naik dibandingkan tahun 2024 sebesar 313,275 km dalam kondisi baik, 233,091 km kondisi sedang atau sebesar 78,29 persen dari jumlah total seluruh panjang jalan sebesar 697.896 km.

Kondisi jembatan dalam kondisi baik dan sedan mengalami penurunan secara drastis dari 56,82 % di Tahun 2023 menjadi 1,57% di Tahun 2025 akibat putusnya beberapa jembatan di kecamatan wilayah atas seperti Petungkriyono, Lebakbarang dan Kandangserang akibat banjir dan tanah longsor. Perkembangan kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.86.
Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

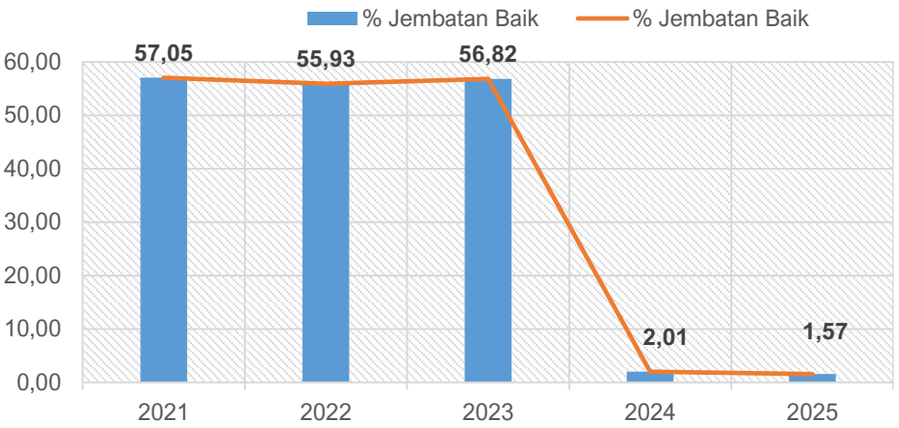
No	Kondisi Jalan	2021	2022	2023	2024	2025
	Kondisi Jalan					
1.	Baik (km)	414,211	432,632	288,992	313,275	300,274
2.	Sedang (km)	137,054	135,383	232,135	233,091	251,282
3.	Rusak ringan (km)	53,154	53,141	79,455	60,573	50,432
4.	Rusak Berat (km)	93,477	76,74	97,314	90,957	95,908
	Total (km)	**697,896**	**697,896**	**697,896**	**697,896**	**697,896**
	% MANTAP (baik dan sedang)	**78,99**	**81,39**	**74,67**	**78,29**	**79,03**
	Kondisi Jembatan					
1.	Baik (unit)	255	250	254	9	7
2.	Sedang (unit)	12	13	11	381	374
3.	Rusak ringan (unit)	180	184	182	57	62
4.	Rusak Berat (unit)	0	0	0	0	4
	Total (unit)	**447**	**447**	**447**	**447**	**447**
	% Jembatan baik	**57,05**	**55,93**	**56,82**	**2,01**	**1,57**

Sumber : DPU TARU Kab. Pekalongan, 2025



Sumber : DPU TARU Kab. Pekalongan, 2026

Gambar 2.102. Persentase Jalan Mantap Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025



Sumber : DPU TARU Kab. Pekalongan, 2026

Gambar 2.103. Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

Selanjutnya, jika dilihat dari jenis perkerasan jalan pada tahun 2025 sebanyak 579,696 km merupakan perkerasan jalan aspal, 78,016 km merupakan jalan beton dan 36,874 km merupakan perkerasan jalan Telford/Krikil/Urpil. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.87.
Kondisi Jalan berdasarkan Jenis Permukaan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Jenis Jalan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jalan Aspal (km)	552,274	565,633	565,633	313,275	579,696
2.	Jalan Beton (km)	52,145	56,654	56,654	233,091	78,016
3.	Jalan Telford/Krikil/Urpil (km)	93,477	75,609	75,609	60,573	36,874
5.	Jalan Paving (km)	-	-	-	90,957	-
	Total (km)	**697,892**	**697,892**	**697,892**	**697,892**	**697,892**

Sumber : DPU TARU Kab. Pekalongan, 2025

Sedangkan prasarana jembatan tahun 2025 di Kabupaten Pekalongan sejumlah 447 buah, berdasarkan jenis konstruksinya terdapat 76 buah jembatan komposit, 11 buah jembatan busur, 317 buah jembatan beton, 33 buah jembatan plat dan 7 buah jembatan rangka baja, serta 3 buah jembatan gantung, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.88.
Jenis Jembatan berdasarkan Konstruksinya
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Jenis Jembatan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Komposit (unit)	71	71	72	73	76
2.	Busur (unit)	11	11	11	11	11
3.	Beton (unit)	320	321	320	319	317
4.	Plat (unit)	35	34	34	34	33
5.	Rangka Baja (unit)	7	7	7	7	7
6.	Gantung (unit)	3	3	3	3	3
	Total (unit)	**447**	**447**	**447**	**447**	**447**

Sumber : DPU TARU Kab. Pekalongan, 2025

(2). Sumber daya Air

Pengelolaan sumber daya air terpadu, yang mengacu kepada tiga pilar yaitu konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Sumber daya air dapat dimanfaatkan di bidang pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi, dan aktivitas lingkungan. Kabupaten Pekalongan memanfaatkan sumber daya air yang ada dalam mendukung pertanian melalui sistem irigasi. Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik terus menunjukan peningkatan di Tahun 2024 dengan mencapai 91,16 persen meningkat dari tahun 2023 sebesar 51,43. Persentase daerah irigasi terlayani jaringan irigasi, dari 78,50 persen di tahun 2020 meningkat menjadi 99,58 persen di tahun 2024. Perkembangan Layanan Bidang Irigasi Tahun 2021-2025 untuk mendukung pertanian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.89.
Rasio Jaringan Irigasi
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Tahun	Luas Jaringan Irigasi Baik (Ha)	Jaringan Irigasi Baik (Km)	Rosio Jaringan Irigasi	Kenaikan Luas Pertahun (Ha)	Kenaikan Irigasi Baik (Km)
1.	**2021**	11.107,50	385,293	3,469	267,20	3,21
2.	**2022**	11.123,56	396,730	3,567	16,06	11,44
3.	**2023**	11.145,14	401,975	3,607	21,58	5,24
4.	**2024**	11.224,79	410.600	3,658	79,65	8,63
5.	**2025**	11.920,80	440,91	3,699	39,30	30,31

Keterangan :
Optimum rasio jaringan irigasi di Kabupaten Pekalongan adalah: (783,32/13818)*100 = 5,67
Panjang saluran Kabupaten Pekalongan : 783,32 km
Luas areal Kabupaten Pekalongan : 13,818 Ha

(3). Drainase

Kondisi drainase di Kabupaten Pekalongan menunjukan kondisi baik, antara lain capaian persentase drainase kondisi mantap mencapai 44,79 persen tahun 2025, mengalami kenaikan dari tahun 2024 sebesar 44,50 persen. Persentase Drainase (jalan) kondisi baik mengalami peningkatan dari 13,18 persen di tahun 2021 menjadi 19,72 persen di Tahun 2025. Perkembangan kondisi drainase Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.90.
Kondisi Drainase Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No.	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase drainase kondisi mantap	32,95	38,05	39,41	44,50	44,79
2	Persentase Drainase (jalan) kondisi baik (%)	13,18	15,11	18,79	19,43	19,72

Sumber : DPU TARU Kab. Pekalongan, 2026

(4). Air Minum dan Air Limbah (Sanitasi)

Air minum merupakan air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus berupaya keras mewujudkan 100 persen akses air minum aman dan dapat dinikmati seluruh masyarakat. Capaian cakupan air minum di Kabupaten Pekalongan sampai dengan tahun 2024 belum dapat mencapai target Nasional yang ditetapkan 100 persen pada tahun 2019, maupun target SDGs tahun 2030. Sementara cakupan pelayanan sanitasi dimana Persentase Penduduk mengakses Air Limbah Domestik telah mencapai target nasional sebesar 100 persen tahun 2024. Perkembangan Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.91.
Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No.	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Penduduk mengakses Air Minum layak dan aman (%)	87,83	84,87	85,00	88,47	89,35
2	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	90,00	93,00	100,00	100,00	62,23

Sumber : DINAS PERKIM DAN LH dan DPU TARU Kab. Pekalongan, 2026

(5). Penataan Ruang

Penataan Ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang). Kabupaten Pekalongan melakukan review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040. RTRW Daerah digunakan sebagai acuan koordinasi penataan ruang wilayah Daerah, penyusunan rencana pembangunan Daerah, dan penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis Daerah. Persentase Ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Pekalongan tahun 2025 sudah mencapai 100,00 persen. Persentase Kawasan yang memiliki RDTRK/RTRK/RTBL sebesar 28,57 persen di tahun 2025.

Capaian kinerja Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.92.
Capaian Kinerja Penataan Ruang
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No.	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Rasio Kepatuhan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kabupaten/kota	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Kawasan yang memiliki RDTRK/RTRK/RTBL	14,29	14,29	20,57	27,76	28,57

No.	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
3	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	10,53	14,29	27,14	99,34	98,13

Sumber : DPU TARU Kab. Pekalongan, 2026

(6). Capaian indikator kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum

Sementara itu untuk capaian indikator kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Pekalongan pada Tahun 2020-2024 menunjukan perkembangan yang cukup baik. Persentase jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi menunjukan peningkatan dari 87,80 tahun 2020 meningkat menjadi 100,00% di tahun 2024, untuk Persentase Rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD juga mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 61,20% menjadi 100,00% di tahun 2024. Pekembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.93.
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi (%)	88,70	89,60	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Rumah yang memiliki akses pengolahan, lumpur tinja diolah dI IPLT dan air limbahnya diolah di IPALD (%)	61,70	61,90	100,00	100,00	100,00

Sumber : isian data DPU TARU Kab. Pekalongan, 2026 dan
https://biropemotdaks.jatengprov.go.id/spme/index.php/capaian_bidang_kabkota, diakses tahun 2023

d). Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Pekalongan dilakukan melalui beberapa upaya antara lain penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh, serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan. Upaya pengurangan luasan kawasan kumuh dalam periode lima tahun terakhir menunjukkan hasil yang semakin baik, hal tersebut dapat dilihat dari capaian kinerja rasio rumah layak huni di Kabupaten Pekalongan menunjukkan trend yang terus menurun setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir (2021-2025).

Rasio rumah layak huni mengalami kenaikan dari 90,38 persen di Tahun 2024 menjadi 91,48 persen di tahun 2025. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.94.
Rekapitulasi Rumah Tidak Layak Huni
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Rumah (unit)	206.807	207.377	207.737	208.037	228.410
2	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (unit)	21.956	20.967	20.539	20.018	19.453
	Rasio Rumah Layak Huni	**89,38**	**90,50**	**90,10**	**90,38**	**91,48**
	Rasio RTLH	**10,62**	**9,50**	**9,90**	**9,62**	**8,52**

Sumber : DINAS PERKIM DAN LH Kab. Pekalongan, 2025

Sedangkan penanganan kawasan kumuh dilaksanakan berdasarkan **Keputusan Bupati Pekalongan No. 400.9.14.3/374 Tahun 2025** yang menetapkan luas kawasan kumuh sebesar **290,147 ha**. Lokasi berada di 31 (tigapuluh satu) kelurahan/desa di Kabupaten Pekalongan. Sisa Luas Kawasan Kumuh yang belum ditangani sampai dengan Tahun 2025 sebesar **276,805 (95,40 persen)**. Luas kawasan kumuh yang ditangani merujuk pada ukuran wilayah permukiman yang telah mendapatkan intervensi perbaikan kualitas hunian serta prasarana oleh pemerintah atau pemangku kepentingan. Berdasarkan data terbaru dan regulasi yang berlaku, penanganan ini dibagi menjadi beberapa kategori kewenangan dan capaian.

Selengkapnya capaian kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.95.
Capaian Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Luas Kawasan Kumuh (ha)	**344,21**[1)]	**321,765**	**222,87**	**219,02**	**290,147** [2)]
2	Kawasan kumuh yang ditangani (ha)	22,445	32,645	0,82	5,65	13,342
3	Sisa Luas Kawasan Kumuh (ha)	321,756	289,12	222,05	213,37	276,805
4	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang ditangani (%)	6,52	10,15	0,36	2,58	4,60
5	Persentase Kawasan kumuh (%)	**93,48**	**89,85**	**69,00**	**55,63**	**95,40**

Sumber : DINAS PERKIM DAN LH Kab. Pekalongan, 2025

[1] Luas Kumuh berdasarkan Keputusan Bupati Pekalongan No. 667/450 Tahun 2021

[2] Luas Kumuh berdasarkan Keputusan Bupati Pekalongan No. 400.9.14.3/374 Tahun 2025

Sementara itu pada indikator Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Pekalongan pada indikator Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni selama 5 tahun terakhir telah mencapai 100 persen. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.96.
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar
Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Indikator Pencapaian SPM	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : isian data DINAS PERKIM DAN LH Kab. Pekalongan, 2024, dan
https://biropemotdaks.jatengprov.go.id/spme/index.php/capaian_bidang_kabkota, diakses tahun 2024

e). Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat terbagi menjadi 3 sub urusan, yaitu ketentraman dan ketertiban umum, bencana, dan kebakaran. Terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum, dapat diukur dari terjadinya kasus pelanggaran peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah dan juga tingkat penyelesaianya. Kasus pelanggaran peraturan daerah di Kabupaten Pekalongan jumlahnya mengalami tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah kasus pelanggaran peraturan daerah ini juga diiringi dengan meningkatnya penanganan/penyelesaian. Meskipun belum mampu menyelesaikan seluruh kasus pelanggaran peraturan daerah yang terjadi namun tingkat penyelesaiannya sudah mampu mencapai angka 100,00 persen di tahun 2025.

Tabel 2.97.
Penyelesaian Pelanggaran Perda
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No.	Tahun	Jml Pelanggaran Perda	Jml Penyelesaian	Persentase (%)
1.	2021	70	62	**88,57**
2.	2022	70	62	**88,57**
3.	2023	66	60	**90,90**
4.	2024	70	64	**91,43**
5.	2025	30	30	**100,00**

Sumber : SATPOL PP DAN DAMKAR Kab. Pekalongan, 2025

Meningkatnya kemampuan penyelesaian kasus pelanggaran peraturan daerah di Kabupaten Pekalongan, salah satunya didukung oleh semakin meningkatnya kuantitas personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dimiliki. Jumlah personil Satpol PP yang ada di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2025 sebanyak 148 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada, maka rasionya adalah sebesar 1,44 per 10.000 penduduk. Meskipun demikian, jika dilihat dari kondisi ideal maka rasio Satpol PP di Kabupaten Pekalongan masih sangat kurang jika dibandingkan dengan banyaknya jumlah penduduk yang ada. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.98.
Rasio Jumlah Satpol PP per 10.000 Penduduk
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No.	Tahun	Jumlah Satpol PP	Jumlah penduduk	Rasio
1.	2021	131	976.504	1,34
2.	2022	116	986.455	1,18
3.	2023	135	1.007.384	1,34
4.	2024	136	1.019.006	1,33
5.	2025	148	1.030.342	1,44

Sumber : SATPOL PP DAN DAMKAR Kab. Pekalongan, 2025

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga kondusifitas Kabupaten Pekalongan adalah dengan mengoptimalkan kinerja Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ada. Hal tersebut menjadi salah satu alternatif yang diambil karena keberadaan Linmas yang tersebar di seluruh wilayah, baik Linmas di tingkat Kabupaten bahkan sampai Linmas di tingkat desa. Jumlah anggota Linmas di Kabupaten Pekalongan sampai dengan Tahun 2025 sebesar 6.317 orang dengan rasio 61,31. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan dengan Tahun 2024 dengan rasio 64,53. Hal tersebut berdampak pada rasio ketersediaan Linmas per satuan penduduk yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.99.
Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No.	Tahun	Jumlah Linmas	Jumlah penduduk	Rasio
1.	2021	6.470	976.504	**66,27**
2.	2022	6,470	986.455	**65,58**
3.	2023	6.317	1.007.384	**62,71**
4.	2024	6.576	1.019.006	**64,53**
5.	2025	6.317	1.030.342	**61,31**

Sumber : SATPOL PP DAN DAMKAR Kab. Pekalongan, 2026

Partisipasi masyarakat juga memiliki peranan penting dalam upaya mewujudkan wilayah yang kondusif. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah dengan penyelenggaraan penjagaan lingkungan secara mandiri dengan mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling). Rata-rata setiap desa di Kabupaten Pekalongan memiliki 5 pos keamanan lingkungan yang dimanfaatkan untuk pelaksanaan siskamling masyarakat. Hal tersebut tentu menjadi sebuah potensi yang besar jika dimanfaatkan dengan optimal untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Jumlah pos kamling di Kabupaten Pekalongan dari 1.145 unit di Tahun 2021 mengalami penurunan di tahun 2025 sebanyak 393 unit. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.100.
Rasio Jumlah Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No.	Tahun	Jumlah Pos kamling	Jml Desa/Kelurahan	Rasio
1.	2021	1.145	285	4,01
2.	2022	1.145	285	4,01
3.	2023	349	285	1,22
4.	2024	362	285	1,27
5.	2025	393	285	1,38

Sumber : Polda Jawa Tengah, 2026

Salah satu bentuk gangguan yang terjadi di Kabupaten Pekalongan adalah adanya kegiatan Kejadian Konflik SARA. Meskipun demikian jumlahnya tidak banyak, yaitu hanya 5 kali kejadian di tahun 2019. Sementara itu untuk tahun 2020-2023 tidak ada kejadian unjuk rasa. Selain itu konflik SARA juga tidak pernah terjadi di Kabupaten Pekalongan selama 5 tahun terakhir. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.101.
Jumlah Kejadian Konflik SARA
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No.	Jumlah Kejadian Konflik SARA	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Politik	0	0	0	0	0
2.	Ekonomi	0	0	0	0	0
3.	Lainnya	0	0	0	0	0
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sumber : SATPOL PP DAN DAMKAR, 2026

Selain penegakan aturan hukum daerah, kewenangan lain yang perlu diperhatikan adalah permasalahan penanganan kebakaran. Selama 5 tahun terakhir Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran di wilayah Kabupaten Pekalongan telah mencapai 100 persen, yang berarti semua kejadian kebakaran telah mampu terlayani oleh unit pemadam kebakaran yang ada. Meskipun demikian hal yang perlu diperhatikan adalah masih rendahnya tingkat waktu tanggap yang dibutuhkan oleh unit pelaksana pelayanan pemadam kebakaran untuk menangani kasus kebakaran. Tahun 2025 tingkat waktu tanggap pemadam kebakaran masih di angka 26,00 persen. Adapun Kinerja Sub-Urusan Kebakaran di Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.102.
Kinerja Sub-Urusan Kebakaran
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No.	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	100	100	100	100
2.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	25,00	21,95	27,62	23,88	26,00

Sumber : SATPOL PP DAN DAMKAR Kab. Pekalongan, 2025

Capaian SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut.

Tabel 2.103.
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Indikator Pelayanan Dasar	Target	2021	2022	2023	2024	2025
1.	**Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan**						
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (Indikator SPM Trantibum)	100	100	100	100	100	100
2.	**SPM Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Urusan Kebencanaan**						
a.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100	100	100	100
b.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	100	100	100
c.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100	100	100
d.	Persentase (%)layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100	100	100

Sumber : Isian data SATPOL PP DAN DAMKAR, BPBD Kab. Pekalongan, 2026

f). Sosial

Pelaksanaan urusan sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah di tingkat kabupaten mencakup 6 sub urusan, yaitu Pemberdayaan Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Bencana, dan Taman Makam Pahlawan. beberapa kewenangan tersebut telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan dapat diukur kinerjanya berdasarkan capaian di beberapa indikator.

Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menjadi masih menjadi sebuah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh seluruh tingkat pemerintahan. Tantangan pelayanan sosial berakar pada berbagai faktor birokrasi, keterbatasan sumber daya, dan disfungsi sistem. Hal ini memicu isu kompleks seperti kemiskinan dan kesenjangan. Untuk mengatasinya, diperlukan penanganan holistik dan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pelayanan. Jumlah panti sosial di Kabupaten Pekalongan cukup banyak, yakni 28 unit lembaga yang tersebar di seluruh wilayah. Panti-panti sosial itu terdiri atas panti asuhan, panti khusus/disabilitas dan panti werdha.

Evaluasi penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di luar panti (non-institusional) seperti gelandangan, pengemis, dan anak jalanan menunjukkan pendekatan berbasis komunitas ini lebih memandirikan PPKS, namun menghadapi kendala utama berupa validasi data yang kurang akurat, keterbatasan anggaran operasional, serta lemahnya koordinasi lintas instansi

Sementara itu untuk persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan menunjukan peningkatan dari 1,08 persen di tahun 2021 menjadi 7,29 persen di tahun 2025 (4.737/65.867 jiwa). Sedangkan persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat rata-rata telah mencapai 100 persen setiap tahunnya. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.104.
Perkembangan Pelayanan Urusan Sosial
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Panti Sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan pusat rehabilitasi yang menyediakan sarana, dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	12	12	25	28	27
	▪ Panti asuhan	11	11	22	24	26
	▪ Panti Khusus/Lembaga Kesejahteraan Sosial penyandang Disabilitas	1	1	2	1	1
	▪ Panti Werdha	-	-	1	3	0
2.	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	1,08	0,19	0,22	1,33	7,29
3.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Jumlah Puskesmas Ramah Disabilitas	2	2	2	2	2

Sumber: DINSOS dan BPBD Kab. Pekalongan, DINSOS Provinsi Jawa Tengah; 2026

Selain hal tersebut di atas, guna mendukung pelayanan publik bagi penyandang disabilitas, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pekalongan meluncurkan **Kartu Disabilitas dan Aplikasi Sosial Peduli** untuk para penyandang disabilitas di Kabupaten Pekalongan bertempat di Aula Lantai I Kantor Setda Kabupaten Pekalongan pada tanggal 5 Desember 2022.



Gambar 2.104. Kartu Disabilitas

Disabilitas di Kabupaten Pekalongan berjumlah sekitar 9800 orang disabilitas yang terdiri atas berbagai kategori ada disabilitas fisik, sensorik, intelektual dan disabilitas mental. Dalam Peringatan Hari Disabilitas Internasional Tingkat Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 telah

diundang sekitar 150 orang penyandang disabilitas dari berbagai kategori tersebut dan mewakili seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan.

Peluncuran kartu disabilitas di Kabupaten Pekalongan bermanfaat untuk memberikan para penyandang disabilitas kemudahan mendapatkan pelayanan publik, Kartu disabilitas memberikan para disabilitas pelayanan prioritas di pusat kesehatan, pembuatan KTP, pembuatan akta, maupun yang lainnya agar tidak perlu antri. Jumlah penerbitan kartu sampai dengan 2023 sebanyak **3.694 lembar kartu** yang sudah disampaikan kepada penerima. Fasilitas bagi penyandang disabilitas yang masih sangat terbatas, perlahan akan diperbaiki. Karena jika secara bersamaan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Saat ini baru ada 2 Puskesmas ramah disabilitas yaitu Puskesmas Karanganyar 1 dan Puskesmas Kedungwuni 1.

Pemkab Pekalongan juga meluncurkan Aplikasi Sosial Peduli untuk para disabilitas, Hal ini merupakan langkah awal sekaligus sosialisasi agar para disabilitas yang belum terdaftar bisa mendaftarkan diri melalui aplikasi ini. Setiap disabilitas kebutuhannya berbeda-beda sesuai kondisinya sehingga nantinya dapat cepat ditanggapi, disikapi, dan cepat diberikan bantuan
Selain indikator-indikator di atas, Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga harus melaksanakan pelayanan minimal urusan sosial. Standar pelayanan minimal ini wajib dan harus diberikan kepada kelompok sasaran yang ada. Terdapat 5 indikator standar pelayanan minimal urusan sosial dan pada tahun 2022 indikator tersebut telah mencapai 100 persen. Rata - rata capaian kinerja SPM di bidang urusan sosial secara lengkap dalam tabel berikut.

Tabel 2.105.
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosial
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase (%) anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah kabupaten/kota	100,00	100,00	95,50	100,00	100,00	100,00

Sumber : DINSOS Kabupaten Pekalongan, 2025

2). Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a). Tenaga Kerja

Kewenangan pemerintah kabupaten terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan tenaga kerja dan pengawasan industrial. Selain itu, permasalahan ketenagakerjaan juga menjadi salah satu permasalahan yang secara bersama-sama perlu ditangani melalui komitmen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs yaitu memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Masalah pokok ketenagakerjaan yang dihadapi adalah adanya kesenjangan antara angkatan kerja (pencari kerja) dengan kesempatan kerja yang tersedia, sehingga menyebabkan pengangguran. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja adalah melalui pelaksanaan bursa kerja dan penyaluran para pencari kerja ke pasar kerja yang sesuai. Upaya ini cukup berhasil, karena pencari kerja yang ditempatkan mengalami kecenderungan peningkatan peningkatan dari sebesar 71,82 persen pada tahun 2021 menjadi 98,96 persen pada tahun 2025. Permasalahan penempatan tenaga kerja dari program pelatihan juga masih menjadi masalah misalnya pada tahun 2025 hanya 30,40 persen dari peserta pelatihan keterampilan yang mampu tersalurkan ke pasar kerja. Hal tersebut tentunya harus menjadi bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi (sertifikasi).

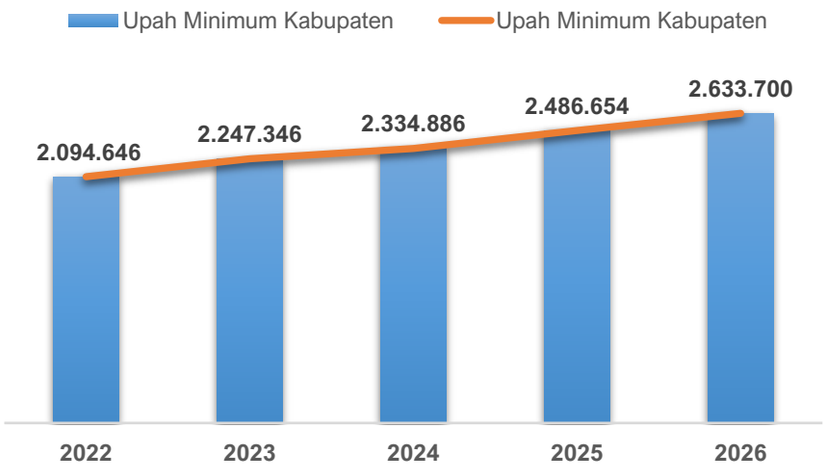
Selain itu Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari ULD (Unit Layanan Disabilitas) bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten pekalongan di Tahun 2023-2025 rata-rata sebanyak 1-2 orang dimana fasilitasi ini bertujuan untuk memberikan layanan dan fasilitasi bagi penyandang disabilitas agar mereka dapat memperoleh pekerjaan dan berpartisipasi penuh dalam dunia kerja. Selanjutnya, capaian kinerja Urusan tenaga kerja Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.106.
Perkembangan Pelayanan Urusan Tenaga Kerja
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Lowongan Kerja Terdaftar	3.746	5.175	4.701	3.704	6.045
2.	Jumlah pencari kerja terdaftar (orang)	5.056	5.130	7.315	3.683	3.380
3.	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan berdasarkan lowongan kerja	3.631	3.830	5.344	2.308	3.345
4.	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan (%)	71,82	74,65	73,06	62,67	98,96
5.	Persentase peserta pelatihan keterampilan bagi pencari kerja yang diterima kerja (%)	42,19	57,00	75,16	41,66	30,40
6.	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari ULD bidang Ketenagakerjaan	-	-	1	2	0

Sumber : DINKOP UKM DAN NAKER Kab. Pekalongan, BPS Provinsi Jawa Tengah; 2026

Selain capaian tersebut di atas, Kebijakan upah minimum telah menjadi isu yang penting dalam masalah ketenagakerjaan di beberapa negara maju maupun berkembang. Sasaran dari kebijakan upah minimum ini adalah untuk menutupi kebutuhan hidup minimum dari pekerja dan keluarganya. Dengan demikian kebijakan upah minimum adalah untuk (1)menjamin penghasilan pekerja sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkat tertentu, (2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan (3)meningkatkan daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Perkembangan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Kabupaten Pekalongan dari Tahun 2022-2026 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 2026

Gambar 2.105. Perkembangan Upah Minimum Kabupaten Pekalongan Tahun 2022-2026

Dari gambar di atas perkembangan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terus mengalami perkembangan dari tahun 2022-2026. Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah untuk memenuhi standar hidup minimum seperti Kesehatan, efisiensi dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Semakin meningkat tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan meningkat dan terbebas dari kemiskinan.

Peran pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah sangat diperlukan dalam menyikapi dampak penetapan upah minimum. Tidak bisa hanya pengusaha saja yang harus menanggung dampak penetapan upah minimum ini. Dengan pengertian, pemahaman serta kerjasama dari semua pihak dapat tercapai tujuan Bersama yaitu pekerja/buruh sejahtera, perusahan berkembang dan lestari dan pemerintah dapat menjadi stabilitas ekonomi dengan baik.

b). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana termuat dalam UU 23 tahun 2014 memiliki 6 sub urusan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten. 6 sub urusan tersebut adalah:

1) Kualitas Hidup Perempuan;
2) Perlindungan Perempuan;
3) Kualitas Keluarga;
4) Sistem Data Gender dan Anak;
5) Pemenuhan Hak Anak (PHA); dan
6) Perlindungan Khusus Anak

Salah satu indikator yang menggambarkan keberhasilan dari urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG), Namun demikian Komponen pembentuk IDG rata-rata turun di tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 sehingga menyebabkan IDG Kabupaten Pekalongan turun dari 69,78 di tahun 2023 menjadi 65,06 di Tahun 2024. Tantangan utama masalah gender di beberapa tahun kedepan adalah masih berkutat pada budaya patriarki yang masih kental, membuat perempuan sulit untuk berpartisipasi secara bebas.

Upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak sudah terimplementasi dengan cukup baik. Kondisi tersebut dapat dilihat dari evaluasi Kabupaten Layak Anak yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dimana Kabupaten Pekalongan memperoleh penghargaan di tingkat madya selama 5 tahun berturut-turut. Meskipun demikian masih ada beberapa klaster pemenuhan hak anak yang perlu ditingkatkan lagi. Adapun Perkembangan Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.107.
Perkembangan Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,56	92,72	92,83	92,96	n/a
2.	[IDG] Indeks Pemberdayaan Gender	70,54	71,76	69,78	65,06	n/a
3.	[IDG] Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	25,79	25,84	25,82	26,12	n/a
4.	[IDG] Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (%)	49,29	48,03	54,99	53,20	n/a
5.	[IDG] Keterlibatan perempuan di Parlemen (%)	26,67	26,67	25,00	17,78	n/a
7.	Indeks Pengarusutamaan Gender (PUG)	0,32	0,32	0,33	0,37	n/a
8.	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam APBD	3,00	3,00	6,40	6,76	6,76
9.	Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya

Sumber : DINAS P3A DAN PPKB Kab. Pekalongan; BPS Jawa Tengah, 2026

c). Pangan

Pangan selalu menjadi isu strategis dalam pembangunan baik di tingkat global maupun nasional, karena pemenuhan pangan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin kuantitas dan kualitasnya, aman dan bergizi. Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk memperkuat ketahanan pangan sebagai upaya untuk menyediakan pangan bagi 275,7 juta penduduk Indonesia, sehingga menjadi sumber daya manusia (SDM) yang sehat, aktif dan produktif, serta berdaya saing sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2012. Komitmen tersebut sejalan dengan upaya pencapaian tujuan kedua dalam Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development Goals/SGDs)* yaitu menghilangkan kelaparan *(zero hunger)* pada tahun 2030.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas SDM adalah pemenuhan pangan yang beragam dan terjangkau oleh setiap penduduk di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karenanya, pemenuhan konsumsi pangan dan gizi yang saat ini diukur melalui indikator keragaman konsumsi pangan berbasis Pola Pangan Harapan (PPH) menjadi komitmen yang perlu diwujudkan sebagaimana amanat Undang-undang Pangan nomor 18/2012 dan Peraturan Pemerintah nomor 17/2015 tentang ketahanan Pangan dan Gizi. Pencapaian skor PPH konsumsi merupakan indikator kunci yang perlu diukur dan dianalisis untuk mengetahui gambaran pola konsumsi pangan masyarakat yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu di setiap wilayah. Tidak hanya di level pusat namun juga di level provinsi dan kabupaten/kota.

Secara rinci capaian pelayanan urusan pangan Tahun 2021-2025 di Kabupaten Pekalongan terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.108.
Capaian Pelayanan Urusan Pangan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Konsumsi Energi (kkal/kap/hari)	2.180	2.143	2.219	2.156	2.153
2.	Persentase Angka Kecukupan Energi (% AKE)	103,79	102,00	105,70	102,65	102,53
3.	Konsumsi Protein (gram/kap/hari)	65,47	67,40	67,10	67,00	66,30
4.	Persentase Angka Kecukupan Protein (% AKP	114,86	118,20	117,80	116,88	116,31
5.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	92,88	96,40	96,80	95,45	98,28

Sumber : Badan Pangan Nasional 2020-2024

Data di atas menunjukkan bahwa ketahanan pangan di Kabupaten Pekalongan cukup baik. Pangan yang dikonsumsi rumah tangga terdapat dalam berbagai bentuk dan jenis dengan satuan yang berbeda, sehingga dilakukan konversi ke dalam satuan dan jenis komoditas yang sama. Skor PPH digolongkan berdasarkan empat kategori yaitu sangat kurang (< 55), kurang (55 – 69), cukup (70 – 84) dan baik (>85). Skor PPH pada tahun 2025 sebesar 98,28 termasuk dalam **kategori baik**. Ada sembilan kelompok pangan yang digunakan untuk menghitung PPH yaitu *padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, buah dan sayur serta lain-lain*.

Pangan yang dikonsumsi rumah tangga terdapat dalam berbagai bentuk dan jenis dengan satuan yang berbeda, sehingga dilakukan konversi ke dalam satuan dan jenis komoditas yang sama. Selanjutnya dihitung asupan energi menurut kelompok pangan per kapita/hari. Standar Kebutuhan energi penduduk sebesar 2.000 kkal per hari dan kebutuhan protein sebesar 52 gram protein per hari. Dengan ketersediaan energi dan protein sebagaimana tersebut dalam tabel di atas, kebutuhan kalori energi dan protein sudah memadai.

Pemerintah Kabupaten terus melakukan penguatan regulasi guna mendongkrak capaian aspek ketersediaan pangan pada Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Tahun 2025 yang dinilai masih rendah berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 223.1 Tahun 2025, dengan memprioritaskan pemenuhan Rasio Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan Kabupaten Pekalongan sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 dengan membentuk lumbung pangan untuk menjamin ketersediaan/logistik pangan dan keamanan pangan. Jumlah lumbung pangan di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2022 sebanyak 14 Desa dari 272 desa yang ada di Kabupaten Pekalongan. Jumlah lumbung pangan dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2.109.
Jumlah Lumbung Pangan
di Kabupaten Pekalongan dan Tahun Pendiriannya

No	Lokasi	Tahun pendirian	Nama kelompok
1.	Desa Klunjukan Kec. Sragi	2009	LPM Tani Makmur
2.	Desa Jagung Kec. Kesesi	2009	Makmur

No	Lokasi	Tahun pendirian	Nama kelompok
3.	Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	2010	Tani Jaya
4.	Desa Werdi Kec. Wonokerto	2010	Sido Makmur
5.	Desa Sumub Lor Kec. Sragi	2011	LPM Sumber Rejeki
6.	Desa Purwodadi Kec. Sragi	2011	LDPM Lancar Tani
7.	Desa Sidosari Kec. Kesesi	2011	Karya Makmur
8.	Desa Tengeng Wetan Kec. Siwalan	2011	Sido Makmur
9.	Desa Pantirejo Kec. Kesesi	2013	Makmur Sejahtera
10.	Desa Blimbing Wuluh Kec. Siwalan	2013	Srikandi
11.	Desa Krandon Kec. Kesesi	2014	Sri Rejeki
12.	Desa Kedungjaran Kec. Sragi	2016	LPM Kedungrejo
13.	Desa Getas Kec. Wonopringgo	2016	Sri Rejeki Jaya
14.	Desa Ketanonageng Kec. Sragi	2019	Gemah Ripah

Sumber : DKPP Kab. Pekalongan, 2023

d). Pertanahan

Kewenangan Urusan Pertanahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah meliputi 1) Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, 2) Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten/kota, 3) Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 4) Penetapan subyek dan obyek retribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah kabupaten/kota, 5) Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota, 6) Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota, 7) Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota, 8) Penerbitan izin membuka tanah, dan 9) Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah kabupaten/kota.

Pelayanan urusan pertanahan tahun 2021-2025 dilakukan melalui fasilitasi hak atas tanah dan penyelesaian permasalahan pertanahan. Dalam periode tahun tahun 2021-2022 sebesar 100 persen dengan perincian masing -masing yang dilaporkan dan dapat diselesaikan semua.Sedangkan di tahun 2023 baru tercapai 15 persen dikarenakan terdapat beberapa kasus tanah desa yang prosesnya masih berjalan dan belum selesai sampai akhir tahun, sedangkan di Tahun 2024 -2025 sudah mencapai 100 persen.

Tabel 2.110.
Capaian Pelayanan Urusan Pertanahan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase permasalahan pertanahan yang diselesaikan (%)	100,00	100,00	15,00	100,00	100,00

Sumber : DPU TARU Kab. Pekalongan, 2024

e). Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) terbatasi oleh keterbatasan luas wilayah dan meningkatnya permintaan untuk lahan terbangun. Nilai IKTL tahun 2025 mencapai 29,03

mengindikasikan kualitas "KURANG". Nilai tersebut naik dibandingkan tahun 2024 sebesar 4,37. Sedangkan Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2025, tercatat pada Tahun 2025 sebesar 29,03% sampah berhasil dikelola. Sebanyak 70,97% sampah sisanya belum terkelola dengan baik. Selengkapnya Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.111.
Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)/Indeks Kualitas Lahan (IKL)	56,55	56,55	58,28	60,47	69,28
2	Persentase timbulan sampah yang dikelola	40,66	41,10	4,96	4,37	29,03

Sumber : DINAS PERKIM DAN LH, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional: SIPSN; 2026

f). Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk, dinyatakan bahwa bagi Penduduk yang wajib memiliki KTP tetapi belum melakukan perekaman, wajib segera melakukan perekaman. Persentase Kepemilikan KTP-Elektronik Pemula Bagi Wajib KTP-Elektronik Pemula mengalami peningkatan dari 98,05 persen di Tahun 2021 menjadi 98,66 persen di tahun 2025. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan telah berupaya salah satunya memberikan pelayanan jemput bola ke lembaga/sekolah melakukan perekaman bagi peserta didik wajib KTP yang belum melakukan perekaman, namun upaya ini dirasa belum optimal karena tidak dapat menjangkau Wajib KTP-Elektronik Pemula yang berada di luar lingkungan sekolah. Selain itu penduduk Wajib KTP-Elektronik lainnya yang perlu dijangkau dan difasilitasi kepemilikan KTP-el diantaranya seperti Penyandang Disabilitas, Lansia, serta PPKS.

Persentase Penduduk Usia 0-18 Tahun Memiliki Akta Kelahiran mengalami penurunan dari 94,20 persen di tahun 2021 menjadi 97,91 persen di Tahun 2025. DISDUKCAPIL telah melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit dan Tenaga Bidan terkait dengan fasilitasi pelayanan dokumen kependudukan berdasarkan data anak usia 0-5 tahun yang belum terlayani kepemilikan akta kelahiran. DISDUKCAPIL melakukan terobosan yang disebut ***"AlDiNo (Alhamdulillah Dia Nongol)***. Suatu terobosan berupa layanan *3in1* bagi keluarga bayi baru lahir untuk mempermudah/mempercepat perolehan dokumen kependudukan, terutama KK, Akta Kelahiran dan KIA melalui kerja sama dengan 3 Rumah Sakit di wilayah Kabupaten Pekalongan. Penyelenggaraan KIA yang baru dilaksanakan sejak tahun 2021 relatif menurun, yaitu tahun 2021 sebesar 73,11 persen menjadi 61,44 persen di tahun 2025.

Cakupan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) tahun 2025 sebesar 2,90 persen. Sedangkan capaian cakupan penerbitan akta kematian di Kabupaten Pekalongan tiap tahun hingga tahun 2025 mencapai 100 persen. Namun sebatas kematian seseorang yang terlaporkan dan tercatat oleh DISDUKCAPIL. DISDUKCAPIL terus melakukan sosialisasi secara proaktif dalam pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang terintegrasi dengan pelayanan urusan kesehatan dan pendidikan guna meningkatkan capaian kepemilikan yang baru mencapai 2,90 persen pada Tahun 2025; serta meningkatkan cakupan kepemilikan KIA) secara signifikan sebagai pemenuhan hak kependudukan anak; serta sajikan data dan

analisis pemanfaatan kerja sama data administrasi kependudukan demi efisiensi pelaksanaan program pembangunan berbasis data rill. Secara rinci capaian penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.112.
Perkembangan Pelayanan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Cakupan Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	N/A	N/A	N/A	2,72	2,90
2	Cakupan kepemilikan dok. kependudukan (%)	97,41	97,99	98,62	98,99	98,80
3	Persentase Kepemilikan KTP EL-Pemula Bagi Wajib KTP EL-Pemula (%)	98,05	97,85	98,77	99,47	98,66
4	Persentase Penduduk Usia 0-18 Tahun Memiliki Akta Kelahiran (%)	94,20	96,12	97,08	97,50	97,91
5	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (%)	100,00	100,00	99,83	99,36	99,35
6	Persentase Kepemilikan Akta Kematian (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	73,11	62,06	61,46	60,71	61,44

Sumber : DISDUKCAPIL Kab. Pekalongan, 2026

g). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Potret keberhasilan pembangunan pemberdayaan masyarakat dan Desa dapat diketahui pada Indeks Desa Membangun (IDM). Pengukuran pembangunan desa di Indonesia mengalami perubahan signifikan dengan peralihan dari Indeks Desa Membangun (IDM) ke Indeks Desa (ID). Pergantian ini tidak hanya soal nomenklatur, tetapi juga menyentuh aspek metodologi, fokus pengukuran, dan implikasi kebijakan pembangunan desa. Perubahan ini menjadi momentum mengevaluasi arah dan strategi pembangunan desa yang selama ini diterapkan

Perubahan Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi Indeks Desa ditetapkan melalui **Permendesa PDT Nomor 9 Tahun 2024**. Perubahan ini bertujuan untuk menyederhanakan nama dan mengintegrasikan seluruh indikator menjadi sistem penilaian tunggal yang lebih akurat dalam mengukur capaian pembangunan desa. **Indeks Desa Membangun (IDM)**: Menggunakan 3 (tiga) dimensi utama ((1)Ketahanan Sosial, (2)Ekonomi, dan (3) Ekologi/Lingkungan). Sedangkan **Indeks Desa**: Dikembangkan menjadi 6 (enam) dimensi dengan penambahan (4) dimensi tata kelola pemerintahan, (5) infrastruktur, serta (6) dimensi kerentanan. Indeks Desa: Menggunakan 48 indikator yang tidak hanya melihat ketersediaan fisik, namun juga menilai kondisi jarak, waktu, dan transportasi terkait akses pelayanan (seperti pendidikan dan kesehatan) untuk merekam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di level desa yang terintegrasi langsung dengan program Satu Data Indonesia dengan dukungan validasi dan verifikasi sistematis hingga ke tingkat pusat.



Gambar 2.106. Klasifikasi Status pada Indeks Desa

Capaian Indeks Desa Kabupaten Pekalongan selama 4 (empat) tahun terakhir terus mengalami kenaikan dari sebesar 0,6688 di Tahun 2021 menjadi 72,42 di Tahun 2025 dengan status **MAJU**. Klasifikasi Status pada Indeks Desa dengan lima status yakni **Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal dan Sangat Tertinggal**. Dalam publikasi tahun 2025 terdapat ada 42,65 persen desa dengan status Desa Maju, angka tersebut setara dengan 116 desa di Kabupaten Pekalongan. Secara rinci capaian Indeks Desa Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.113.
Peringkat Indeks Desa
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

Tahun	Nilai Indeks Desa	Status Indeks Desa	Peringkat Nasional (Dari 434)	Peringkat Jateng (Dari 29)
2021	0,6688	Berkembang	218	29
2022	0,6746	Berkembang	255	28
2023	0,6781	Berkembang	290	28
2024	0,7048	Berkembang	273	27
2025	0,7242	Maju	-	-

Sumber : Dinas PMD Kab. Pekalongan, 2025; *sidesa.jatengprov.go.id 2025; *)Indeks Desa*

Tabel 2.114.
Indeks Desa Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No.	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1.	**Indeks Desa**	**0,6668**	**0,6746**	**0,6781**	**0,7048**	**0,7242**
	• Desa Mandiri	0	2	2	22	40
	• Desa Maju	42	47	56	82	116
	• Desa berkembang	223	216	209	168	116
	• Desa Tertinggal	7	7	5	0	0
	• Desa sangat Tertinggal	0	0	0	0	0
	• **Jumlah Total Desa**	**272**	**272**	**272**	**272**	**272**

Sumber : Dinas PMD Kab. Pekalongan, 2026; *sidesa.jatengprov.go.id 2026*

Selain hal tersebut, upaya pemberdayaan masyarakat desa dilakukan salah satunya oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pemanfaatan hasil usaha BUMDes untuk mewujudkan kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Berdasarkan *sidesa.jatengprov.go.id 2023*, di kabupaten Pekalongan di Tahun 2024 terdapat 190 BUMDES dengan rincian berdasarkan kategori : **PERINTIS sebanyak 109 BUMDES, PEMULA sebanyak 55 BUMDES, BERKEMBANG sebanyak 25 BUMDES dan MAJU sebanyak 1 BUMDES.**

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.115.
Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No.	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1.	**Jumlah Klasifikasi BUMDes**	**191**	**223**	**247**	**-**	n/a
a.	Dasar	91	122	126	-	n/a
b.	Tumbuh	85	90	100	-	n/a
c.	Berkembang	8	7	15	-	n/a
d.	Maju	7	4	6	-	n/a
2	**Jumlah Pemeringkatan BUMDes**				**190**	n/a
a.	Perintis	-	-	-	109	n/a
b.	Pemula	-	-	-	55	n/a
c.	Berkembang	-	-	-	25	n/a
d.	Maju	-	-	-	1	n/a

Sumber : Dinas PMD Kab. Pekalongan, 2025; *sidesa.jatengprov.go.id 2025*

h). Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kewenangan daerah dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana meliputi 3 sub urusan yaitu pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Kewenangan kabupaten/kota berkaitan dengan sub urusan pengendalian penduduk meliputi : 1) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, dan 2) Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota. Pengendalian penduduk berupa pengaturan kelahiran dengan pengendalian *TFR (Total Fertility Rate)*. *Total Fertility Rate* (TFR adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/reproduksinya. TFR di Kabupaten Pekalongan tahun 2025 adalah 2,16 artinya rata rata perempuan di Kabupaten Pekalongan memiliki kemampuan melahirkan diatas 2 anak. Dalam rangka mengendalikan TFR maka perlu dilakukan program pengaturan kelahiran.

Sampai dengan tahun 2025 cakupan peserta KB Aktif mencapai angka 62,46 persen, angka ini masih rendah dibandingkan dengan target nasional (65 persen). Namun demikian dengan capaian *Unmet Need* (persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi) mencapai 6,41 persen di Tahun 2024 lebih rendah dari tahun 2022 sebesar 10,33 persen, dengan harapan dengan turunnya *unmet need* dapat menurunkan angka kematian ibu. Oleh karena itu upaya yang bisa dilakukan ialah dengan melakukan konseling dan juga harus ada semacam role model yang akan diikuti oleh masyarakat.

Adapun Perkembangan Pelayanan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.116.
Perkembangan Pelayanan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Total Fertility Rate (TFR)	2,40	2,38	2,25	2,25	2,16
2.	Cakupan peserta KB aktif (%)	71,29	74,20	66,42	67,18	62,46
3.	Unmet Need	12,74	10,23	10,33	6,41	5,37

Sumber : DINAS P3A DAN PPKB Kab. Pekalongan, 2026

i). Perhubungan

Perkembangan capaian peningkatan kualitas pelayanan transportasi hanya melaksanakan sub urusan pertama yaitu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Korban kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu 2021-2025, rata-rata korban baik meninggal/luka berat/luka ringan setiap tahunnya sebesar 297 jiwa dan terdapat ± 2 orang yang meninggal dunia di jalan. Pemerintah terus melakukan upaya sistematis untuk mencegah kecelakaan dan mengurangi fatalitas korban dengan fokus lima pilar utama: manajemen keselamatan, jalan berkeselamatan, kendaraan yang aman, perilaku pengguna jalan, dan penanganan pasca kecelakaan

Persentase sarana dan prasarana lalu lintas jalan raya berupa Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) naik dari tahun 2021 sebesar 66,25 persen menjadi sebesar 84,81 persen di tahun 2025. Persentase infrastruktur perhubungan yang berkeselamatan dalam kondisi baik juga meningkat dari Tahun 2021 sebesar 44,40 persen menjadi 49,78 persen di di Tahun 2025. Persentase Kepemilikan KIR menurun dari Tahun 2021 sebesar 83,85 persen menjadi 71,00 persen di Tahun 2025. Jumlah terminal tipe C di tahun 2021-2025 sebanyak 5 unit berkurang 1 unit sejak tahun 2016 dari 6 (enam) unit karena pengalihan pengelolaan Terminal Kajen dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.117.
Perkembangan Pelayanan Perhubungan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase sarana dan prasarana lalu lintas jalan raya (APILL) (%)	66,25	74,57	77,97	82,22	84,81
2.	Persentase infrastruktur perhubungan yang berkeselamatan dalam kondisi baik	44,40	45,13	46,74	49,78	49,78
3.	Persentase Kepemilikan KIR	83,85	84,67	73,00	76,41	71,00
4.	Jumlah kendaraan wajib uji kir	3.563	3.563	3.137	5.618	5.618
5.	Jumlah uji kir angkutan umum dan tidak umum	5.299	5.257	4.468	4.293	3.981
6.	Jumlah Terminal Tipe C	5	5	5	5	5
7.	Jumlah Perusahaan Angkutan Penumpang	25	27	28	31	33
8.	Jumlah Armada Angkutan Penumpang (unit)	578	581	594	650	502
9.	Jumlah Perusahaan Angkutan Barang	74	83	83	86	90
10.	Jumlah Armada Angkutan Barang (unit)	3.066	2.700	2.591	2.064	1.963
11.	**Jumlah kecelakaan Lalu Lintas (kali)**	**179**	**238**	**264**	**257**	**215**
	• Meninggal (jiwa)	52	58	77	53	58
	• Luka Berat (jiwa)	3	1	-	3	1
	• Luka Ringan (jiwa)	164	235	254	285	239
	• Kerugian Material (juta Rp)	289.300	483. 250	782.720	693.450	649.500

Sumber : DINHUB Kab. Pekalongan; Bidang TI Subdit Tek Info Kepolisian Daerah Jawa Tengah; 2026

j). Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Pekalongan sangat erat kaitannya dalam mendukung tata kelola pemerintahan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* di Kabupaten Pekalongan diwujudkan melalui Reformasi Birokrasi, digitalisasi layanan publik, dan integrasi berbasis data untuk menciptakan birokrasi yang lebih bersih, transparan, serta akuntabel. Reformasi General: Perbaikan tata kelola internal, penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan peningkatan kualitas SDM aparatur. Reformasi Tematik: Penyelesaian isu-isu prioritas daerah, seperti penanganan stunting, pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan investasi

2) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Pekalongan terus dioptimalkan melalui penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE serta regulasi khusus seperti Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik . Layanan ini dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

Secara umum, capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.118.
Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase OPD yg memiliki *website* (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Jumlah sistem informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah berbasis IT (buah)	70	67	55	55	79
3.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	5	5	5	5	5
4.	Website milik pemerintah daerah	1	1	1	1	1

Sumber : DINKOMINFO Kab. Pekalongan, 2026

k). Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Capaian kinerja urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat melalui pertumbuhan koperasi aktif dan usaha mikro yang cenderung fluktuatif namun mengalami kenaikan dari 3,94 persen di tahun 2024 menjadi 18,87 persen di tahun 2025. Jumlah Koperasi di Kabupaten Pekalongan selalu meningkat setiap tahunnya, dimana pada tahun 2021 berjumlah 598 unit dan meningkat menjadi 887 unit di tahun 2025. Sedangkan persentase koperasi yang aktif, mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 21,82 persen menjadi 51,30 persen di tahun 2025. Persentase koperasi sehat mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 59,60 persen menjadi 29,41 persen pada tahun 2025. Upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong koperasi sehat antara lain: Penguatan kapasitas kelembagaan berbasis sertifikasi kompetensi pengurus; Peningkatan akuntabilitas keuangan berbasis digitalisasi

pembukuan, dan penegakan kepatuhan Rapat Anggota Tahunan (RAT), serta optimalisasi pengawasan klinis secara berkala oleh Perangkat Daerah pengampu secara berkala.

Jumlah Usaha Kecil Mikro (UKM) binaan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, dimana tahun 2021 sebanyak 19.249 unit menjadi 10.198 unit di tahun 48.702. Pemerintah Kabupaten Pekalongan menargetkan percepatan sertifikasi halal bagi sekitar 30.000 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menyukseskan program Wajib Halal. memanfaatkan kuota SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Jawa Tengah di Tahun 2026 ini. Kondisi capaian kinerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah secara rinci dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.119.
Capaian Kinerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Pertumbuhan koperasi aktif dan usaha mikro (%)	-4,24	0,30	15,58	3,94	18,87
2.	Pertumbuhan koperasi aktif (%)	-4,76	0,10	7,75	3,94	7,59
3.	Pertumbuhan Usaha mikro (%)	0,52	0,20	0,18	0,83	11,28
4.	Jumlah Koperasi (unit)	598	629	643	887	887
5.	Persentase Koperasi Aktif (%)	21,82	19,21	23,86	26,73	51,30
6.	Persentase Koperasi Sehat (%)	59,60	49,76	65,36	43,10	29,41
7.	Jumlah UKM Binaan (unit)	19.249	58.000	43.458	48.744	48.702

Sumber : DINKOP UKM DAN NAKER Kab. Pekalongan, 2026

Selain itu Pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Pekalongan yang telah diresmikan telah diselesaikansebanyak 65 titik gerai yang beroperasi secara bertahap di sepanjang Tahun 2025. Permasalahan utama dalam pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) meliputi kendala ketersediaan lahan (terutama izin Perhutani), kebutuhan biaya pengurukan tanah yang tinggi, serta penolakan warga setempat terkait lokasi pembangunan yang dinilai kurang strategis dan sulit diakses. Beberapa detail terkait tantangan dan progres program di lapangan meliputi : kekurangan lokasi (target lahan): Dari target 200 titik lokasi pembangunan KDMP masih terdapat kekurangan sekitar 68 lokasi. Proses perizinan lahan yang berada di kawasan Perhutani serta kebutuhan teknis *cut and fill* (pengurukan tanah) menjadi kendala utama percepatan pembangunan di lapangan.

Dari total 65 titik KDKMP yang disiapkan, seluruhnya sudah siap secara fisik. Fasilitas penunjang seperti pendingin ruangan (AC) sudah tersedia di puluhan titik. Operasional penuh masih berjalan bertahap seiring proses distribusi sarana operasional dari pemerintah pusat. Targetnya seluruh unit akan beroperasi optimal. Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menyerahkan puluhan armada operasional, yang terdiri dari mobil pickup dan motor roda tiga, guna mendukung kelancaran distribusi koperasi. Ruang etalase atau display pada gerai KDMP diprioritaskan untuk produk UMKM lokal. Dinas Koperasi dan UMKM juga memberikan pendampingan agar produk tersebut memenuhi syarat perizinan (seperti PIRT dan sertifikasi halal).

l). Penanaman Modal

Kinerja urusan penanaman modal dapat dilihat dari capaian jumlah realisasi investasi di Kabupaten Pekalongan, jumlah perusahaan baru yang berinvestasi serta jumlah penyerapan tenaga kerja. Sejak tahun 2021-2025, jumlah nilai investasi berskala nasional naik, untuk

PMDN naik dari tahun 2024 sebesar 2.030 miliar menjadi 3.189 miliar di tahun 2025. Didominasi oleh sektor industri : 53,52%, perdagangan dan reparasi : 15,90%, dan sektor Transportasi, Gudang dan telekomunikasi : 15,55%. Nilai investasi Tahun 2025 didapat dari Laporan Realisasi Investasi Penanaman Modal Sektor PMDN Usaha Mikro Kecil (UMK) sebesar Rp. 734.506.477.164,-, Realisasi Investasi Penanaman Modal Non UMK sebesar Rp. 294.755.564.594,-, Realisasi Investasi Penanaman Modal Laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) UMK sebesar Rp. 52.956.934.784,-, Realisasi Investasi Penanaman Modal berdasarkan LKPM PMA sebesar Rp. 1.675.932.022.625,-, Realisasi Investasi Penanaman Modal berdasarkan LKPM PMDN sebesar Rp. 431.038.654.217,-. Masuknya investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) lebih besar dibanding Penanaman Modal Asing (PMA), walaupun di tahun 2024 dan 2025 sektor PMA mendominasi peningkatan investasi Kabupaten Pekalongan.

Jumlah investor tahun 2021 sebesar 5.355 investor naik di Tahun 2025 sebesar 7.536 investor. Meskipun menunjukan peningkatan namun inovasi promosi peluang penanaman modal yprovinsi, penyediaan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan, dan fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan masih perlu dilakukan peningkatan. Capaian kinerja urusan penanaman modal secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.120.
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No.	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan	89,67	89,68	91,17	91,66	91,61
2.	Jumlah nilai investasi berskala Nasional (PMDN/PMA) (miliar.Rp)	2.072	2.696	3.330	2.030	3.189
3.	Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) (investor)	5.355 (PMA 31)	6.346 (PMA 31)	11.681 (PMA 31)	9.127 (PMA 31)	7.536 (PMA 31)

Sumber : DPMPTSP Kab. Pekalongan, 2026

m). Kepemudaan dan Olahraga

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi dan memahami kondisi pemuda serta mencerminkan capaian pembangunan pemuda di Indonesia. IPP mengukur berbagai aspek pembangunan pemuda dalam lima domain utama, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Secara nasional, IPP Kabupaten Pekalongan pada tahun 2025 mencapai angka 65,10 lebih besar dari tahun 2024 sebesar 65,00.

Capaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga antara lain persentase pemuda wirausaha yang dibina tahun 2025 sebesar 5,24 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 sebesar 5,22 persen. persentase prestasi olahraga tingkat regional, dan nasional tahun 2025 sebesar 40,17 persen lebih rendah dibandingkan tahun 2024 sebesar 70,58 persen. persentase atlet berprestasi tingkat regional dan nasional Tahun 2025 sebesar 53,84 persen lebih rendah dibandingkan tahun 2024 sebesar 74,07 persen. Untuk memulihkan prestasi olahraga kabupaten pada Tahun 2027, fokus utama diarahkan pada pemetaan talenta usia dini, pemerataan fasilitas latihan, dan evaluasi manajemen secara menyeluruh

Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.121.
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	62,73	62,24	63,28	65,00	65,10
2.	Jumlah kwartir ranting yang aktif (unit)	19	19	19	19	19
3.	Persentase pemuda wirausaha yang dibina	2,22	2,67	4,76	5,22	5.24
4.	Persentase Prestasi Olahraga Tingkat regional, dan Nasional	41,00	44,40	70,59	70,58	40,17
5.	Persentase Atlet Berprestasi Tingkat regional dan Nasional	33,00	30,00	48,00	74,07	53,84
6.	Jumlah organisasi pemuda (unit)	27	27	26	26	26
7.	Jumlah organisasi olahraga (klub)	38	38	38	38	38
8.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) (unit)	1	1	1	1	1

Sumber : KEMENPORA; DINPORAPAR Kab. Pekalongan, 2024

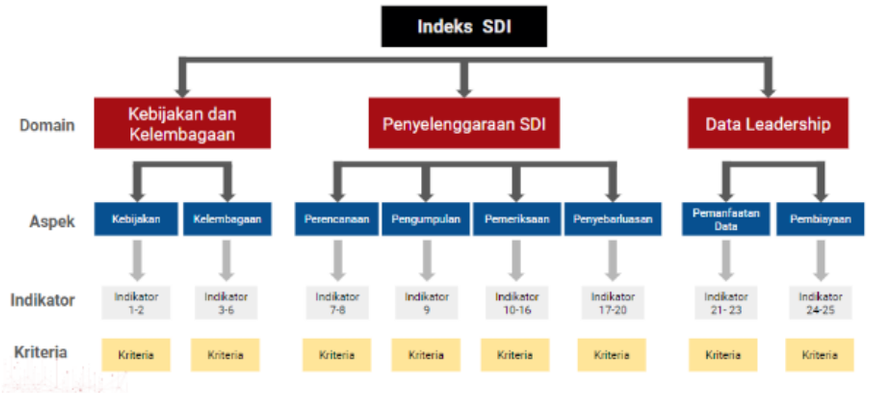
n). Statistik

Kebijakan Satu Data Indonesia yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan di Indonesia. Landasan hukum tersebut digunakan untuk melakukan perbaikan tata kelola data untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan. Pengaturan Satu Data Indonesia bertujuan untuk memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan sehingga dapat mendorong keterbukaan dan transparansi dalam perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia membutuhkan kolaborasi lintas Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai langkah strategis dalam mencapai transformasi digital. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas tantangan pembangunan, kebutuhan akan data akurat dan mutakhir menjadi semakin mendesak. Data yang terfragmentasi, tidak seragam, dan sulit diakses menjadi hambatan dalam perumusan kebijakan yang efektif. Kondisi data yang tidak konsisten dan tidak dapat dibandingkan menghambat upaya mencapai keterpaduan informasi yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan.

Pada tahun 2021 dan 2022 Sekretariat Satu Data Indonesia telah mengadakan *Assesmen* Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Provinsi dan pada tahun 2023 telah melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan SDI (Indeks SDI). Berdasarkan Keputusan Menteri PPN/Bappenas No.93/M.PPN/HK/2025 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan SDI menjadi basis mekanisme Evaluasi Penyelenggaraan SDI Tingkat Kementerian/Lembaga/Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk memetakan penyelenggaraan SDI di Instansi Pusat dan Instansi Daerah pada tahun 2024. SDI Kabupaten Pekalongan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata Kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi dan pengendalian Pembangunan. Evaluasi Penyelenggaraan SDI dilaksanakan pada seluruh Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang mencakup pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penilaian ini dilakukan melalui tahapan

penilaian mandiri yang kemudian diverifikasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat.



Sumber : Kementerian PPN/Bappenas RI, 2024

Gambar 2.107. Struktur Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan SDI

Penilaian pada Evaluasi Penyelenggaraan SDI mencakup domain (1) Kebijakan dan Kelembagaan, (2) Penyelenggaraan SDI, dan (3) Data Leadership dengan rincian struktur penilaian pada Gambar 1. Setiap domain terdiri dari beberapa aspek di mana masing-masing aspek terdiri dari beberapa indikator yang kemudian nilainya akan dihitung agregasinya untuk mendapatkan nilai Indeks Satu Data Indonesia (Indeks SDI). Predikat Indeks SDI dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.122.
Predikat Indeks Satu Data Indonesia

Nilai	Predikat
0 - 30	Sangat Kurang
>30 - 50	Kurang
>50 - 70	Cukup
>70 - 90	Baik
>90 - 100	Sangat Baik

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas RI, 2024

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tahun 2024 Kabupaten Pekalongan memperoleh nilai **69.25** dengan predikat **CUKUP.** Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.123.
Nilai Indeks Domain dan Indeks SDI
Kabupaten Pekalongan Tahun 2023-2024

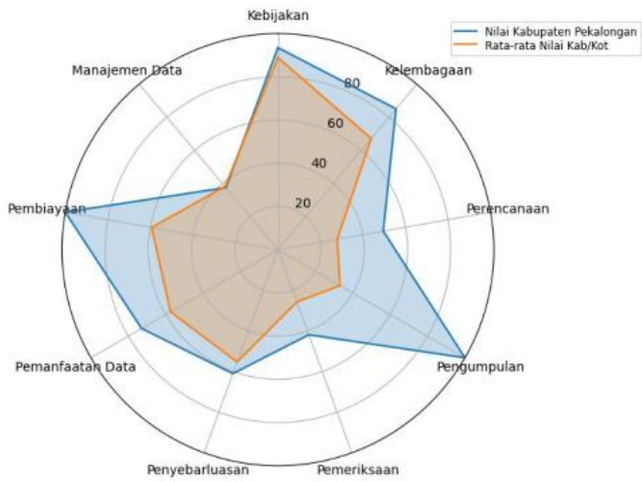
No	Indeks	2023		2024	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Domain Kebijakan dan Kelembagaan	34%	84,54	20%	88.44
2	Domain Penyelenggaraan SDI	43%	3,84	56%	61.71
3	Domain Data Leadership	23%	50,00	24%	70.83
	Indeks Satu Data Indonesia		**59,09**		**69.25**

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas RI, 2024

Tabel 2.124.
Nilai Indeks Aspek Kabupaten Pekalongan Tahun 2023-2024

No	Aspek	2023		2024	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Aspek Kebijakan	17%	100,00	8%	93.48
2	Aspek Kelembagaan	17%	69,08	12%	85.08
3	Aspek Perencanaan	11%	47,73	14%	49.53
4	Aspek Pengumpulan	6%	90,00	12%	100.00
5	Aspek Pemeriksaan	18%	2,22	14%	41.89
6	Aspek Penyebarluasan	8%	97,50	16%	61.00
7	Aspek Pemanfaatan Data	14%	25,00	12%	72.92
8	Aspek Pembiayaan	9%	88,89	6%	100.00
9	Aspek Manajemen Data			6%	37.50

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas RI, 2024



Sumber : Kementerian PPN/Bappenas RI, 2024

Gambar 2.108. Hasil Penilaian Evaluasi SDI Kab. Pekalongan Tahun 2024

o). Persandian

Tugas persandian daerah adalah menyelenggarakan persandian dalam rangka pengamanan informasi Pemerintah Daerah. Upaya yang yang dilakukan dalam rangka pengamanan tersebut adalah dengan mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian pada semua Perangkat Daerah di Kabupaten Pekalongan.

Capaian kinerja urusan Persandian diukur berdasarkan 1 indikator yaitu Tingkat keamanan informasi pemerintah, yang capaiannya sudah sebesar nilai 1. Indeks KAMI merupakan suatu aplikasi untuk mengevaluasi tingkat kematangan, tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001:2009 serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi di suatu instansi pemerintah. Evaluasi dilakukan terhadap beberapa area target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar SNI ISO/IEC 27001:2009, yaitu :

1) Tata Kelola Keamanan Informasi
2) Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi
3) Kerangka Kerja Keamanan Informasi
4) Pengelolaan Aset informasi
5) Teknologi dan Keamanan Informasi
6) Peran TIK

Berikut ini disajikan capaian kinerja pada urusan persandian Kabupaten Pekalongan.

Tabel 2.125.
Capaian Kinerja Urusan Persandian
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No.	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	1	1	1	1	1

Sumber : DINKOMINFO Kab. Pekalongan, 2025

p). Kebudayaan

Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan membawa arah baru dalam pembangunan kebudayaan dengan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Melalui pemajuan kebudayaan, diharapkan kebudayaan dapat memperkukuh jati diri dan karakter bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, melestarikan warisan budaya bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mampu mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

Kondisi layanan urusan Kebudayaan di Kabupaten Pekalongan antara lain dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam melestarikan benda, situs dan kawasan cagar budaya di Kabupaten Pekalongan. Selengkapnya dijelaskan sebagai berikut.

(1). Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan

Cakupan satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok Bahasa Jawa dan atau guru/tenaga pendidik yang mengajar ekskul kesenian dan atau kegiatan/kurikulum yang mengarusutamakan kebudayaan. Satuan Pendidikan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota meliputi PAUD, SD dan SMP baik negeri maupun swasta, Pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan.

Guru Lokal Bahasa Daerah adalah Guru S1/D4 dengan kualifikasi pendidikan Bahasa Daerah/Sastra Jawa. Guru Kesenian adalah Guru dengan kualifikasi pendidikan seni S1/D4 dari perguruan tinggi universitas atau institut kesenian. Kegiatan yang mengarusutamakan kebudayaan baik dalam kurikulum pelajaran maupun ekstra kurikuler.

Indikator tersebut tercapai jika memenuhi 2 dari 3 komponen yang dipersyaratkan: a) Guru yang mengajar mulok bahasa daerah, b) Guru yang mengajar seni budaya, dan c) Melaksanakan kegiatan pengarusutamaan kebudayaan di sekolah (baik melalui kurikulum atau ekskul). Nilai maksimal indikator 100% dan merupakan indikator "positif".

Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan di Kabupaten Pekalongan secara umum telah mencapai **100 persen** selama tahun 2020-2024.

(2). Jumlah pengunjung tempat bersejarah

Jumlah pengunjung pada lokasi dan/atau bangunan bersejarah yang memiliki nilai penting ilmu pengetahuan, pendidikan, keagamaan dan kebudayaan, seperti museum, bangunan bersejarah, masjid, klenteng, gereja, makam, monumen, candi, situs, kawasan, dan lainnya.

Indikator ini menggambarkan sejauh mana masyarakat mempunyai kepedulian dan mengapresiasi warisan budaya dan sejarah Jawa Tengah. Indikator ini merupakan indikator *proxy* dari pembentuk komponen Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) pada Dimensi Warisan Budaya. Tidak ada batasan nilai maksimal terhadap indikator ini, namun tren diharapkan meningkat dari tahun ke tahun. Merupakan indikator *"positif"*.

Formulasi Perhitungan Jumlah pengunjung pada lokasi dan/atau bangunan bersejarah yang memiliki nilai penting ilmu pengetahuan, pendidikan, keagamaan, dan kebudayaan. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia di Tahun 2025 sebanyak **8,10 persen** penduduk atau sebanyak ± 62.000 jumlah penduduk

Selain pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya, pembangunan budaya juga direalisasikan melalui penyelenggaraan festival dan peristiwa budaya. Jumlah festival dan peristiwa budaya yang diselenggarakan pada periode tahun 2021-2025 tetap namun mengalami penurunan di Tahun 2025 sebanyak 6 kali. Pembangunan budaya juga direalisasikan melalui pembinaan grup-grup kesenian di Kabupaten Pekalongan. Hal tersebut sebagai upaya pelestarian budaya melalui pelestarian dan pengembangan kearifan lokal. Selama kurun waktu 2021-2025 jumlah grup kesenian berjumlah 66 grup dan sedikit meningkat menjadi 67 grup di tahun 2025. Semuanya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Selengkapnya capaian kinerja urusan kebudayaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.126.
Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Kebudayaan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No.	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Persentase keikutsertaan festival seni dan budaya (%)	11	11	11	11	6
3.	Jumlah grup kesenian (unit)	66	66	66	66	67
4.	Jumlah gedung kesenian (unit)	2	2	2	2	2
5.	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	1	1	1	1	1
6.	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	5	5	10	7	7

Sumber : DINDIKBUD Kab. Pekalongan, 2026

q). Perpustakaan

(1). Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah indikator yang diukur oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk menilai tingkat keterlibatan masyarakat dalam budaya literasi dan kinerja pemerintah daerah dalam membina perpustakaan. Pengukuran ini mencakup tujuh unsur, termasuk pemerataan layanan, koleksi, tenaga, dan keterlibatan Masyarakat. IPLM mengukur usaha pemerintah dalam mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar seumur hidup. Ini mencerminkan seberapa efektif intervensi literasi yang dilakukan.

Nilai IPLM diklasifikasikan menjadi Sangat Rendah (0-29,9), Rendah (30-49,9), Sedang (50-79,9), Tinggi (80-89,9), dan Sangat Tinggi (90-100)". Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2025 mencapai 4,71 lebih rendah dari Tahun 2024 sebesar 66,65 dengan kategori sangat rendah yang menunjukkan kondisi di mana akses, sarana, dan keterlibatan masyarakat terhadap perpustakaan serta literasi belum memenuhi standar. Faktor utamanya adalah kurangnya kebiasaan membaca sejak dini, minimnya fasilitas, dan rendahnya produksi buku

Jumlah perpustakaan daerah di Kabupaten Pekalongan sebanyak 1 unit, dengan jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2024 sebanyak 100.647 orang mengalami penurunan di tahun 2025 menjadi 22.203 orang. Penurunan jumlah pengunjung ini juga disebabkan koleksi buku perpustakaan kurang banyak, banyaknya buku yang tidak dikembalikan dan banyak buku yang rusak, sehingga berpengaruh terhadap penurunan minat baca masyarakat. Dengan demikian, kedepan capaian tersebut masih harus ditingkatkan lagi melalui penambahan dan pemeliharaan buku. Pada indikator Jumlah perpustakaan desa/Taman Bacaan Masyarakat (TBM) meningkat dari tahun 2024 sebanyak 223 unit menjadi 227 unit di Tahun 2025. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.127.
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1.	**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat**	-	-	**47,58**	**66,65**	**4,71**
	• Rasio Pemerataan Layanan Perpustakaan	-	-	0,5471	0,5452	0,5616
	• Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	-	-	0,3822	0,4378	0,4509
	• Rasio Ketercukupan Tenaga • Perpustakaan	-	-	0,2002	0,2085	0,2148
	• Tingkat Kunjungan Masyarakat perhari	-	-	0,0803	0,4743	0,4885
	• Rasio Perpustakaan Ber–SNP	-	-	0,1211	1	1
	• Rasio Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan	-	-	1	1	1
	• Rasio Anggota Perpustakaan	-	-	1	1	1
	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat				**84,98**	**53,03**
	• Frekuensi Membaca (kali/minggu)				**6**	**7**
	• Durasi Membaca (jam/hari)				02,00-02,59	02,00-02,59
	• Jumlah Buku yang Dibaca				5-6	15-20

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
	(buku/triwulan)					
	• Frekuensi kali/minggu)				5-6	5-6
	• Durasi Akses Internet (jam/hari)				02,00-02,59	08.00-16.00
2.	Persentase ketersediaan bahan pustaka	22,45	23,01	23,65	24,68	25,86
3.	Jumlah perpustakaan desa/Taman Bacaan Masyarakat (TBM) (unit)	187	187	187	223	227
4.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang)	32.160	24.866	12.835	100.647	22.203
5.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (eksemplar)	53.491	53.645	40.648	41.440	41.928

Sumber : DINAS ARPUS Kab. Pekalongan, 2026

Untuk meningkatkan kinerja urusan perpustakaan, upaya lain yang perlu ditingkatkan adalah kualitas SDM dalam bidang perpustakaan. Kualitas SDM dilihat dari jumlah pustakawan dan tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat. Pada Tahun 2025 jumlah pustakawan sebanyak 13 orang, sementara jumlah tenaga teknis relatif sama dalam kurun Tahun 2025 sebanyak 13 orang pada. Sedangkan untuk penilai yang memiliki sertifikat sampai dengan tahun 2025 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan memiliki 1 (satu) orang penilai yang bersertifikat.. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.128.
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai
yang Memiliki Sertifikat Di Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No.	Indikator	2021	2022	2023	2020	2021
1.	Pustakawan (orang)	-	1	10	10	13
2.	Tenaga teknis (orang)	9	9	10	10	13
3.	Penilai yang memiliki sertifikat (orang)	-	-	-	1	1

Sumber : DINAS ARPUS Kab. Pekalongan, 2026

r). Kearsipan

Arsip mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik sebagai sumber informasi yang akurat, sebagai alat bukti otentik serta bahan untuk perencanaan, juga sebagai bukti kinerja organisasi dan aparaturnya, bukti pertanggungjawaban kegiatan pemerintahan dan pembangunan, sehingga evaluasi kinerja dalam suatu perangkat daerah dapat dilaksanakan lebih efisien, efektif produktif, transparan dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan meraih penghargaan Pengawasan Kearsipan selama 3 tahun terakhir (2023-2025) dengan predikat **AA (Sangat Memuaskan)** dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Pencapaian ini mencerminkan tata kelola arsip yang sangat baik.

Penyelenggaraan urusan Kearsipan dilaksanakan melalui pengelolaan arsip secara baku serta penyelamatan arsip/dokumen yang mempunyai nilai guna. Beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam pembangunan urusan kearsipan yaitu alih media arsip menjadi arsip digital, pengelolaan arsip di masing-masing perangkat daerah serta ketersediaan SDM arsiparis dan pengelola arsip yang memadai. Selain itu sarana dan prasarana dalam penyimpanan arsip juga harus menjadi perhatian. Persentase pengelolaan arsip secara baku meningkat dari tahun

2024 sebesar 66,00 persen meningkat menjadi 72,00 persen di tahun 2025.. Persentase Jumlah arsip yang diselamatkan tahun 2024 sebesar 96,00 persen naik di tahun 2025 sebesar 100,00 persen. Persentase pengelolaan arsip secara baku mengalami kenaikan dari Tahun 2024 sebesar 55,56 persen menjadi 72 persen di Tahun 2025. Sedangkan untuk indikator Jumlah penyelamatan arsip tekstual pada tahun 2024 sebanyak 22.808 berkas meningkat sebesar 42.184 berkas di tahun 2025. Jumlah penyelamatan arsip tekstual juga meningkat dari Tahun 2024 sebesar 260 berkas menjadi 1.066 berkas di tahun 2025. Capaian kinerja kearsipan selama Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.129.
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1.	**Nilai Pengawasan Kearsipan**	**A**	**A**	**AA**	**AA**	**AA**
2.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	100,00	100,00	100,00	66,00	72,00
3.	Persentase Jumlah arsip yang diselamatkan (%)	26,70	36,85	12,67	96,00	100,00
4.	Persentase pengelolaan arsip secara baku (%)	55,56	74,30	100,00	66,00	72,00
5.	Jumlah arsip tekstual permanen (berkas)	22.808	26.248	28.556	28.826	42.184
6.	Jumlah penyelamatan arsip tekstual (berkas)	2.840	3.440	2.318	260	1.066

Sumber : DINAS ARPUS Kab. Pekalongan, 2026

3). Urusan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan klasifikasi lapangan usaha BPS, nilai PDRB sub sektor perikanan Kabupaten pekalongandibentuk oleh dua aktivitas utama yaitu Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya sebesar 0,71% di Tahun 2025 naik dari Tahun 2024 sebesar 0,67%. Pertumbuhan produksi perikanan tangkap Tahun 2025 sebesar 14,53% relatif turun dari Tahun 2024 sebesar 24,00%. Sedangkan persentase pertumbuhan produksi perikanan budidaya naik dari sebesar 1,71% di Tahun 2024 menjadi 2,85% di Tahun 2025. Rata-rata pendapatan nelayan menunjukkan adanya peningkatan dari sebesar Rp 2.255.958 pada tahun 2024 menjadi Rp 2.375.000 di tahun 2025, sedangkan Rata-rata Pendapatan Pembudidaya Ikan meningkat dari sebesar Rp 2.309.000 di tahun 2024 menjadi Rp 2.360.000 di tahun 2025. Hal ini berbanding lurus dengan tingkat konsumsi ikan di masyarakat sebesar 33,56 kg/kap/tahun di Tahun 2025 yang meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 32,87 kg/kap/tahun. Secara rinci capaian kinerja urusan kelautan dan perikanan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.130.
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Rasio PDRB ADHK Sub Sektor Perikanan	%	0,67	0,67	0,66	0,67	0,71
2.	Persentase pertumbuhan produksi perikanan tangkap	-	1,44	-24,62	26,69	24,00	14,53

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
3.	Persentase pertumbuhan produksi perikanan budidaya	-	1,50	1,69	1,64	1,71	2,85
4.	Perikanan Tangkap (Ikan Laut)	ton	4.797,43	3.534,27	4.546,10	5.619,17	6.901,493
	Perikanan Budidaya						
	a. Tambak	ton	6.813,64	6.929,80	6.996,37	7.043,68	7.962,076
5.	b. Kolam	ton	8.772,25	8.921,37	9.067,77	9.223,14	1.523,610
6.	Rata-rata Pendapatan Nelayan	Rp/bulan	1.456.256	1.916.600	2.298.400	2.255.958	2.375.000
7.	Rata-rata Pendapatan Pembudidaya Ikan	Rp/bulan	2.162.785	2.278.540	2.281.630	2.309.000	2.360.000
8.	Konsumsi Ikan Masyarakat	kg/kap/ th	24,54	27,84	30,91	32,87	19,72*

Sumber : DINLUTKAN Kabupaten Pekalongan, 2026 *) surat dari Ditjen PDSPKP tanggal 22 Juli 2025

Potensi Perikanan budidaya, luas lahan tambak yang diusahakan pada tahun 2025 seluas 636,80 Ha turun dari tahun 2024 sebesar 826,60 Ha. Sedangkan jumlah pembudidaya tambak tahun 2025 sebesar 847 orang, menurun dari tahun 2024 sebesar 876 orang. Produksi tambak pada tahun 2025 mencapai 77.962,076 ton meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 7.740,117 ton.

Sedangkan untuk budidaya kolam, lahan yang digunakan pada tahun 2025 seluas 86,78 Ha dengan jumlah produksi sebesar 1.523,610 ton, lebih banyak dari tahun 2024 yang mencapai 86,78 ha dengan produksi sebanyak 1.483,022 ton. Jumlah pembudidaya kolam di tahun 2024 sebesar 1.747 orang sama dengan capaian tahun 2025. Sementara itu Produksi Benih BBI meningkat dari tahun 2024 sebesar 1.534.132 ekor menjadi 1.599.000 ekor di tahun 2025. Secara rinci perkembangan perikanan budidaya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.131.
Perkembangan Perikanan Budidaya
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Luas Lahan Tambak	Ha	589,10	589,10	826,60	826,60	636,80
2.	Jumlah Pembudidaya Tambak	Orang	876	876	876	876	847
3.	Produksi Tambak	Ton	6.813,64	6.929,80	6.996,37	7.740,117	7.962,076
4.	Luas Lahan Kolam	Ha	74,63	75,12	86,78	86,78	86,78
5.	Produksi Kolam	Ton	1.409,92	1.432,867	1.457,523	1.483,022	1.523,610
6.	Jumlah Pembudidaya Kolam	Orang	1.747	1.747	1.747	1.747	1.747
7.	Produksi Benih BBI	Ekor	1.311.032	1.374.106	1.445.452	1.534.132	1.599.000

Sumber : DINLUTKAN Kabupaten Pekalongan, 2026

Potensi terkait Produksi perikanan tangkap pada tahun 2025 sebesar 6.901,493 ton meningkat dibanding tahun 2024 sebesar 5.619,17 ton. Jumlah produksi ikan di TPI Wonokerto dan TPI Jambean pada tahun 2025 sebesar 6.689,66 ton naik dibandingkan tahun 2024 sebanyak 5.619,17 ton. Nilai raman TPI Wonokerto dan TPI Jambean tahun 2025 mencapai Rp. 30.472.719 naik dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp. 24.485.601. Secara rinci perkembangan perikanan tangkap dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.132.
Perkembangan Perikanan Tangkap
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No.	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	4.797,43	3.534,27	4.546,10	5.619,17	6.901,493
2.	Produksi TPI Wonokerto	Ton	1.879,51	533,22	1.398,47	2.784,76	4.763,951
3.	Nilai Raman Lelang TPI Wonokerto	Ribu (Rp)	6.207.252	1.748.405	5.482.100	11.246.322	21.282.812
4.	Produksi TPI Jambean	Ton	2.917,92	3.001,06	3.147,64	2.834,41	1.925,709
5.	Nilai Raman Lelang TPI Jambean	Ribu (Rp)	8.760.393	9.000.978	9.446.428	13.239.279	9.189.907

Sumber : DINLUTKAN Kabupaten Pekalongan, 2024

2) Pariwisata

Sektor pariwisata memiliki pengaruh besar bagi perekonomian di Kabupaten Pekalongan terutama dalam menggerakkan roda perekonomian karena peranannya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menciptakan lapangan usaha, kesempatan kerja, pendapatan negara serta pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pengembangan Objek Daya Tarik Wisata saat ini sangat penting. Empat pilar utama dalam pengembangan kepariwisataan meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata untuk senantiasa diupayakan penanganan yang terpadu lintas sektor, sehingga dapat menggambarkan satu bentuk daya tarik yang sinergi dalam menarik wisata, tidak terkecuali budaya/seni tradisi yang masih sangat membutuhkan sentuhan dan dukungan prasarana lebih lanjut.

Selain hal tersebut di atas, Pemerintah Pekalongan juga berfokus pada pengembangan **23 (dua puluh tiga) desa wisata** dengan potensi alam, budaya, dan agrowisata, terutama di wilayah Petungkriyono dan Paninggaran. Desa Wisata tersebut terdiri dari :

(1). Desa Wisata Bedagung Kecamatan Paninggaran
(2). Desa Wisata Domiyang Kecamatan Paninggaran
(3). Desa Wisata Kaliboja Kecamatan Paninggaran
(4). Desa Wisata Kaliombo Kecamatan Paninggaran
(5). Desa Wisata Krandegan Kecamatan Paninggaran
(6). Desa Wisata Lambanggelun Kecamatan Paninggaran
(7). Desa Wisata Lumeneng Kecamatan Paninggaran
(8). Desa Wisata Notogiwang Kecamatan Paninggaran
(9). Desa Wisata Paninggaran Kecamatan Paninggaran
(10). Desa Wisata Sawangan Kecamatan Paninggaran
(11). Desa Wisata Tenogo Kecamatan Paninggaran
(12). Desa Wisata Werdi Kecamatan Paninggaran
(13). Desa Wisata Winduaji Kecamatan Paninggaran
(14). Desa Wisata Botosari Kecamatan Paninggaran
(15). Desa Wisata Tanggeran Kecamatan Paninggaran
(16). Desa Wisata Tlogopakis Kecamatan Petungkriyono
(17). Desa Wisata Kasimpar Kecamatan Petungkriyono
(18). Desa Wisata Kayupuring Kecamatan Petungkriyono
(19). Desa Wisata Tlogohendro Kecamatan Petungkriyono

(20). Desa Wisata Kauman Kecamatan Wiradesa
(21). Desa Wisata Lemahabang Kecamatan Doro
(22). Desa Wisata Lolong Kecamatan Karanganyar
(23). Desa Wisata Mulyorejo Kecamatan Tirto

Tujuan utama pengembangan desa wisata adalah meningkatkan perekonomian desa melalui penciptaan lapangan kerja baru, melestarikan adat budaya dan lingkungan lokal, serta memberdayakan masyarakat setempat sebagai pelaku utama pariwisata. Pengembangan ini juga bertujuan menciptakan destinasi berkelanjutan yang memadukan potensi alam dan budaya

Capaian kinerja Urusan Pariwisata dapat dilihat dari Kontribusi PDRB Sektor Akomodasi Makan dan Minum ADHB Tahun 2021-2025 terus menunjukkan peningkatan dari 1,28 triliun di Tahun 2021 meningkat menjadi 2,13 triliun di Tahun 2025. Sedangkan Kontribusi PDRB Akomodasi Makan dan Minum ADHK juga menunjukkan peningkatan dari 934 miliar di Tahun 2021 menjadi 1,45 triliun di Tahun 2025. Selanjutnya Perkembangan pariwisata di Kabupaten Pekalongan selama kurun waktu tahun 2021-2025 cenderung mengalami penurunan. Jumlah pengunjung dari 3 (tiga) Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan yaitu Objek Wisata Linggo Asri, Objek Wisata Pantai Depok dan Bumi Perkemahan Linggo Asri juga terus menurun dari 5 tahun terakhir dari 95.427 orang di Tahun 2021 menjadi 49.843 orang di Tahun 2025. Jika dilihat dari Nilai pendapatan sektor pariwisata menurun dari tahun 2021 sebesar Rp 701,73 juta di tahun 2024 menjadi sebesar Rp 508,29 juta di tahun 2025. Secara rinci, capaian kinerja urusan pariwisata Kabupaten Pekalongan tahun 2021-2025 bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.133.
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No.	Indikator (Ha)	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kontribusi PDRB Akomodasi Makan dan Minum ADHB (%)	5,34	5,68	5,92	6,27	6,52
2.	Kontribusi PDRB Akomodasi Makan dan Minum ADHK (%)	5,62	6,04	6,43	6,84	7,12
3.	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	95.427	110.898	91.221	73.611	49.843
4.	Nilai pendapatan sektor pariwisata (Rp. /tahun)	701.731.750	967.476.500	824.453.750	710.737.750	508.286.250
5.	Jumlah Daya Tarik Wisata (DTW)	40	40	40	40	40
6.	Jumlah Desa Wisata	-	-	15	16	23

Sumber : DINPORAPAR Kab.Pekalongan, 2026

3) Pertanian

Sektor pertanian menjadi sektor yang memberikan kontribusi cukup besar dalam PDRB Kabupaten Pekalongan. Rasio PDRB ADHB Sub Sektor Pertanian menurun dari sebesar 15,03 persen pada tahun 2024 menjadi 14,93 persen pada tahun 2025. Sedangkan Rasio PDRB ADHK Sub Sektor Pertanian menurun dari sebesar 12,52 persen pada tahun 2024 menjadi 12,41 persen pada tahun 2025.

Produktivitas tanaman pangan utama meliputi padi, jagung dan kedelai menunjukkan peningkatan, namun relatif kecil. Pada tahun 2025 produktivitas padi mencapai 52,19 kuintal per hektar dan jagung mencapai 52,00 kuintal per hektar; dan produktivitas kedelai sebesar 13,33 kuintal per hektar. Produksi komoditas hortikultura menunjukkan kecenderungan meningkat pada jenis komoditas: durian, pisang, bawang daun dan alpukat. Sementara yang lain cenderung menurun.

Populasi produksi komoditas peternakan di Kabupaten Pekalongan rata-rata menunjukkan peningkatan selama kurun waktu tahun 2021-2025 pada semua jenis komoditas. Populasi sapi potong pada tahun 2025 mencapai 13.865 ekor, kerbau sebanyak 757 ekor, kambing sebanyak 51.725 ekor, domba sebanyak 20.880 ekor, ayam broiler sebanyak 12.770.317 ekor, ayam buras/kampung sebanyak 452.214 ekor dan itik sebanyak 189.871 ekor. Untuk produksi daging meningkat dari sebesar 8.970.055 kg pada tahun 2021 menjadi 9.830.117 kg pada tahun 2025. Sementara itu untuk produksi telur, susu dan kulit mengalami peningkatan, pada tahun 2025 produksi telur mencapai 5.898.318 kg, produksi susu sebanyak 318.108 liter dan produksi kulit sebanyak 23.843 lembar. Sedangkan Jumlah Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Hewan yang tersertifikasi halal sampai dengan tahun 2025 sebanyak 2 unit di Kecamatan Wiradesa dan Kedungwuni. Secara rinci perkembangan kinerja urusan pertanian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.134.
Capaian Kinerja Urusan Pertanian
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
A.	**PERTANIAN**						
1.	Rasio PDRB ADHB Sub Sektor Pertanian	Persen	15,65	14,99	14,99	15,03	14,93
2.	Rasio PDRB ADHK 2010 Sub Sektor Pertanian	Persen	13 ,90	13,30	12,97	12,52	12,41
3.	Persentase produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Persen	53,74	52,68	52,85	53,32	52,18
3.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar						
	a. Padi	kuintal/ha	53,12	52,68	52,92	53,29	52,19
	b. Jagung	kuintal/ha	48,19	53,67	51,29	53,75	52,00
	c. Kedelai	kuintal/ha	12,14	13,33	-	-	-
3.	Produktivitas komoditas hortikultura						
	a. Durian	Kuintal	106.221	1.659	221.934	405.728	262.078
	b. Mangga	Kuintal	125.451	124.739	153.129	79.211	92.412
	c. Rambutan	Kuintal	224.500	9.824	28.622	28.536	40.482
	d. Pisang	Kuintal	57.210	226.144	173.943	234.540	245.522
	e. Kentang	Kuintal	16.021	9.824	135.805	126.051	64.733
	f. Bawang Daun	Kuintal	5.141	179	24.171	30.871	18.017
	g. Alpukat	Kuintal	4.784	226.144	8.398	10.065	15.424
	h. Manggis	Kuintal	8.512	7.925	6.851	6.321	4.983
	i. Cabe	Kuintal	12.412	868	13.430	9.093	13.510
	j. Jambu Air	Kuintal	12.875	12.201	11.627	4.174	3.484
B.	**PERKEBUNAN**						
	a. Kelapa	Ton	1.303,00	3.417,72	3.949,37	12.150	11.716,16
	b. Tebu	Kuintal	958.254	35.382,96	2.098,75	24.168	35.761,78

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
	c. Cengkeh	Ton	387,25	502,41	483,20	389,38	441,12
	d. Kopi	Ton	625	491,42	563,40	556,11	556,11
C.	**PETERNAKAN**						
1.	Populasi Produksi Komoditas Peternakan Utama						
	a. Sapi potong	Ekor	22.705	20.434	13.697	13.823	13.865
	b. Kerbau	Ekor	2.906	2.877	747	752	757
	c. Kambing	Ekor	51.290	51.436	51.490	52.054	51.725
	d. Domba	Ekor	31.495	31.507	31.512	20.827	20.880
	e. Ayam broiler	Ekor	6.084.500	6.681.950	6.940.898	12.260.200	12.770.317
	f. Ayam Buras/Kampung	Ekor	1.287.470	1.288.406	1.288.451	216.215	452.214
	g. Itik	Ekor	189.725	189.785	189.790	189.790	189.871
2.	Produksi Peternakan						
	a. Daging	Kg	8.970.055	9.150.519	9.501.785	9.640.650	9.830.117
	b. Telur	Kg	5.555.093	5.409.412	5.689.975	5.670.450	5.898.318
	c. Susu	Liter	365.094	365.098	226.151	298.837	318.108
	d. Kulit	Lembar	16.680	17.551	19.093	19.121	19.503
3	Jumlah RPH yang tersertifikasi halal	Unit	2	2	2	2	2

Sumber : DKPP Kabupaten Pekalongan, 2026

Selain data di atas, data Jaringan irigasi tersier pertanian dimana merupakan jaringan saluran air yang berfungsi untuk mendistribusikan air dari saluran sekunder ke petak-petak sawah di Kabupaten Pekalongan sampai dengan Tahun 2025 dengan **Total Panjang Jaringan Irigasi Tersier** sebesar 1.555.202 meter dengan rincian **kondisi baik** sebesar 331.858 meter (21,34%); **kondisi rusak** sepanjang **318.000 meter (20,45%)** dan non permanen/tanah sepanjang **905.344 meter (58,21%)**.

4) Perdagangan

Hasil capaian kinerja pelaksanaan Urusan Perdagangan di Kabupaten Pekalongan selama kurun waktu tahun 2018-2022 dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya tingginya sumbangan dari sub sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB maupun ADHK. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Atas Dasar Berlaku menurun dari tahun 2024 sebesar 13,39 persen menjadi 13,27 persen di tahun 2025. Sedangkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan juga menurun dari tahun 2024 sebesar 15,01 persen menjadi 14,79 persen di tahun 2025.

Perdagangan Export Import merupakan salah satu pemasukan APBN / APBD di Kabupaten Pekalongan. Jumlah nilai Ekspor Kabupaten Pekalongan dari tahun 2021-2025 fluktuatif. Pada tahun 2024 nilai ekspor di Kabupaten Pekalongan mencapai US$ 561.384miliar. Tahun 2022 adalah tahun dimana nilai ekspor berada di titik tertinggi selama lima tahun terakhir yaitu sebesar US$ 569,28 miliar. Rata-rata nilai ekspor Kabupaten Pekalongan selama 2021-2025 per tahunnya adalah US$ 351,55 miliar. Secara rinci capaian kinerja urusan perdagangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.135.
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB (%)	13,63	13,77	13,76	13,39	13,27

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
2.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHK (%)	15,20	15,30	15,32	15,01	14,79
3.	Nilai Ekspor Perdagangan (ribu US$)	465.428	569.282	463.431	561.384	31.012.122

Sumber : DINPERINDAG; BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026

5) Perindustrian

Penyelenggaraan pemerintahan urusan perindustrian dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan 3 sub urusan, yaitu Perencanaan Pembangunan Industri, Perizinan, dan Sistem Informasi Industri Nasional. Kewenangan Kabupaten dari 3 sub urusan tersebut sebagai berikut.

1) Perencanaan Pembangunan Industri
   - Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten/kota.
2) Perizinan
   - Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah.
   - Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah.
   - Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.
3) Sistem Informasi Industri Nasional
   - Penyampaian laporan informasi industri untuk: IUI Kecil dan Izin Perluasannya; IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.

Capaian penyelenggaraan pemerintahan urusan perindustrian di Kabupaten Pekalongan ditunjukkan dengan 4 indikator. Indikator tersebut, yaitu (1) Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku; (2) Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan; (3) Tingkat pertumbuhan industri kecil dan menengah dan (4) Bidang Industri terdiri dari (a) Jumlah Usaha Industri; (b) Jumlah Tenaga Kerja; (c) Jumlah Investasi; (d) Nilai Produksi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkatan regional (kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah/kabupaten untuk menciptakan output (nilai tambah) pada waktu tertentu. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Lapangan usaha tersebut salah satunya kategori industri pengolahan.

Sektor industri pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambahan atau penggalian. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Pekalongan tahun 2025 sebesar 29,65 persen, angka ini sedikit menurun dari tahun 2024 sebesar 29,65 persen. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2025 mencapai sebesar 29,45 persen. Angka ini lebih besar dibandingkan tahun 2024 sebesar 29,38 persen. Sektor industri pengolahan merupakan peranan terbesar dalam pembentukan PDRB ADHB Kabupaten Pekalongan. Adapun indikator capaian pelayanan urusan perindustrian Kabupaten Pekalongan tahun 2021-2025 seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.136.
Indikator Capaian Pelayanan Urusan Perindustrian
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kontribusi sektor industri pengolahan PDRB ADHB	30,96	30,77	30,09	29,62	29,65
2.	Kontribusi sektor industri pengolahan PDRB ADHK	30,90	30,61	29,90	29,38	29,45

Sumber : BPS Kab. Pekalongan; Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pekalongan; 2026

Jumlah usaha industri di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2023 terdiri dari Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka dan Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan tercatat sebanyak 13.559 usaha, naik dibandingkan tahun 2019 sebanyak 13.336 usaha. Adapun jumlah usaha industri menurut kelompok industri Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.137.
Jumlah Perusahaan/Unit Usaha Menurut Kelompok Industri
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka					
	a. Skala Besar	10	11	11	11	11
	b. Skala Menengah	241	241	241	241	241
	c. Skala Kecil	6.341	6.367	6.378	6.388	6.397
	d. Skala Rumah Tangga	-	-	-	-	-
2	Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan					
	a. Skala Besar	-	-	-	-	-
	b. Skala Menengah	6	6	6	6	6
	c. Skala Kecil	6.867	6.900	6.923	6.954	6.985
	d. Skala Rumah Tangga	-	-	-	-	-
	Jumlah					
	a. Skala Besar (unit)	10	11	11	11	11
	b. Skala Menengah	247	247	247	247	247
	c. Skala Kecil	13.208	13.267	13.301	13.342	13.382
	d. Skala Rumah Tangga	-	-	-		-
	Jumlah Total	**13.465**	**13.525**	**13.559**	**13.600**	**13.640**

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pekalongan; 2026

Usaha Industri Kabupaten Pekalongan tahun 2025 sebanyak 13.640 usaha mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 63.389 orang dengan proporsi antara tenaga kerja pada usaha industri skala besar sebanyak 13.976 orang, skala menengah sebanyak 7.916 orang dan skala kecil sebanyak 41.497 orang. Tenaga kerja di usaha industri biasanya merupakan pekerja dibayar dan pekerja tidak dibayar. Tenaga kerja tak dibayar ini termasuk pemilik atau pengusaha itu sendiri dan pekerja keluarga. Pekerja anak dan pekerja lansia yang bekerja di usaha industri sebagian besar merupakan pekerja yang tidak dibayar yang biasanya merupakan pekerja keluarga yang sifatnya hanya membantu dalam kegiatan produksi suatu usaha.

Tenaga kerja Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka sebagian besar merupakan pekerja dibayar, selebihnya merupakan pekerja tidak dibayar. Sedangkan tenaga kerja Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan relatif lebih besar merupakan pekerja tidak dibayar. Usaha Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan paling banyak menjadi pilihan tenaga kerja perempuan, karena

selain membutuhkan keterampilan seorang wanita, usaha industri tersebut juga dapat menjadi pekerjaan sampingan dari mengurus rumah tangga. Tenaga kerja perempuan dalam usaha industri biasanya diasosiasikan dengan pekerjaan domestik di dalam rumah tangga, sedangkan tenaga kerja laki-laki diasosiasikan dengan tugas sebagai pencari nafkah utama di luar rumah. Secara rinci tenaga kerja menurut kelompok industri di Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.138.
Jumlah Tenaga Kerja Menurut Kelompok Industri
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka					
	a. Skala Besar	13.976	13.976	13.976	13.976	13.976
	b. Skala Menengah	7.747	7.747	7.747	7.747	7.747
	c. Skala Kecil	26.784	26.886	26.969	27.094	27.171
	d. Skala Rumah Tangga	-	-	-	-	-
2	Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan					
	a. Skala Besar	-	-	-	-	-
	b. Skala Menengah	169	169	169	169	169
	c. Skala Kecil	13.993	14.053	14.158	14.238	14.326
	d. Skala Rumah Tangga	-	-	-	-	-
	Jumlah					
	a. Skala Besar (orang)	13.976	13.976	13.976	13.976	13.976
	b. Skala Menengah (orang)	7.916	7.916	7.916	7.916	7.916
	c. Skala Kecil (orang)	40.777	40.939	41.127	41.332	41.497
	d. Skala Rumah Tangga(orang)	-	-	-		-
	Jumlah Total (orang)	**62.669**	**62.831**	**63.019**	**63.214**	**63.389**

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pekalongan; 2026

6) Transmigrasi

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 3 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Transmigrasi di Pemerintah Kabupaten/ Kota. Ketiga sub ursan tersebut adalah: 1) Perencanaan Kawasan Transmigrasi; 2) Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan 3) Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Capaian kinerja urusan Transmigrasi diukur berdasarkan 3 indikator yang telah ditetapkan, yaitu : 1) Persentase pelaksanaan pengiriman calon transmigran ke lokasi transmigrasi; 2) Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi; 3) Jumlah calon transmigran.

Minat masyarakat dalam mengikuti program transmigrasi masih cukup tinggi, dengan harapan dapat mengubah hidup menjadi lebih baik. Akan tetapi jumlah kuota transmigran setiap daerah kuotanya ditentukan oleh Pemerintah Pusat melalui APBN dan Pemerintah Provinsi melalui APBD Provinsi yang nantinya oleh Provinsi kuota tersebut akan dibagi ke semua daerah. Pada tahun 2025 jumlah transmigran yang diberangkatkan sebanyak 1 KK dari total 66 KK calon transmigran.

Faktor penghambat utama pelaksanaan transmigrasi meliputi ikatan emosional penduduk terhadap kampung halaman, minimnya sarana prasarana di lokasi baru, dan konflik sosial-ekonomi dengan warga setempat. Selain itu, kurangnya sosialisasi, keraguan lahan, dan ketidakcocokan lokasi/lahan yang tidak subur turut menyebabkan transmigran tidak betah.

Selengkapnya capaian kinerja urusan Transmigrasi tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.139.
Indikator Capaian Pelayanan Urusan Transmigrasi
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase pelaksanaan pengiriman calon transmigran ke lokasi transmigrasi (%)	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2	Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi (KK)	1	1	0	0	1
3	Jumlah calon transmigran (KK)	1	1	0	0	6

Sumber: DINKOP UKM DAN NAKER Kab. Pekalongan, 2026

4). Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

a). Perencanaan

Pada tahun 2025, Kabupaten Pekalongan berhasil mencatatkan capaian yang **CUKUP BAIK** dalam **Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah**, dengan total nilai sebesar 78,602. Capaian ini lebih baik dari Tahun 2024 sebesar 74,602. Penilaian IPPD berdasarkan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran IPPN. Pengukuran ini bertujuan untuk menilai sejauh mana dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJMD, RKPD, Renstra OPD, dan Renja OPD, telah disusun secara selaras, berkualitas, dan terintegrasi.

Penyusunan nilai IPPD ini dimaksudkan untuk melakukan analisis dan penghitungan capaian Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025, sehingga dapat mencerminkan tingkat keberhasilan perencanaan pembangunan daerah. Nilai tersebut ditopang oleh aspek sinergi, kualitas perencanaan, serta keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja. Capaian ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan telah berada pada kategori yang cukup baik dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

b). Keuangan

Kinerja fungsi Penunjang Keuangan selama kurun waktu tahun 2021-2025 dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah alat ukur yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri melalui Permendagri No 19 Tahun 2020 untuk menilai kualitas tata kelola keuangan Pemda (efektif, efisien, transparan, akuntabel). IPKD terdiri dari 6 dimensi: perencanaan, kualitas belanja, transparansi, penyerapan, kondisi keuangan, dan opini BPK. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2025 sebesar 67,68 lebih baik dari Tahun 2027 sebesar 73,27.

Sedangkan capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama kurun waktu 2021-2025. Opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan Kabupaten Pekalongan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Kinerja tersebut didukung ketepatan waktu penetapan APBD yang selalu tepat waktu, dan ketepatan waktu perangkat daerah menyerahkan laporan keuangan yang selalu tepat waktu. Kinerja pelayanan bidang keuangan terlihat dari rasio PAD terhadap total penerimaan daerah tahun 2025 sebesar 25,87 persen lebih besar dari tahun 2024 sebesar 17,29 persen. Kemudian jumlah barang aset Daerah dari 4.490.289 unit di tahun 2021 menjadi 4.794.287 unit di tahun 2025. Hal ini diikuti dengan nilai aset daerah yang mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar Rp. 4,45 triliun naik menjadi Rp 5,41 triliun di tahun 2025. Secara rinci kinerja terkait keuangan daerah Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.140.
Capaian Kinerja Fungsi Keuangan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	-	-	-	73,27	67,68
2.	Persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD dan pelaporan keuangan daerah	100,00	100,00	100,00	95,83	100,00
3.	Rasio PAD terhadap total penerimaan daerah	16,68	16,53	16,11	17,29	25,87
4.	Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	Jumlah barang Aset Daerah (unit)	4.490.289	4.586.469	4.783.201	4.791.514	4.794.287
6.	Jumlah Nilai Harga Aset Daerah (Rp. juta)	4.452.260	4.728.468	4.948.240	5.369.480	5.414.587

Sumber : BPKD Kab. Pekalongan, 2026

c). Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah ASN sampai dengan 31 Desember 2025 adalah 6.419 orang. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 8.891 orang. Nominatif Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kab. Pekalongan Berdasarkan Golongan dan Pendidikan dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2.141.
Nominatif Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kab. Pekalongan
Berdasarkan Golongan Per 31 Desember 2025

No	GOL. RUANG	PNS		TOTAL
		PRIA	WANITA	
1	I/a	0	0	0
2	I/b	0	0	0
3	I/c	2	0	2
4	I/d	14	2	16
5	II/a	38	3	41
6	II/b	68	3	71
7	II/c	163	86	249
8	II/d	341	128	469
9	III/a	461	505	966
10	III/b	480	570	1.050

No	GOL. RUANG	PNS		TOTAL
		PRIA	WANITA	
11	III/c	329	624	953
12	III/d	502	1.066	1.568
13	IV/a	217	228	445
14	IV/b	275	239	514
15	IV/c	31	39	70
16	IV/d	0	1	1
17	IV/e	1	3	4
	Jumlah	**2.922**	**3.497**	
			2025	**6.419**
			2024	8.891
			2023	8.864
			2022	8.882
			2021	8.047

Sumber : BKPSDM Kabupaten Pekalongan, 2026

Tabel 2.142.
Nominatif Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Kabupaten Pekalongan Berdasarkan Pendidikan
per 31 Desember 2025

No	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
1.	D I	2	4	6
2.	D II	23	13	36
3.	D III	223	661	884
4.	D IV	28	142	170
5.	S1	1.578	2.324	3.902
6.	S2	293	215	508
7.	S3	-	1	1
8.	SD	23	2	25
9.	SLTA	667	129	796
10.	SLTP	85	6	91
	Jumlah Total	**2.922**	**3.497**	**6.419**

Sumber : BKPSDM Kabupaten Pekalongan; 2026

Kinerja Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat dari capaian Indeks Sistem Merit yang mengalami kenaikan dari 0,65 di Tahun 2024 menjadi 0,66 di Tahun 2025. Sistem Merit menurut disiplin ilmu merupakan suatu sistem manajemen kepegawaian yang menekankan pertimbangan dasar kompetensi bagi calon yang diangkat, ditempatkan, dipromosi dan dipensiunkan sesuai UU yang berlaku. Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Capaian Nilai Sistem Merit juga mengalami kenaikan dari 262,00 (baik) di Tahun 2023 menjadi 272,00 (baik) di Tahun 2025. Indeks Profesionalitas ASN juga mengalami kenaikan dari 75,25 di Tahun 2024 menjadi 97,45 di Tahun 2025. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.143.
Capaian Kinerja Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Indeks Sistem Merit	**0,47**	**0,63**	**0,64**	**0,65**	**0.66**
2.	Nilai Sistem Merit	**191,50** (Kurang)	**258.50** (Baik)	**262,00** (baik)	**266,50** (Baik)	**272,00** (Baik)
3.	Indeks Profesionalitas ASN	**34,51** (rendah)	**63.86** (rendah)	**69,60** (rendah)	**75,25** (Sedang)	**79.45** (Sedang)

Sumber : BKPSDM Kabupaten Pekalongan, 2025

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan melalui Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pekalongan telah secara konsisten dan komitmen penuh menerapkan sistem merit secara baik dan adil. Bahkan hal itu diakui dan mendapatkan apresiasi kategori baik dalam acara Anugerah Meritokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.Anugerah Meritokrasi merupakan acara penghargaan yang diselenggarakan untuk memberikan apresiasi kepada instansi pemerintah yang telah menerapkan sistem merit secara baik dan adil.

d). Penelitian dan Pengembangan

Secara khusus, penelitian dan pengembangan yang disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah memiliki fungsi dalam melakukan penilaian terhadap inovasi Daerah. Pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam sistem yang mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan sistem inovasi. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, dan telah ditindaklanjuti Pemerintah Jawa Tengah melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan regulasi dalam pengembangan inovasi di daerah. Inovasi memiliki peranan penting dalam mendukung program pembangunan berkelanjutan, terutama tuntutan inovasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan. Karena itu perlu adanya dorongan dan inisiatif dari Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan inovasi sebagai acuan/*roadmap* sistem inovasi daerah.

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pekalongan pada Tahun 2021 sebesar **52,05 (inovatif)**, Tahun 2022 sebesar **58,19 (inovatif)**, Tahun 2023 sebesar **52,86 (inovatif)**, Tahun 2024 sebesar **46,66 (inovatif)** dan Tahun 2025 sebesar **66,35 (sangat Inovatif)**. Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025 merupakan laporan informasi data inovasi daerah yang telah divalidasi dan dilakukan *quality control* oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri dengan melibatkan Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPPM) *Scientific Modelling Application Research and Training for City-Centered Innovation and Technology (SMART CITY*) Universitas Indonesia dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.

Kapabilitas inovasi menjadi ukuran untuk menggambarkan kemampuan dalam mengembangkan produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan melalui penerapan proses-proses secara tepat serta cepat dalam menanggapi perubahan teknologi. **Kapabilitas Inovasi (Pilar 12)** naik dari 2,43 di Tahun 2024 menjadi 2,86 di Tahun 2025. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.144.
Indeks Inovasi Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 - 2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Inovasi Daerah	**52,05** (inovatif)	**58,19** (inovatif)	**52,86** (inovatif)	**46,66** (inovatif)	**66,35** (sangat Inovatif)
2	Kapabilitas Inovasi	-	-	**2,50**	**2,43**	**2,48**

Sumber : Kemendagri, 2026

e). Sekretariat Daerah

Kinerja Sekretariat Daerah di Kabupaten Pekalongan selama kurun waktu tahun 2021-2025 dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) adalah instrumen yang diluncurkan OJK bersama Bappenas dan Kemenko Perekonomian pada 6 Mei 2025 untuk mengukur tingkat akses, penggunaan, dan kualitas layanan keuangan di berbagai daerah. IKAD Tahun 2025 sebesar 3,84 sama dengan tahun 2024.

Sekretariat daerah Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan amanah Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah dengan menyelenggarakan kegiatan penilaian tingkat kematangan organisasi daerah (KOD) kepada 45 (empat puluh lima) Perangkat Daerah. Tingkat Kematangan Organisasi mengalami kenaikan dari 36,50 (sedang) di Tahun 2023 menjadi 38,66 (sedang) di Tahun 2024. Berdasarkan hasil pengolahan data koding penilaian tingkat kematangan seluruh Perangkat Daerah, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Perangkat Daerah telah memiliki tingkat kematangan organisasi pada level sedang, sehingga diperlukan upaya peningkatan kinerja pada aspek tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi melalui perbaikan sistem kerja pada 11 (sebelas) variabel yang digunakan sebagai instrumen penilaian kematangan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah Daerah.

Selain itu indikator pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kabupaten Pekalongan meliputi Capaian Predikat SAKIP, Nilai SAKIP, Kategori Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai Indeks RB. Secara keseluruhan, ukuran capaian kinerja pada urusan pemerintahan umum di Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.145.
Capaian Kinerja Fungsi Sekretariat Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	-	-	-	3,84	3,90
2.	Tingkat Kematangan Organisasi (Kategori)	29,07 (sedang)	29,48 (sedang)	36,50 (sedang)	38,66 (sedang)	-
3.	Predikat SAKIP	**B**	**B**	**B**	**B**	-
4.	Nilai SAKIP	64,18	64,33	64,89	65,69	-
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	**B** (81.25)	**B** (83,00)	**B** (83,44)	**B** (83,35)	-
6.	Indeks Pelayanan Publik	4,13	4,26	3,95	4,29	4,10

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan, 2026

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa,. Sedangkan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 yang dijadikan sebagai media pertanggungjawaban kinerja dan sebagai alat pengendalian manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilihat dari sisi kinerjanya masih berada di angka **65,69**, artinya masih berada pada peringkat **"B"**, lebih baik dibanding tahun 2023 yang mendapat predikat **"B"** dengan nilai **64,89**. Penilaian ini menunjukkan bahwa implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

f). Sekretariat DPRD

Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan selama Tahun 2021-2025 dilihat dari Tingkat capaian pelayanan administrasi dan dukungan pelayanan tugas dan fungsi DPRD Tahun 2025 mencapai 98,00 persen sama lebih rendah dari Tahun 2024 sebesar 100,00 persen. Selain itu Persentase layanan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD mencapai 96 persen lebih tinggi dari Tahun 2024 sebesar 91,00 persen. Kinerja Penunjang Penunjang Sekretariat DPRD dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.146.
Capaian Kinerja Fungsi Sekretariat DPRD
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Tingkat capaian pelayanan administrasi dan dukungan pelayanan tugas dan fungsi DPRD	91,00	95,00	95,00	100,00	98,00
2.	Persentase layanan dukungan penyelenggaraan Tugas dan fungsi DPRD	91,00	95,00	95,00	91,00	96,00

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Pekalongan, 2026

5). Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1) Inspektorat

Salah satu unsur dalam rangka menuju sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah adanya sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan dilakukan terhadap kebijakan maupun pelaksanaan program dan kegiatan di daerah, baik yang bersifat pelaksanaan tugas dan fungsi, berbagai program dan kegiatan pembangunan kemasyarakatan maupun kegiatan lainnya dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah. Fungsi pengawasan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Pekalongan antara lain dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Kabupaten Pekalongan.

Implementasi atas pelaksanaan pengawasan secara umum ditunjukkan dengan banyaknya temuan yang dihasilkan dari lembaga-lembaga pengawasan tersebut di atas. Berbagai temuan ini disampaikan kepada pemerintah daerah, baik yang sifatnya hanya rekomendasi maupun kondisi dan situasi yang harus ditindaklanjuti dengan perbaikan atau penyesuaian. Mendasarkan pada hasil temuan pada tahun 2022, pemerintah Kabupaten Pekalongan mampu menindaklanjuti hasil temuan BPK dengan baik dibandingkan dengan pelaksanaan tindak lanjut pada tahun-tahun sebelumnya.

Namun untuk hasil temuan yang ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Kabupaten Pekalongan implementasinya tidak seefektif terhadap tindak lanjut temuan dari BPK. Tindak lanjut temuan inspektorat baik provinsi maupun kabupaten cenderung efektivitasnya menurun di tahun 2022. Dalam hal ini, kepatuhan untuk menindaklanjuti hasil temuan lebih besar pada temuan BPK dibandingkan pada hasil temuan inspektorat.

Di sisi lain, hasil pengawasan memiliki fungsi memberikan umpan balik untuk perbaikan-perbaikan perencanaan dan pelaksanaan serta memberikan jaminan kualitas (*Quality Insurance*) agar tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat tercapai secara efisien, efektif dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dari sisi manajerial, pengawasan ini akan memberikan motivasi untuk melakukan perbaikan terhadap kinerja-kinerja yang tidak memenuhi target maupun tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Berbagai hasil temuan atas kegiatan pengawasan diharapkan menjadi perhatian bagi penyelenggara pemerintahan di daerah, sehingga dapat mendorong pada perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang lebih akuntabel.

Unsur pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diwujudkan dalam sebuah sistem dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik. Sistem pengendalian ini pencapaian keberhasilannya dikenal dengan Maturitas SPIP, yaitu tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Hasil penilaian terhadap Maturitas SPIP di Kabupaten Pekalongan sampai pada tahun 2022 masih ada pada level 3 atau tahap terdefinisi di mana kondisi tersebut kebijakan dan prosedur sistem pengendalian internal sudah diimplementasikan namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Ke depan masih perlu pengembangan strategi untuk meningkatkan kualitas maturitas SPIP pada level yang lebih baik lagi. Capaian indikator pengawasan di Kabupaten Pekalongan dalam lima tahun terakhir dapat dilihat melalui indikator yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.147.
Capaian Kinerja Fungsi Fungsi Pengawasan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Tingkat Maturitas SPIP	Level 2 (2,03)	Level 3 (3,183)	Level 3 (Penilaian Mandiri 4,122; Penjaminan Kualitas 3,006)	Level 3 (Penilaian Mandiri 3,62; Penjaminan Kualitas 3,00)	Level 3 (3,566)
2.	Kapabilitas APIP	Level 3 (3,00)	Level 3 (Penilaian Mandiri 3,18; Penjaminan Kualitas 3,09	Level 3 Penilaian Mandiri 3,27; Penjaminan Kualitas (3,09)	Level 3 Penilaian Mandiri 3,29; Penjaminan Kualitas (3,00)	

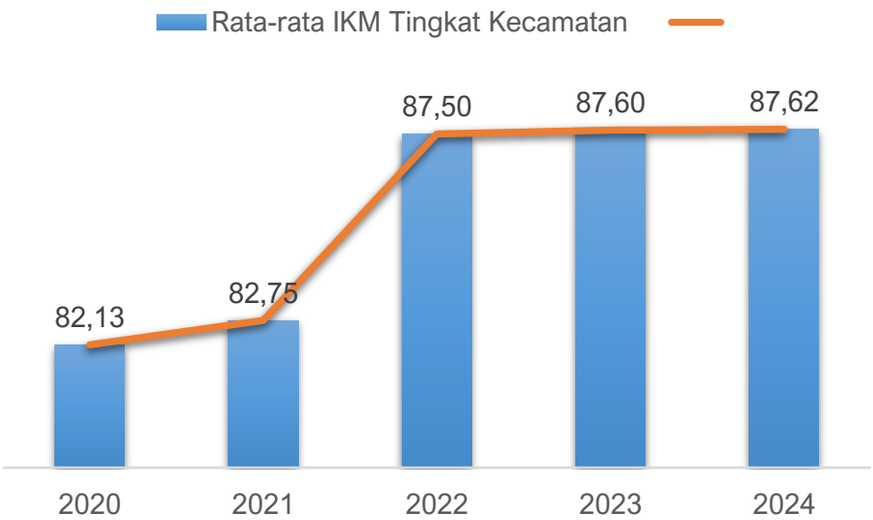
Sumber : INSPEKTORAT Kab. Pekalongan, 2026

6). Unsur Kewilayahan

1) Kecamatan

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu Kabupaten Pekalongan terdiri dari 19 kecamatan, 272 desa, 13 kelurahan, 1.058 dusun, 1.501 RW, dan 4.466 RT. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Setiap unsur di lingkungan Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kecamatan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik Daerah maupun Pusat.

Kinerja 19 (sembilan belas) Kecamatan di Kabupaten Pekalongan diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026 yaitu rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tingkat Kecamatan Tahun 2020-2024 sebagai berikut.



Gambar 2.109. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tingkat Kecamatan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

Dari gambar diatas, Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tingkat Kecamatan Kabupaten Pekalongan meningkat dari 82,13 persen di Tahun 2020 meningkat menjadi 87,62 persen di Tahun 2024. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang dilaksanakan secara berkala. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

7). Unsur Pemerintahan Umum

a). Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam rangka menjaga NKRI dan kesatuan dan persatuan bangsa serta rasa patriotisme dilakukan pembinaan Wawasan Kebangsaan dengan peserta perwakilan pelajar SMA/SMK di wilayah Kabupaten Pekalongan, serta pengiriman peserta Diklat Bela Negara bekerjasama dengan

KODIM Pekalongan. Selain itu juga menyelenggarakan Upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Kartini, Hari Pendidikan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional, Hari Lahir Pancasila, Hari Kesaktian Pancasila, Sumpah Pemuda, hari Pahlawan dan Hari Bela Negara.

Pembinaan politik daerah melalui kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) untuk menjaring informasi dari masyarakat dalam rangka mendukung kegiatan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA). Rapat koordinasi Kominda membahas masalah strategis intelijen terkait masalah politik, keamanan, ketertiban konflik konflik horizontal dan vertikal, konflik agama yang secara riil terjadi di masyarakat dan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah di Kabupaten Pekalongan. Koordinasi Intelijen Daerah (KOMINDA) yang membahas masalah strategis terkait hal hal yang berpotensi mengganggu keamanan. Hasil koordinasi digunakan sebagai laporan kepada Bupati selaku Kepala Daerah, Gubernur, Mendagri dan Menhankam untuk digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan.

Pembinaan politik daerah juga dilakukan melalui pembinaan bagi Ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kepemudaan (OKP) sehingga dengan pembinaan ini dapat memantau aktivitas organisasi kemasyarakatan dan mencegah adanya organisasi ekstrem yang dapat mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat serta mencegah timbulnya terorisme. Untuk menjaga keharmonisan, kerukunan dan saling toleransi, salah satu hal yang dilakukan adalah dengan adanya dialog antar Pemerintah dengan tokoh agama, tokoh masyarakat. Di dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pekalongan kegiatannya bukan hanya dialog dengan pemuka agama maupun tokoh agama untuk menyerap aspirasi, sosialisasi, sarasehan akan tetapi juga memberikan pelayanan administrasi berupa pemberian rekomendasi pendirian tempat ibadah selain itu juga melakukan verifikasi bangunan bukan tempat ibadah, tetapi dipergunakan untuk tempat ibadah.

B. Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2025

1. Evaluasi Capaian Terhadap Target Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan komponen utama dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Tanpa indikator yang jelas dan terukur, dokumen seperti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RENSTRA (Rencana Strategis Perangkat Daerah) akan kehilangan arah serta sulit diukur keberhasilannya. Dalam RPJMD Kabupaten Pekalongan Periode 2025–2029, penetapan indikator kinerja menjadi semakin penting mengingat arah pembangunan nasional telah bertransformasi menuju **perencanaan berbasis hasil (*result-based planning*)**, selaras dengan RPJPD Kabupaten Pekalongan 2025–2045 dan RPJMD Kabupaten Pekalongan 2025–2029**.**

Melalui evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk mengetahui seberapa besar capaian indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap target pembangunan daerah dapat dicapai secara **efisien, akuntabel, dan berkelanjutan**.
Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk menilai sejauh mana **tujuan dan sasaran pembangunan daerah** telah tercapai. indikator kinerja digunakan untuk:

1. Mengukur capaian hasil pembangunan daerah.
2. Menilai efektivitas program dan kegiatan perangkat daerah.
3. Menjadi dasar evaluasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Urusan Pemerintahan Absolut: dibuat dan dijalankan oleh Pemerintah Pusat
2. Urusan Pemerintahan Konkuren: dibagi antara pemerintah pusat dan daerah
3. Urusan Pemerintahan Umum: dibuat pemerintah pusat dan dijalankan pemerintah daerah

Pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi wewenang daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib sendiri terdiri atas urusan pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar.
Berikut adalah tabel pembagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah.

Tabel 2.148.
Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah
A	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	
1	Pendidikan	DINDIKBUD
2	Kesehatan	DINKES, RSUD KAJEN, RSUD KRATON, RSUD KESESI
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPU TARU
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DINAS PERKIM DAN LH
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP DAN DAMKAR, BPBD
6	Sosial	DINSOS
B	**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**	
1	Tenaga Kerja	DINKOP, UKM DAN NAKER

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINAS P3A DAN PPKB
3	Pangan	DKPP
4	Pertanahan	DPU TARU
5	Lingkungan Hidup	DINAS PERKIM DAN LH
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DINDUKCAPIL
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DINAS PMD
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DINAS P3A DAN PPKB
9	Perhubungan	DINHUB
10	Komunikasi dan Informatika	DINKOMINFO
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINKOP, UKM DAN NAKER
12	Penanaman Modal	DINAS PM PTSP
13	Kepemudaan dan OlahRaga	DINPORAPAR
14	Statistik	DINKOMINFO
15	Persandian	DINKOMINFO
16	Kebudayaan	DINDIKBUD
17	Perpustakaan	DINARPUS
18	Kearsipan	DINARPUS
C	**Urusan Pilihan**	
1	Kelautan dan Perikanan	DINLUTKAN
2	Pariwisata	DINPORAPAR
3	Pertanian	DKPP
4	Perdagangan	DINPERINDAG
5	Perindustrian	DINPERINDAG
6	Transmigrasi	DINKOP, UKM DAN NAKER
D	**Urusan Penunjang**	
1	Perencanaan	BAPPEDA LITBANG
2	Keuangan	BPKD
3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	BKPSDM
4	Penelitian dan Pengembangan	BAPPERIDA
5	Pengawasan	INSPEKTORAT
6	Pemerintahan Umum	SETDA, SETWAN, KECAMATAN, BAKESBANGPOL

2. Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan

Pedoman penilaian rata-rata capaian kinerja fisik dan keuangan menggunakan kriteria sebagaimana tercantum dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 sebagai berikut.

Tabel 2.149.
Skala Nilai Peringkat Kinerja Sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Di bawah ini adalah tabel realisasi capaian fisik dan keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025.

Tabel 2.150.
Realisasi Capaian Fisik dan Keuangan Perangkat Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2025

No.	Perangkat Daerah	Persentase Capaian Fisik dan Keuangan Renja yang dievaluasi Tahun 2025		Kategori Fisik dan Keuangan Renja SKPD Tahun 2025		Kategori Fisik dan Keuangan Periode Satu Tahun	
		Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	99,9	97,29	ST	ST	ST	ST
2.	DINAS KESEHATAN	97,79	93,12	ST	ST	ST	ST
	RSUD KRATON	96,82	96,82	ST	ST	ST	ST
	RSUD KAJEN	100	95,26	ST	ST	ST	ST
	RSUD KESESI	96,83	59,44	ST	R	ST	R
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	96,89	92,82	ST	ST	ST	ST
4.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	100	93,75	ST	ST	ST	ST
5.	SATPOL PP DAN DAMKAR	100	93,03	ST	ST	ST	ST
6.	BPBD	100	93,61	ST	ST	ST	ST
7.	DINAS SOSIAL	100	92,42	ST	ST	ST	ST
8.	DINAS P3A, DAN PPKB	100	95,4	ST	ST	ST	ST
9.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	100	95,87	ST	ST	ST	ST
10.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	100	92	ST	ST	ST	ST
11.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	96,65	88,07	ST	T	ST	T
12.	DINAS PERHUBUNGAN	100	97,11	ST	ST	ST	ST
13.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	100	91,6	ST	ST	ST	ST
14.	DINAS KOPERASI, UKM DAN NAKER	100	94,01	ST	ST	ST	ST
15.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	100	93,71	ST	ST	ST	ST
16.	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	96,84	90,56	ST	T	ST	T
17.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	100	90	ST	T	ST	T
18.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	100	94,64	ST	ST	ST	ST
19.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	99,63	90,17	ST	T	ST	T
20.	SEKRETARIAT DAERAH	99,63	93,44	ST	ST	ST	ST
21.	SEKRETARIAT DPRD	99,95	96,82	ST	ST	ST	ST
22.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	100	95,27	ST	ST	ST	ST
23.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	100	89,57	ST	T	ST	T
24.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	97,19	89,14	ST	T	ST	T
25.	INSPEKTORAT	100	94,61	ST	ST	ST	ST
26.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	100	93,03	ST	ST	ST	ST
27.	KECAMATAN KAJEN	99,54	88,79	ST	T	ST	T
28.	KECAMATAN SRAGI	99,94	93,08	ST	ST	ST	ST

No.	Perangkat Daerah	Persentase Capaian Fisik dan Keuangan Renja yang dievaluasi Tahun 2025		Kategori Fisik dan Keuangan Renja SKPD Tahun 2025		Kategori Fisik dan Keuangan Periode Satu Tahun	
		Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
29.	KECAMATAN WIRADESA	100	91,45	ST	ST	ST	ST
30.	KECAMATAN KEDUNGWUNI	100	92,78	ST	ST	ST	ST
31.	KECAMATAN BUARAN	100	92,25	ST	ST	ST	ST
32.	KECAMATAN TIRTO	100	93,01	ST	ST	ST	ST
33.	KECAMATAN BOJONG	100	86,45	ST	T	ST	T
34.	KECAMATAN WONOPRINGGO	100	77,38	ST	T	ST	T
35.	KECAMATAN KARANGANYAR	100	86,6	ST	T	ST	T
36.	KECAMATAN DORO	100	89,56	ST	T	ST	T
37.	KECAMATAN TALUN	100	89,48	ST	T	ST	T
38.	KECAMATAN LEBAKBARANG	100	92,51	ST	ST	ST	ST
39.	KECAMATAN KANDANGSERANG	100	87,9	ST	T	ST	T
40.	KECAMATAN PANINGGARAN	100	89,99	ST	T	ST	T
41.	KECAMATAN KESESI	100	89,61	ST	T	ST	T
42.	KECAMATAN PETUNGKRIYONO	100	92,9	ST	ST	ST	ST
43.	KECAMATAN WONOKERTO	100	85,56	ST	T	ST	T
44.	KECAMATAN SIWALAN	99,88	89,41	ST	T	ST	T
45.	KECAMATAN KARANGDADAP	100	88,88	ST	T	ST	T
JUMLAH		**4.483,83**	**4.118,65**				
Rata-rata		**99,64**	**91,53**	**ST**	**ST**	**ST**	**ST**

Sumber: BPKD, Bagian Pembangunan Setda Kab. Pekalongan, 2026 (data diolah)

Kondisi capaian fisik Perangkat Daerah memiliki rata-rata capaian fisik sebesar 99,64 (**Sangat Tinggi**) dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 91,53 (**Sangat Tinggi**). Capaian fisik terendah adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu 96,65 (**Sangat Tinggi**), sementara realisasi keuangan terendah adalah Kecamatan Wonopringgo dengan realisasi keuangan sebesar 77,38 (**Tinggi**).

3. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu penilaian evaluasi RKPD adalah terhadap realisasi Indikator Kinerja Sasaran, Indikator Kinerja Daerah dan terhadap Indikator Kinerja Program. Adapun penilaian (status) didasarkan pada tingkat capaian masing-masing indikator. Tingkat capaian indikator diperoleh dari persentase kondisi capaian indikator terhadap target tahun 2025. Adapun kriteria status dapat dilihat pada tabel berikut**.**

Tabel 2.151.
Kriteria Penilaian/Status Capaian Indikator Kinerja Program per Urusan Tahun 2025

No	Status Evaluasi Kinerja	Kriteria status Evaluasi Kinerja
1.	Mencapai Target (MT)	Apabila capaian indikator kinerja tahun 2025 ≥ 100% terhadap Target RKPD Tahun 2025
2.	Akan Mencapai Target (AMT)	Apabila capaian indikator kinerja Tahun 2025 dalam interval ≥ 66% s.d < 100 % terhadap target RKPD 2025
4.	Perlu Upaya Keras (PUK)	Apabila capaian indikator kinerja Tahun 2025 ≤ 65 % terhadap Target RKPD Tahun 2025

Pada prinsipnya evaluasi terhadap capaian target RKPD dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam RKPD. Dalam penilaian kinerja, kriteria status evaluasi kinerja akan menunjukkan status kinerja yang dapat diartikan sebagai berikut:

a. Mencapai Target
   Status ini menunjukkan kriteria apabila capaian indikator kinerja tahun 2025 lebih dari sama dengan 100% terhadap target indikator kinerja RKPD tahun 2025;
b. Akan Mencapai Target
   Status ini menunjukkan kriteria apabila capaian indikator kinerja tahun 2025 dalam interval 66% sampai dengan kurang dari 100% terhadap target indikator kinerja RKPD tahun 2025;
c. Perlu Upaya Keras
   Status ini menunjukkan kriteria apabila capaian indikator kinerja tahun 2025 kurang dari sama dengan 65% terhadap target indikator kinerja RKPD tahun 2025.

Berikut adalah capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pekalongan Tahun 2025.

Tabel 2.152.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Pekalongan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target akhir RPJMD	Kondisi Awal 2024	Target RKPD 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan	% capaian 2025	Status ketercapaian	% capaian RPJMD
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Daya Saing Daerah (indeks)	Indeks	3,91	3,61	3,66	3,69	Buku IDSD 2025 oleh BRIN	100,82	MT	94,37
2.	Tingkat Kemiskinan (%) IUP.1	%	6,97-6,00	8,95	9,15-8,00	8,05	BPS	100	MT	84,50
3.	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Bank Dunia (%) IUP.56	%	39,25	20,43	31,68	20,98		66,22	AMT	53,45
4.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (indeks)	Indeks	93,22	92,96	92,98	92,98*		100	MT	99,74
5.	Rasio Gini (indeks)	Indeks	0,20	0,327	0,306	0,334		90,85	AMT	33
	Rata-Rata Capaian Kinerja							**91,41**		**73,01**
	Predikat Kinerja							**Sangat Tinggi**		**Sedang**

Sumber: BPS, PD Kab. Pekalongan, Bapperida Kab. Pekalongan, 2026 (data diolah)

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Pekalongan tahun 2025 terhadap target RKPD 2025 telah mencapai target sebanyak 3 dari 5 indikator dengan predikat kinerja sangat tinggi dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 91,41%. Persentase capaian terhadap target sebesar 60%. Masih ada 1 indikator yang capaiannya masih bersifat angka sementara. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD belum ada yang mencapai target. Rata-rata ketercapaian terhadap target akhir RPJMD 2025-2029 Kabupaten Pekalongan sebesar 73,01% dengan predikat kinerja sedang.

4. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025

Indikator Kinerja Daerah yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum. Sumber jenis data indikator kinerja daerah terdiri dari indikator kinerja makro, indikator utama pembangunan, indikator kinerja kunci yang disusun berdasarkan urusan pemerintahan.

Berikut adalah capaian indikator kinerja daerah kabupaten Pekalongan tahun 2025.

Tabel 2.153.
Evaluasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Target Akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan Realisasi	% capaian 2025	Status ketercapaian	% akhir RPJMD	PD Penanggungjawab Urusan
(1)	(2)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A.	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**											
	1. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan											
1.	IUP.3	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	83,66	80,64	82,37	74,99		91,04	AMT	89,64	DKPP
2.	IUP.2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	3,07	5,54	5,30	5,47		96,79	AMT	21,82	DKPP
3.		Konsumsi Listrik Per kapita	Mwh/jiwa	0,57	0,57	0,57	0,58	Konsumsi listrik =601.594 dibagi jumlah penduduk =1.039.736	101,75	MT	101,75	PEMDA/ PLN
4.	IUP.44	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	80,10-87,25	0,00	80,05-82,25	60,3822	Sesuai SE Provinsi (Jumlah Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum (Aman) = 116996 dibagi Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten/kota = 193759 di kali 100)	75,43	AMT	72,06	DPU TARU
	2. Lingkungan Hidup Berkualitas											
5.	IUP.46	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	71,19	60,90	70,96	72,12	(0.376*IKA)+(0.405*IKU)+(0.219*IKL)	101,64	MT	101,31	DINAS PERKIM LH
6.	IUP.43	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	69,63	8,73	64,84	62.23	Sesuai SE Provinsi (Jumlah rumah yang memiliki akses Sanitasi = 554980 dibagi	95,97	AMT	89,37	DPU TARU

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Target Akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan Realisasi	% capaian 2025	Status ketercapaian	% akhir RPJMD	PD Penanggungjawab Urusan
(1)	(2)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								jumlah rumah Kabupaten/kota = 891892 dikali 100)				
7.	IUP.47	Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	25,51	-	4,01	25,94	Jumlah Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (38591.45 ton) dibagi Jumlah Timbulan Sampah (148774.88 ton) x 100%	202,18	MT	86,46	DINAS PERKIM LH
	3. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim											
8.	IUP.49	Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TonCOzeq	7.408.499,02	21.317,24	854.836,43	41.840,36	Emisi Baseline dikurangi Emisi Aktual	4,89	PUK	0,2	DINAS PERKIM LH
9.	IUP.48	Indeks Risiko Bencana (IRB)	%	118,98 - 115,83	131,25	130,00-125,00	102,14	Surat dari BNPB no B-42/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026 tgl 30 Januari 2025 hal Penyampaian IKD 2025 dan IRB 2025 di Provinsi Jawa Tengah	118,29	MT	111,82	PEMDA/ BPBD
B.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**											
	1. Aspek Kesejahteraan Ekonomi											
10		Pertumbuhan Ekonomi	%	7,40-8,40	5,02	5,10-5,30	5,88		110,94	MT	74,46	PEMDA/ BPS
11		Kemiskinan Ekstrem	%	0,485	0,51	0,510	0,510*		100	MT	94,84	PEMDA/ BPS
12	IUP.36	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,81-2,5	3,30	3,1-2,78	3,24		95,48	AMT	84,70	PEMDA/ BPS
13		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,80	71,95	72,70	72,71		100	MT	100	PEMDA/ BPS
	2. Kesehatan Untuk Semua											
14	IUP.4	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,72	74,25	74,50	74,59		100,12	MT	98,97	DINKES
15	IUP.6	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (SSGI)	%	13.00	19,50	18.00	19,5	Jumlah stunting pada balita kurun waktu 1 tahun dibagi jumlah balita pada tahun yang sama x 100%	91,67	AMT	50,00	DINKES
16	IUP.5	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	16,00	18,00	17,00	13		123,53	MT	118,75	DINKES
17	IUP.7	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis *(treatment coverage)*	%	100,00	85,40	95,00	94,8206	Jumlah kasus TB yang diobati dan dilaporkan dibagi dengan perkiraan	99,81	AMT	94,82	DINKES

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Target Akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan Realisasi	% capaian 2025	Status ketercapaian	% akhir RPJMD	PD Penanggungjawab Urusan
(1)	(2)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								jumlah insiden kasus TB dikalikan 100 (2325/2452)*100				
18	IUP.8	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis *(treatment success rate)*	%	96,00	90,00	91,00	91,4035	Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan (2084/2280)*100	100,44	MT	95,21	DINKES
	3. Pendidikan Berkualitas dan Merata											
19	IUP.10	Literasi Membaca SD/Sederajat	%	63,82	63,82	64,61	78,4		121,34	MT	122,85	DINDIKBUD
20	IUP.10	Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	56,09	56,09	57,42	84,76		147,61	MT	151,11	DINDIKBUD
21	IUP.10	Numerasi SD/Sederajat	%	48,44	48,44	50,18	77,17		153,79	MT	159,	DINDIKBUD
22	IUP.10	Numerasi SMP/Sederajat	%	32,83	32,83	34,86	80,4		230,64	MT	244,9	DINDIKBUD
23	IUP.11	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	8,41	7,48	7,50	7,50	$\boldsymbol{n\ RLS = 1\ n \sum xi\ i=1}$ dimana : RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas xi= Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun ke atas n= Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas	100,27	MT	89,18	DINDIKBUD
24	IUP.12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,94	12,46	13,20	12,63	(Jumlah penduduk usia i yang bersekolah / Jumlah penduduk usia i) dikali 100% untuk setiap kelompok usia	95,68	AMT	90,6	DINDIKBUD
25	IUP.14	Angka Partisipasi Sekolah 5 - 6 tahun	%	90,21	88,48	88,55	90		101,64	MT	99,77	DINDIKBUD
26	IUP.13	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	8,41	6,68	6,98	6,89		98,71	AMT	81,93	DINDIKBUD
27	IUP.15	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	65-70	n/a	60-65	65		100	MT	100	DINDIKBUD

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Target Akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan Realisasi	% capaian 2025	Status ketercapaian	% akhir RPJMD	PD Penanggungjawab Urusan
(1)	(2)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
28	IUP.19	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	%	0.73	0.09	0.09	0,09	(Jumlah kunjungan/ pengguna layanan perpustakaan ÷ Jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan) × 100%	100	MT	12,33	DINARPUS
	4. Perlindungan Sosial yang Adaptif											
29	IUP.9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	80,40	72,19	80,00	100,3934	Jumlah peserta JKN dibagi jumlah penduduk dikalikan 100 (1043826/1039736)*100	125,49	MT	124,84	DINKES
30	IUP.38	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	100.00	n/a	100.00	100		100	MT	100	DINKOP UKM NAKER
	5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju											
31	IUP.16	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	22,08	1,80	18,27	18,27	(Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan / Total Cagar Budaya Teridentifikasi) x 100	100	MT	82,74	DINDIKBUD
32	IUP.17	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah	Orang	10.0000-200.000	62.000	10.0000-200.000	200.000		100	MT	100	DINDIKBUD
33	IUP.18	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	100,00	100,00	100,00	100		100	MT	100	DINDIKBUD
34	IUP. 20	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	0,00	0,00	0,00	0		100	MT	100	KESBANGPOL
	6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif											
35	IUP.21	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Indeks	69,62 - 69,77	65,05	63,93-66,01	72,3	iBangga = (Indeks Ketenteraman + Indeks Kemandirian + Indeks Kebahagiaan)/3. Sumber data BKKBN. 72.3	109,53	MT	103,63	DINAS P3A PPKB
36	IUP.22	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,14-0,13	0,12	0,18-0,17	0.215	BPS	80,56	AMT	46,43	DINAS P3A PPKB
C.	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**											
	1. Daya Saing Sumber Daya Manusia.											
37		Angka Beban Ketergantungan *(Dependency Ratio)*	Angka	44,60	45,41	45,30	45,83		98,83	AMT	97,24	PEMDA/

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Target Akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan Realisasi	% capaian 2025	Status ketercapaian	% akhir RPJMD	PD Penanggungjawab Urusan
(1)	(2)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	2.Daya Saing Sumber Daya Manusiaaaing Sumber Daya Manusia											
38	IUP.34	Kapabilitas Inovasi	Nilai	3,14	2,43	2,68	2,86	Nilai yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui hasil penilaian Kapabilitas Inovasi Daerah	106,72	MT	91,08	BAPPERIDA
39	IUP.55	PDRB Per Kapita	(Rp. Juta)	58,06-64,42	29,66	29,97-30,18	31,72		105,10	MT	54,63	PEMDA/ BPS
40	IUP.23	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	30,85	29,31	30,57	29,65*		96,99	AMT	96,11	DINPERINDAG
41	IUP.24	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	6,93	6,84	6,03	6,52		108,15	MT	94,08	DINPORAPAR
42	IUP.25	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	10-15	5	5-10	29	Jumlah Wisatawan Mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Pekalongan	290	MT	193,33	DINPORAPAR
43	IUP.26	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,69	n/a	2,95	2,95		100	MT	79,95	DINKOP UKM NAKER
44	IUP.27	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	2,04	0,94	1,81	2,95		162,98	MT	144,61	DINKOP UKM NAKER
45	IUP.37	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	65,40-65,50	65,13	65,10-65,20	68,20		103,947	MT	104,281	PEMDA/ DINKOP UKM NAKER
	3. Transformasi Digital											
46	IUP.39	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	69,50	n/a	68,39	75,65	Jumlah rumah tangga dengan akses internet dibagi jumlah penduduk dikali 100	110,62	MT	108,85	DINKOMINFO
	4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global											
47	IUP.30	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	27,23	22,46	25,17	26,05	(PMTB/PDRB)x100%=(26.05/100)*100	103,5	MT	95,67	DINAS PM PTSP
48		Ekspor Barang dan Jasa	ribu US$	567.000	561,380	562,000	537.888.923.157		95,71	MT	94,87	PEMDA
	5. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi											
49		Indeks Desa	Indeks	0,7500	0,7048	0,7242	0,7242	DLD + DS + DE + DL +DA + DTPD = 26,77% + 13,39% + 25,20% + 14,17% + 7,87% +12,60% = 100,00%	100	MT	96,56	DINAS PMD
50	IUP.35	Persentase Desa Mandiri	%	16,54	8,09	14,71	14,71	PT	100	MT	88,94	DINAS PMD

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Target Akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan Realisasi	% capaian 2025	Status ketercapaian	% akhir RPJMD	PD Penanggungjawab Urusan
(1)	(2)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
51	IUP.40	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	65,23	84,17	63,45	91,30	jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan (209602) dibagi jumlah rumah tangga (330314) dikali 100% 209602/330314*100	101,78	MT	99	DINAS PERKIM LH
52	IUP.41	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	76,54	78,29	74,94	79,05	Jumlah Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sedang) = 280.824+270.851 dibagi Jumlah total Panjang jalan Kabupaten =697.896 ((280.824+270.851)/697.896)*100	106,02	MT	103,8	DPU TARU
53	IUP.42	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota.	%	878,73	2,87	74,98	75,91	Ruas Jalan kabupaten dengan pemenuhan minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal perlengkapan jalan =529,8 dibagi total ruas jalan kewenangan kabupaten = 697,896 dikalikan 100%	101,24	MT	86,39	DPU TARU
54	IUP.45	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks	50,00	49,87	49,90	49,895	Sesuai SE Provinsi 890.11/18	96,67	AMT	96,47	DPU TARU
	6. Stabilitas Ekonomi Makro											
55		Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	4,09	3,84	3,92	3,90	Indeks yang menggambarkan tingkat akses keuangan di Kabupaten/Kota, sesuai rilis dari OJK	99,49	AMT	95,35	SETDA
56	IUP.29	Disparitas Harga	%	± 10	-1,27	± 10	0,18		100	MT	100	SETDA/ DINPERINDAG
57		Tingkat inflasi	%	3±1	3±1	3±1	2,83		100	MT	100	BPS
58	IUP.28	*Return on Asset (ROA)* BUMD	%	7,36	7,11	7,04	7,04	Hasil Laporan Keuangan BUMD dengan kepemilikan 100% n-1 audited	100	MT	95,65	SETDA
59	IUP.31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,83	0,40	0,68	0,60	Pajak daerah =197.108,54 dibagi 32.684.206,29 dikalikan 100	88,23	AMT	72,29	BPKD
60	IUP.32	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	%	3,54	3,48	3,49	3,5	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank milik Kabupaten berdasarkan Laporan keuangan BUMD n-1 audited dibagi total PDRB n-1 sesuai rilis dari BPS	100,29	MT	98,87	SETDA

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Target Akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan Realisasi	% capaian 2025	Status ketercapaian	% akhir RPJMD	PD Penanggungjawab Urusan
(1)	(2)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
61	IUP.33	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB listrik	%	6,72	7,10	6,67	6,68	Total Kredit pada Bank milik Kabupaten berdasarkan Laporan keuangan BUMD n-1 audited dibagi total PDRB n-1 sesuai rilis dari BPS	100,15	MT	99,4	SETDA
62		Indeks Zakat Nasional	Indeks	0,57	0,54	0,57	0,57*		100	MT	100	PEMDA
D.	**Aspek Pelayanan Umum**											
	Urusan Wajib dengan Pelayanan Dasar											
63.	IUP.50	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	77,60	77,03	77,10	81,11	Skor hasil evaluasi Reformasi Birokrasi dari kemen PAN RB... nilai di masa sanggah.. bisa berubah	105,20	MT	104,52	SETDA
64.	IUP.51	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	80-100	98,42	80-100	99,76	Hasil Evaluasi Kemenkum HAM	100	MT	100	SETDA
65.	IUP.52	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,25	3,05	3,00	3,05	Berdasarkan hasil penilaian Kemenpanrb	101,67	MT	93,85	DINKOMINFO
66.	IUP.53	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,29	4,29	4,05	4,1	Hasil Evaluasi Kemenpan RB	101,23	MT	95,57	SETDA
67.	IUP.54	Indeks Integritas Nasional	Indeks	83,78	73,97	79,71	80,17		100,58	MT	95,69	INSPEKTORAT
E.	**Indikator Kinerja Kunci (IKK)**											
		Urusan Pendidikan										
68.	1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (IKK)	%	89,50	89,78	86,39	90		104,18	MT	100,56	DINDIKBUD
69.	1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (IKK)	%	100,00	99,99	99,53	99		99,47	AMT	99	DINDIKBUD
70.	1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (IKK)	%	79,82	79,25	78,40	93		118,62	MT	116,51	DINDIKBUD
71.	1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang	%	25,00	20,35	24,20	44,81		185,17MT	MT	179,24	DINDIKBUD

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Target Akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan Realisasi	% capaian 2025	Status ketercapaian	% akhir RPJMD	PD Penanggungjawab Urusan
(1)	(2)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (IKK)										
		Urusan Kesehatan										
72.	1.b.1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan (IKK)	%	0,86	0,79	0,80	0,85	Jumlah TT RS rujukan dibagi jumlah penduduk Ã—1000	106,25	MT	106,25	DINKES
73.	1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100	Jumlah RS rujukan tingkat kab/kota yang terakreditasi dibagi Total Rumah Sakit Rujukan tingkat kabupaten/kota	100	MT	100	DINKES
74.	1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100	jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan dengan nakes yang memiliki kompetensi klinis/kebidanan dan interpersonal yang baik dibagi jumlah sasaran ibu hamil dikalikan 100% (13007/ 13007)*100	100	MT	100	DINKES
75.	1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100	Jumlah ibu bersalin yang persalinannya ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelkes (Poskesdes/Polindes, Pustu, Pusk Klinik, RB, RS) dibagi sasaran ibu hamil dikali 100 %. (12413/12413100	100	MT	100	DINKES
76.	1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100	Jumlah kunjungan Neonatal dibagi sasaran seluruh bayi baru lahir dikali 100%. (11823/ 11823)*100	100	MT	100	DINKES
77.	1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100	JUMLAH balita usia 12-59 bulan yang mendapatkan pelayanan standar dibagi jumlah balita usia 12-59 bulan pada kurun waktu 1 tahun dikali 100%. 63970/63970)*100	100	MT	100	DINKES
78.	1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi jumlah sasaran dikali 100%. (138773/138773)*100	100	MT	100	DINKES

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Target Akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan Realisasi	% capaian 2025	Status ketercapaian	% akhir RPJMD	PD Penanggungjawab Urusan
(1)	(2)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
79.	1.b.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (IKK)	%	100,00	82,06	100,00	91,8361	jumlah orang yang usia 15 - 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah sasaran yang mendapatkan pelayanan kesehatan dikali 100%. (608113/662172)*100	91,84	AMT	91,84	DINKES
80.	1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (IKK)	%	100,00	96,31	100,00	100	Jumlah warga usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan di kabupaten dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah sasaran warga usia lanjut selama satu tahun dikalikan 100%. (98290/98290)*100	100	MT	100	DINKES
81.	1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (IKK)	%	100,00	93,72	100,00	90,64	Jumlah penderita hipertensi usia >15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun dibagi jumlah sasaran penderita hipertensi usia >15 tahun berdasarkan angka prevalensi kabupaten dalam kurun waktu satu tahun dikalikan 100%. (242313/267341)*100	90,64	AMT	90,64	DINKES
82.	1.b.11	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (IKK)	%	100,00	96,52	100,00	100	Jumlah penderita diabetes melitus usia >15 tahun di kabupaten dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah sasaran penderita diabetes selama satu tahun dikalikan 100% (17299/17299)*100	100	MT	100	DINKES
83.	1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100	Jumlah ODGJ berat di kabupaten yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di kabupaten dalam kurun waktu satu tahun dikali 100% (2548/2548)*100	100	MT	100	DINKES

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Target Akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan Realisasi	% capaian 2025	Status ketercapaian	% akhir RPJMD	PD Penanggungjawab Urusan
(1)	(2)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
84.	1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (IKK)	%	100,00	85,58	100,00	100	Jumlah penderita terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di kabupaten dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah sasaran orang terduga TBC selama satu tahun dikalikan 100% (12093/12093)*100	100	MT	100	DINKES
85.	1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV di kabupaten dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah sasaran orang dengan resiko terinfeksi HIV dikalikan 100%. (15442/15442)*100	100	MT	100	DINKES
		Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
86.	1.c.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota (IKK)	%	86.83	80,15	82.15	82,0904	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha) =1224.74 dibagi Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten (ha) = 1491.94 (Sumber : IKK) (1224.74/1491.94)*100	99,93	AMT	94,54	DPU TARU
87.	1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (IKK)	%	90,10	77,43	79,54	79,543	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/kota (ha.m2) = 183,3 dibagi Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi diWS Kewenangan Kabupaten/kota (ha,m2) = 236,73 dikalikan 100. (188.3/236,730 *100	100	MT	88,54	DPU TARU
88.	1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio	3,768	3,658	3,677	3,6986	Luas irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha),	100,59	MT	98,16	DPU TARU

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Target Akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan Realisasi	% capaian 2025	Status ketercapaian	% akhir RPJMD	PD Penanggungjawab Urusan
(1)	(2)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		yang dilayani oleh jaringan irigasi (IKK)						ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting = 440.905 dibagi Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota = 11920.8 (Sumber : IKK)				
89.	1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (IKK)	%	90,01	88,47	88,62	89,3466	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten/kota (layak) = 116996 + 56121 dibagi Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten/kota bersangkutan = 193759 dikali 100 ((116996+56121)/193759)*100	100,87	MT	99,26	DPU TARU
90.	1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK)	%	63,11	62,21	62,35	64,6543	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpr tinjanya telah diolah di PLT + Jumlah rumah memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD = 115329 dibagi jumlah rumah Kabupaten/kota = 178378 dikali 100 (115329/178378)*100	99,83	AMT	98,96	DPU TARU
91.	1.c.5	Mengukur rasio kepatuhan IMB kab/ kota (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya = 199 dibagi Jumlah IMB yang berlaku = 199 dikali 100 (199/199)*100	100	MT	100	DPU TARU
92.	1.c.7	Mengukur tingkat kemantapan jalan (IKK)	%	76,54	78,29	78,69	79,0483	Jumlah Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sedang) = 280.824+270.851 dibagi Jumlah total Panjang jalan Kabupaten =697.896 ((280.824+270.851)/697.896)*100	100,96	MT	103,8	DPU TARU
93.	1.c.8.1	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang	%	72,28	33,15	39,67	39,6739	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan	100,01	MT	54,89	DPU TARU

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Target Akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan Realisasi	% capaian 2025	Status ketercapaian	% akhir RPJMD	PD Penanggungjawab Urusan
(1)	(2)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		memiliki sertifikat kompetensi (IKK)						operator dan teknis / analis = 146 dibagi Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah Kabupaten/kota = 368 dikali 100 (146/368)*100				
94.	1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi = 617 dibagi Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya = 617 dikali 100	100	MT	100	DPU TARU
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										
95.	1.d.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n (5 unit) dibagi Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n (5 unit) x 100%	100	MT	100	DINAS PERKIM LH
96.	1.d.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni dibagi Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima Pelayanan x 100%	100	MT	100	DINAS PERKIM LH
97.	1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ Kota yang ditangani (IKK)	%	2,35		2,10	12,114	Luasan kawasan kumuh dibawah 10 ha yang ditangani dibagi luas total kawasan kumuh dibawah 10 ha dikali 100% 9.846/81.278*100	576,86	MT	515,49	DINAS PERKIM LH
98.	1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (IKK)	%	3,72	0	3,08	8,2343	Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni (18808 unit rumah) dibagi Jumlah total	267,35	MT	221,35	DINAS PERKIM LH

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Target Akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan Realisasi	% capaian 2025	Status ketercapaian	% akhir RPJMD	PD Penanggungjawab Urusan
(1)	(2)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								unit rumah Kabupaten/Kota (228410 unit rumah) *100 18808/228410*100				
99.	1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU dibagi Jumlah unit rumah Kabupaten/Kota x 100%	100	MT	100	DINAS PERKIM LH
		Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat										
100.	1.e.1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100	jumlah gangguan / 12*100 100	100	MT	100	SATPOL PP DAMKAR
101.	1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100		100	MT	100	SATPOL PP DAMKAR
102.	1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100	(Jumlah warganegara di KRB yang menerima layanan informasi / Total jumlah warga negara di Kawasan Rawan Bencana) x 100%	100	MT	100	BPBD
103.	1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100	(Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan / Total sasaran warga negara di kawasan rawan bencana) x 100%	100	MT	100	BPBD
104.	1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100	(Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan & evakuasi/ Jumlah warga negara yang terdampak & terancam bencana) X 100 %	100	MT	100	BPBD
105.	1.e.5	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (IKK)	%	25,25	23,88	24,00	25,25	Jumlah kejadian /12*100 25.25	105,21	MT	100	SATPOL PP DAMKAR
106.	1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (IKK)	Menit	27,00	27,00	27,00	27,00	Waktu tiba di lokasi - Waktu Laporan diterima 60-33	100	MT	100	SATPOL PP DAMKAR
		Urusan Sosial										

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Target Akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan Realisasi	% capaian 2025	Status ketercapaian	% akhir RPJMD	PD Penanggungjawab Urusan
(1)	(2)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
107.	1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (anggaran APBD) dibagi jumlah target yang ditetapkan	100	MT	100	DINSOS
108.	1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (alokasi anggaran APBD) dibagi jumlah seluruh korban bencana alam dan sosial yang ada pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100	MT	100	DINSOS
		Urusan Tenaga Kerja										
109.	2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100		100	MT	100	DINKOP UKM NAKER
110.	2.a.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (IKK)	%	35,00	29,26	30,00	100		333,33	MT	285,71	DINKOP UKM NAKER
111.	2.a.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (IKK)	%	40,75	40,00	40,41	17,12		42,37	PUK	42,01	DINKOP UKM NAKER
112.	2.a.4	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota (IKK)	%	20,88	31,58	20,22	2,490		12,314	PUK	11,92	DINKOP UKM NAKER
113.	2.a.5	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK)	%	100,00	55,01	100,00	100		100	MT	100	DINKOP UKM NAKER

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Target Akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan Realisasi	% capaian 2025	Status ketercapaian	% akhir RPJMD	PD Penanggungjawab Urusan
(1)	(2)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
114.	2.g.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD (IKK)	%	6,82	6,76	6,76	6,7627	Jumlah anggaran responsif gender dibagi jumlah belanja operasi dan belanja modal APBD dikali 100(116857854878/1727988536517)*100	100,04	MT	99,16	DINAS P3A PPKB
115.	2.g.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100	Jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap anak dibagi jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani instansi terkait kabupaten dikali 100 .(46/46)*100	100	MT	100	DINAS P3A PPKB
116.	2.g.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (IKK)	%	10,64	10,64	10,64	11,5618	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO dibagi jumlah penduduk perempuan dikali 100 (34/294072)*100000	122,92	MT	122,92	DINAS P3A PPKB
		Pangan										
117.	2.h.1	Persentase Cadangan Pangan (IKK)	%	100,00	2,08	100,00	126,5	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dibagi Jumlah Cadangan Pangan Sesuai Perbup dikali 100 (18975/15000)*100	126,5	MT	126,5	DKPP
		Urusan Pertanahan										
118.	2.i.1	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani dibagi jumlah pengaduan sengketa tanah Garapan (Sumber : IKK)	100	MT	100	DPU TARU
119.	2.i.2	Persentase ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan	%	38,60	100,00	100,00	100	Jumlah penerima Tanah Obyek Landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 Ha = 18 dibagi jumlah penerima tanah Obyek Landreform =18(IKK)	100	MT	100	DPU TARU

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Target Akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan Realisasi	% capaian 2025	Status ketercapaian	% akhir RPJMD	PD Penanggungjawab Urusan
(1)	(2)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
120.	2.i.3	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100	Luas Tanah yang diadakan/dibebaskan Untuk Kepentingan Umum = 0 dibagi Luas Tanah yang di rencanakan di bebaskan = 0 di kali 100	100	MT	100	DPU TARU
		Urusan Lingkungan Hidup										
121.	2.j.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota (IKK)	Indeks	65,00	60,90	61,00	72,1225	(0.376*IKA)+(0.405*IKU)+(0.219*IKL) (0.376*69.86)+(0.405*75.76)+(0.219*69.28)	101,64	MT	101,31	DINAS PERKIM LH
122.	2.j.2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota (IKK)	%	63,75	33,50	46,58	59,3053	Total Volume Sampah yang ditangani (88231.45 ton) dibagi Total volume timbunan sampah kabupaten/kota (148774.88 ton) x 100% 88231.45/148774.88*100	127,32	MT	93,03	DINAS PERKIM LH
123.	2.j.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota (IKK)	%	50	64,71	100	83,3333	Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota (15 perusahaan) dibagi Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan (18 perusahaan) dikali 100%. 15/18*100	116.67	MT	33,33	DINAS PERKIM LH
		Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
124.	2.k.1	Perekaman KTP Elektronik (IKK)	%	99.55	99.99	99.49	98.9635	756.654/ 764.579*100	99,47	AMT	99,41	DINDUKCAPIL
125.	2.k.2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (IKK)	%	61,00	60,71	60,75	61.4377	171.179/ 278.622 *100	101,13	MT	100,72	DINDUKCAPIL
126.	2.k.3	Persentase Kepemilikan akta kelahiran (IKK)	%	97,56	97,50	97,51	97,9117	Jumlah penduduk usia 0 - 18 tahun yang memiliki akta kelahiran dibanding dengan jumlah penduduk usia 0 - 18 tahun 287931/294072*100	100,41	MT	100,36	DINDUKCAPIL

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Target Akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan Realisasi	% capaian 2025	Status ketercapaian	% akhir RPJMD	PD Penanggungjawab Urusan
(1)	(2)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
127.	2.k.4	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK)	Perangkat Daerah	6,00	-	1,00	1	1/1	100	MT	16,67	DINDUKCAPIL
		Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
128.	2.l.2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri (IKK)	%	3,00	22,01	30,95	30,95		100	MT	1031,67	DINAS PMD
		Urusan Pengendalian Penduduk dan KB										
129.	2.m.1	TFR (Angka Kelahiran Total) (IKK)	Angka	2,15	2,25	2,17	2,16	Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita selama masa usia suburnya (15-49 tahun) 2.16	100,46	MT	99,53	DINAS P3A PPKB
130.	2.m.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (IKK)	%	62,60	67,00	62,10	62.1713	Jumlah PUS pengguna alat kontrasepsi modern dibagi jumlah seluruh PUS dikali 100 (101509/163273)*100	100,11	MT	99,32	DINAS P3A PPKB
131.	2.m.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	6,15	6,41	6,41	5,3689	Jumlah PUS tidak ber-KB tapi ingin menunda/tidak ingin anak lagi dibagi Total PUS dikali 100 (8766/163273)*100	116,24	MT	112,7	DINAS P3A PPKB
		Urusan Perhubungan										
132.	2.n.1	Rasio konektivitas (IKK)	Angka	0,95	0,89	0,90	0,90	(IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	100	MT	95,74	DINHUB
133.	2.n.2	V/C RASIO di Jalan Kabupaten/Kota (IKK)	Angka	0,58	0,58	0,63	0,63	Rata-rata volume lalu lintas di jalan kabupaten dibagi Kapasitas Jalan Kabupaten	100	MT	95,74	DINHUB
		Urusan Komunikasi dan Informatika										
134.	2.0.1	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh	%	100,00	100,00	100,00	100	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh	100	MT	100	DINKOMINFO

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Target Akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan Realisasi	% capaian 2025	Status ketercapaian	% akhir RPJMD	PD Penanggungjawab Urusan
(1)	(2)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Dinas Komunikasi dan Informatika (IKK)						Dinas Kominfo dibagi jumlah OPD dikali 100				
135.	2.o.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (IKK)	%	29,00	22,00	23,00	30	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dibagi jumlah layanan publik dikali 100	130,43	MT	103,45	DINKOMINFO
136.	2.o.3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (IKK)	%	100,00	99,43	100,00	70	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota dibagi jumlah penduduk dikali 100	100	MT	73,68	DINKOMINFO
		Urusan Koperasi dan UMKM										
137.	2.p.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (IKK)	%	56,50	53,42	54,00	29,58		54,78	PUK	52,35	DINKOP UKM NAKER
138.	2.p.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha (IKK)	%	89,10	88,57	88,60	78,55		88,66	AMT	88,16	DINKOP UKM NAKER
		Urusan Penanaman Modal										
139.	2.q.	Persentase peningkatan investasi (IKK)	%	2,00	-39,03	-26,00	57,0921	(Jumlah Investasi tahun(n)-Jumlah Investasi tahun (n-1))dibagi Jumlah Investasi (n-1) dikali.100 (3189.189-2030.14)/2030.14*100	183,63	MT	2,854.61	DINAS PM PTSP
		Urusan Kepemudaan dan Olahraga										
140.	2.r.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (IKK)	%	5,38	5,22	5,24	5,2493	Jumlah pemuda yang berwirausaha / jumlah pemuda yang berpartisipasi aktif dalam organisasi kepemudaan x 100	100,18	MT	97,57	DINPORAPAR
141.	2.r.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	8,1098	Jumlah pemuda yang menjadi anggota aktif pada organisasi sosial kemasyarakatan di kota/jumlah pemuda di kota x 100%	107,41	MT	103,91	DINPORAPAR

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Target Akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan Realisasi	% capaian 2025	Status ketercapaian	% akhir RPJMD	PD Penanggungjawab Urusan
(1)	(2)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
142.	2.r.3	Peningkatan Prestasi Olahraga (IKK)	%	73,50	70,58	71,00	40,1709	(Jumlah atlet berprestasi tingkat regional dan nasional / Jumlah atlet yang dikirim) *100	56,58	PUK	54,65	DINPORAPAR
		Urusan Statistik										
143.	2.s.1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dibagi jumlah OPD dikali 100	100	MT	100	DINKOMINFO
144.	2.s.2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah dibagi jumlah OPD dikali 100	100	MT	100	DINKOMINFO
		Urusan Persandian										
145.	2.t	Tingkat keamanan informasi pemerintah (IKK)	Nilai	88,95	88,68	88,70	89,46	Jumlah nilai per area keamanan informasi dibagi jumlah area penilaian dikali 100	100,85	MT	100,57	DINKOMINFO
		Urusan Kebudayaan										
146.	2.u	Terlestarikannya Cagar Budaya (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100		100	MT	100	DINDIKBUD/
		Urusan Perpustakaan										
147.	2.v.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (IKK)	%	86,00	84,98	85,00	56,41		66,36	AMT	65,59	DINARPUS
148.	2.v.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IKK)	%	70,20	66,65	66,70	4,71		7,06	PUK	6,71	DINARPUS
		Urusan Kearsipan										
149.	2.w.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (IKK)	%	76,95		76,7	76,7		100	MT	100	DINARPUS

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Target Akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan Realisasi	% capaian 2025	Status ketercapaian	% akhir RPJMD	PD Penanggungjawab Urusan
(1)	(2)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
150.	2.w.2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK)	%	48,80		47,80	100		100	MT	100	DINARPUS
		Urusan Kelautan dan Perikanan										
151.	3.a	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap) kabupaten/kota (IKK)	%	6.529,00	5.983,22	6.067,00	6.901,49	Total Produksi Perikanan Tangkap	113,75	MT	105,71	DINLUTKAN
152.	3.a	Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya) kabupaten/kota (IKK)	%	10.362,00	9.223,00	9.485,00	9.485,69	Total Produksi Perikanan Budidaya	100,01	MT	91,54	DINLUTKAN
		Urusan Pariwisata										
153.	3.b.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kebangsaan (IKK)	%	2,60	2,00	2,10	8	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun n dikurang jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun n-1 dibagi kunjungan wisatawan mancanegara tahun n-1 x 100	380,95	MT	307,69	DINPORAPAR
154.	3.b.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	11,30	10,71	10,80	7,2968	Jumlah kunjungan wisata tahun n dikurang jumlah kunjungan wisata tahun n-1 dibagi kunjungan wisata tahun n-1 x 100	67,56	AMT	64,57	DINPORAPAR
155.	3.b.3	Tingkat hunian akomodasi (IKK)	%	84,40	83,28	83,40	21,3828	Jumlah hunian yang terpakai dibagi jumlah hunian yang tersedia*100	25,64	PUK	25,34	DINPORAPAR
156.	3.b.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku (IKK)	%	5,97	6,29	5,66	508,29		89,80	AMT	85,14	DINPORAPAR
157.	3.b.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK)	%	0,186	0,180	0,181	0,0848	PAD sektor pariwisata tahun n dibagi Jumlah PAD pemerintah Daerah dikali 100 (508286250/599277043605.47)*100	46,85	PUK	45,59	DINPORAPAR

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Target Akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan Realisasi	% capaian 2025	Status ketercapaian	% akhir RPJMD	PD Penanggungjawab Urusan
(1)	(2)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Urusan Pertanian										
158.	3.c.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	53,86	53,32	53,46	52,179	(2.213.120/42.414)	97,6	AMT	96,88	DKPP
159.	3.c.2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	5,00	29,97	5,00	5,036	((278-264)/278)*100	100,72	MT	100,72	DKPP
		Urusan Perdagangan										
160.	3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100		100	MT	100	DINPERINDAG
161.	3.f.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK)	%	71,50	70,91	71,00	72,30		101,83	MT	101,12	DINPERINDAG
		Urusan Perindustrian										
162.	3.g.1	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota (IKK)	%	0,56	0,50	0,51	0,29		56,86	PUK	51,79	DINPERINDAG
163.	3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK (IKK)	%	100,00	97,98	100,00	100		100	MT	100	DINPERINDAG
164.	3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100,00	100,00	100,00	100		100	MT	100	DINPERINDAG
165.	3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin	%	100,00	100,00	100,00	100		100	MT	100	DINPERINDAG

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Target Akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan Realisasi	% capaian 2025	Status ketercapaian	% akhir RPJMD	PD Penanggungjawab Urusan
(1)	(2)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota										
166.	3.g.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100		100	MT	100	DINPERINDAG
		Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah (Perencanaan dan Keuangan)										
167.	4.a.1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan (IKK)	%	16,50	15,92	16,00	17,74	Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan, dibagi jumlah APBD (Jumlah realisasi seluruh belanja daerah), dikali 100	110,87	MT	107,515	BPKD
168.	4.a.2	Rasio PAD (IKK)	%	17,75	16,25	16,50	25,86		156,73	MT	145,69	BPKD
169.	4.a.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (IKK)	%	Level 3 (3,03)	3,00	Level 3 (3,01)	2,94 (Level 2)		97,67	AMT	97,03	INSPEKTORAT
170.	4.a.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (IKK)	%	Level 3 (3,06)	3,00	Level 3 (3,01)	3,19		105,98	MT	104,25	INSPEKTORAT
171.	4.a.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures) (IKK)	%	65,00	64,34	65,00	72,1001	Jumlah belanja urusan pemerintahan dikurangi transfer expenditures, dibagi Jumlah realisasi belanja APBD, dikali 100 (2126127128879-442065568155) / 2335726304607*100	110,92	MT	110,92	KEUANGAN
172	4.a.6	Opini Laporan Keuangan (IKK)	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP		100	MT	100	BPKD
		Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)										
173.	4.b.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama (IKK)	%	0,00	0,00	0,00	0	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n/Jumlah kontrak keseluruhan tahun n X 100%	100	MT	100	SETDA

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Target Akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan Realisasi	% capaian 2025	Status ketercapaian	% akhir RPJMD	PD Penanggungjawab Urusan
(1)	(2)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
174.	4.b.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (IKK)	%	82,00	76,78	77,00	79,41	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif/Jumlah seluruh pengadaan X 100%	103,13	MT	96,84	SETDA
175.	4.b.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan (IKK)	%	31,00	25,89	26,00	19,71	Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan/Total belanja operasi dan modal X 100%	75,81	AMT	63,58	SETDA
176.	4.b.4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah (IKK)	%	21,00	15,21	16,00	-50,11	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)/Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) X 100%	-313,19	PUK	-238,62	SETDA
		Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)										
177.	4.c.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (IKK)	%	62,28	76,23	59,00	60,9375	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas dibagi jumlah seluruh pegawai tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan 1638/2688*100	103,28	MT	97,84	BKPSDM
178.	4.c.2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (IKK)	%	19,37	14,87	17,92	17,9315	Jumlah Pegawai Fungsional dibagi jumlah seluruh pegawai tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan. 482/2688 * 100	100,06	MT	92,57	BKPSDM
179.	4.c.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (IKK)	%	57,47	43,03	56,72	56,8465	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi Seluruh jumlah pegawai Fungsional tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan. 274/482 *100	100,22	MT	98,92	BKPSDM

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Target Akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan Realisasi	% capaian 2025	Status ketercapaian	% akhir RPJMD	PD Penanggungjawab Urusan
(1)	(2)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)										
180.	4.d.1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK)	%	1,00	1,10	1,00	-0,99		-99	PUK	-99	BPKD/ BPKD
181.	4.d.2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK)	%	0,90	0,86	0,90	10,24		1.137,78	MT	1.137,78	BPKD
182.	4.d.3	Manajemen Aset	Skor	4	4	4	4		100	MT	100	/ BPKD
183.	4.d.4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	3,26	3,26	3,26	2,86		87,73	AMT	87,73	BPKD
		Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik)										
184.		Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	99,80	99,68	99,70	99,76		100,06	MT	99,96	BPKD
185.		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100		100	MT	100	BPKD

Sumber : OPD Bapperida , dan BPS Kab. Pekalongan; data diolah; 2026

Berdasarkan Tabel diatas, Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) jumlah indikator kinerja daerah yang mencapai target RKPD Tahun 2025 sebanyak 144 indikator dari 185 indikator atau sebesar **77,84% yang mencapai target** dengan predikat kinerja termasuk **tinggi**. Ada 41 indikator yang tidak mencapai target dengan rincian sebanyak akan mencapai target (AMT) sebanyak 30 indikator dan **11 indikator perlu upaya keras (PUK)**. Rincian 185 indikator kinerja daerah terhadap target sebanyak 165 indikator kinerja mencapai target kinerja sangat tinggi, 4 indikator mencapai target kinerja tinggi, 4 indikator mencapai target indikator sedang, 11 indikator mencapai target sangat rendah.

Capaian indikator kinerja daerah (IKD) terhadap target akhir RPJMD Tahun 2025-2029 sebanyak 102 indikator dari 185 indikator telah mencapai target akhir RPJMD atau sebesar **55,14%** telah mencapai target akhir RPJMD Tahun 2025-2029. Adapun Rincian 70 indikator kinerja dengan status akan mencapai target (AMT), 12 indikator kinerja dengan status perlu upaya keras (PUK). Rincian 185 indikator kinerja daerah terhadap target sebanyak 147 indikator ketercapaian terhadap target sangat tinggi, 10 indikator tinggi, 4 indikator sedang, 5 indikator rendah, dan 12 indikator sangat rendah.

CATATAN:

Rumus menghitung persentase capaian indikator positif = Capaian indikator Kinerja dibagi Target Indikator Kinerja dikalikan 100
Rumus menghitung persentase capaian Indikator negative = kurung buka target Indikator Kinerja dikurangi kurung buka capaian Indikator Kinerja dikurangi target Indikator Kinerja dibagi target Indikator Kinerja dikalikan 100.

Tabel 2.154.
Evaluasi Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Tujuan Renstra Perangkat Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2025

VISI : KABUPATEN PEKALONGAN YANG MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Rumusan Tujuan Renstra PD	Indikator Sasaran RPJMD/ Indikator Tujuan Renstra PD	Satuan	Target Akhir RPJMD 2030	Kondisi Awal 2024	Target RKPD 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan Realisasi	% capaian 2025	Status ketercapaian	% terhadap RPJMD 2030	OPD Penanggung Jawab Urusan
Mewujudkan Kabupaten Pekalongan yang Maju, Adil, Sejahtera dan Berkelanjutan			**Indeks Daya Saing Daerah**	**Indeks**	**3,91**	**3,61**	**3,66**	**3,69**		**81,82**	**AMT**	**94,37**	**Pemerintah Daerah**
			Tingkat Kemiskinan (IUP.1)	**%**	**6,97-6,00**	**8,95**	**9,15-8,00**	**8.05**		**100**	**MT**	**84,50**	**Pemerintah Daerah**
			Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Bank Dunia (IUP.56)	**%**	**39,25**	**20,43**	**31,68**	**20,98**		**66,22**	**AMT**	**53,45**	**Pemerintah Daerah**
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	**Indeks**	**93,22**	**92,96**	**92,98**	**92,98***		**100**	**MT**	**99,74**	**Pemerintah Daerah**
			Rasio Gini	**Indeks**	**0,200**	**0,327**	**0,306**	**0,334**		**90,85**	**AMT**	**33,00**	**Pemerintah Daerah**
	Meningkatnya SDM Kabupaten Pekalongan yang Unggul dan Inklusif		**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Indeks**	**73,80**	**71,95**	**72,70**	**72,71**		**100,01**	**MT**	**98,52**	**Pemerintah Daerah**
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata	Usia Harapan Hidup (UHH) IUP.4	Angka	75,72	74,25	74,50	74,59		100,12	MT	98,51	DINKES

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Rumusan Tujuan Renstra PD	Indikator Sasaran RPJMD/ Indikator Tujuan Renstra PD	Satuan	Target Akhir RPJMD 2030	Kondisi Awal 2024	Target RKPD 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan Realisasi	% capaian 2025	Status ketercapaian	% terhadap RPJMD 2030	OPD Penanggung Jawab Urusan
		Meningkatkan aksesibilitas dan distribusi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan *(Prevalence of Undernourishment)* IUP.2	%	75,72	5,54	5,30	5,47		103,21	MT	178,18	DKPP
		Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan yang unggul dan berdaya saing	Harapan Lama Sekolah	Tahun	3,07	12,46	13,20	12,63	(Jumlah penduduk usia i yang bersekolah / Jumlah penduduk usia i) dikali 100% untuk setiap kelompok usia	95,68	AMT	90,6	DINDIKBUD
			Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun IUP.11	Tahun	13,94	7,48	7,50	7,5	$\boldsymbol{n\ RLS = 1\ n \sum xi\ i=1}$ dimana : RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas xi= Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun ke atas n= Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas	100,27	MT	89,18	DINDIKBUD
		Meningkatkan pembangunan literasi masyarakat	IPLM (Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat)	Nilai	8,41	66,65	66,70	4,71		7,06	PUK	6,71	DINARPUS
		Meningkatkan daya saing kepemudaan dan olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	%	70,10	65,00	65,10	51.15	Rata-rata skor 5 domain (Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan, Lapangan dan kesempatan kerja, Partisipasi dan kepemimpinan, Gender dan inklusi)	92,66	AMT	72,97	DINPORAPAR
			Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	%	0,393	n/a	0,362	0,459	Rata-rata indeks partisipasi, indeks ruang terbuka, indeks kebugaran, indeks SDM	126,8	MT	116,79	DINPORAPAR
		Meningkatkan pelestarian seni dan budaya daerah	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak	%	0,393	1,80	18,27	18,27	(Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan / Total Cagar Budaya Teridentifikasi) x 100	100	MT	82,74	DINDIKBUD

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Rumusan Tujuan Renstra PD	Indikator Sasaran RPJMD/ Indikator Tujuan Renstra PD	Satuan	Target Akhir RPJMD 2030	Kondisi Awal 2024	Target RKPD 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan Realisasi	% capaian 2025	Status ketercapaian	% terhadap RPJMD 2030	OPD Penanggung Jawab Urusan
			Benda (WBTB) yang dilestarikan IUP.16										
		Meningkatkan kualitas pembangunan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) IUP.22	Indeks	22,08	0,215	0,18-0,17	0.215	BPS	80,56	AMT	46,43	DINAS P3A PPKB
			Indeks Perlindungan Anak	Indeks	65,50	64,31 (2023)	64,80	72.67	Indeks yang menggambarkan pencapaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. 72.67	112.15	MT	110.95	DINAS P3A PPKB
		Meningkatkan kualitas pengendalian kependudukan dan keluarga berencana didukung dengan data administrasi yang valid untuk mendukung kinerja sasaran pembangunan	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2,15	2,25	2,17	2,16	Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita selama masa usia suburnya (15-49 tahun) 2.16	100,46	MT	99,53	DINAS P3A PPKB
			Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) IUP.21	Indeks	69,62 - 69,77	65,05	63,93-66,01	72,3	iBangga = (Indeks Ketenteraman + Indeks Kemandirian + Indeks Kebahagiaan)/3. Sumber data BKKBN. 72.3	109,53	MT	103,63	DINAS P3A PPKB
			Cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	%	99,137	98,99	99,113	98,809	Persentase kepemilikan KTP elektronik ditambah Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil dibagi 2 x 100% (98.66+98.95)/2	99,69	AMT	99,66	DINDUKCAPIL
	Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata, dengan memperhatikan keberlanjutan		**Persentase kualitas infrastruktur wilayah kondisi baik**	**%**	**75,00**	**n/a**	**70,20**	**76.4644**	Persentase Jalan Mantap + Persentase Jembatan mantap + persentase Drainase Mantap + Persentase Penduduk mengakses Air Minum layak + Persentase	**99.42**	**AMT**	**98.16**	**PEMDA/DPU TARU**

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Rumusan Tujuan Renstra PD	Indikator Sasaran RPJMD/ Indikator Tujuan Renstra PD	Satuan	Target Akhir RPJMD 2030	Kondisi Awal 2024	Target RKPD 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan Realisasi	% capaian 2025	Status ketercapaian	% terhadap RPJMD 2030	OPD Penanggung Jawab Urusan
	lingkungan hidup dan Ketahanan terhadap resiko bencana								Penduduk mengakses Air Limbah Domestik+Persentase kesesuaian tata ruang (79.0313+85.2349+44.7946+89.3466+62.23+98.1319) dibagi 6 (79.0483+85.2349+44.7946+89.3466+62.23+98.1319)/6				
			Indeks Risiko Bencana (IRB) IUP.48	**Indeks**	**118,98 - 115,83**	**131,25**	**130,00-125,00**	**102,14**	Berdasarkan surat dari BNPB No. B-42/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026, tgl 30 Januari 2026, Hal Penyampaian IKD 2025 dan IRB 2025 di Provinsi Jawa Tengah	**100**	**MT**	**100**	**PEMDA/ BPBD**
			Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif IUP.49	**TonCO2eq**	**7.408.499,02**	**21.317,24**	**854.836,43**	**41.840,36**	Emisi Baseline dikurangi Emisi Aktual	4,89	PUK	0,2	**PEMDA/ DINAS PERKIM LH**
		Meningkatkan Keberkelanjutan penanganan infrastruktur wilayah	Persentase sarana dan prasarana wilayah kondisi baik	%	84,07	83,08	83,18	76.4644	Persentase Jalan Mantap + Persen Jembatan mantap + persentase Drainase Mantap + Persentase Penduduk mengakses Air Minum layak + Persentase Pnduduk mengakses Air Limbah Domestik + Persentase kesesuaian taru(79.0313+85.2349+44.7946+89.3466+62.23+98.1319) dibagi 6(79.0483+85.2349+44.7946+89.3466+62.23+98.1319)/6	99,42	AMT	98,16	DPU TARU

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Rumusan Tujuan Renstra PD	Indikator Sasaran RPJMD/ Indikator Tujuan Renstra PD	Satuan	Target Akhir RPJMD 2030	Kondisi Awal 2024	Target RKPD 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan Realisasi	% capaian 2025	Status ketercapaian	% terhadap RPJMD 2030	OPD Penanggung Jawab Urusan
		Tersedianya kebutuhan tanah untuk menunjang pembangunan daerah	Persentase kebutuhan tanah yang tersedia untuk penunjang pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Luas Tanah yang diadakan/dibebaskan Untuk Kepentingan Umum = 2.07 Ha dibagi Luas Tanah yang di rencanakan di bebaskan = 2.07 Ha di kali 100 (2.07/2.07)*100	100	MT	100	DPU TARU
		Meningkatkan kualitas penataan perumahan dan kawasan permukiman	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak IUP.40	%	65,23	0,00	63,45	63,4554	jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan (209602 unit) dibagi Jumlah rumah tangga (330314 rumah tangga) dikali 100% 209602/330314*100	100,01	MT	97,28	DINAS PERKIM LH
		Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur transportasi	Persentase kualitas layanan perhubungan	%	76,46	72,96	73,62	71,75	(Persentase kendaraan laik jalan + Persentase angkutan umum dalam kondisi baik + persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang dalam kondisi baik) dibagi 3	97,46	AMT	94,54	DINHUB
		Meningkatkan Ketangguhan menghadapi risiko bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,73	0,67	0,68	0,69	Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (71 indikator) dari BNPB	101,47	MT	94,52	BPBD
		Meningkatkan pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah IUP.46	Indeks	71,19	60,90	70,96	72,1225	(0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)= (0.376*69.86)+(0.405*75.76) + (0.219*69.28) (0.376*69.86)+(0.405*75.76) + (0.219*69.28)	101,64	MT	101,31	DINAS PERKIM LH
	Meningkatnya perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan dengan mendorong penguatan UMKM, peningkatan		**Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**7,40-8,40**	**5,02**	**5,10-5,30**	**6,26**		**100**	**MT**	**100**	**Pemerintah Daerah**
			PDRB per kapita IUP.55	**(Rp. Juta)**	**58,06-64,42**	**29,66**	**29,97-30,18**	**31,72**		**105,10**	**MT**	**54,63**	**Pemerintah Daerah**
			Tingkat Pengangguran	**%**	**2,81-2,50**	**3,30**	**3,10-2,78**	**3,24**		**95,48**	**AMT**	**84,70**	**Pemerintah Daerah**

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Rumusan Tujuan Renstra PD	Indikator Sasaran RPJMD/ Indikator Tujuan Renstra PD	Satuan	Target Akhir RPJMD 2030	Kondisi Awal 2024	Target RKPD 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan Realisasi	% capaian 2025	Status ketercapaian	% terhadap RPJMD 2030	OPD Penanggung Jawab Urusan
	produktivitas sektor unggulan, pemerataan ekonomi di Kabupaten Pekalongan		**Terbuka (TPT) IUP.36**										
		Meningkatkan kontribusi 230ector PDRB dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan	Rasio PDRB Industri Pengolahan IUP.23	%	30,84	29,31	30,57	29,65*		96,99	AMT	96,11	DINPERINDAG
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum IUP.24	%	6,93	6,84	6,03	6,52		108,15	MT	94,08	DINPORAPAR
			Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB IUP.27	%	2,49	0,94	1,18	0.89	Persentase total nilai pendapatan atau penjualan barang / jasa koperasi dalam satu periode terhadap PDRB Suatu Daera	75.42	AMT	35,74	DINKOP UKM NAKER
			Rasio PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	15,40	14,98	15,15	13,27**	BPS	87,59	AMT	86,17	DINPERINDAG
			Rasio PDRB Sub Sektor Pertanian	%	15,37	14,80	14,90	15.98	BPS	107,25	MT	103,97	DKPP
			Rasio PDRB Sub Sektor Perikanan	Ton	0,93	0,87	0,88	0,87		98,86	AMT	93,55	DINLUTKAN
		Meningkatkan nilai investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.	Rasio Kewirausahaan Daerah IUP.26	%	6,51	n/a	2,95	2,95		100	MT	79,95	DINKOP UKM NAKER
			Pembentukan Modal Tetap Bruto IUP.30	%	27,23	25,43	25,17	26,05	(PMTB/PDRB)x100%=(26.05/100)*100	103,5	MT	95,67	DINAS PM, PTSP
		Meningkatkan peran desa sebagai pendorong perekonomian daerah	Indeks Desa	Indeks	0,7500	0,7048	0,7242	0.7242	DLD + DS + DE + DL +DA + DTPD = 26,77% + 13,39% + 25,20% + 14,17% + 7,87% +12,60% = 100,00%	100	MT	96,56	DINAS PMD

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Rumusan Tujuan Renstra PD	Indikator Sasaran RPJMD/ Indikator Tujuan Renstra PD	Satuan	Target Akhir RPJMD 2030	Kondisi Awal 2024	Target RKPD 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan Realisasi	% capaian 2025	Status ketercapaian	% terhadap RPJMD 2030	OPD Penanggung Jawab Urusan
		Meningkatkan Ketentraman dan ketertiban wilayah	Jumlah kejadian Konflik SARA IUP.20	Kali	0,00	0,00	0,00	0		100	MT	100	KESBANGPOL
			Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas	Indeks	71,14	n/a	61,01	61,1	Indikator Kerja x Bobot / Bobot	100,15	MT	85,89	SATPOL PP, DAMKAR
		Meningkatkan peran lembaga keuangan daerah dalam mendukung pembiayaan ekonomi lokal dan pengembangan sektor produktif.	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	4,09	3,84	3,92	3,90	Indeks yang menggambarkan tingkat akses keuangan di Kabupaten/Kota, sesuai rilis dari OJK	99,49	AMT	95,35	SETDA
		Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran di masyarakat.	Rasio Produktivitas Tenaga Kerja (PDRB dibagi Jumlah Tenaga Kerja)	Rasio	52,85	n/a	52,61	22,16	PDRB =32.684,21 dibagi tenaga kerja 147.512 (berasal dari 20.734 + 126.778)	42,12	PUK	41,93	DINKOP UKM, NAKER
		Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	Indeks Kesejahteraan sosial (Ikesos)	Indeks	57,20	56,62	56,70	63,61	Data sekunder (given) dari Kemensos. Peran daerah pada fasilitasi Dan tindak lanjut hasil survei	112,19	MT	111,21	DINSOS
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmitgrasi untuk mendukung pengurangan kemiskinan	Persentase pemenuhan kuota transmigrasi yang diberangkatkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00		100	MT	100	DIINKOP UKM, NAKER
	Meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahan yang, transparan, dan akuntabel untuk menciptakan pemerintahan yang responsif, efisien, dalam pelayanan publik		**Indeks Reformasi Birokrasi IUP.50**	**Indeks**	**77,60**	**77,03**	**77,10**	**81,11**	Skor hasil evaluasi Reformasi Birokrasi dari kemen PAN RB	**105,2**	**MT**	**104,52**	**Pemerintah Daerah/ SETDA**
			Indeks Integritas Nasional IUP.54	**Indeks**	**83,78**	**73,97**	**79,71**	**80,17**		**100,58**	**MT**	**95,69**	**Pemerintah Daerah**

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Rumusan Tujuan Renstra PD	Indikator Sasaran RPJMD/ Indikator Tujuan Renstra PD	Satuan	Target Akhir RPJMD 2030	Kondisi Awal 2024	Target RKPD 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan Realisasi	% capaian 2025	Status ketercapaian	% terhadap RPJMD 2030	OPD Penanggung Jawab Urusan
		Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, adaptif dan berintegritas	Indeks Pelayanan Publik Kabupaten IUP.53	**Indeks**	4,29	4,29	4,05	4,1	Hasil Evaluasi Kemenpan RB 4.1	101,23	MT	95,57	SETDA
			Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	BB (75,09)	B (65,69)	B (66,20)	66,4	Hasil Evaluasi MENPAN RB = 66.40	100,3	MT	88,43	SETDA
			Nilai Kapabilitas Inovasi IUP.34	Nilai	3,14	2,43	2,68	2,86	Nilai yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui hasil penilaian Kapabilitas Inovasi Daerah	106,72	MT	91,08	BAPPERIDA
			Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	70,00	64,00	65,00	66	(Realisasi/Target)*100% 66	101,54	MT	94,29	SETWAN
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kajen	Indeks	83,50	81,39	81,00	80,56	(Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi) x Nilai penimbang sesuai permenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017	99,45	AMT	96,48	Kecamatan Kajen
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sragi	Indeks	85,25	85,00	85,00	86,49	(Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi) x Nilai penimbang sesuai permenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017	101,75	MT	101,45	Kecamatan Sragi
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Wiradesa	Indeks	84,90	84,86	84,87	84.91		100.05	MT	100.01	Kecamatan Wiradesa
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kedungwuni	Indeks	90,50	88,10	88,25	88,25	Total dari Nilai persepsi per unsur dikali Nilai Total penimbang dibagi total unsur yang terisi	100	MT	97,51	Kecamatan Kedungwuni
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Buaran	Indeks	83,50	80,50	81,00	81,51	(total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi) x nilai penimbang	100,63	MT	97,62	Kecamatan Buaran

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Rumusan Tujuan Renstra PD	Indikator Sasaran RPJMD/ Indikator Tujuan Renstra PD	Satuan	Target Akhir RPJMD 2030	Kondisi Awal 2024	Target RKPD 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan Realisasi	% capaian 2025	Status ketercapaian	% terhadap RPJMD 2030	OPD Penanggung Jawab Urusan
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tirto	Indeks	81,25	81,00	81,00	85,11		105,073.1	MT	104,749.85	Kecamatan Tirto
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bojong	Indeks	87,00	85,55	85,75	85,78	Total dari Nilai persepsi per unsur dikali Nilai Total penimbang dibagi total unsur yang terisi	100,03	MT	98,6	Kecamatan Bojong
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Wonopringgo	Indeks	84,00	81,60	81,80	93,63	Hasil rata-rata survei kepuasan masyarakat yang dibagikan	114,46	MT	111,46	Kecamatan Wonopringgo
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karanganyar	Indeks	80,00	77,03	77,50	77,50		100	MT	100	Kecamatan Karanganyar
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Doro	Indeks	84,00	81,00	83,3	82,17	(Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi) x Nilai penimbang sesuai permenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017	98,64	TM	97,24	Kecamatan Doro
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Talun	Indeks	82,50	80,50	81,00	81	Total nilai unsur dibagi total unsur yang terisi sama dengan nilai penimbang	100	MT	98,18	Kecamatan Talun
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lebakbarang	Indeks	84,25	83,30	83,30	85,05	(Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi) x Nilai penimbang sesuai permenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017	102,1	MT	100,95	Kecamatan Lebakbarang
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kandangserang	Indeks	80,70	80,43	85,00	85,05	(Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi) x Nilai penimbang sesuai permenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017	100,06	MT	99,47	Kecamatan Kandangserang

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Rumusan Tujuan Renstra PD	Indikator Sasaran RPJMD/ Indikator Tujuan Renstra PD	Satuan	Target Akhir RPJMD 2030	Kondisi Awal 2024	Target RKPD 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan Realisasi	% capaian 2025	Status ketercapaian	% terhadap RPJMD 2030	OPD Penanggung Jawab Urusan
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Paninggaran	Indeks	81,15	80,85	80,90	80,95	(Total dari Nilai Persepsi per Unsur/Total Unsur yang Terisi) x Nilai Penimbang sesuai PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017	100,06	MT	99,75	Kecamatan Paninggaran
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kesesi	Indeks	85,25	84,97	85,00	85,11	(Total dari Nilai Persepsi per Unsur/Total Unsur yang Terisi) x Nilai Penimbang sesuai PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017	100,13	MT	99,84	Kecamatan Kesesi
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Petungkriyono	Indeks	81,30	79,50	79,80	79,80		100	MT	98,15	Kecamatan Petungkriyono
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Wonokerto	Indeks	84,00	81,00	81,50	94,6071		116,09	MT	112,63	Kecamatan Wonokerto
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Siwalan	Indeks	82,50	80,50	81,00	81.52		100.64	MT	98.81	Kecamatan Siwalan
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karangdadap	Indeks	84,00	80,93	81,50	83.63		102.61	MT	99.56	Kecamatan Karangdadap
		Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pemnyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bermartabat	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	2,60	n/a	1,60	3,05		160,62	MT	117,31	Komunikasi Dan Informatika/ DIINKOMINFO
			Indek KAMI (Keamanan Informasi)	Indeks	645	n/a	584	577		98,80	AMT	89,46	Persandian/ DINKOMINFO
		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	84,00	74,60	74,60	78.602	IPPD = (Σ(Nilai Indikator$_n$ × Bobot$_n$)) / (Σ Bobot) 20.602+48.000+10.000	105.36	MT	93.57	Perencanaan/ BAPPERIDA

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Rumusan Tujuan Renstra PD	Indikator Sasaran RPJMD/ Indikator Tujuan Renstra PD	Satuan	Target Akhir RPJMD 2030	Kondisi Awal 2024	Target RKPD 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan Realisasi	% capaian 2025	Status ketercapaian	% terhadap RPJMD 2030	OPD Penanggung Jawab Urusan
		yang didukung dengan ketersediaan data yang valid.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,90	2,60	2,30	2,61		113,48	MT	90	Statistik/ DINKOMINFO
			Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori Baik	%	90,41	40,00	56,82	43,2		76,03	AMT	47,78	Kearsipan/ DINARPUS
		Meningkatkan kompetensi, integritas, dan kinerja ASN secara berkelanjutan guna mendukung terciptanya birokrasi yang bersih, efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.	Nilai NSPK Manajemen ASN	Nilai	85,40	84,90	85,00	86,53	Penilaian Langsung Oleh BKN	101,8	MT	101,32	Kepegawaian/ BKPSDM
		Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaran pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Indeks Reformasi Hukum IUP.51	Indeks	80-100	98,42	80-100	99,76	Hasil Evaluasi Kemenkum HAM	100	MT	100	Sekretariat Daerah/ SETDA
			Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (IKK)	level	Level 3 (3,03)	3	Level 3 (3,01)	2,94 (Level 2)		97,67	AMT	97,03	Pengawasan/ INSPEKTORAT
		Meningkatkan implementasi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel untuk menciptakan pemerintahan yang responsive, efisien dalam pelayanan publik	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	76,00	73,27	74,00	67,68		91,46	AMT	89,05	Keuangan Daerah/ BPKD

Sumber : Bapperida Kab. Pekalongan; data diolah; 2026

Berdasarkan Tabel 4.7 capaian indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 sebanyak 55 indikator kinerja dari 80 indikator kinerja mencapai target RKPD tahun 2025 atau sebesar 68,8% mencapai target dengan predikat kinerja **sedang**, 22 indikator akan

mencapai target (AMT), dan 3 indikator perlu upaya keras (PUK). Kategori persentase capaian terhadap target RKPD 2025 adalah sebagai berikut sebanyak 70 indikator dengan status sangat tinggi, 5 indikator dengan status tinggi, 2 indikator dengan status sedang, dan 3 indikator dengan status sangat rendah.

Persentase capaian indikator kinerja terhadap target akhir RPJMD Tahun 2025-2029 sebanyak 58 indikator dengan status sangat tinggi, 12 indikator dengan status tinggi, 1 indikator dengan status sedang, 2 indikator dengan status rendah dan 7 indikator dengan status sangat rendah. Sebanyak 23 indikator kinerja telah mencapai target akhir RPJMD tahun 2025-2029 atau sebesar 28,75%.

Tabel 2.155.
Evaluasi Program Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
1.	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**														
1.01.	**PENDIDIKAN**												**193..402.073.575**	**188.645.448.507**	
	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya akses, mutu, dan tata kelola layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (IKK)	%	100.00	100.00	100.00	90,00	Jumlah partisipasi 5-6 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	90,00	AMT	90,00			Pendidikan/ DINDIKBUD
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (IKK)	%	100.00	100.00	100.00	99,00	Jumlah partisipasi 7-12 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	99,00	AMT	99,00			
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (IKK)	%	100.00	100.00	100.00	93,00	Jumlah partisipasi 13- 15 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	93,00	AMT	93,00			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 Th yang belum menyelesaikan dikdas dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (IKK)	%	100.00	100.00	100.00	213,38	Jumlah partisipasi 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	213,38	MT	213,38			
			IUP.14. Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	93.60	88.60	91.46	90,00	Jumlah APS 5-6 tahun	98,40	AMT	96,15			
	Program Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya kualitas kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta perkembangan IPTEK.	Persentase muatan kurikulum yang dikembangkan	%	100.00		100.00	100		100	MT	100			
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan dalam mendukung proses pembelajaran yang berkualitas.	Persentase Guru Layak Mengajar	%	90.50		88.00	88,00	Jumlah guru layak mengajar	97,24	AMT	97,24			
			IUP.15. Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan *)	%	65-70		60-65	61,00	Jumlah satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	87,14	AMT	87,14			
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Meningkatnya kepatuhan dan tata kelola lembaga pendidikan	Persentase Rekomendasi perizinan Pendidikan yang diterbitkan (PAUD/SD/SMP)		100.00	100.00	100.00	100		100	MT	100			
	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Meningkatnya pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan bahasa dan sastra daerah dan nasional pada	Persentase satuan pendidikan yang telah mengembangkan Bahasa dan Sastra Jawa	%	100.00	100.00	100.00	100,00	Jumlah satuan pendidikan yang telah mengembangkan Bahasa dan Sastra Jawa	100,00	MT	100,00			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
		satuan pendidikan													
1.02.	**KESEHATAN**												**551.954.135.178**	**508.151.029.762**	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya ketersediaan dan kompetensi tenaga kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas.	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	%	4,24	0.00	2.70	2,6413	Jumlah tenaga kesehatan dibagi jumlah penduduk dikalikan 100	97,83	AMT	62,29			Kesehatan/ DINKES
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Meningkatnya ketersediaan, keamanan, mutu, dan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, serta makanan dan minuman yang memenuhi standar.	Cakupan sarana kefarmasian dan sarana pengelolaan pangan sesuai standar	%	100.00	100.00	100.00	100,00	Jumlah Apotek dan toko Obat yang memenuhi seluruh persyaratan perizinan dibagi Jumlah total apotek dan Toko obat di wilayah kerja pemerintah daerah kabupaten/kota yang menjadi target pemeriksaan (sesuai jangka waktu tertentu) dikalikan 100 persen	100,00	MT	100,00			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya peran serta dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan kesehatan	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	100.00	-	52.63	52,6316	Jumlah penduduk umur ≥15 tahun yang melakukan aktivitas fisik cukup dibagi Jumlah penduduk umur ≥15 tahun yang diukur dikalikan 100%	100,00	MT	52,6316			
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan	Meningkatnya cakupan dan mutu pelayanan kesehatan perorangan	Persentase Fasyankes yang memenuhi unit layanan kesehatan sesuai standar	%	67,37		56,48	100,00	Jumlah fasyankes yang memenuhi unit layanan sesuai standar dibagi total fasyankes dikalikan 100% (29/29)*100	177.05	MT	148.43			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
		dan masyarakat secara kematian balita	Jumlah	kasus	189.00	211.00	204.00	190	jumlah kematian balita pada suatu wilayah pada kurun waktu satu tahun	106,86	MT	99,47			
		menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.	Persentase Puskesmas dengan wilayah kerjanya memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	%	46,15	-	7,69	0	Tidak dilaksankan	-	-	-			
			Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	%	85.00	-	65.00	43.2628	jumlah balita gizi kurang dengan atau tanpa stunting yang mendapatkan makanan tambahan berbahan pangan lokal dibagi jumlah seluruh balita usia 6-59 bulan gizi kurang dengan atau tanpa stunting) x 100% (1615/3733)*100	66.56	AMT	50.9			
		selama	Pemeriksaan ANC 6 kali masa kehamilan	%	90.00	-	80.00	96,97	ibu hamil yang mendapatkan pelayanan terpadu dan komprehensif sesuai standar selama kehamilannya minimal 6 kali selama kehamilannya dengan distribusi waktu 1 kali pada trimester I, 2 kali pada trimester II, 3 kali dan pada trimester III dibagi dengan jumlah ibu hamil dikalikan 100%	121,21	MT	107,74			
			Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%	80.00	-	30.00	34.2008	Jumlah orang yang dilayani CKG dibagi Jumlah penduduk kab. pekalongan dikalikan 100 (345498/1010205)*100	114	MT	42,75			
			Angka populasi bebas penyakit menular	%	95.00	-	90.00	92,2	Jumlah puskesmas yang memenuhi keberhasilan pengobatan TB > 90%, penemuan TB > 90%,	101,33	MT	96			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
									eradikasi frambusia, eliminasi malaria dibagi jumlah puskesmas dikali 100						
			Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	80.50	-	80.00	80,00	Jumlah Peserta JKN Aktif dibagi jumlah penduduk dikalikan 100%	100	MT	99,5			
1.03.	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**												**86.403.095.740**	**80.307.690.698**	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air secara berkelanjutan	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi ((Sumber : IKK)	rasio	3.768	3.658	3.677	3,6986	Luas irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting dibagi Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota (IKK)	100,59	MT	98,16			DPUPR
			Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota (IKK)	rasio	86.83	0	82.15	81,70	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha) dibagi Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten (ha) (Sumber : IKK)	99,45	AMT	94,09			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
			Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi,dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kabupaten/Kota (IKK)	rasio	90.10	77.42	79.54	77,43	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/kota (ha.m2) dibagi Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi diWS Kewenangan Kabupaten/kota (ha,m2) dikalikan 100	97,35	AMT	85,94			
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya akses air minum layak bagi penduduk	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	89.39	88.47	88.62	89,3466	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten/kota (layak) = 116996 + 56121 dibagi Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten/kota bersangkutan = 193759 dikali 100 (Sumber : IKK)	100,82	MT	89,39			
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Terpenuhinya sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase TPA/TPST terbangun	%	68.75	67.82	68	65,3846	Jumlah TPA dan TPS-3R Kondisi Baik dibagi jumlah TPA dan TPS3R dikali 100 (17/26)*100	96,15	AMT	95,09			
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya cakupan dan kualitas pengelolaan air	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah	%	63.11	62.21	62.35	62,23	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah	99,81	AMT	98,61			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
		limbah domestik	domestik (IKK)						yang lumpr tinjanya telah diolah di PLT + Jumlah rumah memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD dibagi jumlah rumah Kabupaten/kota. (IKK)						
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Meningkatnya kapasitas sistem drainase jalan	Persentase Drainase (jalan) kondisi baik	%	44.74	44.5	44.54	44,7946	Panjang drainase jalan kondisi mantap = 135.58+2.0595+174.98 KM dibagi total panjang drainase jalan = 697.896 KM dikali 100	100,57	MT	100,12			
	Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya kualitas bangunan gedung yang aman, fungsional, dan sesuai dengan kaidah tata bangunan.	Mengukur rasio kepatuhan IMB kab/ kota (IKK)	%	100.00	100.00	100.00	100		100	MT	100			
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Meningkatnya penataan kawasan dan lingkungan yang sesuai dengan RTBL	Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	%	100	22.22	33.34	40	Persentase kawasan / lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan rencana tata bangunan dan lingkungannya dibagi jumlah Kawasan (2/5)*100	100	MT	50			
	Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya kualitas jaringan jalan untuk mendukung mobilitas dan pertumbuhan wilayah.	Tingkat kemantapan jalan Kabupaten (IKK)	%	76.54	78.29	78.69	79,0313	Jumlah Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sedang) dibagi Jumlah total Panjang jalan Kabupaten ((300.274+251.282)/697.896)*100	100,43	MT	97,94			
			Tingkat kemantapan Jembatan	%	89.589	87.248	87.248	85,2349	Jumlah Jembatan dalam kondisi mantap (baik dan sedang) dibagi Jumlah	97,69	AMT	95,14			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
									total jembatan Kabupaten ((374+7)/447)*100						
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatnya kualitas pelaku jasa konstruksi dalam mendukung pembangunan infrastruktur	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (IKK)	%	72.28	33.15	39.67	39,6739	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis dibagi Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah Kabupaten/ kota (IKK) (146/368)*100	100,01	MT	54,89			
			Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (IKK)	%	100	100	100	100		100,00	MT	100,00			
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas penataan ruang wilayah.	Persentase Kawasan yang memiliki RDTRK/RTRK/RTBL	%	71.43	27.76	28.57	28,5714	jumlah kawasan yang sesuai dengan rencana tata ruang bagi jumlah seluruh kawasan (pusat pelayan kegiatan = 7) (2/7)*100	100	MT	50			
1.04.	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN**												**5.283.609.862**	**5.195.982.882**	
	Program Pengembangan Perumahan	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan masyarakat terdampak relokasi program	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (IKK)	%	100.00	100.00	100.00	100,00	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n (5 unit rumah) dibagi Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n (5 unit rumah) x 100%	100,00	MT	100,00			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman/ DINAS PERKIM LH
			Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak	%	100.00	100.00	100.00	100,00	Jumlah rumah terdampak program yang tertangani dibagi jumlah	100,00	MT	100,00			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
			relokasi program pemerintah kabupaten/kota (IKK)						total rumah yang terdampak x 100%						
	Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani (IKK)	%	2.35	0	2.10	12,114	Luasan kawasan kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (9.846 Ha) dibagi luas total kawasan kumuh dibawah 10 ha (81.278 Ha) x 100	576,86	MT	515,49			
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Meningkatnya RTLH yang ditangani	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (IKK)	%	3.72	3.62	3.08	8,2343	Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni (18808 unit rumah) dibagi Jumlah total unit rumah Kabupaten/Kota (214176 unit rumah) * 100%	267,35	MT	221,35			
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas prasarana, sarana, dan utilitas umum dalam mendukung hunian yang layak.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK)	%	100.00	100.00	100.00	100.00	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU dibagi Jumlah unit rumah Kabupaten/Kota dikali 100%	100.00	MT	100.00			
	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya mutu layanan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah pengembang yang difasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi	Jumlah	12.00	12.00	12.00	12.00	Jumlah pengembang yang difasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi (12 pengembang)	12.00	MT	12.00			
1.05.	**KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**												**15.607.490.990**	**6.211.478.655**	
	Program Peningkatan Ketenteraman dan	Meningkatnya rasa aman, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	(Jumlah Pengaduan yang Terselesaikan / Jumlah Pengaduan Pelanggaran yang masuk) x 100%	100,00	MT	100,00			Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
	Ketertiban Umum		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Jumlah gangguan Trantibum yang diselesaikan / Jumlah seluruh gangguan Trantibum yang terjadi x 100%	100,00	MT	100,00			Perlindungan Masyarakat/ SATPO PP
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Meningkatnya kesiapsiagaan dan kecepatan respon dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan non-kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (IKK)	%	25.25	23.88	24,00	25,00	(Jumlah Layanan Pemadam dalam Daerah + Jumlah Relawan yang dibentuk oleh Kabupaten) x 100%	104,17	MT	99,01			
			Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (IKK)	menit	27,00	27,00	27,00	30,00	Waktu tiba di lokasi - Waktu Laporan diterima	88,89	AMT	88,89			
			Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban non Kebakaran	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Jumlah Korban yang Berhasil diselamatkan dan Dievakuasi / Jumlah total Korban dalam Kejadian Non Kebakaran) x 100%	100,00	MT	100,00			
	Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya ketangguhan daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui upaya mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat bencana yang terintegrasi.	Persentase Warga NegaraYang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	(Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan & evakuasi/ Jumlah warga negara yang terdampak/terancam bencana) X 100 %	100,00	MT	100,00			BPBD
			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuassi korban bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan & evakuasi/ Jumlah warga negara yang terdampak/terancam bencana) X 100 %	100,00	MT	100,00			
			Persentase Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)yang disusun	%	100,00	100,00	100,00	100,00	(Jumlah Dokumen R3P yang disusun/Jumlah target dokumen R3P yang disusun)	100,00	MT	100,00			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
1.06.	**SOSIAL**												**4.007.782.120**	**3.804.785.052**	
	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya kualitas PSKS dalam pembangunan kesejahteraan sosial.	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	%	34,50	31,19	32,00	44,1633	(Jumlah PSKS yang aktif ÷ Jumlah seluruh PSKS yang terdaftar) × 100%	138,01	MT	128,01			Sosial/ DINSOS
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Meningkatnya perlindungan dan pemulihan hak-hak sosial warga negara migran korban tindak kekerasan.	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	(Jumlah Warga Negara Migran korban tindak kekerasan yang tertangani ÷ Jumlah seluruh Warga Negara Migran korban tindak kekerasan yang terdata) × 100%	100,00	MT	100,00			
	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya pemulihan dan fungsi sosial individu, keluarga, dan kelompok rentan untuk hidup mandiri.	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	(Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ÷ Jumlah seluruh penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terdata sebagai sasaran) × 100% 55/55*100	100,00	MT	100,00			
			Persentase Pemerlu Penanganan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di luar Standar Pelayanan Minimal (SPM) terlayani (%)	%	40,00	-	30,00	46,54,26	Jumlah PPKS di luar SPM yang terlayani ÷ Jumlah seluruh PPKS di luar SPM yang terdata sebagai sasaran) × 100% 1575/3384*100	155,14	MT	116,36			
	Program Perlindungan Dan	Meningkatnya perlindungan dan	Persentase Pemerlu Penanganan	%	10,37	-	0,70	3,7808	(Jumlah PPKS Fakir Miskin yang tergraduasi	1.260,27	MT	36,46			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
	Jaminan Sosial	jaminan sosial bagi PPKS	Kesejahteraan Sosial (PPKS) Fakir Miskin yang Tergraduasi						÷ Jumlah seluruh PPKS Fakir Miskin Penerima PKH) × 100% 1242/32850*100						
	Program Penanganan Bencana	Meningkatnya kapasitas tanggap darurat dan perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	(Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat ÷ Jumlah seluruh korban bencana alam dan sosial yang terdata) × 100% 2698/2698*100	100,00	MT	100,00			
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Terpenuhinya sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan sesuai standar	Persentase sarana prasarana taman makam pahlawan yang sesuai dengan standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	(Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang tersedia dan memenuhi standar ÷ Jumlah seluruh sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang dipersyaratkan sesuai standar) × 100% 1/1*100	100,00	MT	100,00			
2	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**														
2.01.	**TENAGA KERJA**														
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengambilan kebijakan tenaga kerja yang efektif.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100*		100,00	MT	100,00			**Tenaga Kerja/ DINKOP UKM NAKER**
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (IKK)	%	35,00		30,00	30,40		101,00	MT	86,85			
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (IKK)	%	40,80		40,41	40,41*		100,00	MT	100,00			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja bagi calon tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota (IKK)	%	20,88		20,22	737		3.644,91	MT	3.529,69			
	Program Hubungan Industrial	Meningkatnya kualitas hubungan industrial antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.	IUP.38. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan *)	%	27,80	27,52	100,00	50		50	PUK	179,86			
			Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	96,4		96,4	AMT	96,4			
2.02.	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER**												**12.236.035.420**	**12.131.985.739**	
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya implementasi PUG dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	Persentase Anggaran responsif gender (ARG) dalam belanja langsung APBD (IKK)	%	6,82	6,76	6,76	6,7627	Jumlah anggaran responsif gender (ARG) dibagi jumlah belanja operasi dan belanja modal dikali 100 (116857854878/1727988536517)*100	100,04	MT	99,16			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/ DINAS P3A
	Program Perlindungan Perempuan	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (IKK)	Rasio	13,64	15,00	15,00	11,5618	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan dan TPPO dibagi jumlah penduduk perempuan dikali 100 (34/294072)*100000	122,92	MT	115,24			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya ketahanan dan kualitas keluarga sebagai unit terkecil dalam pembangunan kesejahteraan sosial.	Tingkat pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan anak sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Jumlah puspaga yang berperspektif gender dibagi jumlah puspaga yang terbentuk dikali 100 (1/1)*100	100,00	MT	100,00			
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Tersedianya data terpilah dan sistem informasi gender dan anak yang akurat dan dapat dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan.	Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Jumlah OPD yang memanfaatkan data gender dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan dibagi jumlah OPD dikali 100 (26/26)*100	100,00	MT	100,00			
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak dalam lingkungan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi.	Persentase hak-hak anak yang telah diimplementasikan	%	100,00	40,00	50,00	50,00	Jumlah indikator klaster hak anak yang telah diimplementasikan dibagi jumlah indikator klaster hak anak dikali 100 (12/24)*100	100,00	MT	50,00			
	Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya perlindungan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Jumlah pengaduan anak korban kekerasan dan TPPO dibagi Jumlah anak korban kekerasan dan TPPO yang ditangani dikali 100 (46/46)*100	100,00	MT	100,00			
2.03.	**PANGAN**												**592.183.585**	**508.676.550**	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya ketersediaan dan akses sumber daya pangan lokal yang mendukung kedaulatan dan kemandirian	Persentase Cadangan Pangan (IKK)	%	100,00	2,08	100,00	126,50	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dibagi Jumlah Cadangan Pangan Sesuai Perbup dikali 100. (18975/15000)*100	126,50	MT	126,50			Pangan/ DKPP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
		pangan daerah.													
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) serta ketahanan pangan rumah tangga.	Konsumsi energi per kapita	(Kkal/kap/hari)	2,100,00	2,156,00	2,100,00	2.153,25	Konsumsi energi per kapita	102,54	MT	102,54			
			Konsumsi protein per kapita	(Kkal/kap/hari)	57,00	66,62	57,00	66,30	Konsumsi Protein Per kapita	116,32	MT	116,32			
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat	Rasio ketersediaan pangan masyarakat terhadap kebutuhan pangan /beras	%	400,00	350,00	350,00	420,00		120,00	MT	105,00			
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya jaminan keamanan pangan segar asal tumbuhan dan hewan yang dikonsumsi masyarakat.	Persentase pangan segar yang aman yang aman di konsumsi	i0	85,00	79,05	80,00	77,70	Jumlah pangan aman /jumlah sampel yang diambil dikali 100 persen	97,13	AMT	91,41			
2.04.	**PERTANAHAN**												**205.599.960**	**85.506.400**	
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Meningkatnya kepastian hukum dan penyelesaian konflik atas tanah garapan secara adil dan damai.	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani dibagi jumlah pengaduan sengketa tanah Garapan (Sumber : IKK	100,00	MT	100,00			Pertanahan/ DPU TARU
	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Meningkatnya pemerataan penguasaan dan pemilikan tanah	Persentase ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Jumlah penerima Tanah Obyek Landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 Ha dibagi jumlah penerima tanah Obyek Landreform (IKK).	100,00	MT	100,00			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
	Program Penatagunaan Tanah	Tertatanya penggunaan dan pemanfaatan tanah secara optimal	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Luas Tanah yang diadakan/dibebaskan Untuk Kepentingan Umum = 2.07 Ha dibagi Luas Tanah yang di rencanakan di bebaskan = 2.07 Ha di kali 100	100,00	MT	100,00			
2.05.	**LINGKUNGAN HIDUP**												**9.584.400.830**	**8.687.768.324**	
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tersusunnya dokumen perencanaan lingkungan hidup yang berkualitas sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan berkelanjutan.	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Jumlah dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup berkualitas (1 dok) dibagi jumlah dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup yang harus disusun (1 dok) x 100%	100,00	MT	100,00			Lingkungan Hidup/ DINAS PERKIM LH
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan	1. persentase Dokumen Hasil Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	%	100,00	-	100,00	100,00	Jumlah dokumen hasil Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan hidup (1 dok) dibagi Dokumen yang direncanakan (1 dok) x 100%	100,00	MT	100,00			
			2. persentase Peningkatan Luas Pemulihan Kerusakan Lingkungan yang ditangani	%	100,00	-	100,00	369,1304	Luas Pemulihan Kualitas Lingkungan yang ditangani (42.45 Ha) dibagi Luas Pemulihan Kualitas Lingkungan yang direncanakan (11.50) x 100%	369,1304	MT	369,1304			
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Terlestarikannya keanekaragaman hayati sebagai bagian dari daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.	Persentase RTH dan Taman Kehati lainnya dalam kondisi baik	%	85,00	-	67,00	69,2308	Jumlah RTH dan Taman Kehati lainnya dalam kondisi baik (27 rth) dibagi Jumlah Total RTH dan Taman Kehati lainnya kondisi baik (39 rth) x 100%	103,33	MT	121,56			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
			Persentase ketersediaan dokumen pengelolaan kehati (perencanaan, penilaian dan evaluasi kehati)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Jumlah Dokumen yang tersusun di tahun tertentu (1 dok) dibagi Jumlah Dokumen yang direncanakan di tahun tertentu (1 dok) x 100%	100,00	MT	100,00			
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Meningkatnya pengelolaan B3 dan Limbah B3 yang aman, terkendali, dan sesuai dengan standar lingkungan.	Persentase pelaku usaha dan/atau Kegiatan yang telah memenuhi rincian teknis pengelolaan limbah B3	%	88,00	-	83,00	100,00	Jumlah pelaku usaha dan /atau kegiatan yang taat pengelolaan limbah B3 (13 perusahaan) dibagi pelaku usaha dan /atau kegiatan yang dibina (13 perusahaan) x 100%	120,48	MT	113,64			
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kegiatan terhadap perizinan lingkungan hidup dan ketentuan PPLH.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota (IKK)	%	50,00	-	100,00	83,33	Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota (15 usaha) dibagi Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan (18 usaha) x 100%	83,33	AMT	166,66			
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Jumlah kelompok Masyarakat yang dididik dan dilatih (10 kelompok) dibagi Jumlah kelompok Masyarakat yang direncanakan akan dididik dan dilatih (10 kelompok) x 100	100,00	MT	100,00			
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya motivasi dan peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan melalui	Jumlah Lembaga dan/atau Perorangan yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup	Lembaga/ Perorangan	13,00	26,00	19,00	26		136,84	MT	200,00			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
		sistem penghargaan lingkungan hidup.													
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Meningkatnya responsivitas dan penyelesaian pengaduan masyarakat terkait isu lingkungan hidup secara cepat dan tepat.	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti (13 aduan) dibagi Jumlah pengaduan yang masuk (13 aduan) x 100%	100,00	MT	100,00			
	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya pengelolaan sampah dari sumber hingga ke TPA.	IUP.47. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	30,00	4,01	12,83	25,9395	Jumlah Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (38591.45 ton) dibagi Jumlah Timbulan Sampah (148774.88 ton) x 100%	202,18	MT	673,93			
			Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota (IKK)	%	63,75	33,50	46,58	59,3053	Total Volume Sampah yang ditangani (88231.45 ton) dibagi Total volume timbunan sampah kabupaten/kota (148774.88 ton) x 100%	127,32	MT	199,72			
2.06.	**KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**												**188.115.700**	**188.110.700**	
	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan penduduk secara menyeluruh dan berkelanjutan.	Persentase Perekaman KTP Elektronik (IKK)	%	99,996	99,99	99,991	98,9635	Perbandingan jumlah perekaman KTP Elektronik dengan Wajib KTP Elektronik x 100% 756.654/764.579*100	98,97	AMT	98,97			Kependudukan dan Pencatatan Sipil/ DINDUKCAPIL
			Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (IKK)	%	61,00	60,71	60,75	61,4377	Perbandingan anak usia 0 - 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA dengan anak usia 0 - 17 tahun kurang 1 (satu) hari 171.179/278.622*100	101,13	MT	100,72			
	Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya kepemilikan	Persentase Kepemilikan Akta Kematian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Kepemilikan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang	100,00	MT	100,00			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
		dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian,							dilaporkan x 100% 13.870/13.870*100						
			Persentase kepemilikan akta kelahiran (IKK)	%	97,56	97,50	97,51	97,9117	Perbandingan penduduk usia 0 – 18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran dengan semua penduduk usia 0 – 18 tahun x 100% 287.931/294.072*100	100,41	MT	100,36			
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersedianya sistem informasi administrasi kependudukan yang andal, terintegrasi, dan mudah diakses untuk pelayanan publik dan perencanaan pembangunan.	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK)	perangkat daerah	6,00	-	1,00	1,00	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama 1/1	100,00	MT	100,00			
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Tersedianya data dan profil kependudukan yang akurat, mutakhir, dan dapat dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan berbasis data.	Cakupan penerbitan profil kependudukan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Jumlah dokumen profil kependudukan yang diterbitkan	100,00	MT	100,00			
2.07.	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**												**7.502.894.622**	**6.449.364.152**	
	Program Penataan Desa	Tertatanya wilayah administrasi desa s sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Persentase desa yang difasilitasi dalam kegiatan penataan desa	%	69,49	-	17,65	31,98	Jumlah desa yang difasilitasi kegiatan penataan desa dibagi jumlah total desa kali 100	181,19	MT	46,02			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ DINAS PMD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Meningkatnya jejaring kerja sama antar-desa dan pihak lain dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.	Persentase desa yang terfasilitasi kerjasama desa	%	38,24	18,01	19,85	113,00	Jumlah desa yang terfasilitasi kerjasama desa dibagi jumlah desa kali 100	58,66	PUK	58,66			
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam pelayanan publik.	Persentase desa yang melaksanakan pelayanan dan administrasi pemerintahan desa yang baik	%	50,00	-	30,00	30,15	Jumlah desa yang melaksanakan pelayanan dan administrasi pemerintahan desa yang baik dibagi jumlah desa kali 100	100,50	MT	60,30			
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya peran dan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dibina	%	21,66	1,52	4,79	4,13	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina dibagi jumlah lembaga kemasyarakatan dikali 100	86,22	AMT	19,07			
2.08.	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**														
	Program Pengendalian Penduduk	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Persentase kampung keluarga berkualitas mandiri	%	10,00	7,40	7,50	7,71		102,92	MT	77,71			DINAS P3A
			Indeks pembangunan berwawasan kependudukan	Skala	72,00	66,00	67,00	67		100	MT	93,05			
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan program KB	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (IKK)	%	62,60	67,00	62,10	62,17		100,11	MT	99,31			
			Persentase Kehamilan tidak diinginkan	%	14,50	18,00	17,40	12,55		127,86	MT	113,4483			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Meningkatnya ketahanan, kemandirian, dan kesejahteraan keluarga melalui lembaga ketahanan keluarga	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	%	38,00	37,13	37,18	37,18		100,01	MT	97,84			
			Indeks Lansia Berdaya	Indeks	58,6	56,2	56,6	71,4		126,15	MT	147,09			
			Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	%	88,5	85,7	86,2	86,2		100	MT	97,40			
2.09.	**PERHUBUNGAN**												**38.410.736.400**	**37.503.563.541**	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya kelancaran, keselamatan, dan keteraturan lalu lintas serta kualitas pelayanan angkutan jalan yang aman, tertib, dan berkelanjutan.	Persentase Perlengkapan Jalan dalam kondisi baik	%	76,17	73,17	73,67	75,64	Jumlah rambu lalu lintas dalam kondisi baik dibagi jumlah rambu lalu lintas yang terpasang dikali 100%	102,67	MT	99,96			Perhubungan/ DINHUB
			Persentase kepemilikan KIR	%	82,00	76,41	77,00	71,00	Jumlah kendaraan yang memiliki KIR dibagi jumlah kendaraan wajib uji KIR dikali 100%	92,21	AMT	87,65			
			Persentase angkutan umum dalam kondisi baik	%	71,20	69,30	70,18	68,61	Jumlah kendaraan angkutan umum dalam kondisi baik dibagi jumlah total kendaraan angkutan umum dikali 100%	97,76	AMT	96,63			
			Rasio Penanganan Daerah Rawan kecelakaan (DRK)	angka	0,29	0,03	0,08	0,07	Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) yang telah ditangani dibagi jumlah DRK yang ada di Kabupaten	87,50	AMT	28,00			
2.10.	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**														
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Meningkatnya diseminasi informasi yang akurat, transparan, dan inklusif	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan	%	100,00	65,00	70,00	70,00	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	100,00	MT	100,00			Komunikasi dan Informatika/ DINKOMINFO

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
			Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						kabupaten/kota dibagi jumlah penduduk						
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) melalui pengembangan dan pemanfaatan aplikasi informatika yang terpadu dan andal.	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dibagi jumlah OPD dikali 100	100,00	MT	100,00			
			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	28,00	22,00	23,00	30,00	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dibagi jumlah layanan publik dikali 100	130,43	MT	107,14			
2.11.	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**														
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Meningkatnya legalitas usaha simpan pinjam koperasi	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	%	100,00	100,00	100,00	-	Tidak dilaksanakan	-	-	-			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah/ DINKOP UKM NAKER
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya kepatuhan koperasi terhadap prinsip tata kelola yang sehat dan regulasi yang berlaku.	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	%	100,00	100,00	100,00	50,00		50,00	PUK	50,00			
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Meningkatnya kinerja dan keberlanjutan usaha KSP/USP koperasi	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	-	Tidak dilaksanakan	-	-	-			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia koperasi dalam pengelolaan usaha	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	%	100,00	100,00	100,00	-	Tidak dilaksanakan	-	-	-			
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya kemandirian koperasi	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	%	75,00		50,00	18,90		37,80	PUK	25,20			
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya kapasitas dan keberlanjutan usaha UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha (IKK)	%	35,00		20,00	170		850	MT	480			
	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya akses pasar, pembiayaan, teknologi, dan inovasi bagi UMKM dalam rangka peningkatan produktivitas	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	%	75,00		50,00	598,00		1.196,00	MT	797,33			
2.12.	**PENANAMAN MODAL**												**393.796.580**	**392.152.180**	
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya daya tarik daerah sebagai lokasi investasi	Persentase pemutakhiran data potensi invesatasi	%	19,23	0	0	0		100,00	MT	100,00			Penanaman Modal/ DINAS PM PTSP
	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya minat dan realisasi investasi di daerah	Persentase promosi di kab pekalongan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Jumlah kegiatan promosi/Jumlah undangan x100	100,00	MT	100,00			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya kualitas dan kecepatan pelayanan perizinan penanaman modal yang terintegrasi dan berbasis elektronik.	persentase izin yang diterbitkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	jumlah izin yang diterbitkan /jumlah izin yang diajukan sudah terverifikasi x100	100,00	MT	100,00			
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha/investor sesuai ketentuan perizinan dan rencana investasi yang telah ditetapkan.	Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM	%	47,73	47,12	47,27	97,0268	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM/Jumlah perusahaan yang wajib melaporkan LKPM x100	205,26	MT	203,28			
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Tersedianya data dan sistem informasi penanaman modal yang akurat, terintegrasi, dan mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.	Persentase layanan Informasi pelayanan publik yang terintegrasi	%	100,00	100,00	100,00	100,0	jumlah jenis izin yang dilayani/jumlah jenis izin yang terintegrasi dalam sistemx100	100,0	MT	100,0			
2.13.	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**												**9.320.093.100**	**8.520.401.880**	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan daya saing pemuda dalam pembangunan daerah	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (IKK)	%	5,38	5,22	5,24	5,2493	Jumlah pemuda yang berwirausaha / jumlah pemuda yang berpartisipasi aktif dalam organisasi kepemudaan x 100	100,18	MT	97,57			Kepemudaan dan Olahraga/ DINPORAPAR
			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (IKK)	%	7,80	7,50	7,55	8,1098	Jumlah pemuda yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan di kabupaten/ jumlah pemuda di kabupaten x 100	107,41	MT	103,97			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya prestasi, partisipasi, dan budaya olahraga di masyarakat	Peningkatan Prestasi Olahraga (IKK)	%	48,00	37,71	38,00	39,8305	(Jumlah atlet berprestasi tingkat regional dan nasional / Jumlah atlet yang dikirim) * 100	104,82	MT	82,98			
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Meningkatnya kualitas dan kapasitas kepramukaan	Persentase kwartir ranting yang aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	kelompok aktif / kelompok di kab. pekalongan) x 100	100,00	MT	100,00			
2.14.	**STATISTIK**												**67.751.490**	**65.826.700**	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tersedianya data dan statistik sektoral untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah.	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dibagi jumlah Perangkat Daerah 48/48*100	100,00	MT	100,00			Statistik/ DINKOMINFO
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah dibagi jumlah Perangkat Daerah 48/48*100	100,00	MT	100,00			
2.15.	**KEBUDAYAAN**												**1.721.502.000**	**1.648.665.100**	
	Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah secara berkelanjutan	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	MT	100,00			Kebudayaan/ DINDIKBUD
			Terlestarikannya Cagar Budaya (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Jumlah Terlestarikannya cagar budaya	100,00	MT	100,00			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Meningkatnya eksistensi dan apresiasi masyarakat terhadap kesenian tradisional daerah	Cakupan gelar seni budaya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Jumlah Cakupan gelar seni budaya	100,00	MT	100,00			
	Program Pembinaan Sejarah	Meningkatnya pemahaman dan kecintaan masyarakat terhadap sejarah dan jati diri bangsa	Cakupan Pelestarian Sejarah Lokal	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Jumlah Cakupan Pelestarian Sejarah Lokal	100,00	MT	100,00			
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Terlestarikannya cagar budaya sebagai warisan sejarah dan identitas daerah	Cakupan cagar budaya yang dilestarikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	100,00	MT	100,00			
2.16.	**PERSANDIAN**												**87.655.500**	**84.245.000**	
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		Tingkat keamanan informasi pemerintah	Nilai	2		1	2	Sesuai hasil penilaian Indeks KAMI 2	200	MT	100			Statistik/ DINKOMINFO
2.17.	**PERPUSTAKAAN**												**1.068.276.750**	**1.002.097.855**	
	Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya kualitas layanan dan akses masyarakat terhadap perpustakaan sebagai pusat pembelajaran	IUP.19.Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	0,73	0,09	0,09	0,09	Jumlah kunjungan dibagi jumlah penduduk x 100%	100,00	MT	100,00			Perpustakaan/ DINARPUS
			Persentase Perpustakaan yang dibina	%	49,00	47,05	47,15	47,05	Jumlah perpustakaan yang di bina dibagi seluruh jumlah perpustakaan x 100 %	99,79	AMT	96,02			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Terlestarikannya koleksi nasional dan naskah kuno sebagai warisan budaya dan sumber pengetahuan bangsa	Persentase naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayah nya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/alih media dibagi jumlah naskah kuno terdaftar di wilayah tersebut x 100 %	100,00	MT	100,00			
2.18.	**KEARSIPAN**												**207.062.750**	**203.078.274**	
	Program Pengelolaan Arsip	Meningkatnya tertib arsip dinamis dan statis dalam mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Tingkat Ketersediaan Arsip=Jumlah arsip yang seharusnya tersedia sesuai tugas dan fungsi dibagi Jumlah arsip yang tersedia, terkelola, dan dapat diakses sesuai ketentuan×100%	100,00	MT	100,00			Perpustakaan/ DINARPUS
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Terjaminnya keamanan dan keberlangsungan arsip vital serta arsip statis sebagai memori kolektif bangsa	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip=Jumlah arsip yang seharusnya ada dibagi Jumlah arsip yang ada dan utuh ×100%	100,00	MT	100,00			
	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Meningkatnya pemanfaatan arsip oleh publik secara tertib, aman, dan sesuai ketentuan	Persentase pengguna arsip tertutup yang menerapkan SOP	%	100,00	100,00	100,00	100		100,00	MT	100,00			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
		perundang-undangan													
3.	**URUSAN PILIHAN**														
3.01.	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**												**2.082.088.375**	**2.076.398.250**	
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produktivitas dan keberlanjutan usaha perikanan tangkap	Total Produksi Perikanan (Tangkap) kabupaten/kota (IKK)	Ton	6.443,00	5.983,22	6.067,00	6.901,493	Produksi Perikanan Tangkap	113,75	MT	105,71			Kelautan dan Perikanan/ DINLUTKAN
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya produktivitas dan keberlanjutan usaha perikanan budidaya	Total Produksi Perikanan (Budidaya) kabupaten/kota (IKK)	Ton	10.174,00	9.223,00	9.485,00	9.485,686	Produksi Perikanan Budidaya	100,01	MT	91,54			
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha/kelompok masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	persentase Kelompok Masyarakat Pengawas yang Terbina	%	92,50	75,00	87,50	100	Jumlah kelompok masyarakat pengawas yang dibina dibagi jumlah seluruh kelompok masyarakat pengawas dikali 100	114,29	MT	105,26			
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya nilai tambah dan akses pasar hasil perikanan	Konsumsi Ikan Masyarakat (KIM)	(kg/kapita/ tahun)	35,41	33,26	26,18	19,72	Konsumsi Dalam Rumah Tangga (Hasil Susenas BPS) ditambah Konsumsi Luar Rumah Tangga ditambah Konsumsi Tidak Tercatat	75,33	AMT	55,69			
3.02.	**PARIWISATA**												**1.844.483.395**	**1.784.532.924**	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya kualitas dan daya saing destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan destinasi wisata	%	5,00	30,30	5,00	10	(jumlah destinasi wisata baru / jumlah destinasi wisata pada tahun dasar (2021) x100	200,00	MT	200,00			Pariwisata/ DINPORAPAR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
	Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan melalui promosi pariwisata yang efektif dan terintegrasi.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota (IKK)	%	11,30	10,71	10,80	7,2968	jumlah wisatawan tahun n - jumlah wisatawan tahun n-1) : jumlah wisatawan tahun n-1))x100	67,56	PUK	64,57			
			Tingkat hunian akomodasi (IKK)	%	2,00	n/a	2,00	21,3828	Jumlah hunian yang terpakai dibagi jumlah hunian yang tersedia*100	1.069,14	MT	1.069,14			
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya kapasitas dan daya saing pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	Cakupan kelompok usaha Pariwisata dan ekraf yang dibina	%	59,00	55,00	55,00	54,0541	Jumlah SDM kepariwisataan dan ekraf yang aktif/Jumlah SDM kepariwisataan dan ekraf yang ada x 100	108,11	MT	91,62			
3.03.	**PERTANIAN**												**10.757.029.273**	**10.593.234.143**	
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana produksi pertanian	Produksi ternak (daging, telur dan susu)	Kg	19.537.558,00	18.988.961	18.790.233	18.792.442	Jumlah produksi daging ditambah produksi telur per tahun	100,01	MT	96,19			Pertanian/ DKPP
			Produksi produk hortikultura (durian dan alpukat)	Kw/Tahun	231.716,00	230.331,00	230.561,00	276.065,10	Jumlah Produksi produk Hortikultura per tahun (Durian dan Alpukat)	119,74	MT	119,74			
			Produktivitas pertanian per hektar per tahun (IKK)	Kw/Ha	53,86	53,32	53,46	52,179	221.312/42.414*100	97,60	AMT	96,88			
			Produksi GKP UPT	Ton	12,00	12,00	12,00	12,00		100,00	MT	100,00			
			Persentase LKMA PUAP Terdampingi	%	100,00	9,88	100,00	100		100,00	MT	100,00			
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya ketersediaan prasarana pertanian	Persentase pertumbuhan prasarana pertanian	%	5,00	14,74	5,00	13,3333	Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan prasarana pertanian dibagi jumlah desa/kelurahan se Kabupaten Pekalongan dikali 100 (38/285)*100	266,67	MT	266,67			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
			Luas Tanam Komoditas Pilihan Perkebunan (Tembakau)	Ha	88,00	55,00	63,00	63,00	Luas tanam komoditas pilihan perkebunan (tembakau)	100,00	MT	71,59			
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya status kesehatan hewan dan keamanan produk asal hewan untuk mendukung ketahanan pangan	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (IKK)	%	5,00	29,97	5,00	5,036	Jumlah kasus hewan tahun n-1 dikurangi tahun n dibagi tahun n-1 dikali 100%	100,72	MT	100,72			
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya mitigasi dan respons terhadap risiko bencana yang mengancam sektor pertanian	Persentase wilayah bebas bencana pertanian	%	82,96	96,27	65,00	94,6693		145,65	MT	114,11			
			Komoditas Perkebunan yang disediakan untuk mengantisipasi DPI	Komoditas	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00	MT	100,00			
	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam menerapkan teknologi dan inovasi pertanian	Persentase kelompok tani terbina	%	83,84	80,00	81,34	80,4918		98,96	AMT	96,01			
3.04.	**KEHUTANAN**														
3.05.	**ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**														
3.06.	**PERDAGANGAN**														
	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Meningkatnya kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	MT	100,00			Perdagangan/ DINPERINDAG
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya kelancaran distribusi barang dan efisiensi	Persentase pasar yang memenuhi persyaratan (layak)	%	100,00	83,00	83,00	83		100,00	MT	100,00			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
		sistem logistik perdagangan													
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Terkendalinya harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di masyarakat.	Persentase Agen dan Pasar Rakyat yang dipantau ketersediaan Bapokting	%	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	MT	100,00			
			IUP.29. Disparitas Harga	%	± 10		± 10	0.18		198.2	MT	198.2			
	Program Pengembangan Ekspor	Meningkatnya daya saing dan volume ekspor produk unggulan daerah.	Nilai ekspor daerah	ribu US$		561.384,00	562.000,00	31.700,296*		5,64	MT	5,64			
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap standar mutu dan terpenuhinya hak-hak konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK)	%	74,20	71,35	72,20	72,3		100,14	MT	97,05			
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan dan daya saing produk dalam negeri di pasar domestik.	persentase pelaku usaha potensial ekspor yang mendapatkan fasilitasi promosi,pemasaran dan peningkatan pengguna	%	0,22		0,17	8,33		4900	MT	3.786			
3.07.	**PERINDUSTRIAN**														
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Tersusunnya perencanaan pembangunan industri yang terarah dan	persentase Peningkatan nilai produksi IKM	%	0,25		0,18	0,18		100,00	MT	100,00			Perindustrian/ DINPERINDAG
		mendorong pertumbuhan industri berdaya saing	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota (IKK)	%	0,56	0,50	0,51	0,003		0,588	PUK	0,588			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Meningkatnya kepatuhan dan tertib administrasi pelaku usaha industri	persentase pengajuan legalitas usaha IKM (IUI, IPUI, IUKI, IUPKI, Merk,Halal. PIRT) yang terfasilitasi	%	100,00	100,00	100,00	100*		100,00	MT	100,00			
			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	0		0	PUK	0			
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan data industri yang akurat dan terintegrasi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	MT	100,00			
3.08.	**TRANSMIGRASI**												**72.977.830**	**21.000.000**	
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya kesiapan calon transmigran	Persentase Calon Transmigran Terdaftar yag mendapatkan pembinaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	MT	100,00			Transmigrasi/ DINKOP UKM NAKER
4.	**UNSUR PENDUKUNG**														
4.01.	**SEKRETARIAT DAERAH**												**17.047.393.240**	**15.239.532.667**	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya efektivitas koordinasi urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Persentase rancangan produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Jumlah rancangan produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dibagi dengan seluruh rancangan produk hukum yang diajukan dikali 100	100,00	MT	100,00			Sekretariat Daerah/ SETDA
			Persentase laporan penyelenggaraan pemerintah terkait tata pemerintahan yang tersusun sesuai ketentuan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintah terkait dengan tata pemerintahan yang tersusun sesuai ketentuan dibagi dengan jumlah kewajiban penyusunan laporan dikali 100	100,00	MT	100,00			
			Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Bina Mental, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang difasilitasi	%	100,00	100,00	100,00	89,00	Jumlah Kegiatan Bina Mental, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang difasilitasi dibagi dengan jumlah kegiatan Kesejahteraan sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang teranggarkan dalam 1 tahun dikali 100	89,00	AMT	89,00			
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Meningkatnya sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan	Persentase laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang tersusun	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang tersusun dibagi jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang harus dihasilkan pada tahun berjalan dikali 100	100,00	MT	100,00			
			Persentase laporan hasil	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Jumlah Kegiatan Bina	100,00	MT	100,00			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
			koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan ekonomi, SDA, BUMD dan BLUD yang tersusun						Mental, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang difasilitasi dibagi dengan jumlah kegiatan Kesejahteraan sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang teranggarkan dalam 1 tahun dikali 100						
			Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang /Jasa (UKPBJ)	Angka	9,00	9,00	9,00	9,00	Skor kematangan UKPBJ yang diterbitkan oleh LKPP	100,00	MT	100,00			
4.02.	**SEKRETARIAT DPRD**												**22.046.118.580**	**21.351.528.725**	
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD	Persentase kelancaran pelaksaan rapat Paripurna	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Realisasi pelaksanaan paripurna/target pelaksanaan paripurna)*100	100,00	MT	100,00			Sekretariat DPRD/ SETWAN
			Persentase rapat penganggaran yang terfasilitasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	(Realisasi Rapat Penganggaran/Target Rapat Penganggaran)*100	100,00	MT	100,00			
			Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD yang terfasilitasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	(Realisasi Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas/Target Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas)*100%	100,00	MT	100,00			
5.	**UNSUR PENUNJANG**														
5.01.	**PERENCANAAN**												**3.239.837.590**	**3.034.685.897**	
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang terukur dan berorientasi hasil	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	MT	100,00			Perencanaan/ BAPPERIDA
			Persentase capaian Indikator Sasaran Daerah	%	85,00	67,00	60,00	60,00		100,00	MT	100,00			
	Program Koordinasi	Meningkatnya	Persentase keselarasan	%	100,00	100,00	100,00	100,00		100	MT	100			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
	Dan Sinkronisasi Perencanaan	sinergi antar-perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah	RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan												
			Persentase ketercapaian indikator kinerja Program pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100,00	100,00	100,00	100,00		100	MT	100			
			Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00		100	MT	100			
			Persentase ketercapaian indikator kinerja Program pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00		100	MT	100			
			Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00		100	MT	100			
5.02.	**KEUANGAN**												**410.210.745.540**	**399.826.893.307**	
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan tepat waktu	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures) (IKK)	%	65,00	64,34	65,00	71.7077	Jumlah belanja urusan pemerintahan dikurangi transfer expenditures, dibagi Jumlah realisasi belanja APBD, dikali 100 (1983172331022-422134383720)/2176944624618*100	110,32	MT	110,32			**Keuangan/ BPKD**
			Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total	%	1,00	1,10	1,00	-0.9899		-90,00	PUK	-90,00			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
			dalam APBD (IKK)												
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya tertib administrasi dan optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah secara legal dan efisien	Persentase aset yang dilakukan pengamanan fisik	%	35,00	20,00	22,50	21,1		100	MT	100			
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya kapasitas dan optimalisasi pendapatan daerah yang mendukung kemandirian fiskal.	Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD (IKK)	%	0,90	0,86	0,90	10,24		100	MT	100			
			Rasio PAD (IKK)	%	17,00	16,25	17,00	25,86		100	MT	100			
			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,83	0,40	0,68	0,60		100	MT	100			
5.03.	**KEPEGAWAIAN**												**1.353.000.000**	**822.460.082**	
	Program Kepegawaian Daerah	Meningkatnya profesionalisme, kompetensi, dan kinerja aparatur sipil negara (ASN) dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	62,28	76,23	59,00	60,9375	Jumlah Pegawai Fungsional dibagi jumlah seluruh pegawai tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	103,28	MT	97,84			Kepegawaian/ BKPSDM
			Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	19,37	14,87	17,92	17,9315	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas dibagi jumlah seluruh pegawai tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	100,06	MT	92,57			
5.04.	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**												**485.000.000**	**443.234.532**	
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, produktif, dan adaptif terhadap perubahan	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	**%**	#REF!	43,03	56,72	56,8465	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi Seluruh jumlah pegawai Fungsional tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	100,22	MT	98,92			Pendidikan dan Pelatihan/ BKPSDM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
5.05.	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**												**808.566.600**	**806.338.594**	
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Tersedianya rekomendasi kebijakan berbasis hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan daerah	Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	%		100,00	100,00	100*		100	MT	100			Penelitian dan Pengembangan/ BAPPERIDA
	Program Riset Dan Inovasi	Meningkatnya kapasitas riset	Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	%	100,00	n/a	-	-		-	-	-			
6.	**UNSUR PENGAWASAN**														
6.01.	**INSPEKTORAT**												**1.587.590.400**	**1.512.881.500**	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel dan bebas dari penyimpangan.	Persentase Rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti	%	92,50	93,63	92,00	95,08		103,35	MT	102,79			Pengawasan/ INSPEKTORAT
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Tersusunnya kebijakan internal serta meningkatnya kapasitas perangkat daerah melalui pendampingan dan asistensi yang berkelanjutan.	Persentase OPD yang mendapat nilai SAKIP dengan predikat minimal BB	%	88,89	51,11	60,00	60		100,00	MT	67,50			
7.	**UNSUR KEWILAYAHAN**														

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
7.01.	**KECAMATAN KAJEN**												**763.079.120**	**696.601.260**	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	%	100	100	100	100	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka Pelayanan di kecamatan yang sudah menggunakan SOP tetap dibagi jumlah bulan target dikali 100 12/12*100	100	MT	100			Kecamatan Kajen
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal.	Persentase lembaga masyarakat aktif	%	100	100	100	100		100	MT	100			
			Cakupan Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam Kondisi Baik	%	100	100	100	100	Realisasi capaian kinerja sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik dibagi total sarana dan prasarana kelurahan yang ada dikalikan 100 100/100*100	100	MT	100			
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas di tingkat kecamatan	%	100	100	100	100	Jumlah pengaduan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan yang terselesaikan dibagi jumlah pengaduan yang masuk pada tahun berjalan di kali 100 12/12*100	100	MT	100			
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi.	Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Fasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan	%	100	100	100	100	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dibagi jumlah kelompok masyarakat di tingkat kecamatan dikali 100 12/12*100	100	MT	100			
			Persentase pelaksanaan urusan Kepala Daerah yang	%	100	100	100	100	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi	100	MT	100			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
			ditugaskan ditingkat Kecamatan						koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dibagi jumlah kelompok masyarakat di tingkat kecamatan dikali 100 12/12*100						
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.	Persentase Dokumen/Laporan Pembinaan dan Pengawasan Desa yang Disusun Sesuai Standar Pelaporan	%	100	100	100	100	Jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah seluruh desa di kecamatan dikali 100 24/24*100	100	MT	100			
7.01.	**KECAMATAN SRAGI**												**905.248.580**	**887.663.170**	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	%	100	100	100	100	Jumlah dan jenis layanan PATEN di kecamatan yang sudah sesuai SP dan SOP dibagi jumlah jenis layanan yang ada di kecamatan dikali 100 (10*12)/(10*12)*100	100	MT	100			Kecamatan Sragi
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal.	Persentase lembaga masyarakat aktif	%	100	100	100	100	Jumlah lembaga masyarakat yang aktif dibagi jumlah lembaga masyarakat yang ada dikali 100	100	MT	100			
			Cakupan Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam Kondisi Baik	%	100	100	100	100	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan hasil pemberdayaan masyarakat dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana yang ada dikali 100	100	MT	100			
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas di tingkat kecamatan	%	100	100	100	100	Jumlah pengaduan trantibumlinmas tingkat Kecamatan yang terselesaikan dibagi jumlah pengaduan yang	100	MT	100			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
									masuk pada tahun berjalan dikali 100						
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi.	Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Fasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan	%	100	100	100	100	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dibagi jumlah kelompok masyarakat di tingkat kecamatan dikali 100	100	MT	100			
			Persentase pelaksanaan urusan Kepala Daerah yang ditugaskan ditingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dibagi jumlah kegiatan yang ditugaskan kepala daerah di kali 100	100	MT	100			
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.	Persentase Dokumen/Laporan Pembinaan dan Pengawasan Desa yang Disusun Sesuai Standar Pelaporan	%	100	100	100	100	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan yang disusun dibagi jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan dikali 100	100	MT	100			
7.01.	**KECAMATAN WIRADESA**														
	Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	%	100	100	100	100	Jumlah dan jenis layanan di kecamatan yang sudah menggunakan SOP tetap dibagi jumlah jenis layanan yang ada di kecamatan dikali 100	100	MT	100			Kecamatan Wiradesa
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal.	Persentase Lembaga Masyarakat Aktif	%	100	100	100	100	Jumlah lembaga masyarakat aktif dibagi jumlah lembaga masyarakat (Kecamatan dan Kelurahan/Desa) dikali 100	100	MT	100			
			Cakupan Sarana dan Prasarana	%	100	100	100	100*		100	MT	100			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
			Kelurahan dalam Kondisi baik												
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibumlinmas di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	Jumlah Pengaduan yang terselesaikan dibagi jumlah Pengaduan yang masuk dikali 100	100	MT	100			
	Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi.	Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan fasilitas Pembinaan Wawasan Kebangsaan	%	100	100	100	100	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dibagi jumlah kelompok masyarakat di tingkat kecamatan dikali 100	100	MT	100			
			Persentase Pelaksanaan Urusan Kepala Daerah yang ditugaskan di tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100*		100	MT	100			
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.	Persentase Dokumen/ Laporan Pembinaan dan Pengawasan Desa yang disusun sesuai Standar pelaporan	%	100	100	100	100	Jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah seluruh desa di kecamatan dikali 100	100	MT	100			
7.01.	**KECAMATAN KEDUNGWUNI**												**1.751.814.025**	**1.717.864.519**	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	%	100	100	100	100	Jumlah jenis layanan PATEN sesuai SP dan SOP dibagi Jumlah jenis layanan PATEN yang ada di Kecamatan dikali 100	100	MT	100			Kecamatan Kedungwuni
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa	Persentase lembaga masyarakat aktif	%	100	100	100	100	Jumlah lembaga masyarakat aktif dibagi jumlah lembaga masyarakat (Kecamatan	100	MT	100			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
	Dan Kelurahan	dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal.							dan Kelurahan/Desa) dikali 100						
			Cakupan Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam Kondisi Baik	%	100	100	100	100	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam Kondisi Baik dibagi Jumlah Sarana dan Prasarana yang ada di Kelurahan dikali 100	100	MT	100			
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas di tingkat kecamatan	%	100	100	100	100	Jumlah penanganan gangguan trantibumlinmas dibagi jumlah gangguan trantibumlinmas di tingkat kecamatan dikali 100	100	MT	100			
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi.	Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Fasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan	%	100	100	100	100	Jumlah Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Fasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dibagi Jumlah Kelompok Masyarakat yang ada dikali 100	100	MT	100			
			Persentase pelaksanaan urusan Kepala Daerah yang ditugaskan ditingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dibagi Jumlah Kegiatan yang ditugaskan Kepala Daerah di kali 100	100	MT	100			
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.	Persentase Dokumen/Laporan Pembinaan dan Pengawasan Desa yang Disusun Sesuai Standar Pelaporan	%	100	100	100	100	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan yang disusun dibagi Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan dikali 100	100	MT	100			
7.01.	**KECAMATAN BUARAN**												**1.572.294.350**	**2.137.548.502**	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	%	100	100	100	100	realisasi capaian kinerja pelayanan PATEN yang dilaksanakan sesuai SP dan SOP dibagi jumlah	100	MT	100			**Kecamatan Buaran**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
	Pelayanan Publik	pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.							seluruh pelayanan PATEN dikalikan 100 100/100*100						
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal.	Persentase lembaga masyarakat aktif	%	100	100	100	100	jumlah lembaga masyarakat yang aktif dibagi jumlah lembaga masyarakat yang ada dikali 100 100/100*100	100	MT	100			
			Cakupan Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam Kondisi Baik	%	100	100	100	100	Realisasi capaian kinerja sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik dibagi total sarana dan prasarana kelurahan yang ada dikalikan 100 100/100*100	100	MT	100			
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas di tingkat kecamatan	%	100	100	100	100	realisasi capaian kinerja program dibagi target capaian kinerja program dikalikan 100 100/100*100	100	MT	100			
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi.	Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Fasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan	%	100	100	100	100	realisasi capaian kinerja program dibagi target capaian kinerja program dikalikan 100 100/100*100	100	MT	100			
			Persentase pelaksanaan urusan Kepala Daerah yang ditugaskan ditingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dibagi Jumlah Kegiatan yang ditugaskan Kepala Daerah di kalikan 100 100/100*100	100	MT	100			
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.	Persentase Dokumen/Laporan Pembinaan dan Pengawasan Desa yang Disusun Sesuai Standar Pelaporan	%	100	100	100	100	jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan yang disusun dibagi jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan dikali 100	100	MT	100			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
									100/100*100						
7.01.	**KECAMATAN TIRTO**												**122.641.920**	**119.174.700**	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	%	100	100.00	100	100	Jumlah pelayanan PATEN yang sesuai SP dan SOP dibagi jumlah pelayanan PATEN dibagi 100 1/1*100	100	MT	100			Kecamatan Tirto
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal.	Persentase lembaga masyarakat aktif	%	100	100.00	100	100	Jumlah lembaga masyarakat aktif dibagi jumlah lembaga masyarakat (Kecamatan dan Kelurahan/Desa) dikali 100 100/4+75	100	MT	100			
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas di tingkat kecamatan	%	100	100.00	100	100	Jumlah penanganan gangguan trantibumlinmas di tingkat Kecamatan yang diselesaikan dibagi Jumlah penanganan gangguan trantibumlinmas di tingkat Kecamatan dikali 100 4/4*100	100	MT	100			
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi.	Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Fasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan	%	100	100.00	100	100	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dibagi jumlah kelompok masyarakat di tingkat kecamatan dikali 100 100/4+75	100	MT	100			
	Program Pembinaan	Meningkatnya	Persentase	%	100	100.00	100	100	Jumlah dokumen/laporan	100	MT	100			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
	Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.	Dokumen/Laporan Pembinaan dan Pengawasan Desa yang Disusun Sesuai Standar Pelaporan						pembinaan dan pengawasan desa yang disusun sesuai standar pelaporan dibagi Total dokumen/laporan pembinaan dan pengawasan desa yang disusun sesuai standar pelaporan 16/16*100						
7.01.	**KECAMATAN BOJONG**												**144.189.400**	**138.571.000**	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	%	100	100	100	100		100	MT	100			Kecamatan Bojong
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal.	Persentase lembaga masyarakat aktif	%	100	100	100	100		100	MT	100			
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas di tingkat kecamatan	%	100	100	100	100		100	MT	100			
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi.	Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Fasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan	%	100	100	100	100		100	MT	100			
			Persentase pelaksanaan urusan	%	100	100	100	100		100	MT	100			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
			Kepala Daerah yang ditugaskan ditingkat Kecamatan												
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.	Persentase Dokumen/Laporan Pembinaan dan Pengawasan Desa yang Disusun Sesuai Standar Pelaporan	%	100	100	100	100		100	MT	100			
7.01.	**KECAMATAN WONOPRINGGO**												**67.881.000**	**67.395.000**	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	%	100	100	100	100	Jumlah layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap dibagi jumlah layanan di Kecamatan dikali 100	100	MT	100			Kecamatan Wonopringgo
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal.	Persentase lembaga masyarakat aktif	%	100	100	100	100	Jumlah lembaga masyarakat aktif dibagi jumlah lembaga masyarakat dikali 100	100	MT	100			
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas di tingkat kecamatan	%	100	100	100	100	Jumlah Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan dibagi jumlah Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum dikali 100	100	MT	100			
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan	Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Fasilitasi Pembinaan Wawasan	%	100	100	100	100	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan	100	MT	100			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
	Umum	pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi.	Kebangsaan						pembinaan wawasan kebangsaan dibagi jumlah kelompok masyarakat dikali 100						
			Persentase pelaksanaan urusan Kepala Daerah yang ditugaskan ditingkat Kecamatan	%	100	100	100	100*		100	MT	100			
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.	Persentase Dokumen/Laporan Pembinaan dan Pengawasan Desa yang Disusun Sesuai Standar Pelaporan	%	100	100	100	100*		100	MT	100			
7.01.	**KECAMATAN KARANGANYAR**														
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	%	100	100.00	100	81,45	Jumlah dan jenis layanan di kecamatan yang sudah menggunakan SOP tetap dibagi jumlah jenis layanan yang ada di kecamatan dikali 100	81,45	AMT	81,45			Kecamatan Karanganyar
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal.	Persentase lembaga masyarakat aktif	%	100	100.00	100	100	Jumlah lembaga masyarakat aktif dibagi jumlah lembaga masyarakat (kecamatan /desa)di kali 100	100	MT	100			
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas di tingkat kecamatan	%	100	100.00	100	97,84	Jumlah pengaduan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan yang diselesaikan dibagi jumlah pengaduan yang	97,84	AMT	97,84			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
									masuk pada tahun berjalan di kali 100						
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi.	Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Fasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan	%	100	100.00	100	98,85	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dibagi jumlah kelompok masyarakat di tingkat kecamatan dikali 100	98,85	AMT	98,85			
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.	Persentase Dokumen/Laporan Pembinaan dan Pengawasan Desa yang Disusun Sesuai Standar Pelaporan	%	100	100.00	100	97,83	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dibagi jumlah kelompok masyarakat di tingkat kecamatan di kali 100	97,83	AMT	97,83			
7.01.	**KECAMATAN DORO**												**270.525.400**	**263.569.200**	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	%	100	100	100	100	jumlah dan jenis layanan Paten di Kecamatan yang sudah sesuai SP dan SOP dibagi jumlah jenis layanan yang ada di kecamatan dikali 100 (10*11)/(10*11)*100	100	MT	100			Kecamatan Doro
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal.	Persentase lembaga masyarakat aktif	%	100	100	100	100	jumlah lembaga masyarakat yang aktif dibagi jumlah lembaga masyarakat yang ada dikali 100 7/7*100	100	MT	100			
	Program Koordinasi Ketentraman Dan	Meningkatnya kondisi ketentraman dan	Persentase penanganan gangguan	%	100	100	100	100	jumlah pengaduan trantibumlinmas tingkat kecamatan yang	100	MT	100			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
	Ketertiban Umum	ketertiban umum	trantibumlinmas di tingkat kecamatan						terselesaikan dibagi jumlah pengaduan yang masuk pada tahun berjalan dikali 100 10/10*100						
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi.	Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Fasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan	%	100	100	100	100	jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitas pembinaan wawasan kebangsaan dibagi jumlah kelompok masyarakat ditingkat kecamatan dikali 100 100/100*100	100	MT	100			
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.	Persentase Dokumen/Laporan Pembinaan dan Pengawasan Desa yang Disusun Sesuai Standar Pelaporan	%	100	100	100	100	jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan yang disusun dibagi jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan dikali 100 6/6*100	100	MT	100			
7.01.	**KECAMATAN TALUN**														
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	%	100	100	100	46,2521	Jumlah dan jenis layanan di kecamatan yang sudah menggunakan SOP tetap dibagi jumlah jenis layanan yang ada di kecamatan dikali 100 100/2.16206189891504	46,25	PUK	46,25			Kecamatan Talun
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal.	Persentase lembaga masyarakat aktif	%	100	100	100	89,31	Jumlah lembaga masyarakat aktif dibagi jumlah lembaga masyarakat (kecamatan /desa)di kali 100 100/1.11969544283955	89,31	AMT	89,31			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas di tingkat kecamatan	%	100	100	100	78,88	Jumlah pengaduan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan yang diselesaikan dibagi jumlah pengaduan yang masuk pada tahun berjalan di kali 100 100/1.26774847870183	78,88	AMT	78,88			
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi.	Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Fasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan	%	100	100	100	90,36	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dibagi jumlah kelompok masyarakat di tingkat kecamatan dikali 100 100/1.10668437361664	90,36	AMT	90,36			
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.	Persentase Dokumen/Laporan Pembinaan dan Pengawasan Desa yang Disusun Sesuai Standar Pelaporan	%	100	100	100	98,47	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dibagi jumlah kelompok masyarakat di tingkat kecamatan di kali 100 100/1.01553772722657	98,47	AMT	98,47			
7.01.	**KECAMATAN LEBAKBARANG**												**65.666.150**	**64,901.800**	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	%	100	100	100	100	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka Pelayanan di kecamatan yang sudah menggunakan SOP tetap dibagi jumlah bulan target dikali 100 12/12*100	100	MT	100			Kecamatan Lebakbarang
	Program Pemberdayaan	Meningkatnya partisipasi dan kemandirian	Persentase lembaga masyarakat aktif	%	100	100	100	100	Jumlah lembaga masyarakat aktif dibagi jumlah Lembaga	100	MT	100			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
	Masyarakat Desa Dan Kelurahan	masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal.							masyarakat (Kecamatan dan Desa) dikali 100 12/12*100						
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas di tingkat kecamatan	%	100	100	100	100	Jumlah pengaduan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan yang terselesaikan dibagi jumlah pengaduan yang masuk pada tahun berjalan di kali 100 12/12*100	100	MT	100			
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi.	Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Fasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan	%	100	100	100	100	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dibagi jumlah kelompok masyarakat di tingkat kecamatan dikali 100 12/12*100	100	MT	100			
			Persentase pelaksanaan urusan Kepala Daerah yang ditugaskan ditingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dibagi jumlah kelompok masyarakat di tingkat kecamatan dikali 100 12/12*100	100	MT	100			
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan	Persentase Dokumen/Laporan Pembinaan dan Pengawasan Desa yang Disusun Sesuai Standar	%	100	100	100	100	Jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah seluruh desa di kecamatan dikali 100 11/11*100	100	MT	100			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
		akuntabel.	Pelaporan												
7.01.	**KECAMATAN KANDANGSERANG**														
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	%	100	100.00	100	100	Jumlah dan Jenis Layanan PATEN di Kecamatan Kandangserang yang sudah sesuai SP dan SOP dibagi jumlah jenis layanan yang ada di Kecamatan dikali 100	100	MT	100			Kecamatan Kandangserang
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal.	Persentase lembaga masyarakat aktif	%	100	100.00	100	100	Jumlah Lembaga Masyarakat yang aktif dibagi Jumlah Lembaga Masyarakat yang ada dikali 100	100	MT	100			
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas di tingkat kecamatan	%	100	100.00	100	100	Jumlah Pengaduan Trantibumlinmas tingkat Kecamatan yang terselesaikan dibagi jumlah pengaduan yang masuk pada tahun berjalan dikali 100	100	MT	100			
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi.	Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Fasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan	%	100	100.00	100	100	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dibagi jumlah kelompok masyarakat ditingkat kecamatan dikali 100	100	MT	100			
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.	Persentase Dokumen/Laporan Pembinaan dan Pengawasan Desa yang Disusun Sesuai Standar Pelaporan	%	100	100.00	100	100	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan yang disusun dibagi jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan dikali 100	100	MT	100			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
7.01.	**KECAMATAN PANINGGARAN**												**76.215.200**	**73.141.900**	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	%	100	100.00	100	100	Jumlah dan jenis layanan di kecamatan yang sudah menggunakan SOP tetap dibagi jumlah jenis layanan yang ada di kecamatan di kali 100 12/12*100	100	MT	100			Kecamatan Paninggaran
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal.	Persentase lembaga masyarakat aktif	%	100	100.00	100	100	Jumlah lembaga masyarakat aktif dibagi jumlah lembaga masyarakat (kecamatan dan kelurahan /Desa) di kali 100 12/12*100	100	MT	100			
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas di tingkat kecamatan	%	100	100.00	100	100	Jumlah pengaduan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan yang terselesaikan dibagi jumlah pengaduan yang masuk pada tahun berjalan di kali 100 12/12*100	100	MT	100			
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi.	Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Fasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan	%	100	100.00	100	100	Jumlah Desa Tertib administrasi dibagi JUmlah seluruh Desa di Kecamatan di kali 100 12/12*100	100	MT	100			
			Persentase pelaksanaan urusan Kepala Daerah yang ditugaskan ditingkat Kecamatan	%	100	100.00	100	100*		100	MT	100			
	Program Pembinaan Dan Pengawasan	Meningkatnya kapasitas tata	Persentase Dokumen/Laporan	%	100	100.00	100	100	Jumlah desa tertib administrasi dibagi	100	MT	100			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
	Pemerintahan Desa	kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.	Pembinaan dan Pengawasan Desa yang Disusun Sesuai Standar Pelaporan						jumlah seluruh desa di kecamatan dikali 100 12/12*100						
7.01.	**KECAMATAN KESESI**												**323.922.000**	**316.877.192**	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	%	100	100	100	100	Jumlah dan jenis layanan PATEN di kecamatan yang sudah sesuai SP dan SOP dibagi jumlah jenis layanan yang ada di kecamatan dikali 100 (10*12)/(10*12)*100	100	MT	100			Kecamatan Kesesi
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal.	Persentase lembaga masyarakat aktif	%	100	100	100	100	Jumlah lembaga masyarakat yang aktif dibagi jumlah lembaga masyarakat yang ada dikali 100 (8*12)/(8*12)*100	100	MT	100			
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas di tingkat kecamatan	%	100	100	100	100	Jumlah pengaduan trantibumlinmas tingkat Kecamatan yang terselesaikan dibagi jumlah pengaduan yang masuk pada tahun berjalan dikali 100 9/9*100	100	MT	100			
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi.	Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Fasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan	%	100	100	100	100	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dibagi jumlah kelompok masyarakat di tingkat kecamatan dikali 100	100	MT	100			
			Persentase	%	100	100	100	100	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dibagi	100	MT	100			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
			pelaksanaan urusan Kepala Daerah yang ditugaskan ditingkat Kecamatan						jumlah kegiatan yang ditugaskan kepala daerah di kali 100 (6/6)*100						
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.	Persentase Dokumen/Laporan Pembinaan dan Pengawasan Desa yang Disusun Sesuai Standar Pelaporan	%	100	100	100	100	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan yang disusun dibagi jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan dikali 100 46/46*100	100	MT	100			
7.01.	**KECAMATAN PETUNGKRIYONO**												**123.978.300**	**125.978.300**	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	%	100	100	100	100	realisasi capaian kinerja pelayanan PATEN yang dilaksanakan sesuai SP dan SOP dibagi jumlah seluruh pelayanan PATEN dikalikan 100 100/100*100	100	MT	100			Kecamatan Petungkriyono
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal.	Persentase lembaga masyarakat aktif	%	100	100	100	100	jumlah lembaga masyarakat yang aktif dibagi jumlah lembaga masyarakat yang ada dikali 100 100/100*100	100	MT	100			
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas di tingkat kecamatan	%	100	100	100	100	realisasi capaian kinerja program dibagi target capaian kinerja program dikalikan 100 100/100*100	100	MT	100			
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan	Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Fasilitasi Pembinaan Wawasan	%	100	100	100	100	realisasi capaian kinerja program dibagi target capaian kinerja program dikalikan 100 100/100*100	100	MT	100			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
	Umum	umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi.	Kebangsaan												
			Persentase pelaksanaan urusan Kepala Daerah yang ditugaskan ditingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dibagi Jumlah Kegiatan yang ditugaskan Kepala Daerah di kalikan 100 100/100*100	100	MT	100			
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.	Persentase Dokumen/Laporan Pembinaan dan Pengawasan Desa yang Disusun Sesuai Standar Pelaporan	%	100	100	100	100	jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan yang disusun dibagi jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan dikali 100 100/100*100	100	MT	100			
7.01.	**KECAMATAN WONOKERTO**												**116.742.200**	**114.419.000**	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	%	100	100	100	100*	Jumlah dan Jenis layanan di kecamatan yang sudah menggunakan SOP tetap dibagi jumlah jenis layanan yang ada di Kecamatan di kali 100						Kecamatan Wonokerto
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal.	Persentase lembaga masyarakat aktif	%	100	100	100	100	Jumlah lembaga masyarakat aktif dibagi jumlah lembaga masyarakat (kecamatan /desa)di kali 100 100/4+75	100	MT	100			
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas di tingkat kecamatan	%	100	100	100	100*	Jumlah pengaduan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan yang diselesaikan dibagi jumlah pengaduan yang masuk pada tahun berjalan di kali 100	100	MT	100			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi.	Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Fasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan	%	100	100	100	100*	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dibagi jumlah kelompok masyarakat di tingkat kecamatan dikali 100	100	MT	100			
			Persentase pelaksanaan urusan Kepala Daerah yang ditugaskan ditingkat Kecamatan	%	100	100	100	100*		100	MT	100			
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.	Persentase Dokumen/Laporan Pembinaan dan Pengawasan Desa yang Disusun Sesuai Standar Pelaporan	%	100	100	100	100*	Persentase Jumlah Dokumen difasilitasi dalam rangka penyusunan Peraturan Desa dan Kepala Desa (Dokumen) dikali 100	100	MT	100			
7.01.	**KECAMATAN SIWALAN**														
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	%	100	100	100	75,93	Jumlah dan jenis layanan di kecamatan yang sudah menggunakan SOP tetap dibagi jumlah jenis layanan yang ada di kecamatan dikali 100 100/1.31700250230475	75,93	AMT	75,93			Kecamatan Siwalan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal.	Persentase lembaga masyarakat aktif	%	100	100	100	77,11	Jumlah lembaga masyarakat aktif dibagi jumlah lembaga masyarakat (kecamatan /desa)di kali 100 100/1.29684865776164	77,11	AMT	77,11			
	Program Koordinasi	Meningkatnya	Persentase penanganan	%	100	100	100	100	Jumlah pengaduan	100	MT	100			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
	Ketentraman Dan Ketertiban Umum	kondisi ketentraman dan ketertiban umum	gangguan trantibumlinmas di tingkat kecamatan						ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan yang diselesaikan dibagi jumlah pengaduan yang masuk pada tahun berjalan di kali 1=100/1						
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi.	Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Fasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan	%	100	100	100	98,66	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dibagi jumlah kelompok masyarakat di tingkat kecamatan dikali 100=100/1.0135819987837	98,66	AMT	98,66			
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.	Persentase Dokumen/Laporan Pembinaan dan Pengawasan Desa yang Disusun Sesuai Standar Pelaporan	%	100	100	100	54,66	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dibagi jumlah kelompok masyarakat di tingkat kecamatan di kali 100 100/1.82949140139041	54,66	PUK	54,66			
8.	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**														
8.01.	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**												**3.458.782.100**	**3.421.498.538**	
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dan karakter kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	Persentase masyarakat yang memperoleh Penguatan Ideiologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	%	4,69	43,11	4,64	5,1587	Jumlah masyarakat yang memperoleh Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan /Jumlah masyarakat x 100 (5956+15000+15423+13600)/968821*100	111,18	MT	109,99			Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program	Meningkatnya partisipasi politik	Persentase masyarakat	%	5,44	45,00	2,72	2,72	Jumlah masyarakat atau Pemilih yang mengikuti	100	MT	50			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	masyarakat dan penguatan budaya politik yang sehat dan demokratis.	yang mengikuti pendidikan Politik dan pengembangan Etika Budaya Berpolitik						pendidikan Politik / Jumlah masyarakat usia pemilih x 100						
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya peran serta dan kepatuhan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan dan kehidupan bermasyarakat yang tertib dan harmonis.	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan mendapatkan pengawasan	%	10	47,24	10	10,7143	Jumlah organisasi masyarakat yang diberdayakan dan mendapatkan pengawasan / jumlah Ormas Keseluruhan x 100 (11+2+1+1)/140*100	107,14	MT	107,14			
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap pengaruh negatif yang mengancam stabilitas ekonomi, sosial, dan budaya daerah.	Persentase masyarakat yang memperoleh pembinaan dan pengembangan Ketahanan Bangsa	%	1,20	12	1,09	1,2724	Jumlah masyarakat yang memperoleh pembinaan / jumlah masyarakat yang harus dibina x 100 (3226+450+50+950)/367 500*100	116,73	MT	106,03			
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya kewaspadaan nasional dan kapasitas daerah dalam mencegah serta menangani potensi konflik sosial.	Persentase Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Pekalongan	%	100	100	100	100	Jumlah Konflik Sosial yang tertangani / Jumlah Konflik Sosial x 100 3/3*100	100	MT	100			
9.	**NON URUSAN**														
	Program Penunjang	Meningkatnya	Tingkat Kematangan	Indeks	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi		100	MT	100			SETDA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir RPJMD 2025-2029	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Indikator 2025	Capaian 2025	Rumus Perhitungan capaian	Persentase capaian 2025	Status ketercapaian	Persentase capaian thdp akhir RPJMD	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Penanggung jawab Urusan
													Rp	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
	Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Organisasi (Setda)		(47,00)	(38,66)	(40,00)	(39,52)							
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Persentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100.00		100.00	100.00		100.00	MT	100.00			Semua Urusan
	TOTAL														

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator kinerja program terhadap target RKPD tahun 2025, jumlah indikator kinerja program sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) indikator yang terdiri atas 7 fokus urusan dengan 39 bidang. Indikator kinerja program (*outcome*) yang mencapai target RKPD 2025 ada 174 (seratus tujuh puluh empat) indikator dengan rata-rata capaian sebesar 96,63% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi**. Indikator yang akan mencapai target sebanyak 28 (dua puluh delapan) indikator, 10 (sepuluh) indikator perlu upaya keras, serta 5 (lima) indikator tidak dilaksanakan atau tidak tersedia angka realisasinya. Jumlah total indikator yang mencapai dan atau melebihi target RKPD Triwulan IV Tahun 2025 sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) indikator, sedangkan indikator yang tidak mencapai target sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) indikator. Berikut diperjelas dengan tabel berikut.

Keseluruhan dari hasil evaluasi capaian indikator kinerja berdasarkan 7 fokus urusan dirangkum pada tabel rekapitulasi capaian indikator kinerja program RKPD pada triwulan IV tahun 2025.

Tabel 2.156.
Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Program Triwulan IV Tahun 2025

No	Urusan /Bidang	Jumlah Indikator Dalam RKPD	Mencapai Target	Akan Mencapai Target	Perlu Upaya Keras	N/A	Tercapai	Tidak Tercapai	Rata-Rata Capaian TW IV 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pendidikan	10	4	6			4	6	96,25
2	Kesehatan	11	8	2		1	8	3	87,67
3	PU Taru	14	9	5			9	5	99,49
4	Perkim	6	6				6	0	100,00
5	Trantibumas	8	7	1			7	1	97,29
6	Sosial	7	7				7	0	100,00
7	Tenaga Kerja	6	4	1	1		4	2	78,2
8	Pemberdayaan Perempuan & Perlidungan Anak	6	6				6	0	100,00
9	Pangan	5	4	1			4	1	99,43
10	Pertanahan	3	3				3	0	100,00
11	Lingkungan Hidup	12	11	1			11	1	98,61
12	Adminduk	6	5	1			5	1	99,83
13	PMD	4	2	1	1		2	2	86,22
14	PPKB	7	7				7	0	100
15	Perhubungan	4	1	3			1	3	95,03
16	Komunikasi & Informatika	6	6				6	0	100
17	Koperasi UKM	7	2		2	3	2	5	71,95
18	Penanaman Modal	5	5				5	0	100,00
19	Kepemudaan & Olahraga	4	4				4	0	100,00
20	Kebudayaan	5	5				5	0	100,00
21	Perpustakaan	3	2	1			2	1	99,93
22	Kearsipan	3	3				3	0	100,00
23	Kelautan Dan Perikanan	4	4				4	0	100,00
24	Pariwisata	4	3		1		3	1	91,89
25	Pertanian	11	9	2			9	2	99,69
26	Perdagangan	8	6		2		6	2	100,00
27	Perindustrian	5	3		2		3	2	86,52
28	Transmigrasi	1	1				1	0	100,00
29	Setda	7	6	1			6	1	98,42
30	Setwan	3	3				3	0	100,00
31	Perencanaan	7	7				7	0	100,00
32	Keuangan	6	4	1	1		4	2	82,30
33	Kepegawaian	2	2				2	0	100,00
34	Pendidikan Dan Pelatihan	1	1				1	0	100,00

No	Urusan /Bidang	Jumlah Indikator Dalam RKPD	Mencapai Target	Akan Mencapai Target	Perlu Upaya Keras	N/A	Tercapai	Tidak Tercapai	Rata-Rata Capaian TW IV 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
35	Penelitian Dan Pengembangan	2	1			1	1	0	100,00
36	Inspektorat	2	2				2	0	100,00
37	Kecamatan	7	7				7	0	100,00
38	Kesbangpol	5	5				5	0	100,00
39	Non Urusan	1	1				1	0	100,00
JUMLAH		**217**	**175**	**27**	**10**	**5**	**175**	**42**	**96,63**

Sumber: Analisis Penyusun, 2026

C. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan dalam periode 2025-2030 merupakan hasil analisis gambaran umum daerah Kabupaten Pekalongan yang mencakup aspek geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum, serta berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah selama lima tahun. Permasalahan pembangunan daerah merupakan permasalahan pembangunan yang sifatnya lintas sektor atau *crosscutting*, makro, dan menjadi kewenangan tingkat daerah. Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan yang masih relevan dalam periode 2025-2030 dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Aspek Geografi dan Demografi

Dari hasil gambaran umum kondisi daerah pada aspek geografi dan demografi yang telah disajikan pada bab sebelumnya, diidentifikasi permasalahan pembangunan daerah sebagai berikut

1). Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan

Kebutuhan akan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas semakin meningkat seiring dengan bertambahnya aktivitas penduduk sejalan dengan jumlah penduduk yang juga semakin meningkat. Di sisi lain, ketersediaan sumber daya alam bersifat tetap, bahkan semakin menurun akibat eksploitasi yang tidak berwawasan lingkungan. Status daya dukung air Kabupaten Pekalongan tahun 2022 masih dalam kondisi **surplus**, dengan nilai Daya Dukung Air sebesar 884.176.589,38 m3. Namun demikian dalam beberapa wilayah terdapat kondisi **defisit** diantaranya Kecamatan Bojong, Doro dan Sragi.

Indikator lain yang juga dapat menggambarkan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Pekalongan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di mana IKLH Kabupaten Pekalongan pada tahun 2025 sebesar 72,12 di bawah IKLH Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 69,46.

Di sisi lain, beberapa tekanan lingkungan di Kabupaten Pekalongan antara lain seperti perubahan tata guna lahan yang menyebabkan degradasi keanekaragaman hayati, peningkatan produksi limbah domestik padat (sampah) dan cair dengan masih terbatasnya kapasitas pengelolaannya, dan pencemaran lingkungan yang disebabkan antara lain masih rendahnya pengawasan dan pemantauan terhadap industri penghasil limbah, masih rendahnya sarana dan prasarana pengelolaan limbah, serta masih rendahnya edukasi masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup dan tata kelola sampah. Indeks Kualitas Air Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 69,86 di bawah rata-rata Jawa Tengah sebesar 52,03. Sedangkan pengelolaan sampah di Kabupaten Pekalongan dalam kurun waktu 2020-2024 rata-rata hanya sekitar 30-36 persen setiap tahun, sehingga rata-rata sampah yang tidak dikelola berkisar 50-60 persen setiap tahunnya

Dampak perubahan iklim juga semakin dirasakan di Kabupaten Pekalongan, terutama ditunjukkan dari semakin meningkatnya suhu udara dan anomali cuaca yang tidak dapat diprediksi. Perubahan iklim terjadi sebagai dampak dari meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) akibat aktivitas ekonomi dan penduduk yang belum diimbangi dengan upaya untuk menurunkan emisi GRK.

2). Belum optimalnya ketahanan pangan

Permasalahan dari aspek geografi lainnya adalah terkait dengan ketahanan pangan. Hasil identifikasi permasalahan ketahanan pangan antara lain yaitu belum optimalnya penjaminan akses dan keterjangkauan pangan dan gizi; pemenuhan hak dasar atas pangan secara berkelanjutan; pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang cukup, beragam, seimbang, dan aman; diversifikasi dan hilirisasi pangan lokal; sistem rantai pasok pangan; jaminan keamanan dan mutu pangan; riset, inovasi, dan teknologi pangan; pengendalian harga bahan pangan; serta peran serta masyarakat untuk penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan; dan pencegahan pemborosan pangan *(food waste)*. Selain itu, terdapat kecenderungan penurunan daya dukung pangan yang akan mempengaruhi kecukupan ketersediaan dan keterjangkauan pangan di masa yang akan datang. prevalensi ketidakcukupan pangan di Kabupaten Pekalongan memiliki kecenderungan turun dari 8,22 persen pada tahun 2021 menjadi 5,47 persen pada tahun 2025. Artinya hingga tahun 2025, masih terdapat 5,47 persen penduduk yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif.

3). Belum optimalnya penyelenggaraan penanggulangan bencana

Selain lingkungan hidup, kondisi geografi juga mempengaruhi kondisi kebencanaan. Gambaran kebencanaan ditunjukkan dari indikator Indeks Risiko Bencana (IRB) yang dari tahun ke tahun IRB Kabupaten Pekalongan sebesar **102,14** di tahun 2025 menurun dari **149,83** pada tahun 2023. Ancaman bencana yang sering terjadi diantaranya ***banjir/rob, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan.*** Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan melakukan upaya pengelolaan risiko bencana untuk mengurangi kerugian akibat bencana seminimal mungkin. Upaya pengelolaan risiko bencana ini didasari dengan pemahaman risiko bencana yang ada yang diperoleh melalui suatu kajian risiko bencana. Informasi risiko bencana tersebut kemudian dijadikan salah satu dasar dalam perumusan berbagai upaya penanggulangan bencana.

Tata kelola kebencanaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana juga masih menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan. Perencanaan penanggulangan bencana, sistem peringatan dini *(early warning system/EWS)*, literasi masyarakat tentang kebencanaan, serta kapasitas lembaga baik pemerintah maupun nonpemerintah masih perlu ditingkatkan.

4). Meningkatnya sebaran dan pertumbuhan penduduk

Penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 sebanyak **1.030.342** jiwa dengan persentase 50,81 persen penduduk laki-laki dan 49,19 persen penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin sebesar 103,29 yang berarti ada 103 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Dengan kata lain, penduduk laki-laki di Kabupaten Pekalongan tercatat lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka kepadatan penduduk Kabupaten Pekalongan juga mengalami peningkatan. Dengan luas wilayah sekitar 836,13 Km^2, kepadatan penduduk Kabupaten Pekalongan pada tahun 2025 mencapai 1.232,26 jiwa/km^2. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (1.219 jiwa/ km^2). Artinya dalam setahun ada pertambahan jumlah penduduk tiap Km^2 sebanyak 13 jiwa. Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan kepadatan penduduk dan jumlah rumah tangga di Kabupaten Pekalongan semakin meningkat.

b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pekalongan meliputi sebagai berikut**.**

a. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat

Tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya dilihat dari kemiskinan. Cukup tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan masih menjadi permasalahan utama dalam pembangunan daerah. Kondisi ini ditunjukkan dari persentase penduduk miskin Kabupaten Pekalongan masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional meskipun dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan pada Maret 2025 tercatat sebesar 8,05 persen menurun dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 8,95. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan nasional (8,47%) dan di bawah Provinsi Jawa Tengah (9,48%).

Selain tingkat kemiskinan, masih cukup tingginya angka pengangguran dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka semakin ketat dengan China, hingga konflik geopolitik di Timur Tengah. (TPT) di Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 sebesar **3,24%** menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dan lebih rendah daripada Provinsi Jawa Tengah **(4,66%)** dan nasional **(4,85%)**. Penurunan ini disebabkan oleh masuknya investasi di Kabupaten Pekalongan dan upaya pemerintah daerah untuk menciptakan lapangan kerja

b. Belum optimalnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia

Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan mengingat perannya sebagai motor penggerak serta bagian dari proses dan tujuan pembangunan. Pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Pekalongan selain memastikan tercukupinya kebutuhan dasar dan kecukupan ekonomi, juga memperhatikan kualitas layanan dasar sehingga tercapai manusia Kabupaten Pekalongan yang maju dan semakin sejahtera.

Namun demikian, kualitas hidup SDM Kabupaten Pekalongan masih perlu ditingkatkan mengingat penyediaan layanan kebutuhan dasar masyarakat belum merata dan inklusif, terutama kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pekalongan pada tahun 2025 sebesar **72,71** yang masih di bawah angka IPM Jawa Tengah sebesar **74,77** dan IPM Nasional yang sebesar **75,90**.

.

Kualitas pendidikan masyarakat ditunjukkan dengan rata-rata lama sekolah dan harapan sekolah yang capaiannya masih di bawah nasional. Rata-rata lama bersekolah di Kabupaten Pekalongan yang masih rendah diperkuat dengan masih dijumpainya **Anak Tidak Sekolah (ATS)** yang mencapai **4.307 anak**. Sementara Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2025 sebesar **12,63 tahun** yang masih di bawah Provinsi Jawa Tengah **(12,86 tahun)** disebabkan masih belum optimalnya perluasan akses dan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Pekalongan, ditandai dengan masih rendahnya tingkat partisipasi pendidikan, adanya kesenjangan layanan pendidikan, dan kurangnya mutu pendidikan.

Permasalahan kesehatan mengalami perubahan pola ke arah semakin kompleks sebagai akibat adanya pengaruh perubahan lingkungan dan perilaku. **Usia Harapan Hidup (UHH)** penduduk Kabupaten Pekalongan menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 sebesar **73,74 tahun** menjadi **74,59 tahun** di Tahun 2025, namun belum diimbangi dengan peningkatan usia harapan sehat. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 sebesar 112,33 per 100.000 kelahiran hidup (13 kasus) pada tahun 2025. Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 sebesar 12,62 dengan jumlah kasus **146 kasus**.

Pada aspek gizi, beban ganda masalah kelebihan dan kekurangan gizi *(underweight, wasting, stunting, overweight)*, pengetahuan dan perilaku pemenuhan kebutuhan gizi, serta ketahanan pangan pada level keluarga masih menjadi faktor determinan yang mempengaruhi status gizi masyarakat. Jumlah kasus balita gizi buruk di Kabupaten Pekalongan pada Tahun 2024 sebesar 145 kasus turun dari Tahun 2024 sebesar 357 kasus. Masih tinginya kemiskinan, fasilitas kesehatan yang terbebani, rantai pasokan makanan yang terganggu dan kurangnya pendapatan merupakan faktor penyebab kasus gizi buruk di Kabupaten Pekalongan. Daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih yang mengakibatkan kemampuan masyarakat mengakses asupan makanan syarat gizi masih rendah serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih sehat. Sedangkan dari data Aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat **(e-PPGM)**, prevalensi stunting di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2025 ada pada angka 6,52 persen atau turun 2,73 point dibandingkan Tahun 2024. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan bahwa pada tahun 2023, prevalensi stunting di Kabupaten Pekalongan juga naik sebanyak 5,10% poin dibanding tahun 2022 dari **23,50%** menjadi **28,60%.**

c. Aspek Daya Saing Daerah

a. Belum optimalnya daya saing dan produktivitas perekonomian daerah

Perekonomian Kabupaten Pekalongan masih harus terus didorong untuk tetap tumbuh positif di tengah tantangan perekonomian global yang tidak pasti. Perekonomian Kabupaten Pekalongan dipengaruhi oleh pertumbuhan beberapa faktor, antara lain : (*1)Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (2)Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (3)Informasi dan Komunikasi; (4)Jasa perusahaan dan (5)Jasa Pendidikan*. Upaya kedepan Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus berupaya mendorong pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian dalam arti luas termasuk pangan, industri pengolahan, perdagangan, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pariwisata), kemudahan investasi, infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan distribusi barang jasa, serta wilayah yang kondusif.

Tantangan ke depan adalah mewujudkan perekonomian daerah dengan produktivitas tinggi secara berkelanjutan. Selain itu, tantangan lainnya adalah bagaimana mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dalam rangka menurunkan kesenjangan pendapatan antarmasyarakat dan antarwilayah. Kondisi tersebut adalah dalam upaya meningkatkan nilai PDRB per kapita tahun 2025 yang tercatat sebesar 31,72 juta rupiah mengalami kenaikan 6,50 persen atau sebesar dari 29,79 juta rupiah di tahun 2024, namun masih dibawah Provinsi Jawa Tengah sebesar **50,82 juta rupiah** dan jauh dibawah PDRB per kapita nasional yang sebesar **83,70 juta rupiah**.

Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan perekonomian daerah masih dijumpai berbagai permasalahan yang perlu ditangani, terutama terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian daerah. Permasalahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

b. Belum optimalnya pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan perekonomian daerah

Permasalahan yang terjadi dalam upaya peningkatan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan di Kabupaten Pekalongan sebagai berikut.

1) Sektor industri pengolahan

Sektor industri pengolahan merupakan sektor unggulan Kabupaten Pekalongan sebesar **29,65 persen** terhadap PDRB. Beberapa permasalahan dan tantangan yang mempengaruhi kinerja sektor industri pengolahan antara lain belum optimalnya produktivitas industri, terutama industri kecil dan menengah, rendahnya nilai tambah produk industri, serta masih rendahnya kapasitas pelaku industri. Faktor penyebab terjadinya permasalahan tersebut antara lain belum optimalnya kapasitas industri kecil dan menengah untuk mampu menghasilkan produk nilai tambah tinggi, pengembangan industri, kapasitas industri berbahan baku lokal, integrasi rantai pasok antarindustri, kapasitas dan kompetensi pelaku usaha industri pengolahan, digitalisasi industri pengolahan serta masih rendahnya kepedulian akan

prinsip keberlanjutan dalam industri. Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh belum optimalnya ketersediaan infrastruktur konektivitas dan logistik pendukung industri pengolahan, infrastruktur pendukung industri pengolahan, keterjangkauan teknologi ramah lingkungan, iklim usaha yang kondusif dan iklim kemitraan, serta penumbuhan kawasan industri/kawasan peruntukan industri baru.

2) Sektor Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan sektor unggulan kedua Kabupaten Pekalongan sebesar **13,27 persen** terhadap PDRB. Namun demikian masih dijumpai beberapa permasalahan dan tantangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan sektor perdagangan ini, antara lain belum optimalnya ekspor unggulan daerah, standarisasi produk-produk unggulan daerah, pengendalian harga dalam upaya mengendalikan tingkat inflasi, kapasitas dan kompetensi pelaku sektor perdagangan, iklim kemitraan pasar produk unggulan daerah, serta sistem distribusi produk perdagangan.

3) Sektor pertanian

Pertanian merupakan sektor unggulan ketiga Kabupaten Pekalongan yang mampu berkontribusi sebesar **16,17 persen** terhadap PDRB. Namun demikian, masih terdapat banyak permasalahan diantaranya belum optimalnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, modernisasi pertanian, integrasi hulu-hilir termasuk sistem distribusi produk pertanian, pengelolaan pertanian secara mandiri dan keterjangkauan biaya produksi pertanian, pengembangan pertanian berbasis korporasi, serta kapasitas dan kompetensi pelaku usaha sektor pertanian. Selain itu permasalahan lain adalah masih tingginya alih fungsi lahan dan rendahnya regenerasi pelaku usaha sektor pertanian. Terkait permasalahan sumber daya air, berdasarkan data Provinsi, di Kabupaten Pekalongan, jaringan irigasi tersier nonpermanen masih cukup panjang yaitu sekitar 58,21%. sehingga menjadi perhatian khusus untuk dapat melakukan rehabilitasi serta pemeliharaan jaringan irigasi sebagai dukungan dalam upaya meningkatkan indeks pertanaman sebagai antisipasi adanya alih fungsi lahan yang ditargetnya rata-rata sekitar ± 300 meter dalam kurun waktu 2026-2020.

4) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Sektor lain yang menjadi unggulan perekonomian Kabupaten Pekalongan adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar **6,52 persen**. Perekonomian Kabupaten Pekalongan sebagian besar didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan salah satu industri yang berkembang pesat adalah industri makanan dan minuman. Pertumbuhan penjualan didorong oleh peningkatan pendapatan pribadi dan peningkatan pengeluaran untuk makanan dan minuman, terutama dari meningkatnya jumlah konsumen kelas menengah

Industri makan minum dapat menjadi subsektor dengan kontribusi PDRB terbesar. dan dapat terus berkembang pesat karena beberapa faktor, di antaranya adalah jumlah penduduk yang besar dengan kebutuhan yang sangat besar pula, serta daya beli yang tinggi dan selain itu sudah mulai terbentuk skala usaha yang terlibat dalam ekosistem industri makan minum,

ditambah dengan era baru teknologi yang bisa menjadikan tulang punggung perkembangan ekonomi dan daya saing negara.

Tantangan industri makan minum antara lain kemampuan daya beli masayarakat, pemerataan pangan yang belum merata dan kualitas hasil pengolahan pangan. Selain itu masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan yang aman, sehat, bergizi dalam sistem pangan yang berkelanjutan.

5) Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor andalan Kabupaten Pekalongan dalam menyokong perekonomian daerah. Sektor pariwisata juga menjadi salah satu sumber potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, penyediaan lapangan pekerjaan, pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha kecil dan menengah pendukung pariwisata. Namun, kontribusi sektor pariwisata pada pendapatan asli daerah dan pada PDRB belum optimal. Nilai pendapatan sektor pariwisata menurun dari tahun 2020 sebesar Rp **802,14** juta menjadi sebesar Rp 508,29 juta juta di tahun 2025. Jumlah pengunjung dari 3 (tiga) Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan yaitu Objek Wisata Linggoasri, Objek Wisata Pantai Depok dan Bumi Perkemahan Linggoasri juga terus menurun dari 5 tahun terakhir dari 95.427 orang di Tahun 2021 menjadi 49.843 orang di Tahun 2025.

Kondisi belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah maupun PDRB disebabkan beberapa permasalahan, antara lain, kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara masih belum optimal, rata-rata lama menginap wisatawan relatif rendah dan masih rendahnya pengeluaran wisatawan. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain belum optimalnya promosi pariwisata, kondisi destinasi wisata termasuk kondisi sarana prasarana destinasi wisata, diversifikasi daya tarik pariwisata, infrastruktur konektivitas antardestinasi wisata, integrasi antardestinasi wisata, kapasitas SDM pelaku pariwisata termasuk pelaku UMKM pariwisata, kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata.

c. Rendahnya daya saing tenaga kerja

Pembangunan ketenagakerjaan yang berdaya saing mencakup kualitas tenaga kerja yang unggul, tingkat produktivitas tenaga kerja yang tinggi, kesempatan kerja yang terbuka luas, hingga adanya perlindungan tenaga kerja. Beberapa faktor penyebab rendahnya daya saing tenaga kerja antara lain masih rendahnya tingkat pendidikan yang ditamatkan, belum optimalnya pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, yang disertai dengan penguatan regulasi tentang vokasi, keahlian dan kompetensi digital, riset dan inovasi, sistem perlindungan tenaga kerja, industri masih bersifat padat karya (belum padat modal/teknologi tinggi), iklim ketenagakerjaan termasuk penerapan upah minimum yang berkeadilan, serta informasi pasar kerja.

d. Belum optimalnya riset dan inovasi

Riset dan inovasi menjadi salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi jangka panjang. Namun demikian, kondisi saat ini riset dan inovasi belum optimal dikembangkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Beberapa penyebabnya antara lain :

- Keterbatasan anggaran untuk riset dan pengembangan merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi inovasi;
- Budaya organisasi yang kurang mendukung, seperti enggan menutup program yang kurang berhasil atau adanya ketergantungan pada figur tertentu, sehingga dapat menghalangi munculnya perbaikan dan inovasi baru secara berkelanjutan;
- Kurangnya hilirisasi inovasi. Meskipun banyak inovasi yang telah dikembangkan, tapi pemanfaatannya masih belum optimal di tingkat daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

e. Ketimpangan ekonomi antarwilayah

Ketimpangan ekonomi antarwilayah di Kabupaten Pekalongan masih terjadi. Hal ini terjadi antara lain disebabkan oleh faktor geografis dan demografis, belum meratanya penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, belum meratanya penyediaan prasarana dan sarana pendukung ekonomi, belum optimalnya konektivitas antarwilayah, dan belum optimalnya tingkat kemandirian desa yang sebesar **8,09 persen** di Tahun 2024. Permasalahan lainnya antara lain adalah tingkat produktivitas ekonomi antarwilayah perkotaan dan perdesaan yang masih belum merata yang disebabkan beberapa faktor antara lain terkait potensi daerah sebagai sektor unggulan daerah yang belum dioptimalkan, serta ketersediaan SDM berkualitas yang tidak merata antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Di wilayah perdesaan khususnya, keterbatasan ketersediaan sarpras pendukung ekonomi, minimnya riset dan inovasi pengembangan produk, keterbatasan akses terhadap permodalan, serta belum optimalnya peran lembaga ekonomi desa menjadi faktor-faktor yang menghambat perkembangan desa dalam upaya pemeratan pembangunan perekonomian perdesaan dan perkotaan.

f. Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pendukung perekonomian daerah

Ketersediaan prasarana sarana menjadi satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah, terutama dalam hal kelancaran distribusi barang dan jasa. Salah satu permasalahan yang masih dijumpai dalam penyediaan prasarana sarana adalah masih belum meratanya jaringan jalan di Kabupaten Pekalongan, belum optimalnya kualitas jalan utamanya jalan kabupaten yang belum memenuhi standar jalan kolektor dan masih terdapat ruas jalan yang kondisinya rusak. Berdasarkan kondisi fisiknya, kondisi jalan mantap (baik dan sedang sebesar **79,03 persen** di Tahun 2025 sehingga masih ada **20,97 persen** permukaan jalan dalam kondisi rusak baik ringan maupun berat. Selain itu masih terdapat titik rawan longsor di ruas-ruas jalan kabupaten maupun provinsi yang memerlukan antisipasi maupun penanganan darurat atau khusus saat terjadi bencana.

Kualitas pelayanan transportasi juga masih perlu ditingkatkan terutama dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan keselamatan dan kelancaran perjalanan transportasi (utamanya pada ruas jalan strategis pendukung jaringan distribusi logistik), peningkatan kualitas layanan angkutan umum (jangkauan wilayah dan kapasitas layanan), dan peningkatan pelayanan di simpul transportasi (utamanya kualitas kondisi fisik, pemenuhan utilitas dan persebaran terminal) serta integrasi antarmoda dalam rangka meningkatkan minat masyarakat menggunakan angkutan umum. Hal lain yang masih perlu dikembangkan terkait peningkatan kelembagaan pengelolaan transportasi yang berbasis kewilayahan dan penataan sistem logistik yang lebih efisien.

Permasalahan lainnya dalam penyediaan prasarana dan sarana pendukung perekonomian daerah adalah belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air yang disebabkan masih kurangnya sarana tampungan air baku. Air baku selain dimanfaatkan untuk penyediaan air minum dan pertanian juga dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi utamanya kebutuhan industri dan kebutuhan kawasan prioritas (pengembangan pariwisata). Pemenuhan sarana prasarana yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat juga masih perlu didorong untuk ditingkatkan seperti pemenuhan dan pemerataan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, serta penyediaan sarana air minum dan sanitasi aman bagi masyarakat.

d. Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan berdasarkan aspek pelayanan umum di Kabupaten Pekalongan adalah **belum optimalnya tata kelola pemerintahan menghadirkan pelayanan publik yang adaptif dan berintegritas**. Kondisi ini ditunjukkan dengan kinerja Reformasi Birokrasi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pengawasan dan Pengendalian serta manajemen ASN berbasis Sistem Merit Kabupaten Pekalongan yang membaik dari tahun-tahun sebelumnya namun dampak terhadap kualitas pelayanan publik dan capaian pembangunan daerah belum meningkat signifikan. Selain itu, perbaikan integritas ASN dan organisasi masih sangat perlu ditingkatkan mengingat hasil Survey Penilaian Integritas dalam kurun waktu 4 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Indeks Integritas Nasional Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 sebesar **80,17** atau naik 6,2 point dari Tahun 2024. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran akan risiko korupsi di Pemerintah Kabupaten Pekalongan sehingga membantu memperbaiki pengelolaan sumber daya dan kebijakan pemerintahan, serta memastikan pelayanan publik yang lebih efisien dan bebas dari penyalahgunaan.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi mencakup kelembagaan yang kurang efisen dan tidak adaptif disebabkan lemahnya peran evaluasi kelembagaan, proses bisnis organisasi yang tidak efektif, perencanaan belum sepenuhnya sinergi dan selaras, belum sepenuhnya berbasis kinerja, risiko dan riset serta penjenjangan kinerja organisasi tidak efisien, serta penetapan indiaktor yang belum sepenuhnya **SMART (spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu)**. Selain itu, kualitas kebijakan yang dihasilkan belum memberikan dampak signifikan tehadap pembangunan. Hal ini dipengaruhi oleh lemahnya pemanfaatan riset dan data dalam perumusan kebijakan serta masih ditemukan regulasi yang tumpang tindih. Selain itu, pemerintah belum mengoptimalkan ruang kolaborasi dengan menjadi

kolaborator bagi seluruh pihak dalam mencapai tujuan bersama. Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan periode 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.157
Permasalahan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2030

No	Aspek	Permasalahan
(1)	(2)	(3)
1	Aspek Geografi dan Demografi	a. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan
		b. Belum optimalnya ketahanan pangan
		c. Belum optimalnya penyelenggaraan penanggulangan bencana
		d. Meningkatnya sebaran dan pertumbuhan penduduk
2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	a. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan Masyarakat
		b. Belum optimalnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia
3.	Aspek Daya Saing Daerah	a. Belum optimalnya daya saing dan produktivitas perekonomian daerah
		b. Belum optimalnya pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan perekonomian daerah
		• Sektor industri pengolahan
		• Sektor Perdagangan
		• Sektor pertanian
		• Sektor Pariwisata
		c. Rendahnya daya saing tenaga kerja
		d. Belum optimalnya riset dan inovasi
		e. Ketimpangan ekonomi antarwilayah
		f. Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pendukung perekonomian daerah
4	Aspek Pelayanan Umum	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan menghadirkan pelayanan publik yang adaptif dan berintegritas

Sumber : Analisis Penyusun; 2025

2. Isu Strategis Daerah

Isu strategis daerah Kabupaten Pekalongan diidentifikasi dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan daerah sebagaimana diuraikan sebelumnya, berbagai isu strategis global, nasional, maupun daerah yang tertuang dalam berbagai dokumen kebijakan pembangunan, serta potensi yang dimiliki Kabupaten Pekalongan yang menjadi peluang sekaligus tantangan dalam pembangunan daerah lima tahun ke depan

Tabel 2.158
Analisis Isu Strategis Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS RPJMD 2025-2029	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			ISU GLOBAL	ISU NASIONAL (RPJPN)	ISU RPJMD PROVINSI JAWA TENGAH 2025-2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Potensi Wilayah darat, pesisir dan pegunungan 2. Unggulan sektor industri kecil menengah (batik, jeans, sarung); pertanian dan perdagangan 3. Sektor jasa pendidikan dan pesantren (kota santri)	1. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan 2. Belum optimalnya ketahanan pangan 3. Belum optimalnya penyelenggaraan penanggulangan bencana 4. Meningkatnya sebaran dan pertumbuhan penduduk 5. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat 6. Belum optimalnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia 7. Belum optimalnya daya saing dan produktivitas perekonomian daerah	1. Kerentanan masyarakat miskin akibat belum meratanya akses terhadap perlindungan sosial, pendidikan dan Kesehatan 2. Pencemaran lingkungan, resiko bencana dan terbatasnya ketersediaan infrastruktur untuk mendukung akses terhadap air bersih, hunian dan sanitasi 3. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi akibat kualitas tenaga kerja, penurunan kontribusi pariwisata, dan industri manufaktur 4. Ancaman terhadap ekosistem alam, kerusakan lingkungan, dan keberlanjutan sumber daya alam	1. Kemiskinan 2. Pangan dan Gizi 3. Kesehatan 4. Pendidikan 5. Gender 6. Air bersih dan sanitasi 7. Energi 8. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja 9. Infrastruktur 10. Kesenjangan Kota dan Permukiman 11. Produksi dan konsumsi berkelanjutan 12. Perubahan iklim 13. Sumberdaya kelautan 14. Ekosistem daratan 15. Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan 16. Kemitraan global	1. **Isu ekonomi**: rendahnya produktivitas, produktivitas tenaga kerja relatif tertinggal, pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas. 2. **integrasi ekonomi** domestik, rendahnya peran perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi 3. **Isu sosial**: kemiskinan menuju nol persen, akses dan kualitas belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial	1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan 2. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Ketahanan pangan yang berkelanjutan 4. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan 5. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana 6. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia 7. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat 8. Tata kelola pemerintahan yang dinamis	1. Optimalisasi potensi ekonomi lokal didukung pengembangan sektor industri kreatif, pariwisata, dan UMKM untuk meningkatkan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan 2. Pembangunan Kualitas Sumberdaya Manusia, Penguatan kohesi sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang merata serta inklusif 3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, adaptasi terhadap perubahan iklim dan ketahanan terhadap bencana 4. Pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata 5. Reformasi birokrasi, pelayanan publik dan pemanfatan IPTEK

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS RPJMD 2025-2029	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			ISU GLOBAL	ISU NASIONAL (RPJPN)	ISU RPJMD PROVINSI JAWA TENGAH 2025-2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	8. Belum optimalnya pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan perekonomian daerah 9. Rendahnya daya saing tenaga kerja 10. Belum optimalnya riset dan inovasi 11. Ketimpangan ekonomi antarwilayah 12. Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pendukung perekonomian daerah 13. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan menghadirkan pelayanan publik yang adaptif dan berintegritas	termasuk Kawasan pesisir 5. Perwujudan kelembagaan yang akuntabel dan keadilan yang merata berbasis kesetaraan gender		4. **Isu tata Kelola pemerintahan**: pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel, memberikan pelayanan publik yang berkualitas 5. **Isu supremasi hukum**, demokrasi substansial, keamanan nasional, stabilitas ekonomi, diplomasi tangguh 6. **Isu kesinambungan** pembangunan: konsistensi perencanaan penganggaran, konsisten perencanaan pusat daerah, kapasitas pembiayaan terbatas		

Sumber : Analisis Penyusun; 2025

Dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka **isu strategis daerah** Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

a. Optimalisasi potensi ekonomi lokal didukung pengembangan sektor industri kreatif, pariwisata, dan UMKM untuk meningkatkan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan

Optimalisasi potensi ekonomi lokal melalui pengembangan sektor industri kreatif, pariwisata, dan UMKM merupakan strategi kunci untuk meningkatkan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan pada tahun 2025 mencapai 5,88 persen, lebih besar dari Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,37 persen dan nasional sebesar 5,11 persen. Kontributor terbesar perekonomian Kabupaten Pekalongan masih dipegang oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, sementara dari sisi pengeluaran adalah Konsumsi Rumah Tangga.

Pengembangan sektor UMKM di Kabupaten Pekalongan menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir. Jumlah Usaha Kecil Mikro (UKM) binaan mengalami peningkatan signifikan dari 78.865 unit pada tahun 2024 menjadi 98.815 unit di tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya serius dari pemerintah daerah untuk mendukung pelaku usaha kecil dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing mereka. Dengan memperkuat UMKM, Kabupaten Pekalongan diharapkan dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sektor pariwisata di Kabupaten Pekalongan juga memiliki potensi besar yang perlu terus dikembangkan. Jumlah kunjungan wisatawan mengalamin penurunan dari 73.611 orang di Tahun 2024 menjadi 49.843 orang di Tahun 2025, namun pendapatan sektor pariwisata mengalami peningkatan dari Rp 710,737 juta pada tahun 2024 menjadi Rp 802.140 juta di tahun 2025. Pengelolaan objek wisata seperti Objek Wisata Linggoasri, Objek Wisata Pantai Depok, dan Bumi Perkemahan Linggoasri oleh pemerintah daerah merupakan langkah positif, namun perlu diikuti dengan pengembangan dan promosi yang lebih intensif untuk menarik lebih banyak wisatawan.

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pekalongan juga cukup signifikan meskipun mengalami sedikit penurunan. Pada tahun 2025, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB mencapai 29,65 persen, sedikit turun dari 29,66 persen pada tahun 2024. Sementara itu, kontribusi terhadap PDRB ADHK 2010 sebesar 6,16 persen pada tahun 2025 lebih besar dibandingkan dengan 2,96 persen pada tahun 2024. Sektor ini masih memegang peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Pekalongan, sehingga optimalisasi dan inovasi dalam industri pengolahan tetap menjadi prioritas.

Secara keseluruhan, optimalisasi potensi ekonomi lokal melalui pengembangan sektor industri kreatif, pariwisata, dan UMKM merupakan langkah strategis yang perlu terus diperkuat oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan. Dengan meningkatkan dukungan terhadap sektor-sektor

ini, diharapkan daya saing daerah dapat meningkat, sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan dapat lebih sejajar dengan pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional. Upaya kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

b. Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia, penguatan kohesi sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang merata serta inklusif

Pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Pekalongan merupakan upaya penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan inklusif. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan pada Maret 2025 tercatat sebesar 8,05 persen menurun dibandingkan Tahun 2024. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan nasional (8,47%) dan di bawah Provinsi Jawa Tengah (9,48%). Penurunan ini mencerminkan keberhasilan berbagai program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan, namun masih perlu diiringi dengan peningkatan kualitas SDM agar masyarakat dapat lebih mandiri dan produktif.

Penguatan kohesi sosial juga menjadi faktor kunci dalam pembangunan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Pekalongan. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menerima bantuan sosial dari pemerintah sebesar 1,33 persen pada tahun 2025. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perhatian lebih dari pemerintah dalam memberikan dukungan kepada kelompok rentan. Meskipun menunjukan peningkatan namun persentase Masyarakat yang memperoleh bantuan sosial dari pemerintah masih relative kecil. Penguatan kohesi sosial diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pekalongan pada tahun 2025 sebesar **72,71** yang masih di bawah angka IPM Jawa Tengah sebesar **74,77** dan IPM Nasional yang sebesar **75,90**. IPM yang lebih rendah ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat di Kabupaten Pekalongan. Upaya-upaya peningkatan kualitas SDM harus difokuskan pada penyediaan akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik serta peluang kerja yang lebih banyak dan berkualitas.

Distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia menunjukkan bahwa 40 persen penduduk berpendapatan rendah di Kabupaten Pekalongan pada Tahun 2024 ternyata sudah menerima 20,43 persen dari total pendapatan. Angka ini sedikit lebih rendah dibanding tahun 2023 yaitu sebesar 20,71 persen. Penurunan ini mengindikasikan adanya ketimpangan pendapatan yang masih perlu diperbaiki. Program-program ekonomi inklusif yang dapat meningkatkan pendapatan kelompok berpendapatan rendah perlu terus dikembangkan untuk menciptakan distribusi pendapatan yang lebih adil.

Secara keseluruhan, pembangunan kualitas SDM, penguatan kohesi sosial, dan peningkatan kualitas hidup yang merata dan inklusif adalah hal yang sangat penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pekalongan. Meskipun telah ada berbagai

pencapaian positif seperti penurunan angka kemiskinan dan peningkatan penerima bantuan sosial, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi, termasuk peningkatan IPM dan pengurangan ketimpangan pendapatan. Melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, Kabupaten Pekalongan dapat mencapai pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

c. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, adaptasi terhadap perubahan iklim dan ketahanan terhadap bencana

Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kabupaten Pekalongan menjadi semakin membaik dengan adanya peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dari 62,52 pada tahun 2020 menjadi 72,12 pada tahun 2025. Nilai IKA pada tahun 2021 tercatat sebesar 50,00, kemudian mengalami penurunan menjadi 43,33 pada tahun 2022 dan mencapai angka terendah sebesar 33,64 pada tahun 2023 dan mengalami kenaikan di Tahun 2024 sebesar 46,36 dan Tahun 2025 sebesar 69,86. Meskipun terjadi perbaikan di tahun 2024 dan 2025 , kondisi ini masih menunjukkan bahwa kualitas air berada dalam kategori rentan, sehingga pengelolaan kawasan pertambangan perlu lebih diarahkan pada pengendalian limbah cair, reklamasi lahan pascatambang, serta pemantauan kualitas air secara konsisten.

Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Pekalongan periode 2021–2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, IKU tercatat sebesar 80,37 kemudian meningkat pada 2022 menjadi 84,12 dan mencapai puncak pada 2023 sebesar 85,10. Namun, pada tahun 2024dan 2025 terjadi penurunan tajam hingga 74,61 dan 75,76. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya deforestasi atau perubahan penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan.

Kabupaten Pekalongan juga menghadapi tantangan besar terkait adaptasi terhadap perubahan iklim dan ketahanan terhadap bencana. Indeks risiko bencana pada tahun 2025 mencapai 102,14, termasuk dalam kelas risiko tinggi, dan menempatkan Kabupaten Pekalongan di posisi keempat dari 35 kabupaten/kota dengan risiko bencana tertinggi di Jawa Tengah. Tingginya risiko bencana ini memerlukan strategi mitigasi dan adaptasi yang komprehensif untuk mengurangi kerentanan masyarakat dan infrastruktur terhadap bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan.

Iklim Kabupaten Pekalongan termasuk dalam kategori iklim tropis basah. Curah hujan dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Curah hujan di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2025 menunjukkan variasi yang signifikan sepanjang tahun. Curah hujan tertinggi berada pada bulan Januari sebesar 502,60 mm dan Februari sebesar 301,60 mm, yang juga disertai jumlah hari hujan yang tinggi, yakni 20 dan 18 hari. Sedangkan, Juli dan Oktober mengalami curah hujan terendah hanya sebesar 52,70 mm dan 57,70mm. Kekurangan air selama musim kemarau ini tidak hanya berdampak pada kebutuhan rumah tangga, tetapi juga pada sektor pertanian yang merupakan salah satu sumber penghidupan utama masyarakat. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya

konservasi air dan pengelolaan sumber daya air yang lebih efisien serta penerapan teknologi pengolahan air yang inovatif.

Secara keseluruhan, pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, adaptasi terhadap perubahan iklim, dan ketahanan terhadap bencana memerlukan perhatian serius di Kabupaten Pekalongan. Penurunan kualitas lingkungan hidup dan tingginya risiko bencana menuntut tindakan yang lebih tegas dan terkoordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Hanya dengan demikian, Kabupaten Pekalongan dapat memastikan keberlanjutan lingkungannya serta meningkatkan kualitas hidup dan ketahanan masyarakat terhadap berbagai ancaman lingkungan dan bencana.

d. Pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata

Pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata di Kabupaten Pekalongan menghadapi berbagai tantangan signifikan yang perlu segera diatasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Salah satu isu utama adalah masih tingginya kerusakan jalan di wilayah ini. Pada tahun 2024, kondisi jalan yang rusak dan rusak berat mencapai 20,97 persen, menunjukkan perlunya perbaikan dan pemeliharaan yang lebih intensif untuk memastikan aksesibilitas dan konektivitas yang lebih baik bagi masyarakat.

Selain jalan, kerusakan jembatan juga menjadi masalah serius dengan persentase kerusakan mencapai 98,43 persen pada tahun 2025 baik kerusakan sedang dan ringan. Kerusakan ini sebagian besar disebabkan oleh usia jembatan yang tua serta kondisi cuaca ekstrem yang mempercepat degradasi struktur jembatan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan investasi yang signifikan dalam pembangunan dan perbaikan jembatan, serta penerapan teknologi yang lebih canggih untuk meningkatkan daya tahan jembatan terhadap cuaca ekstrem.

Pelayanan air minum bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan juga masih belum optimal. Pada tahun 2025, cakupan pelayanan air minum layak dan aman mencapai 89,35 persen, jauh di bawah target nasional yang ditetapkan sebesar 100 persen. Keterbatasan akses terhadap air minum bersih ini mempengaruhi kualitas hidup masyarakat dan kesehatan mereka. Untuk mencapai target nasional, pemerintah daerah perlu meningkatkan infrastruktur air minum dan memperluas jangkauan layanan agar semua warga dapat menikmati akses air bersih.

Kualitas bangunan irigasi di Kabupaten Pekalongan masih ada sekitar 8,84 persen pada tahun 2024 dalam kondisi kurang baik. Sistem irigasi yang tidak optimal berdampak langsung pada produktivitas pertanian, yang merupakan sektor penting bagi perekonomian daerah. Untuk itu, perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi harus menjadi prioritas agar dapat mendukung peningkatan hasil pertanian dan kesejahteraan petani.

Penanganan banjir dan rob di Kabupaten Pekalongan juga belum optimal, meskipun telah ada beberapa upaya yang dilakukan. Pada tahun 2024, persentase penurunan wilayah genangan banjir dan rob mencapai 52,62 persen, namun masih banyak wilayah yang rentan terhadap bencana ini. Penanganan yang lebih komprehensif dan integratif diperlukan untuk mengurangi

risiko banjir dan rob secara signifikan. Selain itu, penyediaan keselamatan sarana perhubungan juga belum maksimal, dengan hanya 49,78 persen infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik di Tahun 2024. Upaya peningkatan keselamatan dan kualitas sarana perhubungan harus terus ditingkatkan untuk memastikan mobilitas dan keamanan masyarakat dalam berkendara.

Secara keseluruhan, pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata di Kabupaten Pekalongan memerlukan perhatian yang lebih serius dan investasi yang lebih besar. Dengan meningkatkan kualitas dan cakupan infrastruktur jalan, jembatan, air minum, irigasi, serta penanganan banjir dan rob, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

e. Reformasi birokrasi, pelayanan publik dan pemanfatan IPTEK

Reformasi birokrasi di Kabupaten Pekalongan menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Salah satu isu utama adalah belum optimalnya kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kompetensi ASN yang belum memadai menghambat pelaksanaan tugas-tugas administratif dan pelayanan publik secara optimal. Upaya peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan yang berkelanjutan perlu menjadi prioritas agar mampu mendukung transformasi birokrasi yang lebih responsif dan profesional.

Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Pekalongan juga belum mencapai potensi optimalnya. Tingkat Maturitas SPIP yang berada pada level 3 menunjukkan bahwa meskipun kebijakan dan prosedur pengendalian internal telah diterapkan, evaluasi atas pengendalian intern masih dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Hal ini menandakan adanya kelemahan dalam proses pengawasan dan evaluasi. Untuk mencapai pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih transparan dan akuntabel, perlu dilakukan perbaikan dalam dokumentasi dan evaluasi pengendalian internal, sehingga dapat mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada tahun 2025 adalah 76,98 dengan kategori "BB", mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 77,03 dengan kategori yang sama. Penurunan ini menunjukkan bahwa upaya reformasi birokrasi masih perlu ditingkatkan secara konsisten. Peningkatan indeks ini sangat bergantung pada peningkatan kompetensi ASN, optimalisasi SPIP, serta pemanfaatan teknologi informasi yang lebih baik. Tanpa adanya peningkatan signifikan dalam faktor-faktor tersebut, reformasi birokrasi tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien.

Belum optimalnya penerapan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) juga menjadi tantangan besar. Tingkat Kematangan Manajemen Layanan SPBE Kabupaten Pekalongan pada tahun 2025 sebesar 3,05, menunjukkan bahwa masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam penerapan teknologi informasi. Peningkatan pemanfaatan IPTEK melalui SPBE yang lebih efektif dan audit TIK yang

komprehensif diharapkan dapat mempercepat proses birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Secara keseluruhan, reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, dan pemanfaatan IPTEK di Kabupaten Pekalongan memerlukan upaya yang lebih terfokus dan terkoordinasi. Peningkatan kompetensi ASN, optimalisasi implementasi SPIP, peningkatan indeks reformasi birokrasi, dan pemanfaatan teknologi informasi yang lebih baik harus menjadi prioritas utama. Dengan langkah-langkah tersebut, Kabupaten Pekalongan dapat mencapai transformasi birokrasi yang lebih responsif, efisien, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

A. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perekonomian Global, Perekonomian Nasional, dan Kondisi Perekonomian di Provinsi Jawa Tengah sangat mempengaruhi Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan. Prospek perekonomian tersebut akan menjadi dasar dalam penentuan asumsi dalam penyusunan dokumen perencanaan (RPJMN/D dan RKP/RKPD) dan juga penyusunan dokumen penganggaran (APBN/APBD).

Gambaran secara umum dari ketiga kondisi di atas, selengkapnya akan dibahas dalam bagian berikut :

1. Kondisi Perekonomian Global dan Nasional

a. Dinamika Perekonomian Global 2027

Berdasarkan laporan terbaru Bank Dunia (World Bank) per Januari 2026, Pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan relatif stabil namun dibayangi oleh risiko ketidakpastian kebijakan perdagangan dan ketegangan geopolitik. Tahun 2026: Diprediksi tumbuh sebesar 2,6%. Angka ini mencerminkan ketahanan ekonomi di tengah perlambatan produktivitas jangka panjang. Selanjutnya perekonomian global 2027 diprediksi melambat dan stagnan di level 3,20%-3,30%, dipicu konflik geopolitik berkelanjutan, proteksionisme, dan inflasi yang sulit turun. Dampak perang menyebabkan guncangan rantai pasok, lonjakan harga energi/minyak, serta ketidakpastian tinggi, menekan pertumbuhan ekonomi negara maju dan berkembang.

Berikut adalah poin-poin utama dinamika ekonomi global 2027 terkait dampak perang antara lain:

1) Pertumbuhan Ekonomi yang Melambat dan "Suram"
   - Pertumbuhan PDB global diproyeksikan tertahan di angka 3,2% pada tahun 2027.
   - Gubernur Bank Indonesia menyebut prospek 2027 masih "suram" karena ketegangan politik yang terus berlanjut dan kebijakan proteksionis negara maju.
2) Risiko Guncangan Harga Energi dan Inflasi
   Konflik militer, seperti serangan terhadap Iran pada awal 2026, diprediksi memicu lonjakan harga minyak dunia hingga mencapai USD 130 per barel jika perang berlarut-larut. Hal ini dapat menyebabkan "kejutan inflasi" (inflationary shock) yang serupa dengan krisis tahun 2022, mempersulit bank sentral untuk menurunkan suku bunga.
3) Fragmentasi Perdagangan dan Multilateralisme
   Perang mempercepat pergeseran dari multilateralisme menuju bilateralisme dan regionalisme. Gangguan infrastruktur transportasi dan logistik akibat konflik akan terus mengubah aliran perdagangan internasional secara permanen hingga 2027.
4) Kerentanan Fiskal dan Utang Negara
   Banyak negara menghadapi tekanan fiskal yang berat karena harus meningkatkan anggaran pertahanan di tengah tingginya beban utang dan suku bunga. Negara-negara berpendapatan rendah (LICs) menjadi yang paling rentan terhadap risiko gagal bayar utang *(debt distress)* akibat guncangan harga pangan dan energi dari wilayah konflik.
5) Perubahan Struktur Ekonomi Regional
   Meskipun global melambat, India diprediksi melampaui Jerman sebagai ekonomi terbesar ketiga dunia pada akhir 2027, menunjukkan adanya pergeseran kekuatan ekonomi ke Asia di

tengah ketidakpastian Barat. Eropa diperkirakan mengalami perlambatan lebih dalam dibandingkan Amerika Serikat karena ketergantungan yang lebih tinggi pada pasokan energi dari wilayah konflik.

Di akhir tahun 2025, ketegangan politik dunia cukup tinggi dengan kebijakan tarif Amerika Serikat yang menimbulkan ketidakpastian global. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis laporan proyeksi ekonomi global terbaru yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia mencapai 2,7 persen pada tahun 2026. Proyeksi ini menunjukkan perlambatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, seiring meningkatnya ketidakpastian ekonomi global dan berlanjutnya ketegangan geopolitik.

PBB menilai perlambatan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk kebijakan kenaikan tarif Amerika Serikat, dinamika perdagangan internasional, serta risiko geopolitik yang masih tinggi. Meski demikian, ekonomi global diperkirakan mulai pulih secara bertahap dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 2,9 persen pada 2027, setelah tumbuh 2,8 persen pada 2025.

Laporan PBB juga mencatat ketahanan ekonomi global di tengah lonjakan tarif dan tekanan eksternal, yang ditopang oleh kuatnya konsumsi masyarakat serta tren penurunan inflasi. Kendati demikian, PBB mengingatkan bahwa risiko penurunan ekonomi masih membayangi dan memerlukan kewaspadaan serta kerja sama global yang berkelanjutan.

Bank Dunia merilis proyeksi pertumbuhan ekonomi beberapa negara di Asia dan pacific seperti yang terlihat gambar berikut

	2023	2024	2025e	2026f	2027f
Cambodia	5.0	6.0	4.8	4.3	5.1
China	5.4	5.0	4.9	4.4	4.2
Fiji	9.4	3.5	2.8	3.0	3.1
Indonesia	5.0	5.0	5.0	5.0	5.2
Kiribati	2.7	5.3	3.9	3.2	2.5
Lao PDR	3.7	4.1	4.2	4.0	3.9
Malaysia	3.5	5.1	4.1	4.1	4.0
Marshall Islands[2]	-4.0	3.0	2.5	4.1	2.4
Micronesia, Fed. Sts.[2]	0.8	0.7	1.0	1.5	0.8
Mongolia	7.2	5.1	5.9	5.6	5.5
Myanmar[2 3]	1.0	-1.0	-1.8	3.0	..
Nauru[2]	0.6	1.6	2.1	1.9	1.9
Palau[2]	2.2	12.8	6.7	3.5	2.7
Papua New Guinea	3.8	3.8	4.7	3.5	3.1
Philippines	5.5	5.7	5.1	5.3	5.4
Samoa[2]	15.2	4.8	4.2	4.4	3.3
Solomon Islands	2.7	2.5	2.5	2.6	2.8
Thailand	2.0	2.5	2.0	1.8	2.5
Timor-Leste	2.4	4.1	4.0	3.4	3.8
Tonga[2]	2.8	1.7	2.7	2.3	1.8
Tuvalu	4.0	3.1	3.0	2.6	2.7
Vanuatu	2.1	0.9	1.7	2.8	2.7
Viet Nam	5.1	7.1	7.2	6.3	6.7

Sumber ; World Bank; 2026;

Gambar 3.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi sejumlah Negara

Dibandingkan beberapa negara di Asia Tenggara, upgrade proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan Malaysia, Thailand, dan Filipina, meski tidak setinggi Vietnam.

2. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional 2027

Indonesia menghadapi berbagai tantangan pembangunan di berbagai sektor ekonomi, pendidikan, SDM, tata kelola, kesehatan, kewilayahan, kemiskinan, infrastruktur, yang bersumber dari tingkat global sampai domestik. Di bidang ekonomi Indonesia terjebak dalam pendapatan kelas menengah selama 30 tahun dan pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan selama 20 tahun terakhir, Kualitas SDM Indonesia masih relatif rendah, di bidang Kesehatan angka stunting, AKI masih cukup tinggi, angka kemiskinan yang masih cenderung stagnan, angka pendidikan yang masih rendah, tata Kelola pemerintahan, ketimpangan dan pembangunan infrastruktur yang belum merata.

Bank Dunia telah meningkatkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dibandingkan prediksi sebelumnya di pertengahan 2025.

- **Tahun 2026**: Diproyeksikan tumbuh sebesar **5,00%.**
- **Tahun 2027**: Diproyeksikan naik menjadi **5,20%**

Sebagai perbandingan, pemerintah dalam APBN 2026 menargetkan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2026 sebesar 5,40%, sementara proyeksi Bank Indonesia berada di level ±5,3% YoY. Pertumbuhan akan didorong melalui 8 program hasil terbaik cepat (PHTC), termasuk program makan bergizi gratis, perumahan, serta penguatan sektor manufaktur dan digital. Sedangkan Bank Dunia mengekspektasikan aktivitas ekonomi pada Tahun 2026 di wilayah *East Asia and Pacific (EAP)* akan melambat. Meski demikian, pertumbuhan Indonesia diekspektasikan terjaga di level ±5,00%, didukung oleh stimulus fiskal dan peningkatan investasi yang didorong oleh pemerintah. Selama 2025 sendiri, Bank Dunia memperkirakan bahwa investasi swasta pada EAP cenderung lemah, kecuali Indonesia dan Malaysia yang didorong oleh inisiatif pemerintah dan penanaman modal.

3. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027

Perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2025 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp1.943 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp1.219 triliun. Kemudian untuk PDRB per kapita mencapai Rp50,82 juta.

Perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2025 tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 5,37 persen, meningkat dibandingkan capaian pada tahun 2024 yang tumbuh 4,95 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yaitu sebesar 10,60 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi dicatat oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) yaitu sebesar 10,04 persen.

Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024, ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan IV-2025 tumbuh sebesar 5,84 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi yang tumbuh sebesar 16,14 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen yang mengalami kenaikan paling tinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) sebesar 13,20 persen.

Sementara itu, dibandingkan dengan Triwulan III-2025 (q-to-q), ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan IV-2025 tumbuh sebesar 0,90 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang tumbuh sebesar 7,11 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen yang mengalami

kenaikan paling tinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 61,58 persen.

Secara struktur, lapangan usaha Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2025 dengan kontribusi sebesar 33,38 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dengan kontribusi sebesar 60,89 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tercatat PDRB per Kapita naik dari Rp.47,97 juta Tahun 2024 menjadi sebesar Rp50,82 juta Tahun 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Tengah mengalami penurunan menjadi 4,66 persen pada Agustus 2025 setelah sebelumnya sebesar 4,78 persen pada Agustus 2024. Angka kemiskinan Jawa Tengah juga konsisten menurun, dari sebelumnya 10,47 persen pada Maret 2024, turun menjadi 9,48 persen pada Maret 2025. Tingkat ketimpangan pengeluaran di Jawa Tengah yang diukur menggunakan Rasio Gini membaik, dari sebelumnya 0,367 (Maret 2024) turun menjadi 0,359 (Maret 2025), dan termasuk dalam kriteria ketimpangan rendah menurut Bank Dunia.

Mendasarkan pada kondisi-kondisi tersebut, maka perekonomian Jawa Tengah tahun 2027 diproyeksikan tumbuh pada angka 5,30-7,00 persen. Sedangkan inflasi diproyeksikan terkendali sebesar 1,5-3,5 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2027 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Jawa Tengah. Tahun 2027, angka kemiskinan diproyeksikan turun sebesar 8,51-8,17 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka turun sebesar 4,65-4,08 persen. Sedangkan PDRB per kapita diharapkan meningkat sebesar 56,0-59,8 juta rupiah. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Rasio Gini sebesar 0,358-0,363 di tahun 2027

Tabel 3.1.
Proyeksi Indikator Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027

No	Indikator	Satuan	Proyeksi 2027
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,30 - 7,00
2.	PDRB per kapita	Juta Rp	56,0 - 59,8
3.	Tingkat Inflasi	%	1,50 – 3,50
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,65- 4,08
5.	Tingkat Kemiskinan	%	8,51 - 8,17
6.	Rasio Gini	Angka	0,358 – 0,363

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah 2026

Arah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2027 berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah **"Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi"**dengan strategi antara lain :

1. pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan;
2. penguatan promosi pariwisata berbasis digital;
3. peningkatan kualitas destinasi wisata berbasis klaster dengan perbaikan prasarana sarana destinasi wisata;
4. penguatan diversifikasi daya tarik pariwisata sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah seperti pemanfaatan keragaman sumber daya alam, budaya, kreativitas, dan olahraga berbasis digital;
5. peningkatan infrastruktur konektivitas antar destinasi wisata;
6. penguatan integrasi antar destinasi wisata;
7. penguatan kapasitas SDM pelaku pariwisata termasuk pelaku UMKM pariwisata;
8. penguatan fasilitasi kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata;

9. *city beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan;
10. pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistic dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada Kawasan megapolitan/metropolitan (urban tourism), serta kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Magelang-Yogyakarta-Surakarta;
11. pengembangan pariwisata ramah muslim melalui fasilitasi peningkatan layanan dan ekosistem halal;
12. penguatan ekonomi dan keuangan syariah melalui penguatan halal value chain, penguatan keuangan syariah, penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), penetapan sekolah pelopor ekonomi syariah dan penguatan ekonomi digital;
13. penguatan kelembagaan pariwisata dan ekonomi syariah agar lebih efektif;
14. peningkatan pemenuhan sarana prasarana pendukung pariwisata desa;
15. peningkatan pengembangan perekonomian desa berbasis potensi pariwisata berkelanjutan;
16. peningkatan peran BUMDes dan lembaga ekonomi desa lainnya dalam mendukung pariwisata berkelanjutan dan ekonomi Syariah;
17. penguatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SLB dan SMK bidang keahlian layanan pariwisata, seni, kriya, kuliner, tata boga, busana, perhotelan, dan perbankan syariah termasuk ekonomi kreatif dan kewirausahaan halal;
18. revitalisasi kurikulum SMK seni, kriya, kuliner, tata boga, busana, perhotelan, layanan pariwisata dan perbankan syariah selaras dengan kebutuhan usaha dan industri;
19. penguatan integrasi tema pariwisata, budaya, ekonomi kreatif dan syariah dalam kurikulum SMA dan SLB berbasis project integratif dan lintas;
20. penguatan kemitraan DUDI melalui sinkronisasi kompetensi dan penyusunan Memorandum of Agreement (MoA) untuk kegiatan spesifik antara lain dengan perusahaan atau hotel syariah, restoran halal, biro perjalanan haji-umrah, bank syariah, UMKM kriya lokal, desa wisata halal, serta perguruan tinggi termasuk dukungan program magang dan sertifikasi halal;
21. peningkatan upaya pelestarian dan pemanfaatan karya budaya dan cagar budaya sebagai salah satu daya tarik wisata melalui pemetaan karya budaya dan cagar budaya potensial, pemeliharaan prasarana sarana kebudayaan, peningkatan upaya diplomasi budaya tingkat nasional/internasional, serta penguatan SDM/lembaga/komunitas kebudayaan sebagai agen diplomasi budaya;
22. penguatan event olahraga pariwisata ramah lingkungan dan berkelanjutan;
23. perluasan literasi berwawasan lingkungan hidup berkelanjutan dan literasi ekonomi berbasis syariah melalui pelibatan pemangku kepentingan;
24. mengoptimalkan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif berbasis kelestarian lingkungan hidup berkelanjutan;
25. peningkatan partisipasi pemuda dalam bidang pariwisata, wisata kreatif, membangun startup berbasis syariah.

4. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Pekalongan Tahun 2027

Dengan melihat situasi ekonomi global, nasional dan regional yang diperkirakan semakin membaik, proyeksi ekonomi makro di Kabupaten Pekalongan juga diharapkan akan tumbuh positif dengan kenaikan PDRB pada sektor- sektor dominan. Pertumbuhan ekonomi positif dan diprediksi akan naik dengan tetap menjaga inflasi agar konsumsi masyarakat tetap terjaga yang harapannya akan memberikan peluang kerja dan menurunkan angka kemiskinan.

Untuk itu diperlukan strategi yang tepat sesuai dengan arah kebijakan ekonomi dengan prioritas antara lain pada sektor-sektor unggulan yang dapat menyerap tenaga kerja dan memulihkan serta meningkatkan pendapatan masyarakat, sektor-sektor potensial untuk mendorong pemulihan

pendapatan daerah, serta sektor-sektor yang mempunyai *multiplier effect*/pengaruh yang luas dalam penciptaan lapangan kerja. Selengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis, perekonomian Kabupaten Pekalongan akan tetap didominasi oleh 3 (tiga) sektor utama yaitu industri pengolahan; pertanian, kehutanan dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pekalongan tahun 2025 tercatat mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 5,88 persen, meningkat dibandingkan capaian tahun 2024 yang tumbuh sebesar 5,08 persen. Capaian positif pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan selama 2025 ditopang dengan penguatan kinerja sejumlah komponen pada sektor lapangan usaha. TercatatLapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan meliputi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,25 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 8,39 persen; Jasa Lainnya sebesar 7,10 persen, Jasa Pendidikan sebesar 6,74 persen dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6,65 persen.

Semakin pulihnya perekonomian di Kabupaten Pekalongan selama Tahun 2023-2025 didukung dengan adanya investasi dan sektor konstruksi seperti pembangunan pasar, program kebijakan pemerintah, dan dukungan usaha mikro kelas menengah (UMKM) perdagangan *online* menjadi ladang penyerapan tenaga kerja yang ada. Hal ini menjadi salah satu pendorong Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 sebesar 5,88 persen lebih besar dari Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,37 persen dan nasional sebesar 5,02 persen.

Sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan tahun 2027 diproyeksikan tumbuh positif sebesar 5,60 - 6,00 persen di Tahun 2026 dan 6,10 - 6,97 persen di Tahun 2027. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pekalongan
Tahun 2023-2025 dan Proyeksi 2026-2027

No	Indikator	2023	2024	2025	Proyeksi	
					2026	2027
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,13	5,08	5,88	5,60 - 6,00	6,00 - 7,85

Sumber: BPS; Bapperida Kabupaten Pekalongan, 2026 (Data diolah)

b. PDRB Perkapita

Pada tahun 2025 PDRB per kapita tercatat sebesar 31,72 juta rupiah mengalami kenaikan 6,50 persen atau sebesar 29,79 juta rupiah di tahun 2024. PDB per kapita Kabupaten Pekalongan diproyeksikan tumbuh positif, mencapai sekitar 35,59-37,03 juta rupiah pada Tahun 2026 dan diprediksi mencapai 41,20-43,88 pada Tahun 2027. Faktor pendukung utama meliputi peningkatan nilai tambah pada sektor lapangan usaha, ekspor jasa, dan pertumbuhan ekonomi daerah yang diproyeksikan di atas 6,00 persen.

PDRB Perkapita Kabupaten Pekalongan Tahun 2023-2025 dan Proyeksi 2026-2027 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3.
PDRB Perkapita Kabupaten Pekalongan
Tahun 2023-2025 dan Proyeksi 2026-2027

No	Wilayah	2023	2024	2025	Proyeksi	
					2026	2027
1	PDRB Perkapita (juta rupiah)	27,96	29,79	31,72	35,59 -37,03	41,20 - 43,88

Sumber: BPS; Bapperida Kabupaten Pekalongan, 2026 (Data diolah)

c. Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi di Kabupaten dalam kurun waktu tahun 2023-2025 relatif terkendali cukup baik di angka rata-rata 3±1 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi di Kabupaten Pekalongan sepanjang 2025 tercatat mencapai **2,83 persen (data inflasi Kota Tegal)** , lebih tinggi dibanding dengan inflasi tahun 2024 yang sebesar 2,19 persen. Proyeksi inflasi untuk 2026 dan 2027 ditargetkan tetap terkendali dalam kisaran 3±1 persen. Meskipun terdapat tekanan inflasi tinggi di awal 2026 (terutama Februari 2026), Bank Indonesia meyakini inflasi akan kembali normal dan terkendali seiring konsistensi kebijakan moneter.

Tingkat Inflasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2023-2025 dan Proyeksi 2026-2027 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4.
Tingkat Inflasi Kabupaten Pekalongan
Tahun 2023-2025 dan Proyeksi 2026-2027

No	Wilayah	2023	2024	2025	Proyeksi	
					2026	2027
1	Tingkat Inflasi (%)	3,28	2,19	2,83	3±1	3±1

Sumber: BPS; Bapperida Kabupaten Pekalongan, 2026 (Data diolah)

d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan berdasarkan data Agustus 2025 menunjukkan penurunan 3,24 persen dibandingkan tahun 2024 sebesar
3,30 persen atau sebesar 0,06 point. Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan tahun 2026-2027 diprediksi fluktuatif di tengah potensi krisis lapangan kerja akibat automasi dan pelemahan konsumsi. Proteksi TPT berkisar 3,05 - 2,75 persen pada 2026 dan 2,98 - 2,66 persen pada 2027, sementara beberapa laporan menyoroti risiko penurunan ketersediaan lapangan kerja hingga 2027. Secara umum, meski pertumbuhan ekonomi diproyeksikan tumbuh positif, penciptaan lapangan kerja dihadapkan pada tantangan struktural yang signifikan, transformasi digital dan memaksimalkan bonus demografi guna menekan angka pengangguran.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan Tahun 2023-2025 dan Proyeksi 2026-2027 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan
Tahun 2023-2025 dan Proyeksi 2026-2027

No	Wilayah	2023	2024	2025	Proyeksi	
					2026	2027
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,25	3,30	3,24	3,05 - 2,75	3,00 - 2,70

Sumber: BPS; Bapperida Kabupaten Pekalongan, 2026 (Data diolah)

e. Tingkat Kemiskinan

Kabupaten Pekalongan termasuk Kabupaten yang memiliki persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan nasional. Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2025 tercatat sebesar **8,05 persen** menurun dibandingkan Tahun 2024 sebesar **8,95 persen**. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan nasional (8,47 persen) dan di bawah Provinsi Jawa Tengah (9,48 persen). Pemerintah Kabupaten Pekalongan menegaskan komitmennya untuk mengentaskan kemiskinan dengan menargetkan kemiskinan sekitar 8,09 - 7,98 persen pada tahun 2026 dan 8,00 - 7,60 persen di Tahun 2027. Langkah ini bukan hanya sekadar angka, melainkan wujud nyata dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi ketimpangan sosial di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan.

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pekalongan Tahun 2023-2025 dan Proyeksi 2026-2027 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6.
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pekalongan
Tahun 2023-2025 dan Proyeksi 2026-2027

No	Wilayah	2023	2024	2025	Proyeksi	
					2026	2027
1	Tingkat Kemiskinan (%)	9,67	8,95	8,05	8,09 - 7,98	7,02 - 6,70

Sumber: BPS; Bapperida Kabupaten Pekalongan, 2026 (Data diolah)

f. Rasio Gini

Rasio Gini Kabupaten Pekalongan rata-rata di bawah provinsi Jawa Tengah. koefisien gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, jika B=0 koefisien gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pemerataan pendapatan di Kabupaten Pekalongan lebih baik dibandingkan dengan rata-rata capaian di Provinsi Jawa Tengah. Rasio Gini Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,327 naik dibandingkan Tahun 2023 sebesar 0,325 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah (0,367).

Strategi pemerintah daerah fokus pada penurunan rasio gini secara bertahap menuju target pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif. Gini rasio ditargetkan di tahun 2026 sebesar 0,285 di tahun 2026 dan 0,264 dii Tahun 2027. Penguatan akses pembiayaan bagi UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi pilar utama dalam menekan ketimpangan di tahun 2026 dan 2027.

Gini Rasio Kabupaten Pekalongan Tahun 2023-2025 dan Proyeksi 2026-2027 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7.
Rasio Gini Kabupaten Pekalongan
Tahun 2023-2025 dan Proyeksi 2026-2027

No	Wilayah	2023	2024	2025	Proyeksi	
					2026	2027
1	Rasio Gini	0,325	0,327	0,306*)	0,285	0,264

*Sumber: BPS; Bapperida Kabupaten Pekalongan, 2026 (Data diolah) *) Angka Sementara*

Arah Pembangunan Kabupaten Pekalongan tahun 2027 berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah " **Penguatan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Optimalisasi Potensi Daerah untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Inklusif"** dengan strategi antara lain :

1) Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan.
2) Mendorong konektivitas antarwilayah terutama kawasan tertinggal, pinggiran, dan perdesaan melalui peningkatan akses transportasi dan digitalisasi wilayah.
3) Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.
4) Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.
5) Penerapan *smart system* dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.
6) Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.
7) Penguatan sektor industri kecil dan menengah (IKM) melalui fasilitasi legalitas, pelatihan, inkubasi bisnis, dan integrasi dengan pasar digital dan global.
8) Revitalisasi dan pengembangan kawasan sentra produksi serta kawasan ekonomi berbasis komunitas.
9) Pengembangan destinasi wisata berbasis budaya, sejarah, dan alam dengan pendekatan *community-based tourism* dan dukungan infrastruktur serta SDM pariwisata.
10) Penguatan ekosistem ekonomi syariah dengan membangun kolaborasi antara UMKM syariah, pesantren, koperasi syariah, dan lembaga keuangan syariah.
11) Peningkatan literasi dan akses masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah.
12) Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.
13) Penguatan peran BUMDes, koperasi, dan lembaga ekonomi lokal sebagai motor penggerak ekonomi inklusif.
14) Penguatan regulasi dan insentif daerah untuk mempercepat investasi dan inovasi pembangunan.
15) Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.
16) Mengintegrasikan pendekatan gender, penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan anak dan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program Pembangunan.

B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kondisi fiskal mempengaruhi kemampuan daerah dalam mencapai target pembangunan daerah serta dukungan terhadap capaian pembangunan nasional. Sehingga sinkronisasi pembangunan dari perencanaan sampai pelaksanaan menjadi sangat penting. Kebijakan Umum Transfer ke Daerah (TKD) dari Kementerian Keuangan yang cenderung menurun tahun 2026 mendorong kepada upaya **Belanja Daerah yang lebih Produktif, Efektif dan Efisien untuk Akselerasi Pertumbuhan.** Kebijakan tersebut meliputi :

1. Penguatan ***Earmarking* Transfer ke Daerah (TKD)** dan **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)** khususnya dalam mendukung pencapaian Standar pelayanan Minimal (SPM) dan prioritas nasional;.
2. **Peningkatan Belanja Produktif** melalui penguatan TKD, Penguatan *Local Taxing Power* dan *Innovative Financing*.
3. Meningkatkan **sinergi kebijakan** fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah.
4. Mendorong **akselerasi *growth*** melalui peningkatan belanja daerah yang produktif, efektif dan efisien, penguatan *local taxing power* serta penguatan ekosistem perekonomian daerah.
5. Mendukung **pengembangan sumber ekonomi baru** di daerah melalui penguatan kerjasama antar daerah, peningkatan investasi daerah, dan keterlibatan dalam *global supply chain*.

6. **Percepatan penyaluran TKD** dalam rangka menjaga kondisi fiskal pemda.
7. Mendukung Pengembangan **Desa Mandiri.**

Sedangkan kebijakan belanja pemerintah tahun 2027 dengan meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih produktif dan fokus pada layanan dasar masyarakat dan *mandatory spending*, sehingga terjadi akselerasi pemerataan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa instrument antara lain :

1. **Fokus Belanja**
   Fokus belanja daerah untuk layanan dasar publik guna pencapaian SPM.
2. ***Mandatory Spending***
   Disiplin pengalokasian belanja yang diwajibkan peraturan perundangan, seperti pendidikan dan infrastruktur
3. **Pengendalian Belanja Pegawai**
   - Batasan besaran belanja pegawai (maksimal 30% dari APBD tidak termasuk tunjangan guru yang berasal dari TKD)
   - Masa transisi penyesuaian porsi belanja pegawai (5 tahun) yaitu sampai dengan Tahun 2027
4. **Penguatan Belanja Infrastruktur**
   - Batasan besaran belanja infrastruktur pelayanan public (minimal 40% dari APBD diluar transfer ke daerah)
   - Masa transisi penyesuaian porsi belanja infrastruktur pelayanan publik (5 tahun) yaitu sampai dengan Tahun 2027.
5. **SiLPA Berbasis Kinerja**

Optimalisasi penggunaan SiLPA non-earmarked untuk belanja daerah berdasarkan kinerja layanan publik daerah:

a. Jika kinerja layanan sudah tinggi, dapat diinvestasikan dan/atau pembentukan dana abadi daerah
b. Jika kinerja layanan masih rendah, diarahkan untuk belanja infrastruktur

Keseluruhan instrumen ini dipergunakan untuk bertujuan agar memastikan fungsi APBD dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Selanjutnya Kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah. Keuangan daerah harus dikelola secara tepat waktu, transparan, partisipatif, tertib, efisien, ekonomis, efektif, dan bertanggung jawab serta sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2027 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tetap memperhatikan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

Dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2027, arah kebijakan yang ditempuh tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan di masa mendatang.

1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini, daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi

kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ditengah trend penurunan dana transfer keuangan dari pusat kedaerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih meningkatkan kreatifitas dan usaha untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung tercapainya sasaran dan target pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2027.

Untuk memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Pekalongan, arah kebijakan keuangan daerah antara lain :

a. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui:

1). Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah yang memiliki potensi besar seperti PBB, BPHTB, Pajak Air Tanah, dan Pajak Reklame, termasuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan, serta Opsen Pajak Kendaraan Bermotor.
2). Pembenahan manajemen penerimaan PAD terutama fokus pada pembenahan data wajib pajak dan objek pajak termasuk pajak kendaraan bermotor, kemudahan pembayaran pajak berbasis IT *(e-tax*), peningkatan ketaatan wajib pajak, dan peningkatan SDM untuk mencegah kebocoran penerimaan pajak terutama pemeriksa pajak dan appraisal/penilai objek pajak, termasuk di dalamnya peningkatan basis data pajak dengan menerjunkan petugas lapangan untuk melakukan pengecekan secara langsung;
3). Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
4). Meningkatkan potensi riil penerimaan pajak dan retribusi melalui penyesuaian tarif, penerimaan pajak dan retribusi berbasis realtime;
5). Membuat kajian potensi riil penerimaan pajak dan retribusi secara berkala sebagai dasar menentukan target/proyeksi PAD;
6). Mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;
7) Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pembayaran pajak bagi Masyarakat;
8) Optimalisasi pemanfaatan aset untuk menambah Pendapatan Daerah, seperti revitalisasi atau renovasi Gedung Kesenian agar bisa dimanfaatkan untuk penyelenggaraan event-event kesenian ataupun lainnya .

b. Mengoptimalkan sumber pendapatan lain yang sah;
c. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), optimalisasi potensi pendapatan dari bagi hasil laba deviden kepada Pemda atas Penyertaan Modal perusahaan milik daerah;
d. Meningkatkan upaya untuk mendapatkan sumber pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan membuka akses melalui eksekutif maupun legislatif.
e. Mengembangkan alternatif-alternatif pembiayaan pembangunan selain dari APBD, yaitu melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Arah kebijakan pendapatan daerah memperhatikan target yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029 menyesuaikan dengan kondisi perekonomian daerah sebagai berikut:

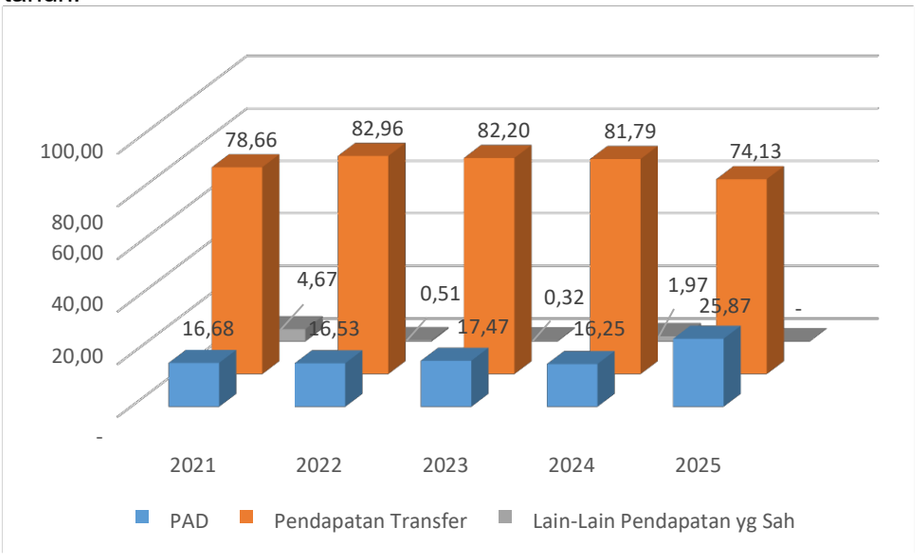
Tabel 3.8.
Perkembangan Pendapatan Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No.		Uraian	Realisasi (Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	**1**	**Pendapatan Asli Daerah**	**346.599.468.113**	**342.971.185.262**	**384.481.026.028**	**430.117.495.442**	**603.313.178.570**	**15,80**
1.	11	Pendapatan Pajak Daerah	83.272.776.486	110.344.250.965	110.054.648.276	121.974.842.968	197.100.874.422	26,17
1.	12	Pendapatan Retribusi Daerah	11.265.026.978	23.996.596.969	14.959.490.439	288.359.927.820	378.195.603.546	483,53
1.	13	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.314.709.793	11.047.546.371	11.051.063.074	10.773.199.567	12.079.291.955	7,06
1.	14	Lain-lain PAD yang Sah	242.746.954.856	197.582.790.957	248.415.824.239	9.009.525.087	15.937.408.647	- 3,09
1	**2**	**Pendapatan Transfer**	**1.634.957.101.107**	**1.721.085.935.443**	**1.808.650.870.640**	**1.937.371.153.376**	**1.728.967.510.394**	**1,68**
1	**21**	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**	**1.208.036.399.361**	**1.261.416.347.693**	**1.350.463.582.776**	**1.481.167.992.666**	**1.376.346.498.998**	**3,52**
1	211	Dana Bagi Hasil	37.991.746.906	34.090.009.176	29.916.065.126	29.249.107.848	32.104.905.360	- 3,74
1	212	Dana Alokasi Umum	871.067.401.000	867.457.562.000	913.291.118.000	966.058.393.723	987.966.742.185	3,23
1	213	Dana Alokasi Khusus - Fisik	83.659.881.060	78.240.636.419	110.610.427.845	175.116.703.582	8.790.805.800	- 0,44
1	214	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	215.317.370.395	281.628.140.098	296.645.971.805	310.743.787.513	347.484.045.653	13,18
1	**22**	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**	**295.993.457.391**	**265.196.556.350**	**294.155.197.000**	**272.670.223.500**	**240.386.385.780**	**- 4,66**
1	221	Dana Insentif Daerah	33.289.185.000	1.482.507.000	29.255.354.000	2.815.645.500	7.151.300.000	460,36
1	224	Dana Desa	262.704.272.391	263.714.049.350	264.899.843.000	269.854.578.000	233.235.085.780	- 2,72
1	**23**	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**130.927.244.355**	**194.473.031.400**	**164.032.090.864**	**183.532.937.210**	**112.234.625.616**	**1,48**
1	231	Pendapatan Bagi Hasil	124.294.980.355	135.132.754.000	142.280.181.862	145.056.178.359	102.273.558.003	- 3,38
1	232	Bantuan Keuangan Lainnya	6.632.264.000	59.340.277.400	21.751.909.002	38.476.758.851	9.961.067.613	183,54
1	**3**	**Lain-Lain Pendapatan yg Sah**	**96.986.943.702**	**10.566.894.691**	**7.100.000.000**	**1.314.000.000**	**-**	**- 75,85**
1	31	Pendapatan Hibah	8.048.645.000	10.566.894.691	7.100.000.000	1.314.000.000	-	- 45,75
1	33	Pendapatan Lainnya	88.938.298.702	-	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH			**2.078.543.512.922**	**2.074.624.015.396**	**2.200.231.896.668**	**2.368.802.648.818**	**2.332.280.688.964**	**3,00**

Sumber: BPKD Kabupaten Pekalongan 2026 (data diolah)

Pendapatan daerah Kabupaten Pekalongan cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2021 - 2025. Tahun 2021 pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan sebesar Rp. 2.078.543.512.922,- dan naik sebesar 12,21 % dalam kurun waktu 4 tahun menjadi Rp. 2.332.280.688.964,- pada tahun 2025 berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Pekalongan Tahun 2025. Rata-rata pertumbuhan pendapatan tersebut sebesar 3,00% per tahun.



Sumber: BPKD Kabupaten Pekalongan 2026 (data diolah)

Gambar 3.2. Proporsi Unsur Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

Dilihat dari proporsinya terhadap total pendapatan daerah, unsur-unsur pendapatan daerah dengan proporsi terbesar dalam kurun waktu 2021-2025 adalah dana transfer dengan kisaran antara 74,13% hingga 82,96%. Sementara itu pendapatan asli daerah berkisar antara 16,25% hingga 25,87%. Adapun lain-lain pendapatan yang sah berkisar antara 0% hingga 4,75%. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu menggali potensi yang ada di daerah tersebut guna meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat bisa berkurang. Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dengan total pendapatan daerah. Tahun 2025 rasio ketergantungan keuangan sebesar 74,13% yang merupakan rasio ketergantungan terkecil dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Meskipun demikian angka Rasio ketergantungan keuangan Kabupaten Pekalongan terhadap pemerintah pusat dan provinsi masih termasuk kategori sangat tinggi dengan rasio diatas 50%.

Selanjutnya Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2027 dihitung dengan memperhatikan kinerja realisasi PAD tahun 2024-2025 dan target tahun 2026 serta potensi masing-masing sumber PAD dengan peningkatan pendapatan daerah diproyeksikan untuk tahun 2027-2028 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.9.
Realisasi dan Proyeksi Perkembangan Pendapatan Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2024-2028

No.	Uraian	Realisasi (Rp)		APBD 2026	Proyeksi (Rp)	
		2024	2025		RKPD 2027	RKPD 2028
11	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**430.117.495.442**	**603.313.178.570**	**711.582.803.400**	**676.546.305.400**	**684.818.828.281**
111	Pajak Daerah	121.974.842.968	197.100.874.422	240.252.611.400	205.216.113.400	208.294.355.101
112	Retribusi Daerah	288.359.927.820	378.195.603.546	423.232.266.000	423.232.266.000	427.464.588.660
113	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.773.199.567	12.079.291.955	10.585.244.000	10.585.244.000	10.796.948.880
114	Lain-lain PAD yang Sah	9.009.525.087	15.937.408.647	37.512.682.000	37.512.682.000	38.262.935.640
12	**Pendapatan Transfer**	**1.937.371.153.376**	**1.728.967.510.394**	**1.698.369.469.000**	**1.704.035.407.660**	**1.704.035.407.660**
121	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**	**1.481.167.992.666**	**1.376.346.498.998**	**1.363.072.363.000**	**1.370.644.724.000**	**1.370.644.724.000**
	Dana Bagi Hasil	29.249.107.848	32.104.905.360	6.094.041.000	3.666.402.000	13.666.402.000
	Dana Alokasi Umum - Tidak ditentukan penggunaannya	966.058.393.723	987.966.742.185	993.694.155.000	993.694.155.000	993.694.155.000
	Dana Alokasi Umum - Ditentukan penggunaannya			23.450.986.000	23.450.986.000	23.450.986.000
	Dana Alokasi Khusus - Fisik	175.116.703.582	8.790.805.800	1.245.742.000	1.245.742.000	1.245.742.000
	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	310.743.787.513	347.484.045.653	338.587.439.000	338.587.439.000	338.587.439.000
122	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**	**272.670.223.500**	**240.386.385.780**	**225.450.275.000**	**225.450.275.000**	**225.450.275.000**
1221	Dana Insentif Daerah	2.815.645.500	7.151.300.000	0	-	-
1224	Dana Desa	269.854.578.000	233.235.085.780	225.450.275.000,00	225.450.275.000	225.450.275.000
123	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**183.532.937.210**	**112.234.625.616**	**109.846.831.000**	**107.940.408.660**	**107.940.408.660**
1231	Dana Bagi Hasil	145.056.178.359	102.273.558.003	109.182.831.000	107.940.408.660	107.940.408.660
1232	Bantuan Keuangan Lainnya	38.476.758.851	9.961.067.613	664.000.000		-
13	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**1.314.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	Pendapatan Hibah	1.314.000.000	0	0	0	0
133	Pendapatan Lainnya	0	0	0	0	0
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		**2.368.802.648.818**	**2.332.280.688.964**	**2.409.952.272.400**	**2.380.581.713.060**	**2.388.854.235.941**

Sumber : Bapperida dan BPKD Kab. Pekalongan; 2026 (data diolah)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Pekalongan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Proyeksi RKPD Tahun 2027 :

a. Porsi pendapatan daerah ditargetkan berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 28,42%, Pendapatan Transfer dengan porsi 71,58%, tanpa adanya pendapatan dari pos Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
b. Target penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2027 sebesar Rp. 2.380.581.713.060,- atau turun sebesar 0,60%. Hal ini disebabkan karena adanya perhitungan yang overestimated pada penetapan target tahun 2026 dan dengan memperhatikan realisasi capaian pendapatan tahun 2025.
c. Penerimaan pendapatan pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2027 ditargetkan sebesar Rp. 676.546.305.400,-, turun sebesar 4,92 persen bila dibandingkan dengan target pendapatan tahun 2026. Turunnya targret PAD ini disebabkan over optimasinya target pendapatan pada Opsen Pajak di Tahun 2026.
d. Dari pos Pendapatan Asli daerah (PAD), Pajak Daerah tahun 2027 ditargetkan sebesar Rp. 205.216.113.400,-, Retribusi Daerah sebesar Rp. 423.232.266.000,-, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 10.585.244.000,- serta Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 37.512.682.000,-.
e. Pendapatan Transfer tahun 2026 diasumsikan sebesar Rp. 1.704.035.407.660,-.

2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Klasifikasi belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Perkembangan belanja daerah Kabupaten Pekalongan menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,13% dalam kurun waktu tahun 5 tahun terakhir (2021-2025). Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2021-2025 selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

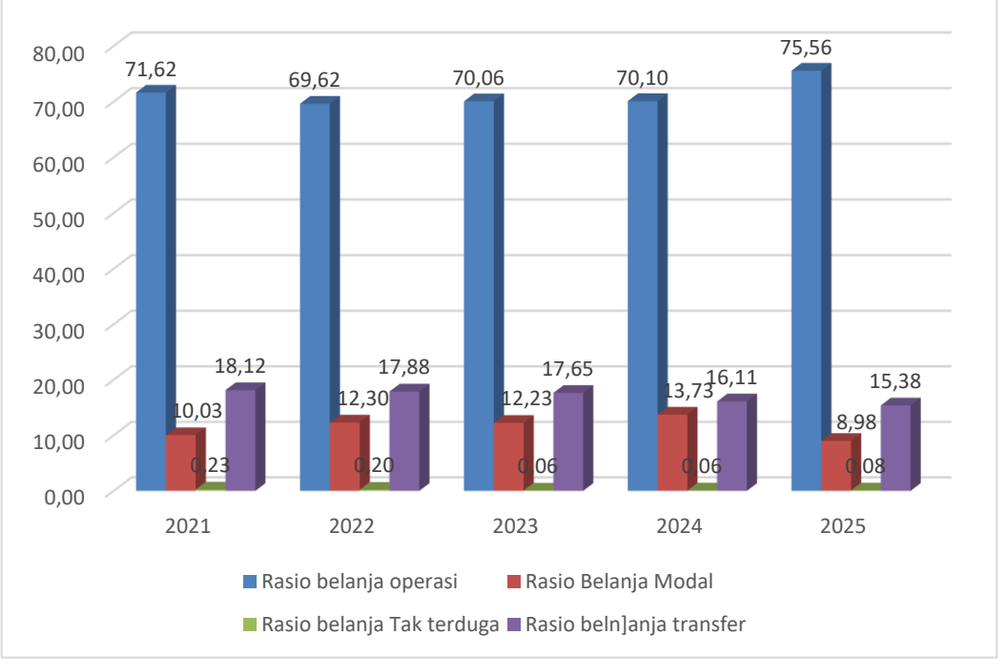
Tabel 3.10.
Perkembangan Belanja Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
21	**Belanja Operasi**	**1.486.225.964.139**	**1.478.715.782.170**	**1.527.743.263.284**	**1.694.444.051.809**	**1.764.744.820.983**	**4,47**
211	Belanja Pegawai	963.180.415.161	930.072.199.250	940.713.411.963	996.155.110.266	1.058.359.945.614	**2,46**
212	Belanja Barang dan Jasa	443.204.514.121	449.632.590.109	479.981.844.439	559.218.119.446	625.393.514.916	**9,14**
215	Belanja Hibah	64.789.644.106	77.868.232.930	92.143.456.232	121.907.156.697	72.666.827.053	**7,61**
216	Belanja Bantuan Sosial	15.051.390.751	21.142.759.881	14.904.550.650	17.163.665.400	8.324.533.400	**-6,34**
22	**Belanja Modal**	**208.046.317.066**	**261.155.583.894**	**266.777.590.935**	**331.960.606.909**	**209.744.666.204**	**3,82**
221	Belanja Modal Tanah	1.213.543.280	0	144.376.800	7.176.237.270	0	**0,00**
222	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.740.311.650	49.698.790.247	59.058.939.278	84.717.124.182	46.482.238.869	**7,69**
223	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.198.123.368	46.231.132.678	120.102.250.944	132.906.096.117	81.998.138.568	**26,04**
224	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	92.894.805.013	157.902.056.451	75.139.766.758	101.980.063.694	68.670.817.898	**5,16**

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
225	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.999.533.755	7.323.604.518	7.208.167.855	4.533.390.106	11.661.326.979	**35,15**
226	Belanja Aset Lainnya	-	-	5.124.089.300	647.695.540	932.143.890	**43,92**
23	**Belanja tak Terduga**	**4.681.287.752**	**4.262.402.000**	**1.268.571.400**	**1.547.578.000**	**1.786.969.238**	**-10,43**
231	Belanja Tidak Terduga	4.681.287.752	4.262.402.000	1.268.571.400	1.547.578.000	1.786.969.238	**-10,43**
24	**Belanja Transfer**	**376.089.591.216**	**379.820.078.297**	**384.774.956.206**	**389.324.017.584**	**359.209.116.063**	**-1,06**
241	**Belanja Tranfer bagi Hasil Pendapatan**	**8.679.398.700**	**10.708.398.822**	**11.845.113.206**	**12.894.612.967**	**359.209.116.063**	**682,15**
2411	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	7.339.868.708	8.585.377.783	9.768.019.282	10.633.344.252	17.944.030.283	**27,09**
2412	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	1.339.529.992	2.123.021.039	2.077.093.924	2.261.268.715	341.265.085.780	**3.764,24**
242	**Belanja Tranfer Bantuan Keuangan**	**367.410.192.516**	**369.111.679.475**	**372.929.843.000**	**376.429.404.617**	**0**	**-24,39**
2421	Transfer Bantuan Keuangan Ke desa	367.410.192.516	369.111.679.475	372.929.843.000	376.429.404.617	0	**-24,39**
2	**Jumlah Belanja**	**2.075.043.160.173**	**2.123.953.846.361**	**2.180.564.381.825**	**2.417.276.254.302**	**2.335.485.572.488**	**3,12**

Sumber: BPKD Kabupaten Pekalongan 2025 (Data diolah)

Jika dilihat rasio Belanja Operasi terhadap total Belanja Daerah di Kabupaten Pekalongan menunjukan bahwa selama kurun waktu tahun 2021-2025 berkisar antara 69,62% sampai dengan 75,57%. Kondisi ini menunjukkan bahwa belanja operasional program dan kegiatan seperti belanja pegawai, belanja barang jasa serta belanja hibah dan bantuan sosial menempati proporsi yang relatif besar. Dari total belanja operasi tersebut belanja pegawai masih menempati proporsi terbesar hingga mencapai rata-rata 61,00% tiap tahunnya. Perkembangan selengkapnya rasio Belanja Operasi dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Sumber: BPKD Kabupaten Pekalongan 2026 (Data diolah)

Gambar 3.3. Proporsi Unsur Belanja Daerah terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

Rasio Belanja Modal terhadap total belanja daerah di Kabupaten Pekalongan menunjukan perkembangan fluktuaktif. Rasio Belanja Modal terhadap total belanja daerah tahun 2025 sebesar 8,98%, menurun bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 13,73%.

Selanjutnya Alokasi Belanja Daerah RKPD tahun 2027 diarahkan pada pengelolaan belanja daerah yang dilaksanakan dengan pola yang proporsional, efisien dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Kebijakan Belanja Daerah pada RKPD tahun 2027 adalah:

a. Pemenuhan *mandatory spending* seperti pengalokasian anggaran minimal pada sektor Pendidikan (20%, Infrastruktur (40%) dan Kesehatan.
b. Penyediaan pelayanan dasar untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
c. Pemenuhan program prioritas Kepala Daerah yang tertuang dalam penjabaran visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama prioritas tahu 2027 yaitu infrastruktur jalan.
d. Penyelesaian permasalahan dan isu strategis daerah.
e. Mendorong pemulihan dan percepatan peningkatan ekonomi daerah.
f. Pengembangan infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antarwilayah.
g. Peningkatan sarana prasarana rumah sakit dan puskesmas diantaranya Pemeliharaan dan pengembangan Sarana Prasarana RSUD Kraton yang direncanakan mulai beroperasi di Kampil, Kecamatan Wiradesa, RSUD Kajen dan RSUD Kesesi yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat dan meningkatkan jumlah kunjungan cakupan pelayanan Rumah Sakit.
h. Dukungan terhadap tema Pembangunan Provinsi Jawa Tengah yaitu Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi seperti sertifikasi halal, penyediaan daerah tujuan wisata halal dan rumah pemotongan hewan halal.

Adapun Realisasi dan Proyeksi Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024-2028 dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 3.11.
Realisasi dan Proyeksi Perkembangan Belanja Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2024-2028

No.	Uraian	Realisasi APBD		APBD 2026	RKPD 2027	PROYEKSI RKPD 2028
		2024	2025			
2	**BELANJA DAERAH**					
21	**Belanja Operasi**	**1.694.444.051.809**	**1.764.744.820.983**	**1.818.484.814.562**	**1.740.636.703.063**	**1.772.804.522.911**
211	Belanja Pegawai	996.155.110.266	1.058.359.945.614	942.313.709.414	941.862.448.527	945.352.535.044
212	Belanja Barang dan Jasa	559.218.119.446	625.393.514.916	790.492.396.902	720.952.646.690	740.790.129.829
	Belanja Bunga	0	0	1.698.750.000	1.698.750.000	2.262.000.000
215	Belanja Hibah	121.907.156.697	72.666.827.053	76.366.431.246	69.812.270.846	76.748.263.402
216	Belanja Bantuan Sosial	17.163.665.400	8.324.533.400	7.613.527.000	6.310.585.000	7.651.594.635
22	**Belanja Modal**	**331.960.606.909**	**209.744.666.204**	**334.816.493.146**	**263.574.045.997**	**246.828.748.339**
221	Belanja Modal Tanah	7.176.237.270	-	75.000.000	334.500.000	0
222	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.717.124.182	46.482.238.869	58.531.310.440	42.134.273.824	43.823.966.992
223	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	132.906.096.117	81.998.138.568	175.181.554.473	68.212.350.215	75.257.462.244
224	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	101.980.063.694	68.670.817.898	90.653.057.101	145.794.325.440	117.844.799.601
225	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.533.390.106	11.661.326.979	9.428.180.348	6.853.487.748	8.955.128.717
226	Belanja Modal Aset Lainnya	647.695.540	932.143.890	947.390.784	245.108.770	947.390.784
23	**Belanja Tidak Terduga**	**1.547.578.000**	**1.786.969.238**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**
231	Belanja Tidak Terduga	1.547.578.000	1.786.969.238	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
24	**Belanja Transfer**	**389.324.017.584**	**359.209.116.063**	**354.220.964.692**	**361.370.964.000**	**354.220.964.692**
2431	Belanja Tranfer bagi Hasil Pendapatan	11.439.439.584	17.944.030.283	19.650.689.692	19.650.689.000	19.650.689.692
2432	Belanja Tranfer Bantuan Keuangan	377.884.578.000	341.265.085.780	334.570.275.000	341.720.275.000	334.570.275.000
JUMLAH BELANJA DAERAH		**2.417.276.254.302**	**2.335.485.572.488**	**2.512.522.272.400**	**2.370.581.713.060**	**2.378.854.235.941**
TOTAL SURPLUS/(DEFISIT)		**-48.473.605.483,53**	**-3.204.883.524,00**	**-102.570.000.000**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**

Sumber : BPKD Kab. Pekalongan; 2026 (data diolah)

3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan mencakup :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).
b. Pencairan Dana Cadangan.
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
d. Penerimaan Pinjaman Daerah.
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.
f. Penerimaan Piutang Daerah.
g. Penerimaan Dana Bergulir.
h. Penerimaan Hasil Penarikan.

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dapat ditempuh melalui:

a. Pembentukan dana cadangan.
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.
c. Pembayaran cicilan pokok pinjaman pemerintah

Penerimaan pembiayaan daerah di Kabupaten Pekalongan menunjukan perkembangan yang fluktuaktif. Penerimaan Pembiayaan daerah Kabupaten Pekalongan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

Perkembangan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Pekalongan terutama yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) cenderung menurun dari tahun 2021 sebesar Rp. 161.260.112.626,- menjadi Rp. 68.434.486.917,- di tahun 2025. Hal ini dapat menjadi indikasi perencanaan yang lebih baik dari tahun ketahun sehingga penyerapan anggaran juga bisa lebih besar.

Tabel 3.12.
Perkembangan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Pekalongan tahun 2021-2025

NO.		URAIAN	REALISASI (Rp.000)				
			2021	2022	2023	2024	2025
4	**1**	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**163.759.759.877**	**161.260.112.626**	**106.680.281.662**	**120.347.796.505**	**71.874.191.022**
4	11	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	163.759.759.877	161.260.112.626	106.680.281.662	100.347.796.505	71.874.191.022
4	12	Pencairan Dana Cadangan				20.000.000.000	-
4	13	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0				0
4	2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**6.000.000.000**	**5.250.000.000**	**26.000.000.000**	**0**	**0**
4	21	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	20.000.000.000	0	0
4	22	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	6.000.000.000	5.250.000.000	6.000.000.000	0	0
PEMBIAYAAN NETTO			**157.759.759.877**	**156.010.112.626**	**80.680.281.662**	**120.347.796.505**	**71.874.191.022**
SILPA			161.260.112.626	106.680.281.662	100.347.796.505	71.874.191.021	68.669.307.498

Sumber : BPKD Kab. Pekalongan, 2026

Proyeksi penerimaan pembiayaan daerah direncanakan secara selektif dan berimbang antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan kapasitas keuangan daerah. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) diproyeksikan sebagai salah satu sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan analisa realisasi SiLPA selama 5 (lima) tahun sebelumnya. Pada sisi pengeluaran pembiayaan, dalam lima tahun ke depan Pemerintah Kabupaten Pekalongan merencanakan adanya penyertaan modal kepada beberapa BUMD guna meningkatkan kinerja dan penguatan struktur modal BUMD serta pengembalian pinjaman daerah.

RKPD Tahun 2027 mengalokasikan penerimaan pembiayaan yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan memperhitungkan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang diasumsikan sebesar 20 milyar. Pada tahun 2027 tidak ada penerimaan pembiayaan dari pinjaman daerah dikarenakan kebutuhan anggaran masih bisa dicukupi melalui pendapatan tanpa adanya pembiayaan dari pihak lain. Untuk Pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000.000,- sebagai pembayaran pertama atas pokok pinjaman daerah yang didapatkan pada tahun 2026 yang dialokasikan untuk penyelesaian Pembangunan RSUD Bendan yang direlokasi ke Kecamatan Wiradesa. Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024-2028 dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 3.13.
Realisasi dan Proyeksi Perkembangan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2024-2028

No.	Uraian	Realisasi		PENETAPAN APBD 2026	TARGET RKPD 2027	PROYEKSI RKPD 2028
		2024	2025			
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**					
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**120.347.796.505**	**71.874.191.022**	**136.825.378.957**	**20.000.000.000**	**20.000.000.000**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	100.347.796.505	71.874.191.022	22.570.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000	0	0	**0**	**0**
6.1.05	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	0	0	80.000.000.000	-	-
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**0**	**0**	**0**	**30.000.000.000**	**30.000.000.000**
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
6.2.04	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	0	0	0	0	0
6.2.04	Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB	0	0	0	30.000.000.000	30.000.000.000
PEMBIAYAAN NETTO		**120.347.796.505**	**71.874.191.022**	**102.570.000.000**	**-10.000.000.000**	**-10.000.000.000**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)		**71.874.191.022**	**68.434.486.917**	**0**	**0**	**0**

Sumber : BPKD Kab. Pekalongan; 2026 (data diolah)

Dari uraian tersebut di atas, maka proyeksi struktur Keuangan Daerah RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2027 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.14.
Proyeksi Struktur Keuangan Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2027

KODE				URAIAN	TARGET RKPD 2027
1				PENDAPATAN DAERAH	
1	1			Pendapatan Asli Daerah (PAD)	676.546.305.400
1	1	1		Pajak Daerah	205.216.113.400
1	1	2		Retribusi Daerah	423.232.266.000
1	1	3		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	10.585.244.000
1	1	4		Lain - lain PAD yang Sah	37.512.682.000
1	2			Pendapatan Transfer	1.704.035.407.660
1	2	1		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.370.644.724.000
1	2	1	1	Dana Bagi Hasil	13.666.402.000
1	2	1	2	Dana Alokasi Umum - Tidak ditentukan penggunaannya	993.694.155.000
1	2	1	2	Dana Alokasi Umum - Ditentukan penggunaannya	23.450.986.000
1	2	1	3	Dana Alokasi Khusus - Fisik	1.245.742.000
1	2	1	4	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	338.587.439.000
1	2	2		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	225.450.275.000
1	2	2	1	Dana Insentif Daerah	0
1	2	2	4	Dana Desa	225.450.275.000
1	2	3		Pendapatan Transfer Antar Daerah	107.940.408.660
1	2	3	1	Dana Bagi Hasil	107.940.408.660
1	2	3	2	Bantuan Keuangan Lainnya	0
1	3			Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0
1	3	1		Pendapatan Hibah	0
1	3	3		Pendapatan Lainnya	0
				JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.380.581.713.060
2				BELANJA DAERAH	
2	1			Belanja Operasi	1.740.636.703.063
2	1	1		Belanja Pegawai	941.862.448.527
2	1	2		Belanja Barang dan Jasa	720.952.646.690
2	1	4		Belanja Bunga	1.698.750.000
2	1	5		Belanja Hibah	69.812.270.846
2	1	6		Belanja Bantuan Sosial	6.310.585.000
2	2			Belanja Modal	263.574.045.997
2	2	1		Belanja Modal Tanah	334.500.000
2	2	2		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.134.273.824
2	2	3		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68.212.350.215
2	2	4		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	145.794.325.440
2	2	5		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.853.487.748
2	2	6		Belanja Modal Aset Lainnya	245.108.770
2	3			Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000
2	3	1		Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000
2	4			Belanja Transfer	361.370.964.000
2	4	1		Belanja Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	19.650.689.000
2	4	2		Belanja Bantuan Keuangan	341.720.275.000
				JUMLAH BELANJA DAERAH	2.370.581.713.060
				SURPLUS / (DEFISIT) BELANJA DAERAH	10.000.000.000

KODE				URAIAN	TARGET RKPD 2027
4				**PEMBIAYAAN DAERAH**	
4	**1**			**Penerimaan Pembiayaan**	
4	1	1	1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)	20.000.000.000
4	1	0	2	Pencairan Dana Cadangan	-
4	1	0	3	Pinjaman Daerah dari LKB	-
				JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000
4	2			**Pengeluaran Pembiayaan**	
4	2	0	1	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	30.000.000.000
4	2	0	2	Penyertaan Modal Daerah	0
				JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000
				PEMBIAYAAN NETTO	-10.000.000.000
				Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0

Sumber : BPKD Kab. Pekalongan; 2026 (data diolah)

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027

A. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029.

1. Visi RPJMD Tahun 2025-2029

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi Kabupaten Pekalongan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 adalah:

"KABUPATEN PEKALONGAN YANG MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA"

Rumusan visi tersebut merupakan kumpulan dari beberapa frase yang perlu dijabarkan kembali sehingga dapat diketahui maknanya. Penjabaran frase ini berguna untuk memberikan batasan mengenai kondisi yang ingin dicapai oleh visi tersebut. Penjabaran dari masing-masing frase visi pembangunan Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

- **KABUPATEN PEKALONGAN**

Kabupaten Pekalongan meliputi seluruh administrasi wilayah dan semua warganya yang berada di dalam suatu wilayah dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040 beserta dengan segala isinya termasuk manusia yang menjadi warganya.

- **MAJU**

Maju yang dimaksud dalam Visi Kepala Daerah Kabupaten Pekalongan merujuk pada peningkatan daya saing daerah melalui penguatan pada empat pilar utama Indeks Daya Saing Daerah (IDSD): kondisi sosial, ekonomi, kelembagaan dan tata kelola, serta infrastruktur dan lingkungan. Kemajuan ini mencerminkan perkembangan masyarakat Kabupaten Pekalongan dalam berbagai aspek kehidupan yang berbudaya dan berlandaskan kearifan lokal.

Dalam pilar infrastruktur dan lingkungan, pembangunan infrastruktur jalan menjadi prioritas penting. Jalan yang baik mendukung mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta menurunkan biaya logistik. Hal ini berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi lokal dengan memperkuat akses pasar bagi produk unggulan seperti hasil pertanian, kerajinan, dan UMKM Kabupaten Pekalongan.

Pilar sosial merupakan fondasi utama dalam membangun daya saing daerah yang berkelanjutan. Penguatan pilar ini mencakup beberapa aspek utama yaitu 1) Akses

pendidikan yang merata dan berkualitas menjadi prioritas utama untuk menciptakan SDM yang unggul, 2) peningkatan kesehatan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat, 3) Pembangunan sosial diarahkan untuk merangkul seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, 4) penguatan nilai-nilai sosial dan pelestarian budaya lokal, 5) Pemerataan pembangunan antarwilayah untuk mengurangi kesenjangan sosial, dan 6) Perlindungan sosial melalui program jaminan sosial, bantuan langsung, dan subsidi kebutuhan dasar.

Pilar ekonomi diperkuat melalui pengembangan teknologi digital untuk mendukung sektor usaha kecil dan menengah. Pemanfaatan platform e-commerce dan media sosial memungkinkan pelaku UMKM menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan hingga ke tingkat nasional dan internasional. Program literasi digital menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing masyarakat dan produktivitas ekonomi.

Sedangkan dalam pilar kelembagaan dan tata kelola, Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus berupaya menciptakan sistem pelayanan publik yang transparan dan efisien melalui e-government dan layanan perizinan online. Hal ini bertujuan untuk mengurangi hambatan birokrasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.

Pengembangan teknologi menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan visi Kabupaten Pekalongan yang maju dan berdaya saing. Di era digital saat ini, penerapan teknologi dalam berbagai sektor kehidupan menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas layanan publik. Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkomitmen untuk memanfaatkan teknologi digital dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan efisien. Sistem layanan publik berbasis digital, seperti e-government dan pelayanan perizinan online, diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan dengan cepat dan tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan.

Teknologi juga berperan besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat seperti membantu para pelaku UMKM dalam memasarkan produk mereka melalui platform e-commerce dan media sosial. Dengan akses teknologi yang lebih luas, pelaku usaha kecil dan menengah dapat menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan hingga ke tingkat nasional dan internasional. Pelatihan literasi digital bagi masyarakat terus digalakkan untuk memastikan bahwa semua kalangan, termasuk generasi muda dan pelaku usaha, mampu memanfaatkan teknologi secara optimal dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan.

Pengembangan teknologi juga diterapkan dalam sektor pendidikan sebagai upaya membentuk SDM unggul di Kabupaten Pekalongan seperti dalam proses belajar-mengajar memungkinkan para siswa dan guru mengakses berbagai sumber pengetahuan yang lebih luas. Dengan penguasaan teknologi sejak dini, generasi muda diharapkan mampu bersaing di era globalisasi yang terus berkembang. Ini sejalan dengan visi pembangunan daerah yang tidak hanya menitikberatkan pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada kesiapan masyarakat dalam menghadapi tantangan masa depan.

- **ADIL**

Adil dimaknai sebagai keadaan di mana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak atas kompensasi, hak hidup layak, hak menikmati pembangunan, dan tidak adanya pihak yang dirugikan. Adl juga mencerminkan adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Keadilan di Kabupaten Pekalongan, keadilan diwujudkan melalui pemerataan pembangunan yang mencakup seluruh wilayah geografis baik pesisir,

perkotaan, dan pegunungan yang masing-masing memiliki karakteristik, potensi, dan tantangan yang unik. Adil yang dimaksud dalam Visi Kepala Daerah Kabupaten Pekalongan merujuk pada penurunan rasio gini dan mendorong percepatan keadilan gender dalam Pembangunan.

Dalam rangka menurunkan Rasio Gini dan mengurangi ketimpangan antarwilayah, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menerapkan strategi pembangunan berbasis kebutuhan dan potensi lokal. Pada wilayah pesisir, pembangunan difokuskan pada penguatan infrastruktur mitigasi bencana untuk mengurangi kerentanan sosial ekonomi akibat abrasi dan banjir rob. Pada wilayah perkotaan, perbaikan transportasi publik, pengelolaan limbah, dan peningkatan fasilitas umum diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk yang padat. Sementara itu, pembangunan wilayah pegunungan difokuskan pada peningkatan aksesibilitas, layanan kesehatan, pendidikan, dan jaringan digital, demi menciptakan keseimbangan pembangunan dan memastikan bahwa masyarakat di seluruh wilayah dapat mengakses sumberdaya pembangunan.

Keadilan juga mencakup keadilan gender sebagai bagian integral dari pembangunan yang berkelanjutan. Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG), ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki akses, partisipasi, dan manfaat yang setara dari pembangunan. Dalam sektor ekonomi, pemberdayaan perempuan dilakukan melalui pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan dukungan pemasaran digital, terutama di sektor UMKM batik yang banyak dikelola oleh perempuan. Ini tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkecil kesenjangan gender dalam pendapatan.

Dalam bidang pendidikan dan kepemimpinan, kebijakan afirmatif diterapkan untuk memastikan anak-anak perempuan memiliki akses pendidikan hingga jenjang tinggi tanpa hambatan budaya atau ekonomi. Beasiswa dan program literasi gender terus dikembangkan, seiring dengan upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di pemerintahan, organisasi masyarakat, dan lembaga desa. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan nilai IPG Kabupaten Pekalongan secara signifikan, serta memperkuat peran perempuan dalam pembangunan.

Keadilan dalam pembangunan bukan hanya tentang kesetaraan antarwilayah, tetapi juga menyasar pemerataan antarindividu dan antarjenis kelamin. Ini sejalan dengan visi daerah yang menempatkan masyarakat sebagai pusat Pembangunan adil, setara, dan inklusif.

- **SEJAHTERA**

Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Sejahtera menggambarkan kondisi di mana seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan terpenuhi kebutuhannya baik dari aspek ekonomi maupun sosial. Sejahtera berarti tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal (*no one left behind)*, adanya akses yang adil ke sumber daya, pekerjaan yang layak, pengentasan kemiskinan, serta perlindungan sosial bagi mereka yang membutuhkan.

Peningkatan kesejahteraan ekonomi terus diupayakan melalui implementasi berbagai program pemberdayaan masyarakat. Selain penguatan ekonomi, kesejahteraan sosial juga menjadi fokus utama dalam pembangunan daerah. Pemerintah daerah terus mendorong akses yang adil terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan layak. Peningkatan kualitas layanan kesehatan di berbagai wilayah, termasuk puskesmas dan rumah sakit ramah disabilitas dengan fasilitas yang lebih baik, bertujuan memastikan

setiap warga mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas. Perlindungan sosial bagi kelompok rentan seperti lansia, disabilitas, dan masyarakat miskin juga terus diperluas agar mereka tidak tertinggal dalam arus pembangunan.

Penciptaan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan di Kabupaten Pekalongan. Pemerintah daerah berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, dalam mendorong investasi yang menciptakan lapangan kerja lokal. Kawasan industri yang dikembangkan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan menjadi salah satu solusi untuk menyerap tenaga kerja, terutama bagi generasi muda.

Pengentasan kemiskinan menjadi agenda prioritas dalam upaya mewujudkan Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera dan memastikan bahwa masyarakat miskin tidak hanya menerima bantuan jangka pendek, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mandiri secara ekonomi. Pembangunan rumah layak huni bagi keluarga miskin menjadi wujud nyata dari upaya menciptakan kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah kabupaten.

Kesejahteraan di Kabupaten Pekalongan tidak hanya diukur dari indikator ekonomi, tetapi juga dari kualitas hidup yang lebih baik. Kehidupan sosial yang harmonis, kelestarian budaya lokal, dan pelestarian lingkungan menjadi bagian penting dalam menciptakan kebahagiaan dan kepuasan hidup masyarakat. Dengan mengedepankan prinsip *no one left behind*, Pemerintah daerah terus berkomitmen membangun daerah yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga sejahtera secara menyeluruh bagi semua lapisan masyarakat.

Sejahtera menunjuk pada kondisi manusia yang makmur, sehat, dan damai. Makna sejahtera mencakup terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, baik dari aspek ekonomi maupun sosial. Sejahtera berarti tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal (*no one left behind*), dengan akses yang adil terhadap sumber daya, pekerjaan layak, serta perlindungan sosial yang menyeluruh bagi kelompok rentan. Upaya menurunkan angka kemiskinan, khususnya kelompok masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem sebagaimana ditetapkan oleh Bank Dunia (USD 1,9 per hari), dan mempersempit kesenjangan distribusi pendapatan, terutama pada kelompok pendapatan terendah 40 persen (bottom 40%).

Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas ekonomi rumah tangga. Fokus pembangunan diarahkan untuk menjamin bahwa distribusi pertumbuhan ekonomi benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya menguntungkan kelompok atas.

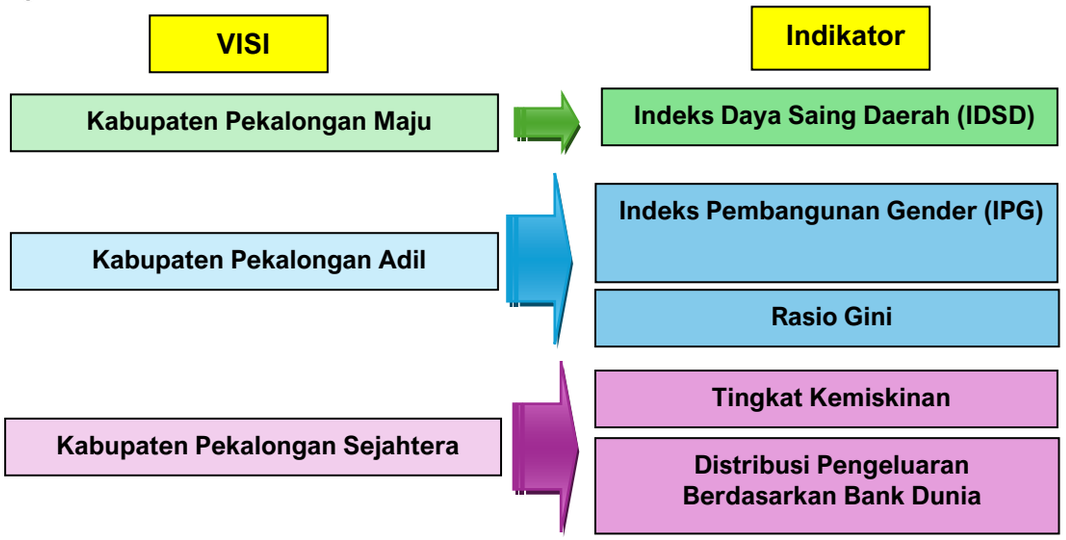
Peningkatan kesejahteraan sosial diwujudkan melalui perluasan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan hunian yang layak. Fasilitas layanan kesehatan diperkuat, termasuk pembangunan puskesmas yang lebih merata dan rumah sakit dengan akses inklusif bagi penyandang disabilitas. Pemerintah daerah juga memperluas cakupan program perlindungan sosial, termasuk bantuan pangan, jaminan kesehatan, dan perlindungan lansia dan penyandang disabilitas, untuk meminimalisasi risiko jatuhnya kelompok rentan ke dalam kemiskinan kronis.

Dalam rangka mendorong mobilitas ekonomi vertikal, penciptaan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan menjadi salah satu prioritas utama. Melalui kemitraan dengan sektor swasta, investasi diarahkan pada sektor padat karya. Kawasan industri ramah lingkungan menjadi alternatif strategis untuk menyerap tenaga kerja lokal, khususnya generasi muda yang berada pada risiko menganggur atau bekerja informal.

Program pengentasan kemiskinan dirancang tidak hanya sebagai bantuan jangka pendek, tetapi juga sebagai proses pemberdayaan jangka panjang. Pembangunan rumah layak huni bagi keluarga miskin dan peningkatan keterampilan kerja menjadi salah satu dari upaya menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan. Ini sejalan dengan pendekatan yang diusung Bank Dunia, yaitu peningkatan kesejahteraan melalui perlindungan sosial produktif dan pembangunan ekonomi inklusif.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga dari kualitas hidup. Kehidupan sosial yang harmonis, pelestarian budaya lokal, dan perlindungan lingkungan menjadi unsur penting dalam mewujudkan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Dengan semangat inklusivitas dan prinsip *no one left behind*, Kabupaten Pekalongan berkomitmen membangun wilayah yang maju secara ekonomi sekaligus sejahtera secara menyeluruh bagi semua lapisan masyarakat.

Visi pembangunan Kabupaten Pekalongan diukur dengan indikator seperti dalam gambar sebagai berikut.



Gambar 4.1. Indikator Visi Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029

2. Misi RPJMD 2025-2029

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian tersebut serta berlandaskan pada makna visi pembangunan Kabupaten Pekalongan, maka ditetapkan misi pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029 sebagaimana berikut:

(1) Memperkuat Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Pekalongan.
(2) Menuntaskan Pembangunan dan Penyediaan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas.
(3) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan UMKM yang Berdaya Saing.
(4) Memperkuat Ketahanan Bencana dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
(5) Menguatkan Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani.

Penjelasan masing-masing misi dapat diuraikan sebagai berikut :

MISI 1 Memperkuat Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Pekalongan

a) SDM yang cerdas, sehat, produktif, dan inovatif

Memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Pekalongan, sejalan dengan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang memprioritaskan penguatan SDM sebagai salah satu fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045. Pembangunan SDM tidak hanya mencakup peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, tetapi juga penguatan kapasitas generasi muda, pemanfaatan sains dan teknologi, serta pemberdayaan kelompok rentan. Kabupaten Pekalongan harus menyiapkan SDM yang cerdas, sehat, produktif, dan inovatif agar mampu bersaing di era globalisasi dan revolusi teknologi, terutama dalam menghadapi perubahan ekonomi, digitalisasi, dan tantangan pasar tenaga kerja.

Pengembangan SDM di Kabupaten Pekalongan juga mendukung pencapaian Asta Cita 4 dalam Rancangan Awal RPJMN Tahun Tahun 2025-2029 yaitu memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z) serta penyandang disabilitas. Misi pertama dalam RPJMD Kabupaten Pekalongan menjadi penting mengingat potensi demografi yang didominasi oleh generasi X (milenial) dan generasi Z, harus diarahkan menjadi sumber daya produktif dan inovatif. Pembangunan SDM yang unggul akan memastikan kesiapan masyarakat dalam menghadapi tantangan global, termasuk transformasi digital dan perubahan struktur ekonomi di era industri 5.0.

b) Akses pendidikan yang inklusif dan ramah bagi semua kelompok masyarakat

Dalam bidang pendidikan, Kabupaten Pekalongan akan mendorong penguatan akses dan kualitas pendidikan formal serta vokasi yang berbasis teknologi dan inovasi. Pendidikan vokasi menjadi salah satu solusi untuk menjembatani kebutuhan pasar kerja dengan kompetensi generasi muda. Hal ini harus disertai dengan peningkatan penguasaan sains, teknologi, dan keterampilan digital, agar generasi X (milenial) dan Z memiliki daya saing tinggi di pasar tenaga kerja domestik maupun global. Selain itu, perhatian terhadap penyandang disabilitas menjadi prioritas dengan memastikan akses pendidikan yang inklusif dan ramah bagi semua kelompok masyarakat.

c) Pelayanan kesehatan berkualitas

Dalam bidang kesehatan, penguatan kualitas layanan kesehatan dasar dan peningkatan fasilitas kesehatan akan menjadi agenda utama. Pembangunan layanan kesehatan di Kabupaten Pekalongan berfokus pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang berkelanjutan. Upaya pencegahan stunting, peningkatan gizi masyarakat, dan promosi pola hidup sehat menjadi prioritas melalui program edukasi dan intervensi berbasis komunitas. Selain itu, pemberian makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil akan dioptimalkan guna mendukung tumbuh kembang yang optimal dan mencegah malnutrisi. Pemeriksaan kesehatan gratis juga akan diselenggarakan secara berkala untuk mendeteksi dini penyakit sekaligus mendorong percepatan penuntasan kasus TBC melalui pengobatan yang terpadu dan berkelanjutan. Sementara itu, pengembangan fasilitas rumah sakit yang lengkap, modern, dan merata akan terus diupayakan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan berkualitas, sehingga terwujud masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera.

Selain itu, pengembangan prestasi olahraga di Kabupaten Pekalongan harus menjadi prioritas untuk membangun generasi yang sehat, dan berkarakter. Dukungan terhadap atlet daerah, sarana olahraga, dan pembinaan berjenjang akan menjadi kunci dalam melahirkan prestasi yang dapat membanggakan daerah di tingkat nasional dan internasional.

d) Penguatan peran perempuan, kesetaraan gender, serta pemuda

Selanjutnya, misi ini juga mencakup penguatan peran perempuan, kesetaraan gender, serta pemuda sebagai agen perubahan. Penguatan peran perempuan akan diarahkan pada peningkatan kapasitas ekonomi, sosial, dan politik, sehingga mereka memiliki kontribusi signifikan dalam pembangunan daerah. Selain itu, pemuda, khususnya generasi X (milenial) dan Z, didorong untuk menjadi inovator, wirausahawan muda, serta pemimpin masa depan dengan pemanfaatan teknologi digital. Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga harus memastikan keterlibatan aktif penyandang disabilitas dalam pembangunan, baik melalui peningkatan keterampilan kerja, penyediaan lapangan kerja inklusif, maupun layanan publik yang ramah disabilitas. Dengan sinergi kebijakan yang inklusif dan berbasis pada prinsip keadilan, misi ini diharapkan dapat menciptakan SDM unggul yang mampu menjawab tantangan masa depan serta mendukung terwujudnya Kabupaten Pekalongan yang maju, adil, dan sejahtera

MISI 2 Menuntaskan Pembangunan dan Penyediaan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas

a) Pembangunan dan penyediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas berkelanjutan

Menuntaskan pembangunan dan penyediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas di Kabupaten Pekalongan dilakukan dengan mendorong pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan konektivitas antarwilayah. Infrastruktur yang baik menjadi prasyarat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur perkotaan dan perdesaan akan menjadi fokus utama dalam lima tahun ke depan, dengan memastikan seluruh wilayah memiliki akses jalan yang layak, jembatan yang kokoh, serta fasilitas publik yang memadai. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara perdesaan dan perkotaan, memperlancar arus barang dan jasa, serta meningkatkan mobilitas masyarakat. Pemerintah juga akan melanjutkan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Infrastruktur akan diarahkan untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pusat ekonomi yang sudah ada. Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan mengembangkan perdagangan, industri dan pariwisata berbasis potensi lokal, yang didukung oleh infrastruktur yang terintegrasi yang diharapkan tercipta pusat-pusat ekonomi baru yang dapat mendorong pemerataan pembangunan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas berwawasan lingkungan.

b) Penanganan sampah terpadu

Dalam penanganan sampah Pemerintah Kabupaten Pekalongan melakukan penguatan pengelolaan persampahan secara terintegrasi dari hulu ke hilir. Ini merupakan langkah strategis Kabupaten Pekalongan dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kabupaten Pekalongan. Pengelolaan ini mencakup seluruh rantai aktivitas,

mulai dari pengurangan dan pemilahan sampah di sumber (rumah tangga, pelaku usaha, dan institusi), hingga proses pengangkutan, pengolahan, dan penanganan akhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Setiap elemen masyarakat memiliki tanggung jawab aktif dalam pengelolaan sampah. Masyarakat sebagai produsen sampah melakukan pemilahan dan pengurangan, pemerintah menyediakan fasilitas dan kebijakan pendukung, dan sektor swasta dapat berperan dalam inovasi teknologi serta daur ulang. Pendekatan pengelolaan sampah ini tidak hanya mengurangi beban TPA, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi sampah melalui pemanfaatan ulang dan daur ulang.

Tantangan pengelolaan sampah di Kabupaten Pekalongan, masih cukup kompleks akibat pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang meningkat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola persampahan yang mengintegrasikan pendekatan hulu dan hilir, melalui edukasi publik, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan penyediaan infrastruktur yang memadai seperti bank sampah, TPS 3R, serta revitalisasi TPA.

c) Akses terhadap hunian yang layak dan berkualitas

Dalam mendukung akses terhadap hunian yang layak dan berkualitas, pemerintah akan mendorong penyediaan rumah murah dengan sanitasi yang baik bagi generasi X (milenial), generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Penyediaan rumah murah ini ini tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah sebagai tempat tinggal, tetapi juga memastikan ketersediaan infrastruktur pendukung, seperti akses air bersih, dan fasilitas sanitasi yang sehat. Dengan demikian, generasi muda dan MBR dapat memiliki hunian yang aman dan nyaman, sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan. Selain itu, pengembangan kawasan permukiman yang tertata dengan baik akan menciptakan lingkungan hunian yang lebih sehat.

d) Pembangunan dan perbaikan sarana serta prasarana transportasi darat

Pembangunan dan perbaikan sarana serta prasarana transportasi darat akan menjadi prioritas untuk mendukung konektivitas antarwilayah. sarana serta prasarana transportasi yang memadai akan memastikan akses yang lebih cepat, murah, dan aman, baik untuk aktivitas ekonomi maupun kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain itu, pembangunan jaringan transportasi yang terhubung dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pusat ekonomi yang sudah ada akan mendukung produktivitas daerah, menarik investasi, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan.

MISI 3 MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN UMKM YANG BERDAYA SAING

a) Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan UMKM yang berdaya saing

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan UMKM yang berdaya saing Kabupaten Pekalongan dilakukan untuk menciptakan pemerataan ekonomi di Kabupaten Pekalongan melalui optimalisasi potensi lokal dan penguatan sektor ekonomi produktif. Ekonomi inklusif memastikan setiap lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan. Penguatan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Pemberdayaan UMKM akan difokuskan pada peningkatan akses permodalan, pendampingan usaha, serta pemanfaatan teknologi digital dan inovasi dalam proses produksi dan pemasaran. Dengan dukungan infrastruktur ekonomi dan

pelatihan, UMKM diharapkan dapat tumbuh lebih berdaya saing, membuka lapangan kerja baru, dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Penguatan UMKM dan pertumbuhan ekonomi inklusif juga akan diarahkan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan membangun kolaborasi antara pelaku UMKM, sektor swasta, dan lembaga keuangan untuk mendorong inovasi dan ekspansi usaha. Dukungan terhadap sektor ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis kearifan lokal akan terus ditingkatkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Ekonomi yang inklusif dan UMKM yang berdaya saing akan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi daerah.

b) Produktivitas sektor pertanian dan pangan

Pada sektor pertanian dan pangan, peningkatan produktivitas menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kabupaten Pekalongan, dengan potensi pertanian yang melimpah, akan mengembangkan sistem pertanian berbasis teknologi modern dan ramah lingkungan guna meningkatkan hasil produksi serta efisiensi petani. Pemerintah akan mendukung petani melalui penyediaan sarana produksi pertanian, seperti benih unggul, pupuk, dan alat-alat pertanian, serta memperbaiki infrastruktur irigasi untuk mendukung ketahanan pangan. Selain itu, penguatan sektor pangan melalui diversifikasi produk olahan akan menciptakan nilai tambah ekonomi dan peluang usaha baru bagi masyarakat. Dengan demikian, sektor pertanian dan pangan akan menjadi salah satu pilar utama dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

c) Pengentasan kemiskinan

Pengentasan kemiskinan akan berjalan seiring dengan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan mendorong program ekonomi produktif berbasis potensi lokal dengan melibatkan kelompok masyarakat miskin sebagai penerima manfaat langsung. Hal ini dilakukan melalui program padat karya, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan perempuan dalam usaha ekonomi kreatif. Selain itu, akses terhadap permodalan dan pasar akan diperluas untuk memastikan kelompok rentan dapat berpartisipasi aktif dalam aktivitas ekonomi. Pemberdayaan masyarakat berbasis pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja, khususnya untuk keluarga miskin, menjadi prioritas untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Melalui pelatihan vokasi, pemberian akses modal usaha, dan pendampingan kewirausahaan, masyarakat diharapkan dapat lebih mandiri secara ekonomi. Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga akan mendorong kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga sosial untuk memperluas peluang kerja serta menciptakan ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan. Dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi, diharapkan angka kemiskinan dapat ditekan secara signifikan, sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap peluang peningkatan pendapatan dan taraf hidup yang lebih baik.

MISI 4 Memperkuat Ketahanan Bencana dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

a) Keseimbangan ekosistem dalam menghadapi ancaman perubahan iklim

Memperkuat ketahanan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kabupaten Pekalongan dilaksanakan untuk mengantisipasi risiko bencana serta memastikan keseimbangan ekosistem dalam menghadapi ancaman perubahan iklim. Dalam menghadapi ancaman perubahan iklim, Kabupaten Pekalongan perlu membangun ekosistem yang

tangguh dan adaptif melalui tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan, salah satunya adalah pengelolaan air tanah. Perubahan iklim menyebabkan naiknya muka air laut, peningkatan suhu, serta ketidakpastian curah hujan memperbesar risiko bencana hidrometeorologis seperti banjir rob, kekeringan, dan penurunan muka tanah. Pengambilan air tanah secara tidak terkendali dapat memperparah kondisi tersebut karena menyebabkan ketidakseimbangan tekanan geologis dan mempercepat intrusi air laut. Pengelolaan air tanah yang baik menjadi bagian integral dari strategi mitigasi risiko bencana sekaligus menjaga fungsi ekologis wilayah, terutama di kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Kelestarian sumber daya air menjadi aspek utama dalam strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Air tanah yang terus-menerus diambil tanpa upaya konservasi akan menyebabkan berkurangnya cadangan air bersih yang dibutuhkan untuk jangka panjang. Penggunaan air tanah yang berlebihan juga mengganggu keseimbangan antara kebutuhan manusia dan fungsi ekologis lingkungan, seperti kelangsungan vegetasi dan habitat mikroorganisme yang bergantung pada kelembapan tanah.

Intrusi air laut merupakan dampak langsung dari eksploitasi air tanah yang berlebihan, terutama di kawasan pesisir utara Kabupaten Pekalongan. Ketika tekanan air tanah menurun, air laut dapat masuk ke lapisan akuifer dan mencemari sumber air tawar, sehingga mengancam keberlangsungan hidup masyarakat yang menggantungkan kebutuhan air bersih dari sumur-sumur dangkal. Hal ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mengganggu produktivitas sektor ekonomi seperti pertanian, perikanan, dan industri kecil yang sangat bergantung pada ketersediaan air tawar. Upaya pengendalian eksploitasi air tanah harus menjadi bagian dari tata kelola lingkungan yang terintegrasi, disertai dengan kebijakan zonasi pemanfaatan air tanah dan edukasi masyarakat tentang pentingnya konservasi air. Eksploitasi air tanah juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang krusial. Ketika sumber air tanah tercemar atau mengering, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah akan menjadi pihak paling terdampak karena keterbatasan akses terhadap air bersih alternatif. Hal ini dapat memicu ketimpangan sosial, konflik sumber daya, serta menurunkan kualitas hidup masyarakat.

Keseimbangan ekosistem menjadi fondasi penting dalam menghadapi ancaman perubahan iklim di Kabupaten Pekalongan. Intervensi pengelolaan RTH dan Konservasi Daratan diarahkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan tidak hanya pada aspek estetika dan rekreasi, tetapi juga memperkuat daya dukung lingkungan melalui peningkatan kapasitas lahan sebagai kawasan resapan air dan pengendali suhu mikro. Dalam rangka adaptasi perubahan iklim, RTH harus dirancang sebagai bagian dari infrastruktur hijau kota yang berfungsi ekologis, sosial, dan ekonomis, termasuk dalam mitigasi risiko banjir dan kekeringan yang makin sering terjadi akibat ketidakstabilan iklim.

Lebih dari sekadar ruang publik, RTH diupayakan menjadi site keanekaragaman hayati *biodiversity-friendly green space* yang mendukung kelestarian flora dan fauna lokal. Keberadaan vegetasi asli dan sistem lanskap alami di RTH dapat menciptakan habitat yang ramah bagi spesies lokal serta menjaga siklus ekologis yang penting bagi kestabilan lingkungan. Perencanaan dan pengembangan RTH di Kabupaten Pekalongan dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip ekologis dan berbasis data biodiversitas agar mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi ekosistem. Penambahan fungsi edukasi dan konservasi di dalam RTH juga menjadi nilai tambah yang dapat memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan sebagai bagian dari upaya adaptasi terhadap perubahan iklim. Selain penguatan RTH, sinergitas Pemerintah Kabupaten

Pekalongan dalam rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS), seperti DAS Kupang, sangat krusial untuk memulihkan daya dukung lingkungan. DAS yang rusak berkontribusi besar terhadap degradasi lahan, sedimentasi, dan banjir di hilir, serta mempercepat kerusakan ekosistem secara keseluruhan. Intervensi berbasis kewenangan daerah perlu difokuskan pada konservasi lereng, penghijauan bantaran sungai, serta pengendalian tata guna lahan di sekitar DAS. Upaya ini memerlukan kolaborasi lintas sektor serta pendekatan partisipatif masyarakat untuk memastikan keberhasilan jangka panjang.

b) Upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Pengelolaan lingkungan hidup juga akan diarahkan pada upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagai bagian dari komitmen pembangunan berkelanjutan. Langkah ini mencakup pengurangan penggunaan bahan bakar fosil, peningkatan penggunaan energi terbarukan, serta pengelolaan sampah melalui sistem reduce, reuse, recycle (3R). Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan mendorong masyarakat dan sektor industri untuk berpartisipasi aktif dalam pengurangan emisi melalui inovasi teknologi ramah lingkungan serta pengelolaan sumber daya alam yang bijak. Secara khusus, sektor pertanian sebagai salah satu penyumbang emisi GRK juga menjadi perhatian penting. Upaya pengurangan emisi dilakukan melalui penerapan pertanian organik, penggunaan UPPO (Unit Pengelolaan Pupuk Organik), serta pengelolaan lahan sawah yang ramah iklim guna menurunkan emisi metana (CH_4).

Selain itu, pengembangan teknologi biogas berbasis *methane capture* menjadi solusi energi alternatif yang berkontribusi langsung terhadap penurunan emisi dari limbah ternak. Penggunaan feed suplemen pada pakan sapi juga diupayakan untuk mengurangi produksi metana dari sektor peternakan. Langkah-langkah tersebut tidak hanya membantu mengurangi jejak karbon sektor pertanian, tetapi juga membuka peluang ekonomi sirkular di tingkat lokal, terutama melalui pemanfaatan limbah organik sebagai sumber energi dan pupuk. Dalam membangun ketahanan bencana dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan memperkuat edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya menjaga lingkungan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi bencana. Kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, dunia usaha, dan akademisi juga akan ditingkatkan untuk mengembangkan inovasi dan solusi berkelanjutan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

MISI 5 Menguatkan Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani

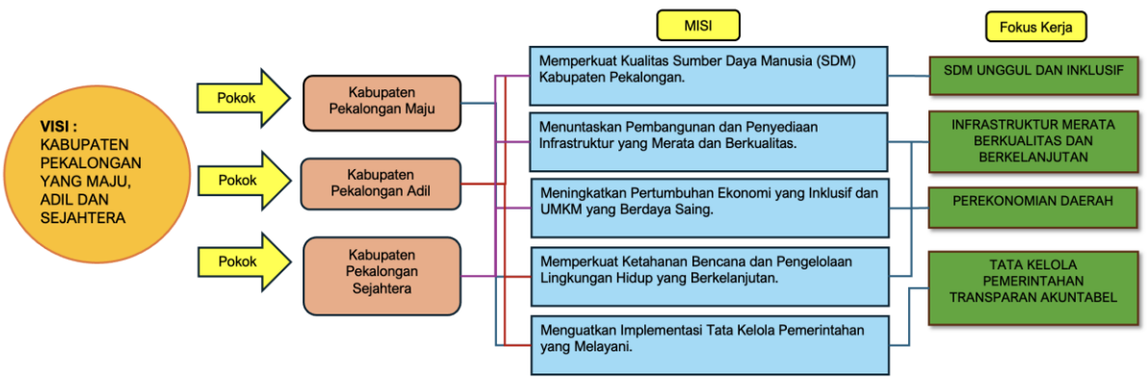
a) Peningkatan kualitas pelayanan publik

Menguatkan implementasi tata kelola pemerintahan yang melayani dilaksanakan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui digitalisasi layanan. Reformasi birokrasi juga akan terus diperkuat dengan penyederhanaan prosedur, peningkatan kompetensi aparatur, serta penerapan standar pelayanan publik yang berfokus pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat.

Peningkatan kualitas layanan publik juga akan berfokus pada pembangunan budaya kerja yang berintegritas, inovatif, dan berorientasi pada hasil. Aparatur pemerintah akan terus didorong untuk mengembangkan budaya melayani. Pelayanan berbasis teknologi, akan terus dioptimalkan guna memangkas birokrasi yang rumit dan memberikan kemudahan bagi masyarakat serta pelaku usaha.

b) Penguatan tata kelola pemerintahan

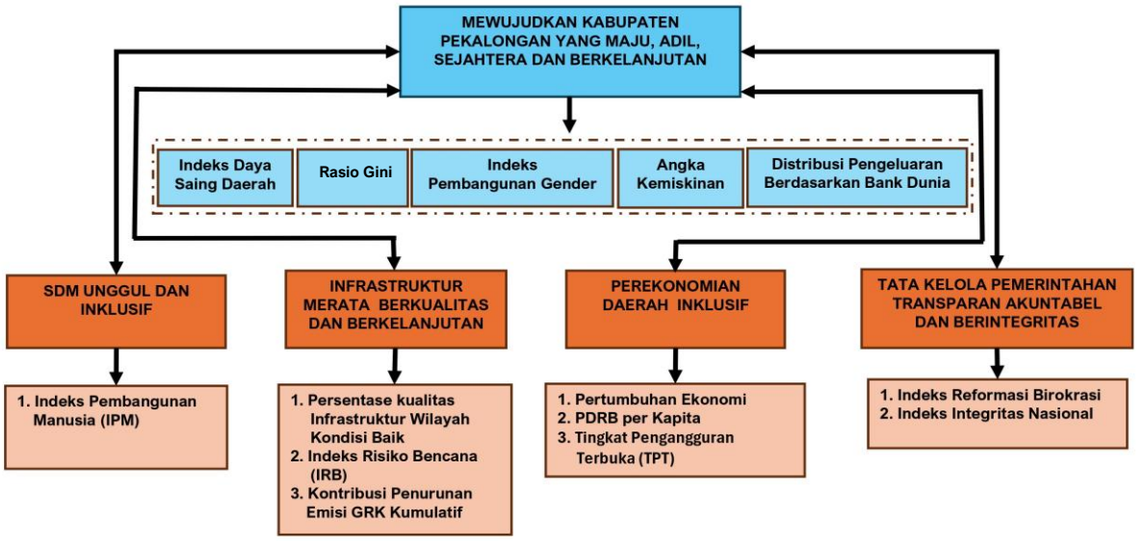
Penguatan tata kelola pemerintahan diwujudkan melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan serta perencanaan pembangunan daerah. Pemanfaatan teknologi dalam pengawasan dan evaluasi kinerja aparatur pemerintahan akan ditingkatkan, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dalam mewujudkan pemerintahan yang melayani, sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat akan terus diperkuat. Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan membangun mekanisme kolaborasi dengan stakeholder terkait untuk menciptakan solusi inovatif dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah. Selain itu, penguatan peran pemerintah desa sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat juga menjadi perhatian penting. Kapasitas aparatur desa akan ditingkatkan agar lebih profesional dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas serta memaksimalkan potensi lokal untuk mendukung pembangunan di tingkat desa. Penerjemahan visi dan misi daerah menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 -2029 dirumuskan melalui logframe pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan sebagai berikut



Gambar 4.2. Keterkaitan Visi dan Pokok Visi, Misi, dan Fokus Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029

3. Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029

Penerjemahan visi dan misi daerah menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 - 2029 dirumuskan melalui logframe pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan sebagai berikut :



Gambar 4.3. Logframe Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 - 2029

Berdasarkan logframe pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 - 2029, maka ditetapkan **1 tujuan** dan **4 (empat) sasaran** yang hendak dicapai dalam kurun waktu 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tujuan : Mewujudkan Kabupaten Pekalongan yang Maju, Adil, Sejahtera dan Berkelanjutan

Sasaran 1 : Meningkatnya SDM Kabupaten Pekalongan yang Unggul dan Inklusif, diukur dengan indikator sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sasaran 2 : Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata, dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan terhadap resiko bencana, diukur dengan indikator sebagai berikut :

1. Persentase kualitas Infrastruktur Wilayah Kondisi Baik
2. Indeks Risiko Bencana (IRB)
3. Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif

Sasaran 3 : Meningkatnya perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan dengan mendorong penguatan UMKM, peningkatan produktivitas sektor unggulan, pemerataan ekonomi di Kabupaten Pekalongan, diukur dengan indikator sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi
2. PDRB per Kapita
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Sasaran 4 : Meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahan yang, transparan, dan akuntabel untuk menciptakan pemerintahan yang responsif, efisien, dalam pelayanan publik, diukur dengan indikator sebagai berikut :

a. Indeks Reformasi Birokrasi
b. Indeks Integritas Nasional

Tabel 4.1.
Sasaran RPJMD Kabupaten Pekalongan 2025-2029

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD		Satuan	OPD Penanggung Jawab Urusan
Meningkatnya SDM Kabupaten Pekalongan yang Unggul dan Inklusif		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	Pemerintah Daerah
Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata, dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan terhadap resiko bencana		Persentase kualitas infrastruktur wilayah kondisi baik	%	Pemerintah Daerah
	IUP.48	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	Pemerintah Daerah
	IUP.49	Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TonCOzeq	Pemerintah Daerah
Meningkatnya perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan dengan mendorong penguatan UMKM, peningkatan produktivitas sektor unggulan, pemerataan ekonomi di Kabupaten Pekalongan		Pertumbuhan Ekonomi	%	Pemerintah Daerah
	IUP.55	PDRB per kapita	(Rp. Juta)	Pemerintah Daerah
	IUP.36	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	Pemerintah Daerah
Meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahan yang, transparan, dan akuntabel untuk menciptakan pemerintahan yang responsif, efisien, dalam pelayanan public	IUP.50	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Pemerintah Daerah
	IUP.54	Indeks Integritas Nasional	Indeks	Pemerintah Daerah

Sumber : Bapperida Kab. Pekalongan; data diolah; 2025

Tabel 4.2.
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Tujuan Renstra Perangkat Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029

VISI : KABUPATEN PEKALONGAN YANG MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Rumusan Tujuan Renstra PD	Indikator Sasaran RPJMD/ Indikator Tujuan Renstra PD		Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab Urusan
						2024	2025	2026	2027		
Mewujudkan Kabupaten Pekalongan yang Maju, Adil, Sejahtera dan Berkelanjutan				**Indeks Daya Saing Daerah**	**Indeks**	**3,61**	**3,69**	**3,71**	**3,76**	**3,91**	**Pemerintah Daerah**
			IUP.1	**Tingkat Kemiskinan**	**%**	**8,95**	**8,05**	**8,00-7,50**	**7,02-6,70**	**6,97-6,00**	**Pemerintah Daerah**
			IUP.56	**Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Bank Dunia**	**%**	**20,43**	**20,98**	**33,19**	**34,71**	**39,25**	**Pemerintah Daerah**
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	**Indeks**	**92,96**	**92,98***	**93,00**	**93,10**	**93,22**	**Pemerintah Daerah**
				Rasio Gini	**Indeks**	**0,327**	**0,334**	**0,285**	**0,264**	**0,200**	**Pemerintah Daerah**
	Meningkatnya SDM Kabupaten Pekalongan yang Unggul dan Inklusif			**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Indeks**	**71,95**	**72,71**	**73,00**	**74,10**	**73,80**	**Pemerintah Daerah**
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata	IUP.4	Usia Harapan Hidup (UHH)	Angka	74,25	74,59	74,69	74,91	75,72	Kesehatan
		Meningkatkan aksesibilitas dan distribusi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	IUP.2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan *(Prevalence of Undernourishment)*	%	5,54	5,47	5,20	4,81	3,07	Pangan
		Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan yang unggul dan berdaya saing	IUP.12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,46	12,63	13,35	13,50	13,94	Pendidikan
			IUP.11	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	7,48	7,50	7,52	7,55	8,41	Pendidikan

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Rumusan Tujuan Renstra PD	Indikator Sasaran RPJMD/ Indikator Tujuan Renstra PD		Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab Urusan
						2024	2025	2026	2027		
		Meningkatkan pembangunan literasi masyarakat		IPLM (Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat)	Nilai	66,65	4,71	66,75	66,80	70,10	Perpustakaan
		Meningkatkan daya saing kepemudaan dan olahraga		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	%	65,00	51,15	65,20	65,30	65,60	Kepemudaan Dan Olahraga
				Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	%	n/a	0,459	0,465	0,470	0,393	Kepemudaan Dan Olahraga
		Meningkatkan pelestarian seni dan budaya daerah	IUP.16	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	1,80	18,27	19,03	19,80	22,08	Kebudayaan
		Meningkatkan kualitas pembangunan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	IUP.22	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,215	0,201	0,17-0,16	0,16-0,15	0,14-0,13	Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak
				Indeks Perlindungan Anak	Indeks	64,31 (2023)	72,67	73,00	73,20	65,50	Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak;
		Meningkatkan kualitas pengendalian kependudukan dan keluarga berencana didukung dengan data administrasi yang valid untuk mendukung kinerja sasaran pembangunan		Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2,25	2,16	2,16	2,16	2,15	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			IUP.21	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Indeks	65,05	72,3	70,10 - 73,00	73,00 - 74,00	69,62 - 69,77	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	%	98,99	98,809	99,117	99,122	99,137	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata, dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan			**Persentase kualitas infrastruktur wilayah kondisi baik**	**%**	n/a	**76,4644**	**77,00**	**77,25**	**75,00**	**Pemerintah Daerah**
			IUP.48	**Indeks Risiko Bencana (IRB)**	**Indeks**	**131,25**	**102,14**	**105,00-100,00**	**100,00 - 99,00**	**118,98 - 115,83**	**Pemerintah Daerah**
			IUP.49	**Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif**	**TonCO_2eq**	**21.317,24**	**41.840,36**	**1.608.653,70**	**3.058.615,03**	**6.658.190,20**	**Pemerintah Daerah**

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Rumusan Tujuan Renstra PD	Indikator Sasaran RPJMD/ Indikator Tujuan Renstra PD		Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab Urusan
						2024	2025	2026	2027		
	hidup dan Ketahanan terhadap resiko bencana										
		Meningkatkan Keberkelanjutan penanganan infrastruktur wilayah		Persentase sarana dan prasarana wilayah kondisi baik	%	83,08	76,4644	83,36	83,53	84,07	Pekerjaan Umum
		Tersediannya kebutuhan tanah untuk menunjang pembangunan daerah		Persentase kebutuhan tanah yang tersedia untuk penunjang pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pertanahan
		Meningkatkan kualitas penataan perumahan dan kawasan permukiman	IUP.40	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	0,00	63,4554	63,86	64,29	65,23	Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur transportasi		Persentase kualitas layanan perhubungan	%	72,96	71,75	74,24	74,80	76,46	Perhubungan
		Meningkatkan Ketangguhan menghadapi risiko bencana		Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,67	0,69	0,69	0,70	0,73	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
		Meningkatkan pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	IUP.46	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	60,90	72,1225	72,20	72,30	71,19	Lingkungan Hidup
	Meningkatnya perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan dengan mendorong penguatan UMKM, peningkatan produktivitas sektor unggulan, pemerataan			**Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**5,02**	**5,88**	**5,85-6,10**	**6,00-7,85**	**7,40-8,40**	**Pemerintah Daerah**
			IUP.55	**PDRB per kapita**	**(Rp. Juta)**	**29,66**	**31,722**	**35,59-37,03**	**41,20-43,88**	**58,06-64,42**	**Pemerintah Daerah**
			IUP.36	**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**	**%**	**3,30**	**3,24**	**3,05-2,75**	**3,00-2,70**	**2,81-2,50**	**Pemerintah Daerah**

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Rumusan Tujuan Renstra PD	Indikator Sasaran RPJMD/ Indikator Tujuan Renstra PD		Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab Urusan
						2024	2025	2026	2027		
	ekonomi di Kabupaten Pekalongan										
		Meningkatkan kontribusi sektor PDRB dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan	IUP.23	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	29,31	29,65	30,65	30,75	30,84	Perindustrian
			IUP.24	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	6,84	6,52	6,61	6,69	6,93	Pariwisata
			IUP.27	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,94	0,89	1,44	1,71	2,49	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
				Rasio PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	14,98	13,27**	15,26	15,30	15,40	Perdagangan
				Rasio PDRB Sub Sektor Pertanian	%	14,80	15.98	16,10	16,20	15,37	Pertanian
				Rasio PDRB Sub Sektor Perikanan	Ton	0,87	0,87	0,89	0,90	0,93	Kelautan Dan Perikanan
		Meningkatkan nilai investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.	IUP.26	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	n/a	2,95	5,03	5,40	6,51	Koperasi UKM
			IUP.30	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	25,43	26,05	26,58	26,99	27,23	Penanaman Modal
		Meningkatkan peran desa sebagai pendorong perekonomian daerah		Indeks Desa	Indeks	0,7048	0,7242	0,7300	0,7350	0,7500	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Meningkatkan Ketentraman dan ketertiban wilayah	IUP.20	Jumlah kejadian Konflik SARA	kali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kesatuan Bangsa dan Poliik
				Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas	Indeks	n/a	61,10	61,50	62,20	71,14	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
		Meningkatkan peran lembaga keuangan daerah dalam mendukung pembiayaan ekonomi lokal dan pengembangan sektor produktif.		Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	3,84	3,90	3,95	3,98	4,09	Sekretariat Daerah

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Rumusan Tujuan Renstra PD	Indikator Sasaran RPJMD/ Indikator Tujuan Renstra PD		Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab Urusan
						2024	2025	2026	2027		
		Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran di masyarakat.		Rasio Produktivitas Tenaga Kerja (PDRB dibagi Jumlah Tenaga Kerja)	Rasio	n/a	22,16	52,65	52,70	52,85	Tenaga Kerja
		Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat		Indeks Kesejahteraan sosial (Ikesos)	Indeks	56,62	63,61	63,80	63,90	57,20	Sosial
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmitgrasi untuk mendukung pengurangan kemiskinan		Persentase pemenuhan kuota transmigrasi yang diberangkatkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Transmigrasi
	Meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahan yang, transparan, dan akuntabel untuk menciptakan pemerintahan yang responsif, efisien, dalam pelayanan publik		**IUP.50**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**77,03**	**81,11**	**81,20**	**81,30**	**77,60**	**Pemerintah Daerah**
			IUP.54	**Indeks Integritas Nasional**	**Indeks**	**73,97**	**80,17**	**80,52**	**81,34**	**83,78**	**Pemerintah Daerah**
		Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, adaptif dan berintegritas	IUP.53	Indeks Pelayanan Publik Kabupaten	Indeks	4,29	4,10	4,10	4,15	4,29	Setda
				Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	B (65,69)	B (66,40)	B (68,10)	BB (70,10)	BB (75,09)	Setda
			IUP.34	Nilai Kapabilitas Inovasi	Nilai	2,43	2,86	2,90	2,96	3,14	Penelitian dan Pengembangan
				Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	64,00	66,00	66,50	67,00	70,00	Setwan

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Rumusan Tujuan Renstra PD	Indikator Sasaran RPJMD/ Indikator Tujuan Renstra PD		Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab Urusan
						2024	2025	2026	2027		
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kajen	Indeks	81,39	80,56	81,50	82,00	83,50	Kecamatan Kajen
				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sragi	Indeks	85,00	86,49	86,55	86,60	85,25	Kecamatan Sragi
				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Wiradesa	Indeks	84,86	84.91	84,93	84,95	84,90	Kecamatan Wiradesa
				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kedungwuni	Indeks	88,10	88,25	88,50	89,00	90,50	Kecamatan Kedungwuni
				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Buaran	Indeks	80,50	81,51	81,55	82,00	83,50	Kecamatan Buaran
				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tirto	Indeks	81,00	85,11	85,30	85,40	81,25	Kecamatan Tirto
				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bojong	Indeks	85,55	85,78	86,00	86,25	87,00	Kecamatan Bojong
				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Wonopringgo	Indeks	81,60	93,63	93,75	93,80	84,00	Kecamatan Wonopringgo
				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karanganyar	Indeks	77,03	77,50	78,00	78,50	80,00	Kecamatan Karanganyar
				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Doro	Indeks	81,00	82,17	82,30	82,50	84,00	Kecamatan Doro
				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Talun	Indeks	80,50	81	81,50	81,75	82,50	Kecamatan Talun
				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lebakbarang	Indeks	83,30	85,05	85,50	85,75	84,25	Kecamatan Lebakbarang
				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kandangserang	Indeks	80,43	85,05	85,50	85,55	80,70	Kecamatan Kandangserang
				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Paninggaran	Indeks	80,85	80,95	81,00	81,05	81,15	Kecamatan Paninggaran

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Rumusan Tujuan Renstra PD	Indikator Sasaran RPJMD/ Indikator Tujuan Renstra PD		Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab Urusan
						2024	2025	2026	2027		
				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kesesi	Indeks	84,97	85,11	85,15	85,20	85,25	Kecamatan Kesesi
				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Petungkriyono	Indeks	79,50	79,80	80,15	80,40	81,30	Kecamatan Petungkriyono
				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Wonokerto	Indeks	81,00	94,6071	94,20	94,30	84,00	Kecamatan Wonokerto
				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Siwalan	Indeks	80,50	81.52	81,60	81,75	82,50	Kecamatan Siwalan
				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karangdadap	Indeks	80,93	83.63	84,00	84,50	84,00	Kecamatan Karangdadap
		Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bermartabat		Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	n/a	3,05	3,15	3,20	3,60	Komunikasi Dan Informatika
				Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	Indeks	n/a	577	590	600	645	Persandian
		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang didukung dengan ketersediaan data yang valid.		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	74,60	78.602	78,80	79,00	84,00	Perencanaan
				Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,60	2,61	2,65	2,70	2,90	Statistik
				Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori Baik	%	40,00	43,2	63,64	72,73	90,41	Kearsipan
		Meningkatkan kompetensi, integritas, dan kinerja Aparatur Sipil Negara secara berkelanjutan guna mendukung terciptanya birokrasi yang bersih, efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.		Nilai NSPK Manajemen ASN	Nilai	84,90	86,53	86,70	86,80	85,40	Kepegawaian
		Meningkatkan kualitas	IUP.51	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	98,42	99,76	80-100	80-100	80-100	Sekretariat Daerah

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Rumusan Tujuan Renstra PD	Indikator Sasaran RPJMD/ Indikator Tujuan Renstra PD		Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab Urusan
						2024	2025	2026	2027		
		pengawasan dan pengendalian dalam penyelengga raan pemerintahan yang bersih dan akuntabel		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (IKK)	Level	3	Level 2 (2,94)	Level 1 (1,75)	Level 1 (1,80)	Level 3 (3,03)	Pengawasan
		Meningkatkan implementasi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel untuk menciptakan pemerintahan yang responsive, efisien dalam pelayanan publik		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	73,27	67,68	74,50	75,00	76,00	Keuangan Daerah

Sumber : Bapperida Kab. Pekalongan; data diolah; 2025

Pada beberapa indikator terdapat perubahan metode penghitungan diantaranya pada indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Perubahan metode penghitungan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dari Perpusnas menitikberatkan pada pergeseran fokus dari sekadar jumlah perpustakaan menjadi penilaian kinerja, aktivitas, dan dampak substantif pembinaan. Nilai dengan metode lama dan baru tidak dapat dikonversi atau diperbandingkan secara langsung karena instrumen serta variabelnya berbeda.

B. PRIORITAS RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027

RKPD disusun melalui sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya, salah satunya melalui penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan RKPD mempedomani RKP dan RKPD Provinsi, melalui penyelarasan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan Daerah. Sasaran dan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2027 menjadi acuan dokumen perencanaan tahunan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya Selengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027

RKP Tahun 2027 merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Asta Cita yang merupakan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagaimana yang telah dijabarkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional untuk tahun 2027 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"**. Tema ini bertujuan memastikan setiap langkah pembangunan pada tahun 2027 sejalan dengan komitmen Indonesia Emas 2045. Fokus ini dirancang untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, serta memperkuat daya saing nasional menuju Indonesia Emas 2045, dengan menekankan peningkatan produktivitas SDM, inovasi, dan integrasi kebijakan ekonomi. Fokus Utama Pembangunan 2027 Berdasarkan arahan kebijakan pusat yang kemudian diturunkan ke daerah, mencakup:

a **Peningkatan Produktivitas**: Mendorong efisiensi di berbagai sektor untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih masif.
b **Penguatan Investasi**: Menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mendukung target Indonesia menjadi anggota penuh OECD pada tahun 2027.
c **Hilirisasi Industri**: Memperkuat struktur industri nasional agar memiliki daya saing global.
d **Kualitas Sumber Daya Manusia**: Fokus pada penguatan kompetensi SDM dan reformasi birokrasi sebagai fondasi pembangunan.
e **Pemerataan Infrastruktur**: Memastikan pembangunan menjangkau seluruh wilayah untuk mendukung ekonomi lokal.

RKP Tahun 2027 difokuskan pada pencapaian Trisula Pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi berkualitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta penurunan kemiskinandan ketimpangan. Dalam mencapai target tersebut, RKP Tahun 2027 dilaksanakan melalui 8 (delapan) Prioritas Nasional (PN).

Intervensi dalam delapan PN disusun dengan memperhatikan keterpaduan antarprogram, penguatan sinergi lintas sektor dan lintas wilayah, serta keberlanjutan kebijakan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Arah kebijakan masing-masing PN dijabarkan ke dalam sasaran utama, program dan indikator Pembangunan sebagai berikut :

(1). **PN 1** : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
(2). **PN 2** : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
(3). **PN 3** : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

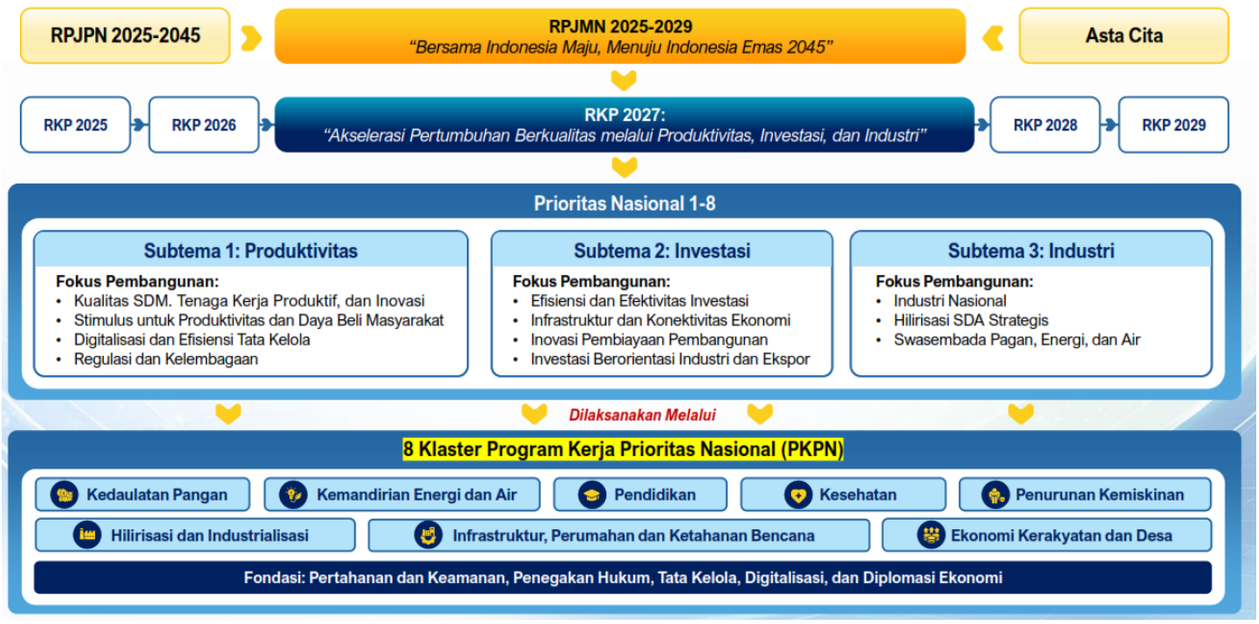
(4). **PN 4** : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

(5). **PN 5** : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

(6). **PN 6** : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

(7). **PN 7** : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.

(8). **PN 8** : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.



Sumber : Kementerian PPN/Bappenas; 2026

Gambar 4.4. Keterkaitan RPJMN-Tema RKP-Prioritas Pembangunan dalam RKP 2027

2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027

a. Tema Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2027

Berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029, pembangunan daerah tahun 2027 yang merupakan tahun kedua dari RPJMD diarahkan pada tema pembangunan daerah **"Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi"**. Dengan tema ini maka pada tahun 2027 pembangunan daerah Jawa Tengah difokuskan lebih besar pada sektor pariwisata berkelanjutan dan pengembangan ekonomi syariah. Strategi yang akan dilakukan dalam rangka implementasi tema pembangunan daerah ini meliputi:

1). pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan;
2). penguatan promosi pariwisata berbasis digital;
3). peningkatan kualitas destinasi wisata berbasis klaster dengan perbaikan prasarana sarana destinasi wisata;
4). penguatan diversifikasi daya tarik pariwisata sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah seperti pemanfaatan keragaman sumber daya alam, budaya, kreativitas, dan olahraga berbasis digital;
5). peningkatan infrastruktur konektivitas antar destinasi wisata;
6). penguatan integrasi antardestinasi wisata;

7). penguatan kapasitas SDM pelaku pariwisata termasuk pelaku UMKM pariwisata;
8). penguatan fasilitasi kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata;
9). city beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan;
10). pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan megapolitan/metropolitan (urban tourism), serta kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Magelang-Yogyakarta-Surakarta;
11). penguatan ekonomi dan keuangan syariah melalui penguatan halal value chain, penguatan keuangan syariah, penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan penguatan ekonomi digital;
12). penguatan kelembagaan pariwisata dan ekonomi syariah agar lebih efektif;
13). peningkatan pemenuhan sarana prasarana pendukung pariwisata desa;
14). peningkatan pengembangan perekonomian desa berbasis potensi pariwisata berkelanjutan;
15). peningkatan peran BUMDes dan lembaga ekonomi desa lainnya dalam mendukung pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah;
16). peningkatan kerja sama pengembangan potensi pariwisata desa dan peningkatan pengembangan kawasan perdesaan;
17). penguatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SLB dan SMK bidang keahlian layanan pariwisata, seni, kriya, kuliner, tata boga, busana, perhotelan, dan perbankan syariah termasuk ekonomi kreatif dan kewirausahaan halal;
18). revitalisasi kurikulum SMK seni, kriya, kuliner, tata boga, busana, perhotelan, layanan pariwisata dan perbankan syariah selaras dengan kebutuhan usaha dan industri;
19). penguatan integrasi tema pariwisata, budaya, ekonomi kreatif dan syariah dalam kurikulum SMA dan SLB berbasis project integratif dan lintas;
20). penguatan kemitraan DUDI melalui sinkronisasi kompetensi dan penyusunan Memorandum of Agreement (MoA) untuk kegiatan spesifik antara lain dengan perusahaan atau hotel syariah, restoran halal, biro perjalanan haji-umrah, bank syariah, UMKM kriya lokal, desa wisata halal, serta perguruan tinggi termasuk dukungan program magang dan sertifikasi halal;
21). peningkatan upaya pelestarian dan pemanfaatan karya budaya dan cagar budaya sebagai salah satu daya tarik wisata melalui pemetaan karya budaya dan cagar budaya potensial, pemeliharaan prasarana sarana kebudayaan, peningkatan upaya diplomasi budaya tingkat nasional/internasional, serta penguatan SDM/lembaga/komunitas kebudayaan sebagai agen diplomasi budaya;
22). penguatan event olahraga pariwisata ramah lingkungan dan berkelanjutan;
23). perluasan literasi berwawasan lingkungan hidup berkelanjutan dan literasi ekonomi berbasis syariah melalui pelibatan pemangku kepentingan;
24). mengoptimalkan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif berbasis kelestarian lingkungan hidup berkelanjutan;
25). peningkatan partisipasi pemuda dalam bidang pariwisata, wisata kreatif, membangun startup berbasis syariah.

Tingkat pencapaian kinerja berbagai aktivitas yang akan dilakukan dalam rangka mengembangkan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah di Jawa Tengah akan diukur dengan indikator sebagai berikut.

a). Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,30 – 7,00%
b). Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (Pariwisata) sebesar 3,72%;

c). Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional sebesar 13,54%;
a). Jumlah Produk Tersertifikasi Halal sebesar 556.618 produk;
b). Aset Perbankan Syariah/PDRB sebesar 3,32%;
c). Indeks Zakat Nasional (Provinsi) sebesar 0,68.

b. Tema Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2027

Prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2027 berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan berbagai upaya dan strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Prioritas daerah tahun 2027 sebagai tahun kedua RPJMD Tahun 2025-2029 diarahkan pada **"Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah"**. Prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2027 dengan fokus strateginya meliputi:

PD.1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah, dengan fokus pada:

1. peningkatan kinerja pelayanan publik berteknologi tinggi dan integratif, serta yang sesuai kebutuhan masyarakat;
2. peningkatan kapabilitas teknologi penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi infrastruktur, sumber daya manusia, dan regulasi guna mendukung transformasi digital;
3. pengembangan kualitas perencanaan berbasis data terintegrasi, riset dan risiko serta berorientasi kinerja;
4. peningkatan kinerja tata kelola data terintegrasi berbasis sistem informasi;
5. pengembangan ekosistem riset dan inovasi, integrasi IPTEK dalam sektor-sektor prioritas daerah, peningkatan hilirisasi hasil riset, penguatan kolaborasi dalam pengembangan riset dan inovasi;
6. peningkatan kualitas manajemen ASN dengan pengembangan manajemen kinerja dan talenta disertai reward and punishment yang berkeadilan;
7. pengembangan kompetensi berbasis analisis kesenjangan kinerja dan kompetensi disertai dengan penguatan nilai integritas;
8. peningkatan nilai-nilai anti korupsi dan budaya integritas penyelenggara pemerintahan;
9. peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian berbasis risiko, serta integrasi penguatan integritas dan pencegahan korupsi;
10. penguatan kualitas analisis evaluasi dan pengawasan produk hukum, jaringan dokumentasi hukum, serta kapasitas penyusunan produk hukum;
11. peningkatan layanan bantuan hukum dan peningkatan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum;
12. peningkatan kualitas pengelolaan digitalisasi manajemen kearsipan;
13. penguatan kelembagaan agar lebih efektif;
14. peningkatan sinergi pelaksanaan reformasi agraria;
15. penguatan koordinasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta peningkatan pemanfaatan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam perencanaan pembangunan daerah;
16. peningkatan kapasitas SDM, penguatan pemetaan daerah rawan, penegakan produk hukum daerah serta pelibatan aktif masyarakat dalam menjaga trantibum;
17. peningkatan pemenuhan hak asasi manusia bagi kelompok rentan terkait layanan dasar serta penjaminan kesetaraan dan kebebasan sipil;
18. pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat;
19. peningkatan integritas dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi;
20. pembentukan jejaring global dalam peningkatan perekonomian dan ketahanan regional;
21. penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila;
22. penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan kriminalisme;

23. peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah;
24. penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah;
25. sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional;
26. perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas.

PD 2. Peningkatan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan, dengan fokus pada:

1. peningkatan produktivitas sektor industri pengolahan dan pemberdayaan pelaku industri lokal;
2. peningkatan kontribusi sektor perdagangan dengan efisiensi distribusi dan stabilitas harga;
3. peningkatan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi kreatif berbasis inovasi;
4. peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah (UKM);
5. peningkatan produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
6. peningkatan pembinaan pertambangan dengan penerapan Good Mining Practice;
7. peningkatan pertumbuhan penanaman modal;
8. pengembangan ekosistem halal, industri halal dan penguatan keuangan syariah;
9. peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah (utamanya konektivitas antar destinasi wisata unggulan) dan kewilayahan;
10. peningkatan pengembangan perekonomian desa berbasis potensi pariwisata berkelanjutan;
11. peningkatan peran BUMDes dan lembaga ekonomi desa lainnya dalam mendukung pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah;
12. peningkatan kerja sama pengembangan potensi pariwisata desa dan peningkatan pengembangan kawasan perdesaan;
13. peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan termasuk integrasi kegiatan posyandu untuk mendukung SPM dan penguatan peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan serta lembaga adat desa;
14. peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa;
15. peningkatan upaya pengendalian inflasi daerah;
16. pemulihan ekosistem dan pelestarian keanekaragaman hayati;
17. peningkatan produktivitas komoditi sumberdaya alam dan jasa lingkungan dengan prinsip keberlanjutan;
18. peningkatan penerapan inisiatif skema insentif/disinsentif bagi pelaku usaha serta apresiasi untuk masyarakat yang menerapkan praktik berkelanjutan;
19. peningkatan upaya dan inisiatif konservasi berbasis masyarakat dengan pendekatan keterpaduan/integrasi pengelolaan lanskap darat dan laut;
20. inisiasi penerapan pendanaan hijau untuk mendukung kelestarian lingkungan hidup;
21. penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air guna meningkatkan ketersediaan air baku;
22. peningkatan pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
23. peningkatan ketahanan energi berbasis potensi lokal (utamanya mendukung kawasan pariwisata);
24. akselerasi dan sinergi antar pemerintah, swasta dan masyarakat dalam implementasi kebijakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim;
25. peningkatan pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir yang mencakup seluruh rantai layanan yang disertai dengan penguatan serta penegakan hukum dan peraturan;

26. peningkatan kualitas air melalui pengelolaan limbah industri UMKM;
27. peningkatan infrastruktur sanitasi air limbah domestik;
28. peningkatan akses air minum yang dikelola secara aman dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya air;
29. peningkatan aksesibilitas dan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan;
30. penguatan infrastruktur hijau dan penerapan zero waste tourism dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan;
31. peningkatan Integrasi rencana tata ruang dan rencana sektoral melalui penyusunan dokumen SPPR;
32. penguatan kelembagaan dan kapasitas institusi penanggulangan bencana;
33. peningkatan kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat bencana;
34. pemberdayaan sosial dan ekonomi untuk membangun ketahanan masyarakat;
35. pengelolaan data dan informasi untuk pengambilan keputusan;
36. pengembangan literasi kebencanaan, pemberdayaan masyarakat, dan inklusi sosial dalam penanggulangan bencana;
37. perluasan jejaring kemitraan serta pendanaan alternatif;
38. pengembangan riset dan inovasi kebencanaan serta pemanfaatan teknologi.

PD 3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter, dengan fokus pada:

1. peningkatan kompetensi siswa SMK, keahlian guru SMK berbasis industri serta revitalisasi alat praktik kejuruan;
2. peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan secara bertahap dengan penyediaan layanan pendidikan pada wilayah blank spot, penguatankerjasama pemerintah-swasta, serta evaluasi strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS);
3. peningkatan mutu pendidikan berbasis literasi-numerasi dan digital, STEAM, kualitas pengajaran guru dan pembelajaran siswa, serta pengelolaan SMK Boarding dan Semi Boarding;
4. peningkatan pendidikan karakter melalui penanaman nilai agama dan budaya, implementasi kurikulum yang adaptif serta penguatan sekolah inklusi;
5. penguatan tata kelola pendidikan berorientasi kepemimpinan instruksional dan berbasis telaah/analisis;
6. pengembangan sarana prasarana layanan kesehatan primer dan lanjutan;
7. pengembangan kompetensi SDM kesehatan untuk mendukung layanan rujukan berbasis kompetensi;
8. pengembangan keterampilan kader kesehatan;
9. peningkatan cakupan kepesertaan aktif;
10. pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi kesehatan terintegrasi;
11. pemerataan sumber daya kesehatan daerah serta tenaga cadangan kesehatan;
12. peningkatan dan penguatan literasi masyarakat dibidang kesehatan ;
13. peningkatan jejaring pelayanan dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah dan nasional;
14. peningkatan kualitas data dan informasi kebudayaan;
15. peningkatan pengembangan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang berkelanjutan;
16. peningkatan kualitas SDM dan lembaga kebudayaan untuk mewujudkan talenta nasional seni budaya;
17. kualitas prasarana sarana kebudayaan;
18. peningkatan literasi masyarakat dalam berolahraga, peningkatan penyadaran masyarakat dalam berolahraga, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan, pembinaan

atlet potensial, pembinaan cabang olahraga unggulan, peningkatan prasarana sarana olahraga masyarakat, peningkatan prasarana sarana olahraga cabor unggulan;
19. perluasan literasi melalui pelibatan pemangku kepentingan;
20. mengoptimalkan akuisisi arsip secara tematis;
21. peningkatan partisipasi pemuda melalui wirausaha muda kreatif dan inovatif;
22. peningkatan pemerataan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
23. peningkatan pembangunan berbasis gender;
24. peningkatan ketahanan keluarga;
25. pelatihan peningkatan produktivitas, sertifikasi kompetensi dan perluasan kemitraan dengan dunia industri dan dunia usaha.

3. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2027

a. Tema RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2027

Tahun 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pekalongan 2025–2029 yang menjadi fase akselerasi dan konsolidasi program-program prioritas untuk mendorong kemajuan pembangunan daerah secara signifikan. Tema pembangunan yang diusung pada tahun ini adalah "**Penguatan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Optimalisasi Potensi Daerah untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Inklusif"**. Tema ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk tidak hanya membangun fondasi fisik, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Penguatan infrastruktur dasar menjadi prioritas utama, meliputi perbaikan dan pembangunan jaringan jalan, penguatan infrastruktur air bersih dan sanitasi, revitalisasi sarana pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan infrastruktur digital di wilayah pedesaan. Upaya ini bertujuan memperluas akses layanan dasar serta mendorong konektivitas antarwilayah, yang menjadi landasan penting bagi pertumbuhan ekonomi lokal.

Pada saat yang sama, optimalisasi potensi daerah diarahkan pada pengembangan sektor-sektor unggulan daerah secara lebih sistematis dan berkelanjutan. Selain pariwisata dan ekonomi syariah yang menjadi perhatian utama, pemerintah daerah juga memperkuat sektor industri kreatif, pertanian modern, perikanan tangkap dan budidaya, serta pengolahan hasil pertanian dan kelautan. Di sektor pariwisata, dilakukan peningkatan kualitas destinasi berbasis budaya, alam, dan sejarah, serta dukungan promosi dan pemasaran digital. Ekonomi syariah dikembangkan melalui penguatan UMKM syariah, koperasi pesantren, keuangan mikro syariah, dan peningkatan literasi ekonomi umat.

Sektor pertanian dan perikanan juga menjadi tumpuan strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, dengan pendekatan hilirisasi, mekanisasi, dan pemanfaatan teknologi. Dukungan terhadap UMKM dan IKM terus diperluas, termasuk kemudahan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, dan integrasi dalam rantai nilai industri lokal.

Dengan pendekatan pembangunan yang terintegrasi dan inklusif, tahun 2027 diarahkan menjadi momentum bagi transformasi ekonomi Kabupaten Pekalongan yang tidak hanya tumbuh secara angka, tetapi juga merata secara kualitas. Melalui kolaborasi antarsektor dan pelibatan aktif masyarakat, pemerintah daerah bertekad membangun struktur ekonomi yang tangguh, adaptif, dan berkeadilan.

b. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2027

Tahun 2027 diarahkan sebagai periode akselerasi dan konsolidasi terhadap program-program prioritas pembangunan yang telah diletakkan fondasinya pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, arah kebijakan di tahun ini difokuskan untuk mempercepat transformasi struktural dan memperkuat daya saing daerah dengan tetap menjunjung prinsip keadilan, inklusivitas, dan keberlanjutan. Berikut arah kebijakan prioritas yang akan dijalankan:

1) Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur **pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan**.
   - Revitalisasi prasarana sekolah dasar dan menengah negeri dan swasta;
   - Revitalisasi prasarana madrasah negeri dan swasta;
   - Relokasi Gedung dan prasarana RSUD Kraton di Desa Kampil Kec. Wiradesa yang sudah mulai beroperasi di awal Tahun 2027;
   - Peningkatan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman.
   - Peremajaan dan penanganan permukiman kumuh yang terpadu.
   - Penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan terhadap layanan dasar serta perluasan cakupan infrastruktur perdesaan terutama (air minum, sanitasi, listrik, dan komunikasi).
   - Penyelenggaraan air minum yang layak.
   - Penyelenggaraan pembinaan infrastruktur permukiman.
   - **Peningkatan jaringan jalan untuk mempermudah akses menuju lokasi wisata**. Dengan infrastruktur yang baik, wisatawan merasa lebih aman dan nyaman, sehingga mendongkrak citra destinasi dan meningkatkan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara.
2) Mendorong konektivitas antarwilayah terutama kawasan tertinggal, pinggiran, dan perdesaan melalui peningkatan akses transportasi dan digitalisasi wilayah.
   - Pengembangan konektivitas jalan pada jalur utama dan aksesibilitas daerah
3) Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.
   - Penguatan ekonomi lokal, ketahanan sosial, dan pelestarian lingkungan perdesaan;
   - Tata kelola dan pemberdayaan desa adaptif.
4) Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.
   - Penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan tentang penggunaan teknologi kepada masyarakat dan perangkat desa untuk meningkatkan literasi digital, memastikan pemanfaatan internet yang positif dan produktif, seperti untuk pemasaran UMKM dan layanan publik;
5) Penerapan *smart system* dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.
   - Pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital.
6) Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.
   - Mekanisasi meningkatkan efisiensi produksi di hulu, adopsi teknologi tepat guna memastikan keberlanjutan dan ketepatan proses, sementara hilirisasi memaksimalkan nilai ekonomi produk di hilir. Ini mengarah pada peningkatan pendapatan petani/nelayan, ketahanan pangan nasional, dan pertumbuhan ekonomi sektor agromaritim secara keseluruhan.
7) Penguatan sektor industri kecil dan menengah (IKM) melalui fasilitasi legalitas, pelatihan, inkubasi bisnis, dan integrasi dengan pasar digital dan global.

- Pelatihan dan Peningkatan SDM : Program pelatihan dirancang untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) IKM, termasuk pelatihan kewirausahaan, manajemen produk halal, dan keterampilan digitalisasi pemasaran;
- Fasilitasi Legalitas Usaha : Ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha bagi pelaku IKM. Proses perizinan kini dipermudah dan dipercepat, termasuk melalui layanan daring, yang membantu IKM mendapatkan legalitas seperti Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).

8) Revitalisasi dan pengembangan kawasan sentra produksi serta kawasan ekonomi berbasis komunitas.
   - Program pemberdayaan UKM, industri rumah tangga, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), atau kelompok tani yang dikelola secara kolektif oleh masyarakat desa
9) **Pengembangan destinasi wisata berbasis budaya, sejarah, dan alam dengan pendekatan *community-based tourism* dan dukungan infrastruktur serta SDM pariwisata**.
   - **Pengembangan dan peningkatan destinasi dan desa wisata unggulan daerah.**
   - Peningkatan amenitas, aksesibilitas dan atrakasi pendukung pariwisata;
   - Peningkatan keterampilan dan keahlian SDM pariwisata;
   - Peningkatan promosi, pemasaran dan kerjasama pariwisata.
   - **Forum komunikasi pemerintah daerah dengan konten kreator lokal**.
10) **Penguatan ekosistem ekonomi syariah dengan membangun kolaborasi antara UMKM syariah, pesantren, koperasi syariah, dan lembaga keuangan syariah**.
    - Kolaborasi antara UMKM syariah, pesantren, koperasi syariah, dan lembaga keuangan syariah dengan menciptakan rantai nilai yang terintegrasi, memfasilitasi permodalan dan literasi keuangan, serta memanfaatkan teknologi digital.
    - Memperkuat daya saing UMKM, memberdayakan pesantren sebagai pusat ekonomi, dan membangun sistem keuangan syariah yang inklusif dan berkeadilan.
11) **Peningkatan literasi dan akses masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah**.
    - Membangun ekosistem digital pesantren dan UMKM untuk memperluas jangkauan pasar;
    - Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM): Melalui pelatihan dan literasi ekonomi syariah bagi santri dan pengelola UMKM syariah dalam menghadapi dinamika ekonomi modern.
12) Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.
    - Penyelenggaraan forum, *focus group discussion (FGD)*, atau lokakarya yang melibatkan seluruh pilar untuk merencanakan dan mengevaluasi program bersama.
13) Penguatan peran BUMDes, koperasi, dan lembaga ekonomi lokal sebagai motor penggerak ekonomi inklusif.
    - Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama kemampuan dalam mengakses permodalan, penguasaan teknologi digital dan meningkatkan produktivitas, kualitas dan pemasaran produk
14) Penguatan regulasi dan insentif daerah untuk mempercepat investasi dan inovasi pembangunan.
    - Peningkatan daya saing BUMD.
    - Efisiensi peran Badan Usaha Milik Daerah dalam penugasan pemerintah daerah.
15) Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.
    - Integrasi data sosial ekonomi penduduk.

- Peningkatan program perlindungan sosial
- Peningkatan produktivitas tenaga kerja, penyediaan tenaga kerja yang terampil dan melakukan pengembangan sistem informasi investasi dan tenaga kerja berbasis teknologi informasi

16) Mengintegrasikan pendekatan gender, penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan anak dan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan
- Perluasan layanan pendidikan anak usia dini.
- Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah
- Penurunan kematian ibu dan anak.
- Pencegahan dan penurunan stunting

c. Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah adalah ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah. Capaian ini menunjukkan seberapa efektif dan efisien program serta kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam mencapai target yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029.

1). Indeks Daya Saing Daerah = 3,76
2). Tingkat Kemiskinan = 8,00-7,60 %
3). Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Bank Dunia = 34,71
4). Indeks Pembangunan Gender (IPG) = 93,10
5). Rasio Gini = 0,264

4. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2027

a. Pedoman Penyusunan Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD didasarkan pada ketentuan dalam pasal 178 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017, bahwa Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan amanat peraturan perundang-undangan dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya penyusunan rancangan awal RKPD untuk penyempurnaan rancangan RKPD menjadi dokumen perencanaan kerja Pemerintah Daerah, dalam satu tahun yang nantinya menjadi dasar dalam penyusunan rancangan KUA-PPAS APBD Kabupaten Pekalongan.

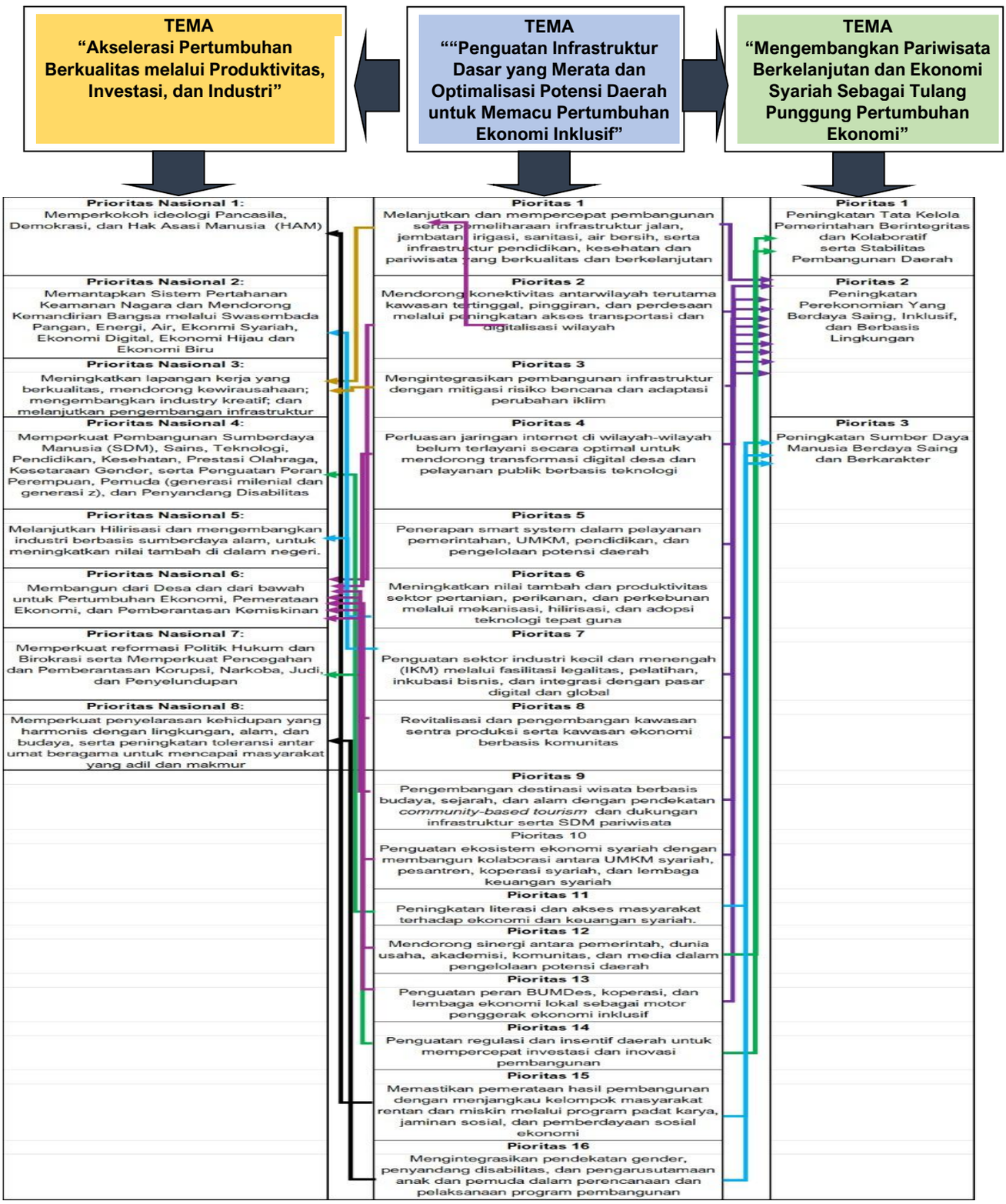
b. Usulan Pokir yang dikemas dalam keputusan tersebut, diharapkan menjadi prioritas untuk diakomodir dalam penyusunan RKPD, dan KUA PPAS APBD TA 2027 dan untuk dianggarkan baik melalui APBD tahun anggaran 2027 baik murni maupun perubahan;

c. Untuk mendukung visi Bupati Pekalongan yaitu ” **KABUPATEN PEKALONGAN YANG MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA”** maka DPRD Kabupaten Pekalongan menyampaikan pokok-pokok pikiran;
1). Pembangunan infrastruktur baik pembangunan jalan dan jembatan, drainase, senderan/tebing, jalan usaha tani, jalan usaha nelayan dan jalan produksi tambak serta penanganan banjir dan sampah;
2). Penyediaan air bersih dan air limbah, fasilitasi penerangan jalan, penanganan rumah tidak layak huni (RTLH)
3). Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia berupa pelatihan UMKM dan koperasi; peningkatan kelompok masyarakat baik petani, nelayan berupa bantuan bibit, pupuk dan alsintan,
4). Pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan, kesehatan, olahraga, pariwisata dan peribadatan.

5. Keselarasan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah Tahun 2027

a. Tema dan Prioritas Nasional dan Daerah tahun 2027

Prioritas dan fokus pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2027 telah selaras dengan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 dan Nasional 2027, serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah. Keterkaitan prioritas pembangunan Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2027 dijabarkan sebagai berikut.



Gambar 4.5. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2027

b. Hasil Rakortekrenbang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Bappeda Provinsi Jawa Tengah juga telah melaksanakan (Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan) Rakortekrenbang untuk penyusunan dokumen tahun 2027 bertujuan menyelaraskan program, kegiatan, dan target kinerja perangkat daerah. Fokus utamanya adalah penguatan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan penanganan kemiskinan, berdasarkan capaian positif tahun sebelumnya.

Beberapa **poin penting** terkait perencanaan pembangunan Jawa Tengah menuju 2027 antara lain :

a. **Tujuan Strategis**: Rakortekrenbang dilaksanakan untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, guna mewujudkan perencanaan yang terarah, terukur, dan berdampak.
b. **Fokus Pembangunan 2027**: Penekanan pada pembangunan infrastruktur dasar yang merata serta optimalisasi potensi daerah untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
c. **Konteks Ekonomi**: Penyusunan RKPD 2027 didukung capaian ekonomi positif, dengan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan penurunan angka kemiskinan.
d. **Tahapan Perencanaan**: Proses perencanaan melibatkan berbagai tahap, mulai dari forum perangkat daerah hingga Musrenbang, yang memastikan sinergi dan kolaborasi antar wilayah.
e. Penyusunan ini dilakukan lebih awal (sosialisasi awal 2026) untuk memastikan target infrastruktur dan ekonomi **tercapai maksimal** di tahun 2027.

Pelaksanaan Rakortekrenbang merupakan upaya sinkronisasi dan penyepakatan target 10 (sepuluh) **indikator tematik** yang diberikan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota untuk mendukung tercapainya kebijakan Perencanaan Pembangunan Jawa Tengah pada tahun 2027 yang dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 4.3.
Target Indikator Makro Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2027
sebagai hasil Rokortekrenbang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

No.	Indikator Makro Pembangunan		Penyelarasan Target Daerah Tahun 2027
	Indikator	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	74,10
2.	Pertumbuhan Ekonomi (PE)	%	6,00 - 7,85
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,00 - 2,70
4.	Tingkat Kemiskinan	%	7,02 - 6,70
5.	Jumlah DTW Alam yang Dikembangkan	Unit	5
6.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	899.097
7.	Jumlah Desa/Kampung Wisata Baru yang Dicanangkan	Unit	30
.8.	Jumlah Konten Kreator yang dilatih	Orang	10
9.	Jumlah Usaha Pariwisata Ramah Muslim yang ditetapka	Unit	5
10.	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Produk	5,938
11.	Jumlah Penyaluran Pembiayaan Syariah	Rp.	0

No.	Indikator Makro Pembangunan		Penyelarasan Target Daerah Tahun 2027
	Indikator	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
12.	Jumlah RPH/RPU yang Tersertifikasi Halal	Unit	2
13.	Jumlah Tukang Jagal yang Tersertifikat Halal	Orang	1
14.	Jumlah Dana Zakat, Infaq, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang Dihimpun	Rp.	8.029.189.044

Sumber : Analisis penyusun; 2026

c. Program Prioritas Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah

Dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur diwujudkan melalui kebijakan **11 program prioritas, 22 program intervensi, 61 program aksi, dan 42 program taktis**. Seluruh program tersebut berjumlah 136 yang kemudian secara teknokratis menjadi **"136 Program Daerah"**. Program-program tersebut kemudian dijabarkan secara lebih implementatif dalam bentuk strategi, kegiatan, dan aktivitas yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta didukung oleh banyak pihak atau stakeholder termasuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan Program Daerah tersebut maka dibutuhkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Dari total 136 Program Daerah sebanyak **35 Program Daerah** didelegasikan kepada Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah untuk diselaraskan dengan program daerah kabupaten/kota dan ditetapkan sebagai "Program Delegasi" Provinsi ke Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, meliputi:

Tabel 4.4.
Dukungan 35 Program Daerah Provinsi Jawa Tengah yang didelegasikan di Kabupaten Pekalongan

No.	Program Daerah Provinsi Jawa Tengah	Program Daerah Kabupaten Pekalongan
(1)	(2)	(3)
1.	PP. Melahirkan pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, profesionalitas dan kualitas ASN dan perangkat desa	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA / Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional / Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (BKPSDM) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA / Kegiatan Penataan Organisasi/ Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (SETDA)
2.	PP. Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN / Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian / Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Sekretariat Daerah) PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,

No.	Program Daerah Provinsi Jawa Tengah	Program Daerah Kabupaten Pekalongan
(1)	(2)	(3)
		USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) / Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan / Sub Kegiatan Perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM (DINKOP UKM NAKER)
3.	PP. Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT / Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (DINAS PMD) PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA / Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana / Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota (BPBD)
4.	PP. Pembangunan infrastruktur melalui permukiman layak huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN / Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha / Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (DINAS PERKIM LH) PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN / Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota (DINPORAPAR)
5.	PP. Moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN / Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan / Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (BAKESBANGPOL) PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT / Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat / Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Sekrearіat Daerah)

No.	Program Daerah Provinsi Jawa Tengah	Program Daerah Kabupaten Pekalongan
(1)	(2)	(3)
6.	PP. Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA / Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi / Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi (DINKOP UKM NAKER)
7.	PI. Pembentukan Kecamatan Berdaya (perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT / Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (DINAS PMD) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) / Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga / Sub Kegiatan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) (DP3APPKB) PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL / Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi (DINSOS) PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN / Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota (DINPORAPAR) PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH / Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia / Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (BAPPERIDA)

No.	Program Daerah Provinsi Jawa Tengah	Program Daerah Kabupaten Pekalongan
(1)	(2)	(3)
8.	PI. Membangun 1.000 desa/kampung wisata baru	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA / Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA / Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (DINPORAPAR)
9.	PI. Mengembangkan 10 titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN / Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam / Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (SETDA) PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH / Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) / Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (BAPPERIDA)
10.	PA. Pelatihan dan pendidikan anti korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan penyelenggara pemerintah desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, Ombudsman, Kepolisian, Kejaksanaan, BPK dan KPK	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI / Kegiatan Pendampingan dan Asistensi / Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (INSPEKTORAT)
11.	PA. Spesialis keliling (Spelling), puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT / Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas (DINKES)
12.	PA. Mendorong pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap kecamatan bekerjasama dengan pihak sekolah swasta	-
13.	PA. Mendorong pembentukan rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas di setiap kecamatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL / Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial / Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu (DINSOS)
14.	PA. Mendorong penyediaan 1 dokter, 1 bidan setiap puskesmas pembantu	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN / Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan

No.	Program Daerah Provinsi Jawa Tengah	Program Daerah Kabupaten Pekalongan
(1)	(2)	(3)
		Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (DINKES)
15.	PA. Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT / Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum / Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum (SETDA)
16.	PA. Pendampingan sertifikasi halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara gratis	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN / Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam / Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (SETDA) PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH / Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) / Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (BAPPERIDA)
17.	PA. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER / Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner / Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (DKPP)
18.	PA. Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK / Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Penyusunan Konten (DINKOMINFO)
19.	PA. Subsidi modal dan pendampingan UMKM 1 RT 1 kelompok UMKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) / Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan / Sub Kegiatan Perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM (DINKOP UKM NAKER)
20.	PA. Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG / Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (DPU TARU) PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) / Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (DINPERKIM LH)

No.	Program Daerah Provinsi Jawa Tengah	Program Daerah Kabupaten Pekalongan
(1)	(2)	(3)
21.	PA. Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI / Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (DINKOP UKM NAKER)
22.	PA. Meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan manajemen olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN / Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi / Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga (DINPORAPAR)
23.	PA. Pengembangan sekolah inklusif di setiap kecamatan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN / Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Menengah Pertama dan PAUD / Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (DINDIKBUD) PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH / Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia / Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (BAPPERIDA)
24.	PA. Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA / Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana / Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (BPBD)
25.	PT. Pemberdayaan masyarakat pesisir tambak ikan nila	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA / Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil / Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil (DINLUTKAN)
26.	PT. BUMDes Berdaya (kepastian hukum dan bantuan modal usaha setiap BUMDes di Jawa Tengah)	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT / Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (DINAS PMD)
27.	PT. Penguatan BPBD dan tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA / Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana / Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan

No.	Program Daerah Provinsi Jawa Tengah	Program Daerah Kabupaten Pekalongan
(1)	(2)	(3)
		Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota (BPBD)
28.	PT. Cek kesehatan gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT / Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (DINKES)
29.	PT. Perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL / Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial / Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga (DINSOS)
30.	PT. Peningkatan desa mandiri energi melalui pengembangan biogas, hidro, maupun tenaga surya	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN / Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam / Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH / Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) / Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (BAPPERIDA)
31.	PT. Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA / Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil / Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil (DINLUTKAN) PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN / Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian / Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa (DKPP)
32.	PT. Hilirisasi produk unggulan dengan semangat ekonomi hijau	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN / Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam / Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (SETDA) PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH / Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) / Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (BAPPERIDA)
33.	PA. Mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA /

No.	Program Daerah Provinsi Jawa Tengah	Program Daerah Kabupaten Pekalongan
(1)	(2)	(3)
	forum pembauran kebangsaan	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya / Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (BAKESBANGPOL)
34.	PT. Peningkatan operasional kader posyandu	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT / Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (DINKES) PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) / Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota (DP3APPKB)
35.	PT. Peningkatan kualitas hidup lansia	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT / Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (DINKES)

Sumber Analisis Penyusun, 2027

6. Inovasi Daerah dalam Pencapaian Target dan Sasaran Tahun 2027

a. *Participatory Poverty Assement* (PPA) sebagai bagian dari Laboratorium Kemiskinan

Inovasi laboratorium kemiskinan merupakan salah satu inovasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam upaya mengatasi masalah efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Laboratorium Kemiskinan diharapkan bisa mengatasi persoalan kemiskinan secara terpadu, tepat program, tepat sasaran serta tepat guna sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik warga miskin. Upaya tersebut dilakukan dengan memberdayakan masyarakat, membangun serta mengembangkan potensi dan sumber daya alam pada desa lokasi prioritas agar dapat tertuntaskan kemiskinannya. Substansi dari kekuatan konsep kemiskinan terdapat dua hal diantaranya:

- Menjadikan warga miskin sebagai subyek program yang harus dipahami dengan benar melalui analisis semua data tentang wilayah dengan segala potensinya dan masalah yang dialami warganya satu persatu *by name by address*;
- Konsep Laboratorium Kemiskinan melalui kolaborasi atau kerjasama antar pemerintah daerah dengan pemerintah desa, perguruan tinggi, swasta, dan unsur masyarakat lainnya yang disebut “Kolaborasi *Pentahelix*”.

Laboratorium Kemiskinan dalam tahapannya dimulai dengan menganalisis anggaran penanggulangan kemiskinan yang selama ini tersebar di setiap organisasi perangkat daerah serta mengelompokan data P3KE yang sekarang ini menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Proses ini sekaligus untuk menyamakan persepsi dan target dalam pelaksanaan program demi menghindari tumpang tindih program sekaligus mengawal efisiensi anggaran. Data ini digunakan dalam proses Laboratorium Kemiskinan dengan melibatkan warga miskin dalam kegiatan *Participatory Poverty Assement* (PPA). Melalui beberapa proses tersebut, diharapkan bisa menghasilkan *output* berupa formula kebijakan yang lebih menyentuh target dan mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Selanjutnya, implementasi kebijakan dilakukan melalui penetapan program dan kegiatan terpadu antar perangkat daerah serta lintas sektor, yang difokuskan pada desa-desa prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Penetapan desa prioritas didasarkan pada hasil analisis komparatif antara data P3KE tahun 2024 dan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2024, yang kemudian dirangking berdasarkan klasifikasi tingkat kesejahteraan. Dari hasil tersebut, ditetapkan 10 desa prioritas sesuai karakteristik wilayah pegunungan, perkotaan, dan pesisir. Perbedaan kondisi geografis antar wilayah di Kabupaten Pekalongan menjadi dasar dalam pemilihan desa lokus dalam perencanaan program Laboratorium Kemiskinan.

b. *Mobile Therapy* (Terapi Keliling)

Inovasi *Mobile Therapy* (Terapi Keliling) adalah pengembangan dari Program Rumah Terapi yang sudah ada sejak tahun 2024. Hingga saat ini, rumah terapi sudah melayani lebih dari 400 anak dengan disabilitas, yang terdiri dari kurang lebih 100 disabilitas fisik, 80 disabilitas intelektual, 70 disabilitas sensorik rungu wicara dan 150 disabilitas ganda. Inovasi ini sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada masyarakat rentan, yaitu anak-anak dengan disabilitas, sehingga *mobile therapy* ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak anak dengan disabilitas.



Gambar 4.6. Pemberian Terapi pada Anak dengan Disabilitas di Sekolah Inklusi melalui Mobile therapy

Layanan mobil terapi keliling merupakan bentuk pelayanan jemput bola. Mobil tersebut akan mendatangi lokasi dengan jumlah anak disabilitas terbanyak, termasuk di sekolah-sekolah inklusi melalui kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, sehingga mereka tidak perlu datang jauh ke ibu kota kabupaten. Program ini didukung oleh dana APBN dan APBD, kedepannya akan diupayakan juga mekanisme pendanaan dari sumber lain yang tidak mengikat seperti CSR, *Philantropy* serta masyarakat peduli melalui pendekatan kolaboratif integratif.

Tujuan dari inovasi ini adalah memastikan Pemerintah Kabupaten Pekalongan selalu hadir untuk mendukung anak-anak dengan disabilitas. Upaya ini dalam rangka mewujudkan Kabupaten Pekalongan menjadi daerah yang inklusif, ramah disabilitas, serta memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, kesempatan mereka untuk hidup lebih sejahtera akan terbuka luas dan dapat mengurangi angka kemiskinan dari disabilitas.
Terapi keliling ini menyediakan berbagai layanan antara lain layanan tenaga terapis, psikolog, serta peralatan terapi. Hal ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan agar tidak ada lagi anak-anak dengan disabilitas di Kabupaten Pekalongan yang belum bisa mendapatkan terapi karena alasan jarak atau biaya. Selain terapi bagi anak dengan disabilitas, *mobile therapy* ini juga memberikan layanan edukasi bagi para orang tua terkait tata cara perawatan dan pengasuhannya. Edukasi tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan kondisi anak-anak sehingga mereka bisa lebih mandiri dan dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga ingin mewujudkan fasilitas publik yang ramah disabilitas, salah satunya dilakukan dengan pembenahan kantor pemerintahan di Kabupaten Pekalongan agar lebih mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Di samping itu, *mobile theraphy* ini juga mendekatkan akses pemberian bantuan sosial, seperti alat bantu disabilitas berupa kursi roda, alat bantu dengar, kaki palsu, serta bantuan usaha ekonomi produktif dan bantuan hibah bagi Karang Taruna kepada para penerima bantuan sosial supaya lebih tepat sasaran.



Gambar 4.7. Pemberian Terapi oleh Therapis dari Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP) melalui Mobile Therapy

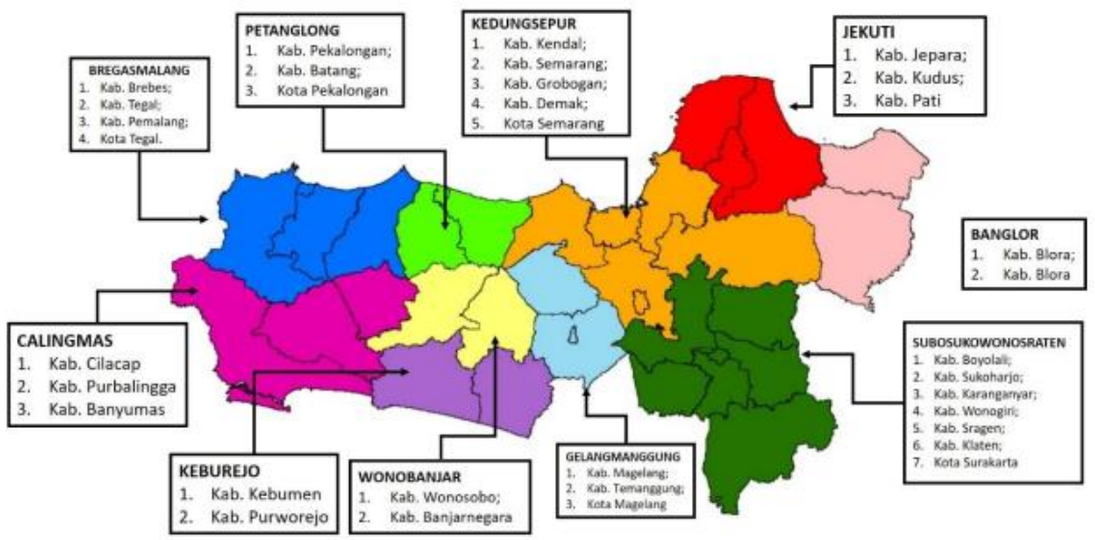
C. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kewilayahan

1. Kebijakan Pembangunan Berbasis Wilayah Pengembangan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Pembangunan wilayah di Jawa Tengah dibagi menjadi sepuluh (10) Wilayah Pengembangan (WP) dengan mempertimbangkan kesatuan geografis, karakteristik dan interaksi wilayah serta sistem permukiman. Pembagian wilayah pengembangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah yang dilihat dari tingkat kesejahteraan serta pertumbuhan ekonomi serta berfungsi untuk mengembangkan wilayah-wilayah yang masih berada pada performa pertumbuhan yang rendah dan mendorong kerja sama antar daerah yang saling menguntungkan pada berbagai sektor. Berdasarkan **Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun**

2024 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2044, berikut 10 (sepuluh) Wilayah Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah adalah:

a. WP Kedungsepur yang terdiri dari 6 (enam) kabupaten dan kota yaitu: Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, dan Kota Salatiga;
b. WP Jekuti yang terdiri dari 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Pati;
c. WP Banglor yang terdiri dari 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora;
d. WP Gelangmanggung yang terdiri dari 3 (tiga) kabupaten dan kota yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kota Magelang;
e. WP Wonobanjar yang terdiri dari 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara;
f. WP Keburejo yang terdiri dari 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo;
g. WP Calingmas yang terdiri dari 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Banyumas;
h. WP Subosukowonosraten yang terdiri dari 7 (tujuh) kabupaten dan kota yaitu Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Klaten, dan Kota Surakarta;
i. WP Bregasmalang yang terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan kota yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, dan Kota Tegal;
j. **WP Petanglong** yang terdiri dari 3 (tiga) kabupaten dan kota yaitu Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan



Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 4.8. Pembagian Wilayah Pengembangan Provinsi Jawa Tengah

a. Arahan Per Wilayah Pengembangan Petanglong

WP Petanglong berada di sisi utara Jawa Tengah dengan batas bagian utara berupa Laut Jawa yang berpusat di kawasan perkotaan Pekalongan meliputi Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan. WP Petanglong memiliki kesenjangan/disparitas rendah. Wilayah Pengembangan Petanglong berpusat di kawasan perkotaan Pekalongan meliputi Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan.

1). Potensi

a). Potensi Infrastruktur

- Jalan tol

- KITB
- Batang industrial park
- Pelabuhan perikanan Nusantara Pekalongan

b). Potensi Ekonomi

- Industri pengolahan
- Pertanian Perkebunan dan perikanan
- Pariwisata alam dan budaya

2). Sistem Perkotaan

- Pusat Kegiatan Wilayah Pekalongan
- Pusat Kegiatan Lokal Batang
- Pusat Kegiatan Lokal Gringsing
- Pusat Kegiatan Lokal Limpung
- Pusat Kegiatan Lokal Wiradesa
- Pusat Kegiatan Lokal Krajen
- Pusat Kegiatan Lokal Kedungwuni-Buaran

3). Arah Pengembangan

a). Menterpadukan pengembangan permukiman perkotaan Kota Pekalongan dan Kabupaten di sekitarnya;

b). mendorong Kerja Sama Antar Daerah dalam hal:

(1) pengembangan ekonomi Daerah yang saling menguntungkan;
(2) koordinasi dan pengelolaan pengembangan Kawasan Permukiman di perbatasan Kabupaten/Kota;
(3) penyediaan prasarana dan sarana di bidang transportasi, air minum, persampahan, drainase, dan pengelolaan limbah;
(4) penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kota Pekalongan dengan Kabupaten lain yang berbatasan;
(5) Pengelolaan dan pengembangan pariwisata; dan
(6) penanganan bencana dan Kawasan terdampak rob.

c). mendorong pengembangan wilayah dan prasarana Kawasan Industri Terpadu Batang dengan daerah sekitarnya;

d). pengembangan fasilitas logistik dalam rangka mendorong kemudahan pergerakan barang hasil industri;

e). pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir yang mengalami penurunan tanah dan peningkatan rob;

f). mengendalikan alih fungsi lahan sawah; pengelolaan limbah industri/ kerajinan batik; mengembangkan Pelabuhan Umum dan Pelabuhan Perikanan; dan

g). pengembangan industri pengolah hasil pertanian, kehutanan, perikanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam

4). Prioritas Pengembangan Provinsi

a). Pengembangan Ekowisata alam dan Wisata Belanja;

b). Pengembangan UMKM dan SDM pendukung industri pariwisata dan industri kreatif;

c). Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan Pelabuhan pengumpan regional di pesisir utara (Pelabuhan Batang) dalam mendukung KITB;

d). Mendorong pelabuhan perikanan samudera

e). Pengembangan Fasilitas Pendukung Kawasan Industri Terpadu Batang;

f). Pengembangan SDM pendukung sektor industri KITBatang;

g). Pengendalian Fungsi Lahan melalui Program Reforma Agraria dalam bentuk sertifikasi lahan pertanian LP2B serta peningkatan akses;

h). Pengembangan Industri Pengolahan Perkebunan, Pertanian, dan Perikanan;

i). Membangun link and match SMK/SMA sederajat dengan dunia industri;

j). Penanganan Jalan Provinsi di Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kota Pekalongan;
k). Inisiasi Pembangunan TPST Regional Petanglong.
l). Mendorong rehabilitasi lahan kritis untuk pemulihan daya dukung dan daya tampung DAS
m). Rehabilitasi, konservasi dan pemanfaatan ekowisata berkelanjutan ekosistem mangrove pantai Utara Jateng;
n). Rehabilitasi Daerah hulu petungkriyono;

5). Prioritas pengembangan kabupaten Kota

a). Pemberian kemudahan perizinan
b). Pemberian insentif dan disinsentif pada pemilik lahan pertanian serta petani;
c). Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan, Horti, dan Perikanan (Teh, Vanili, Kopi, Karet, Kakao, Cengkeh, Tebu);
d). Mendorong penyusunan dan penyelesaian RDTR

b. Target Kinerja Pembangunan Wilayah Petanglong

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya untuk melakukan intervensi terhadap pengembangan kabupaten/kota. Hal ini dilakukan untuk mencapai target perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Sehubungan dengan itu, diharapkan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dapat mendukung kinerja 4 (empat) capaian makro Provinsi Jawa Tengah yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi (PE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Persentase Penduduk Miskin, dengan target sebagai berikut.

Tabel 4.5.
Sasaran Kinerja IPM, Pertumbuhan Ekonomi, TPT, dan Tingkat Kemiskinan WP Petanglong Tahun 2027

No	Kabupaten/Kota	IPM	PE (%)	TPT (%)	KIN (%)
1.	Kab. Batang	72,70	8,10 - 9,55	4,50 - 3,90	7,00 - 6,70
2.	Kab. Pekalongan	74,10	6,00 - 7,85	3,00 - 2,70	7,02 - 6,70
3.	Kota Pekalongan	78,60	6,00 - 7,85	4,70 - 4,24	5,70 - 5,46

Sumber : Rancangan RKPD Provinsi Jawa Tengah 2027

2. Arah Kebijakan Kewilayahan berdasarkan RTRW Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040

Merupakan penetapan kawasan strategis wilayah yang meliputi :

a. Kawasan Strategis Provinsi di Daerah

1) Kawasan strategis provinsi di Daerah yaitu kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang berada di Kawasan Dataran Tinggi Dieng;
2) Pengembangan kawasan strategis provinsi di Daerah mengikuti kebijakan Pemerintah Provinsi disesuaikan perkembangan di Daerah.

b. Kawasan Strategis Daerah

1) Kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi, meliputi :

a) Kawasan strategis sepanjang koridor jalan arteri primer pantai utara (pantura) melalui Kecamatan Tirto - Kecamatan Wiradesa – Kecamatan Siwalan.

Kawasan strategis sepanjang koridor jalan arteri primer pantai utara (pantura) berperan mengoptimalkan peran koridor jalur pantura yang melalui Daerah sebagai koridor pertumbuhan ekonomi.

b) Kawasan agropolitan KRIDO TALUN ANYAR dengan komoditas unggulan tanaman hortikultura yang meliputi:
   1) Kecamatan Doro;
   2) Kecamatan Karanganyar;
   3) Kecamatan Petungkriyono; dan
   4) Kecamatan Talun.

   Kawasan strategis agropolitan KRIDO TALUN ANYAR berperan meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil komoditas hortikultura.

c) Kawasan strategis minapolitan SIWO TIRTO meliputi:
   (1) Kecamatan Siwalan;
   (2) Kecamatan Tirto; dan
   (3) Kecamatan Wonokerto.

   Kawasan strategis minapolitan SIWO TIRTO berperan meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil perikanan.

d) Kawasan strategis peruntukan industri Siwalan – Sragi dan Bojong – Wonopringgo.

   Kawasan strategis peruntukan industri Siwalan – Sragi dan Bojong – Wonopringgo berperan mendorong perkembangan investasi industri di daerah.

2) Kawasan strategis bidang sosial budaya

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi :

a) **Kawasan pariwisata**; dan

   Kawasan pariwisata berupa kawasan wisata Linggoasri di Kecamatan Kajen dan kawasan wisata Petungkriyono.

b) **Kawasan perbatasan**.

   Kawasan perbatasan meliputi :
   (1) Kawasan perbatasan Tirto - Kota Pekalongan;
   (2) Kawasan perbatasan Buaran – Kota Pekalongan;
   (3) Kawasan perbatasan Siwalan – Ulujami (Kabupaten Pemalang);
   (4) Kawasan perbatasan Kesesi – Bodeh (Kabupaten Pemalang);
   (5) Kawasan Perbatasan Talun – Wonotunggal (Kabupaten Batang); dan
   (6) Kawasan Perbatasan Paninggaran-Kalibening (Kab. Banjarnegara).

c. Kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

1) Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air, berupa kawasan imbuhan air tanah, meliputi:
   a) Kecamatan Doro;
   b) Kecamatan Kajen;
   c) Kecamatan Kandangserang;
   d) Kecamatan Karanganyar;
   e) Kecamatan Kesesi;
   f) Kecamatan Lebakbarang;
   g) Kecamatan Paninggaran;
   h) Kecamatan Petungkriyono; dan
   i) Kecamatan Talun.

2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro, berupa kawasan pelestarian mangrove dan tanah timbul di estuari Sungai, meliputi :
   a) Kecamatan Siwalan;
   b) Kecamatan Tirto; dan
   c) Kecamatan Wonokerto.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Indikasi rencana program Tahun 2027 berdasarkan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada Tahun 2027 dengan mempertimbangkan prioritas nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 guna mendukung pembangunan secara menyeluruh dapat dikelompokkan menjadi dalam **6 (enam)** urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, **18 (delapan belas)** urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, **6 (enam)** urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, **6 (enam)** unsur penunjang urusan pemerintahan, **1 (satu)** unsur pengawasan urusan pemerintahan, **1 (satu)** unsur kewilayahan dan **1 (satu)** unsur pemerintahan umum.

A. Kerangka Pendanaan Pembangunan Tahun 2027

Pada bab ini dicantumkan seluruh program baik yang bersifat strategis maupun operasional yang kinerjanya menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah, beserta indikator kinerja, pagu indikatif target kinerja. Program strategis (Program Pembangunan Daerah) menjadi tanggung jawab bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan, sedangkan program operasional murni menjadi tanggung jawab Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Seluruh program yang tercantum akan dimasukan dalam Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Perangkat Daerah.

Penganggaran program perangkat daerah, besarannya masing-masing memperhatikan hasil analisis kerangka pendanaan pembangunan daerah. Alokasi pendanaan dalam RPJMD ini bersifat indikatif, hal ini dimaksudkan bahwa kebutuhan pendanaan setiap tahun dapat berubah disesuaikan dengan perhitungan proyeksi pendapatan tahunan yang tingkat kepastiannya lebih tinggi dan memperhatikan situasi dan kondisi daerah yang berkembang pada tahun berkenaan.

Kerangka pendanaan pembangunan daerah yang akan menjadi dasar perhitungan alokasi anggaran masing-masing program dapat dilihat perinciannya pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2027

KODE				URAIAN	TARGET RKPD 2027
1				**PENDAPATAN DAERAH**	
1	**1**			**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**676.546.305.400**
1	1	1		Pajak Daerah	205.216.113.400
1	1	2		Retribusi Daerah	423.232.266.000
1	1	3		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	10.585.244.000
1	1	4		Lain - lain PAD yang Sah	37.512.682.000
1	**2**			**Pendapatan Transfer**	**1.704.035.407.660**
1	**2**	**1**		**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**	**1.370.644.724.000**
1	2	1	1	Dana Bagi Hasil	13.666.402.000
1	2	1	2	Dana Alokasi Umum - Tidak ditentukan penggunaannya	993.694.155.000
1	2	1	2	Dana Alokasi Umum - Ditentukan penggunaannya	23.450.986.000
1	2	1	3	Dana Alokasi Khusus - Fisik	1.245.742.000
1	2	1	4	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	338.587.439.000

KODE				URAIAN	TARGET RKPD 2027
1	**2**	**2**		**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**	**225.450.275.000**
1	2	2	1	Dana Insentif Daerah	0
1	2	2	4	Dana Desa	225.450.275.000
1	**2**	**3**		**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**107.940.408.660**
1	2	3	1	Dana Bagi Hasil	107.940.408.660
1	2	3	2	Bantuan Keuangan Lainnya	0
1	**3**			**Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**0**
1	3	1		Pendapatan Hibah	0
1	3	3		Pendapatan Lainnya	0
				JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**2.380.581.713.060**
2				**BELANJA DAERAH**	
2	**1**			**Belanja Operasi**	**1.740.636.703.063**
2	1	1		Belanja Pegawai	941.862.448.527
2	1	2		Belanja Barang dan Jasa	720.952.646.690
2	1	4		Belanja Bunga	1.698.750.000
2	1	5		Belanja Hibah	69.812.270.846
2	1	6		Belanja Bantuan Sosial	6.310.585.000
2	**2**			**Belanja Modal**	**263.574.045.997**
2	2	1		Belanja Modal Tanah	334.500.000
2	2	2		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.134.273.824
2	2	3		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68.212.350.215
2	2	4		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	145.794.325.440
2	2	5		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.853.487.748
2	2	6		Belanja Modal Aset Lainnya	245.108.770
2	**3**			**Belanja Tidak Terduga**	**5.000.000.000**
2	**3**	1		Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000
2	**4**			**Belanja Transfer**	**361.370.964.000**
2	4	1		Belanja Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	19.650.689.000
2	4	2		Belanja Bantuan Keuangan	341.720.275.000
				JUMLAH BELANJA DAERAH	**2.370.581.713.060**
				SURPLUS / (DEFISIT) BELANJA DAERAH	**10.000.000.000**
4				**PEMBIAYAAN DAERAH**	
4	**1**			**Penerimaan Pembiayaan**	
4	1	1	1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)	20.000.000.000
4	1	0	2	Pencairan Dana Cadangan	-
4	1	0	3	Pinjaman Daerah dari LKB	-
				JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000
4	2			**Pengeluaran Pembiayaan**	
4	2	0	1	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	30.000.000.000
4	2	0	2	Penyertaan Modal Daerah	0
				JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000
				PEMBIAYAAN NETTO	-10.000.000.000
				Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0

Sumber : BPKD Kab. Pekalongan; 2026 (data diolah)

Mendasarkan kerangka pendanaan tersebut, dijabarkan dalam rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas di seluruh Perangkat Daerah yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2026. Adapun pendanaan masing-masing Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2
Kerangka Pendanaan
Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2027

No	Perangkat Daerah	Jumlah			Anggaran (Rp)
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	17	75	751.004.276.213,00
2	Dinas Kesehatan	5	17	111	626.052.578.692,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14	24	62	178.095.327.003,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	13	27	74	36.867.240.000,00
5	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran	3	12	43	16.236.459.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	8	26	4.522.693.000,00
7	Dinas Sosial	7	16	62	6.205.337.750,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8	21	52	14.889.466.000,00
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	9	21	44	17.664.568.000,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	17	30	7.400.007.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	10	37	9.608.270.000,00
12	Dinas Perhubungan	2	14	31	42.037.003.000,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	13	35	8.467.334.000,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	10	19	37	9.772.452.107,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	11	25	3.885.322.000,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	7	17	38	9.991.965.360,00
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6	17	31	6.098.481.500,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	5	16	36	6.018.856.000,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10	18	37	12.996.378.980,00
20	Sekretariat Daerah	3	19	60	45.041.063.000,00
21	Sekretariat DPRD	2	18	57	59.748.106.918,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	4	14	33	11.114.124.000,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	4	14	60	399.363.962.000,00
24	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	12	30	6.861.353.250,00
25	Inspektorat	3	11	32	10.180.773.500,00
26	Kecamatan Kajen	6	13	31	4.033.281.000,00
27	Kecamatan Sragi	6	11	24	3.740.514.730,00
28	Kecamatan Wiradesa	6	13	37	9.264.133.000,00
29	Kecamatan Kedungwuni	6	13	29	7.218.487.600,00
30	Kecamatan Buaran	6	14	31	5.877.404.540,00

No	Perangkat Daerah	Jumlah			Anggaran (Rp)
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31	Kecamatan Tirto	6	12	22	2.553.275.000,00
32	Kecamatan Bojong	6	10	22	2.758.227.500,00
33	Kecamatan Wonopringgo	5	10	22	1.867.869.000,00
34	Kecamatan Karanganyar	6	13	25	2.342.617.000,00
35	Kecamatan Doro	6	14	23	2.599.918.000,00
36	Kecamatan Talun	6	11	24	2.115.474.500,00
37	Kecamatan Lebakbarang	6	11	21	2.603.903.500,00
38	Kecamatan Kandangserang	6	11	22	2.385.948.217,00
39	Kecamatan Paninggaran	6	11	23	2.380.734.500,00
40	Kecamatan Kesesi	6	12	27	2.556.407.000,00
41	Kecamatan Petungkriyono	6	11	20	2.427.596.800,00
42	Kecamatan Wonokerto	6	10	22	2.914.374.900,00
43	Kecamatan Siwalan	6	12	25	2.671.536.500,00
44	Kecamatan Karangdadap	6	11	23	2.571.908.000,00
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	12	25	5.574.703.500,00
	TOTAL BELANJA				**2.370.581.713.060**

B. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2027

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 - 2030 dijabarkan dalam **6 (enam)** urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, **18 (delapan belas)** urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, **6 (enam)** urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, **6 (enam)** unsur penunjang urusan pemerintahan, **1 (satu)** unsur pengawasan urusan pemerintahan, **1 (satu)** unsur kewilayahan dan **1 (satu)** unsur pemerintahan umum. Selengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program prioritas urusan pendidikan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan PAUD, pengelolaan pendidikan SD, pengelolaan pendidikan SMP dan pengelolaan pendidikan non formal/kesetaraan.

b. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini pada pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal/kesetaraan.

c. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas bahasa dan sastra melalui penelitian, pembakuan, dan pengembangan materi pembelajaran.

2. Kesehatan

Rencana program prioritas urusan kesehatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan, peningkatan kemitraan dengan perguruan tinggi untuk penanganan kesehatan prioritas dan penguatan implementasi perencanaan kebutuhan dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan.

b. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
Program ini diarahkan pada peningkatan akses, kemandirian dan mutu kefarmasian serta alat kesehatan; serta pembinaan pengawasan industri farmasi.

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Program ini diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan; memperkuat jejaring kemitraan dan peran serta masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesehatan, serta pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka promotif preventif serta pelaksanaan program pemeriksaan spesialis keliling (spelling) di Masyarakat.

d. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Program ini diarahkan pada peningkatan mutu fasilitas pelayanan Kesehatan lanjutan dan primer sesuai standar; deteksi dini bagi ibu hamil, bayi baru lahir, usia remaja, usia produktif dan lansia; peningkatan posyandu siklus hidup yang aktif; pemberian PMT bagi balita *wasting, underweight, stunting* dan ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK); pemberian suplemen bagi ibu hamil anemia dan lansia; peningkatan implementasi kesehatan kerja di sektor formal dan informal; pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi balita, anak usia sekolah, usia dewasa dan lansia; deteksi dini penyakit tidak menular prioritas (hipertensi, diabetes melitus, kanker); skrining narkoba untuk pengemudi, anak sekolah, dan ASN Pemerintah Kabupaten Pekalongan; peningkatan penemuan dan pengobatan penyakit menular (TB, HIV, Malaria); pengawasan kualitas air dan udara; peningkatan implementasi STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) 5 pilar; pengadaan obat, BHP, BMHP di RSUD/Puskesmas milik Dinas Kesehatan; pengintegrasian sistem kesehatan nasional; peningkatan cakupan imunisasi lengkap 14 antigen dan imunisasi rutin lengkap; peningkatan cakupan kepesertaan aktif jaminan pembiayaan kesehatan; penguatan kluster kesehatan dalam penanggulangan dampak krisis kesehatan dan penanganan gizi saat bencana, serta pengembangan sarana dan prasarana di RSUD/Puskesmas milik Dinas Kesehatan.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Program ini diarahkan pada pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder kewenangan Kabupaten Pekalongan serta pengelolaan bangunan pengaman wilayah sungai. Pengelolaan sistem irigasi ditujukan untuk penyediaan air irigasi untuk mendukung produksi pangan. Pengelolaan bangunan pengaman wilayah sungai terutama untuk pengendalian dan perlindungan/pengamanan infrastruktur dan permukiman sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana banjir dan tanah longsor.

b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Program ini diarahkan pada pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk peningkatan akses air minum bagi rumah tangga di Kabupaten Pekalongan, terutama air minum perpipaan baik pedesaan maupun perkotaan guna pemenuhan layanan dasar air minum.

c. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
Program ini diarahkan pada pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui penyediaan prasarana dan sarana persampahan untuk meningkatkan kinerja pelayanan persampahan.

d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Program ini diarahkan pada pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik (SPALD) untuk peningkatan akses air limbah bagi rumah tangga di Kabupaten Pekalongan,

terutama pelayanan air limbah (individu dan komunal) dan layanan lumpur tinja, sebagai upaya pemenuhan layanan dasar air limbah.

e. **Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase**
Program ini diarahkan pada pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota untuk penyehatan lingkungan, pencegahan timbulnya genangan dan atau banjir, serta pengamanan infrastruktur jalan. Pengelolaan dan pengembangan sistem dilaksanakan melalui perencanaan, pembangunan, serta operasi dan pemeliharaan drainase perkotaan dan lingkungan.

f. **Program Penataan Bangunan Gedung**
Program ini diarahkan pada penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah kabupaten/kota, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Penyelenggaraan bangunan gedung dilaksanakan antara lain melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan, pemeliharaan dan perawatan, serta rehabilitasi dan renovasi bangunan gedung milik pemerintah untuk meningkatkan keandalan dan kelayakan bangunan, dan mendukung pelayanan publik.

g. **Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya**
Program ini diarahkan pada penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Kabupaten/Kota, melalui penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan, dan penataan bangunan dan lingkungan.

h. **Program Penyelenggaraan Jalan**
Program ini diarahkan pada pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk meningkatkan kualitas jalan dan jembatan, terutama jalan dan jembatan penghubung pusat kegiatan masyarakat, penghubung obyek wisata, penghubung pada fasilitas sosial/fasilitas umum, serta penghubung antar wilayah.

i. **Program Pengembangan Jasa Konstruksi**
Program ini diarahkan pada pembinaan SDM jasa konstruksi melalui penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi

j. **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**
Program ini diarahkan pada penetapan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang, koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang, dan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian tata ruang.

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas urusan perumahan dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. **Program Pengembangan Perumahan**
Program ini diarahkan pada kegiatan-kegiatan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal perumahan, meliputi antara lain pendataan, sosialisasi dan persiapan, pembangunan dan rehabilitasi, serta distribusi dan serah terima penyediaan dan rehabilitas rumah bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota.

b. **Program Kawasan Permukiman**
Program ini diarahkan pada penataan dan peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh kewenangan Kabupaten/kota

c. **Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh**
Program ini diarahkan pada penataan dan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana sarana permukiman, dan penyusunan dokumen pembangunan prasarana sarana utilitas umum perumahan.

e. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan dalam upaya mewujudkan optimalnya perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan lingkup perumahan dan Kawasan permukiman serta pertanahan melalui penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan data, penyusunan kebijakan dan strategi serta upaya pembinaan dan pengendalian program.

5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan, penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat.

b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada peningkatan keterjangkauan pelayanan pencegahan penanggulangan dan penyelamatan korban kebakaran dan non kebakaran.

c. Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada peningkatan Pencegahan Mitigasi Bencana, Penanganan Bencana dan pengoptimalan Sistem Penanggulangan Bencana.

6. Sosial

Rencana program prioritas urusan sosial yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas Potensi Sosial Kesejahteraan Sosial (PSKS).

b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini diarahkan pada fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal.

c. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada optimalisasi dalam penanganan rehabilitasi sosial untuk PPKS. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia, terlantar, dan gelandangan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.

d. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada optimalisasi perlindungan jaminan sosial untuk PPKS.

e. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada optimalisasi penanganan Korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota.

f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan pada optimalisasi pengelolaan makam pahlawan.

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program prioritas urusan tenaga kerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja. Program ini dilakukan untuk mendukung peningkatan SDM tenaga kerja**.**

b. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada meningkatnya kesempatan kerja di Kabupaten Pekalongan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase lowongan kerja yang terpenuhi

c. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada optimalnya kerjasama kelembagaan Tripartit dan Bipartit. Program ini dilaksanakan untuk mewujudkan Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten; dan pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten/kota; serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak; serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

Program ini diarahkan pada pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak.

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada pelembagaan pemenuhan hak anak pada Lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha; serta penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak.

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten/kota; serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi anak korban kekerasan.

3. Pangan

Rencana program prioritas urusan pangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Pekalongan.

b. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada upaya untuk lancarnya akses pangan bagi daerah rawan pangan di Kabupaten Pekalongan.

c. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan pengawasan keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat.

4. Pertanahan

Rencana program prioritas urusan pertanahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini diarahkan pada fasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan lingkup kabupaten/kota**.**

b. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee

Program ini diarahkan pada upaya untuk menyediakan ganti kerugian yang adil dan layak kepada pemilik tanah yang terdampak Pembangunan.

c. Program Penatagunaan Tanah

Program ini diarahkan pada upaya untuk mengatur penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara optimal, seimbang, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang.

5. Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas urusan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup seperti penyusunan dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD), serta fasilitasi dan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten/kota.

b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada pengendalian dan pencemaran kualitas air dan udara melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara ambient, serta dalam rangka penguatan sinergi implementasi Pembangunan rendah karbon dan peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada Lokasi super prioritas kerentanan iklim.

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini diarahkan pada pengelolaan keanekaragaman hayati melalui penanganan Ruang Terbuka Hijau/RTH.

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan pengelolaan limbah B3

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan melalui peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, serta fasilitasi penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan, Upaya Pemantauan Lingkungan/UKL-UPL, Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup/DELH, Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup/DPLH, dan dokumen lingkungan lainnya).

f. **Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**
Program ini diarahkan pada peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan

g. **Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**
Program ini diarahkan untuk memberikan apresiasi dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

h. **Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**
Program ini diarahkan pada penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)

i. **Program Pengelolaan Persampahan**
Program ini diarahkan pada penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana persampahan dan fasilitasi sarpras pengelolaan sampah kepada kelompok masyarakat.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program prioritas urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. **Program Pendaftaran Penduduk**
Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk untuk meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan.

b. **Program Pencatatan Sipil**
Program ini diarahkan pada peningkatan layanan pencatatan sipil.

c. **Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan dalam rangka meningkatkan pengelolaan data kependudukan yang efektif dan efisien serta bisa menjadi dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

d. **Program Pengelolaan Profil Kependudukan**
Program ini diarahkan pada pengelolaan data kependudukan secara efisien, memastikan validitas data, serta menggunakan data kependudukan secara efektif untuk mendukung pengambilan Keputusan dan perumusan kebijakan oleh pemerintah maupun pihak terkait lainnya.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. **Program Penataan Desa**
Program ini dilaksanakan dalam upaya mendorong untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa melalui kegiatan fasilitasi penatausahaan penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa dan desa adat

b. **Program Peningkatan Kerja Sama Desa**
Program ini diarahkan pada optimalisasi kerjasama antar desa yang dapat meningkatkan ekonomi di Masyarakat.

c. **Program Administrasi Pemerintahan Desa**
Program ini diarahkan pada optimalisasi tata kelola administrasi pemerintah desa melalui peningkatan pengelolaan keuangan dan asset desa, peningkatan kapasitas aparatur desa.

d. **Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**
Program ini diarahkan pada upaya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, penguatan lembaga kemasyarakatan, penguatan sinergi peran

pendamping masyarakat antarsektor, serta pengembangan BUMDes dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat di desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana; pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan layanan dan pembinaan kesertaan KB.

c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada pengelolaan pelaksanaan program pembangunan keluarga; serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi.

9. Perhubungan

Rencana program prioritas urusan perhubungan yang akan dilaksanakan melalui **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).** Program ini diarahkan pada pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota, penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan, pengujian berkala kendaraan bermotor, penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota, pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas urusan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan akan layanan informasi dan komunikasi baik terutama antar perangkat daerah melalui layanan jaringan intra, layanan pengaduan, dan layanan data center.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada upaya sinergi dan integrasi aplikasi seperti melalui pemakaian aplikasi berbagi pakai dan bimbingan pengembangan aplikasi yang terpadu untuk mendukung perwujudan *smart city*.

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Rencana program prioritas urusan koperasi, usaha kecil dan menengah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas pengurus/pengelola koperasi dalam hal tata kelola dan akuntabilitas baik koperasi simpan pinjam maupun koperasi sektor riil, serta pemeriksaan dan pengawasan koperasi dalam rangka peningkatan kepatuhan koperasi dan peningkatan kualitas pengelolaan koperasi dalam aspek koperasi bagi koperasi simpan pinjam serta unit simpan pinjam di Kabupaten Pekalongan.

b. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kelembagaan, perluasan akses pembiayaan, penguatan faktor produksi, serta pengembangan jaringan pemasaran dan kerjasama antarkoperasi dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas koperasi.

c. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha mikro kecil melalui layanan pendampingan usaha, kemitraan usaha, sertifikasi produk dan legalitas usaha, peningkatan literasi keuangan dalam perluasan akses pembiayaan serta penumbuhan jiwa wirausaha.

d. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada penguatan kapasitas produksi melalui penerapan sistem manajemen modern, peningkatan kualitas dan kapasitas produksi, peningkatan partisipasi UMKM dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah, serta pengembangan akses pemasaran bagi produk-produk unggulan daerah lewat berbagai promosi dan pameran.

12. Penanaman Modal

Rencana program prioritas urusan penanaman modal yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan kebijakan penanaman modal, penyusunan peta potensi dan peluang usaha yang berkualitas, dan dukungan kemudahan dan fasilitas untuk kemudahan berusaha.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan promosi peluang dan potensi di Kabupaten Pekalongan dengan dukungan strategi promosi yang menyesuaikan perkembangan dunia usaha, pengawalan kepeminatan berusaha hingga terjadi realisasi penanaman modal, dan memfasilitasi kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu, pemantauan pemenuhan komitmen perizinan, fasilitasi penyelesaian pengaduan, serta peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana pelayanan

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan melakukan koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.

e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pengembangan aplikasi sistem informasi, pengelolaan data dan informasi, serta publikasi data dan informasi penanaman modal.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program prioritas urusan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan.

b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada peningkatan daya saing olahraga.

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini diarahkan pada peningkatan kegiatan kepramukaan di Kabupaten Pekalongan.

14. Statistik

Rencana program prioritas urusan statistik yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral,** yang diarahkan pada perwujudan big data melalui penerapan portal data menuju layanan data terbuka.

15. Persandian

Rencana program prioritas urusan persandian yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi,** yang diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi digital yang dimiliki oleh pemerintah baik yang ada di aplikasi maupun yang ada di pusat data**.**

16. Kebudayaan

Rencana program prioritas urusan kebudayaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada pengembangan kebudayaan melalui pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan lembaga kebudayaan.

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diarahkan pada pembinaan kesenian kepada masyarakat berupa fasilitasi ruang ekspresi budaya dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesenian.

c. Program Pembinaan Sejarah

Program ini diarahkan pada pelestarian sejarah lokal.

d. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan pada peningkatan pelindungan, pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya.

17. Perpustakaan

Rencana program prioritas urusan perpustakaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP), serta peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum Kabupaten PeKalongan.

b. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno

Program ini diarahkan pada peningkatan koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan umum Kabupaten Pekalongan.

18. Kearsipan

Rencana program prioritas urusan kearsipan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan pada peningkatan dalam pengelolaan arsip sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK). Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase perangkat daerah yang menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK).

b. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan dan penyelamatan Arsip**.**

c. Program Perizinan Penggunaan Arsip

Program ini diarahkan untuk mengatur akses dan penggunaan arsip, khususnya arsip yang bersifat tertutup atau memiliki keterbatasan akses. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa arsip hanya dapat diakses oleh pihak yang berhak dan untuk kepentingan yang sesuai, serta menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi yang terkandung dalam arsip.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan Dan Perikanan

Rencana program prioritas urusan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Program ini diarahkan pada upaya untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Pekalongan.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan produksi perikanan budidaya di Kabupaten Pekalongan.

c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
Program ini diarahkan pada terlaksananya pengawasan sumber daya perikanan guna menjaga kelestarian ekosistem perikanan.

d. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
Program ini diarahkan pada meningkatnya produksi olahan hasil perikanan.

2. Pariwisata

Rencana program prioritas urusan pariwisata yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan daya tarik wisata kabupaten; kegiatan pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten sebagai upaya peningkatan kunjungan wisatawan.

b. Program Pemasaran Pariwisata
Program ini diarahkan pada kegiatan pemasaran pariwisata ke dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis provinsi melalui penguatan promosi dan fasilitasi event.

c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan; pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui antara lain pelatihan/bimtek peningkatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif, serta fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif.

3. Pertanian

Rencana program prioritas urusan pertanian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
Program ini diarahkan pada penguatan intensifikasi produksi komoditas pangan pertanian untuk peningkatan produktivitas

b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Program ini diarahkan pada penyediaan dan pengembangan prasarana utama dalam produksi pertanian di Kabupaten Pekalongan.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Program ini diarahkan pada upaya pengendalian dan pemantauan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner untuk menjamin menurunnya angka kejadian penyakit hewan dan keamanan produk hasil hewan.

d. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman/OPT tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura; pengawasan mutu, penyediaan, dan peredaran benih tanaman melalui perbanyakan benih padi dan revitalisasi kebun benih; serta perbanyakan/pengembangan benih buah-buahan dan sayuran.

e. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pendampingan dan penyuluhan kepada petani, peningkatan kapasitas kelompok dan pengembangan kemitraan usaha, serta peningkatan SDM penyuluh. Program ini juga diarahkan pada kegiatan pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi peternak, peningkatan kapasitas SDM peternak.

4. Perdagangan

Rencana program prioritas urusan perdagangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini bertujuan untuk memudahkan pelaku usaha dalam memulai dan menjalankan bisnis yang terkait dengan *Online Single Submission (OSS).*

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini berfokus pada upaya mengoptimalkan dan meningkatkan jumlah dan kualitas sarana distribusi perdagangan terutama pasar yang berada di Kabupaten Pekalongan.

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Program ini difokuskan untuk terwujudnya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kabupaten Pekalongan**.**

d. Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan pada upaya pembinaan pelaku usaha ekspor komoditas unggulan di Kabupaten Pekalongan.

e. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Program ini mendukung terwujudnya standardisasi produk dan perlindungan konsumen terutama terkait dengan alat ukur takar timbang.

f. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini diarahkan pada upaya untuk meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk-produk yang diproduksi di dalam negeri. Program ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.

5. Perindustrian

Rencana program prioritas urusan perindustrian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Program ini diharapkan mampu mendorong produktivitas sektor industri melalui pengembangan SDM, sarana prasarana dan perluasan pasar produk hasil industri. Program ini diarahkan pada penyusunan, penerapan, dan evaluasi rencana pembangunan industri di Kabupaten Pekalongan melalui peningkatan SDM industri melalui pelatihan berkelanjutan, fasilitasi sarana produksi bagi kelompok industri, peningkatan pemasaran produk melalui pemasaran online/offline dan jejaring kemitraan, serta peningkatan mutu produk melalui pendampingan bagi IKM.

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Program ini diarahkan pada upaya pengendalian izin usaha industri sehingga perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan sistem informasi industri nasional sehingga dapat diperoleh data industri yang handal dan berkualitas.

6. Transmigrasi

Rencana program prioritas urusan transmigrasi yang akan dilaksanakan adalah **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**, yang diarahkan pada penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

melalui koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi antar pemerintah daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan pada Fasilitasi dan kebijakan pelaksanaan Otonomi Daerah dan kelancaran pelaksanaan tugas lain yang berkaitan dengan penyusunan produk hukum daerah, kewilayahan, kerjasama daerah dan keagamaan.

b. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada fasilitasi dan kebijakan terkait dengan pelaksanaan tugas dalam rangka menyelesaikan permasalahan perekonomian, pembangunan dan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

c. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan administrasi dan pelayanan kedinasan pimpinan daerah

2. Sekretariat DPRD

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat DPRD yang akan dilaksanakan adalah **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**. Program ini diarahkan pada kegiatan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, pelaksanaan dan pengawasan kode etik, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan

kapasitas DPRD, fasilitasi tugas pimpinan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, serta pembahasan kerjasama daerah

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program prioritas pada unsur perencanaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pendanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, serta analisis data dan informasi bidang perencanaan pembangunan daerah.

b. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keselarasan, kesesuaian, dan keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; keselarasan, kesesuaian, dan keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja lingkup bidang perekonomian dan SDA; keselarasan, kesesuaian, dan keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan. Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam), dan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan.

2. Keuangan

Rencana program prioritas pada unsur keuangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen evaluasi APBD, penyusunan dokumen belanja transfer dan belanja tidak terduga, penyusunan dokumen rencana anggaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penyusunan dokumen manajemen kas, serta penyusunan dokumen laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan jumlah aset yang dimanfaatkan untuk menghasilkan PAD, pengamanan aset, peningkatan penyelesaian kasus/sengketa aset daerah, penyusunan laporan barang milik daerah tepat waktu, serta penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah sesuai peraturan perundangan-undangan.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan pada optimalisasi pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Kepegawaian

Rencana program prioritas unsur kepegawaian yang akan dilaksanakan adalah **Program Kepegawaian Daerah**, yang diarahkan dalam rangka mewujudkan distribusi ASN yang tepat dan akuntabel serta memberikan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi dengan sistem informasi melalui Upaya pengadaan sesuai kebutuhan, pengembangan kompetensi ASN selaras dengan tujuan pembangunan daerah, promosi dan mutasi berdasarkan kompetensi, penilaian dan evaluasi kinerja yang transparan dan akuntabel, pemberhentian ASN, serta menyediakan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program prioritas unsur pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan adalah **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**, yang diarahkan pada pengembangan kompetensi teknis dan manajerial yang komprehensif bagi ASN termasuk pemerintah desa ditandai dengan penjaminan mutu dan tersertifikasi untuk mengurangi kesenjangan kompetensi ASN.

5. Penelitian Dan Pengembangan

Rencana program prioritas pada unsur penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan adalah **Program Riset Dan Inovasi Daerah,** yang diarahkan pada kegiatan penyusunan kajian kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan riset dan inovasi, fasilitasi kerjasama dan kemitraan riset dan inovasi, serta fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur riset dan inovasi.

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (Inspektorat Daerah)

Rencana program prioritas pada unsur pengawasan di **Inspektorat Daerah** yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini dilaksanakan dalam rangka pengawasan internal pemerintah pada kinerja pengawasan terhadap tata kelola, kepatuhan dan efektivitas tindak lanjut pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja perangkat daerah, akuntabilitas keuangan daerah, serta pengawasan dengan tujuan tertentu

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Program ini diarahkan dalam rangka peningkatan kualitas kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; melaksanakan pendampingan dan asistensi kepada

perangkat daerah terkait Reformasi Birokrasi, Manajemen Risiko, penguatan integritas serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

G. Unsur Kewilayahan (Kecamatan)

Rencana program prioritas pada unsur kewilayahan di **19 (Sembilan belas) Kecamatan** yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**
   Program ini diarahkan pada aktivitas pelayanan masyarakat di Kecamatan dan pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepada pemerintah Kecamatan.
2. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**
   Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan di kecamatan.
3. **Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**
   Program ini diarahkan pada koordinasi penanganan laporan kejadian, gangguan kamtibmas dan bencana alam di Kecamatan.
4. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**
   Program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang berkaitan dengan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa, kerukunan nasional, penanganan konflik sosial, serta koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan di daerah
5. **Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
   Program ini diarahkan pada fasilitasi penyusunan administrasi pemerintah desa dan disiplin aparatur pemerintah desa.

H. Unsur Pemerintahan Umum

Rencana program prioritas pada unsur pemerintahan umum (Kesatuan Bangsa Dan Politik) yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. **Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**
   Program ini diarahkan pada upaya memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan guna meningkatkan kenyamanan, toleransi dan kerukunan hidup berbangsa dan beragama di masyarakat.
b. **Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**
   Program ini diarahkan pada upaya menumbuh kembangkan etika dan budaya politik serta kesadaran berdemokrasi masyarakat melalui pendidikan politik dengan melibatkan peran para *stakeholder*.
c. **Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**
   Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.
d. **Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya**
   Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi dan peningkatan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam rangka mitigasi potensi konflik yang disebabkan permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya.
e. **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**
   Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi tentang kewaspadaan nasional dan meningkatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam meminimalisasi konflik dan penanganan konflik sosial kepada masyarakat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan program penunjang urusan pemerintahan yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

A. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator kinerja daerah disusun untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran RPJMD. Indikator ini menjadi alat ukur untuk mengetahui ketercapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029.

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten sesuai dengan kewenangan. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Pekalongan dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan disajikan pada tabel berikut.

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan pemerintahan yang baik adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan IKU sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, oleh karena itu, Indikator Kinerja Daerah juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2030

No.			Satuan	Baseline		Target Kinerja		Kondisi Akhir RPJMD
				2024	2025	2026	2027	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(11)
1.		Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,61	3,69	3,71	3,76	3,91
2.	IUP.1	Tingkat Kemiskinan	%	8,95	8,05	8,00-7,50	7,02-6,70	6,97-6,00
3.	IUP.56	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Bank Dunia	%	20,43	20,98	33,19	34,71	39,25
4.		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,96	92,98*	93,00	93,10	93,22
5.		Rasio Gini	Indeks	0,327	0,334	0,285	0,264	0,200

Sumber : Bapperida, BPS Kab. Pekalongan; data diolah 2025

2. INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)

Indikator Kinerja Daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2030, yang merupakan seluruh indikator tujuan dan sasaran pencapaian misi, serta IKU PD.

Indikator Kinerja Daerah juga merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Indikator ini dirancang sebagai panduan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks ini, indikator kinerja tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyajian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan suatu kondisi indikator makro ekonomi dan sosial. Indikator pada aspek Pelayanan Umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan, baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) terhadap capaian penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2030 tertuang pada tabel berikut.

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2030

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Baseline		Target Tahun		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
				2024	2025	2026	2027		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(11)	(12)
A.	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**								
	1. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan								
1.	IUP.3	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	80,64	74,99	77,27	79,54	83,66	Pangan
2.	IUP.2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	5,54	5,47	5,20	4,81	3,07	Pangan
3.		Konsumsi Listrik Perkapita	Mwh/jiwa	0,57	0,58	0,58	0,58	0,57	Pemerintah Daerah
4.	IUP.44	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	0,00	60,3822	80,06-83,25	80,07-84,25	80,10-87,25	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2. Lingkungan Hidup Berkualitas								
5.	IUP.46	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	60,90	72,12	72,20	72,50	71,19	Lingkungan Hidup
6.	IUP.43	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	8,73	62,225	65,80	66,76	69,63	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.	IUP.47	Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	4,01	25,94	26,20	26,50	30,00	Lingkungan Hidup
	3. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim								
8.	IUP.49	Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TonCOzeq	21.317,24	41.840,36	1.608.653,70	3.058.615,03	7.408.499,02	Pemerintah Daerah
9.	IUP.48	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	131,25	102,14	105,00- 100,00	100,00 - 99,00	118,98 - 115,83	Pemerintah Daerah
B.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
	1. Aspek Kesejahteraan Ekonomi								
10.		Pertumbuhan Ekonomi	%	5,02	5,88	5,85-6,10	6,00-7,85	7,40-8,40	Pemerintah Daerah
11.		Kemiskinan Ekstrem	%	0,51	0,510*	0,505	0,500	0,485	Pemerintah Daerah
12.	IUP.36	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,30	3,24	3,05-2,75	3,00-2,70	2,81-2,50	Pemerintah Daerah

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Baseline		Target Tahun		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
				2024	2025	2026	2027		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(11)	(12)
13.		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,95	72,71	73,00	74,10	73,80	Pemerintah Daerah
	2. Kesehatan Untuk Semua								
14.	IUP.4	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,25	74,59	74,69	74,91	75,72	Kesehatan
15.	IUP.6	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (SSGI)	%	19,50	19,5	17.00	16.00	13.00	Kesehatan
16.	IUP.5	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	18,00	13,00	17,00	17,00	16,00	Kesehatan
17.	IUP.7	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis *(treatment coverage)*	%	85,40	94,8206	96,00	97,00	100,00	Kesehatan
18.	IUP.8	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis *(treatment success rate)*	%	90,00	91,4035	92,00	93,00	96,00	Kesehatan
	3. Pendidikan Berkualitas dan Merata								
19.	IUP.10	Literasi Membaca SD/Sederajat	%	63,82	78,4	79,00	79,18	63,82	Pendidikan
20.	IUP.10	Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	56,09	84,76	85,00	85,20	56,09	Pendidikan
21.	IUP.10	Numerasi SD/Sederajat	%	48,44	77,17	77,50	77,67	48,44	Pendidikan
22.	IUP.10	Numerasi SMP/Sederajat	%	32,83	80,4	80,88	80,91	32,83	Pendidikan
23.	IUP.11	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	7,48	7,50	7,52	7,55	8,41	Pendidikan
24.	IUP.12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,46	12,63	13,35	13,50	13,94	Pendidikan
25.	IUP.14	Angka Partisipasi Sekolah 5 - 6 tahun	%	88,60	90	91,89	92,31	93,60	Pendidikan
26.	IUP.13	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	6,68	6,89	7,27	7,55	8,41	Pemerintah daerah
27.	IUP.15	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	n/a	65	60-65	60-65	65-70	Pendidikan
28.	IUP.19	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	%	0.09	0.09	0.16	0.30	0.73	Perpustakaan
	4. Perlindungan Sosial yang Adaptif								
29.	IUP.9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	98,14	100,39	100	100	80,40	Kesehatan
30.	IUP.38	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	27,52	29,35	29.40	29.45	27.80	Tenaga Kerja
	5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju								
31.	IUP.16	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak	%	1,80	18,27	19,03	19,80	22,08	Kebudayaan

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Baseline		Target Tahun		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
				2024	2025	2026	2027		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(11)	(12)
		Benda (WBTB) yang dilestarikan							
32.	IUP.17	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah	Orang	62.000	200.000	10.0000-200.000	10.0000-200.000	10.0000-200.000	Kebudayaan
33.	IUP.18	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	n/a	100	18,40	18,65	19,88	Kebudayaan
34.	IUP. 20	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif								
35.	IUP.21	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Indeks	65,05	72,3	70,10 - 73,00	73,00 - 74,00	69,62 - 69,77	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
36.	IUP.22	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,215	0.201	0,17-0,16	0,16-0,15	0,14-0,13	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**								
	1. Daya Saing Sumber Daya Manusia.								
37.		Angka Beban Ketergantungan *(Dependency Ratio)*	Angka	45,41	45,83	45,20	45,10	44,60	Pemerintah Daerah
	2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi								
38.	IUP.34	Kapabilitas Inovasi	Nilai	2,43	2,86	2,90	2,96	3,14	Penelitian dan Pengembangan
39.	IUP.55	PDRB Per Kapita	(Rp. Juta)	29,66	31,72	35,59-37,03	41,20-43,88	58,06-64,42	Pemerintah Daerah
40.	IUP.23	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	29,31	29,65*	30,65	30,75	30,84	Perindustrian
41.	IUP.24	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	6,84	6,52	6,61	6,69	6,93	Pariwisata
42.	IUP.25	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	5	29	6-11	7-12	10-15	Pariwisata
43.	IUP.26	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	n/a	2,95	5,03	5,40	6,51	Koperasi dan UKM
44.	IUP.27	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,94	0,89	1,44	1,71	2,49	Koperasi dan UKM
45.	IUP.37	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	65,13	68,20	67,15-68,25	67,20-68,30	65,40-65,50	Pemerintah Daerah
	3. Transformasi Digital								
46.	IUP.39	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	66,87	75,65	75,71	76,84	69,50	Komunikasi dan Informastika
	4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global								

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Baseline		Target Tahun		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
				2024	2025	2026	2027		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(11)	(12)
47.	IUP.30	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	22,46	26,05	26,58	26,99	27,23	Penanaman Modal
48.		Ekspor Barang dan Jasa	ribu US$	561,380	537,889	563,000	564,000	567.000	Perdagangan
	5. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi								
49.		Indeks Desa	Indeks	0,7048	0,7242	0,7300	0,7350	0,7500	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
50.	IUP.35	Persentase Desa Mandiri	%	8,09	14,71	15,07	15,44	16,54	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
51.	IUP.40	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	0,00	63,45	63,86	64,29	65,23	Perumahan dan Kawasan Permukiman
52.	IUP.41	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	78,29	79,05	79,34	79,54	76,54	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
53.	IUP.42	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota.	%	2,87	75,91	76,48	76,73	87,73	Pemerintah Daerah
54.	IUP.45	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks	49,87	49,895	49,92	49,94	50,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	6. Stabilitas Ekonomi Makro								
55.		Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	3,84	3,90	3,95	3,98	4,09	Setda
56.	IUP.29	Disparitas Harga	%	-1,27	0,18	± 10	± 10	± 10	Pemerintah Daerah
57.		Tingkat inflasi	%	2,19	2,83	3±1	3±1	3±1	Pemerintah Daerah
58.	IUP.28	*Return on Aset (ROA)* BUMD	%	6,80	7,04	7,09	7,18	7,36	Setda
59.	IUP.31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,40	0,60	0,71	0,74	0,83	Keuangan
60.	IUP.32	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	%	3,47	3,5	3,50	3,51	3,54	Setda
61.	IUP.33	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	%	7,10	6,68	6,68	6,69	6,72	Setda
62.		Indeks Zakat Nasional	Indeks	0,54	0,57*	0,60	0,63	0,57	Pemerintah Daerah
D.	**Aspek Pelayanan Umum**								
	Urusan Wajib dengan Pelayanan Dasar								
63.	IUP.50	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	77,03	81,11	81,20	81,30	77,60	Pemerintah Daerah
64.	IUP.51	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	98,42	99,76	80-100	80-100	80-100	Setda
65.	IUP.52	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,05	3,05	3,05	3,10	3,25	Komunikasi dan Informatika

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Baseline		Target Tahun		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
				2024	2025	2026	2027		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(11)	(12)
66.	IUP.53	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,29	4,10	4,10	4,15	4,29	Setda
67.	IUP.54	Indeks Integritas Nasional	Indeks	73,97	80,17	80,52	81,34	83,78	Pemerintah Daerah
E.	**Indikator Kinerja Kunci (IKK)**								
		Urusan Pendidikan							
68.	1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (IKK)	%	100,00	90	100,00	100,00	100,00	Pendidikan
69.	1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (IKK)	%	100,00	99	100,00	100,00	100,00	Pendidikan
70.	1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (IKK)	%	100,00	93	100,00	100,00	100,00	Pendidikan
71.	1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (IKK)	%	100,00	44,81	100,00	100,00	100,00	Pendidikan
		Urusan Kesehatan							
72.	1.b.1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan (IKK)	%	0,79	0,85	0,86	0,87	0,86	Kesehatan
73.	1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi (IKK)	%	100,00	100	100,00	100,00	100,00	Kesehatan
74.	1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (IKK)	%	100,00	100	100,00	100,00	100,00	Kesehatan
75.	1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan
76.	1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan
77.	1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan
78.	1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan
79.	1.b.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (IKK)	%	82,06	91,84	100,00	100,00	100,00	Kesehatan
80.	1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (IKK)	%	96,31	100	100,00	100,00	100,00	Kesehatan
81.	1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (IKK)	%	93,72	90,64	100,00	100,00	100,00	Kesehatan

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Baseline		Target Tahun		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
				2024	2025	2026	2027		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(11)	(12)
82.	1.b.11	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (IKK)	%	96,52	100	100,00	100,00	100,00	Kesehatan
83.	1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (IKK)	%	100,00	100	100,00	100,00	100,00	Kesehatan
84.	1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (IKK)	%	85,58	100	100,00	100,00	100,00	Kesehatan
85.	1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (IKK)	%	100,00	100	100,00	100,00	100,00	Kesehatan
		Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
86.	1.c.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota (IKK)	%	80,15	82,0904	83.50	84.51	86.83	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
87.	1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (IKK)	%	77,42	79,543	81,65	83,76	90,10	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
88.	1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (IKK)	rasio	3,658	3,6986	3,705	3,713	3,768	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
89.	1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (IKK)	%	88,47	89,3466	89,78	88,93	89,39	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
90.	1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK)	%	62,21	64,6543	64,70	64,85	63,11	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
91.	1.c.5	Mengukur rasio kepatuhan IMB kab/ kota (IKK)	%	100,00	100	100,00	100,00	100,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
92.	1.c.7	Tingkat kemantapan jalan kabupaten (IKK)	%	78,29	79,0483	79,09	79,49	80,69	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
93.	1.c.8.1	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (IKK)	%	33,15	39,6739	46,19	52,72	72,28	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
94.	1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (IKK)	%	100,00	100	100,00	100,00	100,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
95.	1.d.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (IKK)	%	100,00	100	100,00	100,00	100,00	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Baseline		Target Tahun		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
				2024	2025	2026	2027		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(11)	(12)
96.	1.d.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota (IKK)	%	100,00	100	100,00	100,00	100,00	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
97.	1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani (IKK)	%	n/a	12,11	12,15	12,20	2,35	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
98.	1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (IKK)	%	3,62	8,23	8,40	3,50	3,72	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
99.	1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK)	%	100,00	100	100,00	100,00	100,00	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat							
100.	1.e.1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (IKK)	%	100,00	100	100,00	100,00	100,00	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
101.	1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK)	%	100,00	100	100,00	100,00	100,00	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
102.	1.e.3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (IKK)	%	100,00	100	100,00	100,00	100,00	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
103.	1.e.4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (IKK)	%	100,00	100	100,00	100,00	100,00	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
104.	1.e.5	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (IKK)	%	100,00	100	100,00	100,00	100,00	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
105.	1.e.5	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (IKK)	%	23,88	25,25	25,50	25,75	25,25	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
106.	1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (IKK)	menit	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
		Urusan Sosial							

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Baseline		Target Tahun		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
				2024	2025	2026	2027		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(11)	(12)
107.	1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (IKK)	%	100,00	100	100,00	100,00	100,00	Sosial
108.	1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (IKK)	%	100,00	100	100,00	100,00	100,00	Sosial
		Urusan Tenaga Kerja							
109.	2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (IKK)	%	100,00	100	100,00	100,00	100,00	Tenaga Kerja
110.	2.a.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (IKK)	%	29,26	30,40	31,00	32,00	35,00	Tenaga Kerja
111.	2.a.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (IKK)	%	40,00	17,12	40,52	40,65	40,80	Tenaga Kerja
112.	2.a.4	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota (IKK)	%	n/a	2,490	20,44	20,66	20,88	Tenaga Kerja
113.	2.a.5	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK)	%	100,00	100	100,00	100,00	100,00	Tenaga Kerja
		Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
114.	2.g.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD (IKK)	%	14,21	6,7627	14,30	14,35	14,55	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
115.	2.g.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota (IKK)	%	100,00	100	100,00	100,00	100,00	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
116.	2.g.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (IKK)	%	15,00	11,5618	14,73	14,46	13,64	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Pangan							
117.	2.h.1	Persentase Cadangan Pangan (IKK)	%	2,08	126.5	100,00	100,00	100,00	Pangan
		Urusan Pertanahan							
118.	2.i.1	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (IKK)	%	100,00	100	100,00	100,00	100,00	Pertanahan

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Baseline		Target Tahun		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
				2024	2025	2026	2027		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(11)	(12)
119.	2.i.2	Persentase ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan	%	100,00	100	100,00	100,00	38,60	Pertanahan
120.	2.i.3	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum (IKK)	%	100,00	100	100,00	100,00	100,00	Pertanahan
		Urusan Lingkungan Hidup							
121.	2.j.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota (IKK)	Indeks	60,90	72,12	72,20	72,30	71,19	Lingkungan Hidup
122.	2.j.2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota (IKK)	%	33,50	59,31	34,50	35,00	36,50	Lingkungan Hidup
123.	2.j.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota (IKK)	%	0	83,33	80,00	70,00	50,00	Lingkungan Hidup
		Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
124.	2.k.1	Persentase Perekaman KTP Elektronik (IKK)	%	99,990	98,96	99,992	99,993	99,996	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
125.	2.k.2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (IKK)	%	60,71	61,44	61,50	61,55	61,00	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
126.	2.k.3	Persentase Kepemilikan akta kelahiran (IKK)	%	97,50	97,91	97,95	98,00	97,56	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
127.	2.k.4	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK)	Perangkat daerah	-	1	2,00	3,00	6,00	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
128.	2.l.2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri (IKK)	%	22,01	30,95	4,31	4,50	3,00	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Urusan Pengendalian Penduduk dan KB							
129.	2.m.1	TFR (Angka Kelahiran Total) (IKK)	Angka	2,25	2,16	2,16	2,16	2,15	Pengendalian Penduduk dan KB
130.	2.m.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (IKK)	%	67,00	62,17	62,20	62,30	62,60	Pengendalian Penduduk dan KB
131.	2.m.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	6,41	5,37	5,35	5,30	6,15	Pengendalian Penduduk dan KB
		Urusan Perhubungan							
132.	2.n.1	Rasio konektivitas (IKK)	Angka	0,89	0,90	0,91	0,92	0,95	Perhubungan

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Baseline		Target Tahun		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
				2024	2025	2026	2027		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(11)	(12)
133.	2.n.2	V/C RASIO di Jalan Kabupaten/Kota (IKK)	Angka	0,58	0,63	0,62	0,61	0,58	Perhubungan
		Urusan Komunikasi dan Informatika							
134.	2.0.1	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Komunikasi dan Informatika
135.	2.o.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (IKK)	%	22,00	30	32,00	35,00	28,00	Komunikasi dan Informatika
136.	2.o.3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (IKK)	%	65,00	70	75,00	80,00	95,00	Komunikasi dan Informatika
		Urusan Koperasi dan UMKM							
137.	2.p.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (IKK)	%	53,42	29,58	54,50	55,00	56,50	Koperasi dan UMKM
138.	2.p.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha (IKK)	%	20,00	78,55	22,00	25,00	35,00	Koperasi dan UMKM
		Urusan Penanaman Modal							
139.	2.q.	Persentase peningkatan investasi (IKK)	%	-39,03	57,0921	2,00	2,00	2,00	Penanaman Modal
		Urusan Kepemudaan dan Olahraga							
140.	2.r.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (IKK)	%	5,22	5,25	5,28	5,30	5,38	Kepemudaan dan Olahraga
141.	2.r.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (IKK)	%	7,50	8,11	8,20	8,25	7,80	Kepemudaan dan Olahraga
142.	2.r.3	Peningkatan Prestasi Olahraga (IKK)	%	37,71	40,17	41,00	42,00	48,00	Kepemudaan dan Olahraga
		Urusan Statistik							
143.	2.s.1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Statistik
144.	2.s.2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Statistik

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Baseline		Target Tahun		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
				2024	2025	2026	2027		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(11)	(12)
		Urusan Persandian							
145.	2.t	Tingkat keamanan informasi pemerintah (IKK)	Nilai	2	89,46	1	1	2	Persandian
		Urusan Kebudayaan							
146.	2.u	Terlestarikannya Cagar Budaya (IKK)	%	100,00	100	100,00	100,00	100,00	Kebudayaan
		Urusan Perpustakaan							
147.	2.v.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (IKK)	%	84,98	56,41	85,20	85,40	86,00	Perpustakaan
148.	2.v.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IKK)	%	66,65	4,71	66,75	66,80	70,10	Perpustakaan
		Urusan Kearsipan							
149.	2.w.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (IKK)	%	100,00	76,7	100,00	100,00	100,00	Kearsipan
150.	2.w.2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kearsipan
		Urusan Kelautan dan Perikanan							
151.	3.a	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap) kabupaten/kota (IKK)	Ton	5.983,22	6.901,493	7.152,00	7.244,00	6.529,00	Kelautan dan Perikanan
152.	3.a	Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya) kabupaten/kota (IKK)	Ton	9.223,00	9.485,686	9.648,00	9.817,00	10.362,00	Kelautan dan Perikanan
		Urusan Pariwisata							
153.	3.b.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kebangsaan (IKK)	%	2,00	8	2,20	2,30	2,60	Pariwisata
154.	3.b.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	10,71	7,30	10,90	11,00	11,30	Pariwisata
155.	3.b.3	Tingkat hunian akomodasi (IKK)	%	2,00	21,38	2,00	2,00	2,00	Pariwisata
156.	3.b.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku (IKK)	%	6,29	5,08	5,72	5,78	5,97	Pariwisata
157.	3.b.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK)	%	0,180	0,08	0,182	0,183	0,186	Pariwisata

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Baseline		Target Tahun		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
				2024	2025	2026	2027		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(11)	(12)
		Urusan Pertanian							
158.	3.c.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	53,32	52,18	53,54	53,62	53,86	Pertanian
159.	3.c.2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	29,97	5,04	5,00	5,00	5,00	Pertanian
		Urusan Perdagangan							
160.	3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IKK)	%	100,00	100	100,00	100,00	100,00	Perdagangan
161.	3.f.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK)	%	71,35	72,30	73,10	73,43	74,50	Perdagangan
		Urusan Perindustrian							
162.	3.g.1	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota (IKK)	%	0,50	0,29	0,52	0,53	0,56	Perindustrian
163.	3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK (IKK)	%	97,98	100	100,00	100,00	100,00	Perindustrian
164.	3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100,00	100	100,00	100,00	100,00	Perindustrian
165.	3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	%	100,00	100	100,00	100,00	100,00	Perindustrian
166.	3.g.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK)	%	100,00	100	100,00	100,00	100,00	Perindustrian
		Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah (Perencanaan dan Keuangan)							
167.	4.a.1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan (IKK)	%	15,92	17,74	16,10	16,20	16,50	Keuangan
168.	4.a.2	Rasio PAD (IKK)	%	16,25	25,86	26,00	26,00	17,00	Keuangan
169.	4.a.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (IKK)	%	3,00	Level 2 Penilaian Mandiri 2,946	Level 1 (1,75)	Level 1 (1,80)	Level 3 (3,03)	Pengawasan

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Baseline		Target Tahun		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
				2024	2025	2026	2027		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(11)	(12)
170.	4.a.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (IKK)	%	3,00	Level 3 Penilaian Mandiri 3,19	Level 1 (1,70)	Level 1 (1,75)	Level 3 (3,06)	Pengawasan
171.	4.a.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures) (IKK)	%	64,34	72,10	65,00	65,00	65,00	Keuangan
172	4.a.6	Opini Laporan Keuangan (IKK)	%	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Keuangan
		Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)							
173.	4.b.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama (IKK)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sekretariat Daerah
174.	4.b.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (IKK)	%	76,78	79,41	79,00	79,00	82,00	Sekretariat Daerah
175.	4.b.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan (IKK)	%	25,89	19,71	27,00	28,00	31,00	Sekretariat Daerah
176.	4.b.4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah (IKK)	%	15,21	-50,11	17,00	18,00	21,00	Sekretariat Daerah
		Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)							
177.	4.c.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (IKK)	%	76,23	60,94	61,58	61,78	62,28	Pendidikan dan Pelatihan
178.	4.c.2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (IKK)	%	14,87	17,93	18,37	18,62	19,37	Pendidikan dan Pelatihan
179.	4.c.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (IKK)	%	43,03	56,85	56,87	57,02	57,47	Pendidikan dan Pelatihan
		Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)							
180.	4.d.1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK)	%	1,10	-0,99	1,00	1,00	1,00	Keuangan
181.	4.d.2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK)	%	0,86	10,24	0,90	0,90	0,90	Keuangan
182.	4.d.3	Manajemen Aset	Skor	4	4	4	4	4	Keuangan
183.	4.d.4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	3,26	2,86	3,26	3,26	3,26	Keuangan

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Baseline		Target Tahun		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
				2024	2025	2026	2027		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(11)	(12)
		Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik)							
184.		Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	99,68	99,76	99,78	99,78	99,80	Keuangan
185.		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100,00	100	100,00	100,00	100,00	Keuangan

Sumber : Bapperida Kab. Pekalongan; data diolah; 2026

3. INDIKATOR KINERJA DAN PAGU ANGGARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					**751.004.276.213,00**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**749.086.276.213,00**					
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**					**749.086.276.213,00**					
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**564.716.510.800,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah					***564.636.510.800,00***					
			1.Presentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	564.636.510.800,00					
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					13.000.000,00					Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi
		Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi					13.000.000,00					Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	13.000.000,00					
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					13.000.000,00					
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	10 Dokumen	13.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					551.828.017.000,00					Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah					551.828.017.000,00					Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	329.925.000,00					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	551.498.092.000,00					
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					551.498.092.000,00					
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	4887 Orang/bulan	551.498.092.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru Sisa DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru Sisa DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					329.925.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	1 Dokumen	329.925.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					1.457.300.000,00					Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tersedianya Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					1.457.300.000,00					Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.457.300.000,00					
	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1.457.300.000,00					
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	1.457.300.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					519.000.000,00					Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah					519.000.000,00					Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	129.000.000,00					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	160.000.000,00					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	15.000.000,00					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	60.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	80.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	75.000.000,00					
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					60.000.000,00					
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1 Paket	60.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					80.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1 Paket	80.000.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					75.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1 Paket	75.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					15.000.000,00					
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1 Paket	15.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					129.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	129.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					160.000.000,00					
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	160.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					210.400.000,00					Sarana dan prasarana fasilitas kerja yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas serta pelayanan publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terlaksananya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor					210.400.000,00					Sarana dan prasarana fasilitas kerja yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas serta pelayanan publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	20 Unit	100.000.000,00					
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					100.000.000,00					
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	35 Unit	100.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					9.513.793.800,00					pelayanan administrasi perkantoran yang efektif, efisien, dan lancar guna mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi pada DInas Pendidikan dan Kebuidayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Kantor					9.513.793.800,00					pelayanan administrasi perkantoran yang efektif, efisien, dan lancar guna mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi pada DInas Pendidikan dan Kebuidayaan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	415.800.000,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	9.097.993.800,00					
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					415.800.000,00					
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	0 Laporan	415.800.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					9.097.993.800,00					
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Outsorcing 921 PW Laporan	9.097.993.800,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.175.000.000,00					Kondisi fisik dan fungsi aset daerah agar selalu dalam keadaan baik
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Kantor Dalam Kondisi Baik					1.175.000.000,00					Kondisi fisik dan fungsi aset daerah agar selalu dalam keadaan baik
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	5 Unit	1.000.000.000,00					
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	4 Unit	80.000.000,00					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	45.000.000,00					
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					50.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	0 Unit	50.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					80.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	0 Unit	80.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					45.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	7 AC 10 Laptop Unit	45.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1.000.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	3 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
		Terlaksananya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor					210.400.000,00					Sarana dan prasarana fasilitas kerja yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas serta pelayanan publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	110.400.000,00					
	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					110.400.000,00					
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	25 PC, 24 printer Unit	110.400.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**					**174.094.115.413,00**					
		Meningkatnya akses, mutu, dan tata kelola layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan					***169.194.115.413,00***					
			1.TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	169.194.115.413,00					
			2.Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100.00 %	100.00 %	100.00 %	169.194.115.413,00					
			3.Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100.00 %	100.00 %	100.00 %	169.194.115.413,00					
			4.Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	169.194.115.413,00					
			5.Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	93.60 %	91.89 %	92.31 %	169.194.115.413,00					
	1.01.02.2.0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					77.300.504.658,00					Sekolah Dasar
		Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					77.300.504.658,00					Sekolah Dasar
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	15 Paket	15 Paket	15 Paket	2.342.000.000,00					
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	34755 Buku	34755 Buku	34755 Buku	100.000.000,00					
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	1 Paket	268.000.000,00					
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3 Orang	3 Orang	3 Orang	960.000.000,00					
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	8 Ruang	8 Ruang	8 Ruang	500.000.000,00					
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	193.000.000,00					
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10027 Peserta Didik	10027 Peserta Didik	10027 Peserta Didik	700.000.000,00					
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	3 Ruang	3 Ruang	350.000.000,00					
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11 Ruang	11 Ruang	11 Ruang	198.000.000,00					
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	16 Ruang	16 Ruang	16 Ruang	2.450.000.000,00					
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Ruang	12 Ruang	12 Ruang	2.913.040.000,00					
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang	10 Ruang	10 Ruang	500.000.000,00					
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	530.000.000,00					
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Unit	9 Unit	9 Unit	200.000.000,00					
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	502 Satuan Pendidikan	502 Satuan Pendidikan	502 Satuan Pendidikan	396.607.468,00					
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	12 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	175.000.000,00					
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	502 Satuan Pendidikan	502 Satuan Pendidikan	502 Satuan Pendidikan	63.827.641.500,00					
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	6 Peserta Didik	6 Peserta Didik	6 Peserta Didik	481.065.690,00					
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	502 Orang	502 Orang	502 Orang	216.150.000,00					
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					350.000.000,00					
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	3 Ruang	0 Ruang	350.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah					500.000.000,00					
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang	10 Ruang	10 Ruang	500.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah					500.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	8 Ruang	8 Ruang	10 Ruang	500.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					530.000.000,00					
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	4 Unit	0 Unit	530.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					198.000.000,00					
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11 Ruang	11 Ruang	1 Ruang	198.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah					193.000.000,00					
		Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2 Ruang	1 Ruang	193.000.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah					268.000.000,00					
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	0 Paket	268.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					481.065.690,00					
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	6 Peserta Didik	6 Peserta Didik	0 Peserta Didik	481.065.690,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					960.000.000,00					
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3 Orang	3 Orang	100 Cakasek 500 ASN Orang	960.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					175.000.000,00					
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	12 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	175.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					63.827.641.500,00					
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	502 Satuan Pendidikan	502 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	63.827.641.500,00	Kab. Pekalongan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					216.150.000,00					
		Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	502 Orang	502 Orang	0 Orang	216.150.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik					100.000.000,00					
		Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	34755 Buku	34755 Buku	0 Buku	100.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru					2.450.000.000,00					
		Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	16 Ruang	16 Ruang	0 Ruang	2.450.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					200.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Unit	9 Unit	0 Unit	200.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik					396.607.468,00					
		Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	502 Satuan Pendidikan	502 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	396.607.468,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					2.913.040.000,00					
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Ruang	12 Ruang	0 Ruang	2.913.040.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar					700.000.000,00					
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10027 Peserta Didik	10027 Peserta Didik	10000 Peserta Didik	700.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik					2.342.000.000,00					
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	15 Paket	15 Paket	0 Paket	2.342.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					46.767.065.175,00					Sekolah Menengah Pertama
		Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					46.767.065.175,00					Sekolah Menengah Pertama
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	7 Paket	5 Paket	6 Paket	350.000.000,00					
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	0 Buku	0 Buku	16618 Buku	1.000.000.000,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	124.140.000,00					
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Ruang	3 Ruang	3 Ruang	1.750.000.000,00					
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	2 Paket	1 Paket	2.000.000.000,00					
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	Ruang	Ruang	200.000.000,00					
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	1.000.000.000,00					
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	4446 Peserta Didik	4446 Peserta Didik	4446 Peserta Didik	511.897.100,00					
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	90 Satuan Pendidikan	90 Satuan Pendidikan	90 Satuan Pendidikan	377.124.575,00					
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	0 Ruang	0 Ruang	350.000.000,00					
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5 Ruang	4 Ruang	2 Ruang	1.700.000.000,00					
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	14 Ruang	11 Ruang	12 Ruang	200.000.000,00					
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	4 Ruang	3 Ruang	3 Ruang	1.000.000.000,00					
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	21 Unit	18 Unit	18 Unit	0,00					
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	2 Unit	2 Unit	200.000.000,00					
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	90 Satuan Pendidikan	90 Satuan Pendidikan	90 Satuan Pendidikan	169.035.000,00					
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	90 Satuan Pendidikan	90 Satuan Pendidikan	90 Satuan Pendidikan	35.834.868.500,00					
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					350.000.000,00					
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	0 Ruang	0 Ruang	350.000.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah					200.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	Ruang	0 Ruang	200.000.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium					1.000.000.000,00					
		Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	4 Ruang	3 Ruang	0 Ruang	1.000.000.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					0,00					
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	21 Unit	18 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Pekalongan	-	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					200.000.000,00					
		Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	14 Ruang	11 Ruang	0 Ruang	200.000.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah					1.000.000.000,00					
		Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2 Ruang	0 Ruang	1.000.000.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium					1.750.000.000,00					
		Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Ruang	3 Ruang	0 Ruang	1.750.000.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					200.000.000,00					
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	2 Unit	0 Unit	200.000.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah					2.000.000.000,00					
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	2 Paket	0 Paket	2.000.000.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama					511.897.100,00					
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	4446 Peserta Didik	4446 Peserta Didik	0 Peserta Didik	511.897.100,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					169.035.000,00					
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	90 Satuan Pendidikan	90 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	169.035.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					35.834.868.500,00					
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	90 Satuan Pendidikan	90 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	35.834.868.500,00	Kab. Pekalongan	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					124.140.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	124.140.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik					377.124.575,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	90 Satuan Pendidikan	90 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	377.124.575,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru					1.700.000.000,00					
		Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5 Ruang	4 Ruang	0 Ruang	1.700.000.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik					1.000.000.000,00					
		Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	0 Buku	0 Buku	0 Buku	1.000.000.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik					350.000.000,00					
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	7 Paket	5 Paket	0 Paket	350.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					35.078.845.580,00					Pendidikan Anak Usia Dini
		Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini					35.078.845.580,00					Pendidikan Anak Usia Dini
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	1 Paket	500.000.000,00					
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	860 Satuan Pendidikan	860 Satuan Pendidikan	860 Satuan Pendidikan	321.760.000,00					
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	33021 Satuan Pendidikan	33021 Satuan Pendidikan	33021 Satuan Pendidikan	19.676.920.000,00					
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	8 Orang	8 Orang	8 Orang	100.000.000,00					
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	8 Paket	6 Paket	6 Paket	1.414.910.000,00					
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	11210 Peserta Didik	11210 Peserta Didik	11210 Peserta Didik	130.250.000,00					
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	Ruang	1 Ruang	500.000.000,00					
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	8 Ruang	8 Ruang	8 Ruang	735.000.000,00					
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	39 Ruang	39 Ruang	39 Ruang	5.250.005.580,00					
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	8 Ruang	8 Ruang	3.950.000.000,00					
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	20 Unit	20 Unit	20 Unit	2.500.000.000,00					
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD					2.500.000.000,00					
		Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	20 Unit	20 Unit	0 Unit	2.500.000.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD					500.000.000,00					
		Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	0 Paket	500.000.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD					1.414.910.000,00					
		Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	8 Paket	6 Paket	0 Paket	1.414.910.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD					130.250.000,00					
		Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	11210 Peserta Didik	11210 Peserta Didik	0 Peserta Didik	130.250.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD					100.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	8 Orang	8 Orang	0 Orang	100.000.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD					321.760.000,00					
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	860 Satuan Pendidikan	860 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	321.760.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD					19.676.920.000,00					
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	33021 Satuan Pendidikan	33021 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	19.676.920.000,00	Kab. Pekalongan	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					500.000.000,00					
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	Ruang	0 Ruang	500.000.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru					5.250.005.580,00					
		Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	39 Ruang	39 Ruang	0 Ruang	5.250.005.580,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					735.000.000,00					
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	8 Ruang	8 Ruang	0 Ruang	735.000.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					3.950.000.000,00					
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	8 Ruang	0 Ruang	3.950.000.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					14.947.700.000,00					Pendidikan Kesetaraan
		Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					14.947.700.000,00					Pendidikan Kesetaraan
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	110 Orang	110 Orang	110 Orang	40.170.000,00					
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1202 Peserta Didik	1202 Peserta Didik	1202 Peserta Didik	1.128.650.000,00					
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	866 Satuan Pendidikan	866 Satuan Pendidikan	866 Satuan Pendidikan	5.174.000.000,00					
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	866 Satuan Pendidikan	866 Satuan Pendidikan	866 Satuan Pendidikan	8.604.880.000,00					
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan					1.128.650.000,00					
		Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1202 Peserta Didik	1202 Peserta Didik	0 Peserta Didik	1.128.650.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					40.170.000,00					
		Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	110 Orang	110 Orang	0 Orang	40.170.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan					5.174.000.000,00					
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	866 Satuan Pendidikan	866 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	5.174.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan					8.604.880.000,00					
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	866 Satuan Pendidikan	866 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	8.604.880.000,00	Kab. Pekalongan	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
3.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**					**10.000.000.000,00**					
		Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan dalam mendukung proses pembelajaran yang berkualitas.					***10.000.000.000,00***					
			1.Persentase Guru Layak Mengajar	90.50 %	88.50 %	89.00 %	10.000.000.000,00					
			2.Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	65-70 %	60-65 %	60-65 %	10.000.000.000,00					
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					10.000.000.000,00					Tenaga Pedidik dan Kependidikan
		Terpenuhinya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan dalam mendukung proses pembelajaran yang berkualitas.					10.000.000.000,00					Tenaga Pedidik dan Kependidikan
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000.000,00					
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					10.000.000.000,00					
		Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 Dokumen	4 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
4.	**1.01.06**	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**					**275.650.000,00**					
		Meningkatnya pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan bahasa dan sastra daerah dan nasional pada satuan pendidikan					***275.650.000,00***					
			1.Persentase satuan pendidikan yang telah mengembangkan Bahasa dan Sastra Jawa	100 %	100 %	100 %	275.650.000,00					
	1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota					275.650.000,00					Satuan Pendidikan
		Terlaksananya Kegiatan pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan bahasa dan sastra daerah dan nasional pada satuan pendidikan					275.650.000,00					Satuan Pendidikan
			Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di kab/kota	592 Orang	592 Orang	592 Orang	275.650.000,00					
	1.01.06.2.01.0010	Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan kab/kota					275.650.000,00					
		Terbinanya sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan di kab/kota	Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di kab/kota	592 Orang	592 Orang	1 Orang	275.650.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**1.918.000.000,00**					
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**					**1.918.000.000,00**					
5.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**					**630.000.000,00**					
		Meningkatnya pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah secara berkelanjutan					***630.000.000,00***					
			1.Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	100.00 Persentase	100.00 Persentase	100.00 Persentase	630.000.000,00					
			2.Terlestarikannya cagar budaya	100.00 %	100.00 %	100.00 %	630.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					630.000.000,00					Budayawan, seniman, pelaku seni/budaya, tokoh adat, pengelola cagar budaya, serta masyarakat umum di wilayah kabupaten Pekalongan
		Terlaksananya pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah secara berkelanjutan					630.000.000,00					Budayawan, seniman, pelaku seni/budaya, tokoh adat, pengelola cagar budaya, serta masyarakat umum di wilayah kabupaten Pekalongan
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 Objek	2 Objek	2 Objek	630.000.000,00					
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan					630.000.000,00					
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 Objek	2 Objek	0 Objek	630.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
6.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**					**992.000.000,00**					
		Meningkatnya eksistensi dan apresiasi masyarakat terhadap kesenian tradisional daerah					***992.000.000,00***					
			1.Cakupan gelar seni budaya	100 %	100 %	100 %	992.000.000,00					
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					992.000.000,00					kelompok kesenian, sanggar, atau pelaku seni dan budaya yang dibina
		Terlaksananya eksistensi dan apresiasi masyarakat terhadap kesenian tradisional daerah					992.000.000,00					kelompok kesenian, sanggar, atau pelaku seni dan budaya yang dibina
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	3 Sertifikat	3 Sertifikat	3 Sertifikat	992.000.000,00					
	2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan					992.000.000,00					
		Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	3 Sertifikat	3 Sertifikat	0 Sertifikat	992.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
7.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**					**176.000.000,00**					
		Meningkatnya pemahaman dan kecintaan masyarakat terhadap sejarah dan jati diri bangsa					***176.000.000,00***					
			1.Cakupan Pelestarian Sejarah Lokal	100 %	100 %	100 %	176.000.000,00					
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					176.000.000,00					Pemerintah Daerah dan Budayawan
		Terlaksananya pemahaman dan kecintaan masyarakat terhadap sejarah dan jati diri bangsa					176.000.000,00					Pemerintah Daerah dan Budayawan
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	415 Orang	415 Orang	415 Orang	176.000.000,00					
	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota					176.000.000,00					
		Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	415 Orang	415 Orang	0 Orang	176.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
8.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**					**120.000.000,00**					
		Terlestarikannya cagar budaya sebagai warisan sejarah dan identitas daerah					***120.000.000,00***					
			1.Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	120.000.000,00					
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					120.000.000,00					Pengelola cagar budaya, Komunitas dan budayawan, serta Generasi muda/pelajar
		Terlaksananya pelestarian cagar budaya sebagai warisan sejarah dan identitas daerah					120.000.000,00					Pengelola cagar budaya, Komunitas dan budayawan, serta Generasi muda/pelajar
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	10 Objek	10 Objek	10 Objek	120.000.000,00					
	2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya					120.000.000,00					
		Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	10 Objek	10 Objek	0 Objek	120.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
		Dinas Kesehatan					**224.318.361.692,00**					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**224.318.361.692,00**					
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**224.318.361.692,00**					
9.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**225.029.480.000,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.					***153.728.403.000,00***					
			1.Persentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	153.728.403.000,00					
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					25.000.000,00					Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan.					25.000.000,00					Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	15.000.000,00					
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00					
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					15.000.000,00					
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.000.000,00					
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					151.304.357.000,00					Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, akuntabel, dan tepat waktu.					151.304.357.000,00					Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	462.120.000,00					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1972 Orang/bulan	1920 Orang/bulan	1935 Orang/bulan	150.842.237.000,00					
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASNTerlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, akuntabel, dan tepat waktu.					151.304.357.000,00					Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	462.120.000,00					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1972 Orang/bulan	1920 Orang/bulan	1935 Orang/bulan	150.842.237.000,00					
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					150.842.237.000,00					
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1972 Orang/bulan	1920 Orang/bulan	1935 Orang/bulan	150.842.237.000,00	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					462.120.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	462.120.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					230.000.000,00					Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
		Terselenggaranya layanan administrasi umum perkantoran yang tertib dan andal.					230.000.000,00					Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	20.000.000,00					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00					
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					5.000.000,00					
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					100.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3 Paket	100.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					15.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					20.000.000,00					
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					25.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					65.000.000,00					
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					866.106.000,00					Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
		Terpenuhinya kebutuhan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai spesifikasi dan ketentuan.					866.106.000,00					Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	866.106.000,00					
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					866.106.000,00					
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	866.106.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.137.940.000,00					Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran operasional perangkat daerah.					1.137.940.000,00					Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	600.000.000,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	537.940.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					600.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	600.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					537.940.000,00					
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	537.940.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					180.000.000,00					Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
		Terpeliharanya BMD penunjang dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai standar layanan.					180.000.000,00					Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	4 Unit	50.000.000,00					
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	19 Unit	19 Unit	60.000.000,00					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	30.000.000,00					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	35 Unit	12 Unit	40.000.000,00					
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					30.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					60.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	19 Unit	19 Unit	60.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					40.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	35 Unit	12 Unit	40.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					50.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	4 Unit	50.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
10.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**90.322.693.692,00**					
		Meningkatnya cakupan dan mutu pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.					***67.896.164.692,00***					
			1.Persentase Fasyankes yang memenuhi unit layanan kesehatan sesuai standar	67.37 %	58.60 %	60.35 %	67.896.164.692,00					
			2.Jumlah kematian balita	189 Kasus	201 Kasus	198 Kasus	67.896.164.692,00					
			3.Persentase Puskesmas dengan wilayah kerjanya memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	46.15 %	15.38 %	23.07 %	67.896.164.692,00					
			4.Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	85 %	70 %	75 %	67.896.164.692,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			5.Pemeriksaan ANC 6 kali selama masa kehamilan	90 %	82 %	85 %	67.896.164.692,00					
			6.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	80 %	40 %	50 %	67.896.164.692,00					
			7.Angka populasi bebas penyakit menular	95 %	90 %	91 %	67.896.164.692,00					
			8.Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80.50 %	80.10 %	80.20 %	67.896.164.692,00					
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					13.061.316.092,00					Masyarakat, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
		-					13.061.316.092,00					Masyarakat, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	110 Unit	75 Unit	82 Unit	125.000.000,00					
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	340 Paket	290 Paket	310 Paket	300.000.000,00					
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	10.350.316.092,00					
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4 Unit	3 Unit	4 Unit	1.725.000.000,00					
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	220.000.000,00					
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 Unit	3 Unit	4 Unit	341.000.000,00					
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas					1.725.000.000,00					
		Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4 Unit	3 Unit	2 Unit	1.725.000.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas					341.000.000,00					
		Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 Unit	3 Unit	1 Unit	341.000.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya					220.000.000,00					
		Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	220.000.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					125.000.000,00					
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	110 Unit	75 Unit	82 Unit	125.000.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					10.350.316.092,00					
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	1 Paket	10.350.316.092,00	Kab. Pekalongan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan					300.000.000,00					
		Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	340 Paket	290 Paket	310 Paket	300.000.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					77.185.837.600,00					Masyarakat, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
		Terpenuhinya Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai Standar					77.185.837.600,00					Masyarakat, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	203176 Orang	138773 Orang	152650 Orang	40.000.000,00					
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	64370 Orang	63970 Orang	64070 Orang	72.920.000,00					
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12484 Orang	12174 Orang	12274 Orang	2.100.000.000,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	50.115.000.000,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	35.000.000,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	88.000.000,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	500.000.000,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	65.000.000,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	27.900.000,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	0,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	291.000.000,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	175.516.600,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00					
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	125.000.000,00					
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	26 Unit	26 Unit	26 Unit	125.748.000,00					
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12812 Orang	12412 Orang	12512 Orang	250.000.000,00					
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13408 Orang	13008 Orang	13108 Orang	286.224.000,00					
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	16400 Orang	15882 Orang	16000 Orang	35.000.000,00					
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6059 Orang	8844 Orang	7844 Orang	40.000.000,00					
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	4 Orang	8 Orang	7 Orang	25.000.000,00					
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2758 Orang	2266 Orang	2599 Orang	35.380.000,00					
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18725 Orang	17299 Orang	17645 Orang	40.000.000,00					
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	289376 Orang	267341 Orang	272687 Orang	40.000.000,00					
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	102290 Orang	98290 Orang	99290 Orang	20.000.000,00					
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	716755 Orang	662172 Orang	675415 Orang	40.000.000,00					
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					286.224.000,00					
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13408 Orang	13008 Orang	13108 Orang	286.224.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					250.000.000,00					
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12812 Orang	12412 Orang	12512 Orang	250.000.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					2.100.000.000,00					
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12484 Orang	12174 Orang	12.274 Orang	2.100.000.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					72.920.000,00					
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	64370 Orang	63970 Orang	64070 Orang	72.920.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					40.000.000,00					
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	203176 Orang	138773 Orang	152650 Orang	40.000.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					40.000.000,00					
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	716755 Orang	662172 Orang	675415 Orang	40.000.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					20.000.000,00					
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	102290 Orang	98290 Orang	99290 Orang	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					40.000.000,00					
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	289376 Orang	267341 Orang	272687 Orang	40.000.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					40.000.000,00					
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18725 Orang	17299 Orang	17645 Orang	40.000.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					35.380.000,00					
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2758 Orang	2266 Orang	2599 Orang	35.380.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					40.000.000,00					
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6059 Orang	8844 Orang	7844 Orang	40.000.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					35.000.000,00					
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	16400 Orang	15882 Orang	16000 Orang	35.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)					88.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	88.000.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					500.000.000,00					
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					65.000.000,00					
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					0,00					
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya					27.900.000,00					
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	27.900.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					291.000.000,00					
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	291.000.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan					175.516.600,00					
		Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	175.516.600,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					50.115.000.000,00					
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	50.115.000.000,00	Kab. Pekalongan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat					25.000.000,00					
		Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					125.000.000,00					
		Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota					125.748.000,00					
		Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	26 Unit	26 Unit	26 Unit	125.748.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria					25.000.000,00					
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	4 Orang	8 Orang	7 Orang	25.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi					35.000.000,00					
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi					60.000.000,00					Masyarakat, Fasyankes, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan yang Terintegrasi					60.000.000,00					Masyarakat, Fasyankes, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000,00					
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					60.000.000,00					
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					15.540.000,00					Masyarakat, Fasyankes, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya					15.540.000,00					Masyarakat, Fasyankes, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	25 Unit	25 Unit	25 Unit	15.540.000,00					
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya					15.540.000,00					
		Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	25 Unit	25 Unit	15 Unit	15.540.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
		Terpenuhinya Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai Standar					77.185.837.600,00					Masyarakat, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	-	-	300.000.000,00					
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	-	-	506.620.000,00					
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular					300.000.000,00					
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	-	12 Laporan	300.000.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular					506.620.000,00					
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	-	12 Laporan	506.620.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
11.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**					**1.203.963.000,00**					
		Meningkatnya ketersediaan dan kompetensi tenaga kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas.					***1.203.963.000,00***					
			1.Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	4.24 %	2.97 %	3.19 %	1.203.963.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota					30.000.000,00					Fasyankes, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
		Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan					30.000.000,00					Fasyankes, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00					
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan					30.000.000,00					
		Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1.173.963.000,00					Fasyankes, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
		Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan					1.173.963.000,00					Fasyankes, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	165 Orang	135 Orang	135 Orang	1.173.963.000,00					
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1.173.963.000,00					
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	165 Orang	135 Orang	153 Orang	1.173.963.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
12.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**					**520.071.000,00**					
		Meningkatnya ketersediaan, keamanan, mutu, dan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, serta makanan dan minuman yang memenuhi standar.					***520.071.000,00***					
			1.Cakupan sarana kefarmasian dan sarana pengelolaan pangan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	520.071.000,00					
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					125.032.000,00					Masyarakat, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					125.032.000,00					Masyarakat, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	125.032.000,00					
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					125.032.000,00					
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	125.032.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					195.300.000,00					Masyarakat, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					195.300.000,00					Masyarakat, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	195.300.000,00					
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					195.300.000,00					
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	12 Dokumen	12 Dokumen	310 Dokumen	195.300.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga					199.739.000,00					Masyarakat, Fasyankes, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
		Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan					199.739.000,00					Masyarakat, Fasyankes, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	315 Unit	309 Unit	309 Unit	199.739.000,00					
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan					199.739.000,00					
		Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	315 Unit	309 Unit	150 Unit	199.739.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
13.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**					**309.760.000,00**					
		Meningkatnya peran serta dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan kesehatan					***309.760.000,00***					
			1.Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	100 %	68.42 %	78.95 %	309.760.000,00					
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					69.760.000,00					Masyarakat, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat					69.760.000,00					Masyarakat, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	69.760.000,00					
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat					69.760.000,00					
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	5 Dokumen	5 Dokumen	12 Dokumen	69.760.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					240.000.000,00					Masyarakat, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
		Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat					240.000.000,00					Masyarakat, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	240.000.000,00					
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat					240.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	240.000.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
		Rumah Sakit Umum Daerah Kraton					**143.700.000.000,00**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**143.700.000.000,00**					
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**143.700.000.000,00**					
14.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**130.000.000.000,00**					
			-	-	-	-	130.000.000.000,00					
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					130.000.000.000,00					-
		-					130.000.000.000,00					-
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	-	-	130.000.000.000,00					
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					130.000.000.000,00					
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	-	1 Unit Kerja	130.000.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Wiradesa || Desa Kampil || 1	Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
15.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**13.700.000.000,00**					
			-	-	-	-	13.700.000.000,00					
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					13.700.000.000,00					-
		-					13.700.000.000,00					-
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	-	-	-	13.700.000.000,00					
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya					13.700.000.000,00					
		Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	-	-	1 Unit	13.700.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Wiradesa || Desa Kampil || 1	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
		Rumah Sakit Umum Daerah Kajen					**147.000.000.000,00**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**147.000.000.000,00**					
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**147.000.000.000,00**					
16.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**147.000.000.000,00**					
			Prosentase Kinerja BLUD	-	-	87,50 %	147.000.000.000,00					
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					147.000.000.000,00					-
		-					147.000.000.000,00					-
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	-	-	147.000.000.000,00					
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					147.000.000.000,00					
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	-	1 Unit Kerja	147.000.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Karanganyar || Desa Karangsari || 1	Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
17.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**0,00**					
			Prosentase Sesuai Permenkes No.3 Tahun 2020	-	-	67,7 %	0,00					
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					0,00					-
		-					0,00					-
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	-	-	0,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	-	-	-	0,00					
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					0,00					
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	-	1 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Karanganyar || Desa Karangsari || 1	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit					0,00					
		Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	-	-	1 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Karanganyar || Desa Karangsari || 1	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
		Rumah Sakit Umum Daerah Kesesi					**17.966.611.000,00**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**17.966.611.000,00**					
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**17.966.611.000,00**					
18.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**17.966.611.000,00**					
			-	-	-	-	17.966.611.000,00					
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					17.966.611.000,00					-
		-					17.966.611.000,00					-
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	-	-	17.966.611.000,00					
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					17.966.611.000,00					
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	-	12 bulan Unit Kerja	17.966.611.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kesesi || Desa Kesesi || 1	Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
		Puskesmas Kandangserang					**3.793.131.590,00**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**3.793.131.590,00**					
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**3.793.131.590,00**					
19.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**225.029.480.000,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.					***2.878.186.590,00***					
			1.Persentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	2.878.186.590,00					
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					71.286.077.000,00					Masyarakat
		Terlaksananya peningkatan mutu layanan BLUD sesuai SOP dan standar pelayanan yang ditetapkan					71.286.077.000,00					Masyarakat
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	71.286.077.000,00					
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.878.186.590,00					
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.878.186.590,00	Kab. Pekalongan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
20.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**90.322.693.692,00**					
		Meningkatnya cakupan dan mutu pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.					***914.945.000,00***					
			1.Persentase Fasyankes yang memenuhi unit layanan kesehatan sesuai standar	67.37 %	58.60 %	60.35 %	914.945.000,00					
			2.Jumlah kematian balita	189 Kasus	201 Kasus	198 Kasus	914.945.000,00					
			3.Persentase Puskesmas dengan wilayah kerjanya memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	46.15 %	15.38 %	23.07 %	914.945.000,00					
			4.Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	85 %	70 %	75 %	914.945.000,00					
			5.Pemeriksaan ANC 6 kali selama masa kehamilan	90 %	82 %	85 %	914.945.000,00					
			6.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	80 %	40 %	50 %	914.945.000,00					
			7.Angka populasi bebas penyakit menular	95 %	90 %	91 %	914.945.000,00					
			8.Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80.50 %	80.10 %	80.20 %	914.945.000,00					
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					77.185.837.600,00					Masyarakat
		Terpenuhinya Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai Standar					77.185.837.600,00					Masyarakat
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	21.781.529.000,00					
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					914.945.000,00					
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	914.945.000,00	Kab. Pekalongan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
		Puskesmas Paninggaran					**4.645.875.150,00**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**4.645.875.150,00**					
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**4.645.875.150,00**					
21.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**225.029.480.000,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.					***3.679.908.150,00***					
			1.Persentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	3.679.908.150,00					
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					71.286.077.000,00					Masyarakat
		Terlaksananya peningkatan mutu layanan BLUD sesuai SOP dan standar pelayanan yang ditetapkan					71.286.077.000,00					Masyarakat
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	71.286.077.000,00					
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					3.679.908.150,00					
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.679.908.150,00	Kab. Pekalongan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
22.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**90.322.693.692,00**					
		Meningkatnya cakupan dan mutu pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.					***965.967.000,00***					
			1.Persentase Fasyankes yang memenuhi unit layanan kesehatan sesuai standar	67.37 %	58.60 %	60.35 %	965.967.000,00					
			2.Jumlah kematian balita	189 Kasus	201 Kasus	198 Kasus	965.967.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			3.Persentase Puskesmas dengan wilayah kerjanya memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	46.15 %	15.38 %	23.07 %	965.967.000,00					
			4.Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	85 %	70 %	75 %	965.967.000,00					
			5.Pemeriksaan ANC 6 kali selama masa kehamilan	90 %	82 %	85 %	965.967.000,00					
			6.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	80 %	40 %	50 %	965.967.000,00					
			7.Angka populasi bebas penyakit menular	95 %	90 %	91 %	965.967.000,00					
			8.Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80.50 %	80.10 %	80.20 %	965.967.000,00					
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					77.185.837.600,00					Masyarakat
		Terpenuhinya Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai Standar					77.185.837.600,00					Masyarakat
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	21.781.529.000,00					
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					965.967.000,00					
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	965.967.000,00	Kab. Pekalongan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
		Puskesmas Lebakbarang					**2.123.739.643,00**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**2.123.739.643,00**					
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**2.123.739.643,00**					
23.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**225.029.480.000,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.					***1.160.093.643,00***					
			1.Persentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	1.160.093.643,00					
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					71.286.077.000,00					Masyarakat dan Puskesmas
		Terlaksananya peningkatan mutu layanan BLUD sesuai SOP dan standar pelayanan yang ditetapkan					71.286.077.000,00					Masyarakat dan Puskesmas
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	71.286.077.000,00					
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1.160.093.643,00					
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.160.093.643,00	Kab. Pekalongan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
24.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**90.322.693.692,00**					
		Meningkatnya cakupan dan mutu pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.					***963.646.000,00***					
			1.Persentase Fasyankes yang memenuhi unit layanan kesehatan sesuai standar	67.37 %	58.60 %	60.35 %	963.646.000,00					
			2.Jumlah kematian balita	189 Kasus	201 Kasus	198 Kasus	963.646.000,00					
			3.Persentase Puskesmas dengan wilayah kerjanya memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	46.15 %	15.38 %	23.07 %	963.646.000,00					
			4.Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	85 %	70 %	75 %	963.646.000,00					
			5.Pemeriksaan ANC 6 kali selama masa kehamilan	90 %	82 %	85 %	963.646.000,00					
			6.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	80 %	40 %	50 %	963.646.000,00					
			7.Angka populasi bebas penyakit menular	95 %	90 %	91 %	963.646.000,00					
			8.Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80.50 %	80.10 %	80.20 %	963.646.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					77.185.837.600,00					Masyarakat dan Puskesmas
		Terpenuhinya Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai Standar					77.185.837.600,00					Masyarakat dan Puskesmas
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	21.781.529.000,00					
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					963.646.000,00					
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	963.646.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
		Puskesmas Petungkriyono					**2.012.580.041,00**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**2.012.580.041,00**					
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**2.012.580.041,00**					
25.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**225.029.480.000,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.					***1.189.240.041,00***					
			1.Persentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	1.189.240.041,00					
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					71.286.077.000,00					Masyarakat
		Terlaksananya peningkatan mutu layanan BLUD sesuai SOP dan standar pelayanan yang ditetapkan					71.286.077.000,00					Masyarakat
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	71.286.077.000,00					
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1.189.240.041,00					
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.189.240.041,00	Kab. Pekalongan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
26.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**90.322.693.692,00**					
		Meningkatnya cakupan dan mutu pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.					***823.340.000,00***					
			1.Persentase Fasyankes yang memenuhi unit layanan kesehatan sesuai standar	67.37 %	58.60 %	60.35 %	823.340.000,00					
			2.Jumlah kematian balita	189 Kasus	201 Kasus	198 Kasus	823.340.000,00					
			3.Persentase Puskesmas dengan wilayah kerjanya memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	46.15 %	15.38 %	23.07 %	823.340.000,00					
			4.Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	85 %	70 %	75 %	823.340.000,00					
			5.Pemeriksaan ANC 6 kali selama masa kehamilan	90 %	82 %	85 %	823.340.000,00					
			6.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	80 %	40 %	50 %	823.340.000,00					
			7.Angka populasi bebas penyakit menular	95 %	90 %	91 %	823.340.000,00					
			8.Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80.50 %	80.10 %	80.20 %	823.340.000,00					
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					77.185.837.600,00					Masyarakat
		Terpenuhinya Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai Standar					77.185.837.600,00					Masyarakat
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	21.781.529.000,00					
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					823.340.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	823.340.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
		Puskesmas Talun					**2.933.911.043,00**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**2.933.911.043,00**					
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**2.933.911.043,00**					
27.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**225.029.480.000,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.					***2.077.496.043,00***					
			1.Persentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	2.077.496.043,00					
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					71.286.077.000,00					Masyarakat
		Terlaksananya peningkatan mutu layanan BLUD sesuai SOP dan standar pelayanan yang ditetapkan					71.286.077.000,00					Masyarakat
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	71.286.077.000,00					
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.077.496.043,00					
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.077.496.043,00	Kab. Pekalongan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
28.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**90.322.693.692,00**					
		Meningkatnya cakupan dan mutu pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.					***856.415.000,00***					
			1.Persentase Fasyankes yang memenuhi unit layanan kesehatan sesuai standar	67.37 %	58.60 %	60.35 %	856.415.000,00					
			2.Jumlah kematian balita	189 Kasus	201 Kasus	198 Kasus	856.415.000,00					
			3.Persentase Puskesmas dengan wilayah kerjanya memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	46.15 %	15.38 %	23.07 %	856.415.000,00					
			4.Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	85 %	70 %	75 %	856.415.000,00					
			5.Pemeriksaan ANC 6 kali selama masa kehamilan	90 %	82 %	85 %	856.415.000,00					
			6.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	80 %	40 %	50 %	856.415.000,00					
			7.Angka populasi bebas penyakit menular	95 %	90 %	91 %	856.415.000,00					
			8.Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80.50 %	80.10 %	80.20 %	856.415.000,00					
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					77.185.837.600,00					Masyarakat
		Terpenuhinya Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai Standar					77.185.837.600,00					Masyarakat
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	21.781.529.000,00					
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					856.415.000,00					
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	856.415.000,00	Kab. Pekalongan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
		Puskesmas Karanganyar					**3.868.680.643,00**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**3.868.680.643,00**					
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**3.868.680.643,00**					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
29.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**225.029.480.000,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.					***2.898.305.643,00***					
			1.Persentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	2.898.305.643,00					
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					71.286.077.000,00					Masyarakat
		Terlaksananya peningkatan mutu layanan BLUD sesuai SOP dan standar pelayanan yang ditetapkan					71.286.077.000,00					Masyarakat
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	71.286.077.000,00					
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.898.305.643,00					
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.898.305.643,00	Kab. Pekalongan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
30.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**90.322.693.692,00**					
		Meningkatnya cakupan dan mutu pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.					***970.375.000,00***					
			1.Persentase Fasyankes yang memenuhi unit layanan kesehatan sesuai standar	67.37 %	58.60 %	60.35 %	970.375.000,00					
			2.Jumlah kematian balita	189 Kasus	201 Kasus	198 Kasus	970.375.000,00					
			3.Persentase Puskesmas dengan wilayah kerjanya memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	46.15 %	15.38 %	23.07 %	970.375.000,00					
			4.Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	85 %	70 %	75 %	970.375.000,00					
			5.Pemeriksaan ANC 6 kali selama masa kehamilan	90 %	82 %	85 %	970.375.000,00					
			6.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	80 %	40 %	50 %	970.375.000,00					
			7.Angka populasi bebas penyakit menular	95 %	90 %	91 %	970.375.000,00					
			8.Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80.50 %	80.10 %	80.20 %	970.375.000,00					
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					77.185.837.600,00					Masyarakat
		Terpenuhinya Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai Standar					77.185.837.600,00					Masyarakat
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	21.781.529.000,00					
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					970.375.000,00					
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	970.375.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
		Puskesmas Doro 1					**3.258.370.113,00**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**3.258.370.113,00**					
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**3.258.370.113,00**					
31.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**225.029.480.000,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.					***2.408.517.113,00***					
			1.Persentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	2.408.517.113,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					71.286.077.000,00					Masyarakat
		Terlaksananya peningkatan mutu layanan BLUD sesuai SOP dan standar pelayanan yang ditetapkan					71.286.077.000,00					Masyarakat
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	71.286.077.000,00					
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.408.517.113,00					
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.408.517.113,00	Kab. Pekalongan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
32.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**90.322.693.692,00**					
		Meningkatnya cakupan dan mutu pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.					***849.853.000,00***					
			1.Persentase Fasyankes yang memenuhi unit layanan kesehatan sesuai standar	67.37 %	58.60 %	60.35 %	849.853.000,00					
			2.Jumlah kematian balita	189 Kasus	201 Kasus	198 Kasus	849.853.000,00					
			3.Persentase Puskesmas dengan wilayah kerjanya memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	46.15 %	15.38 %	23.07 %	849.853.000,00					
			4.Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	85 %	70 %	75 %	849.853.000,00					
			5.Pemeriksaan ANC 6 kali selama masa kehamilan	90 %	82 %	85 %	849.853.000,00					
			6.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	80 %	40 %	50 %	849.853.000,00					
			7.Angka populasi bebas penyakit menular	95 %	90 %	91 %	849.853.000,00					
			8.Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80.50 %	80.10 %	80.20 %	849.853.000,00					
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					77.185.837.600,00					Masyarakat
		Terpenuhinya Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai Standar					77.185.837.600,00					Masyarakat
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	21.781.529.000,00					
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					849.853.000,00					
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	849.853.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
		Puskesmas Doro 2					**2.216.368.481,00**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**2.216.368.481,00**					
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**2.216.368.481,00**					
33.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**225.029.480.000,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.					***1.453.612.481,00***					
			1.Persentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	1.453.612.481,00					
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					71.286.077.000,00					Masyarakat
		Terlaksananya peningkatan mutu layanan BLUD sesuai SOP dan standar pelayanan yang ditetapkan					71.286.077.000,00					Masyarakat
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	71.286.077.000,00					
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1.453.612.481,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.453.612.481,00	Kab. Pekalongan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
34.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**90.322.693.692,00**					
		Meningkatnya cakupan dan mutu pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.					***762.756.000,00***					
			1.Persentase Fasyankes yang memenuhi unit layanan kesehatan sesuai standar	67.37 %	58.60 %	60.35 %	762.756.000,00					
			2.Jumlah kematian balita	189 Kasus	201 Kasus	198 Kasus	762.756.000,00					
			3.Persentase Puskesmas dengan wilayah kerjanya memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	46.15 %	15.38 %	23.07 %	762.756.000,00					
			4.Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	85 %	70 %	75 %	762.756.000,00					
			5.Pemeriksaan ANC 6 kali selama masa kehamilan	90 %	82 %	85 %	762.756.000,00					
			6.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	80 %	40 %	50 %	762.756.000,00					
			7.Angka populasi bebas penyakit menular	95 %	90 %	91 %	762.756.000,00					
			8.Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80.50 %	80.10 %	80.20 %	762.756.000,00					
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					77.185.837.600,00					Masyarakat
		Terpenuhinya Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai Standar					77.185.837.600,00					Masyarakat
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	21.781.529.000,00					
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					762.756.000,00					
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	762.756.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
		Puskesmas Kajen 1					**4.005.748.206,00**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**4.005.748.206,00**					
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**4.005.748.206,00**					
35.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**225.029.480.000,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.					***3.320.061.206,00***					
			1.Persentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	3.320.061.206,00					
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					71.286.077.000,00					Masyarakat
		Terlaksananya peningkatan mutu layanan BLUD sesuai SOP dan standar pelayanan yang ditetapkan					71.286.077.000,00					Masyarakat
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	71.286.077.000,00					
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					3.320.061.206,00					
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.320.061.206,00	Kab. Pekalongan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
36.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**90.322.693.692,00**					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Meningkatnya cakupan dan mutu pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.					***685.687.000,00***					
			1.Persentase Fasyankes yang memenuhi unit layanan kesehatan sesuai standar	67.37 %	58.60 %	60.35 %	685.687.000,00					
			2.Jumlah kematian balita	189 Kasus	201 Kasus	198 Kasus	685.687.000,00					
			3.Persentase Puskesmas dengan wilayah kerjanya memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	46.15 %	15.38 %	23.07 %	685.687.000,00					
			4.Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	85 %	70 %	75 %	685.687.000,00					
			5.Pemeriksaan ANC 6 kali selama masa kehamilan	90 %	82 %	85 %	685.687.000,00					
			6.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	80 %	40 %	50 %	685.687.000,00					
			7.Angka populasi bebas penyakit menular	95 %	90 %	91 %	685.687.000,00					
			8.Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80.50 %	80.10 %	80.20 %	685.687.000,00					
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					77.185.837.600,00					Masyarakat
		Terpenuhinya Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai Standar					77.185.837.600,00					Masyarakat
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	21.781.529.000,00					
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					685.687.000,00					
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	685.687.000,00	Kab. Pekalongan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
		Puskesmas Kajen 2					**3.360.302.768,00**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**3.360.302.768,00**					
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**3.360.302.768,00**					
37.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**225.029.480.000,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.					***2.382.667.768,00***					
			1.Persentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	2.382.667.768,00					
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					71.286.077.000,00					Masyarakat
		Terlaksananya peningkatan mutu layanan BLUD sesuai SOP dan standar pelayanan yang ditetapkan					71.286.077.000,00					Masyarakat
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	71.286.077.000,00					
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.382.667.768,00					
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.382.667.768,00	Kab. Pekalongan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
38.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**90.322.693.692,00**					
		Meningkatnya cakupan dan mutu pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.					***977.635.000,00***					
			1.Persentase Fasyankes yang memenuhi unit layanan kesehatan sesuai standar	67.37 %	58.60 %	60.35 %	977.635.000,00					
			2.Jumlah kematian balita	189 Kasus	201 Kasus	198 Kasus	977.635.000,00					
			3.Persentase Puskesmas dengan wilayah kerjanya memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	46.15 %	15.38 %	23.07 %	977.635.000,00					
			4.Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	85 %	70 %	75 %	977.635.000,00					
			5.Pemeriksaan ANC 6 kali selama masa kehamilan	90 %	82 %	85 %	977.635.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			6.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	80 %	40 %	50 %	977.635.000,00					
			7.Angka populasi bebas penyakit menular	95 %	90 %	91 %	977.635.000,00					
			8.Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80.50 %	80.10 %	80.20 %	977.635.000,00					
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					77.185.837.600,00					Masyarakat
		Terpenuhinya Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai Standar					77.185.837.600,00					Masyarakat
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	21.781.529.000,00					
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					977.635.000,00					
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	977.635.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
		Puskesmas Kesesi 1					**4.384.563.770,00**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**4.384.563.770,00**					
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**4.384.563.770,00**					
39.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**225.029.480.000,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.					***3.450.510.770,00***					
			1.Persentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	3.450.510.770,00					
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					71.286.077.000,00					Masyarakat
		Terlaksananya peningkatan mutu layanan BLUD sesuai SOP dan standar pelayanan yang ditetapkan					71.286.077.000,00					Masyarakat
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	71.286.077.000,00					
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					3.450.510.770,00					
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.450.510.770,00	Kab. Pekalongan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
40.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**90.322.693.692,00**					
		Meningkatnya cakupan dan mutu pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.					***934.053.000,00***					
			1.Persentase Fasyankes yang memenuhi unit layanan kesehatan sesuai standar	67.37 %	58.60 %	60.35 %	934.053.000,00					
			2.Jumlah kematian balita	189 Kasus	201 Kasus	198 Kasus	934.053.000,00					
			3.Persentase Puskesmas dengan wilayah kerjanya memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	46.15 %	15.38 %	23.07 %	934.053.000,00					
			4.Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	85 %	70 %	75 %	934.053.000,00					
			5.Pemeriksaan ANC 6 kali selama masa kehamilan	90 %	82 %	85 %	934.053.000,00					
			6.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	80 %	40 %	50 %	934.053.000,00					
			7.Angka populasi bebas penyakit menular	95 %	90 %	91 %	934.053.000,00					
			8.Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80.50 %	80.10 %	80.20 %	934.053.000,00					
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					77.185.837.600,00					Masyarakat
		Terpenuhinya Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai Standar					77.185.837.600,00					Masyarakat
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	21.781.529.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					934.053.000,00					
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	934.053.000,00	Kab. Pekalongan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
		Puskesmas Kesesi 2					**3.319.653.529,00**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**3.319.653.529,00**					
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**3.319.653.529,00**					
41.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**225.029.480.000,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.					***2.534.317.529,00***					
			1.Persentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	2.534.317.529,00					
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					71.286.077.000,00					Masyarakat
		Terlaksananya peningkatan mutu layanan BLUD sesuai SOP dan standar pelayanan yang ditetapkan					71.286.077.000,00					Masyarakat
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	71.286.077.000,00					
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.534.317.529,00					
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.534.317.529,00	Kab. Pekalongan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
42.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**90.322.693.692,00**					
		Meningkatnya cakupan dan mutu pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.					***785.336.000,00***					
			1.Persentase Fasyankes yang memenuhi unit layanan kesehatan sesuai standar	67.37 %	58.60 %	60.35 %	785.336.000,00					
			2.Jumlah kematian balita	189 Kasus	201 Kasus	198 Kasus	785.336.000,00					
			3.Persentase Puskesmas dengan wilayah kerjanya memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	46.15 %	15.38 %	23.07 %	785.336.000,00					
			4.Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	85 %	70 %	75 %	785.336.000,00					
			5.Pemeriksaan ANC 6 kali selama masa kehamilan	90 %	82 %	85 %	785.336.000,00					
			6.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	80 %	40 %	50 %	785.336.000,00					
			7.Angka populasi bebas penyakit menular	95 %	90 %	91 %	785.336.000,00					
			8.Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80.50 %	80.10 %	80.20 %	785.336.000,00					
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					77.185.837.600,00					Masyarakat
		Terpenuhinya Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai Standar					77.185.837.600,00					Masyarakat
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	21.781.529.000,00					
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					785.336.000,00					
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	785.336.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
		Puskesmas Bojong 1					**4.314.839.913,00**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**4.314.839.913,00**					
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**4.314.839.913,00**					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
43.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**225.029.480.000,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.					***3.315.854.913,00***					
			1.Persentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	3.315.854.913,00					
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					71.286.077.000,00					Masyarakat
		Terlaksananya peningkatan mutu layanan BLUD sesuai SOP dan standar pelayanan yang ditetapkan					71.286.077.000,00					Masyarakat
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	71.286.077.000,00					
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					3.315.854.913,00					
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.315.854.913,00	Kab. Pekalongan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
44.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**90.322.693.692,00**					
		Meningkatnya cakupan dan mutu pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.					***998.985.000,00***					
			1.Persentase Fasyankes yang memenuhi unit layanan kesehatan sesuai standar	67.37 %	58.60 %	60.35 %	998.985.000,00					
			2.Jumlah kematian balita	189 Kasus	201 Kasus	198 Kasus	998.985.000,00					
			3.Persentase Puskesmas dengan wilayah kerjanya memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	46.15 %	15.38 %	23.07 %	998.985.000,00					
			4.Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	85 %	70 %	75 %	998.985.000,00					
			5.Pemeriksaan ANC 6 kali selama masa kehamilan	90 %	82 %	85 %	998.985.000,00					
			6.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	80 %	40 %	50 %	998.985.000,00					
			7.Angka populasi bebas penyakit menular	95 %	90 %	91 %	998.985.000,00					
			8.Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80.50 %	80.10 %	80.20 %	998.985.000,00					
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					77.185.837.600,00					Masyarakat
		Terpenuhinya Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai Standar					77.185.837.600,00					Masyarakat
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	21.781.529.000,00					
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					998.985.000,00					
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	998.985.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
		Puskesmas Bojong 2					**2.965.325.455,00**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**2.965.325.455,00**					
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**2.965.325.455,00**					
45.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**225.029.480.000,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.					***2.268.582.455,00***					
			1.Persentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	2.268.582.455,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					71.286.077.000,00					Masyarakat
		Terlaksananya peningkatan mutu layanan BLUD sesuai SOP dan standar pelayanan yang ditetapkan					71.286.077.000,00					Masyarakat
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	71.286.077.000,00					
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.268.582.455,00					
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.268.582.455,00	Kab. Pekalongan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
46.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**90.322.693.692,00**					
		Meningkatnya cakupan dan mutu pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.					***696.743.000,00***					
			1.Persentase Fasyankes yang memenuhi unit layanan kesehatan sesuai standar	67.37 %	58.60 %	60.35 %	696.743.000,00					
			2.Jumlah kematian balita	189 Kasus	201 Kasus	198 Kasus	696.743.000,00					
			3.Persentase Puskesmas dengan wilayah kerjanya memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	46.15 %	15.38 %	23.07 %	696.743.000,00					
			4.Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	85 %	70 %	75 %	696.743.000,00					
			5.Pemeriksaan ANC 6 kali selama masa kehamilan	90 %	82 %	85 %	696.743.000,00					
			6.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	80 %	40 %	50 %	696.743.000,00					
			7.Angka populasi bebas penyakit menular	95 %	90 %	91 %	696.743.000,00					
			8.Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80.50 %	80.10 %	80.20 %	696.743.000,00					
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					77.185.837.600,00					Masyarakat
		Terpenuhinya Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai Standar					77.185.837.600,00					Masyarakat
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	21.781.529.000,00					
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					696.743.000,00					
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	696.743.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
		Puskesmas Sragi 1					**3.582.213.393,00**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**3.582.213.393,00**					
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**3.582.213.393,00**					
47.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**225.029.480.000,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.					***2.823.881.393,00***					
			1.Persentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	2.823.881.393,00					
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					71.286.077.000,00					Masyarakat dan Puskesmas
		Terlaksananya peningkatan mutu layanan BLUD sesuai SOP dan standar pelayanan yang ditetapkan					71.286.077.000,00					Masyarakat dan Puskesmas
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	71.286.077.000,00					
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.823.881.393,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.823.881.393,00	Kab. Pekalongan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
48.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**90.322.693.692,00**					
		Meningkatnya cakupan dan mutu pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.					***758.332.000,00***					
			1.Persentase Fasyankes yang memenuhi unit layanan kesehatan sesuai standar	67.37 %	58.60 %	60.35 %	758.332.000,00					
			2.Jumlah kematian balita	189 Kasus	201 Kasus	198 Kasus	758.332.000,00					
			3.Persentase Puskesmas dengan wilayah kerjanya memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	46.15 %	15.38 %	23.07 %	758.332.000,00					
			4.Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	85 %	70 %	75 %	758.332.000,00					
			5.Pemeriksaan ANC 6 kali selama masa kehamilan	90 %	82 %	85 %	758.332.000,00					
			6.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	80 %	40 %	50 %	758.332.000,00					
			7.Angka populasi bebas penyakit menular	95 %	90 %	91 %	758.332.000,00					
			8.Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80.50 %	80.10 %	80.20 %	758.332.000,00					
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					77.185.837.600,00					Masyarakat
		Terpenuhinya Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai Standar					77.185.837.600,00					Masyarakat
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	21.781.529.000,00					
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					758.332.000,00					
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	758.332.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
		Puskesmas Sragi 2					**3.406.169.328,00**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**3.406.169.328,00**					
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**3.406.169.328,00**					
49.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**225.029.480.000,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.					***2.660.516.328,00***					
			1.Persentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	2.660.516.328,00					
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					71.286.077.000,00					Masyarakat dan Puskesmas
		Terlaksananya peningkatan mutu layanan BLUD sesuai SOP dan standar pelayanan yang ditetapkan					71.286.077.000,00					Masyarakat dan Puskesmas
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	71.286.077.000,00					
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.660.516.328,00					
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.660.516.328,00	Kab. Pekalongan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
50.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**90.322.693.692,00**					
		Meningkatnya cakupan dan mutu pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.					***745.653.000,00***					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			1.Persentase Fasyankes yang memenuhi unit layanan kesehatan sesuai standar	67.37 %	58.60 %	60.35 %	745.653.000,00					
			2.Jumlah kematian balita	189 Kasus	201 Kasus	198 Kasus	745.653.000,00					
			3.Persentase Puskesmas dengan wilayah kerjanya memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	46.15 %	15.38 %	23.07 %	745.653.000,00					
			4.Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	85 %	70 %	75 %	745.653.000,00					
			5.Pemeriksaan ANC 6 kali selama masa kehamilan	90 %	82 %	85 %	745.653.000,00					
			6.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	80 %	40 %	50 %	745.653.000,00					
			7.Angka populasi bebas penyakit menular	95 %	90 %	91 %	745.653.000,00					
			8.Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80.50 %	80.10 %	80.20 %	745.653.000,00					
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					77.185.837.600,00					Masyarakat dan Puskesmas
		Terpenuhinya Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai Standar					77.185.837.600,00					Masyarakat dan Puskesmas
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	21.781.529.000,00					
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					745.653.000,00					
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	745.653.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
		Puskesmas Siwalan					**3.804.513.793,00**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**3.804.513.793,00**					
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**3.804.513.793,00**					
51.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**225.029.480.000,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.					***3.118.123.793,00***					
			1.Persentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	3.118.123.793,00					
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					71.286.077.000,00					Masyarakat dan Puskesmas
		Terlaksananya peningkatan mutu layanan BLUD sesuai SOP dan standar pelayanan yang ditetapkan					71.286.077.000,00					Masyarakat dan Puskesmas
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	71.286.077.000,00					
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					3.118.123.793,00					
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.118.123.793,00	Kab. Pekalongan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
52.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**90.322.693.692,00**					
		Meningkatnya cakupan dan mutu pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.					***686.390.000,00***					
			1.Persentase Fasyankes yang memenuhi unit layanan kesehatan sesuai standar	67.37 %	58.60 %	60.35 %	686.390.000,00					
			2.Jumlah kematian balita	189 Kasus	201 Kasus	198 Kasus	686.390.000,00					
			3.Persentase Puskesmas dengan wilayah kerjanya memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	46.15 %	15.38 %	23.07 %	686.390.000,00					
			4.Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	85 %	70 %	75 %	686.390.000,00					
			5.Pemeriksaan ANC 6 kali selama masa kehamilan	90 %	82 %	85 %	686.390.000,00					
			6.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	80 %	40 %	50 %	686.390.000,00					
			7.Angka populasi bebas penyakit menular	95 %	90 %	91 %	686.390.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			8.Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80.50 %	80.10 %	80.20 %	686.390.000,00					
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					77.185.837.600,00					Masyarakat dan Puskesmas
		Terpenuhinya Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai Standar					77.185.837.600,00					Masyarakat dan Puskesmas
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	21.781.529.000,00					
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					686.390.000,00					
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	686.390.000,00	Kab. Pekalongan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
		Puskesmas Kedungwuni 1					**4.393.327.953,00**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**4.393.327.953,00**					
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**4.393.327.953,00**					
53.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**225.029.480.000,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.					***3.541.999.953,00***					
			1.Persentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	3.541.999.953,00					
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					71.286.077.000,00					Masyarakat dan Puskesmas
		Terlaksananya peningkatan mutu layanan BLUD sesuai SOP dan standar pelayanan yang ditetapkan					71.286.077.000,00					Masyarakat dan Puskesmas
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	71.286.077.000,00					
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					3.541.999.953,00					
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.541.999.953,00	Kab. Pekalongan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
54.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**90.322.693.692,00**					
		Meningkatnya cakupan dan mutu pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.					***851.328.000,00***					
			1.Persentase Fasyankes yang memenuhi unit layanan kesehatan sesuai standar	67.37 %	58.60 %	60.35 %	851.328.000,00					
			2.Jumlah kematian balita	189 Kasus	201 Kasus	198 Kasus	851.328.000,00					
			3.Persentase Puskesmas dengan wilayah kerjanya memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	46.15 %	15.38 %	23.07 %	851.328.000,00					
			4.Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	85 %	70 %	75 %	851.328.000,00					
			5.Pemeriksaan ANC 6 kali selama masa kehamilan	90 %	82 %	85 %	851.328.000,00					
			6.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	80 %	40 %	50 %	851.328.000,00					
			7.Angka populasi bebas penyakit menular	95 %	90 %	91 %	851.328.000,00					
			8.Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80.50 %	80.10 %	80.20 %	851.328.000,00					
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					77.185.837.600,00					Masyarakat dan Puskesmas
		Terpenuhinya Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai Standar					77.185.837.600,00					Masyarakat dan Puskesmas
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	21.781.529.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					851.328.000,00					
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	851.328.000,00	Kab. Pekalongan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
		Puskesmas Kedungwuni 2					**3.544.786.797,00**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**3.544.786.797,00**					
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**3.544.786.797,00**					
55.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**225.029.480.000,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.					***2.787.100.797,00***					
			1.Persentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	2.787.100.797,00					
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					71.286.077.000,00					Masyarakat dan Puskesmas
		Terlaksananya peningkatan mutu layanan BLUD sesuai SOP dan standar pelayanan yang ditetapkan					71.286.077.000,00					Masyarakat dan Puskesmas
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	71.286.077.000,00					
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.787.100.797,00					
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.787.100.797,00	Kab. Pekalongan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
56.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**90.322.693.692,00**					
		Meningkatnya cakupan dan mutu pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.					***757.686.000,00***					
			1.Persentase Fasyankes yang memenuhi unit layanan kesehatan sesuai standar	67.37 %	58.60 %	60.35 %	757.686.000,00					
			2.Jumlah kematian balita	189 Kasus	201 Kasus	198 Kasus	757.686.000,00					
			3.Persentase Puskesmas dengan wilayah kerjanya memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	46.15 %	15.38 %	23.07 %	757.686.000,00					
			4.Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	85 %	70 %	75 %	757.686.000,00					
			5.Pemeriksaan ANC 6 kali selama masa kehamilan	90 %	82 %	85 %	757.686.000,00					
			6.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	80 %	40 %	50 %	757.686.000,00					
			7.Angka populasi bebas penyakit menular	95 %	90 %	91 %	757.686.000,00					
			8.Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80.50 %	80.10 %	80.20 %	757.686.000,00					
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					77.185.837.600,00					Masyarakat dan Puskesmas
		Terpenuhinya Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai Standar					77.185.837.600,00					Masyarakat dan Puskesmas
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	21.781.529.000,00					
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					757.686.000,00					
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	757.686.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
		Puskesmas Karangdadap					**3.998.866.670,00**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**3.998.866.670,00**					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**3.998.866.670,00**					
57.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**225.029.480.000,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.					***3.288.339.670,00***					
			1.Persentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	3.288.339.670,00					
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					71.286.077.000,00					Masyarakat dan Puskesmas
		Terlaksananya peningkatan mutu layanan BLUD sesuai SOP dan standar pelayanan yang ditetapkan					71.286.077.000,00					Masyarakat dan Puskesmas
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	71.286.077.000,00					
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					3.288.339.670,00					
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.288.339.670,00	Kab. Pekalongan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
58.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**90.322.693.692,00**					
		Meningkatnya cakupan dan mutu pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.					***710.527.000,00***					
			1.Persentase Fasyankes yang memenuhi unit layanan kesehatan sesuai standar	67.37 %	58.60 %	60.35 %	710.527.000,00					
			2.Jumlah kematian balita	189 Kasus	201 Kasus	198 Kasus	710.527.000,00					
			3.Persentase Puskesmas dengan wilayah kerjanya memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	46.15 %	15.38 %	23.07 %	710.527.000,00					
			4.Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	85 %	70 %	75 %	710.527.000,00					
			5.Pemeriksaan ANC 6 kali selama masa kehamilan	90 %	82 %	85 %	710.527.000,00					
			6.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	80 %	40 %	50 %	710.527.000,00					
			7.Angka populasi bebas penyakit menular	95 %	90 %	91 %	710.527.000,00					
			8.Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80.50 %	80.10 %	80.20 %	710.527.000,00					
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					77.185.837.600,00					Masyarakat dan Puskesmas
		Terpenuhinya Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai Standar					77.185.837.600,00					Masyarakat dan Puskesmas
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	21.781.529.000,00					
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					710.527.000,00					
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	710.527.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
		Puskesmas Wonopringgo					**4.173.231.848,00**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**4.173.231.848,00**					
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**4.173.231.848,00**					
59.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**225.029.480.000,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.					***3.216.729.848,00***					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			1.Persentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	3.216.729.848,00					
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					71.286.077.000,00					Masyarakat dan Puskesmas
		Terlaksananya peningkatan mutu layanan BLUD sesuai SOP dan standar pelayanan yang ditetapkan					71.286.077.000,00					Masyarakat dan Puskesmas
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	71.286.077.000,00					
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					3.216.729.848,00					
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.216.729.848,00	Kab. Pekalongan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
60.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**90.322.693.692,00**					
		Meningkatnya cakupan dan mutu pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.					***956.502.000,00***					
			1.Persentase Fasyankes yang memenuhi unit layanan kesehatan sesuai standar	67.37 %	58.60 %	60.35 %	956.502.000,00					
			2.Jumlah kematian balita	189 Kasus	201 Kasus	198 Kasus	956.502.000,00					
			3.Persentase Puskesmas dengan wilayah kerjanya memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	46.15 %	15.38 %	23.07 %	956.502.000,00					
			4.Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	85 %	70 %	75 %	956.502.000,00					
			5.Pemeriksaan ANC 6 kali selama masa kehamilan	90 %	82 %	85 %	956.502.000,00					
			6.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	80 %	40 %	50 %	956.502.000,00					
			7.Angka populasi bebas penyakit menular	95 %	90 %	91 %	956.502.000,00					
			8.Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80.50 %	80.10 %	80.20 %	956.502.000,00					
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					77.185.837.600,00					Masyarakat dan Puskesmas
		Terpenuhinya Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai Standar					77.185.837.600,00					Masyarakat dan Puskesmas
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	21.781.529.000,00					
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					956.502.000,00					
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	956.502.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
		Puskesmas Buaran					**3.538.579.900,00**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**3.538.579.900,00**					
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**3.538.579.900,00**					
61.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**225.029.480.000,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.					***2.803.660.900,00***					
			1.Persentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	2.803.660.900,00					
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					71.286.077.000,00					Masyarakat dan Puskesmas
		Terlaksananya peningkatan mutu layanan BLUD sesuai SOP dan standar pelayanan yang ditetapkan					71.286.077.000,00					Masyarakat dan Puskesmas
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	71.286.077.000,00					
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.803.660.900,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.803.660.900,00	Kab. Pekalongan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
62.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**90.322.693.692,00**					
		Meningkatnya cakupan dan mutu pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.					***734.919.000,00***					
			1.Persentase Fasyankes yang memenuhi unit layanan kesehatan sesuai standar	67.37 %	58.60 %	60.35 %	734.919.000,00					
			2.Jumlah kematian balita	189 Kasus	201 Kasus	198 Kasus	734.919.000,00					
			3.Persentase Puskesmas dengan wilayah kerjanya memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	46.15 %	15.38 %	23.07 %	734.919.000,00					
			4.Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	85 %	70 %	75 %	734.919.000,00					
			5.Pemeriksaan ANC 6 kali selama masa kehamilan	90 %	82 %	85 %	734.919.000,00					
			6.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	80 %	40 %	50 %	734.919.000,00					
			7.Angka populasi bebas penyakit menular	95 %	90 %	91 %	734.919.000,00					
			8.Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80.50 %	80.10 %	80.20 %	734.919.000,00					
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					77.185.837.600,00					Masyarakat dan Puskesmas
		Terpenuhinya Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai Standar					77.185.837.600,00					Masyarakat dan Puskesmas
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	21.781.529.000,00					
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					734.919.000,00					
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	734.919.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
		Puskesmas Tirto 1					**4.710.865.290,00**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**4.710.865.290,00**					
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**4.710.865.290,00**					
63.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**225.029.480.000,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.					***3.653.225.290,00***					
			1.Persentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	3.653.225.290,00					
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					71.286.077.000,00					Masyarakat dan Puskesmas
		Terlaksananya peningkatan mutu layanan BLUD sesuai SOP dan standar pelayanan yang ditetapkan					71.286.077.000,00					Masyarakat dan Puskesmas
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	71.286.077.000,00					
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					3.653.225.290,00					
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.653.225.290,00	Kab. Pekalongan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
64.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**90.322.693.692,00**					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Meningkatnya cakupan dan mutu pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.					***1.057.640.000,00***					
			1.Persentase Fasyankes yang memenuhi unit layanan kesehatan sesuai standar	67.37 %	58.60 %	60.35 %	1.057.640.000,00					
			2.Jumlah kematian balita	189 Kasus	201 Kasus	198 Kasus	1.057.640.000,00					
			3.Persentase Puskesmas dengan wilayah kerjanya memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	46.15 %	15.38 %	23.07 %	1.057.640.000,00					
			4.Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	85 %	70 %	75 %	1.057.640.000,00					
			5.Pemeriksaan ANC 6 kali selama masa kehamilan	90 %	82 %	85 %	1.057.640.000,00					
			6.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	80 %	40 %	50 %	1.057.640.000,00					
			7.Angka populasi bebas penyakit menular	95 %	90 %	91 %	1.057.640.000,00					
			8.Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80.50 %	80.10 %	80.20 %	1.057.640.000,00					
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					77.185.837.600,00					Masyarakat dan Puskesmas
		Terpenuhinya Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai Standar					77.185.837.600,00					Masyarakat dan Puskesmas
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	21.781.529.000,00					
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					1.057.640.000,00					
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.057.640.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
		Puskesmas Tirto 2					**2.038.938.910,00**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**2.038.938.910,00**					
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**2.038.938.910,00**					
65.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**225.029.480.000,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.					***1.433.547.910,00***					
			1.Persentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	1.433.547.910,00					
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					71.286.077.000,00					Masyarakat dan Puskesmas
		Terlaksananya peningkatan mutu layanan BLUD sesuai SOP dan standar pelayanan yang ditetapkan					71.286.077.000,00					Masyarakat dan Puskesmas
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	71.286.077.000,00					
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1.433.547.910,00					
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.433.547.910,00	Kab. Pekalongan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
66.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**90.322.693.692,00**					
		Meningkatnya cakupan dan mutu pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.					***605.391.000,00***					
			1.Persentase Fasyankes yang memenuhi unit layanan kesehatan sesuai standar	67.37 %	58.60 %	60.35 %	605.391.000,00					
			2.Jumlah kematian balita	189 Kasus	201 Kasus	198 Kasus	605.391.000,00					
			3.Persentase Puskesmas dengan wilayah kerjanya memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	46.15 %	15.38 %	23.07 %	605.391.000,00					
			4.Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	85 %	70 %	75 %	605.391.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			5.Pemeriksaan ANC 6 kali selama masa kehamilan	90 %	82 %	85 %	605.391.000,00					
			6.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	80 %	40 %	50 %	605.391.000,00					
			7.Angka populasi bebas penyakit menular	95 %	90 %	91 %	605.391.000,00					
			8.Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80.50 %	80.10 %	80.20 %	605.391.000,00					
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					77.185.837.600,00					Masyarakat dan Puskesmas
		Terpenuhinya Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai Standar					77.185.837.600,00					Masyarakat dan Puskesmas
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	21.781.529.000,00					
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					605.391.000,00					
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	605.391.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
		Puskesmas Wiradesa					**4.476.159.543,00**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**4.476.159.543,00**					
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**4.476.159.543,00**					
67.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**225.029.480.000,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.					***3.617.948.543,00***					
			1.Persentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	3.617.948.543,00					
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					71.286.077.000,00					Masyarakat dan Puskesmas
		Terlaksananya peningkatan mutu layanan BLUD sesuai SOP dan standar pelayanan yang ditetapkan					71.286.077.000,00					Masyarakat dan Puskesmas
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	71.286.077.000,00					
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					3.617.948.543,00					
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.617.948.543,00	Kab. Pekalongan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
68.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**90.322.693.692,00**					
		Meningkatnya cakupan dan mutu pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.					***858.211.000,00***					
			1.Persentase Fasyankes yang memenuhi unit layanan kesehatan sesuai standar	67.37 %	58.60 %	60.35 %	858.211.000,00					
			2.Jumlah kematian balita	189 Kasus	201 Kasus	198 Kasus	858.211.000,00					
			3.Persentase Puskesmas dengan wilayah kerjanya memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	46.15 %	15.38 %	23.07 %	858.211.000,00					
			4.Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	85 %	70 %	75 %	858.211.000,00					
			5.Pemeriksaan ANC 6 kali selama masa kehamilan	90 %	82 %	85 %	858.211.000,00					
			6.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	80 %	40 %	50 %	858.211.000,00					
			7.Angka populasi bebas penyakit menular	95 %	90 %	91 %	858.211.000,00					
			8.Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80.50 %	80.10 %	80.20 %	858.211.000,00					
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					77.185.837.600,00					Masyarakat dan Puskesmas

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terpenuhinya Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai Standar					77.185.837.600,00					Masyarakat dan Puskesmas
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	21.781.529.000,00					
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					858.211.000,00					
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	858.211.000,00	Kab. Pekalongan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
		Puskesmas Wonokerto 1					**4.196.862.230,00**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**4.196.862.230,00**					
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**4.196.862.230,00**					
69.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**225.029.480.000,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.					***3.323.648.230,00***					
			1.Persentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	3.323.648.230,00					
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					71.286.077.000,00					Masyarakat dan Puskesmas
		Terlaksananya peningkatan mutu layanan BLUD sesuai SOP dan standar pelayanan yang ditetapkan					71.286.077.000,00					Masyarakat dan Puskesmas
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	71.286.077.000,00					
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					3.323.648.230,00					
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.323.648.230,00	Kab. Pekalongan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
70.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**90.322.693.692,00**					
		Meningkatnya cakupan dan mutu pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.					***873.214.000,00***					
			1.Persentase Fasyankes yang memenuhi unit layanan kesehatan sesuai standar	67.37 %	58.60 %	60.35 %	873.214.000,00					
			2.Jumlah kematian balita	189 Kasus	201 Kasus	198 Kasus	873.214.000,00					
			3.Persentase Puskesmas dengan wilayah kerjanya memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	46.15 %	15.38 %	23.07 %	873.214.000,00					
			4.Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	85 %	70 %	75 %	873.214.000,00					
			5.Pemeriksaan ANC 6 kali selama masa kehamilan	90 %	82 %	85 %	873.214.000,00					
			6.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	80 %	40 %	50 %	873.214.000,00					
			7.Angka populasi bebas penyakit menular	95 %	90 %	91 %	873.214.000,00					
			8.Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80.50 %	80.10 %	80.20 %	873.214.000,00					
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					77.185.837.600,00					Masyarakat dan Puskesmas
		Terpenuhinya Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai Standar					77.185.837.600,00					Masyarakat dan Puskesmas
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	21.781.529.000,00					
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					873.214.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	873.214.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					**178.095.327.003,00**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**178.000.327.003,00**					
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**					**178.000.327.003,00**					
71.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**22.531.305.003,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah					***22.406.305.003,00***					
			1.Presentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	22.406.305.003,00					
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					40.000.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan
		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun Tepat waktu					40.000.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00					
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00					
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					20.000.000,00					
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					20.000.000,00					
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					18.334.305.003,00					Masyarakat Kab Pekalongan
		Pesentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					18.334.305.003,00					Masyarakat Kab Pekalongan
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	320.000.000,00					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	196 Orang/bulan	196 Orang/bulan	196 Orang/bulan	18.014.305.003,00					
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					18.014.305.003,00					
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	196 Orang/bulan	196 Orang/bulan	196 Orang/bulan	18.014.305.003,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					320.000.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	320.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					15.000.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan
		Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					15.000.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	10 Orang	15.000.000,00					
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					15.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	10 Orang	15.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					190.000.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan
		Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah					190.000.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	90 Laporan	90 Laporan	60.000.000,00					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	30.000.000,00					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	20.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	35.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	25.000.000,00					
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					20.000.000,00					
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					35.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	35.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					25.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					30.000.000,00					
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					20.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					60.000.000,00					
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	90 Laporan	90 Laporan	60.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					180.000.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan
		Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik daerah					180.000.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	30.000.000,00					
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	20 Unit	150.000.000,00					
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					30.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	30.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					150.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	20 Unit	150.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.846.000.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan
		Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemda					2.846.000.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	900.000.000,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.946.000.000,00					
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					900.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	900.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.946.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.946.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					926.000.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan
		Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Daerah					926.000.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	14 Unit	14 Unit	14 Unit	140.000.000,00					
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	13 Unit	13 Unit	201.000.000,00					
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	68 Unit	68 Unit	68 Unit	300.000.000,00					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	35.000.000,00					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	50 Unit	80 Unit	250.000.000,00					
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					35.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					300.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	68 Unit	68 Unit	68 Unit	300.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar					140.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	14 Unit	14 Unit	14 Unit	140.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					250.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	50 Unit	80 Unit	250.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					201.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	13 Unit	13 Unit	201.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
72.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**					**29.590.483.000,00**					
		Meningkatnya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air secara berkelanjutan					***29.590.483.000,00***					
			1.Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	3.768 %	3.695 %	3.713 %	29.590.483.000,00					
			2.Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	86.83 %	83.50 %	84.51 %	29.590.483.000,00					
			3.Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	90.10 %	81.65 %	83.76 %	29.590.483.000,00					
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					23.650.483.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan
		Persentase Panjang sungai yang dinormalisasi dan tanggul yang dibangun atau ditingkatkan, Persentase penurunan wilayah genangan banjir dan rob					23.650.483.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	530.000.000,00					
			Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	6.078.419.000,00					
			Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	10 Unit	11 Unit	11 Unit	510.000.000,00					
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	1.2 KM	1.2 KM	1.2 KM	7.942.064.000,00					
			Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	1 KM	1 KM	1 KM	5.250.000.000,00					
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	2 KM	2 KM	2 KM	1.700.000.000,00					
			Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	3 KM	3 KM	3 KM	140.000.000,00					
			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	1 KM	1 KM	1 KM	1.500.000.000,00					
	1.03.02.2.01.0013	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir					6.078.419.000,00					
		Terbangunnya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	6.078.419.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai					140.000.000,00					
		Beroperasi dan Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	3 KM	3 KM	3 KM	140.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.03.02.2.01.0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir					510.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	10 Unit	11 Unit	11 Unit	510.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai					1.700.000.000,00					
		Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	2 KM	2 KM	2 KM	1.700.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing					7.942.064.000,00					
		Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	1.2 KM	1.2 KM	1.2 KM	7.942.064.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.03.02.2.01.0113	Pembangunan Kanal Banjir					5.250.000.000,00					
		Terbangunnya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	1 KM	1 KM	1 KM	5.250.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai					1.500.000.000,00					
		Terehabilitasinya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	1 KM	1 KM	1 KM	1.500.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya					530.000.000,00					
		Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	530.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					5.940.000.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan
		Luas jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik					5.940.000.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan
			Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	2 UNIT	2 UNIT	2 UNIT	190.000.000,00					
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	1 KM	1 KM	1 KM	2.630.000.000,00					
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 KM	1 KM	1 KM	120.000.000,00					
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	7 KM	5 KM	5 KM	1.000.000.000,00					
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1 KM	1 KM	1 KM	2.000.000.000,00					
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan					2.630.000.000,00					
		Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	1 KM	1 KM	1 KM	2.630.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan					2.000.000.000,00					
		Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1 KM	1 KM	1 KM	2.000.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan					1.000.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	7 KM	5 KM	5 KM	1.000.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan					120.000.000,00					
		Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 KM	1 KM	1 KM	120.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.03.02.2.02.0053	Rehabilitasi Bendung Irigasi					190.000.000,00					
		Terehabilitasinya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	2 UNIT	2 UNIT	2 UNIT	190.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
73.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**					**4.321.381.000,00**					
		Meningkatnya akses air minum layak bagi penduduk					***4.321.381.000,00***					
			2.Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	89.39 %	88.78 %	88.93 %	4.321.381.000,00					
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					4.321.381.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan
		Jumlah SPAM yang terbangun					4.321.381.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00					
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100 SR	100 SR	100 SR	650.000.000,00					
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	9 Liter/Detik	9 Liter/Detik	9 Liter/Detik	2.071.381.000,00					
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	12 Liter/Detik	11 Liter/Detik	11 Liter/Detik	1.500.000.000,00					
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)					100.000.000,00					
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					1.500.000.000,00					
		Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	12 Liter/Detik	11 Liter/Detik	11 Liter/Detik	1.500.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					2.071.381.000,00					
		Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	9 Liter/Detik	9 Liter/Detik	9 Liter/Detik	2.071.381.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					650.000.000,00					
		Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100 SR	100 SR	100 SR	650.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
74.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**					**100.000.000,00**					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terpenuhinya sistem dan pengelolaan persampahan regional					***100.000.000,00***					
			1.Pesrsentase TPA/TPST terbangun	68.76 %	68.15 %	68.30 %	100.000.000,00					
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota					100.000.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan
		Jumlah TPA/TPST/SPA/TP S-3R/TPS terbangun					100.000.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	0 Ton/hari	1 Ton/hari	1 Ton/hari	100.000.000,00					
	1.03.04.2.01.0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R					100.000.000,00					
		Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	0 Ton/hari	1 Ton/hari	1 Ton/hari	100.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
75.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**					**1.565.000.000,00**					
		Meningkatnya cakupan dan kualitas pengelolaan air limbah domestik					***1.565.000.000,00***					
			1.Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	63.11 %	62.50 %	62.66 %	1.565.000.000,00					
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					1.565.000.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan
		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap pengolahan air limbah domestik					1.565.000.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00					
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)					50.000.000,00					
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap pengolahan air limbah domestik					1.565.000.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	-	-	-	1.015.000.000,00					
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	-	-	-	500.000.000,00					
	1.03.05.2.01.0049	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat					500.000.000,00					
		Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	-	-	20 M^3/Hari	500.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.03.05.2.01.0051	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat					1.015.000.000,00					
		Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	-	-	62 Rumah Tangga	1.015.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
76.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**					**5.234.979.000,00**					
		Meningkatnya kapasitas sistem drainase jalan					***5.234.979.000,00***					
			1.Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	44.74 Persentase	44.58 Persentase	44.62 Persentase	5.234.979.000,00					
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota					5.234.979.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan
		Panjang drainase kondisi baik (drainase jalan)					5.234.979.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	1.500 Meter	1.500 Meter	1.500 Meter	5.134.979.000,00					
	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan					5.134.979.000,00					
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	1.500 Meter	1.500 Meter	1500 Meter	5.134.979.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan					100.000.000,00					
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
77.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**					**4.312.000.000,00**					
		Meningkatnya kualitas bangunan gedung yang aman, fungsional, dan sesuai dengan kaidah tata bangunan.					***4.312.000.000,00***					
			1.Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100 %	100 %	100 %	4.312.000.000,00					
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					4.312.000.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan
		Jumlah rekomendasi teknis IMB yang diterbitkan					4.312.000.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	400 Dokumen	240 Dokumen	280 Dokumen	100.000.000,00					
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG					100.000.000,00					
		Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	400 Dokumen	240 Dokumen	280 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
		Jumlah rekomendasi teknis IMB yang diterbitkan					4.312.000.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan
			Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	4.212.000.000,00					
	1.03.08.2.01.0034	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					4.212.000.000,00					
		Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	20 Bangunan Gedung	4.212.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
78.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**					**3.928.000.000,00**					
		Meningkatnya penataan kawasan dan lingkungan yang sesuai dengan RTBL					***3.928.000.000,00***					
			1.Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	100 %	44.45 %	55.55 %	3.928.000.000,00					
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota					3.928.000.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		jumlah kawasan yang tertata sesuai RTBL (M2)					3.928.000.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00					
			Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	2 Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	3.928.000.000,00					
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					0,00					
		Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota					3.928.000.000,00					
		Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	2 Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	3.928.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
79.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**					**105.982.179.000,00**					
		Meningkatnya kualitas jaringan jalan untuk mendukung mobilitas dan pertumbuhan wilayah.					***105.982.179.000,00***					
			1.Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	80.69 %	79.09 %	79.49 %	105.982.179.000,00					
			2.Tingkat kemantapan Jembatan	89.589 %	87.695 %	88.142 %	105.982.179.000,00					
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					105.982.179.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan
		Panjang jalan terbangun/ terehabilitasi					105.982.179.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	120.000.000,00					
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	7 KM	7 KM	7 KM	5.000.000.000,00					
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	20 KM	20 KM	20 KM	98.062.179.000,00					
			Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	1 Meter	1 Meter	1 Meter	1.000.000.000,00					
			Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	1 Meter	1 Meter	1 Meter	1.800.000.000,00					
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan					120.000.000,00					
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan					5.000.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	7 KM	7 KM	7 KM	5.000.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan					98.062.179.000,00					
		Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	20 KM	20 KM	20 KM	98.062.179.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.03.10.2.01.0057	Penggantian Jembatan					1.000.000.000,00					
		Terlaksananya Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	1 Meter	1 Meter	1 Meter	1.000.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.03.10.2.01.0058	Rehabilitasi Jembatan					1.800.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	1 Meter	1 Meter	1 Meter	1.800.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
80.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**					**125.000.000,00**					
		Meningkatnya kualitas pelaku jasa konstruksi dalam mendukung pembangunan infrastruktur					***125.000.000,00***					
			1.Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	72.28 %	46.19 %	52.72 %	125.000.000,00					
			2.Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100 %	100 %	100 %	125.000.000,00					
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi					20.000.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan
		Prosentase Tenaga terampil dan K3 yang memiliki sertifikat kompetensi					20.000.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	40 Orang	30 Orang	30 Orang	20.000.000,00					
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis					20.000.000,00					
		Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	40 Orang	30 Orang	30 Orang	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					100.000.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan
		Persentase ketersedian data dan informasi jasa konstruksi yang tersedia dan terupdate per tahun					100.000.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00					
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota					100.000.000,00					
		Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi					5.000.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan
		Persentase proyek dalam kewenangan pengawasan tanpa kecelakaan konstruksi					5.000.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	15 Paket Pekerjaan	12 Paket Pekerjaan	12 Paket Pekerjaan	5.000.000,00					
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota					5.000.000,00					
		Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	15 Paket Pekerjaan	12 Paket Pekerjaan	12 Paket Pekerjaan	5.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
81.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**					**310.000.000,00**					
		Meningkatnya kualitas penataan ruang wilayah.					***310.000.000,00***					
			1.Persentase Kawasan yang memiliki RDTRK/RTRK/RTBL	71.43 %	42.85 %	42.85 %	310.000.000,00					
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota					250.000.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan
		Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yang ditinjau kembali					250.000.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00					
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota					100.000.000,00					
		Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota					150.000.000,00					
		Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					60.000.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan
		jumlah lokasi yang didata atas kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW dan monitoring					60.000.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	300 Dokumen	250 Dokumen	250 Dokumen	60.000.000,00					
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang					60.000.000,00					
		Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	300 Dokumen	250 Dokumen	250 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**95.000.000,00**					
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**					**95.000.000,00**					
82.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**					**20.000.000,00**					
		Meningkatnya kepastian hukum dan penyelesaian konflik atas tanah garapan secara adil dan damai.					***10.000.000,00***					
			1.Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100 %	100 %	100 %	10.000.000,00					
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota					20.000.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan
		Jumlah permasalahan pertanahan yang terselesaikan (kasus)					20.000.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	10.000.000,00					
			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00					
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					10.000.000,00					
		Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					10.000.000,00					
		Terinventarisasinya Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
83.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**					**25.000.000,00**					
		Meningkatnya pemerataan penguasaan dan pemilikan tanah					***25.000.000,00***					
			1.Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	25.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					25.000.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan
		Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota					25.000.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan
			Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00					
	2.10.06.2.01.0007	Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.					25.000.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.	Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
84.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**					**50.000.000,00**					
		Tertatanya penggunaan dan pemanfaatan tanah secara optimal					***50.000.000,00***					
			1.Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100 %	100 %	100 %	50.000.000,00					
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota					50.000.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan
		Luas tanah yang diadakan/ dibebaskan untuk kepentingan umum (Ha)					50.000.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00					
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah					50.000.000,00					
		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup					**36.867.240.000,00**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**4.154.748.000,00**					
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**					**4.154.748.000,00**					
85.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**					**695.000.000,00**					
		Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan masyarakat terdampak relokasi program					***545.000.000,00***					
			1.Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100 %	100 %	100 %	545.000.000,00					
			2.Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100 %	100 %	100 %	545.000.000,00					
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					25.000.000,00					Rehabilitasi Dan Pembangunan Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Pemerintah Pada Masyarakat Kabupaten Pekalongan
		Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota secara baik					25.000.000,00					Rehabilitasi Dan Pembangunan Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Pemerintah Pada Masyarakat Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00					
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00					
	1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota					0,00					
		Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	2 Dokumen	2 Dokumen	12 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					25.000.000,00					
		Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	2 Dokumen	2 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					300.000.000,00					Rehabilitasi Dan Pembangunan Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Pemerintah Pada Masyarakat Kabupaten Pekalongan
		Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					300.000.000,00					Rehabilitasi Dan Pembangunan Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Pemerintah Pada Masyarakat Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	5 Unit Rumah	13 Unit Rumah	5 Unit Rumah	150.000.000,00					
			Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Unit Rumah	1 Unit Rumah	1 Unit Rumah	0,00					
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	15 Unit Rumah	32 Unit Rumah	10 Unit Rumah	150.000.000,00					
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana					150.000.000,00					
		Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	15 Unit Rumah	32 Unit Rumah	6 Unit Rumah	150.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana					150.000.000,00					
		Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	5 Unit Rumah	13 Unit Rumah	3 Unit Rumah	150.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	1.04.02.2.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					0,00					
		Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Unit Rumah	1 Unit Rumah	12 Unit Rumah	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus					300.000.000,00					Kelembagaan Pengelola Rusunawa Kedungwuni Di Kabupaten Pekalongan
		Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus					300.000.000,00					Kelembagaan Pengelola Rusunawa Kedungwuni Di Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00					
	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun					300.000.000,00					
		Terfasilitasinya Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kedungwuni || Kelurahan Kedungwuni Barat || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan					70.000.000,00					Koordinasi Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Masyarakat Di Kabupaten Pekalongan
		Tersusunnya laporan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan permohonan izin yang diajukan					70.000.000,00					Koordinasi Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Masyarakat Di Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	0,00					
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	20.000.000,00					
			Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	50.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan					20.000.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	10 Laporan	10 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.04.02.2.06.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum					0,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	2 Laporan	2 Laporan	12 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.04.02.2.06.0005	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman					50.000.000,00					
		Terbentuknya/terpeliharanya Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	50.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
86.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**					**1.650.000.000,00**					
		Meningkatnya kawasan permukiman kumuh yang ditangani					***950.000.000,00***					
			1.Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang sudah ditangani	2.35 %	2.15 %	2.20 %	950.000.000,00					
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman					150.000.000,00					Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kabupaten Pekalongan
		Terlaksanya Koordinasi dengan Pokja PKP dan Forum PKP					150.000.000,00					Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	5 Laporan	6 Laporan	5 Laporan	150.000.000,00					
	1.04.03.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum					150.000.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	5 Laporan	6 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					250.000.000,00					Kawasan Kumuh Di Kabupaten Pekalongan
		Tersusunnya dokumen review RP2KPKPK					250.000.000,00					Kawasan Kumuh Di Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	250.000.000,00					
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP					250.000.000,00					
		Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	250.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					1.250.000.000,00					Kawasan Kumuh Di Kabupaten Pekalongan
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					1.250.000.000,00					Kawasan Kumuh Di Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00					
			Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	300.000.000,00					
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	150.000.000,00					
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	10 Unit	9 Unit	10 Unit	130.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	50 Unit Rumah	25 Unit Rumah	25 Unit Rumah	250.000.000,00					
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	1 Hektar	1 Hektar	Hektar	0,00					
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	7 Ha	2 Ha	20 Ha	300.000.000,00					
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni					250.000.000,00					
		Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	50 Unit Rumah	25 Unit Rumah	9 Unit Rumah	250.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU					300.000.000,00					
		Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	2 Dokumen	2 Dokumen	12 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh					150.000.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	6 Laporan	6 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh					120.000.000,00					
		Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	120.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh					300.000.000,00					
		Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	7 Ha	2 Ha	12 Ha	300.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					130.000.000,00					
		Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	10 Unit	9 Unit	3 Unit	130.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.04.03.2.03.0014	Operasional dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali					0,00					
		Terlaksanananya operasional dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	1 Hektar	1 Hektar	12 Hektar	0,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
87.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**					**840.000.000,00**					
		Meningkatnya RTLH yang ditangani					***840.000.000,00***					
			1.Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	3.72 %	3.20 %	3.39 %	840.000.000,00					
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota					840.000.000,00					Perbaikan RTLH Dan Dokumen Kesepakatan Kerja Sama Terhadap Tumbuh Berkembangnya Permukiman Kumuh Diluar Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 Ha Yang Diperbaiki Masyarakat Di Kabupaten Pekalongan
		Terlaksananya pembangunan rumah layak huni					840.000.000,00					Perbaikan RTLH Dan Dokumen Kesepakatan Kerja Sama Terhadap Tumbuh Berkembangnya Permukiman Kumuh Diluar Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 Ha Yang Diperbaiki Masyarakat Di Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	100 Orang	100 Orang	100 Orang	0,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	7 Unit	8 Unit	8 Unit	130.000.000,00					
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	90 Unit Rumah	100 Unit Rumah	100 Unit Rumah	710.000.000,00					
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					710.000.000,00					
		Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	90 Unit Rumah	100 Unit Rumah	25 Unit Rumah	710.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru					130.000.000,00					
		Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	7 Unit	8 Unit	3 Unit	130.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.04.04.2.01.0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh					0,00					
		Meningkatnya Kesadaran Publik dalam Rangka Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	100 Orang	100 Orang	12 Orang	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
88.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**					**959.748.000,00**					
		Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas prasarana, sarana, dan utilitas umum dalam mendukung hunian yang layak.					***959.748.000,00***					
			1.Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100 %	100 %	100 %	959.748.000,00					
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					959.748.000,00					Perumahan Formal Di Kabupaten Pekalongan
		Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					959.748.000,00					Perumahan Formal Di Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	20.000.000,00					
			Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	3 Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi	939.748.000,00					
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan					20.000.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	8 Laporan	8 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan					939.748.000,00					
		Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	3 Lokasi	3 Lokasi	4 Lokasi	939.748.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
89.	**1.04.06**	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**					**10.000.000,00**					
		Meningkatnya mutu layanan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman					***10.000.000,00***					
			1.Jumlah pengembang yang difasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi	12 Angka	12 Angka	12 Angka	10.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil					10.000.000,00					Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan
		Tersedianya Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil yang dikeluarkan					10.000.000,00					Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	3 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00					
	1.04.06.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil					10.000.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	3 Laporan	2 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**32.712.492.000,00**					
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**					**32.712.492.000,00**					
90.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**20.926.492.000,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah					***20.826.492.000,00***					
			1.Presentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	20.826.492.000,00					
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					35.000.000,00					Administrasi Perkantoran Di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan.					35.000.000,00					Administrasi Perkantoran Di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00					
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00					
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					20.000.000,00					
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	8 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					15.000.000,00					
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12.900.975.000,00					Administrasi Perkantoran Di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, akuntabel, dan tepat waktu					12.900.975.000,00					Administrasi Perkantoran Di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	263.400.000,00					
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	199 Orang/bulan	159 Orang/bulan	169 Orang/bulan	12.632.575.000,00					
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					12.632.575.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	199 Orang/bulan	159 Orang/bulan	12 Orang/bulan	12.632.575.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.11.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					263.400.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	263.400.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					5.000.000,00					
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					50.000.000,00					Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
		Teradministrasikannya pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah secara tertib, transparan, dan tepat waktu					50.000.000,00					Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00					
	2.11.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah					50.000.000,00					
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					7.000.000,00					Administrasi Perkantoran Di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
		Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah secara tertib					7.000.000,00					Administrasi Perkantoran Di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	10 Orang	7.000.000,00					
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					7.000.000,00					
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	1 Orang	7.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					195.000.000,00					Administrasi Perkantoran Di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
		Terselenggaranya layanan administrasi umum perkantoran yang tertib dan andal					195.000.000,00					Administrasi Perkantoran Di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230 Laporan	110 Laporan	110 Laporan	75.000.000,00					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	15.000.000,00					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	15 Paket	15 Paket	20.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	30.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	15.000.000,00					
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					20.000.000,00					
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	15 Paket	12 Paket	20.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					30.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					15.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	15.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					15.000.000,00					
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	10 Paket	15.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					40.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					75.000.000,00					
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230 Laporan	110 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					45.000.000,00					Administrasi Perkantoran Di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
		Terpenuhinya kebutuhan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai spesifikasi dan ketentuan.					45.000.000,00					Administrasi Perkantoran Di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	5 Unit	5 Unit	10.000.000,00					
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	16 Unit	12 Unit	35.000.000,00					
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0,00					
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					10.000.000,00					
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	5 Unit	12 Unit	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					35.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	16 Unit	12 Unit	35.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00					
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					7.394.600.000,00					Administrasi Perkantoran Di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran operasional perangkat daerah					7.394.600.000,00					Administrasi Perkantoran Di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	194.600.000,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	7.200.000.000,00					
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					194.600.000,00					
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	194.600.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					7.200.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	7.200.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					298.917.000,00					Administrasi Perkantoran Di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
		Terpeliharanya BMD penunjang dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai standar layanan					298.917.000,00					Administrasi Perkantoran Di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00					
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	72 Unit	68 Unit	68 Unit	186.000.000,00					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	32.500.000,00					
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	Unit	5 Unit	5.417.000,00					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	33 Unit	33 Unit	25.000.000,00					
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					32.500.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	32.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					186.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	72 Unit	68 Unit	12 Unit	186.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.11.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					5.417.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	Unit	12 Unit	5.417.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					25.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	33 Unit	12 Unit	25.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					50.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	12 Unit	50.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
91.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**					**50.000.000,00**					
		Tersusunnya dokumen perencanaan lingkungan hidup yang berkualitas sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan berkelanjutan.					***50.000.000,00***					
			1.Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup	100 %	100 %	100 %	50.000.000,00					
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota					50.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
		Tersusunnya dokumen KLHS RPJPD/RPJMD serta Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota					50.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
			Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	-	-	-	50.000.000,00					
	2.11.02.2.02.0004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS					50.000.000,00					
		Terlaksananya pemantauan dan evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	-	-	12 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
92.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**					**625.000.000,00**					
		Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan					***610.000.000,00***					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			1.Prosentase Dokumen Hasil Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	100 %	100 %	100 %	610.000.000,00					
			2.Prosentase Peningkatan Luas Pemulihan Kerusakan Lingkungan yang ditangani	100 %	100 %	100 %	610.000.000,00					
		Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					550.000.000,00					Meningkatnya Kualitas Air Sungai, Udara Ambien, dan Tutupan Lahan melalui Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup
			Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00					
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00					
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	45 Dokumen	30 Dokumen	32 Dokumen	75.000.000,00					
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00					
			Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	1 Unit	2 Unit	2 Unit	300.000.000,00					
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut					75.000.000,00					
		Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	45 Dokumen	30 Dokumen	0 Dokumen	75.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim					0,00					
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK					70.000.000,00					
		Tersedianya dokumen hasil inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	70.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah					55.000.000,00					
		Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	55.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	2.11.03.2.01.0013	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota					300.000.000,00					
		Tersedianya peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	1 Unit	2 Unit	1 Unit	300.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota					20.000.000,00					
		Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	2 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					0,00					Cakupan pemantauan kualitas air, Cakupan pemantauan kualitas udara
		Tersusunnya dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tepat					0,00					Cakupan pemantauan kualitas air, Cakupan pemantauan kualitas udara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0,00					
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat					0,00					
		Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					75.000.000,00					Cakupan pemantauan kualitas air, Cakupan pemantauan kualitas udara
		Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Lingkungan Hidup di Kabupaten/Kota					75.000.000,00					Cakupan pemantauan kualitas air, Cakupan pemantauan kualitas udara
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.000.000,00					
			luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	12 Ha	8 Ha	9 Ha	65.000.000,00					
	2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi					65.000.000,00					
		kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	12 Ha	8 Ha	12 Ha	65.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi					10.000.000,00					
		kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	12 Kegiatan	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					550.000.000,00					Meningkatnya Kualitas Air Sungai, Udara Ambien, dan Tutupan Lahan melalui Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup
		Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					550.000.000,00					Meningkatnya Kualitas Air Sungai, Udara Ambien, dan Tutupan Lahan melalui Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup
			Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	-	-	-	15.000.000,00					
			Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	-	-	-	15.000.000,00					
	2.11.03.2.01.0006	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut					15.000.000,00					
		Laporan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	-	-	1 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	2.11.03.2.01.0010	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota					15.000.000,00					
		Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	-	-	12 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
93.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**					**250.000.000,00**					
		Terlestarikannya keanekaragaman hayati sebagai bagian dari daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.					***250.000.000,00***					
			1.Presentase RTH dan Taman Kehati lainnya dalam kondisi baik	85 %	72 %	75 %	250.000.000,00					
			2.Persentase ketersediaan dokumen pengelolaan kehati (perencanaan, penilaian dan evaluasi kehati)	100 %	100 %	100 %	250.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota					250.000.000,00					RTH dalam kondisi baik
		Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota					250.000.000,00					RTH dalam kondisi baik
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00					
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Ha	72 Ha	75 Ha	150.000.000,00					
	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati					100.000.000,00					
		Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)					150.000.000,00					
		Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Ha	72 Ha	10 Ha	150.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
94.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**					**40.000.000,00**					
		Meningkatnya pengelolaan B3 dan Limbah B3 yang aman, terkendali, dan sesuai dengan standar lingkungan.					***40.000.000,00***					
			1.Persentase pelaku usaha dan/atau Kegiatan yang telah memenuhi rincian teknis pengelolaan limbah B3	88 %	84 %	85 %	40.000.000,00					
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3					0,00					pengelolaan limbah B3
		Terlaksananya Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3					0,00					pengelolaan limbah B3
			jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0,00					
	2.11.05.2.01.0004	Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota					0,00					
		tersedianya sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia	1 Unit	1 Unit	12 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					40.000.000,00					pelaku usaha dan/atau yang telah memenuhi rincian teknis pengelolaan limbah B3
		Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten/Kota secara terstruktur					40.000.000,00					pelaku usaha dan/atau yang telah memenuhi rincian teknis pengelolaan limbah B3
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	40.000.000,00					
			jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina	30 Usaha	40 Usaha	30 Usaha	0,00					
	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan					40.000.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	5 Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	2.11.05.2.02.0004	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota					0,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		terlaksananya pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina	30 Usaha	40 Usaha	12 Usaha	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
95.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**					**40.000.000,00**					
		Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kegiatan terhadap perizinan lingkungan hidup dan ketentuan PPLH.					***20.000.000,00***					
			1.Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	50 %	90 %	80 %	20.000.000,00					
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					40.000.000,00					penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Kewenangan Perizinannya di Kabupaten Pekalongan					40.000.000,00					penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	12 Badan Usaha	12 Badan Usaha	12 Badan Usaha	20.000.000,00					
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00					
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH					20.000.000,00					
		Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					20.000.000,00					
		Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	12 Badan Usaha	12 Badan Usaha	12 Badan Usaha	20.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
96.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**					**30.000.000,00**					
		Meningkatnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.					***30.000.000,00***					
			1.Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	100 %	100 %	100 %	30.000.000,00					
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					30.000.000,00					sekolah yang sudah melaksanakan PBLHS (Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah tingkat kabupaten
		Terlaksananya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					30.000.000,00					sekolah yang sudah melaksanakan PBLHS (Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah tingkat kabupaten
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	20 Dokumen	13 Dokumen	15 Dokumen	30.000.000,00					
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup					30.000.000,00					
		Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	20 Dokumen	13 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
97.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**					**40.000.000,00**					
		Meningkatnya motivasi dan peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan melalui sistem penghargaan lingkungan hidup.					***40.000.000,00***					
			1.Jumlah Lembaga dan/atau Perorangan yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup	13 Lembaga	13 Lembaga	13 Lembaga	40.000.000,00					
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					40.000.000,00					Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan
		Terlaksananya kegiatan penghargaan lingkungan hidup kepada lembaga dan/atau perorangan di kabupaten/kota					40.000.000,00					Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	13 Entitas	13 Entitas	13 Entitas	40.000.000,00					
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					40.000.000,00					
		Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	13 Entitas	13 Entitas	12 Entitas	40.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
98.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**					**20.000.000,00**					
		Meningkatnya responsivitas dan penyelesaian pengaduan masyarakat terkait isu lingkungan hidup secara cepat dan tepat.					***20.000.000,00***					
			1.Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	20.000.000,00					
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota					20.000.000,00					pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / kota yang terselesaikan
		Terlaksananya tindak lanjut pengaduan lingkungan hidup					20.000.000,00					pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / kota yang terselesaikan
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	12 Pengaduan	12 Pengaduan	12 Pengaduan	20.000.000,00					
	2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota					20.000.000,00					
		Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	12 Pengaduan	12 Pengaduan	12 Pengaduan	20.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
99.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**					**10.691.000.000,00**					
		Meningkatnya pengelolaan sampah dari sumber hingga ke TPA.					***10.691.000.000,00***					
			1.Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	30.00 (%)	16.20 (%)	20.70 (%)	10.691.000.000,00					
			2.Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota (IKK)	63.75 %	49.95 %	54.45 %	10.691.000.000,00					
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah					10.691.000.000,00					timbulan sampah yang ditangani
		Terlaksananya kegiatan pengelolaan sampah dengan baik dan terstruktur					10.691.000.000,00					timbulan sampah yang ditangani
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00					
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	48 Kelompok	45 Kelompok	45 Kelompok	60.000.000,00					
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	99338.40 Ton	74401.60 Ton	82782.00 Ton	9.600.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	48180 Ton	26017.2 Ton	33244.2 Ton	100.000.000,00					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	70 Unit	50 Unit	55 Unit	881.000.000,00					
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					60.000.000,00					
		Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	48 Kelompok	45 Kelompok	12 Kelompok	60.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota					881.000.000,00					
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	70 Unit	50 Unit	12 Unit	881.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Air Tanah	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota					50.000.000,00					
		Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan					100.000.000,00					
		Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	48180 Ton	26017.2 Ton	1 Ton	100.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional					9.600.000.000,00					
		Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	99338.40 Ton	74401.60 Ton	11 Ton	9.600.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
		Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran					**16.236.459.000,00**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**16.236.459.000,00**					
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**					**16.236.459.000,00**					
100.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**14.622.647.640,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah					***14.608.647.640,00***					
			1.Presentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	14.608.647.640,00					
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.000.000,00					-
		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan.					10.000.000,00					-
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	10.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					10.000.000,00					
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Pajak Daerah	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					7.645.428.050,00					-
		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, akuntabel, dan tepat waktu.					7.645.428.050,00					-
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	82.757.050,00					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang/bulan	97 Orang/bulan	97 Orang/bulan	7.562.671.000,00					
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					7.562.671.000,00					
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang/bulan	97 Orang/bulan	97 Orang/bulan	7.562.671.000,00	Kab. Pekalongan	Pajak Daerah	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	
	1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					82.757.050,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	82.757.050,00	Kab. Pekalongan	Pajak Daerah	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					57.528.000,00					Satpol PP dan Damkar
		Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah secara tertib.					57.528.000,00					Satpol PP dan Damkar
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang	4 Orang	57.528.000,00					
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					57.528.000,00					
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang	6 Orang	57.528.000,00	Kab. Pekalongan	Pajak Daerah	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					109.545.000,00					Satpol PP dan Damkar
		Terselenggaranya layanan administrasi umum perkantoran yang tertib dan andal.					109.545.000,00					Satpol PP dan Damkar
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00					
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	13.775.000,00					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	74.770.000,00					
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	0,00					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	5.000.000,00					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	7.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	5.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	4.000.000,00					
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					7.000.000,00					
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	5 Paket	7.000.000,00	Kab. Pekalongan	Pajak Daerah	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					5.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	5.000.000,00	Kab. Pekalongan	Pajak Daerah	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					4.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	4.000.000,00	Kab. Pekalongan	Pajak Daerah	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					0,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	10 Paket	0,00	Kab. Pekalongan	Pajak Daerah	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					5.000.000,00					
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	20 Paket	5.000.000,00	Kab. Pekalongan	Pajak Daerah	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					0,00					
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	14 Dokumen	0,00	Kab. Pekalongan	Pajak Daerah	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					13.775.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	13.775.000,00	Kab. Pekalongan	Pajak Daerah	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					74.770.000,00					
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	74.770.000,00	Kab. Pekalongan	Pajak Daerah	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					4.710.248.000,00					Satpol PP dan Damkar
		Terpenuhinya kebutuhan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai spesifikasi dan ketentuan.					4.710.248.000,00					Satpol PP dan Damkar
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	5 Unit	5 Unit	15.000.000,00					
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	4.650.000.000,00					
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	3 Unit	3 Unit	10.248.000,00					
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	4 Unit	5 Unit	35.000.000,00					
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					15.000.000,00					
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	5 Unit	22 Unit	15.000.000,00	Kab. Pekalongan	Pajak Daerah	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					10.248.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	3 Unit	3 Unit	10.248.000,00	Kab. Pekalongan	Pajak Daerah	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					4.650.000.000,00					
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	2 Unit	4.650.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Kelurahan Kajen || 0	Pajak Daerah	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					35.000.000,00					
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	4 Unit	5 Unit	35.000.000,00	Kab. Pekalongan	Pajak Daerah	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.655.368.000,00					Satpol PP dan Damkar
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran operasional perangkat daerah.					1.655.368.000,00					Satpol PP dan Damkar
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	73.968.000,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.581.400.000,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	0,00					
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					0,00					
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	0,00	Kab. Pekalongan	Pajak Daerah	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					73.968.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	73.968.000,00	Kab. Pekalongan	Pajak Daerah	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.581.400.000,00					
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.581.400.000,00	Kab. Pekalongan	Pajak Daerah	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					434.530.590,00					Satpol PP dan Damkar
		Terpeliharanya BMD penunjang dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai standar layanan.					434.530.590,00					Satpol PP dan Damkar
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	11 Unit	395.434.590,00					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	30.096.000,00					
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	3 Unit	3 Unit	4.000.000,00					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit	8 Unit	5.000.000,00					
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					30.096.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	30.096.000,00	Kab. Pekalongan	Pajak Daerah	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					395.434.590,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	11 Unit	395.434.590,00	Kab. Pekalongan	Pajak Daerah	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	
	1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					4.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	3 Unit	10 Unit	4.000.000,00	Kab. Pekalongan	Pajak Daerah	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					5.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit	8 Unit	5.000.000,00	Kab. Pekalongan	Pajak Daerah	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	
101.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**1.238.691.360,00**					
		Meningkatnya rasa aman, Ketenteraman dan Ketertiban Umum					***1.238.691.360,00***					
			1.Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	100 %	100 %	1.238.691.360,00					
			2.Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	100 %	100 %	1.238.691.360,00					
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					690.570.120,00					Masyarakat Kab Pekalongan
		Tercapainya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat Tingkat kabupaten/kota					690.570.120,00					Masyarakat Kab Pekalongan
			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	63 Orang	43 Orang	49 Orang	62.000.000,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	8 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	36.245.000,00					
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	89 Dokumen	65 Dokumen	71 Dokumen	131.845.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	258 Laporan	154 Laporan	180 Laporan	148.340.000,00					
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	292 laporan	244 laporan	256 laporan	307.140.120,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	6 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	5 Unit	5 Unit	5 Unit	0,00					
		Tercapainya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan pengawalan					690.570.120,00					Masyarakat Kab Pekalongan
			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	63 Orang	43 Orang	49 Orang	62.000.000,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	8 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	36.245.000,00					
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	89 Dokumen	65 Dokumen	71 Dokumen	131.845.000,00					
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	258 Laporan	154 Laporan	180 Laporan	148.340.000,00					
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	292 laporan	244 laporan	256 laporan	307.140.120,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	6 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	5 Unit	5 Unit	5 Unit	0,00					
		Tercapainya Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum					690.570.120,00					Masyarakat Kab Pekalongan
			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	63 Orang	43 Orang	49 Orang	62.000.000,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	8 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	36.245.000,00					
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	89 Dokumen	65 Dokumen	71 Dokumen	131.845.000,00					
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	258 Laporan	154 Laporan	180 Laporan	148.340.000,00					
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	292 laporan	244 laporan	256 laporan	307.140.120,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	6 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	5 Unit	5 Unit	5 Unit	0,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Tersediaanya Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada					690.570.120,00					Masyarakat Kab Pekalongan
			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	63 Orang	43 Orang	49 Orang	62.000.000,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	8 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	36.245.000,00					
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	89 Dokumen	65 Dokumen	71 Dokumen	131.845.000,00					
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	258 Laporan	154 Laporan	180 Laporan	148.340.000,00					
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	292 laporan	244 laporan	256 laporan	307.140.120,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	6 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	5 Unit	5 Unit	5 Unit	0,00					
		Terwujudnya Pemberdayaan Perlindungan masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban umum					690.570.120,00					Masyarakat Kab Pekalongan
			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	63 Orang	43 Orang	49 Orang	62.000.000,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	8 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	36.245.000,00					
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	89 Dokumen	65 Dokumen	71 Dokumen	131.845.000,00					
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	258 Laporan	154 Laporan	180 Laporan	148.340.000,00					
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	292 laporan	244 laporan	256 laporan	307.140.120,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	6 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	5 Unit	5 Unit	5 Unit	0,00					
		Terwujudnya Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa					690.570.120,00					Masyarakat Kab Pekalongan
			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	63 Orang	43 Orang	49 Orang	62.000.000,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	8 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	36.245.000,00					
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	89 Dokumen	65 Dokumen	71 Dokumen	131.845.000,00					
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	258 Laporan	154 Laporan	180 Laporan	148.340.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	292 laporan	244 laporan	256 laporan	307.140.120,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	6 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	5 Unit	5 Unit	5 Unit	0,00					
		Terwujudnya Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas					690.570.120,00					Masyarakat Kab Pekalongan
			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	63 Orang	43 Orang	49 Orang	62.000.000,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	8 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	36.245.000,00					
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	89 Dokumen	65 Dokumen	71 Dokumen	131.845.000,00					
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	258 Laporan	154 Laporan	180 Laporan	148.340.000,00					
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	292 laporan	244 laporan	256 laporan	307.140.120,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	6 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	5 Unit	5 Unit	5 Unit	0,00					
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota					36.245.000,00					
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	8 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	36.245.000,00	Kab. Pekalongan	Pajak Daerah	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum					131.845.000,00					
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	89 Dokumen	65 Dokumen	71 Dokumen	131.845.000,00	Kab. Pekalongan	Pajak Daerah	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	
	1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas					62.000.000,00					
		Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	63 Orang	43 Orang	49 Orang	62.000.000,00	Kab. Pekalongan	Pajak Daerah	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan					307.140.120,00					
		Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	292 laporan	244 laporan	244 laporan	307.140.120,00	Kab. Pekalongan	Pajak Daerah	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa					148.340.000,00					
		Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	258 Laporan	154 Laporan	256 Laporan	148.340.000,00	Kab. Pekalongan	Pajak Daerah	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah					5.000.000,00					
		Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	6 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pekalongan	Pajak Daerah	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum					0,00					
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	5 Unit	5 Unit	5 Unit	0,00	Kab. Pekalongan	Pajak Daerah	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota					518.121.240,00					Masyarakat Kab Pekalongan
		Terwujudnya Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					518.121.240,00					Masyarakat Kab Pekalongan
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	8 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00					
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	25 laporan	17 laporan	25 laporan	20.080.000,00					
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	172 Laporan	172 Laporan	172 Laporan	488.041.240,00					
		Terwujudnya Penangan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota					518.121.240,00					Masyarakat Kab Pekalongan
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	8 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00					
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	25 laporan	17 laporan	25 laporan	20.080.000,00					
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	172 Laporan	172 Laporan	172 Laporan	488.041.240,00					
		Terwujudnya Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota					518.121.240,00					Masyarakat Kab Pekalongan
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	8 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00					
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	25 laporan	17 laporan	25 laporan	20.080.000,00					
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	172 Laporan	172 Laporan	172 Laporan	488.041.240,00					
	1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					20.080.000,00					
		Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	25 laporan	17 laporan	25 laporan	20.080.000,00	Kab. Pekalongan	Pajak Daerah	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah					488.041.240,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	172 Laporan	172 Laporan	172 Laporan	488.041.240,00	Kab. Pekalongan	Pajak Daerah Pajak Rokok DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					10.000.000,00					
		TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	8 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Pajak Daerah	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota					30.000.000,00					Anggota Satpol PP dan Damkar
		Terwujudnya Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah					30.000.000,00					Anggota Satpol PP dan Damkar
			Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	1 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00					
	1.05.02.2.03.0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah					30.000.000,00					
		Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	1 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00	Kab. Pekalongan	Pajak Daerah	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	
102.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**					**375.120.000,00**					
		Meningkatnya kesiapsiagaan dan kecepatan respon dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan non-kebakaran					***355.120.000,00***					
			1.Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	25.25 %	24.25 %	24.50 %	355.120.000,00					
			2.Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	27 Menit	27 Menit	27 Menit	355.120.000,00					
			3.Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban non Kebakaran	100 %	100 %	100 %	355.120.000,00					
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					296.580.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan yang tertimpa Kebakaran dan Non Kebakaran
		Terlaksananya Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					296.580.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan yang tertimpa Kebakaran dan Non Kebakaran
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	4 Orang	0 Orang	4 Orang	50.000.000,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	165 Dokumen	150 Dokumen	150 Dokumen	46.820.000,00					
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	80 Laporan	70 Laporan	70 Laporan	49.760.000,00					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	3 Unit	11 Unit	3 Unit	150.000.000,00					
		Terlaksananya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran					296.580.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan yang tertimpa Kebakaran dan Non Kebakaran
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	4 Orang	0 Orang	4 Orang	50.000.000,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	165 Dokumen	150 Dokumen	150 Dokumen	46.820.000,00					
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	80 Laporan	70 Laporan	70 Laporan	49.760.000,00					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	3 Unit	11 Unit	3 Unit	150.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terwujudnya Pembinaan aparatur pemadam kebakaran					296.580.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan yang tertimpa Kebakaran dan Non Kebakaran
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	4 Orang	0 Orang	4 Orang	50.000.000,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	165 Dokumen	150 Dokumen	150 Dokumen	46.820.000,00					
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	80 Laporan	70 Laporan	70 Laporan	49.760.000,00					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	3 Unit	11 Unit	3 Unit	150.000.000,00					
		Terwujudnya Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri					296.580.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan yang tertimpa Kebakaran dan Non Kebakaran
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	4 Orang	0 Orang	4 Orang	50.000.000,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	165 Dokumen	150 Dokumen	150 Dokumen	46.820.000,00					
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	80 Laporan	70 Laporan	70 Laporan	49.760.000,00					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	3 Unit	11 Unit	3 Unit	150.000.000,00					
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					49.760.000,00					
		Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	80 Laporan	70 Laporan	62 Laporan	49.760.000,00	Kab. Pekalongan	Pajak Daerah	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran					46.820.000,00					
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	165 Dokumen	150 Dokumen	133 Dokumen	46.820.000,00	Kab. Pekalongan	Pajak Daerah	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran					50.000.000,00					
		Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	4 Orang	0 Orang	4 Orang	50.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Kelurahan Kajen || 0	Pajak Daerah	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri					150.000.000,00					
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	3 Unit	11 Unit	5 Unit	150.000.000,00	Kab. Pekalongan	Pajak Daerah	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran					20.000.000,00					Satpol PP dan Damkar
		Terwujudnya Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran					20.000.000,00					Satpol PP dan Damkar
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	10 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00					
		Terwujudnya Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran					20.000.000,00					Satpol PP dan Damkar
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	10 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran					10.000.000,00					
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Pajak Daerah	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran					48.540.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan
		Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran					48.540.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	22 Desa/Kelurahan	15 Desa/Kelurahan	15 Desa/Kelurahan	48.540.000,00					
		Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat					48.540.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	22 Desa/Kelurahan	15 Desa/Kelurahan	15 Desa/Kelurahan	48.540.000,00					
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran					48.540.000,00					
		Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	22 Desa/Kelurahan	15 Desa/Kelurahan	15 Desa/Kelurahan	48.540.000,00	Kab. Pekalongan	Pajak Daerah	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia					10.000.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan yang tertimpa Kebakaran dan Non Kebakaran
		Terlaksananya Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan					10.000.000,00					Masyarakat Kab Pekalongan yang tertimpa Kebakaran dan Non Kebakaran
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan	10 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00					
	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia					10.000.000,00					
		Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan	10 Laporan	16 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Pajak Daerah	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	
		Terwujudnya Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran					20.000.000,00					Satpol PP dan Damkar
			Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-	-	-	10.000.000,00					
		Terwujudnya Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran					20.000.000,00					Satpol PP dan Damkar
			Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-	-	-	10.000.000,00					
	1.05.04.2.02.0003	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran					10.000.000,00					
		Tersedianya Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-	-	10 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Pajak Daerah	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah					**4.522.693.000,00**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**4.522.693.000,00**					
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**					**4.522.693.000,00**					
103.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**3.622.693.000,00**					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah					***3.572.693.000,00***					
			1.Persentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	3.572.693.000,00					
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.650.493.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, akuntabel, dan tepat waktu.					2.650.493.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	62.600.000,00					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	22 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.587.893.000,00					
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.587.893.000,00					
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	22 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.587.893.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					62.600.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	62.600.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					170.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
		Terselenggaranya layanan administrasi umum perkantoran yang tertib dan andal.					170.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	70.000.000,00					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00					
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					50.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					15.000.000,00					
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					35.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					70.000.000,00					
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	70.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					452.200.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran operasional perangkat daerah.					452.200.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	74.000.000,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	378.200.000,00					
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					74.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	74.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					378.200.000,00					
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	378.200.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					350.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
		Terpeliharanya BMD penunjang dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai standar layanan.					350.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00					
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	18 Unit	18 Unit	225.000.000,00					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	55.000.000,00					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	11 Unit	12 Unit	20.000.000,00					
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					55.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	1 Unit	55.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					225.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	18 Unit	18 Unit	225.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					20.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	11 Unit	11 Unit	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					50.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
104.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**					**900.000.000,00**					
		Meningkatnya ketangguhan daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui upaya mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat bencana yang terintegrasi.					***620.000.000,00***					
			1.Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %	100 %	620.000.000,00					
			2.Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	100 %	100 %	620.000.000,00					
			3.Persentase Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang disusun	100 %	100 %	100 %	620.000.000,00					
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota					130.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
		Terlaksananya layanan informasi Rawan Bencana					130.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 Orang	100 Orang	100 Orang	30.000.000,00					
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)					30.000.000,00					
		Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 Orang	100 Orang	100 Orang	30.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota					100.000.000,00					
		Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					435.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
		Tercapainya target kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					435.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00					
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	50.000.000,00					
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	12 laporan	12 laporan	290.000.000,00					
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	30.000.000,00					
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100 Orang	25.000.000,00					
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota					30.000.000,00					
		Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota					25.000.000,00					
		Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	500 Orang	25.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana					50.000.000,00					
		Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1 Kawasan	1 Kawasan	3 Kawasan	50.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota					0,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota					290.000.000,00					
		Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	12 laporan	12 laporan	290.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					230.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
		Terlaksananya Layanan Peneyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					230.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00					
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	750 Orang	550 Orang	600 Orang	100.000.000,00					
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	25 Orang	25 Orang	25 Orang	30.000.000,00					
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota					100.000.000,00					
		Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota					30.000.000,00					
		Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	25 Orang	25 Orang	25 Orang	30.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.000.000,00					
		Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	750 Orang	550 Orang	600 Orang	100.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					105.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
		Tersusunnya Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana					105.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00					
			Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00					
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	65.000.000,00					
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota					20.000.000,00					
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota					65.000.000,00					
		Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3 Kegiatan	65.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota					20.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
		Tercapainya target kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					435.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-	-	-	40.000.000,00					
	1.05.03.2.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota					40.000.000,00					
		Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-	-	50 Orang	40.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
		Dinas Sosial					**6.205.337.750,00**					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**6.205.337.750,00**					
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**					**6.205.337.750,00**					
105.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**4.142.837.750,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah					***4.060.337.750,00***					
			1.Persentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	4.060.337.750,00					
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					69.500.000,00					Dinas Sosial
		Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terintegrasi dan akuntabel					69.500.000,00					Dinas Sosial
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	1.500.000,00					
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data	12 Data	12 Data	1.500.000,00					
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00					
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	20.000.000,00					
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	25.000.000,00					
			Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	1 Substansi	1 Substansi	1 Substansi	1.500.000,00					
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					20.000.000,00					
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					20.000.000,00					
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					25.000.000,00					
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	25.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.06.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					1.500.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data	12 Data	12 Data	1.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.06.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1.500.000,00					
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	1.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.06.01.2.01.0012	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu					1.500.000,00					
		Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	1 Substansi	1 Substansi	1 Substansi	1.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.872.831.000,00					Dinas Sosial
		Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah yang tertib, transparan dan akuntabel					2.872.831.000,00					Dinas Sosial
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	110.000.000,00					
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	1.500.000,00					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.761.331.000,00					
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.761.331.000,00					
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.761.331.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mengintegrasikan pendekatan gender, penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan anak dan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	
	1.06.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					110.000.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	110.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					1.500.000,00					
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	1.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					3.000.000,00					Dinas Sosial
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib administrasi dan sesuai ketentuan					3.000.000,00					Dinas Sosial
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.500.000,00					
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00					
	1.06.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					1.500.000,00					
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1.500.000,00					
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					9.000.000,00					Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terselenggaranya Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah secara tertib dan profesional					9.000.000,00					Dinas Sosial
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	10 Orang	9.000.000,00					
	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					9.000.000,00					
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	10 Orang	9.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					190.000.000,00					Dinas Sosial
		Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang efektif dan efisien					190.000.000,00					Dinas Sosial
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	30.000.000,00					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	100.000.000,00					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	5 Paket	5 Paket	25.000.000,00					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	7 Paket	7 Paket	10.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	28 Paket	28 Paket	15.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	32 Paket	28 Paket	28 Paket	10.000.000,00					
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					10.000.000,00					
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	7 Paket	7 Paket	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					15.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	28 Paket	28 Paket	15.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					10.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	32 Paket	28 Paket	28 Paket	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					25.000.000,00					
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	5 Paket	5 Paket	25.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					30.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	30.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					100.000.000,00					
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	100.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					72.106.750,00					Dinas Sosial
		Terpenuhinya Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan					72.106.750,00					Dinas Sosial
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	13 Unit	13 Unit	41.000.000,00					
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					41.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	13 Unit	5 Unit	41.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					703.400.000,00					Dinas Sosial
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang yang mendukung kelancaran tugas pemerintahan daerah					703.400.000,00					Dinas Sosial
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	72.000.000,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	626.400.000,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5.000.000,00					
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					5.000.000,00					
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					72.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	72.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					626.400.000,00					
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	626.400.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					223.000.000,00					Dinas Sosial
		Terjaminnya Keberlangsungan fungsi barang milik daerah melalui pemeliharaan yang tepat					223.000.000,00					Dinas Sosial
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	80.000.000,00					
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	18 Unit	18 Unit	70.000.000,00					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	53.000.000,00					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7 Unit	7 Unit	20.000.000,00					
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					53.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	53.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					70.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	18 Unit	18 Unit	70.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					20.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7 Unit	7 Unit	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					80.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	80.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terpenuhinya Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan					72.106.750,00					Dinas Sosial
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	31.106.750,00					
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					31.106.750,00					
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	24 Unit	31.106.750,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
106.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**					**201.000.000,00**					
		Meningkatnya kualitas PSKS dalam pembangunan kesejahteraan sosial.					***201.000.000,00***					
			0.Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	34.50 %	32.50 %	33.00 %	201.000.000,00					
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					201.000.000,00					Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
		Meningkatnya Kualitas dan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial					201.000.000,00					Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
			Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00					
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Lembaga	150 Lembaga	150 Lembaga	100.000.000,00					
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	10 Orang	10 Orang	10 Orang	56.000.000,00					
			Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	30 Orang	30 Orang	30 Orang	4.000.000,00					
			Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	285 Lembaga	50 Lembaga	100 Lembaga	20.000.000,00					
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	30 Orang	32 Orang	10.000.000,00					
			Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	30 orang	30 orang	30 orang	5.000.000,00					
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					100.000.000,00					
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Lembaga	150 Lembaga	333 Lembaga	100.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)					10.000.000,00					
		Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	30 Orang	115 Orang	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.06.02.2.03.0013	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota					20.000.000,00					
		Meningkatnya peran Puskesos sebagai layanan sosial satu pintu dan hub program graduasi	Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	285 Lembaga	50 Lembaga	304 Lembaga	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota					56.000.000,00					
		Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	10 Orang	10 Orang	162 Orang	56.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	1.06.02.2.03.0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi					4.000.000,00					
		Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	30 Orang	30 Orang	70 Orang	4.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.06.02.2.03.0016	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial					6.000.000,00					
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	12 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.06.02.2.03.0017	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					5.000.000,00					
		Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	30 orang	30 orang	30 orang	5.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
107.	**1.06.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**					**8.000.000,00**					
		Meningkatnya perlindungan dan pemulihan hak-hak sosial warga negara migran korban tindak kekerasan.					***8.000.000,00***					
			1.Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	8.000.000,00					
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal					8.000.000,00					Pemerlu Penanganan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
		Terpenuhinya hak perlindungan sosial dan kepastian pemulangan WNI korban kekerasan ke daerah asal					8.000.000,00					Pemerlu Penanganan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	10 Orang	8.000.000,00					
	1.06.03.2.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal					8.000.000,00					
		Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	10 Orang	8.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
108.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**					**547.500.000,00**					
		Meningkatnya pemulihan dan fungsi sosial individu, keluarga, dan kelompok rentan untuk hidup mandiri.					***471.500.000,00***					
			1.Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	100 %	100 %	471.500.000,00					
			2.Persentase Pemerlu Penanganan Kesejahteraan Sosial (PPKS) diluar Standar Pelayanan Minimal (SPM) terlayani	65 %	56 %	59 %	471.500.000,00					
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					126.500.000,00					Pemerlu Penanganan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Fungsi Sosial kelompok rentan di luar panti					126.500.000,00					Pemerlu Penanganan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	23 Orang	23 Orang	10.500.000,00					
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang	8 Orang	8 Orang	5.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	16 Orang	16 Orang	20.000.000,00					
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	21 Orang	21 Orang	10.500.000,00					
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15 Orang	15 Orang	10.500.000,00					
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	155 Orang	155 Orang	155 Orang	35.000.000,00					
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	155 Orang	155 Orang	155 Orang	35.000.000,00					
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan					35.000.000,00					
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	155 Orang	155 Orang	155 Orang	35.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mengintegrasikan pendekatan gender, penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan anak dan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang					35.000.000,00					
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	155 Orang	155 Orang	155 Orang	35.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mengintegrasikan pendekatan gender, penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan anak dan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu					5.000.000,00					
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang	8 Orang	8 Orang	5.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mengintegrasikan pendekatan gender, penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan anak dan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga					10.500.000,00					
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15 Orang	15 Orang	10.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mengintegrasikan pendekatan gender, penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan anak dan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan					20.000.000,00					
		Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	16 Orang	16 Orang	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mengintegrasikan pendekatan gender, penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan anak dan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga					10.500.000,00					
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	21 Orang	41 Orang	10.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mengintegrasikan pendekatan gender, penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan anak dan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan					10.500.000,00					
		Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	23 Orang	23 Orang	10.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mengintegrasikan pendekatan gender, penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan anak dan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					421.000.000,00					Pemerlu Penanganan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
		Terwujudnya Pemulihan Fungsi Sosial PMKS lainnya agar mampu berperan dalam kehidupan masyarakat					421.000.000,00					Pemerlu Penanganan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	18 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	25.000.000,00					
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	66 Orang	66 Orang	66 Orang	100.000.000,00					
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	42 Orang	42 Orang	20.000.000,00					
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	350 Orang	350 Orang	350 Orang	130.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Orang	120 Orang	120 Orang	146.000.000,00					
	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan					20.000.000,00					
		Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	42 Orang	50 Orang	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan					130.000.000,00					
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	350 Orang	350 Orang	457 Orang	130.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu					100.000.000,00					
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	66 Orang	66 Orang	70 Orang	100.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA					146.000.000,00					
		Terlakasananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Orang	120 Orang	770 Orang	146.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota					25.000.000,00					
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	18 Dokumen	16 Dokumen	21 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
109.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**					**716.000.000,00**					
		Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS					***716.000.000,00***					
			1.Persentase Pemerlu Penanganan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Fakir Miskin yang Tergraduasi	10.37 %	2.07 %	4.15 %	716.000.000,00					
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar					50.000.000,00					Pemerlu Penanganan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
		Terjaminnya Kebutuhan Dasar dan Tumbuh Kembang Anak Terlantar					50.000.000,00					Pemerlu Penanganan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	170 Orang	128 Orang	140 Orang	20.000.000,00					
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	12 Orang	12 Orang	30.000.000,00					
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar					20.000.000,00					
		Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	170 Orang	128 Orang	122 Orang	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar					30.000.000,00					
		Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	12 Orang	12 Orang	30.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					666.000.000,00					Pemerlu Penanganan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
		Tersedianya data fakir miskin yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar kebijakan					666.000.000,00					Pemerlu Penanganan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	11000 Orang	11000 Orang	11000 Orang	35.000.000,00					
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Orang	9 Orang	9 Orang	76.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	587 Orang	779 Orang	587 Orang	430.000.000,00					
			Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	12 Usulan	12 Usulan	12 Usulan	125.000.000,00					
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					35.000.000,00					
		Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	11000 Orang	11000 Orang	11000 Orang	35.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat					76.000.000,00					
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Orang	9 Orang	10 Orang	76.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga					430.000.000,00					
		Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	587 Orang	779 Orang	500 Orang	430.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					125.000.000,00					
		Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	12 Usulan	12 Usulan	17000 Usulan	125.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
110.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**					**345.000.000,00**					
		Meningkatnya kapasitas tanggap darurat dan perlindungan sosial korban bencana					***345.000.000,00***					
			1.Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	100 %	345.000.000,00					
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					145.000.000,00					Pemerlu Penanganan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
		Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana secara cepat, tepat dan terkoordinasi					145.000.000,00					Pemerlu Penanganan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	50 Orang	5.000.000,00					
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	404 Orang	404 Orang	404 Orang	22.000.000,00					
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	420 Orang	420 Orang	420 Orang	21.000.000,00					
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	4000 Orang	3000 Orang	2800 Orang	86.000.000,00					
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	5 Orang	11.000.000,00					
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan					86.000.000,00					
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	4000 Orang	3000 Orang	2800 Orang	86.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang					22.000.000,00					
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	404 Orang	404 Orang	404 Orang	22.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan					21.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	420 Orang	420 Orang	420 Orang	21.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial					5.000.000,00					
		Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	50 Orang	5.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi					11.000.000,00					
		Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	5 Orang	11.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					200.000.000,00					Pemerlu Penanganan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
		Meningkatnya Kapasitas Msyarakat dalam Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana					200.000.000,00					Pemerlu Penanganan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kampung	4 Kampung	4 Kampung	70.000.000,00					
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	35 Orang	35 Orang	130.000.000,00					
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana					70.000.000,00					
		Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kampung	4 Kampung	4 Kampung	70.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana					130.000.000,00					
		Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	35 Orang	35 Orang	130.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
111.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**					**245.000.000,00**					
		Terpenuhinya sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan sesuai standar					***245.000.000,00***					
			1.Persentase pemenuhan sarana prasarana Taman Makam Pahlawan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	245.000.000,00					
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					245.000.000,00					Taman Makam Pahlawan Nasional
		Terpeliharanya sarana prasarana Taman Makam Pahlawan sesuai standar untuk mendukung penghormatan jasa pahlawan					245.000.000,00					Taman Makam Pahlawan Nasional
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000,00					
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	1 Makam	1 Makam	135.000.000,00					
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					110.000.000,00					
		Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					135.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	1 Makam	1 Makam	135.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					**14.889.466.000,00**					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**14.889.466.000,00**					
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**					**4.318.469.000,00**					
112.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**3.834.169.000,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah					***3.649.169.000,00***					
			4.Presentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	3.649.169.000,00					
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					20.000.000,00					Dinas P3APPKB
		Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan					20.000.000,00					Dinas P3APPKB
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000,00					
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00					
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					10.000.000,00					
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mengintegrasikan pendekatan gender, penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan anak dan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.000.000,00					
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mengintegrasikan pendekatan gender, penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan anak dan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.188.554.000,00					Dinas P3APPKB
		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, akuntabel dan tepat waktu.					3.188.554.000,00					Dinas P3APPKB
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	170.000.000,00					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3.018.554.000,00					
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					3.018.554.000,00					
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3.018.554.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mengintegrasikan pendekatan gender, penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan anak dan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	
	2.08.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					170.000.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	170.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mengintegrasikan pendekatan gender, penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan anak dan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					110.000.000,00					Dinas P3APPKB
		Terselenggaranya layanan administrasi umum perkantoran yang tertib dan andal.					110.000.000,00					Dinas P3APPKB
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	50.000.000,00					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	10.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					10.000.000,00					
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mengintegrasikan pendekatan gender, penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan anak dan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					10.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mengintegrasikan pendekatan gender, penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan anak dan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					10.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mengintegrasikan pendekatan gender, penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan anak dan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					15.000.000,00					
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2 Paket	15.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mengintegrasikan pendekatan gender, penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan anak dan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	
	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					15.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mengintegrasikan pendekatan gender, penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan anak dan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					50.000.000,00					
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mengintegrasikan pendekatan gender, penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan anak dan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					40.000.000,00					Dinas P3APPKB
		Terpenuhinya kebutuhan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai spesifikasi dan ketentuan..					40.000.000,00					Dinas P3APPKB
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	10 Unit	20.000.000,00					
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	10 Unit	10 Unit	20.000.000,00					
	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					20.000.000,00					
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	5 Unit	20.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mengintegrasikan pendekatan gender, penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan anak dan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					20.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	10 Unit	3 Unit	20.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mengintegrasikan pendekatan gender, penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan anak dan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					333.000.000,00					Dinas P3APPKB
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran operasional perangkat daerah					333.000.000,00					Dinas P3APPKB
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	273.000.000,00					
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					60.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mengintegrasikan pendekatan gender, penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan anak dan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					273.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	273.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mengintegrasikan pendekatan gender, penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan anak dan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					142.615.000,00					Dinas P3APPKB
		Terpeliharanya BMD penunjang dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai standar layanan.					142.615.000,00					Dinas P3APPKB
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00					
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	50.000.000,00					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	32.615.000,00					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	25 Unit	25 Unit	10.000.000,00					
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					32.615.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	32.615.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Kelurahan Kajen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mengintegrasikan pendekatan gender, penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan anak dan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					50.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	6 Unit	50.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mengintegrasikan pendekatan gender, penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan anak dan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					10.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	25 Unit	20 Unit	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mengintegrasikan pendekatan gender, penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan anak dan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					50.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mengintegrasikan pendekatan gender, penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan anak dan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	
113.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**					**65.000.000,00**					
		Meningkatnya implementasi PUG dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan					***65.000.000,00***					
			1.Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam Belanja Langsung APBD	6.82 %	6.77 %	6.78 %	65.000.000,00					
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota					65.000.000,00					OPD, Kecamatan dan Desa serta lembaga pendukung lainnya
		Meningkatnya cakupan Program PUG pada OPD yang sudah dilakukan analisa gender					65.000.000,00					OPD, Kecamatan dan Desa serta lembaga pendukung lainnya
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	-	-	-	30.000.000,00					
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	-	-	-	35.000.000,00					
	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota					30.000.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	-	-	4 Laporan	30.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mengintegrasikan pendekatan gender, penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan anak dan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	
	2.08.02.2.01.0018	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota					35.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	-	-	4 Laporan	35.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mengintegrasikan pendekatan gender, penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan anak dan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	
114.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**					**204.300.000,00**					
		Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi					***204.300.000,00***					
			2.Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	13.64 Rasio	14.73 Rasio	14.46 Rasio	204.300.000,00					
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota					39.300.000,00					Perempuan korban kekerasan, Tim P2TP2A, Psikolog klinis
		Terlaksananya penanganan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO					39.300.000,00					Perempuan korban kekerasan, Tim P2TP2A, Psikolog klinis
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	39.300.000,00					
	2.08.03.2.02.0010	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota					39.300.000,00					
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	40 Orang	39.300.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mengintegrasikan pendekatan gender, penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan anak dan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					165.000.000,00					Lembaga pemerintah dan non pemerintah
		Terwujudnya pengembangan lembaga dan peningkatan kapasitas SDM pada lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan					165.000.000,00					Lembaga pemerintah dan non pemerintah
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	-	-	-	35.000.000,00					
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-	-	-	100.000.000,00					
			Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-	-	-	30.000.000,00					
	2.08.03.2.03.0011	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota					30.000.000,00					
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-	-	20 Orang	30.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mengintegrasikan pendekatan gender, penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan anak dan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	
	2.08.03.2.03.0012	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kab/Kota					35.000.000,00					
		Terlaksananya Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	-	-	4 Laporan	35.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mengintegrasikan pendekatan gender, penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan anak dan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	
	2.08.03.2.03.0013	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota					100.000.000,00					
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-	-	1 Lembaga	100.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mengintegrasikan pendekatan gender, penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan anak dan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	
115.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**					**15.000.000,00**					
		Meningkatnya ketahanan dan kualitas keluarga sebagai unit terkecil dalam pembangunan kesejahteraan sosial.					***15.000.000,00***					
			1.Tingkat pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan anak sesuai standar	100 %	100 %	100 %	15.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					15.000.000,00					Pusat pembelajaran keluarga (Puspaga)
		Terwujudnya Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang kompeten					15.000.000,00					Pusat pembelajaran keluarga (Puspaga)
			Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00					
	2.08.04.2.02.0004	monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					15.000.000,00					
		Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mengintegrasikan pendekatan gender, penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan anak dan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	
116.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**					**10.000.000,00**					
		Tersedianya data terpilah dan sistem informasi gender dan anak yang akurat dan dapat dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan.					***10.000.000,00***					
			1.Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	100 %	100 %	100 %	10.000.000,00					
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					10.000.000,00					OPD
		Terwujudnya penyajian Data pilah gender dan anak di kelembagaan data Kabupaten					10.000.000,00					OPD
			Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dan anak	-	-	-	10.000.000,00					
	2.08.05.2.01.0008	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak					10.000.000,00					
		Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dan anak	-	-	26 Lembaga	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mengintegrasikan pendekatan gender, penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan anak dan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	
117.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**					**75.000.000,00**					
		Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak dalam lingkungan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi.					***75.000.000,00***					
			3.Persentase hak-hak anak yang telah diimplementasikan	100 %	60 %	70 %	75.000.000,00					
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					75.000.000,00					OPD, Kecamatan dan Desa serta lembaga pendukung lainnya
		Terwujudnya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang terstandarisasi					75.000.000,00					OPD, Kecamatan dan Desa serta lembaga pendukung lainnya
			Jumlah Lembaga tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-	-	-	75.000.000,00					
	2.08.06.2.02.0013	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota					75.000.000,00					
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-	-	2 Lembaga	75.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mengintegrasikan pendekatan gender, penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan anak dan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	
118.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**					**115.000.000,00**					
		Meningkatnya perlindungan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran.					***115.000.000,00***					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			4.Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait kabupaten	100 %	100 %	100 %	115.000.000,00					
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					45.000.000,00					Sekolah menengah, lembaga pemerintah dan non pemerintah, dunia usaha/industri
		Terwujudnya kesadaran dan sinergisitas lintas sektor dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.					45.000.000,00					Sekolah menengah, lembaga pemerintah dan non pemerintah, dunia usaha/industri
			Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	-	-	-	45.000.000,00					
	2.08.07.2.01.0014	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota					45.000.000,00					
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	-	-	5 Kegiatan	45.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mengintegrasikan pendekatan gender, penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan anak dan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					40.000.000,00					Anak korban kekerasan/TPPO, Tim P2TP2A, Psikolog klinis
		Tercapainya optimalisasi Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terstandarisasi.					40.000.000,00					Anak korban kekerasan/TPPO, Tim P2TP2A, Psikolog klinis
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-	-	-	40.000.000,00					
	2.08.07.2.02.0016	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota					40.000.000,00					
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-	-	50 Orang	40.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mengintegrasikan pendekatan gender, penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan anak dan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					30.000.000,00					Konselor Puspaga
		Terwujudnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					30.000.000,00					Konselor Puspaga
			Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-	-	-	30.000.000,00					
	2.08.07.2.03.0016	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota					30.000.000,00					
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-	-	20 Orang	30.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mengintegrasikan pendekatan gender, penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan anak dan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**					**10.570.997.000,00**					
119.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**					**30.000.000,00**					
		Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk					***30.000.000,00***					
			3.Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	72 Indeks	68 Indeks	69 Indeks	30.000.000,00					
			3.Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	10 Persentase	8 Persentase	8.5 Persentase	30.000.000,00					
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					10.000.000,00					Balai Penyuluhan KB Kecamatan
		Tersedianya data pemetaan perkiraan pengendalian penduduk melalui aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA)					10.000.000,00					Balai Penyuluhan KB Kecamatan
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00					
	2.14.02.2.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB					10.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					20.000.000,00					OPD/stakeholder terkait, Kampung Keluarga Berkualitas
		Tersedianya kebijakan pengendalian penduduk yang sinkron dengan kebijakan pemerintah provinsi					20.000.000,00					OPD/stakeholder terkait, Kampung Keluarga Berkualitas
			Jumlah laporan dari perangkat daerah yang melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	-	-	-	20.000.000,00					
	2.14.02.2.01.0037	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan					20.000.000,00					
		Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah laporan dari perangkat daerah yang melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	-	-	4 Laporan / Dokumen	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
120.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**					**4.771.397.000,00**					
		Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan program KB					***4.726.397.000,00***					
			3.Persentase Kehamilan yang Tidak Diinginkan	14.5 %	16.7 %	16.1 %	4.726.397.000,00					
			3.Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR	62.60 %	62.20 %	62.30 %	4.726.397.000,00					
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal					862.600.000,00					Akseptor KB, Faskes, PKB/PLKB, IMP dan sub IMP, Kecamatan serta Desa
		Meningkatnya kesadaran, pengetahuan dan perilaku masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam program KB.					862.600.000,00					Akseptor KB, Faskes, PKB/PLKB, IMP dan sub IMP, Kecamatan serta Desa
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	7.000.000,00					
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00					
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	825.600.000,00					
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	5 Organisasi	5 Organisasi	5 Organisasi	15.000.000,00					
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana					825.600.000,00					
		Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	825.600.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang					7.000.000,00					
		Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal					15.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja					15.000.000,00					
		Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	5 Organisasi	5 Organisasi	5 Organisasi	15.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)					1.868.807.000,00					IMP, Sub IMP, PKB dan PLKB
		Terlaksananya koordinasi, penggerakan masyarakat, konseling, advokasi, pendampingan dan fasilitasi pelaksanaan program KB oleh PKB/PLKB.					1.868.807.000,00					IMP, Sub IMP, PKB dan PLKB
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1710 Orang	1710 Orang	1710 Orang	1.798.280.000,00					
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	285 Organisasi	285 Organisasi	285 Organisasi	70.527.000,00					
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)					1.798.280.000,00					
		Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1710 Orang	1710 Orang	1710 Orang	1.798.280.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB					70.527.000,00					
		Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	285 Organisasi	285 Organisasi	19 Organisasi	70.527.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota					2.039.990.000,00					Akseptor KB, Faskes, PKB/PLKB, IMP dan sub IMP, Kecamatan serta Desa
		Terlaksananya pendistribusian alat dan obat kontrasepsi serta pembinaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan dan peningkatan pelayanan KB					2.039.990.000,00					Akseptor KB, Faskes, PKB/PLKB, IMP dan sub IMP, Kecamatan serta Desa
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	25 Orang	10 Orang	15 Orang	10.000.000,00					
			Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00					
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4875 Orang	4870 Orang	4870 Orang	1.979.990.000,00					
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)					1.979.990.000,00					
		Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4875 Orang	4870 Orang	5200 Orang	1.979.990.000,00	Kab. Pekalongan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP					15.000.000,00					
		Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria					10.000.000,00					
		Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	25 Orang	10 Orang	10 Orang	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terlaksananya pendistribusian alat dan obat kontrasepsi serta pembinaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan dan peningkatan pelayanan KB					2.039.990.000,00					Akseptor KB, Faskes, PKB/PLKB, IMP dan sub IMP, Kecamatan serta Desa
			Jumlah kesertaan KB Pascapersalinan	-	-	-	15.000.000,00					
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	-	-	20.000.000,00					
	2.14.03.2.03.0032	Peningkatan kesertaan KB Pascapersalinan					15.000.000,00					
		Terlaksananya advokasi dukungan kebijakan pemerintah daerah terkait KB Pascapersalinan, promosi dan edukasi KB Pascapersalinan, koordinasi dan pelaksanaan pelayanan KB Pascapersalinan di fasilitas kesehatan, serta pemantauan dan evaluasi	Jumlah kesertaan KB Pascapersalinan	-	-	4 Laporan / Dokumen	15.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	2.14.03.2.03.0033	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					20.000.000,00					
		Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	-	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
121.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**					**5.769.600.000,00**					
		Meningkatnya ketahanan, kemandirian, dan kesejahteraan keluarga melalui lembaga ketahanan keluarga					***5.689.600.000,00***					
			3.Indeks Lansia Berdaya	58.6 Indeks	57 Indeks	57.4 Indeks	5.689.600.000,00					
			3.Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	88.5 Indeks	86.6 Indeks	87.1 Indeks	5.689.600.000,00					
			3.Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	38 Persentase	37.2 Persentase	37.25 Persentase	5.689.600.000,00					
		Terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga					5.599.600.000,00					Kelompok BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKA
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	2238 Orang	2238 Orang	2238 Orang	5.379.600.000,00					
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	643 Kelompok	567 Kelompok	586 Kelompok	30.000.000,00					
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00					
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00					
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	100 Orang	100 Orang	100 Orang	20.000.000,00					
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))					20.000.000,00					
		Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)					20.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terlaksananya Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	100 Orang	100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					5.379.600.000,00					
		Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	2238 Orang	2238 Orang	2238 Orang	5.379.600.000,00	Kab. Pekalongan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	2.14.04.2.01.0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)					20.000.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)					30.000.000,00					
		Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	643 Kelompok	567 Kelompok	76 Kelompok	30.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					170.000.000,00					Kelompok BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKA
		Telaksananya Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					170.000.000,00					Kelompok BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKA
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	10 laporan	10 laporan	10 laporan	170.000.000,00					
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)					170.000.000,00					
		Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	10 laporan	10 laporan	1 laporan	170.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					5.599.600.000,00					Kelompok BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKA
		Terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga					5.599.600.000,00					Kelompok BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKA
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	-	-	-	20.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah Kelompok Kegiatan/Poktan atau setara Poktan (BKB, BKR, BKL, Satyagatra, PIK-Remaja dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapatkan biaya operasional pelaksanaan kelompok kegiatan (Poktan)	-	-	-	90.000.000,00					
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	-	-	-	20.000.000,00					
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					20.000.000,00					
		Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	-	-	76 Orang	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	2.14.04.2.01.0033	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)					20.000.000,00					
		Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	-	-	1 Laporan / Dokumen	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	2.14.04.2.01.0039	Penyediaan Biaya Operasional Pelaksanaan Kelompok Kegiatan/Poktan (BKB, BKR, BKL, Satyagatra, PIK-Remaja dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					90.000.000,00					
		Tersedianya biaya operasional pelaksanaan kelompok kegiatan (Poktan) bagi BKB, BKR, BKL, Satyagatra, PIK-Remaja dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan/Poktan atau setara Poktan (BKB, BKR, BKL, Satyagatra, PIK-Remaja dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapatkan biaya operasional pelaksanaan kelompok kegiatan (Poktan)	-	-	1 Kelompok	90.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian					**17.664.568.000,00**					
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**7.600.120.000,00**					
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**					**7.600.120.000,00**					
122.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**7.005.120.000,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah					***6.660.120.000,00***					
			1.Presentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	6.660.120.000,00					
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					25.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
		Disusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tepat waktu					25.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000,00					
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00					
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					15.000.000,00					
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan regulasi dan insentif daerah untuk mempercepat investasi dan inovasi pembangunan.	
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.000.000,00					
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.673.120.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah					5.673.120.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000,00					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	134 Orang/bulan	134 Orang/bulan	134 Orang/bulan	5.473.120.000,00					
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					5.473.120.000,00					
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	134 Orang/bulan	134 Orang/bulan	42 Orang/bulan	5.473.120.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan regulasi dan insentif daerah untuk mempercepat investasi dan inovasi pembangunan.	
	2.09.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					200.000.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan regulasi dan insentif daerah untuk mempercepat investasi dan inovasi pembangunan.	
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					10.000.000,00					PNS di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Terlaksananya pendidiikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi					10.000.000,00					PNS di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	5 Orang	10.000.000,00					
	2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					10.000.000,00					
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	3 Orang	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					320.000.000,00					PNS di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah					320.000.000,00					PNS di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4000 Dokumen	4000 Dokumen	4000 Dokumen	10.000.000,00					
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33 Laporan	33 Laporan	33 Laporan	80.000.000,00					
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	55.000.000,00					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	30.000.000,00					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100.000.000,00					
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					15.000.000,00					
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					100.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	2 Paket	100.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					55.000.000,00					
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1 Paket	55.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					30.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					30.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					80.000.000,00					
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33 Laporan	33 Laporan	20 Laporan	80.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.09.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					10.000.000,00					
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4000 Dokumen	4000 Dokumen	4000 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					567.000.000,00					PNS di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Tersediannya jasa penunjang urusan pemerintah daerah					567.000.000,00					PNS di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	225.000.000,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	342.000.000,00					
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					225.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	225.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					342.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	342.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
		Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah					360.000.000,00					PNS di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100.000.000,00					
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit	100 Unit	100 Unit	130.000.000,00					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	20 Unit	30.000.000,00					
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					130.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit	100 Unit	100 Unit	130.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					30.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	54 Unit	30.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					100.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	
			Persentase ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	100 %	50.000.000,00					
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					50.000.000,00					PNS di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		-					50.000.000,00					PNS di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	50.000.000,00					
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	0,00					
	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					50.000.000,00					
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	14 Unit	50.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.09.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00					
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	0 Unit	0,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					360.000.000,00					PNS di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah					360.000.000,00					PNS di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	-	-	-	100.000.000,00					
	2.09.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar					100.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	-	-	6 Unit	100.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
123.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**					**548.000.000,00**					
		Meningkatnya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) serta ketahanan pangan rumah tangga.					***548.000.000,00***					
			1.Konsumsi Energi Per Kapita	2100 Kkal/Kapita/Hari	2100 Kkal/Kapita/Hari	2100 Kkal/Kapita/Hari	548.000.000,00					
			2.Konsumsi Protein Per Kapita	57 Gram/Kapita/Hari	57 Gram/Kapita/Hari	57 Gram/Kapita/Hari	548.000.000,00					
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					30.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
		Dihasilkannya laporan ketersediaan pangan					30.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00					
			Informasi Stok Pangan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00					
	2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan					20.000.000,00					
		Tersedianya Informasi Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)					10.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota					400.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
		Terselenggaranya pengadaan dan distribusi cadangan pangan					400.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	30 Ton	34 Ton	30 Ton	400.000.000,00					
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota					400.000.000,00					
		Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	30 Ton	34 Ton	31.25 Ton	400.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi					118.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
		Terlaksananya pelatihan penganekaragaman konsumsi pangan					118.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	118.000.000,00					
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					118.000.000,00					
		Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	118.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan sektor industri kecil dan menengah (IKM) melalui fasilitasi legalitas, pelatihan, inkubasi bisnis, dan integrasi dengan pasar digital dan global.	
124.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**					**32.000.000,00**					
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat					***32.000.000,00***					
			1.Rasio Ketersediaan pangan Masyarakat Terhadap Kebutuhan Pangan Beras	400 %	360 %	370 %	32.000.000,00					
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan					32.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
		Terpetakannya status ketahanan dan kerentanan pangan desa					32.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	32.000.000,00					
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan					32.000.000,00					
		Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	100 Dokumen	100 Dokumen	1 Dokumen	32.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
125.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**					**15.000.000,00**					
		Meningkatnya jaminan keamanan pangan segar asal tumbuhan dan hewan yang dikonsumsi masyarakat.					***15.000.000,00***					
			1.Persentase pangan segar yg aman di konsumsi	85 %	81 %	82 %	15.000.000,00					
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota					15.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
		Terlaksananya pemantauan kemanan pangan					15.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00					
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan					15.000.000,00					
		Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					**10.064.448.000,00**					
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**					**10.064.448.000,00**					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
126.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**					**2.025.000.000,00**					
		Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana produksi pertanian					***2.025.000.000,00***					
			1.Produksi produk hortikultura (durian dan alpukat)	231716 Kwintal	230792 Kwintal	231023 Kwintal	2.025.000.000,00					
			1.Produksi ternak	19537558 Kg	18936447 Kg	19084266 Kg	2.025.000.000,00					
			2.Produktivitas pertanian per hektar per tahun	53.86 %	53.54 %	53.62 %	2.025.000.000,00					
			3.Produksi GKP UPT	12 Ton	12 Ton	12 Ton	2.025.000.000,00					
			4.Persentase pertumbuhan sarana pertanian	0.5 %	0.5 %	0.5 %	2.025.000.000,00					
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian					670.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
		Terselenggaranya kegiatan pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian					670.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	385.000.000,00					
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	285.000.000,00					
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi					285.000.000,00					
		Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	285.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian					385.000.000,00					
		Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	385.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota					70.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
		Terlaksananya pengelolaan sumber daya genetik hewan dan tanaman					70.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00					
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00					
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman					20.000.000,00					
		Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman					50.000.000,00					
		Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota					1.285.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
		Meningkatnya populasi ternak lokal unggulan					1.285.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.285.000.000,00					
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil					1.285.000.000,00					
		Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.285.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
127.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**					**7.529.448.000,00**					
		Meningkatnya ketersediaan prasarana pertanian					***7.529.448.000,00***					
			1.Persentase pertumbuhan prasarana pertanian	5 %	5 %	5 %	7.529.448.000,00					
			2.Produktivitas padi per hektar	53.45 Kw/ha	53.05 Kw/ha	53.15 Kw/ha	7.529.448.000,00					
			3.Luas Tanam Komoditas Pilihan Perkebunan (Tembakau)	88 Ha	68 Ha	73 Ha	7.529.448.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian					607.371.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
		Meningkatnya produktivitas komoditas pertanian					607.371.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	415.000.000,00					
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	4 Ha	4 Ha	4 Ha	192.371.000,00					
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya					415.000.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	415.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian					192.371.000,00					
		Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	4 Ha	4 Ha	3 Ha	192.371.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian					6.922.077.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
		Terbangunnya infrastruktur pertanian					6.922.077.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	3 Unit	3 Unit	5.150.000.000,00					
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0,00					
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.100.000.000,00					
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	4 Unit	4 Unit	672.077.000,00					
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani					5.150.000.000,00					
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	3 Unit	32 Unit	5.150.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit					0,00					
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya					672.077.000,00					
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	4 Unit	3 Unit	672.077.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani					1.100.000.000,00					
		terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	7 Unit	1.100.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
128.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**					**120.000.000,00**					
		Meningkatnya status kesehatan hewan dan keamanan produk asal hewan untuk mendukung ketahanan pangan					***40.000.000,00***					
			1.Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	5 %	5 %	5 %	40.000.000,00					
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota					40.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
		Terlaksananya deteksi dan pengobatan penyakit zoonosis					40.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
			Jumlah kader zoonosis	30 Orang	30 Orang	30 Orang	40.000.000,00					
	3.27.04.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis					40.000.000,00					
		Terbentuknya kader zoonosis	Jumlah kader zoonosis	30 Orang	30 Orang	40 Orang	40.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota					40.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
		Tersalurkannya vaksin hewan ke kelompok sasaran					40.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner					40.000.000,00					
		Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner					40.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
		Terselenggaranya pengawasan produk hewan pada event Idul Adha					40.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00					
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan					40.000.000,00					
		Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	
129.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**					**90.000.000,00**					
		Meningkatnya mitigasi dan respons terhadap risiko bencana yang mengancam sektor pertanian					***90.000.000,00***					
			1.Persentase wilayah bebas bencana pertanian	82.96 %	68.25 %	71.66 %	90.000.000,00					
			2.Komoditas Perkebunan yang disediakan untuk mengantisipasi DPI	1 Komoditas	1 Komoditas	1 Komoditas	90.000.000,00					
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota					90.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
		Menurunnya dampak kerusakan pada produksi					90.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	4 Ha	4 Ha	4 Ha	40.000.000,00					
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	300 Ha	300 Ha	300 Ha	50.000.000,00					
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan					40.000.000,00					
		Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	4 Ha	4 Ha	4 Ha	40.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
	3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan					50.000.000,00					
		Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	300 Ha	300 Ha	300 Ha	50.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
130.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**					**300.000.000,00**					
		Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam menerapkan teknologi dan inovasi pertanian					***300.000.000,00***					
			1.Persentase kelompok tani terbina	83.84 %	81.84 %	82.34 %	300.000.000,00					
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian					300.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
		Terlaksananya pelatihan dan pendampingan kelompok tani					300.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	-	-	-	100.000.000,00					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa yang tersedia dan terpelihara	-	-	-	200.000.000,00					
	3.27.07.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa					100.000.000,00					
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	-	-	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
	3.27.07.2.01.0016	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa					200.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Tersedia Sarana dan prasarana serta Terpeliharanya sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa yang tersedia dan terpelihara	-	-	19 Unit	200.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					**7.400.007.000,00**					
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**7.400.007.000,00**					
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**					**7.400.007.000,00**					
131.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**7.307.007.000,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah					***7.307.007.000,00***					
			1.Presentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahandaerah	100 %	100 %	100 %	7.307.007.000,00					
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.126.849.000,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.126.849.000,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	57.600.000,00					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	5.069.249.000,00					
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					5.069.249.000,00					
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	52 Orang/bulan	5.069.249.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	2.12.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					57.600.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	57.600.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					2.000.000,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					2.000.000,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000,00					
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	2 Orang	5 Orang	0,00					
	2.12.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					2.000.000,00					
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					0,00					
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	2 Orang	0 Orang	0,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					931.848.500,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah					931.848.500,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	0,00					
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	14.000.000,00					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	72.400.000,00					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	18.500.000,00					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	0,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	823.548.500,00					
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	3.400.000,00					
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					0,00					
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	0 Paket	0,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					823.548.500,00					
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	823.548.500,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					3.400.000,00					
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	3.400.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					18.500.000,00					
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	18.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					14.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	14.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					72.400.000,00					
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	72.400.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					0,00					
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen	100 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					268.877.000,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					268.877.000,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	3 Unit	4 Unit	0,00					
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	6 Unit	7 Unit	268.877.000,00					
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0,00					
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	3 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					268.877.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	6 Unit	19 Unit	268.877.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					870.860.000,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					870.860.000,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	398.560.000,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	472.300.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					398.560.000,00					
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	398.560.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					472.300.000,00					
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	472.300.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					106.572.500,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					106.572.500,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10.000.000,00					
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	7 Unit	7 Unit	62.000.000,00					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	50 Unit	50 Unit	34.572.500,00					
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					62.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	7 Unit	7 Unit	62.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					34.572.500,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	50 Unit	56 Unit	34.572.500,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					10.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
132.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**					**25.000.000,00**					
		Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan penduduk secara menyeluruh dan berkelanjutan.					***25.000.000,00***					
			1.Persentase Perekaman KTP Elektronik (%)	99.996 %	99.992 %	99.993 %	25.000.000,00					
			2.Persentase anak usia 0 – 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (%)	61.00 %	60.80 %	60.85 %	25.000.000,00					
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk					0,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
		Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk					0,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00					
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan					0,00					
		Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	12 Dokumen	12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk					25.000.000,00					Masyarakat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk					25.000.000,00					Masyarakat
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	55 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	25.000.000,00					
			Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk					25.000.000,00					
		Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	55 Dokumen	44 Dokumen	55 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk					0,00					
		Tersosialisasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
133.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**					**30.000.000,00**					
		Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dll)					***30.000.000,00***					
			1.Persentase kepemilikan akta kelahiran	97.56 %	97.52 %	97.53 %	30.000.000,00					
			2.Persentase kepemilikan akta kematian (%)	100 %	100 %	100 %	30.000.000,00					
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil					30.000.000,00					Masyarakat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil					30.000.000,00					Masyarakat
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	30.000.000,00					
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil					30.000.000,00					
		Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	30 Laporan	30 Laporan	17 Laporan	30.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil					0,00					-
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil					0,00					-
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0,00					
	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil					0,00					
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
134.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**					**24.000.000,00**					
		Tersedianya sistem informasi administrasi kependudukan yang andal, terintegrasi, dan mudah diakses untuk pelayanan publik dan perencanaan pembangunan.					***24.000.000,00***					
			1.Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama	6 %	2 %	3 %	24.000.000,00					
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan					10.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
		Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan					10.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00					
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	7 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	0,00					
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan					10.000.000,00					
		Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan					0,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	7 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					14.000.000,00					Masyarakat
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					14.000.000,00					Masyarakat
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	0,00					
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	19 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	14.000.000,00					
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	0,00					
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					14.000.000,00					
		Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	19 Laporan	12 Laporan	40 Laporan	14.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					0,00					
		Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	0,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat					0,00					
		Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	0,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					0,00					-
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					0,00					-
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	0,00					
	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					0,00					
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	0,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
135.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**					**14.000.000,00**					
		Tersedianya data dan profil kependudukan yang akurat, mutakhir, dan dapat dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan berbasis data.					***14.000.000,00***					
			1.Cakupan penerbitan profil kependudukan	100 %	100 %	100 %	14.000.000,00					
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan					14.000.000,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Tersusunnya Profil Kependudukan					14.000.000,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	14.000.000,00					
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain					14.000.000,00					
		Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	14.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					**9.608.270.000,00**					
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**9.608.270.000,00**					
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**					**9.608.270.000,00**					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
136.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**3.655.033.000,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah					***3.575.033.000,00***					
			-1.Persentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	3.575.033.000,00					
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					20.000.000,00					Kabupaten Pekalongan
		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan					20.000.000,00					Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000,00					
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	0 Laporan	5 Laporan	10.000.000,00					
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					10.000.000,00					
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.000.000,00					
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	0 Laporan	5 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.114.033.000,00					Kabupaten Pekalongan
		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, akuntabel dan tepat waktu					3.114.033.000,00					Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	70.000.000,00					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	3.044.033.000,00					
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					3.044.033.000,00					
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	3.044.033.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.13.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					70.000.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.000.000,00					Kabupaten Pekalongan
		Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah secara tertib					5.000.000,00					Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	Dokumen	4 Dokumen	0,00					
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	2 Orang	2 Orang	5.000.000,00					
	2.13.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					0,00					
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					5.000.000,00					
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	2 Orang	2 Orang	5.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					160.000.000,00					Kabupaten Pekalongan
		Terselenggaranyan layanan administrasi umum perkantoran yang tertib dan andal					160.000.000,00					Kabupaten Pekalongan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00					
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	80.000.000,00					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	15.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	20.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	15.000.000,00					
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					20.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					15.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	15.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					15.000.000,00					
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	15.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					20.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					80.000.000,00					
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	80.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					10.000.000,00					
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					10.000.000,00					Kabupaten Pekalongan
		Terpenuhinya kebutuhan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai spesifikasi dan ketentuan					10.000.000,00					Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	55 Unit	10.000.000,00					
	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					10.000.000,00					
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	12 Unit	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					205.500.000,00					Kabupaten Pekalongan
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran operasional perangkat daerah					205.500.000,00					Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	150.500.000,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00					
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					40.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.13.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					15.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					150.500.000,00					
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	150.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					140.500.000,00					Kabupaten Pekalongan
		Terpeliharanya BMD penunjang dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai standar layanan					140.500.000,00					Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	25.000.000,00					
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	4 Unit	49.500.000,00					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	66.000.000,00					
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					66.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	66.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					49.500.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	4 Unit	49.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					25.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
137.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**					**1.081.450.000,00**					
		&Tertatanya wilayah administrasi desa s sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. &					***1.081.450.000,00***					
			1.Persentase desa yang difasilitasi dalam kegiatan penataan desa	69.49 %	39.71 %	47.06 %	1.081.450.000,00					
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa					1.081.450.000,00					Desa se-Kabupaten Pekalongan
		Terlaksananya penyelenggaraan penataan desa					1.081.450.000,00					Desa se-Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	5 Desa	1 Desa	2 Desa	0,00					
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	62 Desa	45 Desa	50 Desa	10.000.000,00					
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	30 Desa	10 Desa	15 Desa	90.000.000,00					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	105 Unit	73 Unit	85 Unit	981.450.000,00					
	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa					0,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	5 Desa	1 Desa	0 Desa	0,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa					90.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	30 Desa	10 Desa	15 Desa	90.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa					10.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	62 Desa	45 Desa	50 Desa	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa					981.450.000,00					
		Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	105 Unit	73 Unit	85 Unit	981.450.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
138.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**					**30.000.000,00**					
		Meningkatnya jejaring kerja sama antar-desa dan pihak lain dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.					***15.000.000,00***					
			-1.Persentase Desa yang terfasilitasi Kerjasama Desa	38.24 %	23.53 %	27.21 %	15.000.000,00					
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa					30.000.000,00					Desa se-Kabupaten Pekalongan
		Terlaksananya fasilitasi kerjasama desa					30.000.000,00					Desa se-Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	14 Dokumen	2 Dokumen	5 Dokumen	15.000.000,00					
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	104 Dokumen	64 Dokumen	74 Dokumen	15.000.000,00					
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	4 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	0,00					
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota					15.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	104 Dokumen	64 Dokumen	74 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota					0,00					
		Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	4 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan					15.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	14 Dokumen	2 Dokumen	5 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
139.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**					**4.439.127.000,00**					
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam pelayanan publik.					***4.389.127.000,00***					
			-1.Persentase desa yang melaksanakan pelayanan dan administrasi pemerintahan desa yang baik	50.00 %	34.00 %	38.00 %	4.389.127.000,00					
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa					4.439.127.000,00					Desa se-Kabupaten Pekalongan
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa					4.439.127.000,00					Desa se-Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	272 Orang	272 Orang	272 Orang	25.000.000,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	33.225.000,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.864.198.000,00					
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00					
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00					
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	446.704.000,00					
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa					25.000.000,00					
		Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa					3.864.198.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.864.198.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa					446.704.000,00					
		Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	446.704.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					25.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa					33.225.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	33.225.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD					25.000.000,00					
		Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	272 Orang	272 Orang	272 Orang	25.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan					20.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
140.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**					**402.660.000,00**					
		Meningkatnya peran dan kapasitas lembaga kemasyarakatan					***402.660.000,00***					
			-1.Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dibina	21.66 %	8.28 %	11.78 %	402.660.000,00					
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					402.660.000,00					Desa se-Kabupaten Pekalongan
		Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa					402.660.000,00					Desa se-Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	109 Dokumen	89 Dokumen	94 Dokumen	47.960.000,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	272 Dokumen	171 Dokumen	209 Dokumen	189.800.000,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1783 Dokumen	682 Dokumen	970 Dokumen	94.900.000,00					
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	57 Laporan	19 Laporan	38 Laporan	70.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					94.900.000,00					
		Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1783 Dokumen	682 Dokumen	970 Dokumen	94.900.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa					47.960.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	109 Dokumen	89 Dokumen	94 Dokumen	47.960.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan peran BUMDes, koperasi, dan lembaga ekonomi lokal sebagai motor penggerak ekonomi inklusif.	
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna					70.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	57 Laporan	19 Laporan	38 Laporan	70.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga					189.800.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	272 Dokumen	171 Dokumen	209 Dokumen	189.800.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
		Dinas Perhubungan					**42.037.003.000,00**					
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**42.037.003.000,00**					
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**					**42.037.003.000,00**					
141.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**8.505.768.000,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah					***8.225.768.000,00***					
			1.Persentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	8.225.768.000,00					
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					20.000.000,00					Dinas Perhubungan
		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan					20.000.000,00					Dinas Perhubungan
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00					
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00					
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					10.000.000,00					
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.000.000,00					
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6.711.768.000,00					Dinas Perhubungan
		Terlaksananya administrasi keuangan daerah yang tertib, akuntabel, dan tepat waktu					6.711.768.000,00					Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9 Dokumen	8 Dokumen	9 Dokumen	128.000.000,00					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	69 Orang/bulan	70 Orang/bulan	6.583.768.000,00					
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					6.583.768.000,00					
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	69 Orang/bulan	82 Orang/bulan	6.583.768.000,00	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Retribusi Jasa Umum Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	2.15.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					128.000.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9 Dokumen	8 Dokumen	12 Dokumen	128.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					15.000.000,00					Dinas Perhubungan
		Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah secara tertib					15.000.000,00					Dinas Perhubungan
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	5 Orang	1 Orang	15.000.000,00					
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					15.000.000,00					
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	5 Orang	7 Orang	15.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					182.500.000,00					Dinas Perhubungan
		Terselenggaranya layanan administrasi umum perkantoran yang tertib dan andal					182.500.000,00					Dinas Perhubungan
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	16 Dokumen	10 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00					
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	75.000.000,00					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	25.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	7.500.000,00					
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					5.000.000,00					
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					25.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2 Paket	25.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					7.500.000,00					
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	7.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					50.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2 Paket	50.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					15.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					75.000.000,00					
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	10 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					5.000.000,00					
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	16 Dokumen	10 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					50.000.000,00					Dinas Perhubungan
		Terpenuhinya kebutuhan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai spesifikasi dan ketentuan					50.000.000,00					Dinas Perhubungan
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	20.000.000,00					
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	5 Unit	5 Unit	30.000.000,00					
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					20.000.000,00					
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	10 Unit	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					30.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	5 Unit	10 Unit	30.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.126.500.000,00					Dinas Perhubungan
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran operasional perangkat daerah					1.126.500.000,00					Dinas Perhubungan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	97.500.000,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1.029.000.000,00					
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					97.500.000,00					
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	12 Laporan	97.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.029.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	12 Laporan	1.029.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					400.000.000,00					Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terpeliharanya BMD penunjang dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai standar layanan					400.000.000,00					Dinas Perhubungan
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	0 Unit	150.000.000,00					
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	23 Unit	23 Unit	150.000.000,00					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	75.000.000,00					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	25.000.000,00					
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					75.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					150.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	23 Unit	25 Unit	150.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					25.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	20 Unit	25.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					150.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	1 Unit	150.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Gejlig || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
142.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**					**33.531.235.000,00**					
		Meningkatnya kelancaran, keselamatan, dan keteraturan lalu lintas serta kualitas pelayanan angkutan jalan yang aman, tertib, dan berkelanjutan.					***33.481.235.000,00***					
			1.Rasio Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (DRK)	0.29 Angka	0.13 Angka	0.17 Angka	33.481.235.000,00					
			2.Persentase kepemilikan KIR	82.00 %	78.00 %	79.00 %	33.481.235.000,00					
			3.Persentase Perlengkapan Jalan dalam kondisi baik	76.17 %	74.17 %	74.67 %	33.481.235.000,00					
			4.Persentase angkutan umum dalam kondisi baik	71.20 %	70.55 %	70.72 %	33.481.235.000,00					
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					32.505.000.000,00					Pengguna jalan
		Meningkatnya keselamatan lalu lintas pada jaringan jalan kabupaten/kota					32.505.000.000,00					Pengguna jalan
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	500 Unit	500 Unit	500 Unit	6.505.000.000,00					
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	750 Unit	500 Unit	550 Unit	26.000.000.000,00					
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					6.505.000.000,00					
		Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	500 Unit	500 Unit	1000 Unit	6.505.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan					26.000.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	750 Unit	500 Unit	100000 Unit	26.000.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir					80.000.000,00					Masyarakat Umum
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota					80.000.000,00					Masyarakat Umum
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	80.000.000,00					
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota					80.000.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	3 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					155.000.000,00					Pemilik dan pengemudi kendaraan angkutan umum/barang
		Meningkatnya kelaikan teknis dan keselamatan operasional kendaraan bermotor di jalan					155.000.000,00					Pemilik dan pengemudi kendaraan angkutan umum/barang
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1500 Dokumen	1000 Dokumen	1100 Dokumen	50.000.000,00					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	13 Unit	13 Unit	13 Unit	85.000.000,00					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	2 Unit	1 Unit	20.000.000,00					
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					20.000.000,00					
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	2 Unit	1 Unit	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	Opsen PKB	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong konektivitas antarwilayah terutama kawasan tertinggal, pinggiran, dan perdesaan melalui peningkatan akses transportasi dan digitalisasi wilayah.	
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					50.000.000,00					
		Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1500 Dokumen	1000 Dokumen	2000 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Pekalongan	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong konektivitas antarwilayah terutama kawasan tertinggal, pinggiran, dan perdesaan melalui peningkatan akses transportasi dan digitalisasi wilayah.	
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					85.000.000,00					
		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	13 Unit	13 Unit	11 Unit	85.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong konektivitas antarwilayah terutama kawasan tertinggal, pinggiran, dan perdesaan melalui peningkatan akses transportasi dan digitalisasi wilayah.	
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					741.235.000,00					Pengguna jalan
		Meningkatnya kelancaran, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas pada jaringan jalan kabupaten/kota					741.235.000,00					Pengguna jalan
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00					
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	350.000.000,00					
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	4 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	386.235.000,00					
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota					350.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	12 Laporan	350.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong konektivitas antarwilayah terutama kawasan tertinggal, pinggiran, dan perdesaan melalui peningkatan akses transportasi dan digitalisasi wilayah.	
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					5.000.000,00					
		Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong konektivitas antarwilayah terutama kawasan tertinggal, pinggiran, dan perdesaan melalui peningkatan akses transportasi dan digitalisasi wilayah.	
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					386.235.000,00					
		Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	4 Dokumen	2 Dokumen	12 Dokumen	386.235.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					50.000.000,00					Pengguna jalan
		Meningkatnya aspek keselamatan lalu lintas pada jaringan jalan kabupaten/kota melalui identifikasi dan penanganan titik rawan kecelakaan					50.000.000,00					Pengguna jalan
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00					
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota					50.000.000,00					
		Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	3 Laporan	3 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					0,00					Masyarakat
		Terlaksananya pengendalian dan pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					0,00					Masyarakat
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0,00					
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					0,00					
		Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	0,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong konektivitas antarwilayah terutama kawasan tertinggal, pinggiran, dan perdesaan melalui peningkatan akses transportasi dan digitalisasi wilayah.	
		Dinas Komunikasi dan Informatika					**8.467.334.000,00**					
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**8.467.334.000,00**					
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**					**8.257.334.000,00**					
143.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**4.783.334.000,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah					***4.708.334.000,00***					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			1.Persentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	4.708.334.000,00					
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5.000.000,00					Dinas Komunikasi dan Informatika
		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan					5.000.000,00					Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Dokumen	3 Dokumen	2.800.000,00					
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	8 Laporan	5 Laporan	2.200.000,00					
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.800.000,00					
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Dokumen	3 Dokumen	2.800.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.200.000,00					
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	8 Laporan	5 Laporan	2.200.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.809.134.000,00					Dinas Komunikasi dan Informatika
		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, akuntabel, dan tepat waktu					3.809.134.000,00					Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	67.000.000,00					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	3.742.134.000,00					
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					3.742.134.000,00					
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	3.742.134.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.16.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					67.000.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	67.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					10.000.000,00					Dinas Komunikasi dan Informatika
		Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah secara tertib					10.000.000,00					Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	5 Orang	10.000.000,00					
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					10.000.000,00					
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	5 Orang	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					123.000.000,00					Dinas Komunikasi dan Informatika
		Terselenggaranya layanan administrasi umum perkantoran yang tertib dan andal					123.000.000,00					Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00					
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	5.000.000,00					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	50 Laporan	60 Laporan	75.000.000,00					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	9.000.000,00					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	12.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					4.000.000,00					
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	12.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					15.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					9.000.000,00					
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	9.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					5.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					75.000.000,00					
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	50 Laporan	25 Laporan	75.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					3.000.000,00					
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					70.000.000,00					Dinas Komunikasi dan Informatika
		Terpenuhinya kebutuhan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai spesifikasi dan ketentuan					70.000.000,00					Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	8 Unit	3 Unit	30.000.000,00					
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Unit	8 Unit	40.000.000,00					
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					30.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	8 Unit	7 Unit	30.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					40.000.000,00					
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Unit	10 Unit	40.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					613.200.000,00					Dinas Komunikasi dan Informatika
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran operasional perangkat daerah					613.200.000,00					Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	185.000.000,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	428.200.000,00					
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					185.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	185.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					428.200.000,00					
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	428.200.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					153.000.000,00					Dinas Komunikasi dan Informatika
		Terpeliharanya BMD penunjang dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai standar layanan					153.000.000,00					Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	40.000.000,00					
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	9 Unit	35.000.000,00					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	35.000.000,00					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	30 Unit	20 Unit	43.000.000,00					
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					35.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					35.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	9 Unit	35.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					43.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	30 Unit	37 Unit	43.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					40.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
144.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**					**847.000.000,00**					
		Meningkatnya diseminasi informasi yang akurat, transparan, dan inklusif					***807.000.000,00***					
			1.Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	95 %	75 %	80 %	807.000.000,00					
		Terlaksananya kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik					847.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	147.000.000,00					
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media					147.000.000,00					
		Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	147.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					847.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terlaksananya kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik					847.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
			Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	-	-	-	500.000.000,00					
			Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	-	-	-	40.000.000,00					
			Jumlah Konten Komunikasi Publik	-	-	-	120.000.000,00					
			Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-	-	-	40.000.000,00					
	2.16.02.2.01.0025	Pelayanan Informasi Publik serta Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik					40.000.000,00					
		Tersedianya Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat dan terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-	-	100 %	40.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.16.02.2.01.0026	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik					500.000.000,00					
		Terlaksananya Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	-	-	730000 Orang	500.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.16.02.2.01.0031	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat					40.000.000,00					
		Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	-	-	5 Komunitas	40.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.16.02.2.01.0032	Penyusunan Konten					120.000.000,00					
		Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Komunikasi Publik	-	-	120 Konten	120.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
145.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**					**2.627.000.000,00**					
		Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) melalui pengembangan dan pemanfaatan aplikasi informatika yang terpadu dan andal.					***2.627.000.000,00***					
			1.Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	100 %	100 %	2.627.000.000,00					
			2.Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	28 %	24 %	25 %	2.627.000.000,00					
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					42.000.000,00					OPD se-Kabupaten Pekalongan, Masyarakat Kabupaten Pekalongan
		Terlaksananya kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan					42.000.000,00					OPD se-Kabupaten Pekalongan, Masyarakat Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	42.000.000,00					
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa					42.000.000,00					
		Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	42.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					2.585.000.000,00					OPD se-Kabupaten Pekalongan, Masyarakat Kabupaten Pekalongan
		Terlaksananya kegiatan pengelolaan E-government di lingkup Pemerintah Kabupaten Pekalongan					2.585.000.000,00					OPD se-Kabupaten Pekalongan, Masyarakat Kabupaten Pekalongan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00					
	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas					15.000.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
		Terlaksananya kegiatan pengelolaan E-government di lingkup Pemerintah Kabupaten Pekalongan					2.585.000.000,00					OPD se-Kabupaten Pekalongan, Masyarakat Kabupaten Pekalongan
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-	-	-	150.000.000,00					
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-	-	-	135.000.000,00					
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-	-	-	2.010.000.000,00					
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-	-	275.000.000,00					
	2.16.03.2.02.0040	Penyediaan Akses Internet					2.010.000.000,00					
		Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dan UPTD, termasuk ruang publik dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-	-	48 Titik	2.010.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.16.03.2.02.0041	Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK					150.000.000,00					
		Terlaksananya koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-	-	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.16.03.2.02.0042	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi					135.000.000,00					
		Terlaksananya pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-	-	5 Layanan	135.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.16.03.2.02.0043	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota					275.000.000,00					
		Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-	48 Titik	275.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**					**135.000.000,00**					
146.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**					**135.000.000,00**					
		Tersedianya data dan statistik sektoral untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah.					***135.000.000,00***					
			1.Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %	100 %	100 %	135.000.000,00					
			2.Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100 %	100 %	100 %	135.000.000,00					
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					135.000.000,00					OPD se-Kabupaten Pekalongan, Masyarakat Kabupaten Pekalongan
		Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Pekalongan					135.000.000,00					OPD se-Kabupaten Pekalongan, Masyarakat Kabupaten Pekalongan
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	48 Orang	48 Orang	48 Orang	25.000.000,00					
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100 %	100 %	100 %	110.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral					110.000.000,00					
		Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100 %	100 %	100 %	110.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.20.02.2.01.0020	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral					25.000.000,00					
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	48 Orang	48 Orang	48 Orang	25.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**					**75.000.000,00**					
147.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**					**75.000.000,00**					
		Meningkatnya keamanan informasi dalam penyelenggaraan persandian					***75.000.000,00***					
			1.Tingkat keamanan informasi pemerintah	2 Nilai	1 Nilai	1 Nilai	75.000.000,00					
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					75.000.000,00					OPD se-Kabupaten Pekalongan
		Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi					75.000.000,00					OPD se-Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00					
	2.21.02.2.01.0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan					25.000.000,00					
		Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
		Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi					75.000.000,00					OPD se-Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-	-	-	50.000.000,00					
	2.21.02.2.01.0010	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik					50.000.000,00					
		Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-	-	12 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja					**9.772.452.107,00**					
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**9.751.752.107,00**					
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**					**7.190.178.580,00**					
148.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**5.545.997.080,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah					***5.545.997.080,00***					
			1.Presentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	5.545.997.080,00					
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					14.500.000,00					Perangkat Daerah
		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan.					14.500.000,00					Perangkat Daerah
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	10 Dokumen	6.500.000,00					
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	8.000.000,00					
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					6.500.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					8.000.000,00					
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	8.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.006.350.880,00					Perangkat Daerah
		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, akuntabel, dan tepat waktu.					5.006.350.880,00					Perangkat Daerah
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	80.956.880,00					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	4.925.394.000,00					
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					4.925.394.000,00					
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	38 Orang/bulan	4.925.394.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.07.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					80.956.880,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	80.956.880,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					12.000.000,00					Perangkat Daerah
		Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah secara tertib.					12.000.000,00					Perangkat Daerah
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	21 Orang	22 Orang	12.000.000,00					
	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					12.000.000,00					
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	21 Orang	5 Orang	12.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					147.148.800,00					Perangkat Daerah
		Terselenggaranya layanan administrasi umum perkantoran yang tertib dan andal.					147.148.800,00					Perangkat Daerah
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	8.500.000,00					
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	11.000.000,00					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	64.648.800,00					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	13.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	40.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	10.000.000,00					
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					13.000.000,00					
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1 Paket	13.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					40.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	6 Paket	40.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					10.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	6 Paket	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					64.648.800,00					
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	6 Paket	64.648.800,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					11.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	11.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.07.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					8.500.000,00					
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	8.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					270.000.000,00					Pemerintah Daerah
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran operasional perangkat daerah.					270.000.000,00					Pemerintah Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	270.000.000,00					
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					270.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	270.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					95.997.400,00					Pemerintahan Daerah
		Terpeliharanya BMD penunjang dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai standar layanan.					95.997.400,00					Pemerintahan Daerah
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	12 Unit	50.997.400,00					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	12 Unit	12 Unit	45.000.000,00					
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					45.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	12 Unit	1 Unit	45.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					50.997.400,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	10 Unit	50.997.400,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
149.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**					**949.630.000,00**					
		Meningkatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja					***939.630.000,00***					
			1.Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	35.00 %	31.00 %	32.00 %	939.630.000,00					
			2.Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	40.80 %	40.52 %	40.65 %	939.630.000,00					
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					10.000.000,00					Masyarakat
		Terlaksananya pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta					10.000.000,00					Masyarakat
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	38 Lembaga	30 Lembaga	32 Lembaga	10.000.000,00					
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					10.000.000,00					
		Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	38 Lembaga	30 Lembaga	40 Lembaga	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan peran BUMDes, koperasi, dan lembaga ekonomi lokal sebagai motor penggerak ekonomi inklusif.	
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil					10.000.000,00					Perusahaan Kecil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terlaksananya konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil					10.000.000,00					Perusahaan Kecil
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	30 Perusahaan	22 Perusahaan	24 Perusahaan	10.000.000,00					
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil					10.000.000,00					
		Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	30 Perusahaan	22 Perusahaan	5 Perusahaan	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi					929.630.000,00					Masyarakat
		Terlaksananya dukungan pendidikaan dan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi (DBHCHT)					929.630.000,00					Masyarakat
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-	-	-	929.630.000,00					
	2.07.03.2.01.0009	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi					929.630.000,00					
		Terlaksananya Proses Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-	-	160 Orang	929.630.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan sektor industri kecil dan menengah (IKM) melalui fasilitasi legalitas, pelatihan, inkubasi bisnis, dan integrasi dengan pasar digital dan global.	
150.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**					**110.000.000,00**					
		Meningkatnya kesempatan kerja bagi calon tenaga kerja					***110.000.000,00***					
			1.Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	20.88 %	20.44 %	20.66 %	110.000.000,00					
		Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja yang tertib, akuntabel, dan tepat waktu.					95.000.000,00					Masyarakat
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	500 Orang	300 Orang	350 Orang	70.000.000,00					
		Terlaksananya Pelayanan dan penyediaan Informasi Pasar Kerja Online yang tertib, akuntabel, dan tepat waktu.					95.000.000,00					Masyarakat
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	500 Orang	300 Orang	350 Orang	70.000.000,00					
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja					70.000.000,00					
		Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	500 Orang	300 Orang	100 Orang	70.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					95.000.000,00					Masyarakat
		Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja yang tertib, akuntabel, dan tepat waktu.					95.000.000,00					Masyarakat
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	-	-	-	25.000.000,00					
		Terlaksananya Pelayanan dan penyediaan Informasi Pasar Kerja Online yang tertib, akuntabel, dan tepat waktu.					95.000.000,00					Masyarakat
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	-	-	-	25.000.000,00					
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online					25.000.000,00					
		Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	-	-	1500 Orang	25.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota					15.000.000,00					Masyarakat
		Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran yang terkelola dan responsif.					15.000.000,00					Masyarakat
			Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA Layanan Terpadu	-	-	-	15.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	2.07.04.2.04.0004	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran					15.000.000,00					
		Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA Layanan Terpadu	-	-	100 Orang	15.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
151.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**					**584.551.500,00**					
		Meningkatnya kualitas hubungan industrial antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.					***569.551.500,00***					
			1.Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	27.80 (%)	27.60 (%)	27.65 (%)	569.551.500,00					
			2.Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	569.551.500,00					
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					30.000.000,00					Masyarakat
		Terlaksananya Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan tepat waktu dan sesuai ketentuan					30.000.000,00					Masyarakat
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	16 Laporan	8 Laporan	10 Laporan	15.000.000,00					
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	18 Perusahaan	10 Perusahaan	12 Perusahaan	15.000.000,00					
		Tersedianya Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Pengusaha sesuai ketentuan.					30.000.000,00					Masyarakat
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	16 Laporan	8 Laporan	10 Laporan	15.000.000,00					
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	18 Perusahaan	10 Perusahaan	12 Perusahaan	15.000.000,00					
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan					15.000.000,00					
		Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	18 Perusahaan	10 Perusahaan	10 Perusahaan	15.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan					15.000.000,00					
		Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	16 Laporan	8 Laporan	10 Laporan	15.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota					554.551.500,00					Masyarakat
		Terlaksananya operasional lembaga kerja sama tripartit daerah kabupaten/kota tepat waktu dan sesuai ketentuan.					554.551.500,00					Masyarakat
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	3 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	60.789.000,00					
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	779 Orang	779 Orang	779 Orang	475.000.000,00					
		Terlaksananya Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja , dan penutupan perusahaan yang barakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.					554.551.500,00					Masyarakat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	3 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	60.789.000,00					
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	779 Orang	779 Orang	779 Orang	475.000.000,00					
		Terlaksananya Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja (DBHCHT)					554.551.500,00					Masyarakat
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	3 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	60.789.000,00					
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	779 Orang	779 Orang	779 Orang	475.000.000,00					
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota					60.789.000,00					
		Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	3 Lembaga	3 Lembaga	2 Lembaga	60.789.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja					475.000.000,00					
		Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	779 Orang	779 Orang	1470 Orang	475.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
		Terlaksananya operasional lembaga kerja sama tripartit daerah kabupaten/kota tepat waktu dan sesuai ketentuan.					554.551.500,00					Masyarakat
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	-	-	-	18.762.500,00					
		Terlaksananya Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja , dan penutupan perusahaan yang barakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.					554.551.500,00					Masyarakat
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	-	-	-	18.762.500,00					
		Terlaksananya Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja (DBHCHT)					554.551.500,00					Masyarakat
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	-	-	-	18.762.500,00					
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					18.762.500,00					
		Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	-	-	6 Perkara	18.762.500,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**					**2.561.573.527,00**					
152.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**1.833.573.527,00**					
			1.Presentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	-	-	100.00 %	1.833.573.527,00					
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					70.000.000,00					Perangkat Daerah
		Terselenggaranya layanan administrasi umum perkantoran yang tertib dan andal.					70.000.000,00					Perangkat Daerah
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	70.000.000,00					
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					70.000.000,00					
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	70.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.225.000.000,00					Pemerintah Daerah
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran operasional perangkat daerah.					1.225.000.000,00					Pemerintah Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.225.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.225.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.225.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					538.573.527,00					Pemerintahan Daerah
		Terpeliharanya BMD penunjang dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai standar layanan.					538.573.527,00					Pemerintahan Daerah
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	5 Unit	483.612.047,00					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	12 Unit	54.961.480,00					
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					54.961.480,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	12 Unit	54.961.480,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					483.612.047,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	2 Unit	483.612.047,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
153.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**					**30.000.000,00**					
		Meningkatnya kepatuhan koperasi terhadap prinsip tata kelola yang sehat dan regulasi yang berlaku.					***30.000.000,00***					
			1.persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh koperasi	100.00 %	100.00 %	100.00 %	30.000.000,00					
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota					30.000.000,00					Koperasi
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota					30.000.000,00					Koperasi
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	90 Unit Usaha	90 Unit Usaha	90 Unit Usaha	30.000.000,00					
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota					30.000.000,00					
		Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	90 Unit Usaha	90 Unit Usaha	50 Unit Usaha	30.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan peran BUMDes, koperasi, dan lembaga ekonomi lokal sebagai motor penggerak ekonomi inklusif.	
154.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**					**20.000.000,00**					
		Meningkatnya kemandirian koperasi					***20.000.000,00***					
			1.persentase koperasi yang meningkat omsetnya	75.00 %	55.00 %	60.00 %	20.000.000,00					
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota					20.000.000,00					Koperasi
		Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, Restrukturisasi Usaha					20.000.000,00					Koperasi
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	20.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha					20.000.000,00					
		Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan peran BUMDes, koperasi, dan lembaga ekonomi lokal sebagai motor penggerak ekonomi inklusif.	
155.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**					**190.000.000,00**					
		Meningkatnya kapasitas dan keberlanjutan usaha UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja.					***190.000.000,00***					
			1.meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	0.030 %	0.025 %	0.027 %	190.000.000,00					
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					190.000.000,00					Usaha Mikro
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					190.000.000,00					Usaha Mikro
			Jumlah Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	-	-	-	150.000.000,00					
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	-	-	-	40.000.000,00					
	2.17.07.2.01.0016	Perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM					150.000.000,00					
		Terfasilitasinya perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	Jumlah Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	-	-	3 Lembaga	150.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan sektor industri kecil dan menengah (IKM) melalui fasilitasi legalitas, pelatihan, inkubasi bisnis, dan integrasi dengan pasar digital dan global.	
	2.17.07.2.01.0022	Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM					40.000.000,00					
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	-	-	45 Unit Usaha	40.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan sektor industri kecil dan menengah (IKM) melalui fasilitasi legalitas, pelatihan, inkubasi bisnis, dan integrasi dengan pasar digital dan global.	
156.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**					**488.000.000,00**					
		Meningkatnya akses pasar, pembiayaan, teknologi, dan inovasi bagi UMKM dalam rangka peningkatan produktivitas					***488.000.000,00***					
			1.persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	75.00 %	55.00 %	60.00 %	488.000.000,00					
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil					488.000.000,00					Usaha Mikro
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil					488.000.000,00					Usaha Mikro
			Jumlah UMKM yang mendapatkan Pembinaan dan Fasilitasi Kemitraan dan Rantai Pasok Pengembangan UMKM	-	-	-	40.000.000,00					
			Jumlah UMKM yang mendapatkan tempat promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik	-	-	-	358.000.000,00					
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang memperoleh pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi	-	-	-	90.000.000,00					
	2.17.08.2.01.0018	Pembinaan dan Fasilitasi Kemitraan dan Rantai Pasok Pengembangan UMKM					40.000.000,00					
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Kemitraan dan Rantai Pasok Pengembangan UMKM	Jumlah UMKM yang mendapatkan Pembinaan dan Fasilitasi Kemitraan dan Rantai Pasok Pengembangan UMKM	-	-	145 Unit Usaha	40.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan sektor industri kecil dan menengah (IKM) melalui fasilitasi legalitas, pelatihan, inkubasi bisnis, dan integrasi dengan pasar digital dan global.	
	2.17.08.2.01.0019	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM					90.000.000,00					
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada unit usaha UMKM	Jumlah Unit Usaha UMKM yang memperoleh pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi	-	-	90 Unit Usaha	90.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan sektor industri kecil dan menengah (IKM) melalui fasilitasi legalitas, pelatihan, inkubasi bisnis, dan integrasi dengan pasar digital dan global.	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	2.17.08.2.01.0021	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM					358.000.000,00					
		Tersedianya Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM	Jumlah UMKM yang mendapatkan tempat promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik	-	-	110 Unit Usaha	358.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan sektor industri kecil dan menengah (IKM) melalui fasilitasi legalitas, pelatihan, inkubasi bisnis, dan integrasi dengan pasar digital dan global.	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					**20.700.000,00**					
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**					**20.700.000,00**					
157.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**					**20.700.000,00**					
		Meningkatnya kesiapan calon transmigran					***20.700.000,00***					
			1.persentase calon transmigrasi terdaftar yang mendapatkan pembinaan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	20.700.000,00					
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					20.700.000,00					Masyarakat
		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					20.700.000,00					Masyarakat
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	20.700.000,00					
	3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					20.700.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1 Laporan	20.700.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					**3.885.322.000,00**					
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**3.885.322.000,00**					
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**					**3.885.322.000,00**					
158.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**3.632.322.000,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.					***3.544.322.000,00***					
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.824.422.000,00					DPMPTSP KABUPATEN PEKALONGAN
		-					2.824.422.000,00					DPMPTSP KABUPATEN PEKALONGAN
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	53.000.000,00					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Orang/bulan	322 Orang/bulan	322 Orang/bulan	2.771.422.000,00					
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.771.422.000,00					
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Orang/bulan	322 Orang/bulan	322 Orang/bulan	2.771.422.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.18.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					53.000.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	53.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0,00					DPMPTSP KABUPATEN PEKALONGAN
		-					0,00					DPMPTSP KABUPATEN PEKALONGAN
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang	3 Orang	0,00					
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					0,00					
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang	0 Orang	0,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					160.000.000,00					DPMPTSP KABUPATEN PEKALONGAN
		-					160.000.000,00					DPMPTSP KABUPATEN PEKALONGAN
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	20.000.000,00					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	5.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	25.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	20.000.000,00					
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					5.000.000,00					
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	3 Paket	5.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					25.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					20.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					20.000.000,00					
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					15.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					75.000.000,00					
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					41.000.000,00					DPMPTSP KABUPATEN PEKALONGAN
		-					41.000.000,00					DPMPTSP KABUPATEN PEKALONGAN
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	0 Unit	0 Unit	23.000.000,00					
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	3 Unit	4 Unit	18.000.000,00					
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					23.000.000,00					
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	0 Unit	30 Unit	23.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					18.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	3 Unit	2 Unit	18.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					453.900.000,00					DPMPTSP KABUPATEN PEKALONGAN
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran operasional perangkat daerah.					453.900.000,00					DPMPTSP KABUPATEN PEKALONGAN
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	176.500.000,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	277.400.000,00					
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					176.500.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	176.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					277.400.000,00					
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	277.400.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					153.000.000,00					DPMPTSP KABUPATEN PEKALONGAN
		Terpeliharanya BMD penunjang dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai standar layanan.					153.000.000,00					DPMPTSP KABUPATEN PEKALONGAN
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	23.000.000,00					
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	45.000.000,00					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	45.000.000,00					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	40.000.000,00					
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					45.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	45.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					45.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	45.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					40.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	43 Unit	40.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					23.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	23.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
159.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**					**60.000.000,00**					
		Meningkatnya daya tarik daerah sebagai lokasi investasi					***60.000.000,00***					
		-					60.000.000,00					Pelaku usaha
			Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1 Daerah	1 Daerah	1 Daerah	60.000.000,00					
	2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)					60.000.000,00					
		Tersedianya data potensi investasi daerah yang termutakhirkan	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1 Daerah	1 Daerah	1 Daerah	60.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					60.000.000,00					Pelaku usaha
		-					60.000.000,00					Pelaku usaha
			Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00					
	2.18.02.2.02.0007	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota					0,00					
		Tersusunnya Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	-	-	0 Dokumen	0,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
160.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**					**10.000.000,00**					
		Meningkatnya minat dan realisasi investasi di daerah					***10.000.000,00***					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					10.000.000,00					Pelaku usaha
		-					10.000.000,00					Pelaku usaha
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00					
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota					10.000.000,00					
		Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
161.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**					**98.000.000,00**					
		Meningkatnya kualitas dan kecepatan pelayanan perizinan penanaman modal yang terintegrasi dan berbasis elektronik.					***98.000.000,00***					
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					98.000.000,00					pelaku usaha
		-					98.000.000,00					pelaku usaha
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5230 Pelaku Usaha	5200 Pelaku Usaha	5200 Pelaku Usaha	98.000.000,00					
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik					98.000.000,00					
		Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5230 Pelaku Usaha	5200 Pelaku Usaha	5200 Pelaku Usaha	98.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
		-					98.000.000,00					pelaku usaha
			Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	-	-	-	0,00					
	2.18.04.2.01.0009	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko					0,00					
		Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	-	-	0 Kegiatan Usaha	0,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
162.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**					**20.000.000,00**					
		Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha/investor sesuai ketentuan perizinan dan rencana investasi yang telah ditetapkan.					***20.000.000,00***					
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					20.000.000,00					pelaku usaha
		-					20.000.000,00					pelaku usaha
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	10 Kegiatan Usaha	10 Kegiatan Usaha	10 Kegiatan Usaha	20.000.000,00					
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	0,00					
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha					0,00					
		Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal					20.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	10 Kegiatan Usaha	10 Kegiatan Usaha	10 Kegiatan Usaha	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
163.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**					**65.000.000,00**					
		Tersedianya data dan sistem informasi penanaman modal yang akurat, terintegrasi, dan mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.					***65.000.000,00***					
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					65.000.000,00					pelaku usaha
		-					65.000.000,00					pelaku usaha
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00					
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					65.000.000,00					
		Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
		Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata					**9.991.965.360,00**					
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**8.145.465.360,00**					
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**					**8.145.465.360,00**					
164.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**5.169.628.000,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah					***5.147.128.000,00***					
			1.Presentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	5.147.128.000,00					
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5.000.000,00					Masyarakat Umum
		-					5.000.000,00					Masyarakat Umum
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00					
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5.000.000,00					
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.810.502.000,00					ASN Dinporapar
		-					3.810.502.000,00					ASN Dinporapar
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	164.130.000,00					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	3.646.372.000,00					
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					3.646.372.000,00					
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	12 Orang/bulan	3.646.372.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	2.19.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					164.130.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	164.130.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.000.000,00					ASN Dinporapar
		-					5.000.000,00					ASN Dinporapar

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang	3 Orang	5.000.000,00					
	2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					5.000.000,00					
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang	1 Orang	5.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					171.500.000,00					Masyarakat Umum
		-					171.500.000,00					Masyarakat Umum
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	14.000.000,00					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	30.000.000,00					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	17.500.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	32.500.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	17.500.000,00					
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					17.500.000,00					
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	17.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					32.500.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	32.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					17.500.000,00					
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	4 Paket	17.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					30.000.000,00					
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	6 Paket	30.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					14.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	10 Laporan	14.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					60.000.000,00					
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	10 Laporan	60.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					59.683.000,00					Masyarakat Umum
		-					59.683.000,00					Masyarakat Umum
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	10.000.000,00					
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	6 Unit	3 Unit	49.683.000,00					
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					10.000.000,00					
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					49.683.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	6 Unit	4 Unit	49.683.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					824.843.000,00					Masyarakat Umum
		-					824.843.000,00					Masyarakat Umum
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	108.403.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	716.440.000,00					
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					108.403.000,00					
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	108.403.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					716.440.000,00					
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	716.440.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
		-					293.100.000,00					Masyarakat Umum
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	40.000.000,00					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	35.000.000,00					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	3 Unit	21.000.000,00					
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					35.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					40.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	40.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					21.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	6 Unit	21.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					293.100.000,00					Masyarakat Umum
		-					293.100.000,00					Masyarakat Umum
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	197.100.000,00					
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					197.100.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	1 Unit	197.100.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
165.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**					**608.025.000,00**					
		Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan daya saing pemuda dalam pembangunan daerah					***608.025.000,00***					
			1.Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	5.38 % Nilai	5.28 % Nilai	5.30 % Nilai	608.025.000,00					
			2.Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasial kemasyarakatan	7.80 %	7.60 %	7.65 %	608.025.000,00					
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota					573.350.000,00					Pemuda dalam hal ini kelompok masyarakat usia 16-30 tahun
		-					573.350.000,00					Pemuda dalam hal ini kelompok masyarakat usia 16-30 tahun
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	-	-	-	17.800.000,00					
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota Yang ditingkatkan kapasitasnya	-	-	-	106.200.000,00					
			Jumlah Pemuda tingkat Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas kepemimpinannya	-	-	-	258.850.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	-	190.500.000,00					
	2.19.02.2.01.0019	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota					106.200.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota Yang ditingkatkan kapasitasnya	-	-	3 Orang	106.200.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mengintegrasikan pendekatan gender, penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan anak dan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	
	2.19.02.2.01.0020	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota					190.500.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan peningkatan kapasitas Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	100 Orang	190.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.19.02.2.01.0021	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabpuaten/kota					258.850.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda tingkat Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas kepemimpinannya	-	-	150 Orang	258.850.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mengintegrasikan pendekatan gender, penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan anak dan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	
	2.19.02.2.01.0023	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota					17.800.000,00					
		Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	-	-	1 Dokumen	17.800.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					34.675.000,00					Organisasi Kepemudaan
		-					34.675.000,00					Organisasi Kepemudaan
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-	-	-	34.675.000,00					
	2.19.02.2.02.0006	Penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota					34.675.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-	-	1 Organisasi	34.675.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
166.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**					**2.024.137.360,00**					
		Meningkatnya prestasi, partisipasi, dan budaya olahraga di masyarakat					***1.874.137.360,00***					
			1.Peningkatan Prestasi Olahraga	48 % Indeks	40 % Indeks	42 % Indeks	1.874.137.360,00					
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					424.137.360,00					Masyarakat Umum dan disabilitas
		-					424.137.360,00					Masyarakat Umum dan disabilitas
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Usia Dini dan Dasar	-	-	-	114.137.360,00					
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	-	-	-	310.000.000,00					
	2.19.03.2.01.0007	Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Usia Dini dan Dasar					114.137.360,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Usia Dini dan Dasar	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Usia Dini dan Dasar	-	-	1 Kegiatan	114.137.360,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.19.03.2.01.0009	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota					310.000.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	-	-	2 Unit	310.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					750.000.000,00					Pelajar dan Mahasiswa mencakup peserta didik
		-					750.000.000,00					Pelajar dan Mahasiswa mencakup peserta didik
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota yang terselenggara, termasuk olahraga disabilitas	-	-	-	250.000.000,00					
			Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, termasuk olahraga disabilitas	-	-	-	500.000.000,00					
	2.19.03.2.02.0007	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan festival, pekan, dan kejuaraan olahraga					500.000.000,00					
		Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, temasuk olahraga disabilitas	Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, termasuk olahraga disabilitas	-	-	200 Orang	500.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.19.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota					250.000.000,00					
		Terlaksananya Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota yang terselenggara, termasuk olahraga disabilitas	-	-	1 Kegiatan	250.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi					700.000.000,00					Atlet dan Pelatih Olahraga
		-					700.000.000,00					Atlet dan Pelatih Olahraga
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan, termasuk olahraga disabilitas	-	-	-	150.000.000,00					
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga	-	-	-	550.000.000,00					
	2.19.03.2.03.0012	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga					550.000.000,00					
		Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	-	-	20 Orang	550.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.19.03.2.03.0013	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota					150.000.000,00					
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan, termasuk olahraga disabilitas	-	-	100 Orang	150.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi					150.000.000,00					Organisasi Olahraga Rekreasi
		-					150.000.000,00					Organisasi Olahraga Rekreasi
			Jumlah Peserta yang terfasilitasi dalam Pemasalan Olahraga Masyarakat di tingkat kabupaten/kota	-	-	-	150.000.000,00					
	2.19.03.2.05.0012	Peningkatan Partisipasi dan Pemassalan Olahraga di Masyarakat					150.000.000,00					
		Meningkatnya Partisipasi dan Pemasalan Olahraga di Masyarakat di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta yang terfasilitasi dalam Pemasalan Olahraga Masyarakat di tingkat kabupaten/kota	-	-	20 Orang	150.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
167.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**					**343.675.000,00**					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Meningkatnya kualitas dan kapasitas kepramukaan					***343.675.000,00***					
			1.Prosentase kwartir ranting yang aktif	100 %	100 %	100 %	343.675.000,00					
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan					343.675.000,00					Anggota Gerakan Pramuka dan Kwartir Gerakan Pramuka
		-					343.675.000,00					Anggota Gerakan Pramuka dan Kwartir Gerakan Pramuka
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	300.000.000,00					
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah					300.000.000,00					
		Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	300.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
		-					343.675.000,00					Anggota Gerakan Pramuka dan Kwartir Gerakan Pramuka
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	-	-	-	43.675.000,00					
	2.19.04.2.01.0010	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah					43.675.000,00					
		Terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	-	-	1 Laporan	43.675.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					**1.846.500.000,00**					
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**					**1.846.500.000,00**					
168.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**					**931.500.000,00**					
		Meningkatnya kualitas dan daya saing destinasi pariwisata					***931.500.000,00***					
			1.Persentase Pertumbuhan destinasi wisata	5 %	5 %	5 %	931.500.000,00					
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					931.500.000,00					Wisatawan
		-					931.500.000,00					Wisatawan
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	450.200.000,00					
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	131.300.000,00					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	2 Unit	2 Unit	350.000.000,00					
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					450.200.000,00					
		Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	2 Lokasi	1 Lokasi	450.200.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan destinasi wisata berbasis budaya, sejarah, dan alam dengan pendekatan community-based tourism dan dukungan infrastruktur serta SDM pariwisata.	
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					350.000.000,00					
		Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	2 Unit	2 Unit	350.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan destinasi wisata berbasis budaya, sejarah, dan alam dengan pendekatan community-based tourism dan dukungan infrastruktur serta SDM pariwisata.	
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					131.300.000,00					
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	131.300.000,00	Kab. Pekalongan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan destinasi wisata berbasis budaya, sejarah, dan alam dengan pendekatan community-based tourism dan dukungan infrastruktur serta SDM pariwisata.	
169.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**					**725.000.000,00**					
		Meningkatnya kunjungan wisatawan melalui promosi pariwisata yang efektif dan terintegrasi.					***725.000.000,00***					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			1.Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota	11.30 %	10.90 %	11 %	725.000.000,00					
			2.Tingkat hunian akomodasi	2 %	2 %	2 %	725.000.000,00					
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					725.000.000,00					Wisatawan
		-					725.000.000,00					Wisatawan
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	12 Promosi	12 Promosi	12 Promosi	25.000.000,00					
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	700.000.000,00					
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota					700.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan	2 Kegiatan	4 Kegiatan	700.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri					25.000.000,00					
		Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	12 Promosi	12 Promosi	1 Promosi	25.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan destinasi wisata berbasis budaya, sejarah, dan alam dengan pendekatan community-based tourism dan dukungan infrastruktur serta SDM pariwisata.	
170.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**					**190.000.000,00**					
		Meningkatnya kapasitas dan daya saing pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif					***190.000.000,00***					
			1.Cakupan kelompok usaha Pariwisata dan ekraf yang dibina	59 %	55 %	56 %	190.000.000,00					
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					190.000.000,00					SDM Pelaku Ekraf
		-					190.000.000,00					SDM Pelaku Ekraf
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan untuk pengembangan Ekonomi kreatif	-	-	-	190.000.000,00					
	3.26.05.2.01.0013	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif					190.000.000,00					
		Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang Memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan untuk pengembangan Ekonomi kreatif	-	-	30 Orang	190.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					**6.098.481.500,00**					
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**6.098.481.500,00**					
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**					**5.642.658.500,00**					
171.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**4.891.283.500,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah					***4.871.283.500,00***					
			1.Presentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	4.871.283.500,00					
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					25.020.000,00					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan
		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan.					25.020.000,00					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	25.020.000,00					
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					25.020.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	25.020.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan literasi dan akses masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah.	
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.905.751.000,00					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan
		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, akuntabel, dan tepat waktu.					3.905.751.000,00					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	79.948.000,00					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	3.825.803.000,00					
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					3.825.803.000,00					
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	3.825.803.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan literasi dan akses masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah.	
	2.23.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					79.948.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	79.948.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan literasi dan akses masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah.	
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					35.000.000,00					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan
		Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah secara tertib.					35.000.000,00					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	7 Orang	7 Orang	35.000.000,00					
	2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					35.000.000,00					
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	7 Orang	7 Orang	35.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan literasi dan akses masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah.	
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					185.412.500,00					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan
		Terselenggaranya layanan administrasi umum perkantoran yang tertib dan andal.					185.412.500,00					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	68.000.000,00					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	22.000.000,00					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	25.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	23.801.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	26.611.500,00					
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					25.000.000,00					
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan literasi dan akses masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah.	
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					23.801.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	23.801.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan literasi dan akses masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah.	
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					26.611.500,00					
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	26.611.500,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan literasi dan akses masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah.	
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					22.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	22.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan literasi dan akses masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah.	
	2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					20.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	11 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan literasi dan akses masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah.	
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					68.000.000,00					
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	68.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan literasi dan akses masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah.	
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					101.000.000,00					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan
		Terpenuhinya kebutuhan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai spesifikasi dan ketentuan.					101.000.000,00					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	11 Unit	12 Unit	101.000.000,00					
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					101.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	11 Unit	12 Unit	101.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan literasi dan akses masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah.	
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					425.000.000,00					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran operasional perangkat daerah.					425.000.000,00					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	180.000.000,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	245.000.000,00					
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					180.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	180.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan literasi dan akses masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah.	
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					245.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	245.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan literasi dan akses masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah.	
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					214.100.000,00					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan
		Terpeliharanya BMD penunjang dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai standar layanan.					214.100.000,00					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	55.000.000,00					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	38.950.000,00					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	12 Unit	20.000.000,00					
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					38.950.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	38.950.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan literasi dan akses masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah.	
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					55.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	55.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan literasi dan akses masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah.	
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					20.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	12 Unit	20.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan literasi dan akses masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah.	
		Terpeliharanya BMD penunjang dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai standar layanan.					214.100.000,00					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	100.150.000,00					
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					100.150.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	2 Unit	100.150.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan literasi dan akses masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah.	
172.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**					**712.525.000,00**					
		Meningkatnya kualitas layanan dan akses masyarakat terhadap perpustakaan sebagai pusat pembelajaran					***712.525.000,00***					
			1.Tingkat pemanfaatan perpustakaan	0.73 %	0.16 %	0.30 %	712.525.000,00					
			2.Presentase perpustakaan yang dibina	49 %	47.15 %	47.25 %	712.525.000,00					
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					348.705.000,00					Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
		Meningkatnya Perpustakaan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Nomor Pokok Perpustakaan (NPP)					348.705.000,00					Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	42400 Eksemplar	42000 Eksemplar	42100 Eksemplar	102.525.000,00					
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00					
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	236.180.000,00					
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					236.180.000,00					
		Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	236.180.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan literasi dan akses masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah.	
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan					10.000.000,00					
		Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan literasi dan akses masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah.	
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan					102.525.000,00					
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	42400 Eksemplar	42000 Eksemplar	500 Eksemplar	102.525.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan literasi dan akses masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah.	
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					363.820.000,00					Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
		Meningkatnya cakupan lokus gemar membaca					363.820.000,00					Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	64 Lokus	16 Lokus	32 Lokus	363.820.000,00					
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat					363.820.000,00					
		Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	64 Lokus	16 Lokus	10 Lokus	363.820.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan literasi dan akses masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah.	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
173.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**					**38.850.000,00**					
		Terlestarikannya koleksi nasional dan naskah kuno sebagai warisan budaya dan sumber pengetahuan bangsa					***38.850.000,00***					
			1.Persentase naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada diwilayahnya	100 %	100 %	100 %	38.850.000,00					
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota					20.500.000,00					Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
		Meningkatnya Jumlah koleksi Naskah kuno yang didaftarkan ke pangkalan data nasional					20.500.000,00					Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	1 Orang	1 Orang	1 Orang	20.500.000,00					
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno					20.500.000,00					
		Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	1 Orang	1 Orang	1 Orang	20.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan literasi dan akses masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah.	
	2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					18.350.000,00					Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
		Meningkatnya koleksi budaya etnis yang diakurasi					18.350.000,00					Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	1 Eksemplar	1 Eksemplar	1 Eksemplar	18.350.000,00					
	2.23.03.2.02.0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara					18.350.000,00					
		Terlaksananya Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	1 Eksemplar	1 Eksemplar	1 Eksemplar	18.350.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan literasi dan akses masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah.	
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**					**455.823.000,00**					
174.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**					**329.049.000,00**					
		Meningkatnya tertib arsip dinamis dan statis dalam mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan					***329.049.000,00***					
			1.Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	100 %	100 %	100 %	329.049.000,00					
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota					169.700.000,00					OPD
		Meningkatnya arsip dinamis daerah kabupaten yang dikelola					169.700.000,00					OPD
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Laporan	45 Laporan	45 Laporan	56.000.000,00					
			Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	285 Instansi	285 Instansi	285 Instansi	46.700.000,00					
			Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	4 Unit	4 Unit	4 Unit	67.000.000,00					
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota					56.000.000,00					
		Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Laporan	45 Laporan	45 Laporan	56.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	2.24.02.2.01.0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis					67.000.000,00					
		Terlaksananya pengadaan prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	4 Unit	4 Unit	2 Unit	67.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	2.24.02.2.01.0010	Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota					46.700.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terlaksananya Implementasi Pengelolaan Arsip Dinamis pada ORMAS, ORPOL, OPD/SKPD, BUMD	Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	285 Instansi	285 Instansi	45 Instansi	46.700.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota					52.874.000,00					OPD
		Meningkatnya arsip statis daerah kabupaten yang dikelola					52.874.000,00					OPD
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	2800 Arsip	2000 Arsip	2200 Arsip	52.874.000,00					
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis					52.874.000,00					
		Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	2800 Arsip	2000 Arsip	500 Arsip	52.874.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota					106.475.000,00					OPD
		Meningkatnya jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN (PMDN 18/2020)					106.475.000,00					OPD
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	106.475.000,00					
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota					106.475.000,00					
		Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	106.475.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
175.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**					**80.494.000,00**					
		Terjaminnya keamanan dan keberlangsungan arsip vital serta arsip statis sebagai memori kolektif bangsa					***80.494.000,00***					
			1.Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	100 %	100 %	100 %	80.494.000,00					
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun					30.494.000,00					OPD
		Meningkatnya arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun yang dimusnahkan					30.494.000,00					OPD
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	10.000 Arsip	10.000 Arsip	10.000 Arsip	30.494.000,00					
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun					30.494.000,00					
		Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	10.000 Arsip	10.000 Arsip	5000 Arsip	30.494.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota					50.000.000,00					OPD
		Meningkatnya arsip yang diselamatkan akibat bencana yang berskala Kabupaten/Kota					50.000.000,00					OPD
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	135 Arsip	75 Arsip	90 Arsip	50.000.000,00					
	2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana					50.000.000,00					
		Terlaksananya Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	135 Arsip	75 Arsip	90 Arsip	50.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
176.	**2.24.04**	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**					**46.280.000,00**					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Meningkatnya pemanfaatan arsip oleh publik secara tertib, aman, dan sesuai ketentuan perundang-undangan					***46.280.000,00***					
			1.Persentase pengguna arsip tertutup yang menerapkan SOP	100 %	100 %	100 %	46.280.000,00					
	2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota					46.280.000,00					OPD
		Meningkatnya penerbitan izin pengguna arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di LKD Kab/Kota yang sesuai NSPK					46.280.000,00					OPD
			Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	20 Arsip	0 Arsip	5 Arsip	46.280.000,00					
	2.24.04.2.01.0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup					46.280.000,00					
		Terlaksananya Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	20 Arsip	0 Arsip	3 Arsip	46.280.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
		Dinas Kelautan dan Perikanan					**6.018.856.000,00**					
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					**6.018.856.000,00**					
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**					**6.018.856.000,00**					
177.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**4.158.856.000,00**					
		Meningkatnya dukungan Administrasi keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah					***4.063.856.000,00***					
			1.Presentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	4.063.856.000,00					
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					20.000.000,00					Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan
		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan.					20.000.000,00					Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	12.000.000,00					
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	8.000.000,00					
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					12.000.000,00					
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	12.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					8.000.000,00					
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	8.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.343.856.000,00					Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan
		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, akuntabel, dan tepat waktu.					3.343.856.000,00					Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	87.000.000,00					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.256.856.000,00					
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					3.256.856.000,00					
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.256.856.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
	3.25.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					87.000.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	87.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					15.000.000,00					Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan
		Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah secara tertib					15.000.000,00					Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	25 Orang	10 Orang	15.000.000,00					
	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					15.000.000,00					
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	25 Orang	25 Orang	15.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					203.500.000,00					Dinas Kelautan dan Perikanan
		Terselenggaranya layanan administrasi umum perkantoran yang tertib dan andal					203.500.000,00					Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	75.000.000,00					
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	25.000.000,00					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	25.000.000,00					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	10.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	43.500.000,00					
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					10.000.000,00					
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	6 Paket	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					43.500.000,00					
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	43.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					25.000.000,00					
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					25.000.000,00					
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
	3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					25.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					75.000.000,00					
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	50 Laporan	25 Laporan	75.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					40.000.000,00					Dinas Kelautan dan Perikanan
		Terpenuhinya kebutuhan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai spesifikasi dan ketentuan					40.000.000,00					Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	3 Unit	20.000.000,00					
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	6 Unit	3 Unit	20.000.000,00					
	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					20.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	3 Unit	20.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					20.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	6 Unit	3 Unit	20.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					361.500.000,00					Dinas Kelautan dan Perikanan
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran operasional perangkat daerah.					361.500.000,00					Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	145.000.000,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	216.500.000,00					
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					145.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	145.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					216.500.000,00					
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	216.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					175.000.000,00					Dinas Kelautan dan Perikanan
		Terpeliharanya BMD penunjang dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai standar layanan.					175.000.000,00					Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	2 Unit	4 Unit	70.000.000,00					
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	34 Unit	34 Unit	45.000.000,00					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	35.000.000,00					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	30 Unit	30 Unit	25.000.000,00					
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					35.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					45.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	34 Unit	35 Unit	45.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					25.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	30 Unit	35 Unit	25.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					70.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	2 Unit	2 Unit	70.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
178.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**					**615.000.000,00**					
		Meningkatnya produktivitas dan keberlanjutan usaha perikanan tangkap					***415.000.000,00***					
			1.Total Produksi Perikanan (Tangkap) kabupaten/kota	6529 Ton	6152 Ton	6244 Ton	250.000.000,00					
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					165.000.000,00					Kelompok Usaha Bersama (KUB)/ Perkumpulan Nelayan
		Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang disediakan					165.000.000,00					Kelompok Usaha Bersama (KUB)/ Perkumpulan Nelayan
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00					
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	110 Unit	50 Unit	100 Unit	140.000.000,00					
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan					25.000.000,00					
		Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap					140.000.000,00					
		Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	110 Unit	50 Unit	100 Unit	140.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota					250.000.000,00					KUB dan Koperasi Nelayan Kab. Pekalongan
		Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil					250.000.000,00					KUB dan Koperasi Nelayan Kab. Pekalongan
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	35 Orang	25 Orang	25 Orang	50.000.000,00					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	0 Unit	0 Unit	0 Unit	200.000.000,00					
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil					50.000.000,00					
		Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	35 Orang	25 Orang	25 Orang	50.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil					200.000.000,00					
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	0 Unit	0 Unit	100 Unit	200.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)					200.000.000,00					KUB dan Koperasi Nelayan Kab. Pekalongan
		Tersedianya Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)					200.000.000,00					KUB dan Koperasi Nelayan Kab. Pekalongan
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	200.000.000,00					
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)					200.000.000,00					
		Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	200.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
179.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**					**750.000.000,00**					
		Meningkatnya produktivitas dan keberlanjutan usaha perikanan budidaya					***650.000.000,00***					
			1.Total Produksi Perikanan (Budidaya) kabupaten/kota	10362 Ton	9648 Ton	9817 Ton	650.000.000,00					
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil					100.000.000,00					Kelompok Pembudidaya Ikan
		Terbinanya Kelompok Pembudi Daya Ikan yang Mengikuti Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil					100.000.000,00					Kelompok Pembudidaya Ikan
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	100.000.000,00					
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	7 Kelompok	6 Kelompok	6 Kelompok	0,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil					100.000.000,00					
		Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	100.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan					0,00					
		Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	7 Kelompok	6 Kelompok	0 Kelompok	0,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan					650.000.000,00					Kelompok Pembudidaya Ikan
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					650.000.000,00					Kelompok Pembudidaya Ikan
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00					
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00					
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	460 Unit	300 Unit	330 Unit	100.000.000,00					
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	2 Unit	2 Unit	200.000.000,00					
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	2 Unit	2 Unit	320.000.000,00					
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					30.000.000,00					
		Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					200.000.000,00					
		Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	2 Unit	1 Unit	200.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					0,00					
		Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					320.000.000,00					
		Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	2 Unit	5 Unit	320.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat					100.000.000,00					
		Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	460 Unit	300 Unit	330 Unit	100.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
180.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**					**50.000.000,00**					
		Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha/kelompok masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan					***50.000.000,00***					
			1.persentase Kelompok Masyarakat Pengawas yang Terbina	95 %	87.5 %	90 %	50.000.000,00					
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota					50.000.000,00					Pokmaswas Kab. Pekalongan
		Terbinanya Kelompok Masyarakat Pengawas					50.000.000,00					Pokmaswas Kab. Pekalongan
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	4 Orang	4 Orang	4 Orang	50.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	3.25.05.2.01.0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan					50.000.000,00					
		Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	4 Orang	4 Orang	20 Orang	50.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
181.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**					**445.000.000,00**					
		Meningkatnya nilai tambah dan akses pasar hasil perikanan					***445.000.000,00***					
			1.Angka Konsumsi Ikan	35.94 Kg/KAP/TH	33.86 Kg/KAP/TH	34.37 Kg/KAP/TH	345.000.000,00					
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil					15.000.000,00					Masyarakat kabupaten pekalongan
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko					15.000.000,00					Masyarakat kabupaten pekalongan
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00					
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko					15.000.000,00					
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil					100.000.000,00					Unit Uasaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
		Meningkatanya Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Resiko					100.000.000,00					Unit Uasaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	100.000.000,00					
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko					100.000.000,00					
		Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	100.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					330.000.000,00					Pelaku usaha Perikanan
		Meningkatnya Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi					330.000.000,00					Pelaku usaha Perikanan
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	12 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	265.000.000,00					
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3722 Ton	3507 Ton	3559 Ton	65.000.000,00					
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					65.000.000,00					
		Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3722 Ton	3507 Ton	2 Ton	65.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					265.000.000,00					
		Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	12 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	265.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.	
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan					**12.996.378.980,00**					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					**12.996.378.980,00**					
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**					**12.671.378.980,00**					
182.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**11.637.239.980,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.					***11.635.239.980,00***					
			2.Persentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	11.635.239.980,00					
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					7.000.000,00					ASN
		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (%)					7.000.000,00					ASN
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	7.000.000,00					
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					7.000.000,00					
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6.843.677.000,00					ASN
		Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)					6.843.677.000,00					ASN
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	135.000.000,00					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	6.708.677.000,00					
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					6.708.677.000,00					
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	63 Orang/bulan	6.708.677.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	3.30.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					135.000.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	1 Dokumen	135.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					9.900.000,00					ASN
		Persentase ketercapian pelaksanan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi (%)					9.900.000,00					ASN
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00					
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	60 Orang	60 Orang	4.900.000,00					
	3.30.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					5.000.000,00					
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	3.30.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					4.900.000,00					
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	60 Orang	5 Orang	4.900.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					296.951.500,00					ASN
		Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)					296.951.500,00					ASN
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000,00					
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	118.866.020,00					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	74.085.480,00					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100.000.000,00					
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					100.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					74.085.480,00					
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	74.085.480,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					2.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	5 Laporan	2.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					118.866.020,00					
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	12 Laporan	118.866.020,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	3.30.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					2.000.000,00					
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
		Ketercapaian pengadaan barang milik daerah					536.833.980,00					ASN
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	78.633.980,00					
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	85.000.000,00					
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	23.200.000,00					
	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					78.633.980,00					
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	30 Unit	78.633.980,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					85.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	11 Unit	85.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	3.30.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					23.200.000,00					
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	23.200.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.700.877.500,00					ASN dan Non ASN
		Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.700.877.500,00					ASN dan Non ASN
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	530.000.000,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.170.877.500,00					
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					530.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100% Laporan	530.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					3.170.877.500,00					
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100% Laporan	3.170.877.500,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
		Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah					242.000.000,00					Pelaku usaha
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43 Unit	43 Unit	43 Unit	109.000.000,00					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	44.500.000,00					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50.000.000,00					
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					44.500.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	44.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					109.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43 Unit	43 Unit	4 Unit	109.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					50.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					536.833.980,00					ASN
		Ketercapaian pengadaan barang milik daerah					536.833.980,00					ASN
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	350.000.000,00					
	3.30.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					350.000.000,00					
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	1 Unit	350.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					242.000.000,00					Pelaku usaha
		Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah					242.000.000,00					Pelaku usaha
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	38.500.000,00					
	3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					38.500.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	1 Unit	38.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
183.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**					**8.500.000,00**					
		Meningkatnya kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan pendaftaran perusahaan					***5.000.000,00***					
			2.Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	5.000.000,00					
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang					5.000.000,00					Pelaku usaha perdagangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Jumlah izin Tanda Daftar Gudang (TDG) yg diterbitkan					5.000.000,00					Pelaku usaha perdagangan
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	8 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00					
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang					5.000.000,00					
		Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	8 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan sektor industri kecil dan menengah (IKM) melalui fasilitasi legalitas, pelatihan, inkubasi bisnis, dan integrasi dengan pasar digital dan global.	
			-	-	-	-	3.500.000,00					
	3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri					3.500.000,00					Pelaku usaha perdagangan
		-					3.500.000,00					Pelaku usaha perdagangan
			Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	-	-	-	3.500.000,00					
	3.30.02.2.03.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri					3.500.000,00					
		Verifikasi Persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	-	-	3 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan sektor industri kecil dan menengah (IKM) melalui fasilitasi legalitas, pelatihan, inkubasi bisnis, dan integrasi dengan pasar digital dan global.	
184.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**					**647.139.000,00**					
		Meningkatnya kelancaran distribusi barang dan efisiensi sistem logistik perdagangan					***647.139.000,00***					
			2.Persentase pasar yang memenuhi persyaratan (layak)	100 %	83 %	91 %	647.139.000,00					
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					597.139.000,00					Pelaku usaha perdagangan
		Jumlah Unit sarana Distribusi Perdagangan dan fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					597.139.000,00					Pelaku usaha perdagangan
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	75.000.000,00					
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	12 Unit	12 Unit	12 Unit	522.139.000,00					
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan					522.139.000,00					
		Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	12 Unit	12 Unit	12 Unit	522.139.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					75.000.000,00					
		Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya					50.000.000,00					Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
		Jumlah Dokumen Hasil pembinaan dan pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan					50.000.000,00					Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00					
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan					50.000.000,00					
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
185.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**					**30.000.000,00**					
		Terkendalinya harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di masyarakat.					***30.000.000,00***					
			2.Disparitas Harga	10 %	10 %	10 %	30.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			2.Persentase Agen dan Pasar Rakyat yang dipantau ketersediaan Bapokting	100 %	100 %	78,95 %	30.000.000,00					
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					30.000.000,00					Pedagang Pasar Rakyat
		-					30.000.000,00					Pedagang Pasar Rakyat
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	-	-	-	30.000.000,00					
	3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat					30.000.000,00					
		Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	-	-	12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
186.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**					**250.000.000,00**					
		Meningkatnya daya saing dan volume ekspor produk unggulan daerah.					***250.000.000,00***					
			2.Nilai ekspor daerah	567000 US$	563000 US$	564000 US$	250.000.000,00					
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					250.000.000,00					Pelaku usaha
		Pelaksanaan promosi dagang berupa pameran dan misi dagang					250.000.000,00					Pelaku usaha
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	6 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	250.000.000,00					
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan					250.000.000,00					
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	6 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	250.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan sektor industri kecil dan menengah (IKM) melalui fasilitasi legalitas, pelatihan, inkubasi bisnis, dan integrasi dengan pasar digital dan global.	
187.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**					**81.000.000,00**					
		Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap standar mutu dan terpenuhinya hak-hak konsumen					***81.000.000,00***					
			2.Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	74.50 %	73.10 %	73.43 %	81.000.000,00					
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan					81.000.000,00					Pemilik/Pengguna Alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya
		Presentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku					81.000.000,00					Pemilik/Pengguna Alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	2243 Unit	2243 Unit	2243 Unit	75.000.000,00					
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100 Orang	70 Orang	70 Orang	6.000.000,00					
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang					75.000.000,00					
		Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	2243 Unit	2243 Unit	2243 Unit	75.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal					6.000.000,00					
		Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100 Orang	70 Orang	65 Orang	6.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan regulasi dan insentif daerah untuk mempercepat investasi dan inovasi pembangunan.	
188.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**					**17.500.000,00**					
		Meningkatnya penggunaan dan daya saing produk dalam negeri di pasar domestik.					***17.500.000,00***					
			2.persentase pelaku usaha potensial ekspor yang mendapatkan fasilitasi promosi,pemasaran dan peningkatan pengguna	0.22 %	0.18 %	0.19 %	17.500.000,00					
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri					17.500.000,00					UKM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Meningkatnya penggunaan dan daya saing produk dalam negeri di pasar domestik.					17.500.000,00					UKM
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	0.22 UMKM	0.18 UMKM	0.19 UMKM	17.500.000,00					
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota					17.500.000,00					
		Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	0.22 UMKM	0.18 UMKM	2 UMKM	17.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan sektor industri kecil dan menengah (IKM) melalui fasilitasi legalitas, pelatihan, inkubasi bisnis, dan integrasi dengan pasar digital dan global.	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**					**325.000.000,00**					
189.	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**75.000.000,00**					
			2.Persentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	100 %	75.000.000,00					
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					75.000.000,00					ASN
		Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)					75.000.000,00					ASN
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	75.000.000,00					
	3.31.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					75.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1 Paket	75.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
190.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**					**150.000.000,00**					
		Tersusunnya perencanaan pembangunan industri yang terarah dan mendorong pertumbuhan industri berdaya saing.					***150.000.000,00***					
			1.persentase Peningkatan nilai produksi IKM	0.24 %	0.20 %	0.21 %	150.000.000,00					
			1.Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota	0.56 %	0.52 %	0.53 %	150.000.000,00					
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					150.000.000,00					Pelaku Industri
		Tersusunnya perencanaan pembangunan industri yang terarah dan mendorong pertumbuhan industri berdaya saing					150.000.000,00					Pelaku Industri
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00					
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri					110.000.000,00					
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan sektor industri kecil dan menengah (IKM) melalui fasilitasi legalitas, pelatihan, inkubasi bisnis, dan integrasi dengan pasar digital dan global.	
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri					5.000.000,00					
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan sektor industri kecil dan menengah (IKM) melalui fasilitasi legalitas, pelatihan, inkubasi bisnis, dan integrasi dengan pasar digital dan global.	
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat					35.000.000,00					
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan sektor industri kecil dan menengah (IKM) melalui fasilitasi legalitas, pelatihan, inkubasi bisnis, dan integrasi dengan pasar digital dan global.	
191.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**					**50.000.000,00**					
		Meningkatnya kepatuhan dan tertib administrasi pelaku usaha industri					***50.000.000,00***					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			1.Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100 %	100 %	100 %	50.000.000,00					
			1.persentase pengajuan legalitas usaha IKM (IUI, IPUI, IUKI, IUPKI, Merk,Halal. PIRT) yang terfasilitasi	100 %	100 %	100 %	50.000.000,00					
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota					50.000.000,00					Pelaku IKM
		Meningkatnya kepatuhan dan tertib administrasi pelaku usaha industri					50.000.000,00					Pelaku IKM
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00					
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00					
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota					15.000.000,00					
		Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan sektor industri kecil dan menengah (IKM) melalui fasilitasi legalitas, pelatihan, inkubasi bisnis, dan integrasi dengan pasar digital dan global.	
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)					35.000.000,00					
		Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan sektor industri kecil dan menengah (IKM) melalui fasilitasi legalitas, pelatihan, inkubasi bisnis, dan integrasi dengan pasar digital dan global.	
192.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**					**50.000.000,00**					
		Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan data industri yang akurat dan terintegrasi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).					***50.000.000,00***					
			1.Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100 %	100 %	100 %	50.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota					50.000.000,00					Pelaku Industri
		Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan data industri yang akurat dan terintegrasi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)					50.000.000,00					Pelaku Industri
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00					
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)					50.000.000,00					
		Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan sektor industri kecil dan menengah (IKM) melalui fasilitasi legalitas, pelatihan, inkubasi bisnis, dan integrasi dengan pasar digital dan global.	
		Bagian Umum					**31.711.023.500,00**					
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					**31.711.023.500,00**					
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**					**31.711.023.500,00**					
193.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**33.949.968.543,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.					***31.711.023.500,00***					
			1.Persentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	31.711.023.500,00					
			2.Tingkat kematangan organisasi	47.00 Indeks	41.00 Indeks	43.00 Indeks	31.711.023.500,00					
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					20.207.594.000,00					Sekretariat Daerah
		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, akuntabel, dan tepat waktu.					20.207.594.000,00					Sekretariat Daerah
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	335.750.000,00					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 Orang/bulan	150 Orang/bulan	150 Orang/bulan	19.871.844.000,00					
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					19.871.844.000,00					
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 Orang/bulan	150 Orang/bulan	156 Orang/bulan	19.871.844.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					335.750.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	335.750.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					84.315.240,00					Sekretariat Daerah
		Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah secara tertib.					84.315.240,00					Sekretariat Daerah
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	8 Orang	10 Orang	41.650.000,00					
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					41.650.000,00					
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	8 Orang	5 Orang	41.650.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.646.083.000,00					Sekretariat Daerah
		Terselenggaranya layanan administrasi umum perkantoran yang tertib dan andal.					2.646.083.000,00					Sekretariat Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2500 Dokumen	2500 Dokumen	2500 Dokumen	25.500.000,00					
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.561.783.000,00					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	201.000.000,00					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	84.300.000,00					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	159.500.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	319.750.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	294.250.000,00					
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					159.500.000,00					
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	159.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					319.750.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	319.750.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					294.250.000,00					
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	294.250.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					84.300.000,00					
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	84.300.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					1.561.783.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.561.783.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					201.000.000,00					
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	201.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					25.500.000,00					
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2500 Dokumen	2500 Dokumen	2500 Dokumen	25.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					485.375.000,00					Sekretariat Daerah
		Terpenuhinya kebutuhan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai spesifikasi dan ketentuan.					485.375.000,00					Sekretariat Daerah
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	11 Unit	11 Unit	11 Unit	137.000.000,00					
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	40 Unit	40 Unit	348.375.000,00					
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					137.000.000,00					
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	11 Unit	11 Unit	11 Unit	137.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					348.375.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	40 Unit	40 Unit	348.375.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.332.121.500,00					Sekretariat Daerah
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran operasional perangkat daerah.					3.332.121.500,00					Sekretariat Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.317.500.000,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.586.709.000,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	385.412.500,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	42.500.000,00					
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					42.500.000,00					
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	42.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1.317.500.000,00					
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.317.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					385.412.500,00					
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	385.412.500,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.586.709.000,00					
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.586.709.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.466.200.000,00					Sekretariat Daerah
		Terpeliharanya BMD penunjang dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai standar layanan.					2.466.200.000,00					Sekretariat Daerah
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	8 Unit	739.800.000,00					
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	70 Unit	70 Unit	70 Unit	803.550.000,00					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	16 Unit	16 Unit	506.050.000,00					
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	30 Unit	191.250.000,00					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	160 Unit	160 Unit	160 Unit	225.550.000,00					
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					506.050.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	16 Unit	16 Unit	506.050.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					803.550.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	70 Unit	70 Unit	70 Unit	803.550.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					191.250.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	30 Unit	191.250.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					225.550.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	160 Unit	160 Unit	160 Unit	225.550.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					739.800.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	8 Unit	739.800.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					1.925.000.000,00					Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Terlaksananya dukungan administrasi keuangan dan operasional bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara tertib dan tepat waktu.					1.925.000.000,00					Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	1.095.000.000,00					
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					1.095.000.000,00					
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	1.095.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					1.437.000.000,00					Sekretariat Daerah
		Tersedianya layanan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang terkelola dan responsif.					1.437.000.000,00					Sekretariat Daerah
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	833.750.000,00					
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	603.250.000,00					
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah					833.750.000,00					
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	833.750.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah					603.250.000,00					
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	603.250.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Kelurahan Kajen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
		Bagian Tata Pemerintahan					**459.059.552,00**					
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					**459.059.552,00**					
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**					**459.059.552,00**					
194.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**					**9.653.590.064,00**					
		Meningkatnya efektivitas koordinasi urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.					***459.059.552,00***					
			1.Persentase rancangan produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	100 %	100 %	100 %	459.059.552,00					
			2.Persentase laporan penyelenggaraan pemerintah terkait tata pemerintahan yang tersusun sesuai ketentuan	100 %	100 %	100 %	459.059.552,00					
			3.Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Bina Mental, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %	459.059.552,00					
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan					393.749.898,00					OPD
		Terpenuhinya dokumen bidang tata kelola pemerintahan sesuai ketentuan					393.749.898,00					OPD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	125.435.240,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	110.881.615,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	157.433.043,00					
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan					110.881.615,00					
		Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	110.881.615,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan					157.433.043,00					
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	157.433.043,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah					125.435.240,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	125.435.240,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah					65.309.654,00					OPD
		Terfaslilitasinya penyusunan naskah kerjasama Daerah sesuai ketentuan					65.309.654,00					OPD
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	51.309.654,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.500.000,00					
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	5.500.000,00					
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri					51.309.654,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12 Dokumen	12 Dokumen	8 Dokumen	51.309.654,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri					8.500.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama					5.500.000,00					
		Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	5.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
		Bagian Hukum					**296.594.359,00**					
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					**296.594.359,00**					
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**					**296.594.359,00**					
195.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**33.949.968.543,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.					***42.665.240,00***					
			1.Persentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	42.665.240,00					
			2.Tingkat kematangan organisasi	47.00 Indeks	41.00 Indeks	43.00 Indeks	42.665.240,00					
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					84.315.240,00					OPD
		Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah secara tertib.					84.315.240,00					OPD
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	12.750.000,00					
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	90 Orang	90 Orang	90 Orang	29.915.240,00					
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					29.915.240,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	90 Orang	90 Orang	90 Orang	29.915.240,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					12.750.000,00					
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	12.750.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
196.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**					**9.653.590.064,00**					
		Meningkatnya efektivitas koordinasi urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.					***253.929.119,00***					
			1.Persentase rancangan produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	100 %	100 %	100 %	253.929.119,00					
			2.Persentase laporan penyelenggaraan pemerintah terkait tata pemerintahan yang tersusun sesuai ketentuan	100 %	100 %	100 %	253.929.119,00					
			3.Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Bina Mental, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %	253.929.119,00					
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum					253.929.119,00					OPD
		Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pembentukan produk hukum daerah serta publikasinya sebagai kebijakan daerah					253.929.119,00					OPD
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	20 Kasus	15 Kasus	20 Kasus	151.806.003,00					
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	550 Dokumen	500 Dokumen	500 Dokumen	51.535.614,00					
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	50.587.502,00					
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah					51.535.614,00					
		Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	550 Dokumen	500 Dokumen	450 Dokumen	51.535.614,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum					151.806.003,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	20 Kasus	15 Kasus	15 Kasus	151.806.003,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum danPengelolaan Informasi Hukum					50.587.502,00					
		Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	50.587.502,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
		Bagian Organisasi					**319.166.302,00**					
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					**319.166.302,00**					
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**					**319.166.302,00**					
197.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**33.949.968.543,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.					***319.166.302,00***					
			1.Persentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	319.166.302,00					
			2.Tingkat kematangan organisasi	47.00 Indeks	41.00 Indeks	43.00 Indeks	319.166.302,00					
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi					319.166.302,00					OPD
		Tersusunnya dokumen penataan organisasi dan tata laksana perangkat daerah sesuai ketentuan.					319.166.302,00					OPD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen	40.000.000,00					
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	28.657.835,00					
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	61.641.150,00					
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	78.567.317,00					
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	110.300.000,00					
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					61.641.150,00					
		Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	61.641.150,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Kelurahan Kajen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana					110.300.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	110.300.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Kelurahan Kajen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi					78.567.317,00					
		Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	78.567.317,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Kelurahan Kajen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana					28.657.835,00					
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	28.657.835,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Kelurahan Kajen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah					40.000.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Kelurahan Kajen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
		Bagian Administrasi Pembangunan					**365.370.570,00**					
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					**365.370.570,00**					
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**					**365.370.570,00**					
198.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**33.949.968.543,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.					***35.000.000,00***					
			1.Persentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	35.000.000,00					
			2.Tingkat kematangan organisasi	47.00 Indeks	41.00 Indeks	43.00 Indeks	35.000.000,00					
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					45.000.000,00					Sekretariat Daerah
		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan.					45.000.000,00					Sekretariat Daerah
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000,00					
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00					
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00					
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					25.000.000,00					
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					10.000.000,00					
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.000.000,00					
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
199.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**					**1.437.504.393,00**					
		Meningkatnya sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan					***320.370.570,00***					
			1.Persentase laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang tersusun	100 %	100 %	100 %	320.370.570,00					
			2.Persentase laporan hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan ekonomi, SDA, BUMD dan BLUD yang tersusun	100 %	100 %	100 %	320.370.570,00					
			3.Tingkat kematangan unit kerja pengadaaan barang/jasa (UKPBJ)	9 Angka	9 Angka	9 Angka	320.370.570,00					
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan					320.370.570,00					OPD
		Tersusunnya laporan realisasi fisik seluruh OPD secara tepat waktu dan sesuai ketentuan					320.370.570,00					OPD
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	186.869.200,00					
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	133.501.370,00					
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan					133.501.370,00					
		Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	133.501.370,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan					186.869.200,00					
		Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	186.869.200,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
		Bagian Kesejahteraan Rakyat					**8.940.601.393,00**					
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					**8.940.601.393,00**					
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**					**8.940.601.393,00**					
200.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**					**9.653.590.064,00**					
		Meningkatnya efektivitas koordinasi urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.					***8.940.601.393,00***					
			1.Persentase rancangan produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	100 %	100 %	100 %	8.940.601.393,00					
			2.Persentase laporan penyelenggaraan pemerintah terkait tata pemerintahan yang tersusun sesuai ketentuan	100 %	100 %	100 %	8.940.601.393,00					
			3.Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Bina Mental, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %	8.940.601.393,00					
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					8.940.601.393,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
		Terlaksananya fasilitasi kegiatan keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat sesuai ketentuan					8.940.601.393,00					Masyarakat Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	3.839.687.558,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	383.413.835,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	4.717.500.000,00					
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual					3.839.687.558,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	11 Dokumen	11 Dokumen	10 Dokumen	3.839.687.558,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial					4.717.500.000,00					
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	6 Dokumen	6 Dokumen	4 Dokumen	4.717.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat					383.413.835,00					
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	383.413.835,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
		Bagian Perekonomian					**654.473.900,00**					
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					**654.473.900,00**					
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**					**654.473.900,00**					
201.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**					**1.437.504.393,00**					
		Meningkatnya sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan					***654.473.900,00***					
			1.Persentase laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang tersusun	100 %	100 %	100 %	654.473.900,00					
			2.Persentase laporan hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan ekonomi, SDA, BUMD dan BLUD yang tersusun	100 %	100 %	100 %	654.473.900,00					
			3.Tingkat kematangan unit kerja pengadaaan barang/jasa (UKPBJ)	9 Angka	9 Angka	9 Angka	654.473.900,00					
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian					391.467.500,00					OPD
		Terlaksananya monitoring dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah secara efektif dan sesuai ketentuan					391.467.500,00					OPD
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	38.037.500,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	129.072.500,00					
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	224.357.500,00					
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD					129.072.500,00					
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	129.072.500,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian					224.357.500,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	224.357.500,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	4.01.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)					38.037.500,00					
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	6 Dokumen	6 Dokumen	4 Dokumen	38.037.500,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam					263.006.400,00					OPD
		Terlaksananya monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam daerah secara efektif dan sesuai ketentuan					263.006.400,00					OPD
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	58.806.400,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	204.200.000,00					
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan					204.200.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	204.200.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air					58.806.400,00					
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	58.806.400,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa					**462.659.923,00**					
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					**462.659.923,00**					
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**					**462.659.923,00**					
202.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**					**1.437.504.393,00**					
		Meningkatnya sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan					***462.659.923,00***					
			1.Persentase laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang tersusun	100 %	100 %	100 %	462.659.923,00					
			2.Persentase laporan hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan ekonomi, SDA, BUMD dan BLUD yang tersusun	100 %	100 %	100 %	462.659.923,00					
			3.Tingkat kematangan unit kerja pengadaaan barang/jasa (UKPBJ)	9 Angka	9 Angka	9 Angka	462.659.923,00					
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					462.659.923,00					OPD
		Terselenggaranya proses pengadaan barang dan jasa secara efektif, efisien, dan sesuai ketentuan					462.659.923,00					OPD
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	81.430.000,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	340.161.901,00					
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	95 Orang	95 Orang	95 Orang	41.068.022,00					
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					340.161.901,00					
		Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	340.161.901,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik					81.430.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	81.430.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					41.068.022,00					
		Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	95 Orang	95 Orang	95 Orang	41.068.022,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Nyamok || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan					**1.832.113.501,00**					
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					**1.832.113.501,00**					
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**					**1.832.113.501,00**					
203.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**33.949.968.543,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.					***1.832.113.501,00***					
			1.Persentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	1.832.113.501,00					
			2.Tingkat kematangan organisasi	47.00 Indeks	41.00 Indeks	43.00 Indeks	1.832.113.501,00					
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					1.925.000.000,00					Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Terlaksananya dukungan administrasi keuangan dan operasional bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara tertib dan tepat waktu.					1.925.000.000,00					Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10 Orang/Bulan	10 Orang/Bulan	10 Orang/Bulan	830.000.000,00					
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					830.000.000,00					
		Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10 Orang/Bulan	10 Orang/Bulan	10 Orang/Bulan	830.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan					1.002.113.501,00					Sekretariat Daerah
		Terlaksananya protokol dan komunikasi pimpinan yang mendukung agenda pemerintahan dan keterbukaan informasi.					1.002.113.501,00					Sekretariat Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	114.580.000,00					
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	317.500.000,00					
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	570.033.501,00					
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan					114.580.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	114.580.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan					317.500.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	317.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan					570.033.501,00					
		Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	570.033.501,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
		Sekretariat DPRD					**59.748.106.918,00**					
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					**59.748.106.918,00**					
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**					**59.748.106.918,00**					
204.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**40.274.275.358,00**					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah					***40.054.275.358,00***					
			1.Presentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	40.054.275.358,00					
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.000.000,00					Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan					10.000.000,00					Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00					
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00					
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5.000.000,00					
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5.000.000,00					
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.327.941.000,00					Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, akuntabel, dan tepat waktu					5.327.941.000,00					Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	235.440.000,00					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	5.092.501.000,00					
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					5.092.501.000,00					
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	44 Orang/bulan	5.092.501.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					235.440.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	235.440.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000,00					Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
		Teradministrasikannya penatausahaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang lengkap, mutakhir, dan tertib					10.000.000,00					Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00					
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00					
	4.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					5.000.000,00					
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					5.000.000,00					
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					30.000.000,00					Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
		Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah secara tertib					30.000.000,00					Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	10 Orang	30.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					30.000.000,00					
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	10 Orang	30.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					574.000.000,00					Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
		Terselenggaranya layanan administrasi umum perkantoran yang tertib dan handal					574.000.000,00					Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00					
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100.000.000,00					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	14.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	70.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	150.000.000,00					
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					14.000.000,00					
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2 Paket	14.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					70.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2 Paket	70.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					150.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2 Paket	150.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					100.000.000,00					
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2 Paket	100.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					150.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					80.000.000,00					
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					10.000.000,00					
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					172.000.000,00					Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
		Terpenuhinya kebutuhan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai spesifikasi dan ketentuan					172.000.000,00					Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00					
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	5 Unit	4 Unit	0,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	72.000.000,00					
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00					
	4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0,00					
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	5 Unit	4 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					50.000.000,00					
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	5 Unit	50.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					72.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	5 Unit	72.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					50.000.000,00					
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.055.830.000,00					Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran operasional perangkat daerah					1.055.830.000,00					Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	325.000.000,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	730.830.000,00					
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					325.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	325.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					730.830.000,00					
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	730.830.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					651.746.358,00					Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
		Terpeliharanya BMD penunjang dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai standar layanan					651.746.358,00					Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	136.638.358,00					
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	12 Unit	90.000.000,00					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	12 Unit	12 Unit	339.560.000,00					
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	12 Unit	15.000.000,00					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	12 Unit	70.548.000,00					
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					339.560.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	12 Unit	9 Unit	339.560.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					90.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	17 Unit	90.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					15.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	10 Unit	15.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					70.548.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	20 Unit	70.548.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					136.638.358,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	136.638.358,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					31.492.758.000,00					Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
		Tersalurkannya hak keuangan dan kesejahteraan DPRD tepat waktu dan sesuai ketentuan					31.492.758.000,00					Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	14 Orang/Bulan	14 Orang/Bulan	14 Orang/Bulan	30.267.758.000,00					
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	45 Orang	45 Orang	425.000.000,00					
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	240 Paket	285 Paket	240 Paket	800.000.000,00					
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD					30.267.758.000,00					
		Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	14 Orang/Bulan	14 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	30.267.758.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD					800.000.000,00					
		Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	240 Paket	285 Paket	5 Paket	800.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD					425.000.000,00					
		Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	45 Orang	45 Orang	425.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD					950.000.000,00					Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
		Terlaksananya layanan administrasi DPRD secara tertib dan terdokumentasi					950.000.000,00					Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00					
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00					
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	900.000.000,00					
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD					45.000.000,00					
		Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD					5.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD					900.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	900.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
205.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**					**19.473.831.560,00**					
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD					***19.383.831.560,00***					
			1.Persentase kelancaran pelaksanaan rapat paripurna	100 %	100 %	100 %	19.383.831.560,00					
			2.Persentase rapat penganggaran yang terfasilitasi	100 %	100 %	100 %	19.383.831.560,00					
			3.Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD yang terfasilitasi	100 %	100 %	100 %	19.383.831.560,00					
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD					145.608.000,00					Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
		Tersusunnya Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terfasilitasi dan sesuai ketentuan					145.608.000,00					Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	125.608.000,00					
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00					
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan ProgramPembentukan Peraturan Daerah					5.000.000,00					
		Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan					15.000.000,00					
		Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/KeteranganNaskah Akademik					125.608.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	125.608.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran					131.787.560,00					Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
		Terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran yang efektif, transparan, dan akuntabel					131.787.560,00					Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	45.000.000,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	31.787.560,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00					
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS					31.787.560,00					
		Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	31.787.560,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD					45.000.000,00					
		Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	45.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester					25.000.000,00					
		Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD					30.000.000,00					
		Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan					65.000.000,00					Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
		Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel					65.000.000,00					Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00					
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00					
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran					30.000.000,00					
		Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	12 Dokumen	12 Dokumen	5 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan KeteranganPertanggungjawaban Kepala Daerah					35.000.000,00					
		Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD					2.498.300.000,00					Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
		Terlaksananya dukungan peningkatan kapasitas DPRD yang efektif dan profesional					2.498.300.000,00					Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	2.000.000.000,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00					
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	250.000.000,00					
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00					
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	6 Orang	6 Orang	235.800.000,00					
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD					7.500.000,00					
		Terselenggaranya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD					2.000.000.000,00					
		Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	2.000.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi					235.800.000,00					
		Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	6 Orang	6 Orang	235.800.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD					5.000.000,00					
		Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD					250.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	250.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					2.125.000.000,00					Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
		Terserapnya aspirasi masyarakat secara efektif dan terintegrasi					2.125.000.000,00					Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1.750.000.000,00					
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00					
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	200.000.000,00					
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100.000.000,00					
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah					200.000.000,00					
		Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	24 Laporan	24 Laporan	8 Laporan	200.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD					75.000.000,00					
		Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses					1.750.000.000,00					
		Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1.750.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.02.2.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah					100.000.000,00					
		Terlaksananya Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD					15.000.000,00					Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
		Terselenggaranya pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD secara tertib dan efektif					15.000.000,00					Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00					
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00					
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD					5.000.000,00					
		Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD					10.000.000,00					
		Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	12 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah					5.000.000,00					Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
		Terselenggaranya pembahasan kerja sama daerah yang efektif dan produktif					5.000.000,00					Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00					
	4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah					5.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD					14.488.136.000,00					Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
		Terlaksananya pelaksanaan tugas DPRD yang terfasilitasi secara optimal					14.488.136.000,00					Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	22.200.000,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	74 Dokumen	74 Dokumen	74 Dokumen	14.420.936.000,00					
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00					
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD					14.420.936.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	74 Dokumen	74 Dokumen	85 Dokumen	14.420.936.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD					5.000.000,00					
		Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah					15.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD					25.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus					22.200.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	10 Dokumen	10 Dokumen	4 Dokumen	22.200.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Desa Tanjungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah					**11.114.124.000,00**					
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**					**11.114.124.000,00**					
	5.01	**PERENCANAAN**					**10.363.994.000,00**					
206.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**7.498.148.000,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah					***7.443.632.000,00***					
			1.Presentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	7.443.632.000,00					
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					271.528.000,00					OPD dan Pemerintahan Kabupaten Pekalongan
		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan					271.528.000,00					OPD dan Pemerintahan Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	68.117.000,00					
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	179.061.000,00					
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	24.350.000,00					
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					68.117.000,00					
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	68.117.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					179.061.000,00					
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	179.061.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					24.350.000,00					
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	24.350.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.318.456.000,00					OPD dan Pemerintahan Kabupaten Pekalongan
		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, akuntabel, dan tepat waktu					5.318.456.000,00					OPD dan Pemerintahan Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	164.000.000,00					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	5.154.456.000,00					
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					5.154.456.000,00					
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	5.154.456.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	5.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					164.000.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	164.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					15.264.000,00					OPD dan Pemerintahan Kabupaten Pekalongan
		Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah secara tertib					15.264.000,00					OPD dan Pemerintahan Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	6 Orang	6 Orang	15.264.000,00					
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					15.264.000,00					
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	6 Orang	6 Orang	15.264.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					821.767.000,00					OPD dan Pemerintahan Kabupaten Pekalongan
		Terselenggaranya layanan administrasi umum perkantoran yang tertib dan andal					821.767.000,00					OPD dan Pemerintahan Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	21.488.000,00					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	154.475.000,00					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	122.661.000,00					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	45.430.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	420.682.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	57.031.000,00					
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					45.430.000,00					
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	45.430.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					420.682.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	420.682.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					57.031.000,00					
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	57.031.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					122.661.000,00					
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	122.661.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					21.488.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	21.488.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					154.475.000,00					
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	154.475.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					524.156.000,00					OPD dan Pemerintahan Kabupaten Pekalongan
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran operasional perangkat daerah					524.156.000,00					OPD dan Pemerintahan Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	89.406.000,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	434.750.000,00					
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					89.406.000,00					
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	89.406.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					434.750.000,00					
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	434.750.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					546.977.000,00					OPD dan Pemerintahan Kabupaten Pekalongan
		Terpeliharanya BMD penunjang dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai standar layanan					546.977.000,00					OPD dan Pemerintahan Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Unit	1 Unit	252.591.000,00					
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	17 Unit	17 Unit	54.516.000,00					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	54.516.000,00					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	12 Unit	185.354.000,00					
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					54.516.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	54.516.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					54.516.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	17 Unit	17 Unit	54.516.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					185.354.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	12 Unit	185.354.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					252.591.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Unit	1 Unit	252.591.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
207.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**					**1.799.254.000,00**					
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang terukur dan berorientasi hasil					***1.799.254.000,00***					
			1.Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	1.799.254.000,00					
			2.Persentase capaian Indikator Sasaran Daerah	85 %	65 %	67 %	1.799.254.000,00					
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					1.268.632.000,00					Civitas Akademika (perguruan tinggi dan lembaga riset), masyarakat, dan OPD, Dunia Usaha, Pemerintah Provinsi dan Pusat, BUMD
		Tercapainya keselarasan Program APBD denga RKPD					1.268.632.000,00					Civitas Akademika (perguruan tinggi dan lembaga riset), masyarakat, dan OPD, Dunia Usaha, Pemerintah Provinsi dan Pusat, BUMD
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	283.346.000,00					
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	985.286.000,00					
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota					283.346.000,00					
		Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	283.346.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota					985.286.000,00					
		Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	985.286.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					171.725.000,00					Civitas Akademika (perguruan tinggi dan lembaga riset), masyarakat, dan OPD, Dunia Usaha, Pemerintah Provinsi dan Pusat, BUMD
		Tercapainya target capaian indikator kinerja pembangunan daerah					171.725.000,00					Civitas Akademika (perguruan tinggi dan lembaga riset), masyarakat, dan OPD, Dunia Usaha, Pemerintah Provinsi dan Pusat, BUMD
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	171.725.000,00					
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah					171.725.000,00					
		Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	171.725.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					358.897.000,00					Civitas Akademika (perguruan tinggi dan lembaga riset), masyarakat, dan OPD, Dunia Usaha, Pemerintah Provinsi dan Pusat, BUMD
		Meningkatnya Indikator Kinerja Tujuan dalam RPJMD yang tercapai sesuai target (%), Meningkatnya Indikator Kinerja Sasaran dalam RPJMD yang tercapai sesuai target (%), Meningkatnya Indikator Kinerja Program dalam RPJMD yang tercapai sesuai target (%)					358.897.000,00					Civitas Akademika (perguruan tinggi dan lembaga riset), masyarakat, dan OPD, Dunia Usaha, Pemerintah Provinsi dan Pusat, BUMD
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8 Laporan	8 Laporan	9 Laporan	358.897.000,00					
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota					358.897.000,00					
		Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8 Laporan	8 Laporan	9 Laporan	358.897.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
208.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**					**1.066.592.000,00**					
		Meningkatnya sinergi antar-perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah					***1.066.592.000,00***					
			1.Persentase keselarasan RKPD dan dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	100 %	100 %	1.066.592.000,00					
			2.Persentase ketercapaian indikator kinerja program pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 %	100 %	100 %	1.066.592.000,00					
			3.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	1.066.592.000,00					
			4.Persentase ketercapaian indikator kinerja program pada bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 %	100 %	100 %	1.066.592.000,00					
			5.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	1.066.592.000,00					
			6.Persentase ketercapaian indikator kinerja program pada bidang perekonomian dan SDA	100 %	100 %	100 %	1.066.592.000,00					
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					567.124.000,00					Civitas Akademika (perguruan tinggi dan lembaga riset), masyarakat, dan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pusat,
		Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Sesuai peraturan berlaku					567.124.000,00					Civitas Akademika (perguruan tinggi dan lembaga riset), masyarakat, dan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pusat,
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	269.352.000,00					
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	108.266.000,00					
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	189.506.000,00					
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					189.506.000,00					
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	189.506.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mengintegrasikan pendekatan gender, penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan anak dan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					269.352.000,00					
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	269.352.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					108.266.000,00					
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	108.266.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					232.146.000,00					Civitas Akademika (perguruan tinggi dan lembaga riset), masyarakat, dan OPD, Dunia Usaha, Pemerintah Provinsi dan Pusat, BUMD
		Terlaksananya kegiatan bidang ekonomi dan sumberdaya alam					232.146.000,00					Civitas Akademika (perguruan tinggi dan lembaga riset), masyarakat, dan OPD, Dunia Usaha, Pemerintah Provinsi dan Pusat, BUMD
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	117.436.000,00					
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	114.710.000,00					
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian					117.436.000,00					
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	117.436.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Revitalisasi dan pengembangan kawasan sentra produksi serta kawasan ekonomi berbasis komunitas.	
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA					114.710.000,00					
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	114.710.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					267.322.000,00					Civitas Akademika (perguruan tinggi dan lembaga riset), masyarakat, dan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pusat
		Terlaksananya kegiatan bidang infrastruktur dan kewilayahan					267.322.000,00					Civitas Akademika (perguruan tinggi dan lembaga riset), masyarakat, dan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pusat
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	127.658.000,00					
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					127.658.000,00					
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	127.658.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
		Terlaksananya kegiatan bidang infrastruktur dan kewilayahan					267.322.000,00					Civitas Akademika (perguruan tinggi dan lembaga riset), masyarakat, dan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pusat
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	-	-	-	139.664.000,00					
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan					139.664.000,00					
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	-	-	1 Laporan	139.664.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**					**750.130.000,00**					
209.	**5.05.03**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**					**750.130.000,00**					
		Meningkatnya kapasitas riset dan inovasi daerah dalam mendorong tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan yang adaptif dan solutif					***750.130.000,00***					
			1.Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	750.130.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan					471.477.000,00					Civitas Akademika (perguruan tinggi dan lembaga riset), masyarakat, dan OPD, Dunia Usaha, Pemerintah Provinsi dan Pusat, BUMD
		Terlaksananya Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan					471.477.000,00					Civitas Akademika (perguruan tinggi dan lembaga riset), masyarakat, dan OPD, Dunia Usaha, Pemerintah Provinsi dan Pusat, BUMD
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	233.081.000,00					
			Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	1 Naskah	1 Naskah	1 Naskah	238.396.000,00					
	5.05.03.2.01.0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset					238.396.000,00					
		Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	1 Naskah	1 Naskah	1 Naskah	238.396.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	5.05.03.2.01.0003	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan					233.081.000,00					
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	233.081.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi					278.653.000,00					Civitas Akademika (perguruan tinggi dan lembaga riset), masyarakat, dan OPD, Dunia Usaha, Pemerintah Provinsi dan Pusat, BUMD
		Terlaksananya kegiatan pada kegiatan invensi dan inovasi					278.653.000,00					Civitas Akademika (perguruan tinggi dan lembaga riset), masyarakat, dan OPD, Dunia Usaha, Pemerintah Provinsi dan Pusat, BUMD
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	132.270.000,00					
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	146.383.000,00					
	5.05.03.2.02.0004	Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah					146.383.000,00					
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	146.383.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	5.05.03.2.02.0010	Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat					132.270.000,00					
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	132.270.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
		Badan Pengelolaan Keuangan Daerah					**399.363.962.000,00**					
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**					**399.363.962.000,00**					
	5.02	**KEUANGAN**					**399.363.962.000,00**					
210.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**21.776.253.000,00**					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah					***21.711.253.000,00***					
			1.Persentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	21.711.253.000,00					
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					20.000.000,00					Perencanaan dan Keuangan
		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan.					20.000.000,00					Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00					
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00					
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00					
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					10.000.000,00					
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					5.000.000,00					
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5.000.000,00					
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					18.893.553.000,00					Administrasi Keuangan
		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, akuntabel, dan tepat waktu.					18.893.553.000,00					Administrasi Keuangan
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	410.400.000,00					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 Orang/bulan	77 Orang/bulan	77 Orang/bulan	18.483.153.000,00					
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					18.483.153.000,00					
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 Orang/bulan	77 Orang/bulan	77 Orang/bulan	18.483.153.000,00	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					410.400.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	410.400.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					60.000.000,00					Administrasi Kepegawaian
		Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah secara tertib.					60.000.000,00					Administrasi Kepegawaian
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00					
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	5 Orang	50.000.000,00					
	5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					10.000.000,00					
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					50.000.000,00					
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					546.800.000,00					Administrasi Umum
		Terselenggaranya layanan administrasi umum perkantoran yang tertib dan andal.					546.800.000,00					Administrasi Umum
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00					
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	86.800.000,00					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	130.000.000,00					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	75.000.000,00					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	90.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00					
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					15.000.000,00					
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					90.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	90.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					50.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					75.000.000,00					
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					86.800.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	86.800.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					130.000.000,00					
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	130.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					100.000.000,00					
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					490.000.000,00					Pengadaan Barang Milik Daerah
		Terpenuhinya kebutuhan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai spesifikasi dan ketentuan.					490.000.000,00					Pengadaan Barang Milik Daerah
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0,00					
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	0,00					
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	15 Unit	490.000.000,00					
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0,00					
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	5 Unit	0,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0,00					
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					490.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	36 Unit	490.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.220.900.000,00					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran operasional perangkat daerah.					1.220.900.000,00					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	600.000.000,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	620.900.000,00					
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					600.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	600.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					620.900.000,00					
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	620.900.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					545.000.000,00					Pemeliharaan Barang Milik Daerah
		Terpeliharanya BMD penunjang dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai standar layanan.					545.000.000,00					Pemeliharaan Barang Milik Daerah
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	175.000.000,00					
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit	55 Unit	55 Unit	245.000.000,00					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	20 Unit	125.000.000,00					
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					245.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit	55 Unit	55 Unit	245.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					125.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	40 Unit	125.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					175.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	175.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
211.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**					**371.769.479.000,00**					
		Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan tepat waktu					***371.769.479.000,00***					
			-1.Rasio Belanja Urusan pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditures)	65 %	65 %	65 %	371.769.479.000,00					
			2.Budget Excecution : Deviasi Realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Sumber : IKK)	1.00 Nilai	1.00 Nilai	1.00 Nilai	371.769.479.000,00					
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					1.845.125.000,00					Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
		Tersusunnya Perda APBD secara tepat waktu					1.845.125.000,00					Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	250.000.000,00					
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	205.750.000,00					
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	175.750.000,00					
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	630.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	583.625.000,00					
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS					205.750.000,00					
		Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	205.750.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS					175.750.000,00					
		Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	175.750.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					630.000.000,00					
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	630.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					583.625.000,00					
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	583.625.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah					250.000.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					568.020.000,00					Pengelolaan Perbendaraan Daerah
		Terselenggaranya pelayanan perbendaharaan yang tepat waktu					568.020.000,00					Pengelolaan Perbendaraan Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	55.500.000,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	45.770.000,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2000 Dokumen	2000 Dokumen	2000 Dokumen	190.000.000,00					
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	176.750.000,00					
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD					100.000.000,00					
		Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					55.500.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	55.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)					176.750.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	176.750.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas					45.770.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	45.770.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait					190.000.000,00					
		Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2000 Dokumen	2000 Dokumen	2000 Dokumen	190.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					976.620.000,00					Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
		Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Perangkat Daerah					976.620.000,00					Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	278.400.000,00					
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	190.700.000,00					
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	110 Orang	110 Orang	110 Orang	107.020.000,00					
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	400.500.000,00					
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran					190.700.000,00					
		Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	190.700.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah					278.400.000,00					
		Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	278.400.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					400.500.000,00					
		Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	6 Dokumen	400.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan danPertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota					107.020.000,00					
		Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	110 Orang	110 Orang	109 Orang	107.020.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					368.119.714.000,00					Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Meningkatnya kualitas pengelolaan dana Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah, Dana DD/ADD, dana darurat dan dana bagi hasil					368.119.714.000,00					Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.698.750.000,00					
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	272 Laporan	272 Laporan	272 Laporan	341.770.275.000,00					
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	272 Laporan	272 Laporan	272 Laporan	19.650.689.000,00					
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000.000,00					
	5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah					1.698.750.000,00					
		Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.698.750.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan					341.770.275.000,00					
		Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	272 Laporan	272 Laporan	12 Laporan	341.770.275.000,00	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Desa DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak					5.000.000.000,00					
		Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota					19.650.689.000,00					
		Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	272 Laporan	272 Laporan	272 Laporan	19.650.689.000,00	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah					260.000.000,00					Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah
		Teperliharanya sistem pengelolaan keuangan					260.000.000,00					Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	260.000.000,00					
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah					260.000.000,00					
		Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	260.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
212.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**					**2.402.977.000,00**					
		Meningkatnya tertib administrasi dan optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah secara legal dan efisien					***2.402.977.000,00***					
			1.Persentase Aset yang dilakukan pengamanan fisik	35.00 %	25.00 %	27.50 %	2.402.977.000,00					
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah					2.402.977.000,00					Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Meningkatnya pengamanan fisik barang milik daerah					2.402.977.000,00					Pengelolaan Barang Milik Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	116.500.000,00					
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	50.855.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	117.365.000,00					
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1.422.625.000,00					
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	110.150.000,00					
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	76.650.000,00					
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	20.800.000,00					
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	141.482.000,00					
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	110 Orang	110 Orang	110 Orang	68.200.000,00					
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	112.430.000,00					
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	165.920.000,00					
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga					165.920.000,00					
		Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	165.920.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah					112.430.000,00					
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	112.430.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah					141.482.000,00					
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	141.482.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah					117.365.000,00					
		Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	117.365.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah					1.422.625.000,00					
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	1.422.625.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah					76.650.000,00					
		Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	76.650.000,00	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah					110.150.000,00					
		Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	110.150.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah					116.500.000,00					
		Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	3 Dokumen	116.500.000,00	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					20.800.000,00					
		Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	20.800.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					50.855.000,00					
		Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	4 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	50.855.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					68.200.000,00					
		Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	110 Orang	110 Orang	180 Orang	68.200.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
213.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**					**3.415.253.000,00**					
		Meningkatnya kapasitas dan optimalisasi pendapatan daerah yang mendukung kemandirian fiskal.					***3.415.253.000,00***					
			1.Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	0.90 %	0.90 %	0.90 %	3.415.253.000,00					
			2.Rasio PAD	17.00:17.00 %	17.00:17.00 %	17.00:17.00 %	3.415.253.000,00					
			3.Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0.83 (%)	0.71 (%)	0.74 (%)	3.415.253.000,00					
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.415.253.000,00					Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Meningkatnya capaian realisasi pajak dan retribusi daerah					3.415.253.000,00					Pengelolaan Pendapatan Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	569.500.000,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	219.788.000,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	800.850.000,00					
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	7000 Laporan	7000 Laporan	7000 Laporan	439.750.000,00					
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	350.590.000,00					
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	285 Laporan	285 Laporan	285 Laporan	721.775.000,00					
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	45.000.000,00					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit	2 Unit	2 Unit	268.000.000,00					
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah					569.500.000,00					
		Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	569.500.000,00	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					721.775.000,00					
		Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	285 Laporan	285 Laporan	285 Laporan	721.775.000,00	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah					268.000.000,00					
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit	2 Unit	2 Unit	268.000.000,00	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah					439.750.000,00					
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	7000 Laporan	7000 Laporan	12000 Laporan	439.750.000,00	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah					350.590.000,00					
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	350.590.000,00	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah					219.788.000,00					
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	219.788.000,00	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah					800.850.000,00					
		Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	800.850.000,00	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah					45.000.000,00					
		Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	45.000.000,00	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					**6.861.353.250,00**					
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**					**6.861.353.250,00**					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**					**6.603.788.250,00**					
214.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**5.629.590.450,00**					
			Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	100 %	5.564.590.450,00					
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					15.000.000,00					Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah di BKPSDM Kabupaten Pekalongan
		Terlaksananya penyusunan dokumen dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu					15.000.000,00					Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah di BKPSDM Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	15.000.000,00					
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					15.000.000,00					
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.010.065.000,00					Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah di BKPSDM Kabupaten Pekalongan
		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah					5.010.065.000,00					Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah di BKPSDM Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	73.400.000,00					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	46 Orang/bulan	46 Orang/bulan	4.936.665.000,00					
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					4.936.665.000,00					
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	46 Orang/bulan	48 Orang/bulan	4.936.665.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					73.400.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	73.400.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					10.000.000,00					Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah di BKPSDM Kabupaten Pekalongan
		Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi					10.000.000,00					Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah di BKPSDM Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	2 Orang	2 Orang	10.000.000,00					
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					10.000.000,00					
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	2 Orang	2 Orang	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					204.437.200,00					Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah di BKPSDM Kabupaten Pekalongan
		Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah					204.437.200,00					Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah di BKPSDM Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	30.000.000,00					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	88.138.200,00					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	20.000.000,00					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	5.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	46.299.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	15.000.000,00					
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					5.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	2 Paket	5.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					46.299.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	46.299.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					15.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	15.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					20.000.000,00					
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					30.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	30.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					88.138.200,00					
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	88.138.200,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					126.108.250,00					Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah di BKPSDM Kabupaten Pekalongan
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					126.108.250,00					Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah di BKPSDM Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	8 Unit	0 Unit	126.108.250,00					
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					126.108.250,00					
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	8 Unit	20 Unit	126.108.250,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					138.980.000,00					Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah di BKPSDM Kabupaten Pekalongan
		Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					138.980.000,00					Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah di BKPSDM Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	65.000.000,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	73.980.000,00					
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					65.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	65.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					73.980.000,00					
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	73.980.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					125.000.000,00					Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah di BKPSDM Kabupaten Pekalongan
		Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah					125.000.000,00					Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah di BKPSDM Kabupaten Pekalongan
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	40.000.000,00					
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	35.000.000,00					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	35.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	15.000.000,00					
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					35.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					35.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	35.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					15.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	20 Unit	15.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					40.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
215.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**					**974.197.800,00**					
		Meningkatnya profesionalisme, kompetensi, dan kinerja aparatur sipil negara (ASN) dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah					***974.197.800,00***					
			1.Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	62.28 %	59.58 %	59.78 %	974.197.800,00					
			2.Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	19.37 %	18.37 %	18.62 %	974.197.800,00					
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					404.286.600,00					Meningkatnya kualitas manajemen ASN dan Pelayanan Kepegawaian berbasis teknologi informasi
		Terlaksananya penyediaan data DPCP dan formasi yang uptodate					404.286.600,00					Meningkatnya kualitas manajemen ASN dan Pelayanan Kepegawaian berbasis teknologi informasi
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	25.000.000,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	86.200.000,00					
			Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	500 Dokumen	500 Dokumen	500 Dokumen	30.000.000,00					
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	195.792.000,00					
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	67.294.600,00					
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					195.792.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	195.792.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.03.02.2.01.0005	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN					30.000.000,00					
		Dirumuskannya Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	500 Dokumen	500 Dokumen	500 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan AdministrasiPemberhentian					25.000.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian					86.200.000,00					
		Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	86.200.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian					67.294.600,00					
		Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	67.294.600,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN					194.215.500,00					Meningkatnya kualitas manajemen ASN dan Pelayanan Kepegawaian berbasis teknologi informasi
		Terselenggaranya pelayanan mutasi aparatur					194.215.500,00					Meningkatnya kualitas manajemen ASN dan Pelayanan Kepegawaian berbasis teknologi informasi
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	200 Dokumen	200 Dokumen	200 Dokumen	55.850.000,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	400 Dokumen	400 Dokumen	400 Dokumen	81.000.000,00					
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1200 Dokumen	1200 Dokumen	1200 Dokumen	57.365.500,00					
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN					55.850.000,00					
		Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	200 Dokumen	200 Dokumen	200 Dokumen	55.850.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					57.365.500,00					
		Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1200 Dokumen	1200 Dokumen	1200 Dokumen	57.365.500,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN					81.000.000,00					
		Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	400 Dokumen	400 Dokumen	400 Dokumen	81.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN					283.117.300,00					Meningkatnya kualitas manajemen ASN dan Pelayanan Kepegawaian berbasis teknologi informasi
		Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN					283.117.300,00					Meningkatnya kualitas manajemen ASN dan Pelayanan Kepegawaian berbasis teknologi informasi
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	100 Orang	150 Orang	150 Orang	53.050.000,00					
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	230.067.300,00					
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN					53.050.000,00					
		Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	100 Orang	150 Orang	150 Orang	53.050.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center					230.067.300,00					
		Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	230.067.300,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					92.578.400,00					Meningkatnya kualitas manajemen ASN dan Pelayanan Kepegawaian berbasis teknologi informasi
		Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur					92.578.400,00					Meningkatnya kualitas manajemen ASN dan Pelayanan Kepegawaian berbasis teknologi informasi
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	15 Orang	15 Orang	15 Orang	43.994.600,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8500 Dokumen	8500 Dokumen	8500 Dokumen	48.583.800,00					
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					48.583.800,00					
		Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8500 Dokumen	8500 Dokumen	8500 Dokumen	48.583.800,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN					43.994.600,00					
		Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	15 Orang	15 Orang	15 Orang	43.994.600,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**					**257.565.000,00**					
216.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**					**257.565.000,00**					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, produktif, dan adaptif terhadap perubahan					***257.565.000,00***					
			1.Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	57.47 %	56.87 %	57.02 %	257.565.000,00					
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					257.565.000,00					Meningkatnya Kompetensi ASN
		Terlaksananya pendidikan dan pelatihan manajerial dan fungsional ASN					257.565.000,00					Meningkatnya Kompetensi ASN
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	257.565.000,00					
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan					257.565.000,00					
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	257.565.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
		Inspektorat					**10.180.773.500,00**					
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**					**10.180.773.500,00**					
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**					**10.180.773.500,00**					
217.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**8.734.625.500,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah					***8.732.825.500,00***					
			1.Persentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	8.732.825.500,00					
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4.950.000,00					Inspektorat Daerah
		Terlaksanaya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4.950.000,00					Inspektorat Daerah
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	4.950.000,00					
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4.950.000,00					
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	4.950.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					7.692.924.000,00					Inspektorat Daerah
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					7.692.924.000,00					Inspektorat Daerah
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	82.365.000,00					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	7.610.559.000,00					
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					7.610.559.000,00					
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	7.610.559.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	6.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					82.365.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	82.365.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					151.935.000,00					Inspektorat Daerah
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					151.935.000,00					Inspektorat Daerah
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	62 Orang	62 Orang	62 Orang	151.935.000,00					
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					151.935.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	62 Orang	62 Orang	3 Orang	151.935.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					404.347.300,00					Inspektorat Daerah
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah					404.347.300,00					Inspektorat Daerah
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	19.972.500,00					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	253.930.000,00					
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	43.397.500,00					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	35.494.800,00					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	13.440.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	38.112.500,00					
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					13.440.000,00					
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1 Paket	13.440.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					38.112.500,00					
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1 Paket	38.112.500,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					43.397.500,00					
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1 Paket	43.397.500,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					35.494.800,00					
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1 Paket	35.494.800,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					19.972.500,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	19.972.500,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					253.930.000,00					
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	253.930.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					49.034.400,00					Inspektorat Daerah
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					49.034.400,00					Inspektorat Daerah
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	39 Unit	20 Unit	49.034.400,00					
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					49.034.400,00					
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	39 Unit	5 Unit	49.034.400,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					157.040.000,00					Inspektorat Daerah
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					157.040.000,00					Inspektorat Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	85.040.000,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	72.000.000,00					
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					85.040.000,00					
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	85.040.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					72.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	72.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					272.594.800,00					Inspektorat Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					272.594.800,00					Inspektorat Daerah
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	1 Unit	0 Unit	88.569.600,00					
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	37 Unit	37 Unit	92.878.200,00					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	68.777.000,00					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	33 Unit	33 Unit	22.370.000,00					
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					68.777.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	68.777.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					92.878.200,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	37 Unit	36 Unit	92.878.200,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					22.370.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	33 Unit	33 Unit	22.370.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					88.569.600,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	1 Unit	1 Unit	88.569.600,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
			-	-	-	-	1.800.000,00					
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					1.800.000,00					Inspektorat Daerah
		-					1.800.000,00					Inspektorat Daerah
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	1.800.000,00					
	6.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					1.800.000,00					
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	1 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
218.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**					**1.201.468.000,00**					
		Meningkatnya efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel dan bebas dari penyimpangan.					***1.201.468.000,00***					
			1.Persentase Rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti	92.50 %	92.10 %	92.20 %	221.720.000,00					
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal					979.748.000,00					Perangkat Daerah, BUMD, Pemerintah Desa/Kelurahan
		-					979.748.000,00					Perangkat Daerah, BUMD, Pemerintah Desa/Kelurahan
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	26 Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	275.808.000,00					
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	35 Laporan	28 Laporan	28 Laporan	179.790.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	64.640.000,00					
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	188.410.000,00					
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	156.920.000,00					
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	114.180.000,00					
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah					188.410.000,00					
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	15 Laporan	15 Laporan	33 Laporan	188.410.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah					64.640.000,00					
		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	64.640.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja					114.180.000,00					
		Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	15 Laporan	15 Laporan	20 Laporan	114.180.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan					156.920.000,00					
		Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	15 Laporan	15 Laporan	22 Laporan	156.920.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa					179.790.000,00					
		Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	35 Laporan	28 Laporan	39 Laporan	179.790.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP					275.808.000,00					
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	26 Dokumen	26 Dokumen	21 Dokumen	275.808.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					221.720.000,00					Perangkat Daerah, BUMD, Pemerintah Desa/Kelurahan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					221.720.000,00					Perangkat Daerah, BUMD, Pemerintah Desa/Kelurahan
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	50 Laporan	40 Laporan	40 Laporan	209.300.000,00					
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	12.420.000,00					
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian KerugianNegara/Daerah					12.420.000,00					
		Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	12.420.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					209.300.000,00					
		Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	50 Laporan	40 Laporan	52 Laporan	209.300.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
219.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**					**244.680.000,00**					
		Tersusunnya kebijakan internal serta meningkatnya kapasitas perangkat daerah melalui pendampingan dan asistensi yang berkelanjutan.					***244.680.000,00***					
			1.Persentase OPD yang mendapat nilai SAKIP dengan predikat minimal BB	88.89 %	68.89 %	75.56 %	244.680.000,00					
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					8.010.000,00					Perangkat Daerah, BUMD, Pemerintah Desa/Kelurahan
		Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					8.010.000,00					Perangkat Daerah, BUMD, Pemerintah Desa/Kelurahan
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	0,00					
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	8.010.000,00					
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan					8.010.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	8.010.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan					0,00					
		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi					236.670.000,00					Perangkat Daerah, BUMD, Pemerintah Desa/Kelurahan
		Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi					236.670.000,00					Perangkat Daerah, BUMD, Pemerintah Desa/Kelurahan
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	20 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	65.840.000,00					
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 perangkat daerah	8 perangkat daerah	8 perangkat daerah	49.645.000,00					
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	20 perangkat daerah	18 perangkat daerah	18 perangkat daerah	59.790.000,00					
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	16 perangkat daerah	15 perangkat daerah	15 perangkat daerah	61.395.000,00					
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah					61.395.000,00					
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	16 perangkat daerah	15 perangkat daerah	12 perangkat daerah	61.395.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi					59.790.000,00					
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	20 perangkat daerah	18 perangkat daerah	15 perangkat daerah	59.790.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi					65.840.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	20 Kegiatan	20 Kegiatan	16 Kegiatan	65.840.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas					49.645.000,00					
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 perangkat daerah	8 perangkat daerah	4 perangkat daerah	49.645.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
		Kecamatan Kajen					**3.468.151.000,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**3.468.151.000,00**					
	7.01	**KECAMATAN**					**3.468.151.000,00**					
220.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**3.158.401.000,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah					***3.139.401.000,00***					
			1.Presentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	3.139.401.000,00					
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5.000.000,00					OPD Kecamatan Kajen
		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan					5.000.000,00					OPD Kecamatan Kajen
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00					
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5.000.000,00					
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.749.385.000,00					OPD Kecamatan Kajen

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, akuntabel, dan tepat waktu					2.749.385.000,00					OPD Kecamatan Kajen
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	59.310.000,00					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2.690.075.000,00					
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.690.075.000,00					
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2.690.075.000,00	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					59.310.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	59.310.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					91.785.000,00					OPD Kecamatan Kajen
		Terselenggaranya layanan administrasi umum perkantoran yang tertib dan andal					91.785.000,00					OPD Kecamatan Kajen
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00					
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	30.785.000,00					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	15.000.000,00					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	9.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	25.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	8.000.000,00					
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					25.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	25.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					8.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	8.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					9.000.000,00					
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	9.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					30.785.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	30.785.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					15.000.000,00					
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	15.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					4.000.000,00					
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					36.000.000,00					OPD Kecamatan Kajen
		Terpenuhinya kebutuhan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai spesifikasi dan ketentuan					36.000.000,00					OPD Kecamatan Kajen
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	20 Unit	0 Unit	16.000.000,00					
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	0 Unit	20.000.000,00					
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					16.000.000,00					
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	20 Unit	6 Unit	16.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					20.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	8 Unit	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					192.727.000,00					OPD Kecamatan Kajen
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran operasional perangkat daerah					192.727.000,00					OPD Kecamatan Kajen
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	74.577.000,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	118.150.000,00					
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					74.577.000,00					
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	74.577.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					118.150.000,00					
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	118.150.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					83.504.000,00					OPD Kecamatan Kajen
		Terpeliharanya BMD penunjang dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai standar layanan					83.504.000,00					OPD Kecamatan Kajen
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	1 Unit	0 Unit	15.000.000,00					
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	1.450.000,00					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	55.000.000,00					
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	4 Unit	0 Unit	4.000.000,00					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	15 Unit	8 Unit	8.054.000,00					
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					55.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	55.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					1.450.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	1.450.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					4.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	4 Unit	9 Unit	4.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					8.054.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	15 Unit	14 Unit	8.054.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					15.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
221.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**1.000.000,00**					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel					***1.000.000,00***					
			1.Persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100 %	100 %	100 %	1.000.000,00					
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					1.000.000,00					Masyarakat di Kecamatan Kajen
		Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat secara tertib, akuntabel					1.000.000,00					Masyarakat di Kecamatan Kajen
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	0 Dokumen	22 Dokumen	0 Dokumen	1.000.000,00					
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					1.000.000,00					
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	0 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
222.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**641.330.000,00**					
		Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal					***76.200.000,00***					
			1.Persentase lembaga masyarakat aktif	100 %	100 %	100 %	76.200.000,00					
			2.Cakupan Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	100 %	76.200.000,00					
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					76.200.000,00					Desa di Wilayah Kecamatan Kajen
		Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa antar pemangku kepentingan dengan rencana dan laporan yang terdokumentasi					76.200.000,00					Desa di Wilayah Kecamatan Kajen
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	60.000.000,00					
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	16.200.000,00					
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					16.200.000,00					
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	16.200.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					60.000.000,00					
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	60.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mengintegrasikan pendekatan gender, penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan anak dan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					0,00					Lembaga Kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Kajen
		Terfasilitasinya penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan sehingga aktif dan berdaya guna					0,00					Lembaga Kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Kajen
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	0,00					
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					0,00					
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
223.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**38.100.000,00**					
		Meningkatnya kondisi kententraman dan ketertiban umum					***38.100.000,00***					
			1.Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas di tingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	38.100.000,00					
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					38.100.000,00					Polri, TNI dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan Kajen

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terselenggaranya koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan secara berkesinambungan					38.100.000,00					Polri, TNI dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan Kajen
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	38.100.000,00					
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					38.100.000,00					
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	38.100.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
224.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**98.450.000,00**					
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi					***98.450.000,00***					
			1.Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan	100 %	100 %	100 %	98.450.000,00					
			2.Persentase pelaksanaan urusan Kepala Daerah yang ditugaskan ditingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	98.450.000,00					
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					98.450.000,00					Masyarakat di Kecamatan Kajen
		Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah lengkap dengan dokumen pelaksanaan dan laporan					98.450.000,00					Masyarakat di Kecamatan Kajen
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 Orang	150 Orang	150 Orang	98.450.000,00					
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					98.450.000,00					
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 Orang	150 Orang	150 Orang	98.450.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
225.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**96.000.000,00**					
		Meningkatanya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipasif, dan akuntabel					***81.000.000,00***					
			1.Persentase dokumen/laporan pembinaan dan pengawasan desa yang disusun sesuai standar pelaporan	100 %	100 %	100 %	81.000.000,00					
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					96.000.000,00					Desa di wilayah Kecamatan Kajen
		Terfasilitasinya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa melalui rekomendasi dan koordinasi yang tercatat dan ditindaklanjuti					96.000.000,00					Desa di wilayah Kecamatan Kajen
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00					
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00					
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	15.000.000,00					
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	16.000.000,00					
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					15.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					30.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa					15.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					20.000.000,00					
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					16.000.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	16.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
		Kelurahan Kajen					**565.130.000,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**565.130.000,00**					
	7.01	**KECAMATAN**					**565.130.000,00**					
226.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**641.330.000,00**					
		Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal					***565.130.000,00***					
			1.Persentase lembaga masyarakat aktif	100 %	100 %	100 %	565.130.000,00					
			2.Cakupan Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	100 %	565.130.000,00					
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					565.130.000,00					Kelurahan Kajen
		Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan kelurahan sesuai rencana kerja dan kebutuhan masyarakat					565.130.000,00					Kelurahan Kajen
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	317.680.000,00					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2 Unit	1 Unit	247.450.000,00					
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					247.450.000,00					
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2 Unit	1 Unit	247.450.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Kelurahan Kajen || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					317.680.000,00					
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	317.680.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kajen || Kelurahan Kajen || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
		Kecamatan Sragi					**3.163.389.730,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**3.163.389.730,00**					
	7.01	**KECAMATAN**					**3.163.389.730,00**					
227.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**2.985.292.000,00**					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah					***2.985.292.000,00***					
			1.Presentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	2.985.292.000,00					
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.702.252.000,00					Kecamatan Sragi
		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, akuntabel, dan tepat waktu					2.702.252.000,00					Kecamatan Sragi
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	56.400.000,00					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	2.645.852.000,00					
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.645.852.000,00					
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	28 Orang/bulan	30 Orang/bulan	2.645.852.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					56.400.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	56.400.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					76.347.100,00					Kecamatan Sragi
		Terselenggaranya layanan administrasi umum perkantoran yang tertib dan andal					76.347.100,00					Kecamatan Sragi
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00					
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	13.015.200,00					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	28.090.000,00					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	2 Paket	5.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	19.599.800,00					
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	8.642.100,00					
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					19.599.800,00					
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	4 Paket	19.599.800,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					8.642.100,00					
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	8.642.100,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					5.000.000,00					
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					13.015.200,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	13.015.200,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					28.090.000,00					
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	28.090.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					2.000.000,00					
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					12.500.000,00					Kecamatan Sragi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terpenuhinya kebutuhan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai spesifikasi dan ketentuan					12.500.000,00					Kecamatan Sragi
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0,00					
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1 Unit	2 Unit	12.500.000,00					
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					12.500.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1 Unit	1 Unit	12.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00					
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					146.569.500,00					Kecamatan Sragi
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran operasional perangkat daerah					146.569.500,00					Kecamatan Sragi
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	22.480.000,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	124.089.500,00					
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					22.480.000,00					
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	22.480.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					124.089.500,00					
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	124.089.500,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					47.623.400,00					Kecamatan Sragi
		Terpeliharanya BMD penunjang dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai standar layanan					47.623.400,00					Kecamatan Sragi
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	6.232.400,00					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	5 Unit	6 Unit	33.721.000,00					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	6 Unit	6 Unit	7.670.000,00					
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					33.721.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	5 Unit	5 Unit	33.721.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					7.670.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	6 Unit	4 Unit	7.670.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					6.232.400,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	6.232.400,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	
228.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**6.908.600,00**					
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel					***6.908.600,00***					
			1.Persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100 %	100 %	100 %	6.908.600,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					6.908.600,00					Kecamatan Sragi
		Terlaksananya pelayanan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah di kecamatan sesuai ketentuan dan SOP					6.908.600,00					Kecamatan Sragi
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	6.908.600,00					
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					6.908.600,00					
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	6.908.600,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	
229.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**645.905.230,00**					
		Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal					***68.780.230,00***					
			1.Persentase lembaga masyarakat aktif	100 %	100 %	100 %	68.780.230,00					
			2.Cakupan Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	100 %	68.780.230,00					
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					68.780.230,00					Kecamatan Sragi
		Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa antar pemangku kepentingan dengan rencana dan laporan yang terdokumentasi					68.780.230,00					Kecamatan Sragi
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	55.000.000,00					
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	13.780.230,00					
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					13.780.230,00					
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	13.780.230,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					55.000.000,00					
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17 Laporan	17 Laporan	2 Laporan	55.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	
230.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**25.040.000,00**					
		Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum					***25.040.000,00***					
			1.Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas di tingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	25.040.000,00					
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					25.040.000,00					Kecamatan Sragi
		Terselenggaranya koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan secara berkesinambungan					25.040.000,00					Kecamatan Sragi
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	25.040.000,00					
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					25.040.000,00					
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	25.040.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	
231.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**46.578.900,00**					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi					***46.578.900,00***					
			1.Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan	100 %	100 %	100 %	46.578.900,00					
			2.Persentase pelaksanaan urusan Kepala Daerah yang ditugaskan ditingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	46.578.900,00					
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					46.578.900,00					Kecamatan Sragi
		Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah lengkap dengan dokumen pelaksanaan dan laporan					46.578.900,00					Kecamatan Sragi
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	80 Orang	80 Orang	46.578.900,00					
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					46.578.900,00					
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	80 Orang	100 Orang	46.578.900,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	
232.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**30.790.000,00**					
		Meningkatnya kapasitas tata Kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel					***30.790.000,00***					
			1.Persentase dokumen/laporan pembinaan dan pengawasan desa yang disusun sesuai standar pelaporan	100 %	100 %	100 %	30.790.000,00					
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					30.790.000,00					Kecamatan Sragi
		Terfasilitasinya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa melalui rekomendasi dan koordinasi yang tercatat dan ditindaklanjuti					30.790.000,00					Kecamatan Sragi
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	14.620.000,00					
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	16.170.000,00					
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					16.170.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	16.170.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					14.620.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	14.620.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	
		Kelurahan Sragi					**577.125.000,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**577.125.000,00**					
	7.01	**KECAMATAN**					**577.125.000,00**					
233.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**645.905.230,00**					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal					***577.125.000,00***					
			1.Persentase lembaga masyarakat aktif	100 %	100 %	100 %	577.125.000,00					
			2.Cakupan Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	100 %	577.125.000,00					
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					577.125.000,00					Kecamatan Sragi
		Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan kelurahan sesuai rencana kerja dan kebutuhan masyarakat					577.125.000,00					Kecamatan Sragi
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	434.625.000,00					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	142.500.000,00					
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					142.500.000,00					
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	142.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Sragi || Kelurahan Sragi || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					434.625.000,00					
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	434.625.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Sragi || Kelurahan Sragi || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	
		Kecamatan Wiradesa					**6.514.133.000,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**6.514.133.000,00**					
	7.01	**KECAMATAN**					**6.514.133.000,00**					
234.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**6.269.223.000,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi keuangan, sarana prasarana serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah					***6.249.223.000,00***					
			1.Presentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	6.249.223.000,00					
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					15.000.000,00					Kecamatan Wiradesa
		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan.					15.000.000,00					Kecamatan Wiradesa
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	11.000.000,00					
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	4.000.000,00					
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					11.000.000,00					
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4.000.000,00					
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	4.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.946.035.000,00					Kecamatan Wiradesa
		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, akuntabel, dan tepat waktu.					5.946.035.000,00					Kecamatan Wiradesa
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	68.000.000,00					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	5.878.035.000,00					
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					5.878.035.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	5.878.035.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					68.000.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	68.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					3.000.000,00					Kecamatan Wiradesa
		Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah secara tertib.					3.000.000,00					Kecamatan Wiradesa
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	55 Dokumen	55 Dokumen	55 Dokumen	3.000.000,00					
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	5 Orang	0,00					
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					3.000.000,00					
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	55 Dokumen	55 Dokumen	55 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					0,00					
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	5 Orang	0,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					70.000.000,00					Kecamatan Wiradesa
		Terselenggaranya layanan administrasi umum perkantoran yang tertib dan andal.					70.000.000,00					Kecamatan Wiradesa
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Laporan	167 Laporan	175 Laporan	18.000.000,00					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	5.000.000,00					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	7 Paket	25.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00					
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					2.000.000,00					
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					25.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	7 Paket	25.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					10.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					5.000.000,00					
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	5.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					10.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					18.000.000,00					
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Laporan	167 Laporan	140 Laporan	18.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					180.188.000,00					Kecamatan Wiradesa
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah					180.188.000,00					Kecamatan Wiradesa
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	30.188.000,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	150.000.000,00					
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					30.188.000,00					
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	30.188.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					150.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	150.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					55.000.000,00					Kecamatan Wiradesa
		Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah					55.000.000,00					Kecamatan Wiradesa
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	0,00					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	45.000.000,00					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10.000.000,00					
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					45.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	45.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					10.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					0,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	0,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
235.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**4.000.000,00**					
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel					***4.000.000,00***					
			1.Persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100 %	100 %	100 %	4.000.000,00					
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					4.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Wiradesa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terlaksananya pelayanan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah di kecamatan sesuai ketentuan dan SOP.					4.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Wiradesa
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	4.000.000,00					
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					4.000.000,00					
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	4.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
236.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**2.825.250.000,00**					
		Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal					***75.250.000,00***					
			1.Persentase lembaga masyarakat aktif	100 %	100 %	100 %	75.250.000,00					
			2.Cakupan Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	100 %	75.250.000,00					
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					62.750.000,00					Masyarakat Kecamatan Wiradesa
		Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa antar pemangku kepentingan dengan rencana dan laporan yang terdokumentasi.					62.750.000,00					Masyarakat Kecamatan Wiradesa
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00					
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12.750.000,00					
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					12.750.000,00					
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12.750.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					50.000.000,00					
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2.750.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Wiradesa
		Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan kelurahan sesuai rencana kerja dan kebutuhan masyarakat.					2.750.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Wiradesa
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	1.517.550.000,00					
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					0,00					
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Wiradesa || Kelurahan Kepatihan || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					12.500.000,00					Masyarakat Kecamatan Wiradesa
		Terfasilitasinya penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan sehingga aktif dan berdaya guna.					12.500.000,00					Masyarakat Kecamatan Wiradesa
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	12.500.000,00					
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					12.500.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	12.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan peran BUMDes, koperasi, dan lembaga ekonomi lokal sebagai motor penggerak ekonomi inklusif.	
237.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**27.500.000,00**					
		Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum					***27.500.000,00***					
			1.Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas di tingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	27.500.000,00					
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					27.500.000,00					Masyarakat Kecamatan Wiradesa
		Terselenggaranya koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan secara berkesinambungan.					27.500.000,00					Masyarakat Kecamatan Wiradesa
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	27.500.000,00					
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					27.500.000,00					
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	27.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
238.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**108.160.000,00**					
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi					***108.160.000,00***					
			1.Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan	100 %	100 %	100 %	108.160.000,00					
			2.Persentase pelaksanaan urusan Kepala Daerah yang ditugaskan ditingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	108.160.000,00					
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					108.160.000,00					Masyarakat Kecamatan Wiradesa
		Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah lengkap dengan dokumen pelaksanaan dan laporan.					108.160.000,00					Masyarakat Kecamatan Wiradesa
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	100 Orang	100 Orang	33.160.000,00					
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	800 Orang	750 Orang	760 Orang	75.000.000,00					
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					75.000.000,00					
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	800 Orang	750 Orang	760 Orang	75.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					33.160.000,00					
		Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	100 Orang	100 Orang	33.160.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Mendorong konektivitas antarwilayah terutama kawasan tertinggal, pinggiran, dan perdesaan melalui peningkatan akses transportasi dan digitalisasi wilayah.	
239.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**30.000.000,00**					
		Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif dan akuntabel					***15.000.000,00***					
			1.Persentase dokumen/laporan pembinaan dan pengawasan desa yang disusun sesuai standar pelaporan	100 %	100 %	100 %	15.000.000,00					
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					30.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Wiradesa
		Terfasilitasinya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa melalui rekomendasi dan koordinasi yang tercatat dan ditindaklanjuti.					30.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Wiradesa
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen	15.000.000,00					
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	15.000.000,00					
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					15.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					15.000.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	15.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
		Kelurahan Kepatihan					**550.000.000,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**550.000.000,00**					
	7.01	**KECAMATAN**					**550.000.000,00**					
240.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**2.825.250.000,00**					
		Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal					***550.000.000,00***					
			1.Persentase lembaga masyarakat aktif	100 %	100 %	100 %	550.000.000,00					
			2.Cakupan Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	100 %	550.000.000,00					
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2.750.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Kepatihan
		Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan kelurahan sesuai rencana kerja dan kebutuhan masyarakat.					2.750.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Kepatihan
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	1.517.550.000,00					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	5 Unit	5 Unit	1.232.450.000,00					
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					263.150.000,00					
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	5 Unit	1 Unit	263.150.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Wiradesa || Kelurahan Kepatihan || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					286.850.000,00					
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	286.850.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Wiradesa || Kelurahan Kepatihan || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
		Kelurahan Mayangan					**550.000.000,00**					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
										NASIONAL	DAERAH	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**550.000.000,00**					
	7.01	**KECAMATAN**					**550.000.000,00**					
241.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**2.825.250.000,00**					
		Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal					***550.000.000,00***					
			1.Persentase lembaga masyarakat aktif	100 %	100 %	100 %	550.000.000,00					
			2.Cakupan Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	100 %	550.000.000,00					
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2.750.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Mayangan
		Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan kelurahan sesuai rencana kerja dan kebutuhan masyarakat.					2.750.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Mayangan
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	1.517.550.000,00					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	5 Unit	5 Unit	1.232.450.000,00					
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					230.000.000,00					
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	5 Unit	1 Unit	230.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Wiradesa || Kelurahan Mayangan || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					320.000.000,00					
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	320.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Wiradesa || Kelurahan Mayangan || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
		Kelurahan Bener					**550.000.000,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**550.000.000,00**					
	7.01	**KECAMATAN**					**550.000.000,00**					
242.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**2.825.250.000,00**					
		Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal					***550.000.000,00***					
			1.Persentase lembaga masyarakat aktif	100 %	100 %	100 %	550.000.000,00					
			2.Cakupan Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	100 %	550.000.000,00					
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2.750.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Bener
		Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan kelurahan sesuai rencana kerja dan kebutuhan masyarakat.					2.750.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Bener
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	1.517.550.000,00					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	5 Unit	5 Unit	1.232.450.000,00					
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					259.300.000,00					
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	5 Unit	1 Unit	259.300.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Wiradesa || Kelurahan Bener || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					290.700.000,00					
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	290.700.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Wiradesa || Kelurahan Bener || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
		Kelurahan Gumawang					**550.000.000,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**550.000.000,00**					
	7.01	**KECAMATAN**					**550.000.000,00**					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
243.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**2.825.250.000,00**					
		Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal					***550.000.000,00***					
			1.Persentase lembaga masyarakat aktif	100 %	100 %	100 %	550.000.000,00					
			2.Cakupan Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	100 %	550.000.000,00					
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2.750.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Gumawang
		Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan kelurahan sesuai rencana kerja dan kebutuhan masyarakat.					2.750.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Gumawang
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	1.517.550.000,00					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	5 Unit	5 Unit	1.232.450.000,00					
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					265.000.000,00					
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	5 Unit	1 Unit	265.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Wiradesa || Kelurahan Gumawang || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					285.000.000,00					
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	285.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Wiradesa || Kelurahan Gumawang || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
		Kelurahan Pekuncen					**550.000.000,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**550.000.000,00**					
	7.01	**KECAMATAN**					**550.000.000,00**					
244.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**2.825.250.000,00**					
		Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal					***550.000.000,00***					
			1.Persentase lembaga masyarakat aktif	100 %	100 %	100 %	550.000.000,00					
			2.Cakupan Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	100 %	550.000.000,00					
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2.750.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Pekuncen
		Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan kelurahan sesuai rencana kerja dan kebutuhan masyarakat.					2.750.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Pekuncen
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	1.517.550.000,00					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	5 Unit	5 Unit	1.232.450.000,00					
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					215.000.000,00					
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	5 Unit	1 Unit	215.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Wiradesa || Kelurahan Pekuncen || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					335.000.000,00					
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	335.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Wiradesa || Kelurahan Pekuncen || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
		Kecamatan Kedungwuni					**5.672.910.165,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**5.672.910.165,00**					
	7.01	**KECAMATAN**					**5.672.910.165,00**					
245.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**5.349.408.000,00**					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah					***5.294.408.000,00***					
			1.Presentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	5.294.408.000,00					
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					20.000.000,00					Perangkat Daerah
		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan.					20.000.000,00					Perangkat Daerah
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00					
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	10.000.000,00					
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					10.000.000,00					
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	9 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.000.000,00					
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4.758.042.000,00					Perangkat Daerah
		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, akuntabel, dan tepat waktu.					4.758.042.000,00					Perangkat Daerah
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	62.880.000,00					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	4.695.162.000,00					
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					4.695.162.000,00					
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	39 Orang/bulan	4.695.162.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					62.880.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	62.880.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.000.000,00					ASN
		Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah secara tertib.					5.000.000,00					ASN
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	1 Orang	1 Orang	5.000.000,00					
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					5.000.000,00					
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	1 Orang	1 Orang	5.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					90.260.000,00					Perangkat Daerah
		Terselenggaranya layanan administrasi umum perkantoran yang tertib dan andal.					90.260.000,00					Perangkat Daerah
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.000.000,00					
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	216 Laporan	216 Laporan	216 Laporan	26.260.000,00					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	10.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	15.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	15.000.000,00					
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					15.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	15.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					15.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	15.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					10.000.000,00					
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					20.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					26.260.000,00					
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	216 Laporan	216 Laporan	216 Laporan	26.260.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					4.000.000,00					
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					20.000.000,00					Perangkat Daerah
		Tenuhinya kebutuhan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai spesifikasi dan ketentuan.					20.000.000,00					Perangkat Daerah
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	20.000.000,00					
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					20.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					351.600.000,00					Perangkat Daerah, Outsourcing Kebersihan Kawasan Gemek, Kebersihan Kecamatan, Sopir dan Penjaga Malam
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran operasional perangkat daerah.					351.600.000,00					Perangkat Daerah, Outsourcing Kebersihan Kawasan Gemek, Kebersihan Kecamatan, Sopir dan Penjaga Malam
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	36.300.000,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	315.300.000,00					
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					36.300.000,00					
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	36.300.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					315.300.000,00					
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	315.300.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					104.506.000,00					Perangkat Daerah
		Terpeliharanya BMD penunjang dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai standar layanan.					104.506.000,00					Perangkat Daerah
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00					
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	2.425.000,00					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	32.706.000,00					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	19.375.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					32.706.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	32.706.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					2.425.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	2.425.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					19.375.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	19.375.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					50.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
246.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**1.643.830.000,00**					
		Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal					***98.252.565,00***					
			-1.Persentase lembaga masyarakat aktif	100 %	100 %	100 %	98.252.565,00					
			2.Cakupan Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	100 %	98.252.565,00					
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					98.252.565,00					Perangkat Daerah
		Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa antar pemangku kepentingan dengan rencana dan laporan yang terdokumentasi.					98.252.565,00					Perangkat Daerah
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	85.252.565,00					
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	13.000.000,00					
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					13.000.000,00					
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	13.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					85.252.565,00					
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	85.252.565,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
247.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**35.840.800,00**					
		Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum					***35.840.800,00***					
			1.Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas di tingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	35.840.800,00					
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					35.840.800,00					Masyarakat Umum/ Warga Wilayah Kecamatan Kedungwuni
		Terselenggaranya koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan secara berkesinambungan.					35.840.800,00					Masyarakat Umum/ Warga Wilayah Kecamatan Kedungwuni

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	35.840.800,00					
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					35.840.800,00					
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	35.840.800,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
248.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**154.408.800,00**					
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi					***154.408.800,00***					
			-1.Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan	100 %	100 %	100 %	154.408.800,00					
			2.Persentase pelaksanaan urusan Kepala Daerah yang ditugaskan ditingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	154.408.800,00					
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					154.408.800,00					Masyarakat Umum/ Warga Wilayah Kecamatan Kedungwuni
		Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah lengkap dengan dokumen pelaksanaan dan laporan.					154.408.800,00					Masyarakat Umum/ Warga Wilayah Kecamatan Kedungwuni
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	100 Orang	100 Orang	154.408.800,00					
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					154.408.800,00					
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	100 Orang	100 Orang	154.408.800,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
249.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**35.000.000,00**					
		Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.					***35.000.000,00***					
			1.Persentase dokumen/laporan pembinaan dan pengawasan desa yang disusun sesuai standar pelaporan	100 %	100 %	100 %	35.000.000,00					
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					35.000.000,00					Pemerintah Desa di Kecamatan Kedungwuni
		Terfasilitasinya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa melalui rekomendasi dan koordinasi yang tercatat dan ditindaklanjuti.					35.000.000,00					Pemerintah Desa di Kecamatan Kedungwuni
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	35.000.000,00					
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					35.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Kelurahan Kedungwuni Barat					**504.698.185,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**504.698.185,00**					
	7.01	**KECAMATAN**					**504.698.185,00**					
250.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**1.643.830.000,00**					
		Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal					***504.698.185,00***					
			-1.Persentase lembaga masyarakat aktif	100 %	100 %	100 %	504.698.185,00					
			2.Cakupan Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	100 %	504.698.185,00					
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.545.577.435,00					Warga Kelurahan Kedungwuni Barat dan Perangkat Kelurahan
		Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan kelurahan sesuai rencana kerja dan kebutuhan masyarakat.					1.545.577.435,00					Warga Kelurahan Kedungwuni Barat dan Perangkat Kelurahan
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas	1.168.404.100,00					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	377.173.335,00					
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					102.048.185,00					
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	1 Unit	102.048.185,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kedungwuni || Kelurahan Kedungwuni Barat || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					402.650.000,00					
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	402.650.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kedungwuni || Kelurahan Kedungwuni Barat || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
		Kelurahan Kedungwuni Timur					**538.698.750,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**538.698.750,00**					
	7.01	**KECAMATAN**					**538.698.750,00**					
251.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**1.643.830.000,00**					
		Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal					***538.698.750,00***					
			-1.Persentase lembaga masyarakat aktif	100 %	100 %	100 %	538.698.750,00					
			2.Cakupan Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	100 %	538.698.750,00					
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.545.577.435,00					Warga Kelurahan Kedungwuni Timur dan Perangkat Kelurahan
		Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan kelurahan sesuai rencana kerja dan kebutuhan masyarakat.					1.545.577.435,00					Warga Kelurahan Kedungwuni Timur dan Perangkat Kelurahan
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas	1.168.404.100,00					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	377.173.335,00					
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					116.725.150,00					
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	1 Unit	116.725.150,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kedungwuni || Kelurahan Kedungwuni Timur || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					421.973.600,00					
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas	20 Pokmas / Ormas	421.973.600,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kedungwuni || Kelurahan Kedungwuni Timur || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
		Kelurahan Pekajangan					**502.180.500,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**502.180.500,00**					
	7.01	**KECAMATAN**					**502.180.500,00**					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
252.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**1.643.830.000,00**					
		Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal					***502.180.500,00***					
			-1.Persentase lembaga masyarakat aktif	100 %	100 %	100 %	502.180.500,00					
			2.Cakupan Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	100 %	502.180.500,00					
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.545.577.435,00					Warga Kelurahan Pekajangan dan Perangkat Kelurahan
		Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan kelurahan sesuai rencana kerja dan kebutuhan masyarakat.					1.545.577.435,00					Warga Kelurahan Pekajangan dan Perangkat Kelurahan
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas	1.168.404.100,00					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	377.173.335,00					
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					158.400.000,00					
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	1 Unit	158.400.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kedungwuni || Kelurahan Pekajangan || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					343.780.500,00					
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas	20 Pokmas / Ormas	343.780.500,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Kedungwuni || Kelurahan Pekajangan || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
		Kecamatan Buaran					**4.369.605.500,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**4.369.605.500,00**					
	7.01	**KECAMATAN**					**4.369.605.500,00**					
253.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**4.179.545.640,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.					***4.179.545.640,00***					
			1.Presentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	4.179.545.640,00					
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					9.420.000,00					Kecamatan Buaran
		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan					9.420.000,00					Kecamatan Buaran
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	5.040.000,00					
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4.380.000,00					
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5.040.000,00					
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	5.040.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan regulasi dan insentif daerah untuk mempercepat investasi dan inovasi pembangunan.	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4.380.000,00					
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4.380.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.971.855.000,00					Kecamatan Buaran
		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, akuntabel, dan tepat waktu					3.971.855.000,00					Kecamatan Buaran
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	50.280.000,00					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	30 Orang/bulan	31 Orang/bulan	3.921.575.000,00					
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					3.921.575.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.921.575.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					50.280.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	50.280.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					29.275.440,00					Kecamatan Buaran
		Terselenggaranya layanan administrasi umum perkantoran yang tertib dan andal					29.275.440,00					Kecamatan Buaran
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.350.340,00					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	55 Laporan	55 Laporan	9.000.000,00					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.131.600,00					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	12.293.500,00					
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1.500.000,00					
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12.293.500,00					
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	12.293.500,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					1.500.000,00					
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan sektor industri kecil dan menengah (IKM) melalui fasilitasi legalitas, pelatihan, inkubasi bisnis, dan integrasi dengan pasar digital dan global.	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					3.131.600,00					
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.131.600,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan ekosistem ekonomi syariah dengan membangun kolaborasi antara UMKM syariah, pesantren, koperasi syariah, dan lembaga keuangan syariah.	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					3.350.340,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.350.340,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					9.000.000,00					
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	55 Laporan	55 Laporan	9.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					20.000.000,00					Kecamatan Buaran
		Terpenuhinya kebutuhan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai spesifikasi dan ketentuan					20.000.000,00					Kecamatan Buaran
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	20.000.000,00					
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					20.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					73.125.000,00					Kecamatan Buaran
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran operasional perangkat daerah					73.125.000,00					Kecamatan Buaran
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	23.675.000,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	49.450.000,00					
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					23.675.000,00					
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	23.675.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					49.450.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	49.450.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
		Terpeliharanya BMD penunjang dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai standar layanan					75.870.200,00					Kecamatan Buaran
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	28.035.200,00					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	13 Unit	13 Unit	7.835.000,00					
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					28.035.200,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	28.035.200,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					7.835.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	13 Unit	13 Unit	7.835.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					75.870.200,00					Kecamatan Buaran
		Terpeliharanya BMD penunjang dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai standar layanan					75.870.200,00					Kecamatan Buaran
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	30.000.000,00					
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	-	10.000.000,00					
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					10.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	24 Unit	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan sektor industri kecil dan menengah (IKM) melalui fasilitasi legalitas, pelatihan, inkubasi bisnis, dan integrasi dengan pasar digital dan global.	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					30.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	1 Unit	30.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
254.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**3.416.600,00**					
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel					***3.416.600,00***					
			1.Persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100 %	100 %	100 %	3.416.600,00					
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					3.416.600,00					Kecamatan Buaran
		Terlaksananya pelayanan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah di kecamatan sesuai ketentuan dan SOP					3.416.600,00					Kecamatan Buaran
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.416.600,00					
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					3.416.600,00					
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.416.600,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengintegrasikan pendekatan gender, penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan anak dan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	
255.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**1.572.152.440,00**					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal					***64.353.400,00***					
			1.Persentase lembaga masyarakat aktif	100 %	100 %	100 %	64.353.400,00					
			2.Cakupan Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	100 %	64.353.400,00					
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					64.353.400,00					Kecamaatan Buaran
		Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa antar pemangku kepentingan dengan rencana dan laporan yang terdokumentasi					64.353.400,00					Kecamaatan Buaran
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	55.000.000,00					
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9.353.400,00					
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					9.353.400,00					
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9.353.400,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					55.000.000,00					
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	55.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
256.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**21.186.600,00**					
		Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum					***21.186.600,00***					
			1.Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas di tingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	21.186.600,00					
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					21.186.600,00					Kecamatan Buaran
		Terselenggaranya koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan secara berkesinambungan					21.186.600,00					Kecamatan Buaran
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	21.186.600,00					
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					21.186.600,00					
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	21.186.600,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
257.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**68.346.660,00**					
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi					***68.346.660,00***					
			1.Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan	100 %	100 %	100 %	68.346.660,00					
			2.Persentase pelaksanaan urusan Kepala Daerah yang ditugaskan ditingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	68.346.660,00					
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					68.346.660,00					Kecamatan Buaran
		Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah lengkap dengan dokumen pelaksanaan dan laporan					68.346.660,00					Kecamatan Buaran
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	44.991.260,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang	200 Orang	200 Orang	23.355.400,00					
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					23.355.400,00					
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang	200 Orang	200 Orang	23.355.400,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mendorong konektivitas antarwilayah terutama kawasan tertinggal, pinggiran, dan perdesaan melalui peningkatan akses transportasi dan digitalisasi wilayah.	
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal					44.991.260,00					
		Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	44.991.260,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan destinasi wisata berbasis budaya, sejarah, dan alam dengan pendekatan community-based tourism dan dukungan infrastruktur serta SDM pariwisata.	
258.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**32.756.600,00**					
		Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel					***32.756.600,00***					
			1.Persentase dokumen/laporan pembinaan dan pengawasan desa yang disusun sesuai standar pelaporan	100 %	100 %	100 %	32.756.600,00					
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					32.756.600,00					Kecamatan Buaran
		Terfasilitasinya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa melalui rekomendasi dan koordinasi yang tercatat dan ditindaklanjuti					32.756.600,00					Kecamatan Buaran
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00					
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	5.080.000,00					
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	2.676.600,00					
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa					2.676.600,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	2.676.600,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan peran BUMDes, koperasi, dan lembaga ekonomi lokal sebagai motor penggerak ekonomi inklusif.	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					5.080.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	5.080.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan peran BUMDes, koperasi, dan lembaga ekonomi lokal sebagai motor penggerak ekonomi inklusif.	
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					25.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan peran BUMDes, koperasi, dan lembaga ekonomi lokal sebagai motor penggerak ekonomi inklusif.	
		Kelurahan Sapugarut					**502.599.680,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**502.599.680,00**					
	7.01	**KECAMATAN**					**502.599.680,00**					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
259.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**1.572.152.440,00**					
		Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal					***502.599.680,00***					
			1.Persentase lembaga masyarakat aktif	100 %	100 %	100 %	502.599.680,00					
			2.Cakupan Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	100 %	502.599.680,00					
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.507.799.040,00					Kecamatan Buaran
		Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan kelurahan sesuai rencana kerja dan kebutuhan masyarakat					1.507.799.040,00					Kecamatan Buaran
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	27 Pokmas / Ormas	27 Pokmas / Ormas	27 Pokmas / Ormas	714.759.720,00					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	793.039.320,00					
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					255.124.640,00					
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	1 Unit	255.124.640,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Buaran || Kelurahan Sapugarut || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					247.475.040,00					
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	27 Pokmas / Ormas	27 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	247.475.040,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Buaran || Kelurahan Sapugarut || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
		Kelurahan Simbang Kulon					**502.599.680,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**502.599.680,00**					
	7.01	**KECAMATAN**					**502.599.680,00**					
260.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**1.572.152.440,00**					
		Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal					***502.599.680,00***					
			1.Persentase lembaga masyarakat aktif	100 %	100 %	100 %	502.599.680,00					
			2.Cakupan Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	100 %	502.599.680,00					
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.507.799.040,00					Kecamatan Buaran
		Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan kelurahan sesuai rencana kerja dan kebutuhan masyarakat					1.507.799.040,00					Kecamatan Buaran
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	27 Pokmas / Ormas	27 Pokmas / Ormas	27 Pokmas / Ormas	714.759.720,00					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	793.039.320,00					
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					261.299.840,00					
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	1 Unit	261.299.840,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Buaran || Kelurahan Simbangkulon || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					241.299.840,00					
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	27 Pokmas / Ormas	27 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	241.299.840,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Buaran || Kelurahan Simbangkulon || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
		Kelurahan Bligo					**502.599.680,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**502.599.680,00**					
	7.01	**KECAMATAN**					**502.599.680,00**					
261.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**1.572.152.440,00**					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal					***502.599.680,00***					
			1.Persentase lembaga masyarakat aktif	100 %	100 %	100 %	502.599.680,00					
			2.Cakupan Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	100 %	502.599.680,00					
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.507.799.040,00					Kecamatan Buaran
		Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan kelurahan sesuai rencana kerja dan kebutuhan masyarakat					1.507.799.040,00					Kecamatan Buaran
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	27 Pokmas / Ormas	27 Pokmas / Ormas	27 Pokmas / Ormas	714.759.720,00					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	793.039.320,00					
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					276.614.840,00					
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	1 Unit	276.614.840,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Buaran || Kelurahan Bligo || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					225.984.840,00					
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	27 Pokmas / Ormas	27 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	225.984.840,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Buaran || Kelurahan Bligo || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
		Kecamatan Tirto					**2.553.275.000,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**2.553.275.000,00**					
	7.01	**KECAMATAN**					**2.553.275.000,00**					
262.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**2.364.926.000,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah					***2.344.926.000,00***					
			1.Presentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	2.344.926.000,00					
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.000.000,00					Kecamatan Tirto
		Tersusunnya dokumen perencanaan,penganggaran,dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan					2.000.000,00					Kecamatan Tirto
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	2.000.000,00					
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.000.000,00					
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.126.426.000,00					Kecamatan Tirto
		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib,akuntabel,dan tepat waktu					2.126.426.000,00					Kecamatan Tirto
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	54.700.000,00					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.071.726.000,00					
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.071.726.000,00					
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.071.726.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					54.700.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	54.700.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					63.500.000,00					Kecamatan Tirto
		Terselenggaranya layanan administrasi umum perkantoran yang tertib dan andal					63.500.000,00					Kecamatan Tirto
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	7.000.000,00					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	15.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	3.500.000,00					
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					2.000.000,00					
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					15.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	15.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					3.500.000,00					
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2 Paket	3.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					7.000.000,00					
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	6 Paket	7.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					18.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					18.000.000,00					
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					20.000.000,00					Kecamatan Tirto
		Terpenuhinya kebutuhan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai spesifikasi dan ketentuan					20.000.000,00					Kecamatan Tirto
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	32 Unit	0 Unit	20.000.000,00					
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					20.000.000,00					
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	32 Unit	25 Unit	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					110.000.000,00					Kecamatan Tirto
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran operasional perangkat daerah					110.000.000,00					Kecamatan Tirto
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	75.000.000,00					
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					35.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					75.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					43.000.000,00					Kecamatan Tirto
		Terpeliharanya BMD penunjang dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai standar layanan					43.000.000,00					Kecamatan Tirto
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	4 Unit	38.000.000,00					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	5 Unit	5.000.000,00					
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					38.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	4 Unit	38.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					5.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	7 Unit	5.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
263.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**5.000.000,00**					
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel					***5.000.000,00***					
			1.Persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100 %	100 %	100 %	5.000.000,00					
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					5.000.000,00					Kelompok Masyarakat
		Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat secara tertib,akuntabel					5.000.000,00					Kelompok Masyarakat
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00					
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					5.000.000,00					
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.	
264.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**77.349.000,00**					
		Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal					***77.349.000,00***					
			1.Persentase lembaga masyarakat aktif	100 %	100 %	100 %	77.349.000,00					
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					69.349.000,00					Lembaga Kemasyarakatan
		Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa antar pemangku kepentingan dengan rencana dan laporan yang terdokumentasi					69.349.000,00					Lembaga Kemasyarakatan
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	60.000.000,00					
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	9.349.000,00					
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					9.349.000,00					
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	9.349.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					60.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	60.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					8.000.000,00					Lembaga Kemasyarakatan
		Terfasilitasinya penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan sehingga aktif dan berdayaguna					8.000.000,00					Lembaga Kemasyarakatan
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	8.000.000,00					
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					8.000.000,00					
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	8.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mengintegrasikan pendekatan gender, penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan anak dan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	
265.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**23.000.000,00**					
		Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum					***23.000.000,00***					
			1.Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas di tingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	23.000.000,00					
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					23.000.000,00					Kelompok Masyarakat
		Terselenggaranya koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan secara berkesinambungan					23.000.000,00					Kelompok Masyarakat
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	23.000.000,00					
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					23.000.000,00					
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	23.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
266.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**50.000.000,00**					
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi					***50.000.000,00***					
			1.Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan	100 %	100 %	100 %	50.000.000,00					
			2.Persentase pelaksanaan urusan Kepala Daerah yang ditugaskan ditingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	50.000.000,00					
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					50.000.000,00					Kelompok Masyarakat
		Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah lengkap dengan dokumen pelaksanaan dan laporan					50.000.000,00					Kelompok Masyarakat
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	100 Orang	100 Orang	50.000.000,00					
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					50.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
267.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**33.000.000,00**					
		Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel					***33.000.000,00***					
			1.Persentase dokumen/laporan pembinaan dan pengawasan desa yang disusun sesuai standar pelaporan	100 %	100 %	100 %	33.000.000,00					
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					33.000.000,00					Desa
		Terfasilitasinya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa melalui rekomendasi dan koordinasi yang tercatat dan di tindaklanjuti					33.000.000,00					Desa
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00					
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	8.000.000,00					
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					8.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 Dokumen	16 Dokumen	2 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					25.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
		Kecamatan Bojong					**2.758.227.500,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**2.758.227.500,00**					
	7.01	**KECAMATAN**					**2.758.227.500,00**					
268.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**2.512.093.600,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.					***2.512.093.600,00***					
			1.Presentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	2.512.093.600,00					
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.199.963.000,00					OPD Kecamatan Bojong
		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.199.963.000,00					OPD Kecamatan Bojong
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	44.900.000,00					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	18 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2.155.063.000,00					
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.155.063.000,00					
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	18 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2.155.063.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					44.900.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	44.900.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					72.370.000,00					OPD Kecamatan Bojong
		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah					72.370.000,00					OPD Kecamatan Bojong
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	15.998.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	19.310.000,00					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	10.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	15 Paket	21.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	15 Paket	6.062.000,00					
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					21.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	15 Paket	21.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					6.062.000,00					
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	15 Paket	6.062.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					10.000.000,00					
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	3 Paket	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					15.998.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	15.998.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					19.310.000,00					
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	19.310.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					60.000.000,00					OPD Kecamatan Bojong
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					60.000.000,00					OPD Kecamatan Bojong
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	1 Unit	40.000.000,00					
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	9 Unit	5 Unit	20.000.000,00					
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					40.000.000,00					
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	8 Unit	40.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					20.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	9 Unit	6 Unit	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					111.800.000,00					OPD Kecamatan Bojong
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					111.800.000,00					OPD Kecamatan Bojong
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	59.500.000,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	52.300.000,00					
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					59.500.000,00					
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	59.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					52.300.000,00					
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	52.300.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					67.960.600,00					OPD Kecamatan Bojong
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					67.960.600,00					OPD Kecamatan Bojong
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	7.606.600,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	1 Unit	1 Unit	900.000,00					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	43.466.000,00					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	6 Unit	10 Unit	15.988.000,00					
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					43.466.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	43.466.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					900.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	1 Unit	1 Unit	900.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					15.988.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	6 Unit	22 Unit	15.988.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					7.606.600,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	7.606.600,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	
269.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**25.000.000,00**					
			Persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	-	-	100 %	25.000.000,00					
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					25.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Bojong
		-					25.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Bojong
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	-	-	25.000.000,00					
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					25.000.000,00					
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	-	4 Laporan	25.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
270.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**94.793.900,00**					
		Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal					***94.793.900,00***					
			1.Persentase lembaga masyarakat aktif	100 %	100 %	100 %	94.793.900,00					
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					94.793.900,00					Masyarakat Kecamatan Bojong
		Tersedianya dokumen/laporan koordinasi pemberdayaan desa					94.793.900,00					Masyarakat Kecamatan Bojong
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	76.233.900,00					
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	18.560.000,00					
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					18.560.000,00					
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	18.560.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					76.233.900,00					
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	12 Laporan	76.233.900,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
271.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**39.380.000,00**					
		Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum					***39.380.000,00***					
			1.Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas di tingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	39.380.000,00					
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					39.380.000,00					Polri, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Bojong
		Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum					39.380.000,00					Polri, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Bojong
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	39.380.000,00					
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					39.380.000,00					
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	39.380.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	
272.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**38.300.000,00**					
		Meningkatnya efektifitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi					***38.300.000,00***					
			1.Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan	100 %	100 %	100 %	38.300.000,00					
			1.Persentase pelaksanaan urusan Kepala Daerah yang ditugaskan ditingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	38.300.000,00					
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					38.300.000,00					Masyarakat Kecamatan Bojong
		Tersedianya Dokumen laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah					38.300.000,00					Masyarakat Kecamatan Bojong
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300 Orang	300 Orang	300 Orang	38.300.000,00					
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					38.300.000,00					
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300 Orang	300 Orang	300 Orang	38.300.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	
273.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**48.660.000,00**					
		Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif dan akuntabel					***48.660.000,00***					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			1.Persentase dokumen/laporan pembinaan dan pengawasan desa yang disusun sesuai standar pelaporan	100 %	100 %	100 %	48.660.000,00					
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					48.660.000,00					Desa di Kecamatan Bojong
		Terlaksananya kegiatan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa					48.660.000,00					Desa di Kecamatan Bojong
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	4 Dokumen	18 Dokumen	30.000.000,00					
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	18.660.000,00					
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					30.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	4 Dokumen	18 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					18.660.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	18.660.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	
		Kecamatan Wonopringgo					**1.867.869.000,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**1.867.869.000,00**					
	7.01	**KECAMATAN**					**1.867.869.000,00**					
274.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**1.697.869.000,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.					***1.627.869.000,00***					
			1.Presentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	1.627.869.000,00					
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.000.000,00					Kecamatan Wonopringgo
		-					10.000.000,00					Kecamatan Wonopringgo
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	21 Dokumen	10.000.000,00					
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					10.000.000,00					
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.435.019.000,00					Kecamatan Wonopringgo
		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, akuntabel, dan tepat waktu					1.435.019.000,00					Kecamatan Wonopringgo
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	65.000.000,00					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.370.019.000,00					
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					1.370.019.000,00					
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.370.019.000,00	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					65.000.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					85.000.000,00					Kecamatan Wonopringgo
		-					85.000.000,00					Kecamatan Wonopringgo
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00					
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	20.000.000,00					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	10.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4 Paket	4 Paket	20.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	0 Paket	2 Paket	10.000.000,00					
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					20.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4 Paket	1 Paket	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					10.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	0 Paket	5 Paket	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					20.000.000,00					
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1 Paket	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					10.000.000,00					
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					10.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					10.000.000,00					
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	50 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					92.850.000,00					Kecamatan Wonopringgo
		-					92.850.000,00					Kecamatan Wonopringgo
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	52.850.000,00					
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					40.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					52.850.000,00					
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	52.850.000,00	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					75.000.000,00					Kecamatan Wonopringgo
		-					75.000.000,00					Kecamatan Wonopringgo
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	1 Unit	0 Unit	15.000.000,00					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	3 Unit	50.000.000,00					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit	8 Unit	10.000.000,00					
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					50.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	3 Unit	50.000.000,00	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					10.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit	10 Unit	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					15.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	1 Unit	3 Unit	15.000.000,00	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	
		-					85.000.000,00					Kecamatan Wonopringgo
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	5.000.000,00					
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					5.000.000,00					
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	
275.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**40.000.000,00**					
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.					***20.000.000,00***					
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan					20.000.000,00					Kecamatan Wonopringgo
		-					20.000.000,00					Kecamatan Wonopringgo
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00					
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					20.000.000,00					
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mengintegrasikan pendekatan gender, penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan anak dan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	
			Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	-	-	100 %	20.000.000,00					
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					20.000.000,00					Kecamatan Wonopringgo
		-					20.000.000,00					Kecamatan Wonopringgo
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	-	-	20.000.000,00					
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					20.000.000,00					
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	-	4 Kegiatan Laporan	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
276.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**55.000.000,00**					
		Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal.					***55.000.000,00***					
			1.Persentase lembaga masyarakat aktif	100 %	100 %	100 %	55.000.000,00					
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					55.000.000,00					Kecamatan Wonopringgo
		-					55.000.000,00					Kecamatan Wonopringgo
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	40.000.000,00					
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00					
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					15.000.000,00					
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					40.000.000,00					
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
277.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**30.000.000,00**					
		Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum					***30.000.000,00***					
			1.Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas di tingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	30.000.000,00					
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					30.000.000,00					Kecamatan Wonopringgo
		-					30.000.000,00					Kecamatan Wonopringgo
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00					
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					30.000.000,00					
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	14 Laporan	30.000.000,00	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	
278.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**25.000.000,00**					
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi.					***25.000.000,00***					
			1.Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan	100 %	100 %	100 %	25.000.000,00					
			2.Persentase pelaksanaan urusan Kepala Daerah yang ditugaskan ditingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	25.000.000,00					
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					25.000.000,00					Kecamatan Wonopringgo
		-					25.000.000,00					Kecamatan Wonopringgo
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	100 Orang	100 Orang	25.000.000,00					
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					25.000.000,00					
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	100 Orang	100 Orang	25.000.000,00	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mengintegrasikan pendekatan gender, penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan anak dan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	
279.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**20.000.000,00**					
		Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.					***20.000.000,00***					
			1.Persentase dokumen/laporan pembinaan dan pengawasan desa yang disusun sesuai standar pelaporan	100 %	100 %	100 %	20.000.000,00					
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					20.000.000,00					Kecamatan Wonopringgo
		-					20.000.000,00					Kecamatan Wonopringgo
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					20.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	0 Dokumen	14 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
		Kecamatan Karanganyar					**2.342.617.000,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**2.342.617.000,00**					
	7.01	**KECAMATAN**					**2.342.617.000,00**					
280.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**2.056.222.000,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.					***2.056.222.000,00***					
			1.Presentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	49.620.000,00					
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.821.334.000,00					ASN Kecamatan Karanganyar
		-					1.821.334.000,00					ASN Kecamatan Karanganyar
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	48.500.000,00					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.772.834.000,00					
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					1.772.834.000,00					
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.772.834.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					48.500.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	48.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0,00					ASN Kecamatan Karanganyar
		-					0,00					ASN Kecamatan Karanganyar
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	5 Orang	0,00					
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					0,00					
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	5 Orang	0,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					49.620.000,00					layanan administrasi perkantoran di Kecamatan Karanganyar
		-					49.620.000,00					layanan administrasi perkantoran di Kecamatan Karanganyar
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	21.127.000,00					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	13.233.000,00					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2.870.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	7.390.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	5.000.000,00					
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					7.390.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	7.390.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					5.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	5.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					2.870.000,00					
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2.870.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					21.127.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	21.127.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					13.233.000,00					
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	13.233.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					8.800.000,00					Terpenuhinya pengadaan Barang penunjang diKecamatan Karanganyar
		-					8.800.000,00					Terpenuhinya pengadaan Barang penunjang diKecamatan Karanganyar
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	8.800.000,00					
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					8.800.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	8.800.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					129.927.500,00					Penunjang Pelayanan Umum Kantor
		-					129.927.500,00					Penunjang Pelayanan Umum Kantor
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	30.650.000,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	99.277.500,00					
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					30.650.000,00					
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	30.650.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					99.277.500,00					
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	99.277.500,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
		-					46.540.500,00					Barang Milik Pemerintah Daerah
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	36.540.500,00					
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					36.540.500,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	5 Unit	36.540.500,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					46.540.500,00					Barang Milik Pemerintah Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		-					46.540.500,00					Barang Milik Pemerintah Daerah
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	10.000.000,00					
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					10.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	3 Unit	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
281.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**123.085.000,00**					
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.					***123.085.000,00***					
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan					57.500.000,00					Masyarakat Kecamatan Karanganyar
		-					57.500.000,00					Masyarakat Kecamatan Karanganyar
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	57.500.000,00					
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					57.500.000,00					
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 Dokumen	100 Dokumen	12 Dokumen	57.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					65.585.000,00					Masyarakat Kecamatan Karanganyar
		-					65.585.000,00					Masyarakat Kecamatan Karanganyar
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	2.100.000,00					
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	63.485.000,00					
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					2.100.000,00					
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	2.100.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					63.485.000,00					
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	12 Laporan	63.485.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
282.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**20.250.000,00**					
		Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal.					***20.250.000,00***					
			1.Persentase lembaga masyarakat aktif	100 %	100 %	100 %	2.750.000,00					
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					17.500.000,00					Desa di Kecamatan Karanganyar
		-					17.500.000,00					Desa di Kecamatan Karanganyar
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	45 Lembaga Kemasyarakatan	45 Lembaga Kemasyarakatan	45 Lembaga Kemasyarakatan	17.500.000,00					
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					17.500.000,00					
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	45 Lembaga Kemasyarakatan	45 Lembaga Kemasyarakatan	45 Lembaga Kemasyarakatan	17.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					2.750.000,00					Desa di Kecamatan Karanganyar
		-					2.750.000,00					Desa di Kecamatan Karanganyar
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	45 Lembaga Kemasyarakatan	45 Lembaga Kemasyarakatan	45 Lembaga Kemasyarakatan	2.750.000,00					
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					2.750.000,00					
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	45 Lembaga Kemasyarakatan	45 Lembaga Kemasyarakatan	45 Lembaga Kemasyarakatan	2.750.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
283.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**29.300.000,00**					
		Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum					***29.300.000,00***					
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					29.300.000,00					Masyarakat Kecamatan Karanganyar
		-					29.300.000,00					Masyarakat Kecamatan Karanganyar
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	29.300.000,00					
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					29.300.000,00					
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	12 Laporan	29.300.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
284.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**63.500.000,00**					
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi.					***63.500.000,00***					
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					63.500.000,00					Masyarakat Kecamatan Karanganyar
		-					63.500.000,00					Masyarakat Kecamatan Karanganyar
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	50 Orang	50 Orang	63.500.000,00					
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					63.500.000,00					
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	50 Orang	50 Orang	63.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
285.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**50.260.000,00**					
		Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.					***50.260.000,00***					
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					50.260.000,00					Desa di Kecamatan Karanganyar
		-					50.260.000,00					Desa di Kecamatan Karanganyar

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	3 Dokumen	12 Dokumen	16.650.000,00					
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	11.000.000,00					
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	6.651.000,00					
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	8.890.000,00					
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	7.069.000,00					
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa					8.890.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0 Dokumen	0 Dokumen	15 Dokumen	8.890.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					6.651.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	6.651.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					16.650.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	3 Dokumen	12 Dokumen	16.650.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa					11.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0 Dokumen	0 Dokumen	15 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					7.069.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan	4 Laporan	15 Laporan	7.069.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
		Kecamatan Doro					**2.599.918.000,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**2.599.918.000,00**					
	7.01	**KECAMATAN**					**2.599.918.000,00**					
286.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**2.428.605.000,00**					
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu					***2.421.105.000,00***					
			1.Persentase dokumen/laporan pembinaan dan pengawasan desa yang disusun sesuai standar pelaporan	100 %	100 %	100 %	2.421.105.000,00					
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.210.362.000,00					ASN dilingkungan Kantor Kecamatan Doro Kab. Pekalongan
		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, akuntabel, dan tepat waktu.					2.210.362.000,00					ASN dilingkungan Kantor Kecamatan Doro Kab. Pekalongan
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	39.500.000,00					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	2.170.862.000,00					
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.170.862.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	18 Orang/bulan	2.170.862.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					39.500.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	39.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					67.410.000,00					ASN dilingkungan Kantor Kecamatan
		Terselenggaranya layanan administrasi umum perkantoran yang tertib dan andal.					67.410.000,00					ASN dilingkungan Kantor Kecamatan
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	16.500.000,00					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	21.910.000,00					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	5.000.000,00					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	9.000.000,00					
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					5.000.000,00					
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					10.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					9.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	9.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					5.000.000,00					
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	5.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					16.500.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	16.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					21.910.000,00					
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	21.910.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0,00					ASN dilingkungan Kantor Kecamatan
		Terpenuhinya kebutuhan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai spesifikasi dan ketentuan.					0,00					ASN dilingkungan Kantor Kecamatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	0,00					
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0,00					
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	7 Unit	0,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					74.333.000,00					ASN dilingkungan Kantor Kecamatan
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran operasional perangkat daerah.					74.333.000,00					ASN dilingkungan Kantor Kecamatan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	25.500.000,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	48.833.000,00					
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					25.500.000,00					
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	25.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					48.833.000,00					
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	48.833.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
		Terpeliharanya BMD penunjang dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai standar layanan.					74.000.000,00					Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	43.000.000,00					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	11 Unit	11 Unit	16.000.000,00					
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					43.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	43.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					16.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	11 Unit	12 Unit	16.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
			Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya laporan Kewenangan yang dilimpahkan	-	-	100 %	2.500.000,00					
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.500.000,00					Perangkat Daerah
		-					2.500.000,00					Perangkat Daerah
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	2.500.000,00					
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.500.000,00					
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	4 Dokumen	2.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Pekalongan || Kecamatan Doro || Desa Doro || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					74.000.000,00					Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Terpeliharanya BMD penunjang dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai standar layanan.					74.000.000,00					Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	15.000.000,00					
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					15.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	1 Unit	15.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
287.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**25.283.000,00**					
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.					***25.283.000,00***					
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					25.283.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		-					25.283.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	25.283.000,00					
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					25.283.000,00					
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	25.283.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	
288.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**45.500.000,00**					
		Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal.					***45.500.000,00***					
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					45.500.000,00					Lembaga masyarakat yang aktif
		-					45.500.000,00					Lembaga masyarakat yang aktif
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	40.000.000,00					
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	5.500.000,00					
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					5.500.000,00					
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	5.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					40.000.000,00					
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	
289.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**34.530.000,00**					
		Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum					***34.530.000,00***					
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					34.530.000,00					Desa seluruh wilayah Kecamatan
		-					34.530.000,00					Desa seluruh wilayah Kecamatan
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	34.530.000,00					
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					34.530.000,00					
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	12 Laporan	34.530.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	
290.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**30.000.000,00**					
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi					***30.000.000,00***					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					30.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		-					30.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang	200 Orang	200 Orang	30.000.000,00					
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					30.000.000,00					
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang	200 Orang	100 Orang	30.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	
291.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**36.000.000,00**					
		Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.					***36.000.000,00***					
			1.Persentase dokumen/laporan pembinaan dan pengawasan desa yang disusun sesuai standar pelaporan	100 %	100 %	100 %	36.000.000,00					
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					36.000.000,00					Desa seluruh wilayah Kecamatan
		-					36.000.000,00					Desa seluruh wilayah Kecamatan
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00					
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00					
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	11.000.000,00					
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					11.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	14 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					20.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					5.000.000,00					
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	14 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	
		Kecamatan Talun					**2.115.474.500,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**2.115.474.500,00**					
	7.01	**KECAMATAN**					**2.115.474.500,00**					
292.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**1.986.111.900,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah					***1.986.111.900,00***					
			1.Presentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	1.986.111.900,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.307.000,00					ASN Kecamatan Talun
		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan.					2.307.000,00					ASN Kecamatan Talun
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.307.000,00					
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.307.000,00					
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.307.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.824.627.300,00					ASN Kecamatan Talun
		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, akuntabel, dan tepat waktu.					1.824.627.300,00					ASN Kecamatan Talun
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	42.285.300,00					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.782.342.000,00					
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					1.782.342.000,00					
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.782.342.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					42.285.300,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	42.285.300,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					31.425.000,00					Administrasi Umum Kecamatan Talun
		Terselenggaranya layanan administrasi umum perkantoran yang tertib dan andal.					31.425.000,00					Administrasi Umum Kecamatan Talun
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	7.250.000,00					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	10.727.000,00					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3.000.000,00					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	2.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	20 Paket	4.555.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	3.893.000,00					
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					2.000.000,00					
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	2.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					4.555.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	20 Paket	4.555.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					3.893.000,00					
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	3.893.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					3.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					7.250.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	7.250.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					10.727.000,00					
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	10.727.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					77.900.000,00					Jasa Penunjang Kecamatan Talun
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran operasional perangkat daerah.					77.900.000,00					Jasa Penunjang Kecamatan Talun
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	28.800.000,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	49.100.000,00					
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					28.800.000,00					
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	28.800.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					49.100.000,00					
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	49.100.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					49.852.600,00					Kecamatan Talun
		Terpeliharanya BMD penunjang dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai standar layanan.					49.852.600,00					Kecamatan Talun
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	4.283.100,00					
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	8 Unit	2.500.000,00					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	38.379.000,00					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	12 Unit	4.690.500,00					
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					38.379.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	38.379.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					2.500.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	8 Unit	2.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					4.690.500,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	12 Unit	4.690.500,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					4.283.100,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	4.283.100,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
293.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**19.610.700,00**					
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.					***19.610.700,00***					
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					19.610.700,00					Masyarakat Keacamatan Talun
		-					19.610.700,00					Masyarakat Keacamatan Talun
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.649.000,00					
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	17.961.700,00					
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					1.649.000,00					
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.649.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					17.961.700,00					
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	17.961.700,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
294.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**50.101.000,00**					
		Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal.					***50.101.000,00***					
			1.Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas di tingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	50.101.000,00					
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					50.101.000,00					Masyarakat Keacamatan Talun
		Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa antar pemangku kepentingan dengan rencana dan laporan yang terdokumentasi.					50.101.000,00					Masyarakat Keacamatan Talun
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	46.341.000,00					
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	3.760.000,00					
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					3.760.000,00					
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	3.760.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					46.341.000,00					
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	46.341.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
295.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**2.904.900,00**					
		Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum					***2.904.900,00***					
			1.Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas di tingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	2.904.900,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					2.904.900,00					Masyarakat Keacamatan Talun
		Terselenggaranya koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan secara berkesinambungan.					2.904.900,00					Masyarakat Keacamatan Talun
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.904.900,00					
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					2.904.900,00					
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.904.900,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
296.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**28.746.000,00**					
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi					***28.746.000,00***					
			1.Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan	100 %	100 %	100 %	28.746.000,00					
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					28.746.000,00					Masyarakat Keacamatan Talun
		Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah lengkap dengan dokumen pelaksanaan dan laporan.					28.746.000,00					Masyarakat Keacamatan Talun
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 Orang	150 Orang	150 Orang	28.746.000,00					
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					28.746.000,00					
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 Orang	150 Orang	150 Orang	28.746.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
297.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**28.000.000,00**					
		Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.					***28.000.000,00***					
			1.Persentase dokumen/laporan pembinaan dan pengawasan desa yang disusun sesuai standar pelaporan	100 %	100 %	100 %	28.000.000,00					
		Terfasilitasinya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa melalui rekomendasi dan koordinasi yang tercatat dan ditindaklanjuti.					28.000.000,00					Masyarakat Keacamatan Talun
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	3.000.000,00					
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					3.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					28.000.000,00					Masyarakat Keacamatan Talun
		Terfasilitasinya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa melalui rekomendasi dan koordinasi yang tercatat dan ditindaklanjuti.					28.000.000,00					Masyarakat Keacamatan Talun
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	-	-	20.000.000,00					
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-	-	-	5.000.000,00					
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					20.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	-	10 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					5.000.000,00					
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-	-	10 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
		Kecamatan Lebakbarang					**2.603.903.500,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**2.603.903.500,00**					
	7.01	**KECAMATAN**					**2.603.903.500,00**					
298.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**2.428.678.500,00**					
		Meningkatnya Dukungan Administrasi, Keuangan, Sarana Prasarana, serta Sumber Daya yang Efektif dan Efisien dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					***2.428.678.500,00***					
			1.Presentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	2.428.678.500,00					
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					8.000.000,00					OPD Kecamatan Lebakbarang
		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan.					8.000.000,00					OPD Kecamatan Lebakbarang
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	8.000.000,00					
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					8.000.000,00					
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.120.624.000,00					OPD Kecamatan Lebakbarang
		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, akuntabel, dan tepat waktu.					2.120.624.000,00					OPD Kecamatan Lebakbarang
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	53.130.000,00					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.067.494.000,00					
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.067.494.000,00					
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.067.494.000,00	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					53.130.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	53.130.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					124.754.500,00					OPD Kecamatan Lebakbarang
		Terselenggaranya layanan administrasi umum perkantoran yang tertib dan andal.					124.754.500,00					OPD Kecamatan Lebakbarang
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	22.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	9.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	15.004.500,00					
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	48.750.000,00					
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					15.004.500,00					
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	15.004.500,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					48.750.000,00					
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	48.750.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					9.000.000,00					
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1 Paket	9.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					22.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	22.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					30.000.000,00					
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					5.000.000,00					OPD Kecamatan Lebakbarang
		Terpenuhinya kebutuhan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai spesifikasi dan ketentuan.					5.000.000,00					OPD Kecamatan Lebakbarang
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	8 Unit	0 Unit	5.000.000,00					
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	3 Unit	2 Unit	0,00					
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					5.000.000,00					
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	8 Unit	2 Unit	5.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0,00					
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	3 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					86.300.000,00					OPD Kecamatan Lebakbarang
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran operasional perangkat daerah.					86.300.000,00					OPD Kecamatan Lebakbarang
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	74.300.000,00					
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					74.300.000,00					
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	74.300.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					84.000.000,00					OPD Kecamatan Lebakbarang
		Terpeliharanya BMD penunjang dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai standar layanan.					84.000.000,00					OPD Kecamatan Lebakbarang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	1 Unit	25.000.000,00					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	7 Unit	7 Unit	53.000.000,00					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6.000.000,00					
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					53.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	7 Unit	8 Unit	53.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					6.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					25.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
299.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**56.000.000,00**					
		Meningkatnya Partisipasi dan Kemandirian Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan Berbasis Potensi Lokal					***56.000.000,00***					
			1.Persentase lembaga masyarakat aktif	100 %	100 %	100 %	56.000.000,00					
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					56.000.000,00					Lembaga Kemasyarakatan
		Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa antar pemangku kepentingan dengan rencana dan laporan yang terdokumentasi.					56.000.000,00					Lembaga Kemasyarakatan
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	45.000.000,00					
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	11.000.000,00					
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					11.000.000,00					
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	11.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					45.000.000,00					
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	45.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
300.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**25.000.000,00**					
		Meningkatnya Kondisi Ketentraman dan Ketertiban Umum					***25.000.000,00***					
			1.Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas di tingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	25.000.000,00					
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					25.000.000,00					Kelompok Masyarakat
		Terselenggaranya koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan secara berkesinambungan.					25.000.000,00					Kelompok Masyarakat
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					25.000.000,00					
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
301.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**60.000.000,00**					
		Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah secara Tertib dan Terkoordinasi					***60.000.000,00***					
			1.Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan	100 %	100 %	100 %	60.000.000,00					
			2.Persentase pelaksanaan urusan Kepala Daerah yang ditugaskan ditingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	60.000.000,00					
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					60.000.000,00					Kelompok Masyarakat
		Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah lengkap dengan dokumen pelaksanaan dan laporan.					60.000.000,00					Kelompok Masyarakat
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 Orang	150 Orang	150 Orang	60.000.000,00					
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					60.000.000,00					
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 Orang	150 Orang	300 Orang	60.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
302.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**34.225.000,00**					
		Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel					***34.225.000,00***					
			1.Persentase dokumen/laporan pembinaan dan pengawasan desa yang disusun sesuai standar pelaporan	100 %	100 %	100 %	34.225.000,00					
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					34.225.000,00					Desa
		Terfasilitasinya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa melalui rekomendasi dan koordinasi yang tercatat dan ditindaklanjuti.					34.225.000,00					Desa
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00					
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	9.225.000,00					
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					9.225.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	9.225.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					25.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
		Kecamatan Kandangserang					**2.385.948.217,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**2.385.948.217,00**					
	7.01	**KECAMATAN**					**2.385.948.217,00**					
303.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**2.244.266.800,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.					***2.239.266.800,00***					
			1.Presentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	2.239.266.800,00					
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.048.066.000,00					Kecamatan Kandangserang
		Terwujudnya pengelolaan keuangan secara transparan , akuntabel, efektif dan efisien					2.048.066.000,00					Kecamatan Kandangserang
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	39.840.000,00					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.008.226.000,00					
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.008.226.000,00					
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	18 Orang/bulan	2.008.226.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					39.840.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen	39.840.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					46.750.800,00					Kecamatan Kandangserang
		Terciptanya Fondasi yang kuat bagi seluruh kegiatan pemerintahan					46.750.800,00					Kecamatan Kandangserang
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12.287.200,00					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	22.115.000,00					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5.000.000,00					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.350.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0,00					
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.998.600,00					
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					3.350.000,00					
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.350.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0,00					
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3 Paket	0,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					3.998.600,00					
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4 Paket	3.998.600,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					5.000.000,00					
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3 Paket	5.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					12.287.200,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	12.287.200,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					22.115.000,00					
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	22.115.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					5.000.000,00					Kecamatan Kandangserang
		Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai					5.000.000,00					Kecamatan Kandangserang
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0,00					
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00					
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0,00					
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					5.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	2 Unit	5.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					87.450.000,00					Kecamatan Kandangserang
		Terlaksananya oprasional dan Administrasi Perkantoran yang efektif dan efesien					87.450.000,00					Kecamatan Kandangserang
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	14.000.000,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	73.450.000,00					
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					14.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	14.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					73.450.000,00					
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	73.450.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					57.000.000,00					Kecamatan Kandangserang
		Terpeliharanya barang milik daerah agar tetap berfungsi optimal dan memiliki umur pakai yang panjang					57.000.000,00					Kecamatan Kandangserang
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	15.000.000,00					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	36.000.000,00					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	6.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					36.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	6 Unit	36.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					6.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	6 Unit	6.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					15.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	2 Unit	15.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	
304.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**25.300.000,00**					
			-	-	-	-	25.300.000,00					
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					25.300.000,00					Kelompok Masyarakat
		-					25.300.000,00					Kelompok Masyarakat
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	-	-	25.300.000,00					
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					25.300.000,00					
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	-	4 Laporan	25.300.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	
305.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**39.999.600,00**					
		Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dalam pembangunan berbasis potensi lokal.					***39.999.600,00***					
			1.Persentase lembaga masyarakat aktif	100 %	100 %	100 %	39.999.600,00					
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					39.999.600,00					Lembaga Kemasyarakatan
		Terciptanya sinergi dan efektifitas dalam upaya memandirikan masyarakat desa					39.999.600,00					Lembaga Kemasyarakatan
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00					
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	9.999.600,00					
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					9.999.600,00					
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	42 Lembaga Kemasyarakatan	9.999.600,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					30.000.000,00					
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	
306.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**27.685.000,00**					
		Meningkatnya Kondisi Ketentraman dan Ketertiban Umum					***27.685.000,00***					
			1.Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas di tingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	27.685.000,00					
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					27.685.000,00					Kelompok Masyarakat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terciptanya kondisi lingkungan yang aman , damai, dan teratur bagi masyarakat					27.685.000,00					Kelompok Masyarakat
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	27.685.000,00					
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					27.685.000,00					
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	27.685.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	
307.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**27.150.000,00**					
		Meningkatnya Efektifitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah secara tertib dan terkoordinasi					***27.150.000,00***					
			1.Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan	100 %	100 %	100 %	27.150.000,00					
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					27.150.000,00					Kelompok Masyarakat
		Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat kecamatan					27.150.000,00					Kelompok Masyarakat
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 Orang	150 Orang	150 Orang	27.150.000,00					
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					27.150.000,00					
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 Orang	150 Orang	200 Orang	27.150.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	
308.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**21.546.817,00**					
		Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan , partisipatif dan akuntabel					***21.546.817,00***					
			1.Persentase dokumen/laporan pembinaan dan pengawasan desa yang disusun sesuai standar pelaporan	100 %	100 %	100 %	21.546.817,00					
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					21.546.817,00					Desa
		Terciptanya pemerintahan desa yang mandiri, profesional dan akuntabel					21.546.817,00					Desa
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	3 Dokumen	8 Dokumen	16.546.817,00					
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00					
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					5.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					16.546.817,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	16.546.817,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	
		Kecamatan Paninggaran					**2.380.734.500,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**2.380.734.500,00**					
	7.01	**KECAMATAN**					**2.380.734.500,00**					
309.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**2.272.437.220,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.					***2.260.937.220,00***					
			1.Presentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	2.260.937.220,00					
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.649.000,00					OPD Kecamatan Paninggaran
		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan.					1.649.000,00					OPD Kecamatan Paninggaran
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1.649.000,00					
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1.649.000,00					
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1.649.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.071.699.000,00					Kecamatan Paninggaran
		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, akuntabel, dan tepat waktu.					2.071.699.000,00					Kecamatan Paninggaran
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	49.210.000,00					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.022.489.000,00					
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.022.489.000,00					
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.022.489.000,00	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					49.210.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	49.210.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					31.345.200,00					Kecamatan Paninggaran
		Terselenggaranya layanan administrasi umum perkantoran yang tertib dan andal.					31.345.200,00					Kecamatan Paninggaran
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	10.118.100,00					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4.590.000,00					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	3.050.000,00					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	1.500.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	9.937.100,00					
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	2.150.000,00					
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					1.500.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	1.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					9.937.100,00					
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	9.937.100,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					2.150.000,00					
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	2.150.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					3.050.000,00					
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	3.050.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					10.118.100,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	10.118.100,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					4.590.000,00					
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4.590.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					20.000.000,00					Kecamatan Paninggaran
		Terpenuhinya kebutuhan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai spesifikasi dan ketentuan.					20.000.000,00					Kecamatan Paninggaran
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	10.000.000,00					
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	10.000.000,00					
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					10.000.000,00					
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					10.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					93.850.000,00					Kecamatan Paninggaran
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran operasional perangkat daerah.					93.850.000,00					Kecamatan Paninggaran
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	20.400.000,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	73.450.000,00					
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					20.400.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	20.400.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					73.450.000,00					
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	73.450.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					53.894.020,00					Kecamatan Paninggaran
		Terpeliharanya BMD penunjang dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai standar layanan.					53.894.020,00					Kecamatan Paninggaran
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	7.788.020,00					
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	1.500.000,00					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	41.686.000,00					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	5 Unit	2.920.000,00					
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					41.686.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	41.686.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					1.500.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	1.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					2.920.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	4 Unit	2.920.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					7.788.020,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	2 Unit	7.788.020,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
310.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**38.448.300,00**					
		Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal					***38.448.300,00***					
			1.Persentase lembaga masyarakat aktif	100 %	100 %	100 %	38.448.300,00					
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					38.448.300,00					Lembaga Kemasyarakatan
		Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa antar pemangku kepentingan dengan rencana dan laporan yang terdokumentasi.					38.448.300,00					Lembaga Kemasyarakatan
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	8.448.300,00					
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					8.448.300,00					
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	8.448.300,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					30.000.000,00					
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
311.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**19.300.000,00**					
		Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum					***19.300.000,00***					
			1.Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas di tingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	19.300.000,00					
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					19.300.000,00					Kelompok Masyarakat
		Terselenggaranya koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan secara berkesinambungan.					19.300.000,00					Kelompok Masyarakat
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	19.300.000,00					
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					19.300.000,00					
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	19.300.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
312.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**25.298.980,00**					
		Meningkatnya efektifitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi					***25.298.980,00***					
			1.Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan	100 %	100 %	100 %	25.298.980,00					
			2.Persentase pelaksanaan urusan Kepala Daerah yang ditugaskan ditingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	25.298.980,00					
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					25.298.980,00					Kelompok Masyarakat
		Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah lengkap dengan dokumen pelaksanaan dan laporan.					25.298.980,00					Kelompok Masyarakat
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	80 Orang	80 Orang	80 Orang	25.298.980,00					
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					25.298.980,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	80 Orang	80 Orang	50 Orang	25.298.980,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
313.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**25.250.000,00**					
		Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif dan akuntabel					***25.250.000,00***					
			1.Persentase dokumen/laporan pembinaan dan pengawasan desa yang disusun sesuai standar pelaporan	100 %	100 %	100 %	25.250.000,00					
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					25.250.000,00					Desa
		Terfasilitasinya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa melalui rekomendasi dan koordinasi yang tercatat dan ditindaklanjuti.					25.250.000,00					Desa
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	0 Dokumen	14 Dokumen	20.000.000,00					
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.250.000,00					
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					5.250.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.250.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					20.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	0 Dokumen	13 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
		Kecamatan Kesesi					**2.556.407.000,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**2.556.407.000,00**					
	7.01	**KECAMATAN**					**2.556.407.000,00**					
314.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**2.346.896.000,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.					***2.330.896.000,00***					
			1.Presentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	2.330.896.000,00					
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.500.000,00					OPD Kecamatan Kesesi
		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan.					1.500.000,00					OPD Kecamatan Kesesi
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1.500.000,00					
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	0,00					
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1.500.000,00					
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0,00					
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	0 Laporan	0,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.052.564.000,00					OPD Kecamatan Kesesi
		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, akuntabel, dan tepat waktu.					2.052.564.000,00					OPD Kecamatan Kesesi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	46.834.000,00					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	2.005.730.000,00					
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.005.730.000,00					
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	18 Orang/bulan	17 Orang/bulan	2.005.730.000,00	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					46.834.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	46.834.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0,00					ASN di Lingkungan Kecamatan Kesesi
		Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah secara tertib.					0,00					ASN di Lingkungan Kecamatan Kesesi
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00					
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					0,00					
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					86.179.000,00					OPD Kecamatan Kesesi
		Terselenggaranya layanan administrasi umum perkantoran yang tertib dan andal.					86.179.000,00					OPD Kecamatan Kesesi
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.800.000,00					
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	20.479.000,00					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	25.900.000,00					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	8.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	20.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	8.000.000,00					
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					20.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					8.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	8.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					8.000.000,00					
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	8.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					20.479.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	20.479.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					25.900.000,00					
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	25.900.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					3.800.000,00					
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.800.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					27.722.050,00					OPD Kecamatan Kesesi
		Terpenuhinya kebutuhan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai spesifikasi dan ketentuan.					27.722.050,00					OPD Kecamatan Kesesi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	2 Unit	3 Unit	10.016.050,00					
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	1 Unit	2 Unit	17.706.000,00					
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					10.016.050,00					
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	2 Unit	15 Unit	10.016.050,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					17.706.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	1 Unit	4 Unit	17.706.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					107.900.000,00					OPD Kecamatan Kesesi
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran operasional perangkat daerah.					107.900.000,00					OPD Kecamatan Kesesi
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	34.200.000,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	73.700.000,00					
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					34.200.000,00					
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	34.200.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					73.700.000,00					
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	73.700.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					71.030.950,00					OPD Kecamatan Kesesi
		Terpeliharanya BMD penunjang dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai standar layanan.					71.030.950,00					OPD Kecamatan Kesesi
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	19.983.950,00					
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	3 Unit	2.100.000,00					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	40.947.000,00					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	12 Unit	8.000.000,00					
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					40.947.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	40.947.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					2.100.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	3 Unit	2.100.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					8.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	13 Unit	8.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					19.983.950,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	19.983.950,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
315.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**74.000.000,00**					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal.					***74.000.000,00***					
			1.Persentase lembaga masyarakat aktif	100 %	100 %	100 %	74.000.000,00					
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					74.000.000,00					Desa di Lingkungan Kecamatan Kesesi
		Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa antar pemangku kepentingan dengan rencana dan laporan yang terdokumentasi.					74.000.000,00					Desa di Lingkungan Kecamatan Kesesi
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	60.000.000,00					
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	14.000.000,00					
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					14.000.000,00					
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	14.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					60.000.000,00					
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	60.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
316.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**30.920.000,00**					
		Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum					***30.920.000,00***					
			1.Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas di tingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	30.920.000,00					
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					30.920.000,00					Semua Wilayah Kecamatan Kesesi
		Terselenggaranya koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan secara berkesinambungan.					30.920.000,00					Semua Wilayah Kecamatan Kesesi
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	30.920.000,00					
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					30.920.000,00					
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	30.920.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
317.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**59.091.000,00**					
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi					***59.091.000,00***					
			1.Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan	100 %	100 %	100 %	59.091.000,00					
			1.Persentase pelaksanaan urusan Kepala Daerah yang ditugaskan ditingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	59.091.000,00					
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					59.091.000,00					Masyarakat Kecamatan Kesesi
		Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah lengkap dengan dokumen pelaksanaan dan laporan.					59.091.000,00					Masyarakat Kecamatan Kesesi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 Orang	150 Orang	150 Orang	59.091.000,00					
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					59.091.000,00					
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 Orang	150 Orang	690 Orang	59.091.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
318.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**45.500.000,00**					
		Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel					***40.500.000,00***					
			1.Persentase dokumen/laporan pembinaan dan pengawasan desa yang disusun sesuai standar pelaporan	100 %	100 %	100 %	40.500.000,00					
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					45.500.000,00					Desa di Lingkungan Kecamatan Kesesi
		Terfasilitasinya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa melalui rekomendasi dan koordinasi yang tercatat dan ditindaklanjuti.					45.500.000,00					Desa di Lingkungan Kecamatan Kesesi
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2 Dokumen	1 Dokumen	20 Dokumen	25.500.000,00					
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	46 Dokumen	46 Dokumen	46 Dokumen	5.000.000,00					
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00					
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	23 Laporan	23 Laporan	23 Laporan	10.000.000,00					
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa					5.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan regulasi dan insentif daerah untuk mempercepat investasi dan inovasi pembangunan.	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					5.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	46 Dokumen	46 Dokumen	46 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					25.500.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2 Dokumen	1 Dokumen	20 Dokumen	25.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					10.000.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	23 Laporan	23 Laporan	23 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan peran BUMDes, koperasi, dan lembaga ekonomi lokal sebagai motor penggerak ekonomi inklusif.	
		Kecamatan Petungkriyono					**2.427.596.800,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**2.427.596.800,00**					
	7.01	**KECAMATAN**					**2.427.596.800,00**					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
319.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**2.254.229.210,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah					***2.254.229.210,00***					
			1.Presentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	2.254.229.210,00					
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.088.909.000,00					ASN di Kecamatan Petungkriyono
		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, akuntabel, dan tepat waktu.					2.088.909.000,00					ASN di Kecamatan Petungkriyono
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.048.909.000,00					
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.048.909.000,00					
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.048.909.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					40.000.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					20.414.490,00					Masyarakat Kecamatan Petungkriyono
		Terselenggaranya layanan administrasi umum perkantoran yang tertib dan andal.					20.414.490,00					Masyarakat Kecamatan Petungkriyono
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	4.480.500,00					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	4.972.800,00					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	5.961.190,00					
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	5.000.000,00					
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					5.961.190,00					
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	5.961.190,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					5.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	2 Paket	5.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					4.972.800,00					
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	4.972.800,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					4.480.500,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	4.480.500,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0,00					Masyarakat Kecamatan Petungkriyono

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terpenuhinya kebutuhan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai spesifikasi dan ketentuan.					0,00					Masyarakat Kecamatan Petungkriyono
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	2 Unit	2 Unit	0,00					
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0,00					
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	2 Unit	2 Unit	0,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					91.361.000,00					Masyarakat Kecamatan Petungkriyono
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran operasional perangkat daerah.					91.361.000,00					Masyarakat Kecamatan Petungkriyono
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	16.491.000,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	74.870.000,00					
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					16.491.000,00					
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	16.491.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					74.870.000,00					
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	74.870.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					53.544.720,00					ASN di Kecamatan Petungkriyono
		Terpeliharanya BMD penunjang dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai standar layanan.					53.544.720,00					ASN di Kecamatan Petungkriyono
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	10.220.000,00					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	40.143.500,00					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3.181.220,00					
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					40.143.500,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	40.143.500,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					3.181.220,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	4 Unit	3.181.220,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					10.220.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	10.220.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
320.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**25.570.990,00**					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel					***25.570.990,00***					
			1.Persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100 %	100 %	100 %	25.570.990,00					
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan					25.570.990,00					Masyarakat Kecamatan Petungkriyono
		Terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan secara terarah, terdokumentasi, dan tepat waktu.					25.570.990,00					Masyarakat Kecamatan Petungkriyono
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	25.570.990,00					
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					25.570.990,00					
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100 Laporan	100 Laporan	5 Laporan	25.570.990,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
321.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**43.000.000,00**					
		Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal					***43.000.000,00***					
			1.Persentase lembaga masyarakat aktif	100 %	100 %	100 %	43.000.000,00					
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					43.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Petungkriyono
		Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa antar pemangku kepentingan dengan rencana dan laporan yang terdokumentasi.					43.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Petungkriyono
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00					
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	13.000.000,00					
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					13.000.000,00					
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	13.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					30.000.000,00					
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	30.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
322.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**28.000.000,00**					
		Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum					***28.000.000,00***					
			1.Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas di tingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	28.000.000,00					
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					28.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Petungkriyono
		Terselenggaranya koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan secara berkesinambungan.					28.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Petungkriyono
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	28.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					28.000.000,00					
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	28.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
323.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**45.000.000,00**					
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi					***45.000.000,00***					
			1.Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan	100 %	100 %	100 %	45.000.000,00					
			2.Persentase pelaksanaan urusan Kepala Daerah yang ditugaskan ditingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	45.000.000,00					
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					45.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Petungkriyono
		Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah lengkap dengan dokumen pelaksanaan dan laporan.					45.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Petungkriyono
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 Orang	150 Orang	150 Orang	45.000.000,00					
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					45.000.000,00					
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 Orang	150 Orang	150 Orang	45.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
324.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**31.796.600,00**					
		Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel					***31.796.600,00***					
			1.Persentase dokumen/laporan pembinaan dan pengawasan desa yang disusun sesuai standar pelaporan	100 %	100 %	100 %	31.796.600,00					
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					31.796.600,00					Masyarakat Kecamatan Petungkriyono
		Terfasilitasinya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa melalui rekomendasi dan koordinasi yang tercatat dan ditindaklanjuti.					31.796.600,00					Masyarakat Kecamatan Petungkriyono
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	1 Dokumen	7 Dokumen	20.000.000,00					
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	6.016.600,00					
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	5.780.000,00					
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					6.016.600,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	6.016.600,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					20.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	1 Dokumen	7 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					5.780.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	5.780.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.	
		Kecamatan Wonokerto					**2.914.374.900,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**2.914.374.900,00**					
	7.01	**KECAMATAN**					**2.914.374.900,00**					
325.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**2.728.706.700,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi,keuangan, sarana prasarana serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.					***2.728.706.700,00***					
			1.Presentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	2.728.706.700,00					
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.509.453.000,00					OPD Kecamatan Wonokerto
		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, akuntabel, dan tepat waktu.					2.509.453.000,00					OPD Kecamatan Wonokerto
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	50.360.000,00					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2.459.093.000,00					
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.459.093.000,00					
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2.459.093.000,00	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					50.360.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	50.360.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					51.971.500,00					OPD Kecamatan Wonokerto
		Terselenggaranya layanan administrasi umum perkantoran yang tertib dan andal.					51.971.500,00					OPD Kecamatan Wonokerto
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	120 Laporan	120 Laporan	25.000.000,00					
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	8.835.000,00					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	3.800.000,00					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0,00					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	10.336.500,00					
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0,00					
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					0,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					10.336.500,00					
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	10.336.500,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					0,00					
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					8.835.000,00					
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	8.835.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					3.800.000,00					
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	3.800.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					4.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					25.000.000,00					
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	120 Laporan	120 Laporan	25.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					21.840.000,00					OPD Kecamatan Wonokerto
		Terpenuhinya kebutuhan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai spesifikasi dan ketentuan.					21.840.000,00					OPD Kecamatan Wonokerto
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	21.840.000,00					
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					21.840.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	1 Unit	21.840.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					82.685.000,00					OPD Kecamatan Wonokerto
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran operasional perangkat daerah.					82.685.000,00					OPD Kecamatan Wonokerto
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	9.735.000,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	72.950.000,00					
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					9.735.000,00					
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	9.735.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					72.950.000,00					
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	72.950.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					62.757.200,00					OPD Kecamatan Wonokerto
		Terpeliharanya BMD penunjang dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai standar layanan.					62.757.200,00					OPD Kecamatan Wonokerto
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	13.695.000,00					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	4 Unit	41.388.200,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	14 Unit	14 Unit	7.674.000,00					
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					41.388.200,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	4 Unit	41.388.200,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					7.674.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	14 Unit	14 Unit	7.674.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					13.695.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	13.695.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
326.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**60.100.000,00**					
		Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal					***60.100.000,00***					
			1.Persentase lembaga masyarakat aktif	100 %	100 %	100 %	60.100.000,00					
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					60.100.000,00					Lembaga Kemasyarakatan
		Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa antar pemangku kepentingan dengan rencana dan laporan yang terdokumentasi					60.100.000,00					Lembaga Kemasyarakatan
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	50.000.000,00					
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	10.100.000,00					
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					10.100.000,00					
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	10.100.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					50.000.000,00					
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11 Laporan	11 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.	
327.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**33.800.000,00**					
		Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum					***33.800.000,00***					
			1.Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas di tingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	33.800.000,00					
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					33.800.000,00					Masyarakat
		Terselenggaranya koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan secara berkesinambungan.					33.800.000,00					Masyarakat
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	33.800.000,00					
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					33.800.000,00					
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	33.800.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
328.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**54.848.200,00**					
		Meningkatnya efektifitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi					***54.848.200,00***					
			1.Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan	100 %	100 %	100 %	54.848.200,00					
			2.Persentase pelaksanaan urusan Kepala Daerah yang ditugaskan ditingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	54.848.200,00					
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					54.848.200,00					Masyarakat Kecamatan Wonokerto
		Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah lengkap dengan dokumen pelaksanaan dan laporan.					54.848.200,00					Masyarakat Kecamatan Wonokerto
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	100 Orang	100 Orang	54.848.200,00					
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					54.848.200,00					
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	100 Orang	100 Orang	54.848.200,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
329.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**36.920.000,00**					
		Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif dan akuntabel					***36.920.000,00***					
			1.Persentase dokumen/laporan pembinaan dan pengawasan desa yang disusun sesuai standar pelaporan	100 %	100 %	100 %	36.920.000,00					
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					36.920.000,00					Pemerintahan Desa Kecamatan Wonokerto
		Terfasilitasinya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa melalui rekomendasi dan koordinasi yang tercatat dan ditindaklanjuti.					36.920.000,00					Pemerintahan Desa Kecamatan Wonokerto
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00					
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	8.300.000,00					
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	8.620.000,00					
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					8.300.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	8.300.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					20.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					8.620.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	8.620.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan peran BUMDes, koperasi, dan lembaga ekonomi lokal sebagai motor penggerak ekonomi inklusif.	
		Kecamatan Siwalan					**2.671.536.500,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**2.671.536.500,00**					
	7.01	**KECAMATAN**					**2.671.536.500,00**					
330.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**2.522.013.120,00**					
		Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					***2.522.013.120,00***					
			1.Presentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	2.522.013.120,00					
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.636.500,00					KECAMATAN SIWALAN
		-					3.636.500,00					KECAMATAN SIWALAN
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3.636.500,00					
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3.636.500,00					
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	3.636.500,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.313.092.000,00					KECAMATAN SIWALAN
		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, akuntabel, dan tepat waktu.					2.313.092.000,00					KECAMATAN SIWALAN
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	38.040.000,00					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	2.275.052.000,00					
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.275.052.000,00					
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	12 Orang/bulan	2.275.052.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					38.040.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	38.040.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					74.937.120,00					KECAMATAN SIWALAN
		Terselenggaranya layanan administrasi umum perkantoran yang tertib dan andal.					74.937.120,00					KECAMATAN SIWALAN
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000,00					
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	18.534.950,00					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	23.030.000,00					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4.579.120,00					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	18 Paket	18 Paket	15.740.450,00					
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	22 Paket	22 Paket	22 Paket	12.052.600,00					
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					15.740.450,00					
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	18 Paket	18 Paket	15.740.450,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					12.052.600,00					
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	22 Paket	22 Paket	22 Paket	12.052.600,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					4.579.120,00					
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4.579.120,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					18.534.950,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	18.534.950,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					23.030.000,00					
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	23.030.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1.000.000,00					
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					12.000.000,00					KECAMATAN SIWALAN
		-					12.000.000,00					KECAMATAN SIWALAN
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	0,00					
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	12.000.000,00					
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0,00					
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	1 Unit	0,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					12.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	1 Unit	12.000.000,00	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					73.660.000,00					KECAMATAN SIWALAN
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran operasional perangkat daerah.					73.660.000,00					KECAMATAN SIWALAN
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	25.260.000,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	48.400.000,00					
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					25.260.000,00					
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	25.260.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					48.400.000,00					
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	48.400.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					44.687.500,00					KECAMATAN SIWALAN
		-					44.687.500,00					KECAMATAN SIWALAN
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	26.615.400,00					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	4 Unit	7.590.000,00					
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					26.615.400,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	4 Unit	26.615.400,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					7.590.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	4 Unit	7.590.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	
		-					44.687.500,00					KECAMATAN SIWALAN
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	10.482.100,00					
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					10.482.100,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	4 Unit	10.482.100,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	
331.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**37.688.050,00**					
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.					***37.688.050,00***					
			1.Persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100 %	100 %	100 %	37.688.050,00					
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					37.688.050,00					Kecamatan Siwalan
		Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat secara tertib, akuntabel.					37.688.050,00					Kecamatan Siwalan
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	37.688.050,00					
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					37.688.050,00					
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	37.688.050,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	
332.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**42.664.500,00**					
		Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal.					***42.664.500,00***					
			1.Persentase lembaga masyarakat aktif	100 %	100 %	100 %	42.664.500,00					
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					35.664.500,00					Kecamatan Siwalan
		-					35.664.500,00					Kecamatan Siwalan
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00					
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	10.664.500,00					
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					10.664.500,00					
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	10.664.500,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					25.000.000,00					
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					7.000.000,00					KECAMATAN SIWALAN
		-					7.000.000,00					KECAMATAN SIWALAN
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	7.000.000,00					
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					7.000.000,00					
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	7.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	
333.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**21.573.000,00**					
		Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum					***21.573.000,00***					
			1.Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas di tingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	21.573.000,00					
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					21.573.000,00					KECAMATAN SIWALAN
		Terselenggaranya koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan secara berkesinambungan.					21.573.000,00					KECAMATAN SIWALAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	21.573.000,00					
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					21.573.000,00					
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	21.573.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	
334.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**29.492.830,00**					
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi.					***29.492.830,00***					
			1.Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan	100 %	100 %	100 %	29.492.830,00					
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					29.492.830,00					KECAMATAN SIWALAN
		-					29.492.830,00					KECAMATAN SIWALAN
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60 Orang	60 Orang	60 Orang	29.492.830,00					
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					29.492.830,00					
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60 Orang	60 Orang	60 Orang	29.492.830,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	
335.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**18.105.000,00**					
		Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.					***18.105.000,00***					
			1.Persentase dokumen/laporan pembinaan dan pengawasan desa yang disusun sesuai standar pelaporan	100 %	100 %	100 %	18.105.000,00					
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					18.105.000,00					KECAMATAN SIWALAN
		-					18.105.000,00					KECAMATAN SIWALAN
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	9 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00					
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	3.675.000,00					
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	4.430.000,00					
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					4.430.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	4.430.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					10.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					3.675.000,00					
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	3.675.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	
		Kecamatan Karangdadap					**2.571.908.000,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**2.571.908.000,00**					
	7.01	**KECAMATAN**					**2.571.908.000,00**					
336.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**2.384.608.000,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah					***2.352.608.000,00***					
			1.Presentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	2.352.608.000,00					
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5.000.000,00					Kecamatan Karangdadap
		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan.					5.000.000,00					Kecamatan Karangdadap
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	2 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00					
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5.000.000,00					
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	2 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.113.015.000,00					Kecamatan Karangdadap
		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, akuntabel, dan tepat waktu.					2.113.015.000,00					Kecamatan Karangdadap
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	44.590.000,00					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.068.425.000,00					
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.068.425.000,00					
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.068.425.000,00	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					44.590.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	44.590.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					87.213.800,00					Kecamatan Karangdadap
		Terselenggaranya layanan administrasi umum perkantoran yang tertib dan andal.					87.213.800,00					Kecamatan Karangdadap
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	17.000.000,00					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	200 Laporan	200 Laporan	25.000.000,00					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	5.000.000,00					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	0 Paket	5.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	17.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	18.213.800,00					
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					5.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	4 Paket	5.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					17.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	17.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					18.213.800,00					
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	18.213.800,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					5.000.000,00					
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	5.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					17.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	17.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					25.000.000,00					
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	200 Laporan	200 Laporan	25.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					21.000.000,00					Kecamatan Karangdadap
		Terpenuhinya kebutuhan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai spesifikasi dan ketentuan.					21.000.000,00					Kecamatan Karangdadap
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	8 Unit	0 Unit	5.000.000,00					
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	2 Unit	2 Unit	16.000.000,00					
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					5.000.000,00					
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	8 Unit	3 Unit	5.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					16.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	2 Unit	1 Unit	16.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					93.790.000,00					Kecamatan Karangdadap
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran operasional perangkat daerah.					93.790.000,00					Kecamatan Karangdadap
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	18.540.000,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	75.250.000,00					
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					18.540.000,00					
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	18.540.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					75.250.000,00					
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	75.250.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					64.589.200,00					Kecamatan Karangdadap
		Terpeliharanya BMD penunjang dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai standar layanan.					64.589.200,00					Kecamatan Karangdadap
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	4 Unit	15.000.000,00					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	4 Unit	4 Unit	39.589.200,00					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	8 Unit	8 Unit	10.000.000,00					
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					39.589.200,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	4 Unit	4 Unit	39.589.200,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					10.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	8 Unit	10 Unit	10.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					15.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	3 Unit	15.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
337.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**8.000.000,00**					
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.					***8.000.000,00***					
			1.Persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100 %	100% %	100% %	8.000.000,00					
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					8.000.000,00					11 Desa se-Kec. Karangdadap
		Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat secara tertib, akuntabel.					8.000.000,00					11 Desa se-Kec. Karangdadap
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	8.000.000,00					
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					8.000.000,00					
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
338.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**53.000.000,00**					
		Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal					***53.000.000,00***					
			1.Persentase lembaga masyarakat aktif	100 %	100 %	100 %	53.000.000,00					
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					53.000.000,00					11 Desa se-Kec. Karangdadap
		Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa antar pemangku kepentingan dengan rencana dan laporan yang terdokumentasi.					53.000.000,00					11 Desa se-Kec. Karangdadap
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	40.000.000,00					
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	13.000.000,00					
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					13.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	13.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengintegrasikan pendekatan gender, penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan anak dan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					40.000.000,00					
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	40.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
339.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**24.300.000,00**					
		Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum					***24.300.000,00***					
			1.Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas di tingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	24.300.000,00					
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					24.300.000,00					11 Desa se-Kec. Karangdadap
		Terselenggaranya koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan secara berkesinambungan.					24.300.000,00					11 Desa se-Kec. Karangdadap
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	24.300.000,00					
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					24.300.000,00					
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	24.300.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
340.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**70.000.000,00**					
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi.					***70.000.000,00***					
			2.Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan	100 %	100 %	100 %	70.000.000,00					
			2.Persentase pelaksanaan urusan Kepala Daerah yang ditugaskan ditingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	70.000.000,00					
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					70.000.000,00					11 Desa se-Kec. Karangdadap
		Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah lengkap dengan dokumen pelaksanaan dan laporan.					70.000.000,00					11 Desa se-Kec. Karangdadap
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	670 Orang	650 Orang	650 Orang	70.000.000,00					
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					70.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	670 Orang	650 Orang	700 Orang	70.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
341.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**32.000.000,00**					
		Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.					***32.000.000,00***					
			1.Persentase dokumen/laporan pembinaan dan pengawasan desa yang disusun sesuai standar pelaporan	100 %	100 %	100 %	32.000.000,00					
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					32.000.000,00					11 Desa se-Kec. Karangdadap
		Terfasilitasinya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa melalui rekomendasi dan koordinasi yang tercatat dan ditindaklanjuti.					32.000.000,00					11 Desa se-Kec. Karangdadap
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00					
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	12.000.000,00					
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					12.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					20.000.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					**5.574.703.500,00**					
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**					**5.574.703.500,00**					
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**					**5.574.703.500,00**					
342.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**2.912.599.000,00**					
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah					***2.902.099.000,00***					
			1.Presentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	2.902.099.000,00					
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5.000.000,00					Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu
		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan.					5.000.000,00					Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00					
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	2.500.000,00					
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.500.000,00					
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.500.000,00					
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	2.500.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.628.711.000,00					Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, akuntabel, dan tepat waktu.					2.628.711.000,00					Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	69.000.000,00					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2.559.711.000,00					
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.559.711.000,00					
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2.559.711.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	8.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					69.000.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	69.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.000.000,00					Ketercapaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah secara tertib.					5.000.000,00					Ketercapaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	2 Orang	2 Orang	5.000.000,00					
	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					5.000.000,00					
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	2 Orang	2 Orang	5.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					81.800.000,00					Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Terselenggaranya layanan administrasi umum perkantoran yang tertib dan andal.					81.800.000,00					Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	13.200.000,00					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240 Laporan	240 Laporan	240 Laporan	50.000.000,00					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	7.600.000,00					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	3.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	5.000.000,00					
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	3.000.000,00					
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					3.000.000,00					
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	3.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					5.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	5.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					3.000.000,00					
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	3.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					7.600.000,00					
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	7.600.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					13.200.000,00					
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	13.200.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					50.000.000,00					
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240 Laporan	240 Laporan	240 Laporan	50.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					4.994.000,00					Tercapaianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan
		Terpenuhinya kebutuhan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai spesifikasi dan ketentuan.					4.994.000,00					Tercapaianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	2 Unit	4.994.000,00					
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					4.994.000,00					
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	4.994.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					77.984.000,00					Ketercapaian penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran operasional perangkat daerah.					77.984.000,00					Ketercapaian penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	26.000.000,00					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	51.984.000,00					
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					26.000.000,00					
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	26.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					51.984.000,00					
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	51.984.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					109.110.000,00					Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Terpeliharanya BMD penunjang dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai standar layanan.					109.110.000,00					Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	20.000.000,00					
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	8 Unit	39.900.000,00					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	42.400.000,00					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7 Unit	7 Unit	6.810.000,00					
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					42.400.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	42.400.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					39.900.000,00					
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	8 Unit	39.900.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					6.810.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7 Unit	12 Unit	6.810.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					20.000.000,00					
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	20.000.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
343.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**					**481.176.500,00**					
		Meningkatnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dan karakter kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.					***481.176.500,00***					
			1.Persentase masyarakat yang memperoleh Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	4.69 %	4.64 %	4.66 %	481.176.500,00					
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					481.176.500,00					Masyarakat yang mengikuti kegiatan pemantapan idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
		Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					481.176.500,00					Masyarakat yang mengikuti kegiatan pemantapan idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	45400 Orang	45000 Orang	45100 Orang	251.514.500,00					
			Jumlah Paskibraka	27 Orang	Orang	27 Orang	229.662.000,00					
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					251.514.500,00					
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	45400 Orang	45000 Orang	45100 Orang	251.514.500,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka					229.662.000,00					
		Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	27 Orang	Orang	27 Orang	229.662.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
344.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**					**1.859.485.000,00**					
		Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dan penguatan budaya politik yang sehat dan demokratis.					***1.859.485.000,00***					
			1.Persentase masyarakat yang mengikuti pendidikan Politik dan pengembangan Etika Budaya Berpolitik	5.44 %	3.40 %	4.08 %	1.859.485.000,00					
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					1.859.485.000,00					Masyarakat yang mengikuti Pemantapan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan peningkatan demokrasi & Fasilitasi kelembagaan pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
		Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					1.859.485.000,00					Masyarakat yang mengikuti Pemantapan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan peningkatan demokrasi & Fasilitasi kelembagaan pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	40000 Orang	25000 Orang	30000 Orang	1.859.485.000,00					
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					1.859.485.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	40000 Orang	25000 Orang	30000 Orang	1.859.485.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
345.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**					**97.770.000,00**					
		Meningkatnya peran serta dan kepatuhan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan dan kehidupan bermasyarakat yang tertib dan harmonis.					***97.770.000,00***					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			1.Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan mendapatkan pengawasan	10 %	10 %	10 %	97.770.000,00					
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					97.770.000,00					Ormas yang mendapatkan Pemantapan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					97.770.000,00					Ormas yang mendapatkan Pemantapan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150 Orang	150 Orang	150 Orang	97.770.000,00					
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					97.770.000,00					
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150 Orang	150 Orang	150 Orang	97.770.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
346.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**					**50.153.000,00**					
		Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap pengaruh negatif yang mengancam stabilitas ekonomi, sosial, dan budaya daerah.					***50.153.000,00***					
			1.Persentase masyarakat yang memperoleh pembinaan dan pengembangan Ketahanan Bangsa	1.20 %	1.09 %	1.12 %	50.153.000,00					
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					50.153.000,00					Masyarakat yang memperoleh Pemantapan bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya
		Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					50.153.000,00					Masyarakat yang memperoleh Pemantapan bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4400 Orang	4000 Orang	4100 Orang	50.153.000,00					
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					50.153.000,00					
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4400 Orang	4000 Orang	4100 Orang	50.153.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
347.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**					**173.520.000,00**					
		Meningkatnya kewaspadaan nasional dan kapasitas daerah dalam mencegah serta menangani potensi konflik sosial.					***173.520.000,00***					
			1.Persentase Penanganan Konflik Sosial	100 %	100 %	100 %	173.520.000,00					
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					173.520.000,00					Laporan situasi daerah
		Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					173.520.000,00					Laporan situasi daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	106.140.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
										NASIONAL	DAERAH	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang	100 Orang	100 Orang	67.380.000,00					
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					67.380.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang	100 Orang	100 Orang	67.380.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota					106.140.000,00					
		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	106.140.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
		J U M L A H					**2.370.581.713.060,00**					
		Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					173.520.000,00					Laporan situasi daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	106.140.000,00					
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang	100 Orang	100 Orang	67.380.000,00					
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					67.380.000,00					
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang	100 Orang	100 Orang	67.380.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota					106.140.000,00					
		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	106.140.000,00	Kab. Pekalongan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.	
		J U M L A H					**2.370.581.713.060,00**					

DAFTAR POKOK - POKOK PIKIRAN DPRD PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2027

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1	1794543	NASHIH SYARIFUDDIN S.K.M., M.A.P	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan banyak yang rusak sehingga dibutuhkan peningkatan jalan poros Desa Ketitang Kidul - Desa Duwet Kecamatan Bojong	Desa Ketitang Kidul - Desa Duwet Kecamatan Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
2	1802183	Drs.H. Abdul Munir	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SD)	Untuk meningkatkan kapasitas sekolah,memenuhi kebutuhan ruang belajar yang memahadi akibat peningkatan jumlah siswa	MI Rengas Desa Rengas Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
3	1802278	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Lonjakan Jumlah Siswa Kelebihan Kapasitas sehingga dibutuhkan PembangunanTPQ Miftahul Ulum untuk menjadi 2 lantai	TPQ Miftahul Ulum Gang 9 Desa Pekajangan Kecamatan Kedungwuni , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
4	1802319	Drs.H. Abdul Munir	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SMP)	Lonjakan Jumlah Siswa Kelebihan Kapasitas sehingga dibutuhkan Ruang Kelas Baru 2 lokal	SMP Lukman Hakim Desa Gejlik Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
5	1802405	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan kepada lembaga/organisasi masyarakat	Kurangnya Alat Alat Kesehatan di Organisasi Fatayat sehingga dibutuhkan alat bantu Kesehatan	Desa Karangdowo Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
6	1802461	Drs.H. Abdul Munir	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (SD)	Dikarenakan di SD Plus Baitul Rahman sering terdampak ROB sehingga halaman SD tersebut butuh di tinggikan	SD Plus Baitul Rahman Kecamatan Wonokerto, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
7	1802541	Drs.H. Abdul Munir	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SD)	Lonjakan Jumlah Siswa Kelebihan Kapasitas sehingga dibutuhkan Ruang Kelas Baru	MIS Silirejo Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
8	1802596	Drs.H. Abdul Munir	Peningkatan Jalan Produksi Tambak	Jalan Sudah Rusak dan Tidak Layak Untuk di Lewati	Desa Api-Api Kecamatan Wonokerto, Kab. Pekalongan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
9	1802779	Drs.H. Abdul Munir	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SD)	Lonjakan Jumlah Siswa Kelebihan Kapasitas sehingga dibutuhkan Ruang Kelas Baru	MIS Pacar Desa Pacar Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
10	1806608	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan jalan, sehingga membahayakan pemakai jalan	Desa Watusalam, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
11	1806620	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan jalan, sehingga membahayakan bagi pemakai jalan	Desa Simbang Wetan, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
12	1806629	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan jalan, sehingga membahayakan bagi pemakai jalan	Kelurahan Bligo Kec. Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
13	1806661	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Bangunan TPQ Desa Watusalam, kondisinya perlu di rehab untuk kenyamanan dan keamanan dalam proses belajar	Desa Watusalam, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
14	1806682	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Kondisi rumah membahayakan serta tidak sehat untuk di jadikan tempat tinggal	Desa Watusalam, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
15	1806688	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Kondisi rumah membahayakan serta tidak sehat untuk di jadikan tempat tinggal	Desa Simbang Wetan, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
16	1806693	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Kondisi rumah membahayakan serta tidak sehat untuk di jadikan tempat tinggal	Kel. Bligo Kec. Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
17	1806720	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Kondisi rumah membahayakan serta tidak sehat untuk di jadikan tempat tinggal	Desa di Semua Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
18	1806726	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Kondisi rumah membahayakan serta tidak sehat untuk di jadikan tempat tinggal	Kecamatan Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
19	1806741	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan jalan, sehingga membahayakan bagi pemakai jalan	Desa se Kecamatan Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
20	1806771	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Sarana infrastruktur pertanian yang belum mendukung kelancaran pertanian	Desa se Kecamatan Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
21	1806775	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Sarana infrastruktur pertanian yang belum mendukung kelancaran pertanian	Desa se Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
22	1806780	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Sarana infrastruktur pertanian yang belum mendukung kelancaran pertanian	Desa se Kecamatan Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
23	1806814	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Polsek Karangdadap belum memiliki Musholla	Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
24	1806845	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan jalan, sehingga membahayakan bagi pemakai jalan	Desa Karangdadap, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
25	1806860	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan jalan, sehingga membahayakan bagi pemakai jalan	Desa Logandeng, Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
26	1806869	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan jalan, sehingga membahayakan bagi pemakai jalan	Desa Kalilembu, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
27	1806885	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Kondisi rumah membahayakan serta tidak sehat untuk di jadikan tempat tinggal	11 Desa di Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
28	1806893	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Kondisi rumah membahayakan serta tidak sehat untuk di jadikan tempat tinggal	14 Desa di Kecamatan Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
29	1806917	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Pembangunan ruang guru / kepala sekolah / TU (TK/PAUD)	PAUD Desa Jetak lengkong belum memiliki bangunan	Desa Jetak Lengkong, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
30	1806927	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan jalan, sehingga membayahan pemakai jalan	Desa Kaligawe, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
31	1806958	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SMP)	Ruang Kelas tidak cukup untuk menampung siswa SMP Negeri 1 Karangdadap	Desa Pagumenganmas Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
32	1806976	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan jalan, sehingga membahayakan pemakai jalan	Desa Pagumenganmas, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
33	1806987	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan jalan, sehingga membahayakan pemakai jalan	Dukuh Gumengan, Desa Pagumenganmas Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
34	1806995	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan jalan, sehingga membahayakan pemakai jalan	Dukuh Donolayan, Desa Pagumenganmas Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
35	1807021	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Pengadaan Peralatan Belajar Mengajar (Laptop) (TK/PAUD)	TK Desa Podo kekurangan APE	Desa Podo Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Perlengkapan PAUD
36	1807030	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Pengadaan Peralatan Belajar Mengajar (Laptop) (TK/PAUD)	TK Pertiwi kekurangan APE	Desa Pagumenganmas Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Perlengkapan PAUD
37	1807045	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Pengadaan Peralatan Belajar Mengajar (Laptop) (TK/PAUD)	TK Dahlia kekuranan APE	Desa Kebonrowopucang, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Perlengkapan PAUD
38	1807056	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Pengadaan Peralatan Belajar Mengajar (Laptop) (TK/PAUD)	POS PAUD Dahlia tidak memiliki APE	Kebonrowopucang. Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Perlengkapan PAUD
39	1807077	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Pengadaan Peralatan Belajar Mengajar (Laptop) (TK/PAUD)	PAUD Desa Sampih belum memiliki Laptop dan Printer	Desa Sampih, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Perlengkapan PAUD
40	1807081	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Pengadaan Peralatan Belajar Mengajar (Laptop) (TK/PAUD)	RA Muslimat kekurangan APE untuk belajar mengajar	Desa Pagumenganmas, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Perlengkapan PAUD
41	1807653	Slamet Nurudin., SE, M.AP	REHABILITASI BENDUNG IRIGASI	Rusaknya Bendungan SONTO	Desa Kebonrowopucang, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
42	1807668	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Rusaknya jalan usaha tani	Desa Kebonrowopucang, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
43	1807679	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan jalan, sehingga membahayakan pemakai jalan	Dukuh Kepulen RT 002/05 Desa Kebonrowopucang, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
44	1807703	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Bantuan kepada Organisasi Keolahragaan	Hibah kepada Cabang olahraga PERCASI Kab.Pekalongan, untuk meningkatkan prestasi cabang olahraga	PEKALONGAN, Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Usia Dini dan Dasar
45	1807710	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Bantuan kepada Organisasi Keolahragaan	Hibah untuk Cabor PSSI/ ASKAB Pekalongan	Pekalongan, Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Usia Dini dan Dasar
46	1807724	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Kondisi rumah membahayakan serta tidak sehat untuk di jadikan tempat tinggal	Desa Kebonrowopucang, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
47	1807740	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SD)	Pembangunan peningkatan gedung MIWS. MI	Desa Pagumenganmas, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
48	1807750	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Pengadaan Peralatan Belajar Mengajar (Laptop) (TK/PAUD)	Bantuan APE terhadap sekolah PAUD danTK di wilayah Kecamatan Karangdadap	Desa se Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Perlengkapan PAUD
49	1807760	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan jalan, sehingga membahayakan pemakai jalan	Dukuh Kranggan Desa Kebonsari, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
50	1807767	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan jalan, sehingga membahayakan pemakai jalan	Dukuh Kwayuan, Desa Kebonsari, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
51	1807776	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan jalan, sehingga membahayakan pemakai jalan	Dukuh Klekor Desa Pakumbulan, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
52	1807786	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Bantuan bangunan gedung TPQ	Desa Jrebengkembang, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
53	1807798	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan jalan, sehingga membahayakan pemakai jalan	Dukuh Karangsari-Dukuh Kembangan. Desa Jrebengkembang. Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
54	1807805	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan jalan, sehingga membahayakan pemakai jalan	Dukuh Kedolon -mDukuh Sabaran. Desa Jrebengkembang, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
55	1807812	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan jalan, sehingga membahayakan pemakai jalan	Desa Pegandon, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
56	1807855	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan poros Desa (Ruas paraneman. Kebonrowopucang - Proto) rusak, sehingga harus di lakukan pengaspalan jalan	Desa Kebonrowopucang, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
57	1807878	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan poros Desa (Ruas Kedungkebo - Mesoyi) rusak, sehingga harus di lakukan pengaspalan jalan	Desa Kedungkebo, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
58	1807936	Slamet Nurudin., SE, M.AP	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Tebing sungai rowobulus sering longsor	Desa Kebonrowopucang, RT004/015. Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
59	1807959	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Kurangnya fasilitas untuk olahraga, dibutuhkan HIbah Penataan lapangan multifungsi di Yayasan YMI Wonopringgo	Kecamatan Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
60	1807989	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Rehabilitasi Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (SD)	Rawannya keamanan dan ketertiban di MI Des Pagumenganmas	Desa Pagumenganmas Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
61	1808173	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (SD)	Pembangunan pagar MI Desa Pagumenganmas, meminimalisir kerawanan keamanan dan menciptakan ketertiban	Desa Pagumenganmas, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
62	1808198	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Bankeu pengaspalan jalan utama Desa Pagumenganmas	Pagumenganmas, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
63	1808235	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Tanah jalan desa labil, sehingga butuh bankeu untuk betonisasi	Pagumenganmas, Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
64	1811939	Drs.H. Abdul Munir	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SD)	Lonjakan Jumlah Siswa Kelebihan Kapasitas sehingga dibutuhkan Ruang Kelas Baru	MI Walisongo Desa Logandeng, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
65	1812136	Drs.H. Abdul Munir	PEMBANGUNAN JARINGAN AIR MINUM PERPIPAAN (SPAM)	Terjadinya krisis pasokan air bersih akibat sering rusaknya sarana sumur dalam di Pekuncen serta kondisi jaringan perpipaan yang sudah tidak optimal dalam menjangkau kawasan padat pemukiman di Wira Baru, Sehingga dibuuthkan SPAM	Perum Bumi Wira Baru 1, Pekuncen, Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
66	1812235	Drs.H. Abdul Munir	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan sudah rusak dan tidak layak untuk dilewati	Perum Arrayan, Desa Nyamok, Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
67	1812410	Drs.H. Abdul Munir	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Sarana prasarana ibadah rusak dan daya tampung masjid sudah tidak memadai, Sehingga dibutuhkan Hibah	Masjid Baitul Muqorrobin Desa Karangasem, Kecamatan Talun, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
68	1823989	NASHIH SYARIFUDDIN S.K.M., M.A.P	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Untuk mempermudah akses para petani dalam memperluas jalur distribusi hasil pertanian sehingga dibutuhkan Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Sumub Lor Kecamatan Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
69	1823993	NASHIH SYARIFUDDIN S.K.M., M.A.P	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Untuk mempermudah akses para petani dalam memperluas jalur distribusi hasil pertanian sehingga dibutuhkan Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dk. Sijeruk Rt 01 Rw 05 Desa Sijeruk Kecamatan Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
70	1823996	NASHIH SYARIFUDDIN S.K.M., M.A.P	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Dengan adanya sistem irigasi yang baik, petani dapat mengatur pasokan air sesuai kebutuhan tanaman, sehingga pertumbuhan tanaman menjadi optimal sehingga dibutuhkan Pembangunan Jaringan Irigasi	Block Sibango Desa kebang Kerep Kecamatan Sragi , Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
71	1824010	NASHIH SYARIFUDDIN S.K.M., M.A.P	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Untuk mempermudah akses para petani dalam memperluas jalur distribusi hasil pertanian sehingga dibutuhkan Pembangunan Jalan Usaha Tan	Block Ketagihan Santri mati Desa Kebang Kereb Kecamatan Sragi , Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
72	1824111	NASHIH SYARIFUDDIN S.K.M., M.A.P	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Untuk mempermudah akses para petani dalam memperluas jalur distribusi hasil pertanian	Dk. Genteong Kulon Desa Kalijambe Kecamatan Sragi , Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
73	1824129	NASHIH SYARIFUDDIN S.K.M., M.A.P	Bantuan prasarana persampahan Kontainer dan Gerobak Sampah	Bau tidak sedap dan pencemaran lingkungan (air/tanah), risiko korosi yang menyebabkan sampah tercecer, keterbatasan anggaran perbaikan, serta potensi menjadi sarang penyakit dan sampah liar sehingga dibutuhkan KOntaioner Bak sampah	Desa Kedung jaran Kecamatan Sragi , Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
74	1824168	NASHIH SYARIFUDDIN S.K.M., M.A.P	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Tingginya biaya perawatan dan pembangunan infrastruktur, kerusakan jaringan irigasi yang mengakibatkan distribusi air tidak merata, serta potensi dampak lingkungan seperti salinisasi tanah dan pencemaran air, sehingga dibutuhkan Rehabilitasi Irigasi	Desa Kedung Jaran Kecamatan Sragi , Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
75	1824189	NASHIH SYARIFUDDIN S.K.M., M.A.P	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	buruknya pengelolaan saluran, yang mengakibatkan banjir rutin, kerusakan infrastruktur, dan gangguan kesehatan lingkungan sehingga dibutuhkan Pembangunan Drainase	Desa Kedung Jaran kecamatan Sragi , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
76	1824204	NASHIH SYARIFUDDIN S.K.M., M.A.P	Bantuan sarana pendukung pertanian (Alat-alat pertanian : Traktor dan alat pertanian lainnya)	Kehilangan hasil padi yang tinggi saat proses pengeringan/penggilingan, keterbatasan permodalan, dan kurangnya teknologi modern seperti dryer. Sehingga dibutuhkan Revitalisasi Penggilingan Padi	Desa Kedung Jaran Kecamatan Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
77	1824208	NASHIH SYARIFUDDIN S.K.M., M.A.P	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Tingginya biaya perawatan dan pembangunan infrastruktur, kerusakan jaringan irigasi yang mengakibatkan distribusi air tidak merata, serta potensi dampak lingkungan seperti salinisasi tanah dan pencemaran air, sehingga dibutuhkan Rehabilitasi Irigasi	DK 2 Desa Kedung jaran kecamatan Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
78	1824215	NASHIH SYARIFUDDIN S.K.M., M.A.P	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Pembangunan jalan usaha tani krusial untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi distribusi hasil panen, dan mengurangi biaya logistik bagi petani sehingga dibutuhkan Pembangunan Jalan usaha Tani	Desa Kedung Jaran Kecamatan Sragi , Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
79	1824229	NASHIH SYARIFUDDIN S.K.M., M.A.P	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Pembangunan jalan usaha tani krusial untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi distribusi hasil panen, dan mengurangi biaya logistik bagi petani Sehingga dibutuhkan pengecoran Jalan usaha tani	Desa Kedung Jaran kecamatan Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
80	1824243	NASHIH SYARIFUDDIN S.K.M., M.A.P	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Keterbatasan anggaran daerah, tingginya biaya operasional dan pemeliharaan, serta kurangnya koordinasi antarinstansi sehingga dibutuhkan LPJU	Desa Kedung Jaran kecamatan Sragi , Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
81	1824272	NASHIH SYARIFUDDIN S.K.M., M.A.P	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Untuk mempermudah akses para petani dalam memperluas jalur distribusi hasil pertanian sehingga dibutuhkan Pembangunan Jalan Usaha Tan	Dk. Gombong Desa Bulak Pelem Kecamatan Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
82	1824297	NASHIH SYARIFUDDIN S.K.M., M.A.P	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Tingginya risiko banjir dan genangan air yang merusak infrastruktur, melumpuhkan ekonomi, dan menjadi sumber penyakit. Sehingga dibutuhkan Pembangunan Drainase	Desa Bulak Pelem Kecamatan Sragi , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
83	1824308	NASHIH SYARIFUDDIN S.K.M., M.A.P	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Tingginya risiko banjir dan genangan air yang merusak infrastruktur, melumpuhkan ekonomi, dan menjadi sumber penyakit. Sehingga dibutuhkan Pembangunan Drainase	Desa Sumub Lor Kecamatan Sragi , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
84	1824365	NASHIH SYARIFUDDIN S.K.M., M.A.P	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Hibah masjid itu penting agar masjid aman secara hukum, kuat secara pengelolaan, dan berkelnajutan untuk umat sehingga dibutuhkan Hibah Masjid	Masjid Al Hikmah Desa Pantianom kecamatan Bojong, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
85	1824402	NASHIH SYARIFUDDIN S.K.M., M.A.P	REHABILITASI BENDUNG IRIGASI	Bendungan yang tidak terawat dapat menyebabkan kerusakan harta benda hingga hilangnya nyawa jika jebol. Sehingga dibutuhkan Rehabilitasi Bendung	Desa pantianom Kecamatan Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
86	1824419	NASHIH SYARIFUDDIN S.K.M., M.A.P	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Tingginya risiko banjir dan genangan air yang merusak infrastruktur, melumpuhkan ekonomi, dan menjadi sumber penyakit. Sehingga dibutuhkan Pembangunan Drainase	Desa Randumuktiwaren Kecamatan Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
87	1824430	NASHIH SYARIFUDDIN S.K.M., M.A.P	REHABILITASI BENDUNG IRIGASI	Bendungan yang tidak terawat dapat menyebabkan kerusakan harta benda hingga hilangnya nyawa jika jebol. Sehingga dibutuhkan Rehabilitasi Bendung	Bendung Dk. Sudikampir Desa Wangandowo Kecamatan Bojong , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
88	1824477	NASHIH SYARIFUDDIN S.K.M., M.A.P	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan banyak yang rusak sehingga dibutuhkan peningkatan jalan poros Desa Ketitang Lor - Desa Duwet Kecamatan Bojong	Desa ketitang Lor - Desa Duwet Kecamatan Bojong , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
89	1824497	NASHIH SYARIFUDDIN S.K.M., M.A.P	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Untuk mempermudah akses para petani dalam memperluas jalur distribusi hasil pertanian sehingga dibutuhkan Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Sidosari kecamatan Kesesi , Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
90	1824502	NASHIH SYARIFUDDIN S.K.M., M.A.P	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Untuk mempermudah akses para petani dalam memperluas jalur distribusi hasil pertanian sehingga dibutuhkan Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Sukorejo kecamatan Kesesi , Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
91	1824517	NASHIH SYARIFUDDIN S.K.M., M.A.P	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Tingginya risiko banjir dan genangan air yang merusak infrastruktur, melumpuhkan ekonomi, dan menjadi sumber penyakit. Sehingga dibutuhkan Pembangunan Drainase	Desa Karyomukti kecamatan Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
92	1827862	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan bibit ternak	Kurangnya Sumber Daya Alam di Bagian Perternakan di Daerah Tersebut,di Karenakan Daerah Tersebut Berada di Daerah Pesisir, Sehingga dibutuhkan Bantuan Bibit Ternak	Desa Api Api Kecamatan Wonokerto, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
93	1828337	Taufiq Rizal	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Rusaknya Jaringan Irigasi Pertanian	Desa Limbangan KEc. Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
94	1828350	Taufiq Rizal	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Rusaknya Jaringan Irigasi Pertanian	Desa Lolong, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
95	1828362	Taufiq Rizal	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Rusaknya Jaringan Irigasi Pertanian	Desa Sidomukti, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
96	1828375	Taufiq Rizal	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Rusaknya Jaringan Irigasi Pertanian	Desa Sokosari, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
97	1828393	Taufiq Rizal	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Rusaknya Jaringan Irigasi Pertanian	Desa Wonosari, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
98	1828445	Taufiq Rizal	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Rusaknya Jaringan Irigasi Pertanian	Wilayah Kecamatan Petungkriyono, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
99	1828455	Taufiq Rizal	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Rusaknya Jaringan Irigasi Pertanian	Wilayah Kecamatan Lebakbarang, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
100	1828495	Taufiq Rizal	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum adanya Jalan Usaha Tani	Desa Limbangan, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
101	1828503	Taufiq Rizal	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum adanya Jalan Usaha Tani	Desa Lolong, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
102	1828516	Taufiq Rizal	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum adanya Jalan Usaha Tani	Desa Sidomukti, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
103	1828520	Taufiq Rizal	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum adanya Jalan Usaha Tani	Desa Sokosari, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
104	1828531	Taufiq Rizal	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum adanya Jalan Usaha Tani	Desa Wonosari, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
105	1828544	Taufiq Rizal	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum adanya Jalan Usaha Tani	Wilayah Kecamatan Petungkriyono, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
106	1828553	Taufiq Rizal	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum adanya Jalan Usaha Tani	Wilayah Kecamatan Lebakbarang, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
107	1828577	Taufiq Rizal	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya LPJU	Desa Limbangan, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
108	1828587	Taufiq Rizal	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya LPJU	Desa Lolong, Kec.Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
109	1828595	Taufiq Rizal	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya LPJU	Desa Sidomukti, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
110	1828637	Taufiq Rizal	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya LPJU	Desa Sokosari, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
111	1828650	Taufiq Rizal	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya LPJU	Desa Wonosari, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
112	1828664	Taufiq Rizal	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya LPJU	Wilayah Kecamatan Petungkriyono, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
113	1828668	Taufiq Rizal	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya LPJU	Wilayah Kecamatan Lebakbarang, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
114	1828698	Taufiq Rizal	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Adanya Rumah tidak layak huni	Wilayah Kecamatan Petungkriyono, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
115	1828705	Taufiq Rizal	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Adanya Rumah tidak layak huni	Wilayah Kecamatan Lebakbarang, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
116	1828711	Taufiq Rizal	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Adanya Rumah tidak layak huni	Wilayah Kecamatan Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
117	1828747	Taufiq Rizal	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SD)	Kurangnya Ruang Kelas Baru SDN. 01 Limbangan	Desa Limbangan, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
118	1828785	Taufiq Rizal	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Kurangnya Ruang Kelas Baru SDN. 02 Wonosari	Desa Wonosari, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
119	1828801	Taufiq Rizal	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (SD)	Rusak/Robohnya Pagar Bumi Sekolah SDN. 02 Wonosari	Desa Wonosari, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
120	1828826	Taufiq Rizal	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (TK/PAUD)	Belum adanya tempat bermain anak KB. Harapan Bunda	Desa Sidomukti, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
121	1828843	Taufiq Rizal	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (TK/PAUD)	Kurangnya Kelas TPQ Matholi'ul Anwar	Desa Sidomukti, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
122	1828860	Taufiq Rizal	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Rusak/kurangnya sarana peribadatan Musholla Al Barokah	Dk. Serangkantung, Desa Wonosari, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
123	1828873	Taufiq Rizal	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Rusak/kurangnya sarana peribadatan Musholla Baiturrohman	Dk. Doplang, Desa Wonosari, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
124	1828882	Taufiq Rizal	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Rusak/kurangnya sarana peribadatan Musholla An Nur	dk. Bangundadi lor, Desa Pododadi, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
125	1828897	Taufiq Rizal	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah (TK/PAUD)	Rusaknya beberapa bagian kelas PAUD/TK Tunas Harapan	Desa Sokosari, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
126	1828918	Taufiq Rizal	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Tergerusnya tebing sungai sengkarang karena banjir	Desa Lolong, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
127	1829111	Taufiq Rizal	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Rusak/tidak berfungsinya Drainase Jalan Kabupaten (Drainase jalan limbangan-kulu)	Desa Limbangan, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
128	1829126	Taufiq Rizal	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Kondisi Jalan Poros Limbangan-Gutomo yang rusak parah	Desa Limbangan-Gutomo. Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
129	1829143	Taufiq Rizal	Bantuan bibit ternak	Kelompok Tani/Ternak Dkh. Gunungcilik, butuh bantuan ternak	Desa Songgodadi, Kec. Petungkriyono, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
130	1829159	Taufiq Rizal	Bantuan bibit ternak	Kurangnya permodalan utk pengembangan Kelompok Tani/Ternak Karya Abadi	Desa Tlogohendro, Kec. Petungkriyono, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
131	1829185	Taufiq Rizal	Bantuan bibit ternak	Kurangnya permodalan utk pengembangan Kelompok Tani/Ternak Sukamaju	Desa Tlogohendro, Petungkriyono, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
132	1829201	Taufiq Rizal	Bantuan bibit ternak	Kurangnya permodalan utk pengembangan Kelompok Tani/Ternak Tlogo	Tlogohendro, Kec. Petungkriyono, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
133	1829208	Taufiq Rizal	Bantuan bibit ternak	Kurangnya permodalan utk pengembangan Kelompok Tani/Ternak Gunung Beser	Desa Tlogohendro, Kecamatan Petungkriyono, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
134	1829226	Taufiq Rizal	Bantuan bibit ternak	Kurangnya permodalan utk pengembangan Kelompok Tani/Ternak Glidigan	Ds.Tlogohendro, Petungkriyono, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
135	1829239	Taufiq Rizal	Bantuan bibit ternak	Kurangnya permodalan utk pengembangan Kelompok Tani/Ternak Inti Mekar Anugrah	Desa Tlogopakis, Petungkriyono, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
136	1829249	Taufiq Rizal	Bantuan bibit ternak	Kurangnya permodalan utk pengembangan Kelompok Tani/Ternak Tani Mulyo	Desa Songgodadi, Petungkriyono, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
137	1829260	Taufiq Rizal	Bantuan bibit ternak	Kurangnya permodalan utk pengembangan Kelompok Tani/Ternak Banyu Minger	Desa Simego, Petungkriyono, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
138	1829268	Taufiq Rizal	Bantuan bibit ternak	Kurangnya permodalan utk pengembangan Kelompok Tani/Ternak Pedawang Timur	Desa Pedawang, Petungkriyono, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
139	1829274	Taufiq Rizal	Bantuan bibit ternak	Kurangnya permodalan utk pengembangan Kelompok Tani/Ternak Tirta Sari Bumi	Desa Karangsari, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
140	1829293	Taufiq Rizal	Bantuan bibit ternak	Kurangnya permodalan utk pengembangan Kelompok Tani/Ternak Dadi Jaya Lestari Wonodadi	Ds. Songgodadi, Petungkriyono, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
141	1829320	Taufiq Rizal	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan	Kurangnya permodalan utk pengembangan Kelompok Perikanan Tembelan	Desa Kayupuring, Petungjriyono, Kab. Pekalongan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
142	1829328	Taufiq Rizal	Bantuan bibit/ benih/ tanaman pertanian	Budidaya Tanaman Padi, Kelompok Tani Gotong Royong	Desa Sidomukti, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
143	1829403	Taufiq Rizal	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Rusaknya Jaringan Irigasi Pertanian	Desa Karangsari. Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
144	1829413	Taufiq Rizal	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Rusaknya Jaringan Irigasi Pertanian	Desa Kayugeritan, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
145	1829420	Taufiq Rizal	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Rusaknya Jaringan Irigasi Pertanian	Desa Pododadi, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
146	1829432	Taufiq Rizal	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Rusaknya Jaringan Irigasi Pertanian	Desa Banjarejo, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
147	1829437	Taufiq Rizal	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Rusaknya Jaringan Irigasi Pertanian	Desa Pedawang, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
148	1829444	Taufiq Rizal	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Rusaknya Jaringan Irigasi Pertanian	Wilayah Kecamatan Talun, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
149	1829452	Taufiq Rizal	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Rusaknya Jaringan Irigasi Pertanian	wilayah Kecamatan Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
150	1829465	Taufiq Rizal	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum ada jalan usaha tani	Desa Karangsari, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
151	1829471	Taufiq Rizal	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum ada jalan usaha tani	Desa kayugeritan,Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
152	1829480	Taufiq Rizal	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum ada jalan usaha tani	Desa Pododadi, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
153	1829487	Taufiq Rizal	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum ada jalan usaha tani	Desa Banjarejo, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
154	1829495	Taufiq Rizal	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum ada jalan usaha tani	Desa Pedawang, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
155	1829503	Taufiq Rizal	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum ada jalan usaha tani	Wilayah Kecamatan Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
156	1829522	Taufiq Rizal	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum ada jalan usaha tani	Desa Se Kec. Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
157	1829532	Taufiq Rizal	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya LPJU	Desa Karangsari, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
158	1829538	Taufiq Rizal	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya LPJU	Desa Pododadi, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
159	1829542	Taufiq Rizal	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya LPJU	Desa Banjarejo, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
160	1829546	Taufiq Rizal	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya LPJU	Desa Pedawang, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
161	1829549	Taufiq Rizal	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya LPJU	Wilayah Kec.Talun, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
162	1829551	Taufiq Rizal	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya LPJU	Wilayah Kec. Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
163	1829559	Taufiq Rizal	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Adanya Rumah tidak layak huni	Wilayah Kec. Talun, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
164	1829564	Taufiq Rizal	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Adanya Rumah tidak layak huni	Wilayah Kec. Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
165	1829571	Taufiq Rizal	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Bantuan Hibah Masjid Jami Al Asy'ari	Desa Karangsari, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
166	1829582	Taufiq Rizal	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SMP)	Pembangunan RKB SMPN 01 Karanganyar	Desa Karangsari, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
167	1829583	Taufiq Rizal	Pengadaan Mebel (SMP)	Pengadaan Meubelair SMPN 01 Karanganyar	Desa Karangsari, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Mebel Sekolah
168	1829595	Taufiq Rizal	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Bantuan Sarpras (Komputer/meubelair) RA Muslimat NU Karangsari	Ds. Karangsari, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
169	1829602	Taufiq Rizal	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (SD)	Bantuan Sarpras (Komputer/meubelair) MII Karangsari	Ds.Karangsari, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
170	1829607	Taufiq Rizal	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (SMP)	Bantuan Sarpras (Komputer/meubelair) MTs Ma'arif Karanganyar	Desa Karangsari, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
171	1829612	Taufiq Rizal	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (SD)	Bantuan Sarpras (Komputer/meubelair) SDN. 02 Kayugeritan	Desa Kayugeritan, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
172	1829620	Taufiq Rizal	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Rusak/kurangnya sarana peribadatan Masjid Baiturrohman Dkh. Cokrah	Desa Pododadi, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
173	1829626	Taufiq Rizal	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Rusak/kurangnya sarana peribadatan Musholla Al Ikhlas Dukuh Mesoyi	Desa Mesoyi, Talun, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
174	1829635	Taufiq Rizal	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Rusak/kurangnya sarana peribadatan Musholla Al Ikhlas Dk. Kejamas	Desa Banjarsari, Talun, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
175	1829640	Taufiq Rizal	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum adanya Jalan Usaha Tani	Desa Jolotigo, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
176	1829652	Taufiq Rizal	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SD)	Kurangnya Kelas Baru MI Ds. Mesoyi Talun	Desa Mesoyi, Talun, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
177	1829660	Taufiq Rizal	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Tergerusnya tebing sungai sengkarang karena banjir	Desa Karangsari, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
178	1829665	Taufiq Rizal	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Kondisi Jalan Poros Ds. Pedawang yang rusak	Desa Pedawang, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
179	1829679	Taufiq Rizal	Bantuan prasarana persampahan (Sepeda Motor Tiga Roda)	Kurangnya sarpras pengangkut sampah	Wilayah Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
180	1829684	Taufiq Rizal	Bantuan prasarana persampahan (Sepeda Motor Tiga Roda)	Kurangnya sarpras pengangkut sampah	wilayah Kec. Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
181	1829686	Taufiq Rizal	Bantuan prasarana persampahan (Sepeda Motor Tiga Roda)	Kurangnya sarpras pengangkut sampah	wilayah Kec. Talun, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
182	1829694	Taufiq Rizal	Bantuan prasarana persampahan (Sepeda Motor Tiga Roda)	Kurangnya sarpras pengangkut sampah	wilayah Kec. Lebakbarang, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
183	1829696	Taufiq Rizal	Bantuan prasarana persampahan (Sepeda Motor Tiga Roda)	Kurangnya sarpras pengangkut sampah	wilayah Kec. Petungkriyono, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
184	1829702	Taufiq Rizal	Fasilitasi Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Kurangnya modal usaha	Wilayah Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
185	1829707	Taufiq Rizal	Fasilitasi Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Kurangnya modal usaha	Wilayah Kec. Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
186	1829709	Taufiq Rizal	Fasilitasi Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Kurangnya modal usaha	Wilayah Kec. Talun, Kab. Pekalongan	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
187	1829711	Taufiq Rizal	Fasilitasi Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Kurangnya modal usaha	Wilayah Kec. Lebakbarang, Kab. Pekalongan	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
188	1829713	Taufiq Rizal	Fasilitasi Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Kurangnya modal usaha	Wilayah Kec. Petungkriyono, Kab. Pekalongan	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
189	1829720	Taufiq Rizal	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SMP)	Rusaknya Ruang Kelas SMPN 02 Karanganyar	Desa Legokkalong, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
190	1829727	Taufiq Rizal	Pembangunan ruang guru / kepala sekolah / TU (SD)	Belum adanya Ruang Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Legokkalong	Desa Legokkalong, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
191	1829732	Taufiq Rizal	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (SD)	Bantuan Sarpras (computer/meubelair) SDN 01 Legokkalong	Ds. Legokkalong, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
192	1829738	Taufiq Rizal	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Rusaknya Jalan Lingkungan	Desa Legokkalong, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
193	1829741	Taufiq Rizal	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Rusaknya Jalan Lingkungan	Desa Karanggondang, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
194	1829743	Taufiq Rizal	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Rusaknya Jalan Lingkungan	Desa Kutosari, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
195	1829746	Taufiq Rizal	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Rusaknya Jalan Lingkungan	Desa Gutomo. Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
196	1829749	Taufiq Rizal	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Rusaknya Jalan Lingkungan	Desa Kulu, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
197	1829750	Taufiq Rizal	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Rusaknya Jalan Lingkungan	Desa Karangsari, KAranganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
198	1829752	Taufiq Rizal	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Rusaknya Jalan Lingkungan	Desa Kayugeritan, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
199	1829754	Taufiq Rizal	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Rusaknya Jalan Lingkungan	Desa Pododadi, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
200	1829757	Taufiq Rizal	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Rusaknya Jalan Lingkungan	Desa Banjarejo, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
201	1829764	Taufiq Rizal	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Rusaknya Jalan Lingkungan	Ds Pedawang. Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
202	1829767	Taufiq Rizal	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Rusaknya Jalan Lingkungan	Desa Limbangan, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
203	1829769	Taufiq Rizal	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Rusaknya Jalan Lingkungan	Desa Lolong. Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
204	1829772	Taufiq Rizal	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Rusaknya Jalan Lingkungan	Desa Sidomukti. Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
205	1829774	Taufiq Rizal	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Rusaknya Jalan Lingkungan	Desa Sokosari, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
206	1829777	Taufiq Rizal	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Rusaknya Jalan Lingkungan	Desa Wonosari, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
207	1829866	Taufiq Rizal	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Rusaknya Jaringan Irigasi Pertanian	Desa Legokkalong, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
208	1829870	Taufiq Rizal	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Rusaknya Jaringan Irigasi Pertanian	Desa Karanggondang, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
209	1829877	Taufiq Rizal	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Rusaknya Jaringan Irigasi Pertanian	Desa Kutosari, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
210	1829892	Taufiq Rizal	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Rusaknya Jaringan Irigasi Pertanian	Ds Kutosari, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
211	1829896	Taufiq Rizal	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Rusaknya Jaringan Irigasi Pertanian	Ds Gutomo, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
212	1829900	Taufiq Rizal	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Rusaknya Jaringan Irigasi Pertanian	Ds. Kulu, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
213	1829906	Taufiq Rizal	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum adanya Jalan Usaha Tani	Desa Legokkalong, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
214	1829909	Taufiq Rizal	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum adanya Jalan Usaha Tani	Desa Karanggondang, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
215	1829913	Taufiq Rizal	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum adanya Jalan Usaha Tani	Desa Kutosari, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
216	1829916	Taufiq Rizal	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum adanya Jalan Usaha Tani	Desa Gutomo, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
217	1829920	Taufiq Rizal	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum adanya Jalan Usaha Tani	Desa Kulu, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
218	1829925	Taufiq Rizal	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanyanya LPJU	Desa Legokkalong, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
219	1829929	Taufiq Rizal	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanyanya LPJU	Desa Karanggondang, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
220	1829932	Taufiq Rizal	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanyanya LPJU	Desa Kutosari Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
221	1829933	Taufiq Rizal	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanyanya LPJU	Desa Gutomo, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
222	1829937	Taufiq Rizal	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanyanya LPJU	Desa Kulu, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
223	1829944	Taufiq Rizal	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Rusaknya Jalan Poros Ds. Kutosari Karanganyar	Ds. Kutosari, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
224	1829947	Taufiq Rizal	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Tergerusnya bibir tebing sungai blimbing	Desa Kutosari, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
225	1829951	Taufiq Rizal	Bantuan kepada Kelompok Seni	Kurangnya sarpras Kelompok Seni Turonggo Wahyu Budoyo	Desa Legokkalong, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
226	1829956	Taufiq Rizal	Bantuan kepada Kelompok Seni	Kurangnya sarpras Kelompok Seni Turonggo Rekso Sari Pamuji	Desa Limbangan, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
227	1829964	Taufiq Rizal	Bantuan kepada Kelompok Seni	Kurangnya sarpras Kelompok Seni Ketoprak Dukuhsari	Ds Legokkalong. Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
228	1829969	Taufiq Rizal	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Rusak/kurangnya sarana peribadatan Musholla Al Mujahidin Dk. Sidomukti timur	Desa Sidomukti, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
229	1829974	Taufiq Rizal	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Rusak/kurangnya sarana peribadatan Musholla Baitul Falah Dk. Sidomukti timur	Ds. Sidomukti Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
230	1829979	Taufiq Rizal	Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan	Kurangnya Kegiatan Kepemudaan	Desa Legokkalong, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabpuaten/kota
231	1829981	Taufiq Rizal	Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan	Kurangnya Kegiatan Kepemudaan	Desa Karanggondang, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabpuaten/kota
232	1829982	Taufiq Rizal	Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan	Kurangnya Kegiatan Kepemudaan	Desa Kutosari, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabpuaten/kota
233	1829988	Taufiq Rizal	Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan	Kurangnya Kegiatan Kepemudaan	Desa Gutomo, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabpuaten/kota
234	1829990	Taufiq Rizal	Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan	Kurangnya Kegiatan Kepemudaan	Ds Kulu, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabpuaten/kota
235	1829992	Taufiq Rizal	Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan	Kurangnya Kegiatan Kepemudaan	Ds Karangsari, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabpuaten/kota
236	1829997	Taufiq Rizal	Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan	Kurangnya Kegiatan Kepemudaan	Ds Kayugeritan, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabpuaten/kota
237	1829999	Taufiq Rizal	Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan	Kurangnya Kegiatan Kepemudaan	Ds. Pododadi, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabpuaten/kota

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
238	1830001	Taufiq Rizal	Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan	Kurangnya Kegiatan Kepemudaan	Ds. Banjarejo, karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabpuaten/kota
239	1830004	Taufiq Rizal	Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan	Kurangnya Kegiatan Kepemudaan	Ds.Limbangan,Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabpuaten/kota
240	1830010	Taufiq Rizal	Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan	Kurangnya Kegiatan Kepemudaan	Ds. Lolong, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabpuaten/kota
241	1830012	Taufiq Rizal	Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan	Kurangnya Kegiatan Kepemudaan	Ds. Sidomukti, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabpuaten/kota
242	1830015	Taufiq Rizal	Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan	Kurangnya Kegiatan Kepemudaan	Ds. Sokosari, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabpuaten/kota
243	1830016	Taufiq Rizal	Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan	Kurangnya Kegiatan Kepemudaan	Ds. Wonosari, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabpuaten/kota
244	1830020	Taufiq Rizal	Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan	Kurangnya Kegiatan Kepemudaan	Ds. Songgodadi, Petungkriyono, Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabpuaten/kota
245	1830023	Taufiq Rizal	Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan	Kurangnya Kegiatan Kepemudaan	Ds. Mesoyi, Talun, Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabpuaten/kota
246	1830027	Taufiq Rizal	Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan	Kurangnya Kegiatan Kepemudaan	Ds. Tlogohendro, Petungkriyono, Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabpuaten/kota
247	1830028	Taufiq Rizal	Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan	Kurangnya Kegiatan Kepemudaan	Ds. Tlogopakis, Petungkriyono, Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabpuaten/kota
248	1830039	Taufiq Rizal	Bantuan kepada Organisasi Keolahragaan	Kurangnya Sarpras Olah Raga SSB Bina Muda	Desa Karangsari, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
249	1830045	Taufiq Rizal	Bantuan kepada Organisasi Keolahragaan	Kurangnya Sarpras Askab PSSI Kab. Pekalongan	Askab Kabupaten Pekalongan, Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Usia Dini dan Dasar
250	1830049	Taufiq Rizal	Bantuan kepada Organisasi Keolahragaan	Kurangnya Sarpras Cabor Tenis Meja PTMSI	Kabupaten Pekalongan, Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Usia Dini dan Dasar
251	1832889	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	tidak adanya penerangan jalan sehingga jalan gelap	Desa Lumeneng, Kec. Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
252	1832916	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya lampu penerangan jalan sehingga jalan gelap	Desa Kaliombo, Kec. Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
253	1832924	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya lampu penerangan jalan sehingga jalan gelap	Dk. Binangun Desa Werdi Kec. paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
254	1832983	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya penerangan jalan, sehingga jalanan Gelap	Desa Windu Aji Kec. Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
255	1833017	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya penerangan jalan, jalanan gelap	Desa Sabarwangi Kec. Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
256	1833038	Drs.H. Abdul Munir	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SD)	Lonjakan Jumlah Siswa Kelebihan Kapasitas sehingga dibutuhkan Ruang Kelas Baru	MI Desa Bugangan Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
257	1833043	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya penerangan jalan, jalanan gelap	Dk. Bumiroso desa Tenogo Kec. paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
258	1833060	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya Lampu penerangan jalan, jalanan gelap	RT 06 Kel. kajen, Kec. kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
259	1833073	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya Lampu penerangan jalan, jalanan gelap	RT 10 Kel. Kajen, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
260	1833086	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya Lampu penerangan jalan, jalanan gelap	Desa Sinanggoh Prendeng Kec. Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
261	1833114	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya Lampu penerangan jalan, jalanan gelap	Desa Klasem Kec. kandangserang, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
262	1833126	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya Lampu penerangan jalan, jalanan gelap	Desa Karanggondang kec. Kandangserang, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
263	1833137	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya Lampu penerangan jalan, jalanan gelap	Desa Sukoharjo Kec. kandangserang, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
264	1833147	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya Lampu penerangan jalan, jalanan gelap	Desa Kutorojo Kec. Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
265	1833154	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya Lampu penerangan jalan, jalanan gelap	Desa Sambiroto, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
266	1833173	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya Lampu penerangan jalan, jalanan gelap	Desa Kandangserang, Kec. kandangserang, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
267	1833180	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya Lampu penerangan jalan, jalanan gelap	Desa Pringsurat Kec. Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
268	1833198	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya Lampu penerangan jalan, jalanan gelap	Dk. Karangtuang Desa Tanjungsari menuju Desa Tanjungkulon Kec. Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
269	1833206	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya Lampu penerangan jalan, jalanan gelap	Dk. Yosorejo, Linggo Asri, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
270	1833250	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya Lampu penerangan jalan, jalanan gelap	Jl. Poros Desa, Kelurahan kajen Menuju Dk. Gutoko, Desa Kebonagung, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
271	1833259	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya Lampu penerangan jalan, jalanan gelap	RT 08 Kelurahan Kajen, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
272	1833278	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya Lampu penerangan jalan, jalanan gelap	Desa tanjungsari, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
273	1833305	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya Lampu penerangan jalan, jalanan gelap	Desa Bodas Kec. Kandangserang, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
274	1833314	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya Lampu penerangan jalan, jalanan gelap	Desa Bojongkoneng, Kec. kandangserang, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
275	1833319	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya Lampu penerangan jalan, jalanan gelap	Desa Bubak Kec. Kandangserang, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
276	1833348	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya Lampu penerangan jalan, jalanan gelap	Desa Garungwiyoro, kec. Kandangserang, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
277	1833350	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan prasarana persampahan (Sepeda Motor Tiga Roda)	Untuk meningkatkan efesiensi operasional,terutama dalam pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan, Sehingga dibutuhkan Sepeda Motor sampah tiga roda	Desa Kalirejo Kecamatan Talun, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
278	1833362	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya Lampu penerangan jalan, jalanan gelap	Desa gembong, Kec. Kandangserang, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
279	1833402	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya Lampu penerangan jalan, jalanan gelap	Desa Lambur Kec. Kandangserang, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
280	1833410	Drs.H. Abdul Munir	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Sarana prasarana ibadah rusak dan daya tampung masjid sudah tidak memadai, Sehingga dibutuhkan Hibah Masjid	Masjid Raudlatul Mutaqin Desa Ujung Negoro Kecamatan Kesesi, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
281	1833415	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya Lampu penerangan jalan, jalanan gelap	Desa Luragung, Kec. kandangserang, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
282	1833420	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya Lampu penerangan jalan, jalanan gelap	Desa Tajur, Kec. Kandangserang, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
283	1833442	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya Lampu penerangan jalan, jalanan gelap	Desa Trajumas Kec. Kandangserang, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
284	1833461	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya Lampu penerangan jalan, jalanan gelap	Desa Wangkelang, Kec. Kandangserang, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
285	1833500	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya Lampu penerangan jalan, jalanan gelap	RT 1 dan RT 3 Desa Linggoasri Kec. kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
286	1833504	Drs.H. Abdul Munir	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Meningkatkan keselamatan dan keamanan pengguna jalan dimalam hari, serta memperpanjang umur pakai, Sehingga dibutuhkan LPJU	Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
287	1833530	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya Lampu penerangan jalan, jalanan gelap	Dk. Purwodadi Desa Kutorojo Kec. kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
288	1833539	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya Lampu penerangan jalan, jalanan gelap	Desa Kutorojo Kec. kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
289	1833559	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya Lampu penerangan jalan, jalanan gelap	Desa Tambakroto Kec. kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
290	1833561	Drs.H. Abdul Munir	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan sudah tidak layak pakai, Sehingga dibutuhkan Pengaspalan Jalan	Perbatasan Desa Bondansari dan Desa Warulor Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
291	1833572	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya Lampu penerangan jalan, jalanan gelap	Dk. Karangan Selatan Desa Gandarum Kec. Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
292	1833580	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya Lampu penerangan jalan, jalanan gelap	Desa brengkolang Kec. kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
293	1833588	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya Lampu penerangan jalan, jalanan gelap	Desa Gejlig Kec. kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
294	1833599	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya Lampu penerangan jalan, jalanan gelap	Desa gandarum, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
295	1833725	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya Lampu penerangan jalan, jalanan gelap	Desa kajongan Kec. Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
296	1833742	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya Lampu penerangan jalan, jalanan gelap	Desa Kutorojo kec. kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
297	1833747	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya Lampu penerangan jalan, jalanan gelap	Desa Kalijoyo kec. Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
298	1833757	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya Lampu penerangan jalan, jalanan gelap	Desa Kebonagung Kec. kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
299	1833762	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya Lampu penerangan jalan, jalanan gelap	Desa Kutorejo Kec. kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
300	1833772	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya Lampu penerangan jalan, jalanan gelap	Desa Linggoasri Kec. kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
301	1833781	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya Lampu penerangan jalan, jalanan gelap	Desa Nyamok Kec. kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
302	1833792	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya Lampu penerangan jalan, jalanan gelap	Desa Pekiringanageng Kec. kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
303	1833799	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya Lampu penerangan jalan, jalanan gelap	Desa Pekiringanalit Kec. kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
304	1833805	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya Lampu penerangan jalan, jalanan gelap	Desa Pringsurat Kec. kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
305	1833818	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya Lampu penerangan jalan, jalanan gelap	Desa Rowolaku Kec. kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
306	1833836	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya Lampu penerangan jalan, jalanan gelap	Desa Sokoyoso Kec. kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
307	1833845	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya Lampu penerangan jalan, jalanan gelap	Desa Sangkanjoyo, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
308	1833847	Taufiq Rizal	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Rusak/kurangnya sarana peribadatan Masjid Al Fath	Ds.Karangsari, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
309	1833873	Taufiq Rizal	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (SD)	Kurangnya sarana pembelajaran TPQ Al Asy'ari I, II, III	Ds.Karangsari, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
310	1833890	Taufiq Rizal	Pengadaan Peralatan Belajar Mengajar (Laptop) (SD)	Bantuan Sarpras (Komputer/meubelair) SDN 01 Karangsari	Ds Karangsari, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
311	1833892	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya Lampu penerangan jalan, jalanan gelap	Desa tanjung Kulon kec. kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
312	1833894	Rokhyasin, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tidak adanya Lampu penerangan jalan, jalanan gelap	Desa Wonorejo Kec. kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
313	1833909	Taufiq Rizal	Pengadaan Peralatan Belajar Mengajar (Laptop) (SD)	Bantuan Sarpras (Komputer/meubelair) SDN 02 Karangsari	Desa Karangsari, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
314	1833927	Taufiq Rizal	Pengadaan Peralatan Belajar Mengajar (Laptop) (SD)	Bantuan Sarpras (Komputer/meubelair) SDN 01 Sidomukti	Ds. Sidomukti, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
315	1833945	Taufiq Rizal	Pengadaan Peralatan Belajar Mengajar (Laptop) (SD)	Bantuan Sarpras (Komputer/meubelair) SDN 02 Sidomukti	Desa Sidomukti, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
316	1833956	Taufiq Rizal	Pengadaan Peralatan Belajar Mengajar (Laptop) (SD)	Bantuan Sarpras (Komputer/meubelair) SDN 01 Limbangan	Ds. Limbangan, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
317	1833968	Taufiq Rizal	Pengadaan Peralatan Belajar Mengajar (Laptop) (SMP)	Bantuan Sarpras (Komputer/meubelair) SMPN 02 Karanganyar	Ds. Legokkalong, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
318	1833980	Taufiq Rizal	Pengadaan Peralatan Belajar Mengajar (Laptop) (SD)	Bantuan Sarpras (Komputer/meubelair) SDN 01 Gutomo	Ds. Gutomo, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
319	1833993	Taufiq Rizal	Pengadaan Peralatan Belajar Mengajar (Laptop) (SD)	Bantuan Sarpras (Komputer/meubelair) SDN 02 Gutomo	Desa Gutomo, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
320	1834007	Taufiq Rizal	Pengadaan Peralatan Belajar Mengajar (Laptop) (SD)	Bantuan Sarpras (Komputer/meubelair) MI Gutomo	Desa Gutomo, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
321	1834021	Taufiq Rizal	Pengadaan Peralatan Belajar Mengajar (Laptop) (SD)	Bantuan Sarpras (Komputer/meubelair) MTs Yapik Kutosari Karanganyar	Ds. Kutosari, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
322	1834039	Taufiq Rizal	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SMP)	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Islam YMI Wonopringgo	Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
323	1834050	Taufiq Rizal	Pengadaan Peralatan Belajar Mengajar (Laptop) (SD)	Bantuan Sarpras (Komputer/meubelair) SDN 01 Banjarejo	Ds. Banjarejo, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
324	1834054	Taufiq Rizal	Pengadaan Peralatan Belajar Mengajar (Laptop) (SD)	Bantuan Sarpras (Komputer/meubelair) SDN 02 Banjarejo	Desa Banjarejo, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
325	1834071	Taufiq Rizal	Pengadaan Peralatan Belajar Mengajar (Laptop) (SD)	Bantuan Sarpras (Komputer/meubelair) SDN 02 Wonosari	Ds. Wonosari, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
326	1834086	Taufiq Rizal	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (TK/PAUD)	Kurangnya Ruang Kelas TK Pelita Harapan	Ds. Limbangan, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
327	1834099	Taufiq Rizal	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Kurangnya Ruang Kelas TPQ Tarbiyatul athfal	Ds. Limbangan,Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
328	1834105	Taufiq Rizal	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Rusak/kurangnya sarana peribadatan Musholla An Nur	Desa Limbangan, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
329	1834115	Taufiq Rizal	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Kurangnya Ruang Kelas TPQ Al Hidayah Dk. Temiyang	Ds Legokkalong, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
330	1834127	Taufiq Rizal	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Belum adanya Talud Sungai	Ds. Limbangan, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
331	1834176	Taufiq Rizal	Pengadaan Sarana Budidaya Air Tawar	Kurangnya permodalan (bibit ikan) utk pengembangan kelompok perikanan MINA PERSADA	Ds. Karangsari, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
332	1834201	Taufiq Rizal	Bantuan bibit ternak	Kurangnya permodalan utk pengembangan kelompok tani AGRO PERSADA	Ds. Karangsari, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
333	1834211	Taufiq Rizal	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (SD)	Kurangnya Peralatan Drumband SDN 02 Kulu	Ds. Kulu, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
334	1834233	Taufiq Rizal	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Tergerusnya tebing karena banjir	Ds. Gutomo, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
335	1834256	Taufiq Rizal	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Rusak/tidak berfungsinya Drainase Jalan Lingkungan	Ds. Wonosari, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
336	1834267	Taufiq Rizal	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Rusak/tidak berfungsinya Drainase Jalan Lingkungan	Ds.Sokosari, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
337	1834279	Taufiq Rizal	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Rusak/tidak berfungsinya Drainase Jalan Lingkungan	Ds. Banjarejo, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
338	1834291	Taufiq Rizal	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Rusak/tidak berfungsinya Drainase Jalan Lingkungan	Ds. Kulu, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
339	1834300	Taufiq Rizal	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Rusak/tidak berfungsinya Drainase Jalan Lingkungan	Ds. Gutomo, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
340	1834308	Taufiq Rizal	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Rusak/tidak berfungsinya Drainase Jalan Lingkungan	Ds. Karangsari, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
341	1834317	Taufiq Rizal	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Rusak/tidak berfungsinya Drainase Jalan Lingkungan	Ds. Sidomukti, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
342	1834326	Taufiq Rizal	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Rusak/tidak berfungsinya Drainase Jalan Lingkungan	Ds. Legokkalong, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
343	1834334	Taufiq Rizal	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Rusak/tidak berfungsinya Drainase Jalan Lingkungan	Ds. Kayugeritan, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
344	1834341	Taufiq Rizal	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Rusak/tidak berfungsinya Drainase Jalan Lingkungan	Ds. Lolong, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
345	1834360	Taufiq Rizal	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Rusak/tidak berfungsinya Drainase Jalan Lingkungan	Ds. Karanggondang, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
346	1834365	Taufiq Rizal	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Rusak/tidak berfungsinya Drainase Jalan Lingkungan	Ds. Pododadi, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
347	1834371	Taufiq Rizal	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Rusak/tidak berfungsinya Drainase Jalan Lingkungan	Ds. Pedawang, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
348	1834394	Taufiq Rizal	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Rusak/tidak berfungsinya Drainase Jalan Lingkungan	Ds. Limbangan, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
349	1834406	Taufiq Rizal	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Rusak/tidak berfungsinya Drainase Jalan Lingkungan	Ds. Kutosari, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
350	1834435	Taufiq Rizal	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Rusak/tidak berfungsinya Drainase Jalan Lingkungan	Desa Karangsari, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
351	1834455	Taufiq Rizal	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Rusak/tidak berfungsinya Drainase Jalan Lingkungan	Desa Kayugeritan, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
352	1834928	Taufiq Rizal	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (SD)	Belum adanya Talud SDN 01 Gutomo	Ds. Gutomo, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
353	1834939	Taufiq Rizal	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SD)	Kurangnya Ruang Kelas SDN 02 Sokosari	Ds. Sokosari, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
354	1834972	Taufiq Rizal	Bantuan bibit ternak	Kurangnya permodalan utk pengembangan Kelompok Ternak Harapan	Ds. Soggodadi, Petungkriyono, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
355	1835446	Taufiq Rizal	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota (Hibah/Bantuan)	Belum adanya aula di Polsek Karanganyar	Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
356	1835627	Dodiek Prasetyo	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Kurangnya infrastuktur jalan untuk akses petani	Desa Srinahan, Kec Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
357	1835637	Dodiek Prasetyo	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Rusaknya irigasi pertanian	Desa Srinahan, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
358	1835645	Dodiek Prasetyo	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Terjadi abrasi tanah disekitar aliran sungai kaligosek	Desa Srinahan, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
359	1835657	Dodiek Prasetyo	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Jalan desa belum di terangi lampu jalan	Desa Srinahan, Kec Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
360	1835671	Dodiek Prasetyo	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	masih banyak rumah yang perlu bantuan perbaikan	Desa Srinahan, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
361	1835686	Dodiek Prasetyo	Bantuan prasarana persampahan (Sepeda Motor Tiga Roda)	belum mempunyai alat angkut sampah	Desa Srinahan, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
362	1835699	Dodiek Prasetyo	Fasilitasi Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	perlu bantuan permodalan untuk usaha kecil	Kecamatan KESESI, Kab. Pekalongan	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
363	1835709	Dodiek Prasetyo	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Masih banyak rumah yang perlu perbaikan	Kecamatan Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
364	1835763	Dodiek Prasetyo	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (SD)	Halaman tempat olahraga dan upacara perlu di paving	SDN Watupayung, Desa Watupayung KEc. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
365	1835794	Dodiek Prasetyo	Bantuan prasarana persampahan (Sepeda Motor Tiga Roda)	kurangnya alat angkut sampah	Desa Sidosari, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
366	1836249	Dodiek Prasetyo	Rehabilitasi Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (SD)	Perlu penataan halaman sekolah biar rapj	SDN SIDOSARI, Desa Sidosari, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
367	1836440	Eko Arifiyanto., SH	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Rusaknya Jaringan Irigasi Pertanian	Desa Kulu, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
368	1836449	Eko Arifiyanto., SH	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Rusaknya Jaringan Irigasi Pertanian	Desa Wringin agung, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
369	1836456	Eko Arifiyanto., SH	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Rusaknya Jaringan Irigasi Pertanian	Desa Larikan, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
370	1836463	Eko Arifiyanto., SH	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Rusaknya Jaringan Irigasi Pertanian	Desa Rogoselo, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
371	1836469	Eko Arifiyanto., SH	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Rusaknya Jaringan Irigasi Pertanian	Desa Sawangan, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
372	1836476	Eko Arifiyanto., SH	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Rusaknya Jaringan Irigasi Pertanian	Desa Harjosari, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
373	1836481	Eko Arifiyanto., SH	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Rusaknya Jaringan Irigasi Pertanian	Desa Kutosari, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
374	1836497	Eko Arifiyanto., SH	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Rusaknya Jaringan Irigasi Pertanian	Desa Kalimojosari, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
375	1836517	Eko Arifiyanto., SH	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Rusaknya Jaringan Irigasi Pertanian	Desa Bligorejo, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
376	1836528	Eko Arifiyanto., SH	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Rusaknya Jaringan Irigasi Pertanian	Kel. Doro, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
377	1836536	Eko Arifiyanto., SH	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Rusaknya Jaringan Irigasi Pertanian	Desa Pugangan, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
378	1836546	Eko Arifiyanto., SH	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Rusaknya Jaringan Irigasi Pertanian	Desa Sidoharjo, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
379	1836552	Eko Arifiyanto., SH	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Rusaknya Jaringan Irigasi Pertanian	Desa Sengare, Talun, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
380	1836563	Eko Arifiyanto., SH	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Rusaknya Jaringan Irigasi Pertanian	Desa Krompeng, Talun, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
381	1836570	Eko Arifiyanto., SH	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Rusaknya Jaringan Irigasi Pertanian	Desa Batursari, Talun, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
382	1836593	Eko Arifiyanto., SH	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Rusaknya jaringan irigasi pertanian	Desa Karangasem, Talun, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
383	1836599	Eko Arifiyanto., SH	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Rusaknya jaringan irigasi pertanian	Desa Gandarum, Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
384	1836609	Eko Arifiyanto., SH	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Rusaknya jaringan irigasi pertanian	Desa Domiyang, Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
385	1836618	Eko Arifiyanto., SH	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Rusaknya jaringan irigasi pertanian	Desa Kalibahan, Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
386	1836627	Eko Arifiyanto., SH	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Rusaknya jaringan irigasi pertanian	Wilayah Kec. Lebakbarang, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
387	1836633	Eko Arifiyanto., SH	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Rusaknya jaringan irigasi pertanian	Wilayah Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
388	1836644	Eko Arifiyanto., SH	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Rusaknya jaringan irigasi pertanian	Wilayah Kec. Petungkriyono, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
389	1836689	Eko Arifiyanto., SH	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum adanya Jalan Usaha Tani	Desa Kulu, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
390	1836700	Eko Arifiyanto., SH	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum adanya Jalan Usaha Tani	Desa Wringin Agung, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
391	1836718	Eko Arifiyanto., SH	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum adanya Jalan Usaha Tani	Desa Rogoselo, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
392	1836733	Eko Arifiyanto., SH	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum adanya Jalan Usaha Tani	Desa Larikan, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
393	1836747	Eko Arifiyanto., SH	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum adanya Jalan Usaha Tani	Desa Sawangan, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
394	1836753	Eko Arifiyanto., SH	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum adanya Jalan Usaha Tani	Desa Harjosari, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
395	1836763	Eko Arifiyanto., SH	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum adanya Jalan Usaha Tani	Desa Kutosari, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
396	1836781	Eko Arifiyanto., SH	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum adanya Jalan Usaha Tani	Desa Bligorejo, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
397	1836797	Eko Arifiyanto., SH	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum adanya Jalan Usaha Tani	Desa Kalimojosari, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
398	1836807	Eko Arifiyanto., SH	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum adanya Jalan Usaha Tani	Kelurahan Doro, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
399	1836812	Eko Arifiyanto., SH	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum adanya Jalan Usaha Tani	Desa Pugangan, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
400	1836822	Eko Arifiyanto., SH	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum adanya Jalan Usaha Tani	Desa Sidoharjo, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
401	1836832	Eko Arifiyanto., SH	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum adanya Jalan Usaha Tani	Desa Singare, Talun, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
402	1836844	Eko Arifiyanto., SH	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum adanya Jalan Usaha Tani	Desa Krompeng, Talun, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
403	1836859	Eko Arifiyanto., SH	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum adanya Jalan Usaha Tani	Desa Batursari, Talun, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
404	1836871	Eko Arifiyanto., SH	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum adanya Jalan Usaha Tani	Desa Karangasem, Talun, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
405	1836878	Eko Arifiyanto., SH	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum adanya Jalan Usaha Tani	Desa Gandarum, Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
406	1836895	Eko Arifiyanto., SH	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum adanya Jalan Usaha Tani	Desa Domiyang, Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
407	1836909	Eko Arifiyanto., SH	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum adanya Jalan Usaha Tani	Desa Kaibahan, Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
408	1836919	Eko Arifiyanto., SH	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum adanya Jalan Usaha Tani	Wilayah Kecamatan Lebakbarang, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
409	1836929	Eko Arifiyanto., SH	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum adanya Jalan Usaha Tani	Wilayah Kecamatan Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
410	1836940	Eko Arifiyanto., SH	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum adanya Jalan Usaha Tani	Wilayah Kecamatan Petungkriyono, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
411	1836953	Eko Arifiyanto., SH	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya LPJU	Desa Kulu, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
412	1836974	Eko Arifiyanto., SH	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya LPJU	Desa Wringin Agung, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
413	1836979	Eko Arifiyanto., SH	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya LPJU	Desa Rogoselo, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
414	1836988	Eko Arifiyanto., SH	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya LPJU	Desa Larikan, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
415	1836996	Eko Arifiyanto., SH	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya LPJU	Desa Sawangan, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
416	1837008	Eko Arifiyanto., SH	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya LPJU	Desa Harjosari, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
417	1837017	Eko Arifiyanto., SH	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya LPJU	Desa Kutosari, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
418	1837029	Eko Arifiyanto., SH	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya LPJU	Desa Bligorejo, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
419	1837034	Eko Arifiyanto., SH	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya LPJU	Desa Kalimojosari, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
420	1837044	Eko Arifiyanto., SH	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya LPJU	Kelurahan Doro, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
421	1837056	Eko Arifiyanto., SH	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya LPJU	Desa Pugangan, doro, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
422	1837068	Eko Arifiyanto., SH	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya LPJU	Desa Sidoharjo, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
423	1837076	Eko Arifiyanto., SH	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya LPJU	Desa Sengare, talun, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
424	1837085	Eko Arifiyanto., SH	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya LPJU	Desa Krompeng, Talun, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
425	1837093	Eko Arifiyanto., SH	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya LPJU	Desa Batursari, Talun, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
426	1837108	Eko Arifiyanto., SH	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya LPJU	Desa Karangasem, Talun, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
427	1837110	Eko Arifiyanto., SH	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya LPJU	Desa Gandarum, Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
428	1837141	Eko Arifiyanto., SH	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya LPJU	Desa Domiyang, Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
429	1837151	Eko Arifiyanto., SH	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya LPJU	Desa Kaibahan, Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
430	1837160	Eko Arifiyanto., SH	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya LPJU	Wilayah Kecamatan Lebakbarang, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
431	1837168	Eko Arifiyanto., SH	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya LPJU	Wilayah Kecamatan Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
432	1837174	Eko Arifiyanto., SH	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya LPJU	Wilayah Kecamatan Petungkriyono, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
433	1837186	Eko Arifiyanto., SH	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Adanya Rumah tidak layak huni	Wilayah Kecamatan Petungkriyono, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
434	1837198	Eko Arifiyanto., SH	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Adanya Rumah tidak layak huni	Wilayah Kecamatan Lebakbarang, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
435	1837216	Eko Arifiyanto., SH	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Adanya Rumah tidak layak huni	Wilayah Kecamatan Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
436	1837224	Eko Arifiyanto., SH	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Adanya Rumah tidak layak huni	Wilayah Kecamatan Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
437	1837236	Eko Arifiyanto., SH	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Adanya Rumah tidak layak huni	Wilayah Kecamatan Talun, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
438	1837288	Eko Arifiyanto., SH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Rusaknya Jalan Lingkungan	Desa Kulu, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
439	1837297	Eko Arifiyanto., SH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Rusaknya Jalan Lingkungan	Desa Wringin Agung, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
440	1837306	Eko Arifiyanto., SH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Rusaknya Jalan Lingkungan	Desa Rogoselo, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
441	1837313	Eko Arifiyanto., SH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Rusaknya Jalan Lingkungan	Desa Larikan, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
442	1837321	Eko Arifiyanto., SH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Rusaknya Jalan Lingkungan	Desa Sawangan, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
443	1837329	Eko Arifiyanto., SH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Rusaknya Jalan Lingkungan	Desa Harjosari, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
444	1837344	Eko Arifiyanto., SH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Rusaknya Jalan Lingkungan	Desa Kutosari, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
445	1837372	Eko Arifiyanto., SH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Rusaknya Jalan Lingkungan	Desa Bligorejo, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
446	1837377	Eko Arifiyanto., SH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Rusaknya Jalan Lingkungan	Desa Kalimojosari, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
447	1837387	Eko Arifiyanto., SH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Rusaknya Jalan Lingkungan	Kelurahan Doro, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
448	1837396	Eko Arifiyanto., SH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Rusaknya Jalan Lingkungan	Desa Pugangan, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
449	1837403	Eko Arifiyanto., SH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Rusaknya Jalan Lingkungan	Desa Sidoharjo, Doro , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
450	1837412	Eko Arifiyanto., SH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Rusaknya Jalan Lingkungan	Desa Sengare, Talun , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
451	1837421	Eko Arifiyanto., SH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Rusaknya Jalan Lingkungan	Desa Krompeng, Talun , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
452	1837450	Eko Arifiyanto., SH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Rusaknya Jalan Lingkungan	Desa Batursari, Talun , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
453	1837453	Eko Arifiyanto., SH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Rusaknya Jalan Lingkungan	Desa Karangasem, Talun , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
454	1837459	Eko Arifiyanto., SH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Rusaknya Jalan Lingkungan	Desa Gandarum, Kajen , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
455	1837461	Eko Arifiyanto., SH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Rusaknya Jalan Lingkungan	Desa Domiyang, Paninggaran , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
456	1837469	Eko Arifiyanto., SH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Rusaknya Jalan Lingkungan	Desa Kaibahan, Kesesi , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
457	1837472	Eko Arifiyanto., SH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Rusaknya Jalan Lingkungan	Wilayah Kec. Lebakbarang , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
458	1837477	Eko Arifiyanto., SH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Rusaknya Jalan Lingkungan	Wilayah Kec. Karanganyar , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
459	1837480	Eko Arifiyanto., SH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Rusaknya Jalan Lingkungan	Wilayah Kec. Petungkriyono , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
460	1837492	Eko Arifiyanto., SH	Bantuan prasarana persampahan (Sepeda Motor Tiga Roda)	Belum adanya kendaraan angkut sampah di lingkungan	Wilayah Kec. Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
461	1837494	Eko Arifiyanto., SH	Bantuan prasarana persampahan (Sepeda Motor Tiga Roda)	Belum adanya kendaraan angkut sampah di lingkungan	wilayah Kec. Talun, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
462	1837501	Eko Arifiyanto., SH	Bantuan prasarana persampahan (Sepeda Motor Tiga Roda)	Belum adanya kendaraan angkut sampah di lingkungan	Wilayah Kec. Lebakbarang, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
463	1837505	Eko Arifiyanto., SH	Bantuan prasarana persampahan (Sepeda Motor Tiga Roda)	Belum adanya kendaraan angkut sampah di lingkungan	Wilayah Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
464	1837509	Eko Arifiyanto., SH	Bantuan prasarana persampahan (Sepeda Motor Tiga Roda)	Belum adanya kendaraan angkut sampah di lingkungan	Wilayah Kec. Petungkriyono, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
465	1837515	Eko Arifiyanto., SH	Bantuan bibit/ benih/ tanaman pertanian	Bantuan bibit kepada kelompok tani	Wilayah Kec. Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
466	1837517	Eko Arifiyanto., SH	Bantuan bibit/ benih/ tanaman pertanian	Bantuan bibit kepada kelompok tani	Wilayah Kec. Talun, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
467	1837519	Eko Arifiyanto., SH	Bantuan bibit/ benih/ tanaman pertanian	Bantuan bibit kepada kelompok tani	Wilayah Kec. Lebakbarang, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
468	1837522	Eko Arifiyanto., SH	Bantuan bibit/ benih/ tanaman pertanian	Bantuan bibit kepada kelompok tani	Wilayah Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
469	1837525	Eko Arifiyanto., SH	Bantuan bibit/ benih/ tanaman pertanian	Bantuan bibit kepada kelompok tani	Wilayah Kecamatan Petungkriyono, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
470	1839979	Dodiek Prasetyo	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	perlunya peningkatan jalan tani untuk menunjang kelancaran petani	Desa Kalipancur, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
471	1839992	Dodiek Prasetyo	Bantuan kepada Organisasi Keolahragaan	belum memadainya sarana dan prasarana terutama pendopo (gedung) tempat latihan olahraga pencak silat	PSHT Kesesi, Desa Krandon, Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Usia Dini dan Dasar
472	1840000	Dodiek Prasetyo	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	pengairan tidak lancar	Desa Kalimade, Kec. kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
473	1840018	Dodiek Prasetyo	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan poros Ponolawen-Sidomulyo rusak parah	Desa Kalimade, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
474	1840033	Dodiek Prasetyo	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Irigasi pertanian perlu untuk diperbaiki	Desa Kalimade, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
475	1841029	H. M Kholis Jazuli	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Pemasangan bronjong (gabion) dan penguat tebing sungai merupakan kebutuhan krusial dalam teknik sipil dan manajemen sumber daya air, terutama untuk mengatasi berbagai masalah yang ditimbulkan oleh dinamika arus sungai, sehingga dibutuhkan Bronjong atau Penguat tebing	Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
476	1841038	H. M Kholis Jazuli	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Pemasangan bronjong (gabion) dan penguat tebing sungai merupakan kebutuhan krusial dalam teknik sipil dan manajemen sumber daya air, terutama untuk mengatasi berbagai masalah yang ditimbulkan oleh dinamika arus sungai, sehingga dibutuhkan Bronjong atau Penguat tebing	Desa Tosaran Kecamatan Kedungwuni , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
477	1841064	H. M Kholis Jazuli	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan yang rusak, berlubang, dan tidak rata menyebabkan berbagai dampak negatif yang serius bagi masyarakat, ekonomi, dan keselamatan. Sehingga dibutuhkan Perbaikan Jalan	Dk. Capgawen Selatan Desa Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
478	1841151	H. M Kholis Jazuli	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Bangunan Masjid sudah kurang layak untuk digunakan sehingga dibutuhkan Hibah	Desa Pajomblangan Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
479	1841160	H. M Kholis Jazuli	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan yang rusak, berlubang, dan tidak rata menyebabkan berbagai dampak negatif yang serius bagi masyarakat, ekonomi, dan keselamatan. Sehingga dibutuhkan Perbaikan Jalan	Dk. Prawasan Barat Desa Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
480	1841169	H. M Kholis Jazuli	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan yang rusak, berlubang, dan tidak rata menyebabkan berbagai dampak negatif yang serius bagi masyarakat, ekonomi, dan keselamatan. Sehingga dibutuhkan Perbaikan Jalan	Dk. Kranji Desa Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
481	1841176	H. M Kholis Jazuli	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan yang rusak, berlubang, dan tidak rata menyebabkan berbagai dampak negatif yang serius bagi masyarakat, ekonomi, dan keselamatan. Sehingga dibutuhkan Perbaikan Jalan	Dk. Capgawen Utara Desa Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
482	1841210	H. M Kholis Jazuli	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota (Hibah/Bantuan)	Organisasi kemasyarakatan (ormas) atau LSM, merupakan mekanisme yang penting untuk menunjang program pemerintah, memberdayakan masyarakat, dan mengatasi masalah sosial-ekonomi, sehingga dibutuhkna HIbah untuk organisasi Khidmat Panji	Dk. Kranji Desa Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
483	1841348	H. M Kholis Jazuli	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan yang rusak, berlubang, dan tidak rata menyebabkan berbagai dampak negatif yang serius bagi masyarakat, ekonomi, dan keselamatan. Sehingga dibutuhkan Perbaikan Jalan	Dk. Gembong Desa Kedungwuni Tmur Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
484	1841376	H. M Kholis Jazuli	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah (TK/PAUD)	Kondisi bangunan yang membahayakan keamanan, fasilitas yang jauh dari standar kelayakan, serta dampak langsungnya terhadap psikologis dan proses belajar anak, Sehingga dibutuhkan Rehabilitasi	RA Muslimat NU Kranji Desa Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
485	1841558	Rokhyasin, SE	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	jalan menuju lahan pertanian belum memadai untuk mobilitas petani	Desa Kaliombo Kec. Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
486	1841573	Rokhyasin, SE	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	jalan menuju lahan pertanian belum memadai untuk mobilitas petani	desa Notogiwang Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
487	1841587	Rokhyasin, SE	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	jalan menuju lahan pertanian belum memadai untuk mobilitas petani	Dk. Gunung Telu Desa Kutorojo Kec. Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
488	1841609	Rokhyasin, SE	PEMBANGUNAN JARINGAN AIR MINUM PERPIPAAN (SPAM)	Kurangnya pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat	Desa Lumeneng Kec. Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
489	1841626	Rokhyasin, SE	PEMBANGUNAN JARINGAN AIR MINUM PERPIPAAN (SPAM)	Kurangnya pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat	Desa Lor agung Kec. Kandangserang, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
490	1841643	Rokhyasin, SE	PEMBANGUNAN JARINGAN AIR MINUM PERPIPAAN (SPAM)	Kurangnya pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat	Desa Rowolaku Kec. kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
491	1841658	Rokhyasin, SE	PEMBANGUNAN JARINGAN AIR MINUM PERPIPAAN (SPAM)	Kurangnya pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat	Dk. Linggo Asri Desa Linggo Asri Kec. Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
492	1841664	Rokhyasin, SE	PEMBANGUNAN JARINGAN AIR MINUM PERPIPAAN (SPAM)	Kurangnya pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat	Desa Kutorojo Kec. Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
493	1841684	Rokhyasin, SE	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	tebing sungai rawan terjadinya longsor yang mengakibatkan pendangkalan sungai dan terkikisnya pinggiran sungai	Sungai Desa Sabarwangi Kec. kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
494	1841693	Rokhyasin, SE	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	tebing sungai rawan terjadinya longsor yang mengakibatkan pendangkalan sungai dan terkikisnya pinggiran sungai	Sungai Desa Wonorejo Kec. Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
495	1841773	Rokhyasin, SE	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	tebing sungai rawan terjadinya longsor yang mengakibatkan jembatan putus, pendangkalan sungai dan terkikisnya pinggiran sungai	tebing Jembatan RT 01 Desa Sabarwangi Kec. Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
496	1841792	Rokhyasin, SE	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	tebing sungai rawan terjadinya longsor yang mengakibatkan pendangkalan sungai dan terkikisnya pinggiran sungai	Sungai dandang dk Sigugur Desa Sukoharjo Kec. kandangserang, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
497	1841832	Rokhyasin, SE	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	tebing sungai rawan terjadinya longsor yang mengakibatkan pendangkalan sungai dan terkikisnya pinggiran sungai	Kali Paingan Desa Tajur Kec. kandangserang, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
498	1841936	Rokhyasin, SE	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	jalan yang rusak dan berlubang mengganggu mobilitas masyarakat	Jalan RT 10-11 Kelurahan kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
499	1841963	Rokhyasin, SE	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	kegiatan lanjutan guna meneruskan pekerjaan sebelumnya. jalan masih belum memungkinkan dilalui kendaraan menuju makam	makadam jalan menuju makam Dk. Watubelah Kel. kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
500	1841986	Rokhyasin, SE	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	jalan yang rusak dan berlubang mengganggu mobilitas masyarakat	Jalan RT 06 dari depan Panti Asuhan Muhammadiyah kajen menuju jalan arah Dk. Gutoko Desa Kebonagung Kec. kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
501	1842329	Rokhyasin, SE	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	jalan yang rusak dan berlubang mengganggu mobilitas masyarakat	Jalan Poros Desa, Dk karangtuang Desa tanjungsari menuju Desa tanjungkulon kec. kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
502	1842340	Rokhyasin, SE	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	jalan yang rusak dan berlubang mengganggu mobilitas masyarakat	Jalan RT 08 Kelurahan Kajen, Kec. kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
503	1842345	Rokhyasin, SE	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	jalan yang rusak dan berlubang mengganggu mobilitas masyarakat	Desa Kutorojo Kec. kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
504	1842360	Rokhyasin, SE	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	jalan yang rusak dan berlubang mengganggu mobilitas masyarakat	talud ruas jalan sigugur-trajumas, Desa Sukoharjo Kec. Kandangserang, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
505	1842373	Rokhyasin, SE	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Mushola/Masjid sudah tidak layak untuk kegiatan ibadah masyarakat, perlu adanya perbaikan/renovasi	Mushola Baiturohman Dk. Jaha RT 05 RW 02 Desa Bodas Kec. Kandangserang, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
506	1842384	Rokhyasin, SE	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Mushola/Masjid sudah tidak layak untuk kegiatan ibadah masyarakat, perlu adanya perbaikan/renovasi	Masjid At-Taqwa Dk. Linggo Asri, Desa Linggo Asri Kec. Kajen, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
507	1842443	Rokhyasin, SE	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Lanjutan pemasangan Pal Listrik (2), melanjutkan kegiatan sebelumnya.	Dk. Winong Desa Tambakroto Kec. kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
508	1842461	Rokhyasin, SE	Bantuan bibit ternak	Kurangnya modal dan perlunya tambahan benih dan pakan ikan lele untuk kelompok ternak	kelompok Ternak Sumber Mulyo Desa salit Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
509	1842479	Rokhyasin, SE	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Drainase jalan mampet, rusak, perlu adanya perbaikan lebih lanjut agar sistem drainase menjadi lebih baik	drainase depan balaidesa tajur ruas jalan tajur-kandangserang, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
510	1844839	Drs.H. Abdul Munir	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Kerusakan infrastruktur jalan dan seringnya terjadi genangan di wilayah Tirto mengakibatkan lumpuhnya aktivitas ekonomi lokal dan mobilitas warga.	Ruas jalan pemukiman dari Batas Desa Pacar sampai ke ujung Desa Tegaldowo, Kecamatan Tirto., Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
511	1850230	Dodiek Prasetyo	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	perlu perlengkapan sranan dan prasarana masjid/mushola	Masjid/Mushola Mutmainah Ratfa, Desa Srinahan kec. kesesi, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
512	1850261	Dodiek Prasetyo	Bantuan prasarana persampahan (Sepeda Motor Tiga Roda)	perlunya kendaraan pengangkut sampah di mushola	Mushola Al Furqon, Desa Srinahan Kec Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
513	1850276	Dodiek Prasetyo	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belom ada jalan tani yang memadai	Desa Sidomulyo, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
514	1850297	Dodiek Prasetyo	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	kuranya penerangan jalan	Desa Sidomulyo, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
515	1850315	Dodiek Prasetyo	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	pasokan air ke sawah kurang baik	Desa Sukorejo, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
516	1850329	Dodiek Prasetyo	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	masih kurangnya lampu jalan	Desa Sukorejo, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
517	1850343	Dodiek Prasetyo	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	jalan tani rusak	Desa Sukorejo, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
518	1850357	Dodiek Prasetyo	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	jalan tani rusak	Desa Kwigaran, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
519	1850368	Dodiek Prasetyo	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	rusaknya jalan tani	desa Pantirejo, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
520	1850384	Dodiek Prasetyo	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	rusaknya saluran air ke sawah	Desa Pantirejo, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
521	1850547	Dodiek Prasetyo	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	irigasi kurang lancar	Desa Watupayung, Kec kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
522	1850566	Dodiek Prasetyo	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	irigasi kurang memadai	Desa Kaibahan, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
523	1850580	Dodiek Prasetyo	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Jalan tani Rusak	Desa Kaibahan, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
524	1850605	Dodiek Prasetyo	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	jalan poros Ds KarangRejo-Desa Karyomukti rusak	Desa Karyomukti-Desa Karangrejo Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
525	1850620	Dodiek Prasetyo	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Rusaknya jalan tani	Desa Watugajah, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
526	1850630	Dodiek Prasetyo	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Irigasi bocor	Desa Watugajah, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
527	1850668	Dodiek Prasetyo	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Pentinya pelatihan dan permodalan bagi usaha mikro	Kecamatan KESESI, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM
528	1850707	Dodiek Prasetyo	PEMBANGUNAN JEMBATAN	Jembatan Rusak	Desa Srinahan Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jembatan
529	1850836	Dodiek Prasetyo	Bantuan bibit ternak	perlu adanya bantuan bibit ternak (sapi, kambing, lele, nila)	Kecamatan Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
530	1850861	Dodiek Prasetyo	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah (SD)	Banyak ruang kelas yang perlu di rehab	SDN 02 SRINAHAN, Ds. Srinahan, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
531	1850890	Dodiek Prasetyo	Pengadaan Peralatan Belajar Mengajar (Laptop) (TK/PAUD)	Peralatan belajar mengajar kurang memadai	PAUD DIAN SUKMA Desa Srinahan, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Perlengkapan PAUD
532	1850904	Dodiek Prasetyo	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (TK/PAUD)	Kurangnya perlengkapan sekolah	PAUD DIAN SUKMA Desa Srinahan Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Perlengkapan PAUD
533	1850948	Dodiek Prasetyo	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	masih banyak jalan tani yang rusak	Kecamatan Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
534	1850963	Dodiek Prasetyo	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Banyaknya irigasi yang kurang baik di wilyah kecamatan kesesi	Kecamatan Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
535	1850986	Dodiek Prasetyo	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Banyaknya jalan yang belum diterangi lampu jalan	Kecamatan Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
536	1851021	Dodiek Prasetyo	Fasilitasi Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	masih dibutuhkan nya modal usaha untuk ekonomi keluarga	Kecamatan Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
537	1851039	Dodiek Prasetyo	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Banyak lampu jalan yang rusak	Kecamatan Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
538	1851061	Dodiek Prasetyo	Fasilitasi Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	perlu bantuan untuk peningkatan perekonomian	Kecamatan Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
539	1851094	Dodiek Prasetyo	Pengadaan Mebel (SD)	Banyak mebeler yang rusak	SDN 02 Ponolawen, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Mebel Sekolah
540	1851107	Dodiek Prasetyo	Pengadaan Mebel (SD)	Banyak mebeler yang rusak	SDN 01 PONOLAWEN, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Mebel Sekolah
541	1851354	Dodiek Prasetyo	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Drainase tidak berfungsi dengan baik	Desa Srinahan, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
542	1851804	H. M Kholis Jazuli	Bantuan prasarana persampahan (Sepeda Motor Tiga Roda)	Kendaraan roda tiga (motor roda tiga/tosa) di pondok pesantren (ponpes) seringkali menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekadar gaya hidup, melainkan solusi atas permasalahan logistik dan operasional harian, sehongga dibutuhkan kendaraan roda tia di ponpes Nurul Athfal	Desa Langkap Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
543	1851823	H. M Kholis Jazuli	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan yang rusak, berlubang, dan tidak rata menyebabkan berbagai dampak negatif yang serius bagi masyarakat, ekonomi, dan keselamatan. Sehingga dibutuhkan Perbaikan Jalan	Perbaikan/Peninggian jalan Pekajangan Gg 17 Desa Pekajangan Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
544	1852889	H. M Kholis Jazuli	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Bangunan Masjid sudah kurang layak untuk digunakan sehingga dibutuhkan Hibah	Desa Pajomblangan Kecamatan Kedungwuni , Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
545	1852968	H. M Kholis Jazuli	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Fasilitas pesantren, khususnya asrama dan musala, yang sudah tua, rapuh, dan tidak memenuhi standar keamanan bangunan, sehingga dibutuhkan Rehabilitasi Pondok Pesantren	Dk. Kranji Desa Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni , Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
546	1854967	NASHIH SYARIFUDDIN S.K.M., M.A.P	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Untuk mempermudah akses para petani dalam memperluas jalur distribusi hasil pertanian sehingga dibutuhkan Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Sumublor Kecamatan Sragi , Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
547	1854973	NASHIH SYARIFUDDIN S.K.M., M.A.P	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Untuk mempermudah akses para petani dalam memperluas jalur distribusi hasil pertanian sehingga dibutuhkan Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Bulaksari Kecamatan Sragi , Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
548	1854996	NASHIH SYARIFUDDIN S.K.M., M.A.P	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Bantuan untuk TPQ bukan hanya soal dana, tapi tentang menjaga keberlangsungan pendidikan agama bagi generasi muda, sehingga dibuuthkan Bantuan HIbah	Madrasah Diniyah Nurussalam Desa Kalimade Kecamatan Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
549	1855005	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Kondisi jalan yang sudah mengalami kerusakan	Desa Wonorejo Kecamatan Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
550	1855015	NASHIH SYARIFUDDIN S.K.M., M.A.P	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Bantuan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia sangat mendesak dan krusial, mengingat sektor ini merupakan tulang punggung ekonomi yang menyumbang lebih dari 60% PDB dan menyerap 97% tenaga kerja, sehingga dibutuhkan Hibah bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Hibah Alat Mesin Shunfa S1 373 Untuk Bapak Mustakim Desa Srinahan Kecamatan Kesesi , Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM
551	1855028	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Terjadinya pengikisan tanah pada bantaran sungai	Desa Wonorejo Kecamatan Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
552	1855033	NASHIH SYARIFUDDIN S.K.M., M.A.P	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Bantuan untuk TPQ bukan hanya soal dana, tapi tentang menjaga keberlangsungan pendidikan agama bagi generasi muda, sehingga dibuuthkan Bantuan HIbah	TPQ Al Musthofawiyah Desa Gerbangkerep Kecamatan Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
553	1855040	NASHIH SYARIFUDDIN S.K.M., M.A.P	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Untuk mempermudah akses para petani dalam memperluas jalur distribusi hasil pertanian sehingga dibutuhkan Pembangunan Irigasi	Desa Karangsari Kecamatan Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
554	1855046	NASHIH SYARIFUDDIN S.K.M., M.A.P	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Untuk mempermudah akses para petani dalam memperluas jalur distribusi hasil pertanian sehingga dibutuhkan Pembangunan Jalan Usaha Tani	Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Sidomulyo Kecamatan Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
555	1855051	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	Pengadaan Peralatan Belajar Mengajar (Laptop) (SD)	Masih terbatasnya sarana penunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi.	MI YMI Wonopringgo 01 Kecamatan Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
556	1855061	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	Pengadaan Peralatan Belajar Mengajar (Laptop) (SMP)	Masih terbatasnya sarana penunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi	SMP Islam Kecamatan Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
557	1855066	H. M Kholis Jazuli	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan yang rusak, berlubang, dan tidak rata menyebabkan berbagai dampak negatif yang serius bagi masyarakat, ekonomi, dan keselamatan. Sehingga dibutuhkan Perbaikan Jalan	Rehabilitasi Jalan Dk. Madukaran Desa Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
558	1855082	H. M Kholis Jazuli	Bantuan prasarana persampahan (Sepeda Motor Tiga Roda)	Bantuan kendaraan roda tiga (tosa/viart/motor sampah) di desa merupakan kebutuhan mendesak untuk mengatasi berbagai permasalahan operasional, terutama terkait manajemen lingkungan dan pelayanan masyarakat, sehingga dibutuhkan sepeda motor Tiga Roda	Desa Surabayan Kedcamatan Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
559	1855083	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Kondisi jalan yang sudah mengalami kerusakan	Desa Paweden Kecamatan Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
560	1855100	H. M Kholis Jazuli	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan yang rusak, berlubang, dan tidak rata menyebabkan berbagai dampak negatif yang serius bagi masyarakat, ekonomi, dan keselamatan. Sehingga dibutuhkan Perbaikan Jalan	Kedungwuni Kota Belakang Kelurahan Desa Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
561	1855112	H. M Kholis Jazuli	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan yang rusak, berlubang, dan tidak rata menyebabkan berbagai dampak negatif yang serius bagi masyarakat, ekonomi, dan keselamatan. Sehingga dibutuhkan Perbaikan Jalan	Dk. Sidodadi Desa Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
562	1855121	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Kondisi jalan yang sudah mengalami kerusakan	Pekajangan gang 23 Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
563	1855123	H. M Kholis Jazuli	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (TK/PAUD)	Bantuan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk Taman Kanak-kanak (TK) mendesak diperlukan guna mengatasi kurangnya kapasitas menampung siswa, meningkatkan kenyamanan, keamanan, serta menunjang proses belajar-mengajar yang kondusif, sehingga dibutuhkan Ruang Kelas baru	TK Pertiwi Dk. Tosaran Desa Kedungwuni barat Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
564	1855134	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Masih minimnya titik penerangan di sejumlah ruas jalan	Kelurahan Pekajangan Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
565	1855137	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Masih minimnya titik penerangan di sejumlah ruas jalan	Desa Coprayan Gang 2 Kecamatan Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
566	1855143	H. M Kholis Jazuli	Bantuan kepada Organisasi Keolahragaan	Organisasi, baik nirlaba (NGO/LSM) maupun komunitas, sering kali menghadapi situasi di mana bantuan eksternal (keuangan, keahlian, atau sumber daya) menjadi krusial untuk keberlangsungan dan efektivitas mereka, sehingga dibutuhkan HIbah untuk PASI Kabupaten Pekalongan	Pendopo Rumah Dinas Bupati Desa Nyamok Kecamatan Kajen , Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Usia Dini dan Dasar
567	1855156	H. M Kholis Jazuli	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Pemasangan bronjong (gabion) dan penguat tebing sungai merupakan kebutuhan krusial dalam teknik sipil dan manajemen sumber daya air, terutama untuk mengatasi berbagai masalah yang ditimbulkan oleh dinamika arus sungai, sehingga dibutuhkan Bronjong atau senderan	Dk Robulos Kidul Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
568	1855160	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	Bantuan prasarana persampahan (Sepeda Motor Tiga Roda)	Keterbatasan sarana pengangkutan sampah di lingkungan masyarakat	Desa Paweden Kecamatan Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
569	1855164	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	Bantuan prasarana persampahan (Sepeda Motor Tiga Roda)	Keterbatasan sarana pengangkutan sampah di lingkungan masyarakat	Desa Watusalam Kecamatan Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
570	1855166	H. M Kholis Jazuli	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Pemasangan bronjong (gabion) dan penguat tebing sungai merupakan kebutuhan krusial dalam teknik sipil dan manajemen sumber daya air, terutama untuk mengatasi berbagai masalah yang ditimbulkan oleh dinamika arus sungai, sehingga dibutuhkan Pembangunan Bronjong atau Penguat tebing	Desa kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
571	1855168	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	Bantuan prasarana persampahan (Sepeda Motor Tiga Roda)	Keterbatasan sarana pengangkutan sampah di lingkungan masyarakat	Desa Bligo Kecamatan Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
572	1855172	H. M Kholis Jazuli	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Masih minimnya titik penerangan disejumlah ruas jalan	Desa Bugangan Kecamatan Kedungwuni , Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
573	1855179	H. M Kholis Jazuli	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Kondisi bangunan yang sudah mengalami kerusakan	TPQ Nurul Salam Dk. sidodadi Desa Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
574	1855189	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	REHABILITASI JEMBATAN	kondisi jembatan yang mengalami kerusakan, seperti retak, lapuk, atau penurunan struktur sehingga membahayakan keselamatan pengguna jalan	Kebonsari-Ambokembang RT 02 RW 02 Dukuh Tunggakwareng Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jembatan

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
575	1856248	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Kondisi saluran yang rusak, dangkal, dan tersumbat sehingga tidak mampu mengalirkan air secara optimal	Ambukembang Gang 19 Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
576	1859653	Drs.H. Abdul Munir	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan Sudah Rusak dan Tidak Layak Untuk di Lewati	Kelurahan Simbang Kulon RT 015, RT 17, RT 18, RT 24, RT 25, RT 27, dan RT 28 Kecamatan Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
577	1859816	Drs.H. Abdul Munir	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Meningkatkan keselamatan dan keamanan pengguna jalan di malam hari, Sehingga dibutuhkan LPJU	Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
578	1860179	Drs.H. Abdul Munir	REHABILITASI JEMBATAN	Jembatan sudah tergerus dan perlu pelebaran	Desa Pakumbulan RW. 01-08 (Jalan Kabupaten Amboekembang-Salakbrojo) Kecamatan Buaran - Kecamatan Kedungwuni , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jembatan
579	1860225	Drs.H. Abdul Munir	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Meningkatkan keselamatan dan keamanan pengguna jalan di malam hari, Sehingga di butuhkan LPJU	Dukuh Kwasen Tengah, Desa Talun Kecamatan Talun, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
580	1860235	Drs.H. Abdul Munir	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Meningkatkan keselamatan dan keamanan pengguna jalan di malam hari, Sehingga dibutuhkan LPJU	Dukuh Donowangun Lor Desa Donowangun KecamatanTalun, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
581	1860256	Drs.H. Abdul Munir	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Meningkatkan keselamatan dan keamanan pengguna jalan di malam hari, Sehingga dibutuhkan LPJU	Dukuh Jojogan Desa Jojogan Kecamatan Talun, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
582	1860273	Drs.H. Abdul Munir	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Meningkatkan keselamatan dan keamanan pengguna jalan di malam hari, Sehingga dibutuhkan LPJU	PonPes An Nahdiyah desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
583	1860282	Drs.H. Abdul Munir	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Meningkatkan keselamatan dan keamanan pengguna jalan di malam hari, Sehingga dibutuhkan LPJU	Jl Raya Karyomukti arah ke Jl Raya kaibahan Kecamatan Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
584	1860303	Drs.H. Abdul Munir	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Meningkatkan keselamatan dan keamanan pengguna jalan di malam hari, Sehingga dibutuhkan LPJU	Desa Karyomukti, Kecamatan Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
585	1860316	Drs.H. Abdul Munir	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Meningkatkan keselamatan dan keamanan pengguna jalan di malam hari, Seingga dibutuhkan LPJU	Jl Raya Karang rejo arah ke Desa Karyomukti Kecamatan Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
586	1860337	Drs.H. Abdul Munir	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Meningkatkan keselamatan dan keamanan pengguna jalan di malam hari, Sehingga dibutuhkan LPJU	Desa Kaibahan arah Desa Watupayung, Kecamatan Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
587	1883406	Dra.Hj.Hindun . MH	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (TK/PAUD)	Lonjakan Jumlah Siswa Kelebihan Kapasitas sehingga dibutuhkan Ruang Kelas Baru	TK Muslimat NU Desa Dadirejo Timur Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
588	1883453	Dra.Hj.Hindun . MH	Bantuan prasarana persampahan (Sepeda Motor Tiga Roda)	Karena kapasitas terbatas atau proses angkut yang kurang rapat, sampah sering tercecer di jalan selama perjalanan menuju TPS, sehingga dibutuhkan Alat pengangkut sampah sepeda motor tiga roda	MIS Ngalian Desa Ngalian Kecamatan Tirto , Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
589	1883891	Dra.Hj.Hindun . MH	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Kurangnya sarana dan Prasarana Alat Rebana sehingga dibutuhkan Sapras Rebana	Tpq Tahsinatul Qiro Desa Mayangan Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Perlengkapan PAUD
590	1883974	Dra.Hj.Hindun . MH	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (TK/PAUD)	Kurangnya sarana dan Prasarana Alat Rebana sehingga dibutuhkan Sapras Rebana	RA Muslimat Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Perlengkapan PAUD
591	1884070	Dra.Hj.Hindun . MH	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Kurangnya sarana dan Prasarana Alat Rebana sehingga dibutuhkan Sapras Rebana	Tpq At Tarsudiyah Desa Gumawang Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Perlengkapan PAUD

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
592	1884318	Drs.H. Abdul Munir	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (TK/PAUD)	Belum tersedianya sarana sanitasi (MCK) dan instalasi air bersih yang memadai untuk menunjang kegiatan belajar mengajar dan kesehatan siswa di KB Masyitoh Pegandon Kec. Karangdadap	KB Masyitoh Desa Pegandon, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
593	1884385	Dra.Hj.Hindun . MH	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (TK/PAUD)	Kurangnya sarana dan Prasarana Alat Rebana sehingga dibutuhkan Sapras Rebana	RA Muslimat Desa Waru Lor Kecamatan Wiradesa , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Perlengkapan PAUD
594	1884390	Drs.H. Abdul Munir	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SD)	Jalan sudah tidak layak pakai, Sehingga dibutuhkan Pengaspalan Jalan	MI Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
595	1884505	Dra.Hj.Hindun . MH	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (TK/PAUD)	Kurangnya sarana dan Prasarana Alat Rebana sehingga dibutuhkan Sapras Rebana	RA Muslimat Desa Kadipaten Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Perlengkapan PAUD
596	1884523	Dra.Hj.Hindun . MH	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Kurangnya sarana dan Prasarana Alat Rebana sehingga dibutuhkan Sapras Rebana	Tpq Al Amin Desa Kauman Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Perlengkapan PAUD
597	1884544	Dra.Hj.Hindun . MH	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (TK/PAUD)	Kurangnya sarana dan Prasarana Alat Rebana sehingga dibutuhkan Sapras Rebana	RA Muslimat NU Desa Pekuncen Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Perlengkapan PAUD
598	1884616	Dra.Hj.Hindun . MH	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (TK/PAUD)	kekurangan dalam pengadaan sarana dan prasarana di sekolah TK Muslimat NU Kepatihan Wiradesa	TK Muslimat NU Desa Kepatihan Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
599	1885589	JAHIRIN M.H	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Minimnya ruang belajar yang layak, tempat wudhu, sarana sanitasi, serta peralatan mengaji (Iqro/Al-Qur'an) yang memadai, Sehingga dibutuhkkan pembangunan Gedung TPQ	Tpq/Mda Bahrul Ulum Dukuh Karanggondang Desa Bojongkoneng Kecamatan Kandangserang, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
600	1885638	JAHIRIN M.H	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Pipa atau saluran yang dibangun terlalu kecil untuk menampung volume air, terutama saat curah hujan tinggi sehingga dibutuhkan Pembangunan Drainase	Jalan Dukuh Gamblok Desa Bojongkoneng Kecamatan Kandangserang, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
601	1885654	JAHIRIN M.H	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Pipa atau saluran yang dibangun terlalu kecil untuk menampung volume air, terutama saat curah hujan tinggi sehingga dibutuhkan Pembangunan Drainase	Jalan Dukuh Kedayeman - Luragung Desa Luragung Kec. Kandangserang , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
602	1885664	JAHIRIN M.H	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Pipa atau saluran yang dibangun terlalu kecil untuk menampung volume air, terutama saat curah hujan tinggi sehingga dibutuhkan Pembangunan Drainase	Jalan Desa Luragung Kecamatan Kandangserang , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
603	1890046	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan di jalan umum	Desa Logandeng, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
604	1890051	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan di jalan umum	Desa Jrebengkembang, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
605	1890065	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan di jalan umum	Ds. Paguemenganmas, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
606	1890072	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan di jalan umum	Desa Kedungkebo, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
607	1890081	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan di jalan umum	Desa Kaligawe, Kec, Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
608	1890096	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan di jalan umum	Ds. Karangdadap, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
609	1890103	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan di jalan umum	Desa Kalilembu, Kec. Karandadap, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
610	1890109	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan di jalan umum	Desa Pangkah, Kec Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
611	1890116	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan di jalan umum	Desa Kebonrowopucang, Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
612	1890127	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan di jalan umum	Desa Kebonsari, Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
613	1890132	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan di jalan umum	Desa Pegandon, Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
614	1890150	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan di jalan umum	Desa Simbangwetan, Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
615	1890177	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan di jalan umum	Desa Bligo, Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
616	1890183	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan di jalan umum	Desa Pakumbulan, Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
617	1890187	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan di jalan umum	Desa Paweden, Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
618	1890199	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan di jalan umum	Desa Coprayan, Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
619	1890206	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan di jalan umum	Desa Wonorejo, Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
620	1890211	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan di jalan umum	Desa Jetaklengkong, Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
621	1890214	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan di jalan umum	Desa Sampih, Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
622	1890221	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan di jalan umum	Desa Pegaden, Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
623	1890227	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan di jalan umum	Desa Surobayan, Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
624	1890230	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan di jalan umum	Desa Gondang, Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
625	1890238	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan di jalan umum	Desa Jetak Kidul, Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
626	1890252	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan di jalan umum	Desa Salakbrojo, Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
627	1890256	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Desa Proto, Kedungwuni	Desa Proto, Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
628	1890263	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan di jalan umum	Desa Pajomblangan, Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
629	1890269	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan di jalan umum	Desa Kwayangan, Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
630	1890281	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan di jalan umum	Desa di Wilayah Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
631	1890286	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan di jalan umum	Desa di wilayah Kec.Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
632	1890289	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan di jalan umum	Desa di Wilayah Kec. Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
633	1890294	JAHIRIN M.H	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Pipa atau saluran yang dibangun terlalu kecil untuk menampung volume air, terutama saat curah hujan tinggi sehingga dibutuhkan Pembangunan Drainase	Jalan Desa Bubak Kecamatan Kandangserang , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
634	1890300	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rumah belum layak huni	Desa di WIlayah Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
635	1890303	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Belum ada lampu penerangan di jalan umum	Desa di WIlayah Kec. Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
636	1890310	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rumah belum layak huni	Desa di Wilayah Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
637	1890319	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Belum ada lampu penerangan di jalan umum	Desa di Wilayah Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
638	1890326	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rumah belum layak huni	Desa Kebonrowopucang, Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
639	1890337	JAHIRIN M.H	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Kerentanan terhadap Banjir Besar di aliran sungai, sehingga dibutuhkan pembangunan Bronjong sungai	Pembangunan Bronjong Penahan Jalan Desa Garungwiyoro(Watu Lawang) Kec. Kandangserang , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
640	1890339	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Rusaknya Jalan Usaha Tani	Desa di Wilayah Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
641	1890343	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Rusaknya Jalan Usaha Tani	Desa di Wilayah Kec. Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
642	1890347	JAHIRIN M.H	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Pipa atau saluran yang dibangun terlalu kecil untuk menampung volume air, terutama saat curah hujan tinggi sehingga dibutuhkan Pembangunan Drainase	Pembangunan Drainase Jalan Desa Garungwiyoro Kec. Kandangserang , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
643	1890353	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Rusaknya Jalan Usaha Tani	Desa di Wilayah Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
644	1890354	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Rusaknya Jalan Usaha Tani	Desa di Wilayah Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
645	1890364	JAHIRIN M.H	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Pipa atau saluran yang dibangun terlalu kecil untuk menampung volume air, terutama saat curah hujan tinggi sehingga dibutuhkan Pembangunan Drainase	Jalan Desa Lambur Kecamatan Kandangserang , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
646	1890366	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Rusaknya Jalan Usaha Tani	Desa Kebonrowopucang, Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
647	1890382	JAHIRIN M.H	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Kerentanan terhadap Banjir Besar di aliran sungai, sehingga dibutuhkan pembangunan Bronjong sungai	Dukuh Langkap Selatan Desa Luragung Kecamatan Kandangserang , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
648	1890393	JAHIRIN M.H	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalanan yang sudah mengalami kerusakan dan berlobang sehingga dibutuhkan Rehabilitasi Jalan	Dk. Kembang Desa Bodas Kecamatan Kandangserang , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
649	1890443	JAHIRIN M.H	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalanan dengan kondisi yang sudah rusak sehingga dibutuhkan Pembangunan Pengaspalan Jalan	Pembangunan Aspal Jalan Penghubung Desa Trajumas - Desa Bodas Kecamatan Kandangserang , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
650	1890452	JAHIRIN M.H	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalanan dengan kondisi yang sudah rusak sehingga dibutuhkan Pembangunan Pengaspalan Jalan	Pembangunan Aspal Jalan Penghubung Desa Gembong - Desa Klesem Kecamatan Kandangserang , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
651	1890481	JAHIRIN M.H	PEMBANGUNAN JEMBATAN	Belum adanya penghubung jalan untuk Aksesibilitas, sehingga dibutuhkan pembangunan jembatan Kali Banjaran	Jembatan Kali Banjaran Desa Bodas Kecamatan Kandangserang , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jembatan
652	1890498	JAHIRIN M.H	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Pipa atau saluran yang dibangun terlalu kecil untuk menampung volume air, terutama saat curah hujan tinggi sehingga dibutuhkan Pembangunan Drainase	Drainase Jalan Desa Tajur - Kajen Kecamatan Kangserang - Kecamatan Kajen , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
653	1890520	JAHIRIN M.H	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Lonjakan Jumlah Siswa Kelebihan Kapasitas sehingga dibutuhkan Ruang Kelas Baru	TPQ Roudotus Salaf Dukuh Luragung Desa Luragung Kecamatan Kandangserang , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
654	1890528	JAHIRIN M.H	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Lonjakan Jumlah Siswa Kelebihan Kapasitas sehingga dibutuhkan Ruang Kelas Baru	TPQ Al Mubarok Dukuh Luragung Desa Luragung Kecamatan Kandangserang , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
655	1890532	JAHIRIN M.H	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Lonjakan Jumlah Siswa Kelebihan Kapasitas sehingga dibutuhkan Ruang Kelas Baru	TPQ Nurul Huda Dukuh Miriamba Desa Luragung Kecamatan Kandangserang , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
656	1890549	JAHIRIN M.H	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Untuk mendukung perbaikan sarana pendidikan, meningkatkan kualitas pengajaran, dan kesejahteraan santri/pengajar sehingga dibutuhkan Hibah	Hibah Pembangunan Pondok Pesantren Ittihadus syafi'iyah Rowolaku Kecamatan Kajen , Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
657	1890554	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Pengadaan Peralatan Belajar Mengajar (Laptop) (TK/PAUD)	Belum Adanya Peralatan Belajar Mengajar	Desa di WIlayah Kec. BUaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Perlengkapan PAUD
658	1890559	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Pengadaan Peralatan Belajar Mengajar (Laptop) (TK/PAUD)	Belum Adanya Peralatan Belajar Mengajar	Desa di Wilayah Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Perlengkapan PAUD

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
659	1890561	JAHIRIN M.H	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Masjid dalam Keadaan yang sudah kurang layak untuk digunakan sehingga dibutuhkan Hibah Masjid	Hibah Pembangunan Masjid Baitul Maqdis Desa Lambur Kecamatan Kandangserang , Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
660	1890567	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Pengadaan Peralatan Belajar Mengajar (Laptop) (TK/PAUD)	Belum Adanya Peralatan Belajar Mengajar	Desa di WIlayah Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Perlengkapan PAUD
661	1890570	JAHIRIN M.H	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Musholla dalam Keadaan yang sudah kurang layak untuk digunakan sehingga dibutuhkan Hibah Musholla	Hibah Pembangunan Mushola Baitul Karim Desa Lambur 1 Kecamatan Kandangserang , Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
662	1890578	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Pengadaan Peralatan Belajar Mengajar (Laptop) (TK/PAUD)	Belum Adanya Peralatan Belajar Mengajar	Desa di Wilayah Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Perlengkapan PAUD
663	1890580	JAHIRIN M.H	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Musholla dalam Keadaan yang sudah kurang layak untuk digunakan sehingga dibutuhkan Hibah Musholla	Hibah Pembangunan MusholaAl Aqso Desa Lumeneng Kecamatan Paninggaran , Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
664	1890609	JAHIRIN M.H	Bantuan bibit ternak	Ternak kambing diyakini mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga secara signifikan sehingga dibutuhkan Bibit Kambing kelompok ternak	Bantuan Bibit Kambing Kelompok Ternak Mapan Maju Ternak Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran , Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
665	1890618	JAHIRIN M.H	Bantuan bibit ternak	Ternak kambing diyakini mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga secara signifikan sehingga dibutuhkan Bibit Kambing kelompok ternak	Bantuan Bibit Ayam Petelur Kelompok Ternak Bina Mandiri Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran , Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
666	1890624	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Bantuan sarana pendukung pertanian (Alat-alat pertanian : Traktor dan alat pertanian lainnya)	Kurang Lancarnya Kerja Anggota Kelompok Tani	Desa Kebonrowopucang, Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
667	1890631	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Bantuan sarana pendukung pertanian (Alat-alat pertanian : Traktor dan alat pertanian lainnya)	Kurang Lancarnya Kerja Anggota Kelompok Tani	Desa Logandeng, Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
668	1890642	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Bantuan sarana pendukung pertanian (Alat-alat pertanian : Traktor dan alat pertanian lainnya)	Kurang Lancarnya Kerja Anggota Kelompok Tani	Desa Jrebengkembang, Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
669	1890648	JAHIRIN M.H	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penrengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Dinas Perhubungan Desa Klesem Kecamatan Kandangserang , Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
670	1890650	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Bantuan sarana pendukung pertanian (Alat-alat pertanian : Traktor dan alat pertanian lainnya)	Kurang Lancarnya Kerja Anggota Kelompok Tani	Desa Pagumenganmas, Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
671	1890663	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Bantuan sarana pendukung pertanian (Alat-alat pertanian : Traktor dan alat pertanian lainnya)	Kurang Lancarnya Kerja Anggota Kelompok Tani	Desa Kaligawe, Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
672	1890676	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Bantuan sarana pendukung pertanian (Alat-alat pertanian : Traktor dan alat pertanian lainnya)	Kurang Lancarnya Kerja Anggota Kelompok Tani	Desa Kedungkebo, Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
673	1890683	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Bantuan sarana pendukung pertanian (Alat-alat pertanian : Traktor dan alat pertanian lainnya)	Kurang Lancarnya Kerja Anggota Kelompok Tani	Desa Karangdadap, Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
674	1890685	JAHIRIN M.H	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (SD)	Pembangunan pagar sering kali merupakan bagian dari pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan yang ditetapkan, agar sekolah memiliki fasilitas penunjang yang memadai, sehingga dibutuhkan Pembangunan Pagar untuk SD Lambanggelun 3	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) SD Lambanggelun 3 Kec.Paninggaran , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
675	1890691	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Bantuan sarana pendukung pertanian (Alat-alat pertanian : Traktor dan alat pertanian lainnya)	Kurang Lancarnya Kerja Anggota Kelompok Tani	Desa Kalilembu, Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
676	1890697	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Bantuan sarana pendukung pertanian (Alat-alat pertanian : Traktor dan alat pertanian lainnya)	Kurang Lancarnya Kerja Anggota Kelompok Tani	Desa Pangkah, Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
677	1890719	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Bantuan sarana pendukung pertanian (Alat-alat pertanian : Traktor dan alat pertanian lainnya)	Kurang Lancarnya Kerja Anggota Kelompok Tani	Desa Kebonsari, Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
678	1890731	JAHIRIN M.H	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SD)	Lonjakan Jumlah Siswa Kelebihan Kapasitas sehingga dibutuhkan Ruang Kelas Baru	SDN 03 Wangkelang Desa Wangkelang Kecamatan Kandangserang , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
679	1890737	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Bantuan sarana pendukung pertanian (Alat-alat pertanian : Traktor dan alat pertanian lainnya)	Kurang Lancarnya Kerja Anggota Kelompok Tani	Desa Pegandon, Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
680	1890747	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Bantuan prasarana persampahan (Sepeda Motor Tiga Roda)	Belum Adanya Sarana Persampahan	Desa Kebonrowopucang, Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
681	1890755	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Bantuan prasarana persampahan (Sepeda Motor Tiga Roda)	Belum Adanya Sarana Persampahan	Desa di Wilayah Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
682	1890761	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Bantuan prasarana persampahan (Sepeda Motor Tiga Roda)	Belum Adanya Sarana Persampahan	Desa di Wilayah Kec. Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
683	1890769	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Bantuan prasarana persampahan (Sepeda Motor Tiga Roda)	Belum Adanya Sarana Persampahan	Desa di Wilayah Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
684	1890771	JAHIRIN M.H	PEMBANGUNAN JARINGAN AIR MINUM PERPIPAAN (SPAM)	belum meluasnya jangkauan layanan ke daerah-daerah yang belum terlayani atau pelosok sehingga dibutuhkan pembangunan Jaringan Air Minum Perpipaan (SPAM)	Dukuh Kedayeman Desa Luragung Kecamatan Kandangserang , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
685	1890779	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Bangunan gedung yang sudah kurang layak untuk digunakan seperti tapa yang bocor dan dinding yang sudah lapuk, Sehingga dibutuhkan Rehabilitasi TPQ	TPQ Nurussalam Jl. Sidodadi Indah 1, Prawasan Barat, Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
686	1890780	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Bantuan prasarana persampahan (Sepeda Motor Tiga Roda)	Belum Adanya Sarana Persampahan	Desa di Wilayah Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
687	1890789	JAHIRIN M.H	PEMBANGUNAN JARINGAN AIR MINUM PERPIPAAN (SPAM)	belum meluasnya jangkauan layanan ke daerah-daerah yang belum terlayani atau pelosok sehingga dibutuhkan pembangunan Jaringan Air Minum Perpipaan (SPAM)	Desa Lambur Kecamatan Kandangserang , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
688	1890797	JAHIRIN M.H	PEMBANGUNAN JARINGAN AIR MINUM PERPIPAAN (SPAM)	belum meluasnya jangkauan layanan ke daerah-daerah yang belum terlayani atau pelosok sehingga dibutuhkan pembangunan Jaringan Air Minum Perpipaan (SPAM)	Desa Kandangsererang Kecamatan kandangserang , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
689	1890828	JAHIRIN M.H	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Untuk mempermudah akses para petani dalam memperluas jalur distribusi hasil pertanian sehingga dibutuhkan Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dukuh Luragung Desa Luragung Kecamatan Kandangserang , Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
690	1890846	JAHIRIN M.H	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (TK/PAUD)	Pembangunan pagar sering kali merupakan bagian dari pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan yang ditetapkan, agar sekolah memiliki fasilitas penunjang yang memadai, sehingga dibutuhkan Pembangunan Pagar untuk PAUD Al Muttaqin	Desa Tajur Kecamatan Kandangserang , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
691	1890897	JAHIRIN M.H	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Keadaan Rumah sudah tidak layak untuk digunakan seperti Dinding bambu/kayu yang sudah lapuk, dinding tanah/anyaman bambu yang rusak, dinding permanen yang retak/hampir roboh, Sehingga dibutuhkan Perbaikan	(RTLH) Desa Luragung Kecamatan Kandangserang , Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
692	1890910	JAHIRIN M.H	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Keadaan Rumah sudah tidak layak untuk digunakan seperti Dinding bambu/kayu yang sudah lapuk, dinding tanah/anyaman bambu yang rusak, dinding permanen yang retak/hampir roboh, Sehingga dibutuhkan Perbaikan	(RTLH) Desa Lambur Kecamatan Kandangserang , Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
693	1890947	JAHIRIN M.H	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Desa Luragung Kecamatan Kandangserang , Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
694	1890959	JAHIRIN M.H	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Desa Lambur Kecamatan Kandangserang , Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
695	1891133	Dra.Hj.Hindun . MH	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SD)	Lonjakan Jumlah Siswa Kelebihan Kapasitas sehingga dibutuhkan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru MI NU Karangjati Desa Karangjati Kecamatan Wiradesa , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
696	1891158	Dra.Hj.Hindun . MH	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Kurangnya sarana dan Prasarana Alat Rebana sehingga dibutuhkan Sapras Rebana	Tpq Hidayatul Mubtadiin Desa Delegtukang Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Perlengkapan PAUD
697	1891175	Dra.Hj.Hindun . MH	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Kurangnya sarana dan Prasarana Alat Rebana sehingga dibutuhkan Sapras Rebana	Tpq Al Bayan Bener Desa Bener Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Perlengkapan PAUD

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
698	1891186	Eko Arifiyanto., SH	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Tebing Sungai Sering Longsor	Desa Kulu, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
699	1891196	Eko Arifiyanto., SH	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Tebing Sungai Sering Longsor	Desa Wringinagung, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
700	1891199	Dra.Hj.Hindun . MH	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (TK/PAUD)	Kurangnya sarana dan Prasarana Alat Rebana sehingga dibutuhkan Sapras Rebana	TK Muslimat NU Desa Petukangan Kecamatan Wiradesa , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Perlengkapan PAUD
701	1891209	Eko Arifiyanto., SH	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Tebing Sungai Sering Longsor	Desa Larikan, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
702	1891218	Eko Arifiyanto., SH	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Tebing Sungai Sering Longsor	Desa Sawangan, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
703	1891226	Eko Arifiyanto., SH	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Tebing Sungai Sering Longsor	Desa Rogoselo, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
704	1891229	Dra.Hj.Hindun . MH	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Kurangnya sarana dan Prasarana Alat Rebana sehingga dibutuhkan Sapras Rebana	Tpq Mansyaul Huda Desa Bondan sari Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Perlengkapan PAUD
705	1891240	Eko Arifiyanto., SH	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Tebing Sungai Sering Longsor	Desa Harjosari, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
706	1891247	Dra.Hj.Hindun . MH	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (TK/PAUD)	Kurangnya sarana dan Prasarana Alat Rebana sehingga dibutuhkan Sapras Rebana	TK Muslimat NU Desa Kampil Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Perlengkapan PAUD
707	1891248	Eko Arifiyanto., SH	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Tebing Sungai Sering Longsor	Desa Kutosari, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
708	1891262	Eko Arifiyanto., SH	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Tebing Sungai Sering Longsor	Desa Bligorejo, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
709	1891271	Dra.Hj.Hindun . MH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	untuk mencegah longsor dan memperkuat tebing sehingga dibutuhkan Turab	jalan Desa Blimbing wuluh ke Desa Pait Kecamatan Siwalan, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
710	1891272	Eko Arifiyanto., SH	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Tebing Sungai Sering Longsor	Desa Kalimojosari, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
711	1891285	Eko Arifiyanto., SH	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Tebing Sungai Sering Longsor	Kel. Doro, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
712	1891293	Dra.Hj.Hindun . MH	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (TK/PAUD)	Kurangnya sarana dan Prasarana Alat Rebana sehingga dibutuhkan Sapras Rebana	TK Muslimat NU Desa Waru Kidul Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Perlengkapan PAUD

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
713	1891298	Eko Arifiyanto., SH	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Tebing Sungai Sering Longsor	Desa Pugangan, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
714	1891316	Eko Arifiyanto., SH	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Tebing Sungai Sering Longsor	Desa Sidoharjo, Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
715	1891317	Dra.Hj.Hindun . MH	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah (TK/PAUD)	Bangunan dalam kedaan yang sudah Kurang layak digunakan seperti atap Bocor dinding sudah lapuk Sehingga dibutuhkan Rehabilitasi	Tk Muslimat Desa Dadirejo Barat Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
716	1891322	Eko Arifiyanto., SH	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Tebing Sungai Sering Longsor	Desa Krompeng, Talun, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
717	1891344	Eko Arifiyanto., SH	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Tebing Sungai Sering Longsor	Desa Sengare, Talun, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
718	1891364	Eko Arifiyanto., SH	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Tebing Sungai Sering Longsor	Desa Batursari, Talun, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
719	1891365	Dra.Hj.Hindun . MH	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Belum selesainya pembangunan Ponpes AlKhoir Wal Barokah Dadirejo Barat Tirto, sehingga dibutuhkan lanjutan pembangunan	Ponpes AlKhoir Wal Barokah Dadirejo Barat Desa Dadirejo Kecamatan Tirto , Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
720	1891377	Eko Arifiyanto., SH	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Tebing Sungai Sering Longsor	Desa Karangasem, Talun, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
721	1891387	Eko Arifiyanto., SH	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Tebing Sungai Sering Longsor	Desa Gandarum, Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
722	1891397	Eko Arifiyanto., SH	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Tebing Sungai Sering Longsor	Desa Domiyang, Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
723	1891400	Dra.Hj.Hindun . MH	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Lonjakan Jumlah Siswa Kelebihan Kapasitas sehingga dibutuhkan Ruang Kelas Baru	MDA Ma'arif Kepatihan Desa Karangjati Kecamatan Wiradesa , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
724	1891405	Eko Arifiyanto., SH	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Tebing Sungai Sering Longsor	Desa Kaibahan, Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
725	1891419	Eko Arifiyanto., SH	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Tebing Sungai Sering Longsor	Wilayah Kec. Lebakbarang, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
726	1891423	Eko Arifiyanto., SH	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Tebing Sungai Sering Longsor	Wilayah Kec.Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
727	1891429	Dra.Hj.Hindun . MH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalanan dalam Kondisi rusak dan berlobang sehingga dibutuhkan Rehabilitasi	Rehabilitasi Jalan Desa Karangjati - Desa silirejo Kecamatan Wiradesa - Kecamatan tirto , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
728	1891435	Eko Arifiyanto., SH	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Tebing Sungai Sering Longsor	Wilayah Kec. Petungkriyono, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
729	1891444	Dra.Hj.Hindun . MH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalanan dalam Kondisi rusak dan berlobang sehingga dibutuhkan Rehabilitasi	Desa Karangjati Kecamatan Wiradesa , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
730	1891476	Dra.Hj.Hindun . MH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalanan dalam Kondisi rusak dan berlobang sehingga dibutuhkan Rehabilitasi	Jalan Desa Delegtukang - Desa Karangjati Wuled Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
731	1891555	Dra.Hj.Hindun . MH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	kepadatan lalu lintas yang menyebabkan kemacetan khususnya di area dengan volume kendaraan besar, sehingga dibutuhkan pelebaran jalan	Pelebaran jalan Desa Karangjati - Desa Petukangan Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
732	1891593	Dra.Hj.Hindun . MH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalanan dalam Kondisi rusak dan berlobang sehingga dibutuhkan Rehabilitasi	Desa Kampil Sambung ke arah RSUD Kraton Kecamatan Wiradesa , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
733	1891759	Dra.Hj.Hindun . MH	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Untuk mendukung kegiatan operasional, termasuk pengajian, dakwah, dan fungsi sosial lainnya di majelis taklim, sehingga dibutuhkan HIbah	Majlis taklim Al Maslakhah Desa jeruksari Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
734	1891773	Dra.Hj.Hindun . MH	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (TK/PAUD)	Lonjakan Jumlah Siswa Kelebihan Kapasitas sehingga dibutuhkan Ruang Kelas Baru	Tk Muslimat Desa Pandanarum Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
735	1891804	Dra.Hj.Hindun . MH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalanan dalam Kondisi rusak dan berlobang sehingga dibutuhkan Rehabilitasi	Desa Petukangan - Desa Wiradesa (jl Timur) Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
736	1891852	Dra.Hj.Hindun . MH	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Untuk meningkatkan manajemen mutu pendidikan di TPQ di Kecamatan Siwalan	Tpq di Kecamatan Siwalan , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
737	1891870	Dra.Hj.Hindun . MH	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Untuk meningkatkan manajemen mutu pendidikan di TPQ di Kecamatan Wonokerto	TPQ di Kecamatan Wonokerto, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
738	1891885	Dra.Hj.Hindun . MH	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Untuk meningkatkan manajemen mutu pendidikan di TPQ di Kecamatan Wiradesa	TPQ di Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
739	1892023	Budi Santosa	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Untuk mempermudah akses para petani dalam memperluas jalur distribusi hasil pertanian sehingga dibutuhkan Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Pegaden Tengah Kecamatan Wonopringgo , Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
740	1892096	Budi Santosa	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Musholla dalam Keadaan yang sudah kurang layak untuk digunakan sehingga dibutuhkan Hibah Musholla	Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo , Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
741	1892110	Budi Santosa	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Desa Wonopringgo Kecamatan Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
742	1892149	Budi Santosa	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	belum adanya Bak sampah untuk membantu memisahkan sampah yang bisa diolah kembali, sehingga dibutuhkan Bak Sampah	Ponpes Syarif Hidayatullah Desa Jetak Kidul Kecamatan Wonopringgo , Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
743	1892183	Budi Santosa	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Area tebing yang curam berpotensi tanah longsor di area pemukiman, tebing sungai, atau sisi jalan, Sehingga dibutuhkan Senderan Penahan Tebing	Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
744	1893083	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (TK/PAUD)	tidak adanya saluran air di lngkungan PAUD menjadikan lingkungan tidak bersih	Dukuh Tengah RT 01 RW 02 Desa Sawangan Kec Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
745	1893229	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah (SD)	atap ruang kelas banyak yang bocor sehingga menganggu proses kegiatan belajar mengajar	MIS desa sawangan Kec Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
746	1893282	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Pengadaan Mebel (TK/PAUD)	Mebel yang ada sudah tidak layak sehingga perlu penggantian / penambahan	RA Assyafiiyah Desa Sawangan Kec Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Mebel PAUD
747	1893355	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Perlu rehabilitasi sarana dan prasarana di lingkungan TPQ yang sudah tidak memadai	TPQ Al Futuhiyah Dukuh Notowarih Bawah, Desa Notogiwang, Kec Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
748	1893404	Sabdo. SH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalanan dengan kondisi yang sudah rusak sehingga dibutuhkan Pembangunan Rabat Beton	Desa Rogoselo - Desa Sidoharjo Kecamatan Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
749	1893421	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	jalan rusak di ruas jalan kabupaten, desa paninggaran - werdi	ruas Jalan Paninggaran - Werdi, Kec Paninggaran , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
750	1893431	Sabdo. SH	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Jalanan dengan kondisi yang sudah rusak sehingga dibutuhkan Pembangunan Rabat beton jalan Usaha Tani	Desa Rogoselo Kecamatan Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
751	1893455	Sabdo. SH	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (TK/PAUD)	Lonjakan Jumlah Siswa Kelebihan Kapasitas sehingga dibutuhkan Ruang Kelas Baru	TK Muslimat 02 Desa Pododadi Kecamatan Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
752	1893496	Sabdo. SH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan banyak yang rusak sehingga dibutuhkan peningkatan jalan poros Desa Pododadi - Desa Pedawang Kecamatan karanganyar	jalan poros Desa Pododadi - Desa Pedawang Kecamatan karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
753	1893511	Sabdo. SH	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Musholla dalam Keadaan yang sudah kurang layak untuk digunakan sehingga dibutuhkan Hibah Musholla	Mushola AL HIKMAH, Dk Tembelang wetan RT 02 RW 03, Desa Rogoselo Kecamatan Doro, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
754	1893528	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Perlu hibah untuk peningkatan sarana dan prasarana Masjid	Masjid Khoirul Huda Desa Paninggaran Kec Paninggaran, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
755	1893529	Sabdo. SH	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Musholla dalam Keadaan yang sudah kurang layak untuk digunakan sehingga dibutuhkan Hibah Musholla	Mushola AL KHASANAH, Dk Kulu Baru RT 01 RW 01 Desa Kulu Kecamatan Karanganyar, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
756	1893557	Sabdo. SH	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Untuk mempermudah akses para petani dalam memperluas jalur distribusi hasil pertanian sehingga dibutuhkan Pembangunan pengaspalan jalan usaha tani	Dk, Padurekso Desa Legokkalong Kecamatan Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
757	1893630	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Perlu hibah untuk peningatan sarana dan Prasarana Masjid	Masjid Al-ihlas desa Bubak, Kec Kandangserang, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
758	1893681	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Kondisi jalan desa yang gelap memerlukan penerangan untuk kenyamanan dan keamanan warga	Desa Klesem Kec Kandangserang, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
759	1893691	Sabdo. SH	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Belum tertatanya Lingkungan Halaman TPQ AL IKHSAN, Sehingga dibutuhkan Pavingisasi	TPQ AL IKHSAN , Dk, Kumenyep Desa Simego Kecamatan Petungkriyono, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
760	1893717	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Perlu hibah untuk peningkatan sarana dan prasarana masjid untuk kenyamanan jamaah	Masjid Jami Baitul Izzati, Dukuh Krikil Rt 07 Rw 03 Desa Gembong, Kec Kandangserang, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
761	1893736	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Perlu Hibah untuk peningkatan sarana dan prasarana Masjid	Masjid Nurul Hikmat, Desa Notogiwang Kec Paninggaran, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
762	1893780	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SMP)	Perlu Pembangunan RKB untuk peningkatan kualitas belajar mengajar dan merespon perkembangan jumlah peserta didik	SMP IT Lukmanul Hakim Kajen, Kec Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
763	1893806	Sabdo. SH	Pengadaan Peralatan Belajar Mengajar (Laptop) (TK/PAUD)	Keterbatasan sarana Pembelajaran Digital sehingga dibutuhkan Peralatan belajar Laptop dan LCD	TK PGRI Desa Kayugeritan Kecamatan Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Perlengkapan PAUD
764	1893823	Sabdo. SH	Bantuan sarana pendukung pertanian (Alat-alat pertanian : Traktor dan alat pertanian lainnya)	Belum adanya sarana Alat pertanian pendukung seperti Traktor, Sehingga dibutuhklan Traktor	kelompok Tani ADI JAYA Desa Sidomukti Kecamatan Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
765	1893893	NASHIH SYARIFUDDIN S.K.M., M.A.P	Bantuan prasarana persampahan Kontainer dan Gerobak Sampah	Sampah tercecer pengangkutan dari TPS ke TPA seringkali terlambat sehingga dibutuhkan Kontainer dan Gerobak sampah	Desa Pantirejo Kecamatan Kesesi , Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
766	1893935	NASHIH SYARIFUDDIN S.K.M., M.A.P	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	keadaan Rumah sudah tidak layak untuk digunakan seperti Dinding bambu/kayu yang sudah lapuk, dinding tanah/anyaman bambu yang rusak, dinding permanen yang retak/hampir roboh, Sehingga dibutuhkan Perbaikan	(RTLH) Desa Pantianom Kecamatan Bojong , Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
767	1893946	NASHIH SYARIFUDDIN S.K.M., M.A.P	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Keadaan Rumah sudah tidak layak untuk digunakan seperti Dinding bambu/kayu yang sudah lapuk, dinding tanah/anyaman bambu yang rusak, dinding permanen yang retak/hampir roboh, Sehingga dibutuhkan Perbaikan	RTLH) Desa Gebangkerep Kecamatan Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
768	1893955	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Kurangnya drainase yang memadai menyebabkan terjadinya genangan air dan banjir saat musim hujan	Desa Jetak lengkong Kecamatan Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
769	1893988	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	Bantuan prasarana persampahan (Sepeda Motor Tiga Roda)	Keterbatasan sarana pengangkutan sampah di lingkungan masyarakat	Desa Jetak lengkong Kecamatan Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
770	1893991	NASHIH SYARIFUDDIN S.K.M., M.A.P	Bantuan kepada lembaga/organisasi masyarakat	hibah untuk MWC NU Kecamatan Sragi saat ini sangat dinamis dan berpotensi besar untuk mendukung operasional	MWC NU Kec. Sragi melalui PCNU Kab. Pekalongan Desa Kalijambe Kecamatan Sragi , Kab. Pekalongan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
771	1894079	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Terjadinya pengikisan tanah pada bantaran sungai	Desa Jetak lengkong Dukuh Blumbang Kecamatan Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
772	1894133	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Masih terdapat rumah warga dengan kondisi tidak layak huni	RTLH atas nama Sutomo Desa PegadenTengah RT 006 RW 002 Kecamatan Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
773	1894244	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Terjadinya pengikisan tanah pada bantaran sungai	Desa Pegaden Tengah RT 1 RW 1 Kecamatan Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
774	1894309	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Kondisi jalan yang sudah mengalami kerusakan	Desa Kedungpatangewu Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
775	1894404	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (TK/PAUD)	Keterbatasan jumlah ruang belajar yang tidak sebanding dengan jumlah peserta didik yang terus meningkat setiap tahun	TK Pertiwi Desa Wonorejo Kecamatan Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
776	1894463	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	Pengadaan Peralatan Belajar Mengajar (Laptop) (SD)	Masih terbatasnya sarana penunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi	SDIT Bahrul Ulum Kwayangan Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
777	1894533	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Kondisi saluran yang rusak, dangkal, dan tersumbat sehingga tidak mampu mengalirkan air secara optimal	Pekajangan Gang 11 RT 12 RW 5 Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
778	1894593	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Kondisi bangunan yang sudah mengalami kerusakan	Milahan Timur RT 05 RW 03 Kelurahan Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
779	1896266	Eko Arifiyanto., SH	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Tebing sungai sering longsor	Wilayah di Kecamatan Talun, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
780	1896309	Taufiq Rizal	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Kondisi bangunan perlu di rehabilitasi agar nyaman dalam beribadah di Musholla Asshobirin.	dk. Watugajah. Desa Curugmuncar, Petungkriyono, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
781	1896328	Taufiq Rizal	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Untuk kelancaraan kegiatan,jamaah, dibutuhkan HIbah Masjid Miftakhul Huda	Sikromong,. Desa Bantarkulon. Lebakbarang, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
782	1896340	Taufiq Rizal	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Pemerliharaan Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Pekalongan	Wilayah Kabupaten Pekalongan, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
783	1896346	Taufiq Rizal	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Lampu Penerangan Jalan Banyak Yang Rusak	Wilayah Kabupaten Pekalongan, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
784	1896369	Taufiq Rizal	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Bankeu Ke Desa untuk pengaspalan jalan lingkungan	Desa Msoyi, Talun, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
785	1896380	Taufiq Rizal	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Bankeu ke Desa untuk pengaspalan jalan lingkungan	Desa Jolotigo, Talun, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
786	1896382	Taufiq Rizal	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Bankeu ke Desa untuk pengaspalan jalan lingkungan	Desa Kayupuring. Petungkriyono, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
787	1896388	Taufiq Rizal	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Bankeu ke Desa untuk pengaspalan jalan lingkungan	Desa Tlogopakis, Petungkriyono, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
788	1896392	Taufiq Rizal	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Bankeu ke Desa untuk pengaspalan jalan lingkungan	Desa Tlogohendro. Petungkriyono, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
789	1896397	Taufiq Rizal	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Bankeu ke Desa untuk pengaspalan jalan lingkungan	Desa Curugmuncar. Petungkriyono, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
790	1896406	Taufiq Rizal	PEMBANGUNAN JARINGAN AIR MINUM PERPIPAAN (SPAM)	Belum adanya jaringan air minum	Wilayah Kec. Petungkriyono, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
791	1901236	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Kondisi jalan yang sudah mengalami kerusakan	Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
792	1901265	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Kondisi jalan yang sudah mengalami kerusakan	Desa Pegandon Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
793	1901293	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Desa Jrebeng Kembang Kecamatan Karangdadap	Desa Jrebeng Kembang Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
794	1901790	H. Saeful Bahri, S.Ag	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Benteng sungai mudah jebol saat debit air meningkat, Sehingga dibutuhkan Pembangunan Senderan Benteng sungai Pencongan	Desa Karangjompo Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
795	1901819	H. Saeful Bahri, S.Ag	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Untuk mempermudah akses para petani dalam memperluas jalur distribusi hasil pertanian sehingga dibutuhkan Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Rembun Kecamatan Siwalan , Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
796	1901839	H. Saeful Bahri, S.Ag	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Desa Rembun Kecamatan Siwalan, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
797	1901858	H. Saeful Bahri, S.Ag	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Desa Tengeng Kulon Kecamatan Siwalan, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
798	1901872	H. Saeful Bahri, S.Ag	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Desa Tengeng Wetan Kecamatan Siwalan , Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
799	1901892	H. Saeful Bahri, S.Ag	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Desa Yosorejo Kecamatan Siwalan, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
800	1901907	H. Saeful Bahri, S.Ag	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Desa Blimbing Wuluh Kecamatan Siwalan, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
801	1901919	H. Saeful Bahri, S.Ag	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan , Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
802	1901938	H. Saeful Bahri, S.Ag	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Desa Siwalan Kecamatan Siwalan, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
803	1901959	H. Saeful Bahri, S.Ag	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Desa Blacanan Kecamatan Siwalan, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
804	1901976	H. Saeful Bahri, S.Ag	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
805	1901988	H. Saeful Bahri, S.Ag	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Musholla dalam Keadaan yang sudah kurang layak untuk digunakan sehingga dibutuhkan Hibah Musholla	Musholla Nurul Iman Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
806	1901997	H. Saeful Bahri, S.Ag	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Musholla dalam Keadaan yang sudah kurang layak untuk digunakan sehingga dibutuhkan Hibah Musholla	Musholla Baitul Azizah Desa Yosorejo Kecamatan Siwalan , Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
807	1902019	H. Saeful Bahri, S.Ag	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Musholla dalam Keadaan yang sudah kurang layak untuk digunakan sehingga dibutuhkan Hibah Musholla	Masjid Jami' Al Huda Desa Blimbing Wuluh Kecamatan Siwalan, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
808	1902033	H. Saeful Bahri, S.Ag	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Desa Karanganyar Kecamatan Tirto , Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
809	1902047	H. Saeful Bahri, S.Ag	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Desa Sidorejo Kecamatan Tirto , Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
810	1902083	H. Saeful Bahri, S.Ag	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Keadaan Rumah sudah tidak layak untuk digunakan seperti Dinding bambu/kayu yang sudah lapuk, dinding tanah/anyaman bambu yang rusak, dinding permanen yang retak/hampir roboh, Sehingga dibutuhkan Perbaikan	(RTLH) atas Nama Ibu Muaqobah RT 02 RW 07 Dukuh Manyaran Desa Rembun Kecamatan Siwalan Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
811	1902107	H. Saeful Bahri, S.Ag	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Keadaan Rumah sudah tidak layak untuk digunakan seperti Dinding bambu/kayu yang sudah lapuk, dinding tanah/anyaman bambu yang rusak, dinding permanen yang retak/hampir roboh, Sehingga dibutuhkan Perbaikan	(RTLH) atas Nama Ibu Siti Rejeh RT 01 RW 06 Dukuh Rembun Lor Desa Rembun Kecamatan Siwalan , Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
812	1902131	H. Saeful Bahri, S.Ag	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Keadaan Rumah sudah tidak layak untuk digunakan seperti Dinding bambu/kayu yang sudah lapuk, dinding tanah/anyaman bambu yang rusak, dinding permanen yang retak/hampir roboh, Sehingga dibutuhkan Perbaikan	(RTLH) atas Nama Ibu Nok Imah RT 01 RW 06 Dukuh Rembun Lor Desa Rembun Kecamatan Siwalan , Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
813	1902160	H. Saeful Bahri, S.Ag	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Keadaan Rumah sudah tidak layak untuk digunakan seperti Dinding bambu/kayu yang sudah lapuk, dinding tanah/anyaman bambu yang rusak, dinding permanen yang retak/hampir roboh, Sehingga dibutuhkan Perbaikan	(RTLH) atas Nama Ibu Khotimah RT 01 RW 06 Dukuh Rembun Lor Desa Rembun Kecamatan Siwalan , Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
814	1902181	H. Saeful Bahri, S.Ag	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Keadaan Rumah sudah tidak layak untuk digunakan seperti Dinding bambu/kayu yang sudah lapuk, dinding tanah/anyaman bambu yang rusak, dinding permanen yang retak/hampir roboh, Sehingga dibutuhkan Perbaikan	(RTLH) atas Nama Ibu Khakimah RT 02 RW 05 Dukuh Rembun Lor Desa Rembun Kecamatan Siwalan Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
815	1902191	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	Pengadaan Peralatan Belajar Mengajar (Laptop) (SMP)	Masih terbatasnya sarana penunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi	SMP N 1 Kecamatan Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
816	1902202	H. Saeful Bahri, S.Ag	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Keadaan Rumah sudah tidak layak untuk digunakan seperti Dinding bambu/kayu yang sudah lapuk, dinding tanah/anyaman bambu yang rusak, dinding permanen yang retak/hampir roboh, Sehingga dibutuhkan Perbaikan	(RTLH) atas Nama Ibu Amriti RT 02 RW 05 Dukuh Rembun Lor Desa Rembun Kecamatan Siwalan Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
817	1902220	H. Saeful Bahri, S.Ag	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Keadaan Rumah sudah tidak layak untuk digunakan seperti Dinding bambu/kayu yang sudah lapuk, dinding tanah/anyaman bambu yang rusak, dinding permanen yang retak/hampir roboh, Sehingga dibutuhkan Perbaikan	(RTLH) atas Nama Ibu Wahidah RT 01 RW 04 Dukuh Rembun Lor Desa Rembun Kecamatan Siwalan Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
818	1902243	H. Saeful Bahri, S.Ag	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Keadaan Rumah sudah tidak layak untuk digunakan seperti Dinding bambu/kayu yang sudah lapuk, dinding tanah/anyaman bambu yang rusak, dinding permanen yang retak/hampir roboh, Sehingga dibutuhkan Perbaikan	(RTLH) atas Nama Bapak Zaenudin RT 01 RW 04 Dukuh Rembun Lor Desa Rembun Kecamatan Siwalan , Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
819	1902264	H. Saeful Bahri, S.Ag	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Keadaan Rumah sudah tidak layak untuk digunakan seperti Dinding bambu/kayu yang sudah lapuk, dinding tanah/anyaman bambu yang rusak, dinding permanen yang retak/hampir roboh, Sehingga dibutuhkan Perbaikan	(RTLH) atas Nama Bapak Achmad Ridho RT 01 RW 06 Dukuh Rembun Lor Desa Rembun Kecamatan Siwalan , Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
820	1902279	H. Saeful Bahri, S.Ag	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Keadaan Rumah sudah tidak layak untuk digunakan seperti Dinding bambu/kayu yang sudah lapuk, dinding tanah/anyaman bambu yang rusak, dinding permanen yang retak/hampir roboh, Sehingga dibutuhkan Perbaikan	(RTLH) atas Nama Ibu Kartini RT 01 RW 06 Dukuh Rembun Suci Desa Rembun Kecamatan Siwalan Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
821	1902287	H. Saeful Bahri, S.Ag	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Keadaan Rumah sudah tidak layak untuk digunakan seperti Dinding bambu/kayu yang sudah lapuk, dinding tanah/anyaman bambu yang rusak, dinding permanen yang retak/hampir roboh, Sehingga dibutuhkan Perbaikan	(RTLH) atas Nama Ibu Jannatul Ma'wa RT 02 RW 03 Desa Rembun Kecamatan Siwalan , Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
822	1902306	H. Saeful Bahri, S.Ag	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Keadaan Rumah sudah tidak layak untuk digunakan seperti Dinding bambu/kayu yang sudah lapuk, dinding tanah/anyaman bambu yang rusak, dinding permanen yang retak/hampir roboh, Sehingga dibutuhkan Perbaikan	(RTLH) atas Nama Ibu Faizah RT 02 RW 03 Dukuh Cokrah Desa Rembun Kecamatan Siwalan , Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
823	1902320	H. Saeful Bahri, S.Ag	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Keadaan Rumah sudah tidak layak untuk digunakan seperti Dinding bambu/kayu yang sudah lapuk, dinding tanah/anyaman bambu yang rusak, dinding permanen yang retak/hampir roboh, Sehingga dibutuhkan Perbaikan	(RTLH) atas Nama Ibu Riski Dloah RT 02 RW 05 Dukuh Rembun Lor Desa Rembun Kecamatan Siwalan , Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
824	1902336	H. Saeful Bahri, S.Ag	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Keadaan Rumah sudah tidak layak untuk digunakan seperti Dinding bambu/kayu yang sudah lapuk, dinding tanah/anyaman bambu yang rusak, dinding permanen yang retak/hampir roboh, Sehingga dibutuhkan Perbaikan	(RTLH) atas Nama Ibu Fatonah RT 02 RW 05 Dukuh Rembun Lor Desa Rembun Kecamatan Siwalan Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
825	1902358	H. Saeful Bahri, S.Ag	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Desa Wonosari Kecamatan Siwalan, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
826	1903488	H. Achmad Kozin,ST	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Masjid yang kurang layak sehingga perlu adanya perbaikan dan membutuhkan dana hibah	Masjid At Tohiriyah Dukuh Glewang RT 09 RW 04 Desa Sawangan Kec. Doro, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
827	1903500	H. Achmad Kozin,ST	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Masjid/Musholla yang kurang layak sehingga perlu adanya perbaikan dan membutuhkan dana hibah	Musholla Nurul Huda Dukuh Kasri RT 08 RW 04 Desa Sawangan Kec. Doro, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
828	1903512	H. Achmad Kozin,ST	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Masjid/Musholla yang kurang layak sehingga perlu adanya perbaikan dan membutuhkan dana hibah	Musholla Al Hikmah Dukuh Silumbung Desa Doro Kec. Doro, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
829	1903521	H. Achmad Kozin,ST	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Masjid/Musholla yang kurang layak sehingga perlu adanya perbaikan dan membutuhkan dana hibah	Musholla Baitul Maqdis Dukuh Doro Gunung RT 06 RW 03 desa Dororejo Kec. Doro, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
830	1903533	H. Achmad Kozin,ST	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Masjid/Musholla yang kurang layak sehingga perlu adanya perbaikan dan membutuhkan dana hibah	Musholla Babul Huda Dukuh Dempel Gedong RT 05 RW 02 Desa Harjosari Kec. Doro, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
831	1903541	H. Achmad Kozin,ST	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Masjid/Musholla yang kurang layak sehingga perlu adanya perbaikan dan membutuhkan dana hibah	Musholla Al Ikhsan Dukuh Dilem Wetan RT 03 RW 01 Desa Banjarsari Kec. talun, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
832	1903554	H. Achmad Kozin,ST	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Masjid/Musholla yang kurang layak sehingga perlu adanya perbaikan dan membutuhkan dana hibah	Musholla Al Barokah Dukuh Wadas RT 05 RW 01 Desa Banjarsari Kec. Talun, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
833	1903590	H. Achmad Kozin,ST	Bantuan Pupuk Pertanian	mahalnya pupuk, obat dan peralatan penunjang pertanian sehingga para petani banyak yang mandek dalam proses tanam	Kelompok Tani Kalibakung Desa kalirejo Kec. Talun, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
834	1903606	H. Achmad Kozin,ST	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	jalan menuju lahan pertanian kurang layak untuk proses distribusi dan proses tanam sehingga menghambat pekerjaan	Jalan produksi pertanian/perkebunan Desa Kalirejo Kec. Talun, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
835	1903618	H. Achmad Kozin,ST	PEMBANGUNAN JARINGAN AIR MINUM PERPIPAAN (SPAM)	kurangnya pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari warga	Dukuh Welo Lor Desa Wringinagung Kec. Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
836	1903626	H. Achmad Kozin,ST	PEMBANGUNAN JARINGAN AIR MINUM PERPIPAAN (SPAM)	kurangnya pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari warga	Desa Bligorejo Kec. doro, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
837	1903655	H. Achmad Kozin,ST	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalanan Rusak menghambat mobilitas masyarakat, rawan kecelakaan sehingga perlu adanya perbaikan	Jalan Poros Desa, Desa Bligorejo-Desa Kalimojosari, Kec. Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
838	1903666	H. Achmad Kozin,ST	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalanan Rusak menghambat mobilitas masyarakat, rawan kecelakaan sehingga perlu adanya perbaikan	Jl. Kabupaten Ruas Jl. Suroloyo-Kedempel, Desa lemahabang Kec. Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
839	1903681	H. Achmad Kozin,ST	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalanan Rusak menghambat mobilitas masyarakat, rawan kecelakaan sehingga perlu adanya perbaikan	Jalan Kabupaten ruas jalan Desa Kalimojosari-Karangdadap, Dukuh Dobyong, Desa kalimojosari kec. Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
840	1903692	H. Achmad Kozin,ST	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalanan Rusak menghambat mobilitas masyarakat, rawan kecelakaan sehingga perlu adanya perbaikan	jalan Poros Desa, SDN 03 Dororejo menuju Jl. Provinsi Larikan, Desa Harjosari Kec. Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
841	1903703	H. Achmad Kozin,ST	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalanan Rusak menghambat mobilitas masyarakat, rawan kecelakaan sehingga perlu adanya perbaikan	Jalan Poros Desa, dari Dukuh Kecembeng, Desa Randusar kec. doro menuju desa mesoyi kec. talun, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
842	1903717	H. Achmad Kozin,ST	PEMBANGUNAN / REHABILITASI JARINGAN IRIGASI	irigasi rusak perlu perbaikan untuk menghindari banjir dan air meluap	irigasi desa Doro kec. Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
843	1903750	H. Achmad Kozin,ST	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Lampu penerangan jalan mati, jalanan gelap rawan kejahatan dan kecelakaan	Kecamatan Doro dan Kecamatan Talun, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
844	1903763	H. Achmad Kozin,ST	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	kurangnya penerangan jalan/jalanan gelap sehingga rawan terjadinya kecelakaan dan kejahatan	Desa Harjosari Kec. doro, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
845	1903767	H. Achmad Kozin,ST	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	kurangnya penerangan jalan/jalanan gelap sehingga rawan terjadinya kecelakaan dan kejahatan	Desa Randusari kec. Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
846	1903769	H. Achmad Kozin,ST	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	kurangnya penerangan jalan/jalanan gelap sehingga rawan terjadinya kecelakaan dan kejahatan	Desa Kutosari Kec. Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
847	1903777	H. Achmad Kozin,ST	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	kurangnya penerangan jalan/jalanan gelap sehingga rawan terjadinya kecelakaan dan kejahatan	Desa sawangan Kec. Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
848	1903785	H. Achmad Kozin,ST	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	kurangnya penerangan jalan/jalanan gelap sehingga rawan terjadinya kecelakaan dan kejahatan	Desa Wringinagung Kec. Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
849	1903798	H. Achmad Kozin,ST	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	kurangnya penerangan jalan/jalanan gelap sehingga rawan terjadinya kecelakaan dan kejahatan	Desa Lemahabang Ke. Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
850	1903803	H. Achmad Kozin,ST	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	kurangnya penerangan jalan/jalanan gelap sehingga rawan terjadinya kecelakaan dan kejahatan	Desa rogoselo kec. Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
851	1903810	H. Achmad Kozin,ST	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	kurangnya penerangan jalan/jalanan gelap sehingga rawan terjadinya kecelakaan dan kejahatan	Desa Kalimojosari, kec. Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
852	1903813	H. Achmad Kozin,ST	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	kurangnya penerangan jalan/jalanan gelap sehingga rawan terjadinya kecelakaan dan kejahatan	Desa Doro kec. Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
853	1903822	H. Achmad Kozin,ST	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	kurangnya penerangan jalan/jalanan gelap sehingga rawan terjadinya kecelakaan dan kejahatan	Desa Bligorejo Kec. Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
854	1903828	H. Achmad Kozin,ST	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	kurangnya penerangan jalan/jalanan gelap sehingga rawan terjadinya kecelakaan dan kejahatan	Desa Banjarsari kec. Talun, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
855	1903832	H. Achmad Kozin,ST	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	kurangnya penerangan jalan/jalanan gelap sehingga rawan terjadinya kecelakaan dan kejahatan	Desa Mesoyi kec. Talun, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
856	1903837	H. Achmad Kozin,ST	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	kurangnya penerangan jalan/jalanan gelap sehingga rawan terjadinya kecelakaan dan kejahatan	Desa Donowangun Kec. Talun, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
857	1903875	H. Achmad Kozin,ST	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	ruang kelas yang sudah tidak layak perlu perbaikan	TPQ Miftahul Janah Dukuh Plumutan Desa Rogoselo Kec. Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
858	1909123	Nanang Purwidiyanto	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	KEKURANGAN TEMPAT PEMBELAJARAN ATAU PEMBUATAN GEDUNG BARU	DUKUH BUKUR DESA BUKUR RT 9 RW 2 KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
859	1909129	Nanang Purwidiyanto	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	TIDAK ADA PENERANGAN JALAN UMUM	DESA LEGOKCLILE KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
860	1909140	Nanang Purwidiyanto	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	TIDAK ADANYA LAMPU PENERANGAN JALAN	DUKUH 1 DESA BUKUR KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
861	1909152	Nanang Purwidiyanto	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	TIDAK ADANYA PENERANGAN JALAN UMUM	DESA WIRODITAN KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
862	1909156	Nanang Purwidiyanto	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	BELUM ADA DRAINASE PENUNJANG LUAPAN AIR DARI HUTAN	DUKUH 2 DESA BUKUR KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
863	1909160	Nanang Purwidiyanto	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	BELUM ADA PENERANGAN JALAN UMUM	DESA KETITANG LOR KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
864	1909175	Nanang Purwidiyanto	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	ASPAL JALAN YANG SUDAH RUSAK DIJALAN POROS	DESA KETITANG KIDUL KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
865	1909177	Nanang Purwidiyanto	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	BELUM ADANYA PENERANGAN JALAN UMUM	DESA SUMURJOMBLANGBOGO KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
866	1909185	Nanang Purwidiyanto	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	JALAN USAHA TANI SUDAH TIDAK LAYAK	DESA BUKUR KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
867	1909192	Nanang Purwidiyanto	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (TK/PAUD)	BELUM ADANYA PAGAR DAN TEMPAT WUDHU	TK ABA SRAGI DESA SRAGI KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
868	1909199	Nanang Purwidiyanto	Bantuan kepada lembaga/organisasi masyarakat	BANYUAN UNTUK KEGIATAN PEREMPUAN PARTAI AMANAT NASIONAL	KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN, Kab. Pekalongan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
869	1909202	Nanang Purwidiyanto	Bantuan sarana pendukung pertanian (Alat-alat pertanian : Traktor dan alat pertanian lainnya)	KURANGNYA ALAT FASILITAS PENUNJANG PERTANIAN	DESA REJOSARI KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
870	1909207	Nanang Purwidiyanto	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	PERLUNYA REHABILITASI MUSHOLA	MUSHOLA AL IKHLAS DESA MENJANGAN KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
871	1909210	Nanang Purwidiyanto	Penyediaan sarana dan prasarana olahraga	PENGURUKAN LAPANGAN DESA	DESA KARYOMIKTI KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN, Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Usia Dini dan Dasar
872	1909215	Nanang Purwidiyanto	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	KURANG ADANYA PENERANGAN	DESA SEMBUNGJAMBU KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
873	1909221	Nanang Purwidiyanto	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	KURANGADANYA PENERANGAN JALAN	DESA KETITANG LOR KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
874	1909228	Nanang Purwidiyanto	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	BELUM ADANYA DRAINASE	LAPANGAN DESA REJOSARI KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
875	1909230	Nanang Purwidiyanto	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	BELUM ADANYA PENERANGAN JALAN UMUM	DESA RANDUMUKTIWARENN KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
876	1909238	Nanang Purwidiyanto	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	PERLUNYA ANGGARAN UNTUK PERBAIKAN TEMPAT IBADAH	MASJID AL HIDAYAH BUKUR 3 DESA BUKUR RT 13 KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
877	1909245	Nanang Purwidiyanto	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	PEMBANGUNAN TEMPAT WUDHU	MUSHOLLA AL BAROKAH DESA BUKUR RT 6 RW 2 KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
878	1909248	Nanang Purwidiyanto	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	FASILITAS KURANG MEMADAI	MUSHOLA AL IKHLAS DESA BUKUR KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
879	1909263	Nanang Purwidiyanto	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	PERLU ADANYA REHABILITASI MUSHOLLA AL MUTTAQIN	MUSHOLLA AL MUTTAQIN DESA MENJANGAN KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
880	1909390	Dodiek Prasetyo	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Jalan tani kurang baik	Desa Kesesi, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
881	1909408	Dodiek Prasetyo	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Perlunya pembangunan TURAB/TALUD	Jl. Raya Kaibahan-Ponolawen, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
882	1909425	Dodiek Prasetyo	Bantuan prasarana persampahan (Sepeda Motor Tiga Roda)	sarana dan prasarana pengangkut sampah masih minim	SMPN 01 KESESI, KEC. KESESI, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
883	1909493	Dodiek Prasetyo	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan-jalan kabupaten dikecamatan kesesi perlu diperbaiki	Kecamatan Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
884	1915094	Patmisari	PEMBANGUNAN JARINGAN AIR MINUM PERPIPAAN (SPAM)	Belum tersedianya jaringan distribusi air bersih yang memadai dan berkelanjutan	Desa Botosari Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
885	1915115	Patmisari	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Kondisi Jalan Usaha Tani masih berupa tanah dan rusak sehingga dibutuhkan pembangunan rabat beton	Desa Sinangoh Prendeng Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
886	1915128	Patmisari	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Kondisi Jalan Usaha Tani masih berupa tanah dan mengalami kerusakan	Desa Sinangoh Prendeng Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
887	1915136	Patmisari	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Kondisi Jalan Usaha Tani masih berupa tanah dan mengalami kerusakan	Desa Tanjung Kulon Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
888	1915144	Patmisari	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Kondisi Jalan Usaha Tani masih berupa tanah dan rusak sehingga dibutuhkan pembangunan rabat beton	Desa Rowolaku Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
889	1915150	Patmisari	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Kondisi Jalan Usaha Tani masih berupa tanah dan mengalami kerusakan	Desa Sanganjoyo Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
890	1915161	Patmisari	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Kondisi Jalan Usaha Tani masih berupa tanah dan mengalami kerusakan	Desa Wonorejo Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
891	1915171	Patmisari	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Kondisi Jalan Usaha Tani masih berupa tanah dan mengalami kerusakan	Desa Kajongan Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
892	1915197	Patmisari	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Kondisi turab/talud di lokasi tersebut mengalami kerusakan dan penurunan fungsi	Desa Sinangoh Prendeng Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
893	1915205	Patmisari	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Kondisi turab/talud di lokasi tersebut mengalami kerusakan dan penurunan fungsi	Dukuh Kalirong Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
894	1915212	Patmisari	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Kondisi turab/talud di lokasi tersebut mengalami kerusakan dan penurunan fungsi	Desa Tenogo Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
895	1915230	Patmisari	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Kondisi jalan yang sudah mengalami kerusakan	Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
896	1915240	Patmisari	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Kondisi jalan yang sudah mengalami kerusakan	Desa Nyamok Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
897	1915242	Patmisari	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Kondisi jalan yang sudah mengalami kerusakan	Desa Sambiroto Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
898	1915250	Patmisari	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Kondisi jalan yang sudah mengalami kerusakan	Desa Lambanggelun kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
899	1915260	Patmisari	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Kondisi jalan yang sudah mengalami kerusakan	Desa Notogiwang kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
900	1915293	Patmisari	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Belum tersedianya bangunan TPQ yang layak dan memadai untuk kegiatan belajar mengajar	Desa Sabarwangi Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
901	1915299	Patmisari	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Kondisi Jalan Usaha Tani masih berupa tanah dan mengalami kerusakan	Desa Sambiroto Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
902	1915313	Patmisari	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Kondisi Jalan Usaha Tani masih berupa tanah dan mengalami kerusakan	Dukuh Watubelah Kelurahan Kajen Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
903	1915379	Patmisari	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Belum tersedianya saluran drainase yang memadai sehingga sering terjadi genangan air saat hujan	Desa Sambiroto Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
904	1915403	Patmisari	Rehabilitasi perpustakaan (SD)	Kondisi bangunan yang sudah mengalami kerusakan	SD N 1 Gejlig Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
905	1915413	Patmisari	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah (SD)	Kondisi bangunan ruang kelas yang sudah mengalami kerusakan	SD N 1 Sokoyoso Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
906	1915427	Patmisari	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah (SD)	Kondisi bangunan ruang kelas yang sudah mengalami kerusakan	SD N 2 Sambiroto Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
907	1915450	Patmisari	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah (SD)	Kondisi bangunan ruang kelas yang sudah mengalami kerusakan	SD N 06 Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
908	1915498	Patmisari	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Kondisi sarana dan prasarana masjid di wilayah tersebut belum memadai dan memerlukan perbaikan/peningkatan	Masjid Jami An'nur Dukuh Sijaha Desa Bedagung Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
909	1915518	Patmisari	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Kondisi sarana dan prasarana masjid di wilayah tersebut belum memadai dan memerlukan perbaikan/peningkatan	Masjid Al-Hidayah Desa Salit Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
910	1915531	Patmisari	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Kondisi sarana dan prasarana mushola di wilayah tersebut belum memadai dan memerlukan perbaikan/peningkatan	Mushola Al-Qodir Desa Rowolaku Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
911	1915545	Patmisari	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Kondisi sarana dan prasarana masjid di wilayah tersebut belum memadai dan memerlukan perbaikan/peningkatan	Masjid Jabal Nur Desa Botosari Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
912	1915561	Patmisari	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Kondisi sarana dan prasarana mushola di wilayah tersebut belum memadai dan memerlukan perbaikan/peningkatan	Mushola Al-Hidayah Desa Kajongan Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
913	1915582	Patmisari	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Kondisi sarana dan prasarana mushola di wilayah tersebut belum memadai dan memerlukan perbaikan/peningkatan	Mushola Al-Suro Desa Domiyang Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
914	1915606	Patmisari	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Kondisi sarana dan prasarana mushola di wilayah tersebut belum memadai dan memerlukan perbaikan/peningkatan	Mushola Mabahul Huda Desa Winduaji Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
915	1915617	Patmisari	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Kondisi sarana dan prasarana masjid di wilayah tersebut belum memadai dan memerlukan perbaikan/peningkatan	Masjid Al-Amin Desa Kaliombo Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
916	1915629	Patmisari	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Kondisi sarana dan prasarana masjid di wilayah tersebut belum memadai dan memerlukan perbaikan/peningkatan	Masjid Nurul Iman Desa Kaliombo Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
917	1915870	Patmisari	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Kondisi sarana dan prasarana mushola di wilayah tersebut belum memadai dan memerlukan perbaikan/peningkatan	Mushola Mustahizin Desa Garungwioro Kecamatan Kandangserang, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
918	1915873	Patmisari	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Kondisi sarana dan prasarana mushola di wilayah tersebut belum memadai dan memerlukan perbaikan/peningkatan	Mushola Baitul Mutaqin Desa Kandangserang Kecamatan Kandangserang, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
919	1915883	Patmisari	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Kondisi sarana dan prasarana mushola di wilayah tersebut belum memadai dan memerlukan perbaikan/peningkatan	Mushola Al-Hidayah Desa Sinangoh prendeng Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
920	1915894	Patmisari	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Kondisi sarana dan prasarana masjid di wilayah tersebut belum memadai dan memerlukan perbaikan/peningkatan	Masjid Al-Amin Desa Sambiroto Kecamatan Kajen , Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
921	1915908	Patmisari	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Kondisi sarana dan prasarana mushola di wilayah tersebut belum memadai dan memerlukan perbaikan/peningkatan	Mushola At-Taqwa Desa Tanggeran Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
922	1915911	Patmisari	NORMALISASI SUNGAI	Kondisi sungai di wilayah tersebut sudah mengalami pendangkalan dan penyempitan	Desa Sambiroto Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
923	1917733	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Diperlukan hibah untuk peningkatan sarana dan prasarana Pondok pesantren berupa pembuatan Kamar Mandi	Pondok Pesantren Nurul Ummah, Desa Sawangan Kec Paninggaran, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
924	1917763	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Perbaikan sarana dan prasarana di area Perumahan (Rehab Jalan, drainase, RTH Perumahan)	Jalan rusak di lingkungan perumahan sehingga diperlukan perbaikan jalan dengan pengaspalan	Perumahan Griya Kajen Indah, Desa Gandarum, Kec.Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
925	1917777	Patmisari	Rehabilitasi ruang guru / kepala sekolah / TU (SD)	Kondisi bangunan ruang kantor yang sudah mengalami kerusakan	SD N 1 Gejlig Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
926	1917801	Patmisari	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Masih terdapat rumah warga dengan kondisi tidak layak huni	Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
927	1917813	Patmisari	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Masih terdapat rumah warga dengan kondisi tidak layak huni	Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
928	1917822	Patmisari	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Masih terdapat rumah warga dengan kondisi tidak layak huni	Kecamatan Kandangserang, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
929	1917860	Patmisari	Bantuan bibit ternak	Keterbatasan modal peternak dalam pengadaan bibit ternak berkualitas	Kelompok tani Bumi Asih 3 Desa Sawangan Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
930	1917875	Patmisari	Bantuan bibit ternak	Keterbatasan modal peternak dalam pengadaan bibit ternak berkualitas	Kelompok ternak Mbabar Rezeki Desa Sambiroto Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
931	1918138	Patmisari	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Belum tersedianya jaringan irigasi yang memadai	Desa Pekiringan Ageng Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
932	1918223	Patmisari	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Masih terdapat ruas jalan yang belum memiliki penerangan jalan umum	Desa Rowolaku Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
933	1918232	Patmisari	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Masih terdapat ruas jalan yang belum memiliki penerangan jalan umum	Desa Sambiroto Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
934	1918237	Patmisari	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Masih terdapat ruas jalan yang belum memiliki penerangan jalan umum	Desa Salit Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
935	1918248	Patmisari	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Masih terdapat ruas jalan yang belum memiliki penerangan jalan umum	Desa Kutorejo Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
936	1918251	Patmisari	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Masih terdapat ruas jalan yang belum memiliki penerangan jalan umum	Desa Kebonagung Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
937	1918259	Patmisari	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Masih terdapat ruas jalan yang belum memiliki penerangan jalan umum	Desa Sanganjoyo Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
938	1918261	Patmisari	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Masih terdapat ruas jalan yang belum memiliki penerangan jalan umum	Desa Kalijoyo Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
939	1918302	Patmisari	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Masih terdapat ruas jalan yang belum memiliki penerangan jalan umum	Desa Tambakroto Kecamatan Kajen , Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
940	1918308	Patmisari	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Masih terdapat ruas jalan yang belum memiliki penerangan jalan umum	Desa Linggo Asri Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
941	1918315	Patmisari	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Masih terdapat ruas jalan yang belum memiliki penerangan jalan umum	Desa Pekiringan Ageng Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
942	1918320	Patmisari	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Masih terdapat ruas jalan yang belum memiliki penerangan jalan umum	Desa Sinangoh Prendeng Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
943	1918324	Patmisari	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Masih terdapat ruas jalan yang belum memiliki penerangan jalan umum	Desa Pringsurat Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
944	1918331	Patmisari	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Masih terdapat ruas jalan yang belum memiliki penerangan jalan umum	Desa Sokoyoso Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
945	1918336	Patmisari	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Masih terdapat ruas jalan yang belum memiliki penerangan jalan umum	Desa Brengkolang Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
946	1918341	Patmisari	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Masih terdapat ruas jalan yang belum memiliki penerangan jalan umum	Desa Wonorejo Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
947	1918343	Patmisari	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Masih terdapat ruas jalan yang belum memiliki penerangan jalan umum	Kelurahan Kajen Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
948	1918347	Patmisari	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Masih terdapat ruas jalan yang belum memiliki penerangan jalan umum	Desa Tenogo Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
949	1918350	Patmisari	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Masih terdapat ruas jalan yang belum memiliki penerangan jalan umum	Desa Domiyang Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
950	1918366	Patmisari	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Masih terdapat ruas jalan yang belum memiliki penerangan jalan umum	Desa Lambanggelun Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
951	1918371	Patmisari	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Masih terdapat ruas jalan yang belum memiliki penerangan jalan umum	Desa Notogiwang Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
952	1918375	Patmisari	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Masih terdapat ruas jalan yang belum memiliki penerangan jalan umum	Desa Bedagung Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
953	1918391	Patmisari	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Masih terdapat ruas jalan yang belum memiliki penerangan jalan umum	Desa Lumeneng Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
954	1918395	Patmisari	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Masih terdapat ruas jalan yang belum memiliki penerangan jalan umum	Desa Winduaji Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
955	1918409	Patmisari	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Masih terdapat ruas jalan yang belum memiliki penerangan jalan umum	Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
956	1918411	Patmisari	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Masih terdapat ruas jalan yang belum memiliki penerangan jalan umum	Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
957	1918417	Patmisari	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Masih terdapat ruas jalan yang belum memiliki penerangan jalan umum	Desa Tanggeran Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
958	1918419	Patmisari	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Masih terdapat ruas jalan yang belum memiliki penerangan jalan umum	Desa Kaliombo Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
959	1918428	Patmisari	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Masih terdapat ruas jalan yang belum memiliki penerangan jalan umum	Desa Botosari Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
960	1918431	Patmisari	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Masih terdapat ruas jalan yang belum memiliki penerangan jalan umum	Desa Kaliboja Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
961	1918437	Patmisari	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Masih terdapat ruas jalan yang belum memiliki penerangan jalan umum	Desa Tajur Kecamatan Kandangserang, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
962	1918439	Patmisari	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Masih terdapat ruas jalan yang belum memiliki penerangan jalan umum	Desa Kandangserang Kecamatan Kandangserang, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
963	1918443	Patmisari	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Masih terdapat ruas jalan yang belum memiliki penerangan jalan umum	Desa Lambur kecamatan Kandangserang, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
964	1918451	Patmisari	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Masih terdapat ruas jalan yang belum memiliki penerangan jalan umum	Desa Bojongkoneng Kecamatan Kandangserang, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
965	1918455	Patmisari	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Masih terdapat ruas jalan yang belum memiliki penerangan jalan umum	Desa Luragung Kecamatan Kandangserang, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
966	1918463	Patmisari	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Masih terdapat ruas jalan yang belum memiliki penerangan jalan umum	Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
967	1918473	Patmisari	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Masih terdapat ruas jalan yang belum memiliki penerangan jalan umum	Desa Klesem Kecamatan Kandangserang, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
968	1918476	H. M Kholis Jazuli	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Pemasangan bronjong (gabion) dan senderan sungai merupakan kebutuhan krusial dalam teknik sipil dan manajemen sumber daya air, terutama untuk mengatasi berbagai masalah yang ditimbulkan oleh dinamika arus sungai, sehingga dibutuhkan Bronjong atau senderan sungai	Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
969	1918477	Patmisari	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Masih terdapat ruas jalan yang belum memiliki penerangan jalan umum	Desa Bodas Kecamatan Kandangsrang, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
970	1918486	Patmisari	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Masih terdapat ruas jalan yang belum memiliki penerangan jalan umum	Desa Gembong Kecamatan Kandangserang, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
971	1918490	Patmisari	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Masih terdapat ruas jalan yang belum memiliki penerangan jalan umum	Desa Trajumas Kecamatan Kandangserang, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
972	1918495	Patmisari	Bantuan bibit ternak	Keterbatasan modal peternak dalam pengadaan bibit ternak berkualitas	Kelompok ternak Muda Berkarya Desa Botosari Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
973	1918496	H. M Kholis Jazuli	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Jalanan belum ada Lampu penerangan Jalan, Sehingga dibutuhkan LPJU	Desa Bugangan Kecamatan Kedungwuni , Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
974	1918507	H. M Kholis Jazuli	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Bangunan Sudah Kurang Layak untuk digunakan seperti dinding sudah Lapuk, Sehingga dibutuhkan Rebah TPQ Nurul Salam	Tpq Nurul Salam Dk. Sidodadi Desa Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
975	1918520	H. M Kholis Jazuli	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Jalanan Yang belum ada Lampu Penerangan Jalan, Sehingga dibutuhkan LPJU	Desa Legok Gunung Kecamatan Wonopringgo , Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
976	1918589	H. M Kholis Jazuli	Bantuan prasarana persampahan (Sepeda Motor Tiga Roda)	Keadaan Sampah yang sudah bercecer di Jalanan, Sehingga dibuuthkan Alat Pengangkut sampah tiga roda	Dk. Prawasan Timur Desa Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni , Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
977	1918600	H. M Kholis Jazuli	Bantuan prasarana persampahan (Sepeda Motor Tiga Roda)	Keadaan Sampah yang sudah bercecer di Jalanan, Sehingga dibutuhkan Alat Pengangkut sampah tiga roda	Desa Pajomblangan Kecamatan Kedungwuni , Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
978	1918633	H. M Kholis Jazuli	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SD)	Lonjakan jumlah siswa kelebihan kapasitas sehingga dibutuhkan Ruang Kelas Baru	MI Walisongo Dk. Paesan Desa Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
979	1918647	H. M Kholis Jazuli	Bantuan prasarana persampahan (Sepeda Motor Tiga Roda)	Keadaan Sampah yang sudah bercecer di Jalanan, Sehingga dibutuhkan Alat Pengangkut sampah tiga roda	Ponpes Nahjul Hidayah Dk. Capgawen Utara Kedungwuni Timur, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
980	1918774	Fatkhiana Dewi,SH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalanan yang sudah mengalami kerusakan dan berlobang sehingga dibutuhkan Rehabilitasi Jalan/ Pengaspalan/Pavingisasi	Desa Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
981	1918775	Fatkhiana Dewi,SH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalanan yang sudah mengalami kerusakan dan berlobang sehingga dibutuhkan Rehabilitasi Jalan/ Pengaspalan/Pavingisasi	Desa Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
982	1918778	Fatkhiana Dewi,SH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalanan yang sudah mengalami kerusakan dan berlobang sehingga dibutuhkan Rehabilitasi Jalan/ Pengaspalan	Desa Proto Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
983	1918781	Fatkhiana Dewi,SH	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Pipa atau saluran yang dibangun terlalu kecil untuk menampung volume air, terutama saat curah hujan tinggi sehingga dibutuhkan Pembangunan Drainase	Dk. Capgawen Utara Desa Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
984	1918785	Fatkhiana Dewi,SH	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Pipa atau saluran yang dibangun terlalu kecil untuk menampung volume air, terutama saat curah hujan tinggi sehingga dibutuhkan Pembangunan Drainase	Dk. Sidodadi Desa Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
985	1918787	Fatkhiana Dewi,SH	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Pipa atau saluran yang dibangun terlalu kecil untuk menampung volume air, terutama saat curah hujan tinggi sehingga dibutuhkan Pembangunan Drainase	Desa Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
986	1918789	Fatkhiana Dewi,SH	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Pipa atau saluran yang dibangun terlalu kecil untuk menampung volume air, terutama saat curah hujan tinggi sehingga dibutuhkan Pembangunan Drainase	MI WALISONGO Paesan Desa Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
987	1918801	Fatkhiana Dewi,SH	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (SD)	Belum tertatanya Lingkungan Halaman MI Walisongo Paesan, Sehingga dibutuhkan Pavingisasi	Dk. Paesan Desa Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
988	1918808	Fatkhiana Dewi,SH	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (TK/PAUD)	Lonjakan jumlah siswa kelebihan kapasitas sehingga dibutuhkan Ruang Kelas Baru	TK Aisyiyah Desa Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
989	1918811	Fatkhiana Dewi,SH	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Keadaan Rumah sudah tidak layak untuk digunakan seperti Dinding bambu/kayu yang sudah lapuk, dinding tanah/anyaman bambu yang rusak, dinding permanen yang retak/hampir roboh, Sehingga dibutuhkan Perbaikan	Desa Kedungwuni Barat Kecamatan Kedugwuni , Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
990	1918813	Fatkhiana Dewi,SH	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Keadaan Rumah sudah tidak layak untuk digunakan seperti Dinding bambu/kayu yang sudah lapuk, dinding tanah/anyaman bambu yang rusak, dinding permanen yang retak/hampir roboh, Sehingga dibutuhkan Perbaikan	Desa Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni , Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
991	1918959	Fatkhiana Dewi,SH	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Tidak memiliki akses sanitasi yang layak (MCK) dan/atau tidak memiliki sumber air minum yang memadai, Sehingga dibutuhkan Rumah Layak Huni Baru	Desa Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
992	1918961	Fatkhiana Dewi,SH	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Tidak memiliki akses sanitasi yang layak (MCK) dan/atau tidak memiliki sumber air minum yang memadai, Sehingga dibutuhkan Rumah Layak Huni Baru	Desa Kedungpatangewu Kecamatan Kedungwuni , Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni
993	1918968	Fatkhiana Dewi,SH	Fasilitasi Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	kondisi ekonomi lemah yang ditunjukkan dengan rendahnya pendapatan, keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta kondisi tempat tinggal yang tidak layak ,Sehingga dibutuhkan bantuan UEP	UEP Atas Nama Bu Endang Kecamatan Wonopringgo , Kab. Pekalongan	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
994	1918973	Fatkhiana Dewi,SH	Fasilitasi Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	kondisi ekonomi lemah yang ditunjukkan dengan rendahnya pendapatan, keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta kondisi tempat tinggal yang tidak layak ,Sehingga dibutuhkan bantuan UEP	UEP Atas Nama Bapak Rochim Kecamatan Wonopringgo , Kab. Pekalongan	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
995	1918977	Fatkhiana Dewi,SH	Fasilitasi Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	kondisi ekonomi lemah yang ditunjukkan dengan rendahnya pendapatan, keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta kondisi tempat tinggal yang tidak layak ,Sehingga dibutuhkan bantuan UEP	UEP Atas Nama Bu Tina Kecamatan Wonopringgo , Kab. Pekalongan	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
996	1918982	Fatkhiana Dewi,SH	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Karena kapasitas terbatas atau proses angkut yang kurang rapat, sampah sering tercecer di jalan selama perjalanan menuju TPS, sehingga dibutuhkan Alat pengangkut sampah sepeda motor tiga roda	Madin Al JIhad Dk. Madukaran Desa Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
997	1918986	Fatkhiana Dewi,SH	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Karena kapasitas terbatas atau proses angkut yang kurang rapat, sampah sering tercecer di jalan selama perjalanan menuju TPS, sehingga dibutuhkan Alat pengangkut sampah sepeda motor tiga roda	Madin Madin Hidayatul athfal Dk. Pesantunan Desa Kedungwuni Barat KecamatanKedungwuni , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
998	1918988	Fatkhiana Dewi,SH	Hibah Karang Taruna Kabupaten Pekalongan	Karena kapasitas terbatas atau proses angkut yang kurang rapat, sampah sering tercecer di jalan selama perjalanan menuju TPS, sehingga dibutuhkan Alat pengangkut sampah sepeda motor tiga roda	Bumdes Desa Salakbrojo Kecamatan Kedungwuni , Kab. Pekalongan	Dinas Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
999	1918991	Fatkhiana Dewi,SH	Hibah Karang Taruna Kabupaten Pekalongan	Karena kapasitas terbatas atau proses angkut yang kurang rapat, sampah sering tercecer di jalan selama perjalanan menuju TPS, sehingga dibutuhkan Alat pengangkut sampah sepeda motor tiga rodakara	Bumdes Desa Rengas Kecamatan Kedungwuni , Kab. Pekalongan	Dinas Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1000	1918995	Fatkhiana Dewi,SH	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (TK/PAUD)	Keterbatasan sarana Pembelajaran Digital sehingga dibutuhkan Peralatan belajar Pengadaan alat permainan edukatif (APE) Luar Ruang	KB mentari Karangdowo Desa Krangdowo Kecamatan Kedungwuni , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Perlengkapan PAUD
1001	1918997	Fatkhiana Dewi,SH	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (TK/PAUD)	Lonjakan jumlah siswa kelebihan kapasitas sehingga dibutuhkan Ruang Kelas Baru	TK Puri Desa Kecamatan Kedungwuni , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1002	1919000	Fatkhiana Dewi,SH	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Desa Salakbrojo Kecamatan Kedungwuni , Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1003	1919004	Fatkhiana Dewi,SH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalanan yang sudah mengalami kerusakan dan berlobang sehingga dibutuhkan Perbaikan Jalan	Desa Salakbrojo Kecamatan Kedungwuni , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1004	1919011	H. Edy Haryanto, SE	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalanan yang sudah mengalami kerusakan dan berlobang sehingga dibutuhkan Rehabilitasi Jalan	Desa Nyamok Kecamatan Kajen , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1005	1919015	H. Edy Haryanto, SE	Perbaikan sarana dan prasarana di area Perumahan (Rehab Jalan, drainase, RTH Perumahan)	Jalanan yang sudah mengalami kerusakan dan berlobang sehingga dibutuhkan Rehabilitasi Jalan	Prumahan PT Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen , Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
1006	1919018	H. Edy Haryanto, SE	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Musholla dalam keadaan yang kurang layak untuk digunakan seperti Dinding yang sudah lapuk dan atap yang bocor sehingga dibutuhkan HIbah Musholla Miftakhul Huda	Musholla Miftakhul Huda Desa Pekiringan Alit Kecamatan Kajen , Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1007	1919021	H. Edy Haryanto, SE	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Musholla dalam keadaan yang kurang layak untuk digunakan seperti Dinding yang sudah lapuk dan atap yang bocor sehingga dibutuhkan HIbah Musholla Al Muhajirin	Desa Pekiringan Alit Kecamatan Kajen , Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1008	1919023	H. Edy Haryanto, SE	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Desa Winduaji Kecamatan Kajen , Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1009	1919041	H. Edy Haryanto, SE	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Kerentanan terhadap Banjir Besar di aliran sungai, sehingga dibutuhkan pembangunan Bronjong sungai	Kelurahan Kajen Kecamatan Kajen , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1010	1919043	H. Edy Haryanto, SE	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Kerentanan terhadap Banjir Besar di aliran sungai, sehingga dibutuhkan pembangunan Bronjong sungai	Desa Winduaji Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1011	1919045	H. Edy Haryanto, SE	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Untuk mempermudah akses para petani dalam memperluas jalur distribusi hasil pertanian sehingga dibutuhkan Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Kutorejo Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
1012	1919054	H. AFANDI	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (SMP)	Keterbatasan sarana dan prasarana Pembelajaran di sekolah sehingga dibutuhkan Pengadaan sarana dan Prasarana meja dan kursi murid dan kursi guru	MTS NU Desa Pacar kecamatan Tirto , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Mebel Sekolah
1013	1919058	H. AFANDI	Bantuan bibit ternak	peningkatan produksi perikanan budi daya perlu bantuan penyediaan benih ikan untuk ternak Ikan	Desa Jeruksari Kecamatan Tirto , Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
1014	1919061	H. AFANDI	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Desa Tanjung Kecamatan Tirto , Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1015	1919064	H. AFANDI	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Lonjakan jumlah siswa kelebihan kapasitas sehingga dibutuhkan Ruang Kelas Baru TPQ Al Mahfudz	TPQ Al Mahfudz Desa Pucung Kecamatan Tirto , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1016	1919065	H. AFANDI	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Untuk mempermudah akses para petani dalam memperluas jalur distribusi hasil pertanian sehingga dibutuhkan Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Silirejo Kecamatan Tirto , Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
1017	1919067	H. AFANDI	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Desa Silirejo Kecamatan Tirto , Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1018	1919081	JAHIRIN M.H	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (SD)	Pembangunan pagar sering kali merupakan bagian dari pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan yang ditetapkan, agar sekolah memiliki fasilitas penunjang yang memadai, sehingga dibutuhkan Pembangunan Pagar untuk SD 01 Lambanggelun Kec Paninggaran	SD Lambanggelun Desa Lambanggelun Kecamatan Paninggaran , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1019	1919228	EKO PAMUJI	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	jalan gelap kurangnya penerangan Jalan sehingga rawan kecelakaan dan tindak kejahatan	Desa Karangrejo Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1020	1919239	EKO PAMUJI	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (TK/PAUD)	Kurang memadai untuk sarpras Paud Insan Robbani	Paud Insan Robbani Desa Karangrejo KEc. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
1021	1919251	EKO PAMUJI	PEMBANGUNAN / REHABILITASI JARINGAN IRIGASI	perlunya pembenahan irigasi demi kelancaraan pembuangan air disaat hujan agar tidak terjadi banjir atau genangan air yang berlebihan	Desa Pantirejo Kecamatan Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
1022	1919255	EKO PAMUJI	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	perlunya pemeliharaan drainase agar kerja sistem drainase bisa lbih optimal dari sebelumnya	Desa Pantirejo Kecamatan Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
1023	1919265	EKO PAMUJI	Bantuan prasarana persampahan (Sepeda Motor Tiga Roda)	Perlunya motor roda 3 untuk pengangkutan sampah agar bisa dibuang ke TPS	iqro' club desa tanjungsari Kec. Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
1024	1919277	EKO PAMUJI	Bantuan bibit ternak	kurangnya modal dan agar kelompok tani bisa maju demi terciptanya ketahanan pangan masyarakat perlu adanya bantuan ternak kambing	Kelompok Tani Sari Makmur Desa Bulaksari Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
1025	1919288	EKO PAMUJI	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalanan rusak perlu adanya pengaspalan jalan agar mobilitas masyarakat lancar.	jalan musholla at-tabiin Dkh. pesantren RT 12 RW 02 Kelurahan Sragi Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1026	1919306	EKO PAMUJI	PEMBANGUNAN / REHABILITASI JARINGAN IRIGASI	perlunya pembenahan irigasi demi kelancaraan pembuangan air disaat hujan agar tidak terjadi banjir atau genangan air yang berlebihan	Desa Bulaksari Kecamatan Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
1027	1919309	EKO PAMUJI	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	perlunya pemeliharaan drainase agar kerja sistem drainase bisa lbih optimal dari sebelumnya	Desa Bulaksari Kecamatan Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
1028	1919316	EKO PAMUJI	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Talud JUT sudah rusak perlunya perbaikan untuk mobilitas para petani lebih mudah	JUT Desa Bulaksari Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
1029	1919324	EKO PAMUJI	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	jalan gelap kurangnya penerangan Jalan sehingga rawan kecelakaan dan tindak kejahatan	Desa Mrican Kec. Sragi , Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1030	1919328	EKO PAMUJI	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	jalan gelap kurangnya penerangan Jalan sehingga rawan kecelakaan dan tindak kejahatan	Desa Bulaksari-Desa Kwigaran Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1031	1919332	EKO PAMUJI	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	jalan gelap kurangnya penerangan Jalan sehingga rawan kecelakaan dan tindak kejahatan	Desa Krasak Ageng KEc. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1032	1919337	EKO PAMUJI	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	perlunya pemeliharaan drainase agar kerja sistem drainase bisa lbih optimal dari sebelumnya	Desa Krasak ageng Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
1033	1919346	EKO PAMUJI	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Jalan menuju lahan pertanian tidak memadai untuk mobilitas petani	Desa Krasak Agneg Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
1034	1919348	EKO PAMUJI	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Jalan menuju lahan pertanian tidak memadai untuk mobilitas petani	Desa Bulaksari Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1035	1919349	EKO PAMUJI	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Jalan menuju lahan pertanian tidak memadai untuk mobilitas petani	Desa Tegal Suruh Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
1036	1919364	EKO PAMUJI	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Talud sudah tidak layak/rusak perlunya perbaikan demi keslamatan masyarakat yang melewatinya	Desa Sumub Kidul Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1037	1919381	EKO PAMUJI	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (TK/PAUD)	kurangnya ruang kelas untuk proses belajar mengajar anak-anak	TPA Mutiara Bangsa Desa Kalijambe Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1038	1919393	EKO PAMUJI	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (TK/PAUD)	kurangnya dan sudah tidak layaknya sarpras yang ada perlu pembangunan dan pengadaan	KB Permata Hati Desa Bulaksari Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1039	1919412	EKO PAMUJI	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	jalan gelap kurangnya penerangan Jalan sehingga rawan kecelakaan dan tindak kejahatan	Desa Pantianom Kec. Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1040	1919415	EKO PAMUJI	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	jalan gelap kurangnya penerangan Jalan sehingga rawan kecelakaan dan tindak kejahatan	Desa Randumukti Waren Kec. Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1041	1919424	EKO PAMUJI	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Jalan menuju lahan pertanian tidak memungkinkan untuk mobilitas petani	Desa Pantianom Kec. Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
1042	1919429	EKO PAMUJI	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	perlunya pemeliharaan drainase agar kerja sistem drainase bisa lbih optimal dari sebelumnya	Desa Pantianom Kec. Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
1043	1919436	EKO PAMUJI	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	tebing sungai rawan longsor membahayan masyarakat dan menjadikan pendagkalan sungai	sungai Desa Pantianom Kec. Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1044	1919442	EKO PAMUJI	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (TK/PAUD)	kurangnya dan sudah tidak layaknya sarpras yang ada perlu pembangunan dan pengadaan	TK Pertiwi Desa Pantianom Kec. Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
1045	1919449	EKO PAMUJI	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (SD)	kurangnya dan sudah tidak layaknya sarpras yang ada perlu pembangunan dan pengadaan	SD Muhammadiyah Bojong Desa Rejosari Kec. Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1046	1919680	EKO PAMUJI	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	perlunya pembangunan irigasi untuk lahan pertanian, agar sirkulasi air menuju sawah menjadi lebih mudah	Desa Bulaksari Kec. sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
1047	1919702	EKO PAMUJI	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	jalan gelap kurangnya penerangan Jalan sehingga rawan kecelakaan dan tindak kejahatan	Desa Bulaksari Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1048	1919755	EKO PAMUJI	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	perlunya rehabilitasi mushola karena musholla sudah tidak layak	Musholla Al-Ihsan Dk. Karangasem RT 07 RW 03 Desa Podosari Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1049	1919815	EKO PAMUJI	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (TK/PAUD)	kurangnya dan sudah tidak layaknya sarpras yang ada perlu pembangunan dan pengadaan	TK IT Assalam Desa Tegalontar Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
1050	1919828	EKO PAMUJI	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Jalan menuju lahan pertanian tidak memadai dan rusak,	Desa Tegalsuruh Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
1051	1919841	EKO PAMUJI	PEMBANGUNAN / REHABILITASI JARINGAN IRIGASI	perlunya pembenahan irigasi demi kelancaraan pembuangan air disaat hujan agar tidak terjadi banjir atau genangan air yang berlebihan	Desa Krasak Ageng Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
1052	1919858	EKO PAMUJI	Hibah Karang Taruna Kabupaten Pekalongan	perlunya peralatan olahraga untuk karangtaruna	Karangtaruna Desa Bulaksari Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1053	1919875	EKO PAMUJI	Perbaikan sarana dan prasarana di area Perumahan (Rehab Jalan, drainase, RTH Perumahan)	perlunya pemeliharaan drainase agar kerja sistem drainase bisa lbih optimal dari sebelumnya	Drainase jalan Kabupaten Desa Pantianom Kec. Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
1054	1919891	EKO PAMUJI	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (TK/PAUD)	kurangnya dan sudah tidak layaknya sarpras yang ada perlu pembangunan dan pengadaan	PAUD IT Mutiara Umat Desa Duwet Kec. Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
1055	1919986	EKO PAMUJI	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	perlunya perbaikan musholla karena sudah tidak layak	Musholla Al Ikhlas Desa Karyomukti Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1056	1919999	EKO PAMUJI	Hibah Karang Taruna Kabupaten Pekalongan	perlunya bantuan peralaratan olahraga untuk karangtaruna	Karangtaruna desa Pantianom Kec. Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1057	1920015	EKO PAMUJI	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (TK/PAUD)	kurangnya ruang kelas untuk proses belajar mengajar	TPA Mutiara Umat Perum Aditama Desa Ketitang Kidul Kec. bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1058	1920047	EKO PAMUJI	Bantuan Pupuk Pertanian	langkanya pupuk untuk pertanian	Kelompok Tani Sari Makmur Desa Bulaksari Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1059	1920068	EKO PAMUJI	Bantuan Pupuk Pertanian	langkanya pupuk untuk pertanian	Kelompok Tani Gempol Pule Desa Tegal Suruh Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1060	1920072	EKO PAMUJI	Bantuan Pupuk Pertanian	langkanya pupuk untuk pertanian	Kelompok Tani Mukti Desa Pantianom Kec Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1061	1920241	Patmisari	Bantuan bibit ternak	Keterbatasan modal peternak dalam pengadaan bibit ternak berkualitas	Kelompok Mandiri Jaya Desa Sambiroto Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
1062	1920367	EKO PAMUJI	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	tidak adana bedil bak pengaburan persawahan/RJIT	Desa Krasak Ageng Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
1063	1920372	EKO PAMUJI	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	tidak adanya talud penopang jalan	Desa Sumub Kidul Kec. sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1064	1920450	Dinda Aniva Nutkhi, S.H	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	perlunya rehabilitasi JUT agar mobilitas petani lebih mudah karena JUT sudah rusak	Desa Wuled Kec. Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
1065	1920476	Dinda Aniva Nutkhi, S.H	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	jalan rusak, mobilitas warga menjadi sulit rawan terjadinya kecelakaan	jalan poros Desa Wuled-rengas, Kec. tirto , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1066	1920521	Dinda Aniva Nutkhi, S.H	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	jalan gelap kurangnya penerangan Jalan sehingga rawan kecelakaan dan tindak kejahatan	Desa wuled menuju desa rengas, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1067	1920547	Dinda Aniva Nutkhi, S.H	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Perlunya pembangunan talud agar dinding sungai tidak longsor	Sungai Desa Wuled-Pucung, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1068	1920562	Dinda Aniva Nutkhi, S.H	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	jalan gelap kurangnya penerangan Jalan sehingga rawan kecelakaan dan tindak kejahatan	Desa pandanarum, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1069	1920577	Dinda Aniva Nutkhi, S.H	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Jalan menuju lahan pertanian tidak ada	Desa pandanarum kec. Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
1070	1925769	Budi Santosa	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (SD)	Pembangunan pagar sering kali merupakan bagian dari pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan yang ditetapkan, agar sekolah memiliki fasilitas penunjang yang memadai, sehingga dibutuhkan Pembangunan Pagar untuk Pos Paud Tunas Bangsa Kwagean	Desa Kwagean Kecamatan Wonopringgo , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1071	1925793	Budi Santosa	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalanan dengan kondisi yang sudah rusak sehingga dibutuhkan Rehabilitasi Jalan	Desa Wonopringgo Kecamatan Wonopringgo , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1072	1925811	Budi Santosa	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (TK/PAUD)	Lonjakan Jumlah Siswa Kelebihan Kapasitas sehingga dibutuhkan Ruang Kelas Baru untuk POS Paud Tunas Bangsa Kwagean	Desa Kwagean Kecamatan Wonopringgo , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1073	1925981	JAHIRIN M.H	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Untuk mendukung operasional pendidikan nonformal bagi peserta didik Paket A, B, dan C, Sehingga dibutuhkan Bantuan untuk PKBM Akar Nusa Paninggaran)	Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
1074	1926004	JAHIRIN M.H	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Kerentanan terhadap Banjir Besar di aliran sungai, sehingga dibutuhkan pembangunan Bronjong sungai DK. Gunung Atas Desa Paninggaran	Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1075	1926021	JAHIRIN M.H	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalanan dengan kondisi yang sudah rusak sehingga dibutuhkan Pembangunan Pengaspalan Jalan DK. Cokrah Desa Paninggaran	Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1076	1926040	JAHIRIN M.H	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Pipa atau saluran yang dibangun terlalu kecil untuk menampung volume air, terutama saat curah hujan tinggi sehingga dibutuhkan Pembangunan Drainase Dk. Besuki	Dk. Besuki Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
1077	1926057	JAHIRIN M.H	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Untuk mempermudah akses para petani dalam memperluas jalur distribusi hasil pertanian sehingga dibutuhkan Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dk. Cokrah Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
1078	1926069	JAHIRIN M.H	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	LPJU Desa Domiyang Kecamatan Paninggaran , Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1079	1926133	Dinda Aniva Nutkhi, S.H	PEMBANGUNAN / REHABILITASI JARINGAN IRIGASI	Perlunya pembuatan sodetan air menuju sungai sengkareng agar air bisa mengalir dan tidak menggenang	Desa Ngalian Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
1080	1926149	Dinda Aniva Nutkhi, S.H	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (SD)	perlunya penataan halaman sd dikarenakan tidak layaknya halaman dan kurang rapihnya halaman sekolah	SD Negeri Ngalian, Desa Ngalian Kec. Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1081	1926156	Dodiek Prasetyo	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (TK/PAUD)	Halaman sekolah PAUD/KB yang perlu diperbaiki dan di tata	PAUD PERMATA HATI Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
1082	1926192	Dodiek Prasetyo	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (TK/PAUD)	Perlunya halaman sekolah Tk yang harus diperbaiki	TK SIWIDODO Ds. SIDOSARI Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
1083	1926211	Dodiek Prasetyo	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (TK/PAUD)	Pentingnya kelas baru untuk pembelajaran PAUD/KB	PAUD/KB BAITUL MAKMUR, Ds. Krandon, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1084	1926225	Dodiek Prasetyo	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Jalan tani belom diperbaiki	Desa Kaibahan, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1085	1926974	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	kondisi jalan yang rusak tidak nyaman untuk dilewati kendaraan	Dukuh Kawedanan , Kel Kajen Kec.Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1086	1926981	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Kondisi sarana dan prasarana Pondok Pesantren kurang memadai sehingga diperlukan hibah untuk rehabilitasi	Pondok Pesantren Nurul Huda, Simbang Kulon, Kec Buaran, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1087	1926987	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Diperlukan hibah untuk peningkatan sarana dan prasarana Madrasah diniyah	Madrasah Diniyah Almukaromah, Dukuh Krajan, Desa Lumeneng Kec Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
1088	1930572	JAHIRIN M.H	Bantuan kepada lembaga/organisasi masyarakat	Belum adanya Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Ringan Tangan Indonesia)	Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran , Kab. Pekalongan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
1089	1932687	H. Achmad Kozin,ST	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	masjid perlu renovasi karena sudah tidak layak perlu tambahan biaya renov	Masjid Al Hasanah Desa Sidosari Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1090	1933031	H. Mashadi, S.H., M.H	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	perlunya peningkatan jalan dan jembatan	kelurahan kajen, kec. kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1091	1933095	H. Mashadi, S.H., M.H	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	tidak adanya bronjong sungai, tebing sungai rawan longsor	Kali windu sebelah barat jembatan desa gandarum kec. kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1092	1933122	H. Mashadi, S.H., M.H	PEMBANGUNAN / REHABILITASI JARINGAN IRIGASI	perlunya pembenahan irigasi demi kelancaraan pembuangan air disaat hujan agar tidak terjadi banjir atau genangan air yang berlebihan	Desa Kutorejo Kec. Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
1093	1933272	H. Mashadi, S.H., M.H	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah (SD)	Ruang kelas sudah tidak layak untuk proses belajar mengajar	SD N 01 Gembong, Desa gembong kecamatan kandangserang, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
1094	1933318	H. Mashadi, S.H., M.H	Perbaikan sarana dan prasarana di area Perumahan (Rehab Jalan, drainase, RTH Perumahan)	jalan rusak dan drainase kurang baik, perlu adanya perbaikan drainase dan pengaspalan jalan	Perumahan Graha Alfa mandiri Desa Gandarum Kec. kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
1095	1933368	H. Mashadi, S.H., M.H	PEMBANGUNAN / REHABILITASI JARINGAN IRIGASI	perlunya pembangunan turap irigasi	Desa Gandarum Kec. kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
1096	1933401	H. Mashadi, S.H., M.H	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	musholla perlu rehabilitasi demi kenyamanan saat beribadah	Musholla Al Islah desa pekiringan alit kec. kajen, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1097	1933431	H. Mashadi, S.H., M.H	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	perlunya perbaikan masjid demi kenyamanan saat beribadah	Masjid Al Muhajirin Perumahan Graha Alfa Mandiri, Kec. kajen, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1098	1933459	H. Mashadi, S.H., M.H	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	perlunya dana untuk keperluan panti asuhana anak yatim	Panti asuhan anak yatim (PAY) Kelurahan kajen, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1099	1933795	H. Mashadi, S.H., M.H	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Turap Drainase, perlunya pemeliharaan drainase agar kerja sistem drainase bisa lbih optimal dari sebelumnya	Kali Desa Gandarum, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
1100	1933819	H. Mashadi, S.H., M.H	PEMBANGUNAN / REHABILITASI JARINGAN IRIGASI	perlunya pembenahan irigasi demi kelancaraan pembuangan air disaat hujan agar tidak terjadi banjir atau genangan air yang berlebihan	Utara Dukuh Karagan utara desa Gandarum Kec. Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
1101	1933833	H. Mashadi, S.H., M.H	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	jalan gelap kurangnya penerangan Jalan sehingga rawan kecelakaan dan tindak kejahatan	Dukuh Bandar Desa gandarum Kec Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1102	1933886	H. Mashadi, S.H., M.H	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	perlunya peningkatan jalan	jembatan jalan poros desa gandarum-sinangoh prendeng (Dkh. mloko Kajongan), Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1103	1933892	H. Mashadi, S.H., M.H	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	jalan gelap kurangnya penerangan Jalan sehingga rawan kecelakaan dan tindak kejahatan	Desa Bedagung Kec. Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1104	1933902	H. Mashadi, S.H., M.H	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	jalan gelap kurangnya penerangan Jalan sehingga rawan kecelakaan dan tindak kejahatan	Desa Domiyang Kec. Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1105	1933910	H. Mashadi, S.H., M.H	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	jalan gelap kurangnya penerangan Jalan sehingga rawan kecelakaan dan tindak kejahatan	Desa Gejlig Kec. Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1106	1933914	H. Mashadi, S.H., M.H	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	jalan gelap kurangnya penerangan Jalan sehingga rawan kecelakaan dan tindak kejahatan	Desa Nyamok Kec. kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1107	1933930	H. Mashadi, S.H., M.H	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	jalan gelap kurangnya penerangan Jalan sehingga rawan kecelakaan dan tindak kejahatan	Desa Pekiringan Alit Kec. kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1108	1934265	Drs.H. Abdul Munir	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SD)	Untuk meningkatkan kapasitas sekolah,memenuhi kebutuhan ruang belajar yang memahadi akibat peningkatan jumlah siswa	MI Walisoongo Desa Logandeng, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1109	1934304	Drs.H. Abdul Munir	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Musholla yang sudah tidak layak digunakan seperti dinding yang sudah lapuk dan atap yang bocor, sehingga dibutuhkan hibah.	Hibah Musholla Nurul Wahid Praan Desa Salakbrojo Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1110	1934962	Dra.Hj.Hindun . MH	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Kurangnya sarana dan Prasarana Alat Rebana sehingga dibutuhkan Sapras Rebana	Tpq Hidayatul Mubtadiin Desa Delegtukang Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
1111	1934997	Dra.Hj.Hindun . MH	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Kurangnya sarana dan Prasarana Alat Rebana sehingga dibutuhkan Sapras Rebana	Madrasah Diniyah Kepatihan Desa Kepatihan Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Perlengkapan PAUD

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1112	1935178	Dra.Hj.Hindun . MH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Kerentanan terhadap Banjir Besar di aliran sungai, sehingga dibutuhkan senderan Jalan Desa Delegtukang - Desa Karangajti	Desa Delegtukang - Desa Karangajti Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1113	1935220	Dra.Hj.Hindun . MH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalanan dengan kondisi yang sudah rusak sehingga dibutuhkan Rehab Jalan Desa Delegtukang - Desa Karangjati	Desa Delegtukang - Desa Karangjati Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1114	1935287	Dra.Hj.Hindun . MH	Bantuan sarana pendukung pertanian (Alat-alat pertanian : Traktor dan alat pertanian lainnya)	Dengan bantuan alat, petani dapat menekan biaya tenaga kerja manual yang biasanya mahal, Sehingga dibutuhkan Sapras pendukung pertanian berupa Traktor	Kelompok Tani Waru Kidul Desa Waru Kidul Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
1115	1935332	H. Mashadi, S.H., M.H	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	perlunya peningkatan jalan berupa rabat beton	jalan poros desa gandarum - kajongan Kec. Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1116	1935386	H. Mashadi, S.H., M.H	REHABILITASI JEMBATAN	perlunya perbaikan jembatan karena jembatan rusak	Jembatan jalan poros desa Kajongan - Gandarum, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehablitiasi Jembatan
1117	1935428	H. Mashadi, S.H., M.H	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	perlunya jalan menuju lahan pertanian agar memudahkan petani untuk mobilitas hasil panen	Desa Pekiringan ageng Kec. Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
1118	1935457	H. Mashadi, S.H., M.H	PEMBANGUNAN / REHABILITASI JARINGAN IRIGASI	perlunya pembenahan irigasi, turap, dan drainase demi kelancaran pembuangan air	utara dukuh windu desa gandarum kec. kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
1119	1935470	H. Mashadi, S.H., M.H	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	tidak danya dinding penguat tebing sungai, dinding sungai rawan longsor	sungai desa pekiringan alit kec. kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1120	1935490	H. Mashadi, S.H., M.H	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (SMP)	perlunya rehabilitasi dan pembangunan ulang pagar karena pagar sudah rawan ambruk	SMP N 1 kajen kec. kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1121	1935511	H. Mashadi, S.H., M.H	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	perlunya pembangunan irigasi ke lahan pertanian agar kebun/sawah bisa terairi air dengan baik	Desa pringsurat kec. Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
1122	1935530	H. Mashadi, S.H., M.H	PEMBANGUNAN JARINGAN AIR MINUM PERPIPAAN (SPAM)	kurangnya pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari warga	Desa Pringsurat Kec. Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
1123	1935576	H. Mashadi, S.H., M.H	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	perlunya pembangunan/pemeliharaan drainase agar sistem kerja drainase bisa lebih optimal	ruas jalan Trajumas-Lengsar, Desa Trajumas Kec. kandangserang, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1124	1935595	H. Mashadi, S.H., M.H	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	perlunya rehab gedung karena gedung sudah tidak layak untuk kegiatan belajar mengajar TPQ	TPQ Ar Rosyid Desa Pekiringan Alit Kec Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
1125	1935698	Dra.Hj.Hindun . MH	Bantuan sarana pendukung pertanian (Alat-alat pertanian : Traktor dan alat pertanian lainnya)	Dengan bantuan alat, petani dapat menekan biaya tenaga kerja manual yang biasanya mahal, Sehingga dibutuhkan Sapras pendukung pertanian beruba Traktor	Kelompok tani Wiradesa Desa Wiradesa Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
1126	1935853	Drs.H. Abdul Munir	Hibah Karang Taruna Kabupaten Pekalongan	kurangnya sarana dan prasarana di Karang Taruna sehingga dibutuhkan bantuan Layos	Karang Taruna Desa Karangdowo Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1127	1935950	Drs.H. Abdul Munir	Pengadaan Peralatan Belajar Mengajar (Laptop) (SD)	Belum memiliki laboratorium komputer yang memadai untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi.	MIS Pacar Desa Pacar , Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
1128	1935984	Drs.H. Abdul Munir	Pengadaan Peralatan Belajar Mengajar (Laptop) (SD)	Belum memiliki laboratorium komputer yang memadai untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi.	SD Negeri Pandanarum Desa Pandanarum RT 002 RW 001 Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1129	1936056	Drs.H. Abdul Munir	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SMP)	Untuk meningkatkan kapasitas sekolah,memenuhi kebutuhan ruang belajar yang memahadi akibat peningkatan jumlah siswa.	SMP Unggulan Bustanul Mansuriyah Desa Rowolaku, RT 01 RW 01, Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1130	1936132	Drs.H. Abdul Munir	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan sudah rusak dan tidak layak untuk dilewati	Puskesmas Desa Wonoyoso, Kecamatan Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1131	1936166	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan prasarana persampahan (Sepeda Motor Tiga Roda)	Untuk meningkatkan efesiensi operasional,terutama dalam pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan, Sehingga dibutuhkan Sepeda Motor sampah tiga roda.	Yayasan Dayantara Desa Jrebengkembang, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
1132	1936192	H. M Kholis Jazuli	PEMBANGUNAN KANAL BANJIR	Kerentanan terhadap Banjir Besar di aliran sungai, sehingga dibutuhkan pembangunan Tanggul Penahan Banjir	Dk. Kranji Desa Kedungwuni Timur kecamatan Kedungwuni , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1133	1936295	H. M Kholis Jazuli	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Pipa atau saluran yang dibangun terlalu kecil untuk menampung volume air, terutama saat curah hujan tinggi sehingga dibutuhkan Pembangunan Gorong - gorong	Jl. Raya Kranji Desa Kedungwuni Timur kecamatan Kedungwuni , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1134	1936474	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Kedung Kebo, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1135	1936484	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Kaligawe, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1136	1936489	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Karangdadap, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1137	1936498	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Pagumengan Mas, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1138	1936506	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Kalilembu, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1139	1936519	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Kebonsari, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1140	1936525	JAHIRIN M.H	PEMBANGUNAN / REHABILITASI JARINGAN IRIGASI	Untuk mengatasi permasalahan air, baik itu kelebihan air (banjir) maupun kekurangan air (kekeringan) pada area persawahan, Sehingga dibutuhkan saluran Irigasi sekunder	Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
1141	1936529	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Pegandon, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1142	1936535	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Logandeng, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1143	1936538	JAHIRIN M.H	PEMBANGUNAN / REHABILITASI JARINGAN IRIGASI	Untuk mengatasi permasalahan air, baik itu kelebihan air (banjir) maupun kekurangan air (kekeringan) pada area persawahan, Sehingga dibutuhkan saluran Irigasi	Dk. Pedayeman Desa Luragung Kecamatan Kandangserang, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1144	1936543	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Jrebeng Kembang, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1145	1936548	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Kebonrowo Pucang, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1146	1936553	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Pangkah, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1147	1936562	JAHIRIN M.H	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalanan dengan kondisi yang sudah rusak sehingga dibutuhkan Pembangunan Talud Penahan Jalan	Desa Tajur Kecamatan Kandangserang, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1148	1936569	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1149	1936581	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Kedung Patangewu, Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1150	1936588	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1151	1936605	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Bugangan, Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1152	1936611	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Proto, Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1153	1936615	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Tangkil Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1154	1936625	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Rowocacing, Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1155	1936626	Sabdo. SH	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	keadaan Rumah sudah tidak layak untuk digunakan seperti Dinding bambu/kayu yang sudah lapuk, dinding tanah/anyaman bambu yang rusak, dinding permanen yang retak/hampir roboh, Sehingga dibutuhkan Perbaikan	RTLH Atas Nama Casminto Dk. Wonorejo Desa Pododadi Kecamatan Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
1156	1936631	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Pakisputih, Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1157	1936635	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Salak Brojo, Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1158	1936642	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Podo, Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1159	1936648	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Rengas, Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1160	1936656	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Tangkil Kulon, Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1161	1936661	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Kwayangan, Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1162	1936668	H. Saeful Bahri, S.Ag	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalanan dengan kondisi yang sudah rusak sehingga dibutuhkan Pengurukan Sirtu untuk jalan poros Dukuh Sumur Kulon Desa Yosorejo ke Desa Blacanan Kecamatan Siwalan	Dk. Sumur Kulon Desa Yosorejo - Desa Blacanan Kecamatan Siwalan, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1163	1936679	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Tosaran, Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1164	1936684	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Pajomblangan, Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1165	1936692	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1166	1936716	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Paweden, Kecamatan Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1167	1936722	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Wonoyoso, Kecamatan Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1168	1936730	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1169	1936736	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Bligo, Kecamatan Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1170	1936744	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Coprayan, Kecamatan Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1171	1936755	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Kertijayan, Kecamatan Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1172	1936766	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Watussalam, Kecamatan Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1173	1936776	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Sapugarut, Kecamatan Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1174	1936786	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Pakumbulan, Kecamatan Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1175	1936793	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Simbangkulon, Kecamatan Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1176	1936800	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Galang PEngampon Gede, Kecamatan Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1177	1936805	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Getas, Kecamatan Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1178	1936816	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Gondang, Kecamatan Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1179	1936894	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Jetak Kidul, Kecamatan Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1180	1936905	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Jetak Lengkong, Kecamatan Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1181	1936907	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (SD)	Kekurangan dalam pengadaan sarana dan prasarana Peralatan Multimedia MIS Sapugarut	MIS Sapugarut Kelurahan Sapugarut Kecamatan Buaran , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
1182	1936911	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Kwagean, Kecamatan Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1183	1936917	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Legok Gunung, Kecamatan Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1184	1936924	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Musholla dalam Keadaan yang sudah kurang layak untuk digunakan sehingga dibutuhkan Hibah Musholla	Hibah Musholla Al Barokah Kelurahan Sapugarut Kecamatan Buaran , Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1185	1936931	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1186	1936942	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1187	1936948	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Sampih, Kecamatan Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1188	1936958	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Sastrodirjan, Kecamatan Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1189	1936960	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan banyak yang rusak sehingga dibutuhkan Perbaikan Insfrastruktur Jalan Kelurahan Sapugarut Kecamatan Buaran	Kelurahan Sapugarut Kecamatan Buaran , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1190	1936964	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1191	1936972	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Wonopringgo, Kecamatan Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1192	1936977	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan Pupuk Pertanian	Perlunya bantuan pupuk bagi kelompok tani untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian.	Desa Wonorejo, Kecamatan Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1193	1936984	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (TK/PAUD)	Lonjakan Jumlah Siswa Kelebihan Kapasitas sehingga dibutuhkan Ruang Kelas Baru RAM Sapugarut	Raudlatul Athfal Muslimat Sapugarut Kelurahan Sapugarut Kecamatan Buaran , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1194	1936993	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Kelurahan Sapugarut Kecamatan Buaran , Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1195	1937017	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Pipa atau saluran yang dibangun terlalu kecil untuk menampung volume air, terutama saat curah hujan tinggi sehingga dibutuhkan Perbaikan/ Normalisasi Saluran Air/ Drainase	Kelurahan Sapugarut Kecamatan Buaran , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
1196	1938806	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Kondisi jalan yang sudah mengalami kerusakan	Dusun Gembong Beringin Kelurahan Kedungwuni Barat, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1197	1938885	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	Penyediaan sarana dan prasarana olahraga	Belum tersedianya lapangan badminton yang layak dan memadai, sehingga dibutuhkan pembuatan lapangan badminton di wilayah tersebut	Karang Taruna Ki Gede Jati Penghulu Desa Sampih Kecamatan Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Usia Dini dan Dasar
1198	1941803	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Kondisi Ponnpes tidak memadai sehingga diperlukan Hibah untuk rehabilitasi	Pondok Pesantren Nurul Ummah, Desa Sawangan Kec Paninggaran, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1199	1941905	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak menghambat mobilitas dan rawan terjadinya kecelakaan	Desa Brondong Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1200	1941912	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak menghambat mobilitas dan rawan terjadinya kecelakaan	Desa Jagung Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1201	1941917	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak menghambat mobilitas dan rawan terjadinya kecelakaan	Desa Kaibahan Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1202	1941919	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak menghambat mobilitas dan rawan terjadinya kecelakaan	Desa Kalimade Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1203	1941929	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak menghambat mobilitas dan rawan terjadinya kecelakaan	Desa Karangrejo Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1204	1941933	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak menghambat mobilitas dan rawan terjadinya kecelakaan	Desa Karyomukti Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1205	1941939	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak menghambat mobilitas dan rawan terjadinya kecelakaan	Desa Kesesi Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1206	1941945	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak menghambat mobilitas dan rawan terjadinya kecelakaan	Desa Krandon Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1207	1941952	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak menghambat mobilitas dan rawan terjadinya kecelakaan	Desa Kwasen kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1208	1941958	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak menghambat mobilitas dan rawan terjadinya kecelakaan	desa kwigaran kec. kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1209	1941969	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak menghambat mobilitas dan rawan terjadinya kecelakaan	Desa Langensari Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1210	1941979	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak menghambat mobilitas dan rawan terjadinya kecelakaan	Desa Mulyorejo Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1211	1941988	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak menghambat mobilitas dan rawan terjadinya kecelakaan	Desa Pantirejo Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1212	1941991	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak menghambat mobilitas dan rawan terjadinya kecelakaan	Desa Podosari Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1213	1942000	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak menghambat mobilitas dan rawan terjadinya kecelakaan	Desa Ponolawen Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1214	1942008	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak menghambat mobilitas dan rawan terjadinya kecelakaan	Desa Sidomulyo Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1215	1942016	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak menghambat mobilitas dan rawan terjadinya kecelakaan	Desa Sidosari Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1216	1942024	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak menghambat mobilitas dan rawan terjadinya kecelakaan	Desa Srinahan Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1217	1942035	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak menghambat mobilitas dan rawan terjadinya kecelakaan	Desa Sukorejo Kec. kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1218	1942040	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak menghambat mobilitas dan rawan terjadinya kecelakaan	Desa Ujung negoro Kec. kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1219	1942049	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak menghambat mobilitas dan rawan terjadinya kecelakaan	Desa Watugajah Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1220	1942059	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak menghambat mobilitas dan rawan terjadinya kecelakaan	Desa Watupayung Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1221	1942066	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak menghambat mobilitas dan rawan terjadinya kecelakaan	Desa Windurojo Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1222	1942193	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak menghambat mobilitas dan rawan terjadinya kecelakaan	Desa Babalan Kidul Kec. Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1223	1942203	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak menghambat mobilitas dan rawan terjadinya kecelakaan	Desa Babalan Lor Kec. Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1224	1942225	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak menghambat mobilitas dan rawan terjadinya kecelakaan	Desa Bojong Minggir Kec. Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1225	1942239	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak menghambat mobilitas dan rawan terjadinya kecelakaan	Desa Bojong Wetan Kec. Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1226	1942256	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak menghambat mobilitas dan rawan terjadinya kecelakaan	Desa Bojonglor Kec. Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1227	1942278	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak menghambat mobilitas dan rawan terjadinya kecelakaan	Desa Bukur Kec. Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1228	1942287	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak menghambat mobilitas dan rawan terjadinya kecelakaan	Desa Duwet Kec. Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1229	1942312	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak menghambat mobilitas dan rawan terjadinya kecelakaan	Desa Jajar Wayang Kec. Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1230	1942322	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak menghambat mobilitas dan rawan terjadinya kecelakaan	Desa Kalipancur Kec. Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1231	1942337	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak menghambat mobilitas dan rawan terjadinya kecelakaan	Desa Karangsari Kec. Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1232	1942345	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak menghambat mobilitas dan rawan terjadinya kecelakaan	Desa Kemasan Kec. bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1233	1942358	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak menghambat mobilitas dan rawan terjadinya kecelakaan	Desa Ketitang Kidul Kec. Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1234	1942371	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak menghambat mobilitas dan rawan terjadinya kecelakaan	Desa Ketitanglor Kec. Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1235	1942380	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak menghambat mobilitas dan rawan terjadinya kecelakaan	Desa Legok Clile Kec. Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1236	1942423	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak menghambat mobilitas dan rawan terjadinya kecelakaan	Desa Menjangan Kec. Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1237	1942436	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak menghambat mobilitas dan rawan terjadinya kecelakaan	Desa Pantianom Kec. Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1238	1942442	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak menghambat mobilitas dan rawan terjadinya kecelakaan	Desa Randu Muktiwaren Kec. Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1239	1942453	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak menghambat mobilitas dan rawan terjadinya kecelakaan	Desa Rejosari Kec. Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1240	1942459	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak menghambat mobilitas dan rawan terjadinya kecelakaan	Desa Sembung jambu Kec. Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1241	1942474	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak menghambat mobilitas dan rawan terjadinya kecelakaan	Desa Sumur Jomblangbogo, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1242	1942484	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak menghambat mobilitas dan rawan terjadinya kecelakaan	Desa Wangandowo Kec. Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1243	1942494	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak menghambat mobilitas dan rawan terjadinya kecelakaan	Desa Wiroditan Kec. Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1244	1942540	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	jalan kurang lebar perlu adanya pelebaran jalan agar memudahkan mobilitas mobil dan kendaraan besar	jalan Windurojo - Kwasen kec. kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1245	1942576	H. Ruben R. Prabu Faza	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	perlunya pemeliharaan/pembangunan drainase agar sistem kerja drainase lebih optimal	Desa karyomukti Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1246	1942628	H. Ruben R. Prabu Faza	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	kurangnya penerangan jalan, rawan terjadinya kecelakaan dan tindak kejahatan	Desa Windurojo Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1247	1942644	H. Ruben R. Prabu Faza	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Kurangnya penerangan jalan, rawan terjadinya kecelakaan dan tndak kejahatan	Desa Pantirejo Kec. kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1248	1942794	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	perlunya pembangunan talud jalan	Desa Brondong Kec. kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1249	1946104	Catur Andriansah, S.Pd	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Kondisi jalan yang sudah mengalami kerusakan sehingga dibutuhkan perbaikan jalan	Jalan Raya Kesesi – Kaliwadas Kecamatan Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1250	1946152	Catur Andriansah, S.Pd	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Kondisi Jalan Usaha Tani yang sudah mengalami kerusakan sehingga dibutuhkan perbaikan jalan	Desa Karyomukti Kecamatan Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
1251	1946174	Catur Andriansah, S.Pd	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Kondisi Jalan Usaha Tani yang sudah mengalami kerusakan sehingga dibutuhkan perbaikan jalan	Desa Kwigaran Kecamatan Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
1252	1946229	Catur Andriansah, S.Pd	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Kondisi talud mengalami kerusakan dan penurunan fungsi sehingga berpotensi menimbulkan longsor	Jalan Raya Kesesi - Bodeh, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1253	1946230	AHMAD MUZAKI	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan penghubung Kelurahan Sapugarut menuju Desa Coprayan Kecamatan Buaran di perlukan pengaspalan karena rusak dan berlubang	Kelurahan Sapugarut menuju Desa Coprayan Kecamatan Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1254	1946498	Catur Andriansah, S.Pd	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Keterbatasan modal usaha, sehingga pelaku UMKM kesulitan mengembangkan usaha dan meningkatkan kapasitas produksi	Desa Ujungnegoro Kecamatan Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM
1255	1946537	AHMAD MUZAKI	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan penghubung Kelurahan Sapugarut menuju Desa Coprayan Kecamatan Buaran (samping Balai Penyuluh Pertanian) rusak dan tanah tidak stabil sehingga terjadi erosi/pengikisan tanah. Butuh di lakukan pengerjaan Turab dan Pavingisasi	Kelurahan Sapugarut menuju Desa Coprayan Kecamatan Buaran (samping Balai Penyuluh Pertanian), Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1256	1946717	AHMAD MUZAKI	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan gg.15 Kelurahan Pekajangan tembus Desa Pakumbulan tanah tidak stabil sehingga terjadi erosi/pengikisan tanah sehingga perlu dibangun senderan	Kelurahan Pekajangan menuju Desan Pakumbulan Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1257	1947066	AHMAD MUZAKI	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan di gg.18 Kelurahan Pekajangan rusak sehingga di perlukan pengaspalan	Gg.18 Kelurahan Pekajangan Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1258	1947259	AHMAD MUZAKI	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan di Gg.14 Kelurahan Pekajangan perlu di lakukan pengaspalan dan pavingisasi karena rusak	Gg.14 Kelurahan Pekajangan Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1259	1947351	Drs.H. Abdul Munir	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SD)	Untuk meningkatkan kapasitas sekolah, memenuhi kebutuhan ruang belajar yang memadai akibat peningkatan jumlah siswa.	MIS Wonorejo Desa Wonorejo, Kecamatan Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1260	1947406	Drs.H. Abdul Munir	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SD)	Untuk meningkatkan kapasitas sekolah, memenuhi kebutuhan ruang belajar yang memadai akibat peningkatan jumlah siswa.	MI Walisongo Salakbrojo Desa Salakbrojo, Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1261	1947537	Drs.H. Abdul Munir	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan sudah rusak dan tidak layak untuk dilewati	perbatasan Desa Proto Kecamatan Kedungwuni dan Desa Kebon Rowopucang Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1262	1947652	AHMAD MUZAKI	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Saluran drainase di Gg.7 Kelurahan Pekajangan belum sempurna	Gg.7 Kelurahan Pekajangan Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
1263	1947737	AHMAD MUZAKI	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan di Gg.7 Kelurahan Pekajangan Kecamatan Kedungwuni butuh di lakukan pengerjaan pengaspalan dikarenakan rusak	Gg.7 Kelurahan Pekajangan Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1264	1947757	Drs.H. Abdul Munir	Pengadaan Peralatan Belajar Mengajar (Laptop) (SD)	Belum memiliki laboratorium komputer yang memadai untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi.	MI Salafiyah Paninggaran Desa Paninggaran, Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
1265	1947812	Drs.H. Abdul Munir	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (TK/PAUD)	Lonjakan jumlah siswa kelebihan kapasitas sehingga dibutuhkan ruang kelas baru	TK RA Muslimat NU Desa Kebonrowo Pucang, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1266	1947863	AHMAD MUZAKI	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Panti Asuhan Putri Aisyiyah Pekajangan di butuhkan Musholla	Jl. Raya Pekajangan Gg. 23 No.29, Gendingan, Pekajangan, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1267	1947910	AHMAD MUZAKI	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Bantuan hibah Panti Asuhan Putri Aisyiyah Cabang Kedungwuni	Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1268	1947972	AHMAD MUZAKI	Fasilitasi Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif di Kecamatan Wonopringgo karena rendahnya pendapatan keluarga miskin	Kecamatan Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
1269	1947978	AHMAD MUZAKI	Fasilitasi Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif di Kecamatan Kedungwuni karena rendahnya pendapatan keluarga miskin	Kecamatan Kedungwuni , Kab. Pekalongan	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
1270	1947997	AHMAD MUZAKI	Fasilitasi Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif di Kecamatan Buaran karena rendahnya pendapatan keluarga miskin	Kecamatan Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
1271	1949579	Catur Andriansah, S.Pd	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Kondisi jalan yang sudah mengalami kerusakan sehingga perlu perbaikan jalan	Ruas jalan Kesesi - Ujungnegoro Kecamatan Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1272	1949755	Catur Andriansah, S.Pd	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Belum tersedianya drainase yang memadai menyebabkan genangan saat hujan, sehingga diperlukan pembangunan drainase	Desa Rejosari Kecamatan Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1273	1949876	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Masih terbatasnya sarana penunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi, sehingga diperlukan bantuan laptop/komputer untuk TPQ Rodotul Ulum Gembong Beringin Kedungwuni Barat	TPQ Rodotul Ulum Gembong Beringin Kelurahan Kedungwuni Barat, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Perlengkapan PAUD
1274	1949972	Catur Andriansah, S.Pd	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Masih terdapat ruas jalan yang belum memiliki penerangan jalan umum	Dukuh Kulsar Desa Rejosari Kecamatan Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1275	1950014	Catur Andriansah, S.Pd	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Kondisi mushola mengalami kerusakan dan keterbatasan fasilitas, sehingga diperlukan hibah untuk rehabilitasi mushola	Mushola Al Muttaqin Desa Rejosari Kecamatan Bojong, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1276	1950031	Catur Andriansah, S.Pd	PEMBANGUNAN JEMBATAN	Belum tersedianya jembatan penghubung mengakibatkan akses masyarakat dan aktivitas ekonomi terganggu, sehingga diperlukan pembangunan jembatan	Desa Kemasan RT 04 - RT 07 Kecamatan Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1277	1950076	Catur Andriansah, S.Pd	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Belum tersedianya menara mushola yang memadai sebagai sarana penunjang kegiatan keagamaan, sehingga diperlukan hibah untuk pembangunan menara mushola	Mushola Al Ikhlas Desa Kemasan Kecamatan Bojong, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1278	1950211	Catur Andriansah, S.Pd	Bantuan kepada lembaga/organisasi masyarakat	Keterbatasan sarana alat hadroh mengakibatkan kegiatan latihan dan penampilan belum berjalan optimal, sehingga dibutuhkan bantuan alat hadroh	Jamaah Jamilatun Nisa Desa Kemasan Kecamatan Bojong, Kab. Pekalongan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
1279	1950272	Catur Andriansah, S.Pd	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Kondisi sarana dan prasarana mushola di wilayah tersebut belum memadai dan memerlukan perbaikan/peningkatan	Mushola Al Badrussalam Desa Kesesi Kecamatan Kesesi , Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1280	1950287	Catur Andriansah, S.Pd	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Kondisi sarana dan prasarana mushola di wilayah tersebut belum memadai dan memerlukan perbaikan/peningkatan	Mushola AL-ITTIHADDesa Kesesi Kecamatan Kesesi , Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1281	1950309	Catur Andriansah, S.Pd	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Kondisi sarana dan prasarana mushola di wilayah tersebut belum memadai dan memerlukan perbaikan/peningkatan	Mushola Baiturrohman Desa Kesesi Kecamatan Kesesi , Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1282	1950329	Catur Andriansah, S.Pd	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Rendahnya kapasitas dan permodalan usaha masyarakat serta minimnya pelatihan menyebabkan usaha belum berkembang optimal	Desa Ujungnegoro Kecamatan Kesesi , Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM
1283	1950758	Catur Andriansah, S.Pd	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Kondisi Jalan Usaha Tani yang sudah mengalami kerusakan sehingga dibutuhkan perbaikan jalan	Desa Jagung Kecamatan Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
1284	1950788	Catur Andriansah, S.Pd	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Masih terdapat ruas jalan yang belum memiliki penerangan jalan umum	Desa Krandon Kecamatan Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1285	1950804	Catur Andriansah, S.Pd	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Masih terdapat ruas jalan yang belum memiliki penerangan jalan umum	Desa Kwigaran Kecamatan Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1286	1950880	Catur Andriansah, S.Pd	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	Kondisi irigasi pertanian yang rusak dan tidak berfungsi optimal menghambat pasokan air ke lahan, sehingga diperlukan rehabilitasi irigasi pertanian	Desa Kesesi Kecamatan Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1287	1951752	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Bangunan sudah tidak layak digunakan seperti Dinding yang lapuk dan atap yang bocor, Sehingga dibutuhkan, Rehabilitasi Fasilitas Madin Nurul Ghulam	Madin Nurul Ghulam Desa Kertijayan Kecamatan Buaran , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
1288	1951785	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Bangunan sudah tidak layak digunakan seperti Dinding yang lapuk dan atap yang bocor, Sehingga dibutuhkan, Rehabilitasi Fasilitas	TPQ Annur Desa Kertijayan Kecamatan Buaran , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
1289	1951987	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan banyak yang rusak sehingga dibutuhkan peningkatan jalan poros Desa Kertijayan	Desa Kertijayan kecamatan Buaran , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1290	1952377	EKO PAMUJI	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	tidak adalanya talud jalan menuju ke lahan pertanian	RT 19 RW 06 Desa Sumub Kidul Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1291	1952382	H. Ruben R. Prabu Faza	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan sumber daya perikanan	kurangnya modal usaha terkait pembuatan waring dan bambu tambak, perlunya tambahan modal/bantuan	Kelompok Budidaya Ikan Gotong Royong Desa Semut Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
1292	1952384	Drs.H. Mochtar,MM	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	perlunya pembangunan/pemeliharaan drainase agar kerja sistem drainase bisa lbih optimal dari sebelumnya	Desa Yosorejo Ruas jalan pait Depok Kec. Siwalan, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
1293	1952387	Drs.H. Mochtar,MM	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	perlunya pembangunan/pemeliharaan drainase agar kerja sistem drainase bisa lbih optimal dari sebelumnya	Gang Fagansa Kel. Kepatihan Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
1294	1952388	Drs.H. Mochtar,MM	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	perlunya pembangunan/pemeliharaan drainase agar kerja sistem drainase bisa lbih optimal dari sebelumnya	Desa Jeruksari Kec. Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
1295	1952396	Drs.H. Mochtar,MM	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	perlunya senderan sungai, melanjutkan tahap 3	sungai buangan Desa Karanganyar Tahap 3 Kec. Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1296	1952587	Moh Wyldanyl Firdaus, S. Ked	REHABILITASI TEBING / BRONJONG SUNGAI	untuk mencegah erosi dan longsor tebing sungai yang menghambat aliran air di perlukan pembangunan senderan sungai	Dukuh Sedayu Rt 01/01, Desa Pegaden tengah, Kec wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1297	1952600	Moh Wyldanyl Firdaus, S. Ked	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Di perlukan pembangunan LPJU karena gelap. Agar tercipta kenyamanan dan keselamatan warga yang melintas.	Desa Pegaden tengah, Kec Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1298	1952621	Moh Wyldanyl Firdaus, S. Ked	REHABILITASI TEBING / BRONJONG SUNGAI	untuk mencegah erosi dan logsor tebing sungai yang bisa menganggu aliran air diperlukan senderan sungai yang kokoh	Dukuh Kaum RT 03 RW 02 Desa Rowokembu, Kec Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1299	1952627	Moh Wyldanyl Firdaus, S. Ked	REHABILITASI TEBING / BRONJONG SUNGAI	Untuk mencegah erosi dan longsor tebing sungai yang bisa menganggu aliran air maka diperlukan senderan sungai yang kokoh	Dukuh Cokrah RT 01 RW 01 Desa Kwagean Kec Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1300	1952639	Moh Wyldanyl Firdaus, S. Ked	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Untuk memperlancar aliran agar tidak terjadi banjir dan mencegah kerusakan infrasruktur jalan maka diperlukan drainase yang memadai	Desa Karangdowo Kec Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
1301	1952655	Moh Wyldanyl Firdaus, S. Ked	NORMALISASI SUNGAI	Diperlukan normalisasi sungai agar aliran sungai lancar kembali dan terhindar dari banjir	Desa Pegaden tengah Kec Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1302	1952657	Moh Wyldanyl Firdaus, S. Ked	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Diperlukan Hibah untuk peningkatan sarana dan prasaran Musholla untuk kenyamanan jamaah yang melakukan ibadah	Nurul Iman Dukuh Sedayu Rt 01 RW 01 Desa Pegaden Kec Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1303	1952661	Moh Wyldanyl Firdaus, S. Ked	Perbaikan sarana dan prasarana di area Perumahan (Rehab Jalan, drainase, RTH Perumahan)	Jalan yang rusak menganggu mobilitas dan kenyamanan warga sehingga diperlukan pengaspalan jalan	Perum Pisma Griya Permai Blok P, kel Kedungwuni Timur Kec Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
1304	1952673	Moh Wyldanyl Firdaus, S. Ked	Pengadaan Peralatan Belajar Mengajar (Laptop) (SD)	Diperlukan pengadaan laptop untuk meningkatkan kemampuan digital siswa sejak dini dan proses belajar mengajar bisa berjalan lebih interaktif	SD Negeri Desa Simbang Kulon, Kec Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1305	1952697	Moh Wyldanyl Firdaus, S. Ked	PEMBANGUNAN / REHABILITASI JARINGAN IRIGASI	Diperlukan saluran irigasi yang memadai untuk kelancaran alran air dan ketersediaan air	Desa Rowokembu, Kec wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
1306	1952709	Moh Wyldanyl Firdaus, S. Ked	REHABILITASI JEMBATAN	Jembatan yang rusak menganggu kenyamanan dan keselamatan warga	Desa Kebonsari Kec Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jembatan
1307	1952720	Moh Wyldanyl Firdaus, S. Ked	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Diperlukan bantuan laptop untuk mendidik anak tentang pengetahuan digital sejak dini dan melatih kemampuan untuk mengikuti perkembangan jaman	KB tunas Manunggal Perum Pisma Griya Permai Kel Kedungwuni Timur Kec Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Perlengkapan PAUD
1308	1952748	MIRZA KHOLIK	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Untuk meningkan kualitas dan kenyamanan prosen belajar santri maka diperlukan hibah untuk pembangunan RKB	TPQ Nurul Iman Desa Pacar Kec Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1309	1952764	MIRZA KHOLIK	Penyediaan sarana dan prasarana olahraga	Diperlukan penyediaan lapangan bulutangkis untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan penyaluran bakat anak muda	Desa Pacar Rt 01 RW 01, Kec Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Usia Dini dan Dasar
1310	1952774	MIRZA KHOLIK	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Diperlukan pembanguan drainase karena selama ini air meluap saat hujan dan menggenang yang mengakibatkan banjir dan infrastruktur jalan rusak	Jalan poros Desa Pacar-Samborejo_Tanjung Kec Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
1311	1952801	MIRZA KHOLIK	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SD)	Diperlukan RKB untuk meningkatkan kapasitas daya tampung siswa dan menciptakan proses belajar yang nyaman dan layak.	MIS Kel Gumawang Kec Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1312	1952811	MIRZA KHOLIK	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SD)	Diperlukan RKB untuk meningkatkan kapasitas daya tampung siswa dan menciptakan proses belajar yang nyaman dan layak	MIS desa Pacar Kec tirto , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1313	1952815	MIRZA KHOLIK	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (TK/PAUD)	Diperlukan RKB untuk meningkatkan kapasitas daya tampung siswa dan menciptakan proses belajar yang nyaman dan layak	PAUD Muslimat NU Desa Pacar Kec Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1314	1952822	MIRZA KHOLIK	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Diperlukan pembanguan drainase karena selama ini air meluap saat hujan dan menggenang yang mengakibatkan banjir dan infrastruktur jalan rusak	Jl Poros kabupaten desa Pacar - Desa Tanjung Kec Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
1315	1952840	MIRZA KHOLIK	REHABILITASI JEMBATAN	Perlu rehabilitasi jembatan karena sudah tidak memadai dan untuk mencegah banjir di usulkan dengan panjang 8 m lebar 4 m	Jalan Pandanarum - sidorejo Kec Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jembatan
1316	1952870	Drs.H. Abdul Munir	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Fasilitas pesantren, khususnya asrama dan musala, yang sudah tua, rapuh, dan tidak memenuhi standar keamanan bangunan, sehingga dibutuhkan Rehabilitasi Pondok Pesantren.	Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Al Mustafak Salaan Desa Proto, Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1317	1952871	MIRZA KHOLIK	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Perlu rehabilitasi jalan dengan Betonisasi karena kondisi jalan rusak parah dan sering tergenang air banjir	Jalan Poros Desa Pacar - samborejo - Tanjung, Kec Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1318	1952893	Drs.H. Abdul Munir	Fasilitasi Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Masih terdapat keluarga yang belum memiliki usaha produktif atau memiliki usaha namun skala dan produktivitasnya rendah akibat keterbatasan modal, sarana produksi, dan kapasitas manajerial, sehingga pendapatan belum mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak.	Desa Karangdadap, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
1319	1952897	Drs.H. Abdul Munir	Fasilitasi Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Masih terdapat keluarga yang belum memiliki usaha produktif atau memiliki usaha namun skala dan produktivitasnya rendah akibat keterbatasan modal, sarana produksi, dan kapasitas manajerial, sehingga pendapatan belum mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak.	Desa Kalilembu, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
1320	1952903	Drs.H. Abdul Munir	Fasilitasi Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Masih terdapat keluarga yang belum memiliki usaha produktif atau memiliki usaha namun skala dan produktivitasnya rendah akibat keterbatasan modal, sarana produksi, dan kapasitas manajerial, sehingga pendapatan belum mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak.	Desa Kedung Kebo, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
1321	1952907	Drs.H. Abdul Munir	Fasilitasi Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Masih terdapat keluarga yang belum memiliki usaha produktif atau memiliki usaha namun skala dan produktivitasnya rendah akibat keterbatasan modal, sarana produksi, dan kapasitas manajerial, sehingga pendapatan belum mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak.	Desa Kaligawe, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
1322	1952915	Drs.H. Abdul Munir	Fasilitasi Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Masih terdapat keluarga yang belum memiliki usaha produktif atau memiliki usaha namun skala dan produktivitasnya rendah akibat keterbatasan modal, sarana produksi, dan kapasitas manajerial, sehingga pendapatan belum mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak.	Desa Pagumengan Mas, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
1323	1952918	Drs.H. Abdul Munir	Fasilitasi Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Masih terdapat keluarga yang belum memiliki usaha produktif atau memiliki usaha namun skala dan produktivitasnya rendah akibat keterbatasan modal, sarana produksi, dan kapasitas manajerial, sehingga pendapatan belum mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak.	Desa Pegandon, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
1324	1952925	Drs.H. Abdul Munir	Fasilitasi Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Masih terdapat keluarga yang belum memiliki usaha produktif atau memiliki usaha namun skala dan produktivitasnya rendah akibat keterbatasan modal, sarana produksi, dan kapasitas manajerial, sehingga pendapatan belum mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak.	Desa Jrebeng Kembang, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1325	1952929	Drs.H. Abdul Munir	Fasilitasi Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Masih terdapat keluarga yang belum memiliki usaha produktif atau memiliki usaha namun skala dan produktivitasnya rendah akibat keterbatasan modal, sarana produksi, dan kapasitas manajerial, sehingga pendapatan belum mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak.	Desa Kebon Sari, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
1326	1952936	Drs.H. Abdul Munir	Fasilitasi Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Masih terdapat keluarga yang belum memiliki usaha produktif atau memiliki usaha namun skala dan produktivitasnya rendah akibat keterbatasan modal, sarana produksi, dan kapasitas manajerial, sehingga pendapatan belum mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak.	Desa Logandeng, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
1327	1952941	Drs.H. Abdul Munir	Fasilitasi Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Masih terdapat keluarga yang belum memiliki usaha produktif atau memiliki usaha namun skala dan produktivitasnya rendah akibat keterbatasan modal, sarana produksi, dan kapasitas manajerial, sehingga pendapatan belum mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak.	Desa Kebonrowo Pucang, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
1328	1952945	Drs.H. Abdul Munir	Fasilitasi Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Masih terdapat keluarga yang belum memiliki usaha produktif atau memiliki usaha namun skala dan produktivitasnya rendah akibat keterbatasan modal, sarana produksi, dan kapasitas manajerial, sehingga pendapatan belum mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak.	Desa Pangkah, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
1329	1952970	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Masih rendahnya kapasitas usaha dan akses permodalan kelompok usaha kuliner di Kabupaten Pekalongan, sehingga produktivitas, kualitas produk, dan daya saing usaha belum optimal.	Desa Karangdadap. Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1330	1952984	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Masih rendahnya kapasitas usaha dan akses permodalan kelompok usaha kuliner di Kabupaten Pekalongan, sehingga produktivitas, kualitas produk, dan daya saing usaha belum optimal.	Desa Kalilembu, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1331	1952994	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Masih rendahnya kapasitas usaha dan akses permodalan kelompok usaha kuliner di Kabupaten Pekalongan, sehingga produktivitas, kualitas produk, dan daya saing usaha belum optimal.	Desa Kedung Kebo, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1332	1952998	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Masih rendahnya kapasitas usaha dan akses permodalan kelompok usaha kuliner di Kabupaten Pekalongan, sehingga produktivitas, kualitas produk, dan daya saing usaha belum optimal.	Desa Kaligawe, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1333	1953001	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Masih rendahnya kapasitas usaha dan akses permodalan kelompok usaha kuliner di Kabupaten Pekalongan, sehingga produktivitas, kualitas produk, dan daya saing usaha belum optimal.	Desa Pagumengan Mas, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1334	1953004	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Masih rendahnya kapasitas usaha dan akses permodalan kelompok usaha kuliner di Kabupaten Pekalongan, sehingga produktivitas, kualitas produk, dan daya saing usaha belum optimal.	Desa Pegandon, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1335	1953009	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Masih rendahnya kapasitas usaha dan akses permodalan kelompok usaha kuliner di Kabupaten Pekalongan, sehingga produktivitas, kualitas produk, dan daya saing usaha belum optimal.	Desa Jrebeng Kembang, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1336	1953014	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Masih rendahnya kapasitas usaha dan akses permodalan kelompok usaha kuliner di Kabupaten Pekalongan, sehingga produktivitas, kualitas produk, dan daya saing usaha belum optimal.	Desa Kebonsari, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1337	1953020	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Masih rendahnya kapasitas usaha dan akses permodalan kelompok usaha kuliner di Kabupaten Pekalongan, sehingga produktivitas, kualitas produk, dan daya saing usaha belum optimal.	Desa Logandeng, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1338	1953030	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Masih rendahnya kapasitas usaha dan akses permodalan kelompok usaha kuliner di Kabupaten Pekalongan, sehingga produktivitas, kualitas produk, dan daya saing usaha belum optimal.	Desa Kebonrowo Pucang, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1339	1953032	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Masih rendahnya kapasitas usaha dan akses permodalan kelompok usaha kuliner di Kabupaten Pekalongan, sehingga produktivitas, kualitas produk, dan daya saing usaha belum optimal.	Desa Pangkah, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1340	1953057	MIRZA KHOLIK	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Diperlukan LPJU unuk kenyamanan dan keamanan warga yang melintas . usulan 10 titik	Dukuh Mejasem Kidul, Desa Mejasem Kec Siwalan, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1341	1953060	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Masih rendahnya kapasitas usaha dan akses permodalan kelompok usaha kuliner di Kabupaten Pekalongan, sehingga produktivitas, kualitas produk, dan daya saing usaha belum optimal.	Desa Wiradesa, Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1342	1953065	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Masih rendahnya kapasitas usaha dan akses permodalan kelompok usaha kuliner di Kabupaten Pekalongan, sehingga produktivitas, kualitas produk, dan daya saing usaha belum optimal.	Desa Pekuncen, Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1343	1953075	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Masih rendahnya kapasitas usaha dan akses permodalan kelompok usaha kuliner di Kabupaten Pekalongan, sehingga produktivitas, kualitas produk, dan daya saing usaha belum optimal.	Desa Warulor, Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1344	1953077	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Masih rendahnya kapasitas usaha dan akses permodalan kelompok usaha kuliner di Kabupaten Pekalongan, sehingga produktivitas, kualitas produk, dan daya saing usaha belum optimal.	Desa Bener, Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1345	1953084	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Masih rendahnya kapasitas usaha dan akses permodalan kelompok usaha kuliner di Kabupaten Pekalongan, sehingga produktivitas, kualitas produk, dan daya saing usaha belum optimal.	Desa Bondansari, Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1346	1953093	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Masih rendahnya kapasitas usaha dan akses permodalan kelompok usaha kuliner di Kabupaten Pekalongan, sehingga produktivitas, kualitas produk, dan daya saing usaha belum optimal.	Desa Deleg Tukang, Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1347	1953096	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Masih rendahnya kapasitas usaha dan akses permodalan kelompok usaha kuliner di Kabupaten Pekalongan, sehingga produktivitas, kualitas produk, dan daya saing usaha belum optimal.	Desa Gumawang, Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1348	1953117	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Masih rendahnya kapasitas usaha dan akses permodalan kelompok usaha kuliner di Kabupaten Pekalongan, sehingga produktivitas, kualitas produk, dan daya saing usaha belum optimal.	Desa Kadipaten, Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1349	1953124	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Masih rendahnya kapasitas usaha dan akses permodalan kelompok usaha kuliner di Kabupaten Pekalongan, sehingga produktivitas, kualitas produk, dan daya saing usaha belum optimal.	Desa Kampil, Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1350	1953130	MIRZA KHOLIK	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Jalan rusak mengangganggu aktifitas pertanian untuk itu diperlukan perbaikan jalan dengan Betonisasi sepanjang 218 M agar lebih maksimal dan tahan lama	Dukuh Limbangan Rt 01 RW 06 Desa wonosari Kec Siwalan, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
1351	1953132	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Masih rendahnya kapasitas usaha dan akses permodalan kelompok usaha kuliner di Kabupaten Pekalongan, sehingga produktivitas, kualitas produk, dan daya saing usaha belum optimal.	Desa Karangjati, Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1352	1953134	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Masih rendahnya kapasitas usaha dan akses permodalan kelompok usaha kuliner di Kabupaten Pekalongan, sehingga produktivitas, kualitas produk, dan daya saing usaha belum optimal.	Desa Kauman, Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1353	1953138	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Masih rendahnya kapasitas usaha dan akses permodalan kelompok usaha kuliner di Kabupaten Pekalongan, sehingga produktivitas, kualitas produk, dan daya saing usaha belum optimal.	Desa Kemplong, Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1354	1953145	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Masih rendahnya kapasitas usaha dan akses permodalan kelompok usaha kuliner di Kabupaten Pekalongan, sehingga produktivitas, kualitas produk, dan daya saing usaha belum optimal.	Desa Mayangan, Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1355	1953152	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Masih rendahnya kapasitas usaha dan akses permodalan kelompok usaha kuliner di Kabupaten Pekalongan, sehingga produktivitas, kualitas produk, dan daya saing usaha belum optimal.	Desa Kepatihan, Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1356	1953167	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Masih rendahnya kapasitas usaha dan akses permodalan kelompok usaha kuliner di Kabupaten Pekalongan, sehingga produktivitas, kualitas produk, dan daya saing usaha belum optimal.	Desa Warukidul, Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1357	1953173	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Masih rendahnya kapasitas usaha dan akses permodalan kelompok usaha kuliner di Kabupaten Pekalongan, sehingga produktivitas, kualitas produk, dan daya saing usaha belum optimal.	Desa Petukangan, Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1358	1953184	MIRZA KHOLIK	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan sudah lama rusak dan menganggu aktifitas warga untuk itu diusulkan untuk rehabilitasi jalan dengan betonisasi sepanjang 185 M, agar kuat dan umur pemakaian jalan yang panjang	Desa Depok Rt 03 RW 02, Kec Siwalan, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1359	1953215	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Masih rendahnya kapasitas produksi dan akses permodalan kelompok usaha konveksi di Kabupaten Pekalongan, sehingga produktivitas, kualitas produk, dan daya saing usaha belum optimal.	Desa Karangdadap, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1360	1953218	Drs.H. Mochtar,MM	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	perlunya pembangunan senderan sungai, tahap 2	sungai buangan Desa Samborejo, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1361	1953220	MIRZA KHOLIK	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak dan menganggu aktifitas warga untuk itu diusulkan untuk rehabilitasi jalan dengan betonisasi sepanjang 300 M agar kuat dan umur pemakaian jalan yang panjang	Jl kabupaten di Dukuh sumur kulon Rt 01 RW 07, Desa Yosorejo Kec Siwalan, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1362	1953237	Drs.H. Mochtar,MM	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan Rusak rawan kecelakaan, menghambat mobilitas. perlunya rehabilitasi jalan	Jln. Dk. Sumur Kulon Ruas Jalan Rembun Blancanan Kec. Siwalan, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1363	1953244	Drs.H. Mochtar,MM	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan Rusak rawan kecelakaan, menghambat mobilitas. perlunya rehabilitasi jalan	Desa Yosorejo Ruas Jalan Pait Depok Kec. Siwalan, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1364	1953254	MIRZA KHOLIK	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak dan menganggu aktifitas warga untuk itu diusulkan untuk rehabilitasi jalan dengan betonisasi sepanjang 250 M agar kuat dan umur pemakaian jalan yang panjang.	Desa Blacanan Rt 9 sd Rt 11 Kec Siwalan , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1365	1953255	Drs.H. Mochtar,MM	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan Rusak rawan kecelakaan, menghambat mobilitas. perlunya rehabilitasi jalan	Jalan Depok Ruas Jalan Pait Depok Kec. Siwalan, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1366	1953266	Drs.H. Mochtar,MM	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan Rusak rawan kecelakaan, menghambat mobilitas. perlunya rehabilitasi jalan	Jalan Depan Makam Sembung Desa Kampil Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1367	1953279	Drs.H. Mochtar,MM	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan Rusak rawan kecelakaan, menghambat mobilitas. perlunya rehabilitasi jalan	Kelurahan Bener Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1368	1953304	Drs.H. Mochtar,MM	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	jalan sering banjir, perlunya peningkatan jalan agar mobilitas masyarakat mudah, Tahap 2	Jalan Poros Desa Pucung Kec. Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1369	1953311	Drs.H. Mochtar,MM	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	jalan sering banjir, perlunya peningkatan jalan agar mobilitas masyarakat mudah	Jalan Poros Dk. Sebakung Desa Jeruksari Kec. Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1370	1953317	MIRZA KHOLIK	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	alan rusak dan menganggu aktifitas warga untuk itu diusulkan untuk rehabilitasi jalan dengan betonisasi (100 M), agar kuat dan umur pemakaian jalan yang panjang	Dukuh Klayah Rt 13 Rw 3 , Desa Tanjungsari, Kec Siwalan, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1371	1953331	Drs.H. Mochtar,MM	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	jalan gelap kurangnya penerangan Jalan sehingga rawan kecelakaan dan tindak kejahatan	Desa Yosorejo Kec. Siwalan, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1372	1953348	MIRZA KHOLIK	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak dan menganggu aktifitas warga untuk itu diusulkan untuk rehabilitasi jalan dengan betonisasi (165 M), agar kuat dan umur pemakaian jalan yang panjang	Dusun 2 Rt 01 Rw 04 Desa Boyoteluk, Kec siwalan, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1373	1953379	MIRZA KHOLIK	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak dan menganggu aktifitas warga untuk itu diusulkan untuk rehabilitasi jalan dengan betonisasi (350 M), agar kuat dan umur pemakaian jalan yang panjang	Gang melati Rt 01 RW 05 Dukuh rembun Desa Tengeng Kulon Kec siwalan , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1374	1953402	Drs.H. Mochtar,MM	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	jalan gelap kurangnya penerangan Jalan sehingga rawan kecelakaan dan tindak kejahatan	Desa Depok Kec. Siwalan, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1375	1953407	MIRZA KHOLIK	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak dan menganggu aktifitas warga untuk itu diusulkan untuk rehabilitasi jalan dengan betonisasi (250m)agar kuat dan umur pemakaian jalan yang panjang	Dukuh Waluh kulon rt 01 RW 03, Desa blimbing wuluh, Kec Siwalan, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1376	1953412	Drs.H. Mochtar,MM	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	jalan gelap kurangnya penerangan Jalan sehingga rawan kecelakaan dan tindak kejahatan	Desa Blancanan Kec. Siwalan, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1377	1953418	Drs.H. Mochtar,MM	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	jalan gelap kurangnya penerangan Jalan sehingga rawan kecelakaan dan tindak kejahatan	Desa Pucung Kec. Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1378	1953439	MIRZA KHOLIK	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak dan menganggu aktifitas warga untuk itu diusulkan untuk rehabilitasi jalan dengan betonisasi (200 M) agar kuat dan umur pemakaian jalan yang panjang	Dukuh Rembun Lor Rt 02 rw 04 Desa Rembun, Kec Siwalan, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1379	1953454	Drs.H. Mochtar,MM	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah (SD)	Ruang Kelas Sudah tidak layak perlunya rehabilitasi Gedung dan penataan halaman SD	SD Negeri 01 Yosorejo Kec. Siwalan, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
1380	1953464	Drs.H. Mochtar,MM	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah (SD)	Ruang Kelas Sudah tidak layak perlunya rehabilitasi Gedung dan penataan halaman SD	SD Negeri 02 Yosorejo Kec. Siwalan, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
1381	1953508	Drs.H. Mochtar,MM	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Jalan menuju tani belum memadai, perlunya pembangunan guna memudahkan mobilitas petani	Desa Samborejo Kec. Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
1382	1953528	Drs.H. Mochtar,MM	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Jalan menuju tani belum memadai, perlunya pembangunan guna memudahkan mobilitas petani	Desa Karanganyar Kec. Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
1383	1953555	Drs.H. Mochtar,MM	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	masjid sudah tidak layak, perlunya rehabilitasi	Masjid Sabilul Huda Desa Depok Kec. Siwalan, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1384	1954494	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Desa Kertijayan Kecamatan buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1385	1954517	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (TK/PAUD)	Lonjakan Jumlah Siswa Kelebihan Kapasitas sehingga dibutuhkan Ruang Kelas Baru	RKB Raudhatul Athfal Muslimat Kertijayan Desa Ketijayan Kecamatan Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1386	1954531	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Masjid dalam Keadaan yang sudah kurang layak untuk digunakan sehingga dibutuhkan Hibah Masjid	Masjid Annur Desa Kertijayan Kecamatan Buaran, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1387	1954659	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Madrasah ini membutuhkan RehabilitasiGedung tpq karena bangunannya sudah tua dan berpotensi bahaya	TPQ Al Barokah Desa Coprayan Kecamatan Buaran , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1388	1954674	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Desa Coprayan Kecamatan Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1389	1954696	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Masjid dalam Keadaan yang sudah kurang layak untuk digunakan sehingga dibutuhkan Hibah Masjid	Hibah Masjid Makhdum Ibrahim Desa Coprayan Kecamatan Buaran , Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1390	1954701	Moh Wyldanyl Firdaus, S. Ked	Pengadaan Peralatan Belajar Mengajar (Laptop) (SMP)	Perlu bantuan lap top untuk meningkatkan kemampuan siswa dengan pembelajaran digital dan mengikuti perkembangan tehnik belajar mengajar	SMP YMI wonopringgo, Kec wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
1391	1954755	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan dengan Kondisi rusak, retak, atau berlubang, Sehingga dibutuhkan Perbaikan Insfrastruktur Jalan	Desa Coprayan Kecamatan buaran , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1392	1954777	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah (SD)	MII ini membutuhkan perbaikan Gedung karena bangunannya sudah tua dan berpotensi bahaya	Madrasah Ibdtidaiyah Islamiyah Paweden Desa Paweden Kecamatan Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
1393	1954786	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Desa Paweden Kecamatan Buaran , Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1394	1954819	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Madrasah ini membutuhkan Rehabilitasi Sarana Fasilitas karena bangunannya sudah tua dan berpotensi bahaya	Rehabilitasi Fasiilitas TPQ AL Muttaqin Desa Paweden Kecamatan Buaran , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
1395	1954827	Moh Wyldanyl Firdaus, S. Ked	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Perlu penernagan jalan karena jalan gelap menganggu keamanan dan kenyamanan	Desa Wonoyoso Kec Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1396	1954843	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Masjid dalam Keadaan yang sudah kurang layak untuk digunakan sehingga dibutuhkan Hibah Masjid	Hibah Masjid Baitul Muttaqin Desa Paweden kecamatan Buaran , Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1397	1954891	Dodiek Prasetyo	Bantuan kepada lembaga/organisasi masyarakat	Berkurangnya Dana Desa menjadikan desa kurang maksimal dalam membangun	Desa Srinahan, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
1398	1955002	AHMAD MUZAKI	Fasilitasi Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif di Kecamatan Karangdadap karena rendahnya pendapatan keluarga miskin	Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
1399	1955008	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalanan dengan kondisi yang sudah rusak sehingga dibutuhkan Rehabilitasi Insfrastruktur Jalan	Desa Paweden Kecamatan buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1400	1955017	Moh Wyldanyl Firdaus, S. Ked	Bantuan bibit ternak	Perlu bantuan bibit ternak untuk pemberdayaan kelompok ternak, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan	Paguyuban ternak JK Karangdadap, Kec Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
1401	1955083	Moh Wyldanyl Firdaus, S. Ked	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Perlu penernagan jalan karena jalan gelap menganggu keamanan dan kenyamanan	Desa Kalilembu, Kec Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1402	1955151	Moh Wyldanyl Firdaus, S. Ked	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Perlu penernagan jalan karena jalan gelap menganggu keamanan dan kenyamanan	Desa rowokembu Kec Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1403	1955197	Moh Wyldanyl Firdaus, S. Ked	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Perlu penernagan jalan karena jalan gelap menganggu keamanan dan kenyamanan	Kel Kedungwuni barat Kec Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1404	1955256	Moh Wyldanyl Firdaus, S. Ked	REHABILITASI TEBING / BRONJONG SUNGAI	Untuk mencegah erosi dan longsor tebing sungai dan untuk memperlancar arus air perlu rehabilati dengan pembangunan senderan	Desa Rowokembu Kec Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1405	1955283	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Lonjakan Jumlah Siswa Kelebihan Kapasitas sehingga dibutuhkan Ruang Kelas Baru	TPQ As-Syafi'iyah Kelurahan Bligo Kecamatan buaran , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1406	1955305	Moh Wyldanyl Firdaus, S. Ked	REHABILITASI JEMBATAN	jembatan rusak dan tidak memadai untuk di lewati warga	Desa Pegandon Kec Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jembatan
1407	1955378	AHMAD MUZAKI	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Masih terdapat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tidak memiliki rumah layak huni	Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
1408	1955389	Moh Wyldanyl Firdaus, S. Ked	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Perlu perbaikan jalan dengan pengaspalan untuk meningkatkan keselamatam dan kenyamanan warga	Jalan Poros Salakbrojo - Karangdadap Kec Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1409	1955399	AHMAD MUZAKI	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Masih terdapat rumah masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memenuhi standar kelayakan huni.	Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
1410	1955424	Moh Wyldanyl Firdaus, S. Ked	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Perlu penernagan jalan karena jalan gelap menganggu keamanan dan kenyamanan	Jalan PorosRowokembu - Pegaden Tengah-Kec Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1411	1955546	AHMAD MUZAKI	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Masih terdapat rumah masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memenuhi standar kelayakan huni.	Kecamatan Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
1412	1955565	AHMAD MUZAKI	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Masih terdapat rumah masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memenuhi standar kelayakan huni.	Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
1413	1955624	Sumar Rosul	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	rusaknya jalan utama membuat masyarakat susah melaluinya, terutama saat musim hujan	Desa Werdi, Kec. Wonokerto, Ruas jalan Rowoyoso - Werdi (gili tengah), Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1414	1955692	AHMAD MUZAKI	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Pengerjaan saluran drainase di ruas Jl. Raya Jatilondo	Jl. Raya Jatilondo Coprayan, Tangkil Tengah, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
1415	1955720	Sumar Rosul	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum ada Jalan Usaha Tani	Desa Winduaji Kec. Paninggaran , Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1416	1955745	AHMAD MUZAKI	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan di Gg.26 Kelurahan Pekajangan rusak dan perlu dilakukan pengaspalan	Kelurahan Pekajangan Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1417	1955943	Patmisari	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Air melimpah di sepanjang jalan Kabupaten antara Dukuh Simbang - Winduaji berakibat jalan aspal cepat rusak dan berakibat pada akses ekonomi masyarakat	Desa Winduaji, Dukuh Simbang - Dukuh Winduaji, Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
1418	1955985	AHMAD MUZAKI	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (TK/PAUD)	Keterbatasan sarana ruang terbuka (Spilut) yang aman dan representatif untuk kegiatan pendidikan dan pengembangan karakter peserta didik di TK AISYIYAH Gandarum	Karagan Utara, Gandarum, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1419	1956034	Sumar Rosul	Bantuan prasarana persampahan (Sepeda Motor Tiga Roda)	Belum adanya Montor Roda 3 (Tosa) untuk mengangkut sampah	Desa Ponolawen Kec. Kesesi, Pasar Mrican Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
1420	1956036	AHMAD MUZAKI	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (TK/PAUD)	Keterbatasan sarana ruang terbuka (Spilut) yang aman dan representatif untuk kegiatan pendidikan dan pengembangan karakter peserta didik di TK AISYIYAH NURUL HUDA Tanjungkulon	Jl. Kendalisada, Tanjung, Tanjung Kulon, Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1421	1956063	Sumar Rosul	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum adanya jalan usaha tani	Dukuh Tilompo Desa sidorejo kec. Tirto , Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
1422	1956085	Patmisari	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Perlunya jalan penghubung antara Desa Bedagung dengan Desa Botosari, hal ini akan semakin meningkatkan aksesbilitas perekonomian dua desa	Jalan antar Desa Dukuh Bulupitu Desa Bedagung dan Dukuh Gunung Surat Desa Botosari Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1423	1956113	Sumar Rosul	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Pengerjaan Cor beton jalan Poros podo Ambokembang	Pengapaslan jalan Ligkar Podo, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1424	1956133	AHMAD MUZAKI	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah (SD)	Pembangunan rehabilitasi MIM Pakumbulan Kecamatan Buaran	Kaligawe, Pakumbulan, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
1425	1956146	Sumar Rosul	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Rusaknya jalan Poros Kwasen Podosari dukuh Podowani	Desa Kwasen Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1426	1956212	Sumar Rosul	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (TK/PAUD)	Pembangunan Madrasah diniyah	Desa Wiradesa, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1427	1956254	Sumar Rosul	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	belum adanya senderan Pembuangan	Desa Pucung Kec. Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1428	1956278	AHMAD MUZAKI	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (TK/PAUD)	Peningkatan jumlah pendaftar PAUD TK AISYIYAH PAESAN KEDUNGWUNI tiap tahun tidak diimbangi ketersediaan ruang belajar.	Jl. Papagan Jl. Paesan Utara No.17, Paesan Utara, Kedungwuni Barat, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1429	1956313	Sumar Rosul	Bantuan sarana pendukung pertanian (Alat-alat pertanian : Traktor dan alat pertanian lainnya)	Pengadaan Rumah Pompa Pengairan Pertanian	Desa Wuled Kec. Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
1430	1956334	Sumar Rosul	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Pengaspalan jalan Poros Pacar Gang 1 ke Samborejo	Desa Pacar Kec. Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1431	1956362	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran , Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1432	1956387	Sumar Rosul	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Pelebaran jalan daerah mayangan	Desa Mayangan Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1433	1956408	Patmisari	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Talud sepanjang 80 meter di jalan Kabupaten yang terletak di Dukuh Tarbu Desa Krandegan tidak memenuhi standar keselamatan pengguna jalan	Jalan Kabupaten Dukuh Tarbu Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1434	1956431	Sumar Rosul	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	belum ada Lampu Penerangan jalan	Kelurahan Mayangan, kelurahan Pekuncen kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1435	1956461	Sumar Rosul	Bantuan prasarana persampahan Kontainer dan Gerobak Sampah	Pengadaan Tong Sampah	Desa Kemplong, Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
1436	1956490	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalanan dengan kondisi yang sudah rusak sehingga dibutuhkan Perbaikan Insfrastruktur Jalan Keluarahan Bligo	Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1437	1956544	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Pipa atau saluran yang dibangun terlalu kecil untuk menampung volume air, terutama saat curah hujan tinggi sehingga dibutuhkan Perbaikan/ Normalisasi Drainase	Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
1438	1956556	Patmisari	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Salah satu penghasilan terbesar masyarakat Desa Lumeneng adalah dari sektor pertanian, namun di Desa Lumeneng masih banyak sekali akses jalan ke lahan pertanian yang kondisinya sangat belum layak	Dukuh Sumingkir RT 002 RW 004 Desa Lumeneng Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
1439	1956568	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Masjid dalam Keadaan yang sudah kurang layak untuk digunakan sehingga dibutuhkan Hibah Masjid	Masjid Mamba'ul Khikam Bligo Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran , Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1440	1956589	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (TK/PAUD)	Lonjakan Jumlah Siswa Kelebihan Kapasitas sehingga dibutuhkan Ruang Kelas Baru	Raudhatul Athfal Ibtidaiyah Pakumbulan Desa Pakumbulan Kecamatan Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1441	1956591	Sumar Rosul	Perbaikan sarana dan prasarana di area Perumahan (Rehab Jalan, drainase, RTH Perumahan)	Pembangunan Jalan Poros Perumahan Pisma Kemplong Wonoyoso	Desa Kemplong, Desa Wonoyoso, Kec Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
1442	1956611	Patmisari	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Butuhnya infrastruktur jalan yang memadai sebagai dukungan kegiatan perekonomian masyarakat (Aspal Jalan perekonomian)	Dukuh Tamansari Desa Tangeran Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1443	1956623	Sumar Rosul	NORMALISASI SUNGAI	Normalisasi sungai Mrican yang melintas dari Wonokerto	Sungai Mrican Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1444	1956651	Sumar Rosul	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Pembangunan Jalan Cor/Beton	Gang 5 Kelurahan Pekuncen Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1445	1956656	Patmisari	Penyediaan sarana dan prasarana olahraga	Tidak memiliki sarana olahraga di Desa	Desa Sawangan Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
1446	1956684	Sumar Rosul	Pembangunan/Rehabilitasi Pasar	Pembangunan Kios Pasar Sragi	Pasar Sragi Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
1447	1956690	AHMAD MUZAKI	Hibah Karang Taruna Kabupaten Pekalongan	Terbatasnya sarana peralatan drumband untuk mendukung kegiatan seni dan kreativitas pemuda pada Karang Taruna Desa Getas Kecamatan Wonopringgo	Desa Getas Kecamatan Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1448	1956711	AHMAD MUZAKI	Hibah Karang Taruna Kabupaten Pekalongan	Terbatasnya sarana peralatan drumband untuk mendukung kegiatan seni dan kreativitas pemuda pada Karang Taruna Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo	Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1449	1956745	Sumar Rosul	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (TK/PAUD)	Pembangunan ruang kelas baru dan TPQ Nurul Hikmah	Desa WonokertoKec. Wonokerto, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1450	1956758	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Masjid dalam Keadaan yang sudah kurang layak untuk digunakan sehingga dibutuhkan Hibah Masjid	Masjid Baiturrohim Desa Pakumbulan Kecamatan Buaran , Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1451	1956773	Sumar Rosul	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Pembangunan jalan lambat labuh Kapal	Desa Wonokerto Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1452	1956780	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Desa pakumbulan Kecamatan buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1453	1956838	Patmisari	PEMBANGUNAN JEMBATAN	Jembatan Kali Gunungsari adalah jembatan penghubung dan satu-satunya akses dari wilayah Dusun Silemud yang saat ini digunakan memiliki resiko kecelakaan tinggi dan sudah harus mendapat rehabilitasi tetapi melihat aspek keselamatan agar jembatan saat ini dapat di bangun ulang di lokasi yang lebih minim resiko kecelakaan (pembangunan jembatan Kali Gunungsari)	Dusun Silemud Desa Kaliboja Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jembatan
1454	1956846	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Madrasah ini membutuhkan Rehabilitasi Fasilitas perbaikan sarana dan Prasarana	TPQ Sullamut Taufiq Desa Pakumbulan Kecamatan Buaran , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
1455	1956866	AHMAD MUZAKI	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (SD)	Belum dilakukannya pavingisasi halaman sekolah pada SD Muhammadiyah Tangkil Kulon mengakibatkan kondisi lingkungan belajar kurang aman dan mengganggu aktivitas pembelajaran luar ruang.	Tangkil Kulon, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1456	1956887	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalanan dengan kondisi yang sudah rusak sehingga dibutuhkan Perbaikan Insfrastruktur jalan	Desa Pakumbulan Kecamatan Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1457	1956924	AHMAD MUZAKI	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (TK/PAUD)	Belum dilakukannya pavingisasi halaman sekolah pada TK Aisyiyah Ambokembang mengakibatkan kondisi lingkungan belajar kurang aman dan mengganggu aktivitas pembelajaran luar ruang.	Ambo Lor, Ambokembang, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
1458	1956930	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Lonjakan Jumlah Siswa Kelebihan Kapasitas sehingga dibutuhkan Ruang Kelas Baru	TPQ Darussalam Watussalam Desa Watusalam Kecamatan Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1459	1956950	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Masjid dalam Keadaan yang sudah kurang layak untuk digunakan sehingga dibutuhkan Hibah Masjid	Al Jihad Watussalam Desa Watusalam Kecamatan Buaran , Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1460	1956969	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Desa Watusalam Kecamatan Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1461	1957001	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalanan dengan kondisi yang sudah rusak sehingga dibutuhkan Perbaikan Insfrastruktur Jalan	Desa Watusalam Kecamatan Buaran , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1462	1957019	Patmisari	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Keberadaan jalan kabupaten yang menghubungkan Desa Domiyang dan Desa Notogiwang rusak berat	Dukuh Pejarakan Desa Domiyang Kecamatan Paninggaran , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1463	1957029	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Musholla dalam Keadaan yang sudah kurang layak untuk digunakan sehingga dibutuhkan Rehabilitasi	Rehabilitasi Musholla Annur Watusalam , Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1464	1957081	Patmisari	Bantuan sarana prasarana fasilitas kesehatan	Gedung Polindes (PKD) terbengkalai karena rusak parah	Desa Tenogo Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Kesehatan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
1465	1957192	AHMAD MUZAKI	Bantuan prasarana persampahan (Sepeda Motor Tiga Roda)	Keterbatasan armada operasional BKM Sejahtera Ambokembang dalam mendukung sistem persampahan berbasis masyarakat	Ambokembang, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
1466	1957324	Patmisari	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan kabupaten Rowadi - Stisuk sudah mengalami kerusakan parah	Dusun Rowadi - Dusun Stisuk Desa Notogiwang Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1467	1957359	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SD)	Lonjakan Jumlah Siswa Kelebihan Kapasitas sehingga dibutuhkan Ruang Kelas Baru	SDI Simbangwetan Desa Simbangwetan Kecamatan Buaran , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1468	1957386	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Madrasah ini membutuhkan Rehabilitasi sarana karena bangunannya sudah tua dan berpotensi bahaya	TPQ Annur Desa Simbangwetan Kecamatan Buaran , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
1469	1957424	Patmisari	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Pengaspalan jalan Desa (pengaspalan jalan Desa Botosari, jalan desa tersebut merupakan jalan utama akses perekonomian maupun pendidikan, sehingga sangat perlu untuk peningkatan atau perbaikan jalan tersebut)	Jalan Desa Botosari Kecamatan Paninggaran , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1470	1957474	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Musholla dalam Keadaan yang sudah kurang layak untuk digunakan sehingga dibutuhkan Hibah Musholla	Musholla Nurul HUda Desa Simbangwetan Kecamatan Buaran , Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1471	1957490	Patmisari	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan Desa Dukuh Jaladara rawan bencana longsor, membutuhkan talud yang kokoh untuk menopang jalan dan keamanan warga masyarakat	Dukuh Jaladara Desa Kaliombo Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1472	1957565	Sumar Rosul	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan	Pengembangan Tambak waring	Desa Semut Wonokerto, Kab. Pekalongan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1473	1957583	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalanan dengan kondisi yang sudah rusak sehingga dibutuhkan Perbaikan Insfrastruktur Jalan	Desa Simbangwetan Kecamatan Buaran , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1474	1957599	Sumar Rosul	Normalisasi Saluran Tambak	Jalan Produksi Tambak	Tratebang Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1475	1957622	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Desa Simbangwetan Kecamatan Buaran , Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1476	1957651	Patmisari	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Pentingnya perbaikan dan pembangunan drainase jalan PU Kabupaten Pekalongan, karena merupakan akses utama penunjang perekonomian masyarakat dan sebagai satu-satunya akses jalan menuju pusat kota, pendidikan, dan pasar	Desa Lambanggelun Bojongireng - Wangkelang Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1477	1957679	Sumar Rosul	REHABILITASI TEBING / BRONJONG SUNGAI	Pembangunan Tanggul Pecakaran yang Jebol	Desa Pecakaran Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1478	1957686	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalanan dengan kondisi yang sudah rusak sehingga dibutuhkan Perbaikan Insfrastruktur Jalan	Kelurahan Simbangkulon Kecamatan Buaran , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1479	1957714	Sumar Rosul	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Masih banyak Rumah Warga yang tidak Layak Huni	Kec. Buaran, Kec. Siwalan, Kec. Wonokerto, Wonopringgo Kedungwuni, Kajen Sragi Kesesi Karanganyar dan Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
1480	1957773	Patmisari	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Perlunya PJU untuk memberikan penerangan bagi warga dalam menjalankan aktifitas di malam hari dan untuk melakukan siskamling	Dukuh Cokrah RT 002 RW 003 Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran , Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1481	1957802	Sumar Rosul	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Pembangunan jalan Poros Rowoyoso werdi	Desa Werdi Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1482	1957837	Sumar Rosul	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pembangunan Jalan Galangan Kapal	Desa Wonokertokulon Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
1483	1957869	Patmisari	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi destinasi pariwisata di wilayah setempat, ditandai dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung	Desa Bedagung Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1484	1957879	Sumar Rosul	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (TK/PAUD)	Pembangunan TK PaudBaiturohmah	Desa Api-api Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1485	1957902	Sumar Rosul	Bantuan sarana prasarana fasilitas kesehatan	Bantuan MCK	Swalan, Rirto, Wiradesa, Wonokerto, Kab. Pekalongan	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1486	1957976	Sumar Rosul	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Wonorejo Kec.Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
1487	1958093	Sumar Rosul	Pemberdayaan dan peningkatan kualitas perkoperasian	Bintek Pengurus KoperasiMerah Putih	Kec. Wonokerto, Siwalan Sragi Wiradesa , Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
1488	1958140	Sumar Rosul	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Pengadaan dan Pemasangan Patok sungai dan Jalan	Kec. Wiradesa dan Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1489	1958144	Umi Farida	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (TK/PAUD)	Keterbatasan ruang layanan pada TPA Aisyiyah Doro	Kecamatan Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1490	1958194	Sumar Rosul	Pemberdayaan dan peningkatan kualitas perkoperasian	Bintek Managemen Permodalan Koperasi Dinas Koperasi	Kec. Wonokerto, Siwalan, Sragi Bojong Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
1491	1958226	Sumar Rosul	Bantuan kepada Organisasi Keolahragaan	Bantuan Askab PSSI Kab. Pekalongan	Kec. Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Usia Dini dan Dasar
1492	1958285	Sumar Rosul	Rehabilitasi ruang guru / kepala sekolah / TU (TK/PAUD)	Bangunan Paud Desa Mejasem rusak membahayakan dalam belajar mengajar	Desa Mejasem Kec.Siwalan, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1493	1958329	Umi Farida	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Kondisi saluran air di RT 08 RW 03 Dukuh Serang Kantong, Desa Wonosari, Kecamatan Karanganyar belum memiliki talud permanen.	Dukuh Serang Kantong RT 008 RW 003 Desa Wonosari Kecamatan Karanganyar (Belik), Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1494	1958333	Sumar Rosul	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Pengikisan dan Pengendapan yang terjadi disepanjang sungai RawanLonsor	Desa Wonosari kec. siwalan, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1495	1958377	Sumar Rosul	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Rusaknya jalan Poros tengeng -rembun mengakibatkan kurangnya lancarnya Transportasi	Desa Tengeng Kulon Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1496	1958410	Sumar Rosul	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	terdapat jalan Kabupaten ruas Tunjungsari rusak parah dan Amblas Dessa Tunjungsari Amblas	Desa Tunjungsari Kec. Siwalan, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1497	1958458	Sumar Rosul	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	"Jalan Poros Pait - Blimbingwuluh sudah rusak parah menghambat transportasi masyarakat dan hasil pertanian	Desa Pait Kec. Siwalan, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1498	1958515	Sumar Rosul	NORMALISASI SUNGAI	"Terjadi pendangkalan Sungai Sragi Lama sehingga menyebabkan banjir saat musim penghjan di Desa Tengengwetan	Desa Tengeng WetanKec. Siwalan, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1499	1958572	Sumar Rosul	REHABILITASI TEBING / BRONJONG SUNGAI	"Ketika air sungai penuh maka meluap ke pemukiman warga sehingga terjadi bencana banjir	Desa Rembun Kec. Sragi , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1500	1958603	Sumar Rosul	PEMBANGUNAN JEMBATAN	"Pembangunan Jembatan yang bertujuan untuk mempermudah mengakut hasil pertanian dan memperlancar arus perekonomian warga masyarakat	Desa Pucung Kec. Tirto , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jembatan
1501	1958959	Sumar Rosul	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	"Jalan menuju pertanian rusak karena ketinggian jalan rendah sehingga ketika intensitas hujan tinggi	Desa ngalian Kec. Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
1502	1958993	Sumar Rosul	Bantuan sarana pendukung pertanian (Alat-alat pertanian : Traktor dan alat pertanian lainnya)	"harga jual panen rendah, butuh mesin pengering padi dll, untuk dikelola oleh kelompok tani	Desa Pandanarum Kec. Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
1503	1959032	Sumar Rosul	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	"Pembangunan sender sungai buangan untuk memperlancar arus sungai	Desa Karanganyar Kec. Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1504	1959065	Sumar Rosul	REHABILITASI TEBING / BRONJONG SUNGAI	"Semakin tipisnya tanggul Pembatas antara air dengan daratan, oleh karena diperlukan pembangunan bronjong sungai sengkarang untuk memperkuat bagian bawah tanggul agar tidak terjadi longsor.	Desa Silirejo Kec.Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1505	1959088	Sumar Rosul	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	"Belum adanya drainase di jalan utama Desa yang mengakibatkan jalan tergenang air	Desa Sidorejo Kec. Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1506	1959136	Sumar Rosul	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	"Pengaspalan jalan rusak karena ketinggian jalan rendah sehingga ketika intensitas hujan tinggi, air dari sungai besar dan irigasi pertanian meluap ke jalan dan rumah warga	Desa Pucung Kec. Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1507	1959156	Sumar Rosul	PEMBANGUNAN JEMBATAN	"Tidak maksimalnya akses penghubung wilayah dadirejo, karena masih belum adanya jembatan permanen. Contohnya dalam pelayanan mobil ambulance desa harus muter jalan sejauh 5KM untuk sampai wilayah barat dadirejo, sedangkan lewat jalan lain terkedala banjir dan jalan rusak. Jembatan permanen akan mempermudah akses ke Pasar Wiradesa, ke sekolah seperti SMP dan SMA. Jembatan Gantung yang sudah dibangun lebih dari 15 tahun dan sudah harus dirubah menjadi menjadi jembatan permanen. "	Desa Dadirejo Kec. Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jembatan
1508	1959188	Sumar Rosul	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	"Pembangunan Jalan, Pembangunan jalan penghubung dari desa Tanjung Kecamatan Tirto menuju Kelurahan Pringrejo Kota Pekalongan dan Tanjung sampai Dadirejo	Desa Tanjung Kec. Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1509	1959285	Sumar Rosul	PEMBANGUNAN JEMBATAN	"Pembangunan Jembatan, Pembangunan jembatan Karang Melik yang bertujuan untuk memperlancar arus perekonomian warga masyarakat	Desa Curug Kec. Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
1510	1959352	Sumar Rosul	REHABILITASI JEMBATAN	Rehabilitasi Jembatan (Depan Masjid Jami' Samborejo)	Desa Samborejo Kec. Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
1511	1959372	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Pipa atau saluran yang dibangun terlalu kecil untuk menampung volume air, terutama saat curah hujan tinggi sehingga dibutuhkan Perbaikan/Normalisasi Saluran Air (Drainase)	Kelurahan Simbangkulon Kecamatan Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1512	1959378	Sumar Rosul	REHABILITASI TEBING / BRONJONG SUNGAI	"Menahan Luapan Air sungai Sengkarang dari akibat Air ROB dan Banjir Bandang "	KarangjompoKec. Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1513	1959390	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Kelurahan Simbangkulon Kecamatan Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1514	1959407	Sumar Rosul	PEMBANGUNAN JEMBATAN	"Pembangunan Jembatan, Pembangunan Jembatan penghubung guna memperlancar arus mobilitas warga serta peningkatan perekonomian warga "	Desa Tegaldowo Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jembatan
1515	1959423	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Lonjakan Jumlah Siswa Kelebihan Kapasitas sehingga dibutuhkan Ruang Kelas Baru	TPQ Arrohmah Kelurahan Simbangkulon Gg 2 Kecamatan Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1516	1959433	Sumar Rosul	REHABILITASI TEBING / BRONJONG SUNGAI	"Menahan Luapan Air sungai Sengkarang dari akibat Air ROB dan Banjir Bandang	Desa Mulyorejo Kec. Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1517	1959461	Sumar Rosul	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	"Pembangunan Jalan, Pembangunan jalan poros untuk peningkatan sarana transportasi guna menunjang peningkatan perekonomian warga masyarakat "	Desa Jeruksari Kec. Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1518	1959485	Sumar Rosul	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	"Banyaknya lubang yang bisa membahayakan pengguna jalan Rt 013 Rw 007 ke utara menuju Rt 015 Rw 008 "	"Desa Kauman RT 013 - 015, sebelah selatan SMK 45 ke utara/jalan Kab , Kab. Pekalongan" , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1519	1959509	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah (TK/PAUD)	Sekolah membutuhkan perbaikan sarana karena bangunannya sudah tua dan berpotensi bahaya	Raudlatul Athfal Muslimat Salafiyah Kelurahan Simbangkulon Kecamatan Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
1520	1959537	Sumar Rosul	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	"Jalan Poros Desa kadipaten ke Petukangan petukangan dalam kondisi rusak berat "	Desa Kadipaten arah desaPetukangan Wonokerto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1521	1959556	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Musholla dalam Keadaan yang sudah kurang layak untuk digunakan sehingga dibutuhkan Hibah Musholla	Hibah Musholla Al Hadi As Suyuti Kelurahan Simbangkulon Kecamatan Buaran , Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1522	1959588	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SMP)	Lonjakan Jumlah Siswa Kelebihan Kapasitas sehingga dibutuhkan Ruang Kelas Baru	MTS Wonoyoso Desa Wonoyoso Kecamatan Buaran , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1523	1959612	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah (SD)	Membutuhkan Rehabilitasi sarana karena bangunannya sudah tua dan berpotensi bahaya	MIS Wonoyoso Desa Wonoyoso Kecamatan Buaran , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
1524	1959628	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Desa Wonoyoso Kecamatan Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1525	1959649	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalanan dengan kondisi yang sudah rusak sehingga dibutuhkan Perbaikan Insfrastruktur Jalan	Desa Wonoyoso Kecamatan Buaran , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1526	1959672	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Musholla dalam Keadaan yang sudah kurang layak untuk digunakan sehingga dibutuhkan Hibah Musholla	Musholla Abdurrahman Desa Wonoyoso Kecamatan Buaran , Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1527	1959721	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Bantuan kepada lembaga/organisasi masyarakat	Untuk mendukung berbagai program kerja, seperti kegiatan dakwah, sosial, pendidikan, serta operasional badan otonom NU, sehingga dibutuhkan Hibah	Gedung MWC NU Desa Watusalam Kecamatan Buaran , Kab. Pekalongan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
1528	1959766	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Kurangnya sarana dan prasarana Seperti Kursi di Musholla Al Anshori	Musholla Al Anshori Desa Ambokembang Kecamatan Buaran , Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1529	1959786	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Kurangnya sarana dan prasarana Seperti Kursi di Musholla Baiturahman	Musholla Baiturahman Desa Ambokembang Kecamatan Buaran , Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1530	1960385	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Bantuan prasarana persampahan (Sepeda Motor Tiga Roda)	Penumpukan yang menimbulkan bau tidak sedap, penyakit, dan risiko pencemaran lingkungan (tanah, air, udara), Sehingga membutuhkan Sepeda motor tiga roda	Kelurahan Simbangkulon Kecamatan Buaran , Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
1531	1960430	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Bantuan prasarana persampahan (Sepeda Motor Tiga Roda)	Penumpukan yang menimbulkan bau tidak sedap, penyakit, dan risiko pencemaran lingkungan (tanah, air, udara), Sehingga membutuhkan Sepeda motor tiga roda	Desa Coprayan Kecamatan Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
1532	1960453	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Bantuan prasarana persampahan (Sepeda Motor Tiga Roda)	Penumpukan yang menimbulkan bau tidak sedap, penyakit, dan risiko pencemaran lingkungan (tanah, air, udara), Sehingga membutuhkan Sepeda motor tiga roda	Kelurahan Sapugarut Kecamatan Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1533	1960713	Sumar Rosul	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	"Masih terdapat saluran/drainase yang rusah berat "	Desa Kemplong Kec,Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
1534	1960732	Sumar Rosul	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	"Rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT) yang menghubungkan Desa KAMPIL, Desa WARULOR dan Desa BONDANSARI "	Desa Bondansari Kec.Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
1535	1960762	Sumar Rosul	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	"Keluarga Miskin KEL. KEPATIHAN DARI RT. 01- 18 menghuni rumah Tidak Layak Huni "	Kelurahan Kepatihan Kec.Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
1536	1960786	Sumar Rosul	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	"Jalan kabupaten di depan makam sembung Desa Kampil Kec.Wiradesa mengalami rusak dan becek,sehingga mengganggu akses warga "	Desa Kampil Kec.Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1537	1960865	Sumar Rosul	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	"Mencegah Banjir, Memperlancar Arus Air (Saluran Air) "	Delegtukang Desa Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1538	1960892	Sumar Rosul	PEMBANGUNAN JARINGAN AIR MINUM PERPIPAAN (SPAM)	"Kondiri Air Tanah yang Sudah tidak layak konsumsi (Pembangunan Sumur Dalam) "	Karangjati Kec, Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
1539	1960915	Sumar Rosul	PEMBANGUNAN JARINGAN AIR MINUM PERPIPAAN (SPAM)	"kurangnya air bersih di desa petukangan sehingga menyebabkan banyaknya kasus stunting di desa petukangan (Pamsimas) "	Desa Pertukangan Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
1540	1960935	Sumar Rosul	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	"Betonisasi Jalan poros yang sudah rusak berada di area sekitar persawahan dari Desa Waru Kidul sampai perbatasan Desa Waru Lor, Desa Bondansari, dan Desa Blimbing Wuluh Kecamatan Siwalan "	"Perbatasan Jalan Desa Waru Kidul dengan Desa Waru Lor, Desa Bondansari, Desa Blimbing Wuluh Kecamatan Siwalan Kab. Pekalongan, Wiradesa, Waru Kidul , Kab. Pekalongan" , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1541	1960955	Sumar Rosul	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	"Normalisasi/Rehabilitasi Saluran Buangan air Jl. Mayjen Sutoyo Gumawang Kampil "	"Jl. Mayjen Sutoyo Gumawang di Rt. 08, Rt.09 , Rt.13 , Rt,14 Rt.15 Kel Gumawang , Kab. Pekalongan" , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
1542	1960967	Sumar Rosul	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	"Rusak Berat Jalan Usaha tani Desa Wiradesa Kecamatan Wiradesa s/d Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan untuk Meningkatkan sarana dan prasarana Pertanian "	"Desa Wiradesa RT. 023 / RW. 005 / jalan poros. Kec. Wiradesa , Kab. Pekalongan" , Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1543	1960988	Sumar Rosul	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	"Rusaknya jalan di wiranata mengakibatkan akses transportasi keluar masuk sangat sulit,jalan tersebut belum di beton,sehingga kalau terjadi curah hujan banyak genangan air "	"Perum Griya wiranata Rt.003 Rw.009 Kel.Pekuncen Kec.Wiradesa Kab.Pekalongan / Betonisasi , Kab. Pekalongan" , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1544	1961003	Sumar Rosul	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	"Saluran rusak mengakibatkan banjir "	"Kelurahan Mayangan Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan" , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
1545	1961024	Sumar Rosul	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	"Jalan yang berlubang dan aspal terlkelupas menyebabkan terganggunya aktifitas warga. Dan saat musim hujan jalan berlubang tidak terlihat akibat genangan air hujan "	"JL. Merpati Kel Bener Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan" , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1546	1961052	Sumar Rosul	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	"Talud jalan poros sangat dibutuhkan agar tanah yang sudah di aspal tidak labil "	"Area persawahan Desa Bondansari Dusun gendogo sampai dusun Bondan. Kec. Wiradesa , Kab. Pekalongan" , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1547	1961066	Sumar Rosul	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	"Kondisi Tanggul kali Pencongan kondisi rusak rawan jebol "	Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1548	1961088	Sumar Rosul	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	"Adanya titik tanggul Sungai Sengkarang yang belum diperkuat dan dikhawatirkan akan terjadi kerusakan lebih parah, dan bahaya untuk lingkungan sekitar "	"Desa Pesanggrahan RT. 01 - RT. 07 (Dekat Lapangan Sepak Bola Pesanggrahan) Kec. Wonokerto , Kab. Pekalongan" , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1549	1961103	Sumar Rosul	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	"Belum adanya senderan sungai sehingga tanah yang ada dipinggiran sungai terkikis "	"Desa Sijambe RT. 11, RT. 10 dan RT. 12 (Sungai Pekuncen) Kec. Wonokerto , Kab. Pekalongan" , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1550	1961129	Sumar Rosul	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	"Bencana Banjir yang terjadi setiap tahun karena sistem drainase belum maksimal "	"""1. Jl. Soekarno Hatta (timur) 2. Jl. Laks Yos Sudarso (timur) 3. Jl. Laks Yos Sudarso barat) (Ruas Jl. Kepatihan - Wonokerto) "" Desa Bebel Kec. Wonokert, Kab. Pekalongan" , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
1551	1961146	Sumar Rosul	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	"Rusaknya jalan Utama membuat masyarakat susah melaluinya, terutama saat musim hujan. "	"Desa Werdi. Kec. Wonokerto. Ruas Jalan Rowoyoso - Werdi (Gili Tengah) , Kab. Pekalongan" , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1552	1961179	Sumar Rosul	PEMBANGUNAN JEMBATAN	pembangunan jembatan	"Dukuh Rowoyoso RT. 08 RW. 03 (Ruas Jl. Kemplong - Rowoyoso) Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan" , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jembatan
1553	1961197	Sumar Rosul	NORMALISASI SUNGAI	"Pendangkalan sungai karena lumpur "	"Dukuh Semut (Sungai Selud) Desa Semut Kec. Wonokerto , Kab. Pekalongan" , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1554	1961219	Sumar Rosul	REHABILITASI JEMBATAN	"Jembatan sudah dalam kondisi rusak sehingga mengganggu pengguna jalan, dikhawatirkan akan terjadi kerusakan yang semakin parah atau roboh "	Desa Tratebang Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jembatan
1555	1961232	Sumar Rosul	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	tidak ada Drainase	"Desa Wonokerto Kulon RT. 02 RW. 01 (Ruas Jl. Wonokerto - Kepatihan) , Kab. Pekalongan" , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
1556	1961244	Sumar Rosul	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	"Jalan belum tinggi dan belum beton "	"Desa Wonokerto Wetan Jalan Terusan Kepatihan (Ruas Jl. Kepatihan - Bebel) , Kab. Pekalongan" , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1557	1961256	Sumar Rosul	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	"Rusaknya Jalan Produksi Perikanan Desa Api-Api Menuju Ke Pantai Desa Api-Api mengakibatkan lumpuhnya aktifitas para petani tambak "	"Jalan Usaha Tani Menuju Pantai Desa Api-Api Kecamatan Wononokerto Kabupaten Pekalongan, Kab. Pekalongan , Kab. Pekalongan" , Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
1558	1961276	Sumar Rosul	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	"Penanggulangan Bencana Banjir dan Limbah Rumah Tangga "	"Jalan Menuju TPI Jambean Desa Pecakaran, Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan" , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
1559	1961295	Sumar Rosul	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum adanya jalan usaha tani	Dukuh Tilompo Desa Sidorejo Kec. Tirto, Kab. Pekalongan , Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
1560	1961309	Sumar Rosul	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Pengaspalan jalan poros podo - ambokembang	Desa Podo Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1561	1961325	Sumar Rosul	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Pengaspalan jalan lingkar podo	Desa Podo Kec. Kedungwuni , Kab. Pekalongan , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1562	1961379	Sumar Rosul	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan jalan di Lapangan sepakbola Podo	Desa Podo Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan , Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1563	1961389	Sumar Rosul	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Rusaknya jalan poros Kwasen-Podosari	Desa Kwasen Kec.Kesesi, Kab. Pekalongan , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1564	1961394	Sumar Rosul	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum adanya infrastruktur pendukung pertanian	Desa Ponolawen Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan , Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
1565	1961406	Sumar Rosul	Bantuan bibit ternak	Pemanfaatan potensi lingkungan melalui Bantuan ternak kepada kelompok ternak	Desa Bukur Kec. Bojong, Kab. Pekalongan , Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
1566	1961422	Sumar Rosul	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (TK/PAUD)	Pembangunan Ruang Kelas Baru TPQ	Desa Wiradesa Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1567	1961430	Sumar Rosul	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Belum adanya senderan pembuangan	RT 4 RW 1 Desa Pucung Kec. Tirto, Kab. Pekalongan , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
1568	1961444	Sumar Rosul	Bantuan sarana pendukung pertanian (Alat-alat pertanian : Traktor dan alat pertanian lainnya)	Pengadaan rumah pompa pengairan pertanian	Desa Wuled Kec Tirto, Kab. Pekalongan , Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
1569	1961452	Sumar Rosul	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Pengaspalan jalan poros sepacar gang 1 ke Samborejo	Desa Pacar Kec. Tirto, Kab. Pekalongan , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1570	1961462	Sumar Rosul	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Pelebaran jalan kabupaten di daerah mayangan tengah	Kelurahan Mayangan Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1571	1961469	Sumar Rosul	Perbaikan sarana dan prasarana di area Perumahan (Rehab Jalan, drainase, RTH Perumahan)	Pembangunan jalan lingkungan	Kel. Mayangan Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan , Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
1572	1961478	Sumar Rosul	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan jalan	Kel. Mayangan Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan , Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1573	1961493	Sumar Rosul	Pembangunan ruang guru / kepala sekolah / TU (SD)	Kapasitas kelas dan siswa di SDN 1 Kemplong yang tidak memadai	Desa Kemplong Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1574	1961507	Sumar Rosul	Perbaikan sarana dan prasarana di area Perumahan (Rehab Jalan, drainase, RTH Perumahan)	Pembangunan jalan perumahan pisma di RT 15	Desa Kemplong Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan , Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
1575	1961517	Sumar Rosul	NORMALISASI SUNGAI	Normalisasi sungai mrican yang melintas dari wonokerto - wiradesa	Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1576	1961526	Sumar Rosul	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Pengaspalan jalan	Dukuh Wianggong RW 1 Kelurahan Pekuncen Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1577	1961540	Sumar Rosul	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Sering terjadi banjir karena drainase yang belum ada perawatan	RW 9 Kel. Pekuncen Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1578	1962332	Moh Wyldanyl Firdaus, S. Ked	REHABILITASI TEBING / BRONJONG SUNGAI	Diperlukan senderan sungai agar terhindar dari erosi dan longsor tebing akan menghambat arus air sungai	Desa Kebonsari, Kec Karangdadap , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1579	1962351	Moh Wyldanyl Firdaus, S. Ked	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Diperlukan Hibah untu meningkatkan sarana dan prasarana belajar mengajar sehingga bisa meningkatkan mutu pendidikan.	TPQ Khoirunnisa, Rowokembu Kec Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
1580	1962369	Moh Wyldanyl Firdaus, S. Ked	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Diperlukan hibah untuk musholla guna peningkatan sarana dan prasarana agar tercipta kenyamanan dalam melaksanakan ibadah	Musholla An Nur Desa Pegaden Tengah Kec Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1581	1962468	MIRZA KHOLIK	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Diperlukan Bantuan Pembangunan RKB untuk kenyamanan proses belajar mengajar karena jumlah siswa yang makin meningkat	TPQ Al Falah desa Karangjompo Kec Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1582	1962488	MIRZA KHOLIK	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Jalan gelap diperlukan Penyediaan LPJU untuk kenyamanan dan keamanan warga	Desa Karangjompo RT 02/02 Kec Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1583	1963133	MIRZA KHOLIK	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Kondisi sarana dan prasarna Musholla kurang memadai, perlu bantuan untuk rehabilitasi	Musholla Nurul Iman Desa Mulyorejo RT 04/02 Kec Tirto, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1584	1963169	MIRZA KHOLIK	REHABILITASI TEBING / BRONJONG SUNGAI	Tanggul sungai tidak memadai ada bagian yang ambrol perlu rehabilitasi / peninggian tanggul	Desa Mulyorejo Kec Tirto - Desa Pecakaran Kec Wonokerto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1585	1963197	MIRZA KHOLIK	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah (TK/PAUD)	Ruang sekolah rusak tidak memadai untuk proses belajar mengajar	TK PGRI Desa mulyorejo Kec Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
1586	1963219	MIRZA KHOLIK	Peningkatan Jalan Produksi Tambak	Jalan menuju area tambak rusak tidak memadai	Desa Mulyorejo Kec Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1587	1963275	MIRZA KHOLIK	PEMBANGUNAN JARINGAN AIR MINUM PERPIPAAN (SPAM)	Kurangnya ketersediaan air bersih, perlu pembangunan Tower Pamsimas	Desa mulyorejo Kec tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
1588	1963303	MIRZA KHOLIK	Penyediaan sarana dan prasarana olahraga	Perlu pembangunan lapangan bulutangkis untuk sarana kesehatan warga dan penyaluran hobby / bakat	Desa Mulyorejo Kec Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Usia Dini dan Dasar
1589	1963398	Sumar Rosul	Pembangunan/Rehabilitasi Pasar	Pembangunan Kios Pasar Pagi	Kelurahan Pekuncen kec. Wiradesa Kab. Pekalongan, Kab. Pekalongan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
1590	1963410	Sumar Rosul	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (TK/PAUD)	Pembangunan Kelas Baru TK Barune	Desa WonokertoKulon Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1591	1963430	Sumar Rosul	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Pembangunan saluran pembuangan jalan dari wonokerto - tratebang	Wonokerto Kecamatan Wonokerto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
1592	1963441	Sumar Rosul	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Pembangunan jalan tambat labuh kapal	Desa Wonokerto Kecamatan Wonokerto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1593	1963455	Sumar Rosul	REHABILITASI JEMBATAN	Pemeliharaan jembatan Depok	Desa Depok Kec. Siwalan, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jembatan
1594	1963467	Sumar Rosul	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Pembangunan jalan usaha tani dari gang mandarin	Desa Wonokerto Wetan Kec. Wonokerto , Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
1595	1963479	Sumar Rosul	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Pembangunan jalan usaha tani	Dukuh Buntelan Desa Wonokerto Wetan. Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan , Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
1596	1963493	Sumar Rosul	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Peningkatan jalan Soekarno Hatta	Desa Wonokerto Wetan Kec. Wonokerto , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1597	1963505	Sumar Rosul	NORMALISASI SUNGAI	Normalisasi saluran Desa Semut - Desa Tratebang	Desa Semut Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1598	1963525	Sumar Rosul	Peningkatan Jalan Produksi Tambak	Pembangunan jalan produksi tambak	Desa Semut Kc. Wonokerto, Kab. Pekalongan , Kab. Pekalongan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1599	1963537	Sumar Rosul	Peningkatan Jalan Produksi Tambak	Pembangunan tambak waring	Desa Semut Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan , Kab. Pekalongan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1600	1963552	Sumar Rosul	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Pengaspalan jalan poros tratebang - Rowoyoso	Desa Tratebang Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1601	1963568	Sumar Rosul	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	LPJU Jalan poros tratebang - rowoyoso	Desa Tratebang Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan , Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1602	1963681	Sumar Rosul	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	BintekRelawan Penanggulangan Bencana Kab. Pekalongan	Kec. Wonokerto, Kec. Sragi, Kec. Siwalan, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
1603	1963714	Patmisari	Perbaikan sarana dan prasarana di area Perumahan (Rehab Jalan, drainase, RTH Perumahan)	Kondisi jalan perumahan yang sudah rusak dan berlubang sehingga membahayakan warga dan menghambat aktivitas. Diperlukan perbaikan/rehabilitasi untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan lingkungan.	Perumahan Montana Desa Nyamok Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
1604	1963724	Sumar Rosul	Bantuan sarana prasarana fasilitas kesehatan	Bantuan MCK	Kec Wonpkerto, Tirto,Sragi,Siwalan, Kab. Pekalongan	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1605	1963766	Sumar Rosul	Bantuan bibit ternak	Bantuan ternak	Kec. Wonokerto, Bojong Kesesi, Kajen Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
1606	1963789	Sumar Rosul	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (TK/PAUD)	Bantuan Ruang Kelas Baru TPQ NurulHuda Desa Kutorejo	Dukuh Gumanti Desa Kutorejo Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1607	1963806	Sumar Rosul	Pengadaan Peralatan Belajar Mengajar (Laptop) (SMP)	Pengadaan Komputer SMP Manufa	Desa Sragi Kec.sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
1608	1963828	Sumar Rosul	Pengadaan Peralatan Belajar Mengajar (Laptop) (SMP)	Pengadaan Mebeler SMPManufa	Desa Sragi Kecamatan Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Mebel Sekolah
1609	1963859	Sumar Rosul	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Pembangunan Jalan Lingkungan	Lingkungan Rt 02/Rw. 04 kelurahan Sragi Kec. Sragi , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1610	1963881	Sumar Rosul	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Pembangunan Bedah Rumah	Kec, Sragi,Kec. Wonokerto, Kec. Siwalan.Kec. Tirto,Kec. Wiradsea, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
1611	1963896	Sumar Rosul	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Pembangunan Gang jalan Stasiun	Gang Stasiun Kel. Sragi Kec. Sragi , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1612	1963910	Sumar Rosul	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan Usaha Tani Sijambe Wonokerto Wetan	Sijambe Wonokerto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1613	1963922	Sumar Rosul	Bantuan bibit ternak	Bantuan Ternak Se Kab.Pekalongan	19 Kecamatan, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
1614	1963939	Sumar Rosul	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	jalan usaha tani karangsari kec. Bojong	Desa Karangsari Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
1615	1963966	Catur Andriansah, S.Pd	Penyediaan sarana dan prasarana olahraga	Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga di lingkungan masyarakat masih terbatas dan belum memadai, sehingga kegiatan olahraga masyarakat belum berjalan optimal	Desa Kesesi Kecamatan Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
1616	1963982	Masbukhin, S.Ag	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah (SD)	Sekolah membutuhkan Rehabilitasi Ruang Kelas karena bangunannya sudah tua dan berpotensi bahaya	MIS Sembung Jambu Bojong Desa Sembung Jambu Bojong Kecamatan Bojong , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
1617	1964004	Masbukhin, S.Ag	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SD)	Lonjakan Jumlah Siswa Kelebihan Kapasitas sehingga dibutuhkan Ruang Kelas Baru	MI Asy - Sya'ban Desa Karangsari Kecamatan Bojong , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1618	1964008	Sumar Rosul	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Pengadaan dan Pemasangan Patok sungai dan Jalan	Kec. Wiradesa,Wonokerto, , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1619	1964033	Masbukhin, S.Ag	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Desa Karangsari Kecamatan Bojong , Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1620	1964116	Masbukhin, S.Ag	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Desa Babalan Kidul Kecamatan Bojong , Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1621	1964131	Masbukhin, S.Ag	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Masjid dalam Keadaan yang sudah kurang layak untuk digunakan sehingga dibutuhkan Hibah Masjid	Masjid Al Huda Desa Babalan Kidul Kecamatan Bojong , Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1622	1964154	Sumar Rosul	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Pengadaan dan pemasangan patok sungai dan jalan	Kec. Wiradesa dan Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1623	1964172	Sumar Rosul	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan poros pembangunan cor Boyoteluk-werdi	Desa Boyoteluk Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1624	1964173	Masbukhin, S.Ag	Fasilitasi Penumbuhan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin	Upaya untuk penanggulangan kemiskinan berbasis kelompok membutuhkan bantuan KUBE	KUBE Muda Bangkit Desa Babalan Kidul Kecamatan Bojong , Kab. Pekalongan	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
1625	1964184	Sumar Rosul	NORMALISASI SUNGAI	Normalisasi sungai silempeng	Kec. Siwalan , Kab. Pekalongan , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1626	1964187	Masbukhin, S.Ag	Fasilitasi Penumbuhan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin	Upaya untuk penanggulangan kemiskinan berbasis kelompok membutuhkan bantuan KUBE	KUBE Trusmi Desa Babalan Kidul Kecamatan Bojong , Kab. Pekalongan	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
1627	1964194	Sumar Rosul	REHABILITASI TEBING / BRONJONG SUNGAI	Pembangunan tanggul pecakaran yang jebol	Desa Pecakaran Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1628	1964198	Masbukhin, S.Ag	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Desa Bojong Minggir Kecamatan Bojong , Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1629	1964200	Sumar Rosul	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Masih banyak rumah warga Kabupaten Pekalongan yang tidak layak huni	19kecamatan, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
1630	1964209	Sumar Rosul	Fasilitasi Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan kontainer warung untuk usaha	19 kecamatan, Kab. Pekalongan	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
1631	1964277	Sumar Rosul	Bantuan kepada Organisasi Keolahragaan	Bantuan hibah kepada kelompok senam sicita	Kec. Wonokerto dan Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan , Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Usia Dini dan Dasar
1632	1964287	Sumar Rosul	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Bantuan HIbah Baznas Kabupaten Pekalongan	Baznas Kabupaten Pekalongan, Kab. Pekalongan , Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1633	1964295	Sumar Rosul	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	HIbah untuk Musholla Al karomah dan Musholla Nurul Huda	HIbah untuk Musholla Al karomah dan Musholla Nurul Huda , Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1634	1964313	Sumar Rosul	Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan	HIbah ke Ormas/LSM	Desa Kajen Kec. Kajen, Kab. Pekalongan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-
1635	1964316	Umi Farida	PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK	Belum tersedianya sarana sanitasi layak di Desa Sokosari menyebabkan sebagian masyarakat belum memiliki akses terhadap fasilitas MCK yang memenuhi standar kesehatan lingkungan.	Desa Sokosari Kecamatan Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
1636	1964324	Sumar Rosul	Bantuan kepada Organisasi Keolahragaan	HIbah kepada KORMI (Komite Olahraga Masyarakat INdonesia)	Kab. Pekalongan, Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Usia Dini dan Dasar

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1637	1964334	Sumar Rosul	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemeliharaan bangunan cagar budaya eks Pendopo lama dan rumah dinas Bupati	Kab. Pekalongan, Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
1638	1964342	Sumar Rosul	PEMBANGUNAN JEMBATAN	Pembangunan jembatan sungai mrican	Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jembatan
1639	1964376	Sumar Rosul	Pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan	Bantuan MCK	19 Kecamatan, Kab. Pekalongan	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1640	1964390	Sumar Rosul	NORMALISASI SUNGAI	NOrmalisasi sungai pekuncen, api api dan wiradesa	NOrmalisasi sungai pekuncen, api api dan wiradesa , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1641	1964407	Sumar Rosul	Pengadaan Mebel (SMP)	Pengadaan Buku Literasi	Kec. Wonokerto, Tirto, Siwalan, Wiradesa, Buaran, Bojong, Kajen dan Sragi, Kab. Pekalongan , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Mebel Sekolah
1642	1964417	AHMAD MUZAKI	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SD)	Bantuan RKB pembangunan ponpes Roudhatutaklim Kaifyatussholah Simbang Wetan Kec Buaran	Simbang Wetan Kec Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1643	1964419	Sumar Rosul	Pengadaan Mebel (SMP)	Pengadaan alat pembelajaran Digital	19 kecamatan, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
1644	1964432	Sumar Rosul	Pengadaan Mebel (SMP)	Pengadaan buku literasi SMP	19 Kecamatan, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
1645	1964453	Sumar Rosul	Pengadaan Mebel (SMP)	Pengadaan alat peraga KIT Eksperimen	Kec. Wonokerto, Kec. Wiradesa, Kec. Tirto dan Kec. Siwalan, Kab. Pekalongan , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
1646	1964536	Umi Farida	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Kondisi sarana dan prasarana Mushola Al-Barokah Desa Wonosari belum memadai untuk menampung jamaah sehingga diperlukan dukungan peningkatan fasilitas melalui hibah.	Dukuh Serang Kantung RT 008 RW 003 Desa Wonosari Kecamatan Karanganyar, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1647	1964635	Umi Farida	Pengadaan Peralatan Belajar Mengajar (Laptop) (SMP)	Keterbatasan sarana teknologi informasi di MTs Muhammadiyah Darussalam Talun menyebabkan proses pembelajaran dan administrasi berbasis digital belum berjalan optimal.	Bangun Lor, Donowangun, Talun, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
1648	1964666	Umi Farida	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Keterbatasan penerangan jalan di Dukuh Serang Kantung menghambat mobilitas masyarakat serta menimbulkan kerawanan keselamatan dan keamanan lingkungan.	Dukuh Serang Kantung Desa Wonosari Kecamatan Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1649	1964678	Masbukhin, S.Ag	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Sekolah membutuhkan Rehabilitasi Ruang Kelas karena bangunannya sudah tua dan berpotensi bahaya	TPQ Sulam Taufiq Desa Legokcile Kecamatan Bojong , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
1650	1964689	Masbukhin, S.Ag	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Musholla dalam Keadaan yang sudah kurang layak untuk digunakan sehingga dibutuhkan Hibah Musholla	Musholla Nurul Muttaqin Desa Menjangan Kecamatan Bojong , Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1651	1964726	Masbukhin, S.Ag	PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK	Septic tank yang bocor atau tidak sesuai standar sehingga dapat mencemari maka diperlukan bantuan Pembenahan MCK / Spitank	Desa Babalan Kidul Kecamatan Bojong , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1652	1964738	Masbukhin, S.Ag	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Gank KPN Desa Bojong Lor Kecamatan Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1653	1964747	Masbukhin, S.Ag	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Gg Kyai Kasyad Desa Ketitang Lor Kecamatan Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1654	1964753	Masbukhin, S.Ag	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalanan yang sudah mengalami kerusakan dan berlobang sehingga dibutuhkan Pengaspalan Jalan	Desa Babalan Kidul Kecamatan Bojong , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1655	1964760	Masbukhin, S.Ag	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalanan yang sudah mengalami kerusakan dan berlobang sehingga dibutuhkan Pengaspalan Jalan	Desa Bojong Minggir Kecamatan Bojong , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1656	1964768	Masbukhin, S.Ag	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Kerentanan terhadap Banjir Besar di aliran sungai, sehingga dibutuhkan pembangunan Bronjong sungai	Desa Wiroditan Kecamatan Bojong , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1657	1964808	MUKHAMA RIF'AN	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Saluran air sudah rusak mengakibatkan air tidak lancar dan tumpah/meluap ke jalan	Lingkunagn VII kel sragi, Kec sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
1658	1964814	MUKHAMA RIF'AN	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak tidak nyaman dilalui dan menganggu aktifitas warga perlu perbaikan dengan Pengaspalan	Jalan belakang Masjid Besar Baiturrahim Sragi, Kec Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1659	1964825	MUKHAMA RIF'AN	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan sering rusak perlu diperbaiki agar permanen dengan Betonisasi 3 x 50 m	Jalan Depan Makam Dukuh Gembyang Kel Sragi, Kec sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1660	1964834	MUKHAMA RIF'AN	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	jalan rusak bergelombang tidak nyaman di lalui, perlu perbaikan dengan pengaspalan	Jalan perbatasan Kel sragi dan desa tegalontar Kec Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1661	1964842	Umi Farida	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SMP)	Jumlah rombongan belajar di MTs Muhammadiyah Darussalam Talun tidak sebanding dengan jumlah ruang kelas yang tersedia sehingga diperlukan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB).	Bangun Lor, Desa Donowangun, Kecamatan Talun, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1662	1964849	MUKHAMA RIF'AN	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Kondisi jalan banyak rusak berlubang tidak nyaman dilewati , perlu perbaikan dengan pengaspalan	Jalan Lingkungan VI Kel Sragi, Kec sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1663	1964867	MUKHAMA RIF'AN	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan sering rusak perlu perbaikan yang lebih permanen dengan Betonisasi 3 x 70 M	Jalan samping lapangan Tegalontar Kec Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1664	1964883	MUKHAMA RIF'AN	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Kondisi jalan tidak memadai perlu rehabilitasi dengan pavingisasi	Gang Musholla baitul a'la Getongwungu Kel sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1665	1964898	MUKHAMA RIF'AN	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Kondisi jalan tidak memadai perlu rehabilitasi dengan pavingisasi	Gang Musholla Polsek sragi, Kec sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1666	1964908	MUKHAMA RIF'AN	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak dan tidak memadai, perlu rehabilitasi dengan pavingisasi 1.5 x 100 m	Jalan ringin Pitu Kel sragi, Kec sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1667	1964925	MUKHAMA RIF'AN	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Kondisi jalan tidak memadai perlu perbaikan dengan pengaspalan 2.5 x 75 M	Jalan Lingkungan dukuh Pesantren Kel sragi, Kec sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1668	1964946	MUKHAMA RIF'AN	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rumah tidak layak, tidak memenuhi standar kesehatan , kenyamanan dan keamanan	kuh gembyang, Kel sragi, Kec sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
1669	1964947	Umi Farida	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Sebagian wilayah di Desa Pododadi belum terhubung dengan jaringan jalan lingkungan yang layak sehingga menyulitkan akses layanan dasar masyarakat.	Cokrah RT 003 RW 003 Desa Pododadi Kecamatan Talun, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1670	1964957	MUKHAMA RIF'AN	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rumah tidak layak, tidak memenuhi standar kesehatan , kenyamanan dan keamanan	Desa Tegalontar Kec Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
1671	1964965	MUKHAMA RIF'AN	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	kondisi jalan rusak , tidak memadai perlu perbaikan dengan pengaspalan	Desa Kedungjaran Kec sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1672	1964971	MUKHAMA RIF'AN	Bantuan sarana prasarana fasilitas kesehatan	Rumah warga tidak memiliki fasilitas Sanitasi yang baik perlu bantuan untuk Pembuatan WC 3 rumah	Lingkunag Gembyang, Kel Sragi, Kec sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1673	1964976	MUKHAMA RIF'AN	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan tidak memadai perlu rehabilitasi dengan pavingisasi agar nyaman dilalui warga 3 x 50 M	Desa Mrican Kec sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1674	1964985	MUKHAMA RIF'AN	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Kondisi jalan gelap tidak nyaman bagi warga perlu penyediaan LPJU 5 titik	Kel sragi, kec sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1675	1964993	MUKHAMA RIF'AN	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Perlu bantuan modal pelaku UMKM untuk meningkatkan usahanya agar lebih maju sebanyak 10 orang	Kel sragi, kec sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM
1676	1965032	Umi Farida	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Belum optimalnya pengaspalan jalan di Desa Wringin Agung menyebabkan kualitas akses transportasi masyarakat belum memenuhi standar kelayakan jalan lingkungan.	Desa Wringin Agung Kecamatan Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1677	1965052	Umi Farida	Bantuan bibit ternak	Keterbatasan modal usaha dan jumlah ternak produktif pada Kelompok Berkah Ternak Makmur menghambat peningkatan kapasitas produksi dan pendapatan anggota kelompok.	Desa Pangkah Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
1678	1965091	Umi Farida	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Keterbatasan penerangan jalan di dukuh Doro ke arah desa Wringin Agung menghambat mobilitas masyarakat serta menimbulkan kerawanan keselamatan dan keamanan lingkungan.	Dukuh Doro menuju Desa Wringin Agung Kecamatan Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1679	1965105	Umi Farida	Bantuan bibit ternak	Kelompok Berkah Layang Makmur memerlukan dukungan sarana produksi berupa ternak untuk meningkatkan keberlanjutan usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.	Desa Pangkah Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1680	1965839	Masbukhin, S.Ag	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Kerentanan terhadap Banjir Besar di aliran sungai, sehingga dibutuhkan pembangunan Bronjong sungai	Desa Bojong Lor kecamatan Bojong , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1681	1965845	Masbukhin, S.Ag	Fasilitasi Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Dengan berkembangnya usaha, penerima bantuan bisa menciptakan peluang kerja, baik untuk anggota keluarga maupun masyarakat sekitar, Sehingga dibutuhkan UEP	UEP warga Desa Babalan Kidul Kecamatan Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
1682	1965848	Masbukhin, S.Ag	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Keadaan Rumah sudah tidak layak untuk digunakan seperti Dinding bambu/kayu yang sudah lapuk, dinding tanah/anyaman bambu yang rusak, dinding permanen yang retak/hampir roboh, Sehingga dibutuhkan Perbaikan	RTLH warga Desa Wiroditan Kecamatan Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
1683	1965853	Masbukhin, S.Ag	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	TPQ masih memiliki keterbatasan ruang belajar, perlengkapan, dan fasilitas. Bantuan pembangunan membantu menyediakan tempat yang aman, nyaman, dan memadai.	TPQ/Madin Al - Hidayah Desa Sembung Jambu Kecamatan Bojong , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1684	1965856	Masbukhin, S.Ag	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	TPQ masih memiliki keterbatasan ruang belajar, perlengkapan, dan fasilitas. Bantuan pembangunan membantu menyediakan tempat yang aman, nyaman, dan memadai.	TPQ Al - Misbah Desa Kemasan Kecamatan Bojong , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1685	1965858	Ahmad Ridhowi	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Kondisi struktur tanah di Desa Karangnyar Kec. Tirto rawan erosi dan longsor karena belum terdapat konstruksi penahan tanah (senderan) yang memadai sehingga berpotensi mengganggu keselamatan dan infrastruktur sekitar.	Desa Karangnyar Kecamatan Tirto , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1686	1965859	Ahmad Ridhowi	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Kondisi struktur tanah di Desa Dadirejo Kecamatan Tirto rawan erosi dan longsor karena belum terdapat konstruksi penahan tanah (senderan) yang memadai sehingga berpotensi mengganggu keselamatan dan infrastruktur sekitar.	Desa Dadirejo Kecamatan Tirto , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1687	1965864	Ahmad Ridhowi	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Akses jalan di Kelurahan Bener Kecamatan Wiradesa belum memadai sehingga menghambat mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar.	Kelurahan Bener Kecamatan Wiradesa , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1688	1965865	Masbukhin, S.Ag	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SMP)	Lonjakan Jumlah Siswa Kelebihan Kapasitas sehingga dibutuhkan Ruang Kelas Baru	SMP 02 Wiradesa Desa Petukangan Kecamatan Wiradesa , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1689	1965867	Ahmad Ridhowi	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Akses jalan di Kelurahan Bebel Kecamatan Wiradesa belum memadai sehingga menghambat mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar.	Kelurahan Bebel Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1690	1965869	Masbukhin, S.Ag	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Jl. KH. Agung Desa Sumur Jomlang Bpgo Kecamatan Bojong , Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1691	1965870	Ahmad Ridhowi	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Belum tersedianya saluran drainase yang memadai menyebabkan genangan air saat hujan sehingga berpotensi merusak badan jalan dan mengganggu aktivitas masyarakat.	Desa Pesanggrahan Kec. Wonokerto , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
1692	1965871	Ahmad Ridhowi	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Belum tersedianya saluran drainase yang memadai menyebabkan genangan air saat hujan sehingga berpotensi merusak badan jalan dan mengganggu aktivitas masyarakat.	Desa Salit Kec. Kajen , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1693	1965873	Masbukhin, S.Ag	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Pipa atau saluran yang dibangun terlalu kecil untuk menampung volume air, terutama saat curah hujan tinggi sehingga dibutuhkan Perbaikan/Normalisasi Saluran Air (Drainase)	Desa Randu muktiwaren Kecamatan Bojong , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1694	1965874	Ahmad Ridhowi	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Belum tersedianya saluran drainase yang memadai menyebabkan genangan air saat hujan sehingga berpotensi merusak badan jalan dan mengganggu aktivitas masyarakat.	Desa Domyang Kec. Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1695	1965876	Ahmad Ridhowi	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Kondisi struktur tanah pada lokasi tersebut rawan erosi dan longsor karena belum terdapat konstruksi penahan tanah (senderan) yang memadai sehingga berpotensi mengganggu keselamatan dan infrastruktur sekitar.	Desa pangkah Kec. Karangdadap , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1696	1965878	Ahmad Ridhowi	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Kondisi struktur tanah pada lokasi tersebut rawan erosi dan longsor karena belum terdapat konstruksi penahan tanah (senderan) yang memadai sehingga berpotensi mengganggu keselamatan dan infrastruktur sekitar.	Desa Sengare Kec. Talun , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1697	1965882	Masbukhin, S.Ag	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Madin mengalami kerusakan seperti atap bocor, dinding retak, atau lantai rusak. Rehabilitasi diperlukan agar bangunan kembali aman dan layak digunakan untuk kegiatan belajar.	MADIN Desa Randu Multiwaren Kecamatan Bojong , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
1698	1965884	Ahmad Ridhowi	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Kondisi struktur tanah pada lokasi tersebut rawan erosi dan longsor karena belum terdapat konstruksi penahan tanah (senderan) yang memadai sehingga berpotensi mengganggu keselamatan dan infrastruktur sekitar.	Desa Wiradesa Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1699	1965885	Masbukhin, S.Ag	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Desa Kaljembe Kecamatan Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1700	1965889	Ahmad Ridhowi	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Belum tersedianya saluran drainase yang memadai menyebabkan genangan air saat hujan sehingga berpotensi merusak badan jalan dan mengganggu aktivitas masyarakat.	Desa Kauman Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
1701	1965891	Masbukhin, S.Ag	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (TK/PAUD)	TK masih memiliki keterbatasan ruang belajar, perlengkapan, dan fasilitas. Bantuan pembangunan membantu menyediakan tempat yang aman, nyaman, dan memadai.	TK/Paud Cahaya Suci Desa Bukur Kecamatan Bojong , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1702	1965895	Ahmad Ridhowi	Fasilitasi Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Pelaku UMKM di Desa Pangkah mengalami keterbatasan akses permodalan sehingga kapasitas produksi dan pengembangan usaha belum optimal.	Desa pangkah Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1703	1965900	Ahmad Ridhowi	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Kondisi sarana dan prasarana Masjid Muham di Desa Karangjati belum memadai untuk menunjang kegiatan ibadah dan pembinaan keagamaan masyarakat sehingga diperlukan hibah guna mendukung perbaikan dan peningkatan sarana prasarana.	Desa Karangjati Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1704	1965904	Ahmad Ridhowi	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SD)	Keterbatasan ruang kelas di SD Muhammadiyah Desa Wuled menyebabkan kepadatan siswa per kelas melebihi standar ideal sehingga diperlukan penambahan Ruang Kelas Baru (RKB).	Desa Wuled Kec. Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1705	1965922	Ahmad Ridhowi	Bantuan bibit ternak	Keterbatasan kepemilikan ternak pada Kelompok Ternak Makmur di Desa Sengare menyebabkan kapasitas produksi dan peningkatan pendapatan anggota belum optimal sehingga diperlukan bantuan ternak.	Desa Sengare Kec. Talun, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
1706	1965932	Masbukhin, S.Ag	Bantuan sarana prasarana fasilitas kesehatan	Mengantar warga yang sakit, ibu melahirkan, atau korban kecelakaan ke fasilitas kesehatan dengan cepat, Sehingga dibutuhkan Mobil siaga	Mobil Siaga Desa Babalan Kidul Kecamatan Bojong , Kab. Pekalongan	Dinas Kesehatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1707	1965941	Masbukhin, S.Ag	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SD)	Lonjakan Jumlah Siswa Kelebihan Kapasitas sehingga dibutuhkan Ruang Kelas Baru	SD 02 Krasak Desa Krasakageng Kecamatan Sragi , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1708	1966049	AHMAD MUZAKI	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Kondisi sarana dan prasarana Musholla Ass Samsudin di Ambokembang belum memadai untuk menunjang kegiatan ibadah keagamaan masyarakat.	Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1709	1966060	Rossi Ardiyanti	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Sarana dan Prasarana di TPQ Fathun Qorib yang belum memadai dalam proses belajar mengajar	Dk. Sokowangi, Desa Sabarwangi. Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
1710	1966067	Rossi Ardiyanti	Penyediaan sarana dan prasarana olahraga	Lapangan Nasional Keluarahan Kajen, belum memiliki Sanitasi/Toilet	Kelurahan Kajen, Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
1711	1966087	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SD)	Lonjakan Jumlah Siswa Kelebihan Kapasitas sehingga dibutuhkan Ruang Kelas Baru	Madrasah Ibtidiyah Islamiyah Coprayan Desa Coprayan Kecamatan Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1712	1966149	Rossi Ardiyanti	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Tebing Sungai Rowo Sering Longsor, sehingga Tebing perlu di Bronjong	Desa Kebonagung. Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1713	1966153	Rossi Ardiyanti	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (SD)	Lingkungan SD Sangkanjoyo, belum di Pagar	Desa Sangkanjoyo. Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1714	1966160	Rossi Ardiyanti	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan poros Desa Sangkanjoyo, perlu dilakukan Pengaspalan agar transportasi lancar	Desa Sangkanjoyo. Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1715	1966172	Rossi Ardiyanti	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Tebing saluran pada jalan usaha tani perlu di talud agar jalan tidak rusak	Dk.Gumiwang. Desa Gejlig. Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1716	1966203	Rossi Ardiyanti	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan jalan	Desa Sangkanjojoyo. Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1717	1966205	Rossi Ardiyanti	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan jalan	dk. Silawan. Desa Kutorojo. Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1718	1966211	Rossi Ardiyanti	Rehabilitasi perpustakaan (SD)	Penataan perpustakaan di SDN 01 Pringsurat	Desa Pringsurat. Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
1719	1966221	Rossi Ardiyanti	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (TK/PAUD)	PAUD Desa Kebonagung, belum memiliki sarana tempat bermain anak-anak	Desa Kebonagung. Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
1720	1966224	Rossi Ardiyanti	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Tidak lancarnya angkutan hasil pertanian	Desa Bedagung. Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
1721	1966232	Rossi Ardiyanti	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Tidak lancarnya Drainase di lingkungan pemukiman	Dk. Semboja Barat. Desa Kaliboja. Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
1722	1966239	Rossi Ardiyanti	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Tidak lancarnya distibusi hasil pertanian	Desa Domiyang. Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
1723	1966244	Rossi Ardiyanti	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan jalan	Dk. Langkop. Desa Domiyang. Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1724	1966248	Rossi Ardiyanti	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (SD)	Kekurangan Meja dan Kursi untuk sarana belajar di MI Salafiyah	Dk. Sumingkir. Desa Lumeneng. Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Mebel Sekolah
1725	1966455	EKO PAMUJI	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	membutuhkan hibah bantuan untuk sarpras, karena sudah tidak layak	TPQ Al Quds Desa Pantianom Kec. Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
1726	1966467	Sumar Rosul	Bantuan bibit ternak	Bantuan Bibit Ternak untuk kelompok	Dukuh Ketanon Rt 01/Rw01 Desa Krandon, Kec. Kesesi Kab. Pekalongan, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
1727	1966488	Muhammad Sabiq Ashraff	Pembangunan/Rehabilitasi Pasar	Banyak pedagang yang masih berjualan di pinggir jalan dan mengganggu ketertiban di jalan	Pasar Doro, Kec Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
1728	1966498	Muhammad Sabiq Ashraff	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	kurangnya air untuk taman hijau	Desa Doro, Kec. doro, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
1729	1966508	Muhammad Sabiq Ashraff	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	banyak jalan rusak perlunya perbaikan untuk memudahkan mobilitas masyarakat	Desa Doro Kec. Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1730	1966524	Muhammad Sabiq Ashraff	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	irigasi talangnya terputus, aliran kesawah terputus	Desa Dororejo, Kec. Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
1731	1966530	Muhammad Sabiq Ashraff	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	irigasi talangnya terputus, aliran kesawah terputus	Desa Wringginagung, Kec. Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
1732	1966543	Muhammad Sabiq Ashraff	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	dampak banjir, aliran drainase/irigasi tertutup	Lemahabang, Kec. Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
1733	1966556	Muhammad Sabiq Ashraff	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	jalan rusak, perlunya perbaikan jalan untuk memudahkan mobilitas masyarakat	Desa Lemahabang, Kec. Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1734	1966568	Muhammad Sabiq Ashraff	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Akses menuju lahan tani kurang memadai agar memperlancar kegiatan tani	Desa Harjosari Kec. Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
1735	1966574	Muhammad Sabiq Ashraff	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Kurangnya penerangan jalan	Desa Randusari, Kec. doro, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1736	1966626	Muhammad Sabiq Ashraff	Penyediaan Marka Jalan	Tikungan yang tajam rawan kecelakaan, butuh cermin Cembung	Desa Bligorejo Kec. Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1737	1966641	Muhammad Sabiq Ashraff	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Kurangnya penerangan jalan	Desa Bligorejo, Kec. Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1738	1966654	Sumar Rosul	Bantuan bibit ternak	Bantuan Kelompok Ternak Kambing Kelompok Maju Jaya Makmur	Musa Adam Desa Wonopringgo Kec.Wonopringgo , Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
1739	1966660	Muhammad Sabiq Ashraff	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	tebing makam rawan longsor tergerus arus sungai	Desa Bligorejo, Kec. Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1740	1966670	Sumar Rosul	Bantuan bibit ternak	Bantuan Bibit ternak Tani Mulya	Sukaryadi Songgowedi Petungkriyono , Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
1741	1966694	Sumar Rosul	Bantuan bibit ternak	Kelompok ternak Mbangun Tani	Riyadi Dukuh Krandon, Desa Wonorejo Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
1742	1966710	Sumar Rosul	Bantuan bibit ternak	bantuan Kelompok Tani Krikit Sijambe Wonokerto	Kenedi Krikit Sijambe Wonokerto , Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
1743	1966725	Sumar Rosul	Bantuan bibit ternak	Bantuan Kelompok Tani Hasil Ayam	sarjono Ujung Negoro kesesi , Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
1744	1966803	MUKHAMA RIF'AN	Pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan	Diperlukan MOBIL SIAGA untuk pelayanan sosial , kesehatan da penanganan darurat sebagai solusi transportasi cepat bagi warga yang memerlukan penanganan medis namun tidak memiliki kendaraan	Kel Sragi, Kec Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Kesehatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1745	1966965	Muhammad Sabiq Ashraff	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Jalan tembus makam kalau hujan banjir	Sokosari, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
1746	1966975	Muhammad Sabiq Ashraff	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	kurangnya peneragan jalan, jalan gelap	Sokosari, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1747	1966988	Muhammad Sabiq Ashraff	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak sudah tidak ada aspal	dukuh Padurekso, Legok Kalong, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1748	1967121	Muhammad Sabiq Ashraff	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Jalan usaha Tani belum ada talud	Dk. Padurekso, legok kalong, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
1749	1967131	Muhammad Sabiq Ashraff	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak	Jalan poros penghubung sidomukti, sidosari, dan banjarejo, kec. karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1750	1967172	Muhammad Sabiq Ashraff	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan rusak perlu perbaikan	Jalan Desa Blimbing-Bandung, Pedawang, Karangayar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1751	1967179	Muhammad Sabiq Ashraff	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	perlu adanya penambahan bronjong	penyambungan bronjong sebelah SDN Kutosari, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1752	1967315	Rossi Ardiyanti	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Bantuan hibah untuk keberlangsungan belajar mengajar di TPQ Banj Tafsir Al Ustmani	Desa Krandegan. Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1753	1967348	Rossi Ardiyanti	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Belum adanya saluran air/sanitasi di lingkungan Dukuh Sabrang	Dukuh Sabrang. Desa Domiyang. Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1754	1967387	Rossi Ardiyanti	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	terganggunya transportasi jalan, karena kualitas jalan yang kurang mendukung (Pengaspalan Jalan Poros Desa Wangkelang-Desa Lambur)	Desa Wangkelang. Kandangserang, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1755	1967424	Rossi Ardiyanti	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Tebing di Dukuh Karangwringin berpotensi terjadinya longsor	Dk. Karangwringin. Desa Trajumas. Kandangserng, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1756	1967440	Rossi Ardiyanti	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum ada jalan usaha tani	Dukuh Miramba. Desa Loragung. Kandangserang, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
1757	1967459	Rossi Ardiyanti	PEMBANGUNAN JEMBATAN	Belum ada jenbatan yang baik	Dukuh Pedayeman. Desa Loragung. Kandangserang, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jembatan
1758	1967504	Rossi Ardiyanti	Penyediaan sarana dan prasarana olahraga	Lapangan sepakbola Desa Gembong sering longsor, sehingga perlu di turap	Desa Gembong. Kandangserang, Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
1759	1967539	Rossi Ardiyanti	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Untuk kelancaran belajar mengajar di TPQ Dukuh Kandangaur membutuhkan rehab	Desa Garungwiyara. Kandangserang, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
1760	1967565	Rossi Ardiyanti	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Bantuan hibah kepada Musholla Desa Bubak. Sehingga pelaksanaan hibah lebih nyaman	Desa Kandangserang. Kandangserang, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1761	1967589	Rossi Ardiyanti	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum ada jalan usaha tani	Dukuh Gutoko. Desa Kebongagung. Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
1762	1967841	JUHARNO, SH	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Terjadinya pengikisan tanah pada bantaran sungai sehingga dibutuhkan pembuatan senderan sungai	Sungai Mrican Desa Wonokerto Wetan , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1763	1967975	JUHARNO, SH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Kondisi jalan lingkungan yang rusak menghambat mobilitas warga dan meningkatkan risiko kecelakaan, sehingga diperlukan betonisasi untuk meningkatkan kualitas dan keamanan jalan	Jalan Soekarno - Hatta Desa Wonokerto Wetan, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1764	1968020	Muhammad Sabiq Ashraff	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	kurangnya penerangan jalan	Dk. Widari, Limbangan, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1765	1968035	Muhammad Sabiq Ashraff	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	jalan rusak, berlubang	Dk. Widari, Limbangan, Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1766	1968052	Muhammad Sabiq Ashraff	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	jalan rusak	jalan poros limbangan, karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1767	1968067	Muhammad Sabiq Ashraff	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	jalan rusak	desa kulu, karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1768	1968079	Muhammad Sabiq Ashraff	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	kurangnya penerangan jalan, jalan gelap	Lolong, Karangnyar, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1769	1968254	JUHARNO, SH	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SMP)	Terbatasnya ruang kelas yang tidak sebanding dengan jumlah siswa mengakibatkan proses belajar mengajar kurang optimal, sehingga dibutuhkan pembangunan ruang kelas baru	SMP N 2 Wonokerto Desa Rowoyoso, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1770	1968312	Dodiek Prasetyo	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Masih dibutuhkan untuk penataan halaman mushola Al-AMIN	Mushola Al-AMIN Dukuh Kwaringan, Desa Sidomulyo, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1771	1968317	Rossi Ardiyanti	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan jalan	Dukuh Sibedug. Desa Kebonagung. Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1772	1968342	Rossi Ardiyanti	Penyediaan sarana dan prasarana olahraga	Belum adanya tribun di lapangan sepak bola Desa Kebonagung	Desa Kebonagung. Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
1773	1968371	Rossi Ardiyanti	Perbaikan sarana dan prasarana di area Perumahan (Rehab Jalan, drainase, RTH Perumahan)	Jalan di perumahan GKI Desa Gandarum, perlu pengaspalan agar transportasi lancar	Desa Gandarum. Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
1774	1968387	Rossi Ardiyanti	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerrangan jalan umum	Dukuh Sengon. Desa Pekirigan Alit. Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1775	1968418	Rossi Ardiyanti	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Bronjong di Dukuh Kumbangan	Dukuh Kumbangan. Desa Pekiringan Alit. Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1776	1968454	JUHARNO, SH	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Kondisi sarana dan prasarana masjid di wilayah tersebut belum memadai dan memerlukan perbaikan/peningkatan	Masjid BAHRURROMAH Desa Wonokerto Wetan, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1777	1968509	Taufiq Rizal	Bantuan bibit ternak	Bantuan hibah ternak kepada peternak yang tergabung dalam KELOMPOK TANI BUWONO UTOMO, untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat	Desa Gutomo. Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
1778	1971212	Sumar Rosul	Pendidikan politik dan wawasan kebangsaan untuk masyarakat	Pendidikan politik dan wawasan kebangsaan bagi masyarkat	Kab. Pekalongan, Kab. Pekalongan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
1779	1972693	Ahmad Ridhowi	Bantuan bibit ternak	Keterbatasan kepemilikan ternak pada Kelompok Ternak Berkah Makmur di Desa Domiyang Kecamatan Paninggaran menyebabkan kapasitas produksi dan peningkatan pendapatan anggota belum optimal sehingga diperlukan bantuan ternak.	Desa Domiyang Kecamatan Paninggaran , Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1780	1972847	Ahmad Ridhowi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan sumber daya perikanan	Keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan perikanan pada Kelompok Nelayan Desa Pangkah menyebabkan pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan belum optimal sehingga diperlukan dukungan fasilitas pendukung.	Desa pangkah Kecamatan Karangdadap , Kab. Pekalongan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1781	1972923	Ahmad Ridhowi	Pengadaan Sarana Budidaya Air Tawar	Keterbatasan sarana budidaya perikanan air tawar pada Kelompok Mina Pegunungan di Desa Domiyang menyebabkan produksi dan pengembangan usaha belum optimal sehingga diperlukan dukungan fasilitas budidaya.	Desa Domiyang Kecamatan Paninggaran , Kab. Pekalongan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1782	1973225	Ahmad Ridhowi	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Masih terdapat rumah warga di Desa Pangkah yang masuk kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan kondisi struktur bangunan tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan.	Desa pangkah Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
1783	1973237	Ahmad Ridhowi	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Masih terdapat rumah warga di Desa Sengare Kecamatan Talun yang masuk kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan kondisi struktur bangunan tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan.	Desa Sengare Kecamatan Talun, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
1784	1973254	Ahmad Ridhowi	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Masih terdapat rumah warga di Desa Wuled Kecamatan Tirto yang masuk kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan kondisi struktur bangunan tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan.	Desa Wuled Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
1785	1973266	Ahmad Ridhowi	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Masih terdapat rumah warga di Desa Karangjati Kecamatan Wiradesa yang masuk kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan kondisi struktur bangunan tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan.	Desa Karangjati Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
1786	1973316	Ahmad Ridhowi	Bantuan kepada lembaga/organisasi masyarakat	Sarana pendukung kegiatan organisasi Cabang Muhammadiyah Wuled masih terbatas sehingga pelayanan sosial dan pembinaan kemasyarakatan kepada masyarakat belum maksimal.	Desa Wuled Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
1787	1973354	Ahmad Ridhowi	Bantuan kepada lembaga/organisasi masyarakat	Sarana pendukung kegiatan organisasi Ranting Muhammadiyah Pangkah masih terbatas sehingga pelayanan sosial dan pembinaan kemasyarakatan kepada masyarakat belum maksimal.	Desa pangkah Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
1788	1973389	Ahmad Ridhowi	Bantuan kepada lembaga/organisasi masyarakat	Sarana pendukung kegiatan pembinaan kepemudaan dan sosial kemasyarakatan pada Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Pekalongan masih terbatas sehingga diperlukan dukungan bantuan guna meningkatkan efektivitas program organisasi.	Kabupaten Pekalongan, Kab. Pekalongan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
1789	1973407	Ahmad Ridhowi	Bantuan kepada lembaga/organisasi masyarakat	Sarana pendukung kegiatan pembinaan masyarakat yang dilaksanakan Cabang Muhammadiyah Kajen masih terbatas sehingga pelayanan sosial dan kemasyarakatan belum maksimal.	Kecamatan Kajen , Kab. Pekalongan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1790	1973431	Ahmad Ridhowi	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Potensi destinasi pariwisata di Desa Domiyang belum didukung sarana dan prasarana yang memadai sehingga kunjungan dan dampak ekonomi bagi masyarakat belum optimal.	Desa Domiyang Kecamatan Paninggaran , Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
1791	1973483	Ahmad Ridhowi	Hibah Karang Taruna Kabupaten Pekalongan	Keterbatasan sarana dan dukungan kegiatan pada Karang Taruna Desa Samborejo menyebabkan aktivitas kepemudaan dan sosial kemasyarakatan belum berjalan optimal sehingga diperlukan hibah untuk mendukung pengembangan kegiatan pemuda.	Desa Samborejo Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1792	1973539	Ahmad Ridhowi	Hibah Karang Taruna Kabupaten Pekalongan	Keterbatasan sarana dan dukungan kegiatan pada Karang Taruna GTA Kecamatan Tirto menyebabkan aktivitas kepemudaan dan sosial kemasyarakatan belum berjalan optimal sehingga diperlukan hibah untuk mendukung pengembangan kegiatan pemuda.	GTA Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1793	1973556	Ahmad Ridhowi	Hibah Karang Taruna Kabupaten Pekalongan	Keterbatasan sarana dan dukungan kegiatan pada Karang Taruna Desa pangkah Kecamatan Karangdadap menyebabkan aktivitas kepemudaan dan sosial kemasyarakatan belum berjalan optimal sehingga diperlukan hibah untuk mendukung pengembangan kegiatan pemuda.	Desa pangkah Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1794	1973616	Ahmad Ridhowi	Hibah Karang Taruna Kabupaten Pekalongan	Keterbatasan sarana dan dukungan kegiatan pada Karang Taruna Desa Kalilembu menyebabkan aktivitas kepemudaan dan sosial kemasyarakatan belum berjalan optimal sehingga diperlukan hibah untuk mendukung pengembangan kegiatan pemuda.	Desa Kalilembu Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1795	1973639	Ahmad Ridhowi	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (TK/PAUD)	Keterbatasan ruang kelas di PAUD Muhammadiyah Pangkah menyebabkan kepadatan siswa per kelas melebihi standar ideal sehingga diperlukan penambahan Ruang Kelas Baru (RKB).	Desa pangkah Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1796	1973791	Ahmad Ridhowi	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Kapasitas dan fasilitas pendidikan di SLB Muhammadiyah Pekajangan belum memadai untuk menunjang kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus sehingga diperlukan pembangunan guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan.	Kelurahan Pekajangan Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1797	1973872	Ahmad Ridhowi	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Pelaku usaha mikro dan usaha kecil di Desa Pangkah mengalami keterbatasan permodalan dan kapasitas manajerial sehingga pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan belum optimal sehingga diperlukan bantuan dan pelatihan usaha.	Desa pangkah Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM
1798	1973927	JUHARNO, SH	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Masih terdapat rumah warga dengan kondisi tidak layak huni	RTLH Desa Wonokerto Wetan Kecamatan Wonokerto, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1799	1973937	Ahmad Ridhowi	Bantuan Pupuk Pertanian	Sebagian kelompok tani di Kabupaten Pekalongan mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan pupuk sehingga berpotensi menurunkan hasil produksi dan pendapatan petani.	Kabupaten Pekalongan, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
1800	1973945	JUHARNO, SH	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Masih terdapat rumah warga dengan kondisi tidak layak huni	RTLH Desa Bebel Kecamatan Wonokerto, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
1801	1973959	Fatkhiana Dewi,SH	Bantuan prasarana persampahan (Sepeda Motor Tiga Roda)	Karena kapasitas terbatas atau proses angkut yang kurang rapat, sampah sering tercecer di jalan selama perjalanan menuju TPS, sehingga dibutuhkan Alat pengangkut sampah sepeda motor tiga	Desa Podo Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
1802	1973970	JUHARNO, SH	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Masih terdapat rumah warga dengan kondisi tidak layak huni	RTLH Desa Wonokerto Kulon Kecamatan Wonokerto, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
1803	1973976	Fatkhiana Dewi,SH	Bantuan prasarana persampahan (Sepeda Motor Tiga Roda)	Karena kapasitas terbatas atau proses angkut yang kurang rapat, sampah sering tercecer di jalan selama perjalanan menuju TPS, sehingga dibutuhkan Alat pengangkut sampah sepeda motor tiga	Desa Karangdadap kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
1804	1973978	Ahmad Ridhowi	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Keterbatasan sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan pada Kelompok Nelayan Tengiri Makmur menyebabkan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran belum optimal sehingga diperlukan peningkatan fasilitas pendukung.	Desa pangkah Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1805	1974032	Ahmad Ridhowi	Bantuan sarana pendukung pertanian (Alat-alat pertanian : Traktor dan alat pertanian lainnya)	Keterbatasan alat mekanisasi pertanian pada kelompok tani di Kecamatan Paninggaran menyebabkan proses pengolahan lahan belum efisien sehingga berdampak pada produktivitas dan biaya produksi yang relatif tinggi.	Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
1806	1974052	Ahmad Ridhowi	Bantuan sarana pendukung pertanian (Alat-alat pertanian : Traktor dan alat pertanian lainnya)	Keterbatasan alat mekanisasi pertanian pada kelompok tani di Kecamatan Karangdadap menyebabkan proses pengolahan lahan belum efisien sehingga berdampak pada produktivitas dan biaya produksi yang relatif tinggi.	Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
1807	1974056	JUHARNO, SH	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Masih terdapat rumah warga dengan kondisi tidak layak huni	RTLH Desa Karang Jompo Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
1808	1974078	Ahmad Ridhowi	Bantuan sarana pendukung pertanian (Alat-alat pertanian : Traktor dan alat pertanian lainnya)	Keterbatasan alat mekanisasi pertanian pada kelompok tani di Kecamatan Kajen menyebabkan proses pengolahan lahan belum efisien sehingga berdampak pada produktivitas dan biaya produksi yang relatif tinggi.	Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1809	1974120	Fatkhiana Dewi,SH	Bantuan prasarana persampahan (Sepeda Motor Tiga Roda)	Karena kapasitas terbatas atau proses angkut yang kurang rapat, sampah sering tercecer di jalan selama perjalanan menuju TPS, sehingga dibutuhkan Alat pengangkut sampah sepeda motor tiga	Desa Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
1810	1974201	Fatkhiana Dewi,SH	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Keadaan Rumah sudah tidak layak untuk digunakan seperti Dinding bambu/kayu yang sudah lapuk, dinding tanah/anyaman bambu yang rusak, dinding permanen yang retak/hampir roboh, Sehingga dibutuhkan Perbaikan	RTLH Desa Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni , Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
1811	1974212	JUHARNO, SH	Rehabilitasi Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (SD)	Kondisi lingkungan SD saat ini belum memiliki pagar keliling yang memadai serta halaman sekolah dalam kondisi rusak	SD N Pesanggrahan Kecamatan Wonokerto, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1812	1974276	JUHARNO, SH	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SMP)	Terbatasnya ruang kelas yang tidak sebanding dengan jumlah siswa mengakibatkan proses belajar mengajar kurang optimal, sehingga dibutuhkan pembangunan ruang kelas baru	SMP Muhamadiyah TAHIZHUL QUR'AN Wonokerto (Desa Sijambe), Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1813	1974308	Fatkhiana Dewi,SH	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Arus sungai yang deras—terutama saat musim hujan—dapat mengikis tebing dan menyebabkan longsor, Sehingga dibutuhkan Senderan Sungai	Desa karangdadap Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1814	1974323	JUHARNO, SH	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Kondisi sarana dan prasarana mushola di wilayah tersebut belum memadai dan memerlukan perbaikan/peningkatan	Mushola Istiqomah Desa Wonokerto Wetan, Kecamatan Wonokerto, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1815	1974372	JUHARNO, SH	REHABILITASI JEMBATAN	Jembatan penghubung saat ini dalam kondisi rusak dan kurang aman untuk dilalui masyarakat, sehingga di butuhkan rehabilitasi jembatan	Jembatan Penghubung Desa Wonokerto Kulon - Wonokerto Wetan, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jembatan
1816	1974402	JUHARNO, SH	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Kondisi sarana dan prasarana masjid di wilayah tersebut belum memadai dan memerlukan perbaikan/peningkatan	Masjid Jami' AL IHSAN Desa Kepatihan, Kecamatan Wiradesa (Jl. KH. HASYIM ASY'ARI gang 1 Rt 06/Rw 03), Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1817	1974432	Fatkhiana Dewi,SH	Bantuan prasarana persampahan (Sepeda Motor Tiga Roda)	Karena kapasitas terbatas atau proses angkut yang kurang rapat, sampah sering tercecer di jalan selama perjalanan menuju TPS, sehingga dibutuhkan Alat pengangkut sampah sepeda motor tiga	Pemuda dukuh kranji Desa Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
1818	1974444	Ahmad Ridhowi	Hibah Karang Taruna Kabupaten Pekalongan	Keterbatasan sarana dan dukungan kegiatan pada Karang Taruna Desa Sengare Kecamatan Talun menyebabkan aktivitas kepemudaan dan sosial kemasyarakatan belum berjalan optimal sehingga diperlukan hibah untuk mendukung pengembangan kegiatan pemuda.	Desa Sengare Kecamatan Talun, Kab. Pekalongan	Dinas Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1819	1974447	Fatkhiana Dewi,SH	Bantuan prasarana persampahan (Sepeda Motor Tiga Roda)	Karena kapasitas terbatas atau proses angkut yang kurang rapat, sampah sering tercecer di jalan selama perjalanan menuju TPS, sehingga dibutuhkan Alat pengangkut sampah sepeda motor tiga	Pemuda dk. Capgawen Desa Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1820	1974466	Fatkhiana Dewi,SH	Bantuan prasarana persampahan (Sepeda Motor Tiga Roda)	Karena kapasitas terbatas atau proses angkut yang kurang rapat, sampah sering tercecer di jalan selama perjalanan menuju TPS, sehingga dibutuhkan Alat pengangkut sampah sepeda motor tiga	Pemuda dk Gembong mawar Desa Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
1821	1974488	Fatkhiana Dewi,SH	Bantuan prasarana persampahan (Sepeda Motor Tiga Roda)	Karena kapasitas terbatas atau proses angkut yang kurang rapat, sampah sering tercecer di jalan selama perjalanan menuju TPS, sehingga dibutuhkan Alat pengangkut sampah sepeda motor tiga	Pemuda Gembong Mawar 4 Desa Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
1822	1974495	JUHARNO, SH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Badan jalan saat ini rawan tergenang dan mengalami pengikisan karena belum adanya turap penahan tanah serta posisi jalan yang lebih rendah dari area sekitarnya	Desa Rowoyoso, Kecamatan Wonokerto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1823	1974559	Budi Santosa	Bantuan sarana prasarana fasilitas kesehatan	Di wilayah dengan pasokan listrik tidak stabil, genset menjadi sumber listrik cadangan utama agar pelayanan kesehatan tidak terganggu, Sehingga dibutuhkan Genset	Desa Pegaden tengah Kecamatan Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Kesehatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1824	1974573	Budi Santosa	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Kelurahan Simbangkulon Kecamatan Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1825	1974582	JUHARNO, SH	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (SD)	Fasilitas sekolah saat ini kurang memadai dan banyak yang rusak, sehingga mengganggu kenyamanan dan proses belajar mengajar. Untuk itu, diperlukan pembangunan dan perbaikan fasilitas sekolah agar lingkungan belajar aman, nyaman, dan mendukung peningkatan mutu pendidikan.	SDN Pecakaran, Kecamatan Wonokerto, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1826	1974584	Budi Santosa	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Musholla dalam Keadaan yang sudah kurang layak untuk digunakan sehingga dibutuhkan Hibah Musholla	Desa Paweden Kecamatan Buaran, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1827	1974688	JUHARNO, SH	PEMBANGUNAN JARINGAN AIR MINUM PERPIPAAN (SPAM)	Akses air bersih di wilayah saat ini masih terbatas, sehingga warga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk itu diperlukan pembangunan sumur pompa guna menyediakan air bersih yang cukup, aman, dan mudah dijangkau masyarakat	Dukuh Blimbing Lor, Desa Blimbing Wuluh Kecamatan Siwalan, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
1828	1974719	Budi Santosa	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (TK/PAUD)	Lonjakan Jumlah Siswa Kelebihan Kapasitas sehingga dibutuhkan Ruang Kelas Baru	Taman Kanak- kanak Muslimat NU (TK.M) Desa Gondang Kecamatan Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1829	1974725	Budi Santosa	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SD)	Lonjakan Jumlah Siswa Kelebihan Kapasitas sehingga dibutuhkan Ruang Kelas Baru	Madrasah Ibtida'iyah (MI) Desa Gondang Kecamatan Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1830	1974740	Budi Santosa	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SD)	Lonjakan Jumlah Siswa Kelebihan Kapasitas sehingga dibutuhkan Ruang Kelas Baru	Sekolah Dasar Islam (SDI) Gondang Desa Gondang Kecamatan Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1831	1974749	JUHARNO, SH	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (SD)	Toilet di sekolah saat ini terbatas dan banyak yang rusak, sehingga mengganggu kenyamanan, kesehatan, dan kebersihan siswa. untuk itu, diperlukan pembangunan toilet baru agar lingkungan belajar lebih aman, bersih, dan nyaman.	SDN 01 SIJAMBE, Kecamatan Wonokerto, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1832	1974753	Budi Santosa	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (TK/PAUD)	Lonjakan Jumlah Siswa Kelebihan Kapasitas sehingga dibutuhkan Ruang Kelas Baru	Raudlotul Atfal Muslimat NU (RAMNU) Desa Jetaklengkong Kecamatan Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1833	1974763	Budi Santosa	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SMP)	Lonjakan Jumlah Siswa Kelebihan Kapasitas sehingga dibutuhkan Ruang Kelas Baru	Madrasah Tsanawiyah (MTs.) Gondang Desa Gondang Kecamatan Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1834	1974772	Budi Santosa	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SD)	Lonjakan Jumlah Siswa Kelebihan Kapasitas sehingga dibutuhkan Ruang Kelas Baru	Madrasah Ibtida'iyah Salafiyah (MIS) Wonorejo Desa Wonorejo Kecamatan Wonopringgo , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1835	1974777	Budi Santosa	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Lonjakan Jumlah Siswa Kelebihan Kapasitas sehingga dibutuhkan Ruang Kelas Baru	Pondok Pesantren Modern Gondang, Desa Gondang Kecamatan Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1836	1974787	Budi Santosa	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SMP)	Lonjakan Jumlah Siswa Kelebihan Kapasitas sehingga dibutuhkan Ruang Kelas Baru	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nusantara Desa Gondang Kecamatan Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1837	1974793	Budi Santosa	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Untuk mempermudah akses para petani dalam memperluas jalur distribusi hasil pertanian sehingga dibutuhkan Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Pegaden Tengah Kecamatan Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
1838	1974801	Budi Santosa	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Untuk mempermudah akses para petani dalam memperluas jalur distribusi hasil pertanian sehingga dibutuhkan Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Rowokembu Kecamatan WOnopringgo , Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
1839	1974802	JUHARNO, SH	REHABILITASI JEMBATAN	Kondisi jembatan saat ini mengalami kerusakan pada struktur dan lantai, sehingga membahayakan keselamatan pengguna, serta menghambat mobilitas warga dan kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk itu, diperlukan revitalisasi jembatan untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran akses.	Jembatan Gang Melati Rt 03/Rw 01 Desa Mejasem, Kecamatan Siwalan, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jembatan
1840	1974808	JUHARNO, SH	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Kondisi sarana dan prasarana masjid di wilayah tersebut belum memadai dan memerlukan perbaikan/peningkatan	Masjid Jami' Desa Mejasem Kecamatan Siwalan, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1841	1974817	Budi Santosa	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Desa Jetak Kidul Rt 02 Rw 01 Kecamatan Wonopringgo , Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1842	1974831	Budi Santosa	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Musholla dalam Keadaan yang sudah kurang layak untuk digunakan sehingga dibutuhkan Hibah Musholla	Musholla Istiqomah Desa Jetak KIdul Rt 05 Rw 01 Kecamatan Wonopringgo , Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1843	1974842	Budi Santosa	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Masjid dalam Keadaan yang sudah kurang layak untuk digunakan sehingga dibutuhkan Rehabilitasi Masjid	Masjid Jami Al Huda Desa Jetak KIdul Rt 05 Rw 01 Kecamatan Wonopringgo , Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1844	1974864	Budi Santosa	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (TK/PAUD)	Lonjakan Jumlah Siswa Kelebihan Kapasitas sehingga dibutuhkan Ruang Kelas Baru	TK RA Muslimat Nu Desa Jetak Kidul Rt 05 Rw 03 Kecamatan Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1845	1974875	JUHARNO, SH	Perbaikan sarana dan prasarana di area Perumahan (Rehab Jalan, drainase, RTH Perumahan)	Beberapa perumahan belum memiliki batas yang jelas, sehingga rawan penyalahgunaan lahan dan menurunkan keamanan lingkungan. Untuk itu, diperlukan pembangunan tembok batas untuk menjamin keamanan dan ketertiban lingkungan	Perumahan PEPABRI Desa Tanjung Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
1846	1974881	Budi Santosa	Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan	Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan, Sehingga dibutuhkan Alat Marching band pemuda pemudi An Naba	Desa Kwagean Rt 04 dan Rt 03 Kecamatan Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabpuaten/kota
1847	1974891	Budi Santosa	Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan	Belum adanya Bantuan Seragam Marching Band	Pemuda pemudi An Naba Desa Kwagean Rt 04 dan RW 03 Kecamatan Wonopringgo , Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabpuaten/kota
1848	1974899	Budi Santosa	Bantuan prasarana persampahan (Sepeda Motor Tiga Roda)	Penumpukan yang menimbulkan bau tidak sedap, penyakit, dan risiko pencemaran lingkungan (tanah, air, udara), Sehingga membutuhkan Sepeda motor tiga roda	Desa Kwagean Rt 04 Rw 03 Kecamatan Wonopringgo , Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
1849	1974927	JUHARNO, SH	Bantuan kepada lembaga/organisasi masyarakat	Kegiatan seni Hadroh di masyarakat saat ini terbatas karena kurangnya sarana dan perlengkapan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan bantuan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Hadroh agar budaya lokal tetap terjaga dan berkembang.	Jama'ah MUSLIMAT dan FATAYAT NU Ranting Wonokerto Wetan, Kab. Pekalongan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
1850	1974929	Budi Santosa	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Desa Kwagean Rt 04 Rw 05 Kecamatan Wonopringgo , Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1851	1974944	Budi Santosa	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (TK/PAUD)	Lonjakan Jumlah Siswa Kelebihan Kapasitas sehingga dibutuhkan Ruang Kelas Baru	RKB TK Desa Kertijayan Rt 18 Rw 06 Kecamatan Buaran , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1852	1974959	JUHARNO, SH	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (TK/PAUD)	Fasilitas sekolah saat ini kurang memadai dan banyak yang rusak, sehingga mengganggu kenyamanan dan proses belajar mengajar. Untuk itu, diperlukan pembangunan dan perbaikan fasilitas sekolah agar lingkungan belajar aman, nyaman, dan mendukung peningkatan mutu pendidikan	TK MUSLIMAT NU Ranting Wonokerto Wetan, Kecamatan Wonokerto, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
1853	1974966	Budi Santosa	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Dukuh Kedungrandu Desa Kwagean Kecamatan Wonopringgo , Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1854	1974971	Budi Santosa	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Dk. Kedungrandu Kidul Desa Kwagean Kecamatan Wonopringgo , Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1855	1974978	Budi Santosa	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Desa Paweden Kecamatan Buaran , Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1856	1974994	Budi Santosa	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Desa Kwagean Kecamatan Wonopringgo , Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1857	1975008	Budi Santosa	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	keadaan Rumah sudah tidak layak untuk digunakan seperti Dinding bambu/kayu yang sudah lapuk, dinding tanah/anyaman bambu yang rusak, dinding permanen yang retak/hampir roboh, Sehingga dibutuhkan Perbaikan	Desa Kwagean Kecamatan Wonopringgo , Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
1858	1975016	JUHARNO, SH	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Gedung TPQ saat ini sudah mengalami kerusakan, sehingga mengganggu kenyamanan dan keamanan kegiatan belajar mengaji anak-anak. Oleh karena itu, diperlukan rehabilitasi gedung TPQ agar lingkungan belajar menjadi aman, nyaman, dan kondusif.	TPQ Desa Terataibang, Kecamatan Wonokerto, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1859	1975048	Budi Santosa	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SD)	Lonjakan Jumlah Siswa Kelebihan Kapasitas sehingga dibutuhkan Ruang Kelas Baru/Rehab	MI WS Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1860	1975051	JUHARNO, SH	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Jalan usaha tani sudah rusak dan sulit dilalui, juga menghambat mobilitas petani serta distribusi hasil pertanian. Untuk itu, diperlukan revitalisasi untuk mempermudah akses dan meningkatkan produktivitas usaha tani	Jalan usaha tani tambak Desa Terataibang, Kecamatan Wonokerto., Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
1861	1975074	Budi Santosa	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (TK/PAUD)	kekurangan dalam pengadaan sarana dan prasarana di sekolah Pos paud Tunas Bangsa	Desa Kwagean Kecamatan Wonopringgo , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
1862	1975084	Budi Santosa	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Kelurahan Simbang Kulon Kecamatan Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1863	1975105	JUHARNO, SH	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah (TK/PAUD)	Gedung Todhotul Atfal (RA) saat ini mengalami kerusakan sehingga mengganggu kenyamanan dan keamanan belajar anak-anak. Untuk itu, diperlukan rehabilitasi agar lingkungan belajar aman, nyaman, dan kondusif.	Todhotul Atfal (RA) Rt 02/Rw 01 Desa Terataibang, Kecamatan Wonokerto, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
1864	1975165	Budi Santosa	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Tebing yang runtuh dapat mempersempit aliran sungai dan menyebabkan luapan air. Senderan membantu menjaga stabilitas alur sungai. Sehingga dibutuhkan Senderan Sungai	Dk. Kedawungrejo Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1865	1975179	Budi Santosa	Pemberdayaan dan peningkatan kualitas perkoperasian	Pembinaan membantu pengurus koperasi memahami manajemen usaha, administrasi, dan tata kelola yang baik agar koperasi berjalan profesional dan transparan.	Dk. Kedawungrejo Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo , Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
1866	1975221	JUHARNO, SH	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Saluran air dan sanitasi di wilayah saat ini kurang memadai, hal tersebut dapat mengganggu aktivitas warga dan berpotensi menimbulkan penyakit, oleh karena itu, diperlukan pembangunan senderan atau selokan untuk memperlancar aliran air, meningkatkan kebersihan, dan menjaga kesehatan masyarakat.	Desa Terataibang Rt 08/03, Kecamatan Wonokerto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
1867	1975260	JUHARNO, SH	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Saluran air dan drainase di wilayah saat ini banyak yang tersumbat atau rusak, sehingga sering terjadi genangan air dan banjir saat hujan. Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi saluran air dan drainase untuk memperlancar aliran air, mencegah banjir, dan menjaga kebersihan lingkungan.	JL. Ade Irma Suryani Desa Dadirejo Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1868	1975296	JUHARNO, SH	Bantuan sarana prasarana fasilitas kesehatan	Wilayah tersebut belum memiliki gedung Posyandu, sehingga pelayanan kesehatan ibu dan anak kurang optimal dan kurang nyaman. Untuk itu, diperlukan pembangunan gedung Posyandu untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan efektif bagi masyarakat	Desa Sipacar, Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Kesehatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1869	1975313	JUHARNO, SH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Kondisi jalan yang sudah mengalami kerusakan, sehingga dibutuhkan revitalisasi jalan	Jalan sebelah timur SD Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1870	1975330	H. Edy Haryanto, SE	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Volume kendaraan yang meningkat menyebabkan kepadatan lalu lintas. Pelebaran jalan membantu memperlancar arus kendaraan.	Kelurahan Kajen Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1871	1975351	H. Edy Haryanto, SE	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Ponpes membutuhkan perbaikan ruang belajar, asrama, sanitasi, dan fasilitas pendukung agar proses belajar mengajar berjalan nyaman dan aman	Ponpes Fathul Huda Desa Sinangoprendeng Kecamatan Kajen., Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1872	1975361	JUHARNO, SH	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Drainase di wilayah saat ini banyak yang tersumbat atau rusak, sehingga sering terjadi genangan air dan banjir saat hujan. Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi drainase untuk memperlancar aliran air, mencegah banjir, dan menjaga kebersihan lingkungan.	Drainase depan Masjid Jami' Desa Sidorejo, Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
1873	1975452	JUHARNO, SH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Beberapa ruas jalan saat ini posisinya lebih rendah dari drainase atau permukaan sekitar, sehingga sering tergenang air saat hujan dan rawan rusak. Untuk itu, diperlukan peninggian jalan untuk memperlancar akses, mencegah genangan, dan meningkatkan keamanan serta kenyamanan pengguna jalan	Jalan disebelah Rel Kereta Api Desa Sipacar, Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1874	1975465	H. Edy Haryanto, SE	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Pedagang keliling umumnya memiliki keterbatasan modal. Bantuan permodalan membantu menambah stok barang dagangan sehingga omzet dan keuntungan dapat meningkat.	Paguyuban Pedagang keliling/PLIS Desa Kebonagung Kecamatan Kajen , Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1875	1975478	H. Edy Haryanto, SE	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Tebing yang curam dan labil berisiko longsor, terutama saat musim hujan. Talud berfungsi menahan tanah agar tetap stabil. Sehingga dibuutuhkan Penahan tebing atau Talud	Desa pekiringan Ageng Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1876	1975488	H. Edy Haryanto, SE	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Lonjakan Jumlah Siswa Kelebihan Kapasitas sehingga dibutuhkan Ruang Kelas Baru	TPQ Al Ikhlas Desa Sinangoprendeng Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1877	1975497	H. Edy Haryanto, SE	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Membangun atau memperbaiki sarana dan prasarana seperti ruang kelas, asrama, dan fasilitas ibadah agar proses belajar mengajar lebih nyaman dan aman, Sehingga dibutuhkan HIbah Ponpes	Pondok Pesantren Bustanul Mansuriyah Desa Rowolaku Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1878	1975499	H. Edy Haryanto, SE	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Membangun atau memperbaiki sarana dan prasarana seperti ruang kelas, asrama, dan fasilitas ibadah agar proses belajar mengajar lebih nyaman dan aman, Sehingga dibutuhkan HIbah Ponpes	Pondok Pesantren Asy - Syifaa' Desa Nyamok Kecamatan kajen, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1879	1975505	H. Edy Haryanto, SE	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Membangun atau memperbaiki sarana dan prasarana seperti ruang kelas, asrama, dan fasilitas ibadah agar proses belajar mengajar lebih nyaman dan aman, Sehingga dibutuhkan HIbah Ponpes	Pondok Pesantren Fathul Huda Desa Sinanghoh prendeng Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1880	1975549	Masbukhin, S.Ag	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Desa Babalan Kidul Kecamatan Bojong , Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1881	1975566	H. AFANDI	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Volume kendaraan yang meningkat menyebabkan kepadatan lalu lintas. Pelebaran jalan membantu memperlancar arus kendaraan. Sehingga dibuuthkan Pelebaran Jalan	Desa Karangjati Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1882	1975569	H. AFANDI	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Volume kendaraan yang meningkat menyebabkan kepadatan lalu lintas. Pelebaran jalan membantu memperlancar arus kendaraan. Sehingga dibuuthkan Pelebaran Jalan	Desa Petukangan Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1883	1975576	H. AFANDI	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Desa Silirejo Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1884	1975583	H. AFANDI	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Untuk mempermudah akses para petani dalam memperluas jalur distribusi hasil pertanian sehingga dibutuhkan Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Silirejo Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
1885	1975606	H. AFANDI	Bantuan bibit ternak	Bantuan ternak sering diberikan kepada kelompok tani atau kelompok usaha masyarakat untuk mendorong kerjasama, tanggung jawab, dan manajemen usaha bersama. Sehingga dibutuhkan Bantuan ternak Kambing	Ternak Kambing Joyo Sembodo Desa Karanganyar Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
1886	1975611	H. AFANDI	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Musholla dalam Keadaan yang sudah kurang layak untuk digunakan sehingga dibutuhkan Hibah Musholla	Musholla Al Muttaqin Desa Dadirejo Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1887	1975646	H. AFANDI	Bantuan kepada lembaga/organisasi masyarakat	Komputer membantu pengelolaan data kependudukan, keuangan, surat-menyurat, dan laporan kegiatan desa secara cepat dan akurat. Sehingga diobuuthkan Pengadaan Komputer	Desa Tanjung Kecamatan Tirto , Kab. Pekalongan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-
1888	1975662	H. AFANDI	Bantuan bibit ternak	Bantuan ternak sering diberikan kepada kelompok tani atau kelompok usaha masyarakat untuk mendorong kerjasama, tanggung jawab, dan manajemen usaha bersama. Sehingga dibutuhkan Bantuan ternak Kambing	Desa Tengeng Wetan Kecamatan Siwalan , Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1889	1975674	H. AFANDI	Bantuan bibit ternak	Bantuan ternak sering diberikan kepada kelompok tani atau kelompok usaha masyarakat untuk mendorong kerjasama, tanggung jawab, dan manajemen usaha bersama. Sehingga dibutuhkan Bantuan ternak Kambing	Desa Rembun Kecamatan Siwalan , Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
1890	1975686	H. AFANDI	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SD)	Lonjakan Jumlah Siswa Kelebihan Kapasitas sehingga dibutuhkan Ruang Kelas Baru	MI Curug Desa Curug Kecamatan Tirto , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1891	1975691	H. AFANDI	Bantuan kepada lembaga/organisasi masyarakat	Belum terselesainya Pembangunan Gedung MWC NU Kec. Tirto	MWC NU Kec. Tirto Desa Pacar Kecamatan Tirto , Kab. Pekalongan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
1892	1975695	H. AFANDI	Pengadaan Peralatan Belajar Mengajar (Laptop) (SMP)	Belum terepenuhinya Sarana dan Prasarana di MTS NU Tirto	Desa Pacar Kecamatan Tirto , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
1893	1976638	JUHARNO, SH	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah (SD)	Kondisi ruang kelas yang sudah mengalami kerusakan, sehingga dibutuhkan rehabilitasi ruang kelas	SDN 01 Karangjompo Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
1894	1976702	JUHARNO, SH	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Masih terdapat ruas jalan yang belum memiliki penerangan jalan umum	Desa Wonokerto wetan, Kecamatan Wonokerto, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1895	1976728	JUHARNO, SH	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Masih terdapat ruas jalan yang belum memiliki penerangan jalan umum	Desa Tengeng Kulon Kecamatan Siwalan, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1896	1976789	JUHARNO, SH	REHABILITASI TEBING / BRONJONG SUNGAI	Terjadinya pendangkalan, kerusakan, dan penurunan fungsi senderan tanggul akibat erosi dan sedimentasi sehingga mengurangi daya tampung air serta meningkatkan risiko banjir dan longsor, sehingga diperlukan normalisasi untuk mengembalikan fungsi dan memperkuat struktur tanggul	Gang Balaidesa Desa Tanjung Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1897	1976884	JUHARNO, SH	REHABILITASI TEBING / BRONJONG SUNGAI	Ketinggian tanggul sungai belum memadai untuk menahan peningkatan debit air saat musim hujan sehingga berpotensi menimbulkan luapan dan genangan. Oleh karena itu, diperlukan peninggian tanggul guna meningkatkan pengendalian banjir dan mengurangi risiko kerugian masyarakat.	Desa Bondansari Rt 5/Rw 2 Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1898	1976928	JUHARNO, SH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Kondisi jalan yang sudah mengalami kerusakan, sehingga diperlukan rehabilitasi jalan	Pekuncen Selatan, Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1899	1976993	JUHARNO, SH	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Kerusakan dan penyumbatan drainase menyebabkan aliran air tidak lancar dan menimbulkan genangan saat hujan. Oleh karena itu, diperlukan rehabilitasi untuk mengembalikan fungsi saluran agar mampu mengalirkan air secara optimal dan mengurangi risiko banjir	Desa Api api Rt 08/04, Kecamatan Wonokerto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
1900	1977192	JUHARNO, SH	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Kerusakan jalan dan drainase yang tidak berfungsi optimal menyebabkan genangan serta mengganggu mobilitas warga. Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi untuk meningkatkan kualitas akses dan kelancaran aliran air	Desa Pesangrahan, Kecamatan Wonokerto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
1901	1977230	JUHARNO, SH	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Masih terdapat ruas jalan yang belum memiliki penerangan jalan umum	Desa Api api, Kecamatan Wonokerto, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1902	1977394	JUHARNO, SH	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Keterbatasan modal anggota Paguyuban Pedagang Keliling Sekolah menghambat pengembangan usaha dan menurunkan pendapatan. Oleh karena itu, diperlukan bantuan modal untuk mendukung keberlanjutan dan peningkatan usaha pedagang	Paguyuban Pedagang Keliling Sekolah Di Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1903	1977412	Dinda Aniva Nutkhi, S.H	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	perlunya pembangunan talud sungai agar tebing sungai tidak longsor	Sungai Wuled-Pucung, Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1904	1977442	Rizal Efendi	PEMBANGUNAN / REHABILITASI JARINGAN IRIGASI	perlunya pembenahan irigasi demi kelancaraan pembuangan air disaat hujan agar tidak terjadi banjir atau genangan air yang berlebihan	Desa Langkap Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
1905	1977458	Rizal Efendi	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	jalan rusak, sering banjir perlu peningkatan jalan/betonisasi	Ruas Jalan Desa Pakisputih-Tosaran, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1906	1977466	Rizal Efendi	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	tidak adanya JUT, perlunya jalan menuju lahan pertanian agar memudahkan mobilitas petani	Desa Tosaran Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
1907	1977521	Rizal Efendi	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	jalan rusak perlu perbaikan	Jalan Wonopringgo-Sampih, Kec. wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1908	1977601	Rizal Efendi	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	jalan rusak perlu perbaikan	Jalan Kalimojosari-Logandeng, kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1909	1977611	Rizal Efendi	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	jalan rusak perlu rehabilitasi jalan	Jalan Langkap-Logandeng, Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1910	1977623	Rizal Efendi	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan Rusak perlu perbaikan	jalan Bligo-Watusalam, Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1911	1977638	Rizal Efendi	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	jalan rusak perlu perbaikan jalan	Jalan Rowokembu-Pegaden tengah, Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1912	1977651	Rizal Efendi	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	jalan rusak perlu perbaikan jalan	jalan kedungkebo-logandeng, kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1913	1977668	Rizal Efendi	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (SMP)	halaman sekolah kurang rapih, perlunya penataan dan rehabilitasi sekolah	SMP N 1 Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1914	1977680	Rizal Efendi	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	tidak adanya JUT	Desa Langkap-Tosaran, Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
1915	1977703	Rizal Efendi	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (SD)	halaman sd kurang rapih, perlu adanya penataan dan rehabilitasi sekolah	SD N 1 Sastrodirjan, Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1916	1977714	Rizal Efendi	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	tidak adanya JUT	dk. wonolobo, sastrodirjan, wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
1917	1977865	Laila Nur Azizah	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	jalan kurang lebar perlu adanya pelebaran jalan poros	Desa Langensari Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1918	1977883	Laila Nur Azizah	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	perlunya Hibah Uang untuk pembangunan ruang kelas, karena ruang kelas masih kurang untuk proses belajar mengajar	PKBM Bahurekso, Jl Raya Kaibahan Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1919	1977906	Laila Nur Azizah	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	perlunya Hibah Uang untuk pembangunan ruang kelas, karena ruang kelas masih kurang untuk proses belajar mengajar	PKBM Arum Jl. Raya P. Diponegoro Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1920	1977919	Laila Nur Azizah	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Hibah Uang untuk pembangunan pondok pesantren	Ponpes Nurul Anwar RT 05 RW 02 Desa Langensari Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1921	1977933	Laila Nur Azizah	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	perlunya Hibah Uang untuk pembangunan/rehabilitasi ruang kelas, karena ruang kelas masih kurang untuk proses belajar mengajar	TPQ Baitul Ilmi RT 14 RW 05 Desa Kalipancur, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
1922	1978048	JUHARNO, SH	Bantuan bibit ternak	Keterbatasan ternak menghambat pengembangan usaha dan pendapatan Kelompok Ternak, sehingga diperlukan bantuan hewan kambing guna mendukung pengembangan usaha peternakan dan meningkatkan kesejahteraan kelompok	Kelompok Ternak Desa Karanganyar, Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
1923	1978508	JUHARNO, SH	Pengadaan Sarana Budidaya Air Tawar	Keterbatasan sarana dan prasarana budidaya ikan lele yang dimiliki kelompok tani menyebabkan produksi belum optimal dan menghambat pengembangan usaha. Oleh karena itu, diperlukan bantuan sarana budidaya untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kesejahteraan anggota kelompok	Kelompok Tani Desa Wonokerto Wetan Kecamatan Wonokerto , Kab. Pekalongan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1924	1979235	Ahmad Ridhowi	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Kerusakan pada bagian bangunan dan fasilitas pendukung Musholla Nurul Huda Desa Pangkah menyebabkan kenyamanan dan keamanan jamaah belum optimal sehingga diperlukan hibah rehabilitasi untuk meningkatkan kelayakan sarana ibadah.	Desa Pangkah Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1925	1979266	Ahmad Ridhowi	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (SD)	Kondisi sarana sanitasi di SD Negeri Salakbrojo, Kecamatan Kedungwuni, belum mendukung terciptanya lingkungan belajar yang sehat dan higienis sehingga diperlukan pembangunan toilet yang layak.	Desa Salakbrojo Kecamatana Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1926	1979273	Ahmad Ridhowi	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Akses jalan menuju lahan pertanian Kelompok Tani CEMPAKA di Dukuh Gumelar RT 04 RW 02 Desa Kutosari belum memadai sehingga menghambat mobilitas petani dan distribusi hasil pertanian.	Dukuh Gumelar RT 004 RW 002 Desa Kutosari Kecamatan Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
1927	1979314	Ahmad Ridhowi	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SD)	Keterbatasan ruang pembelajaran di SD Muhammadiyah Wuled 02 menyebabkan proses belajar mengajar belum berjalan optimal sehingga diperlukan penambahan ruang kelas.	Jl. Raya Wuled No. 163B, Tirto, Wuled, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
1928	1979326	Ahmad Ridhowi	Bantuan sarana prasarana fasilitas kesehatan	Belum tersedianya fasilitas layanan kesehatan yang representatif di lingkungan Desa Wuled menyebabkan akses pelayanan kesehatan masyarakat sekitar belum optimal sehingga diperlukan pengadaan gedung klinik.	Desa Wuled Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Kesehatan	Pengembangan Puskesmas

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1929	1979419	Ahmad Ridhowi	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Kondisi jalan penghubung Dukuh Madendo menuju Dukuh Sidayu di Desa Domiyang belum memadai sehingga menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian.	Desa Domiyang Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1930	1979446	Ahmad Ridhowi	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Minimnya penerangan pada jalan penghubung Desa Domiyang–Desa Notogiwang menyebabkan rendahnya visibilitas pada malam hari dan berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan serta gangguan keamanan.	Desa Domiyang menuju Desa Notogiwang Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1931	1979466	Ahmad Ridhowi	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Kondisi fisik bangunan dan fasilitas pendukung Musala Babul Janah memerlukan perbaikan agar kegiatan ibadah dan sosial keagamaan dapat berjalan dengan aman dan nyaman sehingga diperlukan hibah rehabilitasi.	Desa Pngkah Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
1932	1979481	Ahmad Ridhowi	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Kondisi jalan poros penghubung Desa Pangkah menuju Desa Kebonrowo Pucang belum memadai sehingga menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian serta aktivitas ekonomi, sehingga diperlukan pengaspalan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kelancaran transportasi.	Desa Pangkah menuju Desa Kebonrowo Pucang Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
1933	1979490	Ahmad Ridhowi	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Kondisi jalan usaha tani di Desa Donowangun belum memadai sehingga menghambat akses petani menuju lahan pertanian dan distribusi hasil panen.	Desa Donowangun Kecamatan Talun, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
1934	1979506	Ahmad Ridhowi	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Minimnya penerangan jalan di wilayah Donowangun Lor menyebabkan rendahnya visibilitas pada malam hari sehingga berpotensi membahayakan pengguna jalan dan mengganggu keamanan lingkungan.	Donowangun Lor Desa Donomangun Kecamatan Talun, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1935	1979851	Laila Nur Azizah	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	perlunya Hibah Uang untuk pembangunan/rehabilitasi ruang kelas, karena ruang kelas masih kurang untuk proses belajar mengajar	TPQ Al Adzkar RT 01 RW 01 Desa Langensari Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1936	1979854	Laila Nur Azizah	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	perlunya Hibah Uang untuk pembangunan/rehabilitasi ruang kelas, karena ruang kelas masih kurang untuk proses belajar mengajar	LPQ Al Ikhsan Dukuh Patempelan Desa Langensari Kecamatan Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
1937	1979861	Laila Nur Azizah	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	belum adanya talut irigasi tani (JIT)	Desa Ponolawen RT 14 RW 05 Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
1938	1979865	Laila Nur Azizah	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	JUT rusak, Perlunya pengaspalan JUT agar memudahkan mobilitas petani	Dukuh Patempelan Desa Langensari Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
1939	1979872	Laila Nur Azizah	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (TK/PAUD)	perlunya Hibah Uang untuk pembangunan/rehabilitasi ruang kelas, karena ruang kelas masih kurang untuk proses belajar mengajar	TK Kartika Asih Desa Sukoharjo Kec. Kandangserang, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1940	1979878	Laila Nur Azizah	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	perlunya pembangunan/pemeliharaan drainase agar kerja sistem drainase bisa lebih optimal dari sebelumnya	Jalan Poros Desa Langensari Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
1941	1979881	Laila Nur Azizah	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Kurangnya penerangan jalan umum, rawan kecelakaan dan tindak kejahatan	Desa Langensari Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1942	1979892	Laila Nur Azizah	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (SD)	tidak adanya toilet guru, dapur dan pagar bumi sekolah	SD N 01 Kalipancur, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1943	1979899	Laila Nur Azizah	Penyediaan sarana dan prasarana olahraga	tidak adanya lapangan bulu tangkis guna menyalurkan kebutuhan masyarakat yang gemar berolahraga	Dukuh Gembyang Kelurahan Sragi Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
1944	1979913	Dinda Aniva Nutkhi, S.H	Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	daerah banjir yang perlu adanya pengadaan diesel dompeng dan pipa penyedot air	Desa Silirejo Kec. Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1945	1981074	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Produktivitas dan kualitas produk konveksi di Pekalongan belum optimal.	Desa Kaligawe, Kecaatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1946	1981081	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Produktivitas dan kualitas produk konveksi di Pekalongan belum optimal.	Desa Kedung Kebo, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1947	1981088	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Produktivitas dan kualitas produk konveksi di Pekalongan belum optimal.	Desa Kalilembu, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1948	1981091	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Produktivitas dan kualitas produk konveksi di Pekalongan belum optimal.	Desa Pagumengan Mas, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1949	1981095	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Produktivitas dan kualitas produk konveksi di Pekalongan belum optimal.	Desa Pegandon, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1950	1981098	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Produktivitas dan kualitas produk konveksi di Pekalongan belum optimal.	Desa Kebonsari, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1951	1981106	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Produktivitas dan kualitas produk konveksi di Pekalongan belum optimal.	Desa Jrebeng Kembang, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1952	1981110	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Produktivitas dan kualitas produk konveksi di Pekalongan belum optimal.	Desa Logandeng, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1953	1981116	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Produktivitas dan kualitas produk konveksi di Pekalongan belum optimal.	Desa Pangkah, Kecamatan Karagdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1954	1981129	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Produktivitas dan kualitas produk konveksi di Pekalongan belum optimal.	Desa Kebonrowo Pucang, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1955	1981135	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Terbatasnya produksi dan permodalan usaha konveksi di Kabupaten Pekalongan berdampak pada rendahnya kualitas dan daya saing.	Desa Warulor, Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1956	1981161	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Terbatasnya produksi dan permodalan usaha konveksi di Kabupaten Pekalongan berdampak pada rendahnya kualitas dan daya saing.	Desa Pekuncen, Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1957	1981172	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Terbatasnya produksi dan permodalan usaha konveksi di Kabupaten Pekalongan berdampak pada rendahnya kualitas dan daya saing.	Desa Bener, Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1958	1981203	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Terbatasnya produksi dan permodalan usaha konveksi di Kabupaten Pekalongan berdampak pada rendahnya kualitas dan daya saing.	Desa Bondansari, Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1959	1981251	Catur Andriansah, S.Pd	Bantuan bibit ternak	Terbatasnya kepemilikan bibit ternak berkualitas di kalangan masyarakat menghambat peningkatan produksi dan pendapatan peternak, sehingga diperlukan bantuan bibit ternak untuk mendukung pengembangan usaha dan kesejahteraan masyarakat	Kelompok ternak masyarakat Desa Ujungnegoro Kecamatan Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
1960	1981661	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Terbatasnya produksi dan permodalan usaha konveksi di Kabupaten Pekalongan berdampak pada rendahnya kualitas dan daya saing.	Desa Delegtukang, Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1961	1981677	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Terbatasnya produksi dan permodalan usaha konveksi di Kabupaten Pekalongan berdampak pada rendahnya kualitas dan daya saing.	Desa Kadipaten, Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1962	1981686	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Terbatasnya produksi dan permodalan usaha konveksi di Kabupaten Pekalongan berdampak pada rendahnya kualitas dan daya saing.	Desa Kampung, Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1963	1981692	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Terbatasnya produksi dan permodalan usaha konveksi di Kabupaten Pekalongan berdampak pada rendahnya kualitas dan daya saing.	Desa Karangjati, Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1964	1981702	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Terbatasnya produksi dan permodalan usaha konveksi di Kabupaten Pekalongan berdampak pada rendahnya kualitas dan daya saing.	Desa Kauman, Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1965	1981710	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Terbatasnya produksi dan permodalan usaha konveksi di Kabupaten Pekalongan berdampak pada rendahnya kualitas dan daya saing.	Desa Kemplong, Kecaatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1966	1981718	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Terbatasnya produksi dan permodalan usaha konveksi di Kabupaten Pekalongan berdampak pada rendahnya kualitas dan daya saing.	Desa Warukidul, Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1967	1981736	Sumar Rosul	Penyediaan sarana dan prasarana olahraga	Bantuan Sarana dan Prasaran Olah Raga Dayung	PODSI Kab. Pekalongan, Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
1968	1981796	Drs.H. Abdul Munir	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Kondisi jalan usaha tani rusak dan belum memadai sehingga menghambat akses petani ke lahan dan distribusi hasil pertanian.	Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
1969	1981804	Drs.H. Abdul Munir	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Kondisi jalan usaha tani rusak dan belum memadai sehingga menghambat akses petani ke lahan dan distribusi hasil pertanian.	Desa Salak Brojo, Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
1970	1981941	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Keterbatasan ruang kelas TPQ sehingga daya tampung tidak mencukupi dan proses pembelajaran kurang optimal.	TPQ Al Hidayah Desa Kwayangan, Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1971	1981961	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Keterbatasan ruang kelas TPQ sehingga daya tampung tidak mencukupi dan proses pembelajaran kurang optimal.	TPQ An Nur Jrebeng Kulon, Desa Jrebeng Kembang, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1972	1982016	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Terbatasnya akses permodalan pelaku usaha ekonomi produktif sehingga usaha sulit berkembang dan produktivitas rendah.	Desa Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1973	1982029	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Terbatasnya akses permodalan pelaku usaha ekonomi produktif sehingga usaha sulit berkembang dan produktivitas rendah.	Desa Bugangan, Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1974	1982045	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Terbatasnya akses permodalan pelaku usaha ekonomi produktif sehingga usaha sulit berkembang dan produktivitas rendah.	Desa Karangdowo, Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1975	1982053	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Terbatasnya akses permodalan pelaku usaha ekonomi produktif sehingga usaha sulit berkembang dan produktivitas rendah.	Desa Kedungpatangewu, Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1976	1982059	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Terbatasnya akses permodalan pelaku usaha ekonomi produktif sehingga usaha sulit berkembang dan produktivitas rendah.	Desa Kwayangan, Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1977	1982066	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Terbatasnya akses permodalan pelaku usaha ekonomi produktif sehingga usaha sulit berkembang dan produktivitas rendah.	Desa Langkap, Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1978	1982072	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Terbatasnya akses permodalan pelaku usaha ekonomi produktif sehingga usaha sulit berkembang dan produktivitas rendah.	Desa Pajomblangan, Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1979	1982081	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Terbatasnya akses permodalan pelaku usaha ekonomi produktif sehingga usaha sulit berkembang dan produktivitas rendah.	Desa Pakisputih, Kecamatan Keedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1980	1982086	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Terbatasnya akses permodalan pelaku usaha ekonomi produktif sehingga usaha sulit berkembang dan produktivitas rendah.	Desa Proto, Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1981	1982095	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Terbatasnya akses permodalan pelaku usaha ekonomi produktif sehingga usaha sulit berkembang dan produktivitas rendah.	Desa Podo, Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1982	1982099	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Terbatasnya akses permodalan pelaku usaha ekonomi produktif sehingga usaha sulit berkembang dan produktivitas rendah.	Desa Rengas, Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1983	1982107	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Terbatasnya akses permodalan pelaku usaha ekonomi produktif sehingga usaha sulit berkembang dan produktivitas rendah.	Desa Rowocacing, Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1984	1982114	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Terbatasnya akses permodalan pelaku usaha ekonomi produktif sehingga usaha sulit berkembang dan produktivitas rendah.	Desa Salak Brojo, Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1985	1982125	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Terbatasnya akses permodalan pelaku usaha ekonomi produktif sehingga usaha sulit berkembang dan produktivitas rendah.	Desa Tangkil Kulon, Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1986	1982135	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Terbatasnya akses permodalan pelaku usaha ekonomi produktif sehingga usaha sulit berkembang dan produktivitas rendah.	Desa Tangkil Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1987	1982143	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Terbatasnya akses permodalan pelaku usaha ekonomi produktif sehingga usaha sulit berkembang dan produktivitas rendah.	Desa Tosaran, Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1988	1982341	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Terbatasnya akses permodalan pelaku usaha ekonomi produktif sehingga usaha sulit berkembang dan produktivitas rendah.	Desa Jrebeng Kembang, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1989	1982347	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Terbatasnya akses permodalan pelaku usaha ekonomi produktif sehingga usaha sulit berkembang dan produktivitas rendah.	Desa Kaligawe, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1990	1982355	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Terbatasnya akses permodalan pelaku usaha ekonomi produktif sehingga usaha sulit berkembang dan produktivitas rendah.	Desa Kalilembu, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1991	1982370	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Terbatasnya akses permodalan pelaku usaha ekonomi produktif sehingga usaha sulit berkembang dan produktivitas rendah.	Desa Karangdadap, Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1992	1982378	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Terbatasnya akses permodalan pelaku usaha ekonomi produktif sehingga usaha sulit berkembang dan produktivitas rendah.	Desa Kebonrowo Pucang, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1993	1982386	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Terbatasnya akses permodalan pelaku usaha ekonomi produktif sehingga usaha sulit berkembang dan produktivitas rendah.	Desa Kebonsari, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1994	1982458	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Terbatasnya akses permodalan pelaku usaha ekonomi produktif sehingga usaha sulit berkembang dan produktivitas rendah.	Desa Kedung Kebo, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1995	1982464	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Terbatasnya akses permodalan pelaku usaha ekonomi produktif sehingga usaha sulit berkembang dan produktivitas rendah.	Desa Logandeng, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1996	1982473	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Terbatasnya akses permodalan pelaku usaha ekonomi produktif sehingga usaha sulit berkembang dan produktivitas rendah.	Desa Pagumengan Mas, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1997	1982477	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Terbatasnya akses permodalan pelaku usaha ekonomi produktif sehingga usaha sulit berkembang dan produktivitas rendah.	Desa Pangkah, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1998	1982482	Drs.H. Abdul Munir	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Terbatasnya akses permodalan pelaku usaha ekonomi produktif sehingga usaha sulit berkembang dan produktivitas rendah.	Desa Pegandon, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
1999	1982534	Drs.H. Abdul Munir	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (TK/PAUD)	Lonjakan jumlah siswa kelebihan kapasitas sehingga dibutuhkan ruang kelas baru.	TK IT Qorina Desa Bojong Wetan, Kecamatan Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
2000	1982551	AS ADILLAH	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Panas matahari dan hujan membuat area depan masjid licin, Sehingga dibutuhkan pembuatan kanopi Masjid	Masjid Baitussalim Kaliketing Desa Kalimojosari Kecamatan Doro , Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
2001	1982553	Drs.H. Abdul Munir	PEMBANGUNAN / REHABILITASI JARINGAN IRIGASI	Kondisi jaringan irigasi tersier belum memadai sehingga distribusi air ke lahan pertanian tidak optimal dan berdampak pada produktivitas pertanian.	Desa Pakumbulan RT 06/RW 03, Kecamatan Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
2002	1982563	AS ADILLAH	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Madrasah ini membutuhkan Pembangunan Gedung karena bangunannya sudah tua dan berpotensi bahaya	TPQ Kaliketing Desa Kalimojosari Kecamatan Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
2003	1982572	Drs.H. Abdul Munir	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (SMP)	Kondisi halaman belum tertata dan belum berpaving sehingga mengganggu kenyamanan, kebersihan, dan keamanan lingkungan sekolah.	MTS Al Hasyimi Desa Salak Brojo, Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
2004	1982574	AS ADILLAH	Bantuan prasarana persampahan (Sepeda Motor Tiga Roda)	Penumpukan yang menimbulkan bau tidak sedap, penyakit, dan risiko pencemaran lingkungan (tanah, air, udara), Sehingga membutuhkan Sepeda motor tiga roda	SMK Ma'arif NU Doro Desa Doro Kecamatan Doro , Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
2005	1982618	Drs.H. Abdul Munir	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Fasilitas pesantren, khususnya asrama dan musala, yang sudah tua, rapuh, dan tidak memenuhi standar keamanan bangunan, sehingga dibutuhkan Rehabilitasi Pondok Pesantren.	Pondok Pesantren Minhajul Muta'alimin Desa Proto, Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
2006	1982622	AS ADILLAH	Bantuan bibit ternak	Bantuan Hibah ternak Kambing domba membantu menambah aset produktif masyarakat, khususnya peternak kecil, sehingga pendapatan keluarga meningkat.	Kelompok Ternak Barokah Dk. Jati Desa Talun Kecamatan Talun , Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
2007	1982646	AS ADILLAH	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Musholla dalam Keadaan yang sudah kurang layak untuk digunakan sehingga dibutuhkan Rehab Musholla	Musholla Al Falah Desa Depok Rt 03 Rw 01 Kecamatan Lebakbarang , Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
2008	1982701	M. Widiyanto, S.Pd	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (TK/PAUD)	perlunya revitalisasi/penyempurnaan bangunan agar layak pakai untuk belajar mengajar	TK RA Muslimat Jetak Lengkong, Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
2009	1982714	M. Widiyanto, S.Pd	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Ruang kelas sudah tidak mencukupi untuk banyaknya siswa, perlu RKB	TPQ Darussalam Desa Jetak Lengkong, Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
2010	1982722	M. Widiyanto, S.Pd	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	ruang kelas sudah tidak mencukupi untuk proses belajar mengajar, perlunya RKB	TPQ Arrohman RT 4 Desa Jetaklengkong, Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
2011	1982731	M. Widiyanto, S.Pd	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	jalan menuju lahan pertanian tidak layak, dan sulit untuk mobilitas petani	Desa Jetak lengkong, Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2012	1982745	M. Widiyanto, S.Pd	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	kurangnya penerangan jalan, rawan kecelakaan dan kejahatan	RT 10 RW 04 Dukuh cempreng Desa Wonopringgo Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2013	1982748	M. Widiyanto, S.Pd	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	musholla sudah tidak layak perlu perbaikan	Musholla Al Mujahidin RT 10 RW 04 Dukuh Cempreng desa Wonopringgo, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
2014	1982751	AS ADILLAH	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (SMP)	Perkembangan teknologi menuntut sekolah untuk menerapkan pembelajaran berbasis digital. Komputer menjadi sarana utama dalam mengakses materi, aplikasi pembelajaran, dan sumber belajar online. Sehingga sekolah dibuuthkan perlengkapan komputer	MTS Syahid Doro Desa Doro Kecamatan Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
2015	1982757	M. Widiyanto, S.Pd	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	kurangnya penerangan jalan, rawan kecelakaan dan tidak kejahatan	RT 14 Desa Karangdowo Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2016	1982764	M. Widiyanto, S.Pd	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	jalan rusak menghambat mobilitas masyarakat	jalan poros Desa Wonorejo, Kec. wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
2017	1982766	AS ADILLAH	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Masjid dalam Keadaan yang sudah kurang layak untuk digunakan sehingga dibutuhkan Rehab Masjid	Masjid Al Barokah Dk. Depok Krajan Desa Depok Kecamatan Lebakbarang, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
2018	1982776	M. Widiyanto, S.Pd	Bantuan bibit ternak	Hibah untuk tambahan modal kelompok ternak agar terciptanya ketahanan pangan	Kelompok Ternak Anugerah Padma, Desa Wonopringgo kec. wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
2019	1982781	AS ADILLAH	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Madrasah ini membutuhkan Pembangunan/ Rehab Gedung karena bangunannya sudah tua dan berpotensi bahaya	TPQ Al Ikhlas Dk. Sinutug Desa Pungangan Kecamatan Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
2020	1982791	AS ADILLAH	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Lonjakan Jumlah Siswa Kelebihan Kapasitas sehingga dibutuhkan Ruang Kelas Baru	TPQ Sulam Taufiq Desa Pungangan Kecamatan Doro , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
2021	1982799	M. Widiyanto, S.Pd	Bantuan bibit ternak	Hibah untuk tambahan modal kelompok ternak agar terciptanya ketahanan pangan	Kelompok Ternak Makmur Bersama, Desa Tangkil Kulon kec. kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
2022	1982811	AS ADILLAH	Bantuan bibit ternak	Bantuan Hibah ternak Kambing dan Domba membantu menambah aset produktif masyarakat, khususnya peternak kecil, sehingga pendapatan keluarga meningkat.	Kelompok ternak Barokah Lestari Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang , Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
2023	1982817	M. Widiyanto, S.Pd	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah (TK/PAUD)	ruang kelas sudah tidak layak, perlunya revitalisasi gedung sekolah	TK Pertiwi Desa Podo, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
2024	1982828	AS ADILLAH	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Musholla dalam Keadaan yang sudah kurang layak untuk digunakan sehingga dibutuhkan Hibah Rehab Musholla	Musholla Al Islah Dk. Kaliketing Desa Kalimojosari Kecamatan Doro, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
2025	1982833	M. Widiyanto, S.Pd	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan Rusak perlu perbaikan guna memudahkan mobilitas masyarakat	Jalan Poros Desa Legok Gunung Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
2026	1982853	M. Widiyanto, S.Pd	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan sempit perlu pelebaran jalan	Jalan Utama Legok Gunung, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
2027	1982871	M. Widiyanto, S.Pd	PEMBANGUNAN / REHABILITASI JARINGAN IRIGASI	perlunya pembenahan irigasi demi kelancaraan pembuangan air disaat hujan agar tidak terjadi banjir atau genangan air yang berlebihan	Desa Pegaden Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
2028	1982892	AS ADILLAH	Bantuan bibit ternak	Ayam petelur merupakan usaha produktif yang menghasilkan pendapatan rutin dari penjualan telur, sehingga membantu meningkatkan ekonomi anggota kelompok tani. seingga dibutuhkan Hibah ayam petelur	Kelompok Tani Makmur Desa Depok kecamatan Lebakbarang , Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
2029	1982893	M. Widiyanto, S.Pd	PEMBANGUNAN / REHABILITASI JARINGAN IRIGASI	belum adanya senderan untuk saluran irigasi	Desa Panjomblangan Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
2030	1982904	AS ADILLAH	Bantuan bibit ternak	Ayam petelur merupakan usaha produktif yang menghasilkan pendapatan rutin dari penjualan telur, sehingga membantu meningkatkan ekonomi anggota kelompok tani. seingga dibutuhkan Hibah ayam petelur	Kelompok Tani Ternak Kali Tujuh Desa Curugmancur Kecamatan Petungkriyono , Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
2031	1982906	M. Widiyanto, S.Pd	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	tebing jalan rawan longsor, perlu pembangunan talud jalan	Pajomblangan, Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
2032	1982917	AS ADILLAH	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Musholla dalam Keadaan yang sudah kurang layak untuk digunakan sehingga dibutuhkan Rehab Musholla	Musholla Al Ikhlas Dk. Karyomukti Desa Jolotigo Kecamatan Talun , Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
2033	1982937	AS ADILLAH	Pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan	Stunting sulit diperbaiki setelah anak melewati usia 2 tahun (periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan). Karena itu, diperlukan dukungan bantuan agar sosialisasi dapat menjangkau sasaran secara luas dan tepat waktu. sehingga dibuuthkan sosialisasi	Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Bali di Jl. Raya Puputan No. 15, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Kab. Pekalongan	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
2034	1982961	AS ADILLAH	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Banyak ponpes memiliki bangunan lama yang mengalami kerusakan (atap bocor, lantai retak, sanitasi kurang layak), sehingga dibuuthkan rehab ponpes	Pondok Pesantren Mambaul Huda Anwar Desa Kutosari Kecamatan Karanganyar , Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
2035	1982983	AS ADILLAH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalanan dengan kondisi yang sudah rusak sehingga dibutuhkan Pembangunan Pengaspalan Jalan	Dk. Majokarang Desa Kalimojosari Kecamatan Doro , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
2036	1983008	AS ADILLAH	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Madrasah ini membutuhkan rehab gedungTPQ karena bangunannya sudah tua dan berpotensi bahaya	TPQ Baitul Sujud Desa Sidomulyo Kecamatan Lebakbarang , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
2037	1983021	AS ADILLAH	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Masjid dalam Keadaan yang sudah kurang layak untuk digunakan sehingga dibutuhkan Rehab Masjid	Masjid Baitussalam Desa Tlogopakis Kecamatan Petungkriyono , Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
2038	1983061	Drs.H. Abdul Munir	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SD)	Lonjakan Jumlah Siswa Kelebihan Kapasitas sehingga dibutuhkan Ruang Kelas Baru	MI Desa Kedung Kebo, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
2039	1983075	AS ADILLAH	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Masjid dalam Keadaan yang sudah kurang layak untuk digunakan sehingga dibutuhkan Pembangunan/ Rehab Masjid	Masjid At Taubah Desa Tlogopakis Kecamatan Petungkriyono , Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
2040	1983085	AS ADILLAH	Bantuan bibit ternak	Ayam petelur merupakan usaha produktif yang menghasilkan pendapatan rutin dari penjualan telur, sehingga membantu meningkatkan ekonomi anggota kelompok tani. seingga dibutuhkan Hibah ayam petelur	Kelompok Tani Sidodadi 1 Desa Sidomulyo Kecamatan Lebakbarang , Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
2041	1983101	AS ADILLAH	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Bantuan Hibah ternak Kambing domba membantu menambah aset produktif masyarakat, khususnya peternak kecil, sehingga pendapatan keluarga meningkat.	Kelompok Ternak Karya Abadi Desa Tlogohendro Kecamatan Petungkriyono , Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
2042	1983112	AS ADILLAH	Bantuan bibit ternak	Ayam petelur merupakan usaha produktif yang menghasilkan pendapatan rutin dari penjualan telur, sehingga membantu meningkatkan ekonomi anggota kelompok tani. seingga dibutuhkan Hibah ayam petelur	Kelompok Tani Wahyu Cinde Desa Depok Kecamatan Lebakbarang, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
2043	1983132	AS ADILLAH	PEMBANGUNAN JARINGAN AIR MINUM PERPIPAAN (SPAM)	Bantuan pipa paralon bertujuan memperlancar distribusi air bersih dari sumber mata air, sumur bor, atau tandon ke rumah-rumah warga sehingga kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Sehingga dibuuthkan Pipa Paralon 3 Dim	Desa Dororejo Kecamatan Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
2044	1983153	AS ADILLAH	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Desa Kalimojosari Kecamatan Doro , Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2045	1983168	AS ADILLAH	Bantuan prasarana persampahan Kontainer dan Gerobak Sampah	Penyediaan tong sampah membantu masyarakat membuang sampah pada tempatnya sehingga lingkungan desa menjadi lebih bersih dan tertata. sehingga dibutuhkan tong sampah	Desa Kalimojosari Kecamatan Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
2046	1983251	AS ADILLAH	PEMBANGUNAN JARINGAN AIR MINUM PERPIPAAN (SPAM)	Desa-desa yang belum memiliki sistem distribusi air, sehingga dibuuthkan Pipanisasi	Desa Talun Kecamatan Talun , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
2047	1983275	AS ADILLAH	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Gereja ini membutuhkan Rehab Pembangunan Kanopi karena bangunannya sudah tua dan berpotensi bahaya	Desa Jolotigo Kecamatan Talun, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
2048	1983297	AS ADILLAH	Bantuan bibit ternak	Bantuan Hibah ternak Kambing domba membantu menambah aset produktif masyarakat, khususnya peternak kecil, sehingga pendapatan keluarga meningkat.	Kelompok Ternak Geropak Purbo Desa Jolotigo Kecamatan Talun , Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
2049	1983313	AS ADILLAH	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Desa Krompeng Kecamatan Talun , Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2050	1983315	Muhammad Sabiq Ashraff	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	tebing sungai rawan longsor	SUNGAI DONOWANGUN DESA DONOWANGUN, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
2051	1983325	Muhammad Sabiq Ashraff	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (TK/PAUD)	kurangnya ruang belajar mengajar di sekolah	TK Aisyiyah DK. BANGLOR DESA DONOWANGUN, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
2052	1983327	AS ADILLAH	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Untuk mempermudah akses para petani dalam memperluas jalur distribusi hasil pertanian sehingga dibutuhkan Rabat Beton dan pengaspalan Jalan Usaha Tani	Desa Krompeng Kecamatan Talun , Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2053	1983336	Muhammad Sabiq Ashraff	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	jalan rusak perlu adanya perbaikan jalan	jalan poros desa mesoyi ke desa talun, kec. talun, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
2054	1983353	Muhammad Sabiq Ashraff	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Kurangnya penerangan jalan rawan kecelakaan dan tindak kejahatan	Desa Batursari Kec. Talun, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2055	1983358	AS ADILLAH	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Bantuan hibah digunakan untuk memperbaiki atau menambah fasilitas belajar seperti ruang kelas, asrama, perpustakaan, atau laboratorium sehingga proses pendidikan menjadi lebih optimal.	Pondok Pesantren Sunan Gunung Jati Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
2056	1983379	Muhammad Sabiq Ashraff	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (TK/PAUD)	tidak adanya MCK	RA Muslimat Desa Batursari, Kec. talun, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
2057	1983405	Muhammad Sabiq Ashraff	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	kurangnya penerangan jalan, jalan gelap	Jalan Poros Desa talun Kec. Talun, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2058	1983414	Muhammad Sabiq Ashraff	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	jalanan gelap	Desa Sengare Kec. Talun, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2059	1983421	Muhammad Sabiq Ashraff	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan Kurang lebar untuk persimpangan kendaraan/mobil, perlu pelebaran jalan	Jalan Desa Sengare-Jolotigo, Kec. talun, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
2060	1983423	AS ADILLAH	Pengadaan Sarana Budidaya Air Tawar	Bantuan sarana seperti kolam, jaring, mesin aerator, atau alat pakan membantu petani ikan meningkatkan jumlah dan kualitas produksi.	Desa Yosorejo Kecamatan Petungkriyono , Kab. Pekalongan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2061	1983432	Muhammad Sabiq Ashraff	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	perluny pelatihan dan bantuan umkm agar memajukan perekonomian	Desa Sengare Kec. Talun, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
2062	1983465	AS ADILLAH	Bantuan bibit ternak	Studi membantu mengetahui cara pengelolaan yang optimal untuk daging, susu, atau kulit domba/kambing sehingga kualitas dan nilai jual produk meningkat.	Desa Sawangan Kecamatan Doro , Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
2063	1983490	AS ADILLAH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalanan dengan kondisi yang sudah rusak sehingga dibutuhkan Pembangunan Pengaspalan Jalan	Desa Kalimojoari Kecamatan Doro , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
2064	1983503	AS ADILLAH	Bantuan bibit ternak	Ayam petelur merupakan usaha produktif yang menghasilkan pendapatan rutin dari penjualan telur, sehingga membantu meningkatkan ekonomi anggota kelompok tani. seingga dibutuhkan Hibah ayam petelur	Kelompok Tani Sami Jaya Desa Tembelang Gunung Kecamatan Lebakbarang , Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
2065	1983518	AS ADILLAH	Bantuan bibit ternak	Ayam petelur merupakan usaha produktif yang menghasilkan pendapatan rutin dari penjualan telur, sehingga membantu meningkatkan ekonomi anggota kelompok tani. seingga dibutuhkan Hibah ayam petelur	Kelompok Tani Raharjo Desa Kutorembet Kecamatan Lebakbarang , Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
2066	1983543	AS ADILLAH	NORMALISASI SUNGAI	Jalan, jembatan, dan rumah di dekat sungai mengalami kerusakan akibat banjir atau arus deras, Sehingga dibutuhkan perapian sungai	Desa Kalimojosari Kecamatan doro, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
2067	1983825	Sumar Rosul	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Normalisasi Drainase /saluran kel. Pekuncen Wiradesa	Desa Dadi Rejo Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
2068	1983849	Sumar Rosul	Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Pengadaan Pompa Air RelKeretaSungai singkarang	SamborejoTirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
2069	1983996	H. M Kholis Jazuli	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Madrasah ini membutuhkan Rehab Gedung TPQ karena bangunannya sudah tua dan berpotensi bahaya	TPQ Nurul Huda Desa Tosaran Desa Kedunguwuni , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
2070	1984053	NASHIH SYARIFUDDIN S.K.M., M.A.P	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	keadaan Rumah sudah tidak layak untuk digunakan seperti Dinding bambu/kayu yang sudah lapuk, dinding tanah/anyaman bambu yang rusak, dinding permanen yang retak/hampir roboh, Sehingga dibutuhkan Perbaikan	Desa Sumurjomblangbogo Kecamatan Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
2071	1984062	NASHIH SYARIFUDDIN S.K.M., M.A.P	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Keadaan Rumah sudah tidak layak untuk digunakan seperti Dinding bambu/kayu yang sudah lapuk, dinding tanah/anyaman bambu yang rusak, dinding permanen yang retak/hampir roboh, Sehingga dibutuhkan Perbaikan	Desa Sijeruk Kecamatan Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
2072	1984066	NASHIH SYARIFUDDIN S.K.M., M.A.P	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Keadaan Rumah sudah tidak layak untuk digunakan seperti Dinding bambu/kayu yang sudah lapuk, dinding tanah/anyaman bambu yang rusak, dinding permanen yang retak/hampir roboh, Sehingga dibutuhkan Perbaikan	Desa Purworejo Kecamatan Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
2073	1984069	NASHIH SYARIFUDDIN S.K.M., M.A.P	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Keadaan Rumah sudah tidak layak untuk digunakan seperti Dinding bambu/kayu yang sudah lapuk, dinding tanah/anyaman bambu yang rusak, dinding permanen yang retak/hampir roboh, Sehingga dibutuhkan Perbaikan	Desa Mrican Kecamatan Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
2074	1984074	NASHIH SYARIFUDDIN S.K.M., M.A.P	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Keadaan Rumah sudah tidak layak untuk digunakan seperti Dinding bambu/kayu yang sudah lapuk, dinding tanah/anyaman bambu yang rusak, dinding permanen yang retak/hampir roboh, Sehingga dibutuhkan Perbaikan	Desa Purwodadi Kecamatan Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
2075	1984125	NASHIH SYARIFUDDIN S.K.M., M.A.P	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Musholla dalam Keadaan yang sudah kurang layak untuk digunakan sehingga dibutuhkan Hibah Musholla	Musholla Al Hikmah Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong , Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
2076	1984132	NASHIH SYARIFUDDIN S.K.M., M.A.P	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Masjid dalam Keadaan yang sudah kurang layak untuk digunakan sehingga dibutuhkan Hibah Masjid	Masjid Jami Darussa'adah Dukuh Winong Desa SumubLor Kecamatan Sragi, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
2077	1984136	AHMAD MUZAKI	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Kondisi jalan lingkungan belakang Pasar Kajen RT 08/RW 03 Kelurahan Kajen belum memadai sehingga menyulitkan akses warga serta aktivitas ekonomi, terutama saat musim hujan.	RT 008 RW 003 Kelurahan Kajen Kecamatan Kajen , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
2078	1984148	Masbukhin, S.Ag	Fasilitasi Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Dengan berkembangnya usaha, penerima bantuan bisa menciptakan peluang kerja, baik untuk anggota keluarga maupun masyarakat sekitar, Sehingga dibutuhkan UEP	UEP warga Desa Bojong Minggir Kecamatan Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
2079	1984153	Masbukhin, S.Ag	Fasilitasi Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Dengan berkembangnya usaha, penerima bantuan bisa menciptakan peluang kerja, baik untuk anggota keluarga maupun masyarakat sekitar, Sehingga dibutuhkan UEP	UEP warga Desa Babalan lor Kecamatan Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
2080	1984160	Masbukhin, S.Ag	Fasilitasi Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Dengan berkembangnya usaha, penerima bantuan bisa menciptakan peluang kerja, baik untuk anggota keluarga maupun masyarakat sekitar, Sehingga dibutuhkan UEP	UEP warga Desa Kalijambe Kecamatan Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
2081	1984167	Masbukhin, S.Ag	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Keadaan Rumah sudah tidak layak untuk digunakan seperti Dinding bambu/kayu yang sudah lapuk, dinding tanah/anyaman bambu yang rusak, dinding permanen yang retak/hampir roboh, Sehingga dibutuhkan Perbaikan	RTLH warga Desa Babalan Kidul Kecamatan Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
2082	1984173	Masbukhin, S.Ag	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Keadaan Rumah sudah tidak layak untuk digunakan seperti Dinding bambu/kayu yang sudah lapuk, dinding tanah/anyaman bambu yang rusak, dinding permanen yang retak/hampir roboh, Sehingga dibutuhkan Perbaikan	RTLH warga Bojong Minggir Kecamatan Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
2083	1984180	Masbukhin, S.Ag	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Keadaan Rumah sudah tidak layak untuk digunakan seperti Dinding bambu/kayu yang sudah lapuk, dinding tanah/anyaman bambu yang rusak, dinding permanen yang retak/hampir roboh, Sehingga dibutuhkan Perbaikan	RTLH warga Kalijambe Kecamatan Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
2084	1984238	Masbukhin, S.Ag	Fasilitasi Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Dengan berkembangnya usaha, penerima bantuan bisa menciptakan peluang kerja, baik untuk anggota keluarga maupun masyarakat sekitar, Sehingga dibutuhkan UEP	UEP warga Desa menjangan Kecamatan Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
2085	1984398	Sumar Rosul	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	pengaspalan jalanPoros sipacar gang menuju Samborejo	Desa Samborejo Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
2086	1984407	Sumar Rosul	Bantuan Pupuk Pertanian	Bantuan Pengadaan Pupuk Pertanian	Se Kabupaten Pekalongan, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
2087	1984423	Sumar Rosul	Bantuan kepada lembaga/organisasi masyarakat	Hibah Bantuan LSM Pejuang 24 Kab. Pekalongan	LSM Pejuang 24 Kab. Pekalongan, Kab. Pekalongan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
2088	1984439	Sumar Rosul	Bantuan kepada lembaga/organisasi masyarakat	Hibah Bantuan Ormas Sequad Nusantara Kab. Pekalongan	Sequad Nusantara Kab. Pekalongan, Kab. Pekalongan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
2089	1984447	Sumar Rosul	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Hibah Bantuan Masjid Desa Semut Kab. Pekalongan	Desa Semut Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
2090	1984465	Sumar Rosul	Normalisasi Saluran Tambak	Normalisasi Kolam Retensi dan PeninggianTanggul TNI	Desa Mulyorejo Kec, Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2091	1984476	Sumar Rosul	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Pengadaan PJU jalan Kepatihan -Wonokerto	Kepatihan Wonokerto, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
2092	1984486	Sumar Rosul	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Pengadaan PJU Wonokerto-Perum Nelayan Wonokerto- TPI Kemplong- Rowoyoso	Wonokerto Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2093	1984498	Sumar Rosul	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan kelurahan Pekuncen	Pekuncen Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
2094	1984508	Dra.Hj.Hindun . MH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalanan dengan kondisi yang sudah rusak sehingga dibutuhkan rehab Pengaspalan Jalan	Jalan Desa Waru Lor - Desa Bondan sari Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
2095	1984518	Dra.Hj.Hindun . MH	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (SD)	Sampah berserakan karena belum memadai di Sekolah Mi Nu Ngalian, Sehingga dibutuhkan Bantuan pengangkut sampah	MI NU Ngalian Desa Ngalian Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
2096	1984534	Sumar Rosul	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Pembangunan Jalan lingkungan ke Mayangan Wiradesa	Mayangan Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
2097	1984544	Sumar Rosul	PEMBANGUNAN JEMBATAN	Pembangunan Jembatan Ketandan Desa Wiradesa Kec. Wiradesa	Desa Wiradesa Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jembatan
2098	1984548	Sumar Rosul	NORMALISASI SUNGAI	Normalisasi saluran buangan kelurahan Gumawang Kepatihan	Gumawang Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
2099	1984555	Sumar Rosul	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (SD)	Penataan Halaman SDN 1 Desa Wonokerto Kulon Kec. Wonokerto	Wonokerto Kulon Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
2100	1984821	H. Edy Haryanto, SE	Perbaikan sarana dan prasarana di area Perumahan (Rehab Jalan, drainase, RTH Perumahan)	Jalanan yang sudah mengalami kerusakan dan berlobang sehingga dibutuhkan Rehabilitasi Jalan	Perumahan GPI Desa Tanjungsari Kecamatan kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
2101	1984903	Drs.H. Abdul Munir	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Meningkatkan keselamatan dan keamanan pengguna jalan di malam hari, Sehingga dibutuhkan LPJU	Desa Babalan Kidul, Kecamatan Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2102	1984923	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Hibah Karang Taruna Kabupaten Pekalongan	Berada di wilayah dengan keterbatasan sarana dan anggaran, Sehingga dibutuhkan lapangan sepakbola	Kelurahan sapu Garut Kecamatan Buaran , Kab. Pekalongan	Dinas Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
2103	1984958	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Bantuan kepada lembaga/organisasi masyarakat	Di era digital, pemasaran tidak lagi hanya dilakukan secara offline. Pelatihan membantu pelaku usaha memahami cara promosi melalui media sosial, marketplace, dan website agar mampu bersaing lebih luas.	Ansor Buaran Jl. Raya Watussalam Desa Watusalam Kecamatan buaran , Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
2104	1985069	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Penyediaan sarana dan prasarana olahraga	Lapangan sepak bola Desa Surabayan masih berupa tanah tidak rata, minim rumput, dan belum memiliki drainase yang baik sehingga sering tergenang saat musim hujan. Kondisi ini berpotensi menyebabkan cedera bagi pemain.	Desa Surabayan Kecamatan Wonopringgo , Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
2105	1985074	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Penyediaan sarana dan prasarana olahraga	Lapangan sepak bola Desa Kertijayan masih berupa tanah tidak rata, minim rumput, dan belum memiliki drainase yang baik sehingga sering tergenang saat musim hujan. Kondisi ini berpotensi menyebabkan cedera bagi pemain.	Desa kertijayan Kecamatan Buaran , Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
2106	1985166	AS ADILLAH	Bantuan bibit ternak	Bantuan Hibah ternak Kambing domba membantu menambah aset produktif masyarakat, khususnya peternak kecil, sehingga pendapatan keluarga meningkat.	Kelompok tani Ngopar Desa Tlogopakis Kecamatan Petungkriyono, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
2107	1985239	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Madrasah ini membutuhkan perbaikan sarana karena bangunannya sudah tua dan berpotensi bahaya, Sehingga dibutuhkan Hibah	TPQ Khoirun Nisa Desa Gondang Kecamatan Wonopringgo , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
2108	1985347	Drs.H. Abdul Munir	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	untuk memudahkan petani mengairi sawah dan penunjang hasil panen petani	Dukuh Kubang RT 08/RW 05 Desa Logandeng, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
2109	1985351	Drs.H. Abdul Munir	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	untuk memudahkan petani mengairi sawah dan penunjang hasil panen petani	Kalisalak Wetan Desa Jrebeng Kembang, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
2110	1985527	Dra.Hj.Hindun . MH	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (TK/PAUD)	Lonjakan Jumlah Siswa Kelebihan Kapasitas sehingga dibutuhkan Ruang Kelas Baru	RA Muslimat Pandanarum Desa Pandanarum Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
2111	1985546	AS ADILLAH	Bantuan bibit ternak	Bantuan Hibah ternak Kambing domba membantu menambah aset produktif masyarakat, khususnya peternak kecil, sehingga pendapatan keluarga meningkat.	Kelompok barokah lestari Desa Lebakbarang kecamatan Lebakbarang, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
2112	1986014	JAHIRIN M.H	Bantuan kepada lembaga/organisasi masyarakat	sekretariat MWC NU dalam kondisi kurang layak (bangunan rusak, fasilitas administrasi minim, tidak memiliki perlengkapan memadai), maka hibah diperlukan untuk menunjang kelancaran organisasi.	Desa kandangserang Kecamatan Kandangserang , Kab. Pekalongan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
2113	1986102	M. Widiyanto, S.Pd	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	perlunya perbaikan masjid karena masjid sudah tidak layak	Masjid Nurul Huda RT 18 RW 06 Desa Wonorejo Kec. wonopringgo, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
2114	1986108	M. Widiyanto, S.Pd	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah (TK/PAUD)	ruang kelas sudah tidak layak, perlunya rehabilitasi	PAUD Dahlia Desa Jetak Lengkong Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
2115	1986116	M. Widiyanto, S.Pd	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah (SD)	ruang kelas sudah tidak layak, perlunya perbaikan	SD N 01 Sampih, Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
2116	1986124	M. Widiyanto, S.Pd	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	mushola perlu adanya renovasi karena sudah lama tidak diperbaiki	Musholla Al Barokah Desa Sampih Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
2117	1986145	M. Widiyanto, S.Pd	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	jalan rusak perlunya perbaikan	Jalan Poros Dk. Manggal RT 01 RW 01 Desa Legok Gunung, Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
2118	1986160	M. Widiyanto, S.Pd	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	perlunya pengurukan tanah untuk TPQ dan untuk Ruang Kelas Baru	TPQ Dahrul Mukminin II Dk. Manggal RT 02 RW 01, legok Gunung, Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
2119	1986172	M. Widiyanto, S.Pd	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Kurangnya penerangan jalan/jalan gelap	Dk. Manggal Rt 01 RW 01 Desa Legok Gunung, Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2120	1986193	M. Widiyanto, S.Pd	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	perlunya pembangunan/pemeliharaan drainase agar kerja sistem drainase bisa lbih optimal dari sebelumnya agar tidak banjir/tidak ada genangan air	Dk. Manggal RT 02 RW 01 Desa Legok Gunung, Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
2121	1986235	Laila Nur Azizah	Bantuan sarana pendukung pertanian (Alat-alat pertanian : Traktor dan alat pertanian lainnya)	kurangnya alat untuk mengolah lahan pertanian, perlunya bantuan hibah alat pertanian	Dukuh patempelan Desa Langensari Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
2122	1986248	Laila Nur Azizah	Bantuan prasarana persampahan (Sepeda Motor Tiga Roda)	tidak adanya angkutan pengangkut sampah	Dukuh Banggisari Desa Langensari Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
2123	1986263	Laila Nur Azizah	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	kurangnya inovasi dan motivasi bagi pelaku UMKM, perlunya pelatihan bagi UMKM	Desa Langensari Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
2124	1986265	MUHAMMAD HAQQI HASENDA	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Musholla dalam Keadaan yang sudah kurang layak untuk digunakan sehingga dibutuhkan Rehab Musholla	Musholla Almuhajirin Desa kayu geritan Kecamatan Karanganyar , Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
2125	1986603	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Diperlukan Hibah untuk peningkatan sarana dan prasarana Musholla	Musholla Al Hikmah Desa Sawangan Kec Paninggaran, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
2126	1986616	Sabdo. SH	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	keadaan Rumah sudah tidak layak untuk digunakan seperti Dinding bambu/kayu yang sudah lapuk, dinding tanah/anyaman bambu yang rusak, dinding permanen yang retak/hampir roboh, Sehingga dibutuhkan Perbaikan	RTLH Atas Nama Rohani Desa Pododadi Kecamatan Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
2127	1986627	Sabdo. SH	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Dk. Pedawang barat Desa Pedawang Kecamatan Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2128	1986635	Sabdo. SH	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum adanya Penerengan jalan lingkungan dan pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga dibutuhkan Penyediaan LPJU	Dk. Sandong - Dk. Tembelang Desa Rogoselo Kecamatan Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2129	1986686	Sabdo. SH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalanan dengan kondisi yang sudah rusak sehingga dibutuhkan Pembangunan Pengaspalan Jalan	Dk. Sicowet RT 03 RW 06 Desa Pododadi Kecamatan Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
2130	1986702	Sabdo. SH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	alanan dengan kondisi yang sudah rusak sehingga dibutuhkan Pembangunan Pengaspalan Jalan	Dk. Bangunrejo Desa Rogoselo Kecamatan Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
2131	1986723	Sabdo. SH	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	alanan dengan kondisi yang sudah rusak sehingga dibutuhkan Pembangunan Rabat beton jalan Usaha Tani	Dk. Gumingsir Desa Gutomo Kecamatan Karanganyar, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2132	1986760	H. Saeful Bahri, S.Ag	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Untuk mempermudah akses para petani dalam memperluas jalur distribusi hasil pertanian sehingga dibutuhkan Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Wonosari Kecamatan Siwalan, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2133	1986787	H. Saeful Bahri, S.Ag	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (SMP)	Apabila halaman sekolah masih berupa tanah, berlumpur saat hujan, dan berdebu saat kemarau, maka pavingisasi sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan aman.	SMP Negeri 2 Siwalan Desa Yosorejo Kecamatan Siwalan , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
2134	1986825	AS ADILLAH	Bantuan bibit ternak	Bantuan Hibah ternak domba membantu menambah aset produktif masyarakat, khususnya peternak kecil, sehingga pendapatan keluarga meningkat.	Kelompok Tani Maeso Sanes Desa Gumelem Kecamatan petungkriyono , Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
2135	1987015	Ian Kurniawan., ST, M.AP	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum ada jalan usaha tani	Desa Pandanarum. Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2136	1987024	Ian Kurniawan., ST, M.AP	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Rusaknya Jalan Poros Sidorejo - Curug	Desa Sidorejo. Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
2137	1987036	Ian Kurniawan., ST, M.AP	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Belum adanya drainase	Desa Sidorejo. Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
2138	1987043	Ian Kurniawan., ST, M.AP	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Rusaknya jalan poros Desa Karangjompo - Tegaldowo	Desa Karangjompo, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
2139	1987061	Ian Kurniawan., ST, M.AP	REHABILITASI TEBING / BRONJONG SUNGAI	Rusaknya tanggul sungai Desa Jeruksari	RW 6 Desa Jeruksari. Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
2140	1987075	Ian Kurniawan., ST, M.AP	REHABILITASI TEBING / BRONJONG SUNGAI	Rusaknya tanggul sungai Desa Jeruksari	RW 5 Desa Jeruksari. Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
2141	1987089	Ian Kurniawan., ST, M.AP	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Rusaknya jalan poros Desa Jeruksari	Desa Jeruksari. Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
2142	1987096	Ian Kurniawan., ST, M.AP	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Rusaknya jalan di Kelurhan Bener	Kelurahan Bener. Wiradesa, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
2143	1987101	NASHIH SYARIFUDDIN S.K.M., M.A.P	Bantuan bibit/ benih/ tanaman pertanian	Tanaman rusak akibat banjir, kekeringan, hama, atau cuaca ekstrem sehingga perlu bantuan bibit	Desa Purworejo Kecamatan Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
2144	1987102	Ian Kurniawan., ST, M.AP	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Rusaknya jalan di Kecamatan Tirto	Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
2145	1987111	Ian Kurniawan., ST, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan jalan	Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2146	1987119	NASHIH SYARIFUDDIN S.K.M., M.A.P	Bantuan sarana pendukung pertanian (Alat-alat pertanian : Traktor dan alat pertanian lainnya)	Petani masih menggunakan alat tradisional sehingga proses olah tanah, tanam, dan panen kurang efisien dan memakan waktu lama. Sehingga membutuhkan bantuan Alat pertanian	Desa Jajar Wayang Kecamatan Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
2147	1987125	Ian Kurniawan., ST, M.AP	Penyediaan sarana dan prasarana olahraga	Bantuan hibah Dayung kepada kelompok Dayung Tirto	Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
2148	1987131	Ian Kurniawan., ST, M.AP	Fasilitasi Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal kepada warga yang memiliki usaha	Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
2149	1987140	Ian Kurniawan., ST, M.AP	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rumah warga tidak layak huni	Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
2150	1987153	Ian Kurniawan., ST, M.AP	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Bantuan kepada pengelola makam	Desa Jeruksari. Tirto, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
2151	1987163	Ian Kurniawan., ST, M.AP	Pengadaan Peralatan Belajar Mengajar (Laptop) (SD)	Belum adanya sarana pemberlajaran dengan media Laptop di SD Jeruksari	Desa Jeruksari. Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
2152	1987175	Ian Kurniawan., ST, M.AP	Pengadaan Alat Penangkapan Ikan untuk nelayan Laut dan PUD	Kurang sarana pendukung bagi nelayan untuk menangkap ikan	Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
2153	1987185	Ian Kurniawan., ST, M.AP	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum adanya jalan usaha tani	Desa Jeruksari. Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2154	1987200	Ian Kurniawan., ST, M.AP	REHABILITASI TEBING / BRONJONG SUNGAI	Rusaknya tanggul di Desa Karangjompo	Desa Karangjompo. Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
2155	1987206	Ian Kurniawan., ST, M.AP	REHABILITASI TEBING / BRONJONG SUNGAI	Rusaknya tanggul di Desa Mulyorejo	Desa Mulyorejo. Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
2156	1987209	Ian Kurniawan., ST, M.AP	REHABILITASI TEBING / BRONJONG SUNGAI	Rusaknya tanggul di Desa Tegaldowo	Desa Tegaldowo. Tirto, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
2157	1987221	AS ADILLAH	Bantuan bibit ternak	Bantuan Hibah ternak Kambing domba membantu menambah aset produktif masyarakat, khususnya peternak kecil, sehingga pendapatan keluarga meningkat.	Kelompok Tani Mulyo Desa Songgodadi Kecamatan Petungkriyono , Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
2158	1987242	NASHIH SYARIFUDDIN S.K.M., M.A.P	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Musholla dalam Keadaan yang sudah kurang layak untuk digunakan sehingga dibutuhkan Hibah Musholla	Musholla Dusun Kauman Selatan Desa Kesesi Kecamatan Kesesi, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
2159	1987254	Eko Arifiyanto., SH	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Bantuan kepada Yayasan Gema Insan Nasional	Desa Gejlig. Kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
2160	1987291	Ian Kurniawan., ST, M.AP	Bantuan kepada lembaga/organisasi masyarakat	Meningkatkan kapasitas generasi muda, dalam menjaga dan merawat NKRI sebagai bentuk bela negara	Desa Gejlig. Kajen, Kab. Pekalongan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
2161	1987305	NASHIH SYARIFUDDIN S.K.M., M.A.P	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (SD)	Sekolah belum memiliki perpustakaan layak, laboratorium, ruang UKS, toilet sehat, atau sarana olahraga yang memadai.	MI Walisongo Kranji 2 Desa Kedngwuni Timur Kecamatan Kedungwuni , Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
2162	1987317	AS ADILLAH	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Madrasah ini membutuhkan Pembangunan Gedung karena bangunannya sudah tua dan berpotensi bahaya	Tpq Nurul Hidayah Desa Gumelem kecamatan Petungkriyono, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
2163	1987342	AS ADILLAH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalanan dengan kondisi yang sudah rusak sehingga dibutuhkan Pembangunan Pengaspalan Jalan jln poros pamutuh depok	jln poros pamutuh Desa Depok Kecamatan Lebakbarang, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
2164	1987350	AS ADILLAH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalanan dengan kondisi yang sudah rusak sehingga dibutuhkan Pembangunan talud jalan poros depok pamutuh	jalan poros Desa Depok Pamutuh Kecamatan Lebakbarang , Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
2165	1987355	AS ADILLAH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalanan dengan kondisi yang sudah rusak sehingga dibutuhkan Pembangunan talud jln poros timbangsari depok	jln poros timbangsari Desa Depok kecamatan Lebakbarang, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
2166	1987368	AS ADILLAH	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalanan dengan kondisi yang sudah rusak sehingga dibutuhkan Pembangunan Pengaspalan Jalan PU lama Mendolo Kutorembet	Jln PU lama Mendolo Desa Kutorembet Kecamatan Lebakbarang, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
2167	1987490	Rizal Efendi	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	tidak adanya senderan	Dukuh Gumingsir Desa Langkap kec. kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
2168	1987492	Drs.H. Abdul Munir	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Sarana prasarana ibadah rusak dan daya tampung masjid sudah tidak memadai, Sehingga dibutuhkan Hibah Musholla	Musholla Nurul Wahid Praan RT 03/RW 04 Desa Salak Brojo, Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
2169	1987495	Rizal Efendi	REHABILITASI JEMBATAN	jembatan rusak	Desa Pegandon Kec. kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jembatan
2170	1987499	Rizal Efendi	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	belum adanya JUT	Desa Kebonsari Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2171	1987504	Rizal Efendi	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	belum adanya drainase	Desa Langkap Kc. Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
2172	1987508	Rizal Efendi	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	jalan rusak	jalan desa rowo cacing kec. kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
2173	1987513	Rizal Efendi	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	rawan longsor	Desa Kedung patangewu Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
2174	1987517	Rizal Efendi	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	belum adanya JUT	Pakis putih, kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2175	1987521	Rizal Efendi	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (SMP)	sarpras yang sudah tidak layak	SMP N 3 Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
2176	1987526	Rizal Efendi	REHABILITASI JEMBATAN	jembatan rusak	kebonsari, kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jembatan
2177	1987534	Rizal Efendi	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	jalan rusak	Dukuh gumungsir Desa Langkap kec kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
2178	1987537	Rizal Efendi	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	belum ada JUT	Desa Langkap Kec Kedungwuni, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
2179	1987556	Umi Farida	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ, Madin, dan PKBM)	Keterbatasan sarana dan prasarana PKBM di Dukuh Karangtengah RT 003 RW 004 Desa Doro Kecamatan Doro menyebabkan layanan pendidikan nonformal belum berjalan optimal sehingga diperlukan pembangunan gedung PKBM melalui skema bantuan kepada lembaga/organisasi masyarakat.	Dk. Karangtengah RT 003 RW 004 Desa Doro Kec. Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
2180	1987572	Umi Farida	Pendidikan politik dan wawasan kebangsaan untuk masyarakat	Terbatasnya akses informasi dan pendampingan hukum di Desa Doro menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat sehingga diperlukan advokasi, sosialisasi, dan pelatihan kebangsaan serta politik.	Dk. Karangtengah, Ds. Doro, Kec. Doro., Kab. Pekalongan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
2181	1987597	Umi Farida	Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan	Minimnya akses masyarakat terhadap fasilitas literasi dan bahan bacaan yang layak	Dk. Karangtengah, Ds. Doro, Kec. Doro., Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabpuaten/kota
2182	1987603	Umi Farida	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SMP)	Kegiatan belajar mengajar tidak optimal akibat kekurangan ruang kelas	Gandaria RT 013 RW 004 Ds. Wringin Agung Kec. Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
2183	2000534	Haryanto	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Pengerasan jalan usaha tani Blok Belakang SMPN 2 Kesesi	Desa Karyomukti. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2184	2000575	Haryanto	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (TK/PAUD)	Dibutuhkan alat Musik Dumband dan Mebeler untuk menunjang Kegiatan Belajar Mengajar Siswa TK Pertiwi	Desa Kwasen. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Mebel PAUD
2185	2000627	Haryanto	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan sarana dan kapasitas produksi ikan Lele pada kelompok Pembudidaya Ikan Lele	Rt 02 RW 04. Desa Kalijambe. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2186	2000665	Haryanto	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Minimnya penerangan jalan di Desa	Gg. Kacaci. RT 06 RW 03. Desa Kedungjarang. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2187	2000680	Haryanto	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Minimnya penerangan jalan di Desa	RT 15 RW 07 Desa Kedungjaran. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2188	2000708	Haryanto	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	KOndisi jalan rusak yang menghubungkan Kel. Sragi dan Desa Tegalontar	Dukuh Jatimalang. Kel. Sragi. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
2189	2000739	Haryanto	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Minimnya penerangan jalan di Desa	RT 02 Rw 01. Desa Klunjukan. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2190	2000763	Haryanto	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Rusaknya Plafon di Musholla Miftahul Jannah	RT 01 RW 01. Desa Klunjukan. Sragi, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
2191	2000835	Haryanto	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Petani di Blok Jetis membutuhakan Jalan Usaha Tani	RT 03 RW 02 Desa Ketitang Kidul. Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2192	2000882	Haryanto	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Minimnya penerangan jalan di Desa	RT 01 RW 01. Desa Karangsari. Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2193	2000925	Haryanto	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Minimnya penerangan jalan di Desa	Gg. Tropong. RT 04 RW 02. Desa Karangari. Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2194	2000983	Haryanto	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Belum ada saluran pembuangan air, pada saat hujan menimbulkan banjir	Jl. Kauman. RT 006 RW 03. Desa Bojongminggir. Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
2195	2001010	Haryanto	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Minimnya penerangan jalan umum di Desa	GG. 8. RT 14 RW 7 Desa Bojongminggir. Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2196	2001039	Haryanto	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Minimnya penerangan jalan di Desa	RT 04 RW 01. Desa Wiroditan. Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2197	2001347	Haryanto	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	Bantuan hibah kepada Musholla MIftahul Jannah. Dukun Watugajah	Dukuh Watugajah. Desa Watugajah. Kesesi, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
2198	2001373	Haryanto	Bantuan prasarana persampahan (Sepeda Motor Tiga Roda)	Belum ada sarana pengangkut sampah	Dukuh Kwasen Tengah. Desa Kwasen. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
2199	2001392	Haryanto	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Tebing sungai sering longsor	Dukuh Kwasen Tengah. Desa Kwasen. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
2200	2001435	Haryanto	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Minimnya penerangan jalan di Desa	Dukuh Petempelan. Desa Langensari. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2201	2001493	Haryanto	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Minimnya penerangan jalan di Desa	RT 01 RW 01. Desa Kalijambe. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2202	2001544	Haryanto	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum ada jalan usaha tani	Dukuh Kalisat. Desa Kwasen. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2203	2001573	Haryanto	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Minimnya penerangan jalan di Desa	RT 03 RW 02. Desa Ketitang Kidul. Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2204	2001968	Haryanto	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Belum ada jalan usaha tani	RT 06 RW 03. Desa Bojongwetan. Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2205	2003126	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Masih ada desa yang belum memiliki jalan usaha tani	Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2206	2003142	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan jalan	Dukuh Keberkahan. Desa Kedungkebo.Karangdadap, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2207	2003156	Slamet Nurudin., SE, M.AP	PEMBANGUNAN TEBING / BRONJONG SUNGAI	Tebing sungai di Desa Wonorejo sering longsor	RT 02 RW 03 Desa Wonorejo. Wonopringgo, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
2208	2003164	Slamet Nurudin., SE, M.AP	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada lampu penerangan jalan	Desa Watusalam. Buaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2209	2010922	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	jalan rusak, menghambat mobilitas, rawan kecelakaan	Desa Bulak Pelem Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
2210	2010928	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	jalan rusak, menghambat mobilitas, rawan kecelakaan	Desa Bulaksari Kec. sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
2211	2010937	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	jalan rusak, menghambat mobilitas, rawan kecelakaan	Desa Gebangkerep kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
2212	2010947	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	jalan rusak, menghambat mobilitas, rawan kecelakaan	Desa Kalijambe kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
2213	2010967	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	jalan rusak, menghambat mobilitas, rawan kecelakaan	Desa Kedungjaran Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
2214	2010975	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	jalan rusak, menghambat mobilitas, rawan kecelakaan	Desa Ketanon Ageng Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
2215	2010982	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	jalan rusak, menghambat mobilitas, rawan kecelakaan	Desa Klunjukan Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
2216	2010989	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	jalan rusak, menghambat mobilitas, rawan kecelakaan	Desa Krasakageng Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
2217	2010997	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	jalan rusak, menghambat mobilitas, rawan kecelakaan	Desa Mrican Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
2218	2011007	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	jalan rusak, menghambat mobilitas, rawan kecelakaan	Desa Purwodadi Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
2219	2011014	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	jalan rusak, menghambat mobilitas, rawan kecelakaan	Desa Purworejo kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
2220	2011024	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	jalan rusak, menghambat mobilitas, rawan kecelakaan	Desa Sijeruk Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
2221	2011052	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	jalan rusak, menghambat mobilitas, rawan kecelakaan	Desa/Kel Sragi Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
2222	2011072	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	jalan rusak, menghambat mobilitas, rawan kecelakaan	Desa Sumub Kidul Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
2223	2011084	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	jalan rusak, menghambat mobilitas, rawan kecelakaan	Desa Sumub Lor Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
2224	2011112	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	jalan rusak, menghambat mobilitas, rawan kecelakaan	Desa Tegal Suruh Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
2225	2011124	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	jalan rusak, menghambat mobilitas, rawan kecelakaan	Desa Tegalontar Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
2226	2011134	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan sempit kurang lebar untuk persimpangan kendaraan	Jalan Kwasen-Windurojo kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
2227	2011140	H. Ruben R. Prabu Faza	Pembangunan atau rehabilitasi Jaringan irigasi usaha tani	belum adanya irigasi menuju lahan pertanian	Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
2228	2011155	H. Ruben R. Prabu Faza	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	jalan menuju lahan pertanian rusak, sulit untuk mobilitas petani	JUT Windurojo-Ujungnegoro, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2229	2011170	H. Ruben R. Prabu Faza	Bantuan bibit ternak	kurangnya modal usaha bagi kelompok tani, perlunya tambahan ternak berupa ayam petelur	Kelompok Tani Karya Berkah Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
2230	2011196	H. Ruben R. Prabu Faza	Bantuan kepada Organisasi Keolahragaan	perlunya bantuan dana untuk kegiatan IPSI Kab. pekalongan	IPSI Kab. Pekalongan, Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Usia Dini dan Dasar
2231	2011270	H. Ruben R. Prabu Faza	Hibah atau bantuan kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim, serta Lembaga Keagamaan (Muslim dan Non Muslim)	perlunya perbaikan musholla karena sudah tidak layak	Musholla Nurul Dholam RT 03 RW 02 Desa Rowolaku Kec. Kajen, Kab. Pekalongan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
2232	2011418	H. Ruben R. Prabu Faza	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	perlunya perbaikan drainase agar sistem air maksimal dan tidak adanya genangan air/banjir	Desa Krasak Ageng Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan
2233	2011495	H. Ruben R. Prabu Faza	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	kurangnya penerangan jalan, jalan gelap rawan kecelakaan dan tindak kejahatan	Desa Tegal Suruh Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2234	2011713	Dodiek Prasetyo	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (SD)	Halaman sekolah PAUD PERMATA HATI perlu di tata	Desa Bulaksari. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
2235	2011754	Dodiek Prasetyo	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (TK/PAUD)	Perlu ruangan belajar untuk siswa KB BAITUL MAKMUR	Desa Krandon. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
2236	2011765	H. Ruben R. Prabu Faza	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	jalan usaha tani rusak perlunya rabat beton	Desa Sumub Kidul Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2237	2011783	H. Ruben R. Prabu Faza	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	belum danya jalan menuju lahan pertanian	Desa Kalijambe Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2238	2011801	H. Ruben R. Prabu Faza	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	jalan menuju lahan pertanian tidak layak sulit untuk mobilitas petani	Desa Gebangkerep Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2239	2011826	Dodiek Prasetyo	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (TK/PAUD)	Perlu penataan halaman sekolah untuk TK SIWIDODO	Desa Sidosari. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
2240	2011838	H. Ruben R. Prabu Faza	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	jalan menuju lahan pertanian tidak layak sulit untuk mobilitas petani	Desa Puwodadi Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2241	2011851	Dodiek Prasetyo	Pembangunan Sarpras Sekolah (Penataan Halaman dan Pagar) (TK/PAUD)	Halaman sekolah KB BAITUL MAKMUR kurang ditata	Desa Krandon. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
2242	2011859	H. Ruben R. Prabu Faza	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	jalan menuju lahan pertanian tidak layak sulit untuk mobilitas petani	Desa Bulaksari Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2243	2011871	H. Ruben R. Prabu Faza	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	jalan menuju lahan pertanian tidak layak sulit untuk mobilitas petani	Desa Purworejo Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2244	2011882	H. Ruben R. Prabu Faza	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	jalan menuju lahan pertanian tidak layak sulit untuk mobilitas petani	Desa Bulakpelem kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2245	2011915	H. Ruben R. Prabu Faza	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	jalan menuju lahan pertanian tidak layak sulit untuk mobilitas petani	Desa Klunjukan Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2246	2011921	H. Ruben R. Prabu Faza	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	jalan menuju lahan pertanian tidak layak sulit untuk mobilitas petani	Desa tegalontar Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
2247	2011957	H. Ruben R. Prabu Faza	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	jalan menuju lahan pertanian tidak layak sulit untuk mobilitas petani	Desa Sijeruk Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2248	2011963	H. Ruben R. Prabu Faza	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	jalan menuju lahan pertanian tidak layak sulit untuk mobilitas petani	Desa Mrican kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2249	2011990	H. Ruben R. Prabu Faza	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (TK/PAUD)	perlunya ruang kelas baru karena sudah tidak muat lagi untuk proses belajar mengajar	PAUD Taman Siswa Desa langensari kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
2250	2012282	Rossi Ardiyanti	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum ada penerangan jalan umum	Dukuh Sedayu. Desa Domiyang. Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2251	2012412	H. Ruben R. Prabu Faza	Bantuan Pupuk Pertanian	kurangnya subsidi pupuk menjadikan petani kesulitan mendapatkan pupuk murah	Semua Desa Di Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
2252	2012419	H. Ruben R. Prabu Faza	Bantuan Pupuk Pertanian	kurangnya subsidi pupuk menjadikan petani kesulitan mendapatkan pupuk murah	Semua Desa Di Kecamatan Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
2253	2012428	H. Ruben R. Prabu Faza	Bantuan Pupuk Pertanian	kurangnya subsidi pupuk menjadikan petani kesulitan mendapatkan pupuk murah	Semua Desa Di Kec. Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
2254	2012445	H. Ruben R. Prabu Faza	Bantuan Pupuk Pertanian	kurangnya subsidi pupuk menjadikan petani kesulitan mendapatkan pupuk murah	Semua Desa Di Kec. Kandangserang, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
2255	2012453	H. Ruben R. Prabu Faza	Bantuan Pupuk Pertanian	kurangnya subsidi pupuk menjadikan petani kesulitan mendapatkan pupuk murah	Semua Desa Di Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
2256	2012467	H. Ruben R. Prabu Faza	Bantuan Pupuk Pertanian	kurangnya subsidi pupuk menjadikan petani kesulitan mendapatkan pupuk murah	Semua Desa Di Petungkriyono, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
2257	2012469	H. Ruben R. Prabu Faza	Bantuan Pupuk Pertanian	kurangnya subsidi pupuk menjadikan petani kesulitan mendapatkan pupuk murah	Semua Desa Di Kec. Doro, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
2258	2012478	H. Ruben R. Prabu Faza	Bantuan Pupuk Pertanian	kurangnya subsidi pupuk menjadikan petani kesulitan mendapatkan pupuk murah	Semua Desa Di Kec. Talun, Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa
2259	2012495	H. Ruben R. Prabu Faza	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	perlunya bantuan gerobak untuk UMKM	Semua Desa Di Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM
2260	2012504	H. Ruben R. Prabu Faza	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	perlunya bantuan gerobak untuk UMKM	Semua Desa Di Kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM
2261	2012508	H. Ruben R. Prabu Faza	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	perlunya bantuan gerobak untuk UMKM	Semua Desa Di Kec. Bojong, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM
2262	2012516	H. Ruben R. Prabu Faza	Bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil	perlunya bantuan gerobak untuk UMKM	Semua Desa Di Kec. kajen, Kab. Pekalongan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM
2263	2012600	H. Ruben R. Prabu Faza	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud/Tebing Jalan, dan Pengaspalan Jalan)	Jalan/tebing rawan longsor	Desa ketanon Ageng kec. Sragi, Kab. Pekalongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
2264	2015891	Drs.H. Abdul Munir	Pendidikan politik dan wawasan kebangsaan untuk masyarakat	masih rendahnya partisipasi dan kapasitas perempuan dalam bidang politik di Kabupaten Pekalongan akibat minimnya literasi politik, keterwakilan, dan dukungan sosial.	Kabupaten Pekalongan, Kab. Pekalongan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
2265	2015976	Dra.Hj.Hindun . MH	Pendidikan politik dan wawasan kebangsaan untuk masyarakat	masih rendahnya partisipasi dan kapasitas perempuan dalam bidang politik di Kabupaten Pekalongan akibat minimnya literasi politik, keterwakilan, dan dukungan sosial.	Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, Kab. Pekalongan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
2266	2015985	Dra.Hj.Hindun . MH	Pendidikan politik dan wawasan kebangsaan untuk masyarakat	masih rendahnya partisipasi dan kapasitas perempuan dalam bidang politik di Kabupaten Pekalongan akibat minimnya literasi politik, keterwakilan, dan dukungan sosial.	Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, Kab. Pekalongan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
2267	2017281	Patmisari	Pendidikan politik dan wawasan kebangsaan untuk masyarakat	Masih rendahnya literasi dan partisipasi politik masyarakat serta terbatasnya kegiatan edukasi politik yang terstruktur, sehingga diperlukan program pendidikan politik guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran berdemokrasi secara sehat	Kecamatan Kajen, Kab. Pekalongan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
2268	2017308	Patmisari	Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan	Terbatasnya kemampuan manajerial dan kepemimpinan pemuda dalam mengelola organisasi dan kegiatan kepemudaan secara optimal, sehingga dibutuhkan pelatihan menegerial kepemudaan	Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabpuaten/kota
2269	2017541	Budi Santosa	Pendidikan politik dan wawasan kebangsaan untuk masyarakat	masih rendahnya partisipasi dan kapasitas perempuan dalam bidang politik di Kabupaten Pekalongan akibat minimnya literasi politik, keterwakilan, dan dukungan sosial.	Kabupaten Pekalongan, Kab. Pekalongan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

BAB VII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2027 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 yang di dalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dan kerangka pendanaan seluruh Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja Pembangunan Daerah.

Tema dan Sasaran RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2027 disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan pada RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 dan hasil evaluasi pembangunan dan anggaran tahun 2025 sehingga Tema yang ditetapkan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Pekalongan tahun 2027 yaitu *"Penguatan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Optimalisasi Potensi Daerah untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Inklusif"*

Rangkaian program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD Tahun 2027 disusun secara bertahap, berkesinambungan, transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, inovatif, kreatif, berorientasi pada hasil (outcome) dengan pendekatan *money follows programme* dan *programme follows result*, berbasis risiko *(risk-based planning)*, dan berbasis pada riset *(research-based planning)*, terpadu lintas sektor, serta berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, penyusunan RKPD Tahun 2027 mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia baik dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergi guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun 2027, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu :

1. RKPD Kabupaten Pekalongan tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan APBD Tahun 2027;
2. Perencanaan dan penganggran serta pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dan terpadu guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program dan kegiatan sehingga mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan;
3. Penyempurnaan Rancangan akhir renja Perangkat Daerah tahun 2027 berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan tahun 2027.

Seluruh pemangku kepentingan berkomitmen dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Pekalongan tahun 2027. Untuk itu, pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan mengajak semua pihak bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan pemantapan daya saing daerah menuju masyarakat Kabupaten Pekalongan yang maju, adil dan sejahtera.

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 26 Juni 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD
M. YULIAN AKBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2026 NOMOR 6

Plt. BUPATI PEKALONGAN,
TTD
SUKIRMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

KISTORO, S.E., MM
Pembina
NIP. 19750503 201001 1 001